2014

LAPORAN TAHUNAN

Annual Report

PT PLN (Persero)

Electricity for a Better life

Menuju Level Kinerja Baru

Towards New Performance Level

Berlandaskan:

- Pengelolaan berkualitas
- Penerapan inovasi dan efisiensi operasional
- Penambahan kapasitas daya dan kehandalan sistem distribusi

Based on:

- Quality governance
- Innovative and efficient operation
- Increasing electrical power and reliability of distribution channel

IDX:PPLN

TANJUNG PR
ATE WATE
190 KL

Menuju
Level Kinerja Baru

Kondisi usaha kurang kondusif membutuhkan ketepatan bereaksi yang kerap melahirkan serangkaian inovasi yang memberikan hasil membanggakan.

Dilandasi komitmen kuat dari jajaran manajemen puncak dan keyakinan akan kemampuan seluruh insan perusahaan dalam mewujudkan misi perusahaan, dalam beberapa tahun terakhir PLN berupaya memperbaiki kinerja dengan menerapkan beragam inovasi operasional di berbagai lini kegiatan. Perbaikan dan inovasi kami terapkan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran, memperbaiki kualitas layanan dan pengelolaan aset Perusahaan. Kami juga konsisten meningkatkan kualitas pengelolaan dengan menerapkan kaidah praktek praktek terbaik Tata Kelola Perusahaan dan menjunjung tinggi asas-asas akuntabilitas, responsibilitas dan *fairness* dalam menjalankan kegiatan usaha.

Menyusul realisasi pengembangan usaha, keberhasilan meningkatkan kualitas layanan dan membaiknya persepsi masyarakat terhadap perusahaan berkat naiknya akuntabilitas jajaran pelaksana, PLN kini telah termasuk salah satu dari perusahaan skala global dari sisi aset dan pendapatan.

Kami meyakini bahwa raihan tersebut berikut serangkaian inovasi operasional yang terus bergulir akan semakin memacu seluruh jajaran perusahaan dan para pemangku kepentingan utama untuk menginisiasi terobosan strategis yang semakin memastikan PLN menuju level kinerja baru dengan kontribusi yang semakin meningkat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

To deal with an unfavorable work environment, it takes an accurate action which will generate a chain of innovations with favorable result.

In compliance with top management's strong commitment and confidence in the competence of all members of the company in accomplishing the company mission, during the last few years PLN has been making an effort in improving its performance by applying various innovations in numerous operational activities. We have been working on innovations to improve the efficiency of distribution, service quality, and company asset management. We are also consistently improving management quality by applying the best practices of corporate governance and upholding the principles of accountability, responsibility, and fairness in our operations.

Following business development efforts, success in improving service quality, and better general perception of the company through improved accountability of the executors, PLN is now one of the world's top companies with highest income.

We believe that that accomplishment, together with continuous operational innovations will better motivate every member of the company and primary stakeholders to initiate strategic breakthrough which ensures that PLN goes to the next level with its performance and contribution for the welfare of the nation.

01 MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN

Improving Management Quality

Nilai Penerapan GCG
GCG Assessment Score

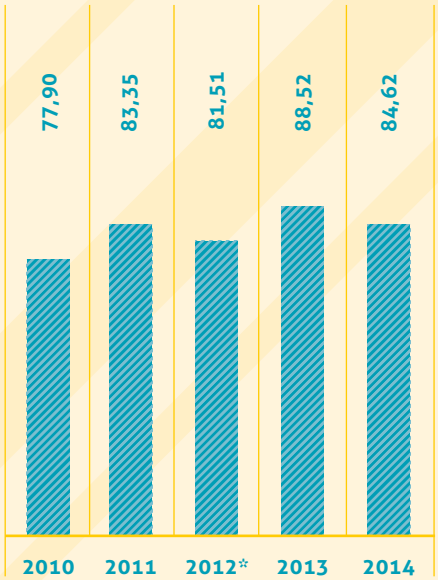

* Mulai tahun 2012 penilaian menggunakan parameter sesuai Surat Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan untuk tahun 2011 dan sebelumnya menggunakan Surat Edaran Kementerian Negara BUMN Nomor. S-168/MBU/2008 tentang Penerapan Praktik GCG di BUMN.

* *Since 2012, assessment has used the parameters stipulated in Ministry of State-Owned Enterprises Secretary Letter No. SK-16/S.MBU/2012 on the Parameters of Good Corporate Governance Assessment and Evaluation in State-Owned Enterprise. Until 2011, the assessment referred to Ministry of SOE Circular Letter Number S-168/MBU/2008 on GCG Application in State-Owned Enterprise.*

Meyakini beragam manfaat dari peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dalam jangka panjang, PLN menunjukan komitmen dan konsisten tinggi dengan merealisasikan beragam program terkait, mencakup:

- Penerbitan "Pedoman PLN Bersih" sebagai bagian dari program pemantapan dan sosialisasi Gerakan "PLN Bersih, No Suap", pilar utama: Partisipasi, Integritas, Transparansi, dan Akuntabilitas (PITA).
- Peningkatan akuntabilitas seluruh jajaran pejabat PLN melalui kewajiban pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).
- Penerbitan pedoman transaksi keuangan antara PLN dengan Mitra Kerja.
- Kewajiban pelaporan gratifikasi.
- Asesmen periodik kualitas penerapan GCG oleh pihak independen

Hasilnya yang diraih

- Penghargaan pihak eksternal terkait kualitas penerapan GCG
- Menjaga implementasi GCG pada kualifikasi baik.

Believing in various benefits of improving Good Corporate Governance (GCG) quality in the long run, PLN has shown commitment and consistency in performing several related programs, including:

- *Issuing "Guide to PLN Bersih" as part of socializing the movement "PLN Bersih, No Suap", primary pillars: Participation, Integrity, Transparency, and Accountability (PITA).*
- *Improving accountability of PLN officers through Wealth Reporting regulations.*
- *Issuing guidance on monetary transactions between PLN and partners.*
- *Obligation to report gratification.*
- *Periodic assessment of GCG practice quality by independent party.*

Accomplished results, including:

- Award of GCG implementation quality from external party
- Maintained GCG implementation on good qualification

02 MENERAPKAN PROGRAM STRATEGIS UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASIONAL

Applying Strategic Program to Improve Operational Efficiency

EBITDA Margin (%)*)
EBITDA Margin (%)

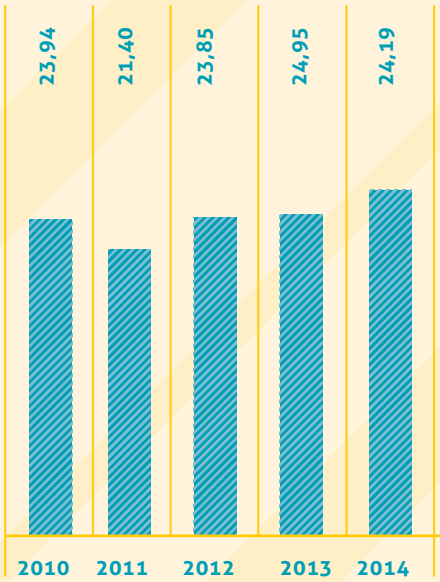

*)Restated ISAK 27

DSCR*)
DSCR

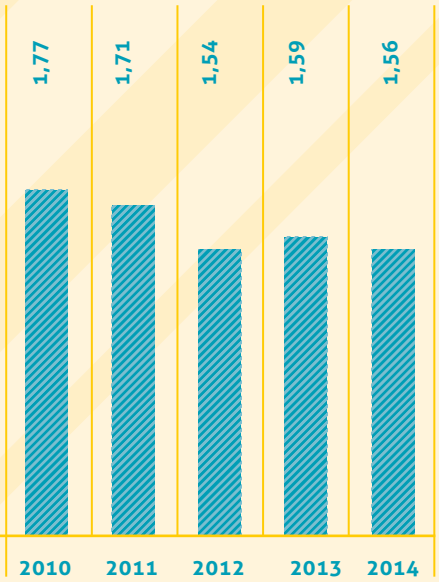

*)Non ISAK

PLN menunjukkan konsistensi dalam menerapkan beragam hasil inovasi diberbagai lini kegiatan untuk meningkatkan kinerja operasional dan keuangan. Dalam rangka mengintegrasikan seluruh inisiatif operasional, PLN menerapkan program strategis *Cost Revenue Management Program* (CRMP) dan mengintensifkan program *Enterprise Asset Management* (EAM) dengan sasaran meningkatnya efisiensi operasional, kualitas pengelolaan dana dan meningkatnya profitabilitas perusahaan.

Hasilnya, PLN kembali membukukan peningkatan margin EBITDA dan berhasil menjaga rasio hutang (DSCR) ditengah kondisi finansial yang menantang.

PLN has shown consistency in implementing various innovations in different activities to improve operational and financial performance. In integrating all operational initiatives, PLN, implemented a strategic program called Cost Revenue Management Program (CRMP) and intensified Enterprise Aset Management (EAM) program, aiming for operational efficiency, fund management quality and profitability improvement.

As a result, PLN has reported an improvement in EBITDA margin and were successful in maintaining debt ratio (DSCR) while in this challenging financial condition.

03 MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN

Improving Service Quality

Contact Center Service Excellence dari Indonesian Contact Center Association (ICCA) dalam ajang ICCA 2014.

Contact Center Service Excellence from Indonesian Contact Center Association (ICCA) in ICCA 2014 event".

PLN menunjukkan konsistensi tinggi pada upaya meningkatkan kualitas layanan, mengimbangi program penyesuaian tarif sebagai salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan kinerja korporasi dimasa mendatang. PLN merealisasikan beragam program untuk mensosialisasikan budaya layanan pada seluruh jajaran, dengan jajaran Contact Center PLN 123 sebagai ujung tombak terciptanya layanan korporasi yang baik dan profesional.

PLN has been consistent in making efforts to improve service quality, and to balance tariff adjustment program as one of the many various strategic policy to advance corporate performance in the future. PLN has implemented many programs to socialize the service culture to the whole company, with PLN Contact Center 123 as the first and foremost to a professional corporate service.

Hasil yang diraih
Accomplished results, including:

- Peningkatan persepsi kepuasan pelanggan.
- Penghargaan eksternal terkait mutu layanan Contact Center PLN 123.

Result:
- *Customer satisfaction perception improvement.*
- *External award for PLN 123 Contact Center service quality*

04 MENINGKATKAN PRODUKSI DAYA DAN KEHANDALAN SISTEM DISTRIBUSI

Improving Power Production and Distribution System Reliability

Hasilnya

228,55 TWh

Meningkatnya produksi daya listrik menjadi sebesar 228,55 TWh

Improvement in electricity power production to 228,55 TWh

84,30 %

Rasio elektrifikasi meningkat menjadi 84,30%

Electrification Ratio improved to 84,30%

Produksi Energi Listrik (TWh)

Electricity Power Production (TWh)

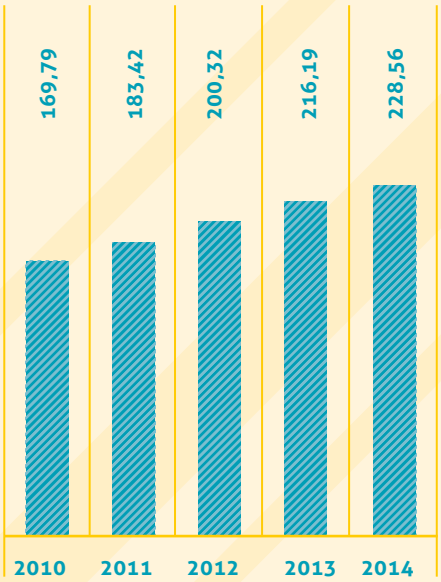

Rasio Elektrifikasi (%)*

Electrification Ratio (%)

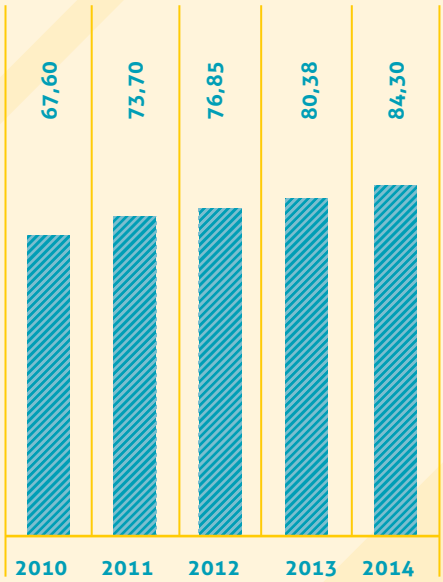

* Termasuk pelanggan Non PLN
Include Non PLN customer

Menyadari fungsi strategis energi listrik bagi pengembangan perekonomian dan kemajuan seluruh negeri, PLN konsisten mengawal program pembangunan sarana pembangkit dan jaringan distribusi.

Guna menjamin kemandirian pemenuhan tenaga listrik dimasa mendatang, PLN menerapkan kebijakan konten lokal untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya industri ketenagalistrikan didalam negeri.

Understanding the strategic purpose of electricity for economic development and nation welfare, PLN consistently carries out the power generator and distribution network development.

In order to guarantee electricity fulfillment independence in the future, PLN implemented local content policy to encourage growth of local electricity industry.

05 MEMBUKUKAN PERBAIKAN KINERJA FINANSIAL

Reporting Financial Performance Improvement

Penjualan (TWh)
Sales (TWh)

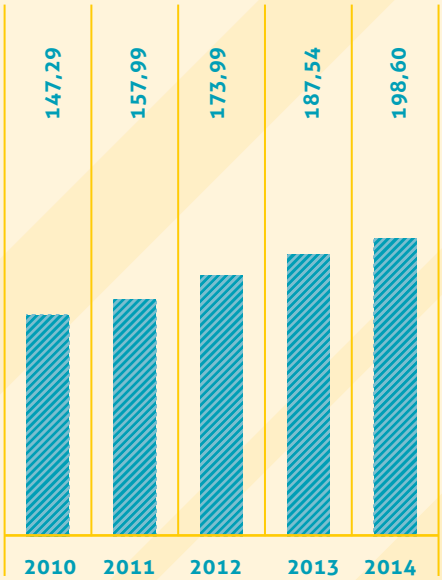

Pendapatan (Rp triliun)
Income (Rp trillion)

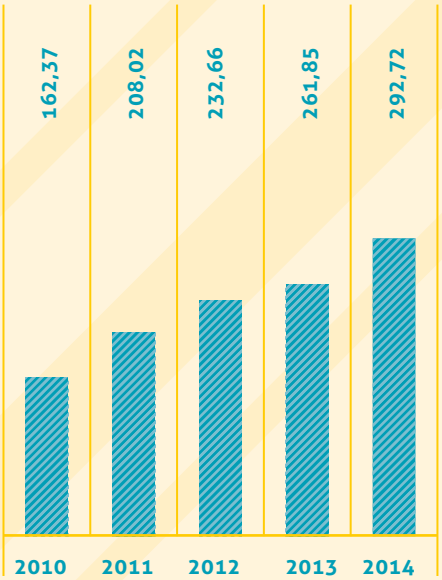

292,72

triliun trillions **Rupiah**

Pendapatan perusahaan mencapai Rp292,72 triliun
Company income amounting to Rp292,72 trillions.

477

Ranking 477 Fortune Global 500
Ranking 477 Fortune Global 500

Realisasi berbagai program peningkatan kualitas pengelolaan, implementasi inisiatif strategis dalam kegiatan operasional dan konsistensi dalam pengawasan realisasi investasi pembangunan pembangkit dan pengembangan kehandalan distribusi membuat PLN berhasil mencatatkan kinerja operasional dan finansial yang membanggakan.

PLN berhasil mencatatkan penjualan tenaga listrik mencapai 198,60 ribu GWh dan kini masuk ranking 477 perusahaan berpenghasilan terbesar di seluruh dunia menurut catatan Fortune Global 500 dengan pendapatan tahun 2014 mencapai Rp292,72 triliun.

In putting into practice various programs for management quality improvement, strategic initiative implementation in order to monitor realization of power plant building investment as well as distribution quality development, PLN has successfully reported a great operational and financial performance.

PLN has reported electricity power sales amounting to 198,60 thousand GWh and is now on the rank of the world's top 477 companies with highest income according to Fortune Global 500, with annual income of 2014 amounting to Rp292.72 trillion.

DAFTAR ISI
Contents

85
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA
Business Development Strategy

1 **PREFACE**

2 **RINGKASAN KINERJA UTAMA**
MAIN PERFORMANCE HIGHLIGHTS

2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan
Improving Management Quality

4 Menerapkan Program Strategis untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional
Applying Strategic Program to Improve Operational Efficiency

6 Meningkatkan Kualitas Layanan Improving Service Quality

8 Meningkatkan Produksi Daya dan Kehandalan Sistem Distribusi
Improving Power Production and Distribution System Reliability

10 Membukukan Perbaikan Kinerja Finansial
Reporting Financial Performance Improvement

14 **IKHTISAR UTAMA**
HIGHLIGHTS

14 Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

16 Ikhtisar Operasional Operational Highlight

19 Peristiwa Penting Event Highlights

28 Penghargaan dan Sertifikasi Award and Certification

32 **LAPORAN MANAJEMEN**
MANAGEMENT REPORT

34 Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report

44 Laporan Direksi Board of Directors' Report

56 **PROFIL PERUSAHAAN**
COMPANY PROFILE

58 Nama dan Alamat Name and Address

59 Sekilas Tentang PLN PLN in Brief

60 Tonggak Sejarah Milestone

62 Bidang Usaha Line of Business

64 Visi, Misi & Nilai-nilai Perusahaan
Vision, Mission and Company's Core Values

66 Kepemilikan Saham Shareholders Ownership

68 Struktur Grup Usaha dan Entitas Anak Usaha
Business Structure and Subsidiary

70 Segmentasi Geografis Geographical Segmentation

72 Struktur Organisasi Organizational Structure

73 Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal
Corporate Institutional and Professional Support in Capital Market

75 Akses Informasi Access to Information

76 **PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA**
BUSINESS DEVELOPMENT PROGRAM

78 Arah Pengembangan Jangka Panjang
Long-Term Development Roadmap

85 Strategi Pengembangan Usaha
Business Development Strategy

92 Pengembangan Organisasi Organizational Development

97 Pengembangan Transmisi dan Distribusi
Development of Transmission and Distribution

104 Pengembangan dan Pengelolaan Pembangkit
Development and Management of Generating Station

118 Pendanaan Funding

124 **LAPORAN PENGELOLAAN OPERASIONAL**
OPERATIONAL MANAGEMENT REPORT

126 Strategi Usaha di Tahun 2014 2014 Business Strategy

134 Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resource Management

150 Pengembangan Teknologi Sistem Informasi
Information System Technology Development

159 Kerja Sama dengan Berbagai Pihak
Collaboration with other Parties

166 **PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN**
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

168 Tinjauan Ekonomi dan Prospek Usaha
Economic Review and Business Prospect

196 Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance

225 Informasi Keuangan Lainnya
Other Financial Information

236 **TATA KELOLA PERUSAHAAN**
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

238 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Report

239 Tujuan Objective

239 Pedoman, Struktur dan Mekanisme Tata Kelola
Guidelines, Structure and Mechanism

241 Komitmen Commitment

242 Kebijakan Pokok Perusahaan
General Policy of The Company

243 Implementasi Prinsip Dasar dan Praktek Terbaik GCG
Implementation of Basic Principles and Best Practice of GCG

248 PITA – Pilar Budaya Anti Korupsi PT PLN (Persero)
PITA - Pillar Anti-Corruption Culture PT PLN (Persero)

250 Penilaian Penerapan GCG GCG Assessment Application

252 Peningkatan Kualitas Penerapan Praktik Terbaik GCG
Improvement of GCG Best Practices Quality

236
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance Report

340
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility

255 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

259 Dewan Komisaris Board of Commissioners

273 Direksi Board of Directors

283 Hubungan Keluarga dan Hubungan Bisnis antara Dewan Komisaris dan Direksi
Family Relationship and Business Relationship Among Board of Commissioners and Directors

283 Prosedur dan Penetapan Besarnya Remunerasi Direksi
Board of Directors' Remuneration Determination Procedure

288 Komite dan Laporan Komite Dewan Komisaris
Committees and Board of Commissioners' Committee Report

288 Komite Audit (KA) Audit Committee (AC)

292 Komite Manajemen Risiko (KMR)
Risk Management Committee (RMC)

297 Komite - Komite Direksi Board of Directors' Committees

297 Rapat Komite Direksi Directors' Committee Meeting

297 Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Secretary

298 Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

302 Risiko dan Manajemen Risiko Risk and Management Risk

316 Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Internal Supervisory Unit (SPI)

321 Akuntan Perseroan
Company's External Auditors

322 Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal
Internal Control and Supervision System

322 *Whistleblowing System*

324 Perkara Hukum yang Melibatkan Perseroan
Legal Proceedings Involving The Company

332 Dampak Perkara Hukum dan Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait
The Impact of Lawsuits and Administrative Sanctions from Related Authority

332 Pedoman Perilaku Code of Conduct

336 Pedoman Perilaku Berlaku Bagi Seluruh Insan PLN
Code of Conduct Applies to all PLN People

338 Budaya Perusahaan Corporate Culture

340 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

343 Maksud dan Tujuan Purpose and Objective

343 Visi dan Misi Kegiatan CSR PLN
Vision and Missions of PLN in CSR Program

344 Ruang Lingkup Kegiatan dan Sumber Dana Kegiatan CSR
The Scope and Funding of CSR's Activities

345 Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan, Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Perubahan Iklim
Environmental, Electricity Safety (K2) and Climate Change Responsibility

350 Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Workforce, Occupational Health and Safety

355 Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Social and Community Development

361 Tanggung Jawab Terhadap Konsumen
Responsibility to Consumer

364 INFORMASI PERSEROAN
CORPORATE INFORMATION

366 Profil Dewan Komisaris
Profile of The Board of Commissioners

371 Profil Direksi
Profile of The Board of Directors

376 Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Secretary and Corporate Secretary

377 Anggota Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee Members

378 Anggota Komite Audit Audit Committee Members

379 Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Supervisory Unit

380 Daftar Unit Bisnis dan Alamat
Address and Business Unit

386 Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners' and Directors' Statement

388 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

714 REFERENSI PERATURAN OJK
CROSS REFERENCE TO OJK RULE

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlight

IKHTISAR POSISI KEUANGAN	2010	2011	2012	2013*)	2014	OVERVIEW OF FINANCIAL POSITION
ASET TIDAK LANCAR	324.417	368.266	472.066	505.382	**518.235**	NON-CURRENT ASSETS
Aset Tetap - Bersih	210.652	261.226	462.318	488.103	**501.706**	Fixed Assets - Net
Pekerjaan dalam pelaksanaan	106.840	98.057	102.810	95.778	**94.901**	Construction in Progress
ASET LANCAR	44.773	58.252	77.310	84.837	**85.424**	CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	19.717	22.088	22.640	25.530	**27.112**	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - Bersih	2.875	3.505	12.522	15.697	**19.495**	Trade accounts receivables - Net
Piutang subsidi listrik	9.359	12.102	20.566	21.794	**19.281**	Receivables on electricity subsidy
Persediaan - Bersih	9.927	15.654	16.738	11.343	**11.608**	Inventories - Net
JUMLAH ASET	369.191	426.519	549.376	590.219	**603.659**	TOTAL ASSETS
LIABILITAS JANGKA PANJANG	164.558	208.251	315.503	350.581	**351.429**	NON-CURRENT LIABILITIES
Utang sewa pembiayaan	14.167	23.923	107.609	129.719	**128.097**	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	36.400	46.003	54.272	66.458	**70.400**	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	46.656	55.908	67.251	81.018	**81.673**	Bonds payable
LIABILITAS JANGKA PENDEK	54.950	62.919.0	74.602.9	89.306	**87.558**	CURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS	219.508	271.169.6	390.106.1	439.887	**438.988**	TOTAL LIABILITIES
TOTAL EKUITAS	142.114	155.349.1	150.599.7	150.331	**164.671**	TOTAL EQUITY
MODAL KERJA BERSIH	10.176.5	4.666.6	(2.707.3)	4.468	**(2.134)**	NET WORKING CAPITAL
INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA	883	1.142.9	1.625.4	2.029	**2.573**	INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES
IKHTISAR LABA RUGI KOMPREHENSIF	**2010**	**2011**	**2012**	**2013*)**	**2014**	**OVERVIEW OF STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME**
PENDAPATAN USAHA	162.375	208.018	232.656	261.847	**292.721**	REVENUES
Penjualan tenaga listrik	102.974	112.845	126.722	153.486	**186.634**	Sale of electricity
Subsidi listrik pemerintah	58.108	93.178	103.331	101.208	**99.303**	Government's electricity subsidy
LABA USAHA	13.267	14.621	29.541	40.935	**45.811**	OPERATING PROFIT
LABA SEBELUM PAJAK	11.406	7.872	1.032	34.779	**15.900**	INCOME BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	(1.313)	(679)	2.174	8.543	**(4.159)**	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	10.093	7.194	3.206	26.236	**11.741**	INCOME FOR THE YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Laba tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :						Income for the year and total comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk (Laba Bersih)	10.087	7.193	3.208	26.232	**11.726**	Owners of the Company
Kepentingan Non Pengendali	6	0	(3)	(4)	**15**	Non-controlling interest
Jumlah	10.093	7.194	3.206	26.235	**11.741**	Total
LABA PER SAHAM DASAR (dalam rupiah penuh)	218.766	155.898	69.451	(567.825)	**253.833**	BASIC EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah amount)
RASIO-RASIO (DALAM PERSEN)	**2010**	**2011**	**2012**	**2013*)**	**2014**	**RATIOS (IN PERCENTAGE)**
RASIO LIKUIDITAS						LIQUIDITY RATIO
Rasio lancar	81,60	92,58	103,63	95,00	**97,56**	Current ratio
Rasio Kas	35,64	35,11	30,35	28,70	**31,08**	Cash ratio
RASIO SOLVABILITAS						SOLVENCY RATIO
Jumlah kewajiban terhadap jumlah aset	59,50	63,58	71,01	74,53	**72,72**	Debt to asset ratio
Jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas	146,90	174,55	244,93	292,61	**266,58**	Debt to equity ratio
RASIO PROFITABILITAS						PROFITABILITY RATIO
Margin laba kotor	12,88	12,96	23,31	26,67	**24,55**	Gross profit margin
Margin laba bersih	9,80	6,37	2,53	(17,09)	**6,29**	Net profit margin
RASIO RENTABILITAS						RENTABILITY RATIO
Rasio laba terhadap ekuitas	6,74	6,74	2,01	(17,45)	**7,13**	Return on equity (ROE)
Rasio laba terhadap aset	3,18	3,18	0,58	(4,45)	**1,95**	Return on assets (ROA)
RASIO OPERASIONAL						OPERATIONAL RATIO
Perputaran piutang (kali)	9,62	7,35	7,95	15,70	**10,61**	Accounts receivable turn over (times)
Perputaran utang usaha (hari)	37,92	27,9	25,84	23,24	**34,41**	Accounts payable turn over (day)
Perputaran aset tetap (kali)	0,49	0,45	0,29	0,32	**0,38**	Inventory turn over (times)

*)Tahun 2013 restated *)Restatement of Financial Statements year 2013

Pertumbuhan Total Aset (Rp triliun)
Total Asset Growth (Rp trilLion)

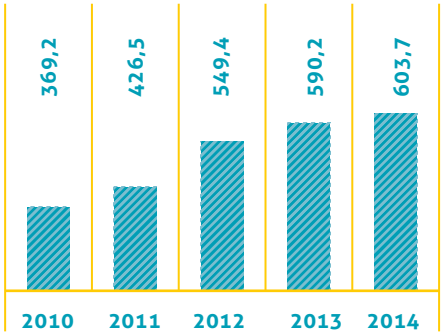

Pertumbuhan Aset Tetap (Rp triliun)
Fixed Asset Growth (Rp trilLion)

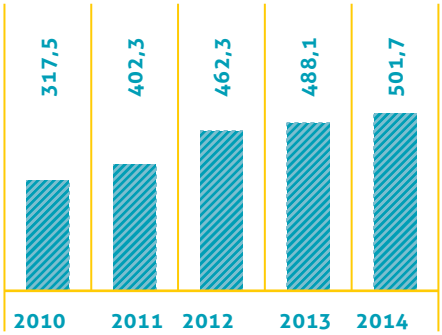

EBITDA (Rp triliun) & EBITDA MARGIN*
EBITDA (RP trilLion) & EBITDA MARGIN

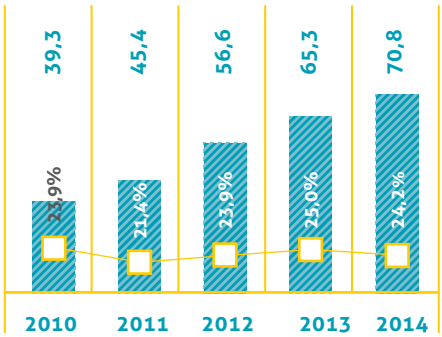

*Restated ISAK 27

Pertumbuhan Pendapatan (Rp triliun)
Revenue Growth (Rp trilLion)

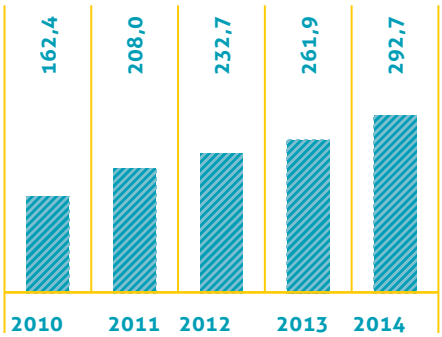

Penjualan Tenaga Listrik (Rp triliun)
Sales of electricity (Rp trilLion)

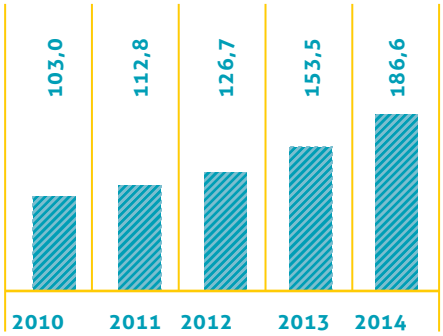

Laba Bersih (Rp triliun)
Net Profit (Rp trilLion)

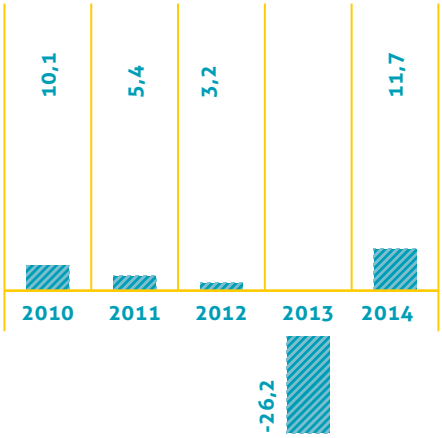

Ikhtisar Operasional
Operational Highlight

KETERANGAN	UNIT	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIPTION
Daya Terpasang *)	MW	26.895	39.099	43.972	46.104	**51.620**	Installed Capacity *)
Penjualan	GWh	147.297	157.993	173.991	187.541	**198.602**	Sales
PRODUKSI							PRODUCTION
Produksi Sendiri	GWh	123.477	128.853	131.684	144.220	**152.853**	Own Production
Sewa Diesel	GWh	8.233	13.886	18.071	19.746	**22.443**	Diesel Rental
Pembelian	GWh	38.076	40.682	50.563	52.223	**53.257**	Purchase
Total Produksi	GWh	169.786	183.421	200.318	216.189	**228.554**	Total Production
Susut Jaringan	Persen Percentage	9,70	9,41	9,21%	9,91%	**9,71%**	Network Losses
MUTU							QUALITY
SAIDI	jam/pelanggan/tahun hour/customer/year	6,96	4,71	3,85	5,76	**5,81**	System Average Interruption Duration Index
SAIFI	kali/pelanggan/tahun times/customer/year	6,82	4,90	4,22	7,26	**5,58**	System Average Interruption Frequency Index
Jumlah Pelanggan	ribu pelanggan thousand customers	42.435	45.895	49.795	53.996	**57.493**	Number of Customers
Daya Tersambung	MVA	67.439	75.189	83.898	93.095	**100.031**	Connected Capacity
Panjang Transmisi	kms	35.146	36.719	38.096	39.395	**39.910**	Transmission Length
Kapasitas Gardu Induk	MVA	65.669	71.615	77.073	81.435	**86.472**	Sub-station Capacity
Jumlah Karyawan **)	Orang Personel	46.296	47.615	47.976	47.833	**48.068**	Total Employees**)

*) Termasuk IPP dan Sewa *) Including IPP and Lease

**) Termasuk jumlah karyawan anak Perusahaan **) Including subsidiaries employees

Daya Terpasang (MW)*
Installed Capacity (MW)*

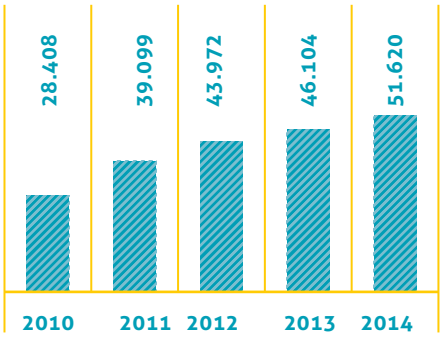

*including IPP and rent

Penjualan (TWh)
Sales (TWh)

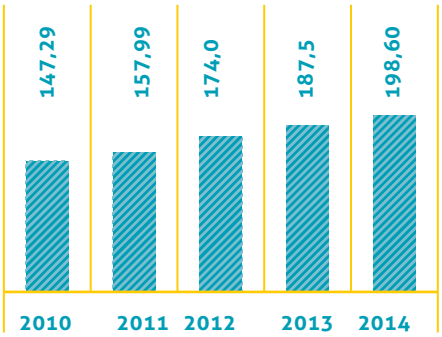

Total Produksi (TWh)
Total Production (TWh)

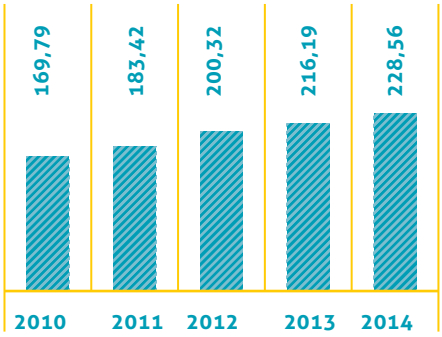

Susut Jaringan (%)
Network Losses (%)

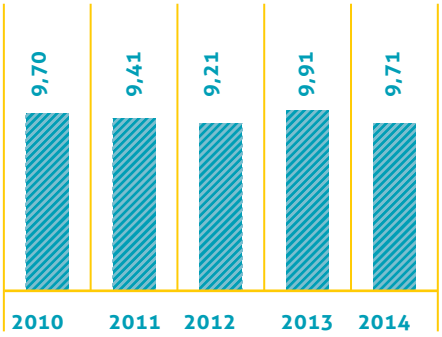

SAIDI (Jam/Pelanggan/Tahun)
SAIDI (Hours/Customer/Year)

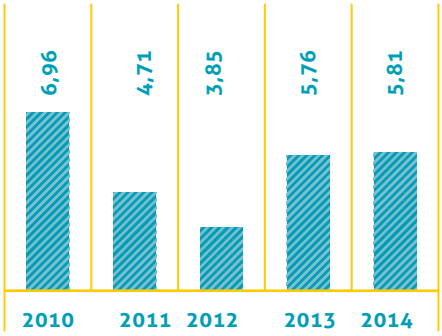

SAIFI (Kali/Pelanggan/Tahun)
SAIFI (Times/Customer/Year)

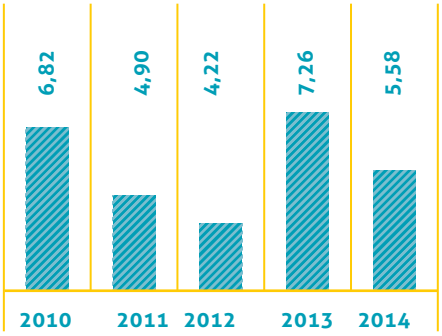

Daftar Efek Domestik yang Diterbitkan PLN dan Belum Jatuh Tempo
List of Outstanding Domestic Bonds

No.	Ref. Code		Plafond	Loan Signing	Tenor (Years)	Maturity Date	Fixed Rate /Fee Ijarah	Peringkat Rating	Lembaga Rating
1	PLN VIII 2006 SERI A	IDR	1.335.100.000.000	21 Juni June 2006	10	21 Juni June 2016	13,60%	idAAA	Pefindo
2	PLN VIII 2006 SERI B	IDR	865.000.000.000	21 Juni June 2006	15	21 Juni June 2021	13,75%	idAAA	Pefindo
3	PLN SYARIAH IJARAH I	IDR	200.000.000.000	21 Juni June 2006	10	21Juni June 2016	13,60%	idAAA (sy)	Pefindo
4	PLN IX 2007 SERI A	IDR	1.500.000.000.000	10 Juli July 2007	10	10Juli July 2017	10,40%	idAAA	Pefindo
5	PLN IX 2007 SERI B	IDR	1.200.000.000.000	10 Juli July 2007	15	10 Juli July 2022	10,90%	idAAA	Pefindo
6	PLN SYARIAH IJARAH II	IDR	300.000.000.000	10 Juli July 2007	10	10 Juli July 2017	10,40%	idAAA (sy)	Pefindo
7	PLN XI 2010 SERI A	IDR	920.000.000.000	12 Januari January 2010	7	12 Januari January 2017	11,95%	idAAA	Pefindo
8	PLN XI 2010 SERI B	IDR	1.783.000.000.000	12 Januari January 2010	10	12 Januari January 2020	12,55%	idAAA	Pefindo
9	PLN SUKUK IJARAH IV SERI A	IDR	130.000.000.000	12 Januari January 2010	7	12 Januari January 2017	11,95%	idAAA (sy)	Pefindo
10	PLN SUKUK IJARAH IV SERI B	IDR	167.000.000.000	12 Januari January 2010	10	12 Januari January 2020	12,55%	idAAA (sy)	Pefindo
11	PLN XII 2010 SERI A	IDR	645.000.000.000	8 Juli July 2010	5	8 Juli July 2015	9,70%	idAAA	Pefindo
12	PLN XII 2010 SERI B	IDR	1.855.000.000.000	8 Juli July 2010	12	8 Juli July 2022	10,40%	idAAA	Pefindo
13	PLN SUKUK IJARAH V SERI A	IDR	160.000.000.000	8 Juli July 2010	5	8 Juli July 2015	9,70%	idAAA (sy)	Pefindo
14	PLN SUKUK IJARAH V SERI B	IDR	340.000.000.000	8 Juli July 2010	12	8 Juli July 2022	10,40%	idAAA (sy)	Pefindo
15	Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri A	IDR	182.000.000.000.00	5 Juli July 2013	7	5 Juli July 2020	8,00%	idAAA	Pefindo
16	Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri B	IDR	697.000.000.000.00	5 Juli July 2013	10	5 Juli July 2023	8,25%	idAAA	Pefindo
17	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I	IDR	121.000.000.000.00	5 Juli July 2013	7	5 Juli July 2020	8,00%	idAAA (sy)	Pefindo
18	Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A	IDR	593.000.000.000.00	10 Desember December 2013	5	10 Desember December 2018	9,00%	idAAA	Pefindo
19	Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B	IDR	651.000.000.000.00	10 Desember December 2013	10	10 Desember December 2023	9,60%	idAAA	Pefindo
20	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A	IDR	321.000.000.000.00	10 Desember December 2013	5	10 Desember December 2018	9,00%	idAAA (sy)	Pefindo
21	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B	IDR	108.000.000.000.00	10 Desember December 2013	10	10 Desember December 2023	9,60%	idAAA (sy)	Pefindo

Daftar Efek Internasional Yang Diterbitkan PLN dan Belum Jatuh Tempo
List of Outstanding International Bonds

Nama Name		Nominal Value	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor (Tahun) Tenor (In Year)	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Kupon Coupon	Peringkat Rating	Lembaga Rating
Global Bond I Tahun 2006 Tr. B	US$	550.000.000	16 Oktober October 2006	10	16 Oktober October 2016	7,7500%	BB/Baa3	S&P/ Moody's
Global Bond II Tahun 2007 Tr. A	US$	500.000.000	28 Juni June 2007	10	28 Juni June 2017	7,2500%	BB/Baa3	S&P/ Moody's
Global Bond II Tahun 2007 Tr. B	US$	500.000.000	28 Juni June 2007	30	29 Juni June 2037	7,8750%	BB/Baa3	S&P/ Moody's
Global Bond III Tahun 2009	US$	750.000.000	7 Agustus August 2009	10	7 Agustus August 2019	8,0000%	BB/Baa3	S&P/ Moody's
Global Bond IV Tahun 2009	US$	1.250.000.000	6 November 2009	10	20 Januari January 2020	7,75%	BB/Baa3	S&P/ Moody's
GMTN 1st Drawdown 2011	US$	1.000.000.000,00	22 November 2011	10	22 November 2021	5,50%	BB/Baa3/ BBB-	S&P/ Moody's/ Fitch
GMTN 2nd Drawdown 2012	US$	1.000.000.000,00	24 Oktober October 2012	30	24 Oktober October 2042	5,25%	BB/Baa3/ BBB-	S&P/ Moody's/ Fitch

Peristiwa Penting
Event Highlight

Januari
January

12 Januari 2014
PLN Jalin Kerjasama Kelistrikan dengan Sabah Electricity, Sdn. Bhd. Kerjasama SESB dan PLN merupakan salah satu langkah dalam menuju ke integrasi jaringan ASEAN.

12 January 2014
PLN established Electrical Cooperation with Sabah Electricity, Sdn. Bhd. This cooperation is one step towards ASEAN network integration.

20 Januari 2014
PLN dan China Shenhua Energy Co.ltd. Guohua Electric Power Branch
PLN melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang, Simpang Belimbing expansion 2×300 Megawatt (MW) atau 1×600 MW.

20 January 2014
PLN and China Shenhua Energy Co.Ltd. Guohua Electric Power Branch
PLN conducted the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) about establishment of 2x300 Megawatt (MW) or 1x600 MW expansion of mine mouth steam power plant, Simpang Belimbing.

20 Januari 2014
PLN Beli *Pure Palm Oil* (PPO) Dari 3 Perusahaan Minyak Sawit skala besar untuk mendukung implementasi penggunaan energi baru terbarukan.

20 January 2014
PLN bought Pure Palm Oil (PPO) from 3 large-scale Palm Oil Companies in order to support the implementation of new renewable energy usage.

27 Januari 2014
PLN Manfaatkan *Compressed Natural Gas* (CNG) pada PLTGU Tambak Lorok, untuk menambah pasokan sistem Jawa Bali sebesar 465 MW dan menghemat sebesar Rp292 miliar pertahun.

27 January 2014
PLN utilized Compressed Natural Gas (CNG) on Tambak Lorok Steam-Gas Power Plant, in order to increase as many as 465 MW supplies for Java-Bali and save Rp292 billion per year.

Februari
February

14 Februari 2014
PLN Peduli Korban Letusan Kelud
Sehari setelah meletusnya gunung Kelud di Jawa Timur, PLN langsung terjun untuk memberikan bantuan bahan pangan dan masker udara, serta membersihkan jaringan listrik berupa trafo, tiang, dan kabel listrik dari abu letusan.

14 February 2014
PLN Concerned for Victims of Kelud Eruption
PLN immediately provided food and air masks, as well as cleaned and removed eruption ashes from electricity networks, such as transformers, poles, and power cables a day after the eruption of Mount Kelud in East Java.

17 Februari 2014
PLN dan Tangguh LNG Terangi Teluk Bintuni
PT PLN (Persero) dan Tangguh LNG mengumumkan keberhasilan uji coba transmisi listrik oleh PLN dari kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni ke Kota Bintuni, Provinsi Papua Barat.

17 February 2014
PLN and Tangguh LNG Lit Bintuni Bay
PT PLN (Persero) and Tangguh LNG announced their success in electricity transmission trial, starting from LNG Tangguh's refinery in Bintuni Bay to Bintuni City, West Papua.

Maret
March

06 Maret 2014
Pertama di Indonesia, PLN Batam Operasikan CNG Marine.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Bintan-Provinsi Kepulauan Riau, PLN mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kijang 2×3 MW dengan pasokan gas dari *mother station* gas Panaran.

06 March 2014
The first in Indonesia, PLN Batam Operates CNG Marine.
In order to fulfill electricity needs in Bintan Island-Riau Islands Province, PLN operates 2x3 MW Kijang Gas Engine Power Plants in which the gas is taken from Panaran mother station.

17 Maret 2014
Storage CNG Plant Muara Tawar Diresmikan Penghematan BBM Rp1,786 Triliun per Tahun
Mulai Senin 17 Maret 2014 *Storage Compressed Natural Gas*(CNG)PlantMuara Tawar – Bekasi, Jawa Barat dengan kapasitas 20 MMSCF resmi beroperasi dengan memberi potensi penghematan BBM senilai Rp1.786 Triliun per tahun.

17 March 2014
Muara Tawar CNG Plant Storage was Officially Announced, Rp1,786 trillion in fuel savings per year
Muara Tawar Compressed Natural Gas (CNG) Plant Storage in Bekasi, West Java with a capacity of 20 MMSCF has started operating since Monday, 17 March 2014. It has potency to save Rp1,786 trillion of fuel per year.

April
April

15 April 2014
PLN Tandatangani Kontrak Pembangunan dan Operasi & Pemeliharaan Fasilitas Marine CNG Transportation Gresik – Lombok untuk memenuhi kebutuhan energi primer pembangkit listrik yang tidak terjangkau fasilitas pipa gas menggunakan CNG Vessel.

15 April 2014
PLN conducted the signing of Contract about the Establishment, Operation, and Maintenance of Marine CNG Transportation in Gresik - Lombok in order to fulfill primary energy needs of power plant which is not reachable with the use of CNG Vessel gas pipeline.

22 April 2014
PLN Lanjutkan Kerja Sama Dengan TII Dalam Program PLN Bersih
PT PLN (Persero) melanjutkan kerja sama dengan Transparency International Indonesia (TII) yang sudah dimulai dua tahun lalu. Naskah Amandemen II Kesepakatan Bersama antara PLN dengan TII tentang Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT PLN (Persero).

22 April 2014
PLN and TII Continued their Cooperation in 'PLN Bersih'
PT PLN (Persero) continued their cooperation with Transparency International Indonesia (TII) which started two years ago. Amendment Manuscript II about Agreement between PLN and TII on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PT PLN (Persero).

Mei
May

19 Mei 2014
Dirut PLN Resmikan Fasilitas AIS Di Pabrik Unindo
Dengan diresmikannya Fasilitas *Air Insulated Switchgear* (AIS) ini maka UNINDO selain memproduksi Trafo juga akan memproduksi *Circuit Breaker* (CB) dan *Disconnecting Switch* (DS). Pembelian produk alat kelistrikan dari dalam negeri akan memberi multiplayer effect bermanfaat bagi ekonomi Indonesia.

19 May 2014
PLN President Director inaugurated AIS Facility in Unindo Factory
The inauguration of Air Insulated Switchgear (AIS) facility helped Unindo produce not only Transformers, but also Circuit Breaker (CB) and Disconnecting Switch (DS). Purchasing electrical appliances from domestic market will bring beneficial multiplayer effect for Indonesian economy.

Juni
June

24 Juni 2014
PLN Tandatangani Kerjasama Pembelian Komponen Switchgear dengan PT CPSI.
PLN terus mendorong peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri, salah satunya dengan melakukan kerjasama pembelian (Purchase Agreement) komponen switchgeardari PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI), sebuah perusahaanJoint Ventureantara PT PLN Enjiniring (Persero) dengan Crompton Greaves Limited, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dari India.

24 June 2014
PLN and PT CPSI Signed a Purchase Agreement on Switchgear Components.
PLN keeps encouraging the use of domestic products. One of them is holding cooperation in purchasing switchgear components (Purchase Agreement) from PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI), a joint venture between PT PLN Enjiniring (Persero) and Crompton Greaves Limited, a Foreign Direct Investment (FDI) company from India.

26 Juni 2014
Sinergi BUMN : PLN Tandatangani Nota Kesepahaman dengan PT PINDAD
PT PLN (Persero) bersama PT PINDAD (Persero) melakukan penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan jasa rehabilitasi/rekondisi/ pemeliharaan peralatan instalasi ketenagalistrikan dan penyediaan peralatan teknis.

26 June 2014
SOE Synergy: PLN Signed Memorandum of Understanding with PT PINDAD
PT PLN (Persero), together with PT PINDAD (Persero), signed a memorandum of understanding about the utilization of rehabilitation services/ reconditioning/ maintenance of electricity installation equipment and the provision of technical equipments.

Juli
July

01 Juli 2014
Moody's Menaikkan Rating PLN Dua Tingkat (Notches)
Moody's, lembaga pemeringkat internasional baru saja mengumumkan kenaikan rating *Company Stand Alone Credit Quality* atau *Baseline Credit Assessment* (BCA) untuk PLN dua tingkat ditandai dengan turunnya BCA dari semula Baa3 menjadi Ba2. Ini berarti turunnya tingkat ketergantungan PLN terhadap Pemerintah karena semakin membaiknya kondisi keuangan PLN secara korporat dibanding tahun sebelumnya sehingga hal-hal tersebut dinilai dapat memberikan ekspektasi positif.

09 Juli 2014
PLN Tembus Fortune Global 500
PLN sukses membuktikan kinerjanya dengan menjadi perusahaan Indonesia yang masuk dalam Fortune Global 500 tahun 2014. Sebagai pendatang baru, PLN masuk di urutan 477 perusahaan terbesar dunia. Pemeringkatan FORTUNE Global 500 adalah ajang tahunan yang dilakukan majalah Fortune sejak tahun 1955. Masuk dalam jajaran bergengsi 500 perusahaan besar dunia yang mencerminkan bentuk pengakuan dunia terhadap PLN merupakan pencapaian besar PLN.

21 Juli 2014
Menteri BUMN Dahlan Iskan Resmikan PLT Biomassa Tongkang Jagung Pertama di Indonesia
PT PLN (Persero) secara resmi telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTB) pertama di Indonesia yang memanfaatkanTongkang Jagung sebagai sumber energi utama untuk menggerakkan generator dan menghasilkan listrik dengan kapasitas awal 500 kilo Watt (kW) yang berlokasi di kecamatan Pulubala, kabupaten Gorontalo, propinsi Gorontalo.

01 July 2014
Moody's Increased PLN Rating by Two Levels (Notches)
Moody's, an international ranking association announced PLN's two levels increment in Company Stand Alone Credit Quality or Baseline Credit Assessment (BCA) which were marked by decrease in BCA from Baa3 to Ba2. This condition shows that the level of PLN dependence on government declined due to the improvement of PLN's corporately financial condition over the previous year which might bring positive expectations.

09 July 2014
PLN Entered Fortune Global 500
PLN successfully proved their performance by becoming one Indonesian Company that entered the Fortune Global 500 2014. As a newcomer, PLN was ranked 477 as the world biggest company. Fortune Global 500 ranking is an annual event that has been held by Fortune magazine since 1955. This was a great achievement for PLN, as becoming one of 500 top companies in the world reflects a form of world recognition to PLN.

21 July 2014
SOE Minister, Dahlan Iskan Officially Announced the first Corn Barge Biomass Power Plant in Indonesia
The first Biomass Power Plant powered by corn barge in Indonesia, located in Pulubala, Gorontalo, had been officially operated by PT PLN (Persero). This power plant uses corn barge as the main energy source to run a generator and produce electricity with an initial capacity of 500 kilowatts (kW).

Agustus
August

17 Agustus 2014
PLTMG – CNG Bawean Diresmikan, PLN Terus Kurangi Pemakaian BBM
PT PLN (Persero) meresmikan pembangkit listrik tenaga mesin gas berbahan bakar CNG (PLTMG – CNG) berkapasitas 3×1 MW di pulau Bawean, Gresik, dan menghemat biaya operasi sekitar 1,5 ,iliar per bulan.

17 August 2014
CNG – Gas Engine Power Plant Bawean Was Officially Announced, PLN Continued Reducing Fuel Usage.
PT PLN (Persero) officially announced 3x1 MW CNG-powered gas engine power plant in Bawean Island, Gresik and saved approximately Rp1,5 billion of operating expenses per month.

20 Agustus 2014
PLN Bangun "Jalan Tol" Listrik Sumatera
PLN berencana membangun jaringan listrik 500 kilo Volt (kV) di sepanjang sisi timur pulau Sumatera. Jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi ini akan berfungsi sebagai "jalan tol listrik" Sumatera, yang menyalurkan tenaga listrik dari pusat-pusat Pembangkit di pusat - pusat beban di Sumatera.

20 August 2014
PLN Built Sumatra Electric "Highway"
Along the eastern side of the island of Sumatra, PLN plans to build a network of 500 kilo Volt (kV) electricity. This extra high voltage transmission network will function as Sumatra 'electric highway' which delivers electricity from power plants to load centers on the island of Sumatra.

22 Agustus 2014
PLN Tambah Kabel Laut Jawa-Bali, Potensi Penghematan Rp400 Miliar per Bulan
PLN mengoperasikan Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi (SKLT) Banyuwangi – Gilimanuk sirkuit 3 dan 4 sejak Juni 2014 lalu. Selain bertujuan memperkuat pasokan listrik di sistem Bali, dengan kehadiran SKLT sirkuit 3 dan 4 ini PLN secara signifikan dapat menurunkan 40% penggunaan bahan bakar minyak di Bali, dari semula 84.000 kilo liter per bulan menjadi 53.000 kilo liter per bulan, dengan potensi penghematan Rp400 miliar per Bulan.

22 August 2014
PLN extended Java-Bali Undersea Cable, Potential Saving up to Rp400 Billion per Month
PLN has started operating Banyuwangi – Gilimanuk's 3rd and 4th circuits of high voltage undersea cable channel since 4 June 2014. In addition to strengthening power supply in Bali, the Banyuwangi – Gilimanuk's 3rd and 4th circuits can significantly decrease 40% of PLN fuel usage in Bali, from 84.000 to 53.000 kiloliter per month, with Rp400 Billion per month potential saving.

September
September

25 September 2014
PLN Gandeng Investor Untuk Berdayakan Aset Tanah
PLN telah menjalin kerja sama dengan 6 investor dalam negeri untuk mendayagunakan aset tetap berupa tanah milik PLN dengan metode Bangun, Guna, Serah (*build, operate and transfer*/BOT).

25 September 2014
PLN Cooperated with Investors to Empower Land Assets
PLN cooperates with 6 domestic investors to empower PLN land assets by using Build, Operate and Transfer (BOT) method.

Oktober
October

8 Oktober 2014
9 PLTU Diresmikan Menko Perekonomian
Sebanyak sembilan proyek Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas total 2.093 Mega Watt (MW) diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Chairul Tanjung. Proyek PLTU yang diresmikan adalah PLTU Nagan Raya Unit 1 dan 2 (2 x 110 MW) di Aceh, PLTU Tanjung Balai Karimun (2 x 7 MW) di Kepulauan Riau, PLTU Teluk Sirih (2 x 112 MW) di Sumatera Barat, PLTU Tarahan Baru #1 (100 MW) di Lampung, PLTU Pelabuhan Ratu (3 x 350 MW) di Jawa Barat, PLTU Tanjung Awar-Awar #1 (350 MW) di Jawa Timur, PLTU Barru (2 x 50 MW) di Sulawesi Selatan, PLTU Kendari #1 (10 MW) di Sulawesi Tenggara dan PLTU Mataram #3 (25 MW) di Nusa Tenggara Barat.

8 October 2014
9 Steam Power Plants were Officially Announced by Coordinating Minister for Economic Affairs
As many as 9 steam power plants with total capacity of 2.093 Mega Watt (MW) were officially announced by Coordinating Minister for Economic Affairs of Republic of Indonesia, Chairul Tanjung. Power plants that were announced are Units 1 and 2 Nagan Raya plants (2 x 110 MW) in Aceh, Tanjung Balai Karimun (2 x 7 MW) in Riau Islands, Teluk Sirih (2 x 112 MW) in West Sumatra, New Tarahan #1 (100 MW) in Lampung, Pelabuhan Ratu (3 x 350 MW) in West Java, Tanjung Awar - Awar #1 (350 MW) in East Java, Barru (2 x 50 MW) in South Sulawesi, Kendari #1 (10 MW) in Southeast Sulawesi and Mataram #3 (25 MW) in West Nusa Tenggara.

10 Oktober 2014
Proyek Transmisi Sumatera dan Transmisi Sumatera – Jawa Dicanangkan
Proyek transmisi listrik 500 kilovolt (kV) Sumatera dan transmisi interkoneksi listrik Sumatera – Jawa dicanangkan pembangunannya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung bersamaan dengan pencanangan proyek-proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor ekonomi Sumatera pada tanggal 10 Oktober 2014.

10 October 2014
Transmission Projects in Sumatra and Sumatra – Java Proclaimed
The development project of 500 kilovolts (kV) power transmission in Sumatera and transmission interconnection in Sumatra – Java, together with Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development Master Plan (MP3EI), was proclaimed by the Coordinating Minister for Economic Affairs of Republic of Indonesia, Chairul, on October 10, 2014.

22 Oktober 2014
Aksi CSR PLN Periksa Gigi Gratis Pelajar Pecahkan Rekor MURI
Aksi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT PLN (Persero) pemecahan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk "Pemeriksaan Gigi Pelajar Secara Serentak Terbanyak" dan untuk "Penambalan Gigi Pelajar Secara Serentak Terbanyak" akhirnya tercapai melalui Pemeriksaan Gigi 3.094 Pelajar dan Penambalan Gigi 1.629 Pelajar.

22 October 2014
PLN's CSR Action - Free Dental Check-up for Student Sets MURI Record
The record breaking of MURI (Indonesian World Records Museum) in "Most Dental Check-ups for Students in Unison" and "Most Dental Fillings for Students in Unison" were achieved by PT PLN (Persero) through Corporate Social Responsibility (CSR) actions in dental checking of 3.094 students and dental filling of 1.629 students.

30 Oktober 2014
Peringkat "Ease of Doing Business" Indonesia Naik, Kemudahan Mendapatkan Listrik Menjadi Faktor Penentu
Peringkat kemudahan berbisnis (*ease of doing business*) Indonesia tahun 2015 naik tiga peringkat dibanding tahun 2014, dari semula 117 menjadi 114. Kenaikan peringkat ini terutama disumbang oleh indikator kemudahan mendapatkan listrik (*getting electricity*) yang naik 23 peringkat dari semula 101 di tahun 2014 menjadi 78 di tahun 2015.

30 October 2014
Increased rating in Indonesian "Ease of Doing Business", Ease of Getting Electricity Became a Determinant
From the 117th in 2014, the rating in Indonesian ease of doing business rose by 3 ranks to the 114th in 2015. This increase was mainly due to the ease of getting electricity's indicator that rose by 23 ranks from the 101st in 2014 to the 78th in 2015.

November
November

19 November 2014
PLN Gandeng PPATK Untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang
PT PLN (Persero) secara konsisten berupaya menerapkan Program PLN Bersih yang telah dicanangkan sejak 2012 sebagai upaya menegakan *Good Corporate Governance* (GCG).Kali ini PLN menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah tidak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya yang terkait pencucian uang di lingkungan PLN melalui nota kesepahaman bersama.

19 November 2014
PLN Cooperated with PPATK to Prevent Money Laundering
PT PLN (Persero) has consistently worked to implement PLN Bersih Program that has been implemented since 2012 which aims to uphold the Good Corporate Governance (GCG). This time, it took PLN to cooperate with Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) to prevent money laundering or other crimes related to money laundering in PLN's environment through a memorandum of understanding.

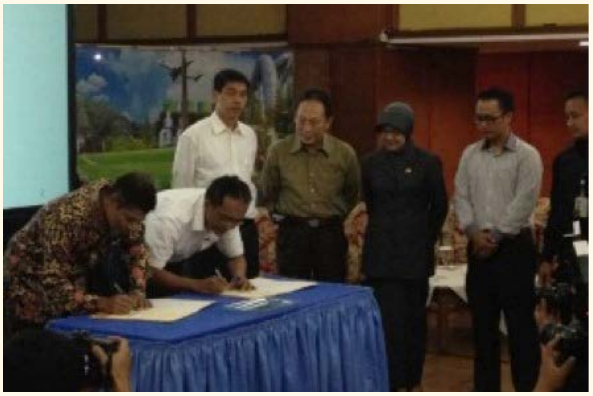

25 November 2014
Presiden Jokowi Tinjau PLTU Lampung
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri ESDM Sudirman Sahid serta Menteri BUMN Rini Soemarno, melakukan kunjungan kerja ke PLTU Lampung yang terletak di Dusun Sebalang, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Selasa (25/11). PLTU Lampung yang berkapasitas 2 X 100 MW ini rencananya akan beroperasi secara komersial (*Commercial Operation Date*/ COD) untuk unit pada 1 Desember 2014 dan unit 2 Awal 2015.

25 November 2014
President Jokowi Reviewed Lampung Steam Power Plant
On Tuesday, 25 November 2014, President Joko Widodo, together with Minister of Energy and Mineral Resources, Sudirman Sahid, and SOE Minister, Rini Soemarno, visited the steam power plant which was located in the hamlet of Sebalang, Tarahan Village, District Katibung, South Lampung. This power plant with a capacity of 2 x 100 MW was expected to be in commercial operation (Commercial Operation Date / COD). Unit #1 was commercially operated on 1 December 2014 and unit #2 was in the beginning of 2015.

Desember
December

8 Desember 2014
Pemerintah Terapkan Adjustment Tarif Listrik di Tahun 2015
Pemerintah melalui Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 31 tertanggal 5 November 2014 menetapkan Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Permen ini mulai berlaku 1 Januari 2015.

December 8, 2014
Government Applies Electricity Tariff Adjustment in 2015
Government through the Regulation of Energy and Mineral Resources Ministry (ESDM) No. 31 dated November 5, 2014 set the electricity tariff provided by the Company (Persero) of PT PLN. The regulation starts on January 1, 2015.

09 Desember 2014
PLN Peringati Hari Anti Korupsi Se-Dunia
Penghargaan Pelapor Gratifikasi PLN memperingati Hari Anti Korupsi se Dunia dengan menggelar "Pekan Anti Gratifikasi" dari 8 – 11 Desember 2014 dengan mengusung tema "Sepekan Untuk Jadi Budaya". Pekan anti gratifikasi ini diisi oleh kegiatan pameran photo dan poster anti gratifikasi, kampanye PLN Bersih On The Road yang tersebar di 20 titik jalan di Jakarta.

December 09, 2014
PLN Celebrates World's Anti-Corruption Day
Rapporteur Gratification Award PLN celebrates the World's Anti-Corruption Day by holding Anti-Gratification Week from 8 to 11 December 2014, with the theme "A Week Becoming Culture". This Anti-Gratification Week is filled by photo and poster of anti-gratification exhibitions, campaign of PLN Bersih On The Road which are in 20 areas in Jakarta.

10 Desember 2014
PLN, BUMN Dengan UPG Terbaik
PT PLN (Persero) mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai BUMN dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik tahun 2014. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada manajemen PLN yang diwakili oleh Direktur (Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan) Moch. Harry Jaya Pahlawan pada acara Festival Anti Korupsi di Yogyakarta 9 Desember 2014.

December 10, 2014
PLN, SOE With The Best of UPG
PT PLN (Persero) received an award from the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) as a SOE with the best of Gratification Control Unit (UPG) in 2014. The award was presented by the Vice Chairman of KPK, Adnan Pandu Praja to PLN's management represented by the Director (Commercial, Risk Management and Compliance) Moch. Harry Jaya Pahlawan at the Anti-Corruption Festival in Yogyakarta December 9, 2014.

18 Desember 2014
PLN Memperoleh Kucuran Rp8,5 Triliun Dari Bank Nasional
Di penghujung tahun 2014 PT PLN (Persero) memperoleh pinjaman untuk kebutuhan investasi senilai Rp8,5 triliun dari sindikasi perbankan Nasional, meliputi Bank BNI, BRI, BCA dan BII.

December 18, 2014
PLN earned Rp8.5 Billion From National Bank
At the end of 2014, PT PLN (Persero) obtained a loan for investment worthed Rp8.5 trillion from national banking syndicate which includes Bank BNI, BRI, BCA and BII.

24 Desember 2014
Direksi dan Komisaris Baru PLN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN melalui Keputusan Menteri yang ditetapkan 23 Desember 2014 mengangkat anggota-anggota Direksi PT PLN (Persero) yang baru.

Selain itu Menteri BUMN juga mengangkat 3 anggota Komisaris PLN baru dimana Chandra M. Hamzah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PLN menggantikan Yogo Pratomo.

December 24, 2014
The New Board of Directors and Commissioners of PLN
Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) as the General Meeting of Shareholders (AGM) of PLN through Minister's Decision dated on December 23, 2014 appointed the new members of Directors of PT PLN (Persero).

In addition, SOE Minister also appointed three new Commissioner of PLN where Chandra M. Hamzah was appointed as Commissioner of PLN replace Yogo Pratomo.

Penghargaan dan Sertifikasi
Award and Certification

Pada tahun 2014 PLN menerima berbagai penghargaan baik secara langsung maupun melalui unit bisnis dan anak usaha dari berbagai lembaga independen. Penghargaan yang diperoleh mencakup:

In 2014, PLN received numerous awards both directly and through business units and subsidiaries from various independent agencies. Obtained awards include:

Mei
Mei

04 Mei 2014
PLN Raih Booth Terbaik di Pameran Indonesia Climate Change 2014
Stand PLN Group (PLN beserta anak perusahaan) berhasil meraih predikat sebagai booth terbaik kategori BUMN dan swasta pada pameran Indonesia Climate Change 2014 yang diadakan di Assembly Hall JCC Senayan Jakarta 1 - 4 Mei 2014.

04 May 2014
PLN Got Best Booth in Indonesian Exhibition 'Climate Change 2014'
In Indonesian exhibition 'Climate Change 2014' Exhibition which was held in Assembly Hall JCC Senayan, Jakarta on 1-4 May 2014, PLN Group (PLN and its subsidiaries) successfully achieved the best booth title for SOE and private categories.

28 Mei 2014
PLN Raih Indonesia Service Quality Award
Contact Center (CC) PLN 123 kembali mendapatkan penghargaan kategori korporat sebagai "The Best Contact Center Operations" – Silver pada Malam Penghargaan "The Best Contact Center Indonesia" tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) di Jakarta.

28 May 2014
PLN Achieved Indonesia Service Quality Award
PLN Contact Center (CC) 123 gained another award in corporate category, which was Silver Winner as "The Best Contact Center Operations" in Appreciation Night "The Best Contact Center Indonesia" 2014, held by Indonesia Contact Center Association (ICCA) in Jakarta.

Juni
June

18 Juni 2014
PLN dan Indonesia Power Raih Penghargaan Indonesia Green Awards 2014
Komitmen dan berbagai upaya nyata yang telah dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan anak usaha, seperti PT Indonesia Power, dalam menjalankan bisnis ketenagalistrikan yang lebih berwawasan lingkungan kembali mendapatkan apresiasi dari pihak pemerhati lingkungan di Indonesia, diantaranya penghargaan pada ajang "Indonesia Green Awards 2014" yang diadakan oleh La Tofi School of CSR, di Jakarta.

18 June 2014
PLN and Indonesia Power Achieved Award in Indonesia Green Awards 2014
PT PLN (Persero) and its subsidiaries, especially PT Indonesia Power put commitments and several real efforts in running environmentally sound electricity business. As a result, an appreciation from environmentalists in Indonesia was given, including an award in "Indonesia Green Awards 2014" which was organized by La Tofi School of CSR in Jakarta.

25 Juni 2014
PLN Raih Gold Champion pada Indonesia WOW Brand 2014 dari MarkPlus Inc.
PT PLN (Persero) meraih penghargaan Gold Champion pada Indonesia WOW Brand 2014 untuk kategori BUMN. Penghargaan Indonesia WOW Brand 2014 kategori Public Services ini diberikan kepada instansi-instansi publik yang memiliki kredibilitas tinggi, dinilai dari aspek-aspek seperti awareness yang baik di masyarakat, kebijakan instansi yang paling disukai publik, dan tingkat kepercayaan dan rekomendasi publik terhadap instansi tersebut.

25 June 2014
PLN Won Gold Champion in Indonesian WOW Brand 2014 from MarkPlus Inc.
In SOE – Public Services category, PT PLN (Persero) won Gold Champion in Indonesian WOW Brand 2014. This award is given to public institutions that have high credibility which is assessed based on aspects, such as good awareness in the community, the most preferred institution policy, level of trust, as well as public recommendation about the institution.

Agustus
August

21 Agustus 2014
PLN Raih 2 Penghargaan Di Ajang BUMN Marketing Award 2014
PLN mendapat 2 penghargaan masing-masing untuk kategori Strategic Marketing (Bronze Winner) dan Tactical Marketing (Bronze Winner) pada ajang BUMN Marketing Award 2014 yang diadakan oleh Majalah BUMN Track bekerjasama dengan BUMN Marketers Club dan Markplus Inc.

21 August 2014
PLN Achieved 2 Awards in SOE Marketing Award 2014
PLN gained 2 awards in Strategic Marketing (Bronze Winner) and Tactical Marketing (Bronze Winner) in SOE Marketing Award 2014 which was held by SOE track magazine, cooperating with SOE Marketers Club and Markplus Inc.

Desember
December

10 Desember 2014
PLN, BUMN Dengan UPG Terbaik
PT PLN (Persero) mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai BUMN dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik tahun 2014.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada manajemen PLN yang diwakili oleh Direktur (Niaga, Manajemen Resiko dan Kepatuhan) Moch. Harry Jaya Pahlawan pada acara Festival Anti Korupsi di Yogyakarta 9.

December 10, 2014
PLN, SOE WithThe Best of UPG
PT PLN (Persero) received an award from the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) as a BUMN with the best of Gratification Control Unit (UPG) in 2014.

The award was presented by the Vice Chairman of KPK, Adnan Pandu Praja to PLN's management represented by the Director (Commercial, Risk Management and Compliance) Moch. Harry Jaya Pahlawan at the Anti-Corruption Festival in Yogyakarta December 9, 2014.

12 Desember 2014
PLN Raih Peringkat 2 Keterbukaan Informasi Publik 2014 dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2014.

PLN mendapatkan skor 78,8 dari nilai maksimal 100. Rata-rata nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk 10 terbesar kategori BUMN adalah 67,84. Skor PLN tahun ini naik 4,708 poin dibanding tahun lalu dengan nilai 74,092.

December 12, 2014
PLN achieved The Second Rank of Public Information Disclosure 2014 from the Central Information Commission (KIP) in the event of Public Information Disclosure Award 2014.

PLN got score 78.8 out 100. The average value of Public Information Disclosure for the 10 largest of SOE category is 67.84. PLN's score increased 4,708 points this year compared to last year with a value of 74.092.

Sertifikasi
Certification

Sejak 2004, secara intensif PLN melaksanakan program sertifikasi Bidang Pembangkitan dan Pelayanan Pelanggan meliputi:

1. ISO 9001 tentang Pelayanan Pelanggan
2. ISO 14001 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan,
3. SMK3,
4. Kelaikan Operasi,
5. Sertifikasi Kompetensi Operasi dan Pemeliharaan.
6. OHSAS untuk Keselamatan dan Kesehatan pegawai, dan
7. Sertifikasi dari Pihak Independen Lainnya. Realisasi Kebijakan Sertifikasi tersebut membuat hampir seluruh Unit Bisnis (46 Unit Bisnis) dan Anak Usaha (10 anak usaha) telah memiliki sertifikasi standar dimaksud, dengan rekapitulasi sertifikasi untuk tahun 2014 sebagai berikut.

Since 2004, PLN has intensively conducted certifications in Generation and Customer Service sector which cover:

1. ISO 9001 about Customer Service,
2. ISO 14001 about Environmental Management,
3. Occupational Health and Safety System,
4. Operational Worthiness,
5. Operations and Maintenance Competency Certification,
6. OHSAS for Employee Safety and Health, and
7. Certifications from Other Independent Parties – The realization of Certification Policies helps most of Business Units (46 Business Units) and Subsidiaries (10 subsidiaries) possess standard certifications. Standard certifications in 2014 are as follow.

No	Jenis Sertifikasi Type of Certification	Deskripsi Description	2013	2014
1	ISO 14001:2004	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	18	37
2	ISO 14001:2005	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	1	2
3	ISO 9001:2000	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	3	3
4	ISO 9001:2008	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	68	100
5	ISO 31000			1
6	SNI 19-14001:2005	Sertifikasi Manajemen Management Certificate		2
7	OHSAS 16001:2007	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	0	1
8	SMK 3	Sertifikasi Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Safety and Environment Management Certificate	51	104
	Zero Accident			
9	ISO 28000:2007 / SNI ISO 28000:2009	Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan Supply-Chain Security Management System	14	15
10	Sertifikat Pemeliharaan		5	5
11	SLO	Sertifikat Laik Operasi Operational Adequacy Certificate	38	42
12	OHSAS 18001 : 2007	Sertifikat Keselamatan Kerja dan Keamanan Lingkungan Occupational Safety and Environment Certificate	1	2
13	ISO / IEC 17021 : 2006	Sertifikasi Sistem Mutu Quality System Certificate	0	0
14	BSN 401-2000	Sertifikasi Produk Product Certificate	0	0
15	SNI/ISO/IEC 17201:2008	Sertifikasi Manajemen Lingkungan Environmental Management Certificate	0	0
	Jumlah Total		**181**	**314**

02 LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

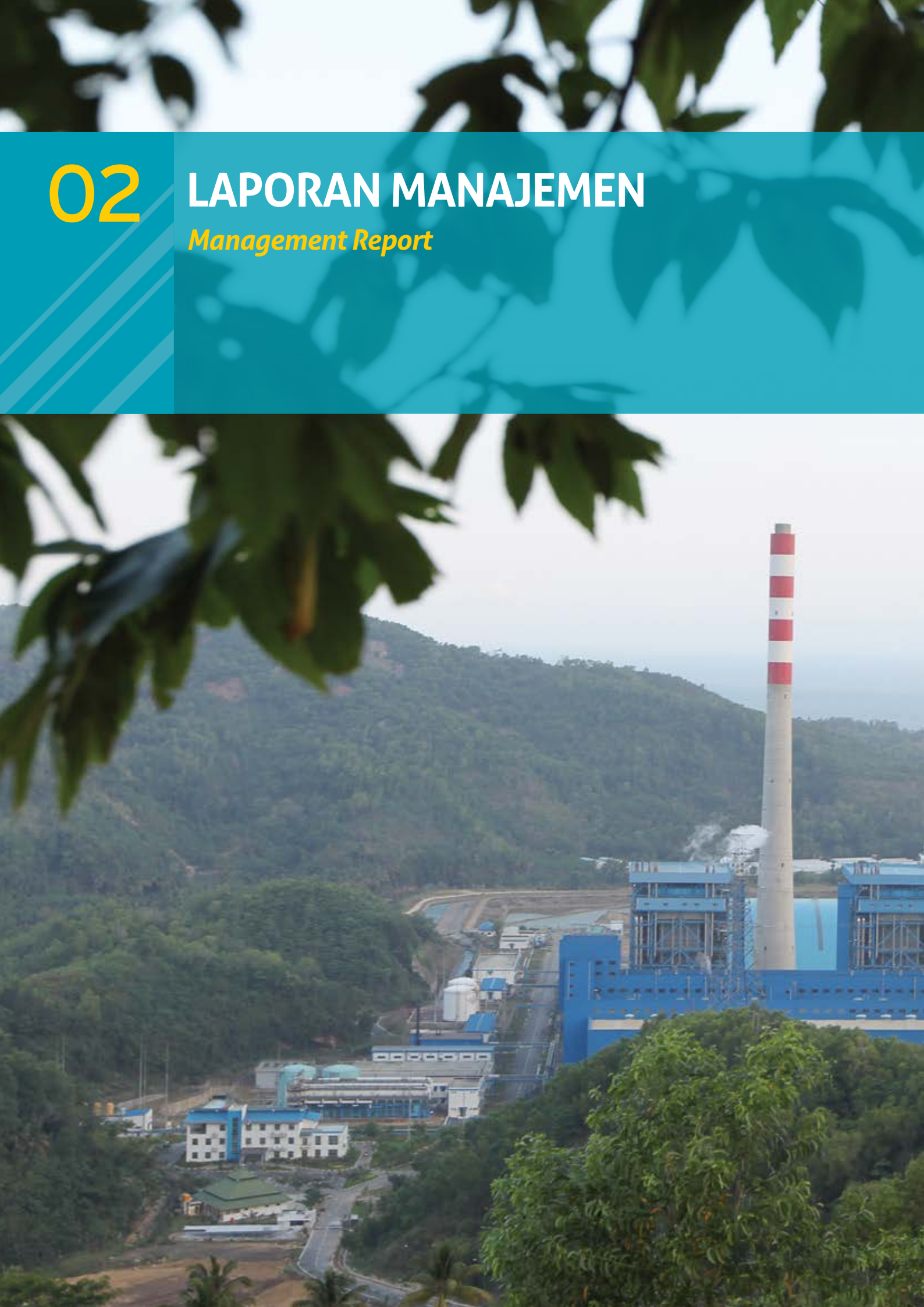

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Report

Laporan Direksi
Board of Directors' Report

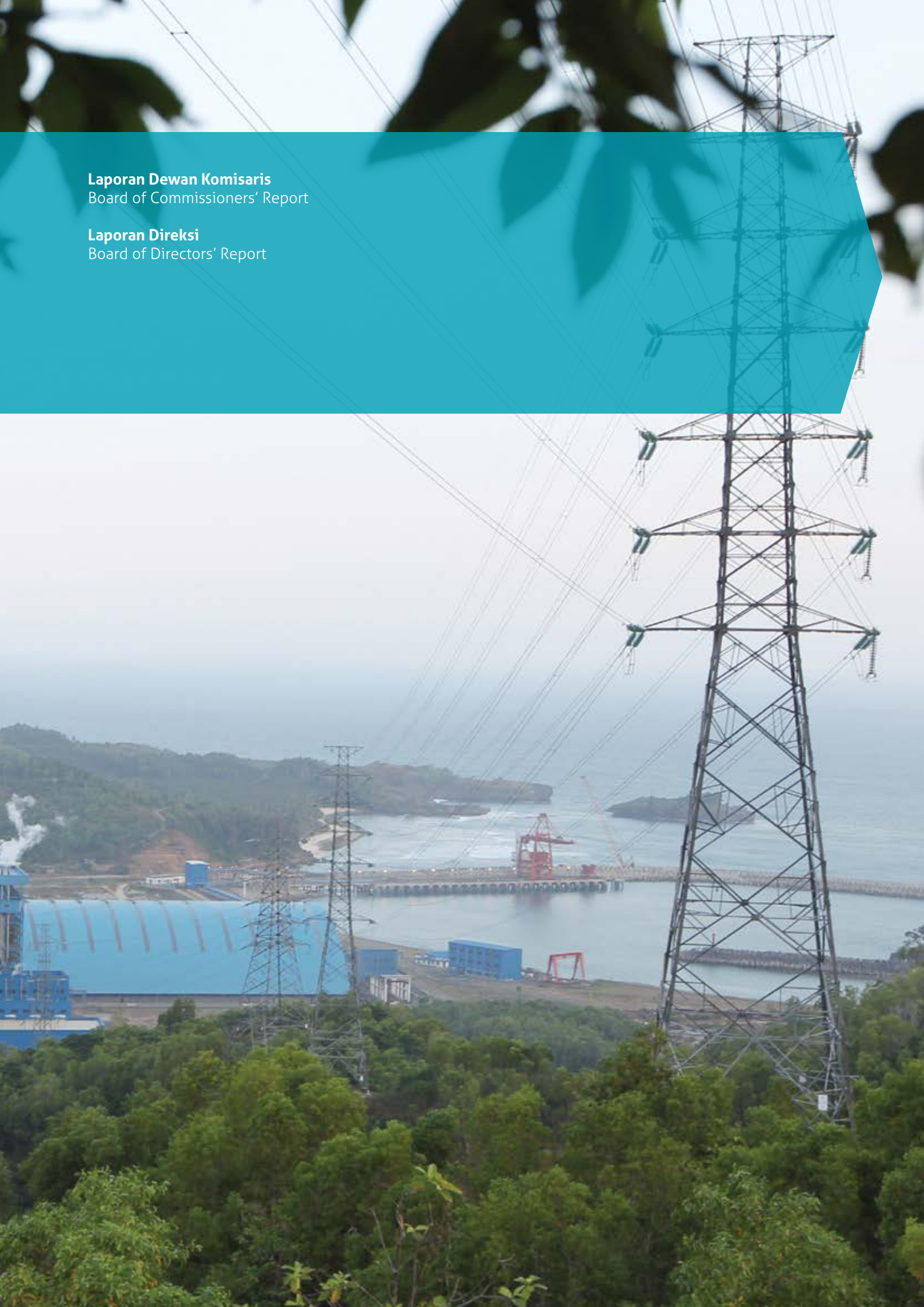

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioner's Report

Prioritas program kerja tahun 2014 adalah mensinergikan tuntutan untuk mewujudkan kinerja operasi yang ekselen dan melayani pertumbuhan pelanggan dengan sumber daya Perusahaan yang terbatas.

Berdasarkan hasil yang diraih ditengah keterbatasan tersebut Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi atas meningkatnya rasio elektrifikasi secara signifikan, terbangunnya kemudahan akses masyarakat/pelanggan dalam berhubungan dengan PLN. Selanjutnya Dewan Komisaris mengingatkan Direksi untuk menyiapkan 'rencana kerja yang konkrit' terkait program penugasan 35.000 MW dan program yang sedang berjalan serta rencana pembiayaannya termasuk dukungan yang dibutuhkan dari Pemerintah.

The work program priority in 2014 is to synergize the demands in realizing an excellence operation performance and serve the customers with limited resources of the Company.

Looking at the overall Company's achievement amidst all challenges, the Board of Commissioners conveys our appreciation to the Board of Directors for the significant increase on electrification ratio and the improvement in community/customer access to PLN. Nevertheless, the Board of Commissioners would like to remind the Board of Directors to conduct a comprehensive planning regarding 35,000 MW assignment roll-out and all ongoing programs, including its funding plans and necessary support needed from the Government.

CHANDRA M. HAMZAH
Komisaris Utama President Commissioners

Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,

Dengan telah berakhirnya tahun 2014 dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini Dewan Komisaris menyampaikan laporan sebagai berikut.

Penilaian Kinerja Direksi

Prioritas program kerja PT PLN (Persero) tahun 2014 adalah mensinergikan tuntutan untuk mewujudkan kinerja operasi yang ekselen dan melayani pertumbuhan pelanggan dengan sumber daya Perusahaan yang terbatas, melalui upaya berupa : (1) mempertahankan tingkat kesehatan keuangan Perusahaan, (2) menjaga kecukupan pasokan listrik, (3) mengoptimalkan bauran energi guna menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik, (4) meningkatkan efisiensi operasi, (5) menyelesaikan proyek PLTU 10.000 MW dan meningkatkan pencapaian *Equivalent Avaibility Factor* (EAF), 6) meningkatkan konsolidasi proses bisnis untuk integrasi pelayanan dan efisiensi, serta 7) meningkatkan sinergi usaha Anak Perusahaan. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan Direksi, selain terdapat beberapa program yang belum dapat direalisasikan, beberapa program telah dapat direalisasikan oleh Direksi pada tahun 2014, yaitu di antaranya pada kinerja operasional dan kinerja keuangan.

Kinerja Operasional

Produksi tenaga listrik pada tahun 2014 adalah sebesar 228,5 GWh, meningkat sebesar 5,7% dibandingkan dengan produksi listrik tahun 2013 sebesar 216,2 GWh. Realisasi penjualan tenaga listrik tahun 2014 sebesar 198,6 GWh, atau meningkat sebesar 5,9% dibandingkan dengan penjualan tahun 2013 sebesar 187,5 GWh. Penjualan tenaga listrik tersebut sebagian besar dikonsumsi oleh pelanggan rumah tangga (42%) dan pelanggan industri (33%). Dalam tahun 2014 pelanggan PLN bertambah sebanyak 3.497.026 pelanggan sehingga total pelanggan di akhir tahun 2014 mencapai 57.463.234 pelanggan, atau meningkat 6,5% dibandingkan dengan pelanggan tahun 2013 sebanyak 53.996.208 pelanggan. Realisasi susut jaringan tahun 2014 mencapai 9,71%, yang berarti lebih baik dibandingkan dengan realisasi susut tahun sebelumnya, yaitu sebesar 9,91%. Tingkat keandalan pelayanan dinyatakan dengan *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI). Pada tahun 2014 realisasi SAIDI mencapai 5,81 jam/pelanggan/tahun dan SAIFI mencapai 5,58 kali/pelanggan/tahun dibandingkan realisasi tahun 2013, SAIDI mencapai 5,76 jam/pelanggan/ tahun dan SAIFI mencapai 7,26 kali /pelanggan/tahun.

Kinerja Keuangan

Apabila pada tahun 2013 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 26.235,61 miliar, maka pada tahun 2014 perusahaan berhasil memperoleh laba sebesar Rp 11.741,61 miliar. Pendapatan usaha mencapai Rp 292.721,19 miliar, tumbuh sebesar 11,79% dibanding dengan tahun 2013 sebesar Rp 261.847,04 miliar. Pendapatan usaha tersebut 63% berasal dari penjualan tenaga listrik,yaitu sebesar Rp 186.634,48 miliar dan subsidi dari Pemerintah sebesar 33% atau sebesar Rp 99.303,25 miliar. Biaya usaha pada tahun 2014 mencapai Rp 246.909,97 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013,yaitu sebesar Rp 220.911,18 miliar. Sebesar 69% dari biaya usaha tersebut, yaitu Rp 170.487,93 miliar digunakan untuk pembelian bahan bakar (energi primer), yaitu batubara, gas alam dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dear Distinguished Stakeholders,

Closing the year of 2014 and as a compliance with the prevailing regulations, the Board of Commissioners is hereby presenting the following report.

Performance Assessment of the Board of Directors

The priority of work program of PT PLN (Persero) in 2014 was to synergize the demand to achieve an excellent operational performance while serving the Company's growing customer base with limited corporate resources which was done through various efforts, including by : (1) managing the Company's financial soundness, (2) maintaining sufficient supply of electricity, (3) optimizing energy mix in order to reduce the cost of electricity supply or Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik, (4) improving the efficiency of operations, (5) completing the 10,000 MW thermal power plant project and improving Equivalent Avaibility Factor (EAF), 6) improving business processes consolidation for service and efficiency integration, and 7) strengthening the synergy among Subsidiaries. Of the various efforts that have been planned by the Board Directors for 2014, regardless several programs that have not been realized, some programs were implemented by the Board of Directors in 2014, including those related to operational and financial performance.

Operational Performance

Total electric power production in 2014 amounted to 228.5 GWh, an increase by 5.7% compared to electricity production in 2013 of 216.2 GWh. Total sales of electricity in 2014 amounted to 198.6 GWh, an increase by 5.9% compared to sales in 2013 amounted to 187.5 GWh. The sales were mostly for household consumption (42%) and industrial customers (33%). In 2014, PLN customers increased by 3,497,026 bringing the total subscribers by the end of 2014 to be 57,463,234, an increase by 6.5% compared to 2013 of 53,996,208 customers. Network losses in 2014 reached 9.71%, better than the previous year which was of 9.91%. Service reliability level is determined by the System Average Interruption Duration Index (SAIDI) and System Average Interruption Frequency Index (SAIFI). In 2014, SAIDI reached 5.81 hour/customer/year and SAIFI was 5.58 time/customer/year compared to 2013 with SAIDI reached 5.76 hour/customer/year and SAIFI reached 7.26 times /customers/a year.

Financial Performance

Whereas in 2013 the Company had Rp 26,235.61 billion loss, in 2014 the Company managed to earn Rp 11741.61 billion profit. Operating revenues reached Rp 292,721.19 billion, grew by 11.79% compared to 2013 which amounted Rp 261,847.04 billion. The operating revenues was 63% derived from the sales of electricity, amounting to Rp 186,634.48 billion, and 33% derived from Government subsidies or Rp 99,303.25 billion. The cost of business in 2014 was Rp 246,909.97 billion, higher than in 2013, which was Rp 220,911.18 billion. 69% of the cost, which was Rp 170,487.93 billion, was used for the purchase of fuel (primary energy), i.e. coal, natural gas and fuel oil.

Tingkat Kesehatan

Penilaian Tingkat Kesehatan PT PLN (Persero) terhitung sejak tahun 2012 mencakup 5 perspektif *Key Performance Indicators* (KPI) berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sesuai Kontrak Manajemen yang meliputi Fokus Pelanggan, Efektivitas Produk dan Proses, Fokus Tenaga Kerja, Keuangan dan Pasar, dan Kepemimpinan dan Tata Kelola. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor No.100/MBU/2002, maka untuk tahun 2014 Tingkat Kesehatan PT PLN (Persero) mendapat Skor 88,3 masuk pada golongan Perusahaan BUMN yang SEHAT, kategori AA. Berdasarkan hasil pencapaian target tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi atas meningkatnya rasio elektrifikasi secara signifikan, terbangunnya kemudahan akses masyarakat/pelanggan dalam berhubungan dengan PLN melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi, terlaksananya program listrik pra bayar yang memberikan kemudahan kepada pelanggan, menjalankan program " PLN Bersih No Suap" melalui kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *Transparency International Indonesia* (TII). Secara umum, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan perusahaan dengan baik dan telah memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik. Untuk selanjutnya, Dewan Komisaris akan terus mendorong Direksi untuk tetap berkomitmen penuh terhadap peningkatan kinerja di masa depan.

Hal-hal Mendasar yang Menjadi Perhatian pada Implementasi Kinerja

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi mandat oleh Undang-undang untuk menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup (*availability*) dengan mutu *(quality)* dan keandalan (*reliability*) yang memadai serta pada harga yang terjangkau (*efficiency*), maka Direksi PT PLN (Persero) perlu untuk menyusun Rencana Jangka Panjang (RJP) 2015-2019 sebagai arah korporasi berupa target-target yang harus dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang guna memastikan:

1. Kecukupan daya mampu pembangkit, jaringan, instalasi (infrastruktur listrik);
2. Kecukupan energi (KWh) yang mampu diproduksi, disalurkan, didistribusikan oleh infrastruktur listrik tersebut kepada pelanggan;
3. Kecukupan mutu (*quality*) dan keandalan (*reliability*) sesuai spesifikasi teknis, disain dan pelaksanaan konstruksi serta operasi/pemeliharaan;
4. Harga yang terjangkau (*efficiency*) terkait dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP).
5. PLN memiliki kemampuan keuangan untuk mendanai pembangunan infrastruktur listrik berupa pembangkit, transmisi, jaringan, gardu induk untuk melayani kebutuhan pelanggan dengan baik dan tepat waktu.

Hal-hal yang menjadi fokus perhatian ke depan adalah:

1. Penurunan BPP merupakan langkah strategis yang harus menjadi prioritas utama, karena akan berpengaruh pada beban subsidi listrik dari Pemerintah (mengurangi subsidi);
2. Memastikan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara atau gas sebesar 35.000 MW dan proyek transmisi terkait dapat berjalan tepat waktu untuk mengurangi pemakaian bahan bakar minyak sehingga BPP akan lebih murah/efisien, menekan angka susut dan memperbaiki tingkat keandalan pelayanan;

Soundness

Assessment on the soundness of PT PLN (Persero), since 2012, covers the five perspectives of Key Performance Indicators (KPIs) based on Excellent Performance Assessment Criteria or Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) under Management Contract, including Customer Focus, Product and Process Effectiveness, Labor Focus, Finance and Market, and Leadership and Governance. Based on the Ministerial Decree of State Owned Enterprises No. 100/MBU/2002, in 2014 PT PLN (Persero) scored 88.3 in its soundness rating, therefore is considered a SOUND state-owned Company, in AA category. Based on the target achievements, the Board of Commissioners commends the Board of Directors for a significant increase in the electrification ratio, the establishment of easy access for the public/customers to contact PLN through various information and communication technology systems, implementation of pre-paid electricity program that brings convenience to customers, running the " PLN Bersih No Suap " program with a cooperation with the Corruption Eradication Commission or Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) and Transparency International Indonesia (TII). In general, the Board of Commissioners recognizes that the Board of Directors has managed the Company well and complied with the principles of good corporate governance. Henceforth, the Board will continue to encourage the Board of Directors to remain fully committed to the improvement of Company's performance in the future.

Fundamental Concerns During Implementation

As a State-Owned Enterprise which is mandated by the Law to provide sufficient electricity supply (availability) with adequate quality and reliability and at an affordable price (efficiency), the Board of Directors of PT PLN (Persero) needs to develop a Long Term Plan or Rencana Jangka Panjang (RJP) 2015-2019 as a corporate directive which translates into five-year target, in order to ensure:

1. Capability for power generation, network, installation (electricity infrastructure);
2. Sufficiency of energy (kWh), which is able to be produced, transmitted and distributed, through the electricity infrastructure, to customers;
3. Quality and reliability that correspond to technical specifications, design, construction and operation/ maintenance;
4. Reasonable price (efficiency) associated with the cost of electricity supply (BPP).
5. PLN has the financial ability to fund infrastructure development such as generation, transmission, sub station to serve customer as well.

Future focus of attention are including:

1. Reduce in the price of BPP is a strategic step that should be a top priority, because it will affect the cost of electricity subsidy by the Government (reducing subsidy);
2. Ensuring the construction of 35,000 MW coal-fired or gas-fired power plant and the timely running of associated transmission projects to reduce the use of fossil fuels so that BPP would be cheaper/more efficient, reduce the number of losses and improve service reliability level;

3. Jadwal pemeliharaan pembangkit yang tertunda juga memerlukan penanganan yang serius guna memastikan pasokan daya yang tersedia dalam jumlah dan mutu yang memadai;
4. Penyusunan proses bisnis dan sinergi antar Direktorat, Unit, Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi yang baku;
5. Mempersiapkan sumber daya manusia dengan baik termasuk aspek jumlah kompetensi serta *"talent pool"*
6. Melaksanakan performance management system dengan bail dan konkrit sehingga terjadi keseimbangan dal am reward and punishment serta mendukung peningkatan kinerja PT PLN (Persero) maupun anak perusahaan.
7. Peningkatan komitmen terhadap penerapan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *good corporate governance*.

Terkait dengan penugasan dari Pemerintah untuk membangun pembangkit 35.000 MW dalam tahun 2015 – 2019 dan mengingat penugasan tersebut melampaui kemampuan keuangan Perusahaan, maka diperlukan rencana dan program kerja yang konkrit serta sumber pembiayaan yang memadai dengan dukungan peraturan dari Pemerintah, dan perlun memastikan fihak mana saja yang akan dilibatkan pada pembangunan pembangkit 35.000 MW tersebut.

Pandangan atas Prospek Usaha

Pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,1% per tahun dengan pertumbuhan GDP meningkat rata-rata 6-7% per tahun dan rasio elektrifikasi nasional masih berkisar 84,3% sehingga peluang pasar masih terbuka bagi PLN. Arah strategis PLN untuk 10 tahun mendatang dibagi menjadi dua bagian, yaitu masa tumbuh (*growth*) pada periode 2013-2017, dan masa ekselen (*excellence*) pada periode 2018-2022. Arah strategis perusahaan periode tahun 2013-2017 adalah menjadi entitas korporasi yang sehat secara finansial sehingga dapat melakukan investasi untuk mempertahankan *market share* dan berkembang sesuai dengan kaidah-kaidah korporasi. Hal tersebut berarti, perusahaan dituntut untuk memiliki kondisi keuangan yang sehat, efisien, dapat memenuhi tingkat keandalan dan pelayanan sesuai ekspektasi pelanggan, serta didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi tinggi, berperilaku sesuai GCG dan CoC (*Code of Conduct*) dalam menjalankan usahanya. Sedangkan tujuan strategis tahun 2013-2017 adalah memperbaiki kondisi keuangan, menyelesaikan proyek kelistrikan secara tepat waktu, meningkatkan efisiensi investasi, mengoptimalkan bauran energi, memperbaiki kinerja operasional dan memperbaiki citra korporasi. Berbagai tantangan yang harus dihadapi perusahaan dalam upaya mencapai sasaran strategis tersebut, antara lain adalah: (1) meningkatkan kecukupan pasokan listrik guna mempertahankan bebas pemadaman dan memenuhi kebutuhan pelanggan, (2) meningkatkan kapasitas dan kemampuan keuangan guna memenuhi kebutuhan investasi, (3) memperbaiki bauran energi guna mendapatkan Biaya Pokok Penyediaan yang optimal, (4) meningkatkan kinerja operasional berupa perbaikan tingkat keandalan pelayanan dan citra positif, serta (5) meningkatkan peran sektor ketenagalistrikan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi.

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Aspek Pengawasan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan meliputi: (1) Pengawasan atas Efektivitas dan Efisiensi Operasi dan Investasi, (2) Pengawasan atas Keandalan Informasi/Pelaporan Keuangan, (3) Pengawasan atas Kepatuhan

3. Delayed plant maintenance schedule also requires serious dealing to ensure sufficient quantity and quality of available power supply;
4. Preparation of standard business processes and synergize across all Directorate, Unit, Subsidiaries and Affiliated Companies;
5. Preparing human resources including number of competencies aspect and talent pool.
6. To Conduct performance management system as well to pursue balances reward and punishment and support performance PT PLN (Persero) and us subsidiaries.
7. Strengthening the commitment on the implementation of applicable rules, regulations and *good corporate governance*.

Regarding the Government's directive to build 35,000 MW power plant within the period between 2015 to 2019 and given the assignment is beyond the financial capacity of the Company, the project calls for concrete planning and work program as well as sufficient funding that is supported by the Government regulations, and requires for appointment of any parties that will be involved in the construction of 35,000 MW power plant.

Business Outlook

Indonesia's population growth is about 1.1% per year with GDP growth increase by an average of 6-7% per year and the national electrification ratio is still around 84.3%, therefore still providing market opportunity for PLN. The Company's strategic direction for the next 10 years is divided into two parts, namely the period of growth from 2013 to 2017, and the period of excellence from 2018-2022. The Company's strategic direction for 2013-2017 is to be a financially sound corporate entity in order that the Company can make investments to maintain market share and grow as a corporation. With this strategy, the Company is required to have financial condition that is sound and efficient, be able to meet the level of reliability and service according to customer expectations, and supported by highly competent human resources, compliant to GCG principles and CoC (Code of Conduct) in conducting its operations. Meanwhile, the strategic objectives of 2013-2017 are to improve the Company's financial condition, to complete electrification project on schedule, improve investment efficiency, optimize energy mix, improve operational performance and improve corporate image. Various potential challenges faced by the Company in order to achieve certain strategic objectives, including to: (1) increasing a sufficient supply of electricity to maintain zero outages and meet customer needs, (2) increase the capacity and financial capability to meet investment needs, (3) improve energy mix in order to obtain optimal cost of electricity supply, (4) improve operational performance through the improvement of the level of service reliability and corporate positive image, and (5) increase the role of electricity sector to boost economic growth.

Report on the Board of Commissioners' Supervisory Function as a part of the Implementation of Corporate Governance

Compliant to the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners has conducted oversight on various aspects including: (1) Supervision on the Effectiveness and Efficiency

terhadap Perundang-undangan & Peraturan yang berlaku. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dalam tahun 2014 telah mengadakan 38 kali rapat yang dihadiri secara kourum oleh Anggota Dewan Komisaris. Sedangkan rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi sejumlah 21 kali. Dalam rangka memperoleh informasi pada kondisi terkini, Dewan Komisaris telah melakukan monitoring langsung ke unit-unit dengan melakukan kunjungan kerja lapangan sebanyak 19 kali, meliputi kunjungan kerja ke 39 Unit / Proyek dan 4 Anak Perusahaan.

Pemberian nasehat/teguran/arahan dan pemberian tanggapan tertulis/persetujuan atas usulan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris maupun yang memerlukan persetujuan RUPS selama tahun 2014 sebanyak 164 kali (melalui 164 surat). Selain hal tersebut, Dewan Komisaris juga telah menyampaikan laporan / tanggapan kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham / RUPS terkait kewajiban Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar.

Hasil pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2014 telah disampaikan dan dilaporkan kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tentang Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan. Hasil penilaian/asesmen yang dilaksanakan oleh BPKP atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Dewan Komisaris mencapai nilai 31,7 dari target 35 atau 90% termasuk katagori " Sangat Baik".

Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris PT PLN (Persero) ditetapkan oleh RUPS, dan sepanjang tahun 2014 telah terjadi perubahan susunan dan jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Oktober 2014 dan Desember 2014. Mengawali tahun 2014, susunan Anggota Dewan Komisaris PT PLN (Persero) terdiri dari : Yogo Pratomo (Komisaris Utama), Adang Firman (Komisaris Independen), Syahrial Loetan (Komisaris Independen), Wimpy S. Tjetjep (Komisaris), Jarman (Komisaris), Andin Hadiyanto (Komisaris), Harry Susetyo Nugroho (Komisaris), Ahmad Yani Basuki (Komisaris) dan Zulkifli Zaini (Komisaris).

Pada tanggal 16 Oktober 2014, terjadi perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris PT PLN (Persero) sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-211/MBU/10/2014 yang memberhentikan dengan hormat para Komisaris : Adang Firman (Komisaris Independen), Syahrial Loetan (Komisaris Independen), Wimpy S. Tjetjep (Komisaris), dan mengangkat Oegroseno (Komisaris Independen), Darmono (Komisaris Independen) dan S. Milton Pakpahan (Komisaris). Pada tanggal 23 Desember 2014, terjadi perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris PT PLN (Persero) sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-273/MBU/12/2014 yaitu Yogo Pratomo (Komisaris Utama), Jarman (Komisaris), Ahmad Yani Basuki (Komisaris) diberhentikan dengan hormat dan mengangkat Chandra M. Hamzah (Komisaris Utama), Hasan Bisri (Komisaris) dan Budiman (Komisaris).

of Operations and Investment, (2) Supervision on Information Reliability /Financial Reporting, (3) Supervision on Compliance with Applicable Laws and Regulations. In conducting such supervisory function, in 2014 the Board of Commissioners held 38 meetings that were attended by the required quorum of the Board of Commissioners and held 21 the Board of Commissioners' meetings that were attended by the Board of Directors. In order to obtain updated information, the Board of Commissioners performed direct unit monitoring through work visits of total 19 times, including work visits to 39 Units/Projects and 4 subsidiaries.

Acts of providing counsel/warning/direction and giving written comment/ approval regarding the Board of Directors' proposals which require the approval from the Board of Commissioners or AGMS throughout 2014 were performed 164 times (through 164 letters). In addition to this, the Board of Commissioners has also submitted a report/response to the Minister of State Owned Enterprises as the Shareholders/AGMS regarding the Board of Commissioners' liabilities according to the Company's Articles of Association.

Results on the Board of Commissioners' supervisory performance throughout 2014 have been presented and reported to the Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders on Annual Accountability Report. The result of assessment conducted by the Finance and Development Supervisory Agency or Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) on the Board of Commissioners regarding the implementation of Good Corporate Governance (GCG) was 31.7 of the target score of 35 or 90%, and considered "Very Good".

Composition of the Board of Commissioners

The composition of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) is decided by the AGM. Changes in the composition and number of members of the Board of Commissioners in 2014 were made 2 times, which are in October 2014 and December 2014. Starting the year 2014, the composition of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) consisted of: Yogo Pratomo (President Commissioner), Adang Firman (Independent Commissioner), Syahrial Loetan (Independent Commissioner), Wimpy S. Tjetjep (Commissioner), Jarman (Commissioner), Andin Hadiyanto (Commissioner), Harry Susetyo Nugroho (Commissioner), Ahmad Yani Basuki (Commissioner) and Zulkifli (Commissioner).

As of 16 October 2014, there is a change in the composition of Board of Commissioners of PT PLN (Persero) according to the Ministerial Decree of the Minister of State Owned Enterprises which acted as AGM of Number: SK-211/MBU/10/2014 that officially terminates members of the Board of Commissioners as follows: Adang Firman (Independent Commissioner), Syahrial Loetan (Independent Commissioner) and Wimpy S. Tjetjep (Commissioner); and appoints Oegroseno (Independent Commissioner), Darmono (Independent Commissioner) and S. Milton Pakpahan (Commissioner). As of December 23, 2014, there is a change in the composition of Board of Commissioners of PT PLN (Persero) according to the Ministerial Decree of the Minister of State Owned Enterprises which acted as AGM of Number: SK-273/MBU/12/2014 that officially terminates Yogo Pratomo (President Commissioner), Jarman (Commissioner) and Ahmad Yani Basuki (Commissioner); and appoints Chandra M. Hamzah (President Commissioner), Hasan Bisri (Commissioner) and Budiman (Commissioner).

Dengan demikian maka susunan Anggota Dewan Komisaris PLN sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai saat ini menjadi sebagai berikut : Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama, Oegroseno dan Darmono sebagai Komisaris Independen sedangkan Andin Hadiyanto, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, S Milton Pakpahan, Hasan Bisri dan Budiman sebagai Komisaris.

Komite Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris beserta sekretariat Dewan Komisaris. Untuk efektivitas tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengatur pembagian tugas dan wewenang di antara Anggota Dewan Komisaris dalam bentuk penetapan Komisaris sebagai ketua /anggota Komite maupun Tim Ad hoc yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, sedangkan seluruh anggota Komite yang bukan Komisaris adalah independen karena berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kepemilikan dan kegiatan usaha perusahaan namun memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang tugasnya.

Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian nasehat atas keandalan (*reliability*) dari laporan dan informasi keuangan Perusahaan serta efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan.

Susunan anggota Komite Audit ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris dan sepanjang tahun 2014 sampai dengan laporan ini telah dilakukan 2 kali perubahan sejalan dengan berubahnya susunan anggota Dewan Komisaris. Mengawali tahun 2014, susunan anggota Komite Audit sebagai berikut: Adang Firman (Komisaris Independen) sebagai Ketua dengan anggota terdiri dari Andin Hadiyanto (Komisaris), Harry Susetyo Nugroho (Komisaris), dan Zulkifli Zaini (Komisaris) serta Sugeng Rochadi dan Aidil Yuzar sebagai anggota Komite Non Komisaris.

Pada tanggal 21 Oktober 2014, susunan anggota Komite Audit berubah menjadi: Zulkifli Zaini (Komisaris) sebagai Ketua merangkap anggota, dengan anggota terdiri dari Andin Hadiyanto (Komisaris), Harry Susetyo Nugroho (Komisaris), dan Oegroseno (Komisaris Independen) serta anggota non Komisaris yaitu Sugeng Rochadi dan Aidil Yuzar.

Pada tanggal 14 Januari 2015, susunan anggota Komite Audit berubah menjadi: Darmono (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap anggota dengan anggota terdiri dari Andin Hadiyanto (Komisaris) dan Hasan Bisri (Komisaris) serta Sugeng Rochadi dan Aidil Yuzar sebagai anggota Komite Non Komisaris.

Thus, the composition of the Board of Commissioners of PLN as of 23 December 2014 is as follows: Chandra M. Hamzah as President Commissioner, Oegroseno and Darmono as Independent Commissioners while Andin Hadiyanto, Harry Susetyo Nugroho, Zulkifli Zaini, S Milton Pakpahan, Hasan Bisri and Budiman as Commissioners.

The Board of Commissioners' Committees

In performing its duties, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs consisting of Committees and Secretary of the Board of Commissioners as well as the secretariat of the Board of Commissioners. For the effectiveness of supervisory duties, the Board of Commissioners has set roles and responsibilities among its members with appointment of a Commissioner as the chairman/ member of the Committee or Ad Hoc Team established by the Board of Commissioners, while all non-Commissioner members of the Committee are independent because they are not from internal company and have no affiliation with the management, ownership and business relation but have the competence and experience in their respective expertise.

Audit Committee

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in carrying out its supervisory and advisory functions regarding the reliability of the Company's reports and financial information and the effectiveness of the Company's internal control system.

The composition of the Audit Committee is determined by the Board of Commissioners. Throughout 2014 up to the publication of this report, there have been 2 changes in the composition of the Board of Commissioners. Starting the year 2014, the members of the Audit Committee are as follows: Adang Firman (Independent Commissioner) as the Chairman with Andin Hadiyanto (Commissioner), Harry Susetyo Nugroho (Commissioner), and Zulkifli (Commissioner) as members; and Sugeng Rochadi and Aidil Yuzar as Non-Commissioner Committee members.

There was a change composition of the Audit Committee on 21 October 2014 as follows: Zulkifli Zaini (Commissioner) as Chairman and member, with Andin Hadiyanto (Commissioner), Harry Susetyo Nugroho (Commissioner), and Oegroseno (Independent Commissioner) as members as well as Sugeng Rochadi and Aidil Yuzar as Non-Commissioner members.

As of 14 January 2015, the members of the Audit Committee are as follows: Darmono (Independent Commissioner) as Chairman and member with Andin Hadiyanto (Commissioner) and Hasan Bisri (Commissioner) as members and Sugeng Rochadi and Aidil Yuzar as Non-Commissioner Committee members.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan atas semua kegiatan perusahaan yang memiliki potensi risiko dan mengawasi pengembangan *Enterprise Risk Management* serta melakukan penelaahan atas sistem organisasi / remunerasi/ nominasi agar sesuai dengan komitmen perusahaan. Susunan anggota Komite Manajemen Risiko ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris dan sepanjang tahun 2014 sampai dengan laporan ini telah dilakukan 3 kali perubahan sejalan dengan berubahnya susunan Anggota Dewan Komisaris.

Mengawali tahun 2014, susunan anggota Komite Manajemen Risiko adalah: Syahrial Loetan (Komisaris Independen) sebagai Ketua dengan anggota terdiri dari Wimpy S. Tjetjep (Komisaris), dan Jarman (Komisaris) serta Edwin R Lumban Tobing dan Yusuf Hamdani sebagai anggota Komite Non Komisaris. Pada tanggal 21 Oktober 2014, susunan anggota Komite Manajemen Risiko berubah menjadi: Jarman (Komisaris) sebagai Ketua merangkap anggota dengan anggota terdiri dari Darmono (Komisaris Independen), dan S. Milton Pakpahan (Komisaris) serta Edwin R Lumban Tobing dan Yusuf Hamdani sebagai anggota Komite non Komisaris. Pada tanggal 14 Januari 2015, susunan anggota

Risk Management Committee

The Risk Management Committee assists the Board of Commissioners in carrying out supervision function on all Company activities that has potential risks and overseeing the development of Enterprise Risk Management as well as conducting review on the system of organization/remuneration/nomination according the Company's commitment. The members of the Risk Management Committee are determined by the Board of Commissioners. Throughout 2014 up to the publication of this report there have been 3 changes in the composition of Board of Commissioners.

Starting the year 2014, the members of the Risk Management Committee were: Syahrial Loetan (Independent Commissioner) as Chairman with Wimpy S. Tjetjep (Commissioner) and Jarman (Commissioner) as members and Edwin R Lumban Tobing and Yusuf Hamdani as a member of the Committee of Non Commissioner. On October 21, 2014, the members of the Risk Management Committee changed to: Jarman (Commissioner) as Chairman and member to member consists of Darmono (Independent Commissioner), and S. Milton Pakpahan (Commissioner) and Edwin R Lumban Tobing and Yusuf Hamdani as Non-Commissioner members. As of 14 January 2015, the composition of the Risk

Komite Manajemen Risiko berubah menjadi: Zulkifli Zaini (Komisaris) sebagai Ketua merangkap anggota dengan anggota terdiri dari Oegroseno (Komisaris Independen) dan S. Milton Pakpahan (Komisaris) serta Yusuf Hamdani sebagai anggota Komite non Komisaris.

Management Committee is as follows: Zulkifli Zaini (Commissioner) as Chairman and member with Oegroseno (Independent Commissioner) and S. Milton Pakpahan (Commissioner) and Yusuf Hamdani as Non-Commissioner Committee members.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN, Dewan Komisaris PT PLN (Persero) telah memiliki 2 (dua) Komite, yaitu Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Namun, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite lain lebih dari satu apabila:

1. Diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau
2. Disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas daan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas BUMN yang bersangkutan.

Karena adanya kebutuhan untuk menangani masalah nominasi dan remunerasi,sedangkan Dewan Komisaris tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, maka pada tanggal 25 Juli 2014 Dewan Komisaris membentuk Tim Ad hoc Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut: Yogo Pratomo (Komisaris Utama) sebagai Ketua merangkap anggota dan Ahmad Yani Basuki (Komisaris) sebagai anggota. Pada tanggal 14 Januari 2015, Tim Ad hoc Nominasi dan Remunerasi berubah menjadi Tim Ad hoc Nominasi Remunerasi dan GCG , dengan susunan sebagai berikut: Chandra M. Hamzah (Komisaris Utama) sebagai Ketua merangkap anggota, Harry Susetyo Nugroho (Komisaris) dan Budiman (Komisaris) masing-masing sebagai anggota.

Dengan terbitnya ketentuan OJK Nomor: 34/POJK.04/ 2014 tanggal 8 Desember 2014 yang mewajibkan Dewan Komisaris perusahaan emiten untuk mempunyai fungsi nominasi dan remunerasi, maka Dewan Komisaris telah mengajukan permohonan persetujuan RUPS untuk pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.

Nomination and Remuneration Committee

Compliant to the Ministerial Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 dated 24August 2012 on Supporting Organs for the Board of Commissioners of a State Owned Enterprise, the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) has 2 (two) Committees, which are the Audit Committee and Risk Management Committee. However, the Board may establish more than one other Committees if:

1. Required by the rules and regulations, or
2. Approved by the Minister according to the complexity and load of the Board of Commissioners in carrying out all duties related to that particular State Owned Enterprise.

Because of the need to address the issue of nomination and remuneration, while the Board of Commissioners do not have the Nomination and Remuneration Committee, on 25 July 2014 the Board of Commissioners formed a Nomination and Remuneration Ad Hoc Team with the following composition: Yogo Pratomo (President Commissioner) as Chairman and member and Ahmad Yani Basuki (Commissioner) as member. As of 14 January 2015, Nomination and Remuneration Ad Hoc Team transforms into Nomination Remuneration and GCG Ad Hoc Team, with the following composition: Chandra M. Hamzah (President Commissioner) as Chairman and member, and Harry Susetyo Nugroho (Commissioner) and Budiman (Commissioner) as members.

With the issuance of the Financial Service Authority regulation Number: 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014, which requires the Board of Commissioners of the publicly listed company to have nomination and remuneration function, the Board of Commissioners has applied for approval of the AGM for the formation of the Nomination, Remuneration and GCG Committee.

Penutup

Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi bersama seluruh jajarannya telah bekerja keras untuk mewujudkan misi perusahaan, yaitu menjalankan bisnis kelistrikan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan Pemegang Saham dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada Direksi beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras menyelesaikan tugas perseroan selama tahun 2014 dan telah dituangkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2014 ini.

Dewan Komisaris akan terus bersinergi dengan Direksi dalam memberikan arahan, nasehat serta pengawasan agar pelaksanaan program sesuai rencana dan strategi perusahaan.

Closing

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors and all the staff have worked hard to achieve the Company's mission, which is to run electricity business that is oriented on customer satisfaction, members of the Company and Shareholders through the implementation of good corporate governance and prudence principles. Therefore, the Board extends appreciation to the Board of Directors and all members of the Company who have worked hard to complete the Company's duties in 2014 that are presented in this 2014 Annual Report.

The Board of Commissioners will continue the synergy with the Board of Directors in providing direction, advice and oversight for the implementation of programs as planned and according to the corporate strategy.

Atas nama Komisaris Utama PT PLN (Persero)
On behalf of PT PLN (Persero) Board of Commissioners

CHANDRA M. HAMZAH
Komisaris Utama
President Commissioners

SOFYAN BASIR
Direktur Utama President Director

Laporan Direksi
Board of Directors' Report

Memastikan langkah menuju korporasi kelas dunia dengan reputasi global melalui penerapan berbagai hasil-hasil inovasi dalam kegiatan operasional untuk meningkatkan efisiensi operasional, merealisasikan seluruh rencana investasi dengan bijaksana dan konsisten mengimplementasikan praktik-praktik terbaik tata kelola.

PLN mengatasi tahun yang berat dan menantang dengan fokus pada upaya pengelolaan risiko dan biaya dengan menerapkan strategi *cost & revenue management program* guna memastikan langkah menuju penciptaan level kinerja baru dalam mendukung pembangunan bangsa.

Ensuring every step towards world-class corporate with global reputation by implementing various innovations in operational activities in order to increase operational efficiency, realizing all investment plans wisely, and implementing Good Corporate Governance consistently.

PLN overcame problems in a tough and challenging year by focusing on risk and cost management which was done by implementing cost & revenue management program in order to ensure steps towards establishment of new performance levels in supporting nation development.

Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

PLN konsisten merealisasikan berbagai program prioritas jangka pendek sebagai bagian dari rencana pengembangan Perseroan jangka panjang dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, mewujudkan visi dan misi sebagai perusahaan kelistrikan kelas dunia, serta memberi *benefit* optimal kepada seluruh pemangku kepentingan.

Program prioritas jangka pendek yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah: (i) menjaga kecukupan pasokan listrik, (ii) mengoptimalkan bauran energi, (iii) meningkatkan efisiensi operasi (iv) menyelesaikan pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi serta distribusi, (v) memperbaiki tingkat kesehatan keuangan perusahaan, (vi) meningkatkan konsolidasi proses bisnis untuk integrasi pelayanan dan efisiensi serta (vii) meningkatkan sinergi usaha Anak Perusahaan.

Beratnya tantangan pada dua tahun terakhir membuat PLN memberi fokus perhatian lebih pada peningkatan efisiensi operasional dengan menerapkan strategi *cost & revenue management program* yang terdiri dari 10 langkah aksi di lapangan.

Kegigihan dan disiplin seluruh jajaran dalam melaksanakan seluruh program kerja yang telah ditetapkan membuat PLN mencatatkan 3 prestasi utama, yakni: masuk ranking 477 perusahaan berpenghasilan terbesar di seluruh dunia menurut catatan Fortune Global 500, peningkatan peringkat hutang dari Baa3 menjadi Ba2 dari Moody's untuk *Company Stand Alone Credit Quality* atau *Baseline Credit Assessment* (BCA) dan berhasil mendukung peningkatan Peringkat Kemudahan Berbisnis di Indonesia dari 117 menjadi 114, melalui indikator kemudahan mendapatkan listrik *(getting electricity)* yang naik 23 peringkat dari 101 menjadi 78.

Selain kinerja utama tersebut PLN juga mencatatkan berbagai kinerja sebagaimana kami uraikan berikut.

Kinerja Operasional

Konsistensi, kerja keras dan disiplin seluruh jajaran dalam melaksanakan inisiatif strategis dalam rangka merealisasikan program dan mencapai target prioritas jangka pendek memberikan capaian sebagai berikut:

Aspek Pemasaran

Penjualan tenaga listrik tahun 2014 naik 5,9% menjadi 198.602 GWh dengan seluruh kelompok pelanggan mengalami kenaikan. Penjualan kepada kelompok industri tumbuh relatif lambat, sebesar 2,37%, sementara penjualan tenaga listrik terhadap kelompok pelanggan lainnya rata-rata tumbuh 7,7%, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2013, yang sebesar 7,04%.

Kenaikan penjualan listrik tersebut sejalan dengan pertumbuhan jumlah pelanggan yang bertambah 3,49 juta atau naik 6,48% dari jumlah pelanggan tahun 2013, sehingga total telah mencapai 57,49 juta pelanggan. Penambahan jumlah

The Honorable Stakeholders,

PLN consistently conducts various short-term priority programs as one part of Company's long-term development program in supporting national economic growth, manifesting vision and missions as world-class electricity company, as well as producing optimal benefits for all stakeholders.

Several short-term priority programs conducted in 2014 were: (i) maintaining electricity supply sufficiency, (ii) optimizing fuel mix, (iii) increasing operational efficiency, (iv) completing power plant as well as transmission and distribution network constructions, (v) improving company financial health, (vi) increasing business process consolidation in order to integrate service and efficiency, as well as (vii) improving Subsidiaries' business synergy.

Tough challenges which occurred in the last two years forced PLN to focus more on operational efficiency by implementing cost & revenue management program which consisted of 10 action steps in the field.

As a result of persistence and discipline of all company levels in conducting all work programs, PLN successfully gained 3 main achievements, which were: the 477th rank in the list of top earning companies in the world based on Fortune Global 500 record, decrease in Baseline Credit Assessment (BCA) from Baa3 to Ba2 based on Moody's in Company Stand Alone Credit Quality or Baseline Credit Assessment (BCA), and successful increase in Ease of Doing Business in Indonesia ranking from the 117th to 114th through an indicator of the ease of getting electricity which rose by 23 ranks from the 101st to the 78th.

In addition to those main performances, PLN recorded various performances, as followed.

Operational Performance

All company levels' consistency, hard work, and discipline in conducting strategic initiative to hold programs and achieve short-term priority target bring several results, as follow:

Marketing Aspect

Electricity sales in 2014 increased as many as 5.9 % to 198,602 GWh as a result of increase in every customer group. Sales to industries groups faced a relatively slow growth, which was 2.37%. Meanwhile, an average growth of 7.7% occurred in sales to other customer groups, which was higher than 7.04% that happened in 2013.

The increase of electricity sales corresponded with the growth of customers which faced an increase of 3.49 millions or increase to 6.48% of total customers in 2013, resulting in a current total of 57.49

pelanggan tersebut membuat rasio elektrifikasi secara nasional menjadi 84,3% (termasuk pelanggan non-PLN), naik dari posisi 80,36% di tahun 2013.

Pertumbuhan penjualan dan jumlah pelanggan membuat daya tersambung di tahun 2014 juga naik 7,45% sebesar 6.936 MVA, sehingga total daya tersambung menjadi 100.031 MVA. Pelambatan pertumbuhan ekonomi, yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan perumahan, mempengaruhi laju kenaikan pelanggan rumah tangga, sehingga hanya tumbuh sebesar 6,37%.

Adapun hasil realisasi usaha dibandingkan target dari aspek penjualan adalah:

million customers. This increase led national electrification ratio to 84.3% (including non-PLN customers), from 80.36% in 2013.

The growth of sales and customers resulted in an increase of 7.45% or equivalent to 6.936 MVA of connected power in 2014, therefore, all connected power summed up to 100,031 MVA. The throttling economic growth led to slow housing development, resulting in a small household customer growth rate of 6.37%.

The following table shows the comparison between targets and their implementation efforts based on sales.

Uraian	RKAP 2014 2014 Company Work Plan & Budget	Pencapaian Achievement	Persen Percentage	Description
Penjualan tenaga Listrik (GWh)	**206.841**	198.602	96,02	Power Sales (GWh)
Penambahan Pelanggan	**3.483.900**	3.497.026	100,38	Additional Customers
Penambahan Daya Tersambung (MVA)	**6.510**	6.936	406,54	Additional Connected Power (MVA)

Dari tabel tersebut, tampak bahwa aspek pemasaran yang tidak mencapai target adalah penjualan tenaga listrik. Penyebabnya antara lain : (i) kondisi perekonomian global yang mempengaruhi kegiatan ekonomi nasional sehingga pertambahan rumah baru juga melambat. (ii) adanya pengendalian pertumbuhan untuk daerah-daerah yang produksi tenaga listriknya didominasi oleh bahan bakar minyak(BBM); (iii) adanya penghematan yang dilakukan oleh pelanggan akibat kenaikan tarif tenaga listrik secara bertahap di sepanjang tahun 2014.

Based on the table, it can be observed that power sales did not achieve its marketing target. Causes were: (i) global economic condition which affected national economic activities and resulted in slow new housing growth. (ii) growth control of areas in which their electricity production was dominated by fuel; (iii) customers' saving in electricity usage due to a gradual increase of electricity rate throughout 2014.

Produksi dan Pembelian Tenaga Listrik

Kondisi perekonomian kurang kondusif tidak menghalangi upaya PLN untuk tetap menyeimbangkan peningkatan permintaan tenaga listrik dengan suplai tenaga listrik yang memadai. Hasilnya, produksi tenaga listrik mencapai 228.554 GWh, naik sebesar 5,72% dari tahun sebelumnya.

PLN konsisten menerapkan strategi pengurangan penggunaan energi BBM dan sebaliknya meningkatkan penggunaan sumber energi batubara, gas dan sumber energi terbarukan, untuk menekan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP), sehingga tercipta pola bauran energi yang memberi *benefit* maksimal.

Ditahun 2014, daya listrik dari pembangkit milik sendiri dengan sumber energi BBM berkurang 16,06% dari tahun sebelumnya, sebagai hasil penyelesaian pembangunan beberapa pembangkit skala besar FTP-1 dan beroperasinya pembangkit PLTA. Namun demikian secara keseluruhan produksi listrik dari pembangkit milik sendiri naik 5,99% mencapai 152.853 GWh. Kondisi cuaca tahun 2014 dengan curah hujan memadai serta bertambahnya pasokan listrik dari pembangkit batubara dan gas, mampu mendukung upaya pengurangan konsumsi BBM.

Electricity Production and Procurement

Less conducive economy did not obstruct PLN's efforts in balancing the increasing electricity demand and sufficient electricity supply. As a result, electricity production reached 228.554 GWh and had an increase of 5.72% from that of previous year.

PLN consistently applies a strategy which decreases fuel usage and increases coal, gas, and renewable energy usage in order to reduce the Basic Cost of Electricity Production as well as produce fuel mix that provides maximum benefits.

In 2014, electrical power produced from owned fuel power plant decreased as much as 16.06% from that of previous year. This was the result of completion of several big-scale FTP-1 generators and operating hydropower plants. In spite of it, the overall electricity production from owned plant increased as much as 5.99%, reaching 152,853 GWh. Sufficient precipitation in weather condition in 2014, as well as addition in electricity supply from coal and gas power plants, helped support efforts in decreasing fuel usage.

PLN juga semakin mengintensifkan penggunaan sumber energi baru terbarukan dalam memproduksi daya listrik, baik melalui PLTP maupun penggunaan bahan bakar nabati dan sumber daya bayu dan surya untuk wilayah-wilayah tertentu. Jumlah produksi listrik pembangkit bersumberkan energi baru terbarukan ditahun 2014 adalah sebesar 26,15 GWh dan ditahun 2013 26,67 GWh. PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan proporsi daya dari pembangkit menggunakan sumber energi terbarukan tersebut.

PLN also intensifies the usage of new renewable energy in producing electricity, such as the utilization of geothermal power plant or vegetable substances, wind and solar energy. The total of electricity produced from new renewable source in 2014 of 26.15 GWh and in 2013 of 26.67 GWh. PLN is committed to keep increasing the proportion of power produced from new renewable energy.

Upaya meningkatkan kualitas bauran energi tersebut membuat PLN mampu menekan kenaikan BPP pada kisaran Rp1.424/Kwh, atau hanya naik 6% dari Rp1.339/kWh di tahun 2013.

The effort in improving the quality of fuel mix helped PLN reduce the increase of Basic Cost of Electricity Production to approximately Rp1,424 /KWh, or equivalent to 6% from Rp1,339/kWh in 2013.

Pencapaian produksi listrik dibandingkan target adalah:

The achievement of electricity production compared to its target is as followed:

Uraian	RKAP 2014	Pencapaian Achievement	Persen Percentage	Description
Produksi Tenaga Listrik (GWh)	237.210	228.554	96,35%	Electricity Production (GWh)
Bauran Energi BBM (%)	9,30	11,37	77,72%	Fuel Mix (%)

Kapasitas Terpasang dan Pemeliharaan

Di tahun 2014, PLN berhasil menyelesaikan pembangunan beberapa pembangkit milik sendiri (pembangkit program FTP-1 dan pembangkit reguler). Demikian juga dengan pembangunan beberapa pembangkit swasta dalam skema IPP dan sewa pembangkit. Sehingga secara keseluruhan total kapasitas terpasang seluruh pembangkit naik 12% menjadi sebesar 51.620 MW. Kapasitas pembangkit milik PLN bertambah menjadi 39.257 MW, naik 15% dari 34.205,6 MW di tahun sebelumnya, berkontribusi sebesar 76% dari total pembangkit nasional di tahun 2014.

Installed Capacity and Maintenance

In 2014, PLN succeeded in completing the establishment of several owned plants (FTP-1 plant program and regular plants), as well as several private plants in IPP scheme and plant rent. Therefore, the overall total of installed capacity increased as many as 12% to 51,620 MW. PLN's owned plant capacity had an increase of 15% from 34,205.6 MW last year to 39,257 MW. This figure contributed as much as 76% of total national power plants in 2014.

PLN juga berhasil merealisasikan pekerjaan pemeliharaan berbagai pusat pembangkit, yakni pusat pembangkit area Jawa-Bali sebanyak 22 unit - kapasitas 9.149 MW, Sumatera sebanyak 58 unit - kapasitas 1.956 MW, Indonesia Timur sebanyak 480 unit – kapasitas 480 MW dan pusat pembangkit milik anak usaha total 133 unit – kapasitas 8.617 MW. Pemeliharaan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan unjuk kerja pusat pembangkit, sehingga pasokan listrik dimasa mendatang semakin handal, agar dapat mendukung keberhasilan program bebas pemadaman bergilir karena kekurangan pasokan daya.

PLN also succeeded in conducting maintenance for various central power stations in different areas, which were 22 units with capacity of 9,149 MW in Java-Bali, 58 units with capacity of 1,956 MW in Sumatera, 480 units with capacity of 480 MW in East Indonesia, and 133 units with capacity of 8,617 MW of subsidiaries'. This maintenance is conducted in order to maintain the performance of central power station and increase the reliability of electricity supply in the future which will support the program of rolling blackouts-free due to shortage of power supply.

Inovasi

PLN konsisten merealisasikan program inovasi dengan membangun pembangkit listrik bersumberkan energi baru dan terbarukan, terutama untuk memasok listrik pada area terpencil menggunakan sumber energi yang bervariasi sesuai kondisi setempat, meliputi energi nabati, energi bayu, energi surya, dan energi mikro hidro. PLN mengintensifkan upaya pengembangan pusat pembangkit energi panas bumi di Indonesia yang memiliki potensi terbesar di dunia. Dalam rangka menekan penggunaan BBM, PLN juga semakin intens memanfaatkan teknologi *Compressed Natural Gas* (CNG) sebagai sumber energi alternatif pembangkit *peaker*.

Innovation

PLN consistently implements innovation program by building power plants that require new renewable energy as their sources. This program is especially aimed to provide electricity for remote areas by using various energy sources based on local condition, which include: vegetable energy, wind energy, solar energy, and micro hydro energy. PLN intensifies development in geothermal power plant in Indonesia which has the biggest potency in the world. In order to decrease fuel usage, PLN is getting more intense in making the most of Compressed Natural Gas (CNG) as the alternative energy source of peaker power plant.

PLN juga menerapkan beberapa inovasi dengan dukungan teknologi informasi guna mempercepat distribusi suku cadang, mencatat meter pelanggan, memastikan jadwal pemeliharaan dan sebagainya. PLN konsisten menyelenggarakan Lomba Karya Inovasi yang telah dimulai sejak tahun 1999 guna meningkatkan peran inovasi untuk meningkatkan unjuk kerja Perseroan. Untuk tahun 2014, tercatat ada 240 karya inovasi yang diperlombakan pada tingkat regional. Beberapa karya dari hasil lomba inovasi tersebut kemudian diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan pemberian kompensasi atas setiap penerapan karya lomba inovasi termasuk pengurusan perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

PLN also implements several innovations supported by information technology in order to accelerate spare part distribution, record customers' meter, ensure maintenance schedule, and others. PLN consistently holds Innovation Contest which was begun in 1999 and aims to increase innovation in improving Company's performance. In 2014, there were 240 innovations competed in regional level. Several innovations in the competition were implemented in daily assignments and were granted with compensation, including Intellectual Property Rights.

Layanan dan Keandalan

Upaya meningkatkan kinerja keandalan jaringan transmisi dan distribusi di tahun 2014 menghadapi tantangan yang cukup berat, berupa terbatasnya pasokan gas pada beberapa pembangkit, terutama di Sumatera dan belum terealisasinya beberapa jaringan instalasi pendukung utama serta melonjaknya permintaan pasokan listrik di beberapa daerah. Kondisi tersebut membuat indeks lama gangguan SAIDI *(System Average Interruption Duration Indexed)* maupun indeks frekuensi gangguan SAIFI *(System Average Interruption Frequency Indexed)* belum memenuhi target yang ditetapkan.

Service and Reliability

Efforts in increasing reliability of transmission and distribution network in 2014 faced tough challenges, such as limited gas supply in several power stations, especially Sumatera; several unrealized main supporting installations; as well as an increase in electricity demand in several areas. As a result, SAIDI (System Average Interruption Duration Index) and SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) has not reached the actual target yet.

PLN telah berupaya mengatasi kondisi tersebut dengan merealisasikan perbaikan, yakni mendapatkan jaminan pasokan gas dan memastikan penyelesaian pembangunan berbagai instalasi pembangkit dan jaringan transmisi maupun distribusi. PLN juga tetap mengintensifkan program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pemberantasan penyambungan listrik liar untuk menekan angka susut jaringan.

PLN has put efforts in overcoming those conditions by holding improvements, such as obtaining gas supply guarantee and ensuring the completion of various power plant installations as well as transmission and distribution networks. PLN keeps intensifying Electricity Use Control Program (P2TL), Street Lighting Control (PJU), and elimination of illegal electricity connections to reduce network losses.

Kinerja SAIDI/SAIFI dan susut jaringan dibandingkan target adalah sebagai berikut:

The following table describes SAIDI / SAIFI and network losses, compared to the actual target.

Uraian	RKAP 2014 2014 Company Work Plan & Budget	Pencapaian Achievement	Persen Percentage	Description
SAIDI (menit/pelanggan)	230	348	48,5	SAIDI (Minute(S)/Customer)
SAIFI (kali/pelanggan)	4,20	5,58	67,14	SAIFI (Time(S)/Customer)
Susut Jaringan (%)	9,00	9,71	92,08	Network Losses (%)
- Susut Transmisi (%)	2,34	2,37	98,53	- Transmission Losses (%)
- Susut Distribusi (%)	6,83	7,52	89,82	- Distribution Losses (%)

Perbaikan Proses Bisnis

PLN mencatatkan perkembangan menggembirakan dalam merealisasikan program perbaikan proses bisnis dengan berlangsungnya implementasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) tahap ke-5, yakni untuk unit-unit pendukung di seluruh wilayah operasi. Penyelesaian implementasi ERP secara total akan membuat operasional PLN semakin efisien.

Business Process Improvement

PLN recorded a proud development in implementing business process improvement due to the 5th phase of Enterprise Resource Planning (ERP) implementation in supporting units in all operational areas. The completion of ERP implementation will make PLN's operations more efficient.

Dalam kaitan perbaikan proses bisnis berbasis TI ini, PLN juga telah menyelesaikan proses kajian terhadap IT Master Plan, agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini dan mengantisipasi perkembangan TI ke depan. PLN juga berhasil menyelesaikan program pilot proyek *Enterprise Asset Management* (EAM) Distribusi yang diterapkan di Bali. Selanjutnya hasil implementasi tersebut akan dikaji untuk diterapkan di seluruh unit kerja lainnya.

In improving the IT-based business process, PLN already established assessment process for IT Master Plan which aims to adjust the system with current information technology development and anticipate IT development in the future. In addition, PLN successfully completed pilot project of Enterprise Asset Management (EAM) Distribution which was applied in Bali. The implementation result is then assessed and to be applied in all work units.

Tahun 2014 juga ditandai dengan dimulainya implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran (SIP2A). Operasional sistem ini memberi manfaat berupa Sistem Anggaran dan Akuntansi Konsolidasi yang terintegrasi dengan proses *planning, budgeting, controlling* dan *reporting* secara terpusat sehingga proses konsolidasi laporan keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kinerja Keuangan

Berbagai upaya yang dilakukan tersebut membuat kinerja keuangan PLN menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2014, upaya perbaikan operasional pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi disertai upaya pengendalian Biaya Pokok Penyediaan tenaga listrik (BPP) dan peningkatan efisiensi pengelolaan membuat laba usaha PLN meningkat substansial.

Nilai Pendapatan

Nilai pendapatan penjualan tenaga listrik di tahun 2014 naik 21,6% menjadi Rp186,63 triliun dari tahun 2013, terutama disebabkan oleh pertumbuhan energi listrik terjual sebesar 5,9% sebesar 198.602 GWh dan adanya penyesuaian tarif tenaga listrik secara bertahap dari rata-rata Rp818,41/kWh menjadi Rp922/kWh.

Namun demikian harga jual rata-rata tarif listrik tersebut masih berada dibawah BPP tahun 2014 yang sebesar Rp1.424/kWh, sehingga PLN masih membutuhkan subsidi senilai Rp99,3 triliun, naik 4% dari nilai subsidi tahun sebelumnya. Disamping itu, PLN memperoleh pendapatan jasa penyambungan dan pendapatan lain-lain, sehingga total pendapatan mencapai Rp292,7 triliun, naik 11,80% dari nilai tahun sebelumnya, sebesar Rp261,8 triliun.

Upaya meningkatkan kualitas bauran energi yang dilakukan secara konsisten, namun demikian karena tuntutan agar tidak terjadi pemadaman membuat volume penggunaan BBM meningkat, sehingga komponen biaya BBM naik 7,83% menjadi Rp73,17 triliun dari nilai sebesar Rp68,36 triliun ditahun 2013. Total biaya bahan bakar meningkat 15,48% mencapai Rp170,49 triliun disamping juga karena adanya penambahan kapasitas pembangkit. Pengendalian komponen-komponen biaya lain yang dilaksanakan melalui inisiatif CRMP membuat total beban usaha hanya meningkat 11,8% menjadi sebesar Rp246,91 triliun. Hasilnya, PLN mencatatkan peningkatan laba usaha hingga sebesar 11,91% menjadi Rp45,82 triliun.

Melemahnya neraca perdagangan membuat nilai tukar rupiah masih terdepresiasi sebesar 2,0% (kurs tengah akhir tahun 2014), namun PLN membukukan laba selisih kurs sebesar Rp1,32 triliun naik dari rugi selisih kurs tahun 2013 sebesar Rp48,10 triliun. PLN juga harus membukukan peningkatan nilai riil pembayaran kewajiban berdenominasi valas sebesar Rp35,97 triliun, naik 19,32% dari Rp30,15 triliun di tahun 2013. Total beban lain-lain PLN di tahun 2014, dengan demikian turun 60,5% menjadi sebesar Rp29,9 triliun.

Peningkatan laba usaha PLN yang substansial mampu menutup kenaikan beban keuangan dan rugi selisih kurs tersebut, sehingga PLN mencatatkan kenaikan laba setelah pajak 155,25% sebesar Rp11,74 triliun. Dengan demikian, PLN berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang baik, seimbang dengan perbaikan kinerja operasional.

2014 was a year when implementation of Budget Planning and Control Information System was started. This operational system provides a benefit in which Budget and Consolidation Accounting System is centrally integrated with planning, budgeting, controlling, and reporting so that financial report consolidations can run effectively and efficiently.

Financial Performance

Various efforts which were conducted help improve PLN's financial performance. In 2014, improvement efforts of operational power plants, transmission and distribution networks; control in Basic Cost of Electricity Production; and increase in management efficiency made PLN's business profit rise substantially.

Revenues

Revenues from electricity sales in 2014 increased as much as 21.6% to Rp186.63 trillions in 2013 which was caused by 5.9% or equivalent to 198,602 GWh electricity sales growth and gradual adjustment of electricity basic tariff from an average of Rp818.41/kWh to Rp922 /kWh.

In spite of it, the position of average electricity price was still under 2014 Basic Cost of Electricity Production, which was Rp1,424 /kWh, resulting in Rp99.3 trillions subsidy needs which increased as much as 4% of subsidies in previous year. Moreover, PLN gained revenues from connection service and other incomes which accumulate the revenues to Rp292.7 trillions or equivalent to 11.80% increase of that of last year, which was Rp261.8 trillions.

An effort to improve the quality of the fuel mix is done consistently, however, because of the demands in order to avoid blackouts, it makes the volume of fuel usage increased, so that the fuel cost component rose 7.83% to Rp73.17 trillion from value for Rp68,36 trillion in 2013. In spite of it, fuel cost rose as much as 15.48% reaching Rp170.49 trillions due to power plants capacity addition. Other cost components were controlled by conducting CRMP initiative which led to an increase of 11.8% in operating expenses to Rp246.91 trillions. As a result, PLN recorded an increase of 11,91% business profit to Rp45.82 trillions.

The weakening trade balance forced Rupiah exchange rate to be depreciated as much as 2.0% (middle rate in the end of 2014) which led to Rp1.32 trillions profit due to exchange rate gap in 2013, which was amounted to Rp48.10 trillions. In addition, PLN had to record an increase of 19.32% of actual value in payment for debt in foreign currency denomination from Rp30.15 trillion in 2013 to Rp35.97 trillion. PLN's total others operating in 2014, therefore, decreased 60.5% to Rp29.9 trillion.

The substantial increase of PLN's business profit was able to cover the increase of financial expenses and loss due to exchange rate which led PLN to record an increase of 155.25% in after-tax profit or equivalent to Rp11,74 trillion. Therefore, PLN has successfully recorded a good financial performance which was balanced with operational performance improvement.

Seluruh realisasi hasil kinerja tahun 2014 membuat pencapaian penilaian tingkat kesehatan PLN di tahun 2014 mendapatkan nilai sebesar 88,04 dengan kategori SEHAT - AA.

All performances in 2014 resulted in a score of 88.04, categorized as HEALTHY – AA in PLN's health level evaluation.

Kebijakan Tarif

Sesuai dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.09 Tahun 2014, dan No. 31 Tahun 2014, Tentang tarif tenaga listrik, maka tarif tenaga listrik baru diberlakukan secara bertahap untuk beberapa golongan tarif tertentu dengan substansi pokok penyesuaian tarif sesuai tarif keekonomian dan *tarif adjustment*.

Tariff Policy

Based on Regulation of Indonesian Minister of Energy and Mineral Resources No. 09 in 2014 and No. 31 in 2014, about Electricity Tariff, new provision regarding electricity tariff has been applied. In this provision, several tariff classes will be applied with tariff which is based on economic cost. This economic cost is at least equal to Basic Cost of Electricity Production (BPP) and a gradual increase in tariff is applied.

Dengan ketentuan tersebut PLN ditargetkan akan memiliki kemampuan finansial yang semakin baik guna mendukung realisasi pembangunan stasiun pembangkit dalam rangka menambah daya dan meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional, selain mengurangi besaran subsidi listrik. Kebijakan tersebut telah berhasil membuat pendapatan penjualan listrik meningkat tajam, sehingga PLN masuk kedalam kelompok 500 perusahaan dengan pendapatan terbesar secara global menurut Fortune Global 500.

As a result of this provision, PLN is targeted to have better financial ability to support the establishment of power station which aims to add more power and increase national electrification ratio, as well as decrease electricity subsidies. This policy has succeeded in producing a sharp increase in revenues from electricity sales which leads PLN to become the top 500 biggest earning companies based on Fortune Global 500.

Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDM

PLN semakin mengintensifkan penerapan kebijakan pengembangan SDM berbasis kinerja untuk mendukung peningkatan kompetensi dan produktifitas seluruh jajaran. Di tahun 2014 PLN telah menerapkan penilaian *key performance indicator* (KPI) individu dan kelompok secara *on-line*. Untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas tersebut, PLN mengintensifkan penerapan program *knowledge management* dalam proses bisnis, menyempurnakan implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) dan menerapkan Program *Strengthening Alignment* pada Sistem Manajemen Kinerja Pegawai dalam rangka penyelarasan Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu. PLN juga mulai menyusun Formulasi Baru untuk mengukur dan meningkatkan Produktivitas Pegawai dengan mengaitkan unsur demografi, geografis dan lain - lain.

HR Management Quality Improvement

PLN is getting more intensive in applying performance-based HR development to support competency improvement and productivity of all company levels. In 2014, PLN implemented online key performance indicator evaluation for individuals and groups. In order to increase productivity, PLN intensively applies knowledge management program in business processes, enhances the implementation of Competence-based Human Resource Management, and implements Strengthening Alignment Program on Employees Performance Management System to adjust Organization Performance with Individual Performance. PLN has also started arranging New Formulation to measure and increase Employees Productivity by considering demographics, geography, and other components.

Dalam kaitan pengembangan kompetensi tersebut, pada tahun 2014, PLN melakukan kajian mengenai *Strategic Specialist Pool* (SSP) sebagai kebutuhan Perusahaan untuk mempertahankan kompetensi-kompetensi spesifik dalam menghadapi persaingan global. Melaksanakan Program *Talent Pool Executive Management* bagi 103 orang level Manajer Atas bekerjasama dengan lembaga pengembangan manajemen yang kompeten. PLN juga semakin meningkatkan peran *Corporate University* sebagai sarana pelatihan dan peningkatan pengetahuan pegawai PLN.

In developing competencies, PLN conducted an assessment about Strategic Specialist Pool (SSP) in 2014 as Company's needs to maintain specific competencies in facing global competition. Moreover, PLN, together with competent management development institution, conducted Talent Pool Executive Management which was participated by 103 employees from top management level. PLN also intensified Corporate University's role in providing training and knowledge for PLN employees.

PLN merealisasikan program penilaian kinerja, program Diklat Penjenjangan, pelaksanaan uji Portofolio Kompetensi, pelaksanaan *fit and proper test*, penilaian Pegawai Tugas Karya dan penilaian terhadap pegawai penerima penghargaan beasiswa S2 di dalam dan luar negeri sebagai bagian dari realisasi penilaian kinerja berbasis kompetensi.

As a part of implementation of competence-based performance evaluation, PLN implements performance-based assessment programs, Career Path education & training program, Competency Portfolio test, fit and proper test, Work Task Employee evaluation, and an evaluation of employees receiving both national and international S2 (master degree) scholarships.

Pada tahun 2014, PLN merealisasikan program rekrutmen terhadap 1.432 orang calon pegawai baru dengan latar belakang pendidikan dari jenjang SLTA sampai S-1, dalam rangka mengantisipasi pengembangan usaha dimasa mendatang.

PLN konsisten meningkatkan keterikatan *(engagement)* pegawai, melalui penggunaan ECC *(Employee Care Center)*, pelaksanaan EES *(Employee Engagement Survey)* dan penyusunan Juklak kinerja EES. PLN menindaklanjuti hasil survey EES tersebut sebagai nara sumber dalam meningkatkan kondisi lingkungan kerja agar setara dengan korporasi berkelas dunia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan SDM, PLN berupaya menyelaraskan pemahaman pengelolaan data kepegawaian di seluruh unit PLN untuk meningkatkan akurasi data yang berguna bagi pengambilan keputusan-keputusan strategis. Selain itu PLN merancang dan mengimplementasikan *software talent pool* sebagai bagian dari penerapan Sistem Informasi SDM berbasis TI.

Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, PLN sedang melaksanakan berbagai program dan kegiatan, mencakup:

1. Pemutakhiran Buku Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris *(Board Manual)*.
2. Pemutakhiran Pedoman *Good Corporate Governance* PT PLN (Persero).
3. Melanjutkan kerjasama dengan Transparansi Internasional Indonesia untuk meningkatkan keterbukaan penyampaian penyelenggaraan bisnis PLN.
4. Melanjutkan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan responsibilitas penyelenggaraan kegiatan operasional dan pengelolaan keuangan perusahaan.
5. Kampanye budaya integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional.
6. Kampanye PLN sebagai wilayah Bebas Korupsi dan Gratifikasi terhadap seluruh pemangku kepentingan.
7. Penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan kekuasaan yang berindikasi korupsi.
8. Sosialisasi *Whistleblowing System* di seluruh jajaran PLN dan mitra kerja PLN.

Selain itu, PLN kembali melaksanakan *assessment* penerapan GCG untuk tahun 2014 sesuai PER-01/MBU/2011 dan mendapatkan capaian score 84,62 dengan klasifikasi 'Baik'. Pelaksanaan *assessment* diikuti dengan tindak lanjut atas berbagai rekomendasi bagi perbaikan kualitas penerapan praktik terbaik GCG di tahun-tahun mendatang.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

PLN merealisasikan program tanggung jawab sosial perusahaan melalui dua skema pelaksanaan kegiatan, yakni PKBL dan Program CSR. Program PKBL dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana telah diubah dengan

In 2014, PLN recruited 1,432 employee candidates with their education background ranging from Senior High School to S-1 (bachelor degree) in order to anticipate business development in the future.

PLN consistently improves employees' engagement by providing ECC (Employee Care Center), conducting EES (Employee Engagement Survey) and preparing EES Guidelines. PLN uses the result of EES survey as a source to improve work environment to become a world-class corporate environment.

In order to increase effectiveness and efficiency in managing HR, PLN puts effort in aligning the understanding of employee data management in all PLN units to increase data accuracy which is useful for strategic decision-making. Furthermore, PLN plans and implements talent pool software as one part of IT-based HR Information System implementation.

Good Corporate Governance Quality Improvement

In order to improve the quality of Good Corporate Governance, PLN is currently holding various programs and activities which include:

1. Updating Board of Directors and Board of Commissioners Manuals (Board Manual).
2. Updating PT PLN (Persero)'s Good Corporate Governance Guidelines.
3. Continuing the cooperation with Indonesian International Transparency to increase transparency in communicating PLN's business.
4. Continuing the cooperation with Supreme Audit Board and Corruption Eradication Commission to increase accountability and responsibility in running operational activities and managing Company's finances.
5. Campaigning about integrity culture in conducting operational tasks.
6. Campaigning about PLN as an area of Free Corruption and Gratification to all stakeholders.
7. Responding strictly when facing each code of conduct violation and power misuse which indicates corruption.
8. Socializing Whistleblowing System to all PLN's employees in every level and business partners.

In addition, PLN reapplied assessment on GCG implementation in 2014 which was based on PER-01/MBU/2011 and gained a score of 84,62, categorized as 'Good'. This assessment was followed by follow-up actions based on recommendations given to improve the quality of GCG best practices in upcoming years.

Company's Social and Environmental Responsibilities

PLN conducts social responsibilities based on two activity schemes, namely Partnership and Environmental Care (PKBL) and CSR Program. PKBL is conducted based on SOE Minister Regulation No: PER-05/MBU/2007 about SOE Partnership Program with small businesses and Environmental Development Programs, which was amended by SOE Minister Regulation No. Per-20/MBU/2012

Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012. Sesuai ketentuan terakhir PLN menambahkan 1 ruang lingkup bantuan Program Bina Lingkungan yaitu bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

PLN juga mendasarkan kegiatan pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 366.K/DIR/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan program Bina Lingkungan/Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L).

PLN mengacu pada ketentuan Kementerian BUMN dalam surat No.S-92/D5.MBU/2013 untuk pelaksanaan Program Kemitraan. PLN juga mengacu pada Surat Kementerian BUMN no.S-119/D5.MBU/2013 tanggal 29 April 2013 yang menegaskan dihapuskannya alokasi dana Program Kemitraan dari laba BUMN mulai tahun buku 2012. Penyaluran dana Kemitraan hanya berasal dari dana bergulir, hasil penagihan penyaluran Program Kemitraan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014, PLN menyalurkan dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp2,2 miliar untuk kegiatan dibidang bencana alam, pembangunan sarana/prasarana pendidikan, pendidikan dan pelatihan, sarana ibadah, peningkatan kesehatan, pelestarian alam serta pengentasan kemiskinan.

Sedangkan untuk kegiatan CSR, PLN mengalokasikan dana sebesar Rp60 miliar dan telah menyalurkan dana senilai Rp43,19 miliar untuk enam bidang kegiatan, yakni: pelestarian alam sebesar Rp4,2 miliar, Sarana Fasilitas Umum sebesar Rp15,24 miliar, Sarana Ibadah senilai Rp4,79 miliar, Bencana Alam sebesar Rp1,45 juta, Peningkatan Kesehatan sebesar Rp2,7 miliar serta dana sebesar Rp14,43 juta untuk Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan.

dated on 27 December 2012. Based on the last provision, PLN added 1 scope of Environmental Care Program, which was societal aid to alleviate poverty.

PLN also bases activities on PT PLN's (Persero) Board of Directors Decree No. 366.K/DIR/2007 dated on 28 December 2007 about the implementation of SOE Partnership with Small Business and Partnership and Community Development Program/Environmental Empowerment Participation Program (PKBL/P3L).

PLN refers to provisions in SOE Ministry Letter No. S-92/D5.MBU/2013 about Partnership Programs. PLN also refers to SOE Ministry Letter no. S-119/D5.MBU/2013 dated on 29 April 2013 which states the elimination of Partnership Program fund allocation from SOE profit starting from 2012. Partnership fund disbursement is only taken from revolving fund which is the accumulation of Partnership disbursement billing of previous years.

In 2014, PLN provided as much as Rp2,2 billions for Environmental Care Program, especially activities regarding natural disasters, establishment of education infrastructures, education and training, worship facilities, health improvement, nature conservation, as well as poverty alleviation.

Meanwhile, PLN allocated as much as Rp60 billions for CSR activities and as much as Rp43.19 billions for six activity sectors, which are: Rp4,2 billion for nature conservation, Rp15.24 billions for Public Facilities, Rp4.79 billions for Worship Facilities, Rp1.45 millions for natural disasters, Rp2.7 billions for Health Improvement, and Rp14.43 millions for Education and Training Improvement.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada tanggal 23 Desember 2014, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No: SK-272/MBU/12/2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota - Anggota Direksi PT PLN (Persero) telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi, dan ditindaklanjuti dengan penetapan deskripsi tugas masing-masing sebagai berikut:

Changes in Composition of Board of Directors

On 23 December 2014, based on SOE State Minister Decree No: SK-272/MBU/12/2014, dated on 23 December 2014 about PT PLN's (Persero) Board of Directors Dismissal and Appointment, there were changes in the composition of board of directors with each job description, as follow:

Nama Name	Jabatan/Tugas Title/Task
Sofyan Basir	Direktur Utama (merangkap SDM & Umum) President Director (Acting Human Resources and General Affairs)
Sarwono Sudarto	Direktur (Keuangan) Director (Finance)
Nasri Sebayang	Direktur (Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan) Director (Construction and New Renewable Energy)
Supangat Iwan Santoso	Direktur (Operasi Jawa Bali) Director (Java - Bali Operations)
Amir Rosidin	Direktur (Operasi Luar Jawa Bali) Director (Outside Java - Bali Operations)
Nicke Widyawati	Direktur (Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan) Director (Commerce, Risk Management and Compliance)
Amin Subekti	Direktur (Pengadaan dan Energi Primer) Director (Procurement and Primary Energy)
Murtaqi Syamsuddin	Direktur (Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi) Director (Planning and Development Affiliates)

Prospek dan Strategi 2015

Berdasarkan RUPTL 2013-2022 yang dimodifikasi sesuai proposal *Service Level Agreement (SLA),* PLN telah mencanangkan serangkaian strategi pengembangan jangka pendek dan menentukan program-program prioritas. Strategi yang akan diterapkan pada dasarnya sama dengan strategi pengembangan jangka pendek yang diterapkan ditahun 2014, namun disertai beberapa penyesuaian dengan prakondisi yang berlangsung di tahun 2015. Sedangkan untuk program prioritas, PLN mengacu pada Arah Strategis 2013-2022 yang kemudian dibagi dalam dua periode, yakni yaitu masa tumbuh *(growth)* pada periode 2013-2017, dan masa ekselen *(excellence)* pada periode 2018-2022.

Sesuai dengan tujuan strategis untuk periode 2013-2017, PLN menerapkan program prioritas yang bertumpu pada pemenuhan kebutuhan listrik melalui penyelesaian seluruh pembangunan pembangkit FTP-I, penggunaan sumber energi surya dan bayu di daerah terpencil untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, mengembangkan sumber energi baru terbarukan (EBT) dan konservasi energi, memulai pembangunan interkoneksi Jawa-Sumatera, merealisasikan pembangunan PLTU besar mulut tambang di Sumatera, meningkatkan penggunaan pembangkit *Peaker* berteknologi *compressed natural gas* (CNG), PLTGB dan Biomass, menggantikan PLTD BBM, peningkatan efisiensi penyaluran daya listrik dan meningkatkan kualitas bauran energi primer untuk mengelola BPP untuk mengurangi subsidi listrik.

2015 Prospects and Strategies

Based on 2013-2022 Electricity Power Supply Business Plan (RUPTL) which has been adjusted with Service Level Agreement (SLA), PLN plans a series of short-term development strategies and decides priority programs. The strategies that will be applied are basically similar to short-term development strategy applied in 2014, but there are several adjustments with preconditions happening in 2015. Meanwhile, PLN refers to 2013-2022 long-term development plan regarding priority program which is divided into two periods, namely growth period in 2013-2017 and excellence period in 2018-2022.

Based on strategic targets in 2013-2017, PLN implements priority programs which aim to fulfill electricity needs by completing all construction of FTP-1 plant, using solar and wind energy as sources in remote area to increase electrification ratio, developing new renewable energy and conserving energy, starting the construction of Java-Sumatra interconnection, conducting the construction of large steam power plant in mine mouth in Sumatra, increasing the use of Peaker power plant with compressed natural gas, coal- and gas- fired power plant and Biomass technology to replace diesel power plants, increasing efficiency of electricity distribution, and increasing the quality of primary fuel mix to manage Basic Cost of Electricity Production and decrease electricity subsidies.

Penutup

Tahun 2014 masih merupakan tahun yang berat bagi seluruh pelaku ekonomi, termasuk PLN. Keberhasilan PLN mencatatkan berbagai kemajuan dibidang operasional, meningkatkan daya terpasang, menaikkan rasio elektrifikasi dan menerapkan berbagai inovasi untuk mendukung efisiensi operasional dan memperbaiki kinerja di tahun 2014 serta menjadikan PLN memiliki landasan yang semakin kuat bagi pengembangan usaha dimasa mendatang merupakan prestasi yang layak diapresiasi. Semakin kuatnya landasan tersebut membuat PLN siap mencatatkan level kinerja baru dimasa mendatang.

Direksi meyakini kerja keras dan kebersamaan seluruh jajaran insan PLN yang semakin padu akan membuat PLN mampu mengatasi setiap tantangan dan menciptakan level kinerja baru tersebut, sebagaimana telah ditunjukkan melalui raihan berbagai prestasi selama ini. Untuk itu, mewakili Direksi, kami memberikan penghargaan dan menghimbau agar seluruh pegawai tetap meningkatkan dedikasi dan loyalitas dalam berkarya dan bekerja untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan negara.

Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam atas dukungan dan arahan dari Dewan Komisaris beserta seluruh jajarannya, sehingga seluruh program kerja PLN dapat terlaksana dengan baik. Kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya, kami juga mengucapkan terimakasih atas sumbang saran perbaikan dan kerja sama yang terjalin dengan semakin baik, semakin menjunjung tinggi transparansi untuk memberi manfaat terbaik dalam merealisasikan seluruh kerjasama yang berkelanjutan.

Menghadapi tahun 2015, kami, jajaran Direksi yang baru, bersama-sama dengan seluruh jajaran manajemen dan pegawai PLN bertekad untuk terus mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai untuk mendukung pembangunan negeri, menjunjung tinggi praktek terbaik Tata Kelola Perusahaan, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan serta memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan.

Closing

2014 was a tough year for all economic actors, including PLN. PLN's successes in bringing various advancement in operations, increase in installed power and electrification ratio, as well as implementation of various innovations to support operational efficiency, improve performance in 2014, and make PLN possess a stronger foundation to improve business in the future are achievements that should be appreciated. Stronger foundation will help PLN prepare new performance record in the future.

Board of Directors believe that hard work and togetherness of all PLN's staffs help PLN solve every challenge and create new performance level which are proved with various achievements gained all this time. Therefore, on behalf of Board of Directors, we give appreciation and encourage all employees to keep increasing dedication and loyalty in working to give the best service to communities and country.

We send the deepest gratitude for support and direction provided by Board of Commissioners and all of its levels which help PLN's work programs run well. To all other stakeholders, we would like to send our gratitude for improvement recommendation and hard work which are established in a better way and transparency to bring best benefits in holding all sustainable cooperation.

Welcoming 2015, we, all of new Board of Directors, together with all management levels and PLN's employees, commit to keep developing sufficient electrical infrastructures in order to support national development, uphold Good Corporate Governance, provide the best service to customers, as well as fulfill the expectation of all stakeholders.

Atas nama Direksi PT PLN (Persero)

On behalf of PT PLN (Persero) Board of Directors

SOFYAN BASIR

Direktur Utama

President Director

03 Profil Perusahaan

Company Profile

Nama dan Alamat
Name and Address

Sekilas Tentang PLN
PLN in Brief

Tonggak Sejarah
Milestone

Bidang Usaha
Line of Business

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Luhur Perusahaan
Vision, Mission and Company's Core Values

Kepemilikan Saham
Shareholders Ownership

Struktur Grup Perusahaan
Business Structure and Subsidiary

Segmentasi Geografis
Geographical Segmentation

Struktur Organisasi
Organizational Structure

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal
Corporate Institutional and Professional Support in Capital Market

Memenuhi kebutuhan listrik untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sesuai perkembangan tingkat kebutuhan dengan kinerja layanan dan keandalan jaringan yang semakin mendekati level korporasi sejenis kelas dunia.

Fulfilling the demand of electricity for all segments of society in the whole region of Indonesia with service performance and network reliability that are equal to the standard of world class companies.

Nama dan Alamat

Name and Address

Nama Company Name	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Bidang Usaha Business Line	Pembangkitan, Distribusi, Transmisi dan Jasa lain terkait kelistrikan. Generation, Distribution, Transmission and other electricity related Services.
Kepemilikan Ownership	100% Pemerintah Indonesia 100% by the Government of Indonesia
Tanggal Pendirian Date of Establishment	1 Januari 1961, dengan nama Jawatan Listrik dan Gas dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. 1 January 1961, under the name of Electricity and Gas Bureau under the Department of Public Works and Power.
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	1. Peraturan Pemerintah No1/S.D. tanggal 27 Oktober 1945 berdiri sebagai Jawatan Listrik dan Gas, 2. Peraturan Pemerintah No 67 tahun 1961, diganti sebagai Perusahaan Negara, disebut sebagai Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara. 3. Peraturan Pemerintah no 19 tahun 1965, dibentuk sebagai Perusahaan Listrik Negara. 4. Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1972, tanggal 3 Juni 1972, ditegaskan menjadi Perum Perusahaan Listrik Negara. 5. Akta 169, 30 Juli 1994 dari Sutjipto, Notaris, Perum PLN dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. PLN (Persero). 1. Government Regulation No. 1/S.D. dated 27 October 1945 established as Electricity and Gas Bureau, 2. Government Regulation No 67 of 1961, renamed BPU-PLN (Board of General Administration of the State Electricity Company). 3. Government Regulation No. 19 of 1965, established as State Electricity Company. 4. Government Regulation No. 18 of 1972, dated 3 June 1972, enacted as a General State-owned Electricity Company. 5. Deed 169, 30 July 1994 by Sutjipto, Notary, Public Company PLN was changed to Limited Company with the name PT PLN (Persero).
Modal Dasar Authorized Capital	Rp63.000,00 miliar billion
Modal ditempatkan dan disetor penuh Subscribed and Paid-up Capital	Rp46.197,38 miliar billion
Jumlah Tenaga Kerja per 2014 Number of workers as of 2014	48.068 orang personel

Kantor Pusat Head Office
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel. +62 21 7251234, 7250550, 7261122
Fax. +62 21 7221330
Website: www.pln.co.id.

Alamat Kontak Contact Center
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Tel. +62 21 725 1234 ext 4000
Fax. +62 21 722 2328
Email: adi.supriono@pln.co.id
Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia

Sekilas Tentang PLN
PLN in Brief

Perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia bermula sejak akhir abad ke-19, melalui pembangunan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri di beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan perkebunan teh. Hingga kemudian antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang.

Seiring dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, di akhir tahun 1945, para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas bersama-sama dengan Pimpinan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno kemudian membentuk Jawatan Listrik dan Gas, yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik saat itu adalah sebesar 157,5 MW. Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan listrik, gas dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965 BPU-PLN dibubarkan, diikuti pembentukan 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

Tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara, bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Tahun 1994 Pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik. PLN kemudian beralih menjadi Perusahaan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2009, PLN bukan lagi sebagai PKUK namun sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Total daya pembangkit milik PLN yang dikelola sampai akhir tahun 2014 telah semakin berkembang menjadi 39.257 MW.

The development of electricity in Indonesia started in late 19th century. Its started by the development of power plant for Dutch companies specifically the sugar mills and tea plantation companies. Between 1942 and 1945, during the world war II, the management of the companies was transferred to the Japanese.

As Japan was defeated in World War II in the late 1945, the youth and the electricity workers formed a delegation called Electricity and Gas Laborers/Employees and together with the leaders of the National Committee of Indonesia (KNI), they met President Soekarno to hand over the companies to the government of Republic of Indonesia.

On 27th of October 1945, President Soekarno established the Electricity and Gas Bureau, under the Public Works and Energy Department, which owned 157.5 MW capacity of power generator. On 1st of January 1961, the Electricity and Gas Bureau was renamed BPU-PLN (Board of General Administration of the State Electricity Company), its main business is in electricity supply, gas and kokas (a type of fuel derived from the remains of coal). On 1st of January 1965 BPU-PLN was divided into two (2) state-owned enterprises: "The State Electricity Company (PLN)" to manage electricity power and "The National Gas Company (PGN)" to manage gas.

In 1972, stipulated in Government Regulation No.17, the of the State Electricity Company (PLN) was renamed General State-Owned Electricity which acted as Authorized Agency for Electrical Power Business (PKUK). Its duty is to provide electricity to fulfill the public needs. In 1994, the Government gave opportunities to the private sector to get involved in electricity supply business. Later, PLN become a Limited Company (PT) as well as PKUK in providing electricity for public use.

With the issuance of Law No. 30/2009, PLN no longer acted as authorized agency in the electrical power business (PKUK), but as the State Owned Enterprises (SOE) called PT PLN (Persero) and its main business is providing and supplying electricity to meet public needs. Total capacity of PT PLN's power plants until the end of 2014 had grown to 39,257 MW.

Tonggak Sejarah
Milestone

AKHIR ABAD 19
Perusahaan-perusahaan Belanda di bidang Pabrik Gula dan Perkebunan Teh membangun pembangkit listrik untuk keperluan sendiri.

END OF 19th CENTURY
Dutch Companies operating in sugar mills and tea plantations built power plant to fulfill their own needs.

01

1942-1945
Seluruh perusahaan Penyedia Tenaga Listrik eks Belanda diambil alih Jepang.

1942-1945
All those Dutch's companies and their electrical power suppliers were taken over by the Japanese.

02

27 OKTOBER 1945
Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

OCTOBER 27, 1945
President Soekarno established Electricity and Gas Bureau under the Public Works and Energy Department of the Republic of Indonesia.

03

1 JANUARI 1961
Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan listrik, gas dan kokas.

JANUARY 1, 1961
The Electricity and Gas Bureau was renamed BPU-PLN (Board of Public Administration of the State Electricity Company) and the main business in the electricity supply, gas and kokas.

04

1 JANUARI 1965
BPU-PLN dibubarkan, dibentuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

JANUARY 1, 1965
BPU-PLN was divided into two (2) state-owned enterprises, consists of: "The State Electricity Company (PLN)" to manage electric power and "The National Gas Company (PGN)" to manage gas.

05

1970
Status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) sesuai ketetapan Peraturan Pemerintah no.30 tahun 1970.

1970
Company status was changed to Public Company (Perum) pursuant to Government Regulation No. 30/1970.

06

1972
Status PLN berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara dan bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

1972
PLN's status was changed to Public State-Owned Electricity Company and acted as Authorized Agency for Electrical Power Business (PKUK), the main duty is to provide electricity for the public.

07

1992
Tahun pertama mendapatkan dana investasi dari pasar modal domestik, melalui penerbitan Obligasi PLN I.

1992
For the First time PLN gathered funds from domestic capital market, through the issuance of PLN Bonds I.

08

2013

PLN mengoperasikan *Compressed Natural Gas* (CNG) terbesar di dunia sebagai bahan bakar substitusi BBM untuk memenuhi kebutuhan pembangkit beban puncak *(peaker)*.

2013

PLN operated the biggest Compressed Natural Gas (CNG) in the world. CNG power plant was used as a substitution of FUEL power plant which is specially operated at the PEAK Burden (peaker) hour.

15

2011

Pemerintah menyerahkan saham BUMN PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) kepada PT PLN (Persero) pada tanggal 5 Agustus 2011 dan menjadi anak perusahaan PT PLN (Persero).

2011

The Government of Indonesia as the owner of a State Owned Enterprise namely PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (PT BAG) reclassified PT BAG to become a subsidiary of PT PLN (Persero). PT BAG is utilized as the marine transporter of coal from the coal mining to PLN's power plant site.

14

2010

Sesuai Peraturan Presiden No.4. tahun 2010, PLN ditugasi untuk membangun berbagai PLTU berbahan bakar batubara, gas maupun panas bumi sebesar 10.000 MW tahap kedua (FTP II).

2010

Pursuant to President Regulation No. 4/2010, PLN was assigned to to build coal-fired steam power plants with a total capacity of 10,000 MW for the second phase (FTP II).

13

2009

Undang-undang No.30 tahun 2009 disahkan, PLN bukan lagi sebagai PKUK, namun beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

2009

Law No. 30/2009 was ratified, PLN no longer being a PKUK, but rather operating as a State-Owned Enterprise (SOE) and assigned to supply electrical power to fulfill public needs.

12

2006

Sesuai Peraturan Presiden no.71 tahun 2006, PLN ditugasi untuk membangun berbagai PLTU berbahan bakar batubara sebesar 10.000 MW tahap pertama (FTP I).

2006

Pursuant to President Regulation No. 71/2006, PLN was assigned to build coal-fired steam power plants with a total capacity of 10,000 Mw for the first phase (FTP I).

11

1994

Status badan hukum berubah menjadi Perseroan Terbatas, sesuai Akta No.169 30 Juli 1994 dari Sutjipto S.H., Notaris, Jakarta.

1994

The legal entity of PLN's status was changed to Limited Company, accordance to Deed No.169 dated July 30, 1994 by Sutjipto S.H., Notary, in Jakarta.

09

2005

PLN memulai program Transformasi menjadi Perusahaan Penyedia dan Penyalur Listrik Kelas Dunia.

2005

Started from year 2005, PLN launched a Transformation program to become world-class electricity supplying and distributing company.

10

Bidang Usaha
Line of Business

Sesuai UU No.30/2009 serta Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha PLN, adalah:

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup:
   - Pembangkitan tenaga listrik.
   - Penyaluran tenaga listrik.
   - Distribusi tenaga listrik.
   - Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.
   - Pengembangan penyediaan tenaga listrik.
   - Penjualan tenaga listrik.

2. Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang mencakup:
   - Konsultansi ketenagalistrikan.
   - Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
   - Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan.
   - Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.
   - Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
   - Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
   - Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.

3. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup:
   - Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk tenaga listrik.
   - Jasa operasi dan pengaturan *(dispatcher)* pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik.
   - Industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang ketenagalistrikan.
   - Kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan.
   - Usaha jasa ketenagalistrikan.

In accordance to Law No. 30/2009 regarding Electricity and in the Company's Articles of Association, the Company's lines of business are:

1. Provision of electrical power includes:
   - Generation of electricity.
   - Supply of electricity.
   - Distribution of electricity.
   - Planning and constructing facilities to supply electrical power.
   - Development of electricity supply.
   - Sales of electricity.

2. Provision of Services' Business Unit to support Electricity services includes:
   - Electricity consultation.
   - Construction and installation of electrical power equipment.
   - Assessment and testing of electrical power equipment.
   - Operation and maintenance of electrical power equipment.
   - Laboratory of electrical power equipment and consumer testing.
   - Certification of electrical power equipment and consumer.
   - Certification of competence for electricity technician.

3. Other activities includes:
   - Managing utilization of natural resources and other energy sources in the interests of electrical power
   - Operating and dispatching services for generation, supply, distribution and retail sales of electrical power.
   - Building the Industry of hardware, software and equipment related to industry of electricity power.
   - Cooperate with other parties and institutions related industry to electrical power in the fields of development, operations, telecommunications and other information related to electrical power.
   - Electricity services.

Lebih lanjut lagi, bidang usaha PLN mencakup juga:

1. Kegiatan perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik (pembangkitan, transmisi dan distribusi) dan penunjang, rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi, dan SDM.
2. Kegiatan pembangunan konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik pembangkitan, transmisi dan gardu induk.
3. Kegiatan pengusahaan/operasi pusat - pusat pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari: Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU); Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA); Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG-gas turbine); Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pusat Listrik Tenaga Bayu (PLTB). PLN juga menjalankan kegiatan sewa pembangkit dan pembelian tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik swasta.
4. Kegiatan riset dan penunjang berkaitan dengan bidang kelistrikan.

Jasa-jasa yang disebutkan di atas dilaksanakan oleh PLN melalui 47 unit bisnis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

PLN's business also focuses on other services related to electricity as follows:

1. Planning and development activities of electric power facilities (generation, transmission and distribution) and supporting activities of budgeting, business development, organization development and human resources.
2. Construction of electricity infra structures, including construction of power generating facilities, transmission and substations (transformer facility station).
3. Utilization and Commercialization of Power Plants, which consist of steam power plant (PLTU), hydro power plant (PLTA), gas turbine power plants (PLTG), geothermal power plant (PLTP), diesel power plant (PLTD), solar cell power plant (PLTS) and wind power plant (PLTB). PLN also purchases electrical power produced by private power plants and rents other public power plants to be utilized.
4. Doing Research and Development, and other supporting activities related to electricity.

All of the above activities is conducted by PLN through its 47 business units distributed across Indonesia.

VISI VISION

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

To be acknowledged as a growing, superior and trusted world-class company, supported by its competent human resources.

MISI MISSION

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan Pemegang Saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

1. To run an electricity business and other related sectors, oriented to customer satisfaction companies members and Shareholders.
2. To make electricity as a medium to improve quality of life of the public.
3. To make every effort for electricity as an economic booster.
4. To operate an environmentally friendly business.

Keterangan:
Pernyataan visi dan misi telah disepakati oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2002 dan telah dideklarasikan pada saat Hari Listrik Nasional 27 Oktober 2002.

Note:
The vision and mission have been approved by the Board of Directors and Commissioners in 2002 and declared on the National Electricity Day on October 27, 2002.

MOTTO

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik

Electricity for a Better Life

NILAI-NILAI LUHUR PERUSAHAAN

Company's Core Values

Sejak awal berdiri, Perusahaan telah menanamkan nilai-nilai budaya yang kuat dalam menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan para pemangku kepentingan.

Since established, the Company has instilled strong cultural values in forming lasting relations with its stakeholders.

FALSAFAH PERUSAHAAN

The Company's Philosophy

Saling Percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar

Saling percaya
Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak - pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang bersih dan etis.

Integritas
Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.

Peduli
Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak - pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dijiwai kepekaan setiap permasalahan yang dihadapi Perusahaan serta mencari solusi yang tepat.

Pembelajar
Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktik pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir demi pembaharuan Perusahaan secara berkelanjutan.

Mutual Trust, Integrity, Care and Learning Mutual

Trust
An atmosphere of mutual trust and openness between fellow members of the company based on a belief in integrity, good faith and competence from parties connected in the implementation of clean and ethical business practice.

Integrity
The manifestation of an attitude shown by members of the company in which they consistently show honesty, harmony between words and deeds, and a sense of responsibility toward company management and use of corporate property short and long-term benefit, as well as a sense of responsibilities toward all stakeholders.

Care
A reflection of the intention to protect and care for the work-life quality felt by company members and stakeholders growing together imbued with sensitivity toward problems faced by the Company and the desire to find the right solution.

Learning
The attitude of company members who always have the courage to question the system and practices of development, management and operations, as well as mastering cutting-edge science and technology for the renewal and sustainability of the Company.

Kepemilikan Saham
Shareholders Ownership

Induk Perusahaan

PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Shareholders Composition

PT PLN (Persero) is a State-Owned Enterprise (SOE) with the entire 100% of its shares owned by government of the Republic of Indonesia.

Kronologis Pencatatan Saham

PT PLN (Persero) hingga saat ini belum melakukan penawaran perdana saham (IPO). Namun Perseroan telah menerbitkan beberapa seri obligasi korporasi, sukuk, dan obligasi global.

Share Listing Chronology

As of date PT PLN (Persero) has not conducted Initial Public Offering (IPO). However, the Company has issued some series of corporate bonds, sukuk and global bonds.

Entitas Anak Perusahaan dan Asosiasi

Daftar Anak Perusahaan PT PLN (Persero) dan Kepemilikan Saham.

Subsidiaries and Affiliates

List of PT PLN (Persero) Subsidiaries and Shareholders.

Anak Perusahaan Subsidiary	Bidang Usaha Line of Business	Kepemilikan Ownership		Status Operasional Operational Status
		Langsung Direct	Tidak Langsung Indirect	
PT Indonesia Power	Pembangkit Listrik Electricity Power Plant	99,99%		Beroperasi Operating
• PT Artha Daya Coalindo (ADC)	Perdagangan Batubara Coal Trading		60,00%	Beroperasi Operating
• PT Cogindo Daya Bersama (CBD)	Pemeliharaan Pembangkit Power Plant Cogeneration		99,99%	Beroperasi Operating
• PT Indo Ridlatama Power (IRP)	Pembangkit Listrik Electricity Power Plant		86,00%	Beroperasi Operating
• PT Putra Indotenaga	Pembangkit Listrik Electricity Power Plant		99,90%	Beroperasi Operating
• PT Tangkuban Perahu Geothermal Power (TPGP)	Pembangkit Listrik Electricity Power Plant		95,21%	Beroperasi Operating
PT Pembangkitan Jawa Bali	Pembangkit Listrik Electricity Power Plant	99,99%		Beroperasi Operating
• PT PJB Services (PJBS)	Pemeliharaan Pembangkit Power Plant Cogeneration		98,00%	Beroperasi Operating
- PT Mitra Karya Prima	Pemeliharaan Pembangkit Power Plant Cogeneration		92,00%	Beroperasi Operating
• PT Rekadaya Elektrika (RE)	Jasa Enjiniring & konstruksi kelistrikan Electricity Engineering and Construction		98,68%	Beroperasi Operating
- PT Rekadaya Elektrika Consult	Jasa Enjiniring & konstruksi kelistrikan Electricity Engineering and Construction		99,80%	Beroperasi Operating
• PT Navigat Innovative Indonesia (NII)	Jasa Enjiniring & konstruksi kelistrikan Electricity Engineering and Construction		72,97%	Beroperasi Operating
PT Indonesia Comnets Plus	Teknologi Informasi Information Technology	99,99%		Beroperasi Operating
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	Distribusi Listrik Electricity Power Plant and Distribution	99,99%		Beroperasi Operating
• PT Pelayanan Energi Batam	Pembangunan Pipa Gas dan Energi Lainnya Construction of Gas Pipeline and Other Energy Sector		99,99%	Beroperasi Operating
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	Rekayasa/Konstruksi Listrik Electricity Engineering/Construction	99,90%		Beroperasi Operating
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	Pembangkit dan Distribusi Listrik Electricity Power Plant and Distribution	99,97%		Beroperasi Operating
PT PLN Batubara	Tambang dan Trading Batubara Coal Mining and Trading	99,99%		Beroperasi Operating
PT PLN Geothermal	Pembangkit Geothermal Geothermal Power Plant	99,99%		Tidak Beroperasi Not Operating
Majapahit Holding BV	Keuangan Finance	100,00%		Beroperasi Operating
• Majapahit Finance	Keuangan Finance		100,00%	Beroperasi Operating

Anak Perusahaan Subsidiary	Bidang Usaha Line of Business	Kepemilikan Ownership		Status Operasional Operational Status
		Langsung Direct	Tidak Langsung Indirect	
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Pengangkutan Batubara Coal Shipping	99,99%		Beroperasi Operating
PT Haleyora Power	Operasi dan Pemeliharaan (Ophar) Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Operational and Maintenance and Electricity Distribution	99,99%		Beroperasi Operating
• PT Haleyora Powerindo	Pembangkit Listrik dan Jasa Lainnya Power Generation and Other Services		90,00%	Beroperasi Operating

Daftar Asosiasi dan Ventura Bersama PT PLN (Persero) beserta Kepemilikan Saham

List of PT PLN (Persero) Affiliates and Joint Ventures and Shareholders.

Nama Perusahaan Subsidiary	Bidang Usaha Line of Business	Kepemilikan Ownership		Status Operasional Operational Status
		Langsung Direct	Tidak Langsung Indirect	
Perusahaan Asosiasi				
PT Geo Dipa Energi (PT GDE)	Pembangkit Geothermal Geothermal Power Plant	33,00%		Beroperasi Operating
PT Unelec Indonesia	Penunjang Penyedia Tenaga Listrik Electrical Support	32,35%		Beroperasi Operating
PT Mitra Energi Batam	Pembangkit Tenaga Listrik Electricity Power Plant		30,00%/PT PLN Batam	Beroperasi Operating
PT Sumber Segara Primadaya	Pembangkit Tenaga Listrik Electricity Power Plant		49,00%/PT PJB	Beroperasi Operating
PT Dalle Energy Batam	Pembangkit Tenaga Listrik Electricity Power Plant		20,00%/PTPLN Batam	Beroperasi Operating
PT Bajradaya Sentranusa	Pembangkit Tenaga Listrik Electricity Power Plant		36,61%/PT PJB	Beroperasi Operating
PT Bukit Pembangkit Innovative	Pembangkit Tenaga Listrik Electricity Power Plant		40,25%/PT PJB	Belum Beroperasi Not Operating
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Operasi dan Pemeliharaan Operational and Maintenance		49,00%/PT PJB	Beroperasi Operating
PT Tanjung Kasam Power	Pembangkit Tenaga Listrik Electricity Power Plant		10,00%/PT PLN Batam	Beroperasi Operating
PT Rekind Daya Mamuju	Pembangkit Tenaga Listrik Electricity Power Plant		10,00%/PT PJB	Belum Beroperasi Not Operating
Ventura Bersama Joint Ventures				
PT Rajamandala Electric Power	Pembangkit Tenaga Listrik Electricity Power Plant		51,00%/PT IP	Belum Beroperasi Not Operating
PT Perta Daya Gas	Transportasi dan Penyimpanan LNG LNG Transportation and Storage		35,00%/PT IP	Belum Beroperasi Not Operating
PT Indo Pusaka Berau	Perdagangan Batubara Coal Trading		46,80%/PT IP	Beroperasi Operating
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Pembangkit Tenaga Listrik Electricity Power Plant		45%/PT Haleyora Power	Beroperasi Operating
PT Crompton Prima Switchgear	Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik Electricity Controller and Distribution		49%/PLNE	Belum Beroperasi Not Operating

Struktur Grup Usaha dan Entitas Anak Usaha

Business Structure and Subsidiary

PLN mengusahakan produk dan jasanya melalui entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan *special purpose vehicle* (SPV).

PLN seeks to provide its products and services through the business units, subsidiaries, associated company, joint venture, and special purpose vehicle (SPV).

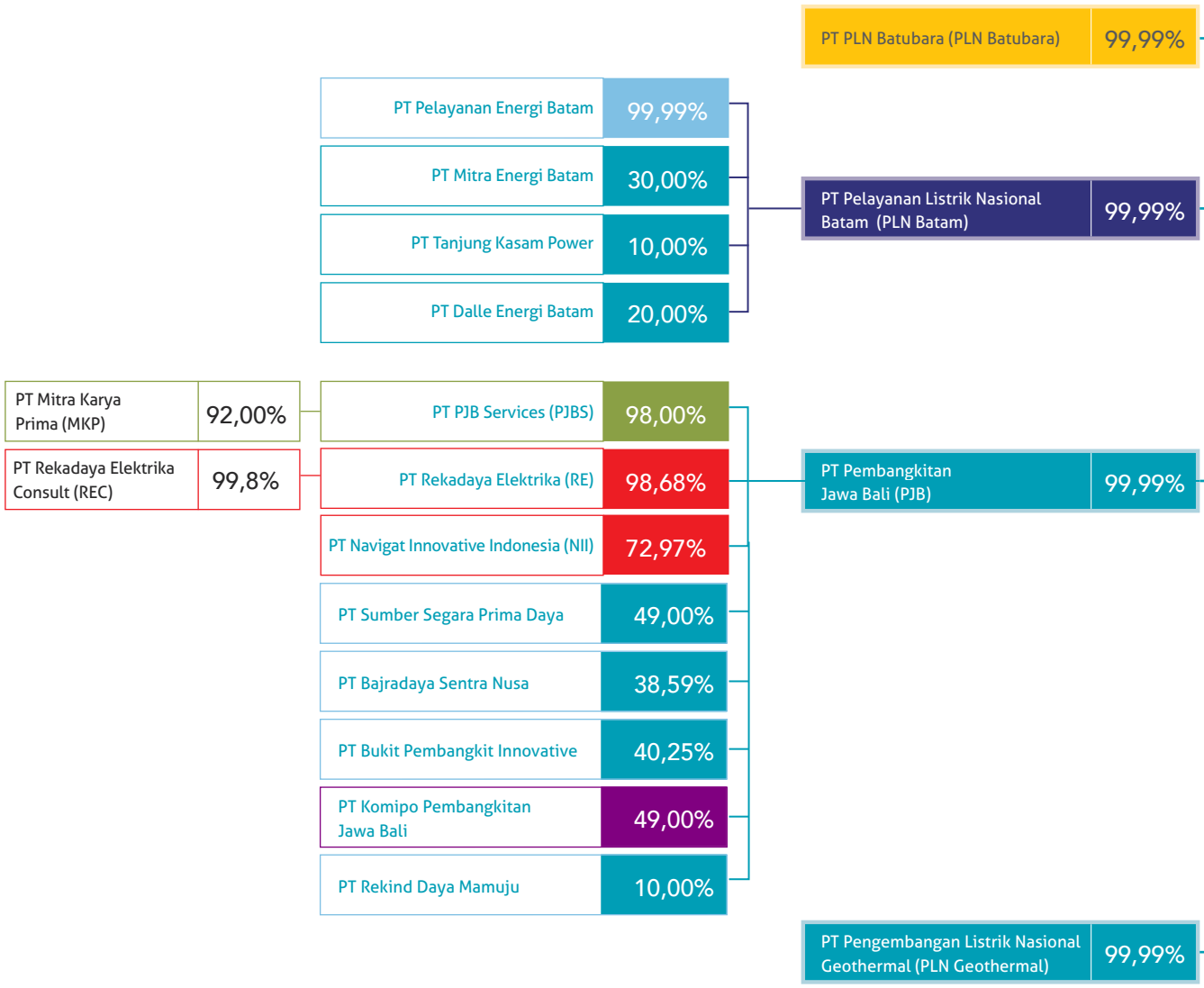

- Keuangan / Finance
- Pembangkit Listrik / Electricity Power Plant
- Listrik Terintegrasi / Integrated Electricity
- Angkutan Laut / Shipping
- Telekomunikasi / Telecommunication
- Jasa Enjiniring & konstruksi kelistrikan / Electricity Engineering and Construction
- Transportasi dan Penyimpanan LNG / LNG Transportation and Storage
- Penunjang Penyedia Tenaga Listrik / Electrical Support
- Pembangkit Geothermal / Geothermal Power Plant
- Operasi dan Pemeliharaan / Operational & Maintenance
- Pembangunan Pipa Gas dan Energi lainnya / Construction of Gas Pipeline and Other Energy Services
- Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik / Electricity Controller and Distribution
- Pemeliharaan Pembangkit / Power Plant Cogeneration
- Perdagangan Batubara / Coal Trading

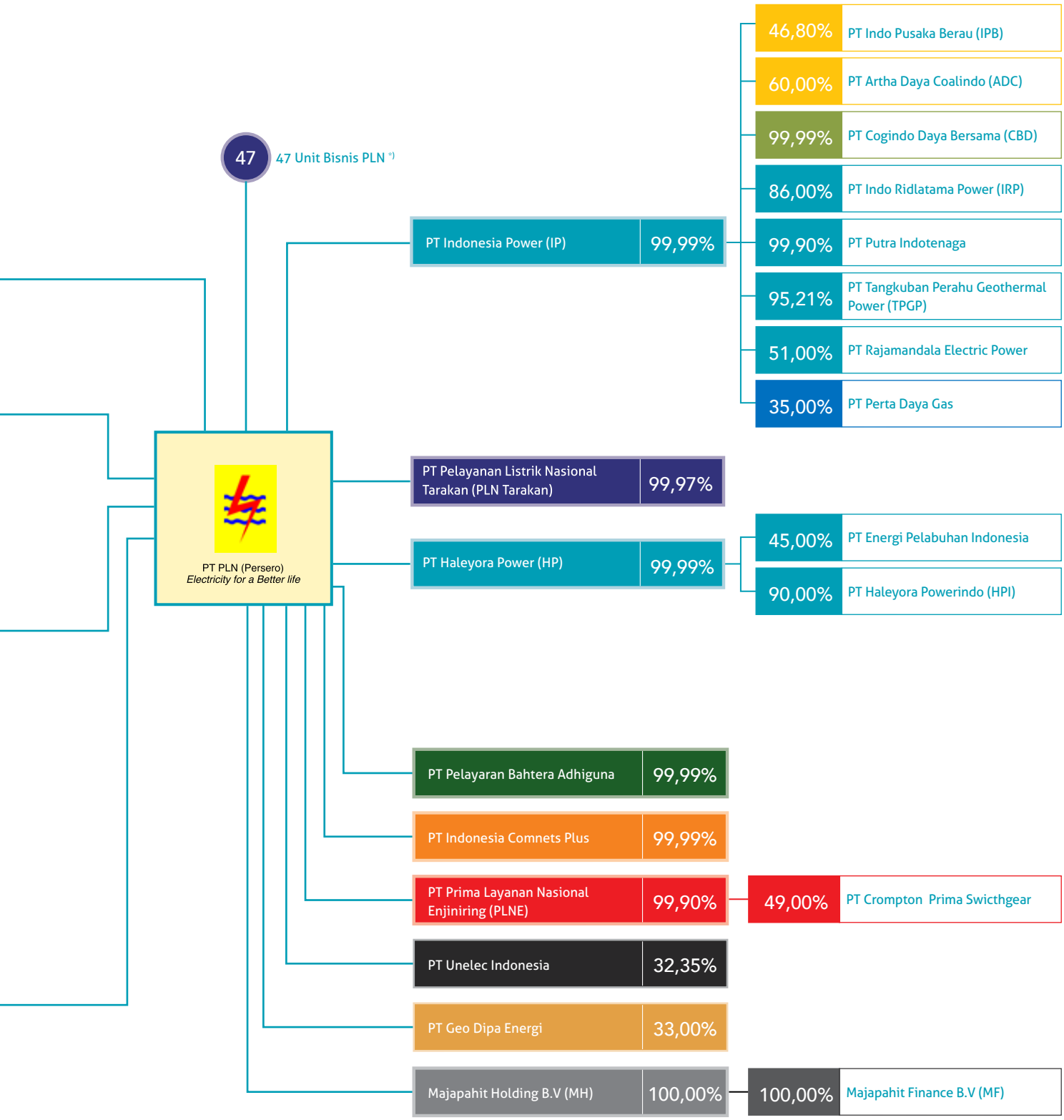

Catatan:
*) Unit Bisnis adalah Unit Operasional PLN yang melakukan fungsi usaha tertentu. Daftar unit bisnis ini serta bidang kegiatannya masing-masing mengacu ke Lampiran "Data Perusahaan" per 31 Desember 2014.

Note:
*) Business Unit is PLN's Operational Unit that executes certain business function. The list of this business unit along with the respective field of activities refer to the Appendix of "Corporate Data" as of December 31, 2014.

Segmentasi Geografis
Geographical Segmentation

Untuk kepentingan perencanaan strategis maupun penyajian laporan keuangan konsolidasi, PLN membagi area operasi kedalam tiga wilayah geografis, yakni: Operasi Geografis Jawa Bali, Sumatera dan Indonesia Timur.

Segmentasi Operasi Geografis, jumlah pelanggan, daya tersambung, energi terjual dan kapasitas daya terpasang yang dikelola untuk masing-masing wilayah, adalah sebagai berikut:

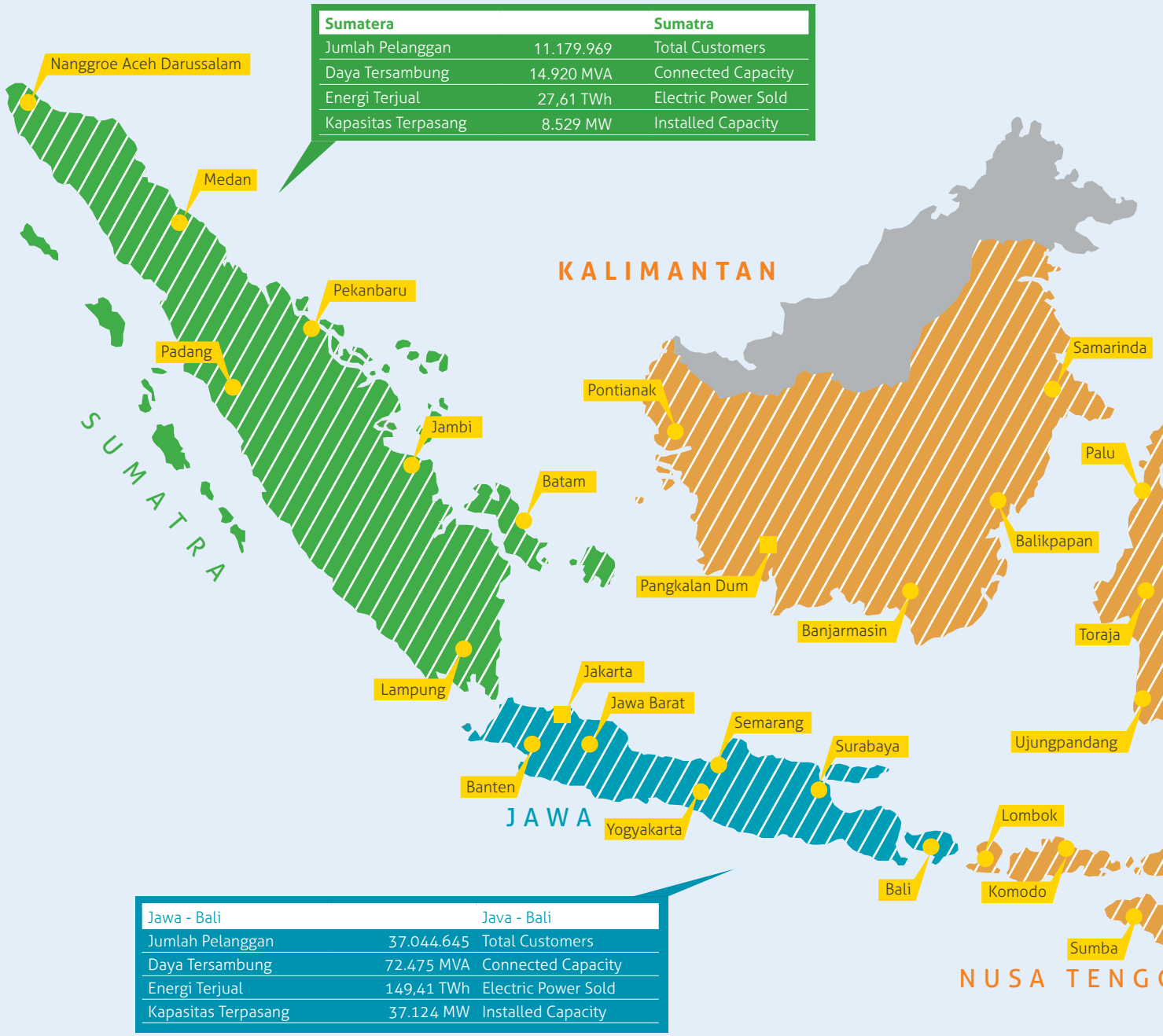

Sumatera		Sumatra
Jumlah Pelanggan	11.179.969	Total Customers
Daya Tersambung	14.920 MVA	Connected Capacity
Energi Terjual	27,61 TWh	Electric Power Sold
Kapasitas Terpasang	8.529 MW	Installed Capacity

Jawa - Bali		Java - Bali
Jumlah Pelanggan	37.044.645	Total Customers
Daya Tersambung	72.475 MVA	Connected Capacity
Energi Terjual	149,41 TWh	Electric Power Sold
Kapasitas Terpasang	37.124 MW	Installed Capacity

For the purpose of strategic planning and presentation of consolidated financial statement, PLN divides its operational area into three geographical regions, i.e.: Java Bali Area, Sumatera and East Indonesia Area. Due to the characteristic of Indonesia which is consist of many islands, each area of operation is namely Geographical Operation Area.

The geographical operational segmentation, number of customer, connected power, energy sold and installed power capacity managed by PLN under each region are as follows:

Indonesia Timur		East Indonesia
Jumlah Pelanggan	8.958.133	Total Customers
Daya Tersambung	11.341 MVA	Connected Capacity
Energi Terjual	19,40 TWh	Electric Power Sold
Kapasitas Terpasang	5.966 MW	Installed Capacity

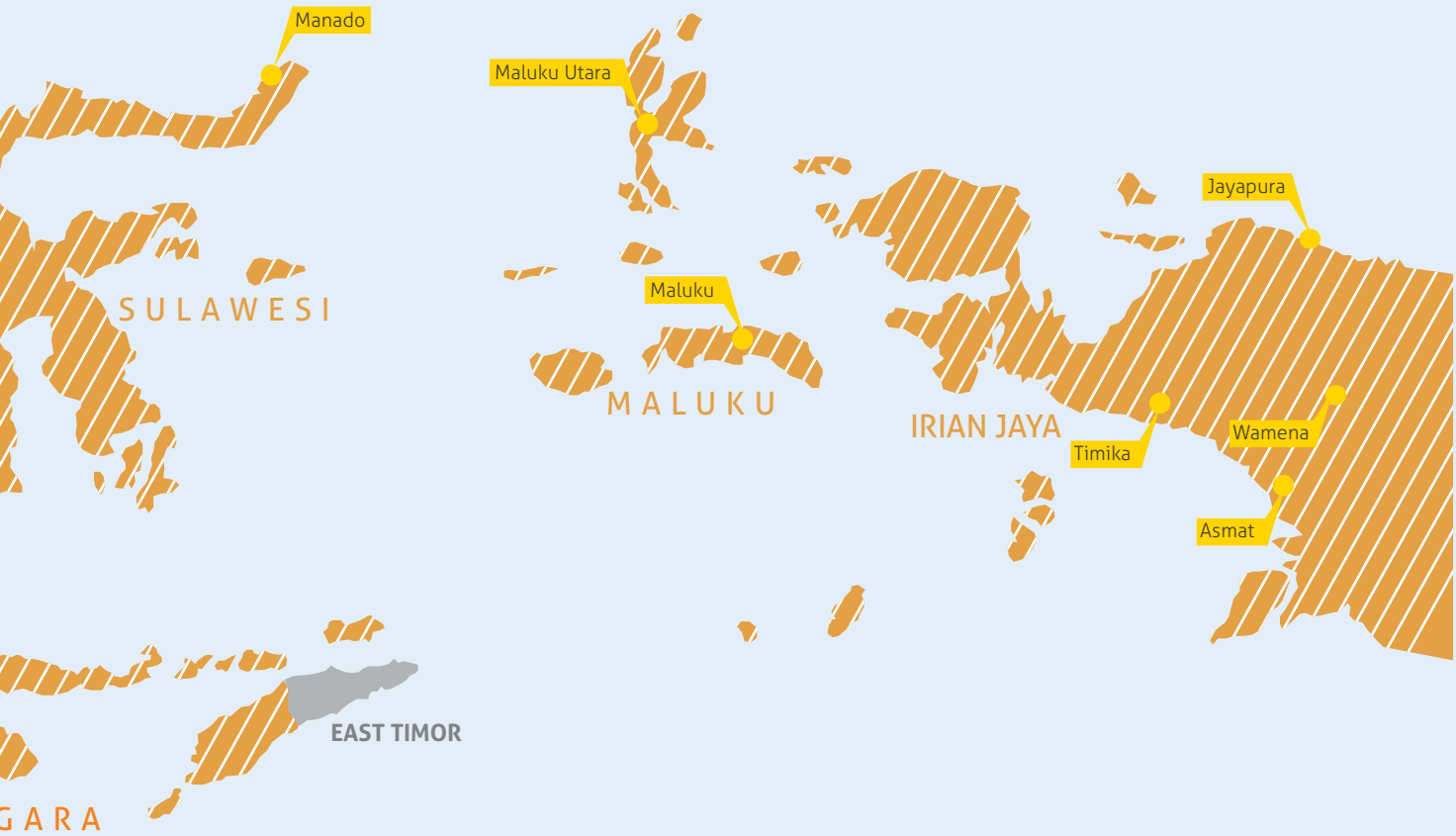

Struktur Organisasi
Organizational Structure

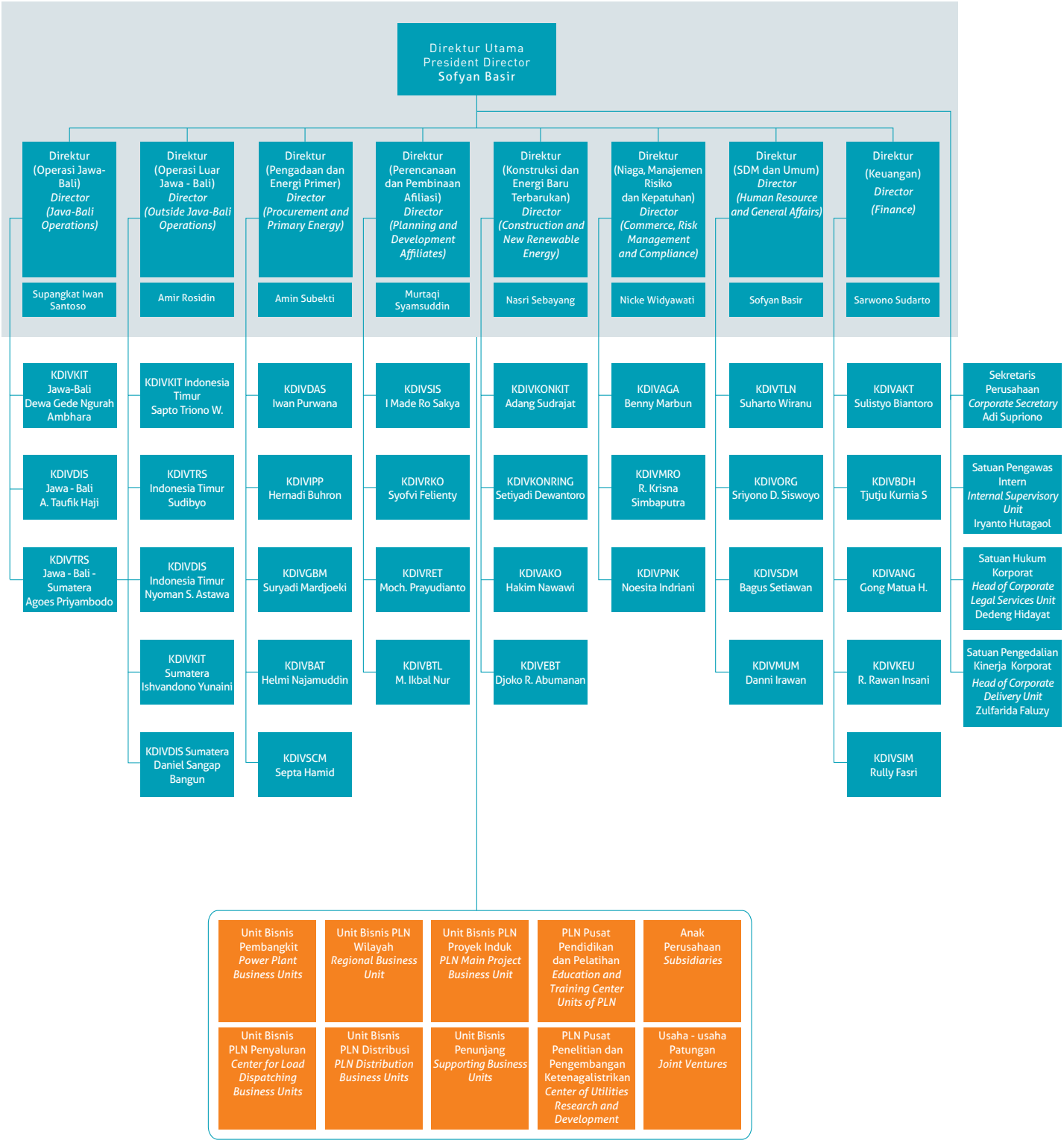

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Di Luar Rapat Direksi (Sirkuler) No. 001/DIT/2015 tentang Pembagian Sementara Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT PLN (Persero) tanggal 6 Januari 2015.

Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Outside Directors Meeting (Circular) No. 001 / DIT / 2015 on the Temporary Division of Duties and Authority of PT PLN's (Persero) the Board of Directors dated January 6, 2015.

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal

Corporate Institutional and Professional Support in Capital Market

Lembaga Pemeringkat Obligasi

Perusahaan menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) untuk melakukan pemeringkatan terhadap obligasi dalam negeri PLN dan *Moody's Investors Service*, *Fitch Rating* dan *Standar and Poor's Rating* untuk pemeringkatan obligasi internasional PLN, dengan masing-masing alamat sebagai berikut:

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Panin Tower Senayan City 17th floor
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270, Indonesia
Telp: (62-21) 7278 2380
Faks: (62-21) 7278 2370

Moody's Investor Service Singapore Pte. Ltd.
50 Raffles Place #23-06
Singapore Land Tower
Singapore 048623, Singapore
Telp: (65) 6398-8308

Moody's Investors Service Hongkong Limited
24/F, One Pacifik Place, 88 Queesway
Hongkong
Tel: +852 3758 1300
Fax: +852 3758 1644

PT Fitch Ratings Singapore Pte Ltd
6 Temasek Boulevard
#35 - 05 Suntec Tower Four
Singapore 038986

Standard and Poor's Singapore Pte. Ltd.
12 Marina Boulevard
#23-01 Marina Bay Financial Centre Tower 3
Singapore 018982

Obligasi dalam negeri PLN tercatat di Bursa Efek Indonesia, sedangkan obligasi luar negeri tercatat di *The Singapore Exchange Limited*, Singapura. Masing-masing perusahaan pencatat efek tersebut beralamat di:

Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190, Indonesia

The Singapore Exchange Limited
2 Shenton Way
#19-00 SGX Centre 1
Singapore 068804, Singapore
Telp: (65) 6236 8888
Faks: (65) 6535 6994

Bond Rating Agencies

The Company has appointed PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) to rate PLN's domestic bonds and Moody's investors service, Fitch Rating and Standard and Poor's Rating to rate PLN's international bonds; the addresses for each company are as follows:

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Panin Tower Senayan City 17th floor
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270, Indonesia
Telp: (62-21) 7278 2380
Faks: (62-21) 7278 2370

Moody's Investor Service Singapore Pte. Ltd.
50 Raffles Place #23-06
Singapore Land Tower
Singapore 48623, Singapore
Telp: (65) 6398-8308

Moody's Investors Service Hongkong Limited
24/F, One Pacifik Place, 88 Queesway
Hongkong
Tel: +852 3758 1300
Fax: +852 3758 1644

PT Fitch Ratings Singapore Pte Ltd
6 Temasek Boulevard
#35 - 05 Suntec Tower Four
Singapore 038986

Standard and Poor's Singapore Pte. Ltd.
12 Marina Boulevard
#23-01 Marina Bay Financial Centre Tower 3
Singapore 018982

PLN's domestic bonds are listed on the Indonesian Stock Exchange, while international bonds are listed on the Singapore Exchange Limited, Singapore. These institutions can be found at the following addresses:

Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190, Indonesia

The Singapore Exchange Limited
2 Shenton Way
#19-00 SGX Centre 1
Singapore 068804, Singapore
Telp: (65) 6236 8888
Faks: (65) 6535 6994

Wali Amanat

PT CIMB Niaga Tbk
Gedung Graha Niaga Lt 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

PT Bank Permata Tbk
Securities & Agency Operations
Permata Bank Tower 3 Bintaro Lantai 14
Jl. M.H Thamrin Blok B 1 No 1
Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor 7
Tangerang 15224

Akuntan Perusahaan

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PriceWaterhouseCoopers Indonesia)
Plaza 89
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6
Jakarta 12940

Notaris

Lenny Janis, SH
Jl. Hang Lekir 9 No.1
Jakarta 12120

Aryanti Artisari, SH, M.Kn.
Menara Sudirman Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav 60
Jakarta Selatan 12190

Konsultan Hukum

Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office
Office 8 Lantai 15 Unit H-SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Amanah
Gedung Victoria Lt 3
Jl. Sultan Hasanudin No. 47/51
Jakarta

A. Hakim G. Nusantara, Harman & Partners
Menara Jamsostek Lt 4
Suite TA 0402
Jl. Jend Gatot Subroto No.38
Jakarta

Hadiputranto, Hadinoto & Partners
Indonesia Stock Exchange Building Tower II Lt 21
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Trustee

PT CIMB Niaga Tbk
Gedung Graha Niaga Lt 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

PT Bank Permata Tbk
Securities & Agency Operations
Permata Bank Tower 3 Bintaro Lantai 14
Jl. M.H Thamrin Blok B 1 No 1
Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor 7
Tangerang 15224

Company Accountant

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PriceWaterhouse Coopers Indonesia)
Plaza 89
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6
Jakarta 12940

Notary

Lenny Janis, SH
Jl. Hang Lekir 9 No.1
Jakarta 12120

Aryanti Artisari, SH, M.Kn.
Menara Sudirman Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav 60
Jakarta Selatan 12190

Legal Consultants

Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdiharjo Law Office
Office 8 Lantai 15 Unit H-SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Amanah
Gedung Victoria Lt 3
Jl. Sultan Hasanudin No. 47/51
Jakarta

A. Hakim G. Nusantara, Harman & Partners
Menara Jamsostek Lt 4
Suite TA 0402
Jl. Jend Gatot Subroto No.38
Jakarta

Hadiputranto, Hadinoto & Partners
Indonesia Stock Exchange Building Tower II Lt 21
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Akses Informasi
Access to Information

Seluruh informasi berkaitan dengan PT PLN (Persero) dapat di peroleh di:

Sekretariat Perusahaan PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M I No.135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel. (62 21) 7251234, 7250550, 7261122
Fax. (62 21) 7221330
Website: www.pln.co.id

Pada situs ini PLN memberikan informasi yang mencakup aspek pelayanan pelanggan, info umum, info korporat dan hubungan investor.

Media Publikasi

1. Untuk Level Korporasi mencakup: Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Company Profile, CSR, PLN Kita, majalah internal Fokus.
2. Untuk level Unit Bisnis mencakup: Yes, Saburai, Pelita Bertuah, INFO PJB, SULUHETAM, DAYA, Warta PLN 8, LMK, ICONEWS, Tabaos, WARTA Serumpun Sebalai, P3BSumatera, LISTRIK KITA, Floeksi, SULUH DEWATA dan CAHAYA.
3. Untuk menunjukkan komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas penerapan praktik terbaik GCG, Perseroan menyediakan fasilitas website mengenai upaya pemberantasan korupsi bekerjasama dengan TII (Transparansi Internasional Indonesia) yaitu: www.plnbersih.com.
4. Media Sosial, berupa twitter @pln_123, dan facebook: PLN123

All information about PT PLN (Persero) can be accessed at:

Sekretariat Perusahaan PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M I No.135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel. (62 21) 7251234, 7250550, 7261122
Fax. (62 21) 7221330
Website: www.pln.co.id

In this website PLN provides information covering aspects of customer service, public and corporate information and investor relations.

Publication

1. Publication at corporate level covers: Annual Report, Sustainability Report, Company Profile, CSR, PLN Kita, Internal magazine Fokus.
2. At the Business Unit level: Yes,Saburai, Pelita Bertuah, INFO PJB, SULUHETAM, DAYA, warta PLN 8, LMK, ICONEWS, Tabaos, WARTA Serumpun Sebalai, P3BSumatera, LISTRIK KITA, Floeksi, SULUH DEWATA and CAHAYA
3. To show PLN's commitment in improving GCG best practices, the Company provided a website containing efforts of corruption eradication in cooperation with Transparency International Indonesia (TII): www.plnbersih.com.
4. Social media of Twitter account @pln_123 and Facebook page PLN123.

04 Program Pengembangan Usaha

Business Development Program

Arah Pengembangan Jangka Panjang
Long-Term Development Roadmap

Strategi Pengembangan Usaha
Business Development Strategy

Pengembangan Organisasi
Organizational Development

Pengembangan Transmisi dan Distribusi
Development of Transmission and Distribution

Pengembangan dan Pengelolaan Pembangkit
Development and Management of Generating Station

Pendanaan
Funding

Arah Pengembangan Jangka Panjang

Long - Term Development Roadmap

PLN telah merancang Program Pengembangan Usaha Jangka Panjang dengan mempertimbangkan seluruh kondisi eksternal yang dinamis, menerapkan program pengembangan jangka pendek sebagai realisasi rencana tersebut dengan tetap memperhatikan kaidah Tata Kelola Perusahaan terbaik untuk memastikan terjadinya peningkatan level kinerja perusahaan sebagai salah satu sasaran utama.

PLN has developed a long term business development program which reflect all dynamic external condition. The short-term development program is implemented in alignment with corporate governance principle to ensure the improvement of company performance as one of the main goals.

Latar Belakang

Pada tanggal 23 September 2009, Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan resmi berlaku. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah membuka peluang bagi BUMN di luar PLN, swasta, koperasi, bahkan LSM untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Berlakunya UU No. 30 tersebut membuat PLN saat ini bukan lagi sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), tetapi sebagai Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum.

Background

The Law No. 30/2009 called as Electricity Law was effective On September 23, 2009. The law stipulates that the Government opens up opportunities for State-Owned Enterprises (SOEs) other than PLN, private enterprises, cooperatives bodies, and NGOs to get involved in providing electricity for the public. With the implementation of the law, PLN is no longer the sole Authorized Company in Electricity Provision (PKUK), but otherwise as the only one company who has the authorization to publish License for all companies or institutions who like to take involve on the Supply of electricity for the public use (IUPTL).

Gambaran mengenai usaha kelistrikan sebelum dan setelah diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009, sebagai berikut:

Following this is an overview of the electricity business before and after the enactment of Law No. 30 of 2009:

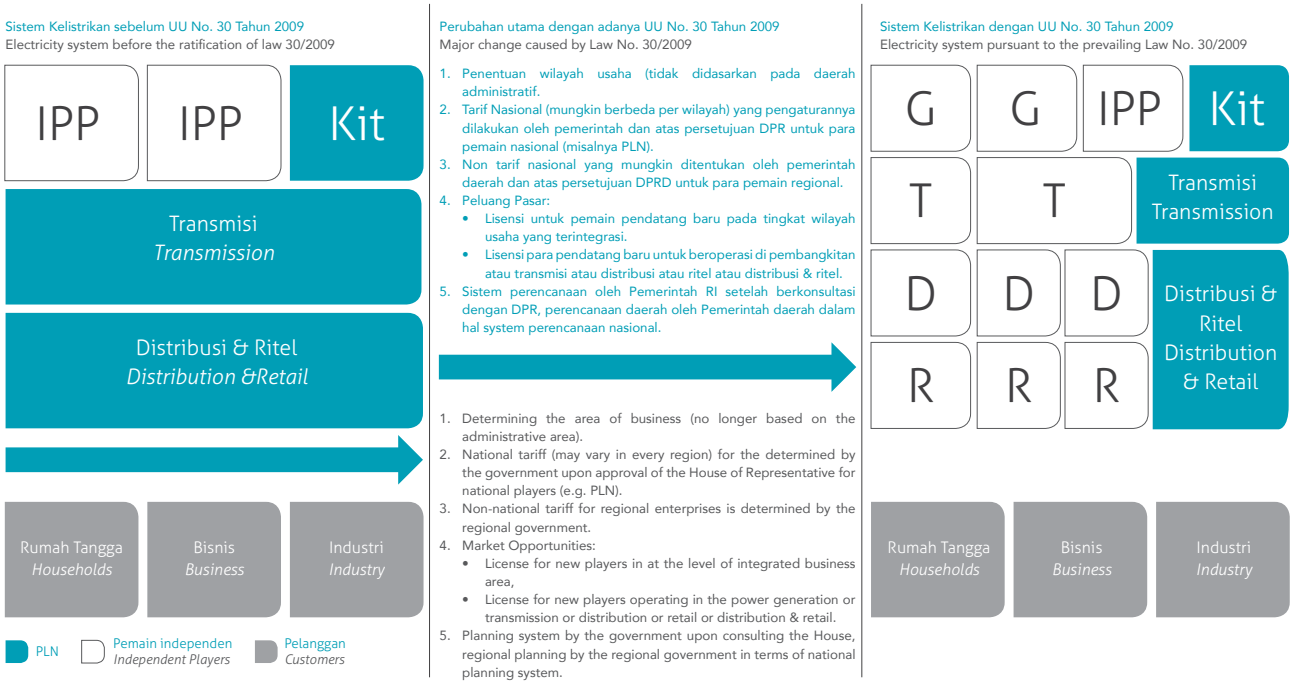

Sebagai tindak lanjut dan pedoman pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2009, maka pada tanggal 24 Januari 2012 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Terbitnya PP No. 14 Tahun 2012 semakin menegaskan kemungkinan tumbuh dan berkembangnya perusahaan lain di luar PLN, yang memiliki bidang usaha sama dengan Perseroan dan menjadi pesaing dalam menyediakan tenaga listrik kepada para pelanggan potensial di masa mendatang.

As a guideline to the implementation of Law No. 30/2009, on January 24, 2012 the Government issued the Government Regulation No. 14/2012 on the Electrical Power Provision Business Activities. The issuance of this regulation guarantees the possibility of all companies other than PLN to take involve on, and compete in the provision of the electricity for the public in the future.

Road Map Rencana Pengembangan Jangka Panjang

Mengantisipasi potensi persaingan usaha dimasa mendatang, PLN telah menyiapkan rencana strategis pengembangan usaha dalam jangka panjang. Arah strategis jangka panjang PLN menjadi entitas korporasi yang sehat secara finansial, sehingga dapat melakukan investasi untuk mempertahankan *market share* dan berkembang sesuai dengan kaidah-kaidah korporasi. Disamping kondisi keuangan yang sehat, PLN juga harus efisien dan dapat memenuhi tingkat keandalan dan pelayanan sesuai ekspektasi pelanggan serta didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi

Long-Term Development Plan

Anticipating the potential business competitors in the future, PLN has designed a strategic development plan for the long run as stated in PLN's strategic objective. The strategic objective of the PLN is to establish considerably stable and financially healthy company, so it can continuously invest in electricity, to preserve the market share and growth under the Good Corporate Governance norms. In addition, PLN should also be concentrated on efficiency, able to meet the level of reliability standard of electricity provision, and delivers services in accordance to the

tinggi dan berperilaku sesuai *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Code of Conduct* (CoC) dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, Perusahaan dapat menjalankan misinya sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi.

Arah strategis Perusahaan untuk 10 tahun mendatang dibagi menjadi dua bagian, yaitu masa tumbuh (*growth*) pada periode 2013-2017, dan masa ekselen (*excellence*) pada periode 2018-2022. Penjelasan ringkas *Roadmap milestone*, rincian arah strategis dan Visi Perusahaan untuk setiap periode adalah sebagai berikut:

Masa Tumbuh *(Growth)* 2013-2017

Masa tumbuh ditandai dengan upaya pencapaian posisi PLN sebagai salah satu dari 50% perusahaan listrik terbaik di dunia dari posisi 65% saat ini. Pengembangan visi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah "Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh-kembang, Unggul dan Terpercaya dengan Bertumpu pada Potensi Insani".

Perspektif capaian mencakup:

1. Produk dan layanan
   - Keandalan (SAIDI danSAIFI) pada level baik.
2. Pelanggan
   - Kepuasan pelanggan pada level baik
   - Komposisi pelanggan semakin baik.
3. Keuangan dan Pasar
   - Keuangan sehat
   - Dipercaya investor dan lembaga keuangan
   - Subsidi + marjin wajar
   - *Automatic tariff adjustment* dan sistem tarif baru diterapkan.
4. Sumber Daya Manusia
   - Jumlah dan komposisi SDM baik
   - Kompetensi SDM meningkat
   - *Knowledge Management* berjalan baik
5. Proses bisnis internal
   - Krisis energi terpecahkan (kapasitas bertambah signifikan, mengimbangi permintaan).
   - Pasokan energi primer terjamin
   - *Equivalent Availability Factor* (EAF) pada level baik
   - Prosentase produksi daya listrik BBM menurun
   - Susut jaringan pada level baik
   - IT yang terintegrasi
   - *Zero accident*
   - Baku mutu lingkungan hidup sesuai standar KLH.
6. *Leadership*
   - GCG berjalan baik
   - Menjadi *Emerging Industry Leader* dengan *score* MB minimal 576 (tahun 2013) dan Industry Leader (tahun 2017) Ukuran KPI Visi "Kelas Dunia" yang dijadikan rujukan adalah:
     - *Equivalent Availability Factor* (EAF) PLTU: Tahap awal 85% kemudian menjadi 91%
     - Susut Jaringan: Tahap awal 8,97% kemudian menjadi 8,48%
     - SAIDI: Tahap awal 200 mnt/pelanggan/thn kemudian menjadi 129 mnt/pelanggan/thn.
     - SAIFI: Tahap awal 3,8 kali/pelanggan/thn kemudian menjadi 2,6 kali/pelanggan/thn.

customers' expected and supported by high competence human resources on the basis of Good Corporate Governance (GCG) and the Code of Conduct (CoC), as contributor to the national economic growth.

The Company's strategic objectives in the next ten years is divided into two phases, namely "the growth phase" for the period of 2013-2017, and "the excellence phase" for the period of 2018-2022. Following this is a chart comprises the milestone and detailed strategic plan based on the Company's vision period to period.

The Growth Phase (2013 - 2017)

Growth phase of PLN is considerably achieved at the point its business position is as one of the 50% best electricity companies in the world from one of the 65% best electricity companies. The ultimate vision's goal in this phase is "To become a world class electricity company, continuously developing, the best among the best, trustworthy, supported by excellence and competence people".

The perspectives of the goals are:

1. Products and Services
   - The reliability of products and services (SAIDI and SAIF) is at the "Good" level.
2. Customers
   - Customers' satisfaction is at the "Good" level.
   - Customers composition is improved.
3. Financial and Market Share
   - Financially healthy
   - Trusted by investors and financial institutions.
   - Fair subsidies and margin.
   - Automatic tariff adjustment program is implemented.
4. Human Resources
   - The amount and the composition of the human resources is "Good".
   - The competency of HR is improved.
   - Knowledge Management is implemented in better condition.
5. Internal Business Process
   - Energy Crisis (Electricity crisis) is solved (capacity is increased significantly compared to electricity demand).
   - Supply of primary energy is guaranteed.
   - Equivalent Availability Factor (EAF) at the "Good" level.
   - Electricity production ratio of fuel oil is decrease.
   - Network losses is decreased.
   - Implemented integrated IT.
   - Zero Accident.
   - Environment is in accordance to KLH's standard
6. Leadership
   - Good Corporate Governance is implemented.
   - Being an Emerging Industry Leader with minimum MB score 576 (in year 2013) and Industry Leader (in year 2017). The standard of KPI used as the criteria basis are:
     - Equivalent Availability Factor (EAF) of PLTU: At beginning stage is 85%, and increase to 91%.
     - Losses: At the beginning stage is 8,97%, and decrease to 8,48%.
     - SAIDI: At the beginning stage is 200 minutes/customer/year, and decrease to 129 minutes/customer/year.
     - SAIFI: At the beginning stage is 3,8 x/customer/year, and decrease to 2.6x/customer/year.

Masa Ekselen *(Growth)* 2018-2025

Masa Ekselen ditandai dengan upaya pencapaian posisi PLN sebagai salah satu dari 35% perusahaan listrik terbaik di dunia pada tahap awal (2022), untuk kemudian menjadi 25% perusahaan listrik terbaik dunia diakhir periode (2025). Pengembangan visi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah "Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh-kembang, Unggul dan Terpercaya dengan Bertumpu pada Potensi Insani" untuk tahap pertama. Selanjutnya pada tahap selanjutnya, visi berubah menjadi "Perusahaan Kelas Dunia, Menguntungkan dan Dicintai Pelanggan dengan Cara yang Ramah Lingkungan dan Aman".

The Excellence Phase (2018 - 2025)

The excellence phase of PLN is considerably achieved at the point PLN is become one of the 35% best electricity companies in the world (2022), and then become one of the 25% best electricity companies in the world at the end of the period (2025). The ultimate vision's goal in this phase is "To become a proven world class electricity company, continuously developing, the best among the best, trustworthy, supported by excellence and competence people" for the first period, and then "To become a World Class company, profitable, customers and safety oriented, and environmentally wise oriented company".

Masa Ekselen ditandai dengan upaya pencapaian posisi PLN sebagai salah satu dari 35% perusahaan listrik terbaik di dunia pada tahap awal (2022), untuk kemudian menjadi 25% perusahaan listrik terbaik dunia diakhir periode (2025).

The excellence phase of PLN is considerably achieved at the point PLN is become one of the 35% best electricity companies in the world (2022), and then become one of the 25% best electricity companies in the world at the end of the period (2025).

Perspektif capaian telah meningkat, mencakup:

1. Produk dan layanan.
   - Keandalan (SAIDI dan SAIFI) pada level sangat baik.
2. Pelanggan
   - Kepuasan pelanggan pada level sangat baik.
   - Komposisi pelanggan menguntungkan.
3. Keuangan dan Pasar.
   - Keuangan sangat sehat.
   - Subsidi + marjin yang wajar.
   - Tarif makin mendekati harga keekonomian.
4. Sumber Daya Manusia.
   - Struktur organisasi efektif (*Lean and Clean*, PLN Pusat hanya fokus pada hal-hal yang bersifat *strategic*).
   - Kompetensi SDM baik.
   - Inovasi berjalan baik.
5. Proses bisnis internal.
   - Pasokan energi primer terjamin.
   - EAF pada level sangat baik di Asia.
   - Susut jaringan pada level sangat baik.
   - IT - *Based Organization*.
   - Teknologi ramah lingkungan dan penggunaan *renewable energy*.
6. *Leadership*
   - GCG berjalan sangat baik.
   - Menjadi *Benchmark Leader* (tahun 2020) berdasarkan kriteria *Malcolm Baldridge*.
     Ukuran KPI Visi "Kelas Dunia" yang dijadikan rujukan adalah:
     - EAF PLTU: Lebih besar dari 91%.
     - Susut Jaringan: Lebih kecil dari 8,48%.
     - SAIDI: Lebih kecil dari 129 menit/pelanggan/tahun.
     - SAIFI: Lebih kecil dari 2,6 kali/pelanggan/tahun.

The KPI are set higher as follows:

1. Products and Services.
   - The reliability of products and services (SAIDI and SAIF) is at the "Very Good" level.
2. Customers
   - Customers' satisfaction is at the "Very Good" level.
   - Customers composition is profitable.
3. Financial and Market Share.
   - Very healthy financial condition.
   - Fair subsidies+margin.
   - Tariff implemented closer to the economy prices.
4. Human Resources
   - Effective Organizational Structure (Lean and Clean, Holding company focuses only on strategic matters).
   - The competency of HR is "Good".
   - Innovation is on all persons oriented.
5. Internal Business Process
   - Supply of primary energy is guaranteed.
   - EAF is at the highest level compared to Asian Countries.
   - Network losses is at the lowest level.
   - The Company implemented IT- Based Organization.
   - Implemented Environmentally wise technology and use of renewable energy.
6. Leadership
   - Good Corporate Governance's oriented company.
   - Become Company Benchmark Leader (2020) of the Malcom Baldridge (MB) scores.
     The standard of KPI used as the criteria basis are:
     - Equivalent Availability Factor (EAF) of PLTU: > 91%.
     - Losses : < 8,48%.
     - SAIDI : < 129 minutes/customer/year.
     - SAIFI : < 2,6x/customer/year.

Pengembangan Anak Usaha

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis korporat tersebut, seluruh bisnis Anak Perusahaan diarahkan untuk mendukung bisnis proses PLN. Arah pengembangan bisnis Anak Perusahaan adalah spesifik untuk setiap Anak Perusahaan, namun tetap sejalan dan terintegrasi dengan Rencana Jangka Panjang (RJP) korporat untuk menjamin sinergitas.

Arah pengembangan bisnis masing-masing Anak Perusahaan tahun 2013-2017 adalah:

1. PT Indonesia Power:
   - Menjadi *enabler* untuk pekerjaan *operation and maintenance (O&M)* pembangkit - pembangkit milik PLN maupun non PLN.
   - Sebagai investasi yang diarahkan untuk meningkatkan keandalan dan optimalisasi pemanfaatan pembangkit - pembangkit eksisting.
   - Melakukan sinergi dengan Perseroan dan anak perusahaannya dalam hal pengadaan dan penyediaan energi primer, *operation and maintenance*, penelitian dan pengembangan teknologi *reverse engineering* dan *re-enjinering* penyediaan komponen pembangkit.
2. PT PJB
   - Menjadi *Operating Holding Company* (*center of business development* baik untuk kegiatan strategis dan pengoperasian serta menjadi *energy company* untuk mengamankan ketersediaan bahan bakar pembangkit listrik).
   - Mempersiapkan perusahaan menjadi *Strategic Holding Company,* dimana semua pekerjaan operasional pengelolaan pembangkit diserahkan kepada *strategic business unit* (SBU) milik PT PJB.
3. PT PLN Batam
   - Meningkatkan pangsa pasar dengan penjualan tenaga listrik ke Bintan melalui interkoneksi transmisi Batam - Bintan.
   - Memastikan kecukupan pasokan daya dengan beroperasinya pembangkit PLTGU Tj Uncang Blok I dan Blok II.
   - Beroperasinya *LNG Plant* dan *Storage*.
   - Bertambahnya sumber pasokan energi primer utama (gas).
4. PT PLN Tarakan
   - Melaksanakan efisiensi dengan cara menekan seluruh biaya operasional.
   - Mewujudkan Harga Jual yang memenuhi kaidah keekonomian dan *sustainable*.
   - Meningkatkan kerjasama dengan pemasok energi primer.
   - Melaksanakan pembangunan PLTU skala kecil dan PLTU IPP.

Subsidiary Companies' Development Program

In order to support the achievement of corporate strategic goals, all of the subsidiary/affiliated companies are directed to support the PLN's comprehensive business plan and process. The goals and the orientation of each subsidiary/affiliated company's business development is specific, yet still in line and integrated with the PLN's Long-Term Plan (RJP) to assure synergy among the subsidiaries.

The objective of each subsidiary/affiliated company for the period of 2013-2017 is as follows:

1. PT Indonesia Power
   - Being able to operate and maintain (O&M) the PLN-owned and non-PLN plants.
   - Affiliated Companies are Functioning as PLN's investments in order to improve reliability and optimizing the utilization of existing plants.
   - Creating synergy between the Holding and its subsidiaries in the procurement and supply of primary energy, operation and maintenance, research and development of reverse engineering technology and re-engineering of plant component procurement.
2. PT PJB
   - Acting as operating holding company or the center of business development for both the strategic activities and operations as well as being an energy company to secure the availability of fuel for power plants.
   - Preparing the Company to become a strategic holding company, where all the operational management is transferred to strategic business unit (SBU) of PT PJB.
3. PT PLN Batam
   - To increase the market share by selling electricity to Bintan island via Batam-Bintan transmission interconnection.
   - To ensure sufficient supply of electricity supported by the Tj Uncang Combined Cycle Power Plant Block I and Block II.
   - The LNG Plant and Storage are being in operation.
   - The increase of primary energy (gas) supply sources
4. PT PLN Tarakan
   - Focuses on the cost- efficiency plan of the all operational costs.
   - Establish economic and sustainable Sales Price.
   - Improving cooperation with vendors and suppliers of the primary energy.
   - Developing small-scaled steam power plant and IPP (Independent Power producer) steam power plant.

5. PT Indonesia Comnet Plus
   - Menjadi penyedia utama solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis jaringan yang terkemuka di Indonesia, dengan fokus pada solusi berbasis jaringan (*clear channel*, IPVPN, Metro-E, IPLC) dan tidak pada semua produk jaringan yang ada.
   - Menggunakan aset strategis untuk mengembangkan layanan telekomunikasi.
6. PT PLN Enjinering
   - Memperbesar *size business* Perusahaan dengan memasuki jenis usaha baru yang masih berada pada industri ketenagalistrikan.
   - Menjadi Perusahaan *Engineering Procurement Construction (EPC), Independent Power Producer* (IPP) dan industri penunjang terkait proyek-proyek kelistrikan milik PLN dan IPP.
7. PT PLN Geothermal
   Menjadi *supporting* pengembangan PLTP yang konsesinya sudah dimiliki oleh PLN Geothermal dan PT PLN (Persero), sehubungan dengan sudah adanya PT Geo Dipa Energi dan PT Pertamina Geothermal Energy milik Pemerintah.
8. PT PLN Batubara
   - Meningkatkan penyediaan batubara untuk memenuhi kebutuhan PLTU milik PT PLN (Persero) dan anak perusahaan, melalui mekanisme *trading* maupun kerjasama operasi (KSO).
   - Melanjutkan penguasaan tambang dalam bentuk pembelian deposit/cadangan batubara.
9. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
   - Menjadi Perusahaan yang dapat menunjang *security of supply of coal* untuk kebutuhan PLTU milik PLN, anak perusahaan dan *Independent Power Purchase* (IPP).
   - Menjadi perusahaan yang dapat melakukan transportasi laut bahan bakar gas untuk pembangkit milik PLN dan IPP.
10. PT Haleyora Power
    - Menyediakan pasokan listrik untuk *committed buyers* dengan kualitas dan layanan premium secara *business to business.*
    - Menjadi perusahaan jasa layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi tenaga listrik.

5. PT Indonesia Comnet Plus
   - To be the main provider of network-based IT and communication solution, which is focused on network-based solutions (clear channel, IPVPN, Metro-E, IPLC), instead of all ordinary network products.
   - Utilized the strategic asset to develop telecommunication services.
6. PT PLN Enjinering
   - To increase the Company's business size by entering into a new type of business in the electricity industry.
   - To Become an Engineering Procurement Construction Company (EPC), Independent Power Producer (IPP) and its supporting industry, in regard to PLN and IPP's electricity projects.
7. PT PLN Geothermal
   To be supporter of the development of PLTP power plant owned by PLN Geothermal and PT PLN (Persero), in connection to the existing PT Geo Dipa Energi and state-owned PT Pertamina Geothermal Energy.
8. PT PLN Batubara
   - To increase the supply of coal to feed the needs of power plant owned by PT PLN (Persero) and its subsidiaries, under trading mechanism and joint operation (KSO).
   - Contineously take control on coal mines by purchasing the coal deposits/reserves.
9. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
   - To be a support company to ensure the security of coal supply for the steam power plant owned by PLN, subsidiaries and Independent Power Purchase (IPP).
   - To be a marine-transportation company of fuel sent to PLN's steam power plants and independent power producer (IPP).
10. PT Haleyora Power
    - To provide electricity to committed buyers in premium quality and services on business to business basis.
    - To be company which provides operation and maintenance of electricity transmission and distribution.

SLA - PLN dengan 12 Kementerian/Lembaga Negara Memastikan Era Baru Pengembangan Ketenagalistrikan di Indonesia

SLA - PLN with 12 Ministries/State Agencies Towards a New Era of Electricity Development in Indonesia

Jum'at, 23 Maret 2013, PLN, diwakili oleh Direktur Utama, menandatangani kesepakatan yang tertuang dalam service level agreement (SLA) dengan 12 Menteri dan Kepala Lembaga. Esensi SLA adalah dukungan dari berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah untuk kelancaran pembangunan ketenagalistrikan melalui pemenuhan indikator kinerja utama PLN. Jadi, di sini ada dukungan penuh dari Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga, sekaligus tantangan untuk memenuhi target kinerja PLN yang ketat.

Acara yang disaksikan oleh Wakil Presiden Boediono, tersebut melibatkan PLN dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Menko Perekonomian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Dalam SLA, terdapat 12 isu utama sektor ketenagalistrikan yang memerlukan penyelesaian secepatnya oleh berbagai pihak yang terlibat melalui pemenuhan 17 indikator kinerja utama. Kedua belas isu utama itu adalah penambahan kapasitas PLN, penambahan kapasitas IPP, kapasitas pembangkit cadangan, efisiensi operasional, keterbatasan pasokan gas, volatilitas harga bahan bakar, rendahnya porsi energi terbarukan, kepastian alokasi anggaran, *revenue* PLN *(cost plus margin)*, pengalokasian risiko, tingkat pengembalian usaha PLN yang rendah, dan tarif yang tidak mencerminkan biaya. Dilain pihak, terdapat 17 indikator kinerja yang akan dinilai periodik oleh UKP4, yang harus dipenuhi oleh PLN.

PLN telah menyelesaikan seluruh kajian dan rencana kerja berkaitan dengan realisasi SLA tersebut. Untuk selanjutnya PLN berharap bahwa seluruh kementerian yang terlibat mampu merealisasikan rencana kerja terkait SLA. Demikian juga Kementerian ESDM sebagai departemen teknis pembina PLN mampu mengintegrasikan point-point kesepakatan yang termaktub dalam SLA sehingga PLN dapat merealisasikan rencana aksi di lapangan dengan lebih baik.

Penerapan rencana kerja menurut skema SLA yang terintegrasi diyakini akan membuat PLN mampu memaksimalkan upaya mengurangi besaran subsidi, namun disaat bersamaan mampu meningkatkan rasio elektrifikasi nasional secara substansial, dan mencatatkan level kinerja baru baik dari sisi operasional maupun finansial dimasa mendatang.

On Friday, March 23, 2013, represented by the President Director, PLN signed the agreement contained in the service level agreement (SLA) with 12 ministers and heads of state agencies. SLA is essentially the support of various ministries and government agencies for the sound development of electricity through the fulfillment of PLN's key performance indicators. It indicates full support of the government through the ministries and agencies, as well as a challenge for PLN to achieve stringent performance targets.

The event that was witnessed by Vice President Boediono, involves the, Ministry of Finance, Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of State Owned Enterprises, Ministry of Forestry, Ministry of Transportation, Ministry of Environment, Ministry of Home Affairs, Coordinating Minister for Economic Affairs, the National Land Agency (BPN), Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas), the Downstream Regulatory Agency of Oil and Gas (BPH Migas), and the Presidential Task Force for Development Monitoring and Control (UKP4).

In the SLA, there are 12 major electricity sector issues that require immediate resolution by the signatories through the fulfillment of 17 key performance indicators. These issues are the increase of PLN capacity, the increase of IPP capacity, reserved power plant capacity, operational efficiency, limited gas supply, fuel price volatility, small portion of renewable energy, budget certainty, PLN's revenue (cost plus margin), the allocation of risks, PLN's low business returns, and the tariffs that do not reflect costs. On the other hand, there are 17 performance indicators that UKP4 will periodically assess, which PLN must meet.

PLN have implement review and plan development in regard to SLA realization. PLN expect involved ministries would also work to support the realization of SLA related work plan. Moreover, it expected that the Ministry of Energy and Natural Resources as the mentor of PLN to integrate the agreed points in SLA so that PLN would be able to successfully realized its work plan in the field.

The implementation of integrated SLA related work plan is believed to enable PLN to maximize the effort to reduce subsidies while at the same time increase the national electrification ratio substantially and record future excellent performance level both from operational and financial perspectives.

Strategi Pengembangan Usaha
Business Development Strategy

PLN merancang strategi pengembangan usaha dengan mempertimbangkan kondisi terkini dan menetapkan program prioritas guna memastikan diperolehnya peningkatan level kinerja baru dalam waktu singkat.

PLN develops business development strategy which consider updated condition and states priority programs to ensure the achievement of performance level improvement within short period.

Tujuan Strategis Tahun 2013 - 1017

Perseroan menetapkan tujuan strategis *(strategic objectives)* dan program prioritas jangka pendek maupun jangka panjang.

Adapun tujuan strategis Perusahaan untuk periode 2013-2017 adalah:

1. Memperbaiki kondisi keuangan
2. Meningkatkan efisiensi investasi
3. Mengoptimalkan bauran energi
4. Memperbaiki kinerja operasional
5. Memperbaiki citra korporasi

Program Prioritas Jangka Pendek

Perseroan telah mengidentifikasi beberapa persoalan krusial yang harus segera diselesaikan, mencakup:

1. Minimnya cadangan energi listrik, yang disebabkan oleh:
   - Minimnya investasi pembangkitan akibat kondisi keuangan sebelum tahun 2009,
   - Keterlambatan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan investasi untuk melayani pertumbuhan permintaan, dan
   - Turunnya kinerja peralatan sebagai akibat terbatasnya kegiatan pemeliharaan sehingga tidak mampu memenuhi tingkat mutu pelayanan.

     Kondisi ini tidak dapat ditangani sendiri oleh Perseroan, namun membutuhkan dukungan Pemerintah dan *Stakeholders* lainnya. Situasi infrastruktur sektor ketenagalistrikan saat ini belum memadai, dikarenakan:

     – Permintaan yang terus meningkat, namun dana internal untuk mendukung investasi masih belum mencukupi.
     – Banyaknya proyek IPP yang dijadwal ulang bahkan dihentikan pelaksanaannya karena alasan ketidakmampuan pendanaan.
     – Di sisi pembangkitan, meningkatnya permintaan energi listrik akan menimbulkan tekanan pada sisi transmisi dan distribusi.
     – Pembebanan trafo yang mendekati kapasitas maksimal, dan kapasitas saluran transmisi dan distribusi yang tidak memenuhi kriteria keandalan.

     Sesuai dengan program jangka pendek, PLN telah dan masih melakukan langkah-langkah terintegrasi untuk menyeimbangkan pasokan dan kebutuhan dengan melakukan optimalisasi aset dan sumber-sumber lokal yang ada, seperti pembelian *excess power* dan pembelian listrik dari pembangkit milik swasta yang *idle*, *revitalisasi* pembangkit dan sewa genset.
2. Ketersediaan pasokan energi primer

   Ketersediaan pasokan energi primer menjadi salah satu penyebab minimnya pasokan daya. Sebagai contoh, beberapa pembangkit PLTGU/PLTG mengalami *derating* dari kapasitas terpasangnya akibat penurunan pasokan gas alam, yang akan berdampak langsung pada kondisi sistem kelistrikan. Fenomena ini terjadi pada semua pembangkit *dual-fired* lainnya dimana bahan bakar minyak akan digunakan sebagai pengganti, apabila tidak tersedia gas. Di samping berdampak pada keandalan pasokan, kondisi ini juga akan meningkatkan biaya produksi, mengingat harga bahan bakar minyak paling tinggi dibandingkan dengan sumber energi lainnya.

Strategic Objectives 2013-2027

The Company establishes strategic objectives as well as short-term and long-term priority programs.

The company's strategic objectives are:

1. To improve PLN's financial position
2. To improve investment efficiency
3. To Optimize fuel mix
4. To improve operational efficiency
5. To improve PLN's image

Short Term Priorities

The Company has identified following vital issues that must be resolved as soon as possible:

1. The shortfall in electricity supply, which is caused by:
   - The lack of investment in power generation due to the difficult financial condition prior to 2009;
   - The delays in completion of works hindered the effort to serve the growing demand, and;
   - The decline of equipment performance as a result of the limited maintenance activities which lead to inability to fulfill the standard quality of service provided. To solve these issues, PLN needs the cooperation and support from the government and other Stakeholders.

     The condition of the infrastructure of electricity sector is inadequate due to:

     – Rapid increase in electricity demands, while the internal funds to support the investment in power plant is insufficient.
     – Some IPP projects being rescheduled and even stopped because of the difficulty in funding sources.
     – Rapid increase in electricity demands puts additional pressure to on the transmission and distribution perspective.
     – The transformers operates at near maximum capacity and the unreliable transmission and distribution capacity.

     In accordance to the short-term programs, PLN has been performing integrated measures to balance the supply and demand by optimizing the current local assets and resources, such as purchase of excess power and purchase of electricity from idle privately owned power plant, and revitalizing existing power plant and generators.
2. The Sufficiency in Primary Energy Supply

   For example, some combined cycle and gas power plants. The insufficiency of primary energy supply is one the reasons of the low supply of power. underwent derating from their installed capacity due to the decreasing natural gas supplies. This will have direct impact on the condition of the electrical system. This phenomenon occurs in all other duel-fired power plants on which petrol is used as a substitute fuel if gas is not available. In addition to the impact on supply reliability, the condition increase the cost of production given that the price of petrol is the highest compared to other energy sources.

Efisiensi penggunaan BBM sejatinya telah dilakukan dengan mengkonversikan bahan bakar minyak ke batubara dan gas. Namun demikian, mundurnya target penyelesaian proyek PLTU 10.000 MW tahap I yang menggunakan bahan bakar batubara dan tidak terpenuhinya kebutuhan pasokan gas menuntut PLN harus melakukan terobosan untuk menyelesaikan persoalan yang sudah menahun ini, namun tanpa dukungan Pemerintah masalah yang dihadapi PLN tidak akan dapat teratasi begitu saja.
PLTS *centralized* yang *hybrid* dengan PLTD atau sepenuhnya dipasok dari *solar cell* telah dikembangkan untuk daerah dengan sistem kecil (*isolated*), dan tidak mempunyai sumber energi baru terbarukan (air dan panas bumi).

Dalam jangka pendek, PLN telah dan akan mengintensifkan penerapan konsep baru sistem *peaker*, yaitu menggantikan PLTD dan PLTG berbahan bakar minyak dengan PLTG-Gas Storage, PLTG-Mini LNG, PLTGB-Gas Batubara, dan PLTA *Pumped Storage*.

3. Tertundanya proyek IPP dan pengembangan pembangkit geothermal
   Untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan kebijakan terpadu dengan melibatkan beberapa institusi pemerintah terkait, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, BAPPENAS, Pemerintah Daerah (pembiayaan lokal, hak atas tanah) dan para *stakeholders* lainnya (lender, IPP).
4. Rendahnya tingkat elektrifikasi
   Penyediaan listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi di propinsi tertinggal sangat penting karena ketersediaan listrik di suatu daerah erat kaitannya dengan tingkat kemajuan daerah tersebut.
5. Listrik Prabayar/Listrik Pintar
   PLN telah mengembangkan layanan terbaru untuk membantu pelanggan melakukan pengaturan penggunaan energi listrik melalui meter elektronik prabayar dengan berbagai kelebihan, antara lain: pemakaian listrik lebih terkendali, tanpa ada sanksi pemutusan, tanpa dikenakan denda keterlambatan, tanpa Uang Jaminan Pelanggan, tidak dikenakan biaya beban bulanan dan sebagainya.
6. Susut jaringan.
   Program penurunan susut jaringan akan terus dilaksanakan dengan memperbanyak trafo distribusi sisipan baru, mengurangi transfer energi dengan mempercepat COD pembangkit baru, penggunaan trafo distribusi *low losses*, meningkatkan penertiban pemakaian listrik termasuk penerangan jalan umum (PJU) termasuk pemakaian listrik *billboard ilegal*, serta mendorong penggunaan listrik prabayar.
7. Kerjasama Penelitian dan Pengembangan
   Dalam rangka memasyarakatkan penggunaan kendaraan listrik, PLN telah berkomitmen untuk memulai *Pilot Project* melalui kerjasama penelitian, pengembangan dan implementasi kendaraan listrik berikut unit charging station. Kegiatan ini dapat mendukung pengendalian subsidi BBM, memperbaiki ketahanan dan efisiensi energi serta menurunkan emisi karbon. Hal ini sesuai dengan salah satu misi PLN yaitu menjalankan kegiatan usaha ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan.

Effort to increase efficiency of petrol use has been done by converting petrol to coal and gas. The delayed of the completion of the first stage of 10,000 MW power plant project from its target time and the unfulfilled demand of gas supply, forces PLN to make a breakthrough to resolve these chronic problems. Therefore, without support from the government, in financing or facilities, or policies, the problem faced cannot be resolved easily.

Solar power plants, either a hybrid with diesel power plant or fully fired by the solar cell system, are developed for isolated or remote areas or in the area where renewable energy sources (water or geothermal) is not available.

In a short term, a new peaker system concept will be commencing, replacing diesel and gas power plants to gas power plant-Gas Storage, gas and coal power plant-Gas Coal and hydro power plant-Pumped Storage.

3. Delays in IPP projects and geothermal development
   The solution to this problem requires an integrated policy from several related government agencies, including the Ministry of Finance, Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of SOEs, Ministry of National Planning and Development (BAPPENAS), the local government (local financing, land rights) and other stakeholders (lenders, IPP).
4. Low levels of electrification
   Electricity supply and increasing electrification ratio in the underdeveloped provinces are very important as the availability of electricity in an area is closely related to the area's growth progress.
5. Prepaid Electricity/Smart Electricity
   This is PLN's latest smart method of selling electricity to customers through prepaid electronic meter. The advantages of this scheme is relatively easier to be managed, e.i : controlled electricity consumption, no sanction termination, no payment delay penalty, no Customer Deposit, and no monthly charge, last but not least it will be automatically disconnected if the allocation is all consumed.
6. Network losses
   The network losses reduction program will be implemented with emphasis on: adding inserted distribution transformers, reducing the transfer of energy by accelerating the COD of new power plants, using low losses distribution transformer, improving electricity consumption controlled, including controlling street lighting and electricity consumption of illegal users, and encouraging the use of prepaid electricity.
7. Cooperation for research, development
   To encourage the usage of electric vehicle, PLN has committed to start a Pilot Project through cooperation for research, development, and implementation of electric vehicle and charging stations. The activity support the effort to control the fuel subsidy, improve the energy efficiency and reduce carbon emission. It is in accordance with one of PLN missions which is operating sustainable electricity business.

8. Terbatasnya dana Perseroan untuk investasi
   Kondisi keuangan PLN yang masih terpengaruh oleh efek krisis keuangan 1998 mengakibatkan terbatasnya dana untuk kegiatan investasi. Modal PLN telah menyusut akibat akumulasi kerugian hingga sebesar Rp15 triliun dalam 5 tahun terakhir (sampai dengan 2008), namun sejak 2009 PLN telah mendapatkan *margin* PSO sebesar 5% (2009), 8% (2010 dan 2011) dan 7% (2012), sehingga secara laporan keuangan PLN telah mencetak laba, kecuali pada tahun 2013 dimana pelemahan nilai tukar rupiah membuat kewajiban pokok dan bunga pinjaman PLN meningkat tajam dan menyebabkan PLN membukukan kerugian yang cukup besar.
   Pada tahun 2014, kebijakan kenaikan TTL mulai dilaksanakan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi besaran subsidi bagi masyarakat yang sudah mampu. Namun demikian peningkatan jumlah pelanggan baru yang mayoritas adalah dari golongan masyarakat tidak mampu membuat jumlah subsidi listrik belum dapat dikurangi secara substansial. Dengan kondisi tersebut, likuiditas yang ada hanya cukup untuk menutupi biaya operasional dan dana internal yang tersedia sangat terbatas untuk mendukung kegiatan investasi.
9. Program khusus untuk Papua dan Papua Barat
   Dalam rangka membantu pembangunan propinsi Papua dan Papua Barat, telah dilakukan pembangunan infrastruktur dasar kabel laut dan jaringan distribusi di Bintuni dan PLTA 10x5 MW di Sungai Baliem untuk menerangi seluruh kawasan pegunungan tengah Papua. Untuk pengembangan kualitas SDM putra putri provinsi Papua dan Papua Barat, dilakukan penerimaan pegawai putra daerah Papua dan Papua Barat untuk ditempatkan di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, maka Perseroan menetapkan berbagai prioritas jangka pendek sebagai berikut:

1. Menuntaskan pembangunan pembangkit FTP 1 sehingga secara signifikan dapat mengurangi pemakaian BBM.
2. Melanjutkan pengembangan *solar cell* untuk kawasan terpencil dalam rangka mempercepat elektrifikasi.
3. Mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan konservasi energi melalui partisipasi pelanggan.
4. Memulai proses tender pembangunan interkoneksi Jawa - Sumatera.
5. Memastikan jalannya proses tender pembangkit - pembangkit besar mulut tambang di Sumatera.
6. Mengembangkan pembangkit *Peaker* dengan memanfaatkan teknologi CNG, PLTGB dan *Biomass* sebagai pengganti PLTD BBM.
7. Menyelesaikan tambahan kabel laut Jawa - Bali.
8. Mempertahankan bebas pemadaman bergilir yang telah dimulai sejak pertengahan 2010 dan menurunkan angka SAIDI maupun SAIFI.
9. Melayani kebutuhan permintaan listrik yang tinggi termasuk melayani daftar tunggu, dan meningkatkan rasio elektrifikasi secara radikal di propinsi tertinggal.
10. Melanjutkan program Listrik Prabayar/Listrik Pintar.
11. Menurunkan susut jaringan secara berkesinambungan sesuai *roadmap* susut.
12. Melakukan *roll out* ERP untuk seluruh Indonesia.
13. Memulai inisiatif pengembangan infrastruktur kendaraan listrik (*Charging Station*).

8. Lack of Company's fund for investment
   PLN's financial condition is still affected by the 1998 financial crisis, which resulted in a lack of investment. PLN's capital (Equity) has decreased due to accumulated losses amounting to IDR 15 trillion in five years (up to year 2008). However, since year 1999 PLN has gained a PSO margin of 5% (in year 2009), 8% (in year 2010 and 2011) and 7% (in year 2012), resulting in only small profit gain, except in 2013 when the weak Rupiah currency exchange rate lead to increasing loan principal payment and interest expense which lead to significant losses.

   In 2014, the policy of increasing the basic electricity price is started. The policy was able to reduce the amount of subsidy for those who do not need it. However, the subsidy has not been able to be reduced substantially due to the increasing number of new customers who are mostly from poor members of society. Due to those condition, the liquidity is only enough to cover operational cost, thus internal fund for investment purposes is very limited.
9. Special program for Papua and West Papua
   To accelerate the development of Papua and West Papua province, submarine cable infrastructure and distribution network in Bintuni as well as 10x5 MW hydro power plant in Baliem River are being constructed to provide electricity in mountainous area of Papua. While to improve the development of human resources quality level of the two provinces, recruitment of the Papuans and West Papuans is carried out as a priority program, and they will be placed in the entire country.

To cope with these problems, the Company set the short-term priorities as follows:

1. Completing the FTP-1 power plant construction in order to significantly reduce fuel consumption.
2. Continuously develop the solar cell energy construction for remote areas in order to accelerate electrification.
3. Developing renewable energy sources and energy conservation program through customer participation.
4. Starting the bidding process of Java - Sumatra interconnection construction.
5. Ascertain the bidding process of the high capacity power plants in mine mouth, Sumatra island.
6. Developing peaker plant by utilizing CNG technology, gas and coal power plant as well as Biomass as a substitute to fuel-fired diesel power plant.
7. Completing the additional construction of Java-Bali submarine cables
8. Maintaining rolling backouts-free which has been implemented since mid-2010 and can reduce the SAIDI/SAIFI.
9. Fulfilling the needs of high electricity demand, including reducing the waiting list, and radically increase the electrification ratio in the underdeveloped province.
10. Continuing pushing the growth of the Prepaid Electricity/ Smart Electricity program higher.
11. Lowering the level of the network losses in line with losses roadmap.
12. Performing the ERP roll out for the entire country.
13. Initiating the development of electric vehicle's infrastructure (Charging Station).

14. Mempersiapkan regenerasi pimpinan Perusahaan akibat tingginya jumlah pensiun untuk level manajemen atas.
    - Memperbaiki kemampuan meminjam (*Debt Capacity*).
    - Menurunkan *non fuel cost.*
    - Melakukan program khusus untuk Papua dan Papua Barat.

Aspirasi Jangka Panjang

Aspirasi jangka panjang PLN adalah menuju "Perusahaan Kelas Dunia, Menguntungkan dan Dicintai Pelanggan dengan Cara yang Ramah Lingkungan dan Aman".

1. Kelas Dunia
   Pada fungsi-fungsi utamanya, untuk menjadi perusahaan kelas dunia PLN harus berada pada kelompok 25% *best performance* di Asia (atau 60% *best performance* dunia) dalam hal kinerja operasi pembangkitan, transmisi, dan distribusi pada akhir tahun 2017. Selanjutnya, peningkatan kinerja operasi ditargetkan mencapai 10% terbaik Asia pada tahun 2022. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara memperbaiki keandalan, efisiensi, dan produktifitas pegawai. Sedangkan pada fungsi pendukung seperti proses bisnis, PLN sebagai perusahaan kelas dunia harus menerapkan proses bisnis kelas dunia, antara lain dalam hal pengadaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan manajemen aset.
   Salah satu strategi untuk mencapai kelas dunia, PLN harus mampu mengambil manfaat dari besarnya skala ekonomi pengadaan dan penggunaan prinsip *Total Cost of Ownership* (TCO) untuk mendapatkan harga dan kualitas yang lebih baik. Begitu juga dalam hal manajemen aset, optimalisasi investasi, dan kemampuan mengeksekusi proyek-proyek skala besar.

2. Menguntungkan
   Menjadi perusahaan kelas dunia saja tidaklah cukup. PLN memerlukan kemampuan dan kemandirian dalam hal keuangan. Oleh karena itu diperlukan *margin* keuntungan (*Return On Asset*) yang dapat memastikan PLN untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan *Stakeholders*.
3. Ramah lingkungan
   Perseroan harus turut bertanggung jawab menjaga lingkungan yang sehat dan terus berupaya memanfaatkan *renewable* energi yang fokus pada pengembangan geothermal dan pemanfaatan energi air. Energi batubara tetap menjadi andalan utama PLN, namun ke depan diupayakan menggunakan teknologi pemanfaatan batubara yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan. Di samping itu PLN akan memulai inisiatif implementasi *smart grid* dan akan memperluas penerapannya apabila diperlukan.
4. Aman
   PLN memiliki jumlah pegawai lebih dari 48.068 pegawai, sehingga Perusahaan harus memperhatikan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dengan tidak terjadi kecelakaan kerja *(Zero accident),* termasuk keamanan terhadap masyarakat sekitar aset operasional (lingkungan).

Dalam rangka mewujudkan aspirasi jangka panjang tersebut, PLN telah menetapkan prioritas kegiatan yang mampu mendukung pencapaian *road map* visi perusahaan tahun 2025. Sesuai dengan pentahapan pencapaian visi perusahaan, untuk tahap 2013-2017 PLN telah menetapkan beberapa prioritas jangka panjang, yakni:

14. Preparing the business leaders regeneration due to high number of retired employee at the high-level management.
    - Improving the Debt Capacity.
    - Cutting the non-fuel costs.
    - Conducting the special program for Papua and West Papua province.

Long Term Priorities

The Company's long term objectives are to transform the company into a world class company, profitable and trusted by its customers, implementing safety and environmentally friendly practices.

1. World Class
   To become a world class company, PLN must stood within the 25% best performance companies in Asia (or 60% best performance companies in the world) in terms of generation, transmission and distribution of electricity by the end of 2017. The ultimate target is to achieve 10% best operational performance companies in Asia by 2022. This stage can only be achieved through improvements of reliability, efficiency and employee productivity. Meanwhile, from the supporting functions' point of view, such as business processes, in order to be recognized as a world class company, PLN must implement world class business practices, including in procurement program, IT utilization and asset management.
   One of the strategies to become a world class company, is by maximizing the utilization of its large economic of scale in procurement process and use of the principle of Total Cost of Ownership (TCO) concept to obtain better price and quality. Similarly, the same strategy and method should be implemented in asset management utilization, investment optimization and the capability to implement the large scale projects.
2. Profitable
   As a world class company, PLN needs to be financially sound, capable and independent. Therefore, in its financial performance, it is compulsery to achieve the ratio of Return on Assets (ROA) which can ensure the growth and sustainability of the company in line with the stakeholders' demand.
3. Environmentally Friendly
   PLN must take responsibility to maintain a healthy environment and continuously utilized renewable energy, focusing on the development of geothermal and hydropower energy. Although coal remains PLN's prime mainstay; the future efforts will be concentrated on using the cleaner technology, and ensuring the exhausted gases from coal fired power plants more environmentally friendly. In addition, PLN will start the implementation of smart grid initiative and expand its application when necessary.
4. Safety
   With more than 48.068 employees, the Company must pay attention to safety and health of its employees. The ultimate aim in safety program is to achieve zero accident. Similar attention must also be paid to safety of the public around the operational assets.

In order to achieve the long-term objectives, the Company has set priorities for actions that can support the achievement of the company's year 2025 vision roadmap. In accordance with the phasing of the company's vision achievement, the long-term priorities for the year 2013-2017 phase include:

1. Antisipasi implementasi UU No. 30 Tahun 2009 dan PP No.14 Tahun 2012.
2. Mempertahankan kecukupan pasokan daya dan menciptakan sistem ketenagalistrikan yang efisien termasuk melibatkan partisipasi konsumen melalui *Demand Side Management*.
3. Mempertahankan kondisi keuangan yang sehat.
4. Mempersiapkan kesiapan perusahaan menghadapi perubahan termasuk organisasi, budaya, manajemen kinerja serta ketersediaan tenaga kerja.
5. Meningkatkan efisiensi internal perusahaan dalam rangka optimalisasi BPP.
6. Memastikan ketersediaan energi primer dalam rangka optimalisasi bauran energi.

Target Jangka Panjang Tahun 2013-2017

Dalam rangka mendukung penerapan program prioritas jangka panjang perusahaan, dan selaras dengan Kesepakatan Bersama tentang *Service Level Agreement* (SLA, lihat Box Text terkait di uraian "Pengembangan Jangka Panjang"), PLN juga telah menetapkan target jangka panjang sebagai berikut, sepanjang tidak ada kondisi khusus yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan:

1. Menambah kapasitas 5 GW per tahun.
2. Mengoptimalkan bauran energi dengan target produksi oleh BBM menjadi maksimum 3,4% (2017), EBT minimum 8% pada tahun 2017.
3. Menurunkan BPP dari Rp1.380/kWh menjadi Rp1.131/kWh (tahun 2017).

1. Anticipation of the enactment of Law No. 30 of 2009 and Government Regulation No. 14 of 2012.
2. Maintaining adequate power supplies and creating an efficient electricity system, including to invite consumer to participate in the efficiency program through Demand Side Management.
3. Maintaining sound financial condition.
4. Preparing the readiness of companies to cope with the changes, including organization, culture, performance management and labor availability.
5. Improving internal efficiency in order to optimize the Basic Cost of Electricity Production.
6. Ensuring the availability of primary energy in order to optimize the mix of energy.

Long-Term Targets Year 2013-2017

In order to support its long-term priorities, and to follow the Service Level Agreement / SLA, the Company has also set the long-term targets as follows (assuming no special condition or situation):

1. Increasing the capacity of power plant by 5 GW per year
2. Optimizing energy mix with fuel production target by a maximum of 3.4% (2017), and renewable energy to a minimum of 8% by 2017.
3. Decreasing Basic Cost of Electricity Production from Rp1,380/kWh to Rp1,131/kWh (2017)

Roadmap Target Jangka Panjang 2013-2017 Road Map of Long-Term Targets 2013-2017

	Kondisi 2012 Conditions in 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Target Kriteria Criteria Target
Penambahan Pembangkit PLN & IPP *Addition of PLN & IPP Power Plants*	3.04 1.59	3.52 0.43	3.06 0.75	3.99 1.22	1.93 4.41	2.97 5.94	Memenuhi kebutuhan listrik sesuai kemampuan keuangan perusahaan (GW) *To meet electricity demands in line with the Company's financial ability (GW)*
Bauran Energi BBM & Energi terbarukan *Fuel Mix & Renewable Energy*	19.3 9.2	16.3 8.6	11.6 10.6	5.4 6.2	5.6 6.9	3.4 7.9	Bauran Energi dari BBM berkurang, energi terbarukan bertambah (%) *Fuel mix from oil-based fuel decrease, renewable energy increase (%)*
BPP *Basic Cost of Electricity Production*	1.309	1.320*	1.347	1.207	1.182	1.131	Menurunkan BPP (Rp/kWh) *Reducing BPP (Rp/kWh)*
Opex Non Fuel	214	216	217	217	216	214	Efisiensi operasi dengan menurunkan Opex non fuel per kWh jual (Rp/kWh) *Operational efficiency by reducing Opex non-fuel per kWh sold (Rp/kWh)*
Susut Jaringan *Network Losses*	9.21	8.97	9.00	8.55	8.50	8.48	Menurunkan susut jaringan (%) *Reducing network losses*
SAIDI	231	200	186	168	149	129	Menurunkan SAIDI (menit/pelanggan/tahun) *Reducing SAIDI (minute/customer/year)*
SAIFI	4.2	3.8	3.5	3.2	2.9	2.6	Menurunkan SAIFI (kali/pelanggan/tahun) *Reducing SAIFI (times/customer/year)*
EAF	88	85	87	89	90	91	Mengoptimalkan EAF (%) *Optimizing EAF (%)*
ROA	0.59	(2.1)	1.8	5.7	4.0	4.5	Kesehatan keuangan perusahaan dengan peningkatan ROA (%) *The company's financial health with ROA increase (%)*

*Realisasi tahun 2013 adalah Rp1.380/kWh berdasarkan audit BPK

*Realization 2013 is Rp1.380/kWh based on Supreme Audit Board

4. Mengendalikan OPEX Non Fuel per kWh jual dari Rp216/kWh menjadi Rp214/kWh.
5. Menurunkan susut jaringan dari 8,97% menjadi 8,48% dan SAIDI/SAIFI dari 200 menit/3,8 kali gangguan menjadi 129 menit/2,6 kali gangguan, mengoptimalkan EAF dari 85% (tahun 2013) menjadi 91% (tahun 2017).
6. Memperbaiki *Return On Assets* (ROA) dari negatif 2,1% menjadi 4,5% sampai dengan tahun 2017.

Inisiatif Strategis

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, PLN telah menyusun delapan inisiatif strategis - lima inisiatif strategis berkaitan dengan fungsi bisnis inti, dua inisiatif strategis sebagai *enabler*, dan satu inisiatif strategis sebagai *ultimate result* dari inisiatif strategis lainnya. Delapan inisiatif strategis tersebut adalah:

1. Mengoptimalkan ekspansi kapasitas dan pembiayaan, yang bertujuan untuk mengoptimalkan ekspansi kapasitas berikut bauran bahan bakarnya dengan biaya terendah dan meningkatkan peluang untuk memperoleh sumber dana yang dibutuhkan.
2. Mengoptimalkan biaya energi primer, yang bertujuan untuk: (i) mengamankan harga primer terendah untuk mengurangi biaya, dan (ii) memastikan ketersediaan pasokan energi primer.
3. Melanjutkan *Operational Performance Improvement* (OPI), mempunyai tujuan untuk mendorong pelaksanaan operasional menuju pada tingkat layanan kelas dunia dengan memaksimalkan nilai tambah aset baik dari aspek efektivitas biaya, operasi dan pemeliharaan, tingkat layanan dan ketersediaan kapasitas.

   Operational Performance Improvement (OPI) merupakan program perubahan perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas kinerja suatu unit atau bidang kerja yang menyeluruh dan melibatkan fungsi bidang teknik, manajemen, sistem organisasi dan kesiapan dari sumber dayanya.
4. Melanjutkan *Procurement and Construction Excellence*, yang bertujuan untuk meminimalkan *total cost of ownership* (TCO), menurunkan dan mengoptimalkan biaya barang dan jasa serta memastikan pelaksanaan konstruksi yang tepat waktu dan memenuhi kualitas.
5. Melanjutkan *Commercial Excellence*, yang dapat diimplementasikan pada kategori Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Layanan Khusus.
6. Meningkatkan Manajemen *Stakeholders* dan Regulasi, yang bertujuan untuk fokus kepada pembentukan fungsi regulasi dan pengimplementasian UU Ketenagalistrikan yang baru.
7. Melanjutkan budaya kinerja tinggi dan kepemimpinan yang kuat, yang bertujuan untuk (i) menjalankan visi korporat; (ii)membangun budaya perbaikan berkelanjutan; (iii) mengembangkan generasi untuk masa depan; (iv) mengimplementasikan *Enterprise Risk Management* (ERM); (v) kepemimpinan yang kuat dalam eksekusi.
8. Meningkatkan pembentukan citra yang positif, tujuannya adalah untuk menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan *stakeholders*.

Lima inisiatif strategis pertama diharapkan akan memberikan hasil yang terukur dan berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan, sedangkan keberhasilan inisiatif strategis *enabler* dan infrastruktur pendukung lainnya meskipun tidak berdampak langsung pada kinerja keuangan PLN, namun kesuksesannya akan sangat penting untuk memastikan keberhasilan lima inisiatif strategis utama.

4. Controlling the Non-Fuel OPEX per kWh sales from Rp216/kWh to Rp214/kWh.
5. Decreasing network losses from 8.97% to 8.48% and SAIDI/SAIFI from 200 minutes/3.8 times of interruption to 129 minutes/2.6 times of interruption, optimizing EAF from 85% (2013) to 91% (2017).
6. Increasing Return On Assets ratio (ROA) from minus 2.1% to 4.5% by 2017.

Strategic Initiatives

In order to achieve the targets, the Company has set eight strategic objectives of which five are related to core business function, two as the enabler, and one as the ultimate result of the other strategic initiatives. The eight strategic initiatives are:

1. Optimizing the expansion of capacity and funding,, which is aimed to optimize expansion of capacity along with the fuel mix at the lowest cost and increase opportunities of obtaining the required fund sources.
2. Optimizing primary energy cost, which is aimed at: (i) secure the lowest primary energy to reduce the cost, and (ii) assure the primary energy supply availability
3. Maintaining Operational Performance Improvement (OPI), this is aimed to drive operational execution toward world class services level by maximizing assets' value added either from cost effectiveness aspect, operational and maintenance, service level or capacity availability aspect.

   OPI is a continuous improvement and transformation program which is aimed to improve the performance ability and capability of a unit or work division. The program is a holistic program and involve engineering function, management, organizational system, and the preparedness of the resources.
4. Maintaining Procurement and Construction Excellence, which is aimed to minimize total cost of ownership (TCO), reduce and optimize goods and service costs as well as assure timely construction implementation that meets the quality requirement.
5. Maintaining Commercial Excellence, which can be implemented in the Basic Electricity Tariffs category for the purpose of Special Service.
6. Improving Stakeholder and Regulatory Management, which is aimed to focus on the establishment of regulation function and the implementation of the new electricity law.
7. Maintaining strong work culture and leadership, which is aimed to (i) execute the corporate vision; (ii) build the culture of sustainable improvement; (iii) develop the future generation; (iv) implement Enterprise Risk Management (ERM); (v) strong leadership in the execution.
8. Improving positive corporate image, which is aimed to make good relationship and communication between the company and the stakeholders.

The first five strategic initiatives are aimed to provide measurable results and directly affect the Company's financial performance. Meanwhile, the success of the enabler strategic initiatives and other supporting infrastructure, although not affecting PLN's financial performance directly, will be important to assure the success of the five main strategic initiatives.

Pengembangan Organisasi
Organizational Development

Merealisasikan program pengembangan organisasi guna memastikan struktur organisasi yang lain dan efektif untuk mendukung terciptanya peningkatan kinerja berkelanjutan dalam jangka panjang.

To bring forth an organization development program to ensure lean and effective organization structure to support sustainable performance improvement in the long run.

Pengembangan Organisasi merupakan wujud realisasi salah satu butir dari 8 inisiatitf strategis Pengembangan PLN Jangka Panjang, yakni butir ke 7 "Pembangunan Budaya Kinerja Tinggi dan Kepemimpinan yang Kuat". Program-program terkait yang dilaksanakan meliputi: Penerapan Manajemen Kinerja, Penyusunan Rencana dan Strategi Pengadaan/Pengelolaan Tenaga Kerja, Penerapan Manajemen Talenta, Program Budaya Kinerja Unggul, Mengembangkan *Human Capital Management System*, Program Sertifikasi dan Pengembangan Organisasi.

Sejalan dengan dinamika dan tantangan lingkungan bisnis yang semakin kompleks, termasuk menyikapi implementasi regulasi Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009, maka PLN telah menyusun *roadmap* organisasi yang bersifat fleksibel, adaptif, responsif dan mampu menjawab seluruh permasalahan penataan organisasi secara menyeluruh. *Roadmap* penataan organisasi tersebut telah memperhatikan pendekatan sistemik, dengan menjamin adanya *alignment, integration*, dan *synthesis* organisasi, yang mampu memelihara kinerja organisasi eksisting sekaligus menyiapkan kemampuan untuk menjawab *sustainability* organisasi di masa mendatang.

Roadmap Organisasi Tahun 2014-2018

Roadmap penataan organisasi PT PLN (Persero) disusun agar komprehensif, memiliki kegesitan (*agility*) dan adaptif terhadap dinamika lingkungan internal dan eksternal, diperlukan sebagai acuan pengembangan organisasi yang tepat dalam menjalankan proses bisnis perusahaan, ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi agar selaras dengan strategi korporat dan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. *Roadmap* organisasi tersebut adalah bagian integrasi yang tidak dapat dipisahkan dari *roadmap* korporat, serta selaras dengan seluruh inisiatif strategis dan kebijakan perusahaan.

Seiring dengan dinamika yang terjadi di lingkup internal maupun eksternal, *roadmap* organisasi mengalami penyesuaian. Perubahan *roadmap* organisasi tersebut dilakukan sejalan dengan pencapaian yang terjadi, dinamika & tantangan lingkungan bisnis antara lain nilai investasi, pembangunan proyek-proyek besar, pemenuhan rasio elektrifikasi, dan regulasi. *Roadmap* organisasi tersebut memperhatikan pendekatan secara sistemik dengan menjamin adanya *alignment*, *integration*, dan *synthesis* organisasi, yang mampu memelihara kinerja organisasi eksisting, menyiapkan kemampuan berinovasi dalam memelihara *sustainability* organisasi di masa mendatang.

Roadmap organisasi menggariskan perubahan masing-masing fungsi organisasi disetiap jenjang. Kantor Pusat di masa mendatang akan lebih fokus pada hal-hal yang bersifat strategis. Beberapa bisnis proses yang dianggap penting dan dapat dimodernisasi serta memberikan dampak efisiensi jika dikelola terpusat akan terus disentralisasi.

Organization development is a realization of one of the 8 long term development strategic initiatives, specifically number 7 "Building high performance culture and strong leadership." Programs related to this initiative covers: Performance Management Implementation, Human Resources Management/ Requirement Strategy and Planning Draft, Talent Management Implementation, Top Performance Culture Program, Human Capital Management System Development, Certification Program and Organization Development.

Along with the dynamics and challenges of business environment that are getting more complex by the hour, following the implementation of Electricity Regulation No 30 Year 2009, PLN has drafted an organization roadmap which is more flexible, adaptive, responsive, and able to answer all organization management problem in entirety. The said organization management roadmap has taken into account systematic approach, ensuring the existence of alignment, integration, and synthesis of the organization, which in turn will preserve existing organization performance as well as preparing the organization's ability to answer to future sustainability.

2014-2018 Organization Roadmap

PLN organization management roadmap is drafted to be comprehensive, agile, and adaptive towards the dynamics of internal and external environment; needed as a fitting guideline in running company's business processes; purposed to improving organization's effectivity and efficiency so that it aligns with the corporate strategy and applicable regulations. The said organization roadmap is an unseparable integrated part from corporate roadmap, and in tune with entire strategic initiatives and company policy.

As a lot of changes have occurred in internal and external scope, organization roadmap underwent adjustments as well. Those adjustments took place along with the achievements, dynamics, and challenges of the business environment, such as investment value, large project constructions, electrification ratio fulfillment, and regulations. The roadmap adopted a systematic approach, in which alignment, integration, and synthesis became a critical part in getting the company ready to innovate for future sustainability needs.

The organization roadmap defines the changes in each organization function in every level. In the future, Head Office will focus more on things that are more on the strategic side. Some business processes will become important and modernized, and create efficiency if managed centrally.

Beberapa proses bisnis dan kewenangan yang bersifat operasional dan pelayanan pelanggan akan didesentralisasi ke Unit-Unit untuk mempercepat proses, sehingga tercipta Unit yang mandiri, lebih responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan Unit setempat.

Several business processes, operational authorities, and customer services will be decentralized to units to accelerate process. This is done to establish independent units that are more responsive to environment changes and local unit needs.

Secara garis besar, *roadmap* organisasi Perseroan telah sesuai dengan fungsi utamanya yaitu untuk memelihara dan memperkuat kinerja organisasi saat ini serta menyiapkan kemampuan berinovasi dalam rangka memelihara kelangsungan kehidupan organisasi di masa mendatang, disusun dengan pendekatan struktur yang bersifat *lean and clean*. Gambaran ringkas *roadmap* proses reorganisasi PLN adalah:

Generally, the organization roadmap has fulfilled its primary objective which is to maintain and strengthen organization present performance and direct innovations to nurture future operations, drafted in lean and clean structure approach. Simple description of PLN reorganization process roadmap:

Roadmap Organisasi PLN 2014 - 2018 PLN Organization Roadmap 2014 - 2018

2013 - 2014	2015 - 2016	2017 - 2018
• Implementasi ERP fase 5 untuk Unit Penunjang & UIP. • Persiapan organisasi fungsi pengadaan Unit yang permanen. • Persiapan dan Implementasi PPFA (Pemusatan Pengelolaan Fungsi Administrasi). • Persiapan *Blue Print* Organisasi Korporat dan Unit. • *Implementation of ERP phase 5 for Supporting Unit and Transmission Development Unit.* • *Preparation of permanent unit procurement function organization.* • *Preparation and Implementation of PPFA (Administrative Functions Management Centralization).* • *Preparation of Corporate and Unit Organization Blue Print*	• Implementasi ERP fase 5 berjalan efektif • Implementasi organisasi fungsi Pengadaan Unit yang permanen • Implementasi PPFA secara bertahap • Implementasi HSSE, Sentralisasi Hukum • Implementasi *Blue Print* Organisasi Korporat dan Unit secara bertahap • *Effective ERP implementation phase 5* • *Implementation of permanent Unit Procurement functions organization* • *Implementation of PPFA gradually* • *Implementation of HSSE, Centralized Law* • *Implementation of Corporate and Unit Organization Blueprint gradually*	• Implementasi diseluruh Unit pemakai ERP berjalan efektif • Persiapan pemusatan /regional organisasi fungsi pengadaan • Implementasi PPFA berjalan efektif • Implementasi HSSE, Sentralisasi Hukum berjalan efektif • Implementasi *Blue Print* Organisasi Korporat dan Unit berjalan efektif • *Effective ERP Implementation in all users unit* • *Preparation of centralization / regional organization of the procurement function* • *Effective PPFA Implementation* • *Implementation of HSSE, Effective Centralized Law* • *Implementation of effective Corporate and Unit Organization Blueprint*
• Implementasi reorganisasi semua UIP berjalan efektif. • Persiapan penguatan Unit Penunjang: Pusdiklat *(Corporate University)*, Pusharlis (MRO), Puslitbang *(Research Center)*, JMK *(Construsction Management)*, Pusenlis *(Engineering Center)*, Jaser *(Certification Center)*. • Persiapan Organisasi Wilayah Sumatra menjadi Distribusi • *Implementation of all effective UIP reorganization.* • *Preparation of Supporting Unit reinforcement: Centre of Education and Training (Corporate University), Pusharlis (MRO), Central Research Institute (Research Center), CTR (Construction Management), Pusenlis (Engineering Center), Jaser (certification Center).* • *Preparation of Sumatra Area Organizations transforming into Distribution*	• Implementasi penguatan Unit Penunjang: Pusdiklat *(Corporate University)*, Purharlis (MRO), Puslitbang *(Research Center)*, JMK *Construction Management)*, Pusenlis *(Engineering Center)*, Jaser *(Certification Center)*. • Implementasi Organisasi Wilayah Sumatra menjadi Distribusi secara bertahap. • Persiapan pembentukan Organisasi Unit Pembangkit dan Unit Transmisi di Sulawesi. • Persiapan pembentukan Organisasi Unit Pembangkit dan Unit Transmisi di Kalimantan. • *Implementation Supporting Unit reinforcement: Centre of Education and Training (Corporate University), Purharlis (MRO), Central Research Institute (Research Center), JMK (Construction Management), Pusenlis (Engineering Center), Jaser (certification Center).* • *Implementation of Sumatra Regional Organizations transforming gradually into Distribution* • *Preparation of establishing Development and Transmission Unit organization in Sulawesi.* • *Preparation of establishing Development and Transmission Unit organization in Kalimantan.*	• Implementasi penguatan Unit Penunjang: Pusdiklat *(Corporate University)*, Purhalis (MRO), Puslitbang *(Research Center)*, JMK *(Construction Management)*, Pusenlis *(Engineering Center)*, Jaser *(Certification Center)* berjalan efektif. • Semua Unit Wilayah Sumatra menjadi Distribusi • Implementasi Organisasi Unit Pembangkit dan Unit Transmisi di Sulawesi • Implementasi Organisasi Unit Pembangkit dan Unit Transmisi di Kalimantan • *Implementation Supporting Unit reinforcement: Centre of Education and Training (Corporate University), Purhalis (MRO), Central Research Institute (Research Center), CTR (Construction Management), Pusenlis (Engineering Center), Jaser (certification Center) is effective.* • *All Sumatra Area Unit transforming into Distribution* • *Implementation of Development and Transmission Unit organization in Sulawesi* • *Implementation of Development and Transmission Unit organization in Borneo*

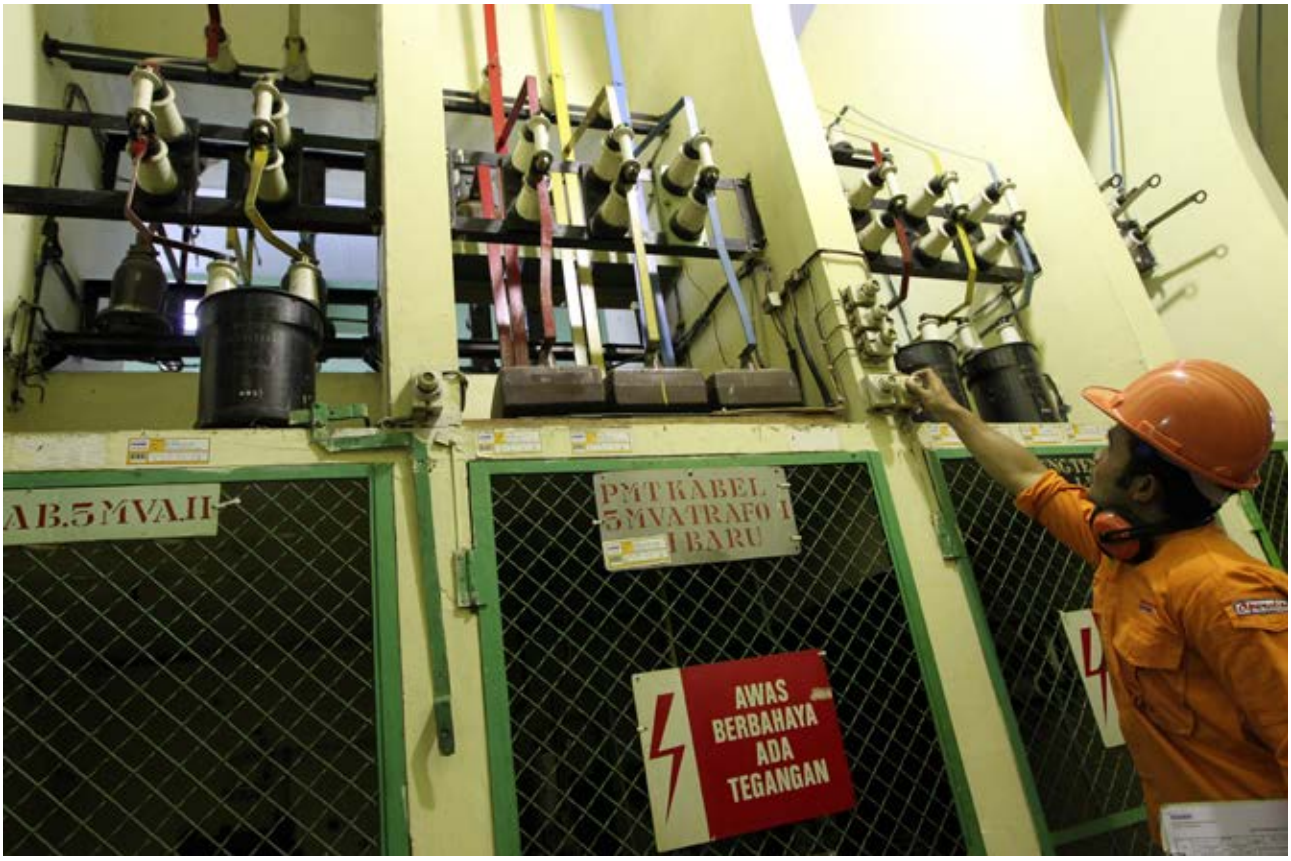

Pencapaian Program Organisasi

Adapun pencapaian perusahaan dalam menata organisasi PLN selama tahun 2014 adalah:

1. Penataan organisasi terkait Formasi Jabatan pada seluruh Direktorat dengan menambahkan jabatan Manajer Eksekutif Direksi setingkat Manajer Senior.
   Manfaat yang didapat adalah meningkatnya efektivitas sumber daya di lingkungan Direktorat, mengoptimalkan pengelolaan kinerja, memastikan terlaksananya mitigasi & manajemen risiko di Direktorat PT PLN (Persero).
2. Penataan organisasi fungsi pengadaan terkait dengan terbitnya Kep.Dir No.620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) a.l. terkait adanya Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan.
   Manfaat yang didapat adalah profesionalisasi pengadaan dengan membuat organisasi pengadaan permanen dan meninggalkan pengadaan sebagai aspek administrasi, pekerjaan sampingan dan bersifat temporer kepanitiaan, serta tetap menjaga prinsip tata kelola yang baik.

Organization Program Achievement

The company's achievement in reorganizing throughout the year 2014 are:

1. Reorganizing in terms of position formation throughout the management by adding Executive Director Manager equivalent to that of Senior Manager.
   Benefits acquired are improvement in effectivity of human resources in directorate milieu, performance management optimization, assurance in risk managing and mitigation in PLN directorate.
2. Reorganizing procurement function in relation to the issuance of Kep.Dir No.620.K/DIR/2013 regulation about PLN General Guidelines on Goods/Services Procurement such as the existence of Procurement Planning Officer and Procurement Execution Officer.
   Advantage of this is professionalization of procurement by creating permanent procurement organization and stop looking at procurement as administration aspect, side job and something that should be done by temporary committee, all the while maintaining the principle of Good Corporate Governance.

3. Penataan organisasi Direktorat SDM & Umum terkait fungsi Kesehatan & Benefit, dengan menambahkan jabatan Manajer Senior Kesehatan & Benefit.
   Manfaat yang didapat adalah tersedianya strategi, kebijakan dan terlaksananya program kesehatan & *benefit* pegawai, dan ketentuan pelaksanaan kesehatan bagi pegawai dan pensiunan.
4. Pelaksanaan pengembangan standar *Framework* Proses Bisnis PLN sebagai pengembangan Kep.Dir.No. 241.K/DIR/2012 tentang Pemetaan Proses Bisnis PT PLN (Persero).
   Manfaatnya adalah tersedianya *framework* proses bisnis PLN sebagai acuan dasar pengelolaan kegiatan, dasar penyusunan sistem korporasi & organisasi untuk menjalankan proses bisnis PLN yang efektif dan berkelanjutan.
5. Pengembangan *Center of Excellence* operasi dan pemeliharaan penyediaan tenaga listrik PLN, sesuai Kep.Dir. No.137.K/DIR/2014.
   Adapun manfaatnya adalah tersedianya kelompok ahli kompeten yang dapat memberikan usulan, saran teknis dan solusi yang menyeluruh terhadap permasalahan O&M serta mendukung dalam menghasilkan kebijakan, standar *operating procedure*, dan *best practices*.
6. Pelaksanaan *Optimality of Organization* untuk me*review* efektivitas Organisasi PLN saat ini dalam mendukung kinerja Perusahaan yang hasilnya adalah *Roadmap* Organisasi (*Blueprint for PLN's High Level Organization*) yang dilaksanakan oleh Konsultan PT Booz Indonesia.
   Hasil program ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan pengembangan organisasi saat ini dan ke depan selaras dengan rencana pengembangan Korporat.
7. Pengembangan Direktori Kompetensi dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) PLN yang akan digunakan sebagai pedoman pengembangan kompetensi individu untuk mendukung tercapainya tujuan Perusahaan.
8. Standarisasi Uraian Jabatan di lingkungan PLN, meliputi: Pembangunan, Pembangkitan, Transmisi, Wilayah, Distribusi, Kantor Pusat dan Unit Pendukung.
   Standar tersebut kelak digunakan sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan pekerjaan disetiap jabatan untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan yang lebih baik dan untuk evaluasi jabatan dalam penetapan bobot jabatan.
9. Penghitungan evaluasi jabatan dengan penetapan bobot dan *grade* posisi jabatan dengan mempergunakan metoda *point system*. Evaluasi Jabatan yang telah dilaksanakan yaitu:
   - Posisi struktural Manajemen Atas,
   - Posisi struktural selain Manajemen Atas,
   - Posisi fungsional F1 sampai dengan F6 di Unit-Unit PLN,
   - Posisi fungsional F1 sampai dengan F6 di PLN Pusat.

   Bobot dan *grade* posisi jabatan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk menentukan besaran remunerasi yang tepat diantara posisi jabatan di lingkungan Perseroan.
10. Perencanaan Tenaga Kerja dan Pagu Rekrutmen Tahun 2014 untuk masing-masing Unit PLN, sehingga akan diperoleh pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (kapasitas & kapabilitas) untuk mendukung strategi, kebijakan dan program kerja Perusahaan.

3. Reorganizing General Affairs & Human Resources Directorate in terms of Health & Benefit function, by adding Health & Benefit Senior Manager position.
   Benefits acquired are provision of strategy, policy, and programs for employee health and benefit, as well as health implementation regulation for employees and retirees.
4. Implementation of PLN Business Process Framework development in expanding Kep.Dir.No. 241.K/DIR/2012 regulation about PLN Business Process Mapping.
   The advantage of this is availability of PLN business process framework as basic guideline in operations management and as basic in building corporation & organization system to perform effective and sustainable PLN business process.
5. Building operation Center of Excellence and PLN power supply maintenance, according to Kep.Dir.No.137.K/DIR/2014 regulation.
   The benefit is that there is a group of experts to give comprehensive plan, technical suggestions and solutions that answer to O&M problems as well as to help out in stipulating policies, standard operating procedures, and best practices.
6. Implementation of Optimality of Organization to review present PLN organization effectivity in supporting Company performance, resulting in Organization Roadmap (Blueprint for PLN's High Level Organization) by Consultant PT Booz Indonesia.
   Product of this program is to be referred to as guidelines in organization development for present and future in tune with Corporate development plans.
7. Building PLN Job Competency and Requirement Directory which will be referred to as guidelines in individual skill development to achieve company's objectives.
8. Standardization of Job Descriptions in PLN company, including: Development, Generation, Transmission, Region, Distribution, Head Office and Supporting Unit.
   The said standard are to be used as reference in work execution process in every job to maintain better company performance and position evaluation to determine position weight.
9. Job evaluation by determining position grade and weight using point system method. Job evaluations that have been performed are for:
   - Top Management structural positions
   - Other structural positions
   - Functional position F1 through F6 in PLN units
   - Functional position F1 through F6 in PLN Head Office

   Position grade and weight are to be referred to in determining remuneration packages for jobs in the company.
10. Human Resources and Recruitment Allotment Planning in 2014 for each PLN unit, so that there will be fulfillment of human resources needs (capacity & capability) to support company strategy, policy, and work programs.

Pengembangan Transmisi dan Distribusi

Development of Transmission and Distribution

Mengembangkan sistem transmisi dan distribusi yang handal untuk memastikan peningkatan level kinerja PLN dimasa mendatang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Developing reliable transmission and distribution systems to ensure an increase in the level of PLN future performance and in general supporting the growth of the national economy.

Proses penyaluran daya listrik dari pembangkit dilakukan melalui jaringan transmisi dan distribusi. Jaringan transmisi yang dikembangkan oleh PLN adalah jaringan tegangan ekstra tinggi 500 kV, jaringan tegangan tinggi 275 kV, 150 kV dan 70 kV sedangkan jaringan distribusi adalah jaringan tegangan menengah 20 kV dan jaringan tegangan rendah 220 V.

Untuk jaringan transmisi di Jawa-Bali dan Sumatera, telah terinterkoneksi dan dilengkapi dengan pusat pengaturan dan penyaluran beban (P3B), sedangkan untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTB, NTT dan Papua belum terinterkoneksi secara penuh.

Peran Pusat Pengaturan dan Penyaluran Beban (P3B)

Pusat Pengaturan dan Penyaluran Beban (P3B) mempunyai peran sebagai (i) pusat pengatur beban listrik yang mengalir pada sistem jaringan hingga sampai ke pelanggan, (ii) menjaga kecukupan aliran listrik pada saat beban puncak sekaligus (iii) menjaga efisiensi produksi listrik pada saat beban listrik relatif rendah.

Untuk menjaga kinerja sistem jaringan, P3B juga mengatur dan merekomendasikan jadwal pemeliharaan stasiun pembangkit, sistem transmisi dan sistem distribusi yang terdiri dari rangkaian trafo dan gardu induk agar masing-masing titik beroperasi dengan kinerja terbaik dan terhindar dari kelebihan beban yang dapat berakibat terganggunya sistem kelistrikan.

Untuk menjamin kinerja seluruh sistem kelistrikan dari stasiun pembangkit hingga ke pelanggan, PLN dengan mempertimbangkan masukan dari P3B untuk mengembangkan jaringan transmisi dengan kapasitas beban penyaluran yang memadai dan sistem distribusi ke pelanggan dengan tegangan listrik sesuai karakteristik kebutuhan pelanggan.

Program Pengembangan Sistem Transmisi

Pengembangan sistem transmisi secara umum diarahkan kepada tercapainya keseimbangan antara kapasitas pembangkitan di sisi hulu dan permintaan daya di sisi hilir secara efisien dengan memenuhi kriteria keandalan tertentu. Disamping itu pengembangan sistem transmisi juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatasi *bottleneck* penyaluran, perbaikan tegangan pelayanan dan fleksibilitas operasi.

Proyek transmisi pada dasarnya dilaksanakan oleh PLN, kecuali beberapa transmisi terkait dengan pembangkit milik IPP yang sesuai kontrak PPA dilaksanakan oleh pengembang IPP. Namun demikian, terbuka opsi proyek transmisi untuk juga dapat dilaksanakan oleh swasta dengan skema bisnis tertentu, misalnya *build lease transfer* (BLT). Opsi tersebut berdasarkan pertimbangan keterbatasan kemampuan pendanaan investasi PLN dan pertimbangan perusahaan swasta dapat lebih fleksibel dalam hal mengurus perizinan dan pembebasan lahan.

The distribution process of generated electrical power is done through transmission and distribution networks. Transmission network developed by PLN is extra high voltage network of 275 kV - 500 kV, and high-voltage network of 70 kV - 150 kV, while the distribution network is a medium voltage network of 20 kV, and low voltage network of 220 V.

Specific in Java-Bali and Sumatra, the transmission network have already interconnected and equipped with a central arrangement and distribution of the load (P3B), whereas in Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTB, NTT and Papua were not yet fully interconnected.

Role of Regulatory and Distribution Center Expenses (P3B)

Center for Regulator and Distribution of Power Load(P3B) has three main roles, which are (i) as a central regulator of the electrical power load sent through the network until it gets to the customer, (ii) to maintain adequate flow of electricity during the peak load at once (iii) to maintain the efficiency of electricity production when the load electricity is relatively low.

To maintain the performance of the network system, P3B also organize and recommended maintenance schedule for generating stations, transmission system and distribution system consisting of a series of transformers and substations, so that each of them can operate at the best performance and can avoid the overload that can result harm the electrical system.

To guarantee the performance of the entire electrical system of the power station to serve the customers, base on the data inputted from P3B, PLN develop transmission network with sufficient load capacity and distribution system to customers in appropriate and adequate voltage in accordance with the characteristics of the customer.

Transmission System Development Program

The Development of transmission system, generally directed towards the achievement of a balance and efficiency of loads between generating capacity in the upstream and demand in downstream sides while maintaining reliability criteria. Besides, the development of transmission system also intended as an effort to overcome the bottleneck on the distribution side, and to maintain voltage and flexibility of operation.

Transmission project is basically carried out by PLN, unless some transmission associated with the plant's corresponding to IPP stipulated in PPA contracts, executed by the IPP developers. However, these activities openly offered to be carried out by the private sector with a particular business schemes, for example, Build Lease and Transfer (BLT). The options are based on the consideration of the limited ability of PLN investment funds, and private companies considerate can be more flexible in terms of the licenses and land acquisition.

Adapun program pengembangan sistem transmisi sebagai berikut:

Region Sumatera

Pengembangan transmisi di Sumatera akan membentuk transmisi *backbone* 500 kV yang menyatukan sistem interkoneksi Sumatera pada koridor timur, dengan pertimbangan:

1. Pusat-pusat pembangkit skala besar dan pusat-pusat beban yang besar di Sumatera akan tersambung ke dalam sistem transmisi 500 kV.
2. Akan mentransfer tenaga listrik dari pembangkit listrik di daerah yang kaya sumber energi primer murah (Sumatera bagian selatan dan Riau) ke daerah yang kurang memiliki sumber energi primer murah (Sumatera bagian utara).
3. Akan bertindak sebagai *feeder* pemasok listrik dari PLTU mulut tambang ke stasiun *converter* transmisi HVDC yang akan menghubungkan pulau Sumatera dan pulau Jawa.

Region Indonesia Timur

Pengembangan sistem transmisi di Kalimantan diutamakan untuk menghubungkan sistem - sistem yang belum terinterkoneksi, sedangkan untuk wilayah Sulawesi akan dibentuk sistem Sulawesi bagian Selatan yang menghubungkan sistem interkoneksi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Region Jawa Bali

Pengembangan transmisi 500 kV di Jawa pada umumnya dimaksudkan untuk mengevakuasi daya dari pembangkit-pembangkit baru maupun ekspansi, dan untuk menjaga kriteria sekuriti N-1, baik statis maupun dinamik. Sedangkan pengembangan transmisi 150 kV dimaksudkan untuk menjaga kriteria sekuriti N-1 dan sebagai transmisi yang terkait dengan gardu induk 150 kV baru.

Perencanaan Sistem Transmisi

Perencanaan transmisi dibuat dengan menggunakan kriteria keandalan N-1, baik statis maupun dinamis. Kriteria N-1 statis mensyaratkan apabila suatu sirkit transmisi padam, baik karena mengalami gangguan maupun dalam pemeliharaan, maka sirkit-sirkit transmisi yang tersisa harus mampu menyalurkan keseluruhan arus beban, sehingga kontinuitas penyaluran tenaga listrik terjaga. Kriteria N-1 dinamis mensyaratkan apabila terjadi gangguan hubungan singkat 3 fasa yang diikuti oleh hilangnya satu sirkit transmisi, maka tidak boleh menyebabkan kehilangan ikatan sinkron antara suatu kelompok generator dan kelompok generator lainnya.

Penambahan kapasitas transmisi direncanakan untuk memperoleh keseimbangan antara kapasitas pembangkitan dan kebutuhan beban, disamping untuk mengatasi *bottleneck*, meningkatkan keandalan sistem, dan memenuhi kriteria mutu tegangan tertentu. Kriteria yang diterapkan adalah kebutuhan penambahan kapasitas trafo di suatu GI ditentukan pada saat pembebanan trafo mencapai 70%-80%.

Jumlah unit trafo yang dapat dipasang pada suatu GI dibatasi oleh ketersediaan lahan, kapasitas transmisi dan jumlah penyulang keluar yang dapat ditampung oleh GI tersebut. Dengan kriteria tersebut suatu GI dapat mempunyai 3 atau lebih unit trafo. Sebuah GI baru diperlukan jika GI-GI terdekat yang ada tidak dapat menampung pertumbuhan beban lagi karena keterbatasan tersebut.

The transmission system development program as follows:

Sumatra Region

Transmission development in Sumatra will in the form of the backbone of 500 kV transmission interconnection system that will unify Sumatra in the east corridor, based on the following consideration:

1. Large-scale generations and large load centers in Sumatra will be connected to the 500 kV transmission system.
2. The transmission system will transfer electricity from power plants in the region with rich source of primary energy (southern Sumatra and Riau) to areas that lack a low primary energy source (northern Sumatra).
3. It will function as a feeder of electricity suppliers from PLTU mine mouth to the transmission HVDC converter station that will connect the islands of Sumatra and Java.

Eastern Indonesia Region

The development of Transmission system in Kalimantan preferably to connect the stand alone systems which have not yet interconnected, whereas for the Sulawesi area, it will be established a South Sulawesi system that will connect the interconnection system of South Sulawesi, West Sulawesi, Central Sulawesi and Southeast Sulawesi.

Region Java Bali

The Development of 500 kV transmission in Java are generally intended to evacuate power from new plants and new expansions, and to maintain the security criteria N-1, both static and dynamic. While the development of the 150 kV transmission is intended to maintain the security criteria N-1 and a transmission associated with a new 150 kV substation.

Transmission System Planning

Transmission planning made using N-1 reliability criteria, either static or dynamic. Static N-1 criterion requires when a transmission circuit is off, either because of impaired or under maintenance, the transmission circuits are left to be able to distribute the entire load current, so that the continuity of electrical power supply is maintained. Dynamic N-1 criterion requires the event of short circuit 3 phase, followed by the dismantled of a single transmission circuit, however it should not cause a loss of synchronous interconnection system among the generators groups.

The addition to Transmission capacity is planned to obtain a balance between generation capacity and load requirements, in addition to overcome bottlenecks, increasing system reliability, and meets the quality criteria specified voltage. The criteria applied are additional needs in a substation transformer capacity is determined at the time of loading the transformer reaches 70%-80%.

The number of transformer units that can be mounted at a substation is limited by the availability of land, the transmission capacity and the number of outgoing feeders can be accommodated by the substation. Based on these criteria, a substation can have 3 or more units of the transformer. A new substation is required if there is not nearby substation can accommodate load growth.

Kebijakan Pengembangan Transmisi

Dalam merealisasikan berbagai program pengembangan transmisi tersebut, Perseroan menerapkan berbagai kebijakan pokok, meliputi:

1. Pembangunan sistem transmisi dilaksanakan dengan mempertimbangkan pertumbuhan beban hingga 10 tahun ke depan.
2. Untuk jaringan yang memasok listrik ke ibukota negara PLN merencanakan *looping* antar sub-sistem dengan pola operasi terpisah untuk meningkatkan keandalan pasokan.
3. Pada saluran transmisi yang tidak memenuhi kriteria keandalan N-1 akan dilaksanakan *reconductoring* dan *uprating*.
4. Perluasan jaringan transmisi dari grid yang telah ada untuk menjangkau sistem *isolated* yang masih dilayani PLTD BBM *(grid extension)* dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan teknis.
5. Penentuan lokasi GI dilakukan dengan mempertimbangkan keekonomian biaya pembangunan fasilitas sistem transmisi tegangan tinggi, biaya pembebasan tanah, biaya pembangunan fasilitas sistem distribusi tegangan menengah dan harus disepakati bersama oleh unit pengelola sistem distribusi dan unit pengelola sistem transmisi.
6. Pemilihan teknologi seperti jenis menara transmisi, penggunaan tiang, jenis saluran (saluran udara, kabel bawah tanah, kabel laut) dan perlengkapannya (pemutus, pengukuran dan proteksi) mempertimbangkan aspek keekonomian jangka panjang, dan pencapaian tingkat mutu pelayanan yang lebih baik, dengan memenuhi standar SNI, SPLN atau standar internasional yang berlaku.

Perseroan juga telah menetapkan kebijakan lebih rinci dalam mengembangkan sistem transmisi ini, yakni:

1. Jumlah unit trafo yang dapat dipasang pada suatu GI dibatasi oleh ketersediaan lahan, kapasitas transmisi dan jumlah penyulang (*feeder*) keluar yang dapat ditampung oleh GI tersebut. Dengan kriteria tersebut suatu GI dapat mempunyai 3 atau lebih unit trafo.
2. Pengembangan GI baru juga dimaksudkan untuk mendapatkan tegangan yang baik di ujung jaringan tegangan menengah.
3. Trafo daya (TT/TM) pada dasarnya direncanakan mempunyai kapasitas sampai dengan 60 MVA.
4. Trafo IBT GITET (500/150 kV dan 275/150 kV) dapat dipasang hingga 4 unit per GITET dengan pola operasi terpisah dan dengan 2 unit per sub-sistem.
5. Spare trafo IBT 1 fasa disediakan per lokasi untuk GITET jenis GIS, dan 1 fasa per tipe per provinsi untuk GITET jenis konvensional.
6. Untuk melistriki komunitas dengan kebutuhan listrik yang dalam jangka panjang diperkirakan akan tumbuh lambat, dapat dibangun gardu induk dengan disain minimalis.

Program Pengembangan Sistem Distribusi

Pengembangan sistem distribusi disesuaikan dengan pertumbuhan permintaan selaras dengan perkembangan perekonomian suatu daerah. Kebutuhan pembangunan sistem distribusi untuk tahun 2015 diperkirakan terus meningkat sejalan dengan akan beroperasinya beberapa stasiun pembangkit tambahan, disamping telah bertambahnya jumlah pelanggan.

Transmission Development Policy

In the realization various transmission development program, the Company are implementing various basic policies, include:

1. Construction of the transmission system implemented by considering the load growth of up to 10 years into the future.
2. For a network that supplies electricity to the state capital of PLN plan looping between sub-systems with separate operating pattern to improve the reliability of supply.
3. In the transmission line which does not meet the criteria of reliability N-1 will be implemented reconductoring and uprating.
4. Expansion of the transmission network from the existing grid to reach the isolated system which is still served diesel fuel (grid extension) by considering the economic and technical aspects.
5. Determining the location of substation carried out by considering the economic cost of the construction of high voltage transmission system facilities, the cost of land acquisition, the cost of construction of the facility and the medium-voltage distribution system, it must be agreed upon by the distribution system and transmission system management unit.
6. Selection of technologies such as the type of transmission towers, the use of the pole, distribution type (airways, underground cables, submarine cables) and equipment (breakers, measurement and protection) to consider the economic aspects of the long-term, and the achievement level of better service quality, which meet SNI, ISO, and SPLN standard or applicable international standards.

The Company also has set a more detailed policy in developing this transmission system, namely:

1. The number of transformer units that can be mounted at a substation is limited by the availability of land, the transmission capacity and the number of out feeders that can be accommodated by the substation. With these criteria a substation can have 3 or more units of the transformer.
2. Development of a new substation is also intended to get a stability voltage at the end of the medium voltage network.
3. The power transformer (TT / TM) is basically planned to have a capacity of up to 60 MVA.
4. The IBT High Voltage (GITET) Transformer (500/150 kV and 275/150 kV) can be mounted up to 4 units per GITET with seperated operating pattern and 2 units per sub-system.
5. Spare IBT 1 phase transformer is provided per location for GITET types of substations, and one phase per type per province for conventional GITET types.
6. To provide electricify the community in the long term with has slow growth, it can be built substations with a minimalist design.

Distribution System Development Program

The Development of distribution system is in line with demand growth, and with the economic development of a region. Distribution system development needs for the year 2015 is predicted to increase in line with the operation of several additional power stations, and in the increased the number of customers.

Secara keseluruhan, pada tahun 2014 PLN merealisasikan pembangunan trafo distribusi berkapasitas total 3.595 MVA, pembangunan jaringan TM sepanjang 339.558,24 kms dan jaringan TR sepanjang 585.753,37 km.

Perencanaan Sistem Distribusi

Sistem distribusi pada umumnya dibuat dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Membatasi panjang maksimum saluran distribusi (JTM dan JTR) untuk menjaga agar tegangan pelayanan sesuai standar SPLN 72:1987.
2. Konfigurasi JTM untuk kota-kota besar dapat berupa topologi jaringan yang lebih andal seperti *spindle*, sementara konfigurasi untuk kawasan luar kota minimal berupa saluran radial yang dapat dipasok dari 2 sumber.
3. Mengendalikan susut teknis jaringan distribusi pada tingkat yang optimal.
4. Program listrik desa dilaksanakan dalam kerangka perencanaan sistem kelistrikan secara menyeluruh dan tidak memperburuk kinerja jaringan dan biaya pokok penyediaan.

Selain itu sistem distribusi juga diarahkan untuk meningkatkan kontinuitas pasokan kepada pelanggan (menurunkan angka SAIDI dan SAIFI) dengan upaya:

1. Membangun SCADA Distribusi untuk ibukota propinsi dan kota-kota lain yang minimal dipasok oleh 2 Gardu Induk dan 15 *feeder*.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan *recloser* atau *Automatic Vacuum Switch* (AVS) yang terpasang di SUTM, dikoordinasikan dengan *reclosing relay* penyulang di GI. Memonitor pengoperasian *recloser* atau AVS, dan menyempurnakan metode pemeliharaan-periodiknya.
3. Dimungkinkan menggunakan DAS *(Distribution Automation System)* pada daerah yang sangat padat beban dan potensi pendapatan tinggi.

Sasaran sistem distribusi adalah menyediakan sarana pendistribusian tenaga listrik yang cukup, andal, berkualitas, efisien, dan susut teknis wajar.

Kebijakan Pengembangan Distribusi

Fokus pengembangan dan investasi sistem distribusi secara umum diarahkan pada 4 hal, yaitu: (i) perbaikan tegangan pelayanan, (ii) perbaikan SAIDI dan SAIFI, (iii) penurunan susut teknis jaringan dan (iv) rehabilitasi jaringan yang tua. Kegiatan berikutnya adalah investasi perluasan jaringan untuk melayani pertumbuhan dan perbaikan sarana pelayanan.

Pemilihan teknologi seperti jenis tiang (beton, besi atau kayu), jenis saluran (saluran udara, kabel bawah tanah), sistem jaringan *(radial, loop atau spindle)*, perlengkapan (menggunakan *recloser* atau tidak), termasuk penggunaan tegangan 70 kV sebagai saluran distribusi ke pelanggan besar, ditentukan oleh manajemen unit melalui analisis dan pertimbangan keekonomian jangka panjang dan pencapaian tingkat mutu pelayanan yang lebih baik, dengan tetap memenuhi standard SNI atau SPLN yang berlaku.

Overall, in the year 2014 PLN have constructed the distribution transformer with the capacity totally 3,595 MVA, and the construction of mid-voltage (TM) network as long as 339.558,24 kms and 585.753,37 kms for the low-voltage (TR) network.

Distribution System Planning

The distribution systems are generally made with attention to the following criteria:

1. Limits the maximum length of the distribution channel (JTM and JTR) to maintain standards of service voltage SPLN 72: 1987.
2. The Configuration of mid voltage network (JTM) to serve larger cities can be a more reliable network topologies such as spindles, while the configuration of the outer regions of the city to a minimum in the form of radial channels which can be supplied from two sources.
3. Controlling the technical losses in the distribution network optimal level.
4. Rural electricity program implemented within the framework of the overall electricity system planning and not worsen the performance of the network and the cost of provision.

In addition, the distribution system is also directed to improve the continuity of supply to customers (SAIDI and SAIFI reduce the numbers) with the effort:

1. Build Distribution SCADA to the provincial capital and other cities are minimal supplied by 2 substation and 15 feeder.
2. Optimizing the use Recloser or AVSAutomatic Vacuum Switch (AVS) installed in SUTM, coordinated with reclosing relay feeders in GI. Monitor the operation of the Recloser or AVS, and refining methods-periodic maintenance.
3. It is possible to use DAS (Distribution Automation System) in highly populated areas and the burden of high income potential.

The Target of distribution system is to provide a means of distribution of sufficient power, reliability, quality, efficient, and reasonable technical losses.

Distribution Development Policy

The focus of the development and distribution system investments generally directed into four policies, namely: (i) improvement of service voltage, (ii) improvement of SAIDI and SAIFI, (iii) reduction of technical losses networks and (iv) rehabilitation of the old network. The next activity is investment for expansion network to serve the growth and improvement of service facilities.

Selection of technologies such as the type of pole (concrete, metal or wood), the type of channel (airways, underground cable), network systems (radial, loop or spindle), equipment (using Recloser or not), including the use of a voltage of 70 kV as a channel of distribution to large customers, is determined by the management unit through the analysis and consideration of long-term economic value and the achievement level of service quality better, while still meeting the standard ISO or SPLN applicable

Meningkatkan kapasitas dan keandalan, menghindarkan krisis listrik

Increasing capacity to avoid, power crisis

Berbagai kalangan belakangan menyuarakan adanya potensi krisis listrik di Indonesia. Setidaknya, tiga tahun mendatang, yaitu pada kisaran 2017, krisis listrik diprediksi akan menghampiri pulau Jawa dan Bali. Penyebab utama krisis listrik ini adalah keterlambatan pembangunan sejumlah proyek pembangkit listrik. Hal ini secara nyata menjadi akar penyebab berkurangnya cadangan pasokan listrik. Hal lain adalah keterlambatan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi terkait.

Potensi tersebut semakin tampak nyata mengingat perekonomian terus meningkat dengan laju antara 5-6% pertahun. Idealnya, untuk mendukung pertumbuhan 1%, laju ketersediaan listrik adalah 1,5%, sehingga pertumbuhan pasokan listrik Indonesia minimal adalah 7,5% - 9%. Dalam dua tahun terakhir, yakni 2013 dan 2014 laju pertumbuhan daya listrik (PLN dan IPP) berada dikisaran 6% - 7%. Jelas kurang dari proyeksi kebutuhan minimum. Akibatnya di beberapa daerah mulai terjadi pemadaman.

Untuk mencegah dan mengantisipasi kondisi krisis listrik tersebut, PLN bersama dengan Kementerian ESDM berupaya keras merancang dan merealisasikan beragam program dan kegiatan yang mampu mendukung percepatan peningkatan pertambahan daya listrik, termasuk keandalan jaringan transmisi terkait.

Salah satu ukuran penyediaan listrik yang layak dan memadai adalah kemampuan menyediakan cadangan daya listrik minimal sebesar 30% di atas kebutuhan beban puncak, yang harus dicapai melalui pembangunan pembangkit listrik baru yang terencana dan terus menerus. Tanpanya, dapat dipastikan gelombang krisis energi akan hadir tak terelakkan.

Sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan listrik, PLN telah mengidentifikasi beragam persoalan yang menghambat laju pembangunan ketenagalistrikan, meliputi: masalah perizinan, kualitas kontraktor, kualitas peralatan dan keterbatasan dana. PLN baik secara *corporate* maupun bersama pemangku kepentingan, melalui SLA, berupaya mengatasi beragam hambatan tersebut.

Untuk mengurai hambatan masalah perizinan, PLN menginisiasi penyelenggaraan "Rapat Koordinasi Percepatan Pemberian Perizinan Kepada PLN yang digelar di Kuta - Bali, 16 April 2014". Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan meliputi: percepatan pemberian izin dan non izin (rekomendasi) kepada PLN dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan, percepatan pemenuhan persyaratan perijinan oleh PLN dan peningkatan intensitas komunikasi Pemda dengan PLN, Izin dan non izin (rekomendasi) diberikan paling lama 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan tidak bermasalah dan penerbitan Surat Edaran dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengenai percepatan pemberian izin dan non izin. Selain melalui aksi korporasi langsung, PLN berupaya memastikan realisasi butir-butir SLA dengan 12 lembaga Pemerintah terkait perizinan ini.

Untuk mengurai masalah kualitas kontraktor, PLN membentuk tim internal untuk mengevaluasi dan memantau perkembangan pembangunan fasilitas ketenagalistrikan. PLN juga telah mengeluarkan Juklak dan e-katalog bagi penyediaan dan pengadaan peralatan ketenagalistrikan sesuai standar yang dibutuhkan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Sementara untuk mengurai keterbatasan dana, PLN berupaya menggali sumber pendanaan alternatif meliputi skema *Export Credit Agency*, pinjaman langsung B to B, diluar sumber dana konvensional seperti penerbitan obligasi dan pinjaman bergaransi Pemerintah. Cara lain yang dapat ditempuh adalah penyesuaian tarif untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi subsidi energi listrik.

Seluruh upaya pengembangan tersebut akan lebih bermakna dalam mencegah krisis listrik, jika seluruh pihak, terutama konsumen, turut membantu dengan menghemat penggunaan listrik dan mendukung upaya pengurangan subsidi listrik bagi golongan mampu melalui penyesuaian tarif.

Sumber Fokus Mei 2013- halaman 1 dan 22-23

Nowadays, various groups are concerning about the potential of power crisis in Indonesia. At least, three years later, in 2017, the power crisis is expected to approach the island of Java and Bali. The main cause of this power crisis is construction delay of several power projects. This is actually the main cause of the depletion of electricity supply. Other cause is the delay in the development of transmission and distribution network related.

This potential is seen considering the economy continues to increase at a rate between 5-6% per year. Ideally, to support the growth of 1%, the rate of electricity availability must be 1.5%, so that the growth of Indonesia's electricity supply is at least 7.5% - 9%. In the last two years, 2013 and 2014 are the rate of electricity power growth (PLN and IPP) which is the range of 6% - 7%. It is clearly less than the projected minimum requirement. As a result, in some areas began to happen the extinction.

To prevent and anticipate the electricity crisis, PLN cooperates with the Ministry of Energy and Mineral Resources to struggle in designing and implementing variety of programs and activities that can support the acceleration of the increasing electric power, including the associated transmission network reliability.

One of the appropriate and adequate electricity supply measurement is the ability to provide electrical power backup at least 30% above the peak load demand, which should be achieved through the construction of new power plants that are planned and continuous. Without it, it is certain that energy crisis will inevitably occur.

As the primary responsibility in the electricity supply, PLN has identified a variety of problems that slower the electricity development, which comprises of: license issues, contractor quality, equipment quality and limited funds. PLN both corporate and stakeholders, through the SLA, trying to overcome a variety of those barriers.

To break down barriers in licence issues, PLN initiates the implementation "Accelerating Licence Distribution in Coordination Meeting PLN held in Kuta - Bali, 16 April 2014". The meeting resulted several agreements include: acceleration of license and non license (recommendation) to PLN in developing electricity infrastructure, accelerating license compliance by PLN and improving the local government's communication intensity with PLN, licence and non-licence (recommendation) is given no more than 14 working days after the requirement is complete and the issuance of Circular Letter of the Directorate General for Regional Development Interior Ministry regarding the acceleration of license and non license distribution. After the direct corporate actions, PLN efforts to ensure the realization of SLA entries with 12 Government Institution relating this permission.

To overcome the contractor quality problems, PLN forms internal team to evaluate and monitor the electricity power facilities construction development. PLN also has issued Guidelines and e-catalogs for the provision and procurement of electricity power equipment according to the standard required, both from abroad and inside the country. While to overcome the limited funds, PLN efforts to find alternative funding sources include the Export Credit Agency scheme, a direct loan B to B, beyond the conventional funding sources such as bonds issuance and government guaranteed loans. Another way that can be taken is tariffs adjustment to increase revenue and reduce electrical energy subsidies.

The whole effort will be more meaningful in preventing electricity crisis, if all parties, especially consumers, helped by saving electricity usage and support efforts to reduce electricity subsidies for the non-poor group through tariff adjustments.

Source: Fokus May 2013- Page 1 & 22-23

Pengembangan dan Pengelolaan Pembangkit

Development and Management of Generating Station

Membangun dan mengelola seluruh unit pembangkit untuk memastikan tingkat keandalan pasokan daya demi mencapai level kinerja perusahaan listrik kelas dunia yang mampu mengimbangi permintaan akan energi listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Nasional.

Build and manage all power plant units to ensure a level of reliability of power supply in order to achieve the level of performance of world-class power company that is able to keep pace with the demand for electrical energy to support national economic growth.

Sebagai perusahaan nasional yang mendapatkan tugas menyediakan energi listrik di seluruh wilayah negara dan pada seluruh lapisan masyarakat, PLN dituntut memenuhi kebutuhan listrik tersebut. Dengan kondisi kelistrikan yang masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, PLN memiliki kewajiban untuk terus mengembangkan jaringan distribusi dan menambah daya listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik. Kebutuhan listrik dimaksud akan terus bertambah seiring dengan kemajuan daya beli dan perekonomian nasional.

As a national company who have a responsibility to supply electricity for the whole region of the country, and at all levels of society, PLN is expected to meet the electricity needs. At current condition, electricity has not reach the whole community. Therefore, PLN has an obligation to continuously develop the distribution network and add power plant to meet the demand for electricity. Demand for electricity continuously grow in line with the progress of the national economy.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, untuk setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, maka dibutuhkan tambahan daya listrik sebesar 1,5%. Sehingga dengan rentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar 5-6%, dibutuhkan tambahan daya sebesar 7,5% hingga 9% kapasitas daya saat ini. Atau berarti tambahan daya sebesar 3.500 - 5.000 MW per tahun.

As mentioned previously, when economy grown by 1%, it requires additional electrical power of 1.5%. So that at the range of Indonesian economic growth in the range of 5-6%, the additional power required would be 7.5% to 9% of the current power capacity, or if measured in power metric, it would be an extra additional power of 3,500 - 5,000 MW per year.

Rasio elektrifikasi Indonesia saat ini adalah sekitar 84,3% masih tertinggal dari beberapa negara kawasan ASEAN yang telah mencapai 100% (Malaysia, Singapura, Thailand). Untuk meningkatkan rasio tersebut PLN harus menambah unit pembangkit sekaligus mengelola unit yang telah operasional agar dapat beroperasi maksimal dalam mensuplai kebutuhan listrik Nasional yang akan terus meningkat tersebut.

Indonesia's electrification ratio is approximately 84,3%, still lags behind some ASEAN countries that have reached 100% (Malaysia, Singapore, Thailand). To increase the ratio of PLN must add power generating units, and at the same time managing the existing units in order to operate optimally and can fulfill the growing demand.

Perencanaan Pembangkit

PLN merencanakan untuk membangun stasiun pembangkit dengan daya yang cukup besar hingga beberapa tahun mendatang, oleh karenanya Perseroan membuat program Perencanaan Sistem Pembangkit yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana pembangunan stasiun pembangkit. Dalam perencanaan tersebut diputuskan apakah suatu unit pembangkit harus masuk ke sistem interkoneksi, sistem terisolasi atau sudah masuk masa penggantian oleh unit yang baru.

Plan for Power Plants

PLN plans to build a power plant with large capacity for the next few years, therefore, the Company creates Generating System Planning program that will be used as a reference in the construction of the power station plan. It was decided that the new generating units must either be entered into interconnected system or into the isolated system, or as a new replacement unit.

Sistem Interkoneksi

Perencanaan sistem pembangkit bertujuan untuk mendapatkan konfigurasi pengembangan pembangkit yang memberikan nilai *net present value* (NPV) total biaya penyediaan listrik termurah dalam suatu kurun waktu periode perencanaan, dan memenuhi kriteria keandalan tertentu. Konfigurasi termurah diperoleh melalui proses optimasi suatu *objective function* yang mencakup NPV dari biaya kapital, biaya bahan bakar, biaya operasi dan pemeliharaan dan biaya *energy not served*. Selain itu diperhitungkan juga nilai sisa *(salvage value)* dari pembangkit yang terpilih pada tahun akhir periode studi. Simulasi dan optimisasi dilakukan dengan menggunakan model yang disebut WASP *(Wien Automatic System Planning).*

Interconnection System

Generating System Planning aims to obtain configuration of plant development which gives the net present value (NPV), cheapest electricity supplying cost in the period of the planning period, and meet certain reliability criteria. The lowest configuration is obtained through an optimization process, an objective function that includes the NPV of the cost of capital, cost of fuel, operating and maintenance costs and the cost of energy not served. In addition, it is also taken into account the residual value (salvage value) of plants selected at the end year of the study period. Simulation and optimization is performed using a model called WASP (Wien Automatic System Planning).

Kriteria keandalan yang dipergunakan adalah *Loss of Load Probability* (LOLP) lebih kecil dari 0,274%. Hal ini berarti kemungkinan/probabilitas terjadinya beban puncak melampaui kapasitas pembangkit yang tersedia adalah lebih kecil dari 0,274%.

Reliability measurement used is the *Loss of Load Probability* (LOLP) is smaller than 0.274%. This means the possibility/probability of occurrence of peak loads exceeding available generation capacity is less than 0.274%.

Perhitungan kapasitas pembangkit dengan kriteria LOLP menghasilkan *reserve margin* tertentu yang nilainya tergantung pada ukuran unit pembangkit, tingkat ketersediaan *(availability)* setiap unit pembangkit, jumlah unit, dan jenis unit.

Calculation of generation capacity based on LOLP criteria will resulted specific reserve margin whose value depends on the size of the generating units, the level of availability (availability) of each generating unit, the unit number and type of units.

Pada sistem Jawa Bali, kriteria LOLP < 0.274% adalah setara dengan *reserve margin* > 25-30% dengan basis daya mampu *netto*. Apabila dinyatakan dengan daya terpasang, maka *reserve margin* yang dibutuhkan adalah sekitar 35%.

Untuk sistem di luar Jawa-Bali, *reserve margin* ditetapkan sekitar 40% dengan mengingat jumlah unit pembangkit yang lebih sedikit, unit *size* yang relatif besar dibandingkan beban puncak, *derating* yang prosentasenya lebih besar, dan pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding Jawa Bali.

Pembangkit energi terbarukan, khususnya panas bumi dan tenaga air, dalam proses optimisasi diperlakukan sebagai *fixed system* (dipaksa/ditetapkan masuk sistem) pada tahun-tahun yang sesuai dengan kesiapan proyek tersebut.

Rencana pengembangan kapasitas pembangkitan dibuat dengan memperhitungkan proyek-proyek yang sedang berjalan dan yang telah jelas alokasi pendanaannya, baik proyek PLN maupun IPP, dan tidak memperhitungkan semua pembangkit sewa serta *excess power*. Selain itu beberapa pembangkit berbahan bakar minyak yang sudah tua, tidak efisien dan dapat digantikan perannya dengan PLTU batubara diasumsikan akan dihapuskan atau dijadikan sebagai pembangkit *stand-by* yang tidak dioperasikan tetapi tetap dipelihara *(mothballed)*.

Selanjutnya penambahan kapasitas pembangkit pemikul beban dasar diutamakan berupa pembangkit berbahan bakar batubara, dan pembangkit sumber energi terbarukan (panas bumi dan tenaga air tertentu).

Sistem Kecil Tidak Interkoneksi/*Isolated*

Perencanaan pembangkitan pada sistem-sistem yang masih kecil dan belum interkoneksi *(isolated)* tidak menggunakan metode probabilistik maupun optimisasi keekonomian, namun menggunakan metode deterministik. Perencanaan dibuat dengan kriteria N-2, yaitu cadangan minimum harus lebih besar dari 1 (satu) unit terbesar pertama dan 1 (satu) unit terbesar kedua.

Life Extension dan Rehabilitasi Pembangkit Eksisting

Suatu pembangkit tenaga listrik didesain untuk beroperasi secara ekonomis selama umur tekno-ekonomisnya *(economic life)*. Sebuah unit pembangkit dapat menjalani *mid-life refurbishment* untuk mempertahankan kapasitas, efisiensi, menjaga kesiapan dan keandalan mesin yang sesuai sifatnya harus dipelihara dan dilakukan penggantian *parts* yang aus. Kemudian, pada akhir umurnya sebuah pembangkit masih dapat diperpanjang umurnya *(life extension)* dengan melakukan rehabilitasi/*refurbishment* pada komponen-komponen tertentu.

Keputusan untuk melakukan *life extension* atau menutup/menghentikan suatu pembangkit memerlukan kajian yang bermuara pada penetapan solusi optimal antara opsi *life extension* dan membangun pembangkit baru.

In the Java-Bali system, LOLP criteria is <0.274%, it is equivalent to a reserve margin of > 25-30% based on net capable - power. If expressed in installed power, the required reserve margin is about 35%.

For the systems operating in outside Java - Bali, the reserve margin is set higher to 40%, given the smaller number of generating units operated, the unit size is relatively large compared to the peak load, derating at larger percentage, and the growth higher than of Java and Bali.

Renewable energy generation, particularly geothermal and hydropower, is in the optimization process and is treated as a fixed system (whether is forced/set entry the system) in the years according to the readiness of the project.

Generation capacity development plan was made taking into account the underway projects which has a clear allocation of funding, both PLN and IPP project, and does not account for all leased and excess power generation. In addition, some petrol power plants which are absolute, inefficient and its role can be replaced with coal power plant is assumed to be eliminated or used as a stand-by non-operated units, but still maintained (mothballed).

Furthermore, the additional generator that will be used to fulfill base load capacity burdens, is preferred in the form of coal-fired plants, and or renewable energy sources plants (geothermal and hydroelectric).

Small, Isolated and Not Interconnection System

Planning on small and unconnected (isolated) generation systems are not using optimization or probabilistic methods, or economic optimization method, but using deterministic methods. Plans were made base on the criteria of the N-2, which is the minimum reserves must be greater than 1 (one) unit of the first biggest one and of the second largest one.

Life Extension and Rehabilitation of Existing Plants

A power plant is designed to operate economically over the age of techno-economic (economic life). A generating unit may undergo a mid-life refurbishment to maintain the capacity, efficiency, maintain readiness and reliability of the unit which by nature must be maintained and replacement of the wear out part. Then, at the end of its age, the life a plant can still be extended (life extension) by carried out the rehabilitation/refurbishment of certain components.

The decision to perform life extension or closing/stop a generator requires a study that led to the determination of the optimal solution between life extension option and build new plants.

Target Pembangunan Pembangkit

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang semakin meningkat dan memenuhi target rasio elektrifikasi diatas 85% untuk seluruh wilayah Indonesia di tahun 2014, dari sekitar 80,38% di akhir tahun 2013 Perseroan menargetkan penambahan daya sebesar 4,64 GW pada tahun 2014.

Untuk memenuhi target pertambahan daya, Pemerintah telah menugaskan PLN untuk melaksanakan percepatan pembangunan sejumlah stasiun pembangkit, yang kemudian dikenal dengan Program Pembangunan Pembangkit 10.000 MW Tahap 1 (FTP – 1), yang disusul dengan program lanjutannya, Program Pembangunan Pembangkit 10.000 MW Tahap 2 (FTP – 2). Berikut adalah uraian mengenai perkembangan program tersebut.

Power Plant Construction Target

To meet the needs of the growing demand and meet the target of electrification ratio above 85% for the whole area of Indonesia in 2014, from about 80.38% at the end of the year 2013, The Company is targeting the addition of power by 4.64 GW in 2014.

To meet the target of additional power, the Government has assigned PLN to accelerate the development of several number of power stations, which is known as the Development Program of 10,000 MW Phase 1 (FTP -1), followed by subsequent programs, the Program Development of 10,000 MW Phase 2 (FTP-2). Following this, is a description of the development of the program.

Untuk memenuhi target pertambahan daya, PLN ditugaskan melaksanakan percepatan pembangunan sejumlah stasiun pembangkit, yakni Program Pembangunan Pembangkit 10.000 MW Tahap 1 (FTP – 1), yang kemudian disusul Program Pembangunan Pembangkit 10.000 MW Tahap 2 (FTP – 2).

To meet the target of additional power, the Government has assigned PLN to accelerate the development of several number of power stations, which is known as the Development Program of 10,000 MW Phase 1 (FTP -1), followed by subsequent programs, the Program Development of 10,000 MW Phase 2 (FTP-2).

Program Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW Tahap 1 (FTP – 1)

Untuk mengurangi ketergantungan akan bahan bakar minyak yang mahal harganya, Pemerintah menetapkan percepatan diversifikasi energi pembangkit tenaga listrik dari BBM ke batubara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang untuk kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2011, Pemerintah menugaskan Perseroan untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara di 37 lokasi di Indonesia, yang meliputi 10 lokasi dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa – Bali; 12 lokasi dengan kapasitas 1.600 MW di Indonesia Barat dan 15 lokasi dengan kapasitas 885 MW di Indonesia Timur.

Pembangunan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara tersebut mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan, disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain:

1. *Financial:* keterlambatan pendanaan karena harus menunggu perubahan Perpres untuk mendapatkan pendanaan; keterlambatan efektif loan; kenaikan suku bunga karena perpanjangan *availability period* terkait dengan keterlambatan penyelesaian pembangunan pembangkit; dan kesulitan finansial kontraktor.

Acceleration of The Development Of 10,000 MW Program Phase 1 (FTP-1)

To reduce the dependency on 'expensive' fossil fuels, the Government set the acceleration of energy diversification from fuel to coal fire base.

Based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 of 2006 dated July 5, 2006, which later amended by the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59, 2009, on December 23, 2009, subsequently updated by Presidential Regulation No. 47 In 2011, the Government assigned the Company to build a steam power plant (PLTU) coal-fired base at 37 locations in Indonesia, which includes 10 locations with a total capacity of 7,490 MW in Java - Bali Area; 12 sites with 1,600 MW capacity in western Indonesia and 15 sites with a capacity of 885 MW in Eastern Indonesia.

The construction of coal-fired base electric power is delayed from the specified schedule, due to several constraints caused by, among others:

1. Financial: problem funding delays, due to delays in the process of presidential regulation revision; delay on the effectiveness of the loan; rising interest rates due to the extension of the completion of construction; and financial difficulties undergone by contractors.

2. Konstruksi: keterlambatan penyediaan lahan karena ketidaksepakatan harga antara Panitia Pembebasan tanah dan pemilik lahan; kendala pada proses *custom clearance:* waktu untuk pemeriksaan material, biaya *demurrage* dan ijin timbul memperlambat proses penyelesaian pembangunan;

3. Kontraktornya kurang kompeten, tidak ada koordinasi yang baik antara *main leader* dan sub kontraktor, kesulitan dalam berkomunikasi antara kontraktor China dan kontraktor lokal.

Pendanaan Proyek

Dari sisi pendanaan, proyek percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW PLN tersebut telah mengalami kemajuan yang signifikan. Seluruh pendanaan proyek percepatan tersebut telah mendapatkan kepastian pendanaan. Komposisi pendanaan adalah 85% dari pinjaman perbankan yang sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007 pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, sedangkan sisanya 15% bersumber dari dana internal PLN. Pinjaman perbankan untuk proyek pembangkitan adalah sebesar USD. 5,2 miliar untuk kebutuhan pendanaan porsi mata uang asing dan IDR 21,4 triliun untuk kebutuhan pendanaan porsi mata uang lokal. Pinjaman perbankan untuk proyek transmisi yang terkait langsung dan tidak langsung dengan proyek percepatan 10.000 MW adalah sebesar USD116 juta untuk kebutuhan pendanaan porsi mata uang asing dan IDR4,8 triliun untuk kebutuhan pendanaan porsi mata uang lokal.

Sampai dengan akhir Desember 2014, Perseroan telah membayar uang muka sebesar US$ 875 juta dan Rp4.789.418 juta untuk 36 kontrak EPC, atau sekitar 15% dari jumlah nilai kontrak, yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan. Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan "fasilitas kredit program percepatan".

Perkembangan Pembangunan 10.000 MW Tahap 1

Secara keseluruhan, pembangkit program FTP-1 yang telah beroperasi sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebesar 8.092 MW dari posisi tahun 2013 sebesar 6.377 MW. Adapun tambahan COD FTP-1 sebesar 1.725 MW berasal dari penyelesaian 13 proyek FTP-1, yaitu:

2. Construction problem: delays in the provision of land due to uncertain price settlement, the disagreement between the Committee of land clearing and land owners; constraints on the custom clearance process: time for material inspection, demurrage and permits all slow downs the process of completing the construction;
3. Contractors problem: Less competent contractor; and not proper coordination between the main leaders and sub-contractors; difficulties in communication between Chinese contractors and local contractors.

Project Funding

In terms of funding, the project acceleration to build 10,000 MW power plants, PLN has made significant progress. The entire project funding for acceleration has obtained funding certainty. The composition of the funding is 85% from bank loans which is fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 91/2007 as replacement of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No 86/2006 on the Provision of Government Guarantees to Accelerate Development of Power Plant of Coal-based fire, while the remaining 15% is sourced from PLN internal funds. Bank loans for generation project is amounting to USD. 5.2 billion for the foreign financing portion, and USD 21.4 billion of local currency portion. Bank loans for transmission projects related directly and indirectly with the acceleration of 10,000 MW project is amounting to USD116 million of foreign financing portion and USD 4.8 million of local currency portion.

As of the end of December 2014, the Company has paid an advance payment of USD 875 million and IDR 4,789,418 million for 36 EPC, or approximately 15% of the total value of the contracts, which is recorded as work in progress. These advances are funded from the proceeds of the Secured Bonds and withdrawal "credit facility acceleration program".

The Progress of the Development of 10,000 MW Phase 1

On the whole, plant-1 FTP program that has been in operation until the end of the year 2014 amounted to 8,092 MW from the 2013's position, to 6,377 MW. The COD additional FTP-1 of 1,725MW from 13 project completion FTP-1, namely:

Nama Proyek	Provinsi Province	Kapasitas Capacity	Name of Project
PLTU Sulawesi Selatan - Barru (2 x 50 MW) # Unit 1	Sulawesi Selatan South Sulawesi	50 MW	Steam Power Plants South Sulawesi - Barru (2 x 50 MW) # Unit 1
PLTU 2 Jawa Barat - Pelabuhan Ratu (3 x 350 MW) # Unit 2	Jawa Barat West Java	350 MW	Steam Power Plants 2 West - Java Pelabuhan Ratu (3 x 350 MW) # Unit 2
PLTU 3 Jawa TImur - Tanjung Awar -awar # Unit 1	Jawa Timur East Java	350 MW	Steam Power Plants 3 East Java - Tanjung Awar -awar # Unit 1
PLTU3 Bangka Belitung - Bangka (2 x 30 MW) # Unit 1	Bangka Belitung	30 MW	Steam Power Plants 3 Bangka Belitung - Bangka (2 x 30 MW) # Unit 1
PLTU 2 Jawa Barat - Pelabuhan Ratu) 3 x 350 MW) # Unit 3	Jawa Barat West Java	350 MW	Steam Power Plants 2 West - Java Pelabuhan Ratu (3 x 350 MW) # Unit 3
PLTU NAD - Nagan Raya # Unit 1	Aceh	110 MW	Steam Power Plants NAD - Nagan Raya # Unit 1
PLTU Kepulauan Riau - Tanjung Balai Karimun # Unit 1	Kepulauan Riau	7 MW	Steam Power Plants Kepulauan Riau - Tanjung Balai Karimun # Unit 1
PLTU NAD - Nagan Raya # Unit 2	Aceh	110 MW	Steam Power Plants NAD - Nagan Raya # Unit 2
PLTU Teluk Sirih (1 x 112 MW) Unit 1	Sumatera Barat West Sumatra	112 MW	Steam Power Plants Teluk Sirih (1 x 112 MW) # Unit 1
PLTU Teluk Sirih (2 x 112) # Unit 2	Sumatera Barat West Sumatra	112 MW	Steam Power Plants Teluk Sirih (2 x 112) # Unit 2
PLTU Lampung (2 x 100) # Unit 1	Lampung	100 MW	Steam Power Plants Lampung (2 x 100) # Unit 1
PLTU 2 NTT - Kupang # Unit 1	NTT	17 MW	Steam Power Plants 2 NTT - Kupang # Unit 1
PLTU 2 NTT - Kupang # Unit 2	NTT	17 MW	Steam Power Plants 2 NTT - Kupang # Unit 2
PLTU Sulawesi Tenggara - Kendari	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	10 MW	Steam Power Plants Southeast Sulawesi - Kendari
	Jumlah Total	1.725 MW	

Dengan kata lain, pertambahan daya dari Proyek FTP 1 sepanjang tahun 2014 menurut lokasi geografis menunjukkan bahwa:
1. Jawa-Bali mendapatkan pertambahan daya sebesar 1.050 MW
2. Sumatera mendapatkan pertambahan daya sebesar 581 MW
3. Sistem Indonesia Timur mendapatkan pertambahan daya sebesar 84 MW.

Untuk mendukung kepastian operasi Proyek Percepatan 10.000 MW tahap 1, PLN telah melaksanakan beragam langkah sebagai berikut:
1. Pembentukan organisasi Unit Induk Pembangunan dan Divisi Administrasi Konstruksi untuk monitoring dan pengendalian
2. Penetapan skema pengamanan *supply* batubara dengan penugasan ke Anak Perusahaan.
3. Penambahan pemasok baru dari penambang PKP2B yang memproduksi batubara dengan kandungan sulfur relatif rendah untuk di-blending di PLTU sebagai solusi pasokan batubara.
4. Penetapan sistem pendistribusian batubara yang optimal dan reliable melalui kerjasama antar BUMN dan melibatkan swasta.
5. Penetapan cadangan stok batubara dengan cara pembelian melalui spot untuk memenuhi operasi pembangkit selama 40 hari di lokasi Labuhan Angin, Ombilin, Paludan Labuan.
6. Penetapan tambahan kontrak pengadaan batubara untuk PLTU 10.000 MW Tahap I yang dilaksanakan melalui pemilihan langsung terhadap perusahaan PKP2B.
7. Renegosiasi harga kontrak batubara *low rank coal* atas dasar PerMen ESDM tentang harga batubara.
8. Pelaksanaan MOU dengan PTBukit Asam untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi Proyek Percepatan10.000MW.
9. Penyelesaian kendala dalam pengoperasian PLTU 10.000 MW seperti pada PLTU Labuhan Angin dengan pengadaan alat *dryer* batubara PLTU 10.000 MW untuk mengatasi batubara yang basah.

Sementara untuk mempercepat penyelesaian Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW Tahap 1 (FTP–1) lainya, PLN telah menempuh beragam cara, meliputi:
1. Mengganti subkontraktor dan *site manager* yang kinerjanya buruk atau kurang kompeten.
2. Mengenakan denda keterlambatan *(liquidated damage)* maksimal kepada kontraktor PLTU Rembang, Suralaya, Paiton, Indramayu, dan Bima.
3. Melakukan kajian dan membuat pedoman untuk Pembangunan Pembangkit dan sudah dikeluarkan surat keputusan Direksi No.1062.K/DIR/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Prosedur Pengelolaan dan Penanganan Proyek-proyek di Lingkungan PT PLN (Persero).
4. Penyelesaian masalah ruislag dan sertifikasi lahan PLTU 2 Jawa Barat–Pelabuhan Ratu.
5. Menambah tenaga kerja ahli dalam bidangnya (*Welder, Fitter, Commissioning Expert*, dan sebagainya).
6. Menambah alat kerja dan shift kerja.
7. Memprioritaskan penyelesaian pekerjaan yang inti untuk dapat mengoperasikan pembangkit
8. Melakukan konsultasi dengan kantor legal dan badan independen untuk mencari solusi *dispute* dalam kontrak (masalah bea masuk, eskalasi, klaim dan sebagainya).

In other words, this increase in power according to geographic location shows that:
1. Java-Bali gain added power of 1,050 MW
2. Sumatra get power increase of 581 MW
3. System of East Indonesia get added power of 84 MW.

To ascertain the operationalability of the 10,000 MW Acceleration Project Phase 1, PLN has implemented a variety of measures that have been conducted as follows:
1. Parent Unit organization formation and Development Division Construction Administration for monitoring and control.
2. Determination of the coal supply security scheme with the assignment to the Subsidiary.
3. The addition of new suppliers that produce coal miners PKP2B with relatively low sulfur content for in-plant as a solution blending in coal supply.
4. Determination of the optimal coal distribution systems and reliable through cooperation between SOEs and private sector involved.
5. Determination of the stock of coal reserves by buying through the spot to meet plant operations for 40 days at the site of Labuan Wind, Ombilin, Palu and Labuan.
6. Determination of additional coal supply contract for 10,000 MW power plant Phase 1 which is carried out through direct elections to the company PKP2B.
7. The renegotiation of the contract price of coal of low rank coal on the basis of ESDM on coal prices.
8. Implementation of the MOU with PT Bukit Asam coal to meet the needs of the project Percepatan10,000 MW.
9. Completion of constraints in the operation of the power plant as the plant of 10,000 MW Wind Labuan to procure coal dryer 10,000 MW power plant to cope with wet coal.

While to accelerate the completion of the other part of Project Development Acceleration 10,000 MW Phase 1 (FTP-1), PLN has taken a variety of ways, including:
1. Changing subcontractors and site managers underperforms or less competent.
2. Fining a late fee (liquidated damage) to the contractor maximum Rembang, Suralaya, Paiton, Indramayu, and Bima.
3. To research and make guidelines for the Development of Generating Plant, PLN and has issued a BOD Decree No.1062.K/DIR/2011 dated July 20, 2011 on Management and Procedures on Handling Projects in PT PLN (Persero).
4. To solve of land acquisition and land certification of PLTU 2 Jawa Barat.
5. Adding skilled manpower in all skill level (Welder, Fitter, Commissioning Expert, and so on).
6. Adding the tools work and shift work
7. Prioritize the completion of the core work to be able to operate the plant
8. Consult with legal offices and independent agencies to seek solutions in the contract dispute (problem duties, escalation, claims, etc).

9. Membantu menyelesaikan *dispute* atau ketidaksepahaman antar anggota konsorsium atau antar main kontraktor dan subkontraktor.
10. Melakukan optimasi disain agar dapat dilaksanakan oleh kontraktor, sejauh tidak mengubah spesifikasi dan *performance guarantee*.
11. Meminta Lembaga Sertifikasi Pengujian memberikan *coaching* dan *parenting* kepada kontraktor yang mempunyai kendala *test* dan *commisioning*.
12. Menggunakan *temporary jetty* pada lokasi yang kontraktornya belum mampu menyelesaikan *jetty*.
13. Mencari upaya komersial dan legal untuk membantu kontraktor yang mengalami kendala finansial.
14. Memperkuat personil SDM dan organisasi proyek di PLN.
15. Menyelenggarakan *workshop* untuk meningkatkan kemampuan supervisor proyek PLTU batubara.

9. Help settle a dispute or disagreement between members of the consortium or between the main contractor and subcontractors.
10. Designing optimization system to be carried out by the contractor, as far as not alter the specifications and performance guarantee.
11. Asking for Testing Certification Institute to provide coaching and parenting to contractors who have obstacles test and commissioning.
12. Using a temporary jetty at locations where the contractor have not been able to complete the jetty.
13. Looking for commercial and legal effort to help contractors who have financial constraints.
14. Strengthening human resources personnel and project organization in PLN.
15. Organize workshops to enhance the ability of the coal power plant project supervisor.

Daftar Proyek FTP-1

Adapun daftar lengkap proyek pembangunan stasiun pembangkit yang masuk kedalam program FTP-1, lokasi, daya dan estimasi tahap *commercial operating date* (COD) adalah sebagai berikut.

List of Projects FTP-1

The Complete List Of Stations Which Their Construction Projects Included In The Ftp-1 Program, Location, Power And Operating Commercial Phase Estimation Date (COD) Is As Follows:

Fast Track Program Tahap I (FTP 1)
Fast Track Program Phase I (FTP 1)

Nama Pembangkit	Kapasitas Capacity	COD	Power PLant
PLTU 2 di Banten (Labuan)	2 x 300	2009 - 2010	Steam Power Plant 2 Banten (Labuan)
PLTU 1 di Jawa Barat (Indramayu)	2 x 330	2011	Steam Power Plant 1 West Java (Indramayu)
PLTU 1 di Banten (Suralaya Unit 8)	1 x 625	2011	Steam Power Plant 1 Banten (Suralaya Unit 8)
PLTU 3 di Banten (Lontar)	3 x 315	2011 - 2012	Steam Power Plant 3 Banten (Lontar)
PLTU 2 di Jawa Barat (Pelabuhan Ratu)	3 x 350	2013 - 2014	Steam Power Plant 2 West Java (Pelabuhan Ratu)
PLTU 1 di Jawa Tengah (Rembang)	2 x 315	2011	Steam Power Plant 1 Central Java (Rembang)
PLTU 2 di Jawa Tengah (PLTU Adipala)	1 x 660	2014	Steam Power Plant 2 Central Java (PLTU Adipala)
PLTU1 di Jawa Timur (Pacitan)	2 x 315	2013	Steam Power Plant 1 East Java (Pacitan)
PLTU 2 di Jawa Timur (Paiton Unit 9)	1 x 660	2012	Steam Power Plant 2 East Java (Paiton Unit 9)
PLTU 3 di Jawa Timur (Tanjung Awar -awar)	2 x 350	2013 - 2014	Steam Power Plant 3 East Java (Tanjung Awar -awar)
PLTU di Aceh (Meulaboh/Nagan Raya)	2 x 110	2013 - 2014	Steam Power Plant Aceh (Meulaboh/Nagan Raya)
PLTU 2 di Sumut (Pangkalan Susu)	2 x 220	2014 - 2015	Steam Power Plant 2 Sumatra Utara (Pangkalan Susu)
PLTU 1 di Riau (Bengkalis)	2 x 10	Batal	Steam Power Plant 1 Riau (Bengkalis)
PLTU Tenayan di Riau	2 x 110	2015	Steam Power Plant Tenayan, Riau
PLTU di Kepulauan Riau (Tanjung Balai)	2 x 7	2013	Steam Power Plant Riau Island (Tanjung Balai)
PLTU 4 di Bangka Belitung	2 x 16,5	2014	Steam Power Plant 4 Bangka Belitung
PLTU 3 di Bangka Belitung (Air Anyer)	2 x 30	2013 - 2014	Steam Power Plant 3 Bangka Belitung (Air Anyer)
PLTU 2 di Riau (Selat Panjang)	2 x 7	Batal	Steam Power Plant 2 Riau (Selat Panjang)
PLTU 2 di Kalimantan Barat (Pantai Kura - kura)	2 x 27,5	2015	Steam Power Plant 2 West Kalimantan (Pantai Kura - kura)
PLTU di Sumatra Barat (Teluk Sirih)	2 x 112	2013 - 2014	Steam Power Plant West Sumatra-Teluk Sirih
PLTU di Lampung (Tarahan Baru)	2 x 100	2013	Steam Power Plant Lampung (Tarahan Baru)
PLTU 1 di Kalimantan Barat (Parit Baru)	2 x 50	2015	Steam Power Plant West 1 Kalimantan (Teluk Balikpapan)
PLTU di Kalimantan Timur (Teluk Balikpapan)	2 x 110	2014	Steam Power Plant East Kalimantan (Teluk Balikpapan)
PLTU 1 di Kalimantan Tengah (Pulau Pisau)	2 x 60	2014	Steam Power Plant 1 Central Kalimantan (Pisau Island)
PLTU di Kalimantan Selatan (Asam-asam)	2 x 65	2013	Steam Power Plant South Kalimantan (Asam-Asam)
PLTU 2 di Sulawesi Utara (Amurang)	2 x 25	2012	Steam Power Plant North Sulawesi (Amurang)

Nama Pembangkit	Kapasitas Capacity	COD	Power PLant
PLTU di Gorontalo (Anggrek)	2 x 25	2015	Steam Power Plant Gorontalo (Anggrek)
PLTU di Maluku Utara (Tidore)	2 x 7	2014	Steam Power Plant North Maluku (Tidore)
PLTU 2 di Papua (Jayapura)	2 x 10	2014	Steam Power Plant Papua 2 (Jayapura)
PLTU 1 di Papua (Timika)	2 x 7	Batal	Steam Power Plant 1 Papua (TImika)
PLTU di Maluku (Ambon)	2 x 15	2014 - 2015	Steam Power Plant Maluku (Ambon)
PLTU di Sulawesi Tenggara (Kendari)	2 x 10	2012 - 2013	Steam Power Plant South East Sulawesi (Kendari)
PLTU di Sulawesi Selatan (Barru)	2 x 50	2012 - 2013	Steam Power Plant South Sulawesi (Barru)
PLTU 2 di NTB (Lombok)	2 x 25	2014	Steam Power Plant 2 West Nusa Tenggara (Lombok)
PLTU 1 di NTT (Ende)	2 x 7	2013	Steam Power Plant 1 East Nusa Tenggara (Ende)
PLTU 2 di NTT (Kupang)	2 x 16,5	2013	Steam Power Plant 2 East Nusa Tenggara (Kupang)
PLTU 1 di Nusa Tenggara Barat (Bima)	2 x 10	2014 - 2015	Steam Power Plant West Nusa Tenggara (Bima)
PLTU 1 Sulawesi Utara	2 x 25	2016 - 2017	Steam Power Plant 1 North Sulawesi
PLTU 2 di Kalimantan Tengah	2 x 7	Batal	Steam Power Plant 2 Central Kalimantan

Program Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW Tahap 2 (FTP–II)

Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap kedua *(Fast Track Program* Tahap II atau FTP II) merupakan lanjutan dari proyek percepatan tahap pertama, yang saat ini sudah mencapai tahap pembangunan/konstruksi.

Dasar pelaksanaan FTP-2 adalah Perpres No 4 Tahun 2010 dan Permen ESDM No.15 Tahun 2010 tentang penugasan kepada PLN untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan (panas bumi dan hidro), batubara, dan gas.

Adapun proyek FTP-2 memiliki total kapasitas sebesar 9.522 MW, dengan rincian 4.216 MW dibangun oleh PLN dan 5.306 MW dibangun oleh swasta berikut jaringan transmisi terkaitnya.

Pendanaan pembangunan pembangkit yang ditugaskan kepada PLN akan bersumber dari APBN, APLN, pinjaman lunak dan pinjaman bentuk lainnya.

Perkembangan Pembangunan Proyek FTP II

Dengan adanya perkembangan pada sektor ketenagalistrikan, PLN mengusulkan kepada Menteri ESDM tentang perubahan lingkup proyek FTP II yang telah tertuang dalam Permen ESDM No.15 Tahun 2010, yaitu mencakup hal-hal:

1. Perubahan beberapa proyek PLTU skala kecil menjadi PLTGB.
2. Perubahan unit *size* beberapa proyek EBT sesuai dengan hasil studi terbaru dan kontrak.
3. Perubahan PLTGU Bangkanai 120 MW menjadi PLTG Bangkanai 280 MW.

Acceleration of The Development Program Phase II 10,000 MW (FTP-II)

The Project of accelerated development of power generation of 10,000 MW Phase II (Fast Track Program Phase II II2 or FTP-2) is a continuation of the phase I of the project acceleration, which has now reached the stage of development/construction.

Basic implementation of FTP-2 is Presidential Decree No. 4 of 2010 and Ministry of ESDM Regulation No 15 Year 2010 on assignment to PLN to accelerate the construction of power plants that use renewable energy (geothermal and hydro), coal, and gas.

The FTP-2 project has a total capacity of 9,522 MW, partly of 4,216 MW built by PLN and 5,306 MW constructed by the following private networks associated transmission.

The sources of Fund for construction of generation plant assigned to PLN are from the state budget, APLN, soft loans and other forms of borrowing.

Progress of the Development of 10,000 MW Phase 2 Project

In relation to the national development in the electricity sector, PLN proposed to Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) the change in project scope in order to accelerate the development of generating 10,000 MW Phase II, which has been stated in the Ministry of ESDM Regulation No 15/ 2010, which includes:

1. Changes in some small-scale hydro power plant projects into PLTGB.
2. Changes in unit size EBT several projects in accordance with the results of recent studies and contract.
3. Changes in Bangkanai 120 MW Combined Cycle Power Plant into Bangkanai 280 MW gas fired base power plant (PLTG).

4. Perubahan kepemilikan beberapa proyek swasta yang dialihkan menjadi proyek PLN.
5. Tambahan beberapa proyek pembangkit EBT seperti PLTP yang baru saja memperoleh penetapan WKP oleh Kementerian ESDM.

Berdasarkan Permen ESDM No. 1 Tahun 2012, maka Proyek FTP II berada di 98 lokasi dengan kapasitas 10.047 MW, dengan rincian 26 lokasi dan 3.757 MW akan dibangun oleh PLN, sedangkan 72 lokasi dan 6.290 MW akan dibangun oleh IPP (swasta). Target operasi proyek pembangkit FTP-2 adalah mulai tahun 2014, namun dengan adanya berbagai hambatan, maka beberapa proyek pembangkit FTP-2 diperkirakan tidak dapat memenuhi target COD tersebut.

Adapun hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses pembangunan antara lain:

1. Aspek Regulasi
   - Perijinan penggunaan lahan: Sebagian besar lokasi pengembangan pembangkit terletak di kawasan hutan lindung/hutan konservasi/ taman nasional, khususnya PLTP.
   - Pembebasan Lahan: Adanya opini bahwa PLN adalah bukan Pemerintah, sehingga pembebasan lahan harus dilakukan dengan pola *business-to-business* yang lebih menyita waktu dan biaya.
   - Ketidakpastian waktu dan proses perijinan.
   - Pengembang meminta waktu eksplorasi paling lambat 5 tahun (sesuai UU 27/2003 & PP 59/2007), sehingga COD minimal 7 tahun, berdampak mundurnya COD proyek PLTP FTP II.
2. Aspek Pendanaan
   - Alokasi risiko yang belum diatur dengan jelas, menjadikan faktor risiko sebagai "*terms*" yang harus dinegosiasikan.
   - Pengembang meminta kepastian bentuk jaminan kelayakan usaha PLN.
   - Kebutuhan dana "*equity*" yang besar yang umumnya diperlukan untuk eksplorasi.
3. Aspek Teknis
   - Potensi cadangan uap pada pembangkit PLTP tidak ada atau lebih kecil dari perkiraan.
   - Pemindahan lokasi pembangkit, karena kondisi lokasi tidak memungkinkan dibangun pembangkit baru.

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 21 tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait mengalami perubahan, baik daftar maupun besaran dayanya.

Proyek-proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga Listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas atau Proyek FTP II tersebut mempunyai kapasitas total 17.918 MW yang terdiri dari PLTU batubara 10.870 MW, PLTP 4.965 MW, PLTG 280 MW dan PLTA 1.803 MW. Porsi pembangkit EBT (PLTP dan PLTA) dalam FTP2 akan menjadi 38%.

4. Changes in ownership of several private projects, and transferred to be the project of PLN.
5. Addition of several EBT generation projects such as renewable energy geothermal power plants (PLTP) that had just gained the determination WKP by the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Based on the Regulation of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 1/2012, the Acceleration Project of 10,000 MW Phase II plant is located at 98 sites with a capacity of 10.047 MW, consist of 26 locations and 3,757 MW will be built by PLN, while 72 locations and 6,290 MW will be built by IPP (private).The Starting operation of projects FTP-2 is predicted in year 2014, but due to some barriers in the construction of the project, several FTP-2 plant project is expected not to meet the target of the COD.

Some obstacles in the development process include:

1. Regulatory Aspects
   - Permit the use of land: Most plant development site is located in a protected forest area/forest conservation/ national parks, particularly geothermal power plants.
   - Land Acquisition: The opinion about PLN among the people is that the PLN as SOE is not part of the government, so that the land acquisition should be acquisition by business-to-business pattern which is time-consumed and higher cost.
   - Uncertainty of time in the process of acquiring permit.
   - The developer asking the exploration time minimum in 5 years (in accordance with Law 27/2003 and PP 59/2007), so that a minimum time to COD may 7 years. As a result it delays the COD of PLTP project FTP -2.
2. Funding Aspects
   - Allocation of risk is not clearly been set out, so they become factors which must be included in negotiated items.
   - The developer requested assurance of the sustainability PLN business.
   - The large fund for exploration is preferably from "equity" funds.
3. Technical Aspects
   - Potential reserves of steam at the geothermal power plant is smaller than expected.
   - The relocation of plant site due to improper of the site to be built.

Furthermore, according to the Regulation of Minister of Energy and Mineral No. 21/2013 dated August 1, 2013 on the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 15/2010 on the List of Projects to Accelerate Development of Power Plant Using Renewable Energy, Coal and Gas and Related Transmission,underwent Changes, both the list of the project and the amount of the Electric Power should be built.

Projects accelerated development of power plants that use renewable energy, coal and gas or FTP-2 project have a total capacity of 17,918 MW, consist of coal fired power plant consisting of 10,870 MW, geothermal power plant of 4,965 MW, gas fired power plant of 280 MW and hydropower plant of 1,803 MW. The portion of renewable energy generation (PLTP and hydropower) in the FTP-2 will be 38%.

Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tahap 2 sebesar 17.918 MW tersebut terdiri atas 5.749 MW sebagai proyek PLN dan 12.169 MW (68%) sebagai proyek IPP. Proyek IPP yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pengembang listrik swasta tersebut tersebar di 59 lokasi. Sisanya, sejumlah 17 proyek akan dilaksanakan oleh PLN, dengan total daya sebesar 5.749 MW (32%).

Development Acceleration Program Phase 2 of 17,918 MW above consist of 5,749 MW is project funded by PLN and 12,169 MW (68%) is project funded by IPP. IPP projects which are conducted cooperation with the private developers spread across 59 locations. The rest, some 17 projects will be implemented by PLN, with a total capacity of 5,749 MW (32%).

Daftar Proyek FTP-2

Adapun daftar lengkap proyek pembangunan stasiun pembangkit yang masuk kedalam program FTP-2, lokasi, daya dan estimasi tahap *commercial operating date* (COD) adalah sebagai berikut.

List of Projects FTP-2

The complete list of development projects in FTP-12 program, location, power and operating commercial phase estimation date (COD) is as follows:

Fast Track Program Tahap II (FTP 2)

Fast Track Program Phase 2

Provinsi Province	Pemilik Owner	Jenis Type	Proyek Pembangkit Power Plant	MW	COD
Aceh	Swasta Private	PLTA Hydro Power Plants	Peusangan-4	83	2020
		PLTP Geothermal Power Plants	Jaboi	10	2019
		PLTP Geothermal Power Plants	Seulawah Agam	2 x 55	2021-2022
Banten	Swasta Private	PLTP Geothermal Power Plants	Endut	1 x 55	2021
		PLTP Geothermal Power Plants	Rawa Dano	1 x 110	2019
Bengkulu	PLN	PLTP Geothermal Power Plants	Hululais	2 x 55	2018-2019
Jambi	PLN	PLTP Geothermal Power Plants	Sungai Penuh	2 x 55	2024
Jawa Barat West Java	PLN	PLTA Hydro Power Plants	Upper Cisokan PS	4 x 260	2017
		PLTA Hydro Power Plants	Jatigede	2 x 55	2017
		PLTU Steam Power Plant	Indramayu	1 x 1.000	2022
		PLTU Steam Power Plant	Jawa-6	2 x 1.000	2021
	Swasta Private	PLTP Geothermal Power Plants	Cibuni	1 x 10	2019
		PLTP Geothermal Power Plants	Cisolok-Cisukarame	1 x 50	2019
		PLTP Geothermal Power Plants	Gn. Ciremai	2 x 55	2021
		PLTP Geothermal Power Plants	Kamojang 5	1 x 30	2015
		PLTP Geothermal Power Plants	Karaha Bodas	1 x 30	2016
		PLTP Geothermal Power Plants	Karaha Bodas	2 x 55	2019
		PLTP Geothermal Power Plants	Patuha	3 x 55	2014 & 2017
		PLTP Geothermal Power Plants	Tampomas	1 x 45	2019
		PLTP Geothermal Power Plants	Tangkuban Perahu 1	2 x 55	2019
		PLTP Geothermal Power Plants	Tangkuban Perahu 2	2 x 30	2019
		PLTP Geothermal Power Plants	Wayang Windu	2 x 110	2019
		PLTU Steam Power Plant	Jawa-1	1 x 1.000	2018
		PLTU Steam Power Plant	Jawa-3	2 x 660	2019-2020
		PLTU Steam Power Plant	Jawa-5	2 x 1.000	2019-2020

Provinsi Province	Pemilik Owner	Jenis Type	Proyek Pembangkit Power Plant	MW	COD
Jawa Tengah Central Java	Swasta Private	PLTP Geothermal Power Plants	Baturaden	2 x 110	2019
		PLTP Geothermal Power Plants	Dieng	55 + 60	2017
		PLTP Geothermal Power Plants	Guci	1 x 55	2019
		PLTP Geothermal Power Plants	Umbul - Telomoyo	1 x 55	2021
		PLTP Geothermal Power Plants	Ungaran	1 x 55	2019
		PLTU Steam Power Plant	Jawa-4	2 x 1.000	2019-2020
Jawa Timur East Java	Swasta Private	PLTP Geothermal Power Plants	Ijen	2 x 55	2019
		PLTP Geothermal Power Plants	Iyang Argopuro	1 x 55	2020
		PLTP Geothermal Power Plants	Wilis/Ngebel	3 x 55	2019 - 2020
		PLTU Steam Power Plant	Madura	2 x 200	2022
Kalimantan Barat West Kalimantan	PLN	PLTU Steam Power Plant	Parit Baru	2 x 50	2016
Kalimantan Selatan South Kalimantan	Swasta Private	PLTU Steam Power Plant	Kalimantan Selatan South Kalimantan	2 x 100	2017 - 2018
Kalimantan Tengah Central Kalimantan	PLN	PLTG	Bangkanai	280	2015 - 2017
Kalimantan Timur East Kalimantan	Swasta Private	PLTU Steam Power Plant	Kalimantan Timur East Kalimantan	2 x 100	2017 - 2018
Lampung	Swasta Private	PLTA Hydro Power Plants	Semangka	56	2017
		PLTP Geothermal Power Plants	Danau Ranau	2 x 55	2022
		PLTP Geothermal Power Plants	Rajabasa	2 x 110	2021 - 2022
		PLTP Geothermal Power Plants	Suoh Sekincau	2 x 110	2021 - 2022
		PLTP Geothermal Power Plants	Ulubelu 3 dan 4	2 x 55	2016 - 2017
		PLTP Geothermal Power Plants	Wai Ratai	55	2022
Maluku	PLN	PLTP Geothermal Power Plants	Tulehu	2 x 10	2018
Maluku Utara North Maluku	Swasta Private	PLTP Geothermal Power Plants	Jailolo	2 x 5	2019
Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	PLN	PLTP Geothermal Power Plants	Songa Wayaua	5	2019
		PLTP Geothermal Power Plants	Sembalun	2 x 10	2020
	Swasta Private	PLTU Steam Power Plant	Lombok	2 x 25	2017
		PLTP Geothermal Power Plants	Huu	20	2021

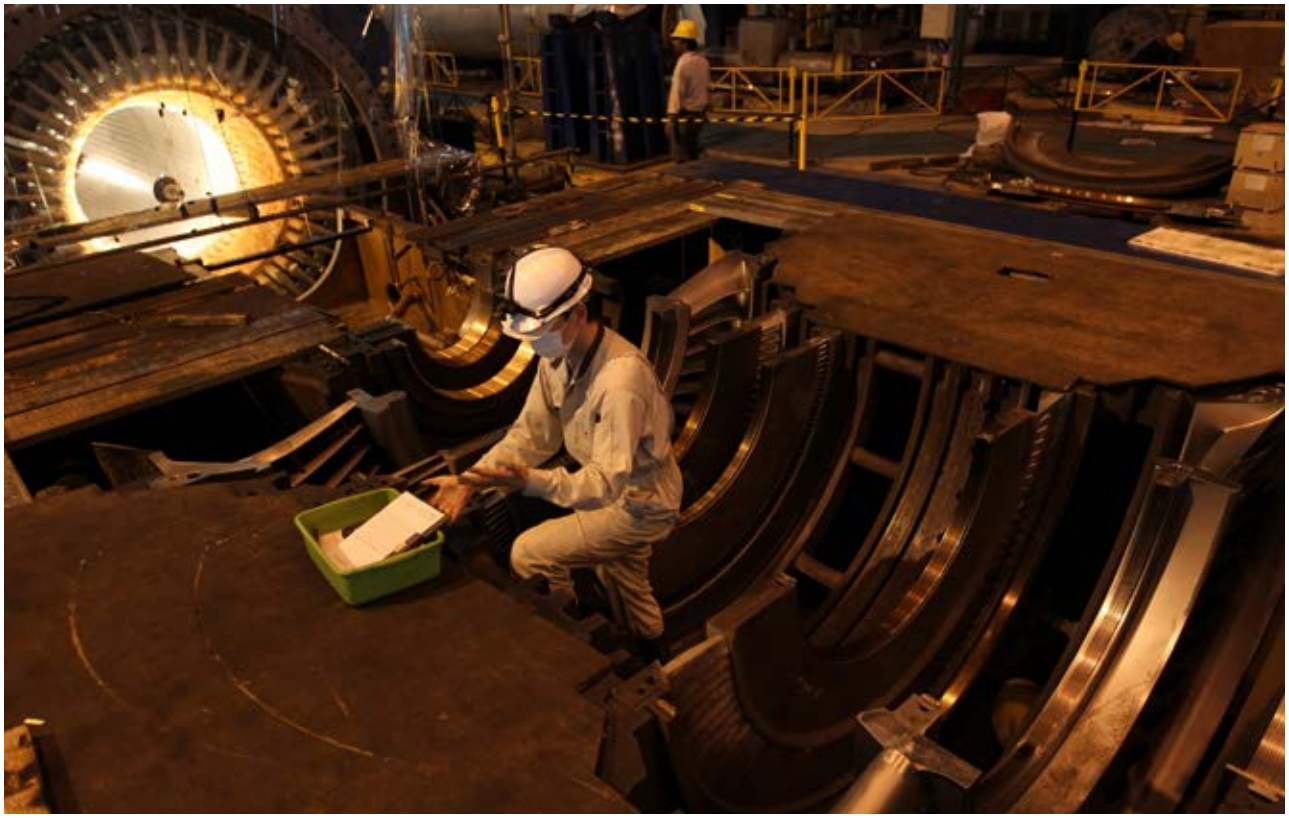

Provinsi Province	Pemilik Owner	Jenis Type	Proyek Pembangkit Power Plant	MW	COD
Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara	Swasta Private	PLTP Geothermal Power Plants	Atadei	5	2017
		PLTP Geothermal Power Plants	Mataloko	5	2018
		PLTP Geothermal Power Plants	Sokoria	3 x 5	2018 - 2020
		PLTP Geothermal Power Plants	Oka Ile Ange	10	2020
Sulawesi Selatan South Sulawesi	PLN	PLTU Steam Power Plant	Punagaya	2 x 100	2016
	Swasta Private	PLTA Hydro Power Plants	Bonto Batu	110	2019
		PLTA Hydro Power Plants	Malea	90	2020
Sulawesi Tengah Central Sulawesi	Swasta Private	PLTP Geothermal Power Plants	Bora Pulu	55	2022
		PLTP Geothermal Power Plants	Marana/Masaingi	20	2022
Sulawesi Utara North Sulawesi	PLN	PLTP Geothermal Power Plants	Kotamobagu 1 dan 2	2 x 20	2022
		PLTP Geothermal Power Plants	Kotamobagu 3 dan 4	2 x 20	2022
	Swasta Private	PLTP Geothermal Power Plants	Lahendong V dan VI	2 x 20	2017 - 2018
Sumatra Barat West Sumatera	PLN	PLTA Hydro Power Plants	Masang-2	55	2020
	Swasta Private	PLTP Geothermal Power Plants	Bonjol	3 x 55	2022
		PLTP Geothermal Power Plants	Muara Laboh	4 x 55	2017 - 2018
Sumatra Selatan North Sumatera	Swasta Private	PLTP Geothermal Power Plants	Lumut Balai	4 x 55	2017 - 2019
		PLTP Geothermal Power Plants	Rantau Dadap	4 x 55	2019 - 2020

Pemeliharaan Pembangkit

Dalam rangka memastikan keandalan pasokan daya listrik dari seluruh unit pembangkit yang dikelolanya, PLN senantiasa menjadwalkan masa-masa pemeliharaan untuk masing-masing unit dimaksud. Jadwal pemeliharaan tersebut dibuat dengan memperhatikan masa pakai dan kondisi masing-masing unit sesuai rekomendasi pabrikan yang merancang dan memproduksi bagian-bagian dari unit pembangkit, meliputi unit boiler, generator dan sebagainya.

Jadwal pemeliharaan tersebut kemudian dituangkan kedalam Rencana Pemeliharaan Pembangkit setiap periode operasi. Jadwal pemeliharaan ditetapkan dengan memperhatikan kontinuitas pasokan listrik di setiap wilayah distribusi. Kondisi fisik unit pembangkit, unjuk kerja dan proyeksi beban puncak dan availability factor dari jaringan distribusi akan menjadi pertimbangan utama dalam setiap pelaksanaan pemeliharaan.

Dengan realisasi COD unit baru dalam Skema FTP I yang banyak terlambat, ketepatan menentukan waktu realisasi pemeliharaan merupakan tantangan tersendiri. Untuk tahun 2014, PLN memiliki target melakukan proses pemeliharaan terhadap 1.150 pembangkit dengan total daya sebesar 23.070 MW, dengan ringkasan rincian per wilayah adalah sebagai berikut.

Plant Maintenance

In order to ensure the reliability of the power supply of all generating units under its management, PLN always scheduled maintenance periods for each of the units. The maintenance schedule is made by taking into account the age and the condition of each unit according to the manufacturer's recommendations of the parts design and manufacture of the generating units, including units of boilers, generators and so on.

The maintenance schedule is then listed in Plant Maintenance Plan for each operating period. Maintenance schedule is determined by taking into account the continuity of electricity supply in each region of the distribution. The physical condition of generating units, performance and projected peak load and availability factor of the distribution network will be a major consideration in any implementation of maintenance.

Since the realization of the new units in the Scheme COD FTP-1 were much too late, the accuracy of determining the time of realization of maintenance is suppose to be a challenge. For 2014, PLN has targeted 1,150 maintenance work on power plants with a total of 23,070 MW, with summary details per region are as follows.

Target Pemeliharaan Unit Pembangkit
Plant Unit Maintenance Target

Lokasi Unit	Jumlah Fisik Pemeliharaan Pembangkit Total Plant Unit Maintenance				Plants Unit
	Target Unit Unit Target	Realisasi Realization	Target Daya (MW) Capacity Target	Realisasi (MW) Realization (MW)	
Jawa Bali	26	22	10.444	9.149	Java Bali
Sumatera	92	58	2.522	1.956	Sumatra
Indonesia Timur	949	480	1.128	501	East Indonesia
PLN Batam	0	0	0	0	PLN Batam
PLN Tarakan	0	0	0	0	PLN Tarakan
Indonesia Power	80	76	4.529	4.232	Indonesia Power
PJB	62	57	4.761	4.385	PJB
Jumlah	**1.209**	**693**	**23.384**	**20.223**	**Total**

PLTU Terbesar Di Asia Pasifik untuk Menghindari Krisis Listrik

Largest Power Plant in Asia Pacific to Avoid Electricity Crisis

Untuk menghindari risiko krisis listrik yang diperkirakan terjadi pada tahun 2017 atau 2018 mendatang jika pembangunan unit baru dalam skema FTP-1 maupun FTP-2 tidak dapat selesai tepat waktu, Pemerintah Indonesia bersama dengan PLN sebagai pelaksana dan penanggung jawab di lapangan, menargetkan pembangunan PLTU berbahan bakar batubara terbesar di dunia maupun di Asia Pasifik dengan menggunakan teknologi *super critical.*

Sebagaimana diketahui FTP-1 dengan total kapasitas 10.000 MW yang dijadwalkan selesai seluruhnya di akhir tahun 2014, belum seluruhnya dapat direalisasikan. Hingga akhir tahun 2014, tercatat baru sebesar 8.092 MW dari FTP-1 yang berhasil diselesaikan, dimana total tambahan pasokan daya ditahun 2014 adalah sebesar 1.715 MW.

Sementara itu FTP-2 dengan total daya sebesar 17.918 MW yang baru dimulai di tahun 2014 (dari rencana semula 2010) dengan jadwal penyelesaian seluruhnya di tahun 2022 dikhawatirkan akan mengalami beragam hambatan seperti halnya FTP-1 sehingga jumlah pasokan daya tidak bisa mengimbangi peningkatan kebutuhan listrik.

Dalam daftar proyek FTP-2 ada rencana pembangunan PLTU Batang di Jawa Tengah berkapasitas 2 x 1.000 MW yang dijadwalkan selesai 2018. Namun realisasinya masih terhambat oleh penyediaan lahan, sehingga pembangunan PLTU terbesar di Asia Pasifik tersebut kemungkinan akan mundur dari jadwal semula. Pemerintah dan PLN saat ini sedang bersinergi untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan lahan sehingga PLTU 2 x 1.000 MW dapat diselesaikan untuk menghindari terjadinya krisis listrik.

To avoid the risk of an electricity crisis that is expected to occur in 2017 or 2018 when the construction of new units in the scheme of the FTP-1 and FTP-2 can not be completed on time, the Government of Indonesia, together with PLN as executor and responsible party in the field, targeting to construct the biggest coal-fired steam power plant in the world and Asia Pacific by using supercritical technology.

The construction of FTP-1 with a total capacity of 10,000 MW which are scheduled to be completed at the end of 2014, has not been fully realized. Until the end of 2014, only 8,092 MW of FTP-1 has been completed which give total additional power supply in 2014 equal to 1,715 MW.

Meanwhile, construction of FTP-2 with a total power of 17 918 MW starts in 2014 (from the original plan of 2010) with completion schedule in 2022 is feared to undergo a variety of obstacles such as FTP-1 so that the number of power supply can not keep pace with the increase in demand for electricity.

In the list of FTP-2 project there are plans to build Batang power plant in Central Java which has capacity of 2 x 1,000 MW and is scheduled for completion in 2018. However, its realization is still hampered by the provision of land, making the construction of largest power plant in the Asia Pacific region is likely to delayed from the original schedule. Government and PLN is currently attempt to immediately solve the problem of land so 2 x 1,000 MW power plant can be constructed to avoid a power crisis.

Pendanaan
Funding

Mencari dan mengelola sumber pendanaan jangka panjang dengan biaya dana yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan investasi jangka panjang untuk menjamin penyediaan listrik yang memadai, handal dan mampu mendukung penciptaan level kinerja baru.

Searching and managing the long term source of fund at efficient and effective level to finance long term investment to ensure the availability, adequacy, and reliability of electricity, and able to support the growth of job opportunity.

PLN mendapatkan dana dari berbagai sumber untuk membiayai seluruh kegiatan investasi pembangunan stasiun pembangkit, sistem transmisi, sistem distribusi, pembangunan sarana termasuk talangan dana cicilan bunga dalam masa pembangunan (*interest during construction*/IDC) yang memerlukan dana besar, meliputi:

1. Pendanaan dari APBN
2. Pinjaman Luar Negeri DIPA SLA
3. Pinjaman dari Bank
4. Dana Internal (APLN)
5. Penerbitan Obligasi

PLN menerapkan beberapa kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan pendanaan investasi pembangunan sarana ketenagalistrikan, mencakup:

1. Mengupayakan untuk memperkecil tagihan PSO (*Public Service Obligation*) melalui program pendanaan dengan biaya bunga pinjaman yang rendah.
2. Mengupayakan peningkatan Penyertaan Modal Negara.
3. Mengendalikan pinjaman dalam batas kemampuan.

Realisasi Pendanaan 2014

Pada tahun 2014 PLN telah merealisasikan pendanaan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan hingga sebesar Rp37,8 triliun, atau 75,6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp49,9 triliun.

Pada tahun 2014 PLN mendapatkan komitmen pendanaan untuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan kelistrikan, dengan rincian:

1. Penandatanganan penerusan pinjaman antara Pemerintah Indonesia dengan PLN *(Subsidiary Loan Agreement)* dengan No.SLA-1255/DSMI/2014 pada tanggal 04 Februari 2014 sebesar USD.49.500.000,00 dalam rangka pembiayaan Strengthening West Kalimantan Power Grid Project yang bersumber dari Pinjaman *Asian Development Bank* (ADB) dengan nomor *Loan Agreement* 3015-INO tanggal 17 Oktober 2013.
2. Penandatanganan penerusan pinjaman antara Pemerintah Indonesia dengan PLN *(Subsidiary Loan Agreement)* dengan No.SLA-1256/DSMI/2014 pada tanggal 04 Februari 2014 sebesar USD.325.000.000,00 dalam rangka pembiayaan *Second Power Transmission Development Project/Scattered Transmission Lines and Substations in Indonesia Phase* II yang bersumber dari *Pinjaman International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dengan nomor *Loan Agreement* 8280-ID tanggal 28 Agustus 2013.

To finance all the investment activities which require a large amount of funds, such as in construction of power plant, transmission system, distribution system, facilities, and including the interest during construction (IDC), PLN acquires funds from the following sources:

1. Allocation from the State Budget (APBN)
2. Foreign loans under subsidiary loan agreement according to Budget Implementation Checklist (DIPA-SLA)
3. Bank loans
4. Internal funds (APLN)
5. Bonds issuance

PLN implements some programs and policies to acquire and manage the fund required for electricity facilities investment, which consist of:

1. Minimizing the Public Service Obligation (PSO) bills by implementing the policy of "low interest rate loan".
2. Always Seeking the way to increase the Equity from the state co-financing.
3. Controlling the maximum level of loans within financial capability burdens.

Funding Realization

In 2014 PLN has used funds to finance a variety of projects totalling to Rp37.8 trillion, or 75.6% from previous year of Rp49.9 trillion.

In 2014 PLN had has the funding commitments to finance several projects of electricity development, as described below:

1. The signing of Subsidiary Loan Agreement (two-steps loan) between the Government of Indonesia and PLN No. SLA-1255/DSMI/2014 on 04th of February, 2014 amounting to USD 49,500,000.00 under the financing framework of Strengthening West Kalimantan Power Grid Project which is funded from the Asian Development Bank (ADB) and the loan agreement number: 3015-INO dated October 17, 2013.
2. The signing of Subsidiary Loan Agreement (two-step loan) between the Government of Indonesia and PLN No. SLA-1256/DSMI/2014 on February 04, 2014 amounting to USD 325,000,000.00 under the financing framework of the Second Power Transmission Development Project/Scattered Transmission Lines and Substations in Indonesia Phase II, which its source of fund from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) loan, and the loan agreement number 8280 - ID dated August 28, 2013.

Pada tahun 2014 PLN telah merealisasikan pendanaan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan hingga sebesar Rp37,8 triliun, atau 75,6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp49,9 triliun.

In 2014 PLN has used funds to finance a variety of projects totalling to Rp37.8 trillion, or 75.6% from previous year of Rp49.9 trillion.

3. Penandatanganan penerusan pinjaman antara Pemerintah Indonesia dengan PLN *(Subsidiary Loan Agreement)* dengan No.SLA-1257/DSMI/2014 pada tanggal 13 Februari 2014 sebesar USD.224.000.000,00 dalam rangka pembiayaan Java-Bali 500 kV *Power Transmission Crossing Project* yang bersumber dari Pinjaman *Asian Development Bank* (ADB) dengan nomor Loan Agreement 3083-INO tanggal 30 Desember 2013.
4. Penandatanganan penerusan pinjaman antara Pemerintah Indonesia dengan PLN *(Subsidiary Loan Agreement)* dengan No.SLA-1258/DSMI/2014 pada tanggal 28 Februari 2014 sebesar USD.25.000.000,00 dalam rangka pembiayaan Java-Bali 500 kV Power *Transmission Crossing Project* yang bersumber dari Pinjaman *Asian Development Bank* (ADB) dengan nomor Loan Agreement 8276-INO tanggal 30 Desember 2013.

Penerbitan, Pengelolaan Obligasi dan Surat Hutang Berjangka

Selain pembiayaan yang bersumberkan dana pemerintah, pinjaman penerusan luar negeri dan pinjaman perbankan, PLN berupaya mendapatkan sumber dana lain yang berdurasi jangka panjang, yakni obligasi. Sejak 1992 PLN telah memanfaatkan pendanaan dari Pasar Modal dengan menerbitkan obligasi untuk keperluan investasi pembangunan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi serta untuk modal kerja. Obligasi PLN yang telah diterbitkan dikelola oleh wali amanat yang berpengalaman dan setiap periode tertentu peringkatnya ditinjau oleh badan pemeringkat bereputasi internasional maupun nasional.

Aksi korporasi penerbitan obligasi terakhir dilaksanakan pada tahun 2013, dimana PLN melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahun 2013 untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam rangka membiayai kegiatan investasi jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Jawa dan/atau Bali. Total ada tujuh seri obligasi yang diterbitkan sepanjang tahun 2013 lalu, sebesar Rp2,67 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri A, diterbitkan tanggal 5 Juli 2013 senilai Rp182.000.000.000,00.
2. Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri B, diterbitkan tanggal 5 Juli 2013 senilai Rp697.000.000.000,00.

3. The signing of two-step loan Subsidiary Loan Agreement between the Government of Indonesia and PLN No. SLA-1257/DSMI/2014 on February 13, 2013 amounting to USD 224,000,000.00 under the financing framework of Java - Bali 500 kV Power Transmission Crossing Project which is funded from Asian Development Bank (ADB) loan, and the loan agreement number: 3083 - INO dated December 30, 2013.
4. The signing of Subsidiary Loan Agreement (two-step loan) between the Government of Indonesia and PLN No. SLA-1258/DSMI/2014 on 28th of February 2014, amounting to USD 25,000,000.00 under the financing framework of Java - Bali 500 kV Power Transmission Crossing Project, which is funded from Asian Development Bank (ADB) loan, and the loan number: 8276 - INO, dated December 30, 2013.

Issuance and Management of Bonds and Medium Term Notes

Apart from the financing of which the funds were sourced from the government, foreign two-step loans and bank loans, PLN seeks to acquire other medium-term fund sources. Since 1992 PLN has registered in the capital market by issuing bonds for the purpose of financing the investment in power plant, transmission and distribution network as well as for working capital. PLN's bonds is managed by reputable international or national rating agencies, and annually assessed by experienced trustee.

The last corporate action made to issue bonds was in 2013, where PLN offered a Continuous Public Offering I Year 2013 for Bonds and Sukuk Ijarah for the purpose to finance transmission network investment in Sumatra and/or Java, and/or Bali, and/or Sulawesi and/or Maluku and/or Papua and/or the interconnection network among them and/or electrical power distribution network in Java and/or Bali. Totally, there were seven series of bonds has been issued during the year 2013, amounting to Rp2.67 trillion, distributed as follows:

1. PLN I Continuous Bond I Year 2013 Series A issued on July 5, 2013 amounting to Rp182,000,000,000.
2. PLN I Continuous Bond I Year 2013 Series B issued on July 5, 2013 amounting to Rp697,000,000,000.

3. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013, diterbitkan tanggal 5 Juli 2013 senilai Rp121.000.000.000,00.
4. Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri A, diterbitkan tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp593.000.000.000,00.
5. Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B, diterbitkan tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp651.000.000.000,00.
6. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri A, diterbitkan tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp321.000.000.000,00.
7. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B, diterbitkan tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp108.000.000.000,00.

Pada tahun pelaporan 2014, PLN tidak menerbitkan obligasi baru untuk membiayai realisasi kegiatan investasi yang telah direncanakan. Sesuai jangka waktunya, PLN melakukan pelunasan atas beberapa obligasi yang telah jatuh tempo, sebagai berikut:

1. Obligasi PLN VII 2004
2. Obligasi PLN X 2009 SERI A
3. Obligasi PLN X 2009 SERI B
4. PLN Sukuk IJARAH III SERI A

Dengan pelunasan tersebut rekapitulasi daftar obligasi domestik PLN, Obligasi PLN yang pernah diterbitkan dan masih *outstanding* sebagai berikut.

3. PLN I Continuous Sukuk Ijarah I Year 2013 issued on July 5, 2013 amounting to Rp121,000,000,000.
4. PLN II Continuous Bond I Year 2013 Series A issued on December 10, 2013 amounting to Rp593,000,000,000.
5. PLN II Continuous Bond I Year 2013 Series B issued on December 10, 2013 amounting to Rp651,000,000,000.
6. PLN II Continuous Sukuk Ijarah I Year 2013 Series A issued on December 10, 2013 amounting to Rp321,000,000,000.
7. PLN II Continuous Sukuk Ijarah I Year 2013 Series B issued on December 10, 2013 amounting to Rp108,000,000,000.

In reporting year 2014, PLN did not issued new bonds for its funding resources. As it is agreed in the bonds agreement, PLN has to redeem some series of the bonds at their maturity date, or some were repaid by early redemption. Based on this information, the PLN domestic bonds that have been settled or are listed below:

1. PLN VII 2004 Bonds
2. PLN X 2009 Series A Bonds
3. PLN X 2009 Series B Bonds
4. PLN III Series A Sukuk Ijarah

Dengan pelunasan tersebut rekapitulasi daftar obligasi domestik PLN, Obligasi PLN yang pernah diterbitkan dan masih outstanding sebagai berikut.

Daftar Efek Domestik yang Diterbitkan PLN dan Belum Jatuh Tempo
List of Outstanding Domestic Bonds

Ref. Code		Plafond	Loan Signing	Tenor (Years)	Maturity Date	Fixed Rate/ Fee Ijarah (%)	Peringkat Rating	Lembaga Rating
PLN VIII 2006 SERI A	IDR	1.335.100.000.000	21 Juni 2006 June 21, 2006	10	21 Juni 2016 June 21, 2016	13,60%	idAAA	Pefindo
PLN VIII 2006 SERI B	IDR	865.000.000.000	21 Juni 2006 June 21, 2006	15	21 Juni 2021 June 21, 2021	13,75%	idAAA	Pefindo
PLN SYARIAH IJARAH I	IDR	200.000.000.000	21 Juni 2006 June 21, 2006	10	21 Juni 2016 June 21, 2016	13,60%	idAAA (sy)	Pefindo
PLN IX 2007 SERI A	IDR	1.500.000.000.000	10 Juli 2007 July 10, 2007	10	10 Juli 2007 July 10, 2007	10,40%	idAAA	Pefindo
PLN IX 2007 SERI B	IDR	1.200.000.000.000	10 Juli 2007 July 10, 2007	15	10 Juli 2022 July 10, 2022	10,90%	idAAA	Pefindo
PLN SYARIAH IJARAH II	IDR	300.000.000.000	10 Juli 2007 July 10, 2007	10	10 Juli 2017 July 10, 2017	10,40%	idAAA (sy)	Pefindo
PLN XI 2010 SERI A	IDR	920.000.000.000	12 Januari 2010 January 12, 2010	7	12 Januari 2017 January 12, 2017	11,95%	idAAA	Pefindo
PLN XI 2010 SERI B	IDR	1.783.000.000.000	12 Januari 2010 January 12, 2010	10	12 Januari 2020 January 12, 2020	12,55%	idAAA	Pefindo
PLN SUKUK IJARAH IV SERI A	IDR	130.000.000.000	12 Januari 2010 January 12, 2010	7	12 Januari 2017 January 12, 2017	11,95%	idAAA (sy)	Pefindo
PLN SUKUK IJARAH IV SERI B	IDR	167.000.000.000	12 Januari 2010 January 12, 2010	10	12 Januari 2020 January 12, 2020	12,55%	idAAA (sy)	Pefindo
PLN XII 2010 SERI A	IDR	645.000.000.000	8 Juli 2010 July 8, 2010	5	8 Juli 2015 July 8, 2015	9,70%	idAAA	Pefindo
PLN XII 2010 SERI B	IDR	1.855.000.000.000	8 Juli 2010 July 8, 2010	12	8 Juli 2022 July 8, 2022	10,40%	idAAA	Pefindo

Ref. Code		Plafond	Loan Signing	Tenor (Years)	Maturity Date	Fixed Rate/ Fee Ijarah (%)	Peringkat Rating	Lembaga Rating
PLN SUKUK IJARAH V SERI A	IDR	160.000.000.000	8 Juli 2010 July 8, 2010	5	8 Juli 2015 July 8, 2015	9,70%	idAAA (sy)	Pefindo
PLN SUKUK IJARAH V SERI B	IDR	340.000.000.000	8 Juli 2010 July 8, 2010	12	8 Juli 2022 July 8, 2022	10,40%	idAAA (sy)	Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri A	IDR	182.000.000.000.00	5 Juli 2013 July 5, 2013	7	5 Juli 2020 July 8, 2020	8,00%	idAAA	Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri B	IDR	697.000.000.000.00	5 Juli 2013 July 5, 2013	10	5 Juli 2023 July 5, 2023	8,25%	idAAA	Pefindo
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I	IDR	121.000.000.000.00	5 Juli 2013 July 5, 2013	7	5 Juli 2020 July 8, 2020	8,00%	idAAA (sy)	Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A	IDR	593.000.000.000.00	10 Desember 2013 December 10, 2013	5	10 Desember 2018 December 10, 2018	9,00%	idAAA	Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B	IDR	651.000.000.000.00	10 Desember 2013 December 10, 2013	10	10 Desember 2023 December 10, 2023	9,60%	idAAA	Pefindo
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A	IDR	321.000.000.000.00	10 Desember 2013 December 10, 2013	5	10 Desember 2018 December 10, 2018	9,00%	idAAA (sy)	Pefindo
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B	IDR	108.000.000.000.00	10 Desember 2013 December 10, 2013	10	10 Desember 2023 December 10, 2023	9,60%	idAAA (sy)	Pefindo

Dalam rangka menggalang sumber dana jangka panjang PLN juga menerbitkan Surat Hutang Jangka Menengah di pasar domestik, dengan nama MTN PLN I. PLN menerbitkan 4 seri MTN I (G, H, I, J), pada tahun 2008, dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp500 miliar. Dua seri MTN PLN I (yakni G dan H) telah dilunasi, sehingga saat ini yang masih beredar adalah dua MTN PLN I, seri I dan J.

Seluruh surat berharga (obligasi dan MTN) PLN dipasar domestik tersebut mendapatkan peringkat AAA dari Lembaga Pemeringkat Indonesia (Pefindo).

Selain di pasar domestik, PLN juga menerbitkan obligasi dan MTN di pasar uang internasional dalam denominasi US Dollar. Perseroan menerbitkan obligasi Global Bond I Tranche A pada tahun 2006 dengan nominasi sebesar US$450 juta. Obligasi ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo yakni pada tahun 2011. Terakhir kali PLN menerbitkan Global Bond IV adalah di tahun 2009 senilai US$1.200 juta.

Obligasi PLN di pasar internasional mendapatkan peringkat BB dari Lembaga Pemeringkat Standard & Poor's dan Ba1 dari Moody's, sedangkan untuk GMTN yang baru diterbitkan di tahun 2011 dan 2012, mendapatkan peringkat BB/Baa3 dan BBB- dari lembaga pemeringkat yang sama. Kenaikan peringkat tersebut sejalan dengan perbaikan peringkat hutang negara RI.

In addition to bonds, PLN also issued medium-term notes in the domestic market, named MTN PLN I. The Company issued four MTN I series (G, H, I, J) in 2008 in IDR denomination, amounting to IDR 500 billion for each series. Two series of MTN PLN I (G and H) bonds have been paid off, so the remaining bonds in circulation are the other two MTN PLN I series, i.e. Series I and Series J.

All of those PLN securities in the domestic market, either bonds or MTN have idAA+ ranked or AAA ranked rated by Indonesia Rating Agency (Pefindo).

In addition, PLN also issued bonds and MTN in the international money market in USD denomination. The Company issued Global Bond I Tranche A in year 2006 amounting to USD 450 million. This bonds have been redeemed at the maturity date, i.e. in year 2011. Lastly, PLN issued Global Bond IV is in year 2009 in USD denomination amounting to USD 1,200 million.

PLN's bonds in the international market were ranked BB by Standard & Poor's, and Ba1 by Moody's. Meanwhile, the GMTN that has only been issued in 2011 and 2012 were ranked BB/Baa3 and BBB- by the same rating agencies. The rank increase is in line with the improvement in Indonesia's debt rank.

Daftar obligasi internasional yang diterbitkan oleh Perseroan adalah: (Lihat juga tabel "Daftar Ikhtisar Efek Perseroan").

The bonds issued by the Company are: (See also "List of PLN Bonds").

Daftar Efek Internasional yang Diterbitkan PLN dan Belum Jatuh Tempo
List of Outstanding International Bonds

Nama Name		Nominal Value	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor (Tahun) Tenor (In Year)	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Kupon Coupon	Peringkat Rating	Lembaga Rating
OBLIGASI								
Global Bond I Tahun 2006 Tr. B	US$	550.000.000	17 Oktober 2006 October 17, 2006	10	16 Oktober 2016 October 16, 2016	7,7500%	BB/Baa3	S&P / Moody's
Global Bond II Tahun 2007 Tr. A	US$	500.000.000	28 Juni 2007 June 28, 2007	10	28 Juni 2017 June 28, 2017	7,2500%	BB/Baa3	S&P / Moody's
Global Bond II Tahun 2007 Tr. B	US$	500.000.000	28 Juni 2007 June 28, 2007	30	29 Juni 2037 June 29, 2037	7,8750%	BB/Baa3	S&P / Moody's
Global Bond III Tahun 2009	US$	750.000.000	7 Agustus 2009 August 7, 2009	10	7 Agustus 2019 August 7, 2019	8,0000%	BB/Baa3	S&P / Moody's
Global Bond IV Tahun 2009	US$	1.250.000.000	6 November 2009 November 6, 2009	10	20 Januari 2020 January 20, 2020	7,75%	BB/Baa3	S&P / Moody's
GMTN 1st Drawdown 2011	US$	1.000.000.000,00	22 November 2011 November 22, 2011	10	22 November 2021 November 22, 2021	5,50%	BB/Baa3/ BBB-	S&P / Moody's/ Fitch
GMTN 2nd Drawdown 2012	US$	1.000.000.000,00	24 Oktober 2012 October 24, 2012	30	24 Oktober 2042 October 24, 2042	5,25%	BB/Baa3/ BBB-	S&P / Moody's/ Fitch

05 Laporan Pengelolaan Operasional

Operational Management Report

Strategi Usaha di tahun 2014
2014 Business Strategy

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resources Management

Pengembangan Teknologi Sistem Informasi
Information Technology System Development

Kerja Sama dengan Berbagai Pihak
Collaboration with Other Parties

Strategi Usaha di Tahun 2014

2014 Business Strategy

Merealisasikan program-program prioritas jangka pendek untuk memastikan terjadinya peningkatan kinerja korporasi dalam jangka panjang yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Nasional.

To carry out short-term priority programs to ensure continuous improvement in corporate performance in the long run in order to support the national economy growth.

Sebagai bagian dari implementasi rencana pengembangan jangka panjang Perseroan periode 2013-2017 (Masa Pertumbuhan), PLN menetapkan rencana program yang dilaksanakan di tahun 2014. Dalam menentukan program kerja tersebut, Perseroan memperhitungkan berbagai faktor eksternal mencakup: kondisi makro, suku-bunga, nilai tukar, PDB, pendapatan per kapita, pembangunan infrastruktur dan prakiraan permintaan tenaga listrik. Perseroan juga mempertimbangkan kondisi internal berkaitan dengan aspek operasional, infrastruktur pendukung, kesiapan SDM maupun kondisi finansial.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, maka Perseroan menyusun *mapping* persoalan dan prioritas program sesuai kondisi yang dihadapi dengan memperhitungkan ketercapaian target yang ditetapkan, termasuk strategi yang diterapkan agar target dapat dicapai.

Secara umum Perseroan menerapkan strategi agar menjadi entitas korporasi yang sehat secara finansial, sehingga dapat mencukupi kebutuhan operasional sekaligus melakukan investasi untuk mempertahankan *market share* dan berkembang sesuai dengan kaidah-kaidah korporasi. Disamping kondisi keuangan yang sehat, PLN juga harus efisien dan dapat memenuhi tingkat keandalan dan pelayanan sesuai ekspektasi pelanggan dan didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan berperilaku sesuai GCG dan CoC dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, Perusahaan dapat menjalankan misinya sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi.

Tantangan dan Prioritas

Di tahun 2014 dan dalam jangka pendek PLN menghadapi enam tantangan utama, yakni:

1. Mempertahankan kecukupan pasokan daya dalam rangka mempertahankan bebas pemadaman bergilir dan melayani seluruh permintaan pasang baru dan tambah daya.
2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan investasi.
3. Memperbaiki bauran energi untuk mendapatkan BPP yang optimal.
4. Mengantisipasi Implementasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
5. Meningkatkan kinerja operasional khususnya peningkatan keandalan dan pembentukan citra positif Perusahaan.
6. Meningkatkan peran sektor ketenagalistrikan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi.

Untuk tahun 2014, PLN memprioritaskan upaya untuk mensinergikan tuntutan mewujudkan kinerja operasi yang ekselen dan melayani pertumbuhan pelanggan. Upaya tersebut berhadapan dengan kemampuan pendanaan investasi yang masih terbatas, sehingga Perseroan menyusun program kerja yang dapat mensinergikan antara tuntutan untuk mewujudkan kinerja operasi yang ekselen dan melayani pertumbuhan pelanggan, dengan sumber daya Perusahaan yang terbatas dan dirumuskan dalam prioritas program kerja tahun 2014, mencakup:

1. Menjaga kecukupan pasokan listrik.
2. Mengoptimalkan bauran energi.
3. Meningkatkan efisiensi operasi.
4. Melalui penyelesaian pembangunan PLTU dan jaringan transmisinya.

As part of the Company's 2013-2017 (Growth Period) long run development plan implementation, PLN determined a program plan to be carried out in 2014. In coming up with the program, the Company took into account various external factors including: macro condition, interest rate, exchange rate, PDB, income per capita, infrastructure development and electricity power demand forecast. The Company also considered internal condition related to operational aspect, supporting infrastructure, human resources readiness as well as financial condition.

Based on those considerations, the Company, came up with a problem mapping and program priorities according to the circumstances while also taking into account goal attainability, as well as strategies to implement to achieve goals.

In general the Company determined a strategy to become financially healthy entity, so that it could answer to operational needs in addition to create investments to maintain market share and grow in line with corporate principles. Aside from a healthy financial condition, PLN had to also be efficient and able in meeting customers' expectation in terms of service and reliability, supported by qualified human resources who complied with GCG and CoC in their efforts. Thus, the company would be able to carry its mission in supporting economy growth.

Challenges and Priorities

During the year 2014 and in short run PLN faced 6 primary challenges, namely:

1. To maintain enough power supply to avoid rotating blackouts and to serve all new installation requests and power upgrade requests.
2. To increase capacity and financial ability to fulfill investment needs.
3. To fix energy mix in order to gain optimum BPP.
4. To anticipate government regulation Undang-Undang No. 30 year 2009 on electricity.
5. To improve operational performance especially in terms of reliability and company positive image.
6. To improve electricity power sector participation as a stimulus in economy growth

For the year 2014, PLN prioritized to synergized demands of excellent operational performance and customer growth service. However, as the ability to provide funds for investment was limited, the Company created a program that would synergize between the two demands, utilizing Company's limited human resources and explained in 2014 program priority, including:

1. Maintaining electricity power sufficiency
2. Optimizing energy mix.
3. Improving operational efficiency.
4. Building Electricity Power Steam Generator and its transmission network.

5. Memperbaiki tingkat kesehatan keuangan Perusahaan.
6. Meningkatkan konsolidasi proses bisnis untuk integrasi pelayanan dan efisiensi.
7. Sinergi usaha Anak Perusahaan.

Detail prioritas program kerja 2014 dapat dijelaskan dalam diagram berikut:

5. Restoring company's financial health.
6. Improving business consolidation process for service integration and efficiency.
7. Business synergy with sub companies.

2014 program priority details are explained in the following diagram:

PENYELESAIAN PLTU DAN TRANSMISINYA
- **Penyelesaian proyek dan transmisinya sesuai jadwal**
- **Peningkatan *availability factor* pembangkit**
- **Perbaikan manajemen *Coal handling***

FINISHING STEAM POWER GENERATOR AND ITS TRANSMISSION
- Finishing power generator and its transmission project according to schedule
- Improving generator's availability factor
- Fixing coal management handling

MENGOPTIMALKAN BAURAN ENERGI
- **Optimalisasi produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar murah**
- **memaksimalkan pembangkit berbahan bakar gas**
- **Meningkatkan kapasitas energi listrik yang dapat ditransfer melalui kabel laut**

OPTIMIZING ENERGY MIX
- Optimizing electricity production and generator with affordable fuel
- Maximizing gas-fueled generator
- Increasing the capacity of electricity that is transferrable through ocean cable

MEMPERBAIKI TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN
- **Memastikan sumber pendanaan investasi**
- **Memperbaiki kemampuan meminjam *(Debt Capacity)***
- **Mengoptimalkan harga jual rata-rata**
- **Mengupayakan kenaikan Tarif tenaga Listrik (TTL)**
- **Memperbaiki *Return on Asset***

RESTORING COMPANY'S FINANCIAL HEALTH
- Ensuring investment fund sources
- Improving debt capacity
- Optimizing average selling price
- Initiating Electricity Power Tariff
- Improving Return on Asset

MENINGKATKAN KONSOLIDASI PROSES BISNIS UNTUK INTEGRITAS PELAYANAN DAN EFISIENSI
- **Melanjutkan program Listrik Prabayar/Listrik Pintar**
- **Meningkatkan program *ease of doing business* dengan penetapan ketersediaan dalam 40 hari untuk sambungan *daya* s/d 200k kVA.**
- **Program PPFA (Pemusatan Pelaksanaan Fungsi Administrasi dan Keuangan)**
- **Melanjutkan implementasi ERP untuk Unit Pusat-Pusat, Unit Jasa dan UPJB.**

IMPROVING BUSINESS CONSOLIDATION PROCESS FOR SERVICE INTEGRATION AND EFFICIENCY.
- Continuing prepaid electricity (smart electricity) program
- Improving ease of business program by determining power availability up to 200 kvA in 40 days.
- Finance and Administrative Function Concentration program
- Continuing ERP for Unit Pusat-Pusat, Unit Jasa and UPJB

MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASI

- **Efisiensi biaya energi primer dan pembangkit serta perfoma pembangkit**
- **Penurunan biaya non - fuel per kWh jual**
- **Implementasi perbaikan berkelanjutan (OPI)**
- **Penurunan susut jaringan**

IMPROVING OPERATIONAL EFFICIENCY

- Primary energy cost efficiency and generator performance efficiency
- Reducing non-fuel cost per kwH of sales
- Continuous Repair Implementation (OPI)
- Reducing shrunk network

MENJAGA KECUKUPAN PASOKAN LISTRIK

- **Optimalisasi aset dan pembelian *excess power***
- **Mengembangkan pembangkit *Peaker***
- **Mengembangkan energi baru dan terbarukan**
- **Konservasi energi melalui partisipasi pelanggan (penghematan listrik)**

MAINTAINING ELECTRICITY POWER SUFFICIENCY

- Optimizing assets and excess power purchase
- Developing Peaker generator
- Developing new and renewable energy
- Conserving energy through customer participation (electricity saving)

- **Melanjutkan program *Revenue Assurance* dan aplikasi e-batubara**
- **Melanjutkan implementasi e-tax**
- **Implementasi EAM pembangkitan. transmisi dan distribusi**
- **Melanjutkan persiapan pengelolaan *Share Service Center* (SSC)**
- **Optimalisasi organisasi dan implementasi pengembangan SDM sesuai desain optimalisasi organisasi**

- Continuing Revenue Assurance Program and e-coal application
- Continuing e-tax implementation
- Implementing EAM generation, transmission and distribution
- Continuing Share Service Center management preparation
- Optimizing organization human resources development according to

SINERGI DENGAN ANAK PERUSAHAAN

- **Kerjasama dalam penyediaan dan transportasi batubara untuk PLTU**
- ***Business Alignment***

BUSINESS SYNERGY WITH SUB COMPANIES

- Working together in providing and transporting coal for steam power generators.
- Business Alignment

Selain berbagai bidang operasional yang telah disebutkan dalam diagram tersebut, Perseroan juga memprioritaskan beberapa program di bidang lain, meliputi:

Optimalisasi Organisasi dan Peningkatan Kualitas SDM

1. Penyederhanaan fungsi Organisasi Unit, sentralisasi fungsi *supporting* yang selaras dengan program efisiensi biaya administrasi (Program Pemusatan Fungsi Administrasi).
2. Implementasi program *Human Capital Management System (HCMS)* yang didukung dan selaras dengan implementasi program strategis sistem uji *online* kompetensi, Diklat Penjenjangan, Evaluasi *Return On Training Investment* (ROTI), Audit SDM serta Survei Strategis.

Aside from operational sectors mentioned in the diagram, the Company also prioritized several programs in other sectors, including:

Optimization of Organization and Improvement of Human Resources Quality

1. Simplification of Unit Organization functions, centralization of supporting function aligning with administration cost efficiency (Administration Function Centralization Program).
2. Implementation of Human Capital Management System (HCMS) program supported by and aligned with online aptitude test system strategic program implementation, Hierarchy Training, Return On Training Investment (ROTI) Evaluation, Human Resources Audit and Strategic Survey.

Untuk tahun 2014, PLN memprioritaskan upaya untuk mensinergikan tuntutan mewujudkan kinerja operasi yang ekselen dan melayani pertumbuhan pelanggan.

In 2014, PLN prioritized to synergized demands of excellent operational performance and customer growth service.

3. Integrasi Sistem Manajemen Kinerja Pegawai dan *Talent Pool Management System* dengan *HR System Information* (SIPEG dan ERP).
4. Melakukan *organization governance* berupa koordinasi aspek Hubungan Industrial, Forum Bipartit, Implementasi CoC.

Penyelesaian *Financial Closing* untuk IPP dan Penyelesaian Konstruksi Sesuai Jadwal

1. Mendorong penyelesaian *financial closing* untuk IPP
2. Mendapatkan sumber pendanaan baru bagi kegiatan pembangunan sistem pembangkit, maupun sistem distribusi/transmisi.
3. Mengawal proses perijinan dan mengontrol kinerja kontraktor.

Menjamin Ketersediaan Energi Primer

1. Mengusahakan kontrak-kontrak jangka panjang secara langsung dengan pemilik konsesi tambang batubara dalam negeri.
2. Koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menjamin pasokan BBM dan Gas.

3. Employee Performance Integrated Management System and Talent Pool Management System with HR System Information (SIPEG and ERP).
4. Execution of organization governance by means of Industrial Relation, Bipartite Forum, CoC Implementation aspect coordination.

Finishing Financial Closing for IPP and Finishing Constructions According to Schedule.

1. To encourage financial closing finishing for IPP
2. To attain new sources of income for generator system construction activity, as well as distribution/transmission system.
3. To carefully watch over permitting process and control contractors' performance.

Guarantee of Primary Power Availability

1. To initiate long-term contracts directly with local coal mining concession owner.
2. To work with stakeholders in guaranteeing gas and fuel supply.

Percepatan Proses Perijinan dan Proses Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Proyek Kelistrikan Melalui Pengelolaan SLA Secara Intensif.

1. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam skema SLA.
2. Menyediakan data-data terkini terkait perkembangan proses perijinan dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Strategi Pengembangan Korporasi di Tahun 2014

Agar seluruh sasaran dan program prioritas jangka pendek dapat tercapai dan dijalankan dengan baik, PLN menerapkan strategi korporasi di tahun 2014, meliputi:

1. Mempertahankan tingkat kesehatan keuangan Perusahaan.
2. Menyelesaikan *fast track program* (FTP) tahap 1 serta melakukan perencanaan dan konstruksi FTP-2 dan pembangkit reguler lain.
3. Mendorong penyelesaian *financial closing* IPP.
4. Menjaga kecukupan pasokan listrik.
5. Menjamin ketersediaan energi primer.
6. Optimalisasi bauran energi melalui produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar non BBM.
7. Meningkatkan efisiensi operasi.
8. Meningkatkan konsolidasi proses bisnis untuk integritas pelayanan dan efisiensi.
9. Sinergi anak perusahaan.

Acceleration of Permitting Process and Land Acquisition Process for Electricity Project Through Intensive SLA Management.

1. To improve coordination with the stakeholders in SLA scheme.
2. To provide the most updated data in relations to permitting process development in electricity infrastructure development.

Corporate Development Strategy in 2014

So that all short-term goals and priority programs could be achieved and well-executed, PLN implemented corporate strategy in 2014, namely:

1. To maintain the Company's financial health level
2. To finish first phase of fast track program (FTP) and start planning and constructing FTP-2 as well as other regular generators.
3. To encourage IPP finansial closing finishing.
4. To maintain power supply sufficiency.
5. To guarantee primary power availability.
6. To optimize energy mix through electricity production from non-oil-fueled generator.
7. To improve operational efficiency.
8. To improve business process consolidation for service integrity and efficiency.
9. To synergize with sub companies.

Keselarasan Program Pembangunan Jangka Pendek dengan Jangka Panjang

Seluruh program-program prioritas jangka pendek tersebut merupakan bagian dari realisasi program-program jangka panjang Perusahaan, sehingga terdapat keselarasan dan kesinambungan pembangunan ketenagalistrikan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Tujuan Perusahaan dan pencapaian Misi Perusahaan. Hal tersebut tercermin dalam diagram berikut.

TUJUAN PERUSAHAAN COMPANY PURPOSE	MISI PERUSAHAAN RJP RJP COMPANY MISSION STATEMENT	TUJUAN STRATEGIS RJP RJP STRATEGIC GOAL
• Penyediaan Listrik yang memadai. • Memperoleh keuntungan. • Melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan. • Sufficient power supply • To gain profit • To carry out government's mandate in electricity sector	• Menjalankan usaha untuk kepuasan pelanggan, anggota dan Pemegang Saham. • Menyediakan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. • Mengupayakan agar tenaga listrik dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi. • Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. • To perform business with customers', members', and Shareholders' satisfaction in mind • To provide electricity power as a means to improve nation's welfare • To work on supporting the economy through electricity • To perform environmentally-sustainable business operations	• Memperbaiki kondisi keuangan PLN. • Meningkatkan efisiensi investasi. • Mengoptimalkan bauran energi. • Memperbaiki citra operasional. • Memperbaiki citra korporasi. • To restore PLN financial condition • To improve investment efficiency • To optimize energy mix • To improve operational public image • To improve corporate public image

Harmony Between Short-Term and Long-Term Programs

All those short-term priority programs were parts of the company's long-term program implementation, hence the continuity and compatibility in electricity development as defined in Company Purpose Statement and Company Mission Statement. It is reflected in this following diagram:

INISIATIF STRATEGIS STRATEGIC INITIATIVE	PRIORITAS PROGRAM KERJA RKAP 2014 2014 PRIORITY PROGRAM
• Mengoptimalkan ekspansi kapasitas dan pembiayaan. • Mengoptimalkan biaya energi primer. • Melanjutkan *Operational Performance Improvement* (OPI). • Melanjutkan *Procurement and Construction Excellence.* • Meningkatkan *Commercial Excellence.* • Meningkatkan manajemen *stakeholders* dan *regulatory.* • Melanjutkan budaya kinerja tinggi dan kepemimpinan yang kuat. • Meningkatkan pembentukan citra yang positif.	• Menjaga kecukupan pasokan listrik. • Mengoptimalkan bauran energi. • Meningkatkan efisiensi operasi. • Penyelesaian PLTU. • Memperbaiki tingkat kesehatan keuangan Perusahaan. • Peningkatan konsolidasi proses bisnis untuk integritas pelayanan dan efisiensi. • Sinergi anak perusahaan.
• To optimize capacity and funding expansion • To optimize primary energy cost • To continue Operational Performance Improvement (OPI) • To continue Procurement and Construction Excellence • To improve Commercial Exchange • To improve stakeholders and regulatory management • To continue strong leadership and excellent performance culture • To improve positive public image	• To maintain power supply sufficiency • To optimize energy mix • To improve operations efficiency • To finish steam power plant construction • To restore Company's financial health • To improve business process consolidation for service integrity and efficiency. • To synergize with sub companies.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Human Resources Management

Merealisasikan program perekrutan, pelatihan, pendidikan dan pengembangan kompetensi disertai pelaksanaan manajemen karir sesuai kinerja sebagai bagian dari implementasi *Human Capital Management System* untuk mendukung pengembangan usaha dan mencapai *level* kinerja korporat kelas dunia.

Realizing the recruitment process, training, education, competence development, and performance-based career management as part of Human Capital Management System implementation to support business development and reach world-class level of corporate performance.

Sebagai perusahaan penyediaan tenaga listrik utama, PLN dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia dengan kuantitas dan kualitas yang semakin baik. Sekalipun masih mendapatkan penugasan untuk melistriki masyarakat yang kurang mampu, sebagai BUMN, PLN tetap dituntut untuk dapat memberikan dividen kepada Pemerintah yang disisihkan dari laba operasional.

As the main provider of electricity, PLN is expected to fulfill the electricity needs in Indonesia with improved quantity and quality. Although PLN is assigned to provide electricity to the underprivileged, it is still required to provide dividends to the Government, which is to be set aside from the operational profit.

Disamping itu, pemberlakuan UU No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juga membuka peluang adanya perusahaan lain yang masuk ke industri penyediaan tenaga listrik, dan membuka atmosfir persaingan dengan PLN. Suatu perubahan yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak terbayangkan. Untuk menjawab seluruh tantangan tersebut, maka PLN harus dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien.

On the other hand, the enforcement of Law No.30 of 2009 pertaining to Electricity provides opportunity for other corporations to enter the industry of electrical power source, and compete with PLN. This is a change which has never been considered previously. Therefore, in order to face those challenges, PLN has to be able to operate more effectively and efficiently.

PLN meyakini bahwa salah satu elemen strategis dalam menjawab tantangan usaha dimasa mendatang, termasuk dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi. Oleh karenanya PLN telah menyusun rencana strategis pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia.

PLN believes that one of the strategic elements in facing future business challenges as well as increasing the efficiency and effectiveness of operations is the availability of competent and dedicated human resources. Hence, PLN has devised strategic plans for the development and management of human resources (HR).

Rencana Strategis Pengelolaan SDM

PLN mengembangkan rencana dan menjalankan pengelolaan serta pemenuhan SDM berdasarkan posisi dan kualifikasi sesuai pengembangan strategis Perseroan, dengan fokus kepada: (i) memenuhi kualitas SDM sesuai kebutuhan organisasi (ii) mengelola pegawai yang berkinerja rendah, (iii) *outsourcing*/ kebijakan kemitraan bisnis dan metodologinya, (iv) menciptakan kemitraan dengan institusi pendidikan dan (v) membangun sistem perekrutan pegawai yang kompetitif bagi *fresh graduate*.

Strategic Plans of HR Management

PLN develops a plan and runs HR management and fulfillment based on position and qualification according to the strategic development of Corporation, focusing on: (i) having HR quality in accordance with the needs of the organization (ii) managing low-performing employees, (iii) outsourcing/business partnership policies and their methodologies, (iv) building partnership with education institutions and (v) creating competitive recruitment for fresh graduate.

Sesuai dengan hasil *review* kondisi ketenagakerjaan, PLN akan mengalami kekurangan tenaga kerja terampil dalam jumlah yang sangat besar pada tahun 2016. Sebagai organisasi yang terus berkembang, PLN membutuhkan tambahan pegawai yang signifikan, sehubungan dengan bertambahnya pembangkit baru, jaringan yang lebih luas, dan jumlah pelanggan yang lebih banyak. Menurut data kepegawaian, dalam 10 tahun mendatang lebih dari 40% dari total pegawai di PLN akan pensiun.

As stated in the result of employment condition review, PLN will experience a massive labor shortage in 2016. As a constantly growing company, PLN needs a significant increase in the number of employees due to new generators increase, wider network, and a growing number of customers. According to employment data, there will be more than 40% of PLN employees in total who will retire within the next ten years.

PLN berupaya mengatasi tantangan ini melalui: (i) memastikan bahwa tenaga kerja yang ada telah dioptimalkan atau memastikan bahwa setiap orang bekerja secara efektif dan efisien dengan produktivitas yang setara dengan perusahaan yang mempraktikkan standar terbaik di dunia, (ii) melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sesuai kebutuhan organisasi.

PLN attempts to overcome this challenge by: (i) ensuring that the current workforce has been optimized or that everyone works effectively and efficiently with productivity level comparable to that of world's best company, (ii) improving the quality as well as the quantity of workforce based on organization's needs.

Dari proses *review* atas kondisi SDM saat ini, khususnya pada fungsi-fungsi operasional, PLN telah mengidentifikasi adanya kelebihan pekerja yang cukup moderat di beberapa fungsi jika dibandingkan dengan standar global. PLN telah menetapkan kelebihan tenaga tersebut sebagai *buffer*, mengingat operasional Perseroan yang akan terus meningkat. PLN juga telah mengidentifikasi kecukupan SDM untuk fungsi-fungsi lain dan mempersiapkan skenario peningkatan kompetensi maupun penambahan tenaga kerja.

From the review of human resources' current condition, especially on operational functions, PLN has identified moderate employee excess in some functions compared to the global standard. PLN has determined such excess as a buffer, considering the operation of the Corporation which will continue to increase. PLN has also identified HR sufficiency in other functions and prepared competency-improving scenarios as well as workforce growth.

Selain dari sisi alokasi SDM dikaitkan dengan kebutuhan fungsi operasional, PLN telah menyiapkan program untuk menjamin lahirnya generasi pemimpin perusahaan masa depan melalui berbagai program pengelolaan SDM dengan tujuan meningkatkan kompetensi pekerja, memberi kompensasi sesuai kompetensi, menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menjamin kesejahteraan pekerja pada masa bakti maupun purna bakti.

Apart from human resources allocation being linked to the operational function needs, PLN has prepared programs to ensure the existence of next generation leaders through various human resource management (HRM) programs aiming to increase employee competence, create conducive work environment and ensure employees' welfare during and after tenure.

Road Map Pengelolaan Sumber Daya Manusia

PLN menyusun *Road Map* SDM sebagai acuan dalam melakukan *review* dan pembaruan rencana pengelolaan yang dilakukan secara berkala. Penyusunan *Road Map* memperhatikan kondisi perusahaan terkini dan rencana strategis perusahaan dalam beberapa tahun kedepan. Dalam implementasinya, setiap pelaksanaan *item* program selalu mempertimbangkan dan memperhatikan kebijakan umum pengelolaan SDM, yang menyatakan bahwa "Pengembangan sumber daya manusia PLN selalu mengikuti kondisi perusahaan terutama mengingat lokasi operasional yang tersebar luas di wilayah Indonesia. Pelaksanaan penambahan pegawai maupun peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai disesuaikan dengan kebutuhan PLN baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang".

Adapun *Road Map* Pengembangan SDM Perseroan sebagai berikut:

Road Map of Human Resource Management

PLN has drafted HRM Road Map as the guidelines when conducting review and renewing management plan which are done periodically. The drafting of Road Map took into account the current condition and the strategic plans of the company within the next few years. In its implementation, every program item execution always considers and pays attention to the general policy of HRM, which states that "The development of PLN human resources always follows the corporation's condition especially considering its operational locations which are widely spread in Indonesia. The implementations of employee recruitment as well as the improvement of employee quality and competence are adjusted to PLN needs in both medium- and long-term".

The Road Map of HRM Development is as follows:

Road Map HR PT PLN (Persero)

	2004	2005 - 2010	2011 - 2012	2013 - 2017
		Pengelolaan SDM PLN yang efisien dan efektif The Effective and Efficient HR management PLN		
MSDM-BK		• Implementasi Sistem Remunerasi 3P Tahap 1 dan Tahap 2. • Implementasi Sistem Manajemen Kinerja secara *On-Line (web base).* • Perumusan dan Penerbitan tata nilai, *code of conduct* dan Direktori Kompetensi Pegawai. • Kesetaraan sistem SDM diseluruh korporasi PLN. • Penyelarasan dan Penyempurnaan Milestone Sistem Manajemen SDM Strategis dan Implementasi HCMS. • Mengembangkan budaya berbagi pengetahuan dan menanamkan KM dalam Proses Bisnis Penyusunan K-Taxonomy, pembangunan portal KMS, KNIF. • *3P Remuneration System Implementation Phase 1 and Phase 2* • *Performance Management System Implementation with On-Line (web-based)* • *Formulating and Publishing values, code of conduct and Directory of Equality Employee Competency* • *With HR system throughout the PLN's corporation* • *Milestone's Completion and Alignment with Strategic Human Resource Management System and Implementation HCMS* • *Developing a culture of sharing knowledge and investing KM in Business Process Preparation of K-Taxonomy, KMS portal development, KNIF.*	Pegawai PLN yang memiliki Profesionalitas • Implementasi *Employee Wall Baing Survey* dan *Employee Engagement Survey.* • Implementasi *Human Capital Management System* (HCMS) dan HR *Service* terpusat. • Penerapan sertifikasi profesi pegawai serta kerjasama dengan Asosiasi/Institusi Profesi Strategis. • Peningkatan kegiatan KIM melalui CoP dan mengembangkan teknologi kolaboratif serta KM Audit. • Program Kerjasama pengembangan SDM Ind Timur bersama 5 Perguruan Tinggi terkemuka. *Professionalism of PLN's employees* • *Implementation Employee Wall Baing Survey and Employee Engagement Survey* • *Applying the Centralized Human Capital Management System (HCMS) and HR Service centralized.* • *Application of employees professional certification cooperation with the Association / Strategic Professional Institution.* • *Development KIM's activities through CoP and increase collaborative technologies and KM Audit.* • *Human Resources Development Program in Eastern Indonesia with five leading universities.*	Organisasi PLN yang sehat dan Dinamis Mampu memberikan • *World Class Service.* • Top Talent menjadi Anggota *Working Group* Internasional serta menjadi kandidat Direksi di BUMN lain. • *Score Malcolm Baldrige* PLN masuk kategori "*Emerging Industry Leader.*" • *Export* dan *Specialist* PLN mampu berkarir secara global. • Penyempurnaan HCMS serta HR Services yang diimplementasikan secara terpusat Penerapan *Innovation Award* PLN sebagai pendorong perbaikan proses bisnis. • Pusdiklat PLN menelma sebagai *Phenomental Learning Center.* • Unit sertifikasi kompetensi PLN diakui secara global • Sistem manajemen pola HCMS. • Penciptaan PLN sebagai organisasi pembelajar. *PLN as a Healthy and Dynamic Organization is able to provide* • *World Class Service.* • *Top Talent in the International Working Group members as well as candidates of Directors in another state-owned enterprises.* • *Score Malcolm Baldrige PLN in the category "Emerging Industry Leader."* • *Export and Specialist of PLN which capable in career globally.* • *Completion HCMS and HR Services which are implemented in a centralized Application Innovation Award of PLN as a driver of business process improvement.* • *Education Center Training (Pusdiklat) PLN as Phenomental Learning Center.* • *Competency certification unit recognized in global.* • *Management system of HCMS.* • *PLN's creation as a learning organization.*

Realisasi Program Pengembangan SDM

Sampai dengan akhir tahun 2014, pengembangan SDM sesuai *Road Map* telah berada pada tahap:

1. Penetapan Keputusan Direksi Tentang *Strategic Specialist Pool* (SSP) PLN.
2. Penyempurnaan Sistem Manajemen HCMS.
3. Penerapan *Innovation* Award PLN melalui acara Knife *(Knowledge, Norm Discussion Forum, Innovation Contest, Festival and Exhibition)* dan STO (*Science and Technology Olympiade).*

Untuk mencapai tahapan sesuai *road map* SDM, maka strategi yang dijalankan diantaranya adalah memperkuat kinerja organisasi saat ini dan di masa mendatang, mempersiapkan organisasi yang ramping, efektif dan adaptif untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan, desentralisasi kewenangan operasional dan sentralisasi kebijakan yang bersifat strategis, implementasi kriteria kinerja ekselen, menjalankan Sistem Manajemen SDM yang komprehensif, melakukan penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja yang selaras dengan strategi bisnis, serta meningkatkan keterlibatan pegawai dalam pencapaian visi dan misi Perseroan.

The Realization of HR Development Program

By the end of 2014, the development of HR according to Road Map was in the stage of:

1. The Determination of Board of Directors' Decree in regard to PLN Strategic Specialist Pool (SSP)
2. The Improvement of HCMS Management System
3. The Implementation of PLN Innovation Award through Knife (Knowledge, Norm Discussion Forum, Innovation Contest, Festival and Exhibition) and STO (Science and Technology Olympiad) events.

In order to reach stages conforming to the HR road map, strategies implemented include the reinforcement of organization's current and future performance, the preparation of lean, effective and adaptive organization to support business needs, operational authority decentralization and strategic policy centralization, excellent implementation of performance criteria, comprehensive HRM System execution, Performance Management System improvement in accordance to business strategies, and the rise of employee involvement in achieving vision and mission of the company.

Penerapan Asas Kesamaan Kesempatan dan Kesetaraan

PLN memberikan kesempatan setara pada seluruh pegawai untuk berkembang sesuai dengan kompetensinya. Kesetaraan ini tidak mengenal *gender*, namun berdasarkan pada kemampuan individual pegawai. Setiap tahun Perusahaan menyelenggarakan pelatihan khusus dalam rangka promosi untuk mengisi jabatan tertentu dan sebagai bagian dari proses kaderisasi pegawai.

Adapun jenis pelatihan yang dilaksanakan pada dasarnya terdiri atas:

1. Pelatihan Ketrampilan Kompetensi, meliputi 17 jenis pelatihan sesuai kompetensi bidang tugas, meliputi: Administrasi, Audit, Distribusi, Pembangkitan, SDM, Keuangan, Komunikasi, Produksi Peralatan, Ketenagalistrikan dan sebagainya.
2. Pengembangan Manajemen, meliputi tiga jenis pelatihan manajemen: Studi/Kajian Manajemen, Jasa Konsultasi Manajemen dan Seminar/ Lokakarya Manajemen.
3. Kursus Manajemen, meliputi 5 jenis pelatihan, yakni: *Supervisory* Dasar, *Supervisory* Atas, Manajemen Dasar, Manajemen Menengah dan Manajemen Atas.

PLN juga menerapkan asas kesamaan dalam penempatan pegawai sesuai jenjang karir dan dalam pemberian remunerasi. PLN telah menerapkan Manajemen Kinerja, yang menekankan bahwa jenjang karir dan remunerasi semata-mata ditentukan oleh kompetensi dan kinerja pegawai, yang dinilai secara periodik dengan ukuran pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) individu dan kelompok.

The Application of Equal Opportunity Principle

PLN gives equal opportunity for all workers to develop according to their competencies. This equality does not discriminate gender, merely based on each individual worker's ability. Every year the Corporation holds special training for the sake of promotion to fill certain position and as part of employee regeneration process.

The training types which were hold basically include:

1. Skills Competence Training, consists of 17 types of training based on job competencies, including: Administration, Audit, Distribution, Generation, Human Resources, Finance, Communication, Equipment Production, Electrical Power, and so forth.
2. Management Development, comprises three types of management training: Management Studies, Management Consultancy Services, and Management Seminar/Workshops.
3. Management Courses, consist of five types of training, namely: Base-level Supervisory, Senior Supervisory, Base-level Management, Middle Management, and Senior Management.

PLN also implements equality principle in placing employee based on career level and in deciding remuneration. PLN has applied Performance Management, which emphasizes that remuneration is solely determined by the competence and performance of the employee, which is assessed periodically using individual and group measure of Key Performance Indicator (KPI).

Human Capital Management System

Dalam menghadapi tantangan bisnis ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) telah mempersiapkan sumber daya manusia yang dimilikinya sehingga menjadi insan-insan profesional, berkompeten dan berintegritas tinggi guna mendukung strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Perseroan dengan internalisasi tata nilai dan budaya perusahaan melalui implementasi *Human Capital Management System* (HCMS) yang bercirikan kompetitif, adil dan transparan.

Human Capital Management System

In facing business challenges, PT PLN (Persero) has prepared its human resources to be professional, competent, and of high integrity in order to support the short-, medium-, and long-term strategies of the Corporation with values and culture internalization via the implementation of Human Capital Management System (HCMS), which is competitive, fair, and transparent.

HCMS memiliki 7 pilar utama, yakni: i) Sistem Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja, ii) Sistem Rekrutmen, iii) Sistem Pengembangan Kompetensi dan Karir, iv) Sistem Pembelajaran, v) Sistem Manajemen Kinerja, vi) Sistem Penghargaan, vii) Sistem Hubungan Industrial.

HCMS memiliki tujuan utama sebagai pola pengelolaan SDM untuk mendukung strategi dan pencapaian korporat yang selaras dengan optimasi sumber daya terutama biaya-biaya jangka panjang Perseroan, yang diberlakukan kepada pegawai yang diangkat sejak tahun 2011 (kualifikasi SMA/SMK) dan tahun 2012 (kualifikasi D3, S1/D4, S2 dan Profesional) untuk kemudian secara jangka panjang akan diselaraskan dengan keseluruhan entitas pegawai yang ada.

Adapun uraian pelaksanaan berbagai kegiatan pengelolaan SDM PLN berdasarkan implementasi HCMS tersebut adalah:

1. Sistem Organisasi dan Perencanaan
   PLN memperhitungkan beberapa parameter dalam mengelola SDM agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan usaha. Beberapa parameter tersebut meliputi: komposisi pegawai unit-unit usaha, ketersediaan anggaran dan faktor efisiensi serta produktivitas pegawai secara keseluruhan maupun menurut unit-unit usaha.

   PLN merencanakan rekrutmen pegawai baru dengan mempertimbangkan antara lain: (i) strategi dan kebijakan Korporat, (ii) level produktifitas pegawai yang diukur melalui energi terjual (kWh) dibagi dengan jumlah pegawai yang menjadi target pada tahun berjalan, (iii) ketersediaan anggaran kepegawaian, serta (iv) program efisiensi dan integrasi dengan teknologi informasi yang dilakukan oleh PLN seperti *Share Service Unit* (SSU). Dalam mengalokasikan komposisi karyawan dipertimbangkan pula usulan komposisi pegawai yang diajukan oleh unit-unit PLN.

   Proses rekrutmen dilaksanakan secara regional sehingga memudahkan calon pegawai dari daerah setempat untuk mengikuti rekrutmen serta mendukung peningkatan komposisi karyawan lokal.

2. Sistem Rekrutmen
   PLN menerapkan kebijakan umum yang menetapkan bahwa proses penerimaan pegawai berawal dari kebutuhan unit bisnis *(user)* yang didasarkan atas perencanaan tenaga kerja oleh Divisi yang membidangi organisasi.
   Pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan berdasarkan rencana pemenuhan tenaga kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang. Proses seleksi melibatkan pihak ketiga dan dilakukan melalui seleksi administrasi, *aptitude test,* psikotes, tes kesehatan, dan wawancara. Sebelum diangkat menjadi pegawai tetap, terlebih dahulu para calon pegawai tersebut mengikuti program pembekalan diklat prajabatan, yang terdiri dari program :
   1. Program pembentukan mental dan disiplin;
   2. Program pengenalan perusahaan;
   3. Program pembidangan;
   4. Program orientasi kerja dalam bentuk *On the Job* berbasis *project.*

HCMS has seven main pillars, namely: i) Organizational Development and Manpower Planning System, ii) Recruitment System, iii) Competence and Career Development System, iv) Learning System, v) Performance Management System, vi) Appraisal System, vii) Industrial Relations System.

As HR management format, HCMS has a main aim to support corporate strategy and achievement which are aligned with HR optimization, especially long-term expenses of the Corporation. This is applicable to employees recruited since 2011 (with SMA/SMK qualification) and 2012 (D3, S1/D4, S2, and Professional qualifications) which in long-term will be aligned with the whole existing employment entity.

Whereas the PLN HRM activities based on the implementation of HCMS include:

1. Organizational and Planning System
   PLN takes some parameters into account in ensuring HR to be in line with the organization needs and business development. These parameters include: the composition of business units' employees, budget availability and efficiency factors, as well as employees productivity overall and according to each business unit.

   PLN plans the recruitment of new employees by considering the following: (i) corporate strategy and policy, (ii) employees' productivity level which is measured by the amount of energy sold (kWh) divided by the number of employees in the year, (iii) employee budget availability, and (iv) efficiency and IT integration programs conducted by PLN such as Share Service Unit (SSU). In allocating employee composition, the draft proposed by PLN units is also considered.

   The recruitment process is conducted regionally to facilitate potential employees from local regions to join the recruitment and to increase the local employee in the composition.

2. Recruitment System
   PLN implements public policy which determined that recruitment process starts from the needs of the business units (users) that are based on manpower planning by the Division of the organization. Implementation of recruitment conducted by labor compliance plan both short and long term. The selection process involves third party and done through administration selection, aptitude test, psychological test, medical test, and interview. Before being appointed as a permanent employee, prospective employee follows pre-service training program, which consists of:
   1. Mental formation and discipline program;
   2. Company introduction program;
   3. Job descriptions program;
   4. Work orientation program in job-based project.

Proses rekrutmen dan seleksi untuk pemenuhan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Perseroan melibatkan dua sumber yaitu internal dan eksternal. Rekrutmen internal adalah kegiatan pemenuhan tenaga kerja yang ditujukan bagi pegawai Perseroan sedangkan eksternal ditujukan bagi pelamar di luar Perseroan. Khusus untuk rekrutmen eksternal metode yang digunakan pada Tahun 2014 adalah metode rekrutmen umum dan rekrutmen khusus.
Pada tahun 2014, telah dilaksanakan rekrutmen untuk 3 jenjang pendidikan, yaitu: tingkat S2 Elektro arus kuat, S1/D4 dan D3 baik dengan metode rekrutmen umum maupun khusus dengan perincian sebagai berikut :

1. Rekrutmen bersama dengan Anak Perusahaan yaitu PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali dan PT Indonesia Comnet Plus. Kerjasama ini dilakukan untuk memaksimalkan dan memanfaatkan potensi masing-masing perusahaan untuk mendapatkan pelaksanaan rekrutmen yang bersih, profesional dan efektif;
2. Rekrutmen umum adalah rekrutmen yang memungkinkan peserta dari seluruh perguruan tinggi mendaftar sepanjang persyaratan yang dipersyaratkan terpenuhi. Tiga puluh (30) *event* rekrutmen umum tingkat S1/D4/D3 telah dilaksanakan sepanjang tahun 2014 baik di Pulau Jawa maupun pulau Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa tenggara, Maluku dan Papua. Sebagai catatan rekrutmen di pulau Kalimantan adalah yang pertama kali dilaksanakan untuk tingkat S1/D4/D3 di Perseroan;
3. Rekrutmen khusus tingkat S1/D4/D3 dilaksanakan bagi perguruan tinggi negeri dengan akreditasi A kualifikasi BAN-PT dan atau memiliki kerjasama khusus dengan Perseroan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Rekrutmen ini dilaksanakan di 5 kota yaitu Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya;
4. Program D3 kelas kerjasama pada lima perguruan tinggi yaitu Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Politeknik Negeri Malang dan Politeknik Negeri Ujung Pandang;
5. Rekrutmen umum tingkat S2 jurusan teknik elektro arus kuat yang lokasinya seleksinya dilaksanakan di Jakarta.

Jumlah calon Pegawai yang telah diseleksi sampai akhir 2014 adalah 1.432 orang untuk tingkat S2/S1/D4/D3. Jumlah tersebut diproyeksikan bertambah 150 orang karena masih ada proses rekrutmen yang dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2014 yang masih berlangsung hingga Februari 2015. Adapun jumlah Pegawai tingkat S1/D4/D3 yang telah diangkat sebagai Pegawai pada 2014 adalah sebanyak 1.134 orang.

Recruitment and selection process for the labor fulfillment which undertaken by the Company involves two sources, namely internal and external. Internal Recruitment is a labor compliance activities aimed at employees of the Company, while the external is intended for applicants outside the Company. Especially for external recruitment methods used in 2014 is a common recruitment and special recruitment method.
In 2014, recruitment has been carried out for three levels of education, namely: master level in Electrical, bachelor and diploma with the general and specific recruitment method with the following details:

1. The recruitment is along with the subsidiary, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Java-Bali and PT Indonesia Comnet Plus. This cooperation is carried out to maximize and exploit the potential of each company to get a clean, professional and effective recruitment implementation.
2. General Recruitment is allowing participants from all universities to register as long as all requirements are required. Thirty (30) general recruitment event of S1 / D4 / D3 level has been carried out throughout 2014, both in the island of Java, Sumatra, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku and Papua. For the record, recruitment in the island of Borneo is first performed for S1 / D4 / D3 level in the Company;
3. Special Recruitment for S1 / D4 / D3 level is implemented for public universities with accreditation of A and BAN-PT qualifications and or have a special partnership with the Company which set in the agreement. Recruitment is conducted in 5 cities namely Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang and Surabaya;
4. Program of Diploma (D3) cooperation in five universities, namely University of Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Politeknik Negeri Malang and Politeknik Negeri Ujung Pandang;
5. General recruitment for master (S2) level for Electrical Engineering is located in Jakarta.

Number of candidates who have been selected until the end of 2014 was 1,432 persom for the level of S2 / S1 / D4 / D3. This number is projected to grow to 150 people because there is still the recruitment process conducted in November and December 2014 which are still ongoing as of February 2015. The number of employee for the level of S1 / D4 / D3 which has been appointed as an Officer in 2014 was as much as 1,134 person.

Secara tabulasi, berikut ini adalah tabel pagu dibandingkan realisasi pencapaian:

In tabulation, the following table is the comparison between table of ceiling and the actual achievement:

Tahun Year	Pagu Rekrutmen Recruitment Allotment					Realisasi Rekrutmen Recruitment Realization						Pencapaian Achievement	Keterangan Description
	S2	S1	D3	SMA	Total	S2	S1	D3	D3K	SMA	Total	Persentase Percentage	
2014	5	670	1153	381	2209	1	650	439	342	0	1432	65%	s/d Desember 2014

3. Sistem Pengembangan Kompetensi dan Karir
PLN melaksanakan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi secara konsisten dengan menerapkan ketentuan bahwa pengembangan eksekutif dilakukan

3. Competency and Career Development System
PLN administers competency-based Human Resource Management (HRM) system consistently by applying regulation in which executive development is executed through the

melalui peningkatan kompetensi SDM sesuai persyaratan yang ditentukan untuk setiap level, dan pengelolaan calon pemimpin masa depan dilakukan melalui penyempurnaan sistem *talent management*. Untuk maksud tersebut, PLN telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan; program pengembangan eksekutif; melaksanakan *asesmen* Kompetensi Inti yang bertujuan untuk lebih memahami kompetensi pegawai secara lebih pasti dan terarah.

PLN memberikan kesempatan setara pada seluruh pegawai untuk berkembang sesuai dengan kompetensinya. Kesetaraan ini tidak mengenal gender, namun semata-mata berdasarkan pada kemampuan individual pegawai. Setiap tahun Perusahaan menyelenggarakan pelatihan khusus dalam rangka promosi untuk mengisi jabatan tertentu dan sebagai bagian dari proses kaderisasi pegawai.

Untuk maksud tersebut, PLN telah melaksanakan program Diklat Penjenjangan guna kaderisasi di seluruh jenjang jabatan struktural yaitu Supervisor Dasar, Supervisor Atas, Manajemen Dasar, Manajemen Menengah dan Manajemen Atas. Selain itu, dilaksanakan pula uji kelayakan dan kepatutan dalam proses pengisian setiap jenjang jabatan tersebut.

4. Sistem Pembelajaran

PLN mengembangkan sistem pembelajaran berjenjang sesuai kebutuhan organisasi, dimana. jenis pelatihan terbagi atas beberapa jenjang mulai dari pelatihan khusus operasional hingga pelatihan manajerial.

Program pendidikan dan pelatihan meliputi seminar dan kursus yang dilaksanakan baik di dalam dan luar negeri, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Disamping itu PLN juga melaksanakan program serupa yang dilaksanakan sendiri oleh PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Corporate University*).

Program pengembangan eksekutif adalah program tugas belajar untuk pegawai yang lulus seleksi untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di berbagai perguruan tinggi yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Diklat Seleksi Pegawai Baru

Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pembekalan kepada seorang calon pegawai. Diklat ini dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pusdiklat, dengan mekanisme diklat yang dibagi berdasarkan tingkat pendidikan dan bidang profesi.

Diklat Profesi

Adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi bidang yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Diklat Penunjang

PLN juga menyelenggarakan Diklat Penunjang, yakni diklat yang dilaksanakan untuk menambah kompetensi yang dipersyaratkan dalam kebutuhan kompetensi jabatan, sehingga nantinya pegawai dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan jabatan. Diklat yang menjadi kebutuhan utama perusahaan meliputi bidang *Knowledge Management*, Pengadaan Barang dan Jasa, Lingkungan, Hukum, Manajemen Risiko, Kehumasan dan lain-lain. Bidang-bidang yang menjadi prioritas dalam diklat penunjang meliputi: akuntansi, teknologi informasi, teknik pemeliharaan SUTET, dan sebagainya.

increase of HR competencies according to each level's requirements, and that the management of potential future leaders are employed by perfecting the talent management system. For that purpose, PLN has administered education and training programs; executive development program; administered Core Competencies assessments aiming to give more understanding of staff competencies in a more focused and reliable way.

PLN gives equal opportunities to all workers to develop accordingly. This equality does not differentiate gender, but solely based on each individual's ability. Every year, the company provides special training due to promotion of certain position and as part of employee regeneration process.

Hence, PLN has held Cadre Training for regeneration in all structural job levels, namely Base-level Supervisor, Senior Supervisor, Base-level Manager, Mid-level Manager, and Senior Manager. In addition, there are also fit and proper test for each level of job vacancies.

4. Learning System

PLN has developed cadre learning system based on organization needs, in which the training categories are divided into several stages, starting from special operational training to managerial training.

Education and training programs involve seminars and courses held in Indonesia and overseas, aiming to improve staff competence. On top of that, PLN also conducts similar programs administered personally by PT PLN (Persero) Centre of Education and Training (Corporate University).

Executive development program is a learning program for employees who have passed the selection to continue their studies further in various universities in Indonesia or abroad.

Employee Selection Training

Training is administered to provide debriefing to candidates. This training is performed by PT PLN (Persero) Centre of Education and Training in which training mechanism is divided based on level of education and field of profession.

Professional Training

Is a training which is administered to reach the required job competencies, both for structural and functional jobs.

Support Training

PLN also carries out Support Training to achieve the required job competencies so that employees can execute their tasks properly. Trainings that the company need most include the field of Knowledge Management, Goods and Services Procurement, Environmental, Law, Risk Management, Public Relations, etc. Other fields which become the priorities in support training include: accountancy, information technology, extra high voltage air duct (SUTET) maintenance techniques, and so forth.

Diklat Penjenjangan
Adalah diklat yang dilakukan dalam rangka memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan bagi pegawai struktural yang dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dengan PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan *(Corporate University)* sebagai pelaksana utama. Di dalam diklat Penjenjangan inilah nantinya akan dipilih calon pemimpin yang mempunyai visi ke depan, cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi di dunia dan mampu bersaing dengan negara lain.

Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti
Diklat ini diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa purna bakti, bertujuan agar pegawai lebih siap dalam menghadapi pensiun serta mempunyai kegiatan yang positif untuk mengisi masa pensiun.

5. Manajemen Kinerja
PLN kini telah menerapkan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai dengan tujuan: i) terwujudnya penilaian kinerja yang dapat membangun dan membina budaya pembelajar dan berprestasi serta memotivasi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan kontribusi bagi Perseroan, ii) sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara lebih transparan, terukur, dan obyektif sehingga Perseroan dapat memberikan kompensasi dan atau penghargaan yang berkeadilan dan sepadan dengan Kinerja Pegawai selama bekerja dalam kurun waktu 1 (satu) semester.

PLN menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai indikator keberhasilan dari sebuah organisasi/unit kerja/pejabat pimpinan Unit dan individu yang ada dalam Perusahaan. KPI adalah ukuran kinerja itu sendiri, sedangkan target KPI adalah target kinerja yang menyatakan standar dan kesepakatan hasil yang diharapkan dan keselarasannya dengan *job description* jabatan adalah yang utama untuk memastikan setiap pegawai memiliki pekerjaan yang berkesesuaian dan selaras dengan tujuan utama dibentuknya jabatan tersebut. PLN mengembangkan KPI melalui *value drivers* yang terkait dengan sasaran-sasaran strategis.

KPI yang terkait dengan bidang SDM diukur melalui Perspektif SDM berbasis *Malcolm Baldrige*, yaitu:
- *Human Capital Readiness*
- *Organization Capital Readiness*

6. Sistem Penghargaan
PLN menetapkan besaran remunerasi Pegawai mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 007.K/DIR/2008 tentang Sistem Remunerasi Pegawai beserta peraturan perubahannya yang terakhir yaitu SK Direksi No.0035.K/DIR/2014, yakni setiap pegawai berhak atas kompensasi berdasarkan:
- *Pay for person* (P1), merupakan kompensasi dalam bentuk uang setiap bulan untuk menghargai kompetensi, pengalaman kerja dan masa kerja yang besarannya ditentukan berdasarkan *level grade* dan skala *grade*;

Leverage Training
Is a training which is organized for structural employees to meet Job Competencies Requirements and is held in the form of Education and Training with PT PLN (Persero) Center of Education and Training (Corporate University) as the main organizer. It is during this Leverage Training that potential leaders who have vision towards the future, respond swiftly towards changes in the world and are able to compete with other nations, are selected.

Retirement Training
This training is given to employees who are about to enter their retirement period, intending to prepare employees in facing retirement as well as to have positive activities to fill their post-retirement days.

5. Performance Management
PLN has applied Employees Performance Management System with the intention to: i) realize performance review that can build and cultivate learning and accomplishment culture, as well as to motivate employees to increase their competencies and contribution towards the Corporation, ii) as a guideline to evaluate employee performance in a more transparent, measurable, and objective way so that the Corporation can give fair and equal compensation and/or reward, comparable to Employee Performance during 1 (one) semester of work.

PLN established Key Performance Indicator (KPI) as a success indicator of the organization/work unit/unit leaders and individuals within the company. KPI is a measure of performance itself, whereas KPI target is a performance target which states that the standard and agreement of the expected result and its accordance with the job description are the most crucial. This is to ensure that every staff has an appropriate position and is in accordance with the main reason of the job being created. PLN developed KPI through value drivers linked to strategic aims.

The KPI which is associated with human resources (HR) is measured by HR Perspective based on Malcolm Baldrige, namely:
- Human Capital Readiness
- Organization Capital Readiness

6. Reward System
PLN has determined the amount of employee remuneration referring to the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 007.K/DIR/2008 in regard to Employee Remuneration System and its last revised rules which is the Decree of the Board of Directors No.0035.K/DIR/2014, that every employee is entitled to compensation based on:
- Pay for person (P1), which is a compensation in the form of money every month to value competence, work experience and working period which amount is decided according to grade level and grade scale;

- *Pay for position* (P2), diberikan sebagai Kompensasi atas bobot jabatan yang dibebankan kepada Pegawai yang menggambarkan *know how*, *problem solving*, *accountability*. Rumusan umum penetapan P2 adalah = indeks daerah x koefisien posisi x tarif posisi.
- *Pay for performance* (P3), diberikan sebagai kompensasi atas prestasi kerja Pegawai berdasarkan hasil kinerja yang dicapai baik secara individu atau secara kelompok yang merupakan kontribusi nyata dan terukur."
- Selanjutnya, didefinisikan pula bahwa:
  - "*Pay for Person* (P1) merupakan Kompensasi tetap bulanan Pegawai, yang terdiri atas Tunjangan Kompetensi dan *Tarif Grade*."
  - "Tunjangan Kompetensi dan Tarif Grade merupakan konversi dari unsur-unsur penghasilan Pegawai sebelum diberlakukannya Keputusan ini yang terdiri atas Gaji Dasar, Tunjangan Dasar, Tunjangan Daerah dan Tunjangan Jabatan."
  - "*Pay for Position* (P2) diberikan berupa Tunjangan Posisi yang ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

- Pay for position (P2), is given as compensation for job weight assigned to the employee which illustrates know how, problem solving, accountability. The general formula in determining P2 is = Area index x Position coefficient x Position rate.
- Pay for performance (P3), is awarded as compensation for employee's work achievement based on the achieved performance result as an individual or as a team, of which is real and measurable achievement.
- Furthermore, it is also defined that:
  - "Pay for Person (P1) is fixed monthly compensation which consists of Competence Allowance and Grade Rate."
  - "Competence Allowance and Grade Rate are conversion from elements of employee remuneration before this Decree is applied, comprising of Basic Salary, Basic Allowance, Region Allowance and Position Pay."
  - "Pay for Position (P2) awarded as Position Pay is determined by the following formula:

Tunjangan Posisi = Indeks Daerah x Koefisien Posisi x Tarif Posisi
Position Pay= Area Index x Position Coefficient x Position Rate.

  - *Pay for Performance* (P3) diberikan berupa Kompensasi berdasarkan hasil kinerja Pegawai baik secara individu maupun kelompok."

  - Pay for Performance (P3) is given as Compensation based on employee performance as an individual and as a team."

Berdasarkan hal-hal diatas, maka remunerasi Pegawai di PT PLN (Persero), didasarkan pada masa kerja yang direfleksikan skala pada P1, tingkat pendidikan yang direfleksikan grade pada P1, dan prestasi kerja pada P3.

Selain remunerasi diatas, PLN memberikan paket jaminan sosial pegawai, meliputi: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, Jaminan Hari Tua; Jaminan Pensiun; Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; dan Bantuan Ganti Rugi.

Untuk jaminan Pensiun, maka bentuk pengelolaannya melalui dua skema, yakni Dana Pensiun Iuran Pasti dan Dana Pensiun Manfaat Pasti.

7. Hubungan Industrial

PLN berupaya membangun hubungan ketenagakerjaan yang sehat, melalui pembahasan dan penyusunan kerangka kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB disusun bersama-sama perwakilan pekerja dalam Serikat Pekerja, yang akan ditinjau secara berkala tiap 2 (dua) tahun sekali.

Sebagai salah satu upaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Perseroan telah memulai tahapan awal rangkaian perundingan dalam rangka penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Untuk maksud tersebut Perseroan telah menyusun Bahan Perundingan PKB dan melakukan pembekalan kepada Tim Negosiasi PKB, baik dari unsur Manajemen maupun unsur Serikat Pekerja.

Therefore, based on the explanations above, the employee remuneration is determined based on year(s) of service reflected on P1 as scale, education level reflected on P1 as grade, and work achievement on P3.

In addition, PLN also provides social security package, including: Work accident insurance, Death insurance, Old Age Insurance; Retirement Insurance; Health Care Insurance; and Compensation Aid.

For Retirement Insurance, its management form is via two schemes, i.e. Fixed Contribution Pension Fund and Fixed Benefit Pension Fund.

7. Industrial Relations

PLN seeks to build healthy work relations, by the discussion and the draft of partnership frame as outlined in the Collective Labor Agreement (PKB). PKB is drafted together with representations from the Labor Union, which will be reviewed periodically every 2 (two) years.

As one of the means in creating conducive work environment, the Corporation has started the early stage of negotiation in drafting the Collective Labor Agreement (PKB). Therefore, the Corporation has established PKB discussion topics and conducted debriefing to PKB Negotiation Team, both for the management and the Labor Union.

Sementara PKB yang baru masih dalam tahap penyusunan dan perundingan, maka yang saat ini diberlakukan adalah Addendum PKB 2010 - 2012 yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2013 lalu untuk menjamin terjalinnya Hubungan Industrial yang harmonis. Untuk memastikan pencapaiannya, PLN menyelenggarakan Pembinaan Hubungan Industrial ke seluruh Unit-Unit melalui program-program diklat yang melibatkan tim beranggotakan unsur manajemen dan unsur Serikat Pekerja. Adapun program diklat mengenai Hubungan Industrial yang telah dan akan direalisasikan adalah:

- Diklat Investigasi.
- Diklat Hubungan Industrial Dasar
- Diklat Hubungan Industrial Terapan

Selain melalui program diklat Perseroan melaksanakan pertemuan periodik dengan Serikat Pekerja (SP) dalam forum Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) dalam rangka memantapkan kualitas hubungan industrial yang telah terjalin semakin kondusif.

Since the new PKB is still in the stages of drafting and discussion, Addendum PKB 2010 - 2012 which was signed on 11 October 2013 to ensure harmonious Industrial Relations, is currently applied. To ensure its achievement, PLN gives Industrial Relations Coaching to all units through training programs which involve team from the management and the Labor Union. As for the training programs in regard to Industrial Relations which has and will be realized are:

- Investigation Training.
- Basic Industrial Relations Training.
- Applied Industrial Relations Training.

Apart from training programs, the Corporation performs periodic meeting with the Labour Union (SP) in Bipartite Cooperation Institution (LKS Bipartit) for the sake of strengthening industrial relations and making them more conducive.

Pada Perjanjian Kerja Bersama dimuat hak dan kewajiban Perusahaan dan Pekerja secara seimbang, yakni: memberi kepastian hak dan kewajiban Perusahaan dan Pekerja, memperteguh dan meningkatkan kerjasama serta Mengatur penyelesaian perbedaan pendapat.

PKB contains balanced rights and obligations of the company and workers, aiming to: Give certain rights and obligations of the Corporation and Employees, Strengthen and improve partnership and Regulate ways of solving disagreements fairly and thus.

Perseroan meyakini kualitas hubungan industrial yang meningkat akan membuat perundingan bagi penyusunan PKB dalam waktu dekat akan berjalan lancar. Mengingat PKB juga memberi andil besar bagi terciptanya suasana kerja yang semakin kondusif, yang memungkinkan seluruh pegawai dapat memberikan kompetensi terbaiknya dan meyakini bahwa kerja kerasnya akan mendapatkan imbalan yang layak dari perusahaan.

Pada PKB dimuat hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja secara seimbang, dengan maksud untuk:

- Memberi kepastian hak dan kewajiban Perusahaan dan Pekerja yang meliputi: hubungan industrial, syarat-syarat kerja, serta Tata Tertib Perusahaan;
- Memperteguh dan meningkatkan kerjasama antara Perusahaan dan Pekerja;
- Mengatur cara penyelesaian perbedaan pendapat secara adil sehingga tidak mengarah pada perselisihan dan setiap perbedaan akan selalu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Selain tiga kegiatan tersebut, berbagai kegiatan Hubungan Industrial yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2014, mencakup:

- Memberikan saran dan supervisi kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan serta kasus-kasus yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Disiplin Pegawai.
- Menangani dugaan pelanggaran disiplin pegawai.
- Partisipasi aktif dalam mengkomunikasikan permasalahan Alih Daya PT PLN (Persero).

The Corporation believes that the increase of industrial relations quality will enable discussions in drafting PKB in the near future to go well. Considering PKB also gives important contribution to the existence of conducive work environment, which enables all workers to give it their best competencies and trust that their hard work will receive just compensation from the company.

PKB contains balanced rights and obligations of the company and workers, aiming to:

- Give certain rights and obligations of the Corporation and Employees which include: industrial relations, employment conditions, and the Corporation's Code of Conduct;
- Strengthen and improve partnership between the Corporation and Employees;
- Regulate ways of solving disagreements fairly and thus, it will not lead to conflict and each difference will always be resolved through discussion to reach a consensus.

In addition to the three activities above, various Industrial Relations activities which have been held throughout 2014 include:

- Provided suggestion and supervision for Industrial Relations Dispute (PHI) cases and other cases related to the implementation of Employee Discipline Regulation.
- Handled alleged employee discipline violation.
- Active participation in communicating PT PLN (Persero) outsourcing problem.

- Pengelolaan Alih Daya baik secara internal PLN (dengan SP PLN) maupun secara eksternal dengan Kementerian BUMN dan Kemenakertrans serta Satgas Alih Daya.
- Mengakomodir dan menjembatani Manajemen dengan DPD SP-PLN yang memiliki permasalahan Alih Daya.

- Menginventarisasi dan membuat rekapitulasi data Perselisihan Hubungan Industrial serta penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Unit-unit PLN.
- Berkoordinasi dengan Bidang MSDM-BK dan DPP SP-PLN melakukan sosialisasi ke seluruh Unit perihal perubahan Sistem Remunerasi dan Juklak Kesehatan melalui video conference pada tanggal 29- 30 September 2014.

8. Program Dana Pensiun

Dana Pensiun PLN merupakan Badan Hukum yang terpisah dari Pendirinya dan bertugas mengelola dana yang dihimpun dari iuran pensiun untuk menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan setelah berhenti bekerja bagi Peserta dan Pihak yang Berhak (Janda/Duda/Anak).

Tujuan pendirian Dana Pensiun PLN adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai PT PLN (Persero) beserta anak perusahaannya yang menjadi Mitra Pendiri, yaitu PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT PLN Batam dan PT Indonesia Comnets Plus.

Penyelenggaraan program pensiun ini khusus bagi pegawai pendiri dan mitra pendiri yang diangkat menjadi pegawai sebelum Januari 2012. Seiring dengan peralihan bentuk hukum Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara diubah menjadi Dana Pensiun PT PLN (Persero), atau disebut juga Dana Pensiun PLN (DP-PLN).

Saat ini yang berlaku adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) Tahun 2013 sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-481/NB.1/2013 tanggal 11 September 2013.

Untuk melaksanakan ketentuan tentang program pensiun, maka disusun Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero). Saat ini yang berlaku adalah sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 008.E/DIR/2013 tanggal 18 November 2013.

Profil Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia PLN dan Anak Perusahaan sampai akhir 2014 berjumlah 48.068 pegawai terdiri dari 41.000 pegawai PLN dan 7.068 pegawai organik Anak Perusahaan, menurun sebesar 1,67% dari tahun 2013 yang jumlahnya 48.886 pegawai. Komposisi pegawai PLN berdasarkan level manajemen dapat dilihat pada tabel berikut:

- Managed outsourcing both internally (with SP PLN) and externally with SOE Ministry, Manpower Ministry and Outsourcing Task Force.
- Accommodated and bridged the Management with DPD SP-PLN which has outsourcing problems.

- Took inventory and recapitulated Industrial Relations Dispute data as well as resolved PLN Units' Employee Discipline Violation cases.
- Coordinated with Competency Based Human Resource Management (MSDM-BK) and DPP SP-PLN to socialize to all units in regard to changes in Remuneration System and Health Guidelines via video conference on the 29th to 30th of September 2014.

8. Pension Fund Program

PLN Pension Fund is a separate legal entity from its founder and is in charge of managing funds collected from pension contribution to ensure and maintain post-retirement income continuity of the Member and Beneficiary (Widow/Widower/Child).

The purpose of PLN Pension Fund establishment is to administer Fixed-Benefits Pension Program (PPMP) for PT PLN (Persero) employees and its co-founding subsidiaries, i.e. PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT PLN Batam and PT Indonesia Comnets Plus.

The implementation of this retirement program is specifically for the employees of the founder and cofounders who were employed prior to January 2012. Along with the transition of legal form of General State-Owned Electricity Company to Corporation (Persero), Pension Fund of National Electricity Company was changed to Pension Fund PT PLN (Persero), or is also known as Pension Fund PLN (DP-PLN).

The current regulation in place is the Pension Fund Regulation from PT PLN (Persero) Pension Fund Year 2013 in accordance with OJK Board of Commissioners' Decree KEP-481/NB.1/2013 dated 11 September 2013.

In order to implement the provision on retirement program, The Procedure and Guidelines for the Enforcement of Retirement Program in line with Pension Fund Regulation from PT PLN (Persero) Pension Fund, has been drafted. PT PLN (Persero) Board of Directors' Circular Number 008.E/DIR/2013 dated 18 November 2013 is currently in place.

Human Resources Profiles

By end of 2014, PLN and its subsidiaries' Human Resources (HR) amounted 48,068 to employees, which consist of 41,000 and 7,068, decreased by 1,67% from 2013 of which there was 48,886 employees. The composition of PLN staff according to management level is shown in the following table:

Jumlah Pegawai PLN Berdasarkan Level Manajemen
Composition of PLN Management Level Employees

Tingkat	2012	2013	2014	Level
Manajemen Atas	81	84	84	Senior Management
Manajemen Menengah	343	328	358	Mid-level Management
Manajemen Dasar	890	868	1.110	Base-level Management
Supervisor Atas	2.106	2.285	2.698	Senior Supervisory
Supervisor Dasar	4.791	4.232	4.711	Base-level Supervisory
Fungsional	33.187	33.549	32.039	Functional
Anak Perusahaan	6.578	7.540	7.068	Subsidiary
Total	**47.976**	**48.886**	**48.068**	**Total**

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai PLN yang berlatar belakang pendidikan di bawah D1 adalah 23.692 atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah pegawai yang berpendidikan D3, S1, S2 dan S3 mengalami kenaikan.

According to the education level, the number of PLN employees with educational background below D1 is 23,692 or decreased from that of the previous year. Whereas the number of employees with D3, S1, S2 and S3 educational background experienced a rise.

Jumlah Pegawai PLN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Number of PLN Employees Based on Education Level

Tingkat	2012	2013	2014	Level
≤ D1	25.011	24.847	23.692	≤ D1
D2	–	–	100	D2
D3	6.046	6.068	6.775	D3
S1	9.335	9.413	9.459	Bachelors
S2	1.004	1.014	969	Masters
S3	2	4	5	PhD
Anak Perusahaan	6.578	7.540	7.068	Subsidiary
Total	**47.976**	**48.886**	**48.068**	**Total**

Berdasarkan usia maka jumlah pegawai PLN paling banyak berada pada rentang usia 46 tahun ke atas, kemudian disusul usia di bawah 30 tahun.

By age, the largest number of PLN employees are those aged 46 or above, followed by those below 30 years of age.

Jumlah Pegawai PLN Berdasarkan Kelompok Usia
Number of PLN Employees Based on Age

Usia	2012	2013	2014	Age
≤	7.398	7.241	8.220	≤
26-30	5.743	6.786	7.354	26-30
31-35	1.791	2.731	2.936	31-35
36-40	2.083	1.369	1.199	36-40
41-45	4.661	4.394	4.175	41-45
46-50	8.754	6.579	5.934	46-50
>50	10.968	12.246	11.182	>50
Anak Perusahaan	6.578	7.540	7.068	Subsidiary
Total	**47.976**	**48.886**	**48.068**	**Total**

Berdasarkan data-data demografi tersebut diatas, tampak bahwa dari sisi pendidikan, PLN memiliki komposisi SDM dengan porsi lulusan sampai dengan D-1 cukup dominan, mencapai angka diatas 50%. Sementara dari sisi usia, sekitar 26% SDM telah memasuki usia diatas 50 tahun dan 39% telah memasuki usia diatas 46 tahun.

Data demografi pendidikan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi kompetensi dasar, PLN harus mulai meningkatkan kualifikasi SDM yang dimilikinya, agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan. Sementara dari demografi menurut usia, maka berarti dalam beberapa tahun kedepan, PLN harus mempersiapkan tambahan SDM yang memasuki usia pensiun dengan jumlah diatas 10.000 orang.

Dengan memperhatikan ketersediaan SDM dan keharusan mengembangkan kegiatan operasional agar dapat memenuhi kebutuhan listrik seluruh masyarakat Indonesia, jelas bahwa PLN menghadapi tugas yang tidak ringan. Untuk mengelola SDM yang ada agar dapat memberikan sumbangsih maksimal kepada kinerja operasional, PLN menerapkan sistem manajemen SDM, yakni *Human Capital Management System*, yang mencakup pengelolaan seluruh fungsi penambahan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan sebagainya, hingga persiapan purna bakti.

Tingkat *Turn-Over*

Dengan berbagai upaya pengelolaan SDM yang dilakukan secara adil, transparan dan berimbang, PLN berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi segenap pegawai. Hal ini dapat dilihat dari relatif rendahnya tingkat *turn-over* pegawai.

Pada Tahun 2014 tercatat ada 2.387 pegawai PLN yang berhenti, atau berarti mencapai 4,9% dari total pegawai PLN per-akhir tahun yang mencapai 48.068 pegawai (termasuk pegawai organik anak usaha). Sejumlah 1.845 orang atau 77,6% dari pegawai yang berhenti tersebut adalah karena faktor alami (pensiun), 143 orang karena meninggal dunia dan 209 orang karena permintaan sendiri dan pensiun dini. Di sisi lain pada tahun 2014, PLN merekrut 1.432 pegawai baru untuk berbagai posisi tertentu.

Dampak Keuangan Pengelolaan SDM

Setiap tahun PLN menganggarkan sejumlah dana yang memadai untuk memastikan dipenuhinya kesejahteraan pegawai. Selain dimaksudkan sebagai imbalan atas jasa pegawai, dana belanja pegawai dimaksudkan sebagai insentif agar setiap pegawai tergerak untuk memberikan kompetensi terbaiknya dalam melakukan tugasnya sehari-hari.

Oleh karena itu, pada umumnya dana belanja pegawai PLN setiap tahun meningkat. Peningkatan tersebut bukan semata pengaruh penambahan pegawai, namun selaras dengan kenaikan skala usaha. Agar ada kesesuaian antara jumlah SDM dengan skala usaha, PLN merealisasikan program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai.

Based on the demographics data above, it can be seen that from education aspect, PLN has a composition of human resources relatively dominated by those with education level D1 or below, amounting to over 50%. Whereas from age aspect, around 26% of human resources are of over 50 years of age and 39% are above 46 years old.

This education demographic data shows that based on basic competency aspect, PLN needs to start improving the qualification of its human resources in order to be more comparable to the development demand. In addition, according to the age demographic, within the next few years PLN has to prepare more human resources to replace more than 10,000 employees who will retire.

By considering the availability of human resources and the necessity to develop operational activities to meet the electricity needs of the entire Indonesian, it is clear that PLN faces quite a challenge. In managing the existing human resources to give maximum contribution to operational performance, PLN applies human resource management system, i.e. Human Capital Management System, which covers the management of all additional functions, competency development, performance assessment, and also retirement plan.

Turnover Rate

As a result of various efforts to manage human resources fairly, transparently, and impartially, PLN has succeeded in creating conducive work environment for all employees. This can be seen from the relatively low employee turnover rate.

In 2014, it was noted that there were 2,387 PLN employees who resigned, reaching 4.9% of the total PLN employees in the end of the year which amounted to 48,068 employees. 1,845 or 77.6% of the staffs who resigned were due to normal cause (retirement), 143 passed away and 209 staff resigned voluntarily and retired early. On the other hand, in 2014, PLN hired 1,432 for various positions.

The Financial Impact of HR Management

Every year PLN plans sufficient budget to ensure employee welfare. Apart from being the compensation for employees' services, personnel expenditure is intended as incentives so that all employees give their all best competence in performing their daily duties.

Therefore, PLN personnel expenditure generally rises every year. The rise occurs not only due to the increase in the number of employees, but also in line with the expansion of business scale. PLN realized competency training and development programs to create conformity between the number of human resources and business scale.

Dengan demikian, maka dampak keuangan pengelolaan SDM terdiri dari dua bagian besar, yakni menyangkut pemberian imbal jasa (beban pegawai) serta penyediaan anggaran pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Beban Pegawai

Seperti tampak pada uraian "Ikhtisar Rugi Laba Komprehensif" beban pegawai PLN tahun 2014 naik 0,64% dari Rp15,6 triliun di tahun 2013 menjadi sebesar Rp15,7 triliun di tahun 2014. Beban kepegawaian tersebut terdiri dari: imbalan kerja, Gaji, Jasa produksi dan insentif prestasi kerja, Tunjangan dan Lain-lain.

Total Biaya Pendidikan dan Pelatihan 2014

Secara total, pada tahun 2013, PLN Pusdiklat telah melaksanakan program-program pelatihan baik yang berasal dari PLN, anak Perusahaan, maupun pihak eksternal, dengan total realisasi anggaran diklat sebesar Rp239,8 miliar.

Mengingat besarnya biaya pegawai dan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung program peningkatan kompetensi, dalam melakukan penambahan pegawai maupun melaksanakan program menyangkut kepegawaian, PLN mempertimbangkan ukuran produktifitas pegawai sebagai salah satu butir yang diperhatikan. Dalam kaitan ini, pelaksanaan program pelatihan, menunjukan memiliki korelasi positif dengan produktifitas pegawai yang diukur melalui satuan energi terjual per pegawai, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Hence, the financial impact of HRM consists of two main parts, namely in regard to service compensation (personnel expense) and in regard to competency training and development budget allocation.

Personnel Expense

As described in "Overview of Comprehensive Profit and Loss Statements", the personnel expense of PLN in 2014 rose by 0.64% from Rp15.6 trillion in 2013 to Rp15.7 trillion in 2014. Personnel expenses comprise employee compensation, salary, production service, work performance incentives, allowances, etc.

Education and Training Total Expense 2014

In total, in 2013, PLN Education and Training Center from PLN, PLN subsidiaries, and external parties has conducted training programs, with total training budget realization of Rp239.8 billion.

Considering the high personnel expense and other expenses incurred to support competency-enhancing program, PLN considers the employee productivity level as one of the points to note in recruiting more employees and executing personnel-related programs. In relation to this, the execution of training programs show positive correlation with employee productivity, which is measured by the unit of energy sold per employee, as shown in the following table:

Produktifitas Pegawai (Energi terjual kWh jual/jumlah pegawai)
Employee Productivity (Unit of Energy Sold kWh of sales/ number of employees)

Tahun Year	Produktivitas Pegawai Employee Productivity
2011	3.635,0 MWh/pegawai MWh/employee
2012	4.019,7 MWh/pegawai MWh/employee
2013	3.836,3 MWh/pegawai MWh/employee
2014	4.131,7 MWh/pegawai MWh/employee

Peningkatan Budaya Unggul dan Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Korporat

Pembentukan dan peningkatan Budaya Unggul merupakan bagian dari upaya memotivasi pegawai agar senantiasa berkinerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi Perseroan. Dimensi Budaya Kinerja Tinggi/Unggul memiliki inisiatif untuk menciptakan pegawai PLN yang kompeten, produktif, memiliki tata nilai & etika kerja tinggi, berjiwa *intrapreneur*, dan *cost-benefit conscious*. Pembentukan budaya organisasi unggul dicapai melalui 3 (tiga) pilar utama sebagai berikut:

1. *High Performance Culture* (HPC)
   Business Concern: PLN Pusat menjadi *Emerging Industry Leader* pada tahun 2014 dengan nilai sebagai berikut:
   - *Customer Focus*;
   - *Performance Minded*;
   - *Managing Quality*.
2. *Synergizing in Business and Values* (SBV)
   Business Concern: Membangun PLN menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2015 dengan nilai sebagai berikut:
   - *Integrity and Business Ethic*;
   - *Human Capital Management*;
   - *Knowledge Capturing*;
   - *Change Management, Strategy Alignment*.

Growth of Excellence Culture and Internalizations of Corporate Culture Values

The establishment and enhancement of Excellence Culture are parts of the efforts to motivate employees to perform and give the best contribution to the company constantly. Excellent Performance Culture Dimension has the initiative to shape PLN employees who are competent, productive, cost-benefit conscious, have values & high work ethics, and has entrepreneurial spirit. The establishment of excellent organization culture is achieved through 3 (three) main pillars as follows:

1. High Performance Culture (HPC)
   Business Concern: The main office of PLN became Emerging Industry Leader in 2014 with the following values:
   - Customer Focus;
   - Performance Minded;
   - Managing Quality.
2. Synergizing in Business and Values (SBV)
   Business Concern : Creating PLN as Corruption Free Zone (WBK) in 2015 with the following values:
   - Integrity and Business Ethic;
   - Human Capital Management;
   - Knowledge Capturing;
   - Change Management, Strategy Alignment.

3. *Business Acumen* (BAC)
   Business Concern: Membangunkan jiwa *intrapreneurship* dan *business survival* pada tiap insan PLN dengan nilai sebagai berikut:
   - *Cost and Benefit Minded*;
   - *Intrapreneurship & Entrepreneurship*.

Program pembentukan dan peningkatan budaya unggul yang dilakukan pada tahun 2014 adalah Implementasi PLN Bersih, dengan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Menyusun materi pembelajaran terkait:
   a. *Strategic Corporate Culture* telah selesai dan akan divalidasi.
   b. Pelopor PLN Bersih.
2. Memfasilitasi Mentoring terkait KPI DIR SDM terkait OCR : Kesiapan Budaya Kerja.
3. Memfasilitasi mentoring *cascading* KPI terkait PLN Bersih terhadap seluruh unit.
4. Melakukan pelatihan pelopor *(change agent)* PLN Bersih untuk seluruh Unit.
5. Melakukan pelatihan mentor PLN Bersih sebanyak >19 orang.
6. Melaksanakan Training of Trainer (TOT) Gratifikasi sampai dengan angkatan 2.
7. Melakukan *assessment* Integritas dan Implementasi PLN Bersih berupa *Survey* kuantitatif terhadap Eksternal (vendor) dan internal (Pegawai), diakhiri dengan *Assessment* Kualitatif terhadap seluruh unit dan 5 anak perusahaan.
8. *Survey Employee Engagement Survey* (EES) tahun 2014.
9. Membuat buku Laporan *Employee Engagement Survey* (EES) tahun 2014 Melakukan verifikasi dan Validasi materi *Change Management* untuk *level Basic*, *intermediate*, dan *Advanced*.

PLN menyakini berbagai pencapaian dan pertumbuhan kinerja yang diperoleh hingga saat ini merupakan wujud nyata dari kerja keras dan dedikasi seluruh Pegawai Perseroan. Keyakinan ini menumbuhkan pemahaman bahwa SDM merupakan unsur penggerak terpenting dari seluruh operasional bisnis yang dilakukan oleh PLN dan menempatkan SDM sebagai kunci Sukses pengembangan usaha di masa mendatang.

Pada setiap periode tertentu PLN menyelenggarakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan dan engagement pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan berkarya di lingkup perusahaan. Tahun 2014 PLN merealisasikan program *Employee Engagement Survey* (EES)/*Survey* Kepuasan dan *Engagement* Pegawai bekerjasama dengan pihak Independen dengan nilai EEI = 77%. Hasil *survey* tersebut kemudian dijadikan salah satu masukan untuk meningkatkan pola pengelolaan SDM dimasa mendatang.

3. Business Acumen (BAC)
   Business Concern: Enhancing entrepreneurial and business survival spirits in every PLN personnel with the following values:
   - Cost and Benefit Minded;
   - Intrapreneurship & Entrepreneurship.

Culture establishment program which held in 2014 was the implementation of PLN Bersih, with several activities including:

1. Develop learning materials related:
   a. Strategic Corporate Culture has been completed and will be validated.
   b. Pioneers of PLN.
2. Facilitate Mentoring related KPI DIR HR and OCR: Readiness of Work Culture.
3. Facilitate mentoring cascading KPI related PLN Bersih for the entire unit.
4. Conduct pioneer of PLN Bersih training (change agents) for the entire unit.
5. Conduct PLN Bersih mentor training for 19 people.
6. Implement Training of Trainer (TOT) Gratification until second generation.
7. Conduct Integrity Assessment and Implementation of PLN Bersih with a quantitative survey for the External (vendors) and internal (employee), ending with Qualitative Assessment for the entire unit and 5 subsidiaries.
8. Survey Employee Engagement Survey (EES) 2014.
9. Create a book report "Employee Engagement Survey (EES) 2014" and get verify and validate the materials of Change Management for Basic level, intermediate, and Advanced.

PLN believes that accomplishment and performance which obtained until now is a concrete manifestation of the hard work and dedication of all Employees in the company. This belief make the understanding that human resources is the most important driving element of the entire business operations conducted by PLN and placing human resources as the key to successful business development in the future.

In every particular period, PLN conducts a survey to measure the satisfaction and engagement level of the employees in performing their tasks as well as in the company's work environment. In 2014, PLN realized Employee Engagement Survey (EES), partnering with independent party with EEI rating of 77%. This survey result is then included as an input to improve the HRM pattern in the future.

Corporate University
Kawah Candradimuka Insan PLN untuk Meningkatkan Kompetensi Mendukung Peningkatan Level Kinerja

Corporate University
The Training Place of PLN Employees in Increasing Competence to Support the Improvement of Performance Level

Dalam rangka peningkatan peran dan akuntabiltas PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan di bidang pembelajaran untuk mendukung implementasi kebijakan dan strategi korporat, maka ruang lingkup dalam pengelolaan pembelajaran di PT PLN (Persero) dintegrasikan melalui penerapan Corporate University.

Corporote University (Corpu) adalah salah satu alat stratejik PLN yang berfungsi mengintegrasikan semua sumber daya pembelajaran, proses dan orang *(people)* di Perusahan yang memungkinkan terwujudnya kinerja terbaik dengan terus menerus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku orang dalam lingkungan ekosistem bisnis.

Melalui implementasi Corpu, maka kepemilkan seluruh program dan sarana pembelajaran yang semula berada di PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Direktorat SDM dan Umum, menjadi milk *process busines owner* sehinga lebih selaras dan resposif dalam mendukung kebutuhan korporat.

Corpu merupakan langkah awal Perseraoan menuju learning organization yang berkelanjutan yang akan mendorong munculnya para pemimpin PLN masa depan yang profesional, dan semakin banyak orang-orang PLN yang memiliki sertifikat atau kompetensi nasional/internasional. Melalui Corpu, PLN membangun pusat keunggulan pembelajaran dalam bidang internalisasi/penguatan budaya korporasi setara kelas dunia dalam menyiapkan potensi insani yang profesional dan berintegritas guna mendukung penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan, mengembangkan dua program utama, yakni:

1. Membangun Zona Integritas PLN (ZIP)/PLN bersih di tahun 2013, menuju PLN sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun2015.
2. Membangun karakter Pegawai PLN yang kuat dan dinamis yang dilandasi saling percaya, integritas, peduli, dan pembelajar sebagai landasan perilaku budaya kerja untuk mendukung PLN bersih.

In order to increase the role and accountability of PT PLN (Persero) Centre of Learning and Training in learning which aims to support the implementation of corporate strategy policy, the scope in organizing studies in PT PLN (Persero) was integrated through the application of Corporate University.

Corporate University (Corpu) is one of PLN's strategic tools which functions to integrate all the learning resources, processes, and people within the Corporation which enable the realization of best perfomance by improving knowledge, skills and people behaviour within the business ecosystem continuously.

Through the implementation of Corpu, all programs and learning tools which originally belonged to PT PLN (Persero) Centre of Learning & Training and the Directorate of Human Resources and General become the properties of business owner so that they are more in line with it and responsive in supporting corporate needs.

Corpu is the Corporation's initial step towards learning organization, which in turn will lead to the emergence of professional PLN future leaders, and there will be more PLN staffs who have certification or national/international competencies. Through Corpu, PLN built learning excellence center in internalization/strengthening world-class corporation culture in preparing high-integrity and professional potentials, in order to support the creation of sustainable corporation values and to develop two main programs, namely:

1. *Establishing PLN Integrity Zone (ZIP)/PLN Bersih in 2013, towards PLN as Corruption Free Zone (WBK) in 2015.*
2. *Developing strong and dynamic PLN employee characteristics, which are built upon mutual trust, integrity, caring sense, and learners as the foundations of work culture behaviors in support of PLN Bersih.*

Pengembangan Teknologi Sistem Informasi

Information System Technology Development

Merealisasikan program pengembangan sistem informasi berbasis teknologi terkini sesuai kebutuhan dan kaidah IT-*Governance* terbaik untuk mendukung tekad PLN dalam meningkatkan kualitas layanan dan memastikan peningkatan efisiensi operasional guna mewujudkan level kinerja baru yang sejajar dengan perusahaan sejenis berstandar global.

Establishing an information system development program based on the latest technology according to the needs and standards of the best IT-Governance to support the intention of PLN to improve its service quality and ensure the improvement of operational efficiency in order to achieve a new level of performance that is parallel to other similar companies with global standard.

Guna mendukung proses bisnis yang lebih cepat, akurat dan akuntabel serta mengikuti pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini, PLN mengembangkan peran sistem operasi berbasis teknologi informasi sebagai "*enabler*", yaitu sistem yang mampu mendukung dan menjawab seluruh tantangan pertumbuhan operasi yang cepat dan akurat.

Hal tersebut membuat Divisi Sistem Informasi harus selalu memandang ke depan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan teknologi, mengevaluasi teknologi proses bisnis sekarang dan melakukan upaya peningkatan kinerja-nya untuk meningkatkan *nilai* perusahaan.

Sehubungan dengan tujuan tersebut, PLN mengembangkan aplikasi teknologi informasi, dengan bergerak dari model *distributed* menuju sistem yang terpusat dan standar,melalui penguatan infrastruktur jaringan, peningkatan pengolahan data dan keandalan *data center.*

Mengacu pada pelaksanaan program PLN *IT Strategic Plan* (2002) dan PLN *IT Master Plan* (2004), maka secara bertahap aplikasi-aplikasi berbasis teknologi informasi yang tersebar mulai distandarisasikan dan pengelolaannya dilakukan secara terpusat sebagai sistem aplikasi teknologi informasi korporat, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

In order to support a fast, accurate and accountable business process as well as following in the rapid development of current technology, PLN established a role of technology-based information system known as "enabler", a system which is able to support and solve the entire challenges in fast and accurate growth of operations.

This creates the need for the Division of Information System to always look forward in acquiring the latest information about technology development, evaluate today's business process technology and accomplish an improvement in its performance to boost the value of the company.

In accordance to the goals, PLN develops an information technology application, by moving from distributed model to a standardized and centered system, through the establishment of network infrastructure, the improvement of data processing and data center reliability.

Referring to the program implementation of PLN IT Strategic Plan (2002) and PLN IT Master Plan (2004), the distributed information technology-based applications are gradually standardized and its management is done centrally as corporate information technology application system, as seen below:

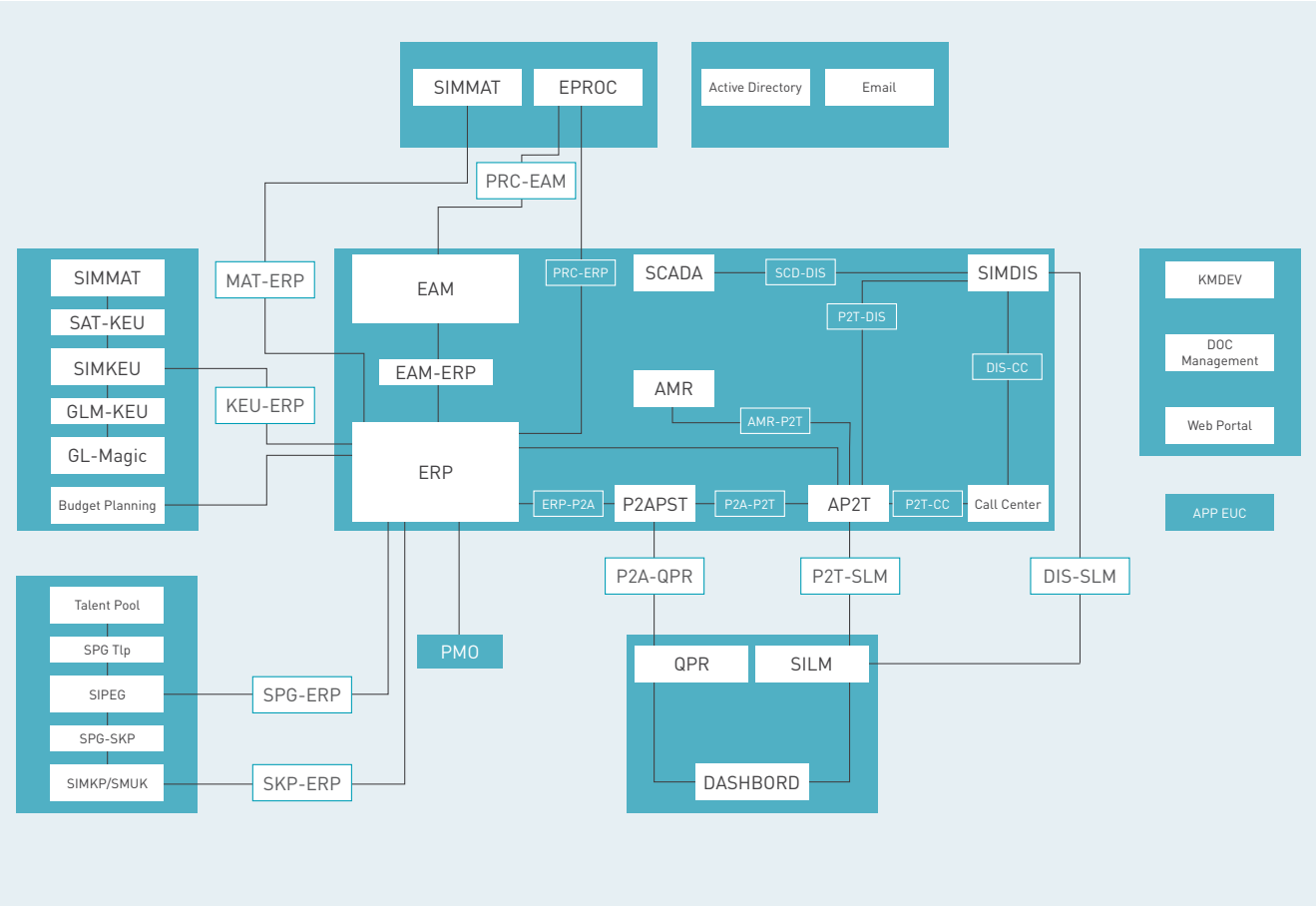

Strategi Pengembangan Teknologi Informasi PLN

PLN secara konsisten mengarahkan pengembangan sistem teknologi informasi PLN untuk mengubah penggunaan aplikasi-aplikasi yang bersifat lokal menuju teknologi informasi yang bersifat *shared services* guna mendorong efisiensi operasional. Proses tersebut disertai dengan standarisasi proses input maupun sistem operasi hingga akhirnya bermuara kepada *Business Shared Services*, dimana proses *sharing* tidak terbatas hanya pada aspek operasional teknologi informasi semata melainkan lebih jauh, hingga menjangkau level operasional bisnis sehari-hari. PLN telah menyusun dan mengaplikasikan *Information Technology Road Map* (ITRM) sebagai pedoman arah pengembangan teknologi informasi di PT PLN (Persero) menuju layanan teknologi informasi yang *Centralized, Integrated* dan *Standardize* dalam rangka mendukung terciptanya *IT Shared Services* dan *Business Shared Services* yang handal.

Layanan teknologi informasi terpusat *(centralized)* adalah bentuk layanan teknologi informasi dimana seluruh data dan informasi ditempatkan pada satu Pusat Layanan yang rencananya berada di PLN Kantor Pusat. Melalui pemusatan tersebut, maka penggabungan berbagai bentuk layanan berbasis teknologi informasi dapat berlangsung dengan lebih mudah dan murah, terlebih jika sistem input dan operasional yang digabungkan telah distandarisasikan, sehingga semua pengguna mempunyai preferensi yang sama pada setiap proses bisnis.

Strategi pengembangan teknologi informasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Sentralisasi informasi dan Desentralisasi proses, yaitu bahwa semua data dan informasi dari sistem yang dibangun akan dipusatkan pada sebuah *data center*, sedangkan penggunaan data dan informasi dapat di-*share* ke Unit PLN di seluruh Indonesia.
2. Standarisasi Proses Bisnis, berarti sistem yang dibangun secara korporat akan mendukung proses bisnis yang sama di seluruh Unit PLN.
3. Transparansi, yang berarti seluruh aktivitas terlihat nyata dan adanya tanggung gugat yang jelas pada peran manajemen, sehingga pihak yang memiliki otoritas adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan pengembangan.
4. Integrasi dan *Shared Services*, berfokus pada pengembangan proses bisnis untuk menekan biaya melalui pengembangan sistem terstandarisasi dan mampu memberikan layanan dengan kualitas terbaik.
5. *Security* dan *Disaster preparedness*, mampu menjamin dan menjaga keakuratan, integritas, keselamatan proses maupun sumber-sumber daya yang digunakan.

PLN Information Technology Development Strategy

PLN consistently directs its information technology system development to adjust the use of local applications into shared serviced technology in order to promote operational efficiency. The process is followed by the standardized input process as well as operation system and eventually reach the Business Shared Services, when sharing process will no longer limited to the operational aspect of information technology but further, to the daily business operational level. The Electricity Company has planned and implemented the Information Technology Road Map (ITRM) as the guidelines of information technology development in the company to achieve a Centralized, Integrated and Standardized information technology service, in order to encourage the establishment of reliable IT Shared Services and Business Shared Services.

The centralized information technology service is a form of information technology service in which the entire data and information are placed in one Service Center which will be located in the company's Headquarter. By means of the centralization, the incorporation of various kinds of information technology based-services could be conducted in more effective and efficient manner, especially when the incorporation of input and operational system has been standardized, to achieve a common user preference towards every business process.

The information technology development strategy is conducted based on these principles:

1. Centralized information and Process Decentralization, which means that every data and information of the built system will be centralized in a data center, while the usage of data and information could be shared to the Company's unit everywhere in Indonesia.
2. Business Process Standardization, which implies that the corporately built system will support the identical business process in every unit.
3. Transparency, which suggests the entire activity to be visible and answerable among the roles of management, so that the authorized party will ensure the success of the development.
4. Integration and Shared Services, focused on the business process development to suppress cost through standardized system development and able to provide optimal quality of service.
5. Security and Disaster Preparedness, to guard and guarantee the accuracy, integrity and safety of the process as well as the resources used.

6. *IT Governance,* pedoman untuk mewujudkan pola standarisasi kerangka pelaksanaan pengembangan, penerapan dan operasional teknologi informasi selaras dengan kebutuhan strategis perusahaan, pedoman untuk memantau dan mengevaluasi unjuk kerja Penyelenggara Teknologi Informasi dan pedoman untuk meningkatkan kapabilitas Perseroan dalam memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Perseroan.

Manfaat IT *Shared Services* dan *Business Shared Services*

Tujuan utama dari pengembangan *IT Shared Services dan Business Shared Services* adalah standarisasi layanan, peningkatan kualitas layanan yang terus menerus dan efektivitas biaya *(Cost Effective).*

Untuk hal tersebut, PLN telah menerapkan aplikasi *Finance Management* yaitu mekanisme pembayaran rekening listrik yang kini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja oleh pelanggan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh pengolahan informasi yang telah distandarisasi, sehingga dapat digunakan oleh unit bisnis secara terpusat.

Teknologi Informasi Bergerak ke Sisi Hulu

Teknologi informasi PLN diarahkan pengembangannya ke bidang distribusi, transmisi dan pembangkitan sesuai dengan bisnis PLN yang secara *realtime* melayani pelanggan.

Fungsi teknologi informasi tersebut adalah:
(i) Melihat keselarasan antara inisiatif teknologi informasi dengan proses bisnis,
(ii) Menentukan persyaratan teknologi yang melayani proses bisnis,
(iii) Memastikan adanya standarisasi proses bisnis dan sentralisasi informasi, serta
(iv) Memastikan adanya integrasi sistem yang baru dengan sistem korporasi yang telah ada untuk menjamin transparansi dan auditibiliti.

ITRM *(Information Technology Road Map)*, Program Pengembangan Teknologi Informasi PLN

Mengingat banyaknya manfaat penerapan teknologi informasi dalam mendukung operasional PLN dengan lingkup kegiatan yang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia dalam 24 jam, maka PLN menyusun dan merealisasikan program pengembangan teknologi informasi dalam beberapa tahap, yang secara keseluruhan membentuk suatu *roadmap* pengembangan teknologi informasi.

Tabel berikut dapat memberikan gambaran kegiatan investasi yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi PLN untuk rentang waktu 2013 sampai dengan 2017.

6. IT Governance, the guidelines to realize the standardized pattern of the development, application, and operational implementation framework of the information technology to align with the company's strategic needs, and as the guidelines to supervise and evaluate the work method of the Information Technology Coordinator and to improve the capability of the Company in providing contribution to the establishment of value, as well as to improve the effectivity and efficiency of the Company's operational activity.

The Benefit of It Shared Services and Business Shared Services

The main purpose of IT Shared services and Business Shared Services development are service standardization, continuous improvement of service quality and Cost Effectiveness.

For the purpose, PLN has implemented the application of Finance Management, which is an account payment mechanism that could be done anywhere and anytime in easier and faster manner. This is the result of standardized information processing, which could be accessed centrally by business units.

The Upstream Movement Of Information Technology

The Electricity Company's information technology development has been directed to distribution, transmission and achievement according to the the company's business which serve the customers in real time manner.
The functions of the information technology are:
(i) To observe harmony between information technology initiative and business process,
(ii) To determine the technological requirement which serve the business process,
(iii) To ensure the existence of standardized business process and information centralization, as well as
(iv) To ensure the existence of the new integrated system with the ongoing corporation system to guarantee transparency and audibility.

ITRM (Information Technology Road Map), The Information Technology Program of PLN

Recalling the massive amount of benefit in information technology application in supporting the company's operational activity within the scope that is taking place in every part of Indonesia in 24 hours, therefore the company has planned and conducted the information technology development in a few stages, which in its entirety will build a roadmap of information technology development.

The following table could offer a depiction of investment activity related to the development of information technology in the company within the time span of 2013 until 2017.

Roadmap ITRM – PLN

No	Kegiatan *Activity*	2013				
		TW1	TW2	TW3	TW4	
1	ERP Phase III (Sumatera-Sulawesi)					
	ERP Phase IV (Kalimantan IBT)					
2	EAM Pembangkit (Jawa - Bali Sumatera) EAM of Power Generation (Java Bali Sumatra)					
	EAM Pembangkit (IBT) EAM of Power Generation (IBT)					
	EAM Distribusi (Pilot Bali) EAM of Distribution (Pilot Bali)					
	EAM Distribusi (Jawa) EAM of Distribution (Java)					
	EAM Distribusi (Luar Jawa) EAM of Distribution (Outside Java)					
	EAM Transmisi EAM of Transmission					
3	Implementasi AMR Standard PLN (Pilot) PLN's AMR Standard (Pilot) Implementation					
	Implementasi AMR Standard PLN (Jawa - Bali) PLN's AMR Standard (Java - Bali) Implementation					
	Implementasi AMR Standard PLN (Luar Jawa - Bali) PLN's AMR Standard (Outside Java - Bali) Implementation					
	Implementasi AMR *Budget Planning* AMR Budget Planning Implementation					
4	*Contact Center* Jawa - Bali Contact Center Java - Bali					
	Contact Center Luar Jawa - Bali Contact Center Outside Java - Bali					
5	PMO Investasi PMO (Project Management Office) Investment					
6	Monitor, Evaluasi & Peningkatan Layanan Operasional Aplikasi Supervision, Evaluation and Improvement of Application Operational Service					
7	Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur TI: Jar. Kom. (FO) Jawa, Sumatera IT, Communication Network (FO) Infrastructure Development and Upgrading Java, Sumatra					
8	WAN PLN sampai level 3 (Rayon/Ranting) Sumatera-Sulawesi PLN WAN up to level 3 (Rayon/Ranting) Sumatra - Sulawesi					
9	Jar. Kom. (FO) Indonesia Timur Communication Network (FO) East Indonesia					
10	WAN PLN sampai level 3 (Rayon/Ranting) Kalimantan-IBT PLN WAN up to level 3 (Rayon/Ranting) Kalimantan-IBT					
11	Data Center Korporat Corporate Data Center					
12	*Corporate Disaster Recovery Center*					
	Disaster Recovery System ERP					
	Disaster Recovery System Centralized Management and Supervision of Revenue Flows (P2APST)					
	Disaster Recovery System - Proc					
	Disaster Recovery System Central Application of Management and Customer (AP2T)					
	Disaster Recovery System EAM Generation					
13	Standarisasi Pengelolaan Infrastruktur Infrastructure Management Standardization					
14	Peningkatan ketersediaan dan keandalan infrastruktur TI IT infrastructure availability and reliability improvement					
15	Kebijakan dan Tata Kelola TI: Asesmen awal tingkat kematangan Tata Kelola TI IT Governance and Policy: Initial Assessment of IT Governance maturity level					
16	Penerbitan *policy & procedure* Tata Kelola TI sesuai hasil asesmen awal IT Governance policy & procedure issuance in accordance with results of initial assessment					
17	Asesmen secara reguler tingkat kematangan Tata Kelola TI PLN Regular Assessment of PLN's IT Governance maturity level					
18	Penerbitan *policy & procedure* Tata Kelola TI sesuai hasil asesmen & Audit IT Governance policy & procedure issuance in accordance with assessment & Audit results					
19	Pencapaian Kematangan Tata Kelola TI PLN minimal pada level 3 PLN's IT Governance Maturity Reaching minimum level 3					
20	*Monitoring and Compliance*					
21	Organisasi TI: Pembentukan Organisasi SSO IT Organization: Establishing SSO Organization					
22	Pengoperasian SSU Operating SSU					

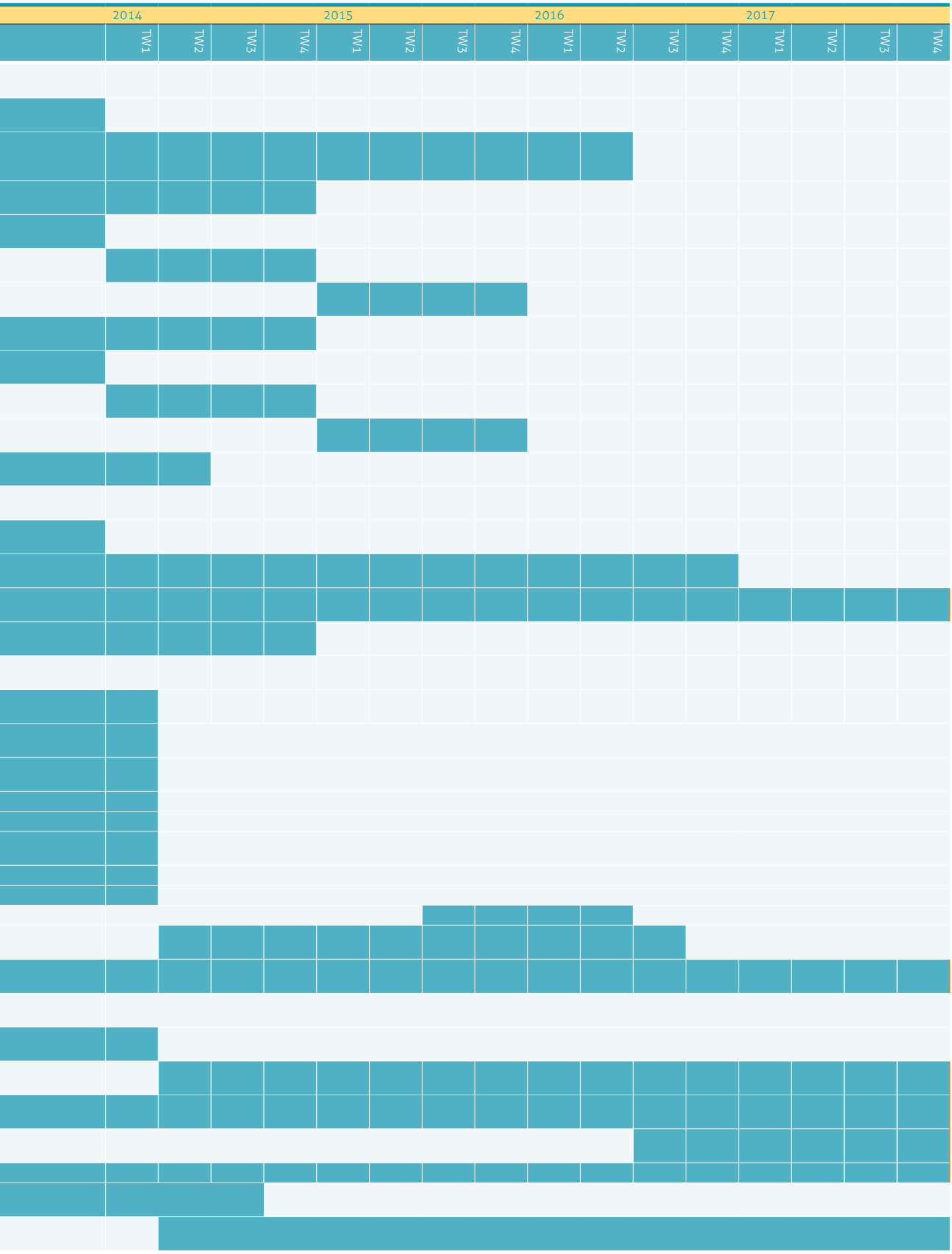
2014
2015
2016
2017
TW1
TW2
TW3
TW4
TW1
TW2
TW3
TW4
TW1
TW2
TW3
TW4
TW1
TW2
TW3
TW4

Realisasi Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2014

Proyek strategis yang menjadi fokus utama pada tahun 2014 adalah implementasi ERP untuk Unit-Unit Jasa Pendukung dan Proyek, Implementasi EAM untuk unit Distribusi dan Transmisi, *Upgrade System* ERP, Implementasi Sistem Perencanaan dan Pengendalian Anggaran serta pengembangan P2APST ke dalam Sistem Transaksi Energi.

Adapun rencana strategis lainnya adalah memperbarui IT *Master Plan* yang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi maupun kebijakan-kebijakan baru sebagai dampak dinamika perkembangan perusahaan. Terkait dengan Tata Kelola TI, disusun metode pengukuran unjuk kerja Sistem TI untuk mengukur unjuk kerja sistem yang dikelola Divisi Sistem Informasi.

Adapun berbagai aplikasi yang berhasil dikembangkan dan diaplikasikan hingga akhir tahun 2014, adalah:

1. ERP - ERP - *Upgrade* SAP *Enterprise Core Component* (ECC) dari Versi 5 ke Versi 6
   - ECC Versi 5 *existing* yang digunakan PLN saat ini sudah *end of support*, maka untuk menjamin dan menjaga kontinuitas layanan perlu segera di-*upgrade* ke Versi 6.
   - ECC Versi 6 memiliki fitur-fitur baru yang belum tersedia di versi sebelumnya, dan diperlukan untuk merubah proses bisnis eksisting menjadi berbasis IT.
   - Perkembangan teknologi di sisi pengguna yang demikian cepat sudah dapat didukung oleh ECC Versi 6.

   Data center PLN yang baru telah beroperasi dengan baik, dan implementasi *upgrade hardware* ERP juga berlangsung dengan baik, serta telah diselesaikan pada awal tahun 2013.
2. *Review IT Master Plan*
   - ITMP merupakan acuan bagi pengembangan IT di lingkungan PLN. ITMP eksisting tahun 2004 perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kebijakan dan regulasi.
   - Menjaga keselarasan antara bisnis dan IT untuk mendapatkan efisiensi dan keuntungan maksimal
3. Implementasi ERP *(Enterprise Resource Planning) Phase V*
   - Setelah kerberhasilan Implementasi ERP di Unit-unit Pengusahaan (*Phase* I- IV), program implementasi ERP dilanjutkan ke Unit-Unit Jasa Pendukung dan Proyek (*phase* V).
   - Target utama dalam Implementasi ERP pada tahun ini adalah keberhasilan mengeluarkan laporan keuangan PLN melalui ERP.
   - Dalam pelaksanaannya, proses Implementasi didukung menjadi 2 (dua) tim (mandiri dan konsultan).
   - Implementasi *Phase* V (mandiri): *Kick Off* dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2014 bertepatan dengan Rapat Koordinasi PT PLN.
   - Implementasi dibagi dalam 2 tahap (deploy) yaitu: *Go Live* pertama telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2014 dan *Go Live* kedua tanggal 1 Oktober 2014.

Establishment of Information Technology Development of Year 2014

Strategic project which is the main focus of 2014 is the implementation of ERP for Project and Support Service Units, EAM Implementation for Transmission and Distribution Units, ERP System Upgrade, Planning System Implementation and Budget Control as well as improvement of P2APST to Energy Transaction System.

While other strategic plans are to renew the IT Master Plan which needs to be adjusted to the growth of technology, change of regulation and new policies as the impact of the company's dynamic expansion. In relation to IT Governance, a working method measurement for the IT System has been prepared to measure the system which is managed by the Information System Division.

Other applications that were developed and applied successfully to the end of 2014 are:

1. ERP – ERP – SAP Enterprise Core Component (ECC) Upgrade from Version 5 to Version 6
   - Version 5 existing ECC which are being used by the company has reached the end of support, therefore to ensure and maintain the continuity of service, it needs to be upgraded to Version 6.
   - Version 6 ECC has the new features which were not found in the previous version, and required to revamp the existing business process to become IT-based.
   - The rapid technology development on the user side can be supported by the Version 6 ECC.

   The company's data center has been operating well, and the ERP hardware upgrade implementation process went exceptional and was finished in early 2013.
2. IT Master Plan Review
   - ITMP has become the guideline for IT development in scope of the company. The existing ITMP of year 2004 requires adjustment with the technology development, policy and regulation.
   - Maintaining harmony between business and IT to achieve efficiency and maximum revenue.
3. ERP (Enterprise Resource Planning) Phase V
   - After the success of ERP Implementation within Development Units (Phase I-IV), ERP implementation program is continued to the Project and Support Service Units (Phase V).
   - The main target of this year's ERP Implementation is the release of the company's financial report through ERP.
   - In its execution, the Implementation process is divided into 2 (two) teams (independent and consultant).
   - Phase V Implementation (independent): the Kick Off took place in January 23, 2014 and coincided with the company's Coordination Meeting.
   - The implementation is divided into 2 deployment stages: the first Go Live was conducted on June 1, 2014 and the second Go Live took place on October 1, 2014.

Proyek strategis yang menjadi fokus utama pada tahun 2014 adalah implementasi ERP untuk Unit-Unit Jasa Pendukung dan Proyek, Implementasi EAM untuk unit Distribusi dan Transmisi, Upgrade System ERP, Implementasi Sistem Perencanaan dan Pengendalian Anggaran serta pengembangan P2PT ke dalam Sistem Transaksi Energi.

Strategic project which is the main focus of 2014 is the implementation of ERP for Project and Support Service Units, EAM Implementation for Transmission and Distribution Units, ERP System Upgrade, Planning System Implementation and Budget Control as well as improvement of P2APST to Energy Transaction System.

- Saat ini Unit-unit pada go-live ke 2 sedang dalam masa pendampingan oleh *support*.
- Sementara untuk proses implementasi yang dilakukan oleh konsultan, sudah berjalan dan sampai pada tahap *Data Cleansing Guideline*.

4. Metodologi Pengukuran Unjuk Kerja Sistem TI
   Menetapkan dan implementasi pengukuran, pencatatan dan pelaporan unjuk kerja sistem TI.
5. SIP2A
   - Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran (SIP2A).
   - Manfaat: Sistem Anggaran dan Akuntansi Konsolidasi yang terintegrasi dengan proses *planning, budgeting, controlling* dan *reporting* serta konsolidasi laporan keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien secara terpusat.
   - Implementasi terbagi dalam 2 *deploy*:
     – *Financial Report Actual Consolidation* direncanakan *Go Live* pada bulan November 2014.
     – *Planning and Budgeting*, direncanakan akan *Go Live* pada bulan Februari 2015.
   - Saat ini kegiatan *End User Training* telah selesai dilaksanakan.
6. P2APST (Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat).
   Sistem P2APST mengembangkan sistem transaksi energi dan susut terpusat antar unit dan fungsi dengan pola *Push* data.
7. EAM Distribusi
   - Implementasi Sistem *Distribution Enterprise Asset Management* (EAM Distribusi) di Unit Pilot Proyek PLN DISBALI.
   - Manfaat: Sistem manajemen jaringan dan *asset* distribusi yang terkonsolidasi terpusat, berupa sistem manajemen *asset* tetap yang terintegrasi, terjamin secara *best practices* dan struktur *Fixed Asset Registered* (FAR), serta mengikuti Standard Internasional.

- The units participated on the second Go Live is in mentoring period by the support team.
- As for the implementation process conducted by the consultants, has been going and has reached the stage of Data Cleansing Guideline.

4. Working Methodology of IT System
   Establishment and measurement, record and report implementation of IT system work method.
5. SIP2A
   - Implementation of Information Planning System and Budget Control (SIP2A).
   - Benefit: Integrated Budget System and Consolidated Accounting with planning, budgeting, controlling and reporting process as well as consolidated financial report to be able to work centrally in efficient and effective manner.
   - The Implementation is divided into 2 deployments:
     – Financial Report Actual Consolidation which is planned to Go Live on November 2014.
     – Planning and Budgeting, which is planned to Go Live on February 2015.
   - As of now, the End User Training activity has reached its completion.
6. P2APST (Management and Supervision of Centralized Revenue Stream).
   P2APST system develops energy transaction system and centralized shrinkage between units ans function by the Push Data pattern.
7. EAM Distribution
   - Enterprise Asset Management Distribution (EAM Distribution) System implementation within DISBALI Electricity Company Pilot Project Unit.
   - Benefit: Network management system and distribution asset which are centrally consolidated, in form of integrated fixed asset management system, guaranteed in best practices and Fixed Asset Registered (FAR) structure, and follows the International Standard.

ERP & P2APST - Operasi Berbasis Teknologi Informasi Untuk Memastikan Peningkatan Level Kinerja PLN

ERP& P2APST – Information Technology-based Operation to Ensure the Company's Performance Level Improvement

PLN bertekad untuk segera dapat menerapkan *sistem enterprise resources planning* (ERP) di setiap unit bisnis. ERP dapat memberikan beragam manfaat, meliputi:

1. Proses Bisnis terintegrasi dan standar
2. Akuntabilitas menjadi lebih baik
3. Proses bisnis lebih terkontrol
4. Akses informasi lebih cepat dan akurat
5. Pengambilan keputusan menjadi lebih baik.

Namun demikian ERP akan memberikan manfaat yang maksimal bila seluruh unit sudah terintegrasi. Rollout untuk unit-unit di Pengusahaan sudah berjalan dan telah melaksanakan *go live* pada tanggal 1 November 2013. Saat ini tengah merealisasikan implementasi ERP untuk unit-unit Jasa penunjang dan Proyek (Pusdiklat, Jaser, Litbang, Pusenlis, Pusharlis, JMK, UPJB, pembangkitan Tanjung Jati dan 14 UIP).

Selain ERP, PLN telah menerapkan dan berupaya meningkatkan kualitas penerapan program aplikasi P2APST di seluruh lini. P2APST memiliki beragam manfaat, meliputi:

1. Risiko pengelolaan kas pendapatan menjadi minimum.
2. Penyederhanaan bisnis proses.
3. Sentralisasi pengelolaan penagihan.
4. Efisiensi biaya.
5. Pembayaran rekening listrik dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan cara apa saja.

Sistem yang tersentralisasi membuat aplikasi layanan ini menjadi tumpuan semua proses pembayaran rekening listrik dan pembelian *stroom* prabayar, maka dibutuhkan *backup* sistem ditempat lain (DRC) yang saat ini telah selesai.

Penyelesaian dan *roll-out* kedua program aplikasi tersebut dan kelak dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi sistem berbasis teknologi informasi terkini lain yang tengah dikembangkan diyakini akan membuat kinerja PLN bergerak pasti menuju level korporasi sejenis kelas dunia.

The Electricity Company intends to immediately apply the Enterprise Resources Planning (ERP) in every business unit. ERP could deliver various values, such as:

1. *Standardized and integrated Business Process*
2. *Better Accountability*
3. *More control on business process*
4. *Faster and more accurate access of information*
5. *Better decision making*

However, ERP will give a maximum benefit when every unit has been integrated. Rollout for units in Development units has been operating and has conducted Go Live on November 1, 2013. The implementation for the Project and Support Service Units (education and training center, Jaser, R&D, Electricity and Energy Center, Electricity Cunductory Center, JMK, UPJB, Tanjung Jati Power Plant and 14 Construction Unit).

Beside ERP, the Electricity Company has applied and sought means to improve the program application implementation quality P2APST within every line. P2APST has a lot of benefit, which include:

1. *Minimum risk of cash income management.*
2. *Simplified business process.*
3. *Centralized billing management.*
4. *Cost efficiency.*
5. *Electricity account payment could be done anywhere, anytime and anyhow.*

Centralized system has constructed this application service to be the foundation of all electricity account payment process both postpaid and prepaid token purchase, therefore a separate backup system (DRC) is required and currently is complete.

Completion and second roll-out of the application program will be supported by other latest information technology-based system applications which are refined and believed to support the company's work performance to progress into a world-class level corporation.

Kerja Sama dengan Berbagai Pihak
Collaboration with Other Parties

Menjalin dan membina kerjasama yang saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan berbagai pihak berkompeten dibidangnya untuk memastikan peningkatan level kinerja dimasa mendatang.

Establishing and fostering mutually beneficial cooperation in the long term with a variety of parties is competent in their field to ensure the increasing levels of future performance.

Dalam rangka memastikan keberhasilan seluruh program penyediaan listrik, sekaligus untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan harapan para pelanggan, PLN dan Anak Perusahaan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari kalangan BUMN, Perusahaan Swasta Nasional, maupun Perusahaan dari luar negeri. Realisasi kerjasama tersebut meliputi hal-hal spesifik yang merupakan kompetensi khusus dari para pihak, dan didasarkan pada pendekatan bisnis yang saling memberi manfaat dalam jangka panjang. Adapun penjelasan ringkas dari kerjasama yang dilakukan PLN dengan berbagai pihak pada tahun pelaporan adalah sebagai berikut.

Kerjasama dengan BUMN

Kerjasama dengan sesama BUMN baik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), Unit PLN dan Anak Perusahaan terus dilanjutkan dan ditingkatkan, meliputi:

1. Bidang pelayanan melalui *call center* 123 dengan PT Telkom. Sedang dikembangkan kerjasama dalam bidang telekomunikasi baik dengan PT Telkom maupun PT INDOSAT melalui jaringan listrik dan fiber optik PLN;
2. Pembelian tenaga listrik dengan Perum Otorita Jatiluhur (PLTA Jatiluhur) dan PT Pusri;
3. Pemenuhan seluruh kebutuhan bahan bakar dengan PERTAMINA dan pemenuhan sebagian kebutuhan gas dengan PT PGN;
4. Pemenuhan kebutuhan batu bara dengan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam;
5. Pemanfaatan dan pengusahaan aset PLN seperti dermaga (PLTU Gresik dan PLTU Grati), *right of way* di PLN UB Sulselra, UBD Jatim dengan PT Telkom dan Indovision;
6. Pendampingan Pengelolaan Sistem Kelistrikan di Bandara Udara Soekarno Hatta dengan PT Angkasa Pura II (Persero);
7. Pelayanan pasokan listrik ke kawasan pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo II;
8. Alokasi pekerjaan pengangkutan batubara kepada PT Djakarta Lloyd (Persero);
9. PLN dan Pelindo II sepakat membentuk perusahaan patungan. Bentuk perusahaan patungan ini telah disepakati dalam *term sheet* Rencana Pembentukan Perusahaan Patungan (JVCO) Penyediaan Tenaga Listrik.
10. PLN bekerjasama dengan PTPN III, IV dan V untuk penyediaan bahan bakar nabati dalam upaya konversi bahan bakar fosil ke bahan bakar nabati sebanyak 300 juta KL per tahun.
11. PLN menandatangani nota kesepahaman pemanfaatan jasa rehabilitasi/rekondisi/ pemeliharaan peralatan instalasi ketenagalistrikan dan penyediaan peralatan teknis dengan PT PINDAD

Kerjasama dengan Mitra Usaha Lain

Kerjasama dengan mitra usaha non BUMN baik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), Unit PLN dan Anak Perusahaan tidak terbatas pada bidang kelistrikan saja, namun meliputi juga kerjasama penyediaan barang dan jasa bagi kelancaran operasional Perseroan, meliputi:

1. Pelatihan, pengembangan SDM dan rekrutmen pegawai dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti ITB, ITS, UI, UGM;
2. Studi kelayakan dengan konsep *shared service centre* (SSC) oleh PT ICON+.

PLN and its subsidiaries set up partnership with various parties including State-owned Enterprises (SOEs), national private companies, and foreign companies to support electricity supply to consumers while providing excellent services. The cooperation involves specific matters of the respective party's competencies. Thorough the cooperation, PLN set its business based on long-term mutual benefit business approaches. An overview of the cooperation between PLN and parties with similar interests is as follows.

Cooperation with State Owned Enterprises (SOEs)

The cooperation with other SOEs undertaken by PT PLN (Persero) and PLN subsidiaries continues to proceed and improve. This cooperation include:

1. Service sector through call center 123 with PT Telkom. A cooperation in telecommunication sector via PT Telkom and PT Indosat through the PLN electricity network and fiber optics is underway;
2. Purchasing electric power from Perum Otorita Jatiluhur (PLTA Jatiluhur) and PT Pusri;
3. Fulfilling all fuel needs with PERTAMINA and partial gas needs with PT PGN;
4. Assisting coal operations with PT Tambang Batu Bara Bukit Asam;
5. Application and utilization of PLN's assets including piers (PLTU Gresik and PLTU Grati) and the right of way (pad way) owned by PLN UB Sulselra, UBD Jatim with PT Telkom and Indovision;
6. Coaching of the electric system management at Soekarno-Hatta International Airports cooperatve with PT Angkasa Pura II (Persero);
7. Supply electric power to the Port areas developed by Pelindo II;
8. Allocating coal transportation (sea transportation) partly to PT Djakarta Lloyd;
9. PLN and Pelindo II agreed to establish a joint venture. The type of this joint venture has been agreed in the Joint Venture Establishment Plan (JVCO) term sheet of electric power supply.
10. PLN and PTPN III, IV, and V cooperate for supply of biofuel in the effort to convert from fossil fuel to biofuel as much as 300million KL per year.
11. PLN signed memorandum of understanding for the rehabilitation/recondition/maintenance services for electricity installation and supply of technical tools with PT PINDAD.

Cooperation with Other Business Partners

PT PLN and PLN subsidiaries cooperated with non-SOEs on specific business services in electricity, including cooperation on the product and service procurement to facilitate the Company's operation. The cooperation include:

1. Training, human resources development, and employee recruitment through educational institutions such as Bandung Institute of Technology (ITB), Surabaya Institute of Technology (ITS), University of Indonesia (UI), and Gadjah Mada University (UGM);
2. Feasibility study adopting shared service center between PT ICON+.

3. Kerjasama proyek konversi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar nabati (BBN) antara PT PLN (Persero) dengan PT Wilmar Nabati sebagai pemasok bahan bakar nabati.
4. Pembelian tenaga listrik berupa excess power maupun memikul/memenuhi pertumbuhan kebutuhan sesuai dengan kontrak jual-beli antara lain : PT RPE dan PT INALUM di Sumatera; PT Kalimantan Prima Coal, PT Aji Ubaya di Kalimantan; PT INCO di Sulawesi
5. Pembayaran rekening listrik di *payment point* untuk meningkatkan pelayanan dengan Bank Swasta, Bank Pemerintah dan KUD;
6. Suplai gas dengan PT Emerada Hess, PT Kodeco dan PT Madya Karya Sentosa;
7. Pelaksanaan *operation maintenance* dengan PT Siemens Indonesia di PLTG Muara Tawar
8. Penelitian dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta, antara lain: Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, Balitbang Depkes, BATAN, BPPT, LIPI, Puslitbang Geologi dan LAPAN;
9. Penyaluran tenaga listrik untuk:
   - Pelanggan yang berada di kawasan Suryacipta City of Industri SCI dengan PT Surya Cipta Swadaya,
   - Pabrik PT Semen Dwima Agung di Tuban,
   - Pabrik PT Mitsubishi Chemical Indonesia di Pulo Merak Banten,
   - Pabrik PT Gorda Prima Steelworks di kawasan Industru Pancatama Cikande,
   - Pabrik PT Semen Gresik Padang,
   - Pabrik PT Chandra Asri di Cilegon.
10. Kerjasama dengan *Transparency International Indonesia* (TII) yaitu jaringan organisasi global anti korupsi. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan, bahwa PLN dalam menjalankan usahanya sungguh-sungguh menerapkan praktik GCG dan anti korupsi.
11. Kerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak tentang pengoptimalan penerimaan pajak di sisi konsumen listrik.
12. Kerjasama pembelian komponen *Switchgear* dengan PT CPSI

Kerjasama Luar Negeri

PLN juga menjalin kerjasama jangka panjang dengan berbagai pihak dari luar negeri, yang meliputi berbagai bidang, termasuk dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan usaha penyaluran tenaga listrik.

Kerjasama dengan pihak luar negeri baik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), Unit PLN dan Anak Perusahaan, meliputi:

1. HAPUA (*Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities*), pertemuan dilakukan setiap tahun diantara negara anggota ASEAN secara *alphabetis*.
   Kerjasama tersebut meliputi 8 proyek, yaitu: *Generation, Transmission, Distribution, Renewable Energy and Environment, ESI Services, Resource Development, Power Reliability and Quality* dan *Human Resource*. Kegiatan

3. Cooperation in the method of conversion from fossil fuel into biofuel with PT PLN and PT Wilmar Abati as supplier of biofuel.
4. Purchase excess of electric power as well as fulfilling contractual purchase-sales agreements with, among others: PT RPE and PT INALUM in Sumatera; PT Kalimantan Prima Coal, PT Aji Ubaya in Kalimantan; PT INCO in Sulawesi.
5. Formating Electricity payment services' accounts, connected online with private and government banks and villagers' cooperation body (KUD);
6. Cooperation with PT Emerada Hess, PT Kodeco, and PT Madya Karya Sentosa, in Gas supply
7. Implementation of operation maintenance with PT Siemens Indonesia in PLTG Muara Tawar;
8. Doing Research together with government and private institutions in electricity development such as: Bank Indonesia, Central Bureau of Statistics, Research and Development Agency of the Ministry of Health, National Nuclear Energy Agency (BATAN), Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT), Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Research and Development Center for Geology, and National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN);
9. Provision of electric power supply to:
   - Customers located in Suryacipta City of Industryi (SCI) with PT Surya Cipta Swadaya,
   - Cement plant of PT Semen Dwima Agung in Tuban,
   - PT Mitsubishi Chemical Indonesia factory in Pulo Merak, Banten,
   - PT Gorda Prima Steelworks factory in Pancatama Cikande Industrial estate,
   - PT Semen Gresik Padang factory,
   - PT Chandra Asri factory in Cilegon.
10. Cooperation with Transparency International Indonesia (TII), a global network of anti-corruptions organization. This partnership aims at ensuring PLN to seriously put in place the GCG and anti-corruption principles.
11. Cooperation with Directorate General of Taxation in regard to optimization of tax revenue from the side of electricity customers.
12. Cooperation for purchase of Switchgear component with PT CPSI

Foreign Cooperation

PLN also undertakes long-term cooperation with foreign parties. The fields of the cooperation varies, including exchange of scientific knowledge and sharing experience in in the business of electricity supply.

The partnerships between foreign interest parties and PT PLN, PLN Unit, and PLN's subsidiaries include:

1. HAPUA (Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities) held annually gathering among the members of ASEAN rotating in alphabetical order.
   The partnership incorporates eight project areas, including Generation, Transmission, Distribution, Renewable Energy and Environment, ESI Services, Resource Development, Power

tersebut dilaporkan ke SOME/AMEM (*Senior Official on Energy/ASEAN Ministers on Energy Meeting*) yang diadakan setiap tahun.

2. AESIEAP (*The Association of Electricity Supply Industry East Asia and the Western Pacific*) yang beranggotakan 19 Negara Asia Timur dan Pasifik bagian barat, dengan 4 *Technical Sub Commitee* yaitu: *Deregulation, Privatization and Competition (DPC), Power Quality (PC), Performance Benchmarking(PB)* dan *Customer Relations Management (CRM)*.
3. PLN dipercaya sebagai sebagai ketua ASEAN *Power Grid Consultative Committee* dan tergabung dalam IERE (*International Electric Research Exchange*).
4. Kerjasama antara PT PLN (Persero) dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) Malaysia dalam rangka interkoneksi Sumatera-Peninsular (Malaysia).
5. Kerjasama antara PT PLN (Persero) dengan Serawak *Electricity Suply Company* (SESCO) dalam rangka interkoneksi Kalimantan-Serawak.
6. Perusahaan multinasional secara *job order* yang bersifat tidak mengikat, antara lain: *Sulzer Hydro* untuk perbaikan PLTA, Yokogawa untuk perbaikan sistem control industri, *Sulzer Pump* untuk perbaikan pompa, Vatech-Elin untuk pembuatan sistem kontrol PLTA, Entec/GTZ untuk pembuatan PLTMH, Hickam Industries untuk perbaikan PLTG, Thomassen untuk perbaikan PLTG, *Quality Assurance Services* untuk sertifikasi ISO, *Cast Iron Welding* Ltd. untuk pengelasan *cast iron*, Global Crankshaft Services Ltd. untuk *regrinding crankshaft* dan *Suzler Metco* untuk*metal coating*.
7. *Project Prepatory Technical Assistance For Geothermal Energy Development Plant* antara BAPPENAS, PLN, PERTAMINA dan ADB.
8. Indramayu *Coal Fired Power Plant Project* antara JICA dengan PT PLN (Persero), BAPPENAS, Kementerian Sumber Daya Mineral dan Energi.
9. Kerjasama dengan *Ministry of Electric Power Myanmar* dalam hal penanganan susut jaringan dan efisiensi energi.
10. Kerjasama dengan *The Export-Import Bank Korea* dalam hal dukungan finansial untuk proyek-proyek PLN.
11. Kerjasama di bidang kelistrikan dengan Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB). Penandatanganan MoU ini membuka kemungkinan kerjasama segala bidang untuk keuntungan kedua belah pihak, termasuk kemungkinan interkoneksi Kalimantan Utara dengan Sabah.

Reliability and Quality and Human Resources. These activities are reported to SOME/AMEM (Senior Official on Energy/ASEAN Ministers on Energy Meeting) which is also held annually.

2. AESIEAP group (The Association of Electricity Supply Industry East Asia and the Western Pacific) which is a joined cooperation and participation between 19 East Asia and Western Pacific states, along with four Technical Sub Committees, namely Deregulation, Privatization and Competition (DPC), Power Quality (PC), Performance Benchmarking (PB) and Customer Relations Management (CRM).
3. PLN has been entrusted as the head of the ASEAN Power Grid Consultative Committee which is joined with IERE (International Electric Research Exchange);
4. There is also cooperation agreement between PT PLN and The Malaysia's Tenaga Nasional Berhad (TNB) under the framework of interconnection between Sumatra and Malaysia Peninsular;
5. PT PLN (Persero) is also working together with Serawak Electricity Supply Company (SESCO) under the framework of interconnection between Kalimantan and Serawak;
6. Conducting Non-binding job orders with multinational companies of, among others: Sulzer Hydro for hydro power generator repairs, Yokogawa for internal automation and control business, Sulzer Hydro to assist PLTA, Yokogawa for enhancing the industry control system, Sulzer Pump for pump technology, Vatech- Elin for improving the PLTA control system, Entec/GTZ for implementing PLTMH, Hickam Industries for improvements activities at PLTG, Thomassen for improvements activities at PLTG, Quality Assurance Services for ISO certification, Cast Iron Welding Ltd. for the cast iron welding, Global Crankshaft Services Ltd. for regrinding crankshaft and Suzler Metco for metal coating;
7. Project Preparatory Technical Assistance among BAPPENAS, PLN, PERTAMINA and ADB;
8. The JICA in cooperation with PT PLN (Persero), BAPPENAS, Ministry of Energy and Mineral Resources for the Indramayu Coal Fired Power Plant project;
9. Cooperation with the Ministry of Electric Power of Myanmar in terms of network losses treatment and energy efficiency;
10. Cooperation with The Export-Import Bank of Korea under the framework of financial support for PLN projects.
11. Cooperation with Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB). The MoU open the opportunity for cooperation in all field for the benefit of both parties, including the opportunity to interconnect North Kalimantan with Sabah.

Peluang Kerjasama Sewa Transmisi
Cooperation Opportunities of Transmission Lease

Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pasal 4 PP menyebutkan bahwa usaha transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.

Ketentuan tersebut membuka peluang bagi PLN untuk mengembangkan usaha dari pemanfaatan bersama jaringan transmisi yang saat ini dimiliki dan dikelola, melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi. Dalam rangka membuka peluang tersebut, PLN berkepentingan untuk segera menyusun mekanisme pemanfaatan jaringan transmisi dan formulasi sewa jaringan yang memberi manfaat bagi semua pihak.

Untuk itu pada tahun 2014 PLN menyelenggarakan Forum Group Diskusi (FGD) bersama konsorsium perguruan tinggi se-Jawa Bali, bertema "Peluang Kerja sama Pemanfaatan Jaringan Transmisi". Pada forum tersebut dibahas bermacam aspek teknis teknis pemanfaatan bersama jaringan transmisi dari perspektif sistem panyaluran, dampak ekonomi, dampak terhadap jadwal perawatan pembangkit, pengaturan beban, kontinuitas pasokan daya termasuk antisipasi aturan yang diperlukan.

Beragam masukan dalam FGD tersebut diharapkan bermuara pada keluarnya kesepakatan dan pengertian bersama akan manfaat optimal yang dapat diraih PLN termasuk para pemangku kepentingan, dari pemanfaatan bersama jaringan transmisi yang telah ada. Pemanfaatan bersama akan dapat menekan besaran nilai investasi dari penyaluran daya dari pembangkit di daerah yang surplus ke daerah lain yang kurang. Dengan demikian pasokan daya menjadi lebih terjamin, dilain pihak, PLN akan memperoleh tambahan sumber pendapatan.

Government Regulation no. 14 of 2012 on Business Activities of Electricity Supply, Article 4 states that the business transmission for electric power must give the utilization of transmission network opportunities for public interest.

This provision is an opportunity for PLN to develop a joint venture of the utilization of the transmission network which is currently owned and managed, through a network lease between the authorized business licence of supply electricity which conduct transmission business with party that will take advantage of the transmission network. In the context of these opportunities, PLN concerned to immediately establish a mechanism of transmission network utilization and network lease formulations that benefits for all parties.

Because of that, in 2014 PLN held a Forum Group Discussion (FGD) with a consortium of universities in Java and Bali, with a theme "Cooperation Opportunities for Transmission Network Utilization". At the forum, it was discussed various technical aspects suc as technical utilization of shared transmission network from the perspective distribution system, the economic impact, the impact on plant maintenance schedule, load regulation, continuity of power supply including necessary anticipation rules.

Various input in FGD is expected lead to the release of the agreement and shared understanding of the optimal benefits that can be achieved PLN including stakeholders, from the joint utilization of existing transmission network. The joint utilization will be able to suppress the amount of the investment value of the power plants distribution in areas of surplus to other remote areas. Thus, the power supply becomes more assured, on the other hand, PLN will obtain additional sources of revenue.

Kerjasama Menuju *World Class Player*

Collaboration to be the World Class Player

Rahasia keberhasilan transformasi proses bisnis adalah optimalisasi information technology (IT). Penggunaan IT dalam proses bisnis PLN memiliki efek luar biasa tidak sebatas mempersingkat proses bisnis, meningkatkan akuntabilitas, dan transparansi, tetapi mampu mencakup bagian terdepan PLN secara keseluruhan, yang pelan- pelan masuk ke setiap area di mana transaksi itu terjadi, demikian dikatakan Direktur (Keuangan) Setio Anggoro Dewo.

Dalam rangka memastikan peningkatan level kinerja menjadi perusahaan kelas dunia, PLN menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri, meresmikan *Go Live* Perdana *Trade Finance Online* (TFO) melalui Mandiri Global Trade bagi seluruh unit PLN, termasuk Anak Perusahaan.

Realisasi TFO merupakan salah satu bentuk kelanjutan dari program proses transformasi bisnis PLN di bidang keuangan menuju perusahaan modern, menyusul penerapan program aplikasi berbasis TI lainnya seperti: implementasi ERP, P2APST, imprest terpusat, PPFA, *Petty Cash Card*, dan *e-Tax Payment.*

Program TFO merupakan layanan *online* dan *real time* berbasis web melalui sistem aplikasi Mandiri Global Trade. Dengan program ini, PLN dapat menjalankan aktivitas transaksional meliputi Letter of Credit (LC), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Bank Garansi (BG), *Standby Letter of Credit* (SBLC).

Tujuan penerapan TFO adalah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan melakukan transaksi *trade finance* kepada PLN melalui teknologi informasi. Transaksi dilakukan melalui layanan *online*, kemudahan akses di mana saja dan kapan saja, pengiriman dokumen secara elektronik dengan metode *upload, monitoring* dapat dilakukan akurat dan *real time*, otomatisasi pelaporan transaksi secara elektronik, konfirmasi bank garansi yang diterima PLN secara *online* sekaligus efektivitas dan efisiensi kerja.

Penerapan TFO diyakini akan semakin mendekatkan PLN sebagai salah satu korporasi penyedia tenaga listrik terbesar yang beroperasi dengan standar dunia.

The secret of business process transformation success is the optimization of information technology (IT). The usage of IT in PLN's business process has a remarkable effect which is not limited to streamline business processes, improve accountability, and transparency, but also able to cover the whole front part of PLN, which is slowly entering into each area which the transaction took place, said the Director (Finance) Setio Anggoro Dewo.

In order to ensure the elevation levels of performance into a world-class company, PLN cooperates with the Mandiri Bank, inaugurated first Go Live Trade Finance Online (TFO) through Mandiri Global Trade for the entire unit of PLN, including its subsidiaries.

Realization of TFO is one of continuation form in PLN's business transformation processes program in finance sector towards a modern enterprise, following the implementation of IT-based application program such as: ERP implementation, P2APST, centralized imprest, PPFA, Petty Cash Card, and E-Tax Payment.

TFO program is online service and web-based real time through Mandiri Global Trade application system. With this program, PLN can run transactional activities include the Letter of Credit (LC), Letter of Credit Home Affairs (SKBDN), Bank Guarantee (BG), Standby Letter of Credit (SBLC).

The purpose of TFO application is to provide easiness and convenience in doing finance trade transactions to PLN through information technology. Transactions conducted through online services, easy access anywhere and anytime, shipping documents electronically with the upload method, the monitoring can be performed accurately and in real time, automatization of electronic transaction reporting, bank guarantees received PLN's confirmation online once the effectiveness and efficiency of work.

Implementation of TFO is believed to make PLN closer as one of the biggest corporate power producers with world standards.

Kerjasama dengan BPKP
Collaboration with BPKP

Selain kerjasama dengan institusi bisnis dalam rangka menjalin jaringan kerja untuk mendapatkan dukungan bagi realisasi program pengembangan usaha, PLN juga menggalang kerja sama dengan institusi dan lembaga yang aktif terlibat dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan tindak kejahatan korupsi, sebagai wujud komitmen tinggi Perseroan dalam menciptakan PLN Bersih, Bebas Korupsi.

In addition to cooperate with business institutions in creating networks to gain support for the realization of business development programs, PLN also works together with institutions and active organizations involved in the prevention and reduction of corruption, as a manifestation of the Company's commitment in creating PLN Bersih, Corruption free.

Salah satu bentuk kerja sama dalam rangka pencegahan tindak kejahatan tersebut adalah dimulainya kerjasama PLN dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kerjasama tersebut dimulai dengan penanda tangan MOU antara kedua belah pihak. Adapun tujuan kerjasama adalah meningkatkan kualitas penerapan GCG di PLN dengan dukungan keahlian BPKP dalam menjalankan pengawasan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Badan Usaha Milik Pemerintah.

One of the cooperation in order to prevent these crimes is starting with PLN's cooperation with the Financial Supervisory Agency (BPKP). The cooperation started with the signatories of the MOU between two sides. The purpose of the partnership is to improve the quality of GCG implementation in PLN with the support of BPKP expertise in conducting surveillance and applying the principles of good corporate governance within the State-Owned Enterprises.

Melalui kerjasama kelembagaan dengan salah satu badan pengawasan dengan salah satu keahlian dibidang penerapan GCG tersebut, PLN meyakini kualitas penerapan GCG akan meningkat. Dengan peningkatan tersebut PLN mendapatkan bekal berharga untuk mewujudkan "PLN Bersih No Korupsi" pada seluruh tatanan dan proses bisnis yang dijalankan.

Through the institutional cooperation with one of the supervisory institution and an expertise in one of the GCG implementation, PLN believes the quality of GCG implementation will improving. With those increases, PLN gets valuable supply to realize "PLN Bersih No Corruption" on the entire structure and business processes which are executed.

06 Pembahasan dan Analisis Manajemen

Management Discussion and Analysis

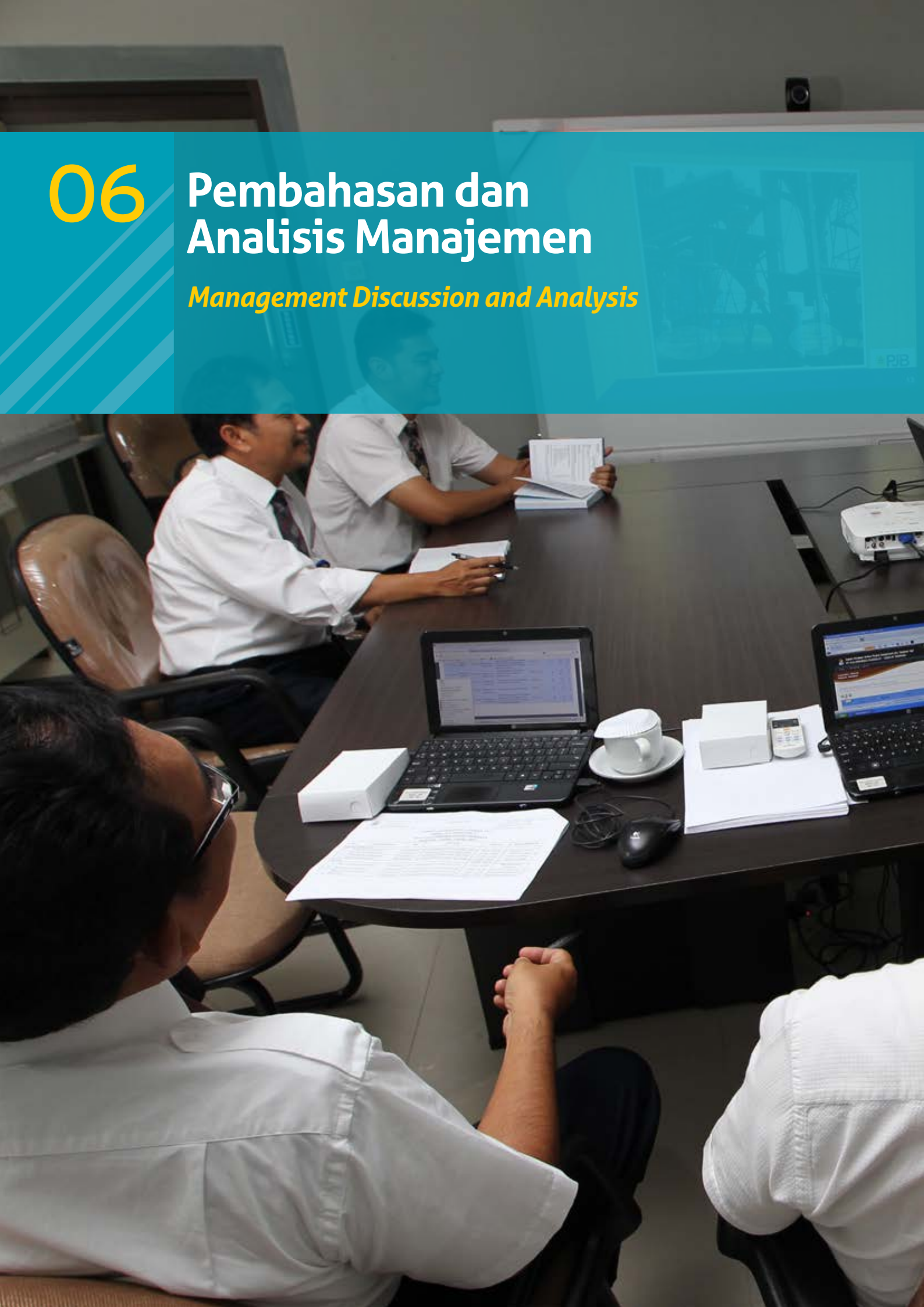

Tinjauan Ekonomi dan Prospek Usaha
Economic Review and Business Prospect

Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance

Tinjauan Ekonomi dan Prospek Usaha

Economic Review and Business Prospect

Dalam beberapa tahun terakhir, PLN berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan pasokan daya listrik sesuai kebutuhan dan mencatatkan kinerja operasional maupun keuangan yang memadai. Namun demikian dimasa mendatang, tantangan akan semakin besar, mengingat Indonesia bertekad meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berarti naiknya kebutuhan akan pasokan daya listrik. Dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5-7% pertahun, Indonesia membutuhkan tambahan suplai listrik antara 7,5% sampai 10,5% per tahun atau sekitar 7.500-11.000 MW pertahun.

In recent years, PLN managed to support Indonesia's economic growth by increasing electrical power supply as needed and recording operational performance and adequate financial. However, the challenge will be even greater in the future, since Indonesia is committed to increase the rate of economic growth, which means an increased requirement for electrical power supply. With the projected growth of 5-7% per year, Indonesia needs additional power supply between 7.5% to 10.5% per year, or approximately 7500-11000 MW per year.

Perekonomian global di tahun 2014, masih belum kembali kemasa sebelum krisis di tahun 2008. Pemulihan perekonomian global berjalan tidak seimbang, dimana Tiongkok yang kini telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar didunia, masih mencatatkan penurunan pertumbuhan, demikian juga Jepang dan kawasan Eropa lainnya, termasuk Jerman. Kekuatan ekonomi Asia lainnya, yakni India justru telah menunjukan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi perekonomian Amerika Serikat telah mulai pulih, membuat Bank Sentral, bersama Pemerintah Amerika sepakat untuk memulai program pengurangan stimulus. Langkah yang kemudian berdampak pada penguatan dollar terhadap hampir seluruh mata uang kuat dunia, termasuk rupiah.

The global economy in 2014 has not recovered to the state before recession in 2008. The recovery process has not been performing very well, wherein China – which currently is the strongest economy power in the world, still showed sluggish economic growth, as well as Japan and European countries, including Germany. Another strong economy power, India, has on contrary been showing an increase in its economic growth. United States' economy has started to recover, so that Central Bank along with US Government agreed to decrease the stimulus. This policy consequently affects to strengthening dollar to other strong currencies in the world, such as rupiah.

Belum kondusifnya perekonomian global tersebut, mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2014, hanya mancatatkan pertumbuhan sebesar 5,20% lebih rendah 5,78% di tahun 2013. Penurunan pertumbuhan ekonomi 2014 terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor non-migas akibat masih lemahnya permintaan berbagai komoditas primer andalan ekspor Indonesia seperti CPO dan batubara. Sementara larangan ekspor mineral mentah membuat nilai ekspor produk non-migas ikut melemah. Kondisi ini membuat neraca perdagangan tertekan.

This inconducive state of global economy affected Indonesia's economic growth in 2014, which was only 5.20%, lower than previously 5.78%. The slowdown in 2014 was mainly because of the less non-oil and gas export performance as the demands for Indonesia's primary export commodities such as CPO, coal and other minerals went down. Meanwhile, the crude oil exports ban has in return causing non-oil and gas' products price fall. This condition pressured the balance of trade.

Realisasi subsidi BBM yang terus membesar juga semakin membuat melebarnya angka defisit pada neraca pembayaran Indonesia, yang mengkibatkan turunnya nilai tukar rupiah. Rencana *tapering off,* yang membuat orientasi penempatan dana investor besar bergerak kembali ke Amerika Serikat membuat nilai tukar rupiah semakin tertekan. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS akhirnya ditutup pada posisi Rp12.440/US$, melemah 2,06% dari posisi tahun 2013, sebesar Rp12.168/US$.

The ever-increasing oil-based fuel subsidies contribute to the increase of deficit in Indonesia's balance of payment, which ultimately weakened Rupiah's exchange rate. This condition was worsened by the plan of tapering off, which reoriented large Investors' fund placements back to the US.The Indonesia Rupiah exchange rate against the US Dollar was finally closed at Rp12,440/US$, even 2.06% weaker than 2013, Rp12,168/US$.

Pengalihan subsidi melalui penyesuaian harga BBM dan penyesuaian tarif listrik kemudian, mendorong peningkatan harga barang di pasar domestik sehingga berpengaruh pada tingginya angka inflasi pada tahun 2014. Data Bank Indonesia menyebutkan, inflasi pada tahun 2014 berada dikisaran 8,36% hanya sedikit berkurang dari angka 8,38% di tahun 2013. Dalam rangka mengendalikan laju inflasi dan menahan laju pelemahan rupiah, selama tahun 2014 Bank Indonesia melakukan 1 kali revisi tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI *Rate*) dari 7,50% di bulan Januari 2014 hingga akhirnya menjadi sebesar 7,75% diakhir tahun 2014.

The government's efforts to reduce subsidy amount through oil fuel price adjustments pushed the goods price hike in the domestic market, which also increased the inflation rate in 2014. According to Bank Indonesia's data, the 2014 inflation rose to 8.36%, a bit decreasing from 8.38% in 2013. To curb inflation rate and Rupiah's depreciation, throughout 2014 Bank Indonesia revised its interest rate once, from 7.50% in January 2014 to 7.75% in end of 2014.

Relatif tingginya suku bunga rujukan tersebut membuat suku bunga kredit investasi juga meningkat dan pada akhirnya mempengaruhi realisasi investasi skala besar dan mempengaruhi biaya dana dalam rangka penggalangan sumber pembiayaan investasi. Naiknya laju inflasi dan suku bunga rujukan tersebut juga membuat konsumsi rumah tangga cenderung berkurang, termasuk pemakaian listrik dan energi lainnya. Namun demikian, secara keseluruhan konsumsi domestik cukup kuat, dan masih menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2014. Bank Indonesia maupun pakar ekonomi meyakini Indonesia akan melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan dengan kisaran pertumbuhan 5,5 - 6,0%.

The increase of the central bank's interest rate also brought investment credit to rise and eventually influenced the large scaled investments and the costs for raising investment financing sources. The increase of inflation rate and BI Rate also affected the domestic consumption, including the cost of electricity and other energy sources. However, domestic consumption as a whole was robust, and still becomes the main contributor to Indonesia's economic growth in 2014. Bank Indonesia and economic experts believe that Indonesia will maintain its economic growth trend for the next few years, at the range between 5.5 - 6.0%.

Prospek Usaha

Tumbuhnya perekonomian Indonesia yang berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir, membuat *Gross Domestic Product* (GDP) perkapita Indonesia tahun 2013 menjadi Rp36,5 juta (BPS). Dengan tingkat pendapatan perkapita tersebut Indonesia telah masuk ke kelompok negara menengah.

Pembangunan nasional selanjutnya menargetkan naiknya GDP per kapita agar Indonesia termasuk kedalam kelompok negara berpendapatan tinggi, yang mensyaratkan pemenuhan berbagai infrastruktur dasar, termasuk ketenagalistrikan. Meningkatnya pendapatan per kapita, akan mendorong pertumbuhan kebutuhan berbagai produk dan jasa termasuk sektor kelistrikan.

Tingkat rasio elektrifikasi nasional hingga akhir tahun 2014 adalah sekitar 84,3%, masih dibawah rata-rata negara lain dikawasan Asia yang telah mencapai rasio sekitar 99% (Malaysia,Thailand, Vietnam), bahkan 100% (Singapura, Brunei). Dengan adanya program peningkatan rasio elektrifikasi hingga diatas 90% mulai akhir tahun 2019, maka hal ini berarti perlunya tambahan stasiun pembangkit dengan total daya minimal 5 GW setiap tahunnya.

Keputusan Pemerintah untuk mewajibkan pendirian fasilitas smelter bagi pelaku kegiatan penambangan mineral logam, membuat kebutuhan listrik untuk industri di masa mendatang akan meningkat dengan jumlah yang substansial dan dengan sebaran yang semakin merata. Dengan demikian pertumbuhan ketenagalistrikan di masa mendatang akan meningkat lebih cepat lagi dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB. Studi empiris menunjukkan, setiap pertumbuhan PDB 1%, perlu didukung dengan pertumbuhan suplai listrik sebesar 1,2-1,5%. Dengan demikian dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5-7% pertahun, Indonesia membutuhkan tambahan suplai listrik antara 7,5% sampai 10,5% per tahun.

Realisasi penyesuaian tarif listrik secara periodik diyakini akan menjadikan PLN memiliki kemampuan keuangan yang semakin baik, sehingga mampu membiayai pembangunan stasiun pembangkit baru dengan sumber dana dari kas internal. Saat ini, PLN telah merencanakan pembangunan berbagai proyek pembangkit tenaga listrik untuk lima tahun ke depan dengan menyediakan dua-per-tiga dari kebutuhan nasional, sedangkan sisanya disediakan melalui partisipasi pihak swasta.

Disamping itu, Keputusan Menteri BUMN untuk mewajibkan Perusahaan BUMN mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar serta mengijinkan dilakukannya transaksi lindung nilai *(hedging)* atas eksposur kewajiban dalam valas, membuat PLN memilki landasan hukum untuk mengelola risiko valasnya. Hal ini penting, mengingat sesuai dengan proyeksi yang telah dipaparkan dihadapan Pemerintah selaku Pemegang Saham, PLN membutuhkan dana yang besar dalam mendukung program kecukupan listrik nasional.

Di samping pembangunan pusat pembangkit, PLN masih memerlukan investasi untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi.

Diperkirakan selama periode 2013-2017, Perseroan membutuhkan dana investasi sebesar Rp500 triliun (termasuk *Interest During Construction*/IDC) Jika tambahan kapasitas daya yang ditargetkan

Business Prospects

The ongoing Indonesia's economic growth in recent years, results in a rise of the Growth Domestic Product (GDP) per capita to Rp36,5 million (BPS). Therefore, putting Indonesia as middle-income countries.

In the future, national development is projecting to leverage GDP per capita so that Indonesia is listed on the high national income category, which considers fulfilment of basic infrastructure, including electricity. The expansion of income per capita will consequently boost the demand of various products and service as well as access to electricity.

The national electrification rate up to late 2014 was 84.3%, below the average of other countries in Asia, which was 99% (Malaysia, Thailand, Vietnam), even 100% (Singapore, Brunei). The program of electrification ratio increase to over 90% starting 2019 would require additional power generation stations with a total power of approximately 5 GW a year.

The government's decision of obliging metal mineral mining business players to build smelter facility made electricity needs for industry in the future to increase substantially and evenly. Thus electricity growth will be more rapid compared to the projected GDP growth. Empirical study shows that 1% of GDP Growth needs to be supported by electricity supply increase between 1.2 and 1.5%. Thus with projected growth of 5 to 7% a year, Indonesia requires additional electricity supply between 7.5% and 10.5% per year.

The realization of periodic electricity cost adjustment made PLN have much better finance, so it was able to finance new electrical power generation station development sourced from its internal cash. PLN has been planning the development of several power plant projects for the next five years by allocating two-thirds of the national needs for itself, while the remainder for third party participation.

In addition, the SOE Minister Decision that obliges SOEs to identify and manage market risk and allow hedging for the exposure to obligations in foreign currency make PLN have the legal basis in managing its foreign currency risk. This matters considering the projection presented before the Government as the Shareholder that PLN needs a great amount of funds for supporting the national electricity adequacy program.

Apart from the plant constructions, PLN needs investment to build transmission and distribution networks.

It is estimated that during the period of 2013-2017, corporate needs up to Rp500 trillion investment funds (including Interest During Construction, IDC). Suppose that the addition of power

meningkat, maka jumlah dana investasi yang dibutuhkan akan lebih besar lagi).

Kebutuhan pendanaan bagi pembangunan ketenagalistrikan tersebut bersumber dari dana internal maupun eksternal Perusahaan. Sumber dana internal berasal dari laba usaha, sedangkan sumber dana eksternal dapat berupa pinjaman *two step loan*, pinjaman pemerintah melalui rekening dana investasi, obligasi nasional maupun internasional, serta pinjaman komersial perbankan lainnya.

Seluruh uraian data tersebut menggambarkan cerahnya prospek industri ketenagalistrikan di masa mendatang. Hal tersebut juga mengindikasikan besarnya peluang PLN menciptakan level kinerja baru dimasa mendatang.

Sekilas Transformasi Kinerja PLN

Setiap tahun PLN merealisasikan rencana investasi bernilai puluhan triliun untuk membangun fasilitas ketenagalistrikan meliputi unit pembangkit, jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Selaras dengan realisasi tersebut, PLN mencatatkan peningkatan kinerja keuangan, terutama dari sisi naiknya pendapatan penjualan listrik sebagai hasil dari naiknya jumlah pelanggan dan jumlah daya listrik terjual. Namun demikian PLN menghadapi beberapa kendala untuk mencatatkan kinerja lebih optimal berupa hasil laba bersih yang lebih baik atau dalam bentuk tingkat pengembalian investasi, ROA dan ROE yang lebih baik.

Beberapa kendala utama adalah keterbatasan PLN untuk mendapatkan sumber energi, terutama BBM pada harga yang bersaing, dan ketentuan penugasan sebagai perusahaan penyedia PSO, yakni tenaga listrik, yang tidak memungkinkan PLN menentukan tarif listrik sesuai harga ke-ekonomian. Sekalipun PLN mendapatkan kompensasi berupa subsidi atas selisih harga pokok produksi listrik dengan tarif listrik ditambah margin tertentu, mekanisme penetapan besaran subsidi dan pencairan dana subsidi yang membutuhkan waktu cukup lama membuat PLN tidak memiliki ruang yang memadai untuk menjalankan operasional perusahaan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dengan lebih cepat, tepat dan efektif.

Kendala utama lainnya adalah risiko valas yang selalu mengiringi kegiatan operasional, untuk memenuhi kebutuhan impor pengadaan barang modal dan pendanaan yang sebagian menggunakan dana dalam valuta asing, sementara pendapatan PLN dalam Rupiah. Hingga tahun 2013 seluruh BUMN termasuk PLN, belum diperbolehkan melakukan transaksi lindung nilai.

Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir kinerja keuangan PLN tidak optimal, mengakibatkan peringkat surat utang PLN belum masuk kategori investment grade, dan premi suku bunga/kupon yang dikenakan juga relatif tinggi.

Kondisi tersebut mulai berubah sejak 1 tahun terakhir. Keputusan Pemerintah untuk mengurangi subsidi listrik pada golongan tarif tertentu, membuat PLN memiliki ruang untuk menyesuaikan tarif dasar listrik semakin mendekati harga ke-ekonomian. Hasilnya, PLN mampu mencatatkan kenaikan pendapatan penjualan listrik secara substansial dan memiliki ruang untuk mengelola likuiditas keuangan dengan lebih optimal.

capacity increases, then the value of investment fund needed will multiply even greater.

These funds will derive from internal and external sources of the Company. Internal fund source is the operating profit, while the external sources include two-step loan, the government's loan through investment fund account, national and international bonds as well as other loans of commercial banks.

From this overview, we can see the electricity industry prospect is growing, so is PLN's performance.

Operational Performance Review

Yearly, PLN realizes investment plan worth of trillions of rupiah to realize electricity development projects as power plant units, transmission and distribution network. Along with these, PLN has recorded growth in economic performance, mainly from the sides of increasing electricity sales income as the result of expanding market and increasing number of power. Notwithstanding, PLN faces numerous hindrance to record a more optimum performance in the form of bigger nett profit or in the form of better return on investment, ROA and ROE.

Few major barriers include limited access to source of energy, especially competitive price of oil-based fuel and assignment provision as PSO providing company, in this case electricity, precludes PLN to govern electricity tariff in accordance with current economic states. Even if PLN has the compensation in the form of subsidies on cost of good sold for electricity with electricity tariff, summed up with certain margin, the complex and time consuming mechanism of subsidies value appointment limits PLN's authority to run company's operation especially in providing faster, more accurate and more effective financial management.

Another major barrier is foreign exchange risk that consistently occurs in daily operational activities; to comply with import demand on procurement of capital goods and funding is using parts of budget in foreign exchange while the income itself is in rupiah. Until 2013, all BUMN companies including PLN had no authority to run hedging transaction.

As a result, in the last few years PLN has not been performing optimally, leading to PLN's debt securities not listed in investment grade category, and premium interest rate / coupon applied onto, is also relatively high.

This condition has been showing changes significantly in the last 1 year. Government's policy to lower electricity subsidy in certain class, gives PLN higher authority to adjust basic electricity tariff with economic price. As a result, PLN manages to record substantial improvement in electricity sales income and obtains more space to manage financial liquidity optimally.

Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan transaksi lindung nilai bagi BUMN yang senantiasa menghadapi risiko valas, termasuk PLN. Ketentuan lindung nilai tersebut membuat PLN memiliki ruang untuk memitigasi risiko nilai tukar, yang membuat PLN tahun 2013 lalu dan beberapa tahun sebelumnya mencatatkan rugi bersih akibat terjadinya pelemahan nilai tukar yang tidak berada dalam pengelolaan PLN.

Besides, Government has declared policy on hedging transaction for BUMN companies that consistently facing foreign currency risk, including PLN. This policy on hedging transaction strengthens PLN's authority to mitigate against exchange rate risk. This in return has made PLN to record nett loss in 2013 and previous few years caused by depreciation that are not listed in PLN management system.

Kinerja keuangan PLN jika dilihat dari besaran EBITDA dan rasio EBITDA/daya listrik terjual sesungguhnya cukup baik. Naiknya tarif dasar listrik sejak akhir tahun 2013 membuat EBITDA PLN meningkat signifikan. Implementasi ketentuan lindung nilai dimasa-masa mendatang diharapkan membuat risiko valuta asing termitigasi dengan baik. Perkembangan positif tersebut membuat dalam beberapa tahun mendatang PLN memiliki peluang mencatatkan level kinerja baru.

As a matter of fact, economic performance of PLN seen from the number of EBITDA and ratio of EBITDA to electrical power sold is considered well. As electricity tariff in the late 2013 is increasing, PLN's EBITDA started to rise significantly. The implementation of hedging transaction policy in the years to come is expected to mitigate foreign currency risk very well. This positive progress allows PLN to have brighter potential to record new level of performance.

Tahun 2014, PLN telah berhasil mencatatkan diri sebagai salah satu dari 500 perusahaan besar dunia dengan pendapatan terbesar. FORTUNE Global 500 adalah ajang tahunan yang dilakukan majalah Fortune sejak tahun 1955. Pada tahun-tahun mendatang, PLN memiliki peluang mencatatkan diri sebagai perusahaan dengan pendapatan terbesar di Indonesia dan mencatatkan laba bersih yang terbesar, sebagai level kinerja baru Perusahaan.

In 2014, PLN had successfully established in the list of top 500 companies in the world by revenue. FORTUNE Global 500 is an annual ranking event held by Fortune magazine since 1955. In the future, PLN is targeted to have opportunity to secure itself as Indonesia's top revenue company and record highest nett profit to eventually placing PLN in a new level of performance.

EBITDA (Rp Triliun)
EBITDA (Rp Trillion)

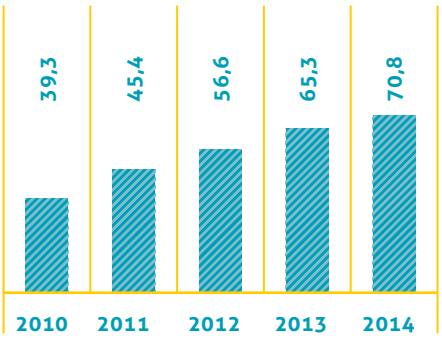

EBITDA Energi Terjual (Rp/kWh)
EBITDA Energy Sales (Rp/kWh)

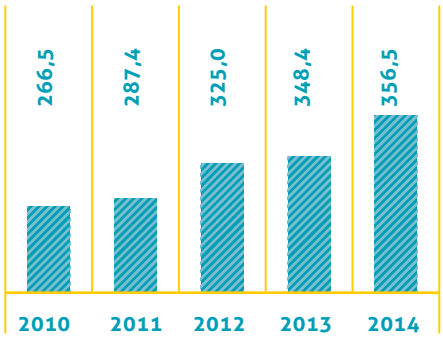

Dari grafik Ebitda/daya terjual tampak bahwa sesungguhnya PLN mencatatkan perbaikan kinerja finansial secara konsisten. Namun penyesuaian tarif membuat kinerja keuangan PLN meningkat signifikan dibandingkan kinerjanya sebelum ada penyesuaian tarif. Mengingat dimasa mendatang tarif dasar listrik pada beberapa golongan tertentu masih akan disesuaikan hingga berada pada level ke-ekonomian, maka kinerja keuangan PLN diharapkan semakin meningkat ke level yang baru.

The above graph of ratio EBITDA to power sold shows that in fact PLN has been constantly recording betterment of financial performance. However, tariff adjustment drives PLN to significantly increase in its financial performance compared to before electricity cost adjustment. Considering the future electricity cost adjustment will be applied to certain class in order to adjust to the economic price, hence PLN financial performance is anticipated to reach a higher new level.

Listrik Semakin Mudah Didapat - Peringkat Kemudahan Berbisnis di Indonesia Naik

Easy Electricity Access – Indonesia's Ease of Doing Business Index Rises

Peringkat kemudahan berbisnis *(ease of doing business)* Indonesia 2015 naik tiga peringkat dibanding 2014, dari semula 117 menjadi 114. Kenaikan peringkat ini terutama disumbang oleh indikator kemudahan mendapatkan listrik *(getting electricity)* yang naik 23 peringkat dari semula 101 di tahun 2014 menjadi 78 di tahun 2015. Demikian sebagaimana dirilis oleh *International Finance Corporation* (IFC), lembaga dibawah Bank Dunia yang memberikan peringkat kemudahan berbisnis di 189 negara. Beberapa indikator yang mempengaruhi kemudahan berbisnis di Indonesia mengalami penurunan peringkat.

Indonesia's ease of doing business index in 2015 rises up to thrice the 2014 index, starting from 117 and ends up to 114. This rise of index is mainly endowed by the rank indicator of ease in getting electricity which elevates 23 points from 101 in 2014 to 78 in 2015. This figure was released by International Finance Corporation (IFC), an international finance institution under World Bank that offers financial services and ease of doing business rank to 189 countries. Some indicators which affects the ease of doing business in Indonesia has experienced drops in its ranking.

Peringkat kemudahan mendapatkan listrik naik cukup signifikan diantaranya karena pemangkasan prosedur dalam mendapatkan listrik, yaitu tidak ada lagi prosedur mendapatkan jaminan instalasi serta biaya yang terkait prosedur tersebut. Dengan pemangkasan prosedur tersebut maka jangka waktu untuk mendapatkan listrik bagi pelaku industri dan bisnis daya 147 kilo Volt Ampere (kVA) ke atas juga berkurang, dari semula 101 hari menjadi 91 hari. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempermudah akses mendapatkan pasokan listrik, diantaranya:

1. Memangkas prosedur.
2. Mempercepat penyalaan tanpa mengurangi faktor keselamatan.
3. Menekan biaya.
4. Perbaikan manajemen material penyambungan.
5. Memberikan kemudahan akses untuk proses permintaan sambungan baru melalui contact center PLN 123.

The ease of getting electricity index ascends significantly, which is partly caused by cutting off procedures in obtaining electricity, i.e. no more procedure to get installation warranty as well as related costs. By the discontinuation of this procedure, the time span given to get electricity for industries and business players using more than 147 kilo Volt Ampere (kVA) is also shortened – from 101 days to 91 days. Some efforts conducted to provide ease of electricity access include:

1. *Cutting off procedures.*
2. *Speed up electricity activation without lowering safety aspects.*
3. *Cost reduction.*
4. *Improvement of connecting material management.*
5. *Providing easy access to request of new electrical connection through PLN 123 contact centre.*

Upaya-upaya seluruh *stakeholders* ketenagalistrikan, terutama PLN dan Kementerian ESDM, diapresiasi oleh Bank Dunia. Peringkat kemudahan mendapatkan listrik dalam beberapa tahun terakhir juga terus meningkat. Pada 2012, kemudahan mendapatkan listrik ada di peringkat 161 dari 189 negara, kemudian meningkat menjadi 147 di 2013 dan naik lagi menjadi 101 di 2014.

World Bank appreciates every efforts made by electricity industry stakeholders, especially PLN and Ministry of ESDM (Energy and Mineral Resources) very well. The index of ease in getting electricity has been recently improving in 2012, the Indonesia's index of ease in getting electricity is in number 161 from 189 countries, while in 2013 it increased to number 147 and continues to reach number 101 in the year of 2014.

Manajemen PLN menargetkan perbaikan peringkat kemudahan mendapatkan listrik menjadi kurang dari 50. Artinya seluruh pemangku kepentingan, terutama jajaran PLN, masih harus menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya, sehingga target tersebut dapat dicapai. Pencapaian target tersebut akan sangat mendukung naiknya peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi dimasa mendatang.

PLN management is targeting to nominate itself on higher rank in the index of ease in getting electricity to less than number 50. This means that all stakeholders, including PLN people, is demanded to constantly showing dedication and hard work, in order to achieve this target. Once achieved, there will be huge opportunity to increase Indonesia's ease of doing business index which eventually promotes future economic growth.

Ikhtisar Kinerja PLN - 69 tahun PLN - Hari Listrik Nasional - Oktober 2014

PLN Performance Highlight – 69 Years PLN – National Electricity Day – October 2014

Kapasitas Terpasang Pembangkit
51.620 MW (Nasional)
Installed Capacity

Jumlah Pelanggan
57,5 juta
Total Customer

Panjang Jaringan Transmisi
Length of Transmission Network
39.909,80 kms

Pertumbuhan Pemakaian Listrik
Electricity Consumption Growth
8% per tahun per year

Panjang Jaringan Distribusi
Length of Distribution Network
339.558,24 kms
Tegangan menengah Medium Voltage
585.753,37 kms
Tegangan rendah Low Voltage

Pelanggan Listrik Prabayar
Prepaid Customer
17 Juta
terbesar sedunia
world's largest

Rasio Elektrifikasi
Electrification Ratio
84,3%

Perusahaan Pendapatan Terbesar di Dunia ke
The 477th world's largest revenue company
477 2014 Rp292,72 triliun

Tinjauan Kinerja Operasional

Segmen Usaha

Sebagaimana disinggung pada uraian mengenai Profil Perusahaan, segmen usaha PLN sebagian besar berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan. Hanya sebagian kecil segmen usaha diluar ketenagalistrikan yang dijalankan, dimana segmen usaha tersebut pada umumnya dilaksanakan oleh entitas anak usaha, meliputi rancang bangun, teknologi informasi, angkutan laut khusus, tambang dan perdagangan batubara, keuangan dan sebagainya. Kinerja segmen usaha non-listrik dengan demikian dijelaskan melalui uraian mengenai kinerja anak usaha PLN.

Sementara uraian kinerja segmen usaha listrik disampaikan dalam rangkaian penjelasan pada sub-bab berikut ini. Selain menurut bidang usaha, untuk alasan administrasi dan koordinasi lapangan, segmen usaha PLN dibedakan menurut 3 area geografis utama, yakni: Operasi Geografis Jawa Bali, Sumatera dan Indonesia Timur.

Prioritas Program Kerja di Tahun 2014

Dengan realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20%, PLN terus berupaya merealisasikan berbagai proyek pembangunan ketenagalistrikan untuk memenuhi pertumbuhan permintaan tenaga listrik. Pertumbuhan permintaan yang terus berkembang, baik karena naiknya tingkat kesejahteraan maupun adanya penyambungan baru untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, membuat PLN harus menetapkan program prioritas, sesuai dengan kondisi terkini dan kapabilitas Perusahaan, baik dari sisi sumber daya maupun dari sisi finansial.

Adapun prioritas program kerja yang dilaksanakan sepanjang tahun 2014 adalah:

1. Menjaga kecukupan pasokan listrik.
2. Mengoptimalkan bauran energi untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP).
3. Meningkatkan efisiensi operasi.
4. Menyelesaikan proyek PLTU 10.000 MW dan peningkatan pencapaian *Equivalent Availability Factor* (EAF).
5. Memperbaiki tingkat kesehatan keuangan Perusahaan.
6. Meningkatkan konsolidasi proses bisnis untuk integrasi pelayanan dan efisiensi.
7. Sinergi usaha Anak Perusahaan.

Sesuai dengan prioritas program kerja tersebut, PLN berupaya meningkatkan setiap *output* program secara optimal dan mencatatkan berbagai keberhasilan operasional. Adapun pencapaian hasil operasional tahun 2014 diuraikan pada pembahasan masing-masing aspek berikut.

Operational Performance Review

Business Segment

As mentioned in the Company Profile brief, PLN's business segment mainly correlates with electricity business. Non-electricity related business is only a minor. It is performed by subsidiary business segment, including design, information technology, sea transportation, mining and coal trading, finance, etc. Performance of non-electricity business segment will later be elaborated through description of PLN's subsidiary business performance.

In addition, electricity-related performance will be elaborated in description on the next chapters. Besides business line, for administration and field coordination purpose, PLN's business line will be divided into 3 main geographical area, which includes: Java Bali geographical area, Sumatera and Eastern Indonesia.

2014 Work Program Priorities

With economic growth at the rate of 5.20%, PLN continues seeking to realize electricity development projects to meet the growing electricity demands. The ever-growing demands, either due to higher welfare level or new installations for raising electrification ratio, cause PLN to set the priority programs in accordance with the latest condition and the Company's capability, either from resources or financial aspects.

The work program priorities carried through the year of 2014 covers:

1. Maintaining electricity supply sufficiency.
2. Optimizing fuel mix to reduce basic cost of electricity production (BPP).
3. Improving operational efficiency.
4. Completing the 10,000 MW steam power plant and achieve higher Equivalent Availability Factor (EAF).
5. Improving company's financial health position.
6. Increasing business process consolidation for service integrity and efficiency.
7. Put synergy amids Subsidiaries.

In line with the priorities above, PLN seeks to best increase every program's outputs and record various operational achievements. The operational achievement in 2014 is discussed below.

Program Effisiensi Untuk Memitigasi Risiko-risiko di Masa Sulit

Efficiency Program to Mitigate Risks in Hard Times

Kendati telah mendapat tambahan subsidi listrik dan tambahan pendapatan dari kenaikan tarif listrik tahun ini, PLN justru kian mempertajam jurus-jurus efisiensi di setiap lini. Sebabnya adalah PLN masih menghadapi sejumlah risiko yang berpotensi mengakibatkan kenaikan biaya operasi. Untuk menyehatkan kondisi keuangan perusahaan sampai akhir tahun nanti, maka PLN menerapkan 10 langkah/ strategi penghematan atau yang dikenal pula sebagai "*The Ten Commandment*" melalui *Cost & Revenue Management Program* (CRMP).

Despite of receiving additional electricity subsidies and additional revenue from electricity tariff hike, PLN is improving efficiency strategies in every lines instead. This is because PLN is still prone to potential risk that may causes increasing operational cost. To maintain company's financial health positions until the end of year, thus PLN applies the 10 saving steps / strategies or known as "The Ten Commandment" through Cost & Revenue Management Program (CRMP).

Persetujuan subsudi listrik sebesar Rp103,8 triliun dan tambahan pendapatan sebesar Rp8,5 triliun dari kenaikan tarif tenaga listrik, maka *debt service coverage ratio*/DSCR PLN (kemampuan Perseroan atas pinjaman tanggungan) di atas kertas sudah aman, yaitu 1,56 kali. Dengan demikian, PLN dapat tetap menjalankan kinerja perusahaan, bisa berinvestasi dan bahkan memperoleh pinjaman baru.

The approval of electricity subsidies worth of Rp103.8 trillion and additional revenue of Rp8.5 trillion from electricity tariff hike, therefore PLN's debt service coverage ratio / DSCR (company's capability of mortgage loan) is theoretically safe, i.e. 1.56 times. Hence, PLN is able to maintain company performance, to invest and even to receive new loans.

Namun mempertimbangkan kondisi eksternal, PLN bertekad bekerja lebih keras, mengingat sampai akhir tahun 2014 masih akan menghadapi risiko-risiko yang berada diluar kendali perusahaan yang dapat mempengaruhi capaian rasio DSCR tersebut. Beberapa risiko tersebut meliputi: risiko peningkatan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, risiko kenaikan harga ICP *(Indonesian Crude Oil Price)*, dan risiko peningkatan konsumsi bahan bakar minyak sebagai dampak dari terjadinya pergeseran jadwal COD *(Commercial Operation Data)* sejumlah proyek PLTU batubara.

However considering the external conditions, PLN is determined to work harder, given there are still potential risks along the year of 2014 which are maybe out of companies' authority that eventually may affects the ratio of DSCR achievement. The risks include: risks of the rising exchange rate of foreign currencies to Indonesian rupiah, risks ICP (Indonesian Crude Oil Price) hike, and risks of increasing oil based-fuel consumption as the impact of switching COD (Commercial Operation Data) schedule of coal based steam power plant.

Sesuai rencana aksi CRMP 2014, PLN akan menerapkan 10 inisiatif strategi penghematan, meliputi: Efisiensi konsumsi BBM, efisiensi susut dan PS (pemakaian sendiri), efisiensi sewa pembangkit, efisiensi biaya pemeliharaan, efisiensi persediaan, efisiensi biaya administrasi, efisiensi biaya pegawai, efisiensi piutang, efisiensi kas, dan efisiensi pendanaan.

According to 2014 CRMP action plan, PLN will apply 10 saving strategy initiatives, which covers: oil based-fuel consumption efficiency, loss and self usage efficiency, power plant rent efficiency, maintenance cost efficiency, supply efficiency, administration cost efficiency, personnel expense efficiency, accounts receivable efficiency, cash efficiency, and funding efficiency.

Target penghematan yang dapat diraih adalah sebesar Rp14,2 triliun, dengan rincian: paling besar atau sekitar 42% diharapkan dapat diperoleh dari hasil efisiensi konsumsi BBM, yakni sebesar Rp6,31 triliun. Kemudian disusul dari efisiensi piutang sebesar Rp2,01 triliun, susut dan PS (pemakaian sendiri) sebesar Rp1,56 triliun, pendanaan sebesar Rp1,50 triliun, biaya pemeliharaan sebesar Rp918 miliar, persediaan sebesar Rp750 miliar, biaya pegawai sebesar 524 miliar, biaya administrasi sebesar Rp304 miliar, kas sebesar 218 miliar, dan sewa pembangkit sebesar Rp149 miliar.

The achievable savings goal is Rp14.2 trillion, with the details of: maximum around 42% is expected to gain from the result of oil based-fuel consumption efficiency, which is Rp6.31 trillion. And followed by accounts receivable efficiency for Rp2.01 trillion, loss and self usage efficiency for Rp1.56 trillion, maintenance Rp918 billion, supply Rp750 billion, personnel expense Rp524 billion, administration Rp304 billion, cash Rp218 billion, and power plant rent Rp149 billion.

Penerapan sepuluh inisiatif CRMP dan dukungan seluruh jajaran serta pemangku kepentingan lainnya diyakini akan mampu membuat PLN melalui tahun sulit ini, mengamankan kondisi keuangan di akhir tahun 2014 dan meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi tercapainya level kinerja baru dimasa mendatang.

The practice of 10 CRMP initiatives and supports from all ranks of employees and stakeholders allows PLN to face the hard times, securing its financial condition and reach end of 2014, and also setting strong principals to achieve better future performance level.

Pemasaran

Penjualan Tenaga Listrik

Sebagai bagian dari implementasi CRMP, penjualan tenaga listrik di tahun 2014 dilakukan dengan memperhatikan patokan bahwa volume bahan bakar minyak yang digunakan untuk produksi tenaga listrik tidak melampaui target konsumsi. Fokus pengendalian penjualan adalah di daerah-daerah yang pasokan listriknya didominasi oleh pembangkit listrik berbahan bakar minyak, yaitu: Sumatera Utara dan sekitarnya, Kalimantan Barat dan sekitarnya, Kalimantan Timur, Bali, dan sebagian besar di daerah Indonesia Timur.

Sebaliknya daerah-daerah yang pasokan listriknya diproduksi oleh pembangkit listrik berbahan bakar non-minyak didorong untuk meningkatkan penjualan dengan tetap memperhatikan kendala operasional lainnya, diantaranya: Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu; Kalimantan Selatan & Tengah; Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo; Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara; dan Jawa.

Pengendalian pertumbuhan penjualan listrik ini pada dasarnya tidak mengurangi target peningkatan rasio elektrifikasi karena pelayanan penyambungan baru bagi pelanggan rumah tangga tidak dibatasi.

Adapun pangsa pasar penjualan listrik PLN di seluruh Indonesia adalah sekitar 95%.

Marketing

Sales of Electricity

As part of the CRMP implementation, the sales of electricity in 2014 is based upon prevailing prices and that the oil based-fuel's volume utilized to produce electrical power is not exceeding consumption target. The sales control is focused on areas whose electricity supply is dominated by oil based fuel fired power plants, namely: North Sumatra and nearby areas, West Kalimantan and nearby areas, East Kalimantan, Bali and most of East Indonesia.

On the other hand, areas whose electricity is supplied from non-oil based fired plants, the sales are boosted by taking into account other operational impediments, including in: South Sumatra, Jambi and Bengkulu, South and Central Kalimantan, North Sulawesi, Southeast Sulawesi and Gorontalo, South Sulawesi, West Sulawesi and Java.

The control of electric power supply growth basically does not hamper the electricity ratio increase, because new installation service for household customers is not limited.

The market segment of PLN's sales of electricity across Indonesia is about 95%.

Penjualan Tenaga Listrik (GWh) per Kelompok Pelanggan / Sales of Electric Power (GWh) by Customer Group

Kelompok Pelanggan	Penjualan Tenaga Listrik (GWh) Sales of Electric Power (GWh)					Customer Group
	2010	2011	2012	2013	**2014**	
Rumah Tangga	59.825	65.110	72.133	77.211	**84.086**	Households
Bisnis	27.175	28.309	30.989	34.498	**36.282**	Business
Industri	50.985	54.725	60.176	64.381	**65.909**	Industry
Lainnya	9.330	9.848	10.694	11.451	**12.324**	Others
Jumlah	**147.315**	**157.992**	**173.992**	**187.541**	**198.602**	**Total**

Dilihat dari pertumbuhannya, maka penjualan tenaga listrik mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari sebesar 7,79% di tahun 2013 menjadi 5,90% di tahun 2014. Penurunan ini terjadi pada dua kelompok pelanggan, yakni kelompok pelanggan Bisnis dan Industri yang masing-masing hanya tumbuh sebesar 5,17% dan 2,37%. Penurunan pertumbuhan ini didominasi oleh kelompok pelanggan B-2 dan B-3 serta Layanan Khusus, yang merupakan pelanggan produktif yang tidak lagi mendapatkan subsidi.

Penurunan pertumbuhan penjualan tenaga listrik (GWh) juga hasil kontribusi dari penghematan yang dilakukan pelanggan akibat kenaikan tarif listrik secara bertahap disepanjang tahun 2014 dan masih belum kondusifnya perekonomian dalam negeri dan adanya antisipasi Perusahaan terkait pelaksanaan agenda politik Pemilu DPR dan Pemilu Presiden.

In terms of growth, the electricity sales decreased compared to the previous year from 7.79% to 5.90% in 2014. This decrease occurred in the two groups of customers, namely the Business and Industrial customer groups which only grew by 5.17% and 2.37%. The decline is dominated by customer group of B-2 and B-3 and Special Services, which is a productive customer who no longer get subsidies.

The sale of electric power (GWh) decrease is also caused by the customers' saving due to gradual electricity tariff hike throughout 2014 and the inconducive economic situation and company's anticipations related to the implementation of House of Representative general election and presidential election political agenda.

Kelompok pelanggan Industri mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan selain adanya kenaikan tarif listrik secara bertahap sepanjang tahun 2014 juga menurunnya produksi usaha industri karena berkurangnya permintaan pasar dari Amerika dan Eropa. Selain itu meningkatnya harga bahan baku impor akibat tingginya nilai tukar USD terhadap mata uang rupiah turut mempengaruhi turunnya kegiatan industri.

The Industry customer group underwent a significant decline. This is due to gradual electricity tariff hike throughout 2014 and the industry players' production decrease following the decrease of American and European market demands. Furthermore, the imported raw material price hike due to the rising USD exchange rate against the Rupiah also contributed to the industry business production decrease.

Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik, Menurut Kelompok Pelanggan
Growth in Sales of Electric Power by Customer Group

Kelompok Pelanggan	Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik Growth in Sales of Electric Power					Customer Group
	2010	2011	2012	2013	2014	
Rumah Tangga	8,88%	8,83%	10,79%	7,04%	**8,90%**	Households
Bisnis	9,47%	4,17%	9,47%	11,32%	**5,17%**	Business
Industri	10,35%	7,34%	9,96%	6,99%	**2,37%**	Industry
Lainnya	8,40%	5,55%	8,59%	7,08%	**7,63%**	Others
Jumlah	**9,46%**	**7,25%**	**10,13%**	**7,79%**	**5,90%**	**Total**

Berdasarkan segmen geografisnya, kontribusi penjualan terbesar terjadi pada region Jawa-Bali yaitu sebesar 75,2% dari penjualan tenaga listrik Perseroan tahun 2014, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

By geographical segment, the largest scale contribution came from Java-Bali region, which accounts for 74.2% of the Company's 2014 electricity sales, as illustrated in the table below.

Penjualan Listrik Menurut Segmen Geografis (ribu GWh)
Sales of Electric Power by Geographical Segment (thousand GWh)

Area Geografis	2013	2014	Kontribusi Contribution		Perubahan Change	Geographical Area
			2013	2014		
Sumatera	27.565	**29.596**	14,7%	**14,9%**	7,4%	Sumatra
Indonesia Timur	17.980	**19.600**	9,6%	**9,9%**	9,0%	East Indonesia
Jawa Bali	141.996	**149.406**	75,7%	**75,2%**	5,2%	Java - Bali
Jumlah	**187.541**	**198.602**	**100%**	**100%**	**5,9%**	**Total**

Jumlah Pelanggan
Pertumbuhan penjualan tenaga listrik (GWh) sejalan dengan bertambahnya jumlah pelanggan. Hal ini terlihat dari penambahan pelanggan sampai akhir tahun 2014 yang mencapai 3,5 juta pelanggan atau turun 16,8% dibanding penambahan pelanggan tahun sebelumnya yang mencapai 4,2 juta pelanggan baru. Penambahan pelanggan terbesar terjadi pada kelompok pelanggan rumah tangga, yang mencapai sebesar 3,2 juta pelanggan dibanding tahun lalu sebesar 3,8 juta pelanggan.

Total Customers
The growth of electricity sales (GWh) in line with the increasing number of customers. This is evident from the addition of the customer until the end of 2014 reached 3.5 million customers, or fell 16.8% compared to the previous year reached 4.2 million new customers. The addition of the largest customers in the category of household customers, which reached 3.2 million customers compared to last year amounted to 3.8 million customers.

Penambahan Pelanggan
New Customers

Kelompok Pelanggan	Penambahan					Customer Group
	2010	2011	2012	2013	2014	
Rumah Tangga	2.224.690	3.253.022	3.642.238	3.896.347	**3.193.198**	Households
Bisnis	110.542	137.211	168.981	200.089	**207.729**	Business
Industri	775	1.690	2.296	2.885	**2.804**	Industry
Lainnya	(18.305)	67.835	86.589	101.638	**93.295**	Others
Jumlah	**2.317.702**	**3.459.758**	**3.900.104**	**4.200.959**	**3.497.026**	**Total**

Peningkatan jumlah pelanggan tersebut sebagai hasil penerapan inovasi PLN dalam meningkatkan kualitas layanan pelanggan yaitu dengan melakukan perbaikan proses bisnis penyambungan baru dan penyediaan layanan fasilitas antara lain melalui:

1. "Contact Center 123" Penyambungan Baru, Penambahan Daya dan Penyambungan Sementara Online ("PB/PD/PS Online") melalui website.
2. Pemasaran Listrik Prabayar.

Dengan penerapan inovasi dibidang layanan tersebut, pelanggan dapat langsung melakukan proses pemasangan listrik baru tanpa harus datang ke kantor unit layanan PLN, hal ini sekaligus menghilangkan praktik percaloan. Penambahan pelanggan baru sebesar 3,5 juta pelanggan tersebut membuat jumlah pelanggan PLN menjadi 57,5 juta pelanggan, naik 6,48% dibandingkan tahun lalu, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Penambahan pelanggan didominasi oleh pelanggan prabayar yang merupakan salah satu program prioritas Perusahaan.

Pada tahun 2014 penambahan pelanggan prabayar mencapai 4.409.544 pelanggan yang berasal dari pelanggan baru dan pelanggan migrasi dari pasca bayar ke prabayar, sehingga jumlah pelanggan prabayar mencapai 17.559.623 pelanggan. Jumlah pelanggan prabayar meningkat sangat signifikan dibanding tahun lalu yang hanya sebesar 13.150.079 pelanggan.

The increase in the total customer was a result of PLN's innovation application in customer service quality improvement through the betterment of new installation business process and providing of facility services including:

1. "Contact Center 123", New Connections, Online Power Upgrade and Temporary Connections ("PB/PD/PS Online") through the PLN website.
2. Prepaid electricity installation.

With the implementation on service innovation, customers can administer the new electricity installment without having to visit a PLN unit, and this also removes the opportunity for brokering services. Additional new customers of 3.5 million made the total PLN customers to 57.5 million, or an 6.48% increase compared to last year, as illustrated in the table below.

The new customers are dominantly pre-paid customers, and this is one of the company's priority programs.

In 2014 the addition of prepaid customers reached 4,409,544, comprising new customers and migration customers from post to pre-paid electricity, thus made the pre-paid customers total 17.559.623. The number of pre-paid customers increased significantly compared to last year, which was only 13,150,079.

Jumlah Pelanggan (ribu pelanggan)
Total Customers (thousand customer)

Kelompok Pelanggan	Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik Growth in Sales of Electric Power					Customer Group
	2010	2011	2012	2013	2014	
Rumah Tangga	39.324	42.578	46.220	50.116	**53.309**	Households
Bisnis	1.912	2.049	2.218	2.418	**2.626**	Business
Industri	49	50	53	56	**58**	Industry
Lainnya	1.150	1.218	1.304	1.406	**1.500**	Others
Jumlah	**42.435**	**45.895**	**49.795**	**53.996**	**57.493**	**Total**

Pertumbuhan jumlah pelanggan di tahun 2014 ditahun 2014 tersebut membuat rasio elektrifikasi secara nasional menjadi sebesar 84,3% (termasuk pelanggan non PLN) dari angka tahun sebelumnya sebesar 80,38%.

The growth in the number of customers in 2014 caused the national scale electrification ratio to rise to 84.3% (including non PLN customers) from that in last year, which was 80.38%.

Rasio Elektrifikasi*
Electrification Ratio

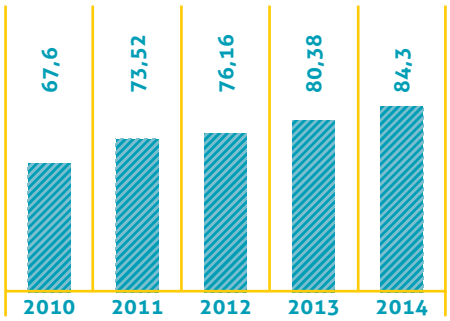

* Termasuk pelanggan Non-PLN
Including non-PLN customers

Berdasarkan segmen geografisnya, jumlah pelanggan di region Jawa Bali tetap mendominasi, dengan kontribusi sebesar 64,4%, diikuti region Sumatera dan Indonesia Timur, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

By geographical segment, the number of customers in Java-Bali was still dominant, with contribution of 64.4%. This was followed by Sumatra and East Indonesia, as shown in the table below.

Jumlah Pelanggan menurut segmen geografis (%)
Total Customers by geographical segment (%)

Area Geografis	2013	2014	Kontribusi 2013	Kontribusi 2014	Perubahan	Geographical Area
Sumatera	10.746.346	**11.448.744**	19,9%	**19,9%**	6,5%	Sumatra
Indonesia Timur	8.344.464	**8.999.845**	15,5%	**15,7%**	7,9%	East Indonesia
Jawa Bali	34.905.398	**37.044.654**	64,6%	**64,4%**	6,1%	Java - Bali
Jumlah	**53.996.208**	**57.493.234**	**100,0%**	**100,0%**	**6,5%**	**Total**

Daya Tersambung

Daya tersambung di tahun 2014 bertambah sebesar 6.936 MVA turun 24,59% dibanding tahun sebelumnya yang naik sebesar 9.197 MVA. Hal ini seiring dengan meningkatnya penjualan tenaga listrik (GWh) dan penambahan pelanggan dibanding tahun sebelumnya.

Penambahan daya tersambung terjadi pada semua kelompok pelanggan, kecuali kelompok pelanggan Industri yang mengalami penurunan. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya pengendalian pertumbuhan terutama di daerah-daerah yang pembangkitnya masih menggunakan bahan bakar minyak serta kekurangan pasokan daya, khususnya untuk wilayah Sumatera Utara dimana industri masih berkembang namun pertumbuhannya terkendala pasokan listrik.

Installed Capacity

The addition of connected power in 2014 was 6.936 MVA, a 24.59% increase compared to last year's 9.197 MVA. This is in line with the increase of electricity sales (GWh) and total customers compared to last year.

All customer groups had the addition of connected power, except the Industry group. This is because of the growth control especially in areas where the plants use oil-based fuels and has limited power supply, particularly North Sumatra where the industry is still developing, but the growth is hampered due to the lack of electricity supply.

Penambahan Daya Tersambung (MVA)
Additional Connected Power (MVA)

Kelompok Pelanggan	2010	2011	2012	2013	2014	Geographical Area
Rumah Tangga	2.503	3.980	3.686	4.345	**3.160**	Households
Bisnis	1.062	1.464	1.993	2.703	**1.292**	Business
Industri	776	1.912	2.503	1.563	**1.998**	Industry
Lainnya	205	394	527	586	**486**	Others
Jumlah	**4.546**	**7.750**	**8.709**	**9.197**	**6.936**	**Total**

Jumlah daya tersambung hingga akhir 2014 mencapai 100.031 MVA atau naik 7,45% dari tahun sebelumnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

The total connected power up to end 2014 was 100.031 MVA, or a 7.45% increase from the previous year, as shown by the table below.

Daya Tersambung (MVA)
Connected Power (MVA)

Kelompok Pelanggan	2010	2011	2012	2013	2014	Geographical Area
Rumah Tangga	33.202	37.183	40.869	45.214	**48.374**	Households
Bisnis	13.772	15.236	17.229	19.931	**21.224**	Business
Industri	15.566	17.478	19.981	21.544	**23.542**	Industry
Lainnya	4.899	5.292	5.819	6.405	**6.890**	Others
Jumlah	**67.439**	**75.189**	**83.898**	**93.094**	**100.031**	**Total**

Secara geografis, daya tersambung untuk region Jawa Bali mendominasi hingga sekitar 73,2% dari total daya tersambung nasional, disusul oleh daya tersambung di wilayah Sumatera dan Indonesia Timur seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

By geographic segment, the connected power for Java-Bali dominates by about 73.2% of the total national connected power, followed by Sumatra and East Indonesia. This is shown by the table below:

Daya Tersambung per Regional (MVA)
Connected Power by Region (MVA)

Area Geografis	2013	2014	% Kontribusi		% Perubahan	Geographical Area
			2013	2014		
Indonesia Barat	15.080	16.113	16,2%	17,1%	12,2%	West Indonesia
Indonesia Timur	10.446	11.442	11,2%	9,7%	14,1%	East Indonesia
Jawa Bali	67.569	72.475	72,6%	73,2%	11,1%	Java - Bali
Jumlah	**93.095**	**100.031**	**100,0%**	**100,0%**	**7,4%**	**Total**

Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik

Nilai pendapatan penjualan tenaga listrik pada tahun 2014 mencapai Rp186.634 miliar, naik 21,6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp153.485 miliar, sebagai dampak dari meningkatnya penjualan tenaga listrik (GWh), penambahan jumlah pelanggan dan daya tersambung serta adanya kenaikan tarif listrik secara bertahap sepanjang tahun 2014.

Kenaikan tarif listrik pada tahun 2014 membuat harga jual rata-rata penjualan tenaga listrik menjadi sebesar Rp939/kWh atau 14% diatas harga rata-rata tahun 2013 sebesar Rp818,41/kWh.

Electricity Power Sales Revenue

The revenue of power sales in 2014 reached Rp186,634 billion, increased by 21,6% from the previous year of Rp153,485 billion. This is in line with the increase of electricity sales (GWh), addition of total customers, connected power and gradual electricity tariff hike in 2014.

The 2014 electricity tariff hike results in an increase of average sales price to Rp939/kWh or 14% above 2013 average sales price which was Rp818.41/kWh.

Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik
Total Revenue from Electricity Sales

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	Description
Pendapatan Penjualan Listrik (Rp miliar)	102.974	112.845	126.722	153.485	**186.634**	Revenue from Electricity Sales (billion Rp)
Harga Jual Rata-rata (Rp/kWh)	699,09	714,28	728,32	818,41	**939**	Average Sales Price (Rp/kWh)

Produksi dan Pembelian Tenaga Listrik

Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, Perseroan memproduksi listrik tidak hanya dari pembangkit listrik milik sendiri, melainkan juga dari pembangkit sewa dan pembelian tenaga listrik milik swasta.

Prioritas program kerja Perseroan dalam hal produksi tenaga listrik bertujuan antara lain: menjaga kecukupan pasokan listrik, mengoptimalkan bauran energi untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP), serta meningkatkan efisiensi operasi.

Produksi tenaga listrik tahun 2014 mencapai 228.555 GWh mengalami kenaikan sebesar 5,7% dari tahun 2013 sebesar 216.189 GWh. Produksi tenaga listrik tahun 2014 yang berasal dari pembangkit sendiri, pembangkit sewa dan pembelian listrik swasta mengalami kenaikan masing-masing sebesar 6,0%, 13,7% dan 2,0% dibandingkan tahun 2013.

Electrical Power Production and Purchase

To meet the ever-increasing electricity needs, the Company seeks to produce electric power not only through its own plants, but also rented power plants and the purchase of electric power from private parties.

The Company's work program priorities in power production are: maintaining electricity supply adequacy, optimizing fuel mix to reduce the Basic Cost of Electricity Production and increasing operation efficiency.

Electricity production in 2014 reached 228,555 GWh, an increase of 5.7% from 2013 which reached 216,189 GWh. In 2014 the electricity which was produced by own plants, rented plants and purchase from private parties increased by 6.0%, 13.7% and 2.0% respectively compared to 2013.

Produksi Tenaga Listrik (GWh)
Electricity Production (GWh)

Produksi Listrik (GWh)	2010	2011	2012	2013	2014	Production (GWh)
Produksi Sendiri	124.516	128.836	131.684	144.220	**152.853**	Own Production (GWh)
• BBM	27.049	29.713	14.570	11.307	**9.491**	• Fuel oil
• Non-BBM	97.467	99.123	117.114	132.913	**143.362**	• Non Fuel Oil
• Batubara	46.685	54.950	66.633	74.269	**83.373**	• Coal
• Gas Alam	31.556	30.369	36.395	41.254	**44.398**	• Natural Gas
• Panas Bumi	3.398	3.487	3.558	4.345	**4.285**	• Geothermal
• Air	15.827	10.316	10.525	13.010	**11.164**	• Hydro
• Surya, Bayu dan Biodiesel	1	1	3	35	**142**	• Solar, Wind and Biodisiel
Sewa (GWh)	8.233	13.886	18.071	19.746	**22.444**	Rented (GWh)
Pembelian	38.076	40.682	50.563	52.223	**53.258**	Purchasing
Total Produksi	**170.825**	**183.404**	**200.318**	**216.189**	**228.555**	**Total production**

Dari tabel di atas tampak bahwa produksi tenaga listrik yang berasal dari pembangkit sendiri berbahan bakar minyak (BBM), mengalami penurunan sebesar 16,1% dari tahun 2013, sedangkan produksi tenaga listrik dari pembangkit non-BBM (batubara, gas alam, tenaga air, panas bumi, surya dan angin) mengalami peningkatan sebesar 7,9% dari tahun lalu.

The table shows that electricity production from oil-based fuel-fired power plants decreased by 16.1% from 2013, while the production from non-oil based (coal, natural gas, hydro, geothermal, solar and wind) power plants increased by 7.9 % compared to last year.

Menurunnya prosentase produksi tenaga listrik yang berasal dari pembangkit BBM disebabkan oleh:

1. Telah beroperasinya beberapa pembangkit FTP I – 10.000 MW yang berbahan bakar batubara.
2. Adanya pasokan gas alam, sehingga pembangkit berbahan bakar gas alam dapat menghasilkan produksi tenaga listrik yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
3. Meningkatnya penggunaan teknologi CNG sebagai pembangkit peaker.

The declining percentage of oil based fuel electrical power production mainly caused by:

1. The operation commencement of several coal fired FTP I – 10,000 MW.
2. Natural gas supply; which increased natural gas-fired plants' electricity production compared to last year.
3. The increase in use of CNG technology as peaker plan.

Usaha yang dilakukan untuk menekan produksi tenaga listrik dari pembangkit berbahan bakar minyak, telah sejalan dengan prioritas program kerja Perseroan untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik melalui cara memaksimalkan produksi tenaga listrik dari pembangkit non BBM.

The efforts taken to minimize electricity production from oil-based fuel plant have been in line with the Company's work program priority of reducing the Basic Cost of Electricity Production by maximizing production from non-oil based plants.

Adapun produksi listrik sendiri yang berasal dari pembangkit berbahan bakar non BBM mengalami peningkatan sebesar 10.449 GWh dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari produksi yang dihasilkan oleh pembangkit berbahan bakar batubara, gas alam, dan Surya, Bayu dan Biodiesel yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 12,3%, 7,6%, dan 306,7%.

The production from non-oil based plants increased at 10.449 GWh from last year. This is shown by the production resulted from coal, natural gas, solar wind and biodisiel power plants, which increased at 12.3%, 7.6%, and 306.7%. respectively.

Selain itu, PLN semakin mengintensifkan penggunaan bahan bakar bio fuel dalam memproduksi tenaga listrik sebagai salah satu upaya mengurangi pemakaian bahan bakar minyak, terutama didaerah-daerah yang memiliki area perkebunan kelapa sawit skala besar, seperti di Kalimantan dan Sumatera. Hal ini telah sejalan dengan program Pemerintah untuk menggunakan energi baru terbarukan.

The Company has also used biofuel in the electricity production as one of the efforts to reduce oil-based fuels, especially in the large scale palm plantation area such as Kalimantan and Sumatera. This is in accordance to the Government's program of using renewable new energy.

Produksi tenaga listrik dari pembangkit sewa dan pembelian dari pihak swasta yang meningkat sebesar 13,7% dan 2,0% dibanding tahun sebelumnya, dilakukan oleh Perseroan untuk menjaga kecukupan daya dan mempertahankan bebas padam untuk daerah di luar Jawa Bali, serta akibat mundurnya jadwal *commissioning of date* (COD) beberapa pembangkit non BBM.

Electricity production from rented plants and purchase from private parties, which rose at 13.7% and 2.0% respectively compared to last year, was conducted to maintain power sufficiency and the outage-free in areas outside Java-Bali. Another reason is the commissioning of data (COD) schedule of some non-oil based fuel plants was delayed.

Kapasitas Terpasang

Kapasitas terpasang pembangkit milik PLN sampai dengan akhir tahun 2014 adalah 39.257,5 MW, meningkat sebesar 14,8% dibanding tahun sebelumnya, sebesar 34.205,64 MW. Hal ini disebabkan telah beroperasinya beberapa pembangkit FTP 1 – 10.000 MW.

Installed Capacity

PLN power plants' installed capacity up to 2014 is 39,257.5 MW, increased by 14.8% compared to last year, which was 34,205.64 MW. The cause of this is the commencement of some FTP-1 – 10,000 MW power plants' operation.

Pembangkit program FTP-I yang telah operasional sampai dengan akhir tahun 2014 adalah:

The FTP-1 power plants which have been operating as of end 2014 are:

Nama	Daya Capacity	Name
PLTU 1 Banten - Suralaya	1 x 625 MW	Steam Power Plant 1, Banten - Suralaya
PLTU 2 Banten - Labuan	2 x 300 MW	Steam Power Plant 2, Banten - Labuan
PLTU 3 Banten - Lontar	3 x 315 MW	Steam Power Plant 3, Banten - Lontar
PLTU 1 Jawa Barat - Indramayu	3 x 330 MW	Steam Power Plant 1, West Java - Indramayu
PLTU 1 Jawa Tengah - Rembang	2 x 315 MW	Steam Power Plant 1, Central Java - Rembang
PLTU 2 Jawa Timur - Paiton	1 x 660 MW	Steam Power Plant 2, East Java - Paiton
PLTU Jawa Timur - Pacitan	2 x 315 MW	Steam Power Plant, East Java - Pacitan
PLTU Pelabuhan Ratu - Jawa Barat	3 x 350 MW	Steam Power Plant, Pelabuhan Ratu - West Java
PLTU Sulawesi Utara - Amurang	2 x 25 MW	Steam Power Plant, North Sulawesi - Amurang
PLTU Sulawesi Tenggara - Kendari	1 x 10 MW	Steam Power Plant, South East - Kendari
PLTU Barru	1 x 50 MW	Steam Power Plant Barru
PLTU Asam-Asam - Kalimantan Selatan	2 x 65 MW	Steam Power Plant Asam - Asam - South Kalimantan
PLTU Tanjung Balai Karimun	1 x 7 MW	Steam Power Plant Tanjung Balai Karimun
PLTU Nagan Raya - Aceh	2 x 110 MW	Steam Power Plant Nagan Raya - Aceh
PLTU Tarahan Baru - Lampung	1 x 100 MW	Steam Power Plant Tarahan Baru - Lampung
PLTU Teluk Sirih - Sumatera Barat	2 x 112 MW	Steam Power Plant Teluk Sirih - West Sumatra
PLTU Bangka - Bangka Belitung	2 x 15 MW	Steam Power Plant Bangka _ Bangka Belitung
PLTU Tanjung Awar-Awar - Jawa Timur	1 x 350 MW	Steam Power Plant Tanjung Awar-Awar - West Java
PLTU 2 Nusa Tenggara Timur - Kupang	2 x 16,5 MW	Steam Power Plant NTT - Kupang

Kapasitas Terpasang Pembangkit (MW)

Power Plant Installed Capacity (MW)

Jenis Pembangkit	2010	2011	2012	2013	**2014**	Plant Type
PLTA	3.522,6	3.511,2	3.515,5	3.519,5	**3.526,9**	Hydro Power Plant
PLTU	9.451,5	12.052,5	14.445,5	15.554,0	**20.451,7**	Steam Power Plant
PLTG	3.223,7	2.839,4	2.973,2	2.893,9	**3.012,1**	Gas Power Plant
PLTGU	6.951,3	7.834,0	8.814,1	8.814,1	**8.886,1**	Combined Cycle Power Plant
PLTP	438,8	435,0	548,0	568,0	**573,0**	Geothermal Power Plant
PLTD	3.267,8	2.568,5	2.598,6	2.847,8	**2.798,6**	Diesel Power Plant
PLTMG	38,8	25,9	-	-	**-**	Gas Engine Power Plant
PLT Surya	0,2	1,2	6,2	7,9	**8,7**	Solar Power Plant
PLT Bayu	0,3	0,3	0,3	0,4	**0,5**	Wind Power Plant
Total Kapasitas Terpasang	**26.895,0**	**29.268,2**	**32.901,5**	**34.205,6**	**39.257,5**	**Total Installed Capacity**

Selain memenuhi kebutuhan daya listrik melalui pembangkit milik sendiri, PLN memenuhi daya listrik melalui pembelian dari pembangkit listrik milik swasta (IPP) dan pasokan dari pembangkit yang disewa. Total kapasitas terpasang pembangkit swasta di tahun 2014 adalah 7.950,7 MW, naik 14,1% dari kapasitas tahun 2013 yang sebesar 7.601,8 MW. Sedangkan kapasitas pembangkit sewa adalah sebesar 4.412,4 MW, meningkat sebesar 8,5% dari angka 4.296,4 MW di tahun sebelumnya.

Total kapasitas terpasang seluruh pembangkit di tahun 2014 sebesar 51.620,6 MW, meningkat sebesar 12,0% dari kapasitas sebesar 46.103,5 MW di tahun 2013, seperti tampak pada tabel berikut.

In addition to generating electric power through its own power plants, the Company also seeks to meet the electricity demand by purchasing electrical power from independent power producers (IPPs) as well as through leased plants. The total installed capacity of IPPs in 2014 is 7,950.7 MW, an increase of 14.1% from 2013 which was 7,601.83 MW. Meanwhile, the capacity of leased plants is 4,412.4 MW, an increase of 8.5% compared to last year's 4,296.43 MW.

The installed capacity of all plants in 2014 is 51.620,6 MW in total, an increase of 12,0% from the total in 2013 of 46,103.5 MW, as demonstrated in the table below.

Status Kepemilikan	2013	2014	% Kontribusi		% Perubahan	Ownership
			2013	2014		
Milik PLN	34.205,24	39.257,55	74,2%	76,1%	12,2%	Owned by PLN
Swasta (IPP)	7.601,83	7.950,68	16,5%	15,4%	14,1%	Independent Power Producer
Sewa Pembangkit	4.296,43	4.412,37	9,3%	8,5%	11,1%	Leased Power Plant
Jumlah	**46.103,50**	**51.620,60**	**100,0%**	**100,0%**	**12,0%**	**Total**

Pemeliharaan Pembangkit

Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan tenaga listrik, PLN telah melakukan pemeliharaan pembangkit yang berada di seluruh Indonesia. Sepanjang tahun 2014, total pemeliharaan pembangkit yang telah dilakukan terdiri dari 693 unit pembangkit dengan total kapasitas 20.223 MW, dengan rincian:

1. Pembangkit di Jawa Bali sebanyak 22 unit - kapasitas 9.149 MW.
2. Pembangkit di Sumatera sebanyak 58 unit - kapasitas 1.956 MW.
3. Pembangkit di Indonesia Timur sebanyak 480 unit – kapasitas 1.201 MW.
4. Pembangkit pada Anak Perusahaan PT Indonesia Power dan PT PJB sebanyak 133 unit – kapasitas 8.617 MW.

Perseroan memutuskan menunda pemeliharaan beberapa stasiun pembangkit lain, khususnya yang berada di luar Jawa Bali, dengan pertimbangan: (i) menghindari terjadinya kekurangan pasokan listrik; (ii) mempertahankan bebas pemadaman bergilir. Namun demikian, penundaan pemeliharaan ini tetap memperhatikan toleransi keamanan mesin pembangkit.

Power Plant Maintenance

Keeping the electric power supply stability, PLN has maintained the power plants throughout Indonesia. In 2014, the total maintained power plants is 693 units with a total capacity of 20,223 MW, as detailed below:

1. Power plants in Java - Bali as many as 22 units – 9,149 MW in capacity.
2. Power plants in Sumatra as many as 58 units – 1,956 MW in capacity.
3. Power plants in East Indonesia as many as 480 units – 1,201 MW in capacity.
4. Power plants in the subsidiary of PT Indonesia Power and PT PJB as many as 133 units – 8,617 MW in capacity.

The Company decided to postpone maintaining some other power plants, particularly outside Java-Bali considering: (i) to avoid electricity supply insufficiency; (ii) to maintain rolling blackout suppression. However, the postponed maintenance remains taking the machine security into account.

Biaya Pokok Penyediaan

Untuk meningkatkan kinerja, Perseroan berupaya menurunkan BPP melalui penerapan berbagai program dengan tujuan menurunkan komponen biaya yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap BPP. Salah satu komponen utama dari BPP adalah biaya pembangkitan yang sangat dipengaruhi oleh jenis energi primer yang digunakan stasiun pembangkitan.

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) adalah:

1. Mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang relatif lebih mahal dan menggantikannya dengan sumber energi primer lain seperti batubara dan gas;
2. Meningkatkan efisiensi distribusi dan transmisi serta menjaga adanya kasus-kasus pencurian listrik dengan tujuan mengurangi susut jaringan;

Basic Cost of Electricity Production

For better performance, PLN sets the calculation of Basic Cost of Electricity Production (BPP) through the implementation of various programs, with the goal of lowering the cost components that significantly influence the BPP. One of the main components of the BPP is the cost of power generating that is highly influenced by the type of primary energy used.

Some of the PLN's efforts of reducing the BPP are:

1. Reducing the use of relatively expensive fuels and replacing them with other primary energy sources, such as coal and gas.
2. Increasing the efficiency of distribution and transmission as well as preventing the electricity theft cases, aimed at reducing network losses.

3. Meningkatkan keandalan pengelolaan sistem distribusi, transmisi dan pembangkitan melalui pemeliharaan secara berkala atas fasilitas tersebut dengan tetap memperhatikan pengaturan penyaluran tenaga listrik dan beban listrik

Berbagai program yang dijalankan dengan konsisten tersebut telah memberikan hasil nyata berupa relatif terjaganya besaran BPP dalam tiga tahun terakhir, seperti ditunjukkan pada grafik berikut:

Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) (Rp/kWh)
Basic Cost of Electricity Production (Rp/kWh)

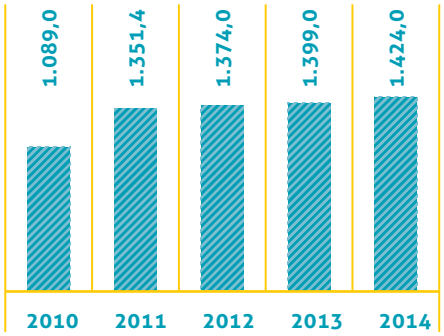

PLN berupaya meningkatkan penggunaan energi primer batubara dan gas sebagai sumber bahan bakar utama pengganti minyak bumi yang mahal. Disamping itu Perseroan juga mengembangkan penggunaan sumber energi baru dan terbarukan seperti panas bumi, bayu, surya, dan *bio fuel* (CPO) dengan tujuan menurunkan BPP. Namun demikian PLN menghadapi kendala dalam meningkatkan secara substansial penggunaan energi primer, terutama gas dan panas bumi dalam mengembangkan stasiun pembangkit yang dengan biaya per kWh yang lebih murah. Kendala yang dihadapi meliputi:

1. Ketiadaan jaminan pasokan gas yang cukup dan konsisten. Perseroan tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan dan menjamin pemenuhan gas untuk kebutuhan bahan bakar pembangkit dari pasar bebas.
2. Belum adanya aturan yang jelas mengenai perijinan pembangunan pembangkit listrik panas bumi (PLTP) yang sumbernya banyak berada di area hutan lindung. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan yang memungkinkan pembangunan pusat PLTP di kawasan hutan lindung. Namun demikian peraturan lanjutan (PP dan turunan aturan lainnya) belum ada, sehingga potensi pembangkitan dari area prospek belum dapat dioptimalkan dalam waktu dekat.
3. Keterbatasan kapasitas dari stasiun pembangkit bertenaga bayu dan surya, sehingga lebih cocok untuk digunakan pada sistem kecil.

Mengingat pentingnya perhitungan biaya pokok pengadaan ini terhadap keseluruhan operasional Perseroan, PLN berupaya meningkatkan akuntabilitas dan akurasi pencatatan transaksi keuangan (termasuk penerimaan pembayaran dari pelanggan) dengan menerapkan berbagai program, meliputi:

3. Improving the reliability of the management system of distribution, transmission and generation through regular maintenance of the facility by taking into account the arrangement of power distribution and electrical loads

A variety of programs that have been implemented consistently deliver tangible results in the form of stable BPP in the last three years. This is demonstrated in the following graph:

PLN is working to increase the use of primary energy sources of coal and natural gas as the primary fuel to replace oil based fuels, which are high cost. Besides that PLN also develops the use of new and renewable energy sources such as geothermal, wind, solar, and bio fuel (CPO) in order to lowering the BPP. Nonetheless, PLN is still facing barriers to increase the use of primary energy significantly especially natural gas and geothermal in developing power plants with lower costs per kWh. These barriers are:

1. Lack of adequate and consistent guarantees of gas supply. The Company does not have the full authority to establish and ensure the fulfillment of gas needs for its plants from the free market.
2. Lack of clear regulations on permit of developing geothermal power plants (PLTP), whose source mostly located in conservation forest area. The Republic of Indonesia Forestry Minister issued the Regulation Number P.18/Menhut-II/2011 on the guidelines for borrow-to-use permits for forest areas which allows the construction of geothermal power plant station in protected forest area. However, there are no the derivative regulations yet, so the potentials of power generation from the prospective area could not yet be optimized in the near future.
3. Limited capacity from solar and wind power plants making them more suitable for use on small systems.

Considering the importance of basic cost of electricity production to overall operations of the company, PLN is working to improve accountability and accuracy in recording of financial transactions (including the receipt of payments from customers) by implementing several programs that covers:

1. Perbaikan sistem akuntansi pencatatan keuangan dengan menerapkan PSAK terbaru seusai ketentuan.
2. Perbaikan sistem transaksi keuangan dengan menerapkan P2APST dan AP2T sebagai bagian perbaikan sistem bisnis ini.
3. Pengelolaan seluruh transaksi keuangan secara terpusat.
4. Bekerjasama dengan BPK untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pencatatan dan pengelolaan keuangan.
5. Bekerjasama dengan KPK untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.

1. Improvement in financial records accounting system by implementing the latest GAAP accordingly
2. Improvement in financial transaction system by implementing P2APST and AP2T as the revision of the business system
3. Centralized management of financial transaction
4. Cooperation with Supreme Audit Board (BPK) to improve accountability and transparency in record keeping and financial management
5. Cooperation with Anti Corruption Commission (KPK) to improve accountability and prevent actions that may harm the company and/or the country

Bauran Energi

Sepanjang tahun 2014, PLN mengintensifkan upaya mengurangi ketergantungan akan bahan bakar minyak secara bertahap. Hal ini terlihat dari pencapaian bauran energi, dimana produksi tenaga listrik dari pembangkit BBM hanya sebesar 11,37% lebih baik dibanding tahun sebelumnya sebesar 12,35%. Produksi dari pembangkit non BBM telah mencapai 88,63% lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 87,65%, seperti tampak pada tabel berikut:

Fuel Mix

Throughout 2014, PLN has put out efforts to reduce dependancy on oil based fuel. This is reflected in the fuel mix achievement, where electric power produced from oil-based plants only amounted to 11,37%, better than 12.35% of last year. Meanwhile production from non-oil based fuel power plant has reached 88,63% compared to the previous year of 87.65%, as shown in the table below:

Bauran Energi (%)
Fuel Mix (%)

Jenis Pembangkit	2011	2012	2013	**2014**	Plant Type
BBM	24,78	14,97	12,35	**11,37**	Fuel Oil
Non-BBM	75,22	85,03	87,65	**88,63**	Non Fuel Oil
• Batubara	42,39	50,38	51,35	**52,59**	• Natural Gas
• Gas Alam	20,86	23,41	23,96	**24,58**	• Coal
• Panas Bumi	5,20	4,85	4,49	**4,39**	• Geothermal
• Air	6,77	6,39	7,83	**6,63**	• Hydro
• Surya dan Bayu	-	-	0,02	**0,02**	• Solar and Wind
• Biodiesel, Olein, dan Biomass	-	-	-	**0,41**	• Biodiesel, Olein, and Biomass

Catatan:
Bauran energi sudah termasuk produksi proyek yang belum COD

Notes:
Fuel mix comprises own production (including from projects prior to COD)

Pada tabel diatas terlihat bahwa bauran energi dari pembangkit berbahan bakar batubara dan gas alam meningkat dibanding tahun lalu. Hal ini sejalan dengan meningkatnya produksi tenaga listrik dari pembangkit non BBM, yang disebabkan oleh:

1. Telah beroperasinya beberapa pembangkit FTP I – 10.000MW yang berbahan bakar batubara
2. Adanya pasokan gas alam, sehingga pembangkit berbahan bakar gas alam dapat menghasilkan produksi tenaga listrik yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya dengan biaya per kWh yang lebih rendah.
3. Semakin intensifnya penggunaan CNG untuk pembangkit peaker.

The table above shows that fuel mix from coal, natural gas and hydro power plant has risen compared to last year. This goes alongside with the increase of production from non oil based fuel power plants, which was caused by:

1. Some FTP I – 10,000 MW coal power plant projects have started the operation
2. Natural gas supply is available, thus the natural gas-fired power plants can produce higher electric power in comparison to last year, at lower cost per kWh
3. Intensive use of CNG for peaker plant

Konsumsi dan Harga Energi Primer

Penambahan kapasitas pembangkit dan peningkatan produksi tenaga listrik seiring dengan meningkatnya pemakaian bahan bakar primer yakni batubara dan gas alam. Peningkatan volume pemakaian batubara dan gas alam ini merupakan realisasi dari upaya yang dilakukan Perseroan untuk menekan pemakaian bahan bakar minyak yang harganya lebih mahal.

Primary Energy Consumption and Price

The increase in the power plant capacity and electricity production volume makes the use of primary fuels, i.e. coal and gas, rose. This increase of coal and gas use is resulted from PLN's efforts to suppress the use of oil-based fuel, which is more expensive.

Memaksimalkan Penggunaan BBN sebagai sumber energi PLTU baru terbarukan

Optimizing Utilization of Bio Fuel as Renewable Energy Source for Steam Power Plant

Untuk memaksimalkan bauran energi, menekan biaya produksi dan memanfaatkan ketersediaan bahan baku nabati (BBN) sebagai sumber energi pembangkit PLTU, PLN bersama Pemerintah (melalui Kementerian ESDM), menargetkan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) atau biofuel pada pembangkit listrik sebesar 20% dari total kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2014 atau sebesar 808 ribu kiloliter dan pemanfaatan *Pure Palm Oil* (PPO) sebesar 6% atau setara 34 ribu kiloliter.

To optimize fuel mix, suppress production cost and utilizing the availability of bio fuel as renewable energy source for steam power plant, PLN together with the government (through Ministry of ESDM (Energy and Mineral Resources)), is targetting the use of biofuel for power plant to reach 20% from total of oil based fuel demand in 2014 or 808 thousands kiloliter of Pure Palm Oil (PPO) utilization as much as 6% or equals to 34 thousand kiloliter.

Pemenuhan target tersebut cukup menantang, mengingat adanya keterbatasan pasokan BBN untuk wilayah-wilayah dengan ketergantungan terhadap BBM yang tinggi, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Penggunaan BBN sementara ini hanya dapat diaplikasikan untuk wilayah Indonesia bagian Barat (Sumatera dan Kalimantan).

This may be a quite challenging target, given the limited bio fuel supplies for areas whose dependance of oil based fuel is still high, especially in East Indonesia. The use of bio fuel is currently applied only in some area in Indonesia (Sumatra and Kalimantan).

Oleh karena itu PLN menjalin kerjasama dengan Indonesia *Clean Energy Development* (ICED) *Project* – USAID, di mana program ICED ini telah memberikan dukungan yang kesekian kalinya dalam rangka mendorong pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. PLN juga mengundang narasumber dari perusahaan listrik di Hawaii, Hawaiian Electric Company, Inc. (HECO) yang telah berhasil menerapkan penggunaan biofuel pada Pembangkit Listrik Gas Turbin, sehingga terlepas dari ketergantungan terhaap BBM yang mahal.

To that extend, PLN starts to cooperate with Indonesia Clean Energy Development (ICED) Project – USAID, wherein this ICED program has given definite and constant support to force the use of renewable energy in Indonesia. PLN also invites experts from various companies in Hawaii, Hawaiian Electric Company, Inc. (HECO) who successfully implementing the utilization of biofuel to turbin gas power plant, so that it is freed from the issue and dependency of high cost oil based fuel.

PLN telah menerapkan penggunaan BBN dan PPO ini pada beberapa pembangkit di Sumatera dan Kalimantan tengah yang memiliki sumberdaya melimpah dari perkebunan skala besar di wilayah tersebut. Dimasa mendatang aplikasi penggunaan BBN dan PPO akan ditingkatkan, sehingga persentasi bauran energi dari sumber energi baru terbarukan ini meningkat, dan biaya pokok produksi listrik dapat dikurangi.

PLN has implemented the use of bio fuel and pure palm oil in some power plants in Sumatera and Central Kalimantan that have abundant natural resources from large scale palm in those areas. In the future, the implementation of bio fuel and pure palm oil usage will surely be improved, so that the percentage of fuel mix from renewable energy source will increase, and consequently reducing the basic cost of electricity production.

Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2012 pemakaian bahan bakar minyak mengalami penurunan, dan sebaliknya pemakaian batubara dan gas alam meningkat. Hal ini disebabkan (i) telah beroperasinya sebagian pembangkit FTP I – 10.000 MW yang berbahan bakar batubara, serta (ii) adanya pasokan gas alam yang sehingga pembangkit berbahan bakar gas alam dapat memproduksi tenaga listrik.

The following table shows that since the use of oil based fuel underwent a decrease in 2012, on contrary the use of coal and natural gas was increasing. This is because (i) some coal FTP I – 10,000 MW coal power plant projects have started the operation, and (ii) natural gas supply is available, thus the natural gas-fired power plants can produce higher electric power.

Pemakaian Energi Primer Primary Energy Use

Jenis Bahan Bakar	2010	2011	2012	2013	**2014**	Fuel Type
BBM (kilo liter)	9.324.934	11.466.840	8.214.749	7.474.492	**7.431.004**	Oil-based fuel (kilo liter)
Batubara (ton)	23.958.699	27.434.163	35.514.791	39.601.034	**44.604.981**	Coal (ton)
Gas Alam (MMSCF)	283.275	285.722	365.927	409.890	**450.190**	Natural Gas (MMSCF)

Realisasi harga pengadaan energi primer untuk tahun 2014 mengalami kenaikan yang bervariasi sebagai berikut:

The realization of primary energy procurement price for 2014 varies in the increase, as follows:

Harga Energi Primer
Primary Energy Price

Jenis Bahan Bakar	2011	2012	2013	**2014**	Fuel Type
BBM (Rp/liter)	7.585,54	8.629,14	9.123,62	**9.787,43**	Oil-based fuel (Rp/liter)
Batubara (Rp/kg)	644,98	737,95	643,13	**710,71**	Coal (Rp/kg)
Gas Alam (Rp/MSCF)	39.867,32	62.167,67	87.011,44	**100.905,29**	Natural Gas (Rp/MMSCF)
Gas Alam (USD/MSCF)	4,54	6,63	8,33	**8,49**	Natural Gas (USD/MMSCF)

Tarif Tenaga Listrik

Komponen utama pendapatan PLN adalah penjualan tenaga listrik dengan dasar perhitungan Tarif Tenaga Listrik (TTL). TTL ditetapkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian digunakan sebagai dasar menghitung jumlah tagihan rekening listrik kepada pelanggan. Besaran TTL ditinjau dan ditetapkan secara berkala dan terdiri dari berbagai kelompok tarif sesuai dengan kelompok pelanggan.

TTL ditetapkan dengan memperhitungkan kemampuan pelanggan dan mempertimbangkan daya terpasang dari masing-masing kelompok pelanggan. Semakin tinggi daya terpasang, maka akan semakin besar pula besaran TTL yang dikenakan. Semakin besar volume pemakaian listrik, maka akan semakin besar pula faktor penggali dalam menetapkan TTL yang akan ditagih. Penerapan faktor volume ini dimaksudkan agar para pelanggan menggunakan tenaga listrik dengan lebih hemat dan bijaksana.

Sepanjang tahun 2014 pemerintah telah memberlakukan tarif tenaga listrik baru yang dituangkan dalam:

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.09 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN yang berlaku mulai 1 Mei 2014.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.19 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Perubahan atas Permen 09 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN.

Electricity Tariff

The sale of electric power with calculation basis of electricity tariff is the main component of PLN's revenues. The tariffs are set by the government and the House of Representatives, which is then used to calculate total electricity bills to customers. Electricity tariffs are reviewed periodically and composed of different tariffs according to the customer group.

In general, electricity tariffs are set taking into account the ability of customers and the installed power of each customer group. The higher the installed power, the greater tariff imposed. The greater the volume of electricity consumption, the greater the multiplier in setting the tariff. The application of this volume factor is meant for the customers to use electricity more sparingly and wisely.

Throughout 2014, the government has imposed a new electricity tariffs which stated in:

1. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 09 of 2014 dated April 1, 2014 on Electricity Tariff supplied by Limited Liability Company (Persero) PT PLN which applied from May 1, 2014.
2. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No.19 of 2014 dated June 30, 2014 on Amendment of Minister Regulation No.09 of 2014 dated April 1, 2014 on Electricity Tariff supplied by Limited Liability Company (Persero) PT PLN

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.31 Tahun 2014 tanggal 5 November 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (persero) PT PLN.

Dengan Substansi pokok adalah penyesuaian tarif pada beberapa golongan tertentu dan penerapan tarif *automatic* tarif *adjustment* yang akan mulai berlaku 1 Januari 2015. Tarif *adjustment* ini diberlakukan setiap bulan menyesuaikan dengan perubahan nilai tukar rupiah, harga bahan bakar dan inflasi bulanan. Tarif *adjustment* ini diberlakukan pada pelanggan Rumah Tangga dengan daya 1300 VA ke atas, industri dengan daya 6600 VA keatas, kantor pemerintah 6600 VA ke atas dan Lampu Penerapan Jalan Umum. Tarif *adjustment* ini tidak berlaku untuk pelanggan rumah tangga kecil 450 VA dan 900 VA Bisnis dan Industri kecil dan Pelanggan Sosial.

Adapun formula penerapan tarif *adjustment* sesuai adalah sebagai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.31 Tahun 2014.

3. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No.31 of 2014 dated November 5, 2014 on Electricity Tariff supplied by Limited Liability Company (Persero) PT PLN.

With the fundamental substance is tariff adjustment on some specific classes and application of automatic tariff adjustment which applied from January 1, 2015. Tariff adjustment applied every month that adapting on the change in the exchange rate, fuel prices and monthly inflation. Tariff adjustment applied on Households customer with 1300 VA and above, industry with power 6600 VA and above, government offices of 6600 VA and above and Application of Public Roads Lighting. Tariff adjustment does not apply to small household customers of 450 VA and 900 VA for small Business and Industry and Social Customer.

The application of tariff adjustment formula regarding to the Regulation of Energy and Mineral Resources Minister No.31 of 2014.

I. Formula Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik The Formula of Electricity Tariff Adjustment	
%TA	% (Kurs x Δ Kurs) = % (K-icp x Δ ICP) + % (K-inflasi x Δ inflasi) % (Rate x Δ Rate) = % (K-icp x Δ ICP) + % (K-inflation x Δ inflation)
TA	Tarif *Adjustment* dihitung berdasarkan perubahan Biaya Pokok Penyediaan tenaga listrik (BPP) sesuai APBN 2013 terhadap nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs), Indonesia Crude Price (ICP), dan/atau inflasi. Tariff Adjustment calculated based on the change of Basic Cost of Electricity Production (BPP) regarding State Budget 2013 against US Dollar exchange rate and Indonesian rupiah exchange rate, Indonesia Crude Price (ICP), and/or inflation.
Kurs	Koefisien perubahan Kurs Coefficient of Changing Rate
Δ kurs	Selisih antara kurs yang baru dengan acuan sesuai APBN 2013 Difference between new rate with reference to the state budget 2013
K-ICP	Koefisien perubahan ICP Coefficient of changing ICP
Δ ICP	Koefisien perubahan inflasi Coefficient of changing inflation
K-inflation	Koefisien perubahan inflasi Coefficient of changing inflation
Δ Inflasi	Selisih antara inflasi yang baru dengan acuan sesuai APBN 2013 Difference between new inflation with reference to the state budget 2013
II. Penetapan Koefisien K Establishment of K Coefficient	
Koefisien K ditetapkan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara setelah terbitnya Undang -Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun yang bersangkutan. The K coefficient is set by Directors of the Company (Persero) of PT PLN after the publication of Law on State Budget for the related year.	
TB:	TL x (1+%TA)
TB	Tarif Tenaga Listrik yang berlaku setelah Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik *(Tariff Adjustment)* Electricity Tariff applied after Tariff Adjustment
TL	Tarif Tenaga Listrik yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri ini. Electricity Tariff applied based on Minister Regulation
%TA	Persentase Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik *(Tariff Adjustment)* The percentage of Tariff Adjustment

Sehingga rata-rata Tarif Tenaga Listrik yang dikenakan terhadap pelanggan sesuai golongan tarif sepanjang tahun 2014 adalah sebagai berikut.

Therefore the average Selling Price through 2014 applied to customers according to its tariff groups is shown as below.

Tarif Listrik Rata-rata Menurut Golongan, Tahun 2014 (Rp/kWh)
Average Electricity Tariff Based on Groups, 2014 (in Rp/Kwh)

Golongan Tarif Tariff Class	Tegangan Voltage	TTL (Rp kWh) Tariff	BPP (Rp/kWh) Basic Cost of Electricity Production	Subsidi (Rp/kWh) Subsidy (RpkWh)
S.2 / 450 VA	TR	316,43	1.553,59	1,237,16
S.2 / 900 VA	TR	440,80	1.553,59	1,112,79
S.2 / 1.300 VA	TR	726,54	1.553,59	827,05
S.2 / 2.200 VA	TR	775,52	1.553,59	778,07
S.2 / > 3.500 s/d 200 kVA	TR	923,23	1.553,59	630,36
S.3 > 200 kVA	TM	921,69	1.347,53	425,84
R.1 / s/d 450 VA	TR	414,88	1.553,59	1,138,71
R.1 /900 VA	TR	586,47	1.553,59	967,13
R.1 / 1.300 VA	TR	1.105,44	1.553,59	448,15
R.1 / 2.200 VA	TR	1.127,96	1.553,59	425,63
R.2 /> 3.500 s/d 5.500 VA	TR	1.230,56	1.553,59	323,03
R.3/ > 6.600 VA	TR	1.493,20	1.553,59	60,39
B.1 / s/d 450 VA	TR	504,70	1.553,59	1,048,89
B.1 /900 VA	TR	601,54	1.553,59	952,05
6.1 /1.300 VA	TR	989,31	1.553,59	564,28
B.1 / 2.200 s/d 5.500 VA	TR	1.134,77	1.553,59	418,82
B.2 / > 6.600 s/d 200 kVA	TR	1.520,75	1.553,59	32,84
B.3 / > 200 kVA	TM	1.223,97	1.347,53	123,55
1.1 /450 VA	TR	446,04	1.553,59	1,107,55
1.1 /900 VA	TR	567,22	1.553,59	986,37
1.1 / 1.300 VA	TR	953,23	1.553,59	600,36
1.1 / 2.200 VA	TR	988,41	1.553,59	565,18
1.1 / 3.500 s/d 14 kVA	TR	1.194,70	1.553,59	358,89
1.2/ > 14 kVA s/d 200 kVA	TR	1.106,80	1.553,59	446,79
1.3/ > 200 kVA	TM	997,99	1.347,53	349,54
1.4/ > 30.000 kVA	TT	920,47	1.266,23	345,76
P.1 / sd 450 VA	TR	671,99	1.553,59	881,60
P.1 1900 VA	TR	766,31	1,553,59	787,28
P.1 / 1.300 VA	TR	1.093,75	1,553,59	459,85
P.1 / 2.200 s/d 5.500 VA	TR	1.116,62	1.553,59	436,97
P.1 / > 6.600 std 200 kVA	TR	1.515,24	1.553,59	38,35
P.2 / > 200 kVA	TM	1.114,05	1.347,53	233,47
P.3	TR	1.107,32	1.553,59	446,27
T / > 200 kVA	TM	766,56	1.347,53	580,97
C / > 200 kVA	TM	715,25	1.347,53	632,27
L	TM	1.151,32	1.347,53	196,20

Subsidi Listrik

Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif.

PLN memerlukan subsidi, mengingat harga penjualan tenaga listrik saat ini masih berada dibawah rata-rata biaya pokok penyediaan listrik (sudah termasuk margin). Hal ini dapat digambarkan pada grafik berikut:

Electricity Subsidy

Electricity subsidies are calculated from the negative difference between the selling price of electricity on average (Rp/kWh) of each tariff group minus the basic cost of electricity production (Rp/ kWh) on the voltage at each tariff group multiplied by sales volume (kWh) for each tariff class.

PLN requires a subsidy, given the prices of electricity sales that occur at this time continue to be below the average basic cost of electricity production (including margin). This can be illustrated in the following graph:

Tarif Tenaga Listrik dan Besaran Subsidi per Golongan Tarif (Tegangan Rendah)
Electricity Tariff and Subsidy Amount per Tariff Group (Low Voltage)

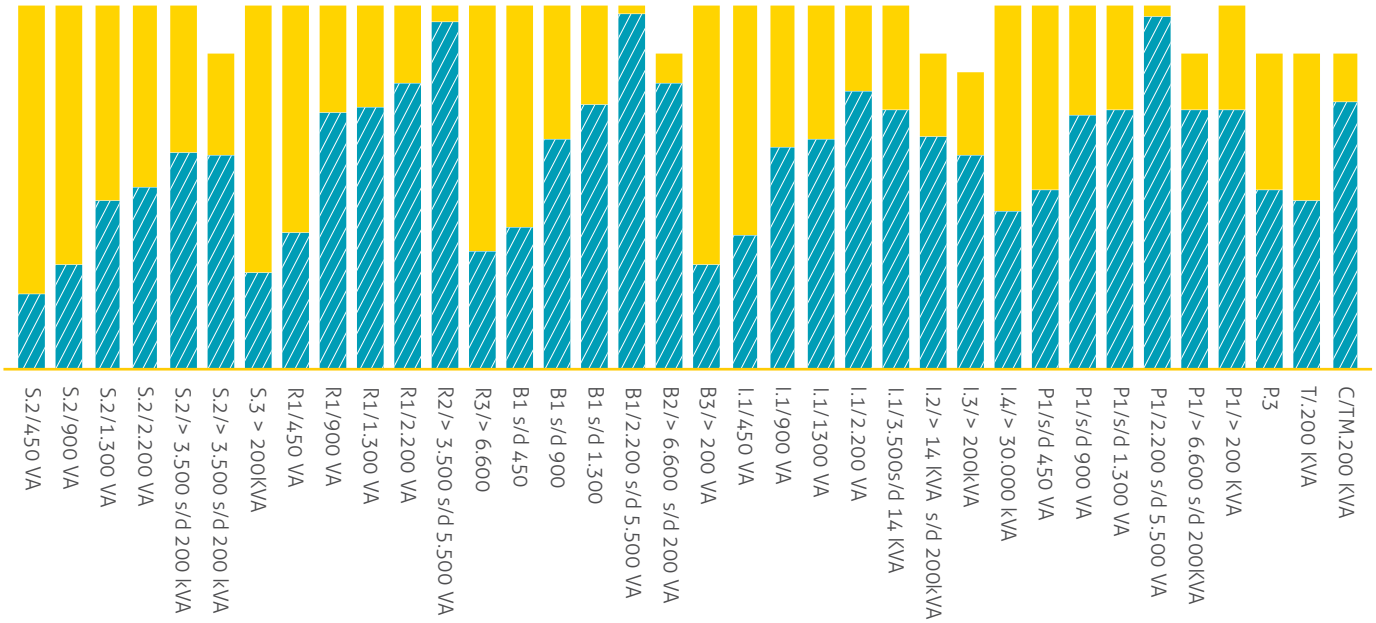

Akumulasi besaran subsidi yang diperlukan oleh Perseroan tersebut ditentukan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, diputuskan untuk masing-masing tahun operasional dan dibayarkan oleh Pemerintah sesuai jadwal realisasi APBN tahun berjalan.

The accumulated amount of subsidy required by the Company is determined by the Government with the approval of Parliament, and decided for each operational year and paid by the government according to the schedule the budget outcome for the ongoing year.

BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula tertentu dengan telah memasukan perhitungan tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Kelistrikan.

The basic cost of electricity production is calculated based on a certain formula by taking into account the calculation of the transmission and distribution network losses, set by the Minister of Energy and Mineral Resources, specifically the Directorate General of Electricity.

Subsidi listrik yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2014 awalnya adalah sebesar Rp71,36 triliun yang telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI serta telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.: 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

The electricity subsidy allocated in the 2014 State Budget amounts to Rp71.36 trillion, which was approved by the RI House of Representatives, and the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2013 on State Budget of Budget Year 2014 has been passed.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tersebut dijelaskan bahwa:

1. Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp71,36 triliun.
2. Subsidi listrik sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2013 (audited) sebesar Rp3,5 triliun.
3. Pemberian margin kepada PT PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) tahun 2014.

Article 8 Law Number 23 of 2013 says that:

1. It is estimated that electricity subsidy in Budget Year 2014 amount to Rp71.36 trillion.
2. Such amount includes the payment of electricity subsidy deficiency of 2013 (audited) amounting to Rp3.5 trillion.
3. Provision of margin to PT PLN (Persero) in order to meet the requirements of PT PLN investment financing is set to 7% in 2014.

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 kemudian disetujui dan disahkan oleh DPR – RI dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

The amendment to the RI Law Number 23 of 2013 has been approved and passed by the RI House of Representatives by the issuance of Law Number 12 of 2014 on the Amendment to Law Number 23 of 2013 on State Budget of Budget Year 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 perubahan atas UU 23 tahun 2013 tersebut dinyatakan bahwa:

1. Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp103,82 triliun.
2. Subsidi listrik sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2013 *(audited)* sebesar Rp21,79 triliun.
3. Pemberian margin kepada PT PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) tahun 2014.

Alokasi subsidi listrik pada APBN TA 2014 telah ditindaklanjuti dengan diterbitkan dan disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. : SP DIPA-999-07.1.979321/2014 tanggal 2 Januari 2014, yang mencantumkan pagu subsidi listrik sebesar Rp71.36 triliun.

Sedangkan Revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No.: DIPA-999-07.1.979321/2013 tanggal 9 Januari 2013 untuk alokasi subsidi listrik pada APBN-Perubahan TA 2014 yang mencantumkan pagu subsidi listrik sebesar Rp103.82 triliun telah diterbitkan dan disahkan.

Pencairan subsidi listrik oleh Pemerintah cq. Kementerian Keuangan Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.02/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-25/MK.2/ 2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Penjelasan Tambahan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.02/2013 dengan jumlah sebesar Rp70,13 triliun.

Pelaksanaan pembayaran subsidi listrik sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:

1. Pagu subsidi listrik tahun 2014 termasuk kekurangan subsidi listrik tahun 2013 hasil audit BPK sebesar Rp101,82 triliun.
2. Realisasi pembayaran subsidi listrik tahun 2014 termasuk kekurangan subsidi listrik tahun 2013 hasil audit BPK sebesar Rp101,82 triliun.
3. Sisa pagu subsidi listrik tahun 2014 sebesar Rp1.169.005.

In the amendment of Law Number 23 of 2013, i.e. Law Number 12 of 2014 says that:

1. It is estimated that electricity subsidy in Budget Year 2013 to amount to Rp103.82 trillion.
2. Such amount includes the payment of electricity subsidy deficiency of 2013 (audited) amounting to Rp21.79 trillion.
3. Provision of margin to PT PLN (Persero) in order to meet the requirements of PT PLN investment financing is set to 7% in 2014.

The electricity subsidy allocation in State Budget 2014 has been followed up by the issuance and passing of Budget Implementation Checklist (DIPA) No.:DIPA-999-07.1.979321/2014 dated January 2, 2014 that states the electricity subsidy ceiling amounting to Rp71.36 trillion.

Meanwhile the revision of Budget Implementation Checklist (DIPA) No.:DIPA-999-07.1.979321/2013 dated January 9, 2013 for allocation of electricity subsidy in State Budget 2014 that states the electricity subsidy ceiling amounting to Rp103.82 trillion has been established and affirmed.

Disbursement of electricity subsidy by the Government, in this case the Ministry of Finance, for 2014 was pursuant to the Finance Minister Regulation No. 170/PMK.02/2013 dated 28 November 2013 on Procedures for the Provision of Budget, Calculation, Payment and Accountability Electricity Subsidy and Finance Minister Decree Number S-25/MK.2/ 2014 dated 5 March 2014 on Additional Declaration for Finance Minister Regulation Article 9 Number 170/PMK.02/2013 at the amount of Rp70.13 trillion.

The subsidy payments in 2014 were as follows:

1. Electricity subsidy ceiling 2014 including the deficiency in 2013 according to Supreme Audit Board's audit results of Rp101.82 trillion
2. Realization of electricity subsidy 2014 payment including the deficiency in 2013 according to Supreme Audit Board's audit results of Rp101.82 trillion
3. The remaining electricity subsidy ceiling 2014 amounts to Rp1,169,005.

Besaran Subsidi Listrik Pemerintah
Government Subsidy

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Subsidi Pemerintah (juta Rupiah)	53.719.818	58.108.418	93.177.740	103.331.285	101.207.859	**99.303.250**	Government subsidy (million Rupiah)

Susut Jaringan

Perseroan berusaha untuk menurunkan angka susut jaringan sebagai salah satu ukuran keberhasilan peningkatan program efisiensi serta upaya menurunkan BPP untuk mengurangi besaran subsidi.

Hasilnya, realisasi pencapaian susut jaringan pada tahun 2014 sebesar 9,71%, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 9,91%, dengan penjelasan sebagai berikut:

Network Losses

The Company seeks to reduce the amount of network losses as a measure of success in improving program efficiency and effort to reduce the BPP so as to reduce the amount of subsidy.

Network losses in 2014 amounted to 9.71%, better than previous years at 9.91%, due to:

1. Jawa Bali
   - Realisasi susut transmisi pada tahun 2014 sebesar 2,49% diatas target RKAP 2,35%. Hal ini merupakan konsekuensi dari kebijakan pengoperasian sistem dengan *merit order*. Kesiapan kapasitas pembangkit di bagian timur Pulau Jawa lebih besar dan harganya lebih murah *(merit order)* dibandingkan dengan pembangkit di bagian barat Pulau Jawa. Sementara itu beban lebih besar berada di bagian barat Jawa. Oleh karena itu untuk dapat menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) maka aliran daya untuk memasok beban-beban di bagian barat Jawa dialirkan dari bagian timur Jawa.
   - Sejak beroperasinya kabel laut Jawa-Bali, maka pembangkit-pembangkit berbahan bakar minyak yang beroperasi di Pulau Bali dimatikan dan pasokkannya dikirim dari sistem transmisi kabel laut Jawa - Bali.
2. Sumatera
   - Panjang rata-rata jaringan distribusi tegangan menengah di Sumatera masih terlalu panjang yaitu sebesar 57 kms dibandingkan dengan panjang rata-rata jaringan distribusi tegangan menengah di Jawa Bali sebesar 25 kms
   - *Workplan* Teknis untuk mengatasi susut teknis tersebut baru dapat dikerjakan fisiknya pada akhir tahun 2014, maka *effort workplan* susut teknis baru bisa berkontribusi pada tahun 2015.
3. Indonesia Timur
   - Merupakan dampak dari defisit pembangkit yang menyebabkan dilakukannya *brownout* untuk mengurangi pelanggan padam (mengutamakan pelayanan).
   - Defisit pembangkit menyebabkan banyaknya permohonan pasang baru pelanggan yang tidak dapat terlayani dan berpotensi menggunakan listrik secara ilegal.
4. Hal-hal Lain
   - Masih banyaknya PJU yang ilegal dan pemakaian ilegal.
   - Masih terjadinya kesalahan baca meter.
   - Tingginya pertumbuhan beban.

1. Jawa Bali
   - Realization of transmission losses in 2014 is 2.49% above the CBP's target of 2.35%. This is a consequence of operation policy system with merit order. Generating capacity readiness in the eastern Java is bigger and cheaper (merit order) compared with plants in the western Java. Meanwhile, the larger load is in the western Java. Therefore, in order to suppress Base Supply (BPP), so power flow to supply the loads in the western Java distributed from the eastern Java.
   - Since the operation of Java-Bali's submarine cables, oil-based fuel plants that operates in Bali is turned off and the supply sent from the Java-Bali's submarine cable transmission systems.
2. Sumatera
   - The average length of medium voltage distribution network in Sumatra is still too long which ic 57 kms compared to an average length of a medium voltage distribution network in Java and Bali by 25 kms.
   - Technical work plan to address the technical losses can only be done physically by the end of 2014, the effort of new technical losses workplan can be contributed in 2015.
3. East Indonesia
   - The impact of power plant deficit that led to a brownout to reduce outages (customer's priority service).
   - The deficit of power plant causesa lot of new installation request which can not be served and potentially using electricity illegally.
4. Others
   - There are still many illegal street lighting (PJU) and illegal usage.
   - There are still the meter reading errors.
   - The Increasing load growth.

Susut Jaringan
Network Losses

	2010	2011	2012	2013	**2014**	
Susut Distribusi	764%	7,34%	6,95%	7,77%	**7,52%**	Distribution Losses
Susut Transmisi	225%	2,25%	2,44%	2,33%	**2,37%**	Transmission Losses
Susut Jaringan	970%	9,41%	9,21%	9,91%	**9,71%**	Network Losses

Susut Jaringan per Regional
Network Losses by Region

Keterangan	Realisasi 2011 Realization	Realisasi 2012 Realization	Realisasi 2013 Realization	**Realisasi 2014 Realization**	Description
Susut Transmisi	2,25%	2,44%	2,33%	**2,37%**	Transmission Losses
Jawa - Bali	2,11%	2,53%	2,38%	**2,49%**	Java - Bali
Sumatera	2,97%	2,69%	2,64%	**2,44%**	Sumatra
Indonesia Timur	2,40%	1,19%	1,32%	**1,36%**	East Indonesia
Susut Distribusi	7,34%	6,95%	7,77%	**7,52%**	Distribution Losses
Jawa - Bali	7,48%	6,09%	6,55%	**6,24%**	Java - Bali
Sumatera	12,42%	10,03%	12,05%	**11,84%**	Sumatra
Indonesia Timur	10,88%	8,60%	11,30%	**10,24%**	East Indonesia
Susut Jaringan	9,41%	9,21%	9,91%	**9,71%**	Network Losses
Jawa - Bali	9,42%	8,64%	8,77%	**8,57%**	Java-Bali
Sumatera	15,07%	12,34%	14,35%	**13,99%**	Sumatra
Indonesia Timur	13,01%	9,68%	12,46%	**11,45%**	East Indonesia

Adapun upaya berkesinambungan yang telah dilakukan oleh Perseroan untuk menurunkan susut jaringan yaitu:

1. Melakukan penambahan penyulang / jurusan baik untuk jaringan tegangan menengah maupun jaringan tegangan rendah pada beberapa lokasi yang bebannya sudah berat.
2. Melakukan pemasangan gardu sisipan pada jaringan distribusi.
3. Melakukan penggantian konduktor/pemberatan jaringan.
4. Penyeimbangan beban trafo.
5. Penggantian kWh meter macet.
6. Melaksanakan dan mengintensifkan program *Revenue Assurance.*
7. Melaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan program penertiban PJU liar dan P2TL.
8. Melakukan perbaikan proses pengadaan material distribusi utama (MDU).
9. Melakukan penyempurnaan sistem *Billing Management.*
10. Penyelesaian pembangunan pembangkit dan transmisi terkait.

The continuous efforts taken into action by the Company to reduce network losses are:

1. Add feeder or router, both for medium voltage and low voltage networks, in some heavy loaded areas.
2. Install sub-relay station in distribution networks.
3. Replace conductor or network balancer.
4. Distribute transformer load evenly.
5. Replace broken kWh meter.
6. Conduct and intensify Revenue Assurance program.
7. Conduct street lighting (PJU) and electrical power consumption (P2TL) control consistently and continuously.
8. Improve material procurement process for main distributions.
9. Improve Billing Management system.
10. Complete the development of plants and related transmissions.

Tingkat Keandalan Layanan

Tingkat keandalan pelayanan diukur dengan menggunakan indeks lama gangguan *(System Average Interruption Duration Index/ SAIDI)* yang dihitung lamanya pelanggan mengalami gangguan dalam satuan menit per pelanggan per tahun. Sedangkan indeks frekuensi gangguan *(System Average Interruption Frequency/ SAIFI)* menghitung banyaknya jumlah gangguan per pelanggan per tahun.

Pada tahun 2014, indeks SAIDI sebesar 5,81 jam/pelanggan/ tahun dan SAIFI sebesar 5,58 kali/pelanggan/tahun. Pencapaian SAIDI lebih buruk, sedangkan SAIFI lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh:

1. Adanya penyempurnaan sistem pencatatan gangguan yang lebih detail dan tingkat akurasinya lebih tinggi dari pencatatan periode sebelumnya di regional Jawa Bali dan Sumatera sebagai bagian dari program *Operational Performance Improvements* (OPI). Kontribusi atas penyempurnaan pencatatan ini terhadap meningkatnya angka SAIDI SAIFI adalah dari perbaikan pencatatan di jaringan sistem distribusi.
2. Adanya defisit daya akibat gangguan dan rehabilitasi pembangkit pada beberapa PLTU di Sumatera.

Service Reliability Levels

The level of services reliability is measured by an index of the length of disruptions (System Average Interruption Duration Index/SAIDI) that calculates the length of time the customers experiences service disruptions in minutes per customer per year. Meanwhile the frequency of disruptions (System Average Interruption Frequency/SAIFI) calculates the number of times a customer experiences disruptions each year.

In 2014, SAIDI index has reached 5,81 hours/customer/year and SAIFI 5,58 times/customer/year. These figures are lower than last year due to:

1. A more detailed and accurate disturbance recording system compared to the previous period in Java Bali and Sumatra regions. This is a part of the operational program improvements (OPI). The contribution to these recording systems to the increase of SAIDI and SAIFI is the betterment in distribution system network record.
2. Power deficiency due to disturbance and rehabilitation of some steam power plants in Sumatra

SAIDI dan SAIFI
SAIDI and SAIFI

Ukuran Keandalan	2010	2011	2012	2013	**2014**	Reliability Measurement
Indeks lama gangguan SAIDI (jam/pelanggan/tahun)	6,7	4,7	3,85	5,76	**5,81**	Length of disruption index SAIDI (hours/customer/year)
Indeks frekuensi gangguan SAIFI (kali/pelanggan/tahun)	6,82	4,9	4,22	7,26	**5,58**	Frequency of disruption index SAIFI (times/customer/year)

SAIDI – SAIFI per Regional
SAIDI and SAIFI by Region

Keterangan	Realisasi 2012 Realization 2012	Realisasi 2013 Realization 2013	**Realisasi 2014 Realization 2014**	Description
SAIDI (jam/plg/tahun)	3,85	5,76	**5,81**	SAIDI (hours/customer/year)
Jawa - Bali	2,88	4,59	**5,37**	Java - Bali
Sumatera	4,22	9,01	**8,03**	Sumatra
Indonesia Timur	7,99	6,46	**4,79**	East Indonesia
SAIFI (kali/plg/tahun)	4,22	7,26	**5,58**	SAIFI (times/customer/year)
Jawa - Bali	3,45	5,38	**4,89**	Java - Bali
Sumatera	4,53	14,19	**8,44**	Sumatra
Indonesia Timur	7,49	6,19	**4,80**	East Indonesia

Peningkatan Mutu Layanan dan Keandalan

Upaya berkesinambungan yang dilakukan Perusahaan agar terus dapat meningkatkan mutu layanan kepada pelanggan adalah:

1. Melengkapi manajemen dengan *tools* pemantauan gangguan penyulang guna mendorong kinerja penyulang yang lebih baik.
2. Meningkatkan peralatan proteksi, melakukan pembenahan pemeliharaan dan pengaturan alat proteksi agar di masa depan tidak terjadi lagi malfungsi.
3. Melakukan pembersihan *Right of Way* (ROW) secara efektif dengan memanfaatkan informasi peta pohon.
4. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja trafo distribusi yang meliputi : pemeliharaan, penyeimbangan beban, pengurangan jumlah trafo yang berbeban lebih *(overblast)*, trafo sisipan maupun relokasi, sekaligus mengurangi risiko kerusakan trafo.

Improvement of Service Quality and Reliability

The continuous efforts taken into action by the company to improve service quality for customers include:

1. Provide management with monitoring tools of feeder disorders to support better feeders' performance.
2. Improve protection equipment, and its maintenance and organization to prevent malfunctions in the future.
3. Clearance of Right of Way (ROW) effectively by utilizing tree map information.
4. Applying stringent control to distribution transformation performance which covers : maintenance, load distribution, reducing number of overblasted transformation, additional and relocated transformers, as well as lowering the risk of transformers' malfunction.

Tingkat Kinerja Perusahaan

Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan mengacu pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) No. RIS-09/D2.MBU/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014, yang mencakup 5 perspektif *Key Performance Indicator* (KPI) berbasis *"Kriteria Penilaian Kinerja Unggul"* sesuai Kontrak Manajemen yaitu Fokus Pelanggan, Produk dan Proses, Fokus Tenaga Kerja, Keuangan dan Pasar, Kepemimpinan dan Tata Kelola.

Company Performance Level

The company health assessment has referred to Minutes of the General Meeting of PT PLN (Persero) Shareholders No. RIS-09/D2.MBU/2014 dated January 17, 2014 on Ratification of the 2014 Company Work Plan and Budget, which refers to the perspectives of 5 Key Performance Indicators (KPI) based on "Assessment Criteria of Performance Excelences" in accordance with the Management Contract, these perspectives are Customers Focus, Product and Process, Workforces Focus, Finance and Market, Leadership and Governance.

Tingkat Kesehatan PT PLN (Persero) tahun 2014 mendapat skor 88,04 masuk pada golongan Perusahaan BUMN yang SEHAT, kategori AA.

PT PLN (Persero) performance level in 2014 received 88.04 scores and is listed in BUMN companies as HEALTHY State Owned Enterprise, category AA.

Tingkat Kesehatan Perusahaan
The Health Level

	2010	2011	2012	2013	**2014**	
Nilai	74,10	86,28	88,60	77,76	**88,04**	Score
Kategori	Sehat A Healthy A	Sehat AA Healthy AA	Sehat AA Healthy AA	Sehat A Healthy A	**Sehat AA Healthy AA**	Category

Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance

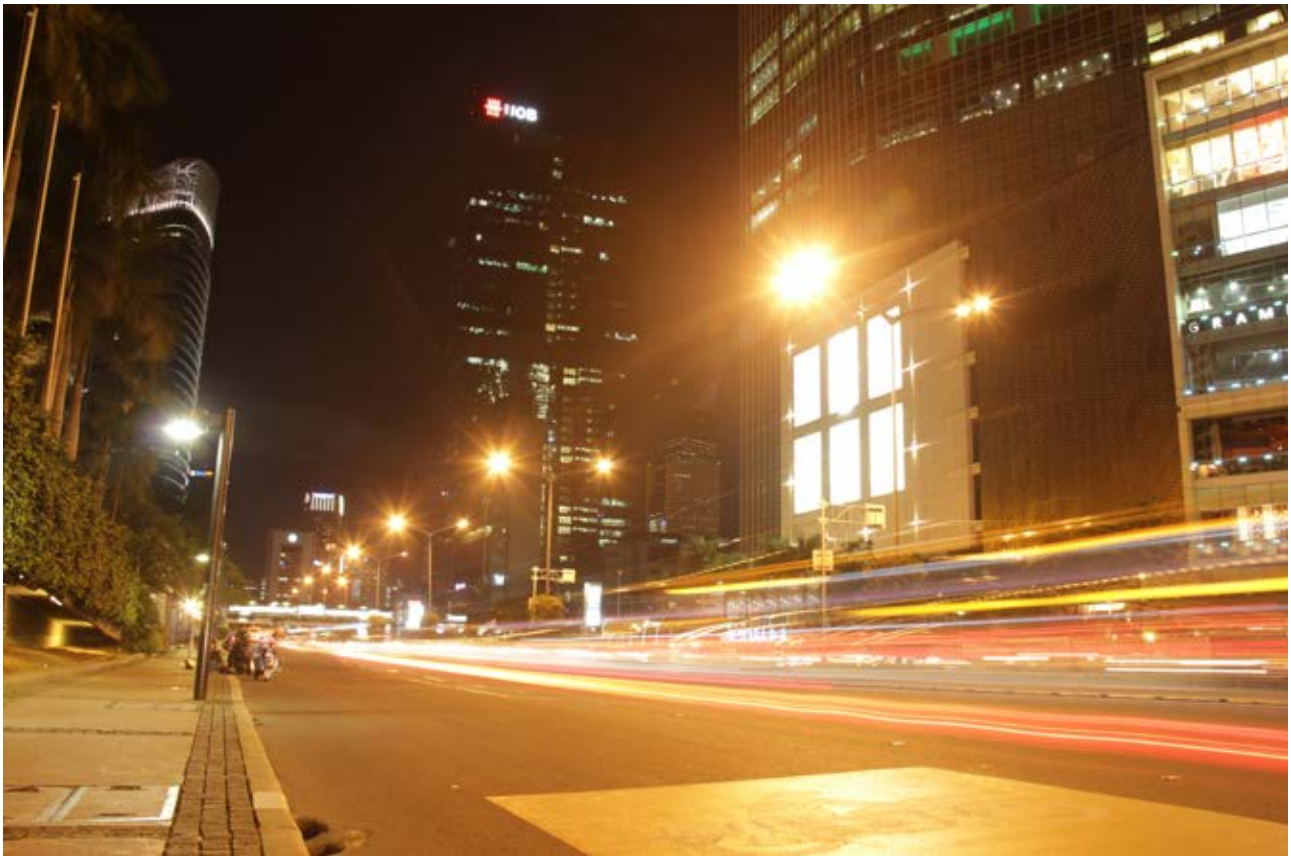

Penghentian subsidi listrik untuk beberapa golongan pelanggan yang dimulai sejak tahun 2013 membuat PLN di tahun 2014 membukukan kenaikan pendapatan penjualan listrik. Upaya pengendalian biaya pokok produksi melalui perbaikan bauran energi serta perbaikan efisiensi operasional melalui implementasi strategi Cost Revenue Management Program (CRMP) memberi andil bagi naiknya laba usaha. Kombinasi kedua hasil positif tersebut membuat PLN mampu mencatatkan peningkatan laba bersih yang substansial.

The termination of electricity subsidies for some classes of customers which began in 2013 lead PLN to record an increase in electricity sales revenue in 2014. The efforts of controlling production costs by improving energy mix as well as improving operational efficiency through the implementation of Cost Revenue Management Program (CRMP) strategy contributes to the increase in operating income. The combination of these two positive results make PLN able to record a substantial increase in net income.

PLN adalah BUMN Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum yang memiliki kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau sesuai dengan UU No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dengan demikian, PLN menjual sebagian besar daya listrik dibawah harga ke-ekonomian, sesuai ketentuan Pemerintah. Selisih atas nilai ke-ekonomian plus margin usaha, disubsidi oleh Pemerintah dengan besaran sesuai perhitungan yang ditetapkan pada tiap-tiap periode operasional.

Dengan kondisi tersebut PLN senantiasa berupaya agar setiap aspek operasional yang berada dalam kendalinya berlangsung dengan tingkat efisiensi optimal, untuk mengurangi biaya operasional, terutama Biaya Pokok Penyediaan tenaga listrik (BPP) dan beban usaha lainnya. Keberhasilan upaya ini akan mengurangi selisih BPP dengan harga jual listrik, mengurangi besaran subsidi, dan meningkatkan kemampuan PLN dalam mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, PLN memiliki target untuk menyediakan tenaga listrik yang memadai bagi seluruh penduduk Indonesia, agar rasio elektrifikasi naik mencapai level 95% pada akhir tahun 2017, dari posisi akhir tahun 2014 sebesar 84,30%.

Untuk mencapai target tersebut PLN tengah membangun sejumlah instalasi pembangkit yang sebagian diantaranya diselenggarakan oleh pihak swasta karena keterbatasan dana investasi. PLN juga tengah membangun jaringan transmisi dan distribusi keseluruh pelosok negeri. Pada saat yang bersamaan, PLN juga berupaya meningkatkan kualitas jaringan distribusi, agar efisiensi penyaluran tenaga listrik dari stasiun pembangkit meningkat. Selain itu, PLN berupaya meningkatkan efisiensi operasional, untuk menekan beban usaha, baik melalui pengaturan penggunaan energi primer maupun upaya efisiensi dalam pengelolaan dana maupun pengelolaan pengeluaran operasional lainnya.

Untuk mendukung pendanaan pembangunan berbagai infrastruktur ketenagalistrikan tersebut, PLN kemudian menggalang dana melalui penerbitan serangkaian instrumen obligasi dan surat hutang berjangka menengah dan panjang, serta mencari dana dari kalangan perbankan dan sumber dana *'two step loan'* dengan garansi dari Pemerintah. PLN semakin intens mencari dana dengan skema B to B dari berbagai lembaga keuangan Internasional, untuk mengatasi keterbatasan anggaran APBN dalam skema penjaminan Pemerintah. PLN juga merealisasikan pengelolaan dan mitigasi risiko secara terintegrasi, meliputi seluruh risiko strategis untuk meminimalisir dampaknya, sesuai koridor ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Rangkaian sebab akibat dari seluruh upaya tersebut terhadap perubahan posisi keuangan PLN akan dijelaskan pada pembahasan berikut.

Mengingat sifat kegiatan usaha dibidang kelistrikan yang padat modal, maka dalam pembahasan berikut, penjelasan mengenai perubahan posisi keuangan ditempatkan dibagian awal pembahasan kinerja keuangan.

PLN is a State-Owned Enterprises (SOE) which is an Authorized Business for Electricity Provision for public interest and obliged to provide electricity at affordable price for the entire people throughout Indonesia in accordance with Law No.30 of 2009 on Electricity. Thus, PLN sells electricity et prices which are below the economic price and pursuant to the Government's stipulation. The discrepancy with the economic price plus operating margin is covered by the Government's subsidy of which the amount is set at every operational period.

Under this circumstance, PLN constantly attempts on making every operational aspects under its control goes at optimum efficiency, to reduce operational charges, particularly the Basic Cost of Electricity Production (BPP) and other operating expenses. The success of these efforts will reduce the discrepancy between the BPP and the electricity sales price, reduce the subsidy amount and enable PLN to further develop electricity infrastructure in Indonesia.

PLN is targeting to provide sufficient electricity supplies to all people in Indonesia so that the country's electrification ratio can reach the level of 95% by the end of 2017, an increase of 84.30% from the end of 2014.

To meet the target, PLN is developing several power plants, some of which are run by private enterprises due to PLN's limited investment capital. In addition, the state utility is setting up transmission and distribution network for coverage throughout Indonesia. At the same time, PLN is also seeking to improve its distribution network quality so that efficiency of electricity distribution can be increased as well. Moreover, another goal set by PLN is increasing operational efficiency to lower business costs, through the management of primary energy utilization and other operating expenditures.

To overcome the limited investment capital derived from its internal cash, PLN raised fund through the issuance of a series of bond instruments and medium and long term debt securities, and as well as seeking loans from banks and 'two-step loan' guaranteed by the Government. PLN has also intensively sought funds under B to B scheme and from international financial institutions in order to overcome the lack of state budget with the government's guarantee. PLN also performs risk management and mitigation in integration, covering all strategic risks, to minimize the impact in line with the applicable rules and regulations.

All the efforts will be reflected in the change of financial position explained below.

Since business activities in the electricity segment is capital intensive one, the explanation on the changes in financial position will be discussed in the beginning of financial performance part.

Secara keseluruhan, kondisi keuangan PLN masih kuat, kendati upaya meningkatkan rasio elektrifikasi membuat PLN mengalami tekanan dari sisi profitabilitas, mengingat sebagian besar tambahan pelanggan menggunakan tarif subsidi.

Meskipun pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 2,06% masih terjadi ditahun 2014 namun PLN mencatatkan keuntungan translasi valas dan PLN berhasil membukukan laba bersih yang substantial sebagai buah keberhasilan implementasi strategi CRMP, termasuk didalamnya pengendalian BPP melalui peningkatan strategi bauran energi.

Pembahasan dan analisis kinerja keuangan pada uraian berikut mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN (Persero) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PriceWaterhouseCoopers Indonesia).

Ikhtisar Posisi Keuangan

Pada tahun 2014 Perseroan, menerapkan ISAK 27, "Pengalihan Aset dari Pelanggan". ISAK 27 berlaku untuk perjanjian di mana Perusahaan menerima aset tetap (atau uang tunai untuk memperoleh atau membangun aset tetap) dari pelanggan yang harus digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan atau menyediakan akses berkelanjutan atas pasokan listrik, atau keduanya.

Perseroan wajib menerapkan ISAK 27 untuk mencatat pengalihan aset dari pelanggan yang diterima pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Pada tanggal 23 Februari 2015, DSAK-IAI menerbitkan Buletin Teknis 10 tentang Penerapan Ketentuan Transisi ISAK 27 yang menjelaskan bahwa penerapan dini diperkenankan dengan syarat penilaian dan informasi lain yang dibutuhkan untuk menerapkan Interpretasi ini pada pengalihan yang telah terjadi sebelumnya diperoleh pada saat pengalihan tersebut terjadi.

Perusahaan memiliki informasi yang cukup untuk menerapkan intreoretasi secara Retrospektif, oleh karena itu Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian yang telah di audit untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 pada tanggal 27 Februari 2015 untuk mencerminkan penerapan awal ISAK 27. Laporan Keuangan Audit Konsolidasi 2013 dan 2012 yang mencerminkan adanya penyajian kembali secara keseluruhan akibat penerapan ISAK 27 tersebut juga dilampirkan dalam laporan ini.

Selanjutnya sesuai dengan catatan 56. Laporan Keuangan Audited Konsolidasian terlampir, seluruh pembahasan mengenai kinerja keuangan pada pembahasan "Tinjauan Keuangan" berikut telah menggunakan data-data Penyajian Kembali untuk angka-angka tahun 2013.

Pada ikhtisar posisi keuangan berikut, total aset PLN per 31 Desember 2014 meningkat 2,3% menjadi Rp603.659,2 miliar dari Rp590.219,0 miliar di tahun sebelumnya. Total Liabilitas turun 0,2% menjadi Rp438.988,0 miliar dari Rp439.887,6 miliar di tahun 2013. Sementara ekuitas Perusahaan naik 9,5% menjadi Rp164.671,2 miliar dari posisi Rp150.331,4 di tahun sebelumnya.

Overall, PLN's financial performance remains strong. However, the efforts to increase electrification ratio holds PLN under pressure in terms of profitability, given that most customers pay at subsidized tariffs.

Even tough Rupiah depreciation by 2.06% in 2014, PLN to record gain in foreign currency translation and PLN made a substantially net profit as the result of a successful implementation of the CRMP strategy, including BPP's control through the increase of energy mix strategy.

Discussion and analysis on financial performance in the following description refers to PT PLN (Persero) Consolidated Financial Statements for years ended December 31, 2014 and 2013, which have been audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana & Partners (PriceWaterhouseCoopers Indonesia)

Balance Sheet Overview

In 2014, Company implement ISAK 27 (Interpretation of Accounting Standard) about "Transfer of Asset from Customer". ISAK 27 is applied to agreement on which the company receives fixed assets (or cash to buy or build the fixed assets) from customer that is used to connect the customer to the company electricity network or to provide sustainable access to electricity supply or both.

The Company have to apply ISAK 27 to record the transfer of assets from customer which is received on or after January 1, 2014. On February 23, 2015 DSAK-IAI (Accounting Standard Board - Indonesian Accounting Association) issued technical bulletin 10 about the transitional implementation of ISAK 27 which explain that early implementation is allowed with the provision that valuation and other necessary information needed to apply the ISAK on transfer that have happened has been acquired when the transfer occurred.

The Company has sufficient information to apply the interpretation retrospectively and therefore, the company re-issue the audited consolidated financial statement which ended on 31 December 2013 and 2012 on 27 February 2015 to show the early implementation of ISAK 27. The restated audited consolidated financial statement of 2013 and 2012 which shows the overall restatement due to implementation of ISAK 27 is also attached within this report.

Subsequently, in accordance noted no.56 in the attached audited consolidated financial statement, all discussion about financial performance on the followed "Financial Performance" section has used the restatement value for year 2013.

In the balance sheet overview below, the total assets of PLN as of December 31, 2014 increased by 2.3% to 603,659.2 billion from Rp590,219.0 billion in the previous year. Total liabilities decreased by 0.2% to Rp438,988.0 billion from Rp439,887.6 billion in 2013. While the Company's equity rose 9,5% to Rp164,671.2 from the position Rp150.331,4 billion in the previous year.

Ikhtisar Posisi Keuangan (dalam miliar)
Balance Sheet Overview (in billion)

Keterangan	2013	2014	Perubahan Change	Komposisi Composition 2013	Komposisi Composition 2014	Remarks
Aset Tidak Lancar	505.381,8	**518.235,5**	2,5%	85,6%	**85,8%**	Non-Current Assets
Aset Lancar	84.837,2	**85.423,7**	0,7%	14,4%	**14,2%**	Current Assets
TOTAL ASET	590.219,0	**603.659,2**	2,3%	100,0%	**100,0%**	TOTAL ASSETS
Liabilitas Jangka Panjang	350.581,7	**351.429,7**	0,2%	79,7%	**80,1%**	Non-current Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek	89.306,0	**87.558,3**	(2,0%)	20,3%	**19,9%**	Short-term Liabilities
TOTAL LIABILITAS	439.887,6	**438.988,0**	(0,2%)	100,0%	**100,0%**	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS	150.331,4	**164.671,2**	9,5%			EQUITY

Adapun penjelasan pos-pos neraca utama yang menyebabkan perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

The main accounts in the balance sheet that caused the changes are detailed in the analysis parts as follows:

Aset

Bidang usaha PLN yang padat modal, membuat komponen aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan yang termasuk kedalam kelompok akun Aset Tidak Lancar terus mendominasi nilai posisi keuangan. Seperti tampak pada tabel sebelumnya dan ditunjukkan pada dua grafik berikut, komponen aset tidak lancar (didalamnya didominasi oleh akun aset tetap) mendominasi komposisi aset hingga pada kisaran 85%.

Assets

The nature of PLN's business is capital intensive, thus the fixed assets components and the construction in progress that are grouped in Non-Current Assets account will continue to dominate the amount of balance sheet. As demonstrated in the previous table and in the two graphs below, the non-current assets component (mainly fixed asset) dominate the assets in total with around 85%.

Nilai Aset (Rp miliar)
Asset Values (Rp billion)

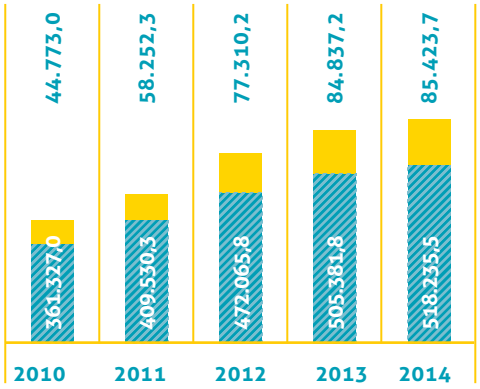

Ikhtisar Komposisi Aset (%)
Asset Composition (%)

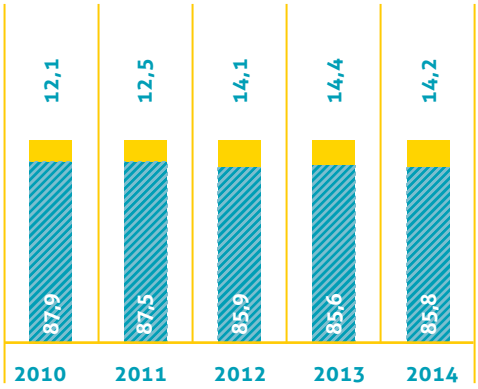

Aset Lancar Current Asset Aset Tidak Lancar Non Current Asset

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada akhir tahun 2014 mencapai Rp518.235,5 miliar, naik 2,5% dibandingkan tahun 2013. Komposisi terbesar aset tidak lancar di tahun 2014 adalah aset tetap bersih, mencapai 96,8% (sudah termasuk aset dalam pelaksanaan dan aset tidak digunakan dalam operasi), diikuti aset pajak tangguhan 0,6% dan rekening bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya sebesar 1,2%, serta beberapa akun yang jumlahnya kurang dari 0,6% terhadap total aset tidak lancar. Komposisi aset tidak lancar tercantum pada tabel berikut.

Non-Current Assets

The amount of the Company's non-current assets as of end 2014 is Rp518,235.5 billion or an increase 2.5% compared to 2013. The largest in the non-current assets composition in 2014 is net fixed assets, with 96.8% (including construction in progress and assets not being used for operation), followed by deferred tax assets with 0.6% and restricted cash in bank and time deposits with 1,2% also some accounts which totaled less than 0.6% of the total non-current assets. The composition of non-current assets is demonstrated in the table below.

Keterangan	2013	2014	Perubahan Change	Komposisi Composition 2013	Komposisi Composition 2014	Remarks
ASET TIDAK LANCAR						NON CURRENT ASSETS
Aset Tetap - Bersih	488.102,6	**501.706,3**	2,8%	96,6%	**96,8%**	Net Fixed Assets
Properti investasi	159,3	**233,1**	46,3%	0,0%	**0,0%**	Investment property
Investasi pada entitas asosiasi	1.836,9	**2.318,9**	26,2%	0,4%	**0,4%**	Investment in associates
Investasi pada ventura bersama	192,2	**253,7**	32,0%	0,0%	**0,0%**	Investment in joint venture
Aset pajak tangguhan	5.932,5	**2.899,8**	(51,1%)	1,2%	**0,6%**	Deferred tax assets
Piutang pihak berelasi	176,0	**98,8**	(43,9%)	0,0%	**0,0%**	Receivables from related party
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5.659,8	**5.994,0**	5,9%	1,1%	**1,2%**	Restricted cash in banks and time deposits
Piutang lain-lain	304,3	**321,4**	5,6%	0,1%	**0,1%**	Other receivables
Aset tidak lancar lain-nya	3.018,3	**4.409,4**	46,1%	0,6%	**0,9%**	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset tidak lancar	**505.382**	**518.235,5**	**2,5%**	**100,0%**	**100,0%**	**Total Non-Current Assets**

Aset Tetap

Aset tetap bersih pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp501.706,3 miliar atau naik 2,8% dari tahun sebelumnya, disebabkan adanya penambahan aset tetap bersih di tahun 2013 sebesar Rp4.493,3 miliar (sebelum reklasifikasi). Pertumbuhan tersebut berarti lebih rendah dari angka pertumbuhan aset tetap tahun 2013 yang mencapai kisaran angka 5,6%. Hal tersebut menunjukkan beratnya kondisi investasi akibat melemahnya nilai tukar karena menurunnya kinerja neraca perdagangan Indonesia dan naiknya tingkat bunga pinjaman, seiring dengan tingginya suku bunga rujukan, BI rate.

Kenaikan aset tetap adalah akibat realisasi pada berbagai proyek pembangunan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi di tahun 2014 dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan meningkatkan keandalan jaringan, meliputi diantararanya:

1. Pembangunan instalasi pembangkit dalam rangka Proyek FTP I dan FTP II.
2. Pembangunan instalasi pembangkit reguler.
3. Pembangunan sistem transmisi dan distribusi.
4. Penambahan areal tanah dan bangunan untuk digunakan sebagai area gardu induk.
5. Pembangunan sarana penunjang lainnya.

Seluruh instalasi pembangkit dan fasilitas transmisi/distribusi telah diasuransikan dengan nilai penutupan yang memadai.

Mengingat masih banyaknya kekurangan daya listrik (target penambahan daya adalah 5 GW per tahun), maka penambahan aset tetap PLN akan terus terjadi ditahun-tahun mendatang. Gambaran lebih lengkap mengenai penambahan aset tetap diuraikan pada sub-bab "Pembangunan Stasiun Pembangkit" dan "Pengembangan Sistim Transmisi dan Distribusi".

Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya

Mengalami kenaikan 5,9% dari posisi tahun 2013 menjadi sebesar Rp5.994,0 miliar, mencerminkan kemajuan pembangunan berbagai proyek pembangkit, transmisi dan distribusi. Peningkatan terjadi sejalan dengan kebijakan PLN untuk memastikan kemajuan pembangunan proyek-proyek tersebut sebelum melakukan pembayaran angsuran sewa pembiayaan dan jaminan operasi sesuai dengan kemajuan proyek.

Investasi pada entitas asosiasi

Mengalami kenaikan sebesar 26% menjadi Rp2.318,9 miliar sebagai realisasi berbagai proyek pembangunan pembangkit yang dilakukan bersama-sama partner strategis. Beberapa proyek dimaksud, meliputi pembangunan PLTU mulut tambang Banjarsari 2x110 di Palembang oleh PT Bukit Pembangkit Innovative (kerjasama dengan PT Bukit Asam (Persero) Tbk) dan pengoperasian beberapa pembangkit listrik bersama PT Geo Dipa Energi, PT Unelec, PT KOMIPO Pembangkitan Jawa Bali, dan sebagainya.

Investasi pada ventura bersama

Naik sebesar 32,0% sebagai akibat adanya penambahan investasi pada perusahaan eksisting dan investasi baru pada perusahaan penedia peralatan listrik. Termasuk kedalam akun ini adalah kerjasama pada PT Indo Pusaka Berau (melalui PT Indonesia Power), PT Energi Pelabuhan Indonesia dan PT Crompton Prima Switcgear yang baru didirikan pada tahun 2014.

Property Plant and Equipment

Net property plant and equipment at the end of 2014 stood at Rp501,706.3 billion or up 2.8% from the previous year, due to the increase in 2013 of Rp4,493.3 billion. This means the growth at is significantly lower than the growth of property, plant and equipment in 2013 which reached around 5.6%. This shows the difficult investment condition due to exchange rate depreciation, as Indonesia's trade balance performance and loan interest rate went up, following the increase of BI rate.

The increase occurred as a result of some power plant, transmission and distribution network projects in 2014 on the occasion to increase electrification ratio and network reliability, which included:

1. Construction of generation installation in the FTP I and FTP II Project framework
2. Construction of regular generation installation
3. Construction of transmission and distribution system.
4. Increasing land area for relay stations.
5. Construction of other supporting facilities.

All generation installation and transmission/distribution facilities has been insured with adequate coverage amount.

Due to significant power shortage in Indonesia (the target is additional power of 5 GW per year), the company will continuously add fixed assets in the following years. To have a comprehensive view of additional fixed assets, see the description of "Power Generation Development" and "Operational, Transmission and Distribution".

Restricted Cash in Banks and Time Deposits

This category experienced an increase of 5.9% from 2013, to Rp5,994.0 billion, which reflected progress in the development of plant, transmission and distribution projects. The increase was in accordance with PLN's policy of assuring project development progress before making the payment of lease installment financing and operation guarantee according to the project's progress.

Investments in Associates

This category experienced a 26% increase to Rp2,318.9 billion due to the power plant development projects carried out together with strategic partners. Some of the said projects are PLTU mine mouth Banjarsari 2x110 in Palembang by PT Bukit Pembangkit Innovative (in cooperation with PT Bukit Asam (Persero) Tbk) and operating of some power plants with PT Geo Dipa Energi, PT Unelec, PT KOMIPO Pembangkitan Jawa Bali, and others.

Investment in Joint Venture

This category experienced an increase at 32.0% as a result of additional investments in existing company and new investments in electricity equipment supplier company. This account includes cooperation with PT Indo Pusaka Berau (through PT Indonesia Power), PT Energi Pelabuhan Indonesia and PT Crompton Prima Switcgear established in 2014.

Investasi pada ventura bersama ditujukan untuk mengembangkan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Perusahaan dan entitas anak, dengan sumber pendanaan mayoritas berasal dari partner strategis sehingga tidak membebani Perseroan.

Investment in joint venture is aimed to develop long-term growth potential. This is because all the entities like the Company and Subsidiaries, are engaged in electrical power industry and the majority funding are sourced from strategic partner, thus not causing financial burden on the Company.

Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan pada akhir tahun 2014 sebesar Rp85.423,7 miliar, naik 0,7% dari tahun sebelumnya. Komposisi terbesar aset lancar adalah kas dan setara kas 31,7%, diikuti piutang usaha 22,8%, piutang subsidi listrik sebesar 22,6%, dan persediaan sebesar 13,6% serta beberapa akun yang jumlahnya kurang dari 6% terhadap total aset lancar. Komposisi aset lancar tercantum pada tabel berikut.

Current Assets

The Company's current assets in end 2014 reached Rp85,423.7 billion, rose 0.7% from the previous year. The largest component in the current asset composition is cash and cash equivalents with 31.7%, followed by receivables on electricity subsidy, by 22.6%, company receivables 22.8% and inventories 13.6% and some accounts which in total represents less than 6% of total current assets. The composition of current assets is as demonstrated in the table below.

Keterangan	2013	2014	Perubahan Change	Komposisi Composition 2013	Komposisi Composition 2014	Remarks
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	25.530,0	**27.111,5**	6,2%	30,1%	**31,7%**	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	97,7	**100,7**	3,1%	0,1%	**0,1%**	Short term investment
Piutang usaha - Bersih	15.696,9	**19.494,9**	24,2%	18,5%	**22,8%**	Trade accounts - Net
Piutang subsidi listrik	21.793,9	**19.280,9**	(11,5%)	25,7%	**22,6%**	Receivables on Electricity Subsidy
Piutang lain-lain	4.625,1	**866,9**	(81,3%)	5,5%	**1,0%**	Other receivables
Persediaan - Bersih	11.343,5	**11.607,9**	2,3%	13,4%	**13,6%**	Inventories - Net
Pajak dibayar di muka	4.397,1	**4.889,5**	11,2%	5,2%	**5,7%**	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	1.312,9	**1.788,7**	36,2%	1,5%	**2,1%**	Prepaid expenses and advances
Piutang pihak berelasi	40,1	**282,8**	605,9%	0,0%	**0,3%**	Receivables from related party
Jumlah Aset Lancar	**84.837,2**	**85.423,7**	**0,7%**	**100,0%**	**100,0%**	**Total Current Assets**

Kas dan setara kas

Posisi kas dan setara kas pada tahun 2014 naik sebesar Rp1.582 miliar menjadi Rp27.111,5 miliar, naik 6,2% dari posisi tahun sebelumnya. Kenaikan kas dan setara kas tersebut salah satunya berasal dari penambahan jaminan sambungan baru, realisasi penggunaan fasilitas listrik prabayar yang kini berjumlah 17,6 juta pelanggan, sekalipun terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional. (Lihat juga uraian "Jumlah Pelanggan dan "Arus Kas", dan "Piutang Usaha").

Posisi kas pada tahun 2014 terdiri dari kas di tangan sebesar Rp9,6 miliar, ditempatkan di rekening giro dalam mata uang asing maupun Rupiah sebesar Rp23.303,6 miliar yang merupakan 85,9% dari jumlah keseluruhan kas dan setara kas, serta deposito berjangka sebesar Rp3.807,9 miliar atau sebesar 14% dari jumlah keseluruhan kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perusahaan dalam bentuk deposito, ditempatkan diantaranya di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Bukopin.

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents positions Increase in 2014, by Rp1,582 billion to Rp27,111.5 billion, or 6.2% from the previous year. The increase in cash and cash equivalents was primarly a result of policies realization in the operational field, i.e the elimination of new connections guarantee, the growth slowing rate of prepaid electricity facilities usage which now has a total of 17.6 million customers as a result of the national economic slowed growth. (See also the description "Total Customers" and "Cash Flow ", and "Company Receivable").

The cash position in 2014 comprised cash in hand amounting to Rp9.6 billion, which wac located in clearing accounts of both rupiah and foreign currency totaling Rp23,303.6 billion or 85.9% of the total cash and cash equivalents and term deposits worth Rp3,807.9 billion or 14% of the total cash and cash equivalents. The company's cash and cash equivalents in term deposit are located in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Bukopin.

Dari penempatan dana tersebut PT PLN (Persero) mendapatkan bunga antara 6,79%-8,80% untuk penempatan dana dalam Rupiah dan 1,68%-2,40% untuk penempatan dana dalam mata uang asing. Dengan pola penempatan dana seperti tersebut Perusahaan memperoleh pendapatan bunga sebesar Rp584,1 miliar, turun 20,7% dari Rp736,4 miliar di tahun 2013. Rincian penempatan dana Kas dan Setara kas disajikan pada tabel berikut.

On the fund placements, PT PLN (Persero) acquired interest at the rates from 6.79% to 8.80% for Rupiah deposit and 1.68% to 2.40% for foreign currency deposit. Under such arrangements, the Company obtained interest income amounting to Rp584.1 billion, a 20.7% decrease from Rp736,4 billion in 2013. Further details on cash and cash equivalents fund placement are presented in the following table.

Posisi dan Penempatan dana Kas dan Setara Kas
Placement of Cash and Cash Equivalents

Keterangan	2013	2014	Perubahan Change	Komposisi Composition		Remark
Dalam Rp Miliar				2013	2014	in billion Rp
KAS	9,7	9,6	(1,6%)	0,04%	0,0%	CASH
REKENING BANK	21.217,5	23.294,0	9,8%	83,11%	85,9%	RESTRICTED CASH IN BANKS
Bank - Pihak Berelasi	15.512,3	17.077,5	10,1%			Banks - Related Parties
Bank Rakyat Indonesia	5.491,6	8.256,4	50,3%			Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri	4.933,4	3.864,0	(21,7%)			Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	5.087,3	4.927,7	(3,1%)			Bank Negara Indonesia
Bank Tabungan Negara	-	29,4				Bank Tabungan Negara
Bank - Pihak Ketiga	5.705,2	6.216,5	9,0%			Banks - Third Parties
Bank Bukopin	4.099,5	3.703,1	(9,7%)			Bank Bukopin
Bank Internasional Indonesia	205,1	72,4	(64,7%)			Bank Internasional Indonesia
Bank Danamon	56,2	80,2	42,7%			Bank Danamon
Bank Central Asia	356,7	629,0	76,4%			Bank Central Asia
Lainnya	987,8	1,731,9	75,3%			Others
JUMLAH KAS DAN BANK	21.227,2	23.303,6	9,8%			TOTAL CASH ON HAND AND IN BANKS
SETARA KAS - DEPOSITO BERJANGKA	4.302,8	3.807,9	(11,5%)	16,85%	14,0%	CASH EQUIVALENTS - TIME DEPOSITS
Bank - Pihak Berelasi	2.715,0	2.235,9	(17,6%)			Banks - Related Parties
Bank Rakyat Indonesia	1.050,0	1.092,6	4,1%			Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri	801,3	511,8	(36,1%)			Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	863,7	631,6	(26,9%)			Bank Negara Indonesia
Bank - Pihak Ketiga	1.587,8	1.572,0	(1,0%)			Banks - Third Parties
Bank Bukopin	1.476,1	1.452,5	(1,6%)			Bank Bukopin
Lainnya	111,7	119,5	7,0%			Others
TOTAL KAS DAN SETARA KAS	25.530	27.111,5	6,2%			TOTAL CASH AND CASH EQUIVALENT

Piutang subsidi listrik

Turun sebesar 11,5% menjadi sebesar Rp19.280,9 miliar dari posisi tahun 2013 yang sebesar Rp21.793,9 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh terealisirnya subsidi listrik pada tahun sebelumnya dan karena adanya penghematan kebutuhan subsidi sebagai dampak naiknya tarif listrik secara berkala untuk beberapa golongan tarif tertentu.

Receivables on Electricity Subsidy

Electricity subsidies receivables decreases by 11,5% to Rp19,280.9 billion, which is lower than 2013 position of Rp21,793.9 billion. The decrease is mainly due to the realization (payment) of electricity subsidies in the previous year and the decrease of electricity subsidies provided as the result of increasing electricity price for several customer classes.

Sekalipun ada tambahan penyambungan pelanggan baru, dimana sebagian besar adalah pelanggan rumah tangga dengan kebutuhan subsidi yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok pelanggan lain, dampak kenaikan tarif listrik cukup dominan untuk mengurangi kebutuhan subsidi yang dicatat dalam akun ini.

Penurunan subsidi juga berkaitan erat dengan keberhasilan Perseroan menerapkan program penghematan melalui *Cost Reduction Management Program* (CRMP) sehingga biaya pokok produksi per satuan daya relatif terkendali (Lihat uraian "Biaya Pokok Pengadaan").

Piutang Usaha

Sesuai metode pencatatan Piutang Usaha baru yang diterapkan sejak 2013, kategori pelanggan dibagi dua kelompok besar, yakni piutang pihak berelasi – terdiri dari pelanggan BUMN – dan piutang pihak ketiga, terdiri dari kelompok pelanggan umum, TNI dan Polri serta Lembaga Pemerintah dan Kementerian.

Piutang BUMN sebesar Rp582.3 miliar, naik 42,5% sejalan dengan naiknya TTL dan program ekspansi yang dilakukan BUMN.

Piutang umum senilai Rp17.977,5 miliar, naik 22,8% dari tahun 2013, akibat naiknya jumlah pelanggan dan TTL. Piutang TNI dan Polri naik 34,1% menjadi sebesar Rp455,7 akibat naiknya TL dan belum dilakukannya realisasi pelunasan tagihan, sedang piutang Lembaga dan Kementerian naik 39,1% menjadi Rp1.074,5 miliar terutama akibat naiknya TTL dan belum diselesaikannya tagihan karena keterlambatan pengesahan APBN-P di tahun 2014.

PLN menerapkan kebijakan untuk melakukan pemutusan aliran listrik jika ada keterlambatan pembayaran pada periode tertentu. Penerapan sistim aplikasi AP2T maupun P2APST, membuat PLN lebih cepat mendeteksi adanya keterlambatan pembayaran dan mempercepat tindakan penyelesaian. Namun jika piutang tersebut menyangkut kepentingan umum yang lebih besar, PLN menunda penyelesaian, sehingga jumlah piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 360 hari, kembali naik 29,0% menjadi sebesar Rp243,1 miliar. Kondisi tahun 2014 yang merupakan tahun politik (sehubungan pelaksanaan PEMILU DPR dan Presiden) serta kurang kondusifnya perekonomian dalam negeri membuat PLN menempuh kebijakan tersebut.

Jumlah cadangan piutang ragu-ragu yang harus disisihkan meningkat 28,0% menjadi sebesar Rp595,1 miliar seiring naiknya jumlah piutang usaha. PLN terus berupaya menyelesaikan piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 360 hari ini sesuai peraturan yang berlaku.

Even though there are additional connections for new customers which mainly consist of household customers that need more subsidies than other classes of customers, the impact of increasing rate of electricity process is dominant enough to reduce the need of subsidies which eventually being recorded in receivables account.

The decrease of subsidies is also related to the success of company's Cost Reduction Management Program (CMRP) which able to control the basic production cost per unit of power (look at "Basis Cost of Production").

Company Receivables

According to the new record of Company Receivable method which applied since 2013, the customers category divided into two major groups, which are receivables from related parties - consists of SOE customers - and receivables from third party, consists of general customer, military and police as well as Governmental institutions and Ministries.

The state enterprise receivables stood at Rp582.3 billion, increased at 42.5% in line with the electricity tariff hike and SOE's expansion program.

The general receivables stood at Rp17,977.5 billion, a 22.8% increase from 2013, due to the increasing in total customers and electricity tariff. The military and police receivables increased 34.1% to Rp455.7 due to the rising electricity tariff and the realization of repayment bill that has not been done, while Institutions and Ministries receivables rose 39.1% to Rp1,074.5 billion, due to electricity tariff hike and the outstanding bills resulted from the delay in passing the Revised State Budget 2014.

PLN implements policies to cut power to overdue account. The (Central Application of Management and Customer) AP2T and Centralized Management and Supervision of Revenue Flows (P2APST) implementation accelerated PLN's detection of late payment and its resolution act. However, in the case that the electricity is related to public services, the company may delay the resolution (the power cut off). Thus the receivables that remained outstanding for more than 360 days, rose 29.0% to Rp243.1 billion. Conditions in 2014 which is a political year (occurred General Election of the House of Representatives and the President) and lack of conducive domestic economy makes PLN takes the policy.

The reserves for doubtful accounts increased at 28.0% to Rp595.1 billion in line with the company receivables increase. PLN attempts to finish receivables for more than 360 today, pursuant to the applicable rules.

Piutang Usaha
Company Receivables

Keterangan	2013	2014	Perubahan Change	Komposisi Composition 2013	Komposisi Composition 2014	Remarks
Pihak Berelasi						Related Parties
BUMN - Bersih	408,7	**582,3**	42,5%			SOE - net
Pihak Ketiga						Third Parties
Umum	14.641,2	**17.977,5**	22,8%	92,9%	**92,2%**	Public
TNI dan Polri	339,9	**455,7**	34,1%	2,2%	**2,3%**	Military and Police
Lembaga dan Kementerian	772,2	**1.074,5**	39,1%	4,9%	**5,5%**	Institution and Ministries
Sub jumlah	15.753,2	**19.507,7**	23,8%			Sub Total
Penyisihan piutang ragu-ragu	(464,9)	**(595,1)**	28,0%			Allowance for impairment losses
Pihak Ketiga-Bersih	15.288,3	**18.912,6**	23,7%			Net - Third Parties
Total Piutang Usaha Bersih	**15.696,9**	**19.494,9**	**24,2%**	**100,0%**	**100,0%**	**Net Receivable**

Persediaan

Naik 2,3% dari posisi Rp11.343,5 miliar di tahun 2013, menjadi sebesar Rp11.607,9 miliar. Nilai persediaan terbesar adalah persediaan bahan bakar dan pelumas, diikuti persediaan umum, persediaan *switchgear* & jaringan serta alat ukur, pembatas dan kontrol diikuti dengan kabel dan transformator.

Kenaikan nilai persediaan terutama terjadi untuk komponen bahan bakar dan pelumas, komponen persediaan umum, kabel dan transformator. Hal tersebut terjadi akibat adanya realisasi pemeliharaan pembangkit serta adanya kebutuhan peningkatan operasional pembangkit berbahan bakar BBM di kawasan Sumatera yang sempat mengalami kendala pasokan akibat berkurangnya pasokan gas untuk pembangkit tertentu.

Sekalipun aplikasi pengelolaan operasional berbasis teknologi informasi, seperti ERP yang telah *roll-out* diseluruh unit bisnis, aplikasi EAM dan aplikasi GOLS di beberapa unit bisnis tetap dioperasikan, operasional beberapa pembangkit baru dan gangguan pasokan di Sumatera membuat nilai persediaan meningkat. Beberapa komponen persediaan yang harus di-impor pada saat nilai rupiah melemah juga berpengaruh terhadap nilai persediaan yang dicatat dalam mata uang rupiah.

Jumlah persediaan tersebut, sebenarnya sudah mencerminkan nilai minimal sebagai hasil aplikasi pengelolaan berbasis teknologi informasi, dengan tetap mengacu pada level yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional.

Liabilitas

Total liabilitas di tahun 2014 turun 0,2% menjadi Rp438.988 miliar, terdiri dari 80,1% liabilitas jangka panjang dan 19,9% liabilitas jangka pendek. Peningkatan total liabilitas terjadi pada liabilitas jangka panjang yang naik 0,2% menjadi Rp351.429,7 miliar sebagai akibat realisasi pembangunan berbagai proyek stasiun pembangkit, transmisi dan distribusi.

Inventory

The inventories experienced an increase of 2.3% from the position Rp11.343,5 billion in 2013, amounting to Rp11,607.9 billion. The largest amount is fuel and lubricants, followed by a general allocations, switchgear and networking, and meter recording device and control equipment, wire and transformers.

The increase of inventory value occured in the components of fuel and lubricants, general inventory components, cables and transformers. This is happen due to the realization of plant maintenance and the need for operational improvements in fuel-fired power plant in Sumatra region that had experienced supply constraints due to reduced gas supplies to certain plants.

Although the information technology-based operational management applications, such as the roll-out of ERP in all business units, EAM application and GOLS application in several business units are still operated, operational of several new plants and supply disruptions in Sumatra create the increase of inventory value. Some parts of inventory should be imported when the rupiah weakened also affect the value of inventories that are recorded in rupiah currency.

The total inventories actually reflect the minimum value as a result of information technology-based management application, with reference to an adequate level to support operational activities.

Liabilities

Total liabilities in 2014 experienced a 0.2% increase to Rp438.988 billion, consisting of 80.1% long-term liabilities and 19.9% short-term liabilities. The increase in total liabilities occured in long-term liabilities which rose 0.2% to Rp351,429.7 billion as a consequence from development of various power generation stations, transmission and distribution projects.

Sementara untuk liabilitas jangka pendek yang turun 2% menjadi sebesar Rp87.558,3 miliar, kontributor penurunannya adalah akun utang obligasi, penerusan pinjaman, utang biaya proyek dan utang lain-lain. Penurunan utang obligasi karena adanya pelunasan atas obligasi yang jatuh tempo.

Meanwhile short-term liabilities 2% to Rp87.558,3 billion, which mainly contributed by the decrease of bonds liability, two-steps loan, project liability, and others. The decrease in bonds liability is caused by the repayment of bonds on due date.

Komposisi Liabilitas PLN (Rp miliar)
PLN Liability Composition (Rp billion)

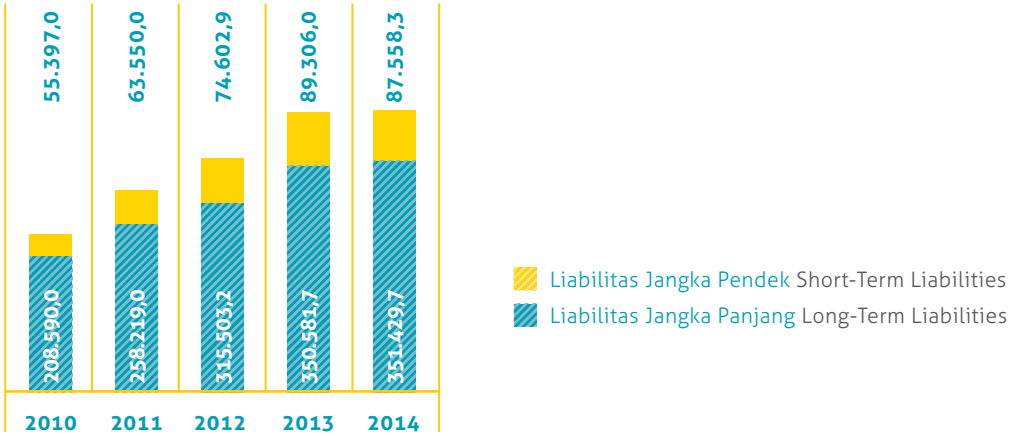

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang pada akhir tahun 2014 naik 0,2% menjadi Rp351.429,7 miliar. Komposisi liabilitas jangka panjang meliputi diantaranya utang sewa pembiayaan sebesar 36,5%, utang obligasi sebesar 23,2%, utang bank dan surat utang jangka menengah sebesar 20,0%, penerusan pinjaman sebesar 7,5%, liabilitas imbalan kerja sebesar 7,4%, dan beberapa akun lain dengan jumlah masing-masing kurang dari 3,0%.

Long-Term Liabilities

The long-term liabilities at the end of 2014 rose 0.2% to Rp351,429.7 billion. The composition of long-term liabilities comprises lease with 36.5%, bonds payable 23.2%, bank loans and medium term notes 20.0%, two step loans 7.5%, employee benefits obligations 7.4%, and other payable that each represents less than 3.0%.

Liabilitas Jangka Panjang	2013	2014	Perubahan Change	Komposisi Composition 2013	Komposisi Composition 2014	Long Term Liabilities
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	3.902,8	**3.752,8**	(3,8%)	1,1%	**1,1%**	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun						Long-term liabilities - net of current maturities
Penerusan pinjaman	29.498,1	**26.453,1**	(10,3%)	8,4%	**7,5%**	Two-step loans
Utang kepada pemerintah	8.578,7	**8.371,9**	(2,4%)	2,4	**2,4%**	Government loans
Utang sewa pembiayaan	129.718,6	**128.096,5**	(1,3%)	37,0%	**36,5%**	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	66.457,9	**70.400,2**	(5,9%)	19,0%	**20,0%**	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	81.018,0	**81.672,6**	(0,8%)	23,1%	**23,2%**	Bonds payable
Utang listrik swasta	6.784,3	**6.654,1**	(1,9%)	1,9%	**1,9%**	Payable to private party
Utang pihak berelasi	6,9	**7,3**	6,2%	0,0%	**0,0%**	Payable to related party
Liabilitas imbalan kerja	24.395,3	**25.922,4**	6,3%	7,0%	**7,4%**	Employee Benefits Obligation
Utang lain-lain	221,2	**98,8**	(55,3%)	0,1%	**0,0%**	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**350.581,7**	**351.429,7**	**0,2%**	**100,0%**	**100,0%**	**Total Non-current Liabilities**

Sesuai dengan sifat usaha yang padat modal dan periode pengembalian investasi yang berjangka waktu lama, komposisi liabilitas PLN mayoritas adalah liabilitas jangka panjang. Seperti ditunjukan dalam grafik berikut, selama tiga tahun terakhir prosentase liabilitas jangka panjang sangat dominan, yakni berada dikisaran 80% dari total liabilitas PLN.

In accordance with the nature of capital-intensive and long-term period od investment return, the composition of PLN liabilities is dominated by long-term liabilities. As demonstrated in the following graph, the long term liabilities percentage has been dominating in the last three years, i.e around 80% of total PLN liabilities.

Komposisi Liabilitas PLN (%)
PLN Liability Composition (%)

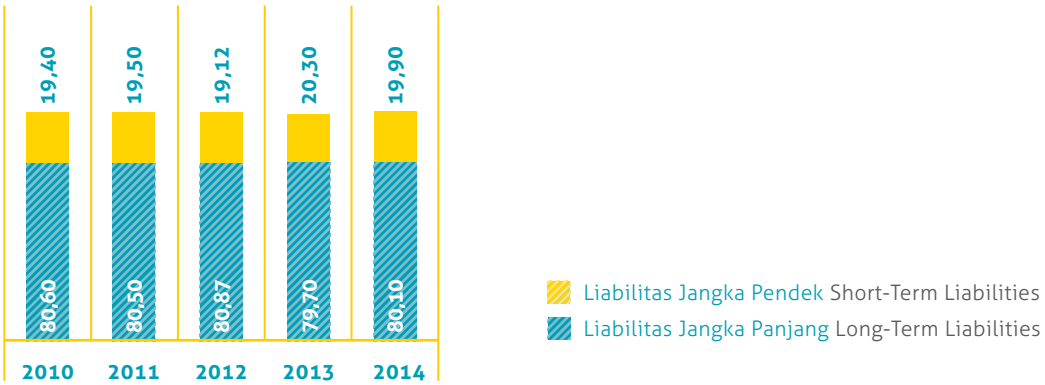

Utang Sewa Pembiayaan
Akun ini menunjukkan pencatatan nilai pembelian daya listrik oleh PLN terhadap pembangkit listrik milik swasta (*Independent Power Producer*/IPP). Dengan semakin banyaknya pembangkit milik sendiri yang telah selesai pembangunannya, pembelian daya listrik dari pembangkit swasta menurun sehingga nilai sewa pembiayaan juga turun. Oleh karenanya pada tahun 2014, akun utang sewa pembiayaan mencatatkan sedikit penurunan, sebesar 1,3% menjadi sebesar Rp128.096,5 miliar.

Mengingat adanya keterbatasan kemampuan PLN untuk membangun seluruh kekurangan instalasi pembangkit listrik, maka peran listrik swasta dalam memenuhi kebutuhan daya dimasa mendatang masih akan tetap besar. Sehingga akun utang sewa pembiayaan ini dimasa mendatang akan cenderung meningkat, selaras dengan naiknya pembelian daya listrik dari instalasi pembangkit IPP yang kini tengah dalam pembangunan maupun masih dalam perencanaan.

(Lihat kembali uraian "Pembangunan Instalasi Pembangkit" dan uraian MDNA "Prospek Permintaan Daya Listrik").

Utang obligasi
Posisi utang obligasi hanya mengalami peningkatan sebesar 0,8% dari posisi tahun 2013, menjadi sebesar Rp81.672,6 miliar. Hal ini karena pada tahun 2014 PLN tidak menerbitkan obligasi baru. Kenaikan lebih disebabkan oleh adanya dampak pelemahan nilai tukar rupiah, yang menyebabkan saldo obligasi berdenominasi mata uang asing meningkat nilainya. Penerbitan obligasi tersebut digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan instalasi pembangkitan, transmisi maupun distribusi.

Lease Liabilities
This account shows the recording of the electric power purchase value by PLN to private power plants (Independent Power Producer / IPP). With the increasing number of private power plant from FTP1 which has been operating so it makes the declining value of finance lease. Therefore in 2014, finance lease debt accounts recorded a moderate decline, by 1.3% to Rp128.096,5 billion.

Considering that the PLN has limited capability to build all the power plants needed, the role of private electricity in meeting the demands of power in the future will remain significant. Thus, the lease liabilities account will continue increasing in the future, in line with the increase of electrical power purchase from IPPs, both of which the construction is in progress and in planning phase.

(See the description of "Power Plant Development" and "Business Prospect of Electrical Power Demand").

Bonds Payable
Bond debt position is only increased by 0.8% from the year 2013, amounting to Rp81.672,6 billion. This is because in 2014 the company did not issue bonds. The increase is caused by the impact of rupiah weakening, which led to the balance of bonds foreign currency denomination bonds increased in value. Bonds issuance is used to finance various development project of power plant, transmission and distribution installation.

Utang Bank dan Surat Utang Jangka Menengah

Naik 5,9% dari posisi tahun 2013 menjadi sebesar Rp70.400,2 miliar. Peningkatan berasal dari pinjaman dalam rangka program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap 1 maupun program pembangunan pembangkit reguler. Pinjaman terdiri dari pinjaman perbankan.

Peningkatan akun ini lebih banyak berasal dari pencairan pinjaman bank, yakni The Export-Import Bank of China, Bank of China Limited dan sindikasi Barclays Bank PLC dengan China Development Bank serta beberapa bank dalam negeri, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Centra Asia.

Pinjaman dilakukan untuk membiayai 85% dari nilai kontrak *Engineering Procurement and Construction* (EPC) untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007 pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara.

Selain untuk program percepatan, pinjaman bank dilakukan untuk membiayai beberapa proyek konstruksi rutin yang dilakukan oleh PLN. Pinjaman ini berasal dari Bank Mandiri, BRI dan Pertamina. (lihat catatan 26 Laporan Keuangan Audit Konsolidasian)

Penerusan Pinjaman

Mengalami penurunan 10,3% dari posisi tahun 2013 menjadi sebesar Rp26.453,1 miliar. Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perseroan untuk membiayai proyek-proyek PLN. Penurunan terjadi karena adanya pelunasan sebagian pinjaman yang telah jatuh tempo.

Penyisihan Imbalan Kerja.

Jumlah penyisihan untuk manfaat pensiun dan kesejahteraan karyawan pada tahun ini naik 6,2% menjadi Rp25.922,4 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan disebabkan adanya penyesuaian terhadap imbalan kerja sebagai cerminan kepedulian PLN terhadap kesejahteraan pegawai yang merupakan aset utama Perseroan. PLN memandang pegawai sebagai aset utama sekaligus mitra dalam mengembangkan usaha dan meraih kinerja, oleh karenanya PLN berupaya memperhatikan kesejahteraan pekerja dengan memberikan imbalan yang layak sesuai kemampuan keuangan perusahaan.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek pada akhir tahun 2014 turun tipis 2,0% dari tahun sebelumnya, menjadi senilai Rp87.558,3 miliar. Komposisi liabilitas jangka pendek diantaranya meliputi utang usaha kepada pihak berelasi sebesar 14,5%, utang usaha kepada ketiga sebesar 15,6%, biaya masih harus dibayar 10,7%, utang jaminan langganan 12,4%, utang bank dan surat utang jangka panjang menengah yang akan jatuh tempo 10,9%, sewa pembiayaan sebesar 5,5% dan beberapa akun lain.

Bank Loans and Medium Terms Notes

Bank loans and medium term notes had an increase of 5.9% from the position in 2013 to a total of Rp70,400.2 billion. The increase is mainly because of loans for first phase of the 10,000 MW fast track program (FTP 1) and regular plant development program. The loans consists of bank loans.

The increase in this account was largely due to bank loan disbursement, i.e The Export-Import Bank of China, Bank of China Limited and syndicate Barclays Bank PLC and China Development Bank, as well as other domestic banks including Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri and Bank Centra Asia.

The loans were obtained to finance 85% of the Engineering Procurement and Construction (EPC) contract value for the fast track program. The loans are fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia pursuant to Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (PP) No. 91 Year 2007, superseding No. 86 Year 2006, regarding Grant of Government Guarantee for Construction of Coal-Fired Power Plant.

In addition to the FTP, bank loans were obtained to finance several routine construction projects carried out by PLN. The loans were derived from Bank Mandiri, BRI and Pertamina. (See Note 26. PLN Consolidated Financial Statement (Audited).

Two Step Loans

Two step loans experienced a decrease of 10.3% from the 2013's position to Rp26,453.1 billion. This account constitutes unsecured foreign loan of the government of the Republic of Indonesia passed on to and maintained by the company for financing company projects. The decrease was In line with the some overdue payment.

Employee Benefits Allowance

Total allocation for the pension program and employee welfare this year experienced growth of 6.2% to Rp25,922.4 billion from the previous year. The increase was due to adjustment to employee benefits allowance, a reflection of PLN's care for the welfare of employee, which is the Company's main asset. PLN views employee as a main asset and a partner in developing the business and performing, and that is why the Company seeks to pay attention to employee's welfare by providing appropriate benefits in line with company's financial ability.

Short-Term Liabilities

Short-term liabilities in the end of 2014 slightly decreased by 2.0% from the previous year to Rp87,558.3 billion. The short-term liabilities components are trade accounts payable assumed by payables to related parties 14.5% and third parties payable 15.6%, accrued expenses 10.7%, customer security deposits 12.4%, current maturities of bank loans and medium and long-term notes 10.9% lease liabilities 5.5% and other accounts.

Posisi Liabilitas Jangka Pendek Perseroan (Rp miliar)
Company's Short-Term Liabilities Position (billion Rp)

Keterangan	2013	2014	Perubahan Change	Komposisi Composition 2013	Komposisi Composition 2014	Remarks
LIABILITAS JANGKA PENDEK						SHORT TERM LIABILITIES
Utang usaha						Trade accounts payable
Pihak berelasi	12.136,7	**12.655,0**	4,3%	13,6%	**14,5%**	Related parties
Pihak ketiga	14.389,8	**13.629,2**	(5,3%)	16,1%	**15,6%**	Third parties
Utang pajak	1.222,4	**1.151,2**	(5,8%)	1,4%	**1,3%**	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	8.714,0	**9.403,2**	7,9%	9,8%	**10,7%**	Accrued expenses
Uang jaminan langganan	10.107,4	**10.828,5**	7,1%	11,3%	**12,4%**	Customer security deposits
Utang biaya proyek	1.061,5	**857,7**	(19,2%)	1,2%	**1,0%**	Project cost payable
Pendapatan ditangguhkan	990,0	**1.307,0**	31,9%	1,1%	**1,5%**	Deferred revenue
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun						Current maturities of long-term liabilities
Penerusan pinjaman	3.209,0	**2.644,6**	(17,6%)	3,6%	**3,0%**	Two-step loans
Utang kepada pemerintah	293,8	**293,8**	0,0%	0,3%	**0,3%**	Government loans
Utang sewa pembiayaan	4.901,5	**5.116,4**	4,4%	5,5%	**5,8%**	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	8.387,9	**9.527,7**	13,6%	9,4%	**10,9%**	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	2.808,0	**805,0**	(71,3%)	3,1%	**0,9%**	Bonds payable
Utang listrik swasta	272,5	**291,7**	7,1%	0,3%	**0,3%**	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	2,8	**-**	(100,0%)	0,0%	**0,0%**	Payable to related parties
Liabilitas imbalan kerja	2.584,5	**2.700,1**	4,5%	2,9%	**3,1%**	Employee benefits obligation
Utang lain-lain	18.223,4	**16.347,2**	(10,3%)	20,4%	**18,7%**	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	89.306,0	**87.558,3**	(2,0%)	100,0%	**100,0%**	**Total non-current liabilities**

Utang Usaha

PLN melakukan pembelian beberapa jasa dan barang tertentu dari para pemasok utama untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, dengan term pembayaran sesuai kesepakatan dan dicatat pada akun utang usaha. Beberapa jasa dan bahan pokok yang dipasok tersebut meliputi: bahan bakar (BBM, Batubara dan Gas), tenaga listrik, pelumas dan jasa konsultasi dengan pemasok utama adalah perusahaan-perusahaan besar, seperti PT Pertamina, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Sumber Segara Primadaya, PT Bajradaya Sentranusa, PT Paiton Energy, PT Jawa Tower dan sebagainya.

Mengingat kesamaan pada struktur kepemilikan perusahaan pemasok, maka utang usaha PLN dicatat pada dua sub-akun, yakni utang usaha dengan pihak berelasi dan utang usaha pada pihak ketiga lainnya.

Utang usaha pihak berelasi kembali naik 4,3% menjadi Rp12.655,0 miliar dari posisi di tahun 2013. Kenaikan terjadi karena bertambahnya volume penggunaan batubara dengan tingkat harga yang belum mengikuti trend penurunan harga energi. Pembelian batubara dilakukan dalam jangka panjang dengan tingkat harga ditinjau setiap periode tertentu. PLN memiliki kebijakan untuk meningkatkan penggunaan batubara dan gas sebagai sumber energi primer yang lebih murah dibandingkan dengan BBM.

Trade Accounts Payable

PLN purchased certain service and goods from main suppliers in order to meet its operational needs, of which the terms of payment are commonly agreed and recorded in trade payable account. Among the services and staple goods supplied are fuels (oil fuels, coal and gas), electrical power, lubricants and consultation service, and the main suppliers are large companies including PT Pertamina, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Sumber Segara Primadaya, PT Bajradaya Sentranusa, PT Paiton Energy, PT Jawa Tower and others.

Considering the similarities in the ownership structure of the supplying companies, PLN's payable was recorded in two sub-accounts, i.e trade accounts payable to related party and trade accounts to third parties.

Trade account payables to related parties increase 4.3% to Rp12,655.0 billion from the position in 2013. The increase is caused by increase in consumption of coal that was purchased on higher price than the current decreasing trend of coal price. Coal purchase is done on a long term basis on price that is reviewed regularly every certain period. PLN has the policy to increase the use of coal and gas as primary energy sources that is lower than fuel (petrol and diesel).

Utang usaha kepada pihak ketiga turun, 5,3% dari posisi tahun sebelumnya menjadi Rp13.629,2 miliar, terutama karena turunnya pembelian listrik dari pembangkit listrik swasta (non IPP), yakni dari PT Paiton Energy, Star Energy, Chevron Geothermal Salak, dan lain-lain. Serta turunnya harga pembelian bahan bakar kepada pihak ketiga lain selaras dengan penurunan harga bahan bakar di tahun 2014 (Lihat catatan 30. Laporan Keuangan Audit Konsolidasian PLN).

Trade account payable to third parties increase moderately at 5.3% from the previous year to Rp13,629.2 billion, particularly due to the decrease in total electricity purchase from private plants (non IPP), i.e PT Paiton Energy, Star Energy, Chevron Geothermal Salak, and others. Moreover, the decreasing price of fuel purchased from third parties are in line with the trend of decreasing price in 2014. (See Note 30 Consolidated Financial Statements (Audited).

Biaya Masih Harus Dibayar

Naik sebesar 7,9% dari tahun 2013 menjadi sebesar Rp9.403,2 miliar disebabkan adanya penundaan pembayaran kewajiban pihak berelasi yang jatuh tempo, meliputi: utang bank swasta, utang penerusan pinjaman. Selain itu dilakukan pula penundaan pembayaran kewajiban terhadap pihak ketiga utang bank serta penundaan pembayaran kewajiban biaya operasional yang jatuh tempo.

Accrued Expenses

An decrease of 7.9% from the year 2013 amounted to Rp9,403.2 billion due to deferred maturities payment of obligations to related parties, comprising private bank loans and two-step loans. There is also deferred payment obligation to third parties which consist of bonds payable and bank loans and the deferred maturity of operational charges obligation payment.

Uang Jaminan Langganan

Naik moderat sebesar 7,1% dari posisi tahun 2013, menjadi sebesar Rp10.828,5 miliar. Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besaran daya dan golongan tarif. Berlakunya ketentuan TTL baru dan naiknya jumlah pelanggan baru, maupun pelanggan yang menambah daya membuat jumlah uang jaminan meningkat.

Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar.

Customer Security Deposits

The customer security deposits increased moderately at 7.1% from the position in 2013, to Rp10.828,5 billion. This account constitutes the customer's security deposits which the amount is set based on the resources and tariff category. The new electricity tariffs and the increase of total customers as well as power upgrading customers raised the amount of customer security deposits.

The security deposits will be returned upon subscription termination, taking into account the outstanding bills.

Utang Bank dan Surat Utang Jangka Menengah

Naik 13,6% dari posisi tahun 2013 menjadi sebesar Rp9.527,7 miliar terutama karena telah jatuh temponya beberapa fasilitas pinjaman bank, baik dari bank BUMN maupun dari bank swasta dalam dan luar negeri.

Utang bank yang jatuh tempo tersebut mayoritas berasal dari pinjaman dalam rangka program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap 1. Sebagian besar posisi akun ini juga dicatat pada bagian Liabilitas Jangka Panjang, dengan nama akun yang sama. (Lihat catatan 26. Laporan Audited Konsolidasian PLN).

Bank Loans and Medium Term Notes

The banks loans and medium term notes rose significantly at 13.6% from the 2013's position totaled Rp9,527.7 billion, primarily as the maturities of some bank loans, either state-owned banks or private local and international banks.

These maturities bank loans came from loans intended for 10,000 MW Fast Track Program Phase 1. The majority position of this account was recorded in long-term liabilities under same account name. (See note 26. PLN Consolidated Financial Statements (Audited).

Ekuitas

Equity

Struktur Ekuitas PLN (miliar)
PLN Equity Structure (billion)

Keterangan	2013	2014	Perubahan Change	Komposisi Composition 2013	Komposisi Composition 2014	Remarks
Modal dasar - 63.000.000 saham						63.000.000 basic equity share
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 46.107.154 saham	46.197	**46.197**	-	30,7%	**28,1%**	Subscribed and paid up 46.107.154 shares
Tambahan modal disetor	49.901	**52.497**	(5%)	33,2%	**31,9%**	Additional paid - in capital
Saldo laba						Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	19.109	**19.109**	(0%)	12,7%	**11,6%**	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	35.031	**46.814**	34%	23,3%	**28,4%**	Unappropriated
Sub Jumlah	150.238	**164.617**	10%			Sub total
Kepentingan non-pengendali	93	**54**	(42%)	0,1%	**0,0%**	Non - controlling interests
Jumlah Ekuitas	**150.331**	**164.671**	**10%**			**Total Equity**

Ekuitas (Modal) Perseroan kembali naik 10% dari posisi tahun 2013 menjadi sebesar Rp164.671 miliar. Ekuitas perusahaan terdiri atas modal ditempatkan dan disetor penuh dengan komposisi 28,1% dari total modal senilai Rp46.197 miliar, tambahan modal disetor 31,9% dari total modal senilai Rp52.497 miliar dan saldo laba, masing-masing telah ditentukan penggunaannya senilai Rp19.109 miliar dan Rp46.814 miliar belum ditentukan penggunaannya.

Peningkatan ekuitas terjadi karena laba bersih tahun buku yang naik substansial akibat adanya penyesuaian TTL dari kebijakan penghapusan subsidi beberapa golongan dan keberhasilan PLN dalam menerapkan strategi CRMP.

Total PLN equity (capital) rose 10% from 2013's position to Rp164.671 billion. The company's equity comprises subscribed and paid-up capital, representing 28.1% of the total capital amounting to Rp46.197 billion; additional paid-in capital, 31.9% totaling Rp52.497 billion; as well as appropriated and unappropriated retained earnings which respectively amounted to Rp19,109 billion and Rp46.814 billion.

The increase in equity occurred because net profit rose significantly due to the electricity tariff and subsidy elimination policy and PLN's success in implementing CRMP strategy.

Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal

Struktur modal PLN di tahun 2014 terdiri dari 72,7% berupa liabilitas dan 27,3% berupa ekuitas. Liabilitas PLN sebagian digunakan untuk membiayai modal investasi pembangunan infrasturktur ketenagalistrikan berupa instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, sebagian digunakan untuk memenuhi modal kerja. Sedangkan ekuitas seluruhnya digunakan untuk membiayai modal investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan menutup risiko usaha.

Capital Structure and Capital Structure Policy

PLN's 2014 capital structure consists of 72.7% liability and 27.3% equity. PLN's liabilities are mostly used to finance investment capital in electricity infrastructure development, namely power plants, transmission and distribution networks, while the remaining is for work capital. Meanwhile, equity is entirely used to finance investment capital in electricity infrastructure development and covering business risks.

Struktur Modal (dalam miliar)
Capital Structure (in billion)

Keterangan	2013	Komposisi Composition	2014	Komposisi Composition	Remarks
Liabilitas	439.888	74,53%	438.988	72.72%	Liabilities
Ekuitas	150.331	25,47%	164.671	27,28%	Equity
Jumlah ekuitas	**590.219**	**100,00%**	**603.659**	**100,00%**	**Total Equity**

Kebijakan Struktur Modal

Perseroan menetapkan kebijakan terkait struktur modal yang meliputi:

1. Struktur modal mencerminkan keseimbangan antara risiko keuangan dan tingkat pengembalian untuk meningkatkan nilai perusahaan.
   - Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan penggunaan hutang yang proporsional untuk menjaga kemampuan pambayaran kewajiban keuangan (tingkat bunga) dan pokok pinjaman yang sejalan dengan pengendalian likuiditas perusahaan.
   - Mengoptimalkan rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri.
2. Struktur modal ditinjau dengan melakukan evaluasi hubungan antara *financial leverage*, nilai perusahaan dan biaya modal.
3. Struktur modal terdiri atas kombinasi yang optimal atas hutang dan modal sendiri (ekuitas) yang dapat memaksimalkan nilai Perseroan dan memastikan pelaksanaan program pengembangan usaha.
4. Kombinasi struktur modal yang mencakup perbandingan ekuitas terhadap likuiditas ditetapkan melalui pelaksanaan analisa sensitivitas dengan berbagai variasi asumsi inti yang paling mungkin dihadapi oleh PLN.
5. Perseroan juga menetapkan kebijakan struktur modal dengan menetapkan persentasi perbandingan jumlah liabilitas terhadap jumlah aset tidak lebih dari 80%.

Capital Structure Policy

The Company established capital structure policy, consisting of:

1. Capital structure reflects the balance between financial risks and rate of returns to increase company values.
   - This is implementing by taking into account proportional loan utilization in order to maintain financial obligation payment ability (interest rate) and collateral in line with the control over company liquidity.
   - Optimizing economic rentability and equity rentability
2. Capital structure is reviewed through evaluation of the relations among financial leverage, company values and capital cost.
3. Capital structure comprises an optimum combination of loans and equity that can increase the Company values to the maximum and ascertain business development program.
4. The capital structure combination which embodies the comparison between equity and liquidity is set through analysis of sensitivity that takes into account of various core assumptions that PLN wouls most likely face.
5. The Company also applies capital structure policy by setting the percentage of liability agains asset which no more than 80%.

Modal Kerja Bersih

Tahun 2014 modal kerja Perusahaan adalah sebesar negatif Rp2.134,5 miliar naik dari modal kerja di tahun 2013 yang sebesar negatif Rp4.468,8 miliar. Peningkatan modal kerja bersih terjadi karena adanya peningkatan aktifitas Perseroan, seperti peningkatan daya listrik dari realisasi pembangunan pembangkit, penambahan pelanggan dan jumlah daya listrik terjual.

Naiknya Tarif Tenaga Listrik, membuat nilai penjualan PLN meningkat secara substansial berkontribusi terhadap kenaikan piutang usaha *(account receivable)*, sehingga membuat PLN mampu memenuhi kebutuhan modal kerja dari kegiatan operasional.

Net Working Capital

In 2014, the Company's working capital amounted to positive Rp2,134.5 billion, an increase from positive Rp4,468.8 billion in 2013. The increase in working capital occured because of the rising in Company's activities, including power capacity increase from power plant development, additional customer and total electrical power sold.

The increase in electricity tariff caused PLN's sales amount rose substantially which contributed to the increase in account receivable so that it makes PLN able to meet the work capital needs from operational activities.

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan (dalam miliar)
Analysis on Company Statements of Comprehensive Income (in billion)

Keterangan	2013	2014	Perubahan Change	Remarks
PENDAPATAN USAHA				REVENUES
Penjualan tenaga listrik	153.485,6	**186.634,0**	21,6%	Sale of electricity
Subsidi listrik pemerintah	101.207,9	**99.303,3**	(1,9%)	Government electricity subsidy
Penyambungan Pelanggan	6.207,8	**5.623,9**	(6,7%)	Customer connection fees
Lain-lain	1,125.8	**1.159,5**	3,0%	Others
Jumlah Pendapatan Usaha	**261.847,0**	**292.720,7**	**11,8%**	**Total Revenues**
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	147.633,8	**170.487,9**	15,5%	Fuel and lubricant
Pembelian tenaga listrik	2.393,8	**3.492,7**	45,9%	Electricity Power Purchase
Sewa	8.114,1	**7.866,3**	(3,1%)	Lease
Pemeliharaan	19.839,5	**20,206,7**	1,9%	Maintenance
Kepegawaian	15.555,1	**15.749,5**	1,2%	Personnel
Penyusutan	21.893,7	**23.618,3**	7,9%	Depreciation
Lain-lain	5.481,3	**5.488,6**	0,1%	Others
Jumlah Beban Usaha	**220.911.1**	**246,910.0**	**11,8%**	**Total Operating Expense**
LABA USAHA	40.935,9	**45.811,2**	11,9%	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER REVENUES/EXPENSES
Penghasilan Bunga	736,4	**584,1**	(20,7%)	Interest income
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(48.096,8)	**1.319,3**	(102,7%)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Beban Keuangan	(30.146,5)	**(35,971,2)**	(19,3%)	Financial cost
Lain-lain - bersih	1.792,1	**4.157,0**	132,0%	Others - Net
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	(75.714,9)	**(29.910,8)**	(60,5)%	Others income/expense - Net
LABA SEBELUM PAJAK	(34.779,9)	**15.900,4**	145,7%	INCOME BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	8.543,3	**(4.158,8)**	148,7%	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(26.235,6)	**11.741,6**	144,8%	INCOME FOR THE YEAR AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Laba tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				Income for the year and total comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk (Laba Bersih)	(26.232,0)	**11.726,4**	144,7%	Owners of the Company
Kepentingan Non Pengendali	(3,6)	**15,2**	524,6%	Non-controlling Interest
Jumlah	**(26.235,6)**	**11.741,6**	**144,8%**	**Total**
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	(567.825)	**253.833**	144,7%	BASIC EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah amount)

Pendapatan Usaha

Pendapatan PLN terutama berasal dari penjualan tenaga listrik kepada pelanggan, pendapatan subsidi, jasa penyambungan pelanggan dan lain-lain. Total pendapatan usaha PLN di tahun 2014 sebesar Rp292.721,2 miliar, naik 11,8% dari total pendapatan usaha pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan tugas awalnya sebagai pelaksana *Public Service Obligation* (PSO) dibidang penyediaan tenaga listrik, PLN mendapatkan subsidi dari Pemerintah. Subsidi ini diperhitungkan berdasarkan pada selisih negatif antara harga jual rata-rata dari masing-masing golongan tarif dikurangi biaya pokok penyediaan tenaga listrik dari masing-masing golongan tarif. (Lihat penjelasan "Subsidi Listrik"; Biaya Pokok Pengadaan" dan "Tarif Tenaga Listrik")

Pendapatan Penjualan Listrik

Pendapatan dari penjualan tenaga listrik di tahun 2014 naik 21,6% dari tahun 2013 menjadi sebesar Rp186.634,5 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan daya listrik terjual dan berlanjutnya realisasi kenaikan TTL sebagai berikut.

Revenues

PLN's revenue mainly comes from electric power sales to customers, subsidies, customer connection fees and others. Total revenue in 2014 was Rp291,720.2 billion or an 11.8% increase from the revenue in previous year.

According to its basic task as the executor of Public Service Obligation (PSO) in electric power supply, PLN receives subsidies from the government. The subsidy amount is set calculated based on the negative difference between the average sales price from each tariff category minus Basic Cost of Electricity Production of each tariff category. (See the description of "Electricity Subsidy"; "Basic Cost of Electricity Production" and "Electricity Tariff").

Revenue from Electricity Sales

Total revenue from electricity sales in 2014 has an increase of 21.6% from 2013's position amounted to Rp186,634.5 billion. This increase caused by the growth of electric power sold and increasing of average electricity price as follows:

Keterangan	2013	2014	Perubahan Change	Remarks
Daya Listrik Terjual (Gwh)	187.541	**198.602**	(5,9%)	Electric Power Sold (Gwh)
Rata-rata Tarif Tenaga Listrik (Rp/kWh)	818,41	**939,74**	(14,8%)	Average Electricity Tariff (Rp/kWh)

Pertumbuhan daya listrik terjual terutama berasal dari penambahan jumlah pelanggan yang naik 6,48%, atau Rp3,49 juta pelanggan di tahun 2014. Hasilnya, kendati kondisi perekonomian di tahun 2014 masih kurang kondusif, dimana pelanggan industri mengurangi kegiatan dan konsumsi listrik, total daya listrik terjual tetap naik.

Pada tahun 2014, berlanjutnya pemberlakuan kenaikan TTL secara otomatis dan periodik, sesuai Peraturan Menteri ESDM no.30 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Tarif Tenaga Listrik, membuat rata-rata tarif tenaga listrik untuk seluruh golongan tarif naik sebesar 14,8%.

Seperti tampak pada tabel berikut, berdasarkan kelompok pelanggan, maka kontribusi kenaikan pendapatan penjualan listrik terutama berasal dari kelompok umum, yang meliputi rumah tangga, industri dan bisnis, yang naik sebesar 22,3%. Kelompok pelanggan lain yang naik adalah Lembaga Pemerintah dan Kementerian serta kelompok TNI & Polri.

The growth of electric power sold mainly came from the increase of total costumer at 6.48% to Rp3.49 billion in 2014. Despite the economic condition in 2014 was less conducive, the customers reduces activities and electricity consumption so the total electric power sold remains increased.

In 2014, the electricity tariff hike is continuous automatically and gradually, pursuant to the Energy and Mineral Resources Minister Regulations No. 30 of 2012 dated December 21, 2012 on Electric Power Tariff. The application of the new tariff caused the average electricity tariff for all tariff classes increased at 14.8%.

As demonstrated by the table below, based on customer group, the increasing contribution of revenue from electricity sales was mainly from the general customer group, consisting of household, industry and business, which increase by 22.3%. Other customer group which contributed an increase are Institutions and Ministries group as well as military and police group.

Dalam Rp Miliar In Billion Rp

Keterangan	2013	2014	Perubahan Change	Remarks
BUMN - Pihak Berelasi	5.414	**5.084**	(1,1%)	SOE - Related Parties
Pihak Ketiga				Third parties
Umum	141.054	**172.517**	22,3%	Public
Pemerintah	6.360	**8.017**	26,1%	Government
TNI dan POLRI	931	**1.016**	9,1%	Military and Police
Subtotal Pihak Ketiga	148.354	**181.550**	22,4%	Subtotal of Third Parties
Total Penjualan Listrik	**153.486**	**186.634**	**21,6%**	**Total Sales of Electric Power**

Pendapatan Subsidi

Seperti telah diuraikan sebelumnya, PLN wajib menyediakan tenaga listrik dengan harga jual yang terjangkau oleh seluruh pelanggannya, walaupun harga jual tersebut berada dibawah-rata-rata biaya penyediaan tenaga listrik (BPP).

Sampai akhir tahun 2014 sebagian pelanggan PLN masih membayar penggunaan tenaga listrik dengan tarif subsidi, karena membayar pemakaian daya dengan tarif dibawah biaya pokok pengadaan. Tahun 2014 nilai rata-rata BPP adalah sebesar Rp1.424/kWh, sementara harga rata-rata tarif listrik yang dikenakan adalah sebesar Rp939,74/ kWh, naik dari rata-rata tahun 2013 yang sebesar Rp818,41/KWh sebagai realisasi penyesuaian TTL.

Selisih kekurangan pembayaran tarif listrik tersebut dikalikan dengan jumlah penggunaan tenaga listrik yang terjual menjadi dasar penetapan subsidi listrik. (lihat kembali uraian "Biaya Pokok Penyediaan", "Tarif Tenaga Listrik" dan "Subsidi Listrik").

Realisasi subsidi di tahun 2014 adalah sebesar Rp99.303,3 miliar, hanya turun 1,9%, dari nilai sebesar Rp101.207,9 miliar di tahun 2013. Nilai subsidi tersebut merupakan wujud dukungan Pemerintah terhadap PLN untuk merealisasikan investasi pengembangan ketenagalistrikan dan menjaga rasio kecukupan modal terhadap hutang sesuai *covenant* yang ditentukan.

Penentuan besaran subsidi listrik melalui serangkain proses yang melibatkan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK – RI), yang telah mendapatkan akses terhadap pencatatan pembukuan keuangan PLN sesuai kerjasama antara BPK dan PLN dan pembahasan intensif antara PLN, Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian Keuangan dan DPR. (lihat kembali uraian "Subsidi Listrik").

Pendapatan Jasa Penyambungan

Pendapatan jasa penyambungan pelanggan turun 6,7% dari tahun 2013 menjadi sebesar Rp5.623,9 miliar karena berkurangnya permintaan sambungan baru dari kelompok pelanggan dari golongan tarif R-2 keatas, termasuk komersial dan bisnis sebagai dampak pelemahan kegiatan ekonomi. Sekalipun terdapat tambahan pelanggan baru sebesar 3,49 juta, namun sebagian besar adalah pelanggan dari golongan R-1 dengan daya yang rendah dan jumlah jasa penyambungan yang terbatas.

PLN mengenakan biaya penyambungan dengan jumlah yang berbeda sesuai golongan tarif, dengan kebijakan umum adalah semakin meningkat, sejalan dengan naiknya golongan tarif pelanggan. (lihat kembali uraian "Jumlah Pelanggan" dan "Daya Tersambung").

Pendapatan lain-lain

Meningkat 3,0% dari tahun 2013 menjadi sebesar Rp1.159,5 miliar. Pendapatan lain-lain ini berasal dari penjualan jasa yang dilakukan oleh unit bisnis PLN maupun anak usaha yang bergerak diberbagai bidang yang berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jaringan telekomunikasi, perbaikan mesin pembangkit, sewa transformator dan jasa lain-lain. (Lihat kembali "Struktur Usaha PLN").

Konsistensi Pemerintah dalam membangun ketenagalistrikan membuat permintaan jasa-jasa tersebut naik, dan mempengaruhi pendapatan anak usaha. Rincian pendapatan lain-lain yang berasal dari unit bisnis, anak usaha maupun kegiatan PLN lainnya adalah sebagai berikut.

Subsidy Revenue

As previously explained, PLN is obliged to provide electric power at sales prices affordable to all its customers, even though the prices are lower than the average electricity basic cost of electricity production (BPP).

Until the end of 2014, most of PLN customer paid for electric power usage with subsidized tariff and the tariff is below the BPP. In 2014, the average BPP if Rp1.424/kWh, while the electricity tariff that is charged is Rp939,74/kWh on average, rose from 2013 of Rp818.41/kWh as the result of tariff adjustment.

The negative difference of the electricity tariffs paid multiplied by the amount of electric power sold constitutes the basis of electricity subsidy establishment. (See the description of "Basic Cost of Procurement", "Electricity Tariffs" and "Electricity Subsidy").

The subsidy in 2014 amounted to Rp99,303.3, a 1,9% lower from Rp101,207.9 billion in 2013. The subsidy is a result of Government's support for PLN to development electricity investment and maintain adequate capital ratio for the loan according to the specified agreement.

The subsidy amount established thought a series of process involving inputs from the Indonesia Supreme Audit Board, which has been granted access to PLN's financial recording in accordance with the cooperation between BPK and PLN; and intensive discussions among PLN, Electricity Directorate General, Finance Minister and House of Representative. (see the description of "Electricity Subsidy").

Revenue from Customers Connection Fees

Revenue from customers connection fees experienced a decrease of 6.7% from 2013 to Rp5,623.9 billion, which was due to to the decrease in demand for new connection from R-2 customer type including commercial and businesses as the impact of weak economic condition. Even with the additional 3,49 million of new customers, most of the new customers are an R-1 customer type which buy low power and low number of connection.

PLN charged a connection fee which is different based on the tariff class with the policy that the fee increase for hinger tariff class. (look at discussion on "Customer" and "Power Connected").

Other Revenues

Other revenues rose 3.0% from 2013 ro Rp1,159.5 billion. This account comprises service sales by PLN business units or subsidiaries which are engaged in a variety of business lines related to electricity business, such as telecommunication network, power plant machine repair and transformer lease. (See "PLN Company Structure").

The consistency of government in developing electricity creates the increase of demand service and affect subsidiaries revenue. Details of the other revenue from business unit, subsidiary and other PLN activities are as follows.

Dalam Rp Miliar In Billion Rp

Keterangan	2013	2014	Perubahan Change	Remarks
Jaringan dan Jasa Telekomunikasi	652	718	10,2%	Telecommunication network and service
Perubahan daya Tersambung dan administrasi	34	46	35,0%	Upgrading of electricity power and administration fees
Sewa Transformator	133	198	49,5%	Transformer rental
Jasa-jasa dan lainnya	308	197	(35,9%)	Services and others
Jumlah	**1.126**	**1.160**	**3,0%**	**Total**

Beban Usaha

Operating Expenses

Dalam Rp Miliar In Billion Rp

Keterangan	2013	2014	Perubahan Change	Remarks
Bahan bakar dan pelumas	147.634	170.488	15,5%	Fuel and lubricant
Pembelian tenaga listrik	2.394	3.493	45,9%	Electricity Power Purchase
Sewa	8.114	7.866	(3,1%)	Lease
Pemeliharaan	19.839	20.207	1,9%	Maintenance
Kepegawaian	15.555	15.749	1,2%	Personnel
Penyusutan	21.894	23.618	7,9%	Depreciation
Lain-lain	5.481	5.489	0,1%	Others
Jumlah Beban Usaha	**220.911**	**246.910**	**11,8%**	**Total Operating Expense**

Beban usaha di tahun 2014 naik 11,8% dari tahun 2013, menjadi Rp246.910 miliar, lebih tinggi dari kenaikan 8,8% pada periode sebelumnya. Beberapa hal diluar kendali PLN menjadi penyebab naiknya beban usaha secara substansial di tahun 2014.

Komponen beban usaha yang terbesar adalah penggunaan bahan bakar dan pelumas. PLN berupaya keras mengganti penggunaan BBM dengan bahan bakar lain yang lebih ekonomis. Namun demikian, pelemahan rupiah yang masih berlanjut dan adanya gangguan pasokan gas, membuat PLN harus mengoperasikan pembangkit menggunakan BBM demi menjaga berlanjutnya pemadaman bergilir di Sumatera.

Penghematan komponen lain diantaranya dilakukan melalui pelaksanaan tender secara elektronik *(e-procurement)* untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa rutin, serta pelaksanaan tender terbuka untuk pembangunan instalasi pembangkit dan transmisi/distribusi, sementara efisiensi operasional dilakukan melalui perbaikan sistem kerja dan sistem bisnis dengan dukungan aplikasi berbasis teknologi informasi, seperti penerapan AP2T, P2APST, *roll-out* ERP di tingkat unit bisnis dan beberapa aplikasi sistem operasi berbasis TI lainnya.

Komposisi beban usaha yang dominan lainnya dalam penyediaan listrik adalah beban pemeliharaan, beban pegawai dan pembelian tenaga listrik. Penyebab utama terjadinya kenaikan beban usaha di tahun 2014 dan upaya pengendalian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Total operating expenses in 2014 rose 11.8 % from 2013 to Rp246.910 billion, higher than the 8.8% increase in the previous period. PLN is the cause of substantial increase in operating expenses in 2014.

The largest operating expenses component is the fuel and lubricants expense. PLN seeks to replace oil-based fuels with more economical fuels. However, the rupiah depreciation that still continues and a disruption of gas supplies, makes PLN must operate power plants using fuel in order to maintain the rolling power outages in Sumatra.

The other saving component is the implementation of electronic tender (e-procurement) fot the provision of regular goods and services; and an open tender for power generation stations and transmission/distribution development. While operational efficiency was carried out through the work system and business system improvement supported by an information technology-based application, such as (Central Application of Management and Customer) AP2T and Centralized Management and Supervision of Revenue Flow (P2APST) implementation, roll-out ERP in business unit level and other information technology-based application.

The other dominant components in operating expense composition are maintenance expense, personnel expense and expense for electricity purchase. The main causes of increase in operating expenses in 2014 and the controlling efforts taken are as follows:

1. Beban bahan bakar dan pelumas naik 15,5% menjadi Rp170.487,9 miliar. Kenaikan pada sub akun ini disebabkan oleh peningkatan biaya pembelian bahan bakar BBM maupun non-BBM (batubara dan gas) yang masing-masing naik sebesar 7,0% menjadi Rp73.173,4 miliar untuk BBM dan naik 22,9% menjadi sebesar Rp97.039,5 miliar untuk non-BBM.
   Laju pertumbuhan biaya ini lebih rendah dari periode sebelumnya yang sebesar 21,8%. Penurunan harga rata-rata batubara berkontribusi terhadap penurunan tersebut, sehingga kenaikan biaya pembelian batubara tidak sejalan dengan kenaikan konsumsi batubara walaupun ada tambahan pembangkit baru. Sebaliknya beban pembelian untuk gas alam bertambah, seiring dengan bertambahnya jumlah pembangkit berbahan bakar gas, sebagai hasil pembangunan maupun hasil konversi.
   Beban pembelian BBM naik 7,0% menjadi sebesar Rp73.173,4 miliar. Kondisi tersebut sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk memastikan berakhirnya pemadaman bergilir di Sumatera akibat hambatan pasokan gas. PLN kemudian mengoperasikan pembangkit berbahan bakar BBM untuk menutupi defisit pasokan listrik. BBM memberikan biaya pembangkitan per kWh yang paling tinggi dibandingkan batubara dan gas.
   Biaya pembelian batubara akan semakin meningkat dimasa mendatang sejalan dengan penyelesaian pembangunan pembangkit dalam FTP-1 yang mayoritas berbahan bakar batubara. Selain batubara, penggunaan gas juga akan semakin meningkat, mengingat semakin banyak stasiun pembangkit yang dikonversikan menjadi berbahan bakar gas.
   PLN juga memiliki target untuk menggunakan bahan bakar nabati sebagai alternatif sumber energi baru terbarukan dalam pembangkitan tenaga listrik. Penggunaan BBN ini diharapkan membuat kualitas bauran energi semakin baik, dengan biaya yang semakin rendah.

1. Fuel and lubricant expenses increased 15.5% to Rp170,487.9 billion. The increase in this account was mainly attributed to the increase in cost for oil fuel and non-oil fuel (coal and gas) which rose 7.0% to Rp73,173.4 billion for oil fuel and an increase of 22.9% to Rp97,039.5 billion for non-oil fuel.

   The growth of this expense is slower than the previous period of 21.8%. The decrease of average coal price contributed to the slowdown, so the increase of coal purchase cost was not in line with the increase of coal consumption, in spite of additional new power plants. On the other hand, expense for natural gas purchase increased, in line with the increase of the total gas-fired power plants as the result of development and conversion.

   The expense of fuel purchases rose 7,0% to Rp73,173.4 billion. The condition is in line with the Company's policy to ensure the end of rolling power outages in Sumatra due to gas supply constraints. PLN then operates oil fuel plants to cover the deficit of electricity supply. Oil fuel provides highest generation cost per kWh compared to coal and gas.

   The cost for coal purchase will remain increasing in the future in line with the completion of FTP-1 plants, most of which are coal fired. In addition to coal, gas usage will continue to increase, considering that more power generation stations are converted to be gas-fired.

   PLN also has a target to use biofuels as an alternative source of renewable energy in electricity generation. The use of biofuels is expected to create more and better quality energy mix with lower costs.

Beban Bahan Bakar dan Pelumas
Fuel and Lubricants

Keterangan Dalam Rp miliar	2013	2014	Perubahan	Description In Billion Rp
Bahan Bakar Minyak (BBM)				Fuel (BBM)
Solar High Speed Diesel	59.220,4	65.205,9	10,1%	Solar High Speed Diesel
Residu	8.970,2	7.795.4	(13,1%)	Residue
Solar Industrial Diesel	29,5	41,7	41,4%	Solar Industrial Diesel
Lainnya	144,7	130,4	(9,9%)	Others
Subtotal BBM	**68.364.7**	**73.173,4**	**7,0%**	**Subtotal of Fuel**
Bahan Bakar - Non BBM				Non Fuel
Gas Alam	37.785,9	47.664,4	26,1%	Natural Gas
Batubara	37.167,8	44.805,7	20,5%	Coal
Panas bumi	3.706,2	4.309,6	16,3%	Geothermal
Air	317,9	259,9	(18,3%)	Water
Subtotal Non-BBM	**78.977.8**	**97.039,5**	**22,9%**	**Subtotal of Non-Fuel**
Minyak Pelumas	291,2	275,0		Lubricants
Total Bahan Bakar dan Pelumas	**147.633,8**	**170.487,9**	**15,5%**	**Total Fuel and Lubricants**

2. Biaya Pemeliharaan naik 1,9% menjadi sebesar Rp20.207 miliar akibat naiknya biaya jasa borongan, namun diikuti penurunan pemakaian material selama tahun 2014. Biaya borongan naik karena PLN melakukan penggantian rutin atas berbagai peralatan di gardu induk dan perawatan rutin

2. Maintenance expenses experienced a 1.9% increase to Rp20,207 billion due to the increase in service expense. This expense increased because the Company focuses on regular replacement of relay station equipment and regular maintenance of other plants to secure the performance of

pada pembangkit-pembangkit lain untuk menjaga unjuk kerja seluruh instalasi pembangkit, jaringan transmisi, distribusi maupun fasilitas gardu induk. Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah terjadinya *mal-function* pada sistem jaringan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kualitas layanan seperti terjadinya pemadaman bergilir karena rusaknya salah satu sistem jaringan atau instalasi pembangkit.

3. Sementara pemakaian material turun, sebagai bentuk *benefit* atas aplikasi sistem teknologi informasi dalam memonitor jadwal *replacement* peralatan pembangkit maupun sistim transmisi dan distribusi, sehingga berlangsung lebih efisien.
4. Biaya kepegawaian naik 1,2% menjadi sebesar Rp15.749 miliar terutama disebabkan oleh naiknya biaya program imbalan kerja, naiknya jasa produksi dan insentif prestasi kerja serta peningkatan biaya tunjangan.
5. Biaya Sewa Pembangkit turun 3,1% menjadi sebesar Rp7.866 miliar sebagai akibat realisasi pembelian tenaga listrik dari stasiun pembangkit dalam skema IPP, yang sesuai dengan ketentuan ISAK 8, dibukukan sebagai sewa. Pembelian listrik ini dilakukan mengingat PLN memiliki keterbatasan dalam membangun seluruh stasiun pembangkit untuk memenuhi peningkatan permintaan tenaga listrik.
6. Beban penyusutan naik 7,9% menjadi sebesar Rp23.618 miliar terutama karena adanya realisasi kegiatan pembangunan instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi yang membuat beban usaha terkait pembangunan proyek tersebut naik.

Laba Usaha

Sebagai akibat peningkatan pendapatan yang lebih tinggi dari peningkatan beban usaha, maka laba usaha PLN di tahun 2014 kembali naik sebesar 11,9% menjadi sebesar Rp45.811,2 miliar.

Beban Lain-Lain

PLN mencatat beban lain-lain bersih sebesar Rp29.910,8 miliar, turun 60,5% dari tahun 2013. Penyebab utama penurunan beban lain-lain adalah:

1. Pelemahan nilai rupiah terhadap berbagai mata uang asing.
   PLN memiliki eksposur pinjaman bank maupun penerbitan obligasi dan surat utang berjangka menengah panjang yang berdenominasi mata uang utama, yakn US dollar, Yen dan Euro. Pelemahan nilai tukar rupiah membuat nilai liabilitas yang disajikan dalam mata uang rupiah, meningkat.
   Setelah melemah tajam di tahun sebelumnya, pada tahun 2014, persentase pelemahan rupiah terhadap mata uang asing US$ adalah sebesar 2,06% (kurs tengah akhir tahun). Sementara nilai tukar rupiah terhadap mata uang justru menguat bervariasi, yakni 10,34% (untuk Yen Jepang) dan 10,03% (Euro). Selisih penjabaran konversi liabilitas tersebut dibukukan sebagai (laba)/beban lain-lain. Perseroan di tahun 2014 bahkan mencatat nilai keuntungan selisih kurs di akhir tahun 2014 sebesar Rp1.319,3 miliar, dibandingkan catatan rugi selisih kurs sebesar Rp48.096,8 miliar pada tahun 2013.
2. Beban keuangan naik 19,3% menjadi sebesar Rp35.971,2 miliar terutama akibat naiknya beban utang sewa pembiayaan total sebesar 14,5% mencapai nilai sebesar Rp22.712,3 miliar. Selain itu beban keuangan lain naik dengan nilai yang cukup dominan adalah beban utang bank dan utang obligasi, yang masing-masing naik sebesar 94,2% dan 13,9%.

all power stations, transmission network, distribution and relay station. The maintenance is compulsory to prevent mal-function to the network system, which would eventually lower than service quality upon the occurrence of rolling power outages.

3. While the use of the material down, as a form of benefit on the application of information technology systems in monitoring plant equipment replacement schedule and the transmission and distribution systems are making them more efficient.
4. Personnel expenses increased 1.2% to Rp15,749 billion primarily due to the increase in employee benefits program expenses, production services, work achievement incentives, allowance, and total employee.
5. Plant Lease expenses decrease 3.1% to Rp7,866 billion. This is the result of electric power purchase from power plants under IPP scheme which was recorded as lease, in accordance with ISAK 8 provisions. The electric power purchase was conducted considering that PLN has limitations in developing all power plant stations to fulfill the increase of electricity demands.
6. Depreciation expense went up 7.9% to Rp23,618 billion especially because of power plant, transmission and distribution development activities which increased the operating expense related to the projects.

Operating Income

Due to the higher increase of revenue compared to the increase of operating expenses, total PLN income in 2014 rose 11.9% to Rp45,811.2 billion.

Other Expenses

PLN recorded other net expenses of Rp29,910.8 billion decreased by 60.5% from 2013. The main causes of the decrease in other expenses are as follows:

1. Rupiah depreciation against foreign currencies
   PLN has exposures on bank loans and bonds issuance as well as medium and long term notes in denomination of main currencies such as US Dollar, Yen and Euro. The rupiah depreciation cause the liabilities amounts which are presented in rupiah increased.
   After weakening sharply in the previous year, in 2014, the percentage of rupiah depreciation against US Dollar is 2.06% (middle rate at end of year). While the percentage of rupiah depreciation against other variety currencies, i.e 10.34% for Yen and 10.03% for Euro. The discrepancy of the liability conversion is recorded as other expense. In 2014, Company recorded the profit value of foreign exchange difference at the end 2014 is Rp1.319,3 billion, compared to foreign exchange loss is Rp48.096,8 trillion in 2013.
2. Financial expenses rose 19.3% to Rp35,971.2 billion, primarly due to the increase of lease debts at 14.5% totaling Rp22,712.3 billion. Other high financial expenses are bonds payable, bank loans and medium term notes as well as electricity purchase payable, at 94.2% and 13,9% respectively.

3. PLN mencatatkan pendapatan denda administrasi, keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi, laba bersih entitas asosiasi, penghasilan jasa dan klaim, serta lainnya sebesar total Rp4.157,0 miliar, atau naik 132,0 dari pendapatan lain-lain tahun 2013 yang sebesar Rp1.792,1 miliar.

Laba Sebelum Pajak

Setelah dikurangi beban lain-lain tersebut, PLN mencatatkan laba sebelum pajak PLN di tahun 2014 sebesar Rp15.900,4 miliar.

Laba Periode berjalan dan Pendapatan Komprehensif Lain

Pada tahun 2014, sebagai konsekuensi penerapan ISAK 8, PLN membukukan beban pajak sebesar Rp4.158,8 miliar, sehingga total laba berjalan termasuk pendapatan komprehensif menjadi sebesar RP11.741,6 miliar

Laba Bersih dan Laba Persaham

Setelah ditambah laba kepentingan non pengendali sebesar Rp15,2 miliar maka laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk (laba bersih) PLN di tahun 2014 adalah sebesar Rp11.726,4 miliar, dari posisi rugi bersih di tahun 2013 yang sebesar Rp26.232,0 miliar. Dengan laba bersih tersebut, maka laba persaham PLN di tahun 2014 menjadi sebesar Rp253.833 rupiah per saham, naik dari posisi rugi sebesar Rp567.825 per saham di tahun 2013.

Arus Kas

PLN mencatat arus kas positif pada tahun 2014, sebesar Rp1.599,2 miliar, seperti tampak pada tabel dibawah, dengan penjelasan sebagai berikut

3. PLN recorded revenue from administration penalty, sales in assets not used in operation, associates net income, claim and services income, and other totaling Rp4,157.0 billion, rose 132,0 from other income in 2013 which amounted to Rp1.792,1 billion.

Profit Before Tax

After reducing other expenses, PLN's profit before tax in 2014 is Rp15,900.4 billion.

Income for The Year and Other Comprehensive Income

In 2014, as a consequence of the application of ISAK 8, PLN's tax expenses is Rp4,158.8 billion, so the total profit for the year including comprehensive income is Rp11,741.6 billion.

Net Profit and Earnings per Share

After adding non-controlling profit interest of Rp15.2 billion, so the profit attributable to the owners of the Company in 2014 (net profit margin) is Rp11,726.4 billion, from the net loss position in 2013 which was Rp26,232.0 billion. With this net profit, PLN's earning per share in 2014 is Rp253,833 billion, rose Rp567,825 per share from the net loss position in 2013.

Cash Flow

PLN recorded a negative cash balance in 2014, amounting to Rp1,599.2 billion as demonstrated in the table below and described as follows.

Dalam Rp Miliar In Billion Rp

Keterangan	2013	2014	Perubahan Change	Remarks
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	38.175,2	**39.252,4**	2,8%	Net Cash Provided by Operating Activities
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(34.987,3)	**(30.399,1)**	(13,1%)	Net Cash Used in Investing Activities
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(331,0)	**(7.254,1)**	2.091,7%	Net Cash Provided by Financing Activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	2.857,0	**1.599,2**	(44,0%)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	22.639,9	**25.530,0**	12,8%	Cash and cash equivalents at beginning of year
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	-	**(17,7)**		
Kas dan setara kas awal tahun entitas anak yang diakuisisi	33,2	**0,0**	(100,0%)	Cash and cash equivalents at beginning of year of subsidiary acquired
Kas dan setara kas akhir tahun	**25.530,0**	**27.111,5**	**6,2%**	**Cash and cash equivalents at end of year**

Perseroan memperoleh arus kas masuk bersih dari kegiatan operasi sebesar Rp39.252,4 miliar. Arus kas masuk dari kegiatan operasional terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp194.886,6 miliar, penerimaan subsidi listrik sebesar Rp101.816,3 miliar dan penerimaan bunga sebesar Rp584,1 miliar. (Lihat catatan "Arus Kas" pada Laporan Audit Konsolidasian PLN).

Dana dari hasil operasional tersebut kemudian digunakan untuk membayar kepada para pemasok sebesar Rp207.506,3 miliar, gaji karyawan sebesar Rp13.441,8 miliar, bunga pinjaman Rp35.381,7 miliar dan pajak penghasilan sebesar Rp1.704,7 miliar.

The company earned clean cash flow from operation activities totaled Rp39,252.4 billion. It was largely coming out from customers amount of Rp194,886.6 billion, subsidies 101,816.3 billion, interest income Rp584.1 billion (See note "Cash Flow" on PLN Consolidated Financial statements Audited).

Operational funds is use for paying the supplier with total of Rp207,506.3 billion, employee salary Rp13,441.8 billion, loan interest Rp35,381.7 billion and income tax Rp1,704.7 billion.

Kas yang digunakan untuk kegiatan investasi turun 13,1% menjadi sebesar Rp30.399,1 miliar, terutama berupa perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan. Dalam kegiatan investasi ini Perseroan melakukan penempatan terhadap rekening bank berelasi sebesar Rp915,9 miliar, menerima dividen dari entitas asosiasi sebesar Rp94,1 miliar, mendapatkan dana hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi sebesar Rp839,0 miliar dan penempatan dana investasi jangka pendek sebesar Rp3,0 miliar.

Dari sisi pendanaan, PLN mencatat penurunan kas bersih sebesar Rp6.923,2 miliar, karena adanya pengeluaran kas meliputi: sejumlah Rp2.808,0 miliar untuk biaya penebusan obligasi, membayar dana pinjaman penerusan sebesar Rp3.179,5 miliar, membayar utang Pemerintah Rp293,8 miliar, membayar hutang bank sebesar Rp58.992,5 miliar, membayar utang listrik swasta sebesar Rp244,7 miliar dan membayar angsuran sewa pembiayaan sebesar Rp4.858,1 miliar. Sementara penerimaan dana hanya berasal dari perolehan pinjaman bank sebesar Rp63.291,6 miliar.

Kemampuan Membayar Hutang

Kemampuan PLN dalam membayar hutang, dapat dilihat dari tiga rasio keuangan yang relevan, yakni rasio solvabilitas, rasio likuiditas dan tingkat kolektibilitas piutang Perseroan.

Rasio Solvabilitas

Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang akan jatuh tempo. Penurunan kewajiban pada tahun 2014 menyebabkan solvabilitas Perusahaan terhadap aset turun menjadi 72,72% dari 74,53% ditahun 2013, sedangkan solvabilitas terhadap ekuitas adalah 266,58%, turun dari posisi 292,61% di tahun 2013.

Penurunan rasio solvabilitas adalah konsekuensi dari naiknya laba PLN dari aktvitas operasional. Pada saat bersamaan PLN justru melakukan pembayaran beberapa kewajiban, seperti pembayaran utang bank, pembayaran obligasi, pembayaran penerusan pinjaman dan pembayaran utang sewa pembiayaan. PLN di tahun 2014 memang menerima pinjaman bank, namun jumlahnya lebih kecil dari pada yang digunakan untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban tersebut. Tujuannya adalah menjaga ketentuan rasio kecukupan hutang *(Debt Service Ratio)* yang ditetapkan oleh para kreditor, sekaligus untuk menyehatkan posisi keuangan perusahaan.

Likuiditas

Rasio ini menunjukkan kemampuan PLN dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Tahun 2014 rasio likuiditas PLN lancar adalah sebesar 97,56%, naik dari posisi 95,00% di tahun 2013. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang dihitung dengan membandingkan total piutang terhadap total hasil penjualan. Dengan perhitungan tersebut tingkat perputaran piutang PLN adalah sebesar 34,41 hari, melemah dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar 23,24 hari.

Net cash used in investing activities experienced a decrease of 13.1% to Rp30,399.1 billion, largely used for acquisition of fixed assets and construction in progress. In the investing activities, the Company withdrew funds from bank accounts of related parties totaling Rp915.9 billion, received dividends from associates of Rp94.1 billion, received cash influx from the sale of dormant assets totaling Rp839.0 billion and from short term investment income totaling Rp3.0 billion.

PLN recorded the decrease of net cash totaled Rp6.923.2 billion, which was resulted by cash payments, comprising payments of bonds issuance costs totaling Rp2.808.0 billion, two-step loans payment of Rp3,179.5 billion, government loans payment of Rp293.8 billion, dividends paid Rp58,992.5 billion, bank loans payment Rp244.7 billion, loan private electricity payment Rp4,858.1 billion. Meanwhile, the income came from bank loans Rp63,291.6 billion.

Debt Payment Ability

PLN's capability in paying debts can be seen from three relevant financial ratio, i.e solvability, liquidity and accounts receivable collectibility.

Solvability Ratio

This ratio shows the company capability in meeting both short and long term debt obligations on time. The decrease in obligations in 2014 led to the Company solvability toward assets becoming 72.72% from 74.53% in 2013. While solvability against equity was 266.58%, rose from the 292,61% in 2013.

The decrease of solvability ratio is a consequence of the increase in profit from operational activities. On the same time, PLN has to pay for several liabilities such as bank loan, bond repayment, payment for two-step loan, and payment for finance lease. In 2014, PLN receives bank loan but in amount that is lower than bank loan repayment. The goal is to keep the Debt Service Ration which is set up by creditors as well as moving toward healthier financial position.

Liquidity

This ratio indicates company capability in meeting its maturing short-term obligations, calculated and apportioned by liquid assets and liquid obligations. In 2014, the company liquidity ratio is 97.56%, increase from the position of 95.00% in 2013. This shows the company's higher capability in meeting short-term obligations.

Accounts Receivable Collectibility

The collectibility level for accounts receivable is counted by comparing accounts receivable with sales results. With this calculation, the timing of company accounts receivable collectibility is 34.41 days slightly better than the previous year which was 23.24 days.

Adapun posisi piutang PLN secara keseluruhan adalah senilai Rp19.494,9 miliar. Dari total piutang usaha tersebut hanya 1,2% yang melebihi masa pembayaran diatas 360 hari. Sisanya adalah terdiri dari piutang usaha dengan masa lewat jatuh tempo kurang dari 360 hari, seperti ditunjukan tabel berikut. (Lihat juga uraian "Piutang Usaha").

The position of company receivables in overall is Rp19,494.9 billion. From the total receivables, there is only 1.2% which were overdue for more than 360 days. The remainings are receivable less than 360 days as demonstrated in the table below. (See also description of " Accounts Receivables").

Piutang Usaha Berdasarkan Umur	2013	2014	Perubahan Change	
Belum Ditagih	13.723,8	**16.786,2**	22,3%	Not yet billed
Lewat Jatuh Tempo				Past Due
1 s/d 90 hari	1.625,9	**2.239,6**	37,7%	1 to 90 days
91 s/d 360 hari	158,8	**226,1**	42,3%	91 to 360 days
Lebih dari 360 hari	188,5	**243,1**	29,0%	More than 360 days
Jumlah	**15.696,9**	**19.494,9**	**24,2%**	**Total**

Rasio-Rasio Keuangan

Adapun rasio-rasio keuangan lain dari PLN untuk tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut.

Financial Ratios

PLN's financial ratios for 2014 and 2013 are as follows:

Dalam Rp Miliar In Billion Rp

Rasio-Rasio	2013	2014	Perubahan Change	Ratios
RASIO LIKUIDITAS				LIQUIDITY RATIO
Rasio lancar	95,00	**97,56**	2,56%	Current Ratio
Rasio Kas	28,7	**31,08**	2,38%	Cash Ratio
RASIO SOLVABILITAS				SOLVENCY RATIO
Jumlah kewajiban terhadap jumlah aset	74,53	**72,72**	(1,81)%	Debt to asset ratio
Jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas	292,61	**266,58**	(26,03)%	Debt to equity ratio
RASIO PROFITABILITAS				PROFITABILITY RATIO
Margin laba kotor	26,67	**24,55**	(2,12)%	Gross Profit Margin
Margin laba bersih	(17,09)	**6,29**	23,38%	Net Profit Margin
RASIO RENTABILITAS				RENTABILITY RATIO
Rasio laba terhadap ekuitas	(17,45)	**7,13**	24,58%	Return on Equity (ROE)
Rasio laba terhadap aset	(4,45)	**1,95**	6,40%	Return on Assets (ROA)
RASIO OPERASIONAL				OPERATIONAL RATIO
Perputaran piutang (kali)	15,70	**10,61**	(5,09%)	Accounts receivable turnover (times)
Perputaran piutang usaha (hari)	23,24	**34,41**	11,17%	Accounts receivable turnover (day)
Perputaran aset tetap (kali)	0,32	**0,38**	0,06%	Fixed asset turnover (times)
Perputaran aset (kali)	0,29	**0,31**	0,02%	Aset turnover (times)

Rentabilitas

Rasio ini menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Rentabilitas terhadap ekuitas *(Return On Equity)* ditahun 2014 menjadi 7,13% naik dari angka -17,45% di tahun 2013.

Rentabilitas terhadap aset *(Return on Asset)* juga mengalami kenaikan, yaitu menjadi 1,95% dari angka tahun 2013 yang sebesar -4,45%. Hal ini menunjukkan kemampuan mencetak laba perusahaan dapat mengkompensasi rugi selisih kurs akibat penambahan kewajiban dalam valuta asing.

Penguatan nilai rupiah dimasa-masa mendatang diyakini akan mendatangkan efek positif terhadap kinerja keuangan PLN. Selain itu, berlanjutnya program penghapusan subsidi melalui kenaikan tarif listrik dimasa mendatang diyakini akan semakin menunjukkan dampak positif terhadap kinerja keuangan PLN.

Rentability

This ratio shows the Company's ability in generating net profit using the existing resources. The return on equity (ROE) in 2014 was 7.13%, an increase from -17.45% in 2013.

The return on asset (ROA) also increased to 1.95% from 2013 of -4.45%. This shows the Company's profit can compensate the loss on foreign currency difference due to the additional obligations in foreign currency.

The strengthening of rupiah in the future is believed to bring positive effects on the PLN's financial performance. In addition, the subsidy elimination program continues through the electricity tariff hike which is believed to be increasingly showing a positive impact on the PLN's financial performance.

Profitabilitas

Rasio profitabilitas laba bersih di tahun 2014 kembali naik dibandingkan tahun 2013 sebagaimana tampak pada tabel di atas. Profitabilitas naik sebagai dampak positif dari realisasi penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang diberlakukan secara bertahap sejak awal tahun 2014, dan naiknya volume penjualan listrik, yang membuat PLN mampu membukukan peningkatan hasil penjualan listrik yang cukup besar.

Profitability

The net income profitability ratio for 2014 increased compared to 2013 as illustrated in the table above. Profitability rose as the positive impact of tariff adjustment realization applied gradually since the beginning of 2014, and the increase in electricity sales volume, which makes PLN able to record an increase in the large electric power sales.

Realisasi Belanja Modal

Dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapasitas daya untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus tumbuh. Disamping berasal dari penambahan daya masyarakat golongan mampu, pertambahan kebutuhan daya listrik adalah sejalan dengan program peningkatan rasio elektrifikasi secara nasional, yang ditargetkan mencapai angka 95% diakhir tahun 2017 mendatang. Untuk mencapai sasaran elektrifikasi rasio tersebut, PLN menargetkan penambahan daya listrik sebesar 5 GW per tahun.

Oleh karena itu, di tahun 2014 PLN terus merealisasikan pembangunan berbagai proyek pembangkit maupun sistim transmisi dan distribusi, sehingga nilai investasi (belanja modal) di tahun 2014 mencapai Rp37.802 miliar turun 24,3% dari realisasi investasi pengembangan pada tahun 2013. Penurunan tersebut disebabkan oleh masih terhambatnya realisasi pembangunan beberapa proyek pembangkit dan transmisi akibat kendala pembebasan lahan. Penyebab lainnya adalah tingginya biaya dana di tahun 2014 yang membuat perhitungan investasi menjadi kurang tepat dan kurang *feasible*.

Adapun berbagai proyek yang berhasil direalisasikan sepanjang tahun 2014 lalu, mencakup:

1. Pembangunan beberapa instalasi pembangkit listrik baru dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap pertama dengan realisasi tambahan daya sebesar 1.505 MW.
2. Pembangunan beberapa instalasi pembangkit listrik baru reguler, skala kecil dan IPP. Total tambahan daya listrik, termasuk FTP 1 adalah sebesar 2.094 MW.
3. Pembangunan proyek jaringan transmisi T/L 500 kV Jawa – Bali, T/L 150 kV untuk luar Jawa-Bali, proyek gardu induk 150 kV serta proyek interkoneksi jaringan.
4. Pelaksanaan proyek jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah 20 kV serta proyek gardu distribusi dengan tegangan 220V.

Adapun rekapitulasi investasi pembangkitan, transmisi dan distribusi di tahun 2014 adalah sebagai berikut.

Capital Expenditure Realization

This was carried out with the purpose of increasing power capacity to meet the ever-growing demands for electricity. Apart from contribution of capacity addition of the affluent, the increase in electricity demands is in accordance with the program of nationwide electrification ratio increase, of which the target is 95% by the end of 2017. To meet the electrification ratio target, PLN sets out to increase electric power by 5 GW per year.

Thus, in 2014 PLN continues the development of power plants as well as transmission and distribution system, bringing the investment (capital expenditure) in 2014 reached Rp39.910 billion or a decrease of 20.1% from the investment fro development in 2013. The decrease is caused by the hampered realization of power plant and transmission construction project due to difficulties in land acquiring. Another cause is the high financial expense in 2014 which lead the investment calculation inaccurate and unfeasible.

In 2014, following projects are successfully realized:

1. Development of new power generation installation (power plants) within the framework of 10,000 MW power plant acceleration program phase 1 which is able to add 1,505 MW of electricity.
2. Development of several regular, small, and IPP power plants. Total additional power, including FTP1, is 2.094 MW.
3. Development of T/L 500kV transmission projects for Java-Bali, T/L 150 kV for outside Java-Bali, and 150 kV substation and interconnected network.
4. The implementation of 20 kV low and medium voltage distribution network and 220 V distribution substation.

The recapitulation of investment in power plants, transmission, and distribution in 2014:

Jenis	Satuan Unit	Rencana Plan	Realisasi Realization	Perbandingan Comparison	
Pembangkit	MW	4.682	2.094	44,72	Power Plant
Transmisi	kms	9.845	1.893	19,23	Transmission
Gardu Induk	MVA	6.18	2.6	42,07	Sub-station
Distribusi					Distribution
JTM	kms	13.768	10.093	73,31	JTM
JTR	kms	107.17	116.274	108,5	JTR
Gardu	MVA	3.181	3.595	113,03	Station

Realisasi Dibandingkan Target

Dari seluruh uraian kinerja tersebut, beberapa target operasional terpenuhi, beberapa tidak terpenuhi. Namun untuk target-target kinerja keuangan banyak diantaranya tidak tercapai. Uraian mengenai penyebab tercapai dan tidak tercapainya target dimaksud, ada pada uraian topik-topik yang relevan. Ringkasan keterangan beberapa target utama tersebut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Realization – Target Comparison

From all the performance, all operational target have almost been fulfilled. However, many financial performance target were not achieved. The causes of success and failure of achieving targets is described under the relevant topics. The overview of some main targets are in the table below.

Keterangan	Satuan	RKAP	Realisasi		Perubahan (%)		Description
		(a)	**2014 (b)**	2013 (c)	(b) / (a)	(b) / (c)	
Penjualan Tenaga Listrik	GWh	206.841,0	**198.602,0**	187.541,0	(3,98)	5,90	Sales of Electric Power
Penambahan Pelanggan	Pelanggan Customer	3.483.900,0	**3.497.026,0**	4,200.959,0	0,38	(16,76)	New Customer
Jumlah Pelanggan	Pelanggan Customer 100	57.480.108,0	**57.493.234,0**	53.996.208,0	0,02	6,48	Total Customer
Penambahan Daya Tersambung	MVA	6.510,0	**6.936,0**	9.179,0	6,54	(24,58)	Installed Capacity Addition
Total Daya Tersambung	MVA	99.605,0	**100.031,0**	93.095,0	0,43	7,45	Total Connected Capacity
Total Produksi Listrik	GWh	237.210,0	**228.554,0**	216.188.0	(3,65)	5,72	Total Electricity Production
Pendapatan	Rp miliar Rp billion	290.223,9	**292.720,7**	261.847,0	0,86	11,79	Revenue
Laba Usaha	Rp miliar Rp billion	40.965,1	**45.811,2**	40.935,9	11,83	11,91	Operating Profit
Laba Bersih	Rp miliar Rp billion	11.253,1	**11.741,6**	(26.235,6)	4,34	144,75	Net Profit

Target-Target Kuantitatif pada Tahun Mendatang

Sejalan dengan program pengembangan usaha yang terus dijalankan dan sejalan dengan membaiknya prospek ketenagalistrikan di tahun-tahun mendatang, PLN telah menyusun serangkaian target kuantitatif yang dituangkan dalam rencana kerja tahun 2015. Beberapa target yang diharapkan dicapai untuk tahun operasional 2015, diantaranya tercakup pada tabel berikut.

Quantitative Targets for Incoming Years

In accordance with the ongoing business development program and the improving business prospect of electricity in the coming years, PLN has set several quantitative targets as reported in the 2015 Work Plan. It is expected that some of the targets would be achieved in operational year 2015, including these in the following table.

Keterangan	Satuan	Realisasi 2014	**Target 2015**	Perubahan	Description
Penjualan Tenaga Listrik	GWh	198.602,0	**218.848**	10,2%	Sales of Electric Power
Penambahan Pelanggan	Pelanggan Customer	3.497.026,0	**3.595.031**	2,8%	New Customer
Penambahan Daya Tersambung	MVA	6.936,0	**6.376**	(8,1%)	Installed Capacity Addition
Pendapatan	Rp miliar Rp billion	292.720,7	**329.531**	12,6%	Revenue
Laba Usaha	Rp miliar Rp billion	45.810,7	**52.748**	15,1%	Operating Profit
Laba Bersih	Rp miliar Rp billion	11.741,6	**16.311**	38,9%	Net Profit

Dividen dan Kebijakan Dividen

PLN memiliki kebijakan pembagian dividen yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, namun demikian, realisasi pembagian dividen setiap tahun operasional ditetapkan dalam RUPS untuk tahun buku bersangkutan. Adapun kebijakan umum mengenai pembagian dividen laba usaha mencakup:

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Laba bersih tersebut akan dibagikan untuk cadangan, dividen dan lain-lain yang prosentasinya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS.
3. Dividen harus sudah diambil dalam waktu maksimal lima tahun, atau jika tidak diambil akan dimasukkan kedalam dana cadangan, kecuali dividen untuk Pemerintah Republik Indonesia.
4. Perseroan hanya dapat memberikan tantiem kepada Komisaris dan Direksi jika seluruh akumulasi kerugian telah terkompensasikan oleh akumulasi laba tahun-tahun selanjutnya.

Pada tahun 2014, PLN tidak membagikan dividen kepada Pemerintah, mengingat pada tahun 2013 PLN mencatatkan rugi bersih operasional hingga sebesar Rp26,23 triliun.

Sementara pada tahun 2013, PLN telah membagikan dividen kepada Pemerintah selaku pemegang saham dari laba bersih operasional tahun buku 2012 sebesar Rp1,44 triliun yang menggambarkan kebijakan deviden sebesar 45,04%. Dividen tahun buku 2012 dibayarkan bertahap, yakni pada tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp500 miliar, 4 Oktober 2013 sebesar Rp500 miliar dan 4 November 2013 sebesar Rp444 miliar.

Dividends and Dividend Policy

PLN has the policy of dividend partition which regulated in the Company Articles of Association. However, the dividend partition in every year is established in the General Shareholders' Meeting in the respective fiscal year. The general policies concerning dividend partition includes:

1. The Company's net income in one fiscal year as stated in the balance sheet and profit and loss statement approved through Annual General Shareholders' Meeting is distributed in accordance with the usage set in the meeting.
2. The net income will be appropriated for reserve, dividends and others which each percentage is set annually through the General Shareholders' Meeting.
3. Dividend must have been collected within five years at the maximum, otherwise it will be included in the reserve funds, except for dividend to the Government of the Republic of Indonesia.
4. The Company is only able to provide bonus share (tantiem) to the Commissioners and Directors when all accumulated losses have been compensated by the accumulated profit in the following years.

In 2014, PLN did not distribute dividend to the Government considering that in 2013 PLN recorded operational net loss amounted to Rp26,23 trillion.

While in 2013, PLN has distributed dividend to the Government as Shareholders of operational net income in fiscal year 2012 amounting to Rp1.44 trillion which described dividend policy of 45.04%. Dividends of financial year 2012 were paid in stages, i.e June 4, 2013 amounting to Rp500 billion and October 4, 2013, Rp500 billion and November 4, 2013, Rp444 billion.

Informasi Keuangan Lainnya

Informasi Material Mengenai

1. Investasi
   Pada tahun 2014 PLN merealisasikan berbagai rencana investasi dengan membangun instalasi Pembangkit, Transmisi dan Distribusi baru maupun investasi dalam rangka memelihara unjuk kerja seluruh instalasi ketenagalistrikan yang dimiliki dan dikelola,sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat. Rincian Kegiatan Investasi terkait dapat dilihat pada pembahasan "Instalasi Pembangkit" dan "Transmisi dan Distribusi."
2. Ekspansi
   PLN melakukan ekspansi usaha ketenagalistrikan melalui penambahan kapasitas (melalui investasi) maupun melalui pendirian usaha baru yang masih berkaitan dengan upaya pengembangan ketenagalistrikan.
   Uraian ekspansi melalui investasi dapat dilihat pada pembahasan "Instalasi Pembangkit" dan "Transmisi dan Distribusi". Sementera pendirian perusahaan baru dapat dilihat pada "Entitas Anak Usaha" dan "Profil Perusahaan".
3. Divestasi
   Tidak ada Divestasi anak perusahaan pada periode laporan.
4. Penggabungan / Peleburan Usaha
   Tidak ada penggabungan/peleburan usaha pada periode laporan.
5. Akuisisi
   Tidak ada Akuisisi perusahaan lain pada periode laporan.
6. Restrukturisasi Utang/Modal
   Tidak ada restrukturisasi Utang/Modal pada periode laporan.

Komitmen dan Kontinjensi

Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar

1. Bahan bakar gas
   PLN dan Anak Perusahaan memiliki perikatan penting berupa perjanjian pemasokan gas dengan beberapa operator pengelola blok migas. Perjanjian pemasokan tersebut berlaku dalam jangka pendek maupun panjang, diantaranya berlaku untuk periode sampai dengan tahun 2027, volume pembelian dengan masing-masing pemasok bervariasi namun pemasok gas terbesar adalah PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Per tanggal 31 Desember 2014 harga pembelian gas pada titik penyerahan berkisar antara US$3,7 sampai dengan US$9,8 per MMBtu untuk gas pipa. Sedangkan untuk LNG antara US$13,16 sampai US$15,84 per MMBtu.(lihat catatan 54, Laporan Keuangan Audited Konsolidasian "Ikatan dan Kontinjensi", butir a).
2. Bahan Bakar Batubara
   PLN dan Anak perusahaan juga memiliki perikatan perjanjian pemasokan batubara dengan beberapa pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) proses Produksi. Perjanjian tersebut pada intinya mengatur volume pasokan, waktu pengiriman dan kualitas batubara. Harga pembelian akan ditinjau secara berkala dan ditetapkan sesuai kesepakatan berdasarkan pada patokan harga yang berlaku. Jangka waktu perjanjian bervariasi, dengan periode terpanjang berlaku sampai dengan tahun 2031. Beberapa pemasok batubara utama PLN adalah PT Tambang Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal dan PT Adaro.

Other Financial Information

Material Information on

1. Investment
   In line with PLN efforts to meet the demands for electricity, the Company realizes the expansion plan to construct new power plant, transmission, and distribution including investments to maintain all the owned and managed electrical installations. For further details on investment activities can be found in section "Power Plant" and "Transmission and Distribution."
2. Expansion
   PLN implements the expansion effort through capacity development (investment) and development of new field of business oriented to support electrical development. For further details on investment can be found in section "Power Plant" and "Transmission and Distribution". While for development of new field of business can be found in "Subsidiaries Entity" and "Company's Profile."
3. Divestment
   There was not any Divestment during the reporting period.
4. Merger
   There was not any Merger during the reporting period.
5. Acquisition
   There was not any Acquisition during the reporting period.
6. Debt/Capital Restructuring
   There was not any Debt/Capital Restructuring during the reporting period.

Commitment and Contingencies

Fuel Supply Procurement Agreement

1. Gas
   PLN and its subsidiaries have important relationships and commitments in supplying gas with several gas block managers and operators. These supply commitments are both in short and long term, some of which will last until 2027 at the soonest, the volume purchased from each supplier differs but the largest one is from PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
   As of 31 December 2014, the gas price at point of delivery ranges from US $ 3.7 to US $ 9.8 per MMBtu. Meanwhile, the price for LNG ranges from US$13,16 to US$15,84 per MMBtu. (See note 54, Consolidated Financial Reports (Audited) "Commitments and Contingencies" point a).
2. Coal
   PLN and its subsidiaries also have commitments with several owners of license to mine and process coal. These agreements in essence determine the volume of coal supply, delivery time and coal quality. The price of coal is surveyed and reviewed on a periodic basis and is determined by agreements based upon prevailing prices. The agreement period varies, where the longest are those of the agreement with PT Tambang Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal and PT Adaro.

Per tanggal 31 Desember 2014 harga *stockpile* pembelian batubara berkisar antara Rp323.644 dan Rp763.993 per ton yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, SFT dan HGI.

Selain melalui mekanisme jual-beli batubara biasa, PLN memenuhi kebutuhan batubara melalui mekanisme kerja sama operasi penambangan batubara dengan beberapa pemasok (8 pemasok) dengan pasokan terbesar berasal dari PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa yang berlokasi di Kalimantan.

3. Bahan Bakar Minyak

   Perseroan dan Pertamina mengadakan Perjanjian Payung Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001 yang berlaku sampai dengan 8 Oktober 2004. Perjanjian ini telah diaddendum pada tanggal 16 Mei 2007, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

   Perjanjian ini kemudian di addendum pada tanggal 14 Agustus 2009, kemudian di adendum untuk kedua kalinya pada tanggal 1 Juni 2010. Pada tanggal 7 November 2011 PLN dan Pertamina melaksanakan addendum ke-III atas perjanjian tersebut. Pada intinya perjanjian pengadaan BBM dengan Pertamina mengatur harga, tempat penyerahan, denda keterlambatan pengiriman maupun pembayaran.

   Selengkapnya lihat catatan 54.a laporan Keuangan Audited Konsolidasian "Ikatan dan Kontinjensi".

4. Uap Panas Bumi

   PLN juga memiliki perjanjian dengan Pertamina untuk pengadaan uap panas bumi untuk Kamojang selama 30 tahun yang berakhir tahun 2012 yang telah diperpanjang hingga tahun 2014, dan untuk Gunung Salak dan Darajat selama 30 tahun yang berakhir tahun 2030 serta untuk Lahendong selama 30 tahun yang berakhir tahun 2038.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Sebelum tahun 1997, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA dan ESC) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP) skala besar. Pada tahun 1999, Perusahaan telah melaksanakan renegosiasi terhadap PPA dan ESC melalui Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PLN dibawah arahan Pemerintah.

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 3L, Kebijakan Akuntansi pada Laporan Keuangan Audit Konsolidasian, Perusahaan menilai bahwa perjanjian PPA dan ESC tertentu memenuhi kriteria sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan sebagai akibat dari adopsi ISAK 8. Pada tanggal 31 Desember 2013, perjanjian signifikan antara Perusahaan dan entitas anak dengan IPP adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian dengan 38 perusahaan pengelola pembangkit listrik yang sudah beroperasi sebagai sewa pembiayaan.
2. Perjanjian jual beli listrik yang signifikan dengan 5 perusahaan pemasok listrik yang sudah beroperasi sebagai sewa operasi.
3. Perjanjian jual beli listrik dengan 118 perusahaan pemasok listrik yang masih dalam pengembangan dan perusahaan listrik skala kecil dengan kapasitas kurang dari 50 MW, diperlakukan sebagai transaksi pembelian normal.

As of 31 December, 2014, the stockpile price of coal purchases ranges from Rp323,644 to Rp763,993 per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, SFT and HGI.

In addition to ordinary coal purchase mechanism, PLN fulfills its coal needs through coal mining operation cooperation with some suppliers (totaling 8), of which the largest is PT Arutmin Indonesia and PT Darma Henwa, in Kalimantan.

3. Oil

   The company and Pertamina established an oil Buy-Sell umbrella Agreement no. 071.pJ/060/DIR/2001 dated 8 October 2001, which was in effect until 8 October 2004. The addendum to the agreement extended the arrangements from 16 May 2007 through 31 December 2011.

   This agreement was amended again on 14 August 2009, for the second time on 1 June 2010 and for the third time on 7 November 2011. The composition of the agreement regarding oil with Pertamina arranged price, delivery sites, and penalties for delayed delivery or payment.

   (See note 54.a Consolidated Financial Statements (Audited) "Commitments and Contingencies" point iii).

4. Geothermal Heat

   The company has an agreement with Pertamina for the supply of geothermal heat for Kamojang for a 30 year period ending 2012, and for Gunung Salak and Darajat for 30 years ending 2030 and for Lahendong for 30 years ending 2038.

Power Purchase Agreements

Prior to 1997, the Company entered into Power Purchase Agreement (PPA) and Energy Sales Contract (ESC) with big scale Independent Power Producers (IPP). In 1999, the Company entered into renegotiation of PPA and ESC through Working Group on PLN Special Contract Renegotiation under the direction of the Government.

As discussed in Note 3L, Consolidated Financial Statements (Audited), the Company has assessed that certain PPAs and ESCs qualify as either operating lease or finance lease as a result of option of ISAK 8. Some of the significant agreements in electric power purchase are:

1. Agreements with 38 power plant-managing companies which are in operations, under finance lease.
2. Significant power purchase agreement with five (5) electric power supplying companies which are in operations, under operating lease.
3. Power purchase agreements with 118 electric power supplying companies which are in development stage and small-scaled electricity company with capacity less than 50 MW, enacted under normal purchase transaction.

4. Butir-butir pokok perjanjian jual beli listrik tersebut adalah:
   - Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 19 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal produksi komersial.
   - Penetapan AF = Faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perusahaan.
   - Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi dan pemeliharaan.
   - Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge dan Capacity Charge.*

Selengkapnya lihat Catatan 54.b Laporan Keuangan Audit Konsolidasian PLN Tahun 2014.

Fasilitas pinjaman belum digunakan

Penerusan pinjaman *(twostep loans)*
Perseroan masih memiliki fasilitas pinjaman penerusan yang belum digunakan sebesar Rp14.955.217 juta dikenakan provisi sebesar 0,10% - 0,75% per tahun, sedangkan fasilitas sebesar Rp17.789.852 juta tidak dikenakan provisi. Fasilitas ini akan berakhir antara tahun 2014 sampai dengan 2047.

Perjanjian pinjaman program percepatan
Tujuan fasilitas pinjaman ini adalah untuk membiayai 85% dari nilai kontrak EPC untuk program percepatan. Jangka waktu pinjaman termasuk periode penyediaan kredit selama 36 bulan, dan sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007 pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan-batasan umum.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 fasilitas pinjaman yang belum digunakan adalah sebesar Rp7.694,0 miliar, US$101,0 juta dan EUR114 juta.

Selengkapnya lihat Catatan 54.d Laporan Keuangan Audit Konsolidasian PLN tahun 2014.

Program operasi dan pemeliharaan

Perusahaan menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Sampai akhir tahun 2014 nilai komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebesar ekivalen Rp4.538,96 miliar. Selengkapnya lihat Catatan 54.e Laporan Keuangan Audit Konsolidasian PLN 2014.

4. The main points of the power purchase agreement are as follows:
   - The agreements are effective from the date of signing and purchase of electricity is valid between 19 to 30 years starting from the commercial operation date.
   - AF = power supply factor which should be absorbed by the Company.
   - The electricity power price per kWh for gas, MFO and coal power plants are determined by certain formula as stated in the agreement which regulate, among others, capital cost recovery, fixed operation and maintenance cost payment, fuel expense and variable operation, and maintenance cost payment.
   - For geothermal heat power plants, the electricity power price is determined by certain formula as stated in the agreement, among others, Energy Charge and Capacity Charge.

For further details, see Note 54.b Consolidated Financial Statements (Audited) year 2014.

Unused Loan Facilities

Two-step loans
The company still has unused twostep loans facilities of Rp14.955.217 million with provision of 0,10% - 0,75% per year while the twostep loans facilities of Rp17.789.852 million has no provision. The facilities will expire between 2014 to 2047.

Loan Agreements for Fast Track Program
The purpose of these loan facilities is to finance 85% of the contract price of EPC for fast track program. The term of the loan includes preparation of credit for 36 months and is fully guaranteed by the Government of the Republic Indonesia in accordance with the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (PP) No. 91 of 2007, superseding No. 86 of 2006, regarding Grant of Government Guarantee for Construction of Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is obliged to comply with general restrictions.

The loan facilities utilized by the Company from December 31, 2014 until the date of the issuance of the consolidated financial statements amounted to Rp7.694,0 billion and US$101,0 million and EUR114 million.

For further details, see Note 54.d PLN Consolidated Financial Statements (Audited).

Operation and Maintenance Program

The Company has entered into Operation and Maintenance Agreements with contractors. The contract payment comprises fixed and variable portions. The contractors have to meet certain targets and will be charged with penalty if these targets are not met. The commitments with the contractors for fixed portion amount to Rp4,538.96 billion to the end of 2014. For further details, see Note 54.e Consolidated Financial Statements (Audited) 2013.

Ikatan Material untuk Barang Modal

Selain melalui skema IPP (FTP I dan II), PLN juga membangun instalasi ketenaga listrikan secara mandiri, dikenal dengan pembangunan instalasi reguler, meliputi pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi. Untuk memenuhi kebutuhan barang modal dalam proses pembangunan instalasi tersebut, PLN mengadakan ikatan pengadaan peralatan utama dengan para pemasok utama, umumnya melibatkan kreditor penyandang dana.

Ikatan material yang dilakukan dimaksud dicatat dan disajikan dalam Laporan Keungan Audit Konsolidasian, yakni: Catatan 54. Ikatan dan Kontinjensi, butir c "Perolehan Barang Modal. Beberapa penjelasan menyangkut ikatan tersebut, meliputi:

Ikatan Perolehan barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan (melalui percepatan pembangunan pembangkit), jaringan transmisi dan distribusi mencapai nilai total sebesar ekivalen Rp29.038,3 miliar, terdiri dari:

1. Program Percepatan
   - Kontrak Pembangkitan Rp5.620,9 miliar
   - Kontrak Transmisi Rp79,3 miliar
2. Konstruksi rutin sebesar Rp23.338,3 miliar

Berkaitan dengan Ikatan ini, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No.59 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009, Pemerintah menugaskan Perseroan untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa – Bali. Proyek ini diharapkan beroperasi pada tahun 2014 dan 2015.

Kontrak Pembangkitan

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan telah menandatangani 36 kontrak *Engineering Procurement and Construction* (EPC) meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 26 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.451 MW di luar Jawa – Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan telah membayar uang muka sebesar US$5.863 juta dan Rp26.408,8 miliar untuk 35 kontrak EPC, atau sekitar 15% dari jumlah nilai kontrak, yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan (Catatan 6).

Kontrak Transmisi

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan telah menandatangani 137 kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

Material Commitment on Capital Expenditure

In addition to meet the demand of electricity, through IPP scheme (FTP I and II), PLN constructs independent electricity installations, called regular installations development, including power plant, transmission, and distribution. In order to fulfill the capital expenditure in the development process, PLN establishes material commitment with main suppliers, while mainly engaging with creditors.

Material commitment is recorded in the Consolidated Financial Statements (Audited), note 54, Commitment and Contingencies, point c "capital expenditures". Information related to the commitment is described below:

Acquisition of capital goods bond

On December 31, 2014, the amount of the bond acquisition of capital goods under the contract, especially in relation to the procurement of generation (through the Plant Development Acceleration), transmission and distribution network reached a total value of equivalent to Rp29,038.3 billion, consisting of:

1. Acceleration Program
   - Power Plant Contract Rp5,620.9 billion
   - Transmission Contract Rp79.3 billion
2. Routine Construction Rp23,338.3 billion

In relation to these commitments, pursuant to Presidential of the Republic of Indonesia Decree No. 71 of 2006 dated July 5, 2006 which was amended by Presidential of the Republic of Indonesia Regulation No. 59 dated December 23, 2009, the Government mandates the Company to build steam power plants at 42 locations in Indonesia, which include 10 power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 32 power plants with aggregate capacity of 2,769 MW outside Java – Bali. These projects are expected to be in operation by 2014 and 2015.

Power Plant Contract

As of December 31, 2014, the Company signed 36 Engineering Procurement and Construction (EPC) contracts which consist of 10 electricity power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 26 electricity power plants with aggregate capacity of 2,451 MW outside Java - Bali. Under the terms of such contracts, the Company is required to pay the contractor a down payment, which is approximately 15% of the contract price and the remaining 85% will be funded through credit facilities from banks.

Up to December 31, 2014 the Company made a total down payment of US$5.863 million and Rp26,408.8 million for 35 EPC contracts or approximately 15% of the total contract price, which are recorded as construction in progress. (Note 6)

Transmission Contract

As of December 31, 2013 the Company signed 137 contracts for upgrading and constructing new transmission and substations in Java and outside Java. These projects are financed by own funds and withdrawal of credit facilities from banks.

Kontrak Konstruksi Rutin

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

Pada tanggal 31 Desember 2014, PJB mengadakan ikatan/kontrak dengan berbagai pihak untuk pengadaan material dan aset tetap serta jasa borongan dengan berbagai mata uang dengan jumlah setara Rupiah masing-masing sebesar Rp607.783 juta.

Selengkapnya lihat Catatan 54. c Laporan Keuangan Audit Konsolodasion PLN 2014 dan pembahasan "Pembangunan Instalasi Pembangkit" serta "Transmisi dan Distribusi".

Nominasi Ikatan Untuk Barang Modal

Nominasi ikatan bergantung pada persyaratan teknis dan persyaratan kreditor dalam proses pembangunan instalasi dimaksud. Adapun dalam laporan Keuangan Audit Konsolidasian, nilai ikatan tersebut disajikan dalam mata uang rupiah (untuk perjanjian dalam Rupiah) dan dalam mata uang US$ untuk ikatan dalam mata uang asing lainnya.

Transaksi Lindung Nilai

Sampai akhir tahun 2014, Perseroan belum melakukan transaksi lindung nilai terhadap seluruh eksposur ikatan dan kontinjensi dalam mata uang asingnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No.Per:09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara, Perseroan kini tengah mengkaji dan menyusun kebijakan manajemen untuk melakukan akuntansi lindung nilai untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan. Perusahaan juga sedang mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menangani akuntansi lindung nilai untuk memastikan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akuntansi lindung nilai dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Investasi Barang Modal

Rincian Realisasi Kegiatan Investasi Barang Modal dapat dilihat pada pembahasan "Instalasi Pembangkit" dan "Transmisi dan Distribusi".

Program Kepemilikan Saham

PLN belum terdaftar di pasar modal sehingga tidak ada program kepemilikan saham bagi karyawan maupun (ESOP) bagi manajemen (MSOP).

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Dalam menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi, PLN senantiasa mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dalam rangka menerapkan ketentuan SAK, tersebut, pada tahun 2014 PLN telah menerapkan beberapa standar akuntansi keuangan baru (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Penjelasan ringkas dan dampaknya diuraikan pada tabel berikut:

Regular Construction Contract

Capital expenditure commitments for regular construction represent project contract signed for additional electricity generating plants and development of transmission and distribution network. This project is financed through own funds and external parties through foreign loans, aid and investment projects as a part of the state budget.

On December 31, 2014, PJB entered into commitments or contracts with various parties for the supply of materials, property, plant and equipment, and contracted services in various currencies, equivalent in Rupiah amount of Rp607,783 billion, respectively.

For further details, see Note 54.c Consolidated Financial Statements (Audited) 2014 and section on development, transmission, and distribution.

Nomination on Capital Expenditure Commitment

The commitment nomination depends on technical and creditor requirements in the stated installations development process. In the Consolidated Financial Statement (Audited), the commitment is recorded in Rupiah (for agreement in Rupiah) and in USD for foreign currency commitment.

Hedge Transactions

Up to end of 2014, the Company has not established hedge transactions to all of its commitment and contingencies exposures in foreign currency.

In accordance with the Regulation of the Minister of SOE Number: 09/MBU/2013 on Public Policy on Hedge Transaction, the Company is assessing and designing management policy to conduct hedge accounting serves as implementation guideline. At the same stage, the Company is also preparing its personnel to manage the hedge accounting and to ensure its acknowledgment, assessment, and disclosure is in accordance with accounting standards.

Capital Investment

For further details on Capital Investment Activities, see section on development, transmission, and distribution.

Share Ownership Program

PLN is non listed company on the capital market, so it does not have either Employee Stock Option Program (ESOP) or Management Stock Option Program (MSOP).

Adoption of New and Revised Statements of Financial Accounting Standards

In preparing the consolidated financial statement, PLN always complies with applied Financial Accounting Standards in Indonesia.

In 2014 PLN has adopted new Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK). This is briefly described below.

1. Perubahan Standar Akuntansi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014.

1. The following standards are effective for period of January 1, 2014.

Standar Akuntansi	Perubahan Signifikan dari Standar Sebelumnya atau Pokok dari Standar yang Baru Significant Change on the Previous Standards or Points of the New Standards	Dampak pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Impact on PLN Financial Statements	Accounting Standards
PSAK 27, Pengalihan Aset dari Pelanggan	n.a	Perusahaan menyusun Laporan Audit untuk Penyajian Kembali, pada semua pernyataan yang berkaitan dengan biaya penyambungan pelanggan. The company compile Audited Report for Restatement on all statement that is related to customer connection fee.	PSAK 27, Transfer of Assets from Customers
ISAK 28, Pengakhiran Liabiltas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas	n.a	n.a	ISAK 28, Termination of Financial Liabilities with Equity Instruments
ISAK 29, Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi Pada Tambang Terbuka	n.a	n.a	ISAK 29, Cost of Land Stripping On Production Stage of Open Mine

2. PLN akan menerapkan beberapa standar dan interpretasi yang telah diterbitkan tapi belum diterapkan, yakni:
   - Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015 adalah:
     - PSAK 1 (revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan
     - PSAK 4 (revisi 2013), Laporan Keuangan Tersendiri
     - PSAK 15 (revisi 2013), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
     - PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja
     - PSAK 65, Laporan Keuangan Konsolidasian
     - PSAK 66, Pengaturan Bersama
     - PSAK 67, Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
     - PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar

Manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi baru tersebut diatas terhadap laporan keuangan konsolidasian.

2. PLN will implement several standards and interpretations in issue but not yet implemented, namely:
   - Effective for the period beginning on or after January 1, 2015, namely:
     - PSAK 1 (revised 2013), Financial Statement Format
     - PSAK 4 (revised 2013), Separate Financial Statement
     - PSAK 15 (revised 2013), Investments in Associates and Joint ventures
     - PSAK 24 (revised 2013), Employee Benefits
     - PSAK 65, Consolidated Financial Statement
     - PSAK 66, Joint Arrangement
     - PSAK 67, Disclosure on Other Entity Interest
     - PSAK 68, Fair Value Measurement

Preliminary evaluations by the management conducted on its impacts on the consolidated financial statement.

Penyajian Kembali – Sebagai Dampak Pemberlakuan ISAK 27

Seperti telah disinggung sebelumnya, penerapan ISAK 27 untuk laporan Keuangan Konsolidasi 2014 yang berlaku restrospektif membuat Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian dan menyajikan kembali beberapa akun laporan keuangan tertentu di tahun 2013 dan 2012. Perseroan telah membuat kembali Laporan Keuangan pada tahun-tahun tersebut dan dilampirkan pula dalam Laporan Tahunan ini. (Lihat Catatan 56. Penerapan Isak 27 "Laporan Keuangan Audit Konsolidasi PT PLN (Persero) 2014.

Sementara itu untuk menunjukkan adanya kesesuaian dengan laporan tahun 2014 yang telah menggunakan ISAK 27 secara penuh, berikut adalah beberapa akun dari laporan keuangan 2013 yang telah disesuaikan untuk mencerminkan dampak dari penerapan ISAK 27. Dampak seluruhnya dapat dilihat selengkapnya pada Laporan Audit PT PLN (Perseroa) - Penyajian Kembali 2012-2013.

Dengan Catatan ; Penerapan ISAK 27 tidak memiliki dampak pada laporan arus kas konsolidasian Perusahaan.

As the impact of ISAK 27

As discussed before, due to the implementation of ISAK 27 for 2014 consolidated financial statement which should be done retrospectively, the company has the obligation to adjust and restate some accounts within the financial report of 2013 and 2012. The company has reissued those financial statement and is being attached within this report. (See note no.56, Implementation of ISAK 27 for PT PLN 2014 audited consolidated financial statement)

Meanwhile, to show the suitability with 2014 financial statement which has fully applied ISAK 2014, following are several accounts from 2013 financial statement that has been adjusted to show the impact of ISAK 27 implementation. The full impact can be found in the PT PLN Audited Report - 2012-2013 Restatement.

Notes: the implementation of ISAK 27 does not have an impact toward company consolidated cash flow.

Dalam Rp Miliar In Billion Rp

	31 Desember 2013 Desember 31, 2013			
	Jumlah sebelum penyesuian Balance before Adjustment	Penyesuian Adjustments	Jumlah setelah penyesuian Balance after Adjustment	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				Consolidated statement of financial position
Aset Tidak Lancar				Non current assets
Aset pajak tangguhan	11.590.879	(5.658.405)	5.932.474	Deferred tax assets
Liabilitas jangka panjang				Non current liabilities
Pendapatan ditangguhkan	23.788.838	(23.788.838)	_	Deferred revenue
Liabilitas pajak tangguhan	3.862.843	39.942	3.902.785	Deferred tax liabilities
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Pendapatan ditangguhkan	_	990.913	990.913	Deferred revenue
Saldo laba tidak ditentukan penggunaannya	17.931.293	17.099.578	35.030.871	Retained earnings - unappropriated
Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian				Consolidate statement of comprehensive income
Pendapatan usaha				Revenues
Penyambungan pelanggan	1.585.338	4.442.461	6.027.799	Customer connection fees
Manfaat (beban) pajak	9.653.958	(1.110.615)	8.543.343	Tax benefit (expense)
Laba (rugi) tahun berjalan dan jumlah laba	(29.567.461)	3.331.846	(26.235.615)	Profit (loss) for the year and total comprehensive income
Laba (rugi) per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	(639.947)	72.122	(567.825)	Basic earnings (loss) per share (in full Rupiah amount)

Untuk tahun 2014 (dan 2013) tidak ada penyajian kembali atas catatan akun dimaksud.

For the year of 2014 (and 2013) there is no restatement on the account records.

Transaksi Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi benturan kepentingan selama periode pelaporan.

Conflict of Interest Transactions

There was not any transaction involving conflict of interest during the reporting period.

Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi (Afiliasi)

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang berelasi (hubungan afiliasi). Seluruh transaksi signifikan dengan pihak hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

Transactions with Affiliates

In doing business activities, the Company and subsidiaries carry out certain transactions with related parties (affiliates). All the significant transactions with parties with special relationship, either with the same or different terms and conditions as those with third party, have been disclosed in the note to the consolidated financial statements.

Sifat Hubungan Berelasi:

1. Pemerintah Republik Indonesia merupakan Pemegang Saham Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara.
2. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi (Catatan 8).
3. Pengurus Koperasi Karyawan juga merupakan karyawan Perusahaan dan entitas anak.
4. Pendiri dan pengawas Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pengurus dan karyawan Perusahaan dan entitas anak.
5. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan Pemegang Saham mayoritas PT Tugu Kresna Pratama.
6. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

The Nature of Related Parties

1. Government of the Republic of Indonesia is the Stockholder of the Company and State- Owned Enterprises.
2. The Company and its subsidiaries have significant influence on investments in associates (Note 8).
3. Management of Employee Cooperative is composed of the Company and its subsidiaries' employees.
4. The founders and controllers of Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) are composed of management and employees of the Company and its subsidiaries.
5. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) is the majority stockholder of PT Tugu Kresna Pratama.
6. Board of Commissioners and Directors is a member of the key management of the Company and its subsidiaries.

Ketentuan Transaksi Berelasi

Dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi tersebut, PLN menerapkan kebijakan, meliputi:

1. Penjualan produk dan jasa kepada pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan, yang pada umumnya menggunakan dasar harga pasar yang berlaku ditambah margin tertentu sesuai kesepakatan.
2. Pengangkutan bahan bakar maupun suku cadang oleh pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak pengangkutan yang disepakati bersama berdasarkan hasil negosiasi dengan memperhatikan unsur-unsur biaya yang ada ditambah dengan marjin tertentu.

Provisions on Transactions with Affiliates

PLN adopted the following policies in conducting transactions with affiliates:

1. Product and service sales to affiliates is assigned based on sales contract, which using the applied basic rate with specific agreed margin.
2. Either fuel or spare part shipping by the affiliates is assigned based on shipping contract with consideration to the existing costs.

3. Penempatan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan dan perjanjian yang saling menguntungkan dan memberikan benefit optimal pada Perseroan.
4. Perolehan dana pinjaman dilakukan melalui negosiasi term dan kondisi yang paling optimal bagi kepentingan operasional Perseroan.

Perseroan menyajikan saldo transaksi berelasi pada Catatan 52 Laporan Keuangan Audit Konsolidasian PLN periode tahun 2014.

Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Pada tanggal 14 Januari 2015, melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No 01/KR/DK- PLN/2015, telah diangkat Darmono dan Hasan Bisri sebagai Komite Audit menggantikan Zulkifli Zaini, Harry Susetyo Nugroho, dan Oegroseno sehingga susunan Komite Audit menjadi sebagai berikut:

Ketua : Darmono
Anggota : Andin Hadiyanto
Hasan Bisri
Sugeng Rochadi
Aidil Yuzar

Perubahan Peraturan

Beberapa Peraturan Baru yang berpengaruh signifikan terhadap operasional PLN, mencakup diantaranya:

3. Fund placement is based on requirements, mutual agreement, and benefits to the Company.
4. Loan is managed through the term and condition negotiation which most beneficiates the company operational interest.

The Company reports the affiliated transaction balance in note 52 Consolidated Financial Statement (Audited) 2014.

Subsequent Events

On 14 January 2015, with Decision Letter of Board of Commissioner No. 01/KR/DK-PLN/2015, Darmono and Hasan Bisri is appointed as Audit Committee to replace Zulkifli Zaini, Harry Susetyo NUgroho, and Oegroseno. Therefore the member of Audit Committee is as follows:

Chair : Darmono
Members : Andin Hadiyanto
Hasan Bisri
Sugeng Rochadi
Aidil Yuzar

Regulation Changes

Some rules and regulations that caused impacts on PLN's operation are, among others:

Peraturan Perundang-undangan Laws and Regulations	Topik dan Penjelasan Topic and Description	Dampak Terhadap PLN Impact on PLN
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik,	• Pemerintah memberi kemudahan untuk dilakukan pengembangan tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, gas marginal, PLTU mulut tambang, energi setempat serta penambahan kapasitas pada pembangkit yang telah beroperasi.	PLN mempunyai tambahan kemudahan untuk mengembangkan kapasitas pembangkit eksisting serta kemudahan untuk menunjuk mitra swasta untuk mengembangkan energi terbarukan, gas marginal, PLTU mulut tambang, energi setempat.
Government Regulation Number 23 of 2014 on Amendment of Government Regulation Number. 14 of 2012 on Business Activities of Electricity Supply.	• Government provide easiness to develop renewable energy, marginal gas, mine mouth power plant, and local energy power sources as well as adding the capacity of currently operated power plants.	PLN get additional facility to develop the capacity of existing power plants and the convenience to appoint private partners to develop renewable energy, marginal gas, mine mouth power plant, and local energy.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang	• Pemerintah memberikan pedoman tentang tata cara penyediaan dan penetapan harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang.	PLN memiliki dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan pengadaan IPP khusus untuk PLTU Mulut Tambang.
Energy Minister Regulation Number 10 of 2014 on Procedure of Supplying and Price Fixing of Coal for mine mouth power plant.	• The government provide guideline for procedures of provision and arrangement of coal price for mine mouth power plant.	PLN has a clear legal background to do special IPP for mining steam prower plant.
Keputusan Menteri ESDM No. 2186.K/91/MEM/2014 tentang Penugasan Khusus Kepada PLN Dalam Rangka Mempercepat Proses Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Tenaga Listrik.	• Pemerintah memberi penugasan khusus kepada PLN melakukan proses pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam rangka penyediaan tenaga listrik berupa pembangkit, gardu, jaringan transmisi dan jaringan distribusi tenaga listrik, serta sarana pendukungnya	PLN mempunyai dasar hukum untuk melakukan pengadaan tanah, khususnya terhadap proyek-proyek sarana ketenagalistrikan yang terkendala pembebasan lahan.
Energy Minister Regulation Number 2186.K/91/MEM/2014 on Special Assignment for PLN to accelerate Land Acquisition Process for Electrical Power Supply.	• Government appoint PLN to do land acquiring for the construction of electricity infrastructure for the supply of electricity such as power plants, substation, transmission networks, and electricity distribution networks and other supported facilities.	PLN has a legal basis to acquire land especially for electricity projects that has been hindered by land acquisition issue.
Per Men ESDM Nomor 25 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008.	• Ditetapkan 28 Agustus 2013 dan berlaku pada tanggal 1 September 2013. • Pengaturan Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain.	PLN mempunyai tambahan alternatif sumber energi primer yang terbarukan untuk pembangkit listrik.
Energy Minister Regulation No. 25 year 2013 to revise the Energy Minister Regulation No. 32 year 2008.	• Issued on 28 August 2013 and effective on 1 September 2013. • Regulation about the provision, use, and market of biofuel as other fuel.	PLN has alternative of primary energy source for power plants.

Peraturan Perundang-undangan Laws and Regulations	Topik dan Penjelasan Topic and Description	Dampak Terhadap PLN Impact on PLN
Kep Men ESDM Nomor 38 tahun 2013, menggantikan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999	• Ditetapkan 24 Desember 2013. • Pengaturan kompensasi tanah, tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan bangunan yang berada di bawah ruang bebas SUTT atau SUTET, terdiri dari 11 pasal aturan mencakup: - Pembentukan Lembaga Penilai - Menegaskan definisi dan ketentuan tanam tumbuh - Invetarisasi Tanah, Bangunan dan Tanaman - Formula perhitungan Kompensasi - Penetapan dan pembayaran kompensasi, dsb.	PLN memiliki kepastian dalam menghitung dan menetapkan nilai investasi untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik dan jaringan transmisi
Decision Letter of Energy Minister No. 38 year 2013 to replace Decision Letter of Energy Minister No.975K/47/MPE/1999 which is issued on 11 May 1999.	• Issued on 24 December 2013. • Guideline about compensation for land, plants, and buildings on the free area on the location of high voltage networks (SUTT and SUTET), consists of 11 articles discussing about: - The establishment of Valuation Institution - Assert the definition and criteria of plant growing - Land, building, and plants inventory counting. - Formula to calculate compensation. - Stipulation and payment of compensation, etc.	PLN has a certainty for calculation and stipulating the investment value to develop power plant and transmission network infrastructure.
Peraturan Men Keu no170/PMK.02/2013, menggantikan Peraturan Men Keu 162/PMK.02/2007	• Ditetapkan dan Berlaku pada tanggal 28 November 2013. • Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik • Pengaturan mencakup rumus subsidi , yakni: S = (TTL – BPP (1+m)) x V S = subsidi listrik TTL = tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif. BPP = BPP (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif. M = marjin (%) V = volume penjualan • marjin dalam perhitungan pembayaran subsidi listrik merupakan marjin yang digunakan dalam perhitungan besaran subsidi listrik untuk menghasilkan angka subsidi listrik yang ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.	PLN memiliki panduan baru dalam menghitung dan memproyeksikan besaran subsidi sebagai bagian pemenuhan kebutuhan dana investasi maupun modal kerja.
Regulation of Finance Minister No. 170/PMK.02/2013 to replace Regulation of Finance Minister No. 162/PMK.02/2007.	• Issued on and Effective on 28 November 2013. • Procedures for Budgeting, Calculation, Payment, and Reporting of electricity subsidy. • Regulation about the formula of subsidy which is: • S=(TTL-BPP(1+m))xV • S: electricity subsidy • TTL: average electricity tariff (Rp/kWh) for each tariff group • BPP: basic electricity cost (Rp/kWh) for each tariff group • m: margin (%) • V: volume • margin in the calculation of electricity subsidy is margin that is being used to calculate the value of electricity subsidy that result in subsidy number that is stated in National Budget or Revised National Budgets.	PLN has new guideline to calculate and predicts the amount of subsidy as part of fulfillment of fund needed for both investment and working capital.
Per Men BUMN Nomor : PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara.	• Kewajiban bagi BUMN melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pasar secara efektif dalam rangka memitigasi risiko pasar. • Pengendalian risiko pasar dapat dilakukan melalui Transaksi Lindung Nilai *(Hedging)* • Kewajiban pembuatan SOP untuk transaksi *Hedging* dimaksud.	PLN dapat memitigasi risiko perubahan kurs dan meminimalisir kerugian akibat perubahan kurs yang selama ini membebani perhitungan rugi laba.
Regulation of State Owned Enterprises Minister No. PER-09/MBU/2013 about the general regulation of hedging for State Owned Enterprises (SOE).	• SOE have to identify, value, monitor, and control the market risk effectively in order to mitigate market risk. • Controlling market risk can be done using hedging. • Requirement to have Standard Operating Procedures for hedging.	PLN can mitigate exchange rate risk and minimize loss due to exchange rate changes which has been a burden for the profit.
Peraturan BI No 16/20/PBI/2014 Tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN) Korporasi Nonbank pada PLN	• BI memberikan pedoman tentang prinsip kehati-hatian bagi lembaga korporasi non-bank yang memiliki utang valuta asing (valas) dengan memenuhi rasio lindung nilai minimal, rasio likuiditas minimal dan peringkat hutang	PLN harus menjaga dan memenuhi 3 prinsip kehati-hatian : rasio lindung nilai minimal, rasio likuiditas minimal dan peringkat hutang
Regulation of Indonesia Central Bank No. 16/20/PBI/2014 about the implementation of precautionary principles in managing Foreign Loan in NonBank corporation such as PLN	• The Indonesian Central Bank provide guideline about precautionary principles for non-bank corporation which have foreign currency loan by fulfilling minimum hedging ratio, liquidity ratio, and debt ranking.	PLN have to maintain and fulfill three precautionary principles: minimum hedging ration, liquidity ratio, and debt rank.

Informasi Segmen

Tinjauan Operasi Menurut Segmen

Untuk kepentingan manajemen, PLN membagi segmen operasi berdasarkan area geografis, yakni Sumatera, Indonesia Timur dan segmen Jawa Bali. Selain itu, PLN juga membagi segmen menurut bidang usaha yang diwakili oleh kinerja anak usaha terkonsolidasi yang disajikan dalam bentuk tabel kinerja anak usaha secara ringkas.

Penjualan Tenaga Listrik Menurut Segmen Geografis

Berdasarkan segmen geografisnya, penjualan tenaga listrik terbesar terjadi pada region Jawa-Bali yang berkontribusi hingga 65.8% dari penjualan tenaga listrik Perseroan di tahun 2014. Data penjualan listrik menurut Segmen Geografis dapat dilihat pada pembahasan "Pemasaran – Penjualan Tenaga Listrik".

Pelanggan PLN Menurut Segmen Geografis

Berdasarkan segmen geografisnya, jumlah pelanggan di wilayah Jawa Bali tetap mendominasi, dengan kontribusi 64,41%, diikuti wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur, seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Persentasi jumlah pelanggan (65,1%) yang relatif lebih kecil dari jumlah konsumsi listrik (75%) untuk region Jawa Bali, menunjukkan pelanggan di region ini memiliki tingkat perekonomian yang lebih tinggi dan menunjukkan relatif lebih banyaknya pelanggan, industri maupun bisnis yang membutuhkan listrik dalam jumlah lebih besar dari pelanggan rumah tangga. Jumlah pelanggan menurut segmen geografis dapat dilihat pada pembahasan "Pemasaran – Jumlah Pelanggan".

Segment Information

Operational Review by Segment

For management purposes, the Company divides the operational segment geographically, into Java-Bali, West Indonesia and East Indonesia. Furthermore, the Company also segments the operation according to business line of the consolidated subsidiary, as briefly presented in the table of subsidiary performance.

Electric Power Sales by Geographical Segment

By geographical segment, the largest electric power sales occurred in Java-Bali area, which contributed up to 65,8% of the total electrical power sales of the Company in 2012. Electric power sales by geographical segment data can be found in the marketing electric power sales section.

PLN Customers by Geographical Segment

By geographical segments, the number of customers in the Java Bali area remained dominating, with a contribution of 64.41%, followed by the West Indonesian and then East Indonesia, as demonstrated in the following table. Percentage of the number of customers (65.1%) which is relatively smaller than the amount of electricity consumption (75%) for the Java-Bali area, shows that customers in this region are of higher economic level and that customers from industry and business categories have relatively higher demands for electricity than the household customers. Total PLN customers by geographical segment can be found in Marketing – Total Customer section.

Penjualan menurut segmen geografis (dalam GWh)

Amount of Electric Power Sales by Geographical Segment (In GWh)

Area Geografis	2013	2014	Kontribusi Contribution		Perubahan Change	Geographic Area
			2013	2014		
Sumatera	27.565	29.596	14,70%	14,9%	7,4%	Sumatera
Indonesia Timur	17.980	19.600	9,59%	9,9%	9,0%	East Indonesia
Jawa - Bali	141.996	149.406	75,71%	75,2%	5,2%	Java - Bali
Jumlah	**187.541**	**198.602**	**100,00%**	**100%**	**5,9%**	**Total**

Nilai Penjualan Perseroan Menurut Segmen Geografis.

Sejalan dengan jumlah pelanggan dan jumlah penjualan daya listrik, maka nilai penjualan listrik terbesar terdapat pada segmen geografis Jawa Bali, diikuti Sumatera dan Indonesia Timur. Hal ini dapat dilihat pada tabel ringkas berikut.

Amount of Electric Power Sales by Geographical Segment

In line with the total customers and electric power sold, the amount of electric power sales is the largest coming from the Java - Bali segment, followed by Sumatera and then East Indonesia. This is demonstrated in the table below.

Nilai penjualan menurut segmen geografis (Rp Miliar)

Amount of Electric Power Sales by Geographical Segment (Rp Billion)

Keterangan	2013	2014	Perubahan Change	Remark
Jawa Bali	133.611.034	192.575.175	44.1%	Java - Bali
Sumatera	94.163.882	71.892.129	(23.7%)	Sumatera
Indonesia Timur	34.072.126	28.253.887	(17.1%)	East Indonesia
Jumlah	**261.847.042**	**292.721.191**	**11.8%**	**Total**

Kinerja Anak Perusahaan

Kinerja anak usaha mencerminkan kinerja sesuai segmen usaha sebagaimana tergambar pada struktur usaha. Adapun ringkasan kinerja keuangan Anak Perusahaan pada tahun 2014, sesuai bidang usahanya adalah sebagai berikut.

Subsidiary Performance

A subsidiary performance reflects the performance in the respective business line as illustrated in the Company structure. The summary of the Subsidiary financial performance in 2014, listed by business line is as follows.

Dalam Rp Miliar In Billion Rp

Uraian	PT IP	PT PJB	PT ICON+*	PT PLN Batam*	PT PLN Tarakan*	PT PLN Enjiniring	PT PLN Batubara*	PT PLN BAG*	PT Haleyora Power*	Description
Total Aktiva	53.503	41.057	2.035	5.767	217	419	1.398	1.388	305	Total Assets
Aktiva Lancar	25.756	21.037	751	965	100	384	369	715	242	Current Assets
Aktiva Tidak Lancar	27.747	20.019	1.284	4.802	117	35	1.029	673	63	Non current Assets
Total Ekuitas dan Kewajiban	53.503	41.057	2.035	5.767	217	419	1.399	1.388	305	Total Equity and Liabilities
Ekuitas	45.366	35.851	993	1.659	(75)	329	131	62	159	Equity
Kewajiban Lancar	3.321	2.874	644	1.157	247	88	1.268	414	52	Current Liabilities
Kewajiban Tidak Lancar	4.816	2.332	398	2.951	45	2	1	913	93	Non current Liabilities
Laba (Rugi)										Earnings (Loss)
Pendapatan Usaha	35.724	28.367	1.584	2.606	270	193	3.258	1.275	643	Operating Income
Beban Usaha	33.479	27.126	1.271	2.047	287	176	3.290	1.165	627	Operating Expenses
Pendapatan/Beban di luar usaha	10.797	532	313	559	(18)	17	(32)	111	16	Others Income/ Expenses
Laba (Rugi) Bersih	1.636	1.434	171	138	(16)	35	(31)	109	54	Gain (Loss)

**In house report*

07 Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Report

Tujuan Objective

Pedoman, Struktur dan Mekanisme Tata - kelola
Guidelines, Structure and Mechanism

Kebijakan Pokok Perusahaan Corporate Policies

Implementasi Praktek GCG
GCG Practices Implementation

Penilaian Penerapan GCG GCG Assessment

Peningkatan Kualitas Penerapan Praktik Terbaik GCG
Improvement of GCG Best Practices Quality

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
The General Meeting of Shareholders (GMS)

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Direksi Board of Directors

Komite dan Laporan Komite Dewan Komisaris
Committees and Board of Commissioners' Committee Report

Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Secretary

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Risiko dan Manajemen Risiko
Risk and Management Risk

Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Internal Supervisory Unit

Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal
Internal Control
And Supervision System

Mekanisme Pelaporan The Mechanism

Perkara Hukum yang Melibatkan Perseroan
Legal Proceedings Involving The Company

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola terbaik sebagai landasan dari tercapainya level kinerja baru Perseroan sejajar dengan korporasi sejenis kelas dunia dalam memenuhi permintaan tenaga listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

Improving the quality of implementation of best practices of corporate governance as the cornerstone of achieving a new level of performance of the Company in line with the kind of world-class company in meeting electric power demand to support the growth of the national economy while meeting stakeholder expectations.

Tujuan

PLN bertekad terus menerapkan *best practice* Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk menunjang tercapainya tujuan Perusahaan, dilandasi oleh keyakinan seluruh jajaran manajamen puncak maupun jajaran pelaksana, bahwa penerapan *best practices* GCG akan meningkatkan kepercayaan sekaligus nilai Perusahaan secara berkelanjutan.

Penerapan lima prinsip dasar GCG yakni: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran, secara konsisten diyakini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG dengan target tercapainya tiga sasaran utama dari penerapan GCG bagi PLN, yakni:

1. Memaksimalkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan berkualitas, peningkatan efisiensi operasional serta peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan.
2. Meningkatnya nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalkan risiko keputusan investasi yang mengandung benturan kepentingan.
3. Meningkatnya kepercayaan Pemegang Saham serta kepuasan pemangku kepentingan karena meningkatnya nilai perusahaan.

PLN berupaya memastikan tercapainya tujuan tersebut, dengan melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkesinambungan, baik dari sisi perangkat lunak GCG (pedoman, aturan-aturan dan sistem kerja) maupun dari sisi perangkat keras (penguatan lembaga pelaksana unit kerja).

Untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan praktik GCG di masa depan, PLN melaksanakan penilaian secara berkala mengenai praktik, kelengkapan perangkat lunak dan perangkat keras GCG.

Pedoman, Struktur dan Mekanisme Tata-Kelola

Pedoman GCG telah menjadi pegangan bagi pelaksanaan tata kelola maupun landasan setiap kebijakan pengelolaan operasional Perusahaan, serta merupakan penjabaran dari 10 Prinsip Praktis implementasi GCG di lingkungan PLN, yaitu:

1. Meletakkan dasar yang kuat untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Mengembangkan struktur Komisaris dan Direksi yang bernilai tambah.
3. Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab.
4. Menumbuhkan dan mempertahankan integritas dalam Laporan Keuangan.
5. Membuat *disclosure* atau pengungkapan yang tepat waktu dan berimbang mengenai segala sesuatu yang penting tentang perusahaan.
6. Menghormati hak-hak Pemegang Saham.
7. Mengidentifikasi dan mengelola risiko perusahaan.
8. Mendorong dan meningkatkan kinerja.
9. Mengembangkan sistem remunerasi yang adil dan bertanggung jawab.
10. Memahami dan peduli terhadap kepentingan-kepentingan para *stakeholders*.

Objective

PLN is committed to continuously apply the best practices of Good Corporate Governance to support the achievement of corporate objectives, based on the belief hold by the whole range of management, from the highest rank, and executive ranks, that the application of best practices in corporate governance will increase the trust and value of the company on an ongoing basis.

Application of the five basic principles of corporate governance are: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness, consistently believed would improve the quality of GCG with the achievement targets three main objectives of the implementation of GCG for PLN, namely:

1. Maximize the performance of the company through the creation of a decision-making process and in better quality, increased operational efficiency and improved service delivery to stakeholders.
2. Increased value through improved financial performance and minimize the risk of investment decisions from any conflict of interest.
3. Increased confidence of Shareholders and the satisfaction of stakeholders due to the increased value of the company.

PLN seeks to ensure the achievement of these objectives, by taking steps and continuous improvement, both in the GCG software (guidelines, rules and systems of work) and in terms of hardware (strengthening the implementing agencies working unit).

To get feedback for improvement of corporate governance practices in the future, PLN carry out regular assessments on the practice, the completeness of software and hardware of GCG.

Guidelines, Structure and Mechanism of Governance

GCG Guideline has become a handbook for the implementation of governance and policy cornerstone of any Company's operational management, as well as the elaboration of the 10 Principles of Practical implementation of GCG in the PLN, namely:

1. Laying down a solid foundation for the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Develop the structure of Commissioners and Board of Directors which can seek value-added.
3. Develop a process of ethical and responsible decision-making.
4. To foster and maintain the integrity of the Financial Statements.
5. Making a disclosure on timely basis and balanced approaching about everything important about the company.
6. Respect the rights of Shareholders.
7. Identify and manage risks Company.
8. Encourage and improve performance.
9. Develop a fair remuneration system and responsible.
10. Understand and care for the legitimate interests of stakeholders

Implementasi GCG di PLN didukung oleh perangkat yang lengkap yaitu dengan memiliki dan memberlakukan Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)* yang berisi panduan, batasan dan nilai-nilai yang mengatur segala kebiasaan dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN.

PLN telah memiliki *Board Manual*, yakni Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang berisi panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten sehingga menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perusahaan.

Tujuan dari penyusunan dan pemberlakuan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris adalah:

1. Memperjelas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta memperjelas hubungan kerja di dalam maupun di antara kedua organ perusahaan tersebut; dan
2. Mempermudah organ-organ di bawah Dewan Komisaris dan Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, maupun hubungan tugas keduanya.

Struktur

Struktur mekanisme GCG di lingkungan PT PLN (Persero) adalah:

GCG implementation in PLN is supported by a complete device that is by having and enforcing the Code of Conduct, which contains guidelines, limits and values that govern all practices and procedures in the inter-action among the professional association in the PLN.

PLN has a Board Manual, namely Work Guidelines for Directors and Board of Commissioners, which contains guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners which describes the activity in a structured, systematic, easily understood and can be implemented consistently so that it becomes a reference for the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out their respective duties to achieve the vision and mission of the Company.

The purpose of the preparation and application of the Working Guidelines for Board of Directors and Board of Commissioners are:

1. To clarify the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as clarify the working relationships within and between the two organs of the company; and
2. To facilitate the Organs under the Board of Commissioners and Board of Directors to understand the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as the relationship of both Board tasks.

Structure

The structure of corporate governance mechanisms in PT PLN (Persero) is:

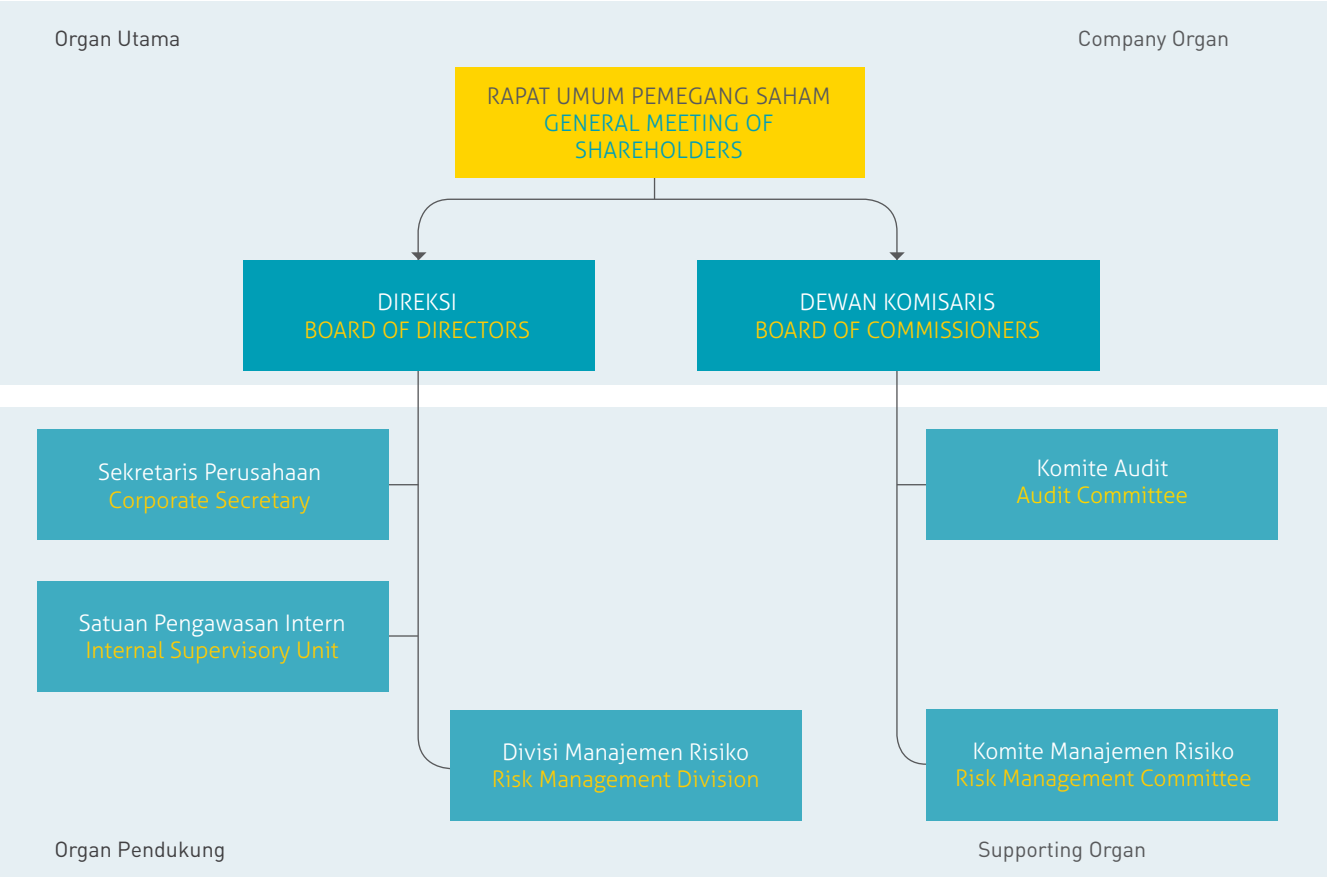

Mekanisme

Pada struktur tersebut tampak bahwa lembaga tertinggi di perusahaan adalah forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam forum ini, Pemegang Saham dapat mengusulkan suatu keputusan penting dengan kedudukan yang setara. Sebagai contoh adalah pengambilan keputusan untuk melakukan investasi, dimana RUPS dapat menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengelolaan Perusahaan dan pelaksanaan setiap keputusan RUPS dilakukan oleh Direksi, dan Dewan Komisaris wajib mengawasi dan memberikan nasihat guna memastikan tujuan perusahaan serta Keputusan RUPS terlaksana dan tercapai. Untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait.

Komitmen

Seluruh jajaran PLN, mulai dari jajaran manajemen puncak, manajemen madya hingga pelaksana, memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan seluruh aturan dan kebijakan sebagai bagian dari upaya menerapkan praktek terbaik Tata Kelola Perusahaan. Komitmen implementasi praktek terbaik Tata Kelola Perusahaan ditunjukkan dengan selalu mendasarkan seluruh keputusan dan penetapan kebijakan operasional pada aturan-aturan dan undang-undang yang berlaku.

Selain itu, manajemen puncak juga mempelopori pelaksanaan penandatanganan pakta integritas untuk tunduk, taat dan konsisten melaksanakan seluruh pokok-pokok aturan dan kebijakan yang digariskan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan serta Pedoman Kode Etik.

Sejak deklarasi "PLN Bersih, No Suap" di tahun 2012, seluruh jajaran Perseroan termotivasi untuk menerapkan praktek terbaik tata kelola pada saat melaksanakan tugas sehari-hari, melaksanakan kegiatan operasional maupun saat merealisasikan proyek-proyek pengembangan.

Deklarasi "PLN Bersih, No Suap" merupakan salah satu upaya yang dilakukan Perseroan untuk menunjukkan komitmen penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, yang telah dikampanyekan dan dilaksanakan secara konsisten.

Pernyataan deklarasi "PLN Bersih" adalah:

1. Tidak akan melakukan segala tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi menurut UU nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pelayanan publik yang dilaksanakan PLN. Tindakan tersebut meliputi korupsi, nepotisme, gratifikasi, *mark up*, pemberian hadiah, konflik kepentingan, dan pemerasan.
2. Menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan berpegangan pada prinsip transparansi dan efisiensi dalam penggunaan aset negara.
3. Menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan mengikuti proses legal formal juga menekankan pada prinsip efisiensi dan transparansi.

Mechanism

As demonstrated in the structure above, the highest corporate organ is the General Meeting of Shareholders (GMS).

In this forum, the Shareholders can propose an important decision with an equal vote. For example, in making the decision to invest, where the GMS may submit all of the authority and supervision of the implementation of the decision to the Board of Commissioners and Board of Directors, in accordance with the statutes and regulations applied.

The management of the Company and the implementation of any decision made in GMS is conducted by the Board of Directors and Board of Commissioners shall supervise and provide advice to ensure company objectives and decisions of Shareholders done and achieved. To ensure a successful and smooth execution of big duties and responsibilities, the Board is assisted by the Audit Committee and Risk Management Committee, while the Board of Directors is assisted by relevant work units.

Commitment

The whole range of PLN, starting from the top Management, middle Management to executive, has committed to implementing all the rules and policies as part of efforts to implement the best practices of Corporate Governance. Commitment to the implementation of Corporate Governance best practices demonstrated by always put all decisions and determination of operational policy on the rules and laws that applied.

In addition, top management also pioneered the implementation of integrity pact to submit, obey and consistently perform all the main points of the rules and policies outlined in the Corporate Governance Guidelines and Codes of Conduct.

Since the declaration of "PLN Bersih, No Suap" in 2012, the whole range of the company are motivated to implement best practices in governance at the time of carrying out everyday tasks, carrying out operational activities and when realizing development projects.

"PLN Bersih, No Suap" Declaration is an effort by the company to demonstrate commitment on practical application of Good Corporate Governance, which has been campaigned and implemented consistently.

"PLN Bersih" declaration statement are:

1. It will not do any action that can be categorized as corruption according to Law No. 20/2001 on Corruption, in every process of procurement of public services are carried out by PLN. Such actions include corruption, nepotism, graft, mark up, gifts, conflicts of interest, and extortion.
2. Run the process of procurement of goods and services by holding on to the principles of transparency and efficiency in the use of state assets.
3. Run the process of procurement of goods and services by following the formal legal process also emphasizes the principles of efficiency and transparency.

Kebijakan Pokok Perusahaan

Untuk menunjang peningkatan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik PLN terus berupaya melengkapi aturan kebijakan operasional sebagai bagian dari panduan GCG. Berikut adalah beberapa aturan kebijakan (*soft-structure*) yang telah selesai disusun dan diimplementasikan.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Perseroan

PLN menyusun dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pengendalian internal dengan tujuan meminimalisir potensi kerugian yang mungkin terjadi.

PLN telah memiliki Divisi Manajemen Risiko, sebagai upaya meningkatkan pengelolaan risiko secara terus menerus, tepat dan komprehensif. Pengelolaan risiko disertai upaya mitigasi risiko yang telah diidentifikasi, sehingga terhindar dari dampak negatif yang mungkin timbul dalam mencapai tujuannya. (*Selengkapnya lihat uraian "Risiko dan Manajemen Risiko", halaman 302*)

Transaksi Benturan Kepentingan

PLN memiliki peraturan "Transaksi Benturan Kepentingan", yang menegaskan bahwa pihak-pihak internal maupun eksternal yang memiliki peluang keuntungan dari terjadinya benturan kepentingan dalam suatu transaksi, dilarang terlibat dalam proses pembuatan keputusan menyangkut transaksi tersebut.

Kebijakan Manajemen Kinerja

Dalam rangka optimalisasi kinerja korporasi, PLN membuat Kontrak Manajemen yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris yang mencakup enam perspektif *key performance indicator* yang berbasis *Malcolm Baldridge*, yaitu perspektif pelanggan; produk dan layanan; proses bisnis internal; sumber daya manusia; keuangan dan pasar; serta kepemimpinan.

Kontrak Manajemen ini tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2014, yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris dan telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN/RUPS.

Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi

PLN melarang pemberian maupun penerimaan hadiah dan donasi baik oleh pihak dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Larangan ini diberlakukan untuk menegakkan independensi pengambilan keputusan maupun potensi terjadinya benturan kepentingan dan atau turunnya kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

PLN menerapkan kebijakan pengadaan yang transparan dan akuntabel, memenuhi prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka dan bersaing dengan adil serta tidak diskriminatif. Proses pengadaan barang dan jasa diupayakan melalui persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran

Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas terhadap seluruh proses bisnis yang dilakukan, serta untuk mencegah tindakan korupsi, *fraud* dan tindakan penyalahgunaan

General Policy of The Company

To support the increased the adoption of Good Corporate Governance PLN continues to complement the operational policy rules as part of corporate governance guidelines. Following these are some rules of the policy (soft-structure) that has been implemented.

Risk Management Policy The Company

PLN prepares and establishes a Risk Management Policy as part of the control system and internal control for the purpose of minimizing the occurring of potential losses.

PLN has a Risk Management Division, as an effort to improve risk management continuously, accurately and comprehensively. Risk management plus the effort of risk mitigation of all identified risk, will avoid negative impacts that may arise in achieving the company's objectives. (for details see the description "Risks and Risk Management", page 302.

Conflict of Interest Transaction

PLN has rules "Conflict of Interest Transaction", which confirms that the party-internal or external- which having opportunities to have advantage from the possibility the existing of "conflicts of interest" in a transaction, are prohibited from engaging in the decision-making process regarding the transaction.

Performance Management Policy

In order to optimize the performance of the corporation, PLN creates Contract Management, which are agreed and signed by the Shareholders, the Board of Directors and Board of Commissioners, in which includes six perspectives of key performance indicator of Malcolm Baldridge, namely: the customer perspective; products and services; internal business processes; human resources; and financial markets; and leadership.

The management contract is stated in the Work Plan and Budget 2014, which was signed by the Board of Directors, Board of Commissioners and has been approved by the Minister of State Owned Enterprises / General Meeting of Shareholders (GMS).

Prohibition of Giving and Receiving Gifts and Donations

PLN prohibits giving or receiving of gifts and donations by both inside and outside the enterprise environment. This prohibition applied to uphold the independence of decision-making as well as potential conflicts of interest and or decline in public confidence in the integrity of the company.

Procurement of Goods / Services

PLN implement procurement policies based on the principles of transparent and accountable, effective and efficient, openness and competition in fairly, and not discriminatory. The procurement process is pursued through healthy competition in accordance with rules and regulations that applied.

Reporting Policy Violations

To improve accountability, transparency and responsibility of all business processes carried out, as well as to prevent corruption, fraud and abuse of authority, PLN has implemented Reporting

kewenangan lainnya, PLN telah menerapkan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (KPP) atau dikenal juga dengan *Whistleblowing System sejak akhir tahun 2012*. (Lihat uraian *"Whistleblowing System"* selengkapnya di halaman 322*)*

Implementasi Prinsip Dasar dan Praktek Terbaik GCG

PLN senantiasa memastikan bahwa seluruh prinsip-prinsip dasar GCG, yakni: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, *Fairness*/Kesetaraan/Kesamaan Kesempatan, diterapkan pada setiap aspek bisnis di semua tingkat/struktur operasional perusahaan. Implementasi kelima prinsip dasar GCG dalam kegiatan operasional perusahaan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

A. Transparansi

Implementasi asas transparansi tercermin dalam berbagai kegiatan dan media komunikasi yang intensif dan dikelola secara profesional, sehingga para investor, kreditor, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan perusahaan secara merata.

Sebagai perusahaan yang telah menerbitkan obligasi, maka sesuai dengan Peraturan Bapepam, UU PT serta UU KIP, PLN berkewajiban mengungkapkan informasi perusahaan. Oleh karenanya PLN menyediakan informasi kepada publik untuk setiap aksi korporasi yang telah dilaksanakan selambat-lambatnya dua hari kerja, termasuk kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Perseroan juga menyediakan beragam informasi dasar berkaitan dengan status perusahaan, maupun informasi lain yang wajib disampaikan dan dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

Informasi diberikan melalui beragam saluran, berupa media cetak, tatap muka melalui acara *press release*, presentasi dan *press gathering*, maupun media elektronik sebagaimana disediakan pada *website* Perseroan. Adapun informasi yang disajikan oleh PLN meliputi:

1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
2. Nama lengkap Pemegang Saham, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
3. Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca dan Laporan Laba-rugi, dan Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah diaudit;
4. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
5. Sistem dan alokasi dana remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Mekanisme penetapan Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai Informasi Publik serta tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan/atau Direktur dan Komisaris perusahaan;
8. Pedoman pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;

Policy Violations (KPP) or also known as the Whistleblowing System since the end of 2012. (See description "Whistleblowing System" more on page 322)

Implementation of Basic Principles and Best Practice of GCG

PLN always make sure that all the basic principles of Good Corporate Governance, namely: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness / Equality / Equal Opportunities, is applied to every aspect of the business at all levels / operational structure of the company. Implementation of the five basic principles of Good Corporate Governance in the company's operations are described in the following paragraphs.

A. Transparency.

Implementation of the principle of transparency is reflected in the various activities and intensive communication media and professionally managed, so that investors, creditors, public and all stakeholders can determine the performance and activities of the company management evenly.

As a company that has issued bonds, PLN should comply to Bapepam Regulation, Company Law and Freedom of Information Law, PLN shall disclose all corporate information. Therefore, PLN shall provide information to the public for any corporate actions taken, no later than two working days, including for the Shareholders and Board of Commissioners. The Company also provides a variety of importance information pertaining to the status of the company, as well as any other information required to be submitted and needed by stakeholders.

Information is provided through a variety of channels, such as printing media, face-to-face through the press releases event, presentations and press gathering, and electronic media, as provided on the Company's website. The information presented by PLN includes:

1. The name and domicile, purpose and types of business activities, the establishment period, and capital, as stated in the Articles of Association;
2. The full name of the Shareholder, Member of the Board of Directors, and Member of the Board of Commissioners;
3. The Annual Report, Financial Statements, Balance Sheet and Income Statement, and Statement of Corporate Social Responsibility which has been audited;
4. The results of the assessment by the external auditors, credit rating agencies and other agencies;
5. The system of allocation of funds and the remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors;
6. The determination of the mechanism of Directors and Board of Commissioners;
7. The case law under the laws of the open as well as the Public Information lawsuits are important to the company and / or Directors and Commissioners;
8. The guidelines for the implementation of Good Corporate Governance based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness;

9. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan;
10. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
11. Produk atau penemuan baru yang berarti;
12. Perubahan dalam pengendalian;
13. Perubahan penting dalam Manajemen;
14. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
15. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
16. Penggantian akuntan yang mengaudit;
17. Perubahan tahun fiskal perusahaan;
18. Kegiatan penugasan Pemerintah dan/atau pelayanan umum atau subsidi; dan
19. Transparansi mekanisme pengadaan barang dan jasa.

B. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan fokus peningkatan fungsi dan peran setiap Organ Perusahaan dan Manajemen, sehingga pengelolaan usaha dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas operasional, PLN menerapkan beberapa kebijakan dan prosedur kerja berstandar internasional, sebagai berikut.

1. Sistem Manajemen Mutu (ISO)
   Sejak 2004, secara intensif PLN melaksanakan program sertifikasi Bidang Pembangkitan yang meliputi ISO 9001 tentang Pelayanan, ISO 14001 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, SMK3, Kelaikan Operasi, Sertifikasi Kompetensi Operasi dan Pemeliharaan.

   Sasaran yang hendak dicapai adalah setiap Pusat Tenaga Listrik (Pembangkit) harus dikelola dengan mengikuti standar internasional yang dibuktikan dengan diperolehnya Sertifikasi Bidang Pembangkitan.

   PLN juga mengintensifkan pelaksanaan program sertifikasi bidang Pelayanan Pelanggan yaitu ISO 9001 di unit bisnis distribusi dan wilayah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan. Perusahaan selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan pegawainya sehingga diharapkan tidak terjadi kecelakaan kerja *(zero accident)* dengan mewajibkan setiap unit memperoleh sertifikat ISO 27000.

   Penerapan Sistem Manajemen Mutu melalui program sertifikasi diyakini akan membuat akuntabilitas kegiatan operasional meningkat, sehingga tingkat kepercayaan para kreditor dan para pemangku kepentingan lain terhadap PLN membaik.

2. Pengawasan dan Pengendalian Internal
   PLN menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian internal sebagai bagian dari implementasi asas akuntabilitas dan transparansi dari prinsip dasar GCG. PLN menerapkan sistem pengendalian internal yang sebagian tugasnya adalah melakukan pengawasan atas akuntabilitas Direksi dan jajaran operasionalnya. Melalui unit Satuan Pengawasan Intern, Manajemen PLN memberikan jaminan atas efektivitas dan efisiensi operasi, ketaatan terhadap aturan dan perundang-undangan serta ketepatan dan

9. Merger, stock purchase, consolidation or creation of joint ventures;
10. Acquisition or loss of significant contracts;
11. Products or new invention means;
12. The change in control;
13. The important changes in management;
14. The labor disputes are relatively important;
15. The announcement of the issuance of debt securities;
16. Replacement of auditor;
17. The change in the company's fiscal year;
18. The assignment of activities of government and / or public services or subsidies; and
19. Transparency mechanism for procurement of goods and services.

B. Accountability

The principle of accountability implemented focused on improving the function and role of each organ of the company and management, so that the management of the business can be run properly. In order to improve the accountability of the implementation of operational tasks, PLN implement policies and procedures to international standards, as follows:

1. Quality Management System (ISO)
   Since 2004, PLN is implement a Power Sector certification program that includes ISO 9001 on Services, ISO 14001 on Environmental Management and Monitoring, SMK3, Operation Worthiness, and Operation and Maintenance Competency certification.

   The target to be achieved is every Central Electric Power (Plant) should be managed according to international standards as evidenced by obtaining certification in Power Sector.

   PLN also intensify the implementation of field certification programs such as ISO 9001 Customer Service in the distribution business units and regions in an effort to improve the quality of service to customers. The company always put the safety and health of its employees so hopefully not happen occupational accidents (zero accident) by requiring each unit obtained ISO 27000.

   The implementation of the Quality Management System through the certification program is believed to made accountability of operating activities increased, so that the level of confidence of creditors and other stakeholders to PLN is improved.

2. Supervision and Internal Control
   PLN conducting oversight and internal controls as part of the implementation of the principle of accountability and transparency of the basic principles of Good Corporate Governance. PLN implement internal control system, whose work is to supervise the accountability of the Board of Directors and its operational range. Through the Internal Audit unit, Management PLN provide assurance on the effectiveness and efficiency of operations, adherence to rules and regulations as well as the accuracy and reliability

keandalan pelaporan keuangan. (Selanjutnya lihat uraian "Satuan Pengawasan Intern", halaman 316).

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan transaksi dan pengelolaan keuangan perusahaan, PLN merintis dan meningkatkan kerjasama dengan BPK dan KPK, badan negara yang aktif terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. PLN juga menjalin kerjasama dengan Tranparansi Internasional Indonesia dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan usaha.

2. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (KPP)
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabiltas, PLN telah menerapkan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (KPP) atau dikenal juga dengan *Whistleblowing System* sejak akhir tahun 2012.

3. Pengembangan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi
Pengembangan modul sistem transaksi berbasis teknologi informasi dimaksudkan untuk dua tujuan, yakni akuntabilitas pencatatan dan pembukuan transaksi, sekaligus efisiensi operasional. PLN telah menerapkan beragam modul transaksi berbasis teknologi informasi, meliputi: AP2T (Aplikasi Pengelolaan Pelanggan Terpusat) dan P2APST (Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat), yang meminimalisir kontak antara petugas dengan pelanggan sehingga meminimalisir peluang terjadinya tindakan penyimpangan.

4. Kode Perilaku dan Kode Etik
Kode perilaku atau *Code of Conduct* PLN telah diterbitkan pada Oktober 2005 sebagai implementasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG, khususnya dalam hal akuntabiltas. *Code of Conduct* berisi kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN. Petunjuk ini mengatur mengenai aspek kepemimpinan PLN, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota, dan hubungan dengan pihak eksternal. Secara paralel, Buku Pedoman Perilaku PLN disempurnakan mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis perusahaan, yang terakhir kali disempurnakan pada tahun 2012.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas setiap pelaksana dalam menjalankan tugasnya, PLN kini tengah menyusun Buku Kode Etik Perusahaan. Penyusunan pedoman Kode Etik tersebut dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari upaya menanamkan Budaya PLN Bersih yang digencarkan sejak tahun 2012 melalui gerakan "PLN Bersih, No Suap". Penyusunan kode etik tersebut melengkapi kebijakan-kebijakan yang telah ada, seperti: Larangan Pemberian serta Penerimaan Hadiah dan Donasi, Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan kebijakan lain sejenis.

5. Budaya Perusahaan
Gerakan PLN Bersih, No Suap, merupakan upaya menciptakan budaya perusahaan, budaya seluruh jajaran PLN untuk meningkatkan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengelolaan perusahaan sehari-hari. Seluruh "warga PLN" yakin untuk mewujudkan falsafah, visi dan

of financial reporting. (See also the description of "Internal Supervisory Unit", page 316.

As part of efforts to improve the accountability of transactions and financial management company of, PLN pioneering and increase cooperation with the CPC and the Corruption Eradication Commission, the state agency that is actively involved in efforts to combat corruption. PLN also formed a partnership with Transparency International Indonesia in order to increase the accountability of business activities.

2. Reporting Policy Violations (KPP)
As part of efforts to improve accountability, PLN has implemented Reporting Policy Violations (KPP) or also known as the Whistleblowing System since the end of 2012.

3. Development of Information Technology-Based Transaction
The development of technology-based transaction system module Opera- intended for two purposes, namely accountability records and bookkeeping transactions, as well as operational efficiency. PLN has implemented a variety of information technology-based transaction module, include: AP2T (Centralized Customer Management Applications) and P2APST (Management and Control Flow In Centralized Revenue), which minimizes contact between officers with the customers so as to minimize the chances of actions deviation.

4. Code of Conduct and Code of Ethics
Codes of conduct or Code of Conduct of PLN has been published in October 2005 as an implementation to improve the quality of implementation of Good Corporate Governance, particularly in terms of accountability. Code of Conduct contains good practice and governance professionals in the environmental association PLN. This Directive regulates the leadership aspects of PLN, membership responsible, professional relationships between members, and relationships with external parties. In parallel, PLN's Behavior Handbook enhanced following development and changes in the business environment of the company, which last amended in 2012.

As part of efforts to improve the accountability of each executive in carrying out its duties, PLN currently compiles the Company's Code of Ethics. The preparation of the guidelines of the Code is intended as a follow-up of efforts to inculcate the culture of PLN Bersih intensified since the year 2012 through the motions "PLN Bersih, No Suap". Preparation of the complete code of conduct policies that already exist, such as: Prohibition of Giving and Receiving Gifts and Donations, Transactions Conflict of Interest and other such policies.

5. Corporate Culture
Movement "PLN Bersih, No Suap" an effort to create a culture of enterprise, culture whole range of PLN to increase accountability in performing tasks of daily management of the company. The whole "citizen PLN" are sure to realize

misi perusahaan harus dilakukan secara bersama-sama dilandasi oleh Budaya Perusahaan yang mengandung nilai-nilai Saling Percaya, Integritas, Peduli, Pembelajar.

Budaya Perusahaan PLN diresmikan pada 27 Oktober 2002 bertepatan dengan Hari Listrik Nasional ke-57, menjadi alat agar tercipta integritas di seluruh "warga PLN" sekaligus meningkatkan kualitas penerapan GCG.

Implementasi Budaya Perusahaan dilaksanakan melalui sosialisasi ke seluruh jajaran perusahaan oleh Tim Sosialisasi PLN Kantor Pusat. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui presentasi, diskusi tanya-jawab dan diskusi kelompok. Penanaman nilai-nilai Budaya Perusahaan juga dilakukan kepada pegawai baru dalam masa orientasi.

C. Responsibilitas

Responsibilitas atau asas pertanggungjawaban diterapkan melalui ketaatan pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial. Beberapa kebijakan dan praktek operasional PLN yang menunjukan upaya peningkatan kualitas penerapan asas ini meliputi:

1. Penerapan Manajemen Risiko
   PLN berkomitmen menerapkan Manajemen Risiko secara berkesinambungan di seluruh proses bisnis dan pengelolaan perusahaan guna mendukung tercapainya tujuan dan terhindarnya perusahaan dari dampak negatif atas risiko yang tidak tertangani dengan baik. Komitmen ini tercermin dari penetapan Kebijakan Manajemen Risiko, pembentukan Divisi Manajemen Risiko dan pelaksanaan penilaian risiko secara berjenjang hingga ke level korporasi. (Selanjutnya lihat uraian "Manajemen Risiko", halaman 302).
2. Manajemen Kinerja
   Untuk meningkatkan tanggung jawab setiap jajaran terhadap kualitas pelaksanaan tugasnya, PLN menerapkan Kebijakan Manajemen Kinerja. Melalui kebijakan tersebut, setiap insan PLN dituntut menunjukkan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan tugas tersebut dinilai untuk kemudian dijadikan dasar bagi penetapan jenjang karir dan besaran remunerasi yang akan diterima. Remunerasi berbasis kinerja ini sejalan dengan ketentuan peraturan terbaru dari Kementerian BUMN.
   Kebijakan Manajemen Kinerja juga diterapkan dalam rangka optimalisasi kinerja korporasi. Dalam kaitan ini, seluruh jajaran insan PLN, mulai dari karyawan pelaksana, manajemen hingga Direksi, diberikan target kinerja yang harus dicapai sesuai lingkup dan tanggung jawabnya. Untuk level pelaksana, pertanggungjawaban kinerja dilakukan dalam bentuk asesmen kinerja atas *Key Performance Indicator* (KPI) yang dilakukan secara berkala pada setiap periode operasional. Sementara untuk tingkat Direksi dan Komisaris, target kinerja dituangkan dalam bentuk KPI Direksi dan KPI Dewan Komisaris yang dipertanggungjawabkan dihadapan Rapat Umum Pemegang Saham.

the philosophy, vision and mission of the company shall be jointly based on the corporate culture that contains the values of Mutual Trust, Integrity, Caring, Learners.

PLN Corporate Culture was inaugurated on October 27, 2002 to coincide with the 57th National Electricity Day, a tool to create integrity in the whole "citizen PLN" while enhancing the quality of GCG implementation.

Implementation of Corporate Culture implemented through socialization to the whole company by PLN Socialization Team Headquarters. Dissemination is done through presentations, question-and-answer discussion and group discussions. The values Corporate culture is also performed to new employees during orientation.

C. Responsibility

Responsibility principle is applied through strict adherence to the principle of prudence and ensure compliance with company regulations, statutes and regulations in force, and implement social responsibility. Some policies and operational practices PLN shows efforts to improve the quality of the application of this principle include:

1. Application of Risk Management
   PLN is committed to implementing sustainable Risk Management in all business processes and management of the company in order to support the achievement of company objectives and avoiding negative impacts on the risks that are not handled properly. This commitment is reflected in the establishment of the Risk Management Policy, the establishment of the Division of Risk Management and implementation of risk assessment in stages up to the corporate level. (See also the description "Risk Management", page 302).
2. Performance Management
   To increase the responsibility of each line on the quality of its operation, PLN implement Performance Management Policy. Through this policy, every PLN employee is required to demonstrate its responsibility in carrying out the tasks and task execution is considered to be used as the basis for career path and the amount of remuneration to be received. This performance-based remuneration in line with the latest regulations of the Ministry of SOEs.

   Performance Management Policy is also applied in order to optimize corporate performance. In this regard, the whole range of PLN employee, ranging from executive, management to the Board of Directors, is given the performance targets to be achieved within the scope and responsibilities. For the executive level, performance accountability is carried out in the form of performance assessment on the Key Performance Indicator (KPI) which are conducted periodically at each operational period. Meanwhile, for Directors and Commissioners, the performance targets set forth in the form of Directors and Board of Commissioners KPI which are accountable before the General Meeting of Shareholders.

D. Independensi/Kemandirian

Prinsip kemandirian diterapkan melalui penyusunan dan penerapan *code of conduct* dan *code of ethic* termasuk pengaturan seluruh transaksi maupun rencana investasi yang mengandung atau berpotensi mengandung benturan kepentingan *(conflict of interest)*. Selain itu, PLN menerapkan kebijakan larangan adanya hubungan keluarga atau kekerabatan hingga derajat tertentu antara para Direktur dengan anggota Dewan Komisaris ataupun antara masing-masing anggota Direktur dan Dewan Komisaris.

Untuk memastikan Independensi/Kemandirian dalam setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas, PLN juga menerapkan dengan ketat kebijakan-kebijakan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang sudah berlaku maupun *Code of Ethics* yang tengah diselesaikan.

E. Kesetaraan/Kewajaran/*Fairness*

Asas kesetaraan diterapkan dengan memperlakukan seluruh *stakeholder* secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan oleh PLN. PLN juga membuka akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan sumbang-saran bagi kemajuan dan peningkatan mutu layanan perusahaan.

Kesetaraan juga diterapkan dalam proses rekrutmen, pelatihan, penilaian dan penetapan jenjang karir para karyawan. Pada keseluruhan proses pengelolaan sumber daya manusia tersebut, PLN hanya mendasarkan pada kompetensi, kemauan dan kinerja setiap karyawan, seperti dijelaskan dalam uraian Manajemen Kinerja.

Selain dalam pengelolaan sumber daya manusia, PLN juga menerapkan asas kewajaran/kesetaraan dalam pemilihan vendor barang maupun jasa. PLN menerapkan program *e-proc* dalam proses tender pengadaan barang dan jasa, serta menerapkan penilaian dan pengumuman secara terbuka atas setiap kesempatan pengadaan barang dan jasa. Proses, kualifikasi jenis barang dan jasa yang ditenderkan juga diumumkan secara terbuka dan dapat diakses oleh calon peserta tender sesuai kualifikasi masing-masing.

Kemudian PLN juga melakukan penilaian berkala terhadap kinerja para vendor tersebut, dengan kriteria penilaian yang dapat diketahui oleh seluruh vendor. Hasil penilaian akan diberikan secara tertutup kepada masing-masing vendor, untuk menghormati privasi. Dengan penerapan asas kesetaraan tersebut, PLN meyakini akan dapat menumbuh kembangkan budaya kompetisi yang sehat dan pada akhirnya mendapatkan kualitas barang dan jasa sesuai kualifikasi yang diharapkan dengan harga terbaik yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian kinerja yang semakin baik.

D. Independence

The principle of independence is applied through the development and implementation of codes of conduct and code of ethics, including setting the whole transaction or investment plan containing or potential contain conflict of interest. In addition, PLN implement a policy that prohibits the existence of a family relationship or kinship to a certain degree between the Director of the members of the Board of Commissioners or between each member of the Board of Directors and Commissioners.

To ensure the independence of / Independence in any decision-making and execution of tasks, PLN also implement strict policies as set out in the Code of Conduct (Code of Conduct) which is in force and the Code of Ethics that was resolved.

E. Equality / Fairness

The principle of equality is applied to treat all stakeholders in balance between their rights and obligations. PLN also open access to information to all stakeholders in giving suggestions for the improvement of services quality of the company.

Equality is also applied in the process of recruitment, training, assessment and career path of employees. In the whole process of human resource management, PLN only based on competence, willingness and the performance of each employee, as described in the description of Performance Management.

In addition, to the management of human resources, PLN also apply the principle of fairness / equality in the selection of a vendor of goods or services. To implement a program of e-proc in the process of procurement of goods and services, and implementation of assessment and public announcement on each occasion, the procurement of goods and services. The Process, qualifying the type of goods and services that are bid, also announced publicly and can be accessed by potential bidders.

Then PLN also conduct periodic assessment on the performance of the vendor, using the assessment criteria that are acknowledged to all vendors. The Results of the assessment will be provided confidentially to each vendor, to respect privacy. The application of the principle of equality, PLN believes will be able to cultivate a culture of healthy and fairly competition and ultimately get the quality of goods and services according to the qualifications expected, at the best price, which in turn will support the achievement of better company performance.

PITA – Pilar Budaya Anti Korupsi PT PLN (Persero)

PITA - Pillar Anti-Corruption Culture PT PLN (Persero)

Komitmen manajemen untuk menjadikan PT PLN (Persero) sebagai perusahaan yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme bukan sebatas wacana. PLN telah menggelar program PLN Bersih, No Suap sebagai tema kampanye perusahaan dalam menegakkan korporasi yang bebas dari korupsi. Untuk mewujudkannya dalam tindakan sehari-hari, PLN menunjuk beberapa unit usaha, termasuk PLN Disjaya sebagai *pilot project* PLN Bersih se-Indonesia.

Sebagai *pilot project*, unit usaha yang ditunjuk melaksanakan beberapa inisiatif, meliputi membangun komitmen, sosialisasi, implementasi dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan.

Pada tahap selanjutnya PLN mengembangkan empat pilar utama untuk menjadikan perusahaan sebagai korporasi yang benar-benar bersih, dikenal dengan PITA, yakni Partisipasi, Integritas, Transparansi dan Akuntabilitas. Keempat pilar tersebut senantiasa mengiringi setiap pergerakan PLN dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Penjabaran dari keempat pilar utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pilar Pertama: Partisipasi
   Partisipasi meliputi deklarasi komitmen integritas pegawai PLN di seluruh lapisan unit kerja dan wilayah kerja PLN, dari mulai pegawai PLN hingga seluruh jajaran *stakeholders*.

   Partisipasi ini juga aktif melibatkan pihak-pihak yang terlibat kerjasama dengan PLN melalui deklarasi *Collective Action*, yang merupakan komitmen bersama (antara PLN, Vendor dan Publik) untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Secara lebih dalam, PLN dan para mitra kerja ini perlu saling mendukung lewat sarana komunikasi, evaluasi kualitas, akuntabilitas dan integritas dalam pengadaan barang/jasa dan pelayanan pelanggan.

2. Pilar Kedua: Integritas
   Integritas dari para pegawai dalam bekerja melayani masyarakat sangat penting artinya untuk membangun budaya PLN Bersih. Integritas menjadikan pegawai PLN patuh terhadap *Code of Ethic* (CoE) dan *Code of Conduct* (CoC) yang berlaku di perusahaan.

   Implementasinya misalnya pegawai PLN dilarang berinteraksi dengan vendor yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan *(conflict of Interest)* dan timbulnya gratifikasi melalui berbagai media. Integritas ini pun berlaku pada proses pelayanan pelanggan, yakni melalui perbaikan indeks integritas layanan *public* (ILP).

   Salah satu penerapan yang sudah dilakukan, antara lain terkait kemudahan proses Pasang Baru (PB), Tambah Daya (TD), dan Layanan Gangguan (LG) sehingga berperan dalam menciptakan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat yang bebas korupsi dan suap.

3. Pilar Ketiga: Transparansi
   Keterbukaan informasi dan sikap responsif terhadap permintaan informasi publik sangat menentukan dan penting dalam pembangunan budaya PLN. Dengan mengedepankan transparansi, maka peluang korupsi, suap, pungli dan yang lainnya dapat ditekan seminimal mungkin.

   Penerapan prinsip transparansi ini sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang telah diakomodir oleh PLN melalui Keputusan Direksi Nomor 501 Tahun 2012.

   Keputusan ini mengatur tentang prosedur keterbukaan dan permintaan informasi oleh publik, baik melalui media seperti internet maupun media konvensional, seperti buku panduan, brosur, *leaflet*, dll.

4. Pilar Keempat: Akuntabilitas
   Mendorong pegawai PLN untuk selalu bersikap responsif terhadap setiap keluhan pelanggan, dan memberi kesempatan pengaduan terkait pelayanan pelanggan dan pengadaan barang/jasa.

   Contact center 123 dan *website* PLN saat ini merupakan wujud dari ketersediaan akuntabilitas. Selain itu juga mendukung implementasi *Whistleblowing System* dan Program Pengendalian Gratifikasi untuk melindungi kerahasiaan pelapor.

Management commitment to make PT PLN (Persero) as a company that is clean and free from corruption, collusion, nepotism is not limited only on discourse. PLN has launched "PLN Bersih, No Suap" as a campaign theme in enforcing corporate company that is free from corruption. To make it happen in everyday actions, PLN appoint several business units, including the PLN Disjaya as a pilot project in Indonesia.

As a pilot project, the designated business units carry out several initiatives, including building commitment, dissemination, implementation and evaluation on an ongoing basis.

At a later stage PLN developed four main pillars to make the company as a corporation that is really clean, known as PITA, namely participation, Integrity, Transparency and Accountability. The four pillars are always accompany each movement PLN in providing services to the public. Elaboration of the four main pillars are as follows:

1. *First Pillar: Participation*
   Participation includes the declaration of commitment to the integrity of PLN employees at all levels of work units and work areas, from PLN employees to the whole range of stakeholders.

   This participation is also actively involved parties cooperation with PLN through the declaration of Collective Action, which is a shared commitment (between PLN, Vendors and public) to prevent corruption in the procurement of goods and services. PLN and the partner's need to support each other through the means of communication, quality evaluation, accountability and integrity in the procurement of goods / services and customer services.

2. *Second Pillar: Integrity*
   The integrity of the employees in the work serving the community is very important to build a culture of "PLN Bersih". Integrity will make PLN's employees adhere to the Code of Ethics (CoE) and the Code of Conduct (CoC) which applies in the company.

   The implementation, for example: PLN employees are prohibited from interacting with vendors which potentially have conflict of interest and the incidence of graft through various media. Integrity is also applicable to the customer service process, namely through the improvement of public service integrity index (ILP).

   One application that has been carried out, among other processes related to the ease of new pairs (PB), is added power (TD), and the service disruption (LG) that play a role in creating services for the welfare of a society free of corruption and bribery.

3. *Third Pillar: Transparency*
   Disclosure of information and responsiveness to public information requests very decisive and important in the cultural development of the PLN. By promoting transparency, then the opportunities for corruption, bribery, extortion and others can be minimized. Application of the principle of transparency is in line with the Law on Public Information (KIP) No. 14 of 2008 which was adopted by the Board of Directors PLN through Decree No. 501 of 2012. This decision regulates the disclosure procedures and requests for information by the public, either through media such as the Internet and conventional media, such as guide books, brochures, leaflets, etc.

4. *Fourth Pillar: Accountability*
   Encouraging employees PLN to always be responsive to any customer complaints, and provide customer service opportunities related complaints and procurement of goods / services. Contact center and website PLN 123 today is a manifestation of the availability of accountability. It also supports the implementation of whistleblowing system and gratuities control program to protect the confidentiality of the complainant.

Penilaian Penerapan GCG

Dalam rangka mendapatkan umpan balik bagi perbaikan kualitas penerapan praktik terbaik GCG, PLN melakukan asesmen kualitas penerapan GCG secara berkala sejak tahun 2002. Melalui asesmen berkala tersebut, PLN mempertimbangkan dengan seksama rekomendasi yang dikemukakan untuk memperbaiki kualitas penerapan praktik terbaik GCG, kemudian melakukan asesmen lagi untuk mendapatkan umpan balik perbaikan di periode selanjutnya.

Dalam kurun waktu 2002 hingga 2014, PLN telah melakukan 9 (sembilan) kali penilaian kualitas penerapan praktik GCG. Penilaian kualitas penerapan GCG pada umumnya dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan mengacu pada ketentuan dari Kementerian BUMN mengenai praktik GCG di lingkungan BUMN.

Pada setiap periode penilaian, PLN berupaya melakukan perbaikan beberapa kebijakan, mekanisme kerja maupun pembentukan infrastruktur tata kelola baru sesuai rekomendasi penilai. PLN kemudian kembali melakukan asesmen penerapan praktek GCG pada periode dimaksud, dengan memperhatikan skor penilaian dan berupaya melakukan perbaikan sesuai rekomendasi *assessor*.

Dari 9 (sembilan) kali proses penilaian kualitas, terbentuk pola skor kualitas penerapan GCG PLN, seperti tampak pada grafik yang menampilkan 5 (lima) kali hasil penilaian kualitas penerapan GCG terakhir, sebagai berikut.

GCG Assessment Application

In order to get feedback for improvement in the quality of corporate governance best practices, PLN to assess the quality of the implementation of GCG regularly since 2002. Through these periodic assessments, PLN consider carefully the recommendations put forward to improve the quality of corporate governance best practice, then do the assessment again to get feedback on improvements in the next period.

In the period 2002 to 2014, PLN has held nine (9) assessment of the implementation of corporate governance practices. The assessment of the implementation of GCG is generally performed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPK), with reference to the provisions of the Ministry of SOEs on corporate governance practices in the SOEs.

At each assessment period, PLN attempted to improve some of the policies, the mechanism of action and the establishment of new governance infrastructure as recommended by the assessor. PLN then re-assess the application of Good Corporate Governance practices in the period in question, considering the assessment scores and trying to make improvements as recommended by the assessors.

From 9 (nine) times process of quality assessment, it formed a pattern of PLN's GCG implementation quality score, as shown in the graph that displays five (5) times results of the final GCG implementation quality assessment, as follows.

Skor Penilaian Kualitas Penerapan GCG, 2010-2014
Quality Assessment Score Graph GCG, 2010-2014

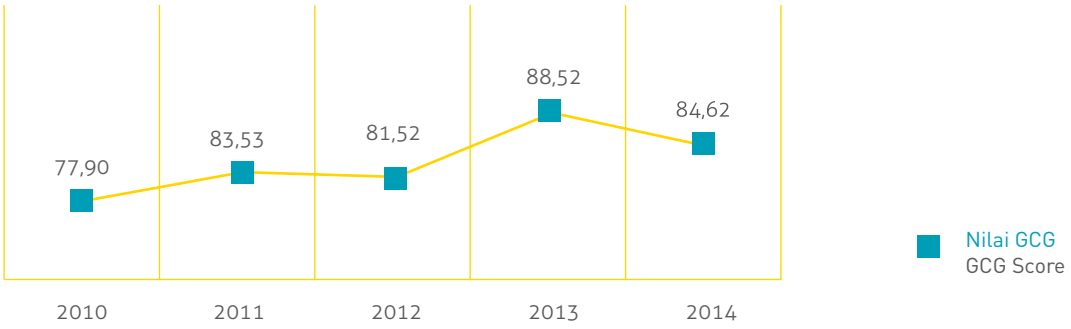

* Mulai tahun 2012 penilaian menggunakan parameter sesuai Surat Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan untuk tahun 2011 dan sebelumnya menggunakan Surat Edaran Kementerian Negara BUMN Nomor. S-168/MBU/2008 tentang Penerapan Praktik GCG di BUMN.

* Starting in 2012 assessment using appropriate parameters Letter Secretary to the Minister of SOEs No.SK-16 / S.MBU / 2012 on the indicators / parameters Assessment and Evaluation of the Implementation of Corporate Governance (Good Corporate Governance) on State-Owned Enterprises. As for the year 2011 and previous use Circular Letter No. Ministry of State Enterprises. S-168 / MBU / 2008 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in SOEs.

Pada tahun 2012 PLN melakukan penilaian kualitas penerapan GCG untuk periode tahun 2011, yang dilakukan oleh Trisakti *Governance Center* selaku konsultan independen. Penilaian dilaksanakan dengan mengacu kepada Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG dari Kementerian BUMN yang didasarkan pada dokumen, kuesioner dan hasil wawancara.

Pada tahun 2013 PLN kembali melakukan penilaian penerapan praktik GCG untuk periode tahun 2012 berdasarkan metode yang mengacu kepada Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG dari Kementerian BUMN yang terbaru, yang dilaksanakan oleh BPKP dengan mendapatkan skor hasil penilaian sebesar 81,52.

Pada 2014, PLN melakukan *self assessment* atas kualitas penerapan GCG untuk periode tahun 2013, yang pelaksanaannya didampingi oleh BPKP.

Self Assessment penerapan GCG di PT PLN (Persero) dilaksanakan sesuai kriteria yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara.

Adapun tujuan pelaksanaan *self assessment* penerapan GCG adalah untuk:

1. Menilai kecukupan infrastruktur dan praktik Tata Kelola Perusahaan dalam memenuhi kriteria Tata Kelola Perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN pada tahun 2013;
2. Tindak lanjut terhadap rekomendasi *assessment* yang telah dilakukan pada tahun 2012;
3. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan *(area of improvement);*
4. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT PLN (Persero) dan merumuskan langkah perbaikan dan penyempurnaan yang masih diperlukan.

Pelaksanaan *self assessment* penerapan GCG ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di PT PLN (Persero), sehingga hasil *self assessment* juga merupakan penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG di PT PLN (Persero).

Terdapat 6 (enam) aspek dalam pengujian penerapan GCG di PT PLN (Persero), yang meliputi Aspek: (i) Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan; (ii) Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal,

In 2012, PLN had Trisakti Governance Center, an independent consultant, evaluate 2011 GCG implementation quality. The evaluation referred to GCG Assessment Terms of Reference published by SOE Ministry which was based on documents, questionnaires, and interviews.

In 2013, PLN had Development Finance Controller (BPKP) evaluate 2012 GCG practice implementation which was based on methods in the newest GCG Assessment Terms of Reference published by SOE Ministry and gained a score of 81.52.

In 2014, PLN, assisted by BPKP, held self assessment on 2013 GCG implementation quality.

Self assessment of PT PLN's (Persero) GCG implementation was based on criteria developed by SOE Ministry in accordance with:

1. SOE Minister Regulation No. Per-01/MBU/2011 dated 01 August 2011 regarding Good Corporate Governance Implementation in State-owned Enterprise (SOE).
2. SOE Minister Secretary Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 regarding Indicators/Evaluation Parameters and Evaluation of Good Corporate Governance in State-owned Enterprise.

The objectives of self assessment of GCG implementation are to:

1. Evaluate infrastructure sufficiency and governance practice in fulfilling Good Corporate Governance criteria which are established by SOE Ministry in 2013;
2. Follow up 2012 assessment recommendations;
3. Identify area of improvement;
4. Monitor GCG implementation consistency in PT PLN (Persero) and formulate improvement and refinement steps, if required.

The execution of self assessment on GCG implementation is one part of sustainable GCG implementation in PT PLN (Persero), therefore, the result of self assessment is an evaluation of GCG advance in PT PLN (Persero).

There are 6 aspects in GCG evaluation in PT PLN (Persero), namely: (i) Commitment to Continuous Good Corporate Governance Application; (ii) Shareholders and GMS/Owners of Capital (iii) Board of Commissioners, (iv) Board of Directors, (v)

(iii) Dewan Komisaris, (iv) Direksi, (v) Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan (vi) Aspek Lainnya. Sementara jumlah indikator pengujian penerapan GCG adalah sebanyak 43 indikator dengan 153 parameter/sub indikator pengujian.

Information Disclosure and Transparency, and (vi) Other Aspects. Meanwhile, there are 43 GCG evaluation indicators with 153 parameters/sub indicators.

Hasil *self assessment* terhadap penerapan GCG di PT PLN (Persero) tahun 2013 mencapai total skor sebesar 88,52. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT PLN (Persero) pada tahun 2013 mencapai kualifikasi 'Sangat Baik'.

In 2013, PLN gained a score of 88.52 on GCG self assessment. It shows that GCG implementation in PT PLN (Persero) in 2013 achieved a 'Very Good' qualification.

Pada tahun 2015 PLN kembali melakukan *assessment* atas kualitas penerapan GCG untuk periode tahun 2014 yang dilakukan oleh BPKP.

In 2015 PLN held assessment on 2014 GCG implementation conducted by BPKP.

Hasil *assessment* penerapan GCG di PT PLN (Persero) Tahun 2014 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

The result of GCG implementation assessment in PT PLN (Persero) in 2014 can be highlighted as follows:

Nama Kriteria	Bobot Portion	Capaian Tahun 2014 Achievement in 2014		Criteria
		Skor Score	Capaian Achievement	
Komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik secara berkelanjutan	7	5,45	78%	Commitment to Continuous Good Corporate Governance Application
Pemegang saham dan RUPS/Pemilik modal	9	7,49	83%	Shareholder and General Meeting of Shareholders (GMS)
Dewan Komisaris	35	31,67	90%	Board of Commissioner
Direksi	35	31,33	90%	Board of Directors
Pengungkapan informasi dan transparansi	9	8,68	97%	Information disclosure and Transparency
Aspek lainnya	5	0	0%	Other aspects
Skor keseluruhan	100	84,62		Total score
Kualifikasi kualitas penerapan GCG		Baik Good		GCG assessment

Prosentase capaian skor tertinggi terdapat pada aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi yaitu 8,68 dari nilai maksimum 9 atau 97%, dan capaian terendah terdapat pada aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan yaitu 5,45 dari nilai maksimum 7 atau 78%.

The highest percentage of achieved score was 8.68 out of a maximum score of 9 or equivalent to 97% on Information Disclosure and Transparency aspect. Meanwhile, the lowest achieved score was 5.45 out of a maximum score of 7 or equivalent to 78% on Commitment to Continuous Good Corporate Governance Application.

Peningkatan Kualitas Penerapan Praktik Terbaik GCG

Selama tahun 2014, PLN merealisasikan berbagai program penyempurnaan tata laksana serta sosialisasi kebijakan internal baru maupun restrukturisasi perangkat Dewan Komisaris. Seluruh program tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada perkembangan *best practises* GCG terkini dan aturan terakhir menyangkut pelaksanaan GCG di BUMN.

Quality Improvement of GCG Best Practices

During 2014, PLN had conducted various governance improvement programs, socialized new internal policies, as well as restructured Board of Commissioners composition. All of those programs were held based on current GCG best practises development and the latest rule regarding GCG implementation in SOE companies.

Program yang dilakukan di tahun 2014, mencakup:

1. Pemutakhiran Buku Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris *(Board Manual)*:
   - Perseroan telah mengkaji butir-butir isi *Board Manual* yang dikeluarkan pada tahun 2010.
   - Sesuai hasil kajian tersebut, Perseroan berpendapat sudah waktunya beberapa ketentuan yang mengatur hubungan dan tatalaksana kerja antara Dewan Komisaris disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kondisi terkini yang dihadapi PLN.
   - Perseroan telah membentuk gugus tugas untuk menyusun dan memutakhirkan butir-butir ketentuan dalam *Board Manual* sebelumnya dan mengaplikasikan pada pedoman *Board Manual* pengganti.
   - Draft Buku Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris *(Board Manual)* Perseroan tersebut telah selesai disusun pada Q-4 2014 dan telah dimintakan pendapat dari para pihak.
   - Sesuai saran perbaikan dan pendapat para pihak *draft Board Manual* 2014 dimaksud telah diperbaiki dan memasuki tahap persetujuan final dari para pihak.
   - Board Manual 2014 terdiri atas 5 Bab ditambah Lampiran-lampiran.

Programs that were held in 2014 consist of :

1. Updating Board of Directors' and Board of Commissioners' Manual (Board Manual):
   - Company had assessed points of Board Manual content published in 2010.
   - Based on the assessment, Company believed that it was time to adjust several provisions which regulated work relationship and governance among Board of Commissioners with applicable laws and regulations as well as the latest condition faced by PLN.
   - Company formed a task force to compile and update points of provisions in the previous Board Manual and apply them in replaced Board Manual.
   - The Board Manual draft was finished in Q-4 2014 and opinions had been requested from various parties.
   - Based on improvement recommendation and opinions from various parties, 2014 Board Manual draft was then edited and entered the final phase of agreement from various parties.
   - 2014 Board Manual consists of 5 Chapters, added with Appendices.

Untuk memastikan peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan terbaik PLN merealisasikan beragam program penyempurnaan tata laksana serta sosialisasi kebijakan internal baru sesuai dengan rekomendasi para asesor penilai penerapan praktek GCG Perseroan

In order to ensure the quality improvement of Good Corporate Governance, PLN holds various governance improvement program as well as socialization of new internal policies which are based on recommendations given from assessor of Company's GCG implementation evaluation.

2. Pemutakhiran Pedoman *Good Corporate Governance* PT PLN (Persero).
   - Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* / GCG), PLN juga merealisasikan program pemutakhiran "Pedoman *Good Corporate Governance*" agar lebih sesuai dengan perkembangan implementasi tata kelola terkini.
   - Draft Pedoman dimaksud telah selesai disusun pada Q-4 2014 dan telah diedarkan untuk memperoleh pendapat akhir dari para pihak.
   - Buku "Pedoman *Good Corporate Governance*" terdiri atas 3 Bab yang kemudian dirinci kedalam 12 Bagian, yang masing-masing menjelaskan beberapa hal pokok mengenai fungsi dan kedudukan organ utama dan organ pendukung perusahaan.

2. Updating PT PLN's (Persero) Good Corporate Governance Guidelines.
   - In order to improve Good Corporate Governance quality, PLN updated "Good Corporate Governance Guidelines" to adjust it with current governance development.
   - The Guidelines draft was finished in Q-4 2014 and distributed to all parties for final feedbacks.
   - Good Corporate Governance Guidelines consists of 3 Chapters which are then specified to 12 Parts with each part explaining several basic guidelines about functions and positions of both main and supporting company organs.

3. Sosialisasi *Code of Ethics* (CoE).
   Sehubungan dengan tekad PLN untuk menjadi Perusahaan yang Bersih dari tindakan korupsi, *fraud*, nepotisme dan pelanggaran sejenis lainnya, Perseroan mulai melakukan sosialisasi butir-butir ketentuan yang terkandung dalam Pedoman Etika (CoE), yang menjelaskan beberapa hal pokok mengenai aturan yang berkaitan dengan etika, mencakup diantaranya:
   - Kebijakan tentang Etika Hubungan dengan Atasan.
   - Kebijakan tentang Etika Hubungan dengan Sesama.
   - Kebijakan tentang Etika transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.
   - Kebijakan tentang Etika Penyelesaian Transaksi Keuangan.
   - Kebijakan tentang Etika Bisnis.
   - Kebijakan tentang Etika Pengadaan Barang dan Jasa.
   - Sanksi atas pelanggaran etika.
   - Distribusi lembar kepatuhan terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Pergaulan yang harus ditandatangani oleh setiap Pegawai.

3. Socialization of Code of Ethics (CoE).
   In association with PLN's determination to become Clean Company which is free from corruption, fraud, nepotism, and other similar violations, Company began holding socialization of points of provision in Code of Ethics Guidelines that explain several basic guidelines related to ethics, consisting of:
   - Policy regarding Relationship Ethics with Superior.
   - Policy regarding Relationship Ethics with Counterparts.
   - Policy regarding Transaction Ethics involving Conflict of Interest.
   - Policy regarding Financial Transaction Completion Ethics.
   - Policy regarding Business Ethics.
   - Policy regarding Goods and Service Procurement Ethics.
   - Sanctions due to ethics violation.
   - Distribution of Compliance with Business and Association Ethics Guidelines sheet which should be signed by every employee.

Membakukan dan Membukukan "PLN Bersih"
Standardizing and Documenting "PLN Bersih"

Agar tercipta PLN tangguh, unggul, dan bermartabat, baru-baru ini Direksi PLN mengeluarkan pedoman "PLN Bersih" melalui Peraturan Direksi No. 0060.K/DIR/2014. Direktur Utama PLN Nur Pamudji berupaya mewujudkan komitmen PLN terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap proses bisnisnya dan tidak terlepas dari peran internal, eksternal maupun seluruh pemangku kepentingan PLN.

Pedoman ditujukan mewujudkan PLN tangguh yang profesional dan tahan goncangan, serta unggul dengan mengutamakan sistem, mutu, dan inovasi, juga bermartabat yang bersih dari segala bentuk penyimpangan dan kecurangan, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tujuan pedoman ini mengupayakan internalisasi "PLN Bersih" yang terus menerus agar semangat "PLN Bersih" menjadi budaya perusahaan, sehingga membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap PLN. Selain itu, mengoptimalkan nilai-nilai pedoman perilaku agar PLN mempunyai daya saing kuat secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya secara berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan PLN.

Pedoman "PLN Bersih" ini diharapkan bisa mendorong Direksi, pegawai, pejabat, maupun pemangku kepentingan PLN lain agar melaksanakan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, peraturan perusahaan dan Anggaran Dasar PLN agar tercipta "PLN Bersih" dan bebas KKN.

In order to establish tough, superior, and dignified PLN, PLN's Board of Directors recently published "PLN Bersih" guidelines through Board of Directors Regulation No. 0060.K/DIR/2014. PLN's President Director, Nur Pamudji, attempts to realize PLN's commitment in Good Corporate Governance (GCG) implementation in every business process which cannot be separated from internal and external roles as well as all PLN's stakeholders.

The guidelines aim to make PLN tough, professional, and resistant to any problems, superior in prioritizing system, quality, and innovation, as well as dignified and clean from all forms of violation and fraud, including corruption, collusion, and nepotism (CCN).

These guidelines are used to seek continuous "PLN Bersih" internalization to create "PLN Bersih" spirit as one company culture, therefore, public trust on PLN can be increased. Furthermore, these guidelines also aim to optimize code of conduct in order to create strong competitiveness in both national and international scopes so that PLN's existence can be sustained while achieving its purposes and objectives.

"PLN Bersih" Guidelines are expected to be able to support board of directors, employees, officials, as well as other stakeholders to perform actions based on high morality and compliance with laws, company regulations, and PLN's articles of association, thus, Clean and CCN-free PLN can be established.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sebagai instansi tertinggi dalam Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggung-jawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perseroan, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Anggota Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara Direktur dan lain-lain.

RUPS merupakan forum bagi Pemegang Saham untuk memberikan suara dan menetapkan sikap dalam proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan rencana strategis Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar (AD) Perseroan RUPS terdiri atas:

1. RUPS Tahunan yang diselenggarakan tiap tahun. RUPS Tahunan bersifat rutin, RUPS Tahunan terdiri dari:
   - RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan.
   - RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
2. RUPS Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

RUPS diselenggarakan dengan wewenang utama dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan, di antaranya:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Meningkatkan permodalan Perseroan, memecah maupun mengurangi jumlah saham dan membeli kembali saham.
3. Menggabungkan, melebur, mengambil alih maupun memisahkan unit usaha Perseroan dengan perusahaan lain atau menjadi unit usaha yang lain.
4. Menjaminkan sebagian besar aktiva perusahaan.
5. Mengesahkan transaksi material atau perubahan kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan, serta benturan kepentingan

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

1. RUPS tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014, dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2014.
2. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014.
3. RUPS Luar Biasa tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2014.
4. RUPS Luar Biasa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2014.
5. RUPS Luar Biasa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2014.

General Meeting of Shareholders (GMS)

As the highest level in Company, General Meeting of Shareholders (GMS) possesses authorities which are not given to either Board of Commissioners or Directors with its limitation set in Articles of Association and applicable laws and regulations. These authorities include requesting Board of Commissioners' and Directors' accountability related to Company management; changing Articles of Association; appointing and dismissing members of Board of Directors and Commissioners; deciding task division and management authorities between Directors and others.

GMS is a forum for Shareholders to vote and conclude a stance in important decision making process associated with Company's strategic plan.

According to provisions in Company's Articles of Association, GMS consists of:

1. Annual GMS which is held every year, no more than 6 months after Company's financial year has ended.
   - Annual General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report and Approval of the Financial Statements.
   - Annual General Meeting of Shareholders regarding the Work Plan and Budget (CBP)
2. Extraordinary GMS is General Meeting of Shareholders which is held whenever necessary.

GMS is held and has main authority and responsibility to make decisions, such as:

1. Appointing and dismissing members of Board of Commissioners and Directors.
2. Increasing Company's capital, breaking down or reducing the amount of share, as well as repurchasing share.
3. Acquiring, merging, taking over, or separating Company's business units from other companies or to another business unit.
4. Using a large part of Company's assets as collateral
5. Ratifying material transaction or changes in Company's main business activity, and resolving conflict of interest.

In 2014, GMS was conducted five (five) times, namely:

1. GMS about Ratification of 2014 Company Work Plan and Budget, held on 17 January 2014.
2. GMS regarding Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements in Financial Year of 2013, held on 17 April 2014.
3. Extraordinary GMS about dismissal and appointment of members of Board of Commissioners, ratified on 16 October 2014.
4. Extraordinary General Meeting of Shareholder regarding the Dismissal and Assignment of Members of the Board of Directors determined on December 23, 2014.
5. Extraordinary General Meeting of Shareholder regarding the Dismissal and Assignment of Members of the Commissioner determined on December 23, 2014.

Keputusan dan Realisasi Keputusan RUPS

Penyelenggaraan RUPS di tahun 2013 dan lima kali RUPS di tahun 2014 tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang telah ditindaklanjuti, dengan Rekapitulasi sebagai berikut.

GMS Decision and Decision Realization

Holding GMS in 2013 and five times in 2014 resulted in several decisions which have been followed up, as follows.

Keputusan RUPS Tahun 2013 dan Tindak Lanjut / GMS Decisions in 2013 and Follow-up Actions

	Ringkasan Keputusan RUPS GMS Decision Summary	Realisasi Rups GMS Realization
I	RUPS Tanggal 7 Mei 2013 Tentang Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012 GMS on 7 May 2013 about the Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements of Financial Year 2012	
1	Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2012 dan Pengesahan terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku 2012 Approval of Annual Report 2012 and Ratification of Financial Statements of Financial Year 2012	n.a
2	Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2012 Ratification of Annual Report of 2012 Partnership and Community Development	n.a
3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2012 Determination of 2012 Net Profit Utilization	
	1. Deviden sebesar 45% dan cadangan sebesar 55%. 45% dividend and 55% reserves. 2. Tidak ada alokasi laba bersih untuk PKBL, PLN membentuk cadangan kegiatan tanggung jawab sosial sesuai kemampuan. There was no net profit allocated for Partnership and Community Development (PKBL), PLN made expense reserves for corporate social responsibility activities based on ability.	Deviden sudah dibayarkan Dividend has already been paid Tidak ada anggaran PK baru, cadangan dana BL dan CSR, masing-masing ditetapkan sebesar Rp10,03 miliar dan Rp60 miliar. There were no new partnership program budget, community development and CSR fund reserves, Rp10,3 billion and Rp60 billion were set respectively.
4	Penetapan Gaji Direksi dan Honorarium Komisaris Determination of Board of Directors' Salaries and Board of Commissioners' Honorarium	
	1. Gaji Direktur Utama Rp160.000.000,- perbulan, dengan catatan: • Direktur : 90% Gaji Direktur Utama • Komisaris Utama: 40% Gaji Direktur Utama • Komisaris: 36% Gaji Direktur Utama. Rp 160,000,000.- per month of President Director's salary, with a note: • Directors : 90% of President Director's salary • President Commissioner: 40% of President Director's salary • Commissioners : 36% of President Director's salary 2. Tantiem kinerja Perseroan Tahun Buku 2012 sebesar Rp23.874.000.000 dengan pembagian proposional sebesar 100%, 90%, 40%, 36% untuk Direktur Utama, Anggota Direksi, Komisaris Utama, Anggota Dewan Komisaris sesuai masa kerja. Company's performance tantiem/bonus of Financial Year 2012 summed up to Rp 23,874,000,000 with proportional distribution of 100%, 90%, 40%, 36% for President Director, Members of Directors, President Commissioner, Members of Board of Commissioners respectively based on tenure. 3. Tunjangan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2013 tetap mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-07/MBU120L0 tanggal 27 Desember 2010. Allowances and facilities of Company's Board of Directors and Commissioners in 2013 refer to SOE State Minister Regulation No: PER-07/MBU120L0 dated 27 December 2010.	Besaran gaji dan honorarium telah disesuaikan sesuai Kep Dir no.1271.K/DIR/2011 sebagaimana telah diubah dengan Kep Dir No 0502-1.K/Dir/2013. The amount of salaries and honorariums have been adjusted in accordance with Decree of Director no.1271.K KEP / DIR / 2011, as amended by Decree of Director No. 0502-1.K Dir / Dir / 2013. Tantiem dimaksud telah dibagikan pada tanggal 4 Juni 2013 The tantiem/bonus was distributed on June 4, 2013. Tunjangan ditetapkan sesuai aturan dimaksud dengan Kep Dir no1271.K/DIR/2011 sebagaimana telah diubah dengan Kep Dir No 0502-1.K/Dir/2013. Allowances are set according to the rules defined by Decree of Director no1271.K / DIR / 2011, as amended by Decree of Director No. 0502-1.K Dir / Dir / 2013.

	Ringkasan Keputusan RUPS GMS Decision Summary	Realisasi Rups GMS Realization
I	RUPS Tanggal 7 Mei 2013 Tentang Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012 GMS on 7 May 2013 about the Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements of Financial Year 2012	
5	Penetapan Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm Appointment	
	1. Pelimpahan wewenang seleksi KAP untuk melakukan general audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013, Laporan Evaluasi Kinerja Perseroan Tahun Buku 2013, Laporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern Tahun Buku 2013, Laporan PKBL dan KPI PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun Buku 2013. kepada Dewan Komisaris. The granting of authorities in selecting PAF to Board of Commissioners to conduct general audit on Company's Financial Statements of Financial Year 2013, 2013 Company's Performance Evaluation Report, 2013 Report of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control, PKBL Report, and KPI of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). 2. Meminta usulan Dewan Komisaris mengenai KAP yang akan dipilih dalam 2 bulan sejak tanggal pelaksanaan RUPS. Requested Board of Commissioners' recommendation regarding Public Accounting Firm which would be selected in 2 months after GMS.	Dewan Komisaris menetapkan KAP Osman Bing Satrio dan Eny pada tanggal 12 Juni 2013 Board of Commissioners assigned Public Accounting Firm (KAP) Osman Bing Satrio & Eny on June 12, 2013

Keputusan RUPS Tahun 2014 dan Tindak Lanjut — Table of GMS Decisions in 2014 and Follow-up Actions

I	RUPS tanggal 17 Januari 2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014 GMS on 17 January 2014 regarding Ratification of 2014 Company Work Plan and Budget (RKAP)	
1	Pengesahan RKAP Tahun Buku 2014. Ratification of 2014 RKAP	n.a
2	Pengesahan RKAP Program PKBL tahun 2014 sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN nomor: PER-05/MBU12007 tanggal 27 April 2007 tentang PKBL. Ratification of 2014 RKAP of PKBL based on SOE State Minister Regulation no: PER-05/MBU12007 dated 27 April 2007 regarding PKBL.	n.a
3	Persetujuan indikator aspek Operasional PLN sesuai Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-100/MBU|2002 tanggal4 Juni 2002. Approval of PLN's operational aspects according to SOE State Minister Decree No: KEP-100/MBU|2002 dated 4 June 2002.	n.a
4	Persetujuan dan Pengesahan KPI Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sesuai Surat Wakil Menteri BUMN Nomor: S-17/Wk.MBU/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang *Shareholder aspiration.* Approval and Ratification of KPI of Management Contract between Board of Directors and Commissioners and Shareholders of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) based on SOE Deputy Minister Letter No: S-17/Wk.MBU/2013 dated 30 October 2013 regarding Shareholder aspiration.	Ketentuan KPI dimaksud digunakan sebagai acuan kinerja pengurus di tahun 2014. The KPI was used as management performance reference in 2014.
5	Persetujuan penghapus bukuan aktiva tetap tidak beroperasi sebesar Rp1.689.408.236.785,00, berupa mesin pembangkit, trafo, jaringan distribusi, jaringan transmisi, bangunan dan kelengkapan halaman, kendaraan bermotor, perlengkapan umum dan lainnya yang fisiknya rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi. Approval of Rp 1,689,408,236,785.00 non-operational fixed assets account removal, consisting of damaged and unusable power plants, transformers, distribution networks, transmission networks, buildings and yard equipments, vehicles, general and other equipments.	Telah ditindaklanjuti, dimana aset dimaksud telah dicatat pada neraca off balanced sheet. Hasil koleksi dan penjualan aset dimaksud akan dicatat sebagai akun "pendapatan lain-lain tidak terduga". Has been followed up in which the referred assets were recorded in off balance sheet. The result of the assets collection and sales was recorded as "unexpected other income" account.

II	RUPS Tanggal 17 April 2014 tentang "Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013". GMS on 17 April 2014 regarding "Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements of Financial Year 2013"	
1	a. Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2013 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2013; serta Approval of Annual Report of Company's conditions and operations during 2013 and Annual Report of 2013 Partnership and Community Development Programs. b. Persetujuan atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2013. Approval of Execution of Board of Commissioners' Supervision Duty in Financial Year 2013.	n.a
2	a. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Ratification of Company's Financial Statements of Financial Year which ended on 31 December 2013. b. Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Ratification of Annual Report of Partnership and Community Development Program of Financial Year which ended on 31 December 2013. c. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Giving accomplishment and release of responsibility (volledig acquit et decharge) to Board of Directors and Commissioners for performed management and supervision during the financial year which ended on 31 December 2013.	n.a
3	Menetapkan Tantiem dan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris: Determine the amount of Tantiem and Remuneration for Board of Directors and Commissioners. a. Menetapkan Gaji Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2014 sebesar Rp175.000.000 per bulan, gaji Direktur dan Honorarium Dewan Komisaris sesuai tersebut dalam lampiran. Set Rp 175,000,000.- per month as 2014 salary of President Director of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), meanwhile, the salaries of Directors as well as honorarium of Board of Commissioners are shown in appendices. b. Menetapkan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut dalam lampiran Set the amount of Board of Directors' and Board of Commissioners' income as mentioned in appendices. c. Rincian penghasilan Direksi dan Komisaris lainnya sesuai Peraturan Menteri BUMN terkait. Other details of Board of Directors' and Commissioners' income are based on related SOE Minister Regulation. d. Tidak memberikan tantiem/insentif kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja tahun 2013 Tantiem/performance incentive for 2013 performance was not distributed to Board of Directors and Commissioners.	Besaran gaji dan honorarium ditetapkan dalam KEP.DIR No. 0309.K/DIR/2014, tanggal 20 Juni 2014 The amount of salaries and honorarium are set in Decree of DIrector No. 0309.K / DIR / 2014, dated June 20, 2014
4	Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan seleksi dan memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014, Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2014, Laporan Evaluasi Kinerja Perseroan tahun buku 2014, dan Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern Perseroan tahun buku 2014. The granting of authorities to Board of Commissioners to conduct selection and select Public Accounting Firm (PAF) which would audit Company's Financial Statement of Financial Year 2014, Financial Report of 2014 Partnership and Community Development Program, 2014 Company's Performance Evaluation Report, and 2014 Report of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control.	Dewan Komisaris menetapkan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan *(Price Waterhouse Coopers Indonesia)* pada tanggal 12 Juni 2013 Board of Commissioners assigned Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers Indonesia) on June 12, 2013
5	Persetujuan dan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan PLN Tahun 2013-2017 Approval and ratification of the Company's Long Term Plan Year 2013-2017 PLN.	RUPS menetapkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep. 102/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang RJPP 2013-2017 The Annual General Meeting of Shareholder ratified the Ministry of SOE Decree No. Kep. 102/MBU/2002 dated 4 June 2002 regarding Company Long Term Planning and Budgeting 2013-2017

	RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS	
III	RUPSLB Tanggal tanggal 16 Oktober 2014 tentang "Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris periode Tahun 2014 - 2019". General Meeting of Extraordinary Shareholders dated October 16, 2014 on "Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners whir period of 2014 - 2019".	Pergantian beberapa anggota Dewan Komisaris. Replacing some Members of the Board of Commissioners.
IV	RUPSLB tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2014. General Meeting of Extraordinary Shareholders on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated on December 23 2014.	Perubahan Komposisi Direksi PLN. Changes in PLN's Boar of Directors composition.
V	RUPSLB tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2014. General Meeting of Extraordinary Shareholders on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners dated December 23, 2014.	Pergantian Komisaris Utama PLN dan anggota Komisaris. Replacing President Director of PLN and Board of Commissioners.

Dewan Komisaris

Prosedur Penetapan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Apabila diangkat lebih dari satu orang, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Susunan, persyaratan, nominasi, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan lima tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham yang sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk satu kali masa jabatan.

Board of Commissioners

Board of Commissioners Appointment Procedure

Board of Commissioners are appointed and dismissed by GMS. Boards of Commissioners consist of one or more members. If it consists of more than one person, one of them will be appointed as President Commissioner. Composition, requirements, nominations, and appointment of members of Board of Commissioners are set by GMS in accordance with applicable laws and regulations.

Five years of members of Board of Commissioners' tenure is set without reducing the right of General Meeting of Shareholders to dismiss member of Board of Commissioners anytime. After tenure has ended, members of Board of Commissioners are able to be reappointed for one more tenure by General Meeting of Shareholders.

Kebijakan Persyaratan Komposisi Komisaris dan Direksi

Dalam menetapkan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan memiliki kebijakan untuk mempertimbangkan latar belakang pengalaman dan kompetensi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Sebagai contoh, mengingat kegiatan operasional PLN baik dalam pembangunan maupun pemeliharaan yang berada di lapangan dan berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat, maka dalam komposisi Dewan Komisaris, PLN senantiasa menempatkan anggota Dewan Komisaris dengan latar belakang kompetensi dibidang kepolisian.

Demikian juga dengan komposisi anggota Direksi, Perseroan senantiasa mempertimbangkan latar belakang kompetensi akademik maupun pengalaman profesional dari masing-masing calon anggota Direksi, sebelum kemudian menetapkan yang bersangkutan untuk menjadi Direktur di PLN.

Kebijakan menyangkut persyaratan komposisi anggota Direksi tersebut, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No Per-16/MBU/2012 tentang Perubahan Kedua atas PerMen BUMN No Per-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Policy Requirements The composition of Commissioners and Board of Directors

In setting the personnel composition of the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company has a policy to consider the experience background and competence of each member of the Board of Commissioners and Board of Directors. For example, given the PLN operations both in the construction and maintenance of which are in the field and interact with various community groups, then the composition of the Commissioner, PLN always put the Commissioner with a competence background of the police.

Same with personnel composition of the Board of Directors, the Company continues to consider the academic competence background and professional experience from each candidate member of the Board of Directors, then assign become a director in PLN.

Policy regarding the composition requirement member of Board of Directors, referring to the provisions of SOE Minister Regulation No. Per-16 / MBU / 2012 on the Second Amendment on SOE Minister Regulation No. Per-01 / MBU / 2012 on Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Directors Member of State Owned Enterprises.

Anggota Dewan Komisaris Independen PLN telah memenuhi seluruh kriteria dalam Keputusan Menteri BUMN, meliputi: tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya dan mampu bertindak secara independen dalam menjalankan tugas.

PLN's members of Independent Board of Commissioners have fulfilled all criteria in SOE Minister Decree, which include: no financial relationship, management relationship, share ownership, and/or family relationship with other members of Board of Commissioners, other members of Board of Directors; and ability to act independently in performing duties.

Independensi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Independen adalah 2 orang, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara bahwa komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya oleh RUPS.

Anggota Dewan Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri BUMN di atas, bahwa tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Selain hal tersebut, anggota Dewan Komisaris telah membuat pernyataan terkait dengan tidak ada benturan kepentingan *(conflict of interest)* dan tidak mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

Board of Commissioners' Independence

There are 2 members of Independent Board of Commissioners which is based on State-owned Enterprise State Minister Regulation No: PER-01/MBU/2011 regarding GCG implementation in State-owned Enterprise, stating that at least 20% of Board of Commissioners' composition is members of Independent Board of Commissioners which are appointed in appointment decision made by GMS.

Company's members of Independent Board of Commissioners have fulfilled criteria established in SOE Minister Decree, which are no financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationship with other members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, and/or controlling Shareholder or related SOE that can affect the ability to act independently.

In addition, members of Board of Commissioners have made statements not to have conflict of interest and take individual benefit from decision making and/or activities execution, apart from official income, in related SOE.

Informasi Mengenai Komisaris Independen

PLN memiliki 2 orang Komisaris Independen. Adapun independensi anggota Komisaris Independen yang menjabat sejak tahun 2013 tercermin dalam tabel dengan aspek-aspek utama sebagai berikut:

Information Regarding Independent Commissioner

PLN owns 2 Independent Commissioners. The following table shows independence of Independent Commissioners who have served since 2013 in several main aspects.

Aspek Independensi	Adang Firman	Syahrial Loetan	Independence Aspect
Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya	√	√	Has no financial ties, management position, share ownership and/or family relationships with other Board of Commissioners member.
Tidak memiliki hubungan dengan Direksi	√	√	Has no relationships with Board of Directors
Tidak memiliki hubungan dengan BUMN lain yang bersangkutan dengan PLN	√	√	Has no relationships with other State-Owned Enterprises related to PLN
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat pemerintahan	√	√	Does not hold position in political party management or governmental official
Tidak menjabat kepengurusan di anak usaha PLN	√	√	Does not hold management position at PLN subsidiary

Komposisi dan Masa Tugas Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris PLN sejak 2 Juli 2013 sesuai sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-302/MBU/2013 sampai dengan 16 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

Yogo Pratomo : Komisaris Utama
Adang Firman : Komisaris Independen
Syahrial Loetan : Komisaris Independen
Wimpy S. Tjetjep : Komisaris
Jarman : Komisaris
Andin Hadiyanto : Komisaris
Harry Susetyo Nugroho : Komisaris
Ahmad Yani Basuki : Komisaris
Zulkifli Zaini : Komisaris

Sedangkan Susunan anggota Dewan Komisaris PLN sejak 16 Oktober 2014 s/d 23 Desember 2014 sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-211/MBU/2014 tanggal 16 Oktober 2014 adalah sebagai berikut.

Yogo Pratomo : Komisaris Utama
Oegroseno : Komisaris Independen
Darmono : Komisaris Independen
S. Milton Pakpahan : Komisaris
Jarman : Komisaris
Andin Hadiyanto : Komisaris
Harry Susetyo Nugroho : Komisaris
Ahmad Yani Basuki : Komisaris
Zulkifli Zaini : Komisaris

Kemudian sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-273/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014, susunan Dewan Komisaris Perseroan kembali berubah, sebagai berikut:

Chandra M. Hamzah : Komisaris Utama
Oegroseno : Komisaris Independen
Darmono : Komisaris Independen
Harry Susetyo Nugroho : Komisaris
Zulkifli Zaini : Komisaris
Andin Hadiyanto : Komisaris
Budiman : Komisaris
Hasan Bisri : Komisaris
S. Milton Pakpahan : Komisaris

Sehingga ringkasan perubahan komposisi Dewan Komisaris, tanggal pengangkatan dan masa jabatan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut.

Board of Commissioners' Composition and Service Period

The composition of members of PLN's Board of Commissioners which is based on SOE Minister Decree as GMS No. SK-302/MBU/2013 from 2 July 2013 to 16 October 2014 is as follows:

Yogo Pratomo : President Commissioner
Adang Firman : Independent Commissioner
Syahrial Loetan : Independent Commissioner
Wimpy S. Tjetjep : Commissioner
Jarman : Commissioner
Andin Hadiyanto : Commissioner
Harry Susetyo Nugroho : Commissioner
Ahmad Yani Basuki : Commissioner
Zulkifli Zaini : Commissioner

Meanwhile, the composition of member of PLN's Board of Commissioners since 16 October 2014 until 31 December 2014 based on SOE Minister Decree as GMS No. SK-211/MBU/2014 dated 16 October 2014 is as follows.

Yogo Pratomo : President Commissioner
Oegroseno : Independent Commissioner
Darmono : Independent Commissioner
S. Milton Pakpahan : Commissioner
Jarman : Commissioner
Andin Hadiyanto : Commissioner
Harry Susetyo Nugroho : Commissioner
Ahmad Yani Basuki : Commissioner
Zulkifli Zaini : Commissioner

Then according to the Decree of the Minister of SOEs as GMS Number: SK-273 / MBU / 12/2014 dated December 23, 2014, the composition of the Commissioners Board is change, as follows:

Chandra M. Hamzah : President Commissioner
Oegroseno : Independent Commissioner
Darmono : Independent Commissioner
Harry Susetyo Nugroho : Commissioner
Zulkifli Zaini : Commissioner
Andin Hadiyanto : Commissioner
Budiman : Commissioner
Hasan Bisri : Commissioner
S. Milton Pakpahan : Commissioner

So the summary of changes in the composition of the Commissioners Board, date of assignment and work term during 2014 are as follows.

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan
Composition and Tenure of Board of Commissioners in Desember 2014-2019

Nama Name	Jabatan Title	Tanggal Pengangkatan Appointed Date	Perkiraan Akhir Masa Jabatan Estimation of Tenure
Yogo Pratomo	Komisaris Utama President Commissioner	22 Desember 2009 22 December 2009	23 Desember 2014 23 December 2014
Adang Firman	Komisaris Independen Independent Commissioner	22 Desember 2009 22 December 2009	16 Oktober 2014 16 October 2014
Syahrial Loetan	Komisaris Independen Independent Commissioner	22 Desember 2009 22 December 2009	16 Oktober 2014 16 October 2014
Wimpy S Tjetjep	Komisaris Commissioner	22 Desember 2009 22 December 2009	16 Oktober 2014 16 October 2014
Jarman	Komisaris Commissioner	26 November 2012	23 Desember 2014 23 December 2014
Ahmad Yani Basuki	Komisaris Commissioner	21 Mei 2013 21 May 2013	23 Desember 2014 23 December 2014
Andin Hadiyanto	Komisaris Commissioner	3 Oktober 2012 3 October 2012	3 Oktober 2017 3 October 2017
Harry Susetyo Nugroho	Komisaris Commissioner	2 April 2013	2 April 2018
Zulkifli Zaini	Komisaris Commissioner	2 Juli 2013 2 July 2013	2 Juli 2018 2 July 2018
Oegroseno	Komisaris Independen Independent Commissioner	16 Oktober 2014 16 October 2014	16 Oktober 2019 16 October 2019
Darmono	Komisaris Independen Independent Commissioner	16 Oktober 2014 16 October 2014	16 Oktober 2019 16 October 2019
S. Milton Pakpahan	Komisaris Commissioner	16 Oktober 2014 16 October 2014	16 Oktober 2019 16 October 2019
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama President Commissioner	23 Desember 2014 23 December 2014	23 Desember 2019 23 December 2019
Budiman	Komisaris Commissioner	23 Desember 2014 23 December 2014	23 Desember 2019 23 December 2019
Hasan Bisri	Komisaris Commissioner	23 Desember 2014 23 December 2014	23 Desember 2019 23 December 2019

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris *(Board Manual)*

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) serta Pedoman Kerja (*Board Manual*) Dewan Komisaris.

Board Manual PLN berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Board Manual Dewan Komisaris mencakup:
1. Ketentuan Umum
2. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
3. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris
4. Pengawasan dan Pemberian Nasehat
5. Rapat Dewan Komisaris
6. Rencana Kerja dan KPI Serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
7. Organ Pendukung

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah:

1. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);

Board of Commissioners Employment Guidelines (Board Manual)

In supervising and giving advices to board of Directors, Board of Commissioners refer to Board of Commissioners and Board of Directors Employment Guidelines (Board Manual) as well as Board of Commissioners Employment Guidelines (Board Manual).

PLN's Board Manual acts as reference and guidelines in how Board of Commissioners and Directors work in a structured, systematic, easily understood, and consistent way as well as in carrying out duties to achieve Company's Vision and Missions.

Board Manual of Board of Commissioners covers:
1. Main Provisions
2. Board of Commissioners' Duties and Authorities
3. Board of Commissioners' Rights and Obligations
4. Supervising and Giving Advice
5. Board of Commissioners' Meetings
6. Board of Commissioners' Work Plan, KPI, and Supervising Report.
7. Supporting Organs.

Board of Commissioners' Duties, Responsibilities, and Authorities

Law foundations of Board of Commissioners' tasks execution and authorities are:
1. Law No: 40 of 2007 regarding Limited Liability Company;
2. PT PLN's (Persero) Articles of Association;

3. Keputusan Menteri BUMN Nomor: 253/MBU/2009, Nomor: SK-365/MBU/2012 tanggal 03 Oktober 2012, Nomor: SK-424/ MBU /2012 tanggal 26 November 2012, Keputusan Menteri BUMN No. SK-211/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 dan Keputusan Menteri BUMN No. SK-273/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN;
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER -01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN dan Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN;
5. Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris *(Board Manual);*

3. Decree of SOE Minister Number: 253/MBU/2009, Number: SK-365/MBU/2012 dated October 3, 2012, Number SK-424/ MBU /2012 dated November 26, 2012, Decree of SOE Minister No. SK-211/MBU/10/2014 dated October 16, 2014 and Decree of SOE Minister No. SK-273/MBU/12/2014 dated December 23, 2014 on Dismissal and Appointment of Board of Commissioners for PT PLN (Persero);
4. SOE Minister Regulation No: PER-01/MBU/2011 regarding Good Corporate Governance (GCG) in SOE and No: PER-09/MBU/2012 regarding Changes in SOE State Minister Regulation No. PER-01/MBU/2011 regarding Good Corporate Governance (GCG) in SOE;
5. Board of Directors' and Commissioners' Work Procedure (Board Manual);

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01 / MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN, maka tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

Duties and Responsibilities

According to SOE Minister Regulation Number: PER-01/ MBU/2011 regarding Good Corporate Governance in SOE, Board of Commissioners' responsibilities and authorities are supervising management policies regarding company or its business, as well as giving advices to Board of Directors. Those duties are conducted for company interests and based on company purposes and objectives, not for particular party or group interests.

Untuk memastikan dipatuhinya seluruh keputusan RUPS dan dipenuhinya seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris memiliki wewenang meliputi: memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan posisi uang kas dan lain-lain dalam rangka verifikasi.

In order to ensure that all GMS decisions are obeyed and all provisions in applicable laws and regulations are fulfilled, Board of Commissioners possess authorities which cover: examining books, evidence papers, provision of goods, examining and matching cash position and others for verification.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.

According to Company's Articles of Association, Board of Commissioners' duties and authorities include:

1. Supervising Company's management policies which are conducted by Directors as well as giving advices to Directors about company development plan, work plan, and Company's annual budget, implementation of provisions in Articles of Association and GMS decisions as well as applicable laws and regulations;
2. Performing duties, authorities, and responsibilities based on provisions in Articles of Association and General Meeting of Shareholders decisions as well as applicable laws and regulations;
3. Conducting Company's interests by considering Shareholders' interests and being responsible to General Meeting of Shareholders.
4. Checking and reviewing Annual Report, including Financial Statements prepared by Board of Directors as well as signing those reports.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu:
   - memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan; dan
   - memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan posisi uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, memeriksa keberadaan surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Membentuk komite-komite yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris atau menunjuk tenaga ahli. Komite yang wajib dibentuk adalah Komite Audit dengan anggota yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan; dan
4. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan dua komite yang terdiri dari Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, serta membagi tugas dan wewenang diantara Dewan Komisaris dalam bentuk penetapan Komisaris sebagai Ketua, Wakil Ketua maupun anggota pada komite-komite tersebut.

Board of Commissioners' Authorities

In supervising, Board of Commissioners have authorities to:

1. Together or individually every time:
   - Enter buildings or yards or places used or owned by Company; and
   - Examine books, evidence papers, provision of goods, examine and match cash position for verification or other purposes, examine securities, as well as know all actions taken by Board of Directors.
2. Form committees which have a function to support Board of Commissioners' supervising duty or appoint experts. Committee which is compulsorily formed is Audit Committee with its members consisting of one or more members of Board of Commissioners and holding responsibility under Board of Commissioners.
3. Ask explanation of all questions given to Board of Directors and Board of Directors are obliged to give explanation; and
4. In performing duties, Board of Commissioners are assisted by Secretary of Board of Commissioners and two committees consisting of Audit Committee and Risk Management Committee. Board of Commissioners also possess an authority to divide duties and authorities among Board of Commissioners in appointing Commissioners as Chairman, Vice Chairman, as well as members in those committees.

Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris

Kewajiban Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan adalah:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta perubahan dan tambahannya, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
2. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, dalam hal ini perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
5. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris;
7. Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan dan perusahaan lain;
8. Memberikan laporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham
9. Mengawasi kepatuhan terhadap semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Board of Commissioners' Rights and Obligations

Board of Commissioners' Obligations according to Company's Articles of Association are:

1. Giving opinions and recommendations to General Meeting of Shareholders regarding Company's development plan, work plan, and Company's annual budget and its changes and addition, regular reports, and other reports from Directors;
2. Supervising the execution of company work plan and budget as well as informing evaluation result and opinions to General Meeting of Shareholders;
3. Following Company's development activities. If Company showed a setback, Board of Commissioners had to report it to General Meeting of Shareholders with prepared recommendations about required improvement steps.
4. Sharing opinions and recommendations to General Meeting of Shareholders about other important problems in handling Company;
5. Performing other supervising duties appointed by General Meeting of Shareholders;
6. Taking Minutes of Board of Commissioners Meeting;
7. Reporting any share ownership and/or family relationship with Company or other companies to Company;
8. Providing report of duties and supervising which had been conducted during the last financial year that just ended to General Meeting of Shareholders.
9. Supervising compliance with all applicable laws and regulations.

Sesuai Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2006, Dewan Komisaris melakukan beberapa tindakan pengawasan, yakni:

1. Memberikan rekomendasi dan persetujuan kepada Direksi dalam pengadaan barang dan jasa;

According to President Regulation No. 71 in 2006, Board of Commissioners conduct several supervision actions, namely:

1. Giving recommendations and approval of goods and service procurement to Board of Directors.

2. Memantau pelaksanaan Keputusan Presiden No. 71 antara lain dengan meminta laporan tertulis dari Direksi setiap tiga bulan sekali; dan
3. Melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan dan kemajuan proyek tersebut.

Sepanjang tahun 2014, jumlah pemberian nasehat/teguran/arahan dan pemberian tanggapan tertulis/persetujuan atas usulan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris maupun yang memerlukan persetujuan RUPS sebanyak 164 buah.

Selain itu, Dewan Komisaris juga telah menyampaikan laporan/tanggapan kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham/RUPS terkait kewajiban Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar sebanyak 16 buah. Dewan Komisaris juga melakukan monitoring langsung ke unit Bisnis dan Anak Perusahaan dengan melakukan kunjungan kerja sebanyak 19 kali kunjungan, dengan jumlah Unit/AP yang dikunjungi sebanyak 39 Unit/Proyek PLN dan 4 Anak Perusahaan.

2. Monitoring the execution of President Decree No. 71, such as requesting written report from Board of Directors once in three months; and
3. Conducting field visit to observe the execution and advancement of the project directly.

During 2014, there were 164 advices/warnings/guidance and written response/approval given to respond Board of Directors' proposals which required Board of Commissioners' or GMS approval.

In addition, the Board of Commissioner has also submitted report / feedback to the SOE minister as Shareholders / GMS related obligation of the Board of Commissioners according to 16 articles. The Board of Commissioners also monitors business unit and Subsidiaries with a working visit as many as 19 visits, the total Units / AP is 39 units / PLN's project and 4 subsidiaries.

Dewan Komisaris melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan maupun penasehatan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Direksi untuk memastikan terjadinya peningkatan kinerja operasional, keuangan dan terpenuhinya harapan pemangku kepentingan.

Board of Commissioners execute both supervising and advising activities, as well as give improvement recommendations to Board of Directors in order to ensure operational and financial performance increase and stakeholders' expectation fulfillment.

Rapat Rutin Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar, rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan dapat mengundang Direksi untuk hadir dalam rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika rapat yang bersifat segera / strategis dan dianggap perlu oleh:

1. Rapat internal Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris yang dilaksanakan setiap bulan.
2. Rapat konsultasi Direksi - Dewan Komisaris yang dilaksanakan setiap bulan.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika rapat yang bersifat segera/strategis dan dianggap perlu oleh:

1. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; dan
2. Permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris;

Keputusan - keputusan Dewan Komisaris diambil selain dalam rapat tersebut juga ditetapkan tanpa diadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan catatan keputusan tersebut telah disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Agenda Rapat membahas:

1. Pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Triwulanan dan Tahunan.
2. Pemenuhan Tugas Dewan Komisaris sesuai Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Laporan Komite.
4. Tindak lanjut hasil keputusan rapat yang lalu.
5. Tindak lanjut temuan auditor eksternal dan auditor internal yang sifatnya material.
6. Pemberian nasehat/teguran/arahan kepada Direksi.

Board of Commissioners' Routine Meetings

Based on Articles of Association, Board of Commissioners' meeting is held at least once in a month and it is possible to invite Board of Directors to participate in the meeting. Routine / scheduled Board of Commissioners' meetings consist of:

1. Internal meeting between Board of Commissioners and Board of Commissioners' Committees which is held every month.
2. Consultation meeting between Board of Directors and Board of Commissioners which is held every month.

Board of Commissioners' meeting can be held outside the routine schedule if the meeting is urgent / strategic and needed by:

1. One or more members of Board of Commissioners; and
2. Written request from one or more member of Board of Commissioners;

Board of Commissioners' decision can be made in the meeting or without Board of Commissioners' meeting by providing written decision which is approved and signed by all members of Board of Commissioners.

Board of Commissioners' Routine Meeting Agenda

Internal Meeting agenda with Committee of Board of Commissioners consists of:

1. Achievement in Quarterly and Annual Work Plan and Budget.
2. Fulfilment of Board of Commissioners' Duties based on General Meeting of Shareholders.
3. Committee Report.
4. Follow-up actions of the previous meeting decision.
5. Follow-up actions of material findings of external and internal auditors.
6. Giving advices/warnings/guidance to Board of Directors.

7. Pemberian tanggapan tertulis/persetujuan atas usulan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris maupun yang memerlukan persetujuan RUPS.
8. Permasalahan / isu strategis / kondisi perusahaan
9. Kebijakan Direksi atas kepengurusan perusahaan
10. Evaluasi kinerja dan rencana kerja masing-masing Direktorat
11. Tindak lanjut atas pemberian tanggapan / arahan Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Konsultasi Direksi - Dewan Komisaris membahas:
1. Permasalahan/isu strategis/kondisi perusahaan.
2. Kebijakan Direksi atas kepengurusan perusahaan.
3. Evaluasi kinerja dan rencana kerja masing-masing Direktorat.
4. Tindak lanjut atas pemberian tanggapan/arahan Dewan Komisaris.

Produk Pengawasan Dewan Komisaris

Pemberian pendapat Dewan Komisaris kepada Direksi atas:
1. Permintaan rekomendasi maupun persetujuan Dewan Komisaris atas rencana tindakan Direksi sesuai Anggaran Dasar, antara lain: penghapusan piutang ragu-ragu, penghapusan ATTB, pendanaan perbankan, pembelian tenaga listrik IPP, penerusan pinjaman proyek.
2. Perubahan Struktur Organisasi.
3. Pejabat Satu Tingkat di bawah Direksi dan Direksi/Komisaris Anak Perusahaan.
4. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi 2014.
5. RJP 2015-2019.
6. RKAP tahun 2015.
7. Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan 2014.
8. Laporan Pencapaian KPI Triwulanan dan Tahunan serta KPI masing-masing Direktorat 2014.
9. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dan internal.

Selain hal tersebut, Dewan Komisaris juga memberikan nasehat dan teguran kepada Direksi sesuai informasi yang diperoleh dari fakta/kenyataan di lapangan.

Pemberian Tanggapan/Laporan Dewan Komisaris kepada RUPS:
1. Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris 2014 dan 2015.
2. Usulan Penunjukan KAP untuk Audit PLN 2014.
3. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 2013 dan 2014.
4. Pendapat Dewan Komisaris Terhadap Laporan Manajemen 2013 dan 2014.
5. Rekomendasi Penetapan Tantiem dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PLN 2014.
6. Pendapat Dewan Komisaris Terhadap Laporan Manajemen 2013 dan 2014.
7. Rekomendasi dan Pendapat Dewan Komisaris RKAP 2015.
8. Data Hasil Asesmen Pejabat Satu Tingkat Di Bawah Direksi
9. Catatan Dewan Komisaris 2010-2014.
10. Perubahan Susunan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.
11. Penyampaian Penilaian Kinerja Direksi.

7. Giving written response/approval for Board of Directors' suggestions which require approval from Board of Commissioners or GMS.
8. Strategic problems or issues or company's conditions.
9. Board of Directors' policy on company management.
10. Performance and work plan evaluation of each Directorate.
11. Follow-ups to the suggestions of Board of Commissioners.

Consultation Meeting agenda between Board of Directors and Board of Commissioners consists of:
1. Problems / strategic issues / company condition
2. Board of Directors' policies in company management
3. Performance and work plan of each Director evaluation
4. Follow-up of response/guidance given from Board of Commissioners.

Products of Board of Commissioners' Supervision

Board of Commissioners give opinion to Board of Directors about:
1. Request of recommendation or approval of Directors' action plans to Board of Commissioners based on Articles of Association, comprises: doubtful accounts removal, Non-operational Fixed Assets removal, banking funding, IPP electricity purchase, two-step loans continuation.
2. Changes in Organization Structure.
3. Officials which are one level under Board of Directors and Subsidiaries' Board of Directors/Commissioners.
4. 2014 Board of Commissioners' and Board of Directors' Remuneration.
5. PLN's Long-term Plan Year 2015-2019.
6. 2015 RKAP.
7. 2014 Quarterly and Annual Management Reports.
8. 2014 Quarterly and Annual KPI Achievement Reports as well as KPI of each Directororate.
9. Follow-up on findings of external and internal audits.

In addition, Board of Commissioners give advices and warnings to Board of Directors based on information gained from facts in field.

Responses/Reports given by Board of Commissioners to GMS:
1. 2014 and 2015 Work Plans and Board of Commissioners' KPI
2. Suggestions of PAF selection to audit PLN in 2014.
3. 2013 and 2014 Board of Commissioners' Supervision Report.
4. Board of Commissioners' opinions regarding 2013 and 2014 Management Reports.
5. Recommendations of 2014 bonus (tantiem) and remuneration for PLN's Board of Commissioners and Board of Directors.
6. The opinion of the Board of Commissioners to Management Report 2013 and 2014.
7. Recommendations and Opinions Board of Commissioners CBP 2015.
8. Assessment Result Data One Level Officer Below Board of Directors
9. BOC's note 2010-2014.
10. Changes in Composition of the Audit Committee and Risk Management Committee.
11. Submission of Performance Evaluation on the Board of Directors.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selalu hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan 2 (dua) kali yaitu Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan (LPT).

Sepanjang tahun 2014, total kegiatan rapat Dewan Komisaris adalah 38 kali rapat yang terdiri dari rapat internal dan rapat konsultasi. Sesuai dengan ketentuan internal, kehadiran Dewan Komisaris pada rapat internal maupun rapat konsultasi telah memenuhi kuorum yang ditetapkan (minimal 5 Komisaris).

Seluruh Direksi senantiasa menghadiri Rapat Konsultasi/rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris.

Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Komisaris dalam rapat tersebut sebagai berikut.

Board of Commissioners' Meeting Frequency

Boards of Commissioners always attend Annual General Meeting of Shareholders which is held twice, namely approval of Company's Buget Plan (CBP's) and Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements (LPT).

During 2014, there were 38 Board of Commissioners' meetings, consisting of 20 internal meetings and consultation. According to internal provision, the presence of Board of Commissioners in both internal and consultation meetings fulfilled the set quorum (a minimum of 5 Commissioners).

The entire Board of Directors always attended the joint Meeting with the Board of Commissioner.

The following tables show attendance of each Commissioner in those meetings.

Kehadiran dan Persentasi Kehadiran Komisaris Pada Rapat Dewan Komisaris Tahun 2014

Attendance and Attendance Percentage of Commissioners at Internal Meeting in 2014

Nama Name	Total Rapat Meeting Frequency	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Yogo Pratomo	38	36	95
Adang Firman	31	29	94
Syahrial Loetan	31	26	84
Wimpy S Tjetjep	31	25	81
Harry Susetyo Nugroho	38	29	76
Jarman	38	24	63
Andin Hadiyanto	38	17	45
Ahmad Yani Basuki	38	28	74
Zulkifli Zaini	38	36	95
Oegroseno*	7	7	100
Darmono*	7	6	86
S. Milton Pakpahan*	7	6	86

* Tingkat kehadiran dihitung berdasarkan masa tugas.

*Attendance rate is calculated based on the period of duty.

Selama tahun 2014, Dewan Komisaris secara kuorum menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2013 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014.

During 2014, the Board of Commissioners attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) Annual regarding Accountability Report 2013 and the Work Plan and Budget (CBP) 2014.

Nama Name	Total Rapat Meeting Frequency
17 April 2014 (LPT 2013)	Yogo Pratomo, Adang Firman, Syahrial Loetan, Wimpy S. Tjetjep, Harry Susetyo Nugroho, Jarman, Andin Hadiyanto, Ahmad Yani Basuki, Zulkifli Zaini
17 Januari January 2014 (RKAP 2014)	Yogo Pratomo, Adang Firman, Syahrial Loetan, Andin Hadiyanto, Jarman, Harry Susetyo Nugroho, Ahmad Yani Basuki, Zulkifli Zaini.

Asesmen Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham. Penilaian kinerja Dewan Komisaris mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*/KPI) Dewan Komisaris. KPI Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan Kementerian BUMN.

Board of Commissioners' Performance Assessment

The evaluation of Board of Commissioners' performance is conducted by Shareholders. The evaluation is based on Key Performance Indicators (KPI) of Board of Commissioners. KPI of Board of Commissioners is arranged by considering tasks and responsibilities of Board of Commissioners based on Articles of Association and SOE Ministry regulations.

Realisasi KPI Dewan Komisaris Tahun 2014
Realization of KPI of Board of Commissioners 2014

Program Kerja Work Program	Uraian Description	Realisasi Program Kerja 2014 Work Program Realization 2014	Realisasi KPI 2014 KPI's Realization 2014
Dewan Komisaris Dengan Direksi Board of Commissioners with Board of Directors			
1. *Review* dan tanggapan Rencana Perusahaan Review and Response to Company Plan	Pembahasan, saran dan atau persetujuan atas RKAP dan KPI 2015 dan *review* RJP 2013-1017 Discussion, advice and or approval of RKAP and KPI 2015 and Long Term Plan Review 2013-1017	• RKAP 2015 • Draft RJP 2015-2019 • RKAP 2015 • Long Term Plan Draft 2015-2019	7
	Ketepatan waktu pemberian setelah draft diperoleh dari Direksi dengan data yang akurat : • RKAP 2015 • RJP 2013-2017 Punctuality submission after the draft was obtained from Board of Directors with accurate data • RKAP 2015 • Long Term Plan 2013-2017	Ketepatan waktu : • RKAP 2015 : 1 hari • Draft RJP 2015-2019 : 15 hari Punctuality RKAP 2015 : 1 day Long Term Plan Draft 2015-2019 : 15 days	3
2. *Review* dan tanggapan kinerja perusahaan Review and Response to Company Plan	Pembahasan, saran dan persetujuan atas : • LM dan KPI Triwulanan 2014 • LM dan KPI Tahunan 2013 • KPI Direksi Tahunan 2013 Discussion, advice and or approval of • LM and Quarterly KPI 2014 • LM and Annual KPI 2013 • Annual Board of Directors KPI 2013	• LM dan KPI TW I/2014 • LM dan KPI TW II/2014 • LM dan KPI TW III/2014 • LM 2013 • KPI Direksi 2013 • LM and KPI Quarter I/2014 • LM and KPI Quarter II/2014 • LM and KPI Quarter III/2014 • LM 2013 • Board of Directors KPI 2013	9
	Ketepatan waktu pemberian setelah draft diperoleh dari Direksi dengan data yang akurat: • LM dan KPI Triwulanan 2014 • LM dan KPI Tahunan 2013 • KPI Direksi Tahunan 2013 Punctuality submission after the draft was obtained from Board of Directors with accurate data • LM and Quarterly KPI 2014 • LM and Annual KPI 2013 • Annual Board of Directors KPI 2013	Ketepatan waktu : • LM & KPI TW I/ 2014: 1 hari • LM & KPI TW II/ 2014 : 1 hari • LM & KPI TW III/ 2014 : 2 hari • LM & KPI 2013 : 5 hari • KPI Direksi 2013 : 5 hari Punctuality • LM & KPI Quarter I/ 2014: 1 day • LM & KPI Quarter II/ 2014 : 1 day • LM & KPI Quarter III/ 2014 : 2 days • LM & KPI 2013 : 5 days • KPI Direksi 2013 : 5 days	3
3. *Review* tindak lanjut hasil/temuan audit internal /eksternal Review on the follow-ups to internal/external audit findings	Pembahasan dan tanggapan/saran atas Efektivitas pemeriksaan internal dan monitoring tindak lanjut temuan auditor. Discussion and feedback / advice on the effectiveness of internal checks and follow-up monitoring of the auditor's findings	6 kali times	10
4. Memberi tanggapan tertulis/ persetujuan nasehat /saran /teguran kepada Direksi Provision of response/ appraisal/reminder/ advice/direction to Board of Directors	Pembahasan dan pemberian tanggapan tertulis /persetujuan atas permintaan Direksi 2014 Discussion and written responses / approval of the request of Board of Directors 2014	90 %	15
	Ketepatan waktu pemberian setelah usulan diperoleh dari Direksi dengan data dan dokumen pendukung yang lengkap The accuracy of the time after the proposal of the Board of Directors with the data obtained and complete supporting documents	Ketepatan waktu : 18 hari Punctuality: 18 days	5
	Pemberian nasehat/saran/teguran Giving advise/warning	12 kali times	4

Program Kerja Work Program	Uraian Description	Realisasi Program Kerja 2014 Work Program Realization 2014	Realisasi KPI 2014 KPI's Realization 2014
Dewan Komisaris dengan RUPS Board of Commissioners with General Meeting of Shareholder			
5. Menyampaikan program kerja dan KPI Dekom tahunan Delivering the work program and annual Board of Commissioners KPI	Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris Tahunan 2014. Work Plan and annual Board of Commissioners KPI 2014	RKA Dekom 2014 Board of Commissioners RKA 2014	3
	Ketepatan waktu penyampaian RK dan KPI Dekom 2014. Punctuality Delivering work plan and Board of Commissioners KPI 2014	Ketepatan waktu : 16 hari sebelum RUPS RKAP 2014 Punctuality: 16 days before the General Meeting of Shareholder CBP 2014	1
6. Menyampaikan laporan/ pendapat Dekom kepada Pemegang Saham/RUPS Delivering report/opinion of Board of Commissioners to Shareholders	Pendapat atas : • RJP 2013-2017 • RKAP 2015 • LM & KPI PLN Tahunan 2013 Menyampaikan : • Usulan penetapan kantor akuntan publik (KAP) 2014 • Usulan Remunerasi 2014 Opinion on: • Long Term Plan 2013-2017 • RKAP 2015 • LM & KPI Annual PLN 2013 • convey: • Proposal of public accounting firm (KAP) establishment 2014 • Proposal of Remuneration 2014	Tanggapan : • RJP 2013-2017 • RKAP 2015 • Tanggapan LM & KPI 2013 Usulan : • KAP 2014 • Remunerasi 2014 Response: • Long Term Plan 2013-2017 • RKAP 2015 • Feedback of LM & KPI 2013 • proposal: • KAP 2014 • Remuneration	4
	Ketepatan waktu penyampaian sebelum RUPS: • RKAP 2015 • LM & KPI PLN Tahunan 2013 • Usulan KAP 2014 • Usulan Remunerasi 2014 Punctuality of submission before the GMS: • RKAP 2015 • LM & KPI Annual PLN 2013 • KAP Proposal 2014 • Remuneration Proposal 2014	Ketepatan waktu sebelum RUPS : • RKAP 2015 : 35 hari • LM&KPI 2013 : 16 hari • KAP 2014 : 16 hari • Remunerasi 2014: 16 hari The accuracy time before the General Meeting of Shareholder: • RKAP 2015: 35 days • LM & KPI 2013: 16 days • KAP 2014: 16 days • Remuneration 2014: 16 days	2
7. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris. Delivering report on supervisory duties of the Board of Commissioners	• Laporan Pengawasan dan KPI Dewan Komisaris Semesteran 2014 • Laporan Pengawasan dan KPI Dewan Komisaris Tahunan 2013 • Semiannual Monitoring Report and Board of Commissioners KPI 2014 • Annual Monitoring Report and Board of Commissioners KPI 2013	• Laporan Pengawasan dan KPI Dewan Komisaris Semesteran 2014 • Laporan Pengawasan dan KPI Dewan Komisaris Tahunan 2013 • Semiannual Monitoring Report and Board of Commissioners KPI 2014 • Annual Monitoring Report and Board of Commissioners KPI 2013	3 1
	Ketepatan waktu penyampaian: • Laporan Semesteran • Laporan Tahunan Time line of Delivery • Semiannual Report • Annual Report	Ketepatan waktu : • Laporan Semesteran 2014 : 24 hari sejak berakhirnya periode • Laporan 2013 : 16 hari Sebelum RUPS LPT 2013 Punctuality • Semiannual Report 2014 : 24 days since the end of the period • Report 2013 : 16 days before GMS LPT 2013	

Program Kerja Work Program	Uraian Description	Realisasi Program Kerja 2014 Work Program Realization 2014	Realisasi KPI 2014 KPI's Realization 2014
8. RUPS General Meeting of Shareholder	Kehadiran Komisaris korum : • RUPS RKAP 2014 • RUPS LPT 2013 The presence of Board of Commissioners: • GMS RKAP 2015 • GMS LPT 2013	Kehadiran Komisaris korum : • RUPS RKAP 2014 • RUPS LPT 2013 The presence of Board of Commissioners: • GMS RKAP 2015 • GMS LPT 2013	4
Internal Dewan Komisaris Internal Board of Commissioners			
9. Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	Rapat Dewan Komisaris terdiri dari : Rapat internal dan rapat konsultasi Board of Commissioners Meeting consists ofK Internal Meeting and Consultation Meeting	38 kali times	20
10. Pengenalan/ Induksi / peningkatan kompetensi Introduction / induction / competence enhancement	Pengenalan induksi / Peningkatan kompetensi dengan mengikuti seminar / workshop Pengenalan induksi / Peningkatan kompetensi dengan mengikuti seminar / workshop	8 kali times	2
11. Pengelolaan GCG GCG management	Penunjukan *assessor* GCG 2013 GCG assessor appointment 2013	1 kali times	1
	Pencapaian skor *self assessment* GCG Dewan Komisaris terhadap skor maksimum bagian Dewan Komisaris Achievement scores on GCG self-assessment Board of Commissioners towards the maximum score of the Board of Commissioners	88 %	3

Prosedur Penetapan dan Besarnya Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan dan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER - 04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa RUPS menetapkan penghasilan anggota Dewan Komisaris berupa honorarium; tunjangan; fasilitas; dan tantiem.

Board of Commissioners Remuneration Determination Procedure

Board of Commissioners Remuneration is determined according to SOE Minister Regulation No. PER - 04/MBU/2014 regarding Guidelines in Setting Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-owned Enterprises.

The regulation states that GMS sets honorarium; allowances; facilities; and bonus (tantiem) as the income of Board of Commissioners.

Adapun bagan ringkas prosedur penetapannya sebagai berikut:

The following diagram shows the procedure of remuneration determination.

Bagan Ringkas Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris.

Board of Commissioners Remuneration Determination Procedure

KMR
- Mendapatkan masukan dari Konsultan Independen dalam menetapkan dasar penentuan remunerasi
- Konsultan Independen memberi masukan berdasarkan:
  - BUMN No. PER-04/MBU/ 2014 tgl 10 Maret 2014 pasal 5
  - Survey Remunerasi dan Faktor Penyesuian Industri
  - Keberhasilan memitigasi risiko
  - Kemampuan Perseroan, Kompetensi dan Pengalaman

KMR
- Mengusulkan dasar dan besaran Remunerasi kepada Dewan Komisaris (DK)

DK
- Membahas usulan KMR dan mengusulkan besaran remunerasi kepada RUPS

- **Honor dan Tantiem Dewan Komisaris**

KMR
- Receive input from Independent Consultant in setting the remuneration bases
- Independent Consultant provides input in accordance with:
  - SOE Minister Regulation No. PER-04/MBU/ 2014 dated March 27, 2014 art. 5
  - Remuneration Survey and Industry Adjustment Factor
  - Success in risk mitigation
  - Company capability, Competency and Experience

KMR
- Propose Remuneration bases and amounts to BOC

DK
- Discuss RMC proposal and propose remuneration amounts to GMS.

- **Honorarium and Incentives of performance for Board of Commissioners**

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris

Besaran honorarium Dewan Komisaris disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menetapkan besaran honorarium tersebut diterapkan Faktor Penyesuaian Industri yang mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur *(benchmark),* kondisi persaingan usaha *(competitiveness)* atau kompleksitas usaha, serta kelangkaan sumber daya manusia.

Besaran remunerasi Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri BUMN No. No. PER-04/MBU/2014 adalah Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama, sedangkan besaran remunerasi anggota Komisaris lainnya adalah 90 % dari Komisaris Utama. Adapun rincian remunerasi Dewan Komisaris yang meliputi honorarium, tunjangan dan fasilitas dalam bentuk kas maupun non kas.

Sedangkan remunerasi dalam bentuk kas yang meliputi honorarium dan tunjangan yang diterima anggota Dewan Komisaris di tahun 2014 sesuai RUPS adalah sebagai berikut.

Board of Commissioners Remuneration

The amount of Board of Commissioners honorarium is adjusted with company financial condition and capability and must not contradict laws and regulations. In deciding the amount of honorarium, Industry Adjustment Factor is applied to consider measurable similar industries (benchmark), business competitiveness or business complexity, as well as human resource shortage.

Remuneration amount of Board of Commissioners in accordance with SOE Minister Regulation Number PER-04/MBU/2014 is that the President Commissioners remuneration is 45% of from President Director's remuneration while remuneration of other Board of Commissioner member is 90% from President Commissioners. There is also remuneration detail of Board of Commissioners which include honorarium, allowance, and facility in the form of cash or non-cash.

Meanwhile, remuneration in cash which includes honorarium and allowances obtained by Board of Commissioners in 2014 according to GMS is as follows.

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2014 (Rp)
Board of Commissioners Remuneration in 2014 (Rp)

Nama Name	Jabatan Position	Honorarium / Gaji Honorarium/ Salary	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	THR Religious Holiday Allowance	Tanggungan PPh Ps 21 Income Tax Art. 21 Allowance	Total
Dewan Komisaris Board of Commissioners							
Yogo Pratomo	Komisaris Utama President Commissioner	945.000.000	-	37.200.000	78.750.000	252.980.000	1.313.930.000
Adang Firman	Komisaris Commissioner	673.312.500	134.662.500	26.505.000	70.875.000	207.209.000	1.112.564.000
Harry Susetyo Nugroho	Komisaris Commissioner	850.500.000	170.100.000	33.480.000	70.875.000	272.181.500	1.397.136.500
Wimpy S. Tjetjep	Komisaris Commissioner	673.312.500	134.662.500	26.505.000	70.875.000	207.209.000	1.112.564.000
Syahrial Loetan	Komisaris Commissioner	673.312.500	134.662.500	26.505.000	70.875.000	207.209.000	1.112.564.000
Jarman	Komisaris Commissioner	850.500.000	170.100.000	33.480.000	70.875.000	272.181.500	1.397.136.500
Andin Hadiyanto	Komisaris Commissioner	850.500.000	170.100.000	33.480.000	70.875.000	270.966.500	1.395.921.500
Ahmad Yani Basuki	Komisaris Commissioner	850.500.000	170.100.000	33.480.000	70.875.000	270.966.500	1.395.921.500
Zulkifli Zaini	Komisaris Commissioner	850.500.000	170.100.000	33.480.000	70.875.000	272.789.000	1.397.744.000
Darmono, SH	Komisaris Commissioner	177.187.500	35.437.500	6.975.000	-	28.745.083	248.345.083
Sumanggar Milton Pakpahan	Komisaris Commissioner	177.187.500	35.437.500	6.975.000	14.765.625	28.745.083	263.110.708
Oegroseno	Komisaris Commissioner	177.187.500	35.437.500	6.975.000	-	14.767.834	234.367.834
	Jumlah (A) Total (A)	8.135.400.000	1.360.800.000	305.040.000	692.715.625	2.372.012.500	12.865.968.125

Catatan: Per tanggal 23 Desember 2014, susunan personalia Dewan Komisaris tersebut diatas, sudah berubah.

Note: As of December 23, 2014, the personnel composition of the Board of Commissioners above has changed.

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti seminar, workshop, *benchmarking*, training/diklat. Jumlah seminar/*workshop/benchmarking*/training/diklat yang diikuti selama tahun 2014 yang diadakan di Jakarta maupun di luar negeri adalah 6 kali.

Tabel seminar/*workshop/benchmarking/training*/diklat yang diikuti oleh Dewan Komisaris pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners' Training Programs

Boards of Commissioners improve competencies by participating in seminars, workshops, benchmarking, and trainings. The total of seminar/workshop/benchmarking/training participation in 2014 which were held both in Jakarta and other countries is 6 times.

The following table shows the details of Board of Commissioners' seminar/workshop/benchmarking/training participation in 2014.

Seminar/*Workshop/Benchmarking* yang Diikuti Dewan Komisaris tahun 2014
List of Seminar/Workshop/Benchmarking Participated by Board of Commissioners in 2014

Tanggal	Seminar / Workshop / Benchmarking	Date
18 Mei 2014	*Leading Change in Complex Organization MIT Sloan Executive Education, Cambridge, Masssachusetts, USA*	18 May 2014
01 Juni 2014	*Power- Gen, Europe Conference Grid, Cologne, Germany*	01 June 2014
21 Juli 2014	*World's largest Hydrovision Conference, Nashville USA*	21 July 2014
20 Oktober 2014	*Konferensi Internasional Hydrovision, Brazil*	20 October 2014
1 Desember 2014	*Workshop dan Seminar ERM Fundamentals ISO 31000, CRMS, Bali, Indonesia*	1 December 2014
8 Desember 2014	*Renewable Energy World Conference & Expo, North America, USA*	8 December 2014

Selain hal tersebut Dewan Komisaris juga telah melaksanakan 2 kali program pengenalan/induksi untuk Komisaris baru, yaitu:

Beside that, Board of Commissioners has also conducted two times of introduction / induction program for new Commissioner, namely:

TANGGAL	KOMISARIS
21 Oktober 2014	*Darmono, Oegroseno, S. Milton Pakpahan*
7 Januari 2015	*Chandar M. Hamzah, Budiman, Hasan Bisri*

Direksi

Prosedur Penetapan Direksi

Perusahaan dikelola dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. Apabila diangkat lebih dari satu orang Direktur, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Susunan, persyaratan, nominasi, dan pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa jabatan anggota Direksi adalah lima tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para Anggota Direksi sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, para Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

Independensi Direksi

Kriteria Independensi anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan antara lain diatur mengenai larangan jabatan rangkap yaitu Direksi dilarang memangku jabatan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Apabila Anggota Direksi berpotensi melakukan rangkap jabatan, maka Anggota Direksi yang bersangkutan harus meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pengecualian atas rangkap jabatan tersebut.

Kebijakan Suksesi Direksi

Untuk mempersiapkan kader-kader pimpinan masa depan, PLN menyelenggarakan program *Talent Management*. Kader-kader potensial yang masuk kedalam *Talent Pool* akan menjalani serangkaian program pelatihan dengan muatan utama adalah peningkatan kapabilitas dibidang manajemen, strategi pengembangan usaha, evaluasi rencana strategis dan sejenisnya. Pada saat tibanya pergantian kepemimpinan, PLN akan mengajukan kandidat internal melalui pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Adhoc dan difasilitasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pemilihan kandidat internal tersebut kemudian diajukan kepada Kementerian BUMN untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Komposisi dan Masa Tugas Direksi

Sesuai Keputusan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selaku RUPS PLN Nomor SK-179/MBU/2013 pada tanggal 11 Maret 2013, susunan Direksi PT PLN adalah sebagai berikut.

Board of Directors

Board of Directors Appointment Procedure

Company is managed and led by Board of Directors which consist of one or more Directors. If there are more than one Directors, one of them should be appointed as President Director. Composition, requirements, nominations, and appointment of Members of Board of Directors are determined by GMS based on provisions in Articles of Association and applicable laws and regulations.

Five years of members of Board of Directors' tenure is set without reducing the right of General Meeting of Shareholders to dismiss member of Board of Directors anytime. After tenure has ended, members of Board of Directors are able to be reappointed for one more tenure by General Meeting of Shareholders.

Independence Board of Directors

Criteria member of board of Directors' Independence based on Company's Articles of Association include prohibition of double titles in which Directors are prohibited to hold titles as follows:

1. Member of SOE, Regional Owned Enterprise, Private-owned Enterprise Directors
2. Member of Board of Commissioners / Board of Supervisors in SOE, Regional Owned Enterprise, Private-owned Enterprise
3. Other structural and functional title in central and/or regional government institutions/bodies.
4. Other titles based on provisions in laws and regulations, leader of a political party and/or prospective member of the legislature and/or candidate of regional head/deputy head and/or regional head/deputy head.
5. Other titles which can lead to conflict of interest.

If members of Board of Directors are potential to hold double titles, the related member should request exception approval from General Meeting of Shareholders (GMS) for double titles.

Board of Directors Succession Policy

In order to prepare future leader cadres, PLN hold Talent Management program. Potential cadres who join Talent Pool will participate in several training programs with main contents of capabilities improvement in management, business development strategy, strategic plan evaluation, and other similar contents. At the time of leadership change, PLN will propose internal candidates through a selection which is conducted by an ad hoc committee and facilitated by Board of Commissioners. The selected internal candidate will then be proposed to SOE Ministry to face fit and proper test.

Composition and Tenure Board of Directors

According to SOE (State-owned Enterprise) Minister Decree as GMS of PLN No. SK-179/MBU/2013 dated 11 March 2013, the composition of PT PLN's Directors is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Nur Pamudji	Direktur Utama President Director
Murtaqi Syamsuddin	Direktur (Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi) atau DIR (REN) Director (PLN Planning and Affiliation Development) or DIR (REN)
Moch. Harry Jaya Pahlawan	Direktur (Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan atau DIR (NRK). Director (Commerce, Risk Management, and Compliance) or DIR (NRK)
Nasri Sebayang	Direktur (Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan) atau DIR (KON) Director (Construction and New Renewable Energy) or DIR (KON)
Bagiyo Riawan	Direktur (Pengadaan dan Energi Primer) atau DIR (DAN) Director (Procurement and Primary Energy) or DIR (DAN)
Vickner Sinaga	Direktur (Operasi Indonesia Timur) atau DIR (OP-IT) Director (East Indonesia Operations) or DIR (OP-IT)
I.G.A. Ngurah Adnyana	Direktur (Operasi Jawa - Bali – Sumatera) atau DIR (OP-JBS) Director (Java-Bali-Sumatra Operations) or DIR (OP-JBS)
Eddy D. Erningpraja	Direktur (Sumber Daya Manusia dan Umum) atau DIR (SDM) Director (Human Resources and General Affairs) or DIR (SDM)
Setio Anggoro Dewo	Direktur (Keuangan) atau DIR (KEU) Director (Finance) or DIR (KEU)

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selaku RUPS PLN Nomor SK-272/MBU/12/2014 pada tanggal 23 Desember 2014, susunan Direksi PT PLN beserta perkiraan masa jabatan adalah sebagai berikut.

Pursuant to the Decree of the Minister of SOEs (State Owned Enterprises) as PLN's Annual General Meeting of Shareholders No. SK-272 / MBU / 12/2014 on December 23, 2014, the Board of Directors of PT PLN along with the estimated term of office are as follows.

Komposisi dan Masa Jabatan Anggota Direksi
Composition and Tenure of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Title	Tanggal Pengangkatan Appointment Date	Perkiraan Akhir Masa Jabatan Estimation of Tenure
Sofyan Basir	Direktur Utama President Director Direktur (SDM & Umum) Director (HR & General Affairs)	23 Desember 2014 23 December 2014	23 Desember 2019 23 December 2019
Sarwono Sudarto	Direktur Keuangan Director (Finance)	23 Desember 2014 23 December 2014	23 Desember 2019 23 December 2019
Nasri Sebayang	Direktur (Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan) Director (Construction and New Renewable Energy)	23 Desember 2014 23 December 2014	23 Desember 2019 23 December 2019
Supangkat Iwan Santoso	Direktur (Operasi Jawa Bali) Director (Java - Bali Operations)	23 Desember 2014 23 December 2014	23 Desember 2019 23 December 2019
Amir Rosidin	Direktur (Operasi Luar Jawa Bali) Director (Outside Java - Bali Operations)	23 Desember 2014 23 December 2014	23 Desember 2019 23 December 2019
Nicke Widyawati	Direktur (Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan) Director (Commerce, Risk Management and Compliance)	23 Desember 2014 23 December 2014	23 Desember 2019 23 December 2019
Amin Subekti	Direktur (Pengadaan dan Energi Primer) Director (Procurement and Primary Energy)	23 Desember 2014 23 December 2014	23 Desember 2019 23 December 2019
Murtaqi Syamsuddin	Direktur (Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi) Director (Planning and Development Affiliates)	8 Maret 2013 8 March 2013	8 Maret 2018 8 March 2018
Nur Pamudji	Direktur Utama President Director	22 Desember 2009 December 22, 2009	22 Desember 2014 December 22, 2014
Moch. Harry Jaya Pahlawan	Direktur (Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan atau DIR (NRK). Director (Commerce, Risk Management, and Compliance) or DIR (NRK)	22 Desember 2009 December 22, 2009	22 Desember 2014 December 22, 2014
Nasri Sebayang	Direktur (Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan) atau DIR (KON) Director (Construction and New Renewable Energy) or DIR (KON)	22 Desember 2009 December 22, 2009	22 Desember 2014 December 22, 2014
Bagiyo Riawan	Direktur (Pengadaan dan Energi Primer) atau DIR (DAN) Director (Procurement and Primary Energy) or DIR (DAN)	22 Desember 2009 December 22, 2009	22 Desember 2014 December 22, 2014
Vickner Sinaga	Direktur (Operasi Indonesia Timur) atau DIR (OP-IT) Director (East Indonesia Operations) or DIR (OP-IT)	22 Desember 2009 December 22, 2009	22 Desember 2014 December 22, 2014
I.G.A. Ngurah Adnyana	Direktur (Operasi Jawa - Bali – Sumatera) atau DIR (OP-JBS) Director (Java-Bali-Sumatra Operations) or DIR (OP-JBS)	22 Desember 2009 December 22, 2009	22 Desember 2014 December 22, 2014
Eddy D. Erningpraja	Direktur (Sumber Daya Manusia dan Umum) atau DIR (SDM) Director (Human Resources and General Affairs) or DIR (SDM)	22 Desember 2009 December 22, 2009	22 Desember 2014 December 22, 2014
Setio Anggoro Dewo	Direktur (Keuangan) atau DIR (KEU) Director (Finance) or DIR (KEU)	22 Desember 2009 December 22, 2009	22 Desember 2014 December 22, 2014

Deskripsi Tugas Masing-Masing Anggota Direksi

Deskripsi lengkap mengenai tugas masing-masing anggota Direktur ditetapkan melalui Keputusan Direksi No.0443K/DIR/2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 023.K/DIR/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja PT PLN (Persero). Adapun deskripsi ringkas tugas masing-masing anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut.

Direktur Utama

Tugas pokoknya adalah memimpin dan mengelola Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan, serta menguasai, memelihara dan mengelola kekayaan Perseroan. Tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam 9 tugas manajerial.

Direktur (Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi)/DIR (REN)

Tugas pokoknya adalah memimpin dan membina Direktorat Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi yang meliputi fungsi perencanaan strategis korporat, perencanaan sistem, perencanaan pengadaan strategis dan enjinering & teknologi, strategi pengembangan bisnis anak perusahaan, investasi dan pembinaan anak perusahaan serta usaha patungan, memastikan Perusahaan mampu tumbuh dan berkembang menuju terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan. Tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam 9 tugas manajerial.

Direktur (Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan)/(DIR NRK)

Tugas pokoknya adalah memimpin dan membina Direktorat Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan meliputi fungsi perencanaan dan kebijakan niaga, manajemen risiko serta kepatuhan untuk memastikan Perusahaan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik dan terarah, sesuai Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) menuju terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan serta tercapainya SLA dengan lembaga terkait. Tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam 7 tugas manajerial.

Direktur (Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan)/DIR (KON)

Tugas pokoknya adalah memimpin dan membina Direktorat Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan meliputi fungsi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan konstruksi pembangkit dan jaringan tenaga listrik, perencanaan dan pelaksanaan implementasi penggunaan energi baru dan terbarukan, dan pelaksanaan administrasi konstruksi untuk memastikan tercapainya tujuan Perusahaan dan dihasilkannya nilai tambah bagi *stakeholders*. Tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam 8 tugas manajerial.

Direktur (Pengadaan dan Energi Primer)/DIR (DAN)

Tugas pokoknya adalah memimpin dan membina Direktorat Pengadaan dan Energi Primer meliputi fungsi pengadaan barang/jasa logistik, pengadaan IPP dan penyelesaian *financial* closing, memantau progress IPP sampai dengan COD, penyediaan energi primer batubara, gas dan BSM, untuk memastikan proses pengadaan barang/jasa logistik dan IPP yang efisien dan efektif, dan terpenuhinya kebutuhan energi primer batubara, gas dan BBM Perusahaan logistik. Tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 9 tugas manajerial.

Job Description of Each Member of Directors

Complete description of each member of Director's duties is determined by Board of Director's decision Number. No.0443K/DIR/2013 on Second Amendment of Board of Director of PT PLN (Persero) Decision Number 023.K/DIR/2012 on Organization and Work Procedure of PT PLN (Persero). The brief description of each member of the Board of Directors of the Company duties are as follows.

President Director

The main duties are leading and managing Company based on Company purposes and objectives, putting efforts continuously in increasing Company efficiency and effectiveness, and controlling, maintaining, and managing Company wealth. These main duties are then defined further in 9 managerial duties.

Director (Planning and Affiliation Development) /DIR (REN)

The main duties are leading and coaching Directorate of Planning and Affiliation Development which covers functions of corporate strategic planning, system planning, strategic procurement and engineering & technology planning, subsidiary business development strategy, investment and subsidiary and joint venture coaching, as well as ensuring that Company is able to grow and develop towards achieving Company Vision, Missions, and Objectives. These main duties are then defined further in 9 managerial duties.

Director (Commerce, Risk Management)/DIR (NRK)

The main duty is leading and coaching Directorate of Commerce, Risk Management, and Compliance which covers functions of commerce planning and policies, risk management, and compliance in order to ensure Company's ability in growing and developing well and directionally, based on Good Corporate Governance (GCG) towards achieving Vision, Missions, and Objectives of Company as well as SLA with related institutions. This main duty is then defined further in 7 managerial duties.

Director (Construction and New Renewable Energy)/DIR (KON)

The main duty is leading and coaching Directorate of Construction and New Renewable Energy which covers functions of planning and execution of power plant and electricity network constructions, planning and implementation of new renewable energy usage, and construction administration execution in order to achieve Company's objectives and produce added value for stakeholders. This main duty is then defined further in 8 managerial duties.

Director (Primary Energy Supply and procurement)/DIR (DAN)

The principal task is to lead and develop the Directorate of Primary Energy Supply and procurement include function of logistics services, IPP procurement and completion of financial closing, monitor IPP progress with COD, the primary energy supply of coal, gas and BSM, to ensure the procurement process of logistics services and efficient and effective IPP, and the requirement for primary energy coal, gas and fuel logistics company. The principal tasks are then elaborated into 9 managerial tasks.

Direktur (Operasi Luar Jawa Bali)/DIR (OP-LJB)
Tugas Pokoknya adalah memimpin dan membina Direktorat Operasi Luar Jawa Bali meliputi fungsi strategi operasional pembangkitan, transmisi, distribusi dan pelayanan pelanggan di Indonesia Timur (di luar wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera) untuk memastikan tercapainya tujuan Perusahaan dan dihasilkannya nilai tambah bagi *stakeholders*. Tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 tugas manajerial.

Direktur (Operasi Jawa-Bali)/DIR (OP-JB)
Tugas pokoknya adalah memimpin dan membina Direktorat Operasi Jawa-Bali-Sumatera meliputi fungsi strategi operasional pembangkitan, transmisi, distribusi dan pelayanan pelanggan di Jawa- Bali-Sumatera untuk memastikan tercapainya tujuan Perusahaan dan dihasilkannya nilai tambah bagi *stakeholders*. Tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 tugas manajerial.

DIrektur (Sumber Daya Manusia dan Umum)/DIR (SDM)
Tugas pokoknya adalah memimpin dan membina Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum meliputi fungsi pengembangan organisasi dan sistem manajemen SDM, pengembangan SDM dan Talenta serta pengelolaan umum dan manajemen Kantor Pusat untuk memastikan terwujudnya organisasi dan sistem SDM serta sinergi seluruh fungsi organisasi mendukung strategi Perusahaan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan. Tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 9 tugas manajerial.

Direktur (Keuangan)/DIR (KEU)
Tugas pokoknya adalah memimpin dan membina Direktorat Keuangan meliputi fungsi keuangan korporat, perencanaan dan pengendalian anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pajak dan asuransi serta pengelolaan sistem informasi untuk memastikan keuangan dan anggaran Perusahaan dikelola secara efektif dan efisien untuk menjamin Perusahaan mampu tumbuh sehat dan berkembang mencapai tujuannya. Tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 8 tugas manajerial

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi *(Board Manual)*

Dalam rangka menjalankan peran dan fungsi pengelolaan perusahaan serta mengelola hubungan dengan Dewan Komisaris, Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*). yang berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dalam *Board Manual* PLN diatur secara khusus dalam Bab II yang mencakup:
1. Ketentuan umum jabatan anggota Direksi
2. Tugas dan wewenang Direksi
3. Hak dan kewajiban Direksi
4. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
5. Pelaksanaan tugas pengurusan Perseroan oleh Direksi
6. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Direksi
7. Rapat Direksi
8. Sekretaris Perusahaan
9. Hubungan dengan Anak Perusahaan.

Director (Outside Java Bali Operations) /DIR (OP-LJB)
The main duty is leading and coaching Directorate of Outside Java Bali Operastions which covers a function of operational strategies of generation, transmission, distribution and customer service in East Indonesia (outside Java, Bali, and Sumatera) in order to ensure that Company's purposes are achieved and added value is produced for stakeholders. This main duty is then defined further in 5 managerial duties.

Director (Java-Bali-Sumatera Operations)/DIR (OP-JBS)
The main duty is leading and coaching Directorate of Java-Bali-Sumatera Operations which covers a function of operational strategies of generation, transmission, distribution and customer service in Java-Bali-Sumatera in order to ensure that Company purposes are achieved and added value is produced for stakeholders. This main duty is then defined further in 5 managerial duties.

Director (Human Resource and General Affairs)/DIR (SDM)
The main duty is leading and coaching Directorate of Human Resource and General Affairs which covers functions of organization development and HR management system, HR and Talents development, and general affairs management and Head Office Management in order to ensure that organization and HR system are realized as well as all organization functions are able to support Company strategies in realizing Vision, Missions, and Objectives of Company. This main duty is then defined further in 9 managerial duties.

Director (Finance)/DIR (KEU)
The main duty is leading and coaching Directorate of Finance which covers functions of corporate finance; budget, treasury, accounting, tax, and insurance planning and control; and information system management in order to ensure that Company finance and budget are managed effectively and efficiently, thus, Company is able to grow and develop healthily in reaching objectives. This main duty is then defined further in 8 managerial tasks.

Board of Directors Employment Guidelines (Board Manual)

In managing company and relationship with Board of Commissioners, Board of Directors refer to Board of Commissioners and Board of Directors Employment Guidelines (Board Manual) which contain work procedures for Board of Commissioners and Board of Directors as well as explanation of activity steps in a structured, systematic, easily understood, and consistent way, therefore, it can be guidelines for Board of Commissioners and Board of Directors in performing each task to achieve Vision and Mission of the Company.

Board of Directors Employment Guidelines are specially stated in Chapter II of PLN's Board Manual which includes:
1. Main Provisions of Board of Directors
2. Board of Directors' Duties and Authorities
3. Board of Directors' Rights and Obligations
4. Division of Directors' Duties and Authorities
5. Execution of Company management duties by Board of Directors
6. Board of Directors' Decision Making Principles
7. Board of Directors Meeting
8. Corporate Secretary
9. Relationship with Subsidiaries

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Tugas Direksi

Tugas pokok Direksi adalah:

1. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan; dan
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas itu, wewenang Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan diatur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wewenang Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris adalah:
   - Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
   - Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, Kontrak Manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah, Bangun Milik Serah, Bangun Serah Guna dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan RUPS;
   - Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan PT PLN (Persero), dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
   - Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
   - Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan lima tahun;
   - Menetapkan struktur organisasi satu tingkat di bawah Direksi;
2. Pelaksanaan wewenang Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari RUPS, adalah:
   - Mengalihkan kekayaan perusahaan; atau
   - Menjadikan jaminan utang kekayaan perusahaan, yang nilainya lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perusahaan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Transaksi ini adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih perusahaan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku.
3. Pelaksanaan wewenang Direksi yang dapat dilakukan setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS, yakni:
   - Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
   - Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;
   - Mendirikan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
   - Melepaskan penyertaan modal pada Anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
   - Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak usaha
   - Mengikat perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);
   - Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah, Bangun Milik Serah, Bangun Serah Guna dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan Rapat Umum Pemegang Saham;

Board of Directors' Duties, Responsibilities, and Authorities

Directors' Duties

Directors' main duties are:

1. Leading and managing Company based on Company's purposes and objectives as well as putting efforts continuously in increasing Company efficiency and effectiveness; and
2. Controlling, maintaining, and managing Company wealth.

In performing those duties, according to Company Articles of Association, Board of Directors possess authorities which are:

1. Implementation of Directors' authorities which require written approval from Board of Board of Commissioners comprises:
   - Mortgaging fixed assets to obtain short-term credit;
   - Holding cooperation with other business or entities in form of licensing, management contract, asset leasing, Cooperative operations (KSO), Build Operate Transfer, Build Own Transfer, Build Transfer Operate, and other cooperation with fixed value or time frame as ratified by GMS;
   - Receiving or providing medium/long-term loans, except for loans (debt or receivables) which occur due to business transaction and loans given to PT PLN (Persero) subsidiaries and reported to Board of Commissioners;
   - Writing off any stuck account payable and provisions of goods from books;
   - Writing down movable fixed assets with a generally fair economic life of up to five years applicable in the industry.
   - Defining organization structure which is one level under Board of Directors;
2. Implementation of Board of Directors' authorities which requires approval from GMS consists of:
   - Transferring company assets or
   - Pledging company assets with a value exceeding 50% of the total net value of the company in one or more transactions, whether the transactions are related or not. Such transactions are transactions which transfer the net value of the company occurring in one financial year.
3. Implementation of Board of Directors' authorities which require written response from Board of Commissioners and approval from GMS consists of:
   - Using fixed assets to gain medium/long-term credit;
   - Undertaking equity investments in other companies;
   - Establishing subsidiaries and/or joint ventures;
   - Redeeming equity investments to subsidiaries and/or joint ventures;
   - Conducting mergers, consolidation, takeovers, separations, and dissolution of subsidiaries
   - Warranting the company in surety (borg or avalist)
   - Holding cooperation with other business or entities which include contract management license, assets leasing, Operation Cooperation (KSO), Build Operate Transfer, Build Own Transfer, Build Transfer Operate, and other cooperation with a value or time frame exceeding that ratified by General Meeting of Shareholders;

- Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
- Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perusahaan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 tahun;
- Menetapkan *blue print* organisasi perusahaan;
- Menetapkan dan mengubah logo perusahaan;
- Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;
- Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yang berdampak bagi perusahaan;
- Membebankan biaya perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan; dan
- Mengusulkan wakil perusahaan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

- Re-billing stuck account payable which have been written off;
- Redeeming and writing off company fixed assets, except for movable fixed assets with a fair economic life as applicable in the industry in general of up to five years;
- Setting the blue print of company organization;
- Setting and changing company logo;
- Conducting other actions and those which has not been ratified in GMS;
- Establishing foundations, organizations, and/or associations whether they are directly or indirectly related to company or can affect the company;
- Charging fixed and routine company costs for foundation, organization, and/or association activities, whether they are related directly or indirectly to company; and
- Proposing a company representative to become the candidate of Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries which give significant contribution to the company and/or has strategic value as defined in General Meeting of Shareholders.

Tugas pokok Direksi adalah memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional; dan menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan dalam rangka meningkatkan level kinerja pada setiap periode operasional dan memastikan pencapaian tujuan.

Board of Directors' main duties are to lead and manage Company according to Company purposes and objectives, increase operational efficiency and effectiveness; and to control, maintain, and manage Company assets on the means of improving performance level in every operational period and ensuring objectives achievement.

Hak dan Kewajiban Direksi

Hak dan kewajiban Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berhak untuk:

1. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus perusahaan;
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun dan jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan rapat umum Pemegang Saham;
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain atau badan lain; dan
5. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Directors' Rights and Obligations

Board of Directors' rights and obligations are stated in Company's Articles of Association.

In performing their main duties, Board of Directors have rights to:

1. Establish policies in leading and managing company;
2. Organize provisions regarding company employees including setting the value of salaries, pensions, and other income for company employees based on laws and regulations and general meeting of Shareholders decision;
3. Appoint and dismiss company employees based on company employee regulations and applicable laws and regulations;
4. Manage transfer of Directors' power to one or several members of Board of Directors who are specially appointed or to one or several company employees, either individually or together or to other people or bodies to represent company in and out of court.
5. Perform other actions, related to either management or ownership based on provisions stated in articles of association and ratified by general meeting of Shareholders according to applicable laws and regulations.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perusahaan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan termasuk rencana–rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan;
3. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelazimannya yang berlaku bagi suatu perusahaan;
4. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
5. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta Pemegang Saham;
7. Menyiapkan susunan organisasi perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
8. Menyiapkan neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Menjalankan kewajiban - kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

In performing their main duties, Board of Directors are obliged to:

1. Make every effort and guarantee business operation and company activities based on company purposes and objectives as well as business activities;
2. Prepare company development plan, work plan, and annual budget as well as other plans which are related to business operation and company activities at the scheduled time; and submit them to Board of Commissioners and Shareholders to be communicated further in general meeting of Shareholders to obtain ratification;
3. Establish and maintain company records and administration based on applicable norms in the company;
4. Organize accounting system based on financial accounting standards and internal control principles, especially administration, records, storage, and monitoring;
5. Report accountability and all information regarding company condition and operation in form of annual report which includes annual accounts to general meeting of Shareholders;
6. Submit routine report based on method and time in applicable provisions as well as other reports as requested by Shareholders;
7. Prepare a complete company organization structure and its job description details.
8. Prepare balance sheets and income statement for Minister of Law and Human Rights of Indonesia which have been ratified in General Meeting of Shareholders based on laws and regulations; and
9. Perform other obligations based on provisions stated in articles of association and ratified in General Meeting of Shareholders according to laws and regulations.

Rapat Rutin Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi. Keputusan - keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan Rapat Direksi, asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi.

Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui Rapat Direksi sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar, yaitu:
   - Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi;
   - Kewenangan yang memerlukan persetujuan Komisaris; dan
   - Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS.
2. Tindakan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan; dan
3. Tindakan Strategis lainnya, dengan batasan:
   - Bersifat strategis/signifikan mempengaruhi operasional perusahaan;
   - Di luar rencana dalam RKAP;
   - Bersifat mendesak; dan
   - atau, menyangkut pegawai dalam jabatan strategis.

Board of Directors Routine Meeting

Board of Directors Meeting is a meeting which is held by Board of Directors. Decisions which bind can be made without holding any Board of Directors Meeting, but written decision should be approved and signed by all members of Board of Directors.

Board of Directors determine several following issues which require decision making through Directors Meeting:

1. Actions related to implementation of authority in accordance with provisions in Articles of Association, namely:
   - Authorities which require Directors' approval;
   - Authorities which require Commissioners' approval; and
   - Authorities which require GMS approval.
2. Actions associated with Goods and Service Procurement in accordance with applicable regulations in Company; and
3. Other Strategic Actions, with limitations as follows:
   - Tend to influence company operation strategically/ significantly.
   - Outside the plans set in GMS;
   - Urgent; and
   - Or, involving employees in strategic position.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Rapat Direksi harus dilaksanakan secara berkala dan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Direksi PT PLN (Persero) memutuskan untuk mengadakan Rapat Direksi secara rutin setiap hari Selasa.

Selain rapat rutin tersebut, dapat dilaksanakan juga rapat tambahan sesuai kebutuhan yang mendesak dan memerlukan keputusan segera. Rapat Direksi dihadiri oleh Direksi berikut seluruh jajaran pejabat yang terkait, dan kehadiran Direksi dalam rapat tersebut harus bersifat kuorum.

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Rapat yang dilakukan melalui sarana elektronik harus senantiasa direkam dan dibuatkan risalahnya sebagai sarana tertib administrasi dan dokumentasi hukum.

Kehadiran Direktur dalam Rapat Direksi dan Hasil Rapat Direksi

Jumlah Rapat Direksi pada tahun 2014 adalah 51, dengan ringkasan tingkat kehadiran masing-masing Direktur sebagai berikut:

In accordance with SOE State Minister Regulation No. PER-01/MBU/2011, Directors Meeting should be held routinely and at least once in a month. Board of Directors of PT PLN (Persero) decided to hold directors meeting every Tuesday.

Apart from routine meeting, additional meetings can be held based on urgent needs which require an immediate decision. A Director Meeting is participated by Board of Directors and all related officials. The attendance of Directors in the meeting must be a quorum.

Board of Directors Meeting can be conducted via teleconference, video conference or other electronic media which enable all participants to see and listen each other directly and participate in meeting.

Meeting conducted via electronic media should always be recorded and compiled in minutes of meeting as administration obligation and legal documentation.

Directors' Attendance in Board of Directors Meeting and Results of Board of Directors Meeting

There were 51 Board of Directors Meetings in 2014, with an attendance summary of each Board of Director as follows:

Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi Tahun 2014
Board of Directors' Attendance in 2014 Directors Meeting

Keterangan Description	DIRUT	DIR (KEU)	DIR (DAN)	DIR (KON)	DIR (REN)	DIR (OP-JBS)	DIR (NRK)	DIR (OP-IT)	DIR (SDM)	Total Rapat Meeting Frequency	Description
Hadir	48	42	46	44	44	44	42	45	42		Presence
Absen	3	9	5	7	7	7	9	6	9	51	Absence
Persentase	94%	82%	90%	86%	86%	86%	82%	88%	82%		Percentage

Hasil Rapat Direksi Tahun 2014

1. Bidang Operasional
   - Pembangunan PLTG / PLTGU 1.000 MW dan berbagai PLTU dan PLTG lain di Jawa-Bali dan Sumatera.
   - Upaya meningkatkan pasokan daya dari PLTP, termasuk pembangunan PLTP Sarulla, Wayang Windu, dan sebagainya.
   - Peningkatan penggunaan CNG *peaker* menggantikan PLTD *peaker*.
   - Pembahasan mengenai risiko penggunaan konten lokal di PLTU Sumsel 9 dan 10.
   - Formulasi solusi penyelesaian pembangunan PLTU Batang dengan teknologi supercritical berkapasitas 2 x 1.000 MW.

Results of 2014 Directors Meeting

1. Operational
   - Establishment of gas power plant/combine cycle power plant 1,000 MW and other several gas power plant/combine cycle power plant in Java-Bali and Sumatera
   - Effort to increase electric power from Geothermal power plant, include Geothermal power plant Sarulla, Wayang Windu, and others.
   - Increasing of CNG peaker usage replace diesel power plant peaker.
   - Discuss on local content usage risks in steam power plant South Sumatera 9 and 10.
   - Formulation of steam power plant Batang construction with supercritical technology with a capacity of 2 x 1,000 MW.

- Pelaksanaan lelang pembangunan SUTET 500 kV Sumatera tahap 1 Sumatera bekerjasama dengan BUMN lain
- Pelaksanaan lelang pembangunan saluran transmisi dan distribusi di Jawa, Bali dan Sumatera.
- Penyelesaian lelang pembangunan kabel laut antara Jawa dengan Sumatera.
- Formulasi penyelesaian pembangunan pembangkit FTP – 1 yang masih terkendala.
- Penyelesaian pasokan gas untuk PLTG di Sumatera guna menghindari kekurangan pasokan listrik.
- Pembentukan Tim Kajian eveluasi Program SEHEN dan tindak lanjut bagi perluasan program SEHEN diunit-unit lain.
- Realisasi implementasi EAM di seluruh unit kerja.
- Kerjasama pemanfaatan energi baru terbarukan dengan berbagai pihak.
- Perluasan penggunaan bahan bakar nabati untuk pembangkit listrik di daerah Kalimantan dan Sumatera.
- Perluasan pembangunan sistem kabel laut Jawa Bali.
- PLN akan mengkaji terkait dengan pembentukan Anak Perusahaan Properti.
- PLN mulai melakukan kerjasama komersialisasi (layanan listrik pintar 2 arah), dimana PLN bekerjasama dengan operator telekomunikasi dan teknologi provider.
- PLN melakukan pembelian LNG dari BP Tangguh

2. Bidang Keuangan
   - Program Pendanaan Tahun 2014.
   - Penyediaan pendanaan bank untuk pembangunan pembangkit dan sistem transmisi/distribusi
   - Evaluasi dan penyusunan prosedur penghapusan aset non produktif untuk mendukung tambahan pendapatan lain-lain.
   - Penambahan modal disetor untuk perusahaan afiliasi dan entitas anak usaha.
   - Pembahasan kebutuhan investasi untuk tahun anggaran 2014 – 2015.
   - Pemanfaatan saluran transmisi untuk mendukung ketersediaan dan penjualan listrik dari IPP
   - PLN menerapkan ISAK 27 dalam Laporan Keuangan PLN 2014
   - PLN Mengusulkan Pengalihan Pendanaan dari APBN ke APLN untuk proyek berkategori Krisis kepada Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

3. Bidang GCG
   - Pelaksanaan pengadaan menggunakan PERDIR 620 Tahun 2013.
   - Pembahasan dan evaluasi dalam rangka penyusunan ulang Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan

- Implementation of construction bidding of SUTET with 500 kV high-voltage phase 1 Sumatra in cooperation with other state-owned enterprises
- Implementation of construction bidding of transmission and distribution network in Java, Bali and Sumatera.
- Completion of construction bidding of submarine cables between Java and Sumatra.
- Formulation of power plant construction completion FTP - 1 are still constrained.
- Completion of the gas supply for power plant in Sumatra in order to avoid a power shortage.
- Formation of Evaluation Study Team SEHEN program and follow-up for expansion of SEHEN program in other units.
- Realization of EAM implementation throughout the unit.
- Cooperation of renewable energy utilization with various parties.
- Expansion of biofuels usage for power plants in Kalimantan and Sumatra.
- Expansion of submarine cable systems of Java and Bali.
- PLN will review related to the establishment of the Subsidiary Property.
- PLN begins commercialization working (smart electric service 2-way), where PLN in cooperation with telecom operators and technology providers.
- PLN purchases LNG from BP Tangguh

2. Finance
   - Funding Program 2014.
   - Provision of bank financing for the construction and transmission / distribution system
   - Evaluation and preparation procedures for the elimination of non-productive assets to support additional income.
   - The addition of the paid up capital for affiliated companies and its subsidiary entities.
   - Discussion on investment needs for fiscal year 2014-2015.
   - Utilization of the transmission line to support the availability and electricity sale from IPP
   - PLN applies ISAK 27 in PLN Financial Report 2014
   - PLN Proposes Funding Transfer from the state budget to APLN for category Crisis on Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Finance.

3. GCG
   - Procurement implementation use Director Regulation 620 year 2013.
   - Discussion and evaluation in order rearrangements of Corporate Governance Guideline

- Pembahasan dan evaluasi dalam rangka penyusunan ulang Buku Board Manual Perusahaan.
- Pembahasan dan penyusunan Code of Ethics.
- Sosialisasi Board Manual, Pedoman Tata Kelola dan Code of Ethics.
- Penguatan sistem pelaporan pelanggaran.
- Kerjasama dengan penegak hukum, KPK dan BPKP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
- Tindak lanjut program PLN Bersih.
- PLN memberlakukan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0355.K/DIR/2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT PLN (Persero) termasuk Anak perusahaan.

4. Bidang Sumber Daya Manusia
   - PLN berencana melakukan perekrutan pegawai difabel
   - Perkembangan Organisasi Unit Induk Pembangunan.
   - Pengembangan SDM dan Organisasi.
   - Penyesuaian Kewenangan dan Organisasi
   - Pengelolaan Kesehatan Karyawan.
   - Pengembangan Manajemen Kinerja.
   - Pengembangan PLN Corpu sebagai pusat *Knowledge Center* PLN.

- Discussion and evaluation in order rearrangements of Company Board Manual Book.
- Discussion and preparation of the Code of Ethics.
- Socialization of Board Manual, Governance Guidelines and Code of Ethics.
- Strengthening the whistleblowing system.
- Cooperation with law enforcement, KPK and BPK in order to improve accountability for implementing the task.
- Follow-up PLN Bersih program.
- PLN applies Director's regulation of PT PLN (Persero) Number 0355.K/DIR/2014 on Environmental Risk Management in PT PLN (Persero) including Subsidiaries.

4. Human Resources
   - PLN plans to recruit workers with disabilities.
   - Organizational Development of Establishment Primary Unit.
   - Human Resources and Organizational Development.
   - Adjustment Authority and Organization.
   - Employee Health Management.
   - Development of Performance Management.
   - PLN Corpu development as a Konwledge Center of PLN.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Bisnis Antara Dewan Komisaris dan Direksi

Tidak terdapat hubungan keluarga di antara sesama anggota Dewan Komisaris, sesama anggota Direksi, dan di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Demikian juga tidak ada hubungan bisnis di antara sesama anggota Dewan Komisaris, sesama anggota Direksi, di antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi dengan PLN.

Family Relationship and Business Relationship Among Board of Commissioners and Directors

There are no family relationship among Board of Commissioners, Board of Directors, and between Board of Commissioners and Board of Directors. Moreover, there are no business relationship among Board of Commissioners, Board of Directors, and between board of Commissioners and Board of Directors, as well as between Board of Commissioners/Directors and PLN.

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial relations with						Hubungan Keuangan dengan Financial relations with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris Board of Commissioner												
Chandra M. Hamzah		√		√		√		√		√		√
Oegroseno		√		√		√		√		√		√
Darmono		√		√		√		√		√		√
Harry Susetyo Nugroho		√		√		√		√		√		√
Zulkifli Zaini		√		√		√		√		√		√
Andin Hadiyanto		√		√		√		√		√		√
Budiman		√		√		√		√		√		√
Hasan Bisri		√		√		√		√		√		√
S. Milton Pakpahan		√		√		√		√		√		√
Direksi Board of Director												
Sofyan Basir		√		√		√		√		√		√
Nicke Widyawati		√		√		√		√		√		√
Supangkat Iwan Santoso		√		√		√		√		√		√
Amin Subekti		√		√		√		√		√		√
Nasri Sebayang		√		√		√		√		√		√
Amir Rosidin		√		√		√		√		√		√
Murtaqi Syamsuddin		√		√		√		√		√		√
Sarwono Sudarto		√		√		√		√		√		√

Prosedur dan Penetapan Besarnya Remunerasi Direksi

Remunerasi Komisaris dan Direksi dikaji oleh Dewan Komisaris. Hasil kajian melibatkan konsultan independen yang kompeten di bidangnya. Kajian tersebut mempertimbangkan beberapa faktor utama, antara lain komitmen waktu, pencapaian target sesuai *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi, serta imbal jasa yang terkait dengan tanggung jawab atas tindakan masing-masing yang mengandung risiko bagi pribadi masing-masing.

Board of Directors' Remuneration Determination Procedure

Board of Commissioners' and Board of Directors' remuneration is assessed by Board of Commissioners. This assessment involves competent independent consultant and considers several main factors, such as time commitment, target achievement based on key performance index (KPI) set by Board of Commissioners and Board of Directors, as well as reward related to responsibility of each risky actions for each individual.

Bagan ringkas penetapan remunerasi Direksi adalah sebagai berikut:

The following diagram illustrates the procedure of setting the amount of Directors' remuneration.

Komite Manajemen Risiko • Mendapatkan masukan dari Konsultan Independen dalam menetapkan dasar penentuan remunerasi • Konsultan Independen memberi masukan berdasarkan: • Peraturan Menteri BUMN no PER-04/MBU/ 2014 tgl 10 Maret 2014 pasal 5 • Survey Remunerasi Industri sejenis dan faktor Industri • Beban Tugas dan Tanggung Jawab • KPI Direksi • Kemampuan / Kesehatan Keuangan Perusahaan	**RMC** • Receive inputs from independent consultant in deciding bases of remuneration. • Independent consultant provides input based on: • SOE Minister Regulation No. Per-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 art. 5 • Survey of similar industry remuneration and industry factors • Workload and responsibilities • Board of Directors' KPI • Company Financial Ability / Health
Komite Manajemen Risiko Mengusulkan dasar dan besaran Remunerasi kepada Dewan Komisaris (DK)	**RMC** • Propose the bases and amount of Remuneration to Board of Commissioners (BoC)
Dewan Komisaris Membahas usulan KMR dan mengusulkan besaran remunerasi kepada Pemegang Saham	**BoC** • Discuss RMC suggestion and propose amount of remuneration to Shareholders
Rapat Umum Pemegang Saham Melimpahkan ketentuan penetapan gaji dan tantiem Direksi kepada Dewan Komisaris sesuai arahan Pemegang Saham	**GMS** • Transfer Board of Directors' salary and tantiem establishment provisions to BoC as directed by Shareholders.
Dewan Komisaris Menjalankan mandat untuk menentukan besaran gaji dan tantiem anggota Direksi	**BoC** • Execute mandate to decide the amount of salary and tantiem of Directors
Gaji dan Tantiem Anggota Direksi	Directors' Salary and Bonus (Tantiem)

KMR: Komite Manajemen Risiko
DK : Dewan Komisaris

RMC: Risk Management Committee (RMC)
BoC : Board of Commissioners (BoC)

Remunerasi Direksi

Penetapan besaran remunerasi, yang terdiri dari komponen gaji, tunjangan dan tantiem Direksi didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Direksi juga mendapatkan tunjangan dan fasilitas lain yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PLN No. 0309.K/DIR/2014, tanggal 20 Juni 2014 yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Adapun rincian remunerasi Direksi, yang meliputi gaji, tunjangan tetap dan tidak tetap serta fasilitas non kas lain sesuai keputusan RUPS 2014 adalah sebagai berikut.

Directors' Remuneration

Determination of the amount Board of Directors' remuneration which consists of salary, allowances, and bonus (tantiem) refers to SOE Minister Regulation No. PER-04/MBU/2014, March 10, 2014.

Board of Directors also receive allowances and other facilities determined in PLN Directors Decree No. 0309.K/DIR/2014, June, 20 2014 which refers SOE Minister Regulation PER-04/MBU/2014, March 10, 2014.

According to 2014 GMS Decision, details Board of Directors' remuneration which includes salary, fixed and non-fixed allowances, as well as non cash facilities are as follows.

Jenis Penghasilan Type of Income	Putusan RUPS/ Menteri (dalam Rupiah) Decree of GMS/Minister (in Rupiah)		Keterangan Description
	Direktur Utama President Director	Direksi Board of Director	
GAJI SALARY	175.000.000.00	157.500.000.00	a. Direktur Utama: 100 % b. Direktur : 90 % dari Dirut a. President Director : 100 % b. Board of Director : 90 % from President Director
TUNJANGAN ALLOWANCE			
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1 (satu) bulan gaji 1 (one) month salary	1 (satu) bulan gaji 1 (one) month salary	
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	27.500.000.00	27.500.000.00	Diberikan apabila tidak menggunakan fasilitas rumah jabatan It is given if not using home office facility
Tunjangan Biaya Utilitas Utility Allowance	6.300.000.00	6.300.000.00	
Asuransi Purna Jabatan Life Insurance	Premi yang ditanggung 25% dari Gaji dalam satu tahun Premi is covered 25% of salary in one year		
FASILITAS FACILITY			
Fasilitas Kendaraan Dinas Vehicle facility	1 (satu) unit 1 (one) unit	1 (satu) unit 1 (one) unit	
Fasilitas Kesehatan Health facility	1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 tahun 1 wife and 3 children aged up to 25 years	1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 tahun 1 wife and 3 children aged up to 25 years	
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Support Facility	diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku It is given in accordance with the provisions of the legislation		
Fasilitas Club Membership Membership club facility	dapat diikutsertakan 2 (dua) keanggotaan Club Membership yaitu Business Club atau Sport Club can be included 2 (two) Membership Club which are Business Club or Sports Club		
Fasilitas Komunikasi Communication Facility	biaya komunikasi ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan costs covered entirely by the company		
Corporate Credit Card Corporate Credit Card	1 (satu) kartu kredit untuk keperluan menjamu tamu dinas Perseroan atau biaya representasi kedinasan lainnya 1 (one) credit card for entertaining guests of company or other official representation expenses		Pemakaian untuk keperluan pribadi tidak ditanggung oleh Perseroan Personal usage is not covered by the company
Pakaian Seragam Uniform	2 (dua) stel setiap 1 (satu) tahun 2 (two) sets every 1 (one) year		

Sementara remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi untuk tahun operasional 2014 adalah sebagai berikut.

Meanwhile, the amount of remuneration obtained by each Board of Director in operational year of 2014 is as follows.

Remunerasi Direksi Tahun 2014 (dalam Rupiah)
Board of Directors Remuneration in 2014

Nama Name	Jabatan Position	Honorarium / Gaji Honorarium/ Salary	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Biaya Utilitas	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Tunjangan Cuti Besar (Tahun 2014) Leave Large Allowance (2014)	Tanggungan PPh Ps 21 Income Tax Art. 21 Allowance	Total
Nur Pamudji	Direktur Utama President Director	2.100.000.000	-	-	175.000.000	160.000.000	663.980.000	3.098.980.000
Ngurah Adnyana	Direktur Director	1.890.000.000	330.000.000	75.600.000	157.500.000	144.000.000	714.432.500	3.311.532.500
Moch. Harry Jaya Pahlawan	Direktur Director	1.890.000.000	330.000.000	75.600.000	157.500.000	144.000.000	713.825.000	3.310.925.000
Vickner Sinaga	Direktur Director	1.890.000.000	330.000.000	75.600.000	157.500.000	144.000.000	712.610.000	3.309.710.000
Nasri Sebayang	Direktur Director	1.890.000.000	330.000.000	75.600.000	157.500.000	144.000.000	714.432.500	3.311.532.500
Bagiyo Riawan	Direktur Director	1.890.000.000	330.000.000	75.600.000	157.500.000	144.000.000	713.825.000	3.310.925.000
Murtaqi Syamsuddin	Direktur Director	1.890.000.000	330.000.000	75.600.000	157.500.000	144.000.000	713.825.000	3.310.925.000
Eddy D. Erningpraja	Direktur Director	1.890.000.000	-	-	157.500.000	144.000.000	590.930.000	2.782.430.000
Setio Anggoro Dewo	Direktur Director	1.899.000.000	291.000.000	75.600.000	187.500.000	144.000.000	713.217.500	3.310.317.500
	Jumlah (B)	17.229.000.000	2.271.000.000	529.200.000	1.465.000.000	1.312.000.000	6.251.077.500	29.057.277.500

Asesmen Kinerja Direksi

Pihak yang melakukan asesmen terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Audit. Hasil asesmen kemudian menjadi catatan untuk dibahas dalam RUPS dan menjadi dasar bagi perpanjangan maupun perubahan posisi tugas Direktur di jajaran Direksi.

Dasar penilaian dalam pelaksanaan asesmen kinerja Direksi adalah KPI Direksi / KPI Korporat yang ditetapkan bersama-sama dengan Dewan Komisaris pada awal periode kepengurusan. KPI tersebut pada dasarnya adalah besaran kualitatif maupun kuantitatif dari RKAP yang menjadi tujuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran kegiatan.

Pada akhirnya, pihak yang menjadi penilai dari capaian KPI Direksi adalah RUPS. Melalui RUPS Direksi bersama Komisaris mempertanggungjawabkan raihan kinerja KPI korporat pada tahun operasional. Dalam pertanggungjawaban tersebut, Direksi harus mampu menjabarkan kaitan raihan KPI dengan kondisi lapangan dan respon operasional yang dijalankan oleh Direksi. Adapun Dewan Komisaris memberi penjelasan dan mempertanggungjawabkan aspek pengawasan dan penasehatan yang telah dilaksanakan selama tahun operasional.

KPI Direksi

Mengacu pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) No. RIS-07/D2.MBU/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014, maka penilaian Tingkat Kesehatan PT PLN (Persero) terhitung tahun 2012, mencakup 5 perspektif KPI berbasis Malcolm Baldridge kiriteria Penilaian Kinerja Unggul (PKU) sesuai Kontrak Manajemen yang meliputi perspektif Fokus pelanggan, efektivitas produk dan proses, Fokus Tenaga Kerja, Keuangan dan Pasar, Kepemimpinan dan Tatakelola.

Evaluasi atas pencapaian kinerja perusahaan dilakukan oleh Satuan Pengendalian Kinerja Korporat.

Adapun pencapaian kinerja Perusahaan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Board of Directors' Performance Assessment

The entity who assesses Board of Directors' performance is Board of Commissioners supported by Audit Committee. The result of assessment will then become notes which are going to be discussed in GMS and become the bases of extension or changes in Directors' duties in Board of Directors.

The base of Board of Directors' performance assessment is Board of Directors' KPI / Corporate KPI which is determined together with Board of Commissioners in the beginning of tenure. Basically, KPI is a qualitative and quantitative scale from RKAP which becomes the objectives of activity budget planning and execution.

Eventually, GMS is the evaluator of Board of Directors' KPI achievement. In GMS, Board of Directors, together with Board of Commissioners, report their accountability in achieving Corporate KPI performance in an operational year. In this accountability, Board of Directors should be able to explain relationship between KPI achievement and field condition as well as operational response taken by Board of Directors. Moreover, Board of Commissioners give explanation and account for supervisory and advisory aspects which have been conducted during operational year.

Board of Directors' KPI

In accordance with General Meeting of Shareholders (GMS) of PT PLN (Persero) Minutes No. RIS-07/D2.MBU/2014 dated Januari 17, 2014 regarding Ratification of 2012 Company Work Plan and Budget (RKAP), the evaluation of Health Level of PT PLN (Persero) starting from 2014 Including Malcom Baldridge-based KPI evaluation criteria as stated in the Management Contract, which covers 5 perspective of Customer Focus, Product and Process, Effectiveness, Human Resources Focus, Financial and Marketplace, Leadership and Governance.

The evaluation of company performance achievement is held by Corporate Performance Control Unit.

Company performance achievements in 2014 are as follows:

Perspektif	Nilai Score	Perspective
Fokus Pelanggan	16,61	Customer Fokus
Efektivitas Produk dan Proses	14,79	Product and Process Effectively
Fokus Tenaga Kerja	17,00	Work Focus
Keuangan dan Pasar	23,26	Financial and Market
Kepemimpinan dan Tata Kelola	16,38	Leadership
Jumlah	88,28	Total

Adapun gambaran KPI Direksi / Korporat untuk tahun 2014 selengkapnya adalah sebagai berikut.

The following table shows 2014 Board of Directors' / Corporate KPI.

Indikator KPI	Satuan Unit	Bobot Target 2014 Target 2014	Target	Realisasi Realization	Pencapaian 2014 Achievement 2014	Nilai Value	Keterangan Description	Indicator of KPI
Fokus Pelanggan		22				16,6		Customer Focus
Kepuasan Pelanggan	%	6	88,0	88,3	100%	6,0	Baik Good	Customer Satisfaction
Penambahan jumlah pelanggan	Juta Pelanggan Million Customer	3	3,48	3,50	100%	3,0	Baik Good	Increasing total customer
Kehandalan Jaringan								network reliability
SAIDI	Menit/Pelanggan Minute/Customer	6	230,00	349	48%	2,9	Masalah	SAIDI

Indikator KPI	Satuan Unit	Bobot Target 2014 Target 2014	Target	Realisasi Realization	Pencapaian 2014 Achievement 2014	Nilai Value	Keterangan Description	Indicator of KPI
SAIFI	Kali/Pelanggan	7	4,20	5,6	67%	4,7	Masalah	SAIFI
Efektivitas Produk dan Proses		20				14,8		Effectiveness of Product and Process
Fuel Mix BBM Termasuk IPP	%	6	9,35	11,37	78%	4,7	Masalah	Fuel Mix BBM include IPP
Penambahan Kapasitas Pembangkit (COD)	GW	5	4,64	1,93	42%	2,08	Masalah	Additional power plant capacity (COD)
Pengendalian Kapasitas Pembangkit Sewa BBM	GW	2	4,38	3,18	127%	2	Baik	Controlling Lease Power Plant Fuel Capacity
EAF PLTU	%	4	86,70	74,6	86%	3,4	Masalah	EAF steam power plant (PLTU)
Susut Jaringan	%	3	8,50	9,71	86%	2,6	Masalah	Network Losses
Fokus Tenaga Kerja		17				17,0		Labor Focus
Human Capital Readiness	Level	4	3,50	3,64	104%	4,0	Baik	Human Capital Readiness
Organization Capital Readiness	Level	3	3,50	3,56	102%	3,0	Baik	Organization Capital Readiness
Pelaksanaan Performance Based Remuneration	%	10	100,00	100,00	100%	10,0	Baik	Performance Based Remuneration Implementation
Keuangan dan Pasar		24				19,3		Market and Finance
Pengendalian Biaya Non Fuel *)	Rp/kWh	6	217,3	208,7	104%	6,0	Baik	Controlling Non Fuel Cost *)
Pengendalian BPP (Biaya Pokok Penyediaan) *)	Rp/kWh	8	1,347	1.424	94%	7,54	Masalah	Controlling basic cost production (BPP) *)
EBITDA Margin *)	%	2	21,80	26,0	119%	2,0	Baik	Margin EBITDA *)
DSCR *)	Kali	4	1,54	1,56	101,3%	4,0	Baik	DSCR *)
Pencapaian Investasi								Investment Achievement
Program (Realisasi program terkontrak UIP) tanpa luncuran	%	2	100,00	100,00	100%	2,0	Baik	Program (Contracted Actual Program UIP) without distribution
Fisik (realisasi bayar/pagu disburse)	%	2	75,00	65	86%	1,7	Masalah	Physical (disburse realization)
Kepemimpinan dan Tata Kelola		17				16,4		Governance and Leadership
Tata Kelola Perusahaan								Good Corporate Governance
Peningkatan tingkat proper unit	Unit	2	6,00	9	150%	2	Baik	Increasing Unit Proper Level
Skor Penilaian Kinerja Unggul BUMN	Skor	3	500,00	566	113%	3,0	Baik	Superior Performance Assessment Score of SOE
Skor GCG	Skor	3	85,00	84,62	100%	3,0	Baik	GCG Score
Pengelolaan risiko	Level	3	3,50	3,31	95%	2,8	Masalah	Risk Management
Pemenuhan Portal BUMN	%	2	100	77,5	77,5%	1,55	Masalah	Fulfillment Portal of SOE
Penyelesaian temuan auditor (BPK)	%	4	100,00	100,0	100%	4,0	Baik	The completion of auditor's findings (BPK)
TOTAL PENILAIAN KINERJA		100				88,04		TOTAL PERFORMANCE ASSESSMENT

Program Pelatihan Direksi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, PLN memfasilitasi anggota Direksi untuk mengikuti berbagai pelatihan, seminar maupun lokakarya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Beberapa program sejenis yang sempat diikuti oleh anggota Direksi, mencakup:

Board of Directors Training Program

In order to increase knowledge and competencies, PLN provides various trainings, seminars, workshops for Board of Directors. Various similar programs which were participated by Directors include:

Direksi Board of Director	Pelatihan Training		
	Tanggal Date	Tempat Location	Judul Title
Direktur (Keuangan) Director (Finance)	18 Mei s.d 22 Mei 2014 May 18 - May 22, 2014	Harvard Business School, California	Leadership For Senior Executives

Direksi Board of Directors	Pelatihan Training		
	Tanggal Date	Tempat Place	Judul Title
Nur Pamudji DIRUT	12-15 Agustus August 2013	Crotonville, New York, USA	Customer Leadership Education Global Summit (GCS)
Vickner Sinaga DIR (OP-IT)	2 November 2013	The Dharmawangsa – Grha Bimasena - Jakarta	Pilihan Penyelesaian Sengketa Bisnis yang Bermartabat
Setio Anggoro Dewo DIR (KEU)	02 Desember December s.d. 07 Desember December 2013	Harvard Business School Boston	Executive Program Authentic Leadership Development
Bagiyo Riawan DIR (DAN)	12-15 Agustus August 2013	Crotonville, New York, USA	Customer Leadership Education Global Summit (GCS)

Komite dan Laporan Komite Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris membentuk Komite-komite yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris terutama Komite Audit.

Keanggotaan Komite tersebut terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Anggota Komite Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan BUMN, Dewan Komisaris PLN telah membubarkan Komite GCG (KGCG) dan Komite Nominasi & Remunerasi (KNR), sehingga Komite Komisaris yang masih bertugas saat ini adalah Komite Audit (KA) dan Komite Manajemen Risiko (KMR).

Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit masing-masing telah memiliki Piagam Komite yang berisikan tugas pokok dan kewenangan komite.

Committees and Board of Commissioners' Committee Reports

In accordance with company articles of association, Board of Commissioners form committees, especially Audit Committee as a supporting function in performing supervision task.

The committee consists of one or more members of Board of Commissioners and is responsible to Board of Commissioners. Members of Board of Commissioners' Committee are appointed and dismissed by Board of Commissioners.

In accordance with SOE State Minister Decree No: KEP-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 regarding SOE Board of Commissioners'/Board of Supervisors' Supporting Organ, PLN's Board of Commissioners dismissed GCG Committee (KGCG) and Nomination & Remuneration Committee (KNR), therefore, only Audit Committee (KA) and Risk Management Committee (KMR) are still in duties.

Each Risk Management Committee and Audit Committee has a Committee Charter containing committee's main duties and authorities.

PLN saat ini memiliki dua perangkat Komite Komisaris, yakni Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko yang masing-masing telah memiliki Piagam Komite sebagai pedoman kegiatan dan pelaksanaan tugas Komite Komisaris dalam mengawasi dan memastikan pencapaian level kinerja PLN yang baru di tahun-tahun mendatang.

Currently, PLN owns two Commissioners' Committees, namely Audit Committee and Risk Management Committee in which each committee has a Committee Charter as guidelines in holding activities and performing tasks of Commissioners' Committee to supervise and ensure PLN's new performance level achievement in the coming years.

Komite Audit (KA)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

1. Melakukan telaahan atas efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan;
2. Melakukan telaahan atas efektivitas pelaksanaan tugas dan hasil audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik termasuk memberikan rekomendasi Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan;

Audit Committee (KA/AC)

Audit Committee's Duties and Responsibilities

Audit Committee's Duties and Responsibilities are:

1. Conducting an assessment of effectiveness of company's internal control system;
2. Conducting an assessment of effectiveness of task performance and external audit results by Public Accounting Firm, including giving recommendations of Public Accounting Firm which will be selected to conduct Company's financial report audit.

3. Melakukan telaahan atas efektivitas pelaksanaan dan hasil audit internal yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern;
4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya
5. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Manajemen;
6. Melakukan telaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG);
7. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris, diantaranya adalah:
   - Telaahan dan tanggapan atas usulan penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aktiva tidak beroperasi dan penghapusan asset lainnya yang disampaikan Direksi;
   - Tugas-tugas khusus lainnya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
9. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan menyampaikan Laporan Realisasi triwulanan sesuai bidang tugasnya.

3. Conducting an assessment of effectiveness of internal audit execution and results held by Internal Audit Unit;
4. Providing recommendation about improvement of management control system and its execution.
5. Ensuring that there is satisfying evaluation procedure of financial information published by company, including Financial Report, Company Work Plan and Budget, Management Report. The financial information, however, is not only limited to reports mentioned before.
6. Conducting an assessment of company compliance with laws and regulations in Capital Market and other regulations which are related to company activities in accordance with Good Corporate Governance (GCG) principles.
7. Identifying matters which require Board of Commissioners' attention;
8. Performing other tasks given by Board of Commissioners, such as:
   - Assess and comment on proposal of account receivable removal, inventory removal, non operational fixed assets removal, and other assets removal as communicated by Board of Directors;
   - Other special duties in accordance with applicable laws and regulations;
9. Developing Annual Work Plan and Budget as well as submitting Quarterly Report based on fields of duty.

Independensi Anggota Komite Audit

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, maka salah satu dari kriteria menjadi anggota Komite Audit adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi.

Independence of Audit Committee Members

In accordance with Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) regulation and SOE State Minister Regulation No: PER-01/MBU/2011, one of the criteria to become Audit Committee is being independent and free from conflict of interest in order to behave objectively in giving opinion when facing problems.

Anggota Komite Audit PLN senantiasa bersikap professional, independen, objektif dan bebas dari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

Members of PLN's Audit Committee always behave professionally, independently, objectively, and freely from conflict of interest in performing duties and giving opinion to Board of Commissioners.

Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota Komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen atau yang dapat bersifat independen sedang anggota Komite (non Komisaris) terdiri dari akademisi (akuntansi, keuangan, teknik) yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang tugasnya atau mantan pegawai/pejabat perusahaan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan luas berkaitan dengan perusahaan dan aktivitasnya.

Other matter which is emphasized to all committee members is to act professionally in performing duties and giving opinion to Board of Commissioners.

Audit Committee is led by Independent Commissioners or one who is able to be independent. Meanwhile, members of Committee (non-Commissioners) consist of academics (accounting, finance, engineering) who possess competencies and experience based on fields of duty or company former employees/officials who own experience and broad knowledge associated with company and its activities.

Komite Audit bersifat independen dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris;
2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN;
3. Bukan merupakan Direksi atau karyawan PLN dan atau Anak Perusahaan PLN sekurangnya dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit PLN;
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Anak Perusahaan PLN dan atau perusahaan afiliasi PLN;
5. Tidak bekerja pada Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan atau non audit atau jasa konsultasi pada PLN dalam sekurangnya satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit PLN.

Audit Committee behaves independently based on following criteria:

1. Does not have any family relationship due to marriage and offspring to the second degree with members of Board of Directors and/or Board of Commissioners;
2. Does not have any business relationship both directly and indirectly which are related to PLN's business operations.
3. Is not Director or PLN's and/or PLN's subsidiary employees in no less than one year before appointed as PLN's Audit Committee;
4. Does not hold any share in PLN's subsidiaries and/or affiliation companies both directly and indirectly;
5. Does not work for Public Accounting Firm, Legal Consultancy or other entities who provide audit and/or non-audit services or consultation service to PLN in no less than one year prior to being appointed to be PLN's Audit Committee.

Kualifikasi dan Pendidikan Anggota Komite Audit.

Kualifikasi pengalaman kerja, profesi dan latar belakang pendidikan anggota Komite Audit dapat dilihat pada uraian "Profil Anggota Komite Audit, halaman 378)

Qualification and Education of Audit Committee Members

Work experience, profession, and education background of Committee Audit members can be seen in "Committee Audit Member Profiles" (page 378)

Susunan Anggota Komite Audit

Sejalan dengan perubahan komposisi Personalia Dewan Komisaris, maka susunan keanggotaan Komite Audit mengalami perubahan, sebagai berikut:

1. Mengawali tahun 2014, susunan keanggotaan Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 05.KR/DK-PLN/2013 adalah:

Adang Firman	Ketua Chairman
Andin Hadiyanto	Anggota Member
Harry Susetyo Nugroho	Anggota Member
Zulkifli Zaini	Anggota Member
Sugeng Rochadi	Anggota non Komisaris Non Commissioner Member
Aidil Yuzar	Anggota non Komisaris Non Commissioner Member

2. Mulai tanggal 21 Oktober 2014 susunan keanggotaan Komite Audit berubah berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 08/SK/DK-PLN/2014 menjadi sebagai berikut:

Zulkifli Zaini	Ketua Chairman
Andin Hadiyanto	Anggota Member
Harry Susetyo Nugroho	Anggota Member
Oegroseno	Anggota Member
Sugeng Rochadi	Anggota non Komisaris Non Commissioner Member
Aidil Yuzar	Anggota non Komisaris Non Commissioner Member

3. Pada tanggal 14 Januari 2015, susunan keanggotaan Komite Audit berubah menjadi sebagai berikut :

Darmono	Ketua/Anggota Chairman/Member
Andin Hadiyanto	Anggota Member
Hasan Bisri	Anggota Member
Sugeng Rochadi	Anggota non Komisaris Non Commissioner Member
Aidil Yuzar	Anggota non Komisaris Non Commissioner Member

Committee Audit Composition

In accordance with changes in composition of Board of Commissioners, the composition of Audit Committee also faced changes, as follows:

1. In the beginning of 2014, the composition of Committee Audit based on Board of Commissioners Decree No: 05.KR/DK-PLN/2013 is:

2. Starting from 21 October 2014, the composition of Audit Committee has changed in accordance with Board of Commissioners Decree No: 08/SK/DK-PLN/2014 to:

3. On January 14, 2015, the Audit Committee member compilation was changed as follows:

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2014 Komite Audit melaksanakan rapat sebanyak 67, yang terdiri dari rapat dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Audit yakni Satuan Pengendalian Intern, Auditor Eksternal dan Manajemen Perusahaan.

Audit Committee Meeting

During 2014, Audit Committee conducted 67 meetings, consisting of meetings which invited related parties based on duty and responsibility of Audit Committee, namely Internal Audit Unit, External Auditor, and Company Management.

Di samping itu, Komite Audit juga melaksanakan rapat internal komite audit dan rapat komite-komite Dewan Komisaris lainnya untuk membahas beberapa permasalahan secara lebih mendalam. Selain rapat, Komite Audit melakukan kunjungan kerja sebanyak 13.

In addition, Audit Committee also held internal meeting and other Board of Commissioners' Committees meeting to discuss several problems more thoroughly. Apart from meetings, Audit Committee conducted 13 work visits.

Rekapitulasi Rapat Komite Audit Tahun 2014.
Audit Committee Meetings in 2014

Uraian Description	Tahun Year 2014
Rapat internal Komite Audit Audit Committee Internal Meeting	6 x
Rapat internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meeting	17 x
Rapat dengan SPI PT PLN (Persero) Meeting between Board of Commissioners and KSPI	8 x
Rapat dengan Kantor Akuntan Publik (OBSE & PwC Indonesia) Meeting with Public Accounting Firm (OBSE & PwC Indonesia)	7 x
Kunjungan kerja Dewan Komisaris dan rapat dengan pimpinan Unit PLN setempat BOC's work vist and meeting with PLN's unit leader	13 x
Rapat pembahasan dengan manajemen untuk Revisi RKAP 2014 / RKAP 2015 Discussion Meeting with Management for Budget 2014/2015 Revision	5 x
Rapat pembahasan dengan manajemen untuk Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan Discussion Meeting with Management for Quarter and Annual Management Report	5 x
Rapat Pembahasan dengan manajemen untuk menelaah permohonan penghapusan atas ATTB, PRR, Aktiva Lainnya, Piutang macet lainnya yang diajukan Direksi Discussion Meeting with Management to examine the removal request of ATTB, PRR, Other Assets, Other Accounts Receivable proposed by Directors	6 x
Jumlah Rapat Total Meeting	67 x

Frekuensi Rapat Tingkat Kehadiran Rapat Anggota Komite Audit Tahun 2014
Audit Committee Members' Meeting Attendance, 2014.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Adang Firman	Ketua Chairman	62	34	55%
Andin Hadiyanto	Anggota Member	67	12	18%
Harry Susetyo Nugroho	Anggota Member	67	20	30%
Zulkifli Zaini	Anggota Member	67	40	60%
Oegroseno	Anggota Member	5	5	100%
Sugeng Rochadi	Anggota Member	67	58	87%
Aidil Yuzar	Anggota Member	67	59	88%

Rekapitulasi Kunjungan Kerja Komite Audit Tahun 2014

Sepanjang tahun 2014, Komite Audit telah melaksanakan kunjungan kerja ke:

Recapitulation of Audit Committee Work Visit in 2014

During semester I 2014, Audit Committee conducted work visits to:

Tanggal	Unit/AP	Date
12 Februari 2014	PLN Batam	February 12, 2014
13 – 14 Maret 2014	Distribusi Lampung Lampung Distribution	March 13 - 14, 2014
19 – 23 Maret 2014	Wilayah Papua dan Papua Barat Papua and West Papua Region	March 19 - 23, 2014
23- 26 April 2014	Wilayah Kupang Kupang Region	April 23 - 26, 2014
22-26 April 2014	Wilayah Papua dan Papua Barat Papua and West Papua Region	April 22 - 262014
6 Mei 2014	PLN Pusenlis dan PLN E	6 May, 2014
17 – 20 Juni 2014	Wilayah Sumatera Utara North Sumatra Region	June 17 - 20, 2014
28- 30 Agustus 2014	Wilayah Sulserabar di Makassar Sulserabar Region in Makassar	August, 28 - 30 2014
10 – 12 September 2014	Wilayah Suluttenggo di Manado Suluttenggo Region in Manado	September 10 - 12, 2014
17 September 2014	Proyek PLTU Cilacap Cilacap Steam Power Plant Project	September 17, 2014
22 – 25 September 2014	PLN Distribusi Bali dan PLN Wil. NTT/Area Ende Bali Distribution and NTT Region/Ende Area	22 - 25 September, 2014
29 – 31 Oktober 2014	Wilayah Kalimantan Timur dan Proyek PLTU Balikpapan East Kalimantan Region and Balikpapan Steam Power Plant Project	29 - 31 Oktober, 2014
15 Desember 2014	PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Jakarta Raya and Tangerang Distribution	Desember 15,2014

Kegiatan-kegiatan Komite Audit

1. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar Direksi meningkatkan kepatuhan seluruh unit maupun anak perusahaan terhadap ketentuan intern dan ketentuan perundangan-undangan serta segera menindaklanjuti seluruh temuan SPI maupun auditor ekstern dengan tertib.
2. Menelaah dan memberikan tanggapan atas surat Direksi perihal permintaan persetujuan penghapusan Piutang Ragu-Ragu (PRR), persetujuan /rekomendasi Penghapusan ATTB dan Penghapusan material serta piutang lainnya yang diajukan Direksi.
3. Menelaah Laporan Keuangan Perusahaan dan efektivitas kegiatan dan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik.
4. Menelaah dan memberikan tanggapan atas Laporan Manajemen (LM) Tahunan dan Triwulanan 2014, Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2015 dan *Key Performance Indicators* (KPI) 2015 dengan tim RKAP, tim LM, serta Divisi Terkait.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar DIRUT:
   - Menugaskan SPI melakukan audit khusus pada Unit dan Anak Perusahaan tertentu sebagai tindak lanjut hasil temuan SPI dan BPK.
   - Menyampaikan perkembangan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
   - Permintaan klarifikasi dan penjelasan tentang upaya penyelesaian terkait dengan surat pengaduan masyarakat,
   - Memonitor perkembangan proyek-proyek pembangkit.
6. Menyampaikan laporan Penilaian Kinerja Direksi.
7. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2015.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.
9. Melakukan rapat internal.

Activities conducted by Audit Committee were:

1. Conveying the recommendation to the Board of Commissioners so that the Board of Directors can improve entire unit compliance or subsidiary to the internal regulations and the provisions of legislation and to follow up the SPI's entire findings or the external auditor with orderly.
2. Reviewing and responding to the letter of Board of Directors regarding the approval request of doubtful accounts (PRR) removal, the approval / recommendation of ATTB and material Removal and other receivables which proposed by Board of Directors.
3. Reviewing the Company's Financial Report and the activities effectiveness and audit results by Public Accounting Firm.
4. Reviewing and responding to Annual and Quarterly Management Report (LM) 2014. Work Plan and Budget (CBP) 2015 and Key Performance Indicators (KPI) 2015 with CBP team, LM team, and Related Division.
5. Providing recommendations to the Board of Commissioners so that the President Director:
   - Assigning SPI to conduct a special audit on the Units and certain subsidiaries as a follow-up of SPI and CPC findings
   - Covering the development of follow-up completion on BPK's result and
   - clarification request and explanation to complete letters of complaints,
   - monitoring the progress of power plant projects
6. Delivering Board of Directors Performance Assessment report.
7. Arranging the Audit Committee Work Plan 2015.
8. Conducting other duties assigned by the Commissioners
9. Performing an internal meeting.

Komite Manajemen Risiko (KMR)

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite;
2. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi perusahaan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko perusahaan, pengendalian intern perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur;
3. Melakukan evaluasi terhadap model pengukuran risiko yang digunakan perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut;
4. Memantau kesesuaian berbagai potensi risiko yang dihadapi perusahaan;
5. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko perusahaan;
6. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam perusahaan;
7. Mengukur efektivitas masing masing komponen dari *Enterprise Risk Management* (ERM) yang telah ditetapkan di perusahaan;

Risk Management Committee (KMR/RMC)

Risk Management Committee's Duties and Responsibilities are:

1. Develop work plans and annual budgets
2. Understanding company risk management including various risks faced by company; company risk management strategies, system, and policies; company internal control which covers policies, methodology, and infrastructures;
3. Conducting evaluation of risk measurement model used by company and providing further improvement recommendation.
4. Monitoring various risk potencies faced by company;
5. Evaluating various company risk management policies;
6. Coordinating implementation and supervision of existence and effectiveness of each Enterprise Risk Management (ERM) component in company;
7. Measuring effectiveness of each Enterprise Risk Management (ERM) set by company;

8. Mengkaji hasil kajian risiko dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh Direksi sebagai kelengkapan atas usulan rencana investasi/pendanaan/transaksi dan kegiatan operasional lainnya yang berdampak besar terhadap perusahaan serta memberikan tanggapan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi tersebut;
9. Mengawasi dan memantau bahwa mitigasi risiko terhadap kegiatan investasi dan operasional perusahaan yang berdampak besar telah dilaksanakan secara konsisten;
10. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai yang ditetapkan dalam piagam Komite Manajemen Risiko dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
12. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite;
13. Menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Tugas Triwulanan dan Tahunan Komite;

Independensi Anggota Komite Manajemen Risiko

Salah satu kriteria menjadi anggota Komite Manajemen Risiko adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

Ketua Komite adalah Komisaris Independen, sedangkan anggota Komite (non Komisaris) berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kepemilikan dan kegiatan usaha perusahaan karena anggota Komite merupakan akademisi yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang tugasnya atau mantan pegawai/pejabat perusahaan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan luas berkaitan dengan perusahaan dan aktivitasnya.

Kualifikasi dan Pendidikan Anggota Komite Manajemen Risiko

Kualifikasi pengalaman kerja, profesi dan latar belakang pendidikan anggota Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada uraian "Profil Anggota Komite Manajemen Risiko, 377)

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko

Sejalan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, maka susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sepanjang tahun 2014 mengalami perubahan, sebagai berikut

1. Mengawali tahun 2014, susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001.SK/DK-PLN/2013 tanggal 9 Januari 2013, adalah sebagai berikut:
   - Syahrial Loetan : Ketua
   - Wimpy S Tjetjep : Anggota
   - Jarman : Anggota
   - ERL Tobing : Anggota non Komisaris

8. Reviewing risk assessment result and other documents submitted by Directors as complement to proposal of investment/funding/transaction plans and other operational activities which give major impact to company as well as giving response to Board of Commissioners regarding Board of Directors' proposal;
9. Supervising and monitoring consistent implementation of risk mitigation in investment activities and company operations which have major impact.
10. Identifying matters and Board of Commissioners' other duties which require Board of Commissioners' attention;
11. Performing other duties given by Board of Commissioners in accordance with Risk Management Charter and applicable laws;
12. Coordinating with Board of Commissioners Secretary to facilitate Committees' duties;
13. Submission of Committee's Quarter and Annual Duties Realization Report

Independence of Risk Management Committee Members

One of criteria to be selected as members of Risk Management Committee is independence and freedom from conflict of interest in order to behave objectively in giving opinion in handling problems. Another criteria required by members of committee is professional behaviour in performing duties and giving opinion to Board of Commissioners.

The head of committee is Independent Commissioner, meanwhile, members of committee (non-commissioners) are ones who are from outside the company and do not have any relationship with management, ownership, as well as company business activities, since members of Committee are academics who possess competencies and experience based on field of duties or company former employees/officials who possess experience and broad knowledge associated with company and its activities.

Qualification and Education Background of Risk Management Committee Members

Work experience, profession, and education background of Risk Management Committee Members can be seen on "Risk Management Committee Member Profiles" (page 377)

Composition of Risk Management Committee Members

In accordance with changes in Board of Commissioners composition, composition of Risk Management Committee also faced the following changes during 2014.

1. In the beginning of 2014, the composition of Risk Management Committee based on Board of Commissioners Decree No: 001.SK/DK-PLN/2013 dated 9 January 2013 is:
   - Syahrial Loetan : Head of Committee
   - Wimpy S Tjetjep : Member
   - Jarman : Member
   - ERL Tobing : non-Commissioner Member

2. Pada tanggal 1 Maret 2014, susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko berubah berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 09.SK/DK-PLN/2013 menjadi sebagai berikut:

2. On 1 March 2014, the composition of Risk Management Committee, based on Board of Commissioners Decree No: 09.SK/DK-PLN/2013, changed to:

Syahrial Loetan	Ketua Chairman
Jarman	Anggota Member
Wimpy S Tjetjep	Anggota Member
ERL Tobing	Anggota non Komisaris Non Commissioner Member
Yusuf Hamdani	Anggota non Komisaris Non Commissioner Member

3. Pada tanggal 21 Oktober 2014, susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko berubah berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 08/SK/DK-PLN/2014 menjadi sebagai berikut:

3. On 21 October 2014, the composition of Risk Management Committee, based on Board of Commissioners Decree No: 08.SK/DK-PLN/2014, changed to:

Jarman	Ketua Chairman
Darmono	Anggota Member
S. Milton Pakpahan	Anggota Member
ERL Tobing	Anggota non Komisaris Non Commissioner Member
Yusuf Hamdani	Anggota non Komisaris Non Commissioner Member

4. Pada tanggal 14 Januari 2015, susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko berubah menjadi sebagai berikut:

4. On January 14, 2015 the composition of Risk Management Committee, changed to:

Zulkifli Zaini	Ketua/Anggota Chairman/member
Oegroseno	Anggota Member
S. Milton Pakpahan	Anggota non Komisaris Non Commissioner Member
Yusuf Hamdani	Anggota non Komisaris Non Commissioner Member

Rapat Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2014 Komite Manajemen Risiko melaksanakan rapat sebanyak 63, yang terdiri dari rapat dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko.

Di samping itu, Komite Manajemen Risiko juga melaksanakan rapat internal komite Manajemen Risiko dan rapat komite-komite Dewan Komisaris lainnya untuk membahas beberapa permasalahan secara lebih mendalam. Selain rapat, Komite Manajemen Risiko melakukan kunjungan kerja sebanyak 15.

Risk Management Committee Meeting

In 2014, there were 63 meetings conducted by Risk Management Committee, including meeting which invites parties who are related based on Risk Management Committee's field of duties and responsibilities.

In addition, Risk Management Committee also held internal meeting and other Board of Commissioners' Committees meeting to discuss several issues more thoroughly. Apart from meeting, Risk Management Committee conducted 15 work visits.

Pokok Bahasan Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2014

Subjects Discussed in Risk Management Committee Meetings in 2014

Pokok Bahasan Subjects	2014
Rapat Internal Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Internal Meeting	21 x
Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioner Internal Meeting	17 x
Kunjungan Kerja KMR bersama Dewan Komisaris ke Unit PLN, Proyek Kelistrikan dan atau Anak Perusahaan PLN Work Visit of RMC with BOC to PLN's unit, Kunjungan Kerja KMR bersama Dewan Komisaris ke Unit PLN, Electricity Project and or PLN's subsidiaries	15 x
Rapat pembahasan dengan manajemen untuk Laporan Manajemen Triwulanan Discussion Meeting with Management for Quarter Management Report	4 x
Rapat pembahasan dengan manajemen untuk Laporan Manajemen Tahunan 2013. Discussion Meeting with Management for Annual Management Report 2013.	1 x
Rapat pembahasan dengan manajemen untuk KPI Korporat dan KPI Direksi Discussion Meeting with Management for Corporate's KPI and Directors' KPI	2 x
Rapat pembahasan dengan manajemen dan Direksi untuk pemilihan KAP untuk audit tahun buku 2014 Discussion Meeting with Management and Board of Directors for the election of Public Accounting Firm for audit in for financial year 2014	2 x
Rapat pembahasan dengan KAP PWC untuk proses audit tahun buku 2013 Discussion Meeting with PWC Public Accounting Firm for audit process in financial year 2013	1 x
Jumlah Rapat Total Meeting	63 x

Kunjungan Kerja Komite Manajemen Risiko Tahun 2014
Risk Management Committee Work Visits in 2014

Tanggal	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris 2014 Board of Commissioners' Work Visit 2014	Date
30 Januari 2014	PLN Distribusi Jawa Tengah (Jogya) PLN Central Java Distribution (Jogya)	January 30, 2014
6-7 Februari 2014	PLN Distribusi Jawa Barat (Bandung) PLN West Java Distribution (Bandung)	February 6-7, 2014
13-14 Maret 2014	PLN Distribusi Lampung (Bandar Lampung, PLTU Sibalang, PLTU Tarahan, Proyek HVDC Sumatera-Jawa) PLN Lampung Distribution (Bandar Lampung, PLTU Sibalang, PLTU Tarahan, HVDC Sumatera-Java Project)	March 13-14, 2014
19-23 Maret 2014	PLN Wilayah Papua dan Papua Barat (Sorong, PLTA Genyem Jayapura) PLN Papua and West Papua (Sorong, PLTA Genyem Jayapura)	March 19-23, 2014
23-26 April 2014	PLN Wilayah NTT (Kupang, PLTU Kupang) PLN East Nusa Tenggara (Kupang, PLTU Kupang)	April 23-26, 2014
22-26 April 2014	PLN Wilayah Papua dan Papua Barat (Timika, Wamena, PLTU Holtekam Jayapura) PLN Papua and West Papua (Timika, Wamena, PLTU Holtekam Jayapura)	April 22-26, 2014
6 Mei 2014	PLN Pusenlis dan PLNE PLN Pusenlis and PLNE	May 6, 2014
17-20 Juni 2014	PLN Wilayah Sumut dan Aceh (Medan, PLTU Nagan Raya, PLTU Pangkalan Susu, proyek-proyek Transmisi) PLN North Sumatera and Aceh (Medan, PLTU Nagan Raya, PLTU Pangkalan Susu, Transmission Projects)	June 17-20, 2014
28-29 Agustus 2014	PLN Batam (Batam, PLTGU Tanjung Uncang, PLTU Tanjung Kasam, interkoneksi T/L Batam ke Bintan) PLN Batam (Batam, PLTGU Tanjung Uncang, PLTU Tanjung Kasam, interconnection of T/L Batam to Bintan)	August 28-29, 2014
10-13 September 2014	PLN Suluttenggo (Manado, PLTU Amurang, PLTA Tanggari) PLN Suluttenggo (Manado, PLTU Amurang, PLTA Tanggari)	September 10-13, 2014
22-24 Septemberl 2014	PLN Wilayah Bali dan NTT (Denpasar, Ende, PLTU Ropa, PLTP Mataloko, PLTP Ulumbu, PLTM Ndungga) PLN Bali and East Nusa Tenggara (Denpasar, Ende, PLTU Ropa, PLTP Mataloko, PLTP Ulumbu, PLTM Ndungga)	September, 22-24 2014
17 September 2014	PLN Cilacap (Proyek PLTU Adipala dan IPP S2P) PLN Cilacap (PLTU Adipala Project and IPP S2P)	September 17, 2014
4-6 Nopember 2014	PLN Wilayah Papua (Merauke dan Jayapura) PLN Papua (Merauke and Jayapura)	November 4-6 2014
27-29 Nopember 2014	PLN Wilayah Aceh (Banda Aceh. PLTU Nagan Raya Meulaboh, Sabang PLN Aceh (Banda Aceh. PLTU Nagan Raya Meulaboh, Sabang	November 27-29 2014
15 Desember 2014	PLN Jakarta Raya dan Tangerang PLN Jakarta Raya and Tangerang	December 15 2014

Kegiatan Komite Manajemen Risiko

1. Evaluasi atas dokumen yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris terkait pengajuan usulan tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan maupun rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain:
   - Transaksi pembelian BBM,
   - Pinjaman jangka panjang Perusahaan
   - Pinjaman jangka pendek Perusahaan Afiliasi,
   - Pembelian tenaga listrik dari IPP,

Risk Management Committee Activities

1. Evaluation of documents which conveyed by the Board of Directors to BOC related to the proposal of the Board of Directors action that require the approval or BOC's recommendation, among others:
   - Transaction of fuel purchases,
   - Company Long-term Loan
   - Affiliated Companies Short term loans
   - The purchase of electricity from IPPs,

- Transaksi pembelian LNG
- Usulan konversi piutang SHL menjadi tambahan modal pada anak Perusahaan,
- Konversi hutang BBM Anak Perusahaan ke Perusahaan menjadi tambahan modal
- Usulan swap aset PLTGU dengan hutang Perusahaan pada anak Perusahaan

2. Mengikuti Ekshibisi dan Seminar pada Power Gen Europe di Cologne pada 1 – 5 Juni 2014.
3. Mengikuti Ekshibisi dan Seminar pada Hydrovision International di Nashville US pada 22 – 25 Juli 2014.

- Transaction of LNG purchases,
- Proposal of SHL receivables conversion into additional capital in subsidiaries,
- Conversion of Subsidiary Company 's fuel debt to be additional capital
- Proposal of PLTGU asset swap with the Company's debt to subsidiaries

2. Follow the Exhibition and Seminar on Power Gen Europe in Cologne on June 1 to 5, 2014.
3. Follow the Exhibition and Seminar on International Hydrovision in Nashville US on July 22 to 25, 2014.

Tim Adhoc Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan kewajiban Tim Adhoc Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah menetapkan Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero);
2. Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan proses rekrutmen, pengembangan karier, nominasi dan remunerasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
3. Membantu merumuskan dalam menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta insentif dan tantiem yang bersifat *variable* bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
4. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengembangan GCG;
5. melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan dan pengembangan GCG;
6. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Adhoc;
7. membuat laporan sesuai bidang tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Temporary (Ad Hoc) Nomination and Remuneration Team

Duties and responsibilities of Temporary Nomination and Remuneration Team are:

1. Reviewing and monitoring to ensure that Board of Directors have set the Nomination and Remuneration variables of PT PLN (Persero);
2. Reviewing and monitoring to ensure that Board of Directors have performed recruitment, career development, nomination and remuneration in accordance with ratified provisions;
3. Assisting in formulating remuneration policy to decide Board of Commissioners' and Directors' salary and honorarium, allowances, and facilities which are fixed as well as incentives and tantiem (bonus) which are variable.
4. Monitoring and guiding to the implementation and development of GCG;
5. Evaluating and giving recommendations to the implementation and development of GCG;
6. Coordinating and giving recommendations with the Secretary of the Board of Commissioners for the convenience of implementation of the Temporary Team's duties;
7. Making a report in accordance with their sectors according to applicable regulations.

Frekuensi dan agenda pertemuan

Sejak dibentuk pada 25 Juli 2013, Tim Adhoc telah melaksanakan 1 kali rapat dengan pokok bahasan usulan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan

Meeting Frequency and Agenda

Established since 25 July 2013, Temporary Team has conducted 1 meetings with subjects discussing about recommendation of Board of Directors and Commissioners of Subsidiaries.

Susunan anggota Tim AdHoc Nominasi dan Remunerasi

Susunan anggota tim Adhoc Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk pada tanggal 25 Juli 2013 adalah:

Composition of Temporary Nomination and Remuneration Team

The composition of temporary nomination and remuneration team which is established on 25 July 2013 is:

Yogo Pratomo	Ketua Chairman
Achmad Yani Basuki	Anggota Member

Pada tanggal 14 Januari 2015, dibentuk tim Adhoc Nominasi dan Remunerasi serta GCG dengan susunan anggota sebagai berikut:

Compilation of members of Temporary Nomination and Remuneration Team, which was formed on January 14, 2015 is as follows:

Chandra M. Hamzah	Ketua Chairman
Harry Susetyo Nugroho	Anggota Member
Budiman	Anggota Member

Rapat Tim AdHoc Nominasi dan Remunerasi

Pada tahun 2014, Tim Adhoc telah melaksanakan 3 kali rapat dengan pokok bahasan usulan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan.

The Meeting of Temporary Nomination and Remuneration Team

In 2014, Temporary team held 3 times of meeting with the subject of BOD and BOS subsidiaries proposal.

Komite-Komite Direksi

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasional, PLN telah membentuk komite-komite (lima komite) di bawah Direksi, dengan nama komite dan keanggotaan Direksi, sebagai berikut.

Board of Directors' Committees

In order to support effectiveness in performing operational duties and responsibilities, PLN formed committees (five committees) under Board of Directors, in which the name of committees and Directors' membership are mentioned as follows:

Keanggotaan Komite Direktur	Anggota	Committees and Directors' Membership
Komite Investasi dan Pendanaan	DIR (KEU), DIR (DAN), DIR (KON), DIR (REN), Dir (NRK), Direktur Operasi Terkait	Investment & Funding Committee
Komite IPP & Kemitraan	DIR (REN), DIR (KEU), DIR (DAN), DIR (KON), Dir (NRK), Direktur Operasi Terkait	IPP & Partnership Committee
Komite Energi Primer	DIR (DAN), DIR (KEU), DIR (REN), DIR (NRK), Direktur Operasi Terkait	Primary Energy Committee
Komite Niaga	DIR (NRK), DIR (KEU), DIR (REN), Direktur Operasi Terkait	Commerce Committee
Komite SDM & Organisasi	DIR (SDM), DIR (KEU), DIR (NRK), Direktur Operasi Terkait	Human Resource Committee
Komite Anak Perusahaan dan Afiliasi	DIR (REN), DIR (KEU), DIR (NRK), DIR (SDM), Direktur Operasi Terkait	Subsidiaries and Affiliates Committee
Komite Penghapusan dan Pelepasan Aset	DIR (KEU), DIR (NRK), DIR (SDM), Direktur Operasi Terkait	Elimination and Disposal of Assets Committee
Komite Operasional	DIR (KEU), DIR (NRK), DIR (REN), Direktur Operasi Terkait	Operating Committee

Rapat Komite Direksi

Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Komite Tahun 2014

Directors' Committee Meeting

Attendance of Board of Directors in 2014 Committee Meeting

Rapat Meeting	Keterangan	DIR (KEU)	DIR (DAN)	DIR (KON)	DIR (REN)	DIR (NRK)	DIR (OP-JBS)*	DIR (OP-IT)*	DIR (SDM)	Total Rapat
Komite Investasi & Pendanaan Investment & Funding Committee	Hadir Present	2	6	4	7	2	3	2		7
	Absen Absent	5	1	3	0	5	4	5		
	Persentase Percentage	29%	86%	57%	100%	29%	43%	29%		
Komite IPP & Kerjasama Kemitraan IPP & Partnership Cooperation Committee	Hadir Present	3	5	3	4	3	4	1		5
	Absen Absent	2	0	2	1	2	1	4		
	Persentase Percentage	60%	100%	60%	80%	60%	80%	20%		
Komite Energi Primer Primary Energy Committee	Hadir Present	0	1		0	0	1	1		1
	Absen Absent	1	0		1	1	0	0		
	Persentase Percentage	0%	100%		0%	0%	100%	100%		
Komite Niaga Commerce Committee	Hadir Present	0			0	0	0	0		0
	Absen Absent	0			0	0	0	0		
	Persentase Percentage	0%			0%	0%	0%	0%		
Komite SDM & Organisasi Human Resource Committee	Hadir Present	0				0	0	0	0	0
	Absen Absent	0				0	0	0	0	
	Persentase Percentage	0				0	0	0	0	
Komite Anak Perusahaan dan Afiliasi Subsidiaries and Affiliates Committee	Hadir Present	0			0	0	0	0	0	0
	Absen Absent	0			0	0	0	0	0	
	Persentase Percentage	0			0	0	0	0	0	
Komite Penghapusan dan Pelepasan Aset Elimination and Disposal of Assets Committee	Hadir Present	0				0	0	0	0	0
	Absen Absent	0				0	0	0	0	
	Persentase Percentage	0				0	0	0	0	
Komite Operasional Operating Committee	Hadir Present	0			0	0	0	0		0
	Absen Absent	0			0	0	0	0		
	Persentase Percentage	0			0	0	0	0		

Sekretaris Dewan Komisaris

Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Board of Commissioners' Secretary

In order to ensure that Board of Commissioners perform their duties smoothly, Board of Commissioners may be assisted by Board of Commissioners' Secretary appointed by Board of Commissioners and paid by Company.

Board of Commissioners' Secretary possesses a function to provide administrative and secretarial supports for Board of Commissioners in order to facilitate Board of Commissioners in performing duties.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan dibidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perusahaan.
3. Memfinalisasi laporan-laporan yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, antara lain Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris.
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat, serta tugas-tugas lain yang terkait;
5. Memfasilitasi kegiatan Dewan Komisaris.
6. Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris

Pada tahun 2014, Sekretariat Dewan Komisaris telah:

1. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sejumlah 38 kali rapat dan rapat lainnya sejumlah 47 kali rapat.
2. membuat dan mengelola risalah rapat Dewan Komisaris sejumlah 38 risalah.
3. Mengadministrasikan surat-surat yang masuk atau ditujukan kepada Dewan Komisaris sejumlah 1008 surat, dan surat-surat yang diterbitkan oleh Dewan Komisaris baik sebagai jawaban dari surat masuk, mau pun dalam jenis surat lainnya sejumlah 340 surat.
4. Menyelenggarakan kunjungan kerja Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris sebanyak 19 kali dengan jumlah yang dikunjungi sebanyak 39 Unit/Proyek PLN dan 4 Anak Perusahaan, mencakup: PLN Batam, PLN Wilayah Lampung, PLTU Tarahan, PLN Wilayah Papua (Papua Barat), PLN Wilayah NTT , PLN Wilayah Papua (sistem Timika, Wamena dan Jayapura), PLN Wilayah Kalimantan Timur, PLN UIPIX, PLN UIPX – Kalimantan.
5. Mengikuti Ekshibisi dan Seminar pada Power Gen Europe di Cologne pada 1 – 5 Juni 2014.

Sekretaris Perusahaan

Dasar Penunjukan

Kebijakan Regulator yang dijadikan sebagai acuan bagi pembentukan dan pelaksanaan Sekretaris Perusahaan oleh PLN antara lain:

1. Keputusan Ketua Bapepam IX.I.4 No: Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no 35./ POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahan Emiten atau Perusahaan Publik.

Duties of Board of Commissioners' Secretary

Board of Commissioners' Secretary performs the following duties:

1. Holding secretarial activities in Board of Commissioners' scope.
2. Coordinating provision of information required by Board of Commissioners, such as routine reports from Board of Directors (Monthly Report, Quarterly Report, Annual Report, Internal Audit Result Reports) as well as other reports/ information about Company;
3. Finalizing reports which are the obligations of Board of Commissioners, such as Board of Commissioner Supervision Report;
4. Holding Board of Commissioner meetings, preparing and sending invitations, submitting meeting materials, writing minutes of meeting, as well as other related tasks;
5. Facilitating Board of Commissioners' activities;
6. Administering minutes of meeting and other Board of Commissioners' documents as well as delivering meeting decision to related parties.

Board of Commissioners' Secretary Meeting

In 2014, Board of Commissioners Secretariat

1. Held BOC's meetings about 38 meetings and other meetings totalled 47 meetings.
2. Conduct and manage the minutes of meetings of the Board of Commissioners with total 38 minutes of meetings
3. Administering incoming letters or addressed to the Board of Commissioners about 1008 letters, and letters issued by the Board of Commissioners as the response of incoming mail, and even in other types of letter with total 340 letters.
4. Held Board of Commissioners' work visit and Board of Commissioners Committees about 19 times with 39 visited units / Project PLN and 4 subsidiaries, include: PLN Batam, PLN Lampung region, PLTU Tarahan, PLN Territory of Papua (West Papua), PLN NTT Region, PLN Papua region (Timika, Wamena and Jayapura system), PLN East Kalimantan Regional, PLN UIPIX, PLN UIPX - Borneo.
5. Following the Exhibition and Seminar on Power Gen Europe in Cologne on June 1 to 5, 2014.

Corporate Secretary

Bases of Selection

Regulations which are used by PLN as guidelines in forming Corporate Secretary are:

1. Chairman of Capital Market Supervisory Agency Decree No: Kep-63/PM/1996 about Corporate Secretary Establishment.
2. SOE State Minister Regulation No: PER-01/MBU/2011 about Good Corporate Governance Implementation in State-owned Enterprise, which was amended with PER-09/MBU/2012.
3. Regulation of Financial Services Authority (FSA) No. 35. / POJK.04 / 2014 on Corporate Secretary for Public Listed Company.

Tugas Sekretaris Perusahaan

Direksi mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi penatausahaan dan penyimpanan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta Risalah Rapat Direksi maupun RUPS;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat *(public relations)* dan hubungan investor;
3. Bekerja sama dengan fungsi yang menangani pelayanan Hukum Korporat.
4. Melakukan pembinaan dan pengendalian Tata Kelola Perusahaan;
5. Menyiapkan Laporan Tahunan, Laporan Manajemen dan Laporan Statistik; dan
6. Dalam hubungan dengan RUPS dan Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Direksi dengan organ tersebut.

Sekretaris Perusahaan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.

Corporate Secretary's Duties

Board of Directors appoint one Corporate Secretary with following duties:

1. Conducting activities related to administration and company document storage, including but not limited to Special List, Shareholder List, Directors or GMS Minutes of Meetings.
2. Conducting activities related to public relations and investor relationship;
3. Cooperating with function which handles Corporate Law.
4. Coaching and controlling corporate governance;
5. Preparing Annual Report, Management Report and Statistical Report; and
6. Acting as communicator between Board of Directors and GMS or Board of Commissioners.

Corporate Secretary is responsible to Board of Directors in performing duties.

Resume Kegiatan Sekretaris Perusahaan
Summary of Corporate Secretary Activities

Kegiatan	Jumlah Total	Activities
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	2 kali times	General Meeting of Shareholders (AGM)
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)	-	General Meeting of Bondholders
Conference Call and Investor Update	2 kali times	Conference Call and Investor Update
Analyst Update & Analyst Meeting	5 kali times	Analyst Update & Analyst Meeting
Road show	-	Road show
Press Release	64 kali times	Press Release
Press Briefing	2 kali times	Press Briefing
Press Visit	8 kali times	Press Visit
Press Conference	2 kali times	Press Conference

PT PLN (Persero) juga menyampaikan berbagai informasi terkait operasional perusahaan dalam rangka keterbukaan informasi kepada Bapepam-LK maupun melalui Siaran Pers, diantaranya mencakup.

On the means of information disclosure, PT PLN (Persero) also communicated various information related to company operations to Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) or through Press Release, such as:

Tanggal Januari	Judul Title	Date January
12 Januari 2014	PLN Jalin Kerjasama Kelistrikan dengan Sabah Electricity, Sdn. Bhd. PLN conducts electricity cooperation with Sabah Electricity, Sdn. Bhd.	Januariy 12, 2014
16 Januari 2014	PLTMG Duri Beroperasi, Listrik di Riau Semakin Kuat PLTMG Duri Operates, Electricity in Riau is Better	Januariy 16, 2014
18 Januari 2014	Aksi Sosial PLN Peduli Korban Banjir PLN's Sosial Care For Flood Victims	Januariy 18, 2014
20 Januari 2014	PLN Tandatangani MoU Pembangunan PLTU Simpang Belimbing Expansion 600 MW PLN Signs MoU of power plant development in PLTU Simpang Belimbing Expansion 600 MW	Januariy 20, 2014
20 Januari 2014	PLN Beli Pure Palm Oil (PPO) Dari 3 Perusahaan Minyak Sawit PLN Purchases Pure Palm Oil (PPO) from 3 palm oil company	Januariy 20, 2014
27 Januari 2014	PLN Manfaatkan Compressed Natural Gas (CNG) Untuk PLTGU Tambak Lorok PLN Utilizes Compressed Natural Gas (CNG) For PLTGU Tambak Lorok	Januariy 27, 2014

Tanggal Februari	Judul Title	Date Februari
14 Februari 2014	PLN Peduli Korban Letusan Kelud PLN Care about Kelud's eruption victims	Februari 14, 2014
17 Februari 2014	LN dan Tangguh LNG Terangi Teluk Bintuni LN and LNG Tangguh Brightens Teluk Bintuni	Februari 17, 2014
Maret		Maret
05 Maret 2014	Laporan Keuangan PLN 2013, Efisiensi Yang Terus Dijaga PLN's financial report 2013, The efficiency that need to be maintained	March 05, 2014
06 Maret 2014	Pertama di Indonesia, PLN Batam Operasikan CNG Marine First in Indonesia, PLN Batam Operates CNG Marine	March 06, 2014
17 Maret 2014	Storage CNG Plant Muara Tawar Diresmikan Penghematan BBM Rp 1,786 Triliun per Tahun Storage CNG Plant Muara Tawar formalizes with Fuel Saving of Rp 1,786 Trillion per Year	March 17, 2014
30 Maret 2014	Earth Hour 2014, Beban Listrik Jawa Madura Bali Turun Hingga 509 MW Earth Hour 2014, Elelctricity Load in Java Madura Bali Declined Until 509 MW	March 30, 2014
April		April
15 April 2014	PLN Tandatangani Kontrak Pembangunan Dan Operasi & Pemeliharaan Fasilitas Marine CNG Transportation Gresik – Lombok PLN Signs the Contract of development and operation and facility maintenance for Marine CNG Transportation Gresik – Lombok	April 15, 2014
17 April 2014	Menuju Keekonomian Tarif Listrik To the Economic Electricity Tarriff	April 17, 2014
17 April 2014	Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN Energy Minister Regulation Number 09 of 2014 on Electricity Tarrif which provided by Company Corporation of PT PLN	April 17, 2014
22 April 2014	PLN Lanjutkan Kerja Sama Dengan TII Dalam Program PLN Bersih PLN Continues to cooperate with TII in PLN Bersih program	April 22, 2014
24 April 2014	Penandatanganan Head of Agreement (HoA) PLN – PGE Tentang Harga Dasar Uap Panas Bumi Dan Tenaga Listrik The signing of Head of Agreement (HoA) PLN – PGE on basic price of geothermal heat and electric power	April 24, 2014
Mei		May
04 Mei 2014	PLN Raih Booth Terbaik di Pameran Indonesia Climate Change 2014 PLN Wins Best Booth in Indonesia Climate Change 2014 Exhibition	May 04 , 2014
19 Mei 2014	Dirut PLN Resmikan Fasilitas AIS Di Pabrik Unindo PLN's President Director Inaugurates AIS Facility in Unindo Factory	May 19 , 2014
28 Mei 2014	PLN Resmi Gunakan Program Pemeliharaan Kesehatan Online PLN Inaugurates Using Health Maintenance Online Program	May 28 , 2014
28 Mei 2014	Contact Center PLN 123 Raih Penghargaan Dari ICCA PLN's Contact Center 123 Wins Award from ICCA	May 28 , 2014
Juni		June
13 Juni 2014	PLN Dan PT Tanggamus Electric Power Tandatangani PPA PLTA Semangka PLN and PT Tanggamus Electric Power Signs PPA PLTA Semangka	June 13, 2014
18 Juni 2014	PLN dan Indonesia Power Raih Penghargaan Indonesia Green Awards 2014 PLN and Indonesia Power Wins Indonesia Green Awards 2014	June 18, 2014
25 Juni 2014	PLN Raih Gold Champion pada Indonesia WOW Brand 2014 dari MarkPlus Inc. PLN Wins Gold Champion pada Indonesia WOW Brand 2014 dari MarkPlus Inc.	June 25, 2014
26 Juni 2014	Sinergi BUMN : PLN Tandatangani Nota Kesepahaman dengan PT PINDAD BUMN Synergy: PLN Signs MoU with PT PINDAD	June 26, 2014
27 Juni 2014	Penghapusan Subsidi Listrik Melalui Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Secara Bertahap Untuk Golongan Tertentu Electricity Subsidy Removal Through Electricity Tarrif Adjustment Gradually For certain groups.	June 27, 2014
Juli		July
01 Juli 2014	Moody's Menaikkan Rating PLN Dua Tingkat (Notches) Moody's Increases 2 ranks for PLN (Notches)	July 01, 2014
09 Juli 2014	PLN Tembus Fortune Global 500 PLN Surpasses Fortune Global 500	July 09, 2014
21 Juli 2014	Menteri BUMN Dahlan Iskan Resmikan PLT Biomassa Tongkang Jagung Pertama di Indonesia SOE's Minister Dahlan Iskan Inaugurates the first PLT Biomassa Tongkang Jagung in Indonesia	July 21, 2014

Tanggal	Judul Title	Date
25 Juli 2014	Mudik Gratis Bareng PLN 2014 Free Homecoming Trip with PLN 2014	July 25, 2014
Agustus		August
17 Agustus 2014	PLTMG – CNG Bawean Diresmikan, PLN Terus Kurangi Pemakaian BBM PLTMG – CNG Bawean Inaugurated, PLN Keeps Reducing fuel usage	August 17, 2014
20 Agustus 2014	PLN Bangun "Jalan Tol" Listrik Sumatera PLN Develops Sumatera Electricity "Highway" Listrik	August 20, 2014
21 Agustus 2014	PLN Raih 2 Penghargaan Di Ajang BUMN Marketing Award 2014 PLN Wins 2 awards in SOE Marketing Award 2014	August 21, 2014
22 Agustus 2014	PLN Tambah Kabel Laut Jawa-Bali, Potensi Penghematan Rp400 Miliar per Bulan PLN Adds Submarine Cable Java-Bali, Potential for Saving Rp400 Billion per Month	August 22, 2014
28 Agustus 2014	Survei Implementasi PLN Bersih untuk Pelanggan dan Mitra Kerja Implementation Survey of PLN Bersih for Customers and partners.	August 28, 2014
September		September
03 September 2014	Infrastruktur Ketenagalistrikan Dukung Pembangunan Ekonomi Electricity Infrastructure Supports Economy Development	September 03, 2014
10 September 2014	ICCA Kunjungi Contact Center PLN 123 ICCA Visits PLN's Contact Center 123	September 10, 2014
22 September 2014	Timor Leste Belajar Kelistrikan Ke PLN Timor Leste Learns Electricity in PLN	September 22, 2014
25 September 2014	PLN Gandeng Investor Untuk Berdayakan Aset Tanah PLN Team Up with Investor to conduct Land Asset	September 25, 2014
Oktober		Oktober
01 Oktober 2014	PLN Group Hadir Di Pameran Kelistrikan Indonesia 2014 PLN Group Presents in Indonesia Electricity Exhibition 2014	Oktober 01, 2014
08 Oktober 2014	9 PLTU Diresmikan Menko Perekonomian 9 PLTU Inaugurated by Economy's Minister	Oktober 08, 2014
10 Oktober 2014	Proyek Transmisi Sumatera dan Transmisi Sumatera – Jawa Dicanangkan Sumatera and Sumatera-Java Transmission Projects announced.	Oktober 10, 2014
15 Oktober 2014	PLN Tandatangani Kesepakatan Dengan Dua Pengembang Swasta PLN Signs Agreement with 2 private developer	Oktober 15, 2014
17 Oktober 2014	PPATK bersama PT Indonesia Power Bekerja sama Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang & Praktek KKN PPATK and PT Indonesia Power Cooperates to Prevent Money Laundering and Corruption	Oktober 17, 2014
26 Oktober 2014	HLN ke 69, 27 Oktober 2014 Bersama Memajukan Kelistrikan Indonesia The 69th HLN, October 27, 2014 Together Icncreasing Indonesian Electricity	Oktober 26, 2014
November		November
2 November 2014	PLTG Borang Dapat Gas Lagi (Berkat Upaya Menteri ESDM mengatasi Kendala Birokrasi di Hari Libur) PLTG Borang Earns More Gas (Thanks to the efforts of the Minister of Energy and Mineral Resources to overcome bureaucratic obstacles in Holidays)	November 2, 2014
12 November 2014	Stimulasi Pertumbuhan Industri dengan Listrik Stimulation of Industry Growth with Electricity	November 12, 2014
27 November 2014	Pemerintah, PLN dan Pengembang swasta Rencanakan bangun PLTA sebesar 6,300 MW dalam sepuluh tahun kedepan Government, PLN and Private Developer plans to build water power plant of 6,300 MW in next 10 years	November 27, 2014
Desember		Desember
8 Desember 2014	Pemerintah terapkan adjustment tarif listrik di tahun 2015 Government Applies Electricity Tarriff Adjustment in 2015	Desember 8, 2014
10 Desember 2014	PLN, BUMN dengan UPG terbaik PLN, SOE with Best UPG	Desember 10, 2014
12 Desember 2014	Skor Naik, PLN Raih Peringkat 2 Keterbukaan Informasi Publik 2014 Higher score, PLN Wins The Second Rank of Public Information Disclosure 2014	Desember 12, 2014
18 Desember 2014	PLN Memperoleh Kucuran Rp8,5 Triliun Dari Bank Nasional PLN Earns fund Rp8,5 Trillion from National Bank	Desember 18, 2014
24 Desember 2014	Direksi dan Komisaris Baru PLN PLN's New Board of Directors and Board of Commissioners	Desember 24, 2014

Risiko dan Manajemen Risiko

Risk and Risk Management

Dengan semakin membaiknya pengelolaan risiko PT PLN (Persero) dari tahun ke tahun diharapkan dapat mendukung perubahan paradigma pengelolaan perusahaan dari crisis management, yang bersifat reaktif-korektif terhadap suatu permasalahan yang timbul, menjadi risk management yang berupa pengelolaan preventif sebelum suatu risiko benar-benar terjadi sebagai sebuah permasalahan.

With the improvement in risk management of PT PLN (Persero) from year to year is expected to support shifting the company's risk management paradigm from crisis management, that is reactive-corrective approach, to a risk management in the form of preventive management before a risk actually occurs as a problem.

Merujuk kepada Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN, maka sebagai bentuk komitmen manajemen dalam implementasi GCG tersebut, maka PLN menjalankan manajemen risiko dengan senantiasa memperhatikan profil risiko yang akan dihadapi dan berupaya memitigasi risiko-risiko tersebut.

Untuk maksud tersebut, Perseroan telah meletakan dasar-dasar untuk menerapkan implementasi Manajemen Risiko sesuai dengan kaidah *best practice*. Sejak tahun 2011 PT PLN (Persero) telah menggambarkan Profil Risiko Perusahaan terkait pencapaian sasaran RKAP yang didasarkan pada Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko sesuai KEPDIR No. 537.K/DIR/2011 yang saat ini telah diperbaharui menjadi PERDIR No. 0355.K/DIR/2014.

Dengan semakin membaiknya pengelolaan risiko PT PLN (Persero) dari tahun ke tahun diharapkan dapat mendukung perubahan paradigma pengelolaan perusahaan dari *crisis management*, yang bersifat reaktif-korektif terhadap suatu permasalahan yang timbul, menjadi *risk management* yang berupa pengelolaan *preventive* sebelum suatu risiko benar-benar terjadi sebagai sebuah permasalahan.

Tujuan Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesiapan *(preparedness)* Perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian *(uncertainty)* yang semakin tinggi dl lingkungan global, regional maupun lokal yang berpotensi mengancam sumber daya dan bahkan kelangsungan Perusahaan.
2. Menjaga agar Perusahaan letap dalam koridor pengelolaan usaha yang berkehati-hatian *(prudent operation)* dalam setiap aktivitas yang dilakukannya sebagai bentuk tata kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* guna meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan.

Lingkup penerapan Manajemen Risiko meliputi :

1. Pada prinsipnya setiap pemilik risiko di Perusahaan berkewajiban mengelola risikonya, dan setiap proses bisnis wajib dikelola risikonya sesuai ketentuan Perusahaan.
2. Manajemen Risiko Perusahaan diterapkan pada
   a. Proses pengambilan keputusan;
   b. Proses perencanaan dan pencapaian sasaran strategis maupun operasional Perusahaan;
   c. Segenap proses bisnis Perusahaan, termasuk di dalamnya adalah proses pelaporan, dalam rangka *continuous improvement;*
   d. Aspek Kepatuhan *(Compliance)*.
3. Pada prinsipnya Manajemen Risiko diterapkan pada segenap unsur organisasi dalam Perusahaan, namun demikian baik pemantauan secara korporat dilakukan hanya sampai dengan Unit Induk dan Anak Perusahaan maupun risiko tertentu yang secara spesifik akan mempengaruhi keberlangsungan usaha Perusahaan.
4. Dalam pelaksanaannya, Manajemen Risiko yang spesifik pada bidang, fungsi, proses bisnis maupun kebutuhan tertentu dapat ditetapkan dalam ketentuan tersendiri, namun tetap mengacu pada Peraturan ini, diantaranya seperti namun tidak terbatas pada Manajemen Risiko Keuangan, Manajemen Risiko Proyek; Manajemen Risiko Teknologi Informasi; Manajemen Risiko Kecurangan *(Fraud)*, Manajemen Risiko Kelangsungan

Referring to the Decree of the SOEs Minister No. PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in state-owned enterprises, as a form of management commitment to the GCG implementation, PLN runs the risk management with observing the risk profile thatwould be encountered and efforts to mitigate these risks.

For this purpose, the Company has placed the fundamental values to conduct best practice in the implementation of Risk Management. Since 2011, PT PLN (Persero) has described the company's risk profile related to the CBP target achievement based on the Risk Management Policy in accordance with Board of Directors' Decision No. 537.K / DIR / 2011, which has been renewed into Board of Directors' Regulation No. 0355.K / DIR / 2014.

With the improvement in risk management of PT PLN (Persero) from year to year is expected to support shifting the company's risk management paradigm from crisis management, that is reactive-corrective approach, to a risk management in the form of preventive management before a risk actually occurs as a problem.

Objectives Of Risk Management Implementation

The objective of the implementation of Company Risk Management are as follows:

1. Improving preparedness of the Company to face the high uncertainty in global, regional and local which has potentially threatened resources and continuity of the Company.
2. Maintaining the company remains in business management of prudent operation in any activities that has done as a form of good corporate governance (GCG) in order to increase the additional value for the Company.

The scope of Risk Management implementation comprises:

1. In principle, every risk owner in the Company is obliged to manage its risks, and every business process must be managed in accordance with the Company's risks.
2. Company's Risk Management applied to: Manajemen Risiko Perusahaan diterapkan pada
   a. Decision-making process;
   b. The process of planning and achieving Company's strategic and operational objectives.
   c. Over the Company's business processes, including the reporting process in order to the continuous improvement;
   d. Compliance.
3. Risk Management is applied to all elements in the Company's organization, however monitoring is done corporately to the Center Unit and subsidiaries as well as certain risks that specifically affect the Company's business continuity.
4. In practice, the specific Risk Management in the fields, functions, business processes and specific requirements can be specified in separate provisions, but still refer to this Regulation, which not limited to Financial Risk Management, Project Risk Management; Information Technology Risk

Usaha *(Business Continuity)*, dan Implementasi Pengendalian Internal (termasuk di dalamnya pengendalian internal dalam pelaporan keuangan /ICoFR).

Metode Pengelolaan Risiko

Dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan maupun pelaksanaan pengelolaan kegiatan lainnya, perusahaan berkomitmen untuk menerapkan *risk management* melalui implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM).

Pedoman penerapan Manajemen Risiko di lingkungan PLN disusun dengan menggunakan acuan utama ISO 31000 : 2009 *(International Standard of Risk Management)*. Namun demikian beberapa hal seperti aspek *compliance*, lingkup penerapan, beberapa peristilahan, mengacu pada standar COSO – ERM, AS/NZS dan lain-lain.

Struktur Manajemen Risiko dan Standar Proses Manajemen Risiko

Untuk mengelola risiko, Perseroan membentuk Divisi Manajemen Risiko (Divisi MRO) yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan sosialisasi dan implementasi manajemen risiko

Management; Fraud Risk Management, Business Continuity Risk Management, and Internal Control implementation (including internal controls in financial reporting / ICoFR).

Risk Management Method

In order to achieve the company's target and implementation of other management activities, the company has been committed to apply risk management through implementing Enterprise Risk Management (ERM).

The guidelines of Risk Management application in PLN environment were prepared referring mainly to ISO 31000:2009 (International Standard of Risk Management). However, some aspects including compliance, application scope and terms refer to the COSO-ERM, AS/NZS standards and others.

Risk Management Structure And Risk Management Process Standards

For managing risks, the Company established the Risk Management Division (MRD), which is responsible for the making of policy, work structure, risk management application guidelines and risk management infrastructure, and assuring the risk management socialization and application in the Company environment. This division also has the task to prepare strategic

Adapun kerangka penerapan manajemen risiko Perseroan digambarkan dalam bagan berikut.

Company risk management implementation structure is outlined as follows:

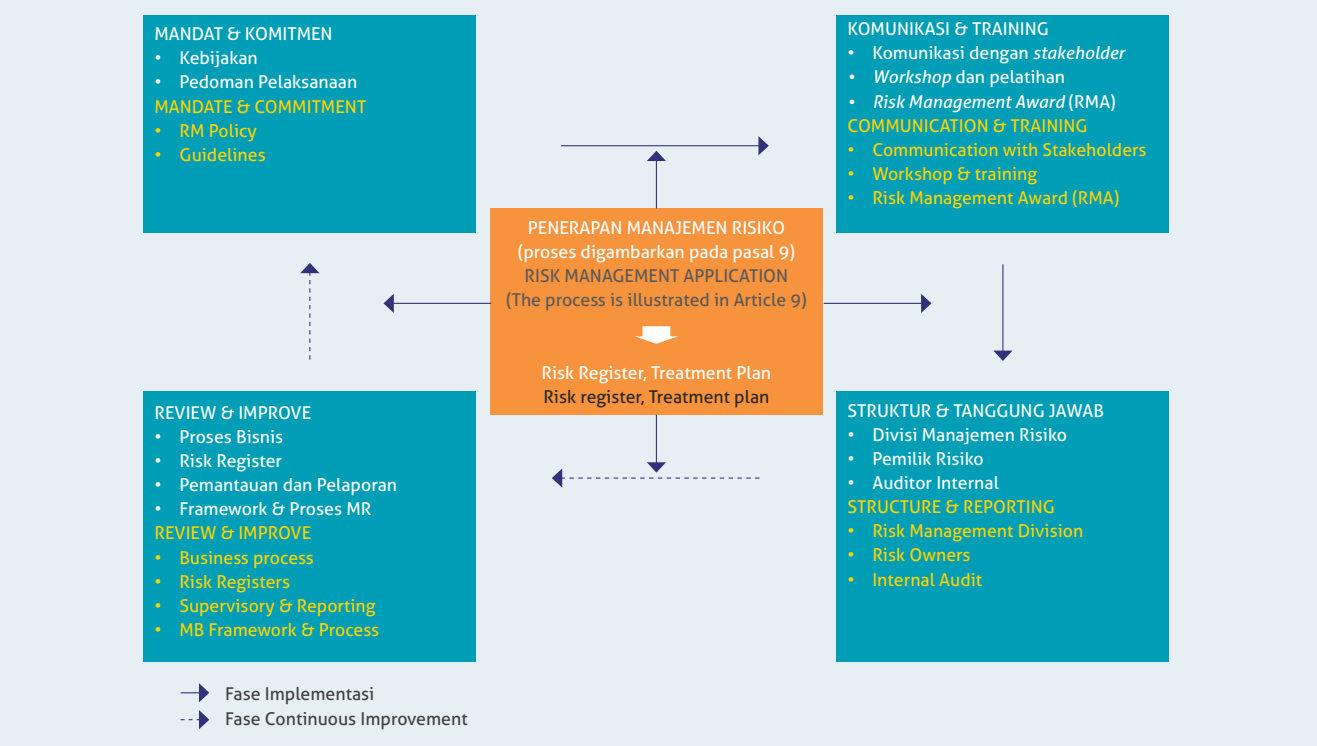

tersebut dilingkungan Perusahaan. Divisi ini juga bertugas untuk menyusun *risk profile* yang bersifat strategis sebagai *early warning* kepada manajemen Perusahaan. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Perseroan melakukan pengelolaan risiko dalam suatu siklus pengelolaan risiko (atau penyusunan Kajian Risiko) yang dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Siklus Pengelolaan Risiko

risk profile to function as early warning for the Company management. Management Risk Division reports to the Business and Risk Management Director.

The company applies risk management according to a risk management flow (Risk Assessment) which is illustrated in the following scheme:

Structure of Risk Management Implementation

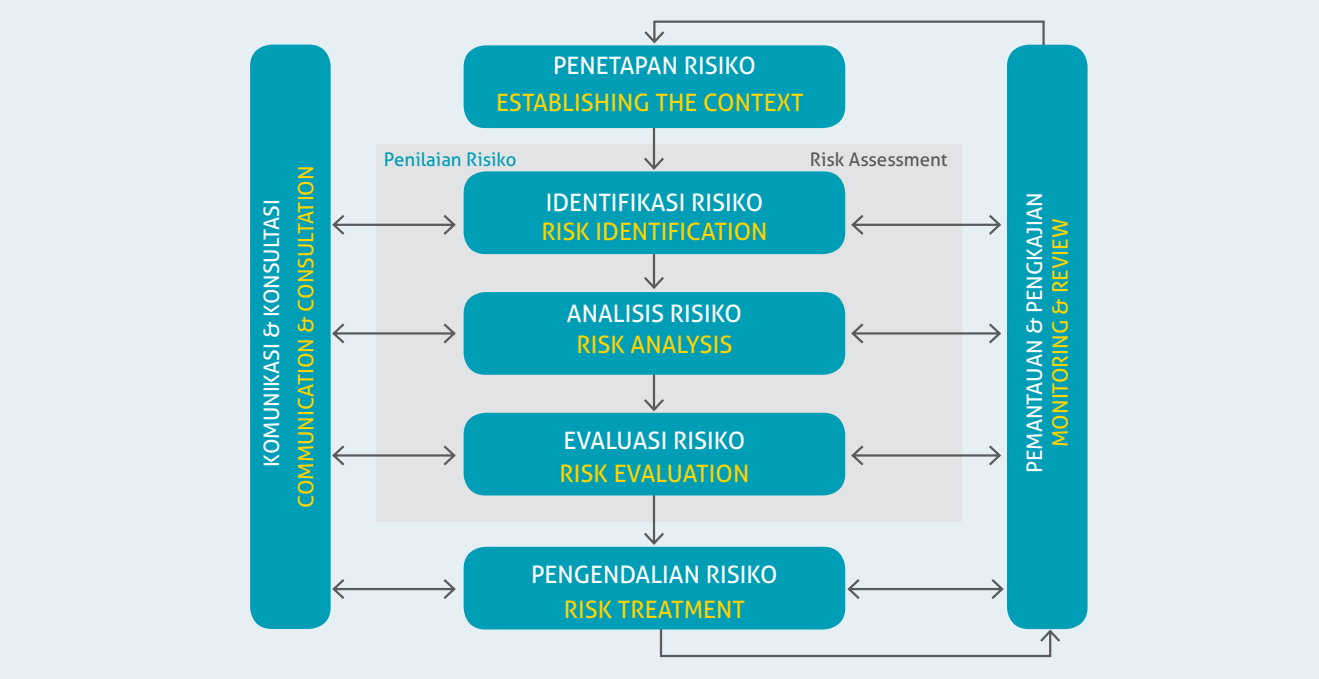

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengelolaan risiko Perusahaan dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, diantaranya adalah dengan memasukkan aspek Manajemen Risiko dalam KPI Korporat, unit maupun Anak Perusahaan, audit manajemen risiko oleh auditor internal, *review* implementasi dan asesmen *risk maturity* oleh Pihak Independen, *risk management award* (RMA), maupun pemantauan dan pelaporan kepada *stakeholders*.

Dalam pelaksanaannya, Divisi Manajemen Risiko secara berkala melakukan evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko korporat, dengan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi. Profil risiko dimaksud meliputi laporan pengelolaan risiko strategis, keuangan, operasional, proyek dan kepatuhan serta penilaian atas perbaikan kontrol dan penanganan risiko.

Unit kerja operasional selaku *risk owner* bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko pada seluruh aktivitas yang dilakukan. Pemimpin unit kerja operasional bertanggung jawab mengidentifikasi risiko, menilai risiko yang ada di unit kerjanya dan memantau risiko termasuk memitigasi risiko dengan level ekstrem

Risk Management System Effectiveness Evaluation

Monitoring and evaluation of the effectiveness in implementing the Company's risk management is carried out through several mechanisms, such as by incorporating aspects of Risk Management in Corporate KPI, units or subsidiaries, risk management audit by internal auditors, the implementation reviews and risk maturity assessment by an independent party, risk management award (RMA), as well as monitoring and reporting to stakeholders.

In practice, Risk Management Division periodically evaluates the effectiveness of corporate risk management system, by submitting risk profile report to Board of Directors. The risk profile comprises strategic risk management reports, financial, operational, projects and compliance and assessment of improvement and risk management controls.

The operational work unit as the risk owner is responsible for risk management in relation to all activities. The operational work unit chair person is responsible to identify risks, assess the risk occurring in its work unit and assess risks including mitigating risks

dan tinggi, kemudian melaporkan profil risiko serta tindak lanjut mitigasi yang dilakukan.

Pelaksanaan Enterprise *Risk Management* (ERM)

Pada tahun 2014, Perseroan memiliki target pencapaian *Maturity Level* ERM 3,5. Untuk mencapai target tersebut, PLN bekerja sama dengan Konsultan memetakan *maturity level* ERM di awal tahun, kemudian melakukan *Gap Analysis* untuk menentukan program kerja yang perlu dilaksanakan oleh PLN secara korporat untuk mencapai *maturity level* ERM 3.5 dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk maksud tersebut pada tahun 2014, dilakukan pengukuran *maturity level* guna melihat tingkat kematangan dalam implementasi manajemen risiko oleh perusahaan. *Assessor* independen yang melakukan pengukuran *maturity level* pada tahun 2014 ini adalah Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Metode Pengukuran *maturity level* menggunakan metode *Six Element of Infrastructure* yang dikombinasikan dengan *Capability Maturity Model* yang dikembangkan oleh *Carnegie Melon University*. *Six Element of Infrastructure* adalah 6 elemen atau aspek yang dilihat untuk mengukur tingkat kematangan, antara lain.

1. *Business strategy and policies*
2. *Business and risk processes*
3. *People and organization*
4. *Management Reports*
5. *Methodologies*
6. *System and Data*

Adapun *capability maturity* model, tingkat kematangan suatu system dinilai *(rating/scoring)* menjadi 5 (lima) tingkatan yaitu:

1. *Initial*
2. *Repeatable*
3. *Defined*
4. *Managed*
5. *Optimizing*

Target *maturity level* untuk PLN tahun 2014 adalah mencapai tahap *Define* menuju ke tahap *Managed*. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan dengan metode diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan *system* manajemen risiko di PT PLN (Persero) telah melampaui tingkat *Defined*. Penilaian tersebut berdasarkan penilaian rata – rata pada 8 (delapan) unit , Anak Perusahaan dan Divisi yang disampling dengan menggunakan bobot tertimbang jumlah risiko korporat yang dikelola oleh masing – masing unit, Anak Perusahaan atau Divisi tersebut.

Profil dan Pengelolaan Risiko Korporat Tahun 2014

Penyusunan Profil Risiko Tahun 2014 dilakukan dengan mengacu pada sasaran dan fokus perusahaan tahun 2014, yang telah diselaraskan dengan sasaran jangka panjang perusahaan. Risiko-risiko yang diidentifikasi dalam Profil Risiko Korporat Tahun 2014 terdiri dari risiko-risiko dengan level Ekstrem, Tinggi, Moderat dan Rendah. Perseroan kemudian fokus melakukan proses mitigasi terhadap risiko dengan profil ekstrim.

Profil Risiko Perusahaan tahun 2014 yang diuraikan adalah *key risks*, yaitu risiko-risiko yang secara dominan berpotensi mempengaruhi sasaran perusahaan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

in high and extreme level, and then report the risk profile and the mitigation follow-ups that have been taken.

Enterprise Risk Management (Erm) Application Roadmap

In 2014, the Company has a target to achieve the Maturity Level of ERM 3.5. To achieve these targets, PLN cooperates with Consultant and mapping ERM maturity level at the beginning of the year, and then conduct Gap Analysis to determine the work program that is to be implemented by PLN corporately to achieve maturity level of ERM 3.5 with the previously established criteria.

For that purpose in 2014, maturity level measurement has done in order to see the level of maturity in the implementation of risk management by the company. Independent assessors who perform measurements maturity level in 2014 is the Institute of Management, Faculty of Economics, University of Indonesia. Method of Measurement maturity level uses methods of Six Elements of Infrastructure combined with the Capability Maturity Model developed by Carnegie Melon University. Six Elements of Infrastructure are 6 elements or aspects viewed to measure the level of maturity, among others,

1. *Business strategy and policies*
2. *Business and risk processes*
3. *People and organization*
4. *Management Reports*
5. *Methodologies*
6. *System and Data*

The capability maturity model, the maturity level of a system scoring to 5 (five) levels, namely:

1. *Initial*
2. *Repeatable*
3. *Defined*
4. *Managed*
5. *Optimizing*

The target of maturity level for PLN in 2014 is reaching the Define stage tothe Managed stage. Based on that assessment has been carried out by the method above, it can be concluded that the level of risk management system maturity in PT PLN (Persero) has exceeded the Defined level. The assessment is based on the average assessment on eight (8) units, subsidiaries and divisions were sampled by using weight with total corporate risk managed by each unit, subsidiary or division.

Corporate Risk Profile and Management 2014

Risk Profile Preparation in 2014 performed with reference to the objectives and focuses of the company in 2014, which has been aligned with the company's long-term goals. The risks identified in the Corporate Risk Profile 2014 consists of Extreme, High, Moderate and Low-level risks. The Company then focuses on the mitigation process on risk with extreme profiles.

Corporate Risk Profile 2014 is the key risks, which are the risks potentially affecting predominantly the company's target as outlined below:

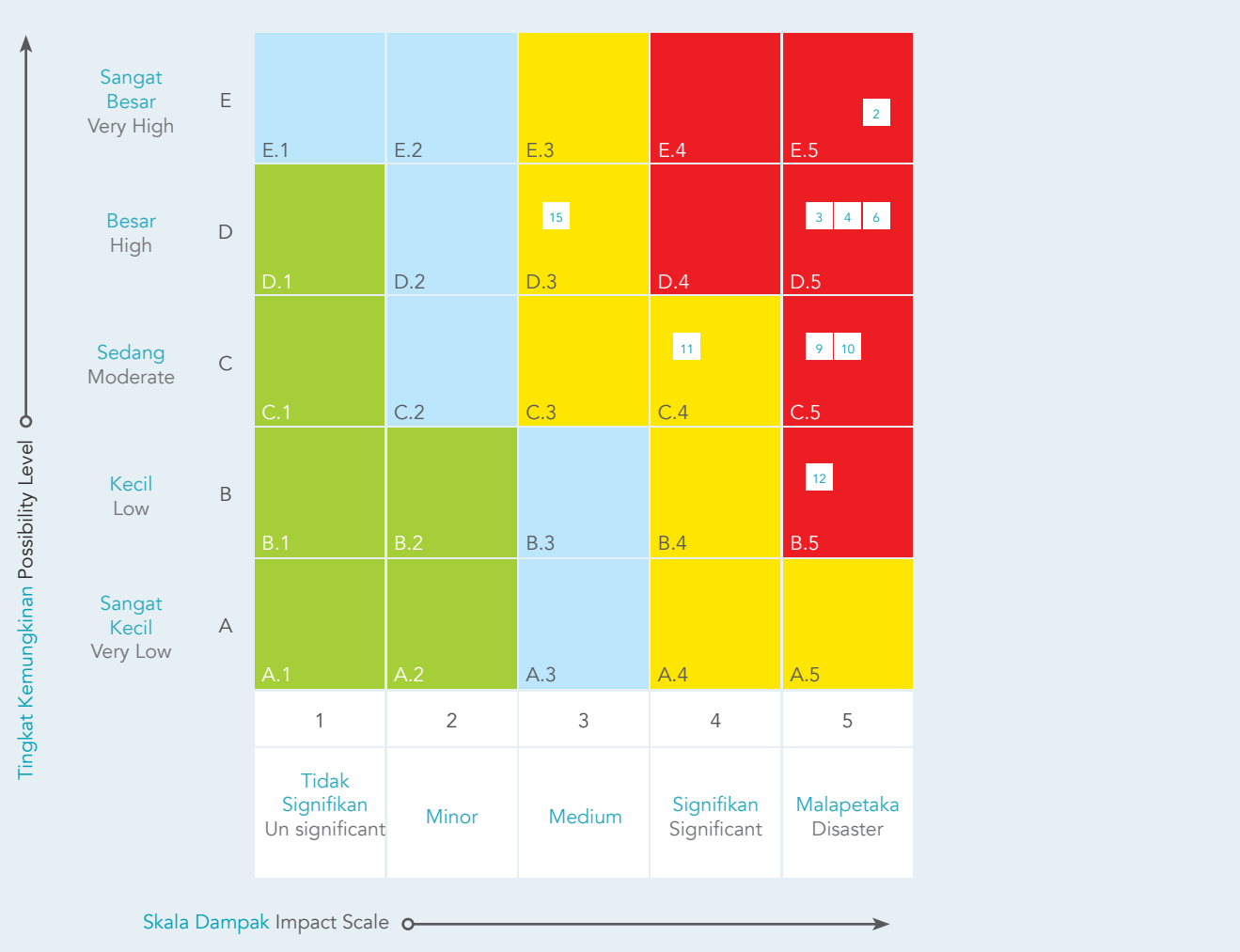

Deskripsi Risiko Description of Risks	Awal Initial	Triwulan IV Quarter IV
Tidak diperolehnya pendanaan yang memadai Insufficient funding	🔴	🟢
Keterlambatan penyelesaian proyek pembangkit, transmisi (PLN & IPP) Delay on the comppletetion of power plant project, transmission (PLN & IPP)	🔴	🔴
Tidak tercapainya kinerja operasional pembangkit (PLN) Under achievement of power plant's operational performance (PLN)	🔴	🔴
Ketidakselarasan penyelesaian proyek pembangkit dan transmisi Incongruities completion of generation and transmission projects	🔴	🔴
Terjadi pelampauan *debt covenant* yang ada Exceedances of the current debt covenant	🔴	🟡
Kendala kapasitas *handling system* pada pembangkit PLTU Capacity problem on power plant's handling system	🔴	🔴
Rasionalisasi tarif tenaga listrik tidak dapat dilakukan Electricity tariff rationalization that can not be achieved	🔴	🟢
Tidak optimalnya komitmen *stakeholder* atas penerapan SLA *(Service Level Agreement)* Stakeholders' commitment toward the implementation of SLA is not optimal	🔴	🟢
Peningkatan nilai tukar mata uang asing terhadap IDR The increase of foreign currency exchange rates against the IDR	🔴	🔴
Peningkatan biaya energi primer Increase in primary energy costs	🔴	🔴
Peningkatan biaya langsung non - bahan bakar per kWh yang tidak dapat diimbangi dengan peningkatan pendapatan Increase in non-fuel direct costs per kWh that can not be offseted by increase in revenue	🔴	🟡
Keterbatasan pasokan sumber energi (batubara/gas) Limited energy resources supply (coal/gas)	🔴	🔴
Ketidakmampuan pemulihan kegiatan pada kondisi force majeur dalam jangka waktu yang memadai Failure in restoration following force majeur event within in a reasonable timeline	🔴	🟢
Ketidaktersediaan likuiditas dalam melakukan kewajiban Limited liquidity to settle obligations	🔴	🟢
Tidak optimalnya jumlah, kualitas dan komposisi SDM. Unoptimal number, quality and composition of Human Resources.	🔴	🟡

1. Risiko tidak diperolehnya pendanaan yang memadai.
   Untuk mencapai pertumbuhan kelistrikan yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5 % pada tahun 2014 serta meningkatkan rasio elektrifikasi dan menjaga keandalan penyediaan listrik kepada masyarakat, Perusahaan membutuhkan pendanaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam pengembangan fasilitas penyediaan tenaga listrik. Kapasitas pendanaan PLN semakin terbatas hal ini terlihat dari *debt covenant* yang dimiliki PLN terutama untuk DSCR dan CICR terus mengalami penurunan ke ambang batas. Atas hal ini, PLN menghadapi risiko melemahnya kemampuan pendanaan investasi yang berupa potensi hambatan pada proses penyediaan pendanaan seperti keterbatasan kapasitas pendanaan dari ekuitas maupun pinjaman.

   Risiko ini akan membawa dampak terhambatnya penyediaan infrastruktur tenaga listrik untuk pertumbuhan penjualan tenaga listrik dan penyediaan *reserve margin* yang memadai yang pada akhirnya dapat berakibat pada pemadaman.

   Mitigasi yang dilakukan antara lain adalah dengan memastikan alokasi subsidi tahun 2014 dapat diterima tepat waktu, melakukan pinjaman ke perbankan nasional, memantau penyerapan dan *progress* proyek tahun 2014 sehingga bisa sinkron dengan rencana pendanaan yang akan di ambil.

1. Risk of not getting the adequate funding.
   To achieve electricity growth that can sustain national economic growth of 5.5% in 2014 and increase the electrification ratio and maintain the reliability of electricity supply to the public, the Company requires adequate funding to meet the investment needs in the development of electricity supply facilities. The capacity PLN's fund is limited as seen from debt covenants owned by PLN especially for DSCR and CICR that has continued to decline to the threshold. On this matter, PLN faces the risk of weakening the ability of investment funding in the form of the potential barrier in the process of providing funding such as the financing limited capacity of equity and loan.

   This risk will bring the impact of electricity infrastructure for electricity sales growth and the provision of adequate reserve margins, which it can result to thr outages.

   The mitigation is to ensure the subsidies allocation in 2014 can be received on time, make loans to national banks, monitoring the uptake and progress of the project in 2014 so it can sync with the funding plan that will be taken.

2. Risiko keterlambatan penyelesaian proyek pembangkit, transmisi (PLN & IPP).
   Risiko keterlambatan operasi pembangkit dan transmisi PLN maupun IPP merupakan risiko yang perlu mendapat perhatian khusus dan utama, hal ini mengingat karena kemungkinan terjadinya masih cukup besar. Potensi dampak yang ditimbulkannya juga cukup signifikan, khususnya terkait dengan terhambatnya pencapaian *fuelmix* yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak finansial berupa *cost overrun* subsidi.

   Penyebab risiko beragam, meliputi: kesulitan memperoleh perijinan (Pemda, Lingkungan, Kehutanan, Hubungan laut), keterlambatan perolehan penjaminan pemerintah, pencairan pendanaan yang lambat *(two step loan)* dan kegagalan oleh kontraktor EPC *(Engineering, Procurement and Construction).* Adanya Undang – Undang No 2 tahun 2012 dan Permen ESDM No 38 Tahun 2013 serta adanya SLA/Kesepakatan Bersama 13 Kementerian/Lembaga untuk menjaga kesinambungan fiskal pemerintah dan kesinambungan usaha penyediaan tenaga listrik PLN, sangat membantu PLN dalam membebaskan lahan dan mengurus perijinan.

   Mitigasi risiko yang dilakukan juga beragam, meliputi: memantau efektivitas pengendalian proyek dan sistem pengendalian konstruksi secara berkelanjutan, melakukan koordinasi dengan Divisi anggaran dalam mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan melakukan kerjasama dengan pihak terkait (Pemerintah Daerah, aparat keamanan, dll) terutama dalam hal pembebasan tanah dan perijinan masuk dalam SLA yang dipantau oleh UKP4.

3. Risiko tidak tercapainya kinerja operasional pembangkit (PLN)
   Risiko ini berasal dari kondisi pembangkit-pembangkit. Kondisi pembangkit PLN saat ini banyak yang sudah berumur dan banyak juga yang baru masuk. Untuk pembangkit yang sudah berumur kinerjanya sangat rentan mengalami *derating*, sementara untuk pembangkit yang masih baru seperti FTP-1 umumnya mengikuti *bathtube curve*.Untuk pembangkit FTP-1 pada beberapa lokasi mengalami *First Year Inspection* (FYI) yang melebihi durasi waktu yang telah dijadwalkan.

   Dengan demikian, penyebab risiko tidak tercapainya kinerja operasional pembangkit secara umum antara lain disebabkan pemeliharaan pembangkit tidak dapat dilakukan sesuai jadual yang telah ditentukan karena *reserve margin* yang rendah, kuantitas dan kualitas suku cadang tidak tersedia/pengadaan lambat serta usia pakai suku cadang yang melewati batas umur pemakaian, ketidaktersediaan energi primer sesuai jumlah, kualitas dan waktu, yang akan berdampak pada *Capacity Factor* dan *Heat Rate*.

   Dampak risiko yang masih termasuk kelompok esktrem ini diantaranya adalah tidak tercapainya target ketersediaan listrik (EAF), *fuelmix*, dan dapat menyebabkan terjadinya pemadaman.

   Mitigasi yang dilakukan diantaranya adalah: memantau kinerja pembangkit melalui *maturity level*, *physical asset management*, analisa pembangkit yang *derating*, kajian *risk rating* dan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance*

2. Risk of delay in completion of power plant and transmission project (PLN&IPP).
   The risk of delay in the operational of PLN and IPP transmission and power plant is a risk that needs special attention, it is given because the possibility is still quite large. The impact is potentially significant, particularly with the delay of fuelmix achievement that will ultimately lead to the financial impact in the form of subsidies cost overrun.

   The variety causes of risk are including: difficulty in obtaining licenses (Local Government, Environment, Forestry, Marine), delay in the getting government guarantee, the slow disbursement of funding (two-step loan) and failure by the EPC (Engineering, Procurement and Construction). The existence of Law No. 2 of 2012 and the regulation of Energy and Mineral Source Minister No. 38 of 2013 as well as the SLA / Understanding with 13 Ministries / Institutions to maintain the government fiscal sustainability and the continuity of electricity supply business of PLN, it will help PLN to liberate the land and manage the license.

   There are diverse risk mitigation that undertaken including: monitoring the effectiveness of project management and construction control system sustainably, to coordinate with the budget division in optimizing the available budget and to cooperate with stakeholders (local government, security forces, etc.), especially in terms of land acquisition and licensing included in the SLA monitored by UKP4.

3. Risk of not achieving power plant (PLN) operational performance.
   This risk is derived from the condition of power plants. There are many old and new power plant of PLN.For the old power plants, they are very susceptible to derating, while for the new power plant like FTP-1 generally follow the bathtube curve. For FTP plant-1 at some locations is experiencing First Year Inspection (FYI) which exceeds the duration that has been scheduled.

   Thus, the cause of the risk for not achieving the power plant operating performance is partly due to power plant maintenance can not be performed as scheduled prescribed because the low reserve margin, the quantity and quality of the spare parts are not available or in slow procurement and the age of spare parts is expired, the unavailability of primary energy according to the total, quality and time, which will have an impact on the Capacity Factor and Heat Rate.

   The risk impact that still includes these extreme groups which are not achieving the target of electricity availability (EAF), fuelmix, and can lead to outage.

   Mitigations are monitoring power plant performance through maturity level, physical asset management, derating power plant analysis, risk rating assessment and power plant's Quality Control (QC) and Quality Assurance (QA), handling

(QA) pembangkit, melakukan penanganan *Operational and Maintenance* (OM) melalui kerja sama dengan anak perusahaan, membangun *shelter* batubara untuk mengurangi *plugging*, membangun laboratorium analisis batubara untuk menjamin bahwa batubara yang diterima sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan serta menambah beberapa *coal handling facility* yang belum *redundant*.

Operational and Maintenance (OM) in collaboration with subsidiaries, building coal shelter to reduce plugging, building coal analysis laboratory to ensure that coal is in accordance with the required quality and adding some coal handling facility that is not redundant yet.

4. Risiko ketidakselarasan penyelesaian proyek pembangkit dan transmisi.
   Pembangunan pembangkit (PLN maupun IPP) dan jaringan transmisi dilaksanakan secara terpisah, sejak dari proses pendanaan hingga konstruksinya. Risiko ketidakselarasan operasi transmisi khususnya yang berhubungan terhadap proyek pembangunan pembangkit pada umumnya disebabkan oleh masalah perijinan kehutanan dan permasalahan sosial terkait pembebasan lahan tapak tower.

   Dampak atas risiko yang masih termasuk esktrem ini adalah hambatan dalam proses *commissioning*, keterlambatan penyelesaian proyek, *bottlenecking* penyaluran listrik, serta hambatan pada pencapaian target *fuelmix*.

   Mitigasi terhadap risiko tersebut lebih ditekankan pada koordinasi dengan pihak-pihak *stakeholder*, khususnya terkait perijinan dan pembebasan lahan proyek melalui mekanisme SLA PLN-Pemerintah, pengawasan yang lebih ketat pada proses konstruksinya serta pembentukan Divisi yang secara khusus menangani perijinan dan pembebasan lahan proyek, memasukkan penerapan manajemen risiko secara berkala dalam pengelolaan proyek yang saling terkait, serta mengkaji untuk usulan amandemen regulasi-regulasi terkait (UU No.2/2012- Pengadaan Tanah).

4. Risk of power plant project and transmission completion disharmony.
   The development of power plant (PLN and IPP) and the transmission network implemented separately, since the funding process to the construction. The risk of transmission operating disharmony particularly relating to power plant development projects which mainly due to licensing issues of forestry and social issues related land acquisition for tower site.

   The risk impact which still extreme are the obstacles in the commissioning process, delays in project completion, bottlenecking of electricity distribution, as well as barriers in achieving the fuelmix target.

   Mitigation against the risk is more emphasis on coordination with stakeholders, particularly related to licensing and projects land acquisition through SLA mechanism of PLN-government, monitoring on construction process and the establishment of the Division specifically addressing licensing and projects land acquisition, apply the risk management regularly in related project management, as well as reviewing the proposed amendments to the regulations related to the Act No. 2 / 2012- Land Acquisition.

5. Risiko terjadinya pelampauan *debt covenant*.
   Debt covenant merupakan indikator komitmen untuk melindungi pemberi pinjaman (*lender* atau kreditor) dari potensi gagal bayar, diantaranya adalah *Debt Service Commitment Ratio* (DSCR / rasio kemampuan perusahaan untuk menjaga kemampuan membayar pinjaman), dalam RKAP 2014 diproyeksikan sebesar 1,41 dan telah melewati ambang batas yang ditentukan oleh pemberi pinjaman.

   Risiko ini disebabkan diantaranya oleh tidak tercapainya target penerimaan pendapatan listrik, kenaikan mata uang asing terhadap rupiah sehingga meningkatnya beban dalam mata uang asing, peningkatan biaya bahan bakar, tunggakan pelanggan, meningkatnya suku bunga pinjaman, dan lain-lain.

   Selain dampak terburuk berupa *cross default* dan jatuhnya reputasi perusahaan / pemerintah, dampak lainnya adalah terjadinya permintaan pelunasan hutang di awal oleh kreditor, meningkatnya *cost of fund* dan terganggunya pengerjaan proyek (pembangkit, transmisi dan distribusi).

   Salah satu Mitigasi yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah untuk meminta kepada *lender* agar mengecualikan perhitungan *covenant* pada 2014 ini dan juga terus menjaga komunikasi yang baik dengan *lender* agar kepercayaan *lender* tetap terjaga dengan baik.

5. Risk of overshooting debt covenant.
   Debt covenant is an indicator of commitment to protect the lender (creditor) from the possibility of failed to pay, among others, the Debt Service Commitment Ratio (DSCR / ratio of company's ability to maintain the ability to repay loan), the CBP in 2014 is projected at 1.41 and had passed the threshold limit specified by the lender.

   The cause of these risks are not achieving the target of electricity revenues, the increase in foreign currency against the rupiah so that the increasing load in a foreign currency, the increase in fuel costs, customer's payment delay, rising loan interest rates, and others.

   Besides the worst effects in the form of cross default and the collapse of the company's reputation / government, other impact is the earlydem and of debt repayment by the creditor, the rising cost of funds and the disruption of the project (generation, transmission and distribution).

   One of the mitigations that has been done is to coordinate with the government to ask the lenders to exclude the calculation of this Covenant in 2014 and also continues to maintain good communication with lenders in order to lenders' confidence remain well preserved.

6. Risiko kendala kapasitas *handling system* pada pembangkit PLTU.
   Coal handling system adalah sistem penanganan penerimaan batubara pada pembangkit PLN, mulai dari pembongkaran *(unloading)* batubara dari kapal/ tongkang, penimbunan/ penyimpanan di *stock area*, maupun pengisian ke bunker *(power plant)*. Dalam hal ini, PLN menghadapi risiko terjadinya kendala dalam proses pengiriman dan penerimaan batubara di pembangkit PLN.

   Penyebab risiko ini antara lain: keterbatasan infrastruktur terutama fasilitas *unloading* yang berakibat terjadinya antrian panjang dalam proses pasokan batubara, lokasi geografis yang terpencil dan faktor cuaca yang tidak mendukung.

   Potensi dampak risiko yang masih termasuk ekstrem ini diantaranya: berkurangnya *availability* pembangkit, meningkatnya biaya *demurrage*, dioperasikannya pembangkit BBM dengan biaya yang lebih tinggi dan hambatan pada pencapaian target *fuelmix*.

   Adapun mitigasi risiko ini adalah: penggunaan *vessel* yang memiliki fasilitas *loading-unloading* sendiri, melakukan perbaikan / penambahan fasilitas *unloading* batubara pembangkit termasuk menyusun anggaran perbaikan *unloading*, dan penyesuaian model transportasi.

7. Risiko rasionalisasi tarif tenaga listrik oleh Pemerintah tidak terlaksana.
   Dalam rangka mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran, pemerintah telah mendapat persetujuan DPR pada tanggal 21 Januari 2014 untuk penerapan tarif *adjustment* (penyesuaian tarif bulanan) per 1 Mei 2014 untuk golongan tarif rumah tangga besar R3 (6.600 VA keatas), Kantor pemerintah skala menengah P-1 (6600 vA sd 200 KVA), Bisnis skala menengah B-2 (6600 VA sd 200 KVA) dan Bisnis skala besar B3 (diatas 200 KVA).

   Dalam pembahasan RAPBN-P 2014, pemerintah dan DPR sudah menyepakati kenaikan tarif listrik untuk enam golongan pelanggan mulai 1 Juli 2014. Kenaikan tarif diberlakukan dengan besaran 5,36 persen hingga 11,57 persen setiap dua bulan sekali tergantung jenis pelanggan.

   Setelah kenaikan 1 Juli 2014 masih ada dua kali lagi kenaikan listrik bagi keenam golongan pelanggan, yaitu 1 September 2014 dan 1 November 2014. Golongan rumah tangga R1 (1.300 VA) dengan kenaikan 11,36 persen setiap dua bulan, rumah tangga R1 (2.200 VA) naik 10,43 persen setiap dua bulan, dan rumah tangga R2 (3.500-5.500 VA) naik 5,7 persen setiap dua bulan. Kemudian, golongan pelanggan industri I3 *non go public* dengan kenaikan 11,57 persen setiap dua bulan, golongan penerangan jalan umum P3 naik 10,69 persen setiap dua bulan, dan golongan pemerintah P2 (di atas 200 kVA) naik 5,36 persen setiap dua bulan. Nilai penghematan subsidi dari kenaikan tarif enam golongan tersebut mencapai Rp7,42 triliun.

   Adanya kemungkinan penolakan dari berbagai pihak, maka rencana rasionalisasi tarif tersebut berpotensi tidak terlaksana sesuai tahapannya, sehingga akan berdampak subsidi overrun

6. Risk of handling system capacity constraints in steam power plant.
   Coal handling system is the handling system of coal acceptance in PLN, it begins withunloading coal from ships / barges, accumulation / storage in the stock area, as well as charging into the bunker (power plant). In this case, PLN is facing the risk of constraints in the process of sending and receiving coal in PLN.

   The cause of these risks are: the lack of infrastructure especially unloading facilities which results in long queues in the process of coal supply, located geographycally in remote area and unsupported weather factors.

   The potential of risk impact that still in extremes are: reduced power plant availability, increased demurrage costs, operation of fuel stations with higher costs and barriers in achieving the target fuelmix.

   The mitigation of this risk are: vessel usage which has a loading and unloading facility, make improvements / additional power plant coal unloading facilities including preparing the budget of unloading improvement, and transportation model adjustment.

7. Risk of electricity tariff rationalization by the Government that did not accomplish.
   In order to encourage electricity subsidies that well targeted, the government has approval from Parliament on January 21, 2014 for the implementation of monthly tariff adjustment as of May 1, 2014 for large household tariff group R3 (6,600 VA and above), medium-scale government office P-1 (6,600 vA to 200 KVA), medium-scale Business B-2 (6,600 VA to 200 KVA) and large-scale Business B3 (above 200 KVA).

   In the discussion of Revised Budget 2014, the government and the Parliament had agreed on the increase in electricity tariffs for the six classes of customers from July 1, 2014. The increase in tariffs imposed by the amount of 5.36 percent to 11.57 percent every two months, depending on the type of customers.

   After the increase in July 1, 2014, there are two times of electricity rise for six classes of customers, namely September 1, 2014 and November 1, 2014. The groups ofhousehold R1 (1.300 VA) with a 11.36 percent rise every two months, households R1 (2,200 VA) rose 10.43 percent every two months, and household R2 (3,500-5,500 VA) rose 5.7 percent every two months. Then, groups of industrial customers I3 non go public with 11.57 percent rise every two months, street lighting group P3 rose 10.69 percent every two months, and the government group P2 (above 200 kVA) rose 5.36 percent every two months. The value of the subsidy savings from increasing rate of six groups reached Rp 7.42 trillion.

   The possibility of rejection from various parties, then the tariff rationalization plan was potentially not implemented in accordance stages, so that it will affect over run subsidies at

sekurang-kurangnya Rp7,42 triliun. Namun demikian, dengan telah disetujuinya kenaikan tarif dasar tenaga listrik ini, faktor selanjutnya yang dapat menghambat pelaksanaan kenaikan tarif ini adalah penolakan dari konsumen. Sampai dengan akhir tahun 2014 belum ada reaksi dari Masyarakat terhadap kenaikan tarif listrik ini. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut diatas, maka level risiko mengalami penurunan menjadi level rendah.

Adapun mitigasi yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan mempersiapkan dan mengkoordinasikan dengan *stakeholder* terkait dan sosialisasi kepada segenap elemen masyarakat. Selain itu harus menjaga agar tidak terjadi pemadaman, dan menjaga agar jika terjadi pemadaman dapat segera diselesaikan.

8. Risiko tidak optimalnya komitmen *stakeholder* atas penerapan SLA *(Service Level Agreement)* PLN-Pemerintah.

   Penerapan SLA antara PLN dan Pemerintah akan sangat membantu PLN dalam penyediaan infrastruktur kelistrikan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan juga penurunan subsidi listrik pemerintah. Beberapa KPI *(key performance indicator)* PLN sangat tergantung kepada komitmen dari instansi / lembaga lain di luar PLN seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, SKK Migas dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam upaya penambahan kapasitas pembangkit, ketersedian pasokan gas, rasionalisasi tarif tenaga listrik dan lain-lain.

   Dampak yang ditimbulkan risiko ini cukup signifikan, khususnya terkait dengan terhambatnya pencapaian *fuelmix* yang pada akhirnya berdampak penurunan kinerja keuangan berupa *cost (subsidy) overrun* maupun menurunnya kemampuan pasokan listrik / pemadaman.

   Mitigasi yang dilakukan antara lain dengan mengadakan pertemuan koordinasi antara *stakeholders* setiap 1 bulan sekali untuk tindak lanjut penerapan SLA dan melakukan kajian atas hambatan-hambatan dan dampak yang dapat terjadi.

9. Risiko peningkatan nilai tukar mata uang asing terhadap IDR.
   Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah sangat mempengaruhi kemampuan PLN dalam memenuhi kewajiban hutangnya. Dengan tren kurs USD terhadap Rupiah pada akhir tahun 2013 yang menguat secara signifikan, pinjaman porsi USD yang cukup signifikan (78,5%) dari total keseluruhan pinjaman, dan juga mengingat bahwa sebagian besar material pembangkit dan penyaluran merupakan produk impor yang biayanya dalam mata uang asing, risiko mata uang menjadi meningkat.

   Dampak yang ditimbulkan dari risiko ini antara lain munculnya *cost overrun*, memicu *debt covenant* yang terlampaui dari batas yang ditentukan, termasuk DSCR terlampaui sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor/ peminjam terhadap kemampuan PLN menghasilkan laba (profitablitas).

   Mitigasi yang dilakukan diantaranya: mengkombinasikan pendanaan antara valas dengan Rupiah, pemantauan secara ketat kebutuhan valas 1 bulan ke depan agar pembelian valas dapat dilakukan pada harga yang optimal. PLN juga sedang menunggu kejelasan kebijakan tentang pelaksanaan *hedging*.

least Rp7.42 trillion. However, having approval of electricity tariff increase, the next factor that could impede the implementation of this rate increase is the rejection fom the consumer. Until the end of 2014, there has been no reaction from the society on this increasing electricity tariff. Having consider the conditions mentioned, the risk level decreased to a low level

The mitigation is to prepare and coordinate with relevant stakeholders and disseminate to all elements of society. In addition,it has to maintain for having blackouts, and resolve immediately if there is an outage.

8. Risk of not optimal stakeholder's commitment for the implementation of SLA (Service Level Agreement) PLN-Government.
   The application of SLA between PLN and the Government will be very helpful for PLN in providing electricity infrastructure, improve service quality to the community and also a decrease in electricity subsidy by the government. Some KPI (key performance indicator) of PLN is dependent upon the commitment of other agencies / institutions outside PLN such as the Ministry of Forestry, Ministry of Transportation, Ministry of Energy, Ministry of Finance, SKK Gas and Local Government, especially in efforts to increase generation capacity, availability of gas supply, rationalization of electricity tariff and others.

   The impact of this risk is significant, particularly related to inhibition of fuelmix achievement which ultimately affect the reduction of finance performance such as cost overrun (subsidy) or decreased ability of the power supply/outages.

   The mitigation is conducting coordination meeting between stakeholders every 1 month to follow up the implementation of the SLA and conduct a review of barriers and the impact that may occur.

9. Risk of increasing foreign currency exchange rates against Rupiah.
   Risk of increasing foreign currency exchange rates against the Rupiah will influence PLN's ability to meet debt obligations. With the trend of the US dollar exchange rate against the rupiah at the end of 2013 which rose significantly, loan portion of USD is in significant portion (78.5%) of the total loan, and also considering that the majority of power plant material and the distribution is imported products in the foreign currency and risk of currency is increased.

   The impact of these risks, among others, the emergence of cost overrun, trigger debt covenants that exceeded specified limits, including DSCR is passed that can lead to distrust of investors / borrowers against PLN's ability to generate profits (profitability).

   Mitigation carried out is combining funding between the foreign currency and Rupiah, monitoring of foreign exchange in the next one month in order to purchase foreign exchange can be done at the optimal price. PLN also are awaiting the clarity on the implementation of the hedging policy.

10. Risiko peningkatan biaya bahan bakar.
    Mengingat bahwa sekitar 68% dari OPEX *(operational expenditure)* PLN adalah merupakan biaya bahan bakar (energi primer), maka fluktuasi ataupun kenaikan harga energi primer akan berdampak langsung pada kinerja finansial PLN.

    Hal – hal yang dapat menyebabkan tingginya risiko peningkatan biaya energi primer adalah kontrak gas dilakukan dalam USD, kontrak Batubara dilakukan dalam Rupiah, namun ada klausul penyesuaian terhadap nilai tukar dolar di PLTU tertentu (contoh: Tanjung Jati), adanya kontrak-kontrak baru yang dieksekusi di tahun berjalan dengan potensi negosiasi harga kenaikan harga bahan bakar (ICP, Gas, Panas Bumi), dan kenaikan mata uang asing terhadap Rupiah. Selain faktor harga, faktor konsumsi juga berpengaruh terhadap peningkatan biaya energi primer.

    Dampak peningkatan biaya bahan bakar terutama adalah potensi *cost overrun* yang semakin besar jika *fuel mix* dan harga bahan bakar meningkat. Target *fuel mix* masih sulit dicapai dan harga bahan bakar diluar kontrol PLN, sehingga risiko ini masih termasuk kelompok ekstrem.

    Mitigasi yang dilakukan diantarnya: mengkaji *Passthrough* peningkatan biaya ke pemerintah/ pelanggan, melakukan kontrak dalam mata uang Rupiah, melakukan uji ketahanan keuangan perusahaan terhadap peningkatan harga energi primer.

11. Risiko peningkatan biaya langsung non-bahan bakar per kWh yang tidak dapat diimbangi dengan peningkatan pendapatan.

    Komponen biaya langsung non-bahan bakar merupakan salah satu komponen yang harus dikelola oleh PLN sebagai bagian dari pengelolaan BPP yang dapat dikendalikan.

    Risiko yang dihadapi adalah timbulnya biaya pemeliharaan yang tidak terduga, inflasi yang berakibat pada kenaikan harga material dan jasa, penurunan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang berakibat pada meningkatnya biaya komponen dalam mata uang asing serta kebijakan pengangkatan karyawan alih daya.

    Mitigasi yang sudah dilakukan PLN antara lain memantau realisasi beban operasi terhadap *budget* yang dilakukan tiap minggu, melakukan perbandingan harga dan kualitas suku cadang non OEM, menetapkan kebijakan pemakaian beban operasi yang belum dianggarkan sebelumnya harus melalui prosedur persetujuan yang lebih panjang, menetapkan kontrak payung dengan vendor untuk pengadaan material/ suku cadang secara jangka panjang dengan harga tetap, melakukan sisir tarif, mengoptimalkan pemanfaatan material cadangan, pengaturan kembali jadwal pemeliharaan.

    Selain itu, mitigasi yang akan dilakukan oleh PLN adalah melakukan analisa biaya operasional dan menghubungkan dengan pengelolaan keuangan, evaluasi kinerja dan kebutuhan fasilitas pendukung, mempertajam akurasi perencanaan pemeliharaan, menerapkan *cost management*, menerapkan *reengineering* proses pengadaan, melaksanakan kontrak-kontrak pengadaan dalam mata uang Rupiah, menerapkan *Joint Procurement*.

10. Risk of increasing fuel cost.
    Considering that approximately 68% of PLN'sOPEX (operational expenditure) is the cost of fuel (primary energy), the fluctuation or the increase in primary energy prices will have a direct impact on the financial performance of PLN.

    The things that can cause a high risk on an increase in the cost of primary energy is gas contracts in USD, coal contracts in Rupiah, however there is a clause adjustment to the dollar exchange rate at a particular steam power plant (example: Tanjung Jati), there are new contracts executed in the current year with the potential for negotiating prices of rising fuel prices (ICP, Gas, Geothermal), and an increase of foreign currencies against the rupiah. Besides the price factor, consumption factors also affect the increase in primary energy costs.

    The impact of increasing fuel costs primarily is the great potential of cost overrun if the fuel mix and fuel prices increased. Target of fuel mix is still difficult to achieve and fuel prices beyond the control of the PLN, so the risk is still considered in extreme groups.

    The mitigation is assessing Pass through of increasing costs to government / customer, performing the contract in Rupiah, conducting resilience test for the company's financial to the increase in the primary energy price.

11. Risk of increasing direct costs of non-fuel per kWh that can not be offset by increasing revenue.

    Component of non-fuel direct costs is one of the components that should be managed by PLN as part of BPP management that can be controlled.

    The risks are the emergence of unexpected maintenance costs, inflation that results in rising prices of materials and services, the decline of the rupiah against foreign currencies resulting in increased component cost in foreign currency and the hiring policy of outsourcing.

    Mitigation that has been done by PLN is monitoring the realization of operating expenses against the budget in every week, making comparison of price and quality of non-OEM spare parts, assigning the policy of operating expenses usage that have not budgeted previously, so it had to go through a longer approval procedures, establishing a contract with the vendor for the procurement of materials / spare parts in the long term with fixed price, conducting screened rates, optimizing the utilization of additional material, setting back the schedule of maintenance.

    In addition, mitigation that will be done by PLN is to analyze operating costs and connect with financial management, evaluate performance and supporting facilities, sharpen the accuracy of maintenance planning, implement cost management, implement procurement process reengineering, implement procurement contracts in Rupiah, implement the Joint Procurement.

12. Risiko keterbatasan pasokan energi primer (batubara/gas).
Kontinyuitas pasokan batubara dan gas menjadi salah satu risiko yang berpotensi terjadi dan berpengaruh pada sasaran strategis perusahaan tahun 2014, diantaranya karena masih adanya klausul *best effort* dalam kontrak jual-beli gas dimana PLN ikut menanggung risiko gas depleting, maupun karena terjadinya gangguan pada beberapa sumur gas. Turunnya harga batubara berpotensi menyebabkan produsen tidak mengoptimalkan produksi atau pemasok batubara memprioritaskan ekspor karena harga yang lebih menguntungkan dari pada penjualan domestik, kuota DMO batubara dan gas yang tidak mencukupi, keterbatasan transportasi dan infrastruktur, serta faktor cuaca turut menghambat ketersediaan pasokan sampai di pembangkit.

Risiko ini akan berdampak langsung pada *fuelmix* dan peningkatan BPP, mengingat bahwa apabila terjadi permasalahan pada pasokan gas ataupun batubara maka salah satu substitusinya adalah BBM.

Mitigasi yang telah dilakukan antara lain dengan menugaskan PLN batubara untuk memasok 20% batubara dan berkoordinasi dengan SKK Migas untuk tembahan dan alokasi gas baru. Selain itu PLN juga melakukan kontrak jangka panjang kepada pemasok batubara dan gas untuk menjamin ketersediaan pasokan energi primer. Dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan bulan Desember tahun 2014, dimana tingkat penyerapan gas dan pemenuhan batubara telah terpenuhi, Disamping itu PLN juga akan mengupayakan beberapa langkah mitigasi risiko, antara lain dengan melakukan analisa mengenai perluasan bisnis PLN mencakup *supply chain energy primer* (gas/LNG) dan melakukan alokasi/pengalihan gas antar pembangkit untuk kontrak-kontrak yang akan habis masa berlakunya.

12. Risk of limited primary energy supply (coal/gas).
The continuity of coal and gas supply became one of the risks that could potentially occur and affect the company's strategic objectives in 2014, such as the persistence of best effort clause in the contract of gas sales which PLN has the risk of depleting gases, as well as the disruption of several gas wells. The fall price of coal has potentially caused the manufacturer does not optimize the production or coal supplier prioritizes the export because the price is more favorable than domestic sales, DMO's quota of coal and gas are inadequate, limited transportation and infrastructure, as well as the weather factors also inhibit the availability of supplies arrived at the power plant site.

This risk will have a direct impact on fuelmix and improvement of BPP, considering that if there is problems in the coal and gas supply then the substantial thing is the fuel.

Mitigation that has been done is assigning PLN of coal to supply 20% of coal and coordinate with SKK oil and gas for additional and new gas allocation. In addition, PLN also undertakes long-term contracts for coal and gas suppliers to ensure the availability of primary energy supply. Taking into account the conditions until December 2014, where the rate of gas absorption and coal storage has been fulfilled, beside that, PLN will also be seeking some risk mitigation steps, among others, by conducting an analysis of the PLN's business expansion which including supply chain of primary energy (gas / LNG) and performing allocation or gas transfer between power plants on the contracts that will be expired soon.

13. Risiko ketidakmampuan pemulihan kegiatan pada kondisi force majeur dalam jangka waktu yang memadai *(billing system)*.

    Dengan cakupan pelayanan yang luas dan merupakan obyek vital, maka kegiatan Perusahaan sangat bergantung kepada keandalan sistem. Atas hal ini, terdapat risiko bahwa Perusahaan harus dapat menyediakan pelayanan yang optimal dalam keadaan force majeur sehingga terdapat potensi keterlambatan pemulihan kegiatan.

    Dampak risiko ini diantaranya: kehilangan potensi pendapatan, keterlambatan penanganan, dampak biaya, kerusakan aset kritis, hingga terhentinya proses bisnis kritikal PLN.

    Mitigasi yang telah dilakukan adalah dengan membuat back-up site melalui *Disaster Recovery Center* (DRC) untuk system IT pada kondisi force majeur. *Back up site* diletakkan di lokasi yang terpisah dan saat ini *back up site* bersifat *mirroring / hot back-up*, sudah dilakukan pengujian untuk *sistem back up* dan berhasil. Kesiapan *back up site* dalam menjalankan fungsinya telah melalui audit baik internal maupun eksternal.

    Disamping itu PLN juga akan mengupayakan langkah mitigasi risiko dengan melakukan *review* IT master plan serta mempertimbangkan risiko ini untuk masuk ke dalam bagian dari *Business Continuity Management* jika suatu saat diterapkan.

14. Risiko ketidaktersediaan likuiditas dalam melakukan kewajiban
    Untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman, PLN perlu memastikan ketersediaaan likuiditas untuk membayar kewajibannya yang jatuh tempo. Ketidak mampuan pembayaran kewajiban tersebut secara tepat waktu akan menimbulkan dampak antara lain, ketidakpercayaan investor/ peminjam terhadap kemampuan pembayaran hutang PLN serta memicu kreditor lain untuk meminta pelunasan hutang di awal dan menghambat pengajuan hutang di masa datang.

    Dampak risiko ini diantaranya: ketidakpercayaan investor/ peminjam terhadap kemampuan pembayaran hutang PLN serta memicu kreditor lain untuk meminta pelunasan hutang di awal dan menghambat pengajuan hutang di masa datang dan kerugian sebesar bunga KMK apabila terdapat masalah likuiditas pada PLN dengan asumsi bahwa kekurangan likuiditas akan di atasi dengan kredit modal kerja.

    Adapun mitigasi yang akan dilakukan antara lain menyusun kebijakan kontinjensi apabila terjadi risiko likuiditas dalam memenuhi kewajiban, meningkatkan batas plafon Kredit Modal Kerja hingga mencari pinjaman melalui perbankan atau obligasi.

15. Risiko kekurangan jumlah, kualitas, dan komposisi sumber daya manusia yang produktif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang (sistem regenerasi).

    Risiko ini dapat disebabkan oleh pensiunnya pegawai-pegawai dengan kompetensi tertentu, proses knowledge management yang belum optimal, penilaian berbasis kinerja yang belum optimal, masih kurangnya sertifikasi profesi dan

13. Risk of activities recovery inability on the force majeur condition within a reasonable time (billing system)

    With a wide service coverage and a vital object, the Company's activities are very dependent on the system reliability. On this matter, there is a risk that the Company should be able to provide an optimum service in case of force majeure so it can cause a potential delay in the recovery of activity.

    The risk impacts are: loss of potential revenue, delays in treatment, the cost impact, damage of critical assets, until the cessation of critical business processes of PLN.

    Mitigation that has been done is to make a back-up site through the Disaster Recovery Center (DRC) for the IT system on the condition of force majeure. Back up site is placed in a separate location and has the nature of mirroring / hot backup, the back up system is tested successly. The readiness of back up site in carrying out its functions have been through both internal and external audits.

    Beside that, PLN will also be working on risk mitigation by reviewing the IT master plan, and considering this risk to get into the part of the Business Continuity Management if it is applied.

14. Risk of liquidity unavailability in performing the obligations.
    To fulfill the payment of principal and loan interest, PLN needs to ensure the availability of liquidity to pay the maturing obligations. The inability of the obliged payment on time will have an impact, among others, the distrust of investors / borrowers on the loan repayment ability of PLN and trigger another creditor to request early repayment of debt and hamper the future debt submission.

    The risk impacts are: the distrust of investor / borrower against the loan repayment ability of PLN and trigger another creditor to request early repayment of debt and hamper the future debt submission and the loss of interest for working capital loans (KMK) when there is a problem of liquidity in PLN with the assumption that the liquidity shortage will be overcome with working capital loans.

    The mitigation is to develop contingencies policies in case of liquidity risk in meeting obligations, to improve working capital loan limitation to seek loans through banks or bond.

15. Risk of productive quantity, quality and human resources composition shortage and in accordance with the needs of a growing organization (regeneration system).

    This risk may be caused by the retirement of employees with specific competencies, knowledge management processes and performance-based assessment that are not optimal, the

jumlah orang yang tersertifikasi, serta tidak adanya proses regenerasi yang memadai sehingga menghambat integritas layanan PLN ke masyarakat.

Dampak risiko yang ditimbulkan daintaranya: menurunnya tingkat pelayanan pelanggan yang menimbulkan keluhan pelanggan dan menurunnya kualitas pengelolaan pembangkit baru.

Adapun mitigasi yang telah dilakukan antara lain adalah dengan menyusun perencanaan SDM, melakukan mutasi karyawan sesuai pemetaan talenta yang ada dan kebutuhan organisasi dan mengimplementasikan sistem aplikasi manajemen organisasi (AMOR). Di samping itu PLN juga akan mengupayakan beberapa langkah mitigasi risiko, antara lain dengan membuat perencanaan tenaga kerja, program karir untuk menarik, merekrut mengembangkan talenta SDM serta proses suksesinya dan mengembangkan directori kompetensi, uraian jabatan, kebutuhan kompetensi jabatan untuk seluruh proses bisnis.

Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Satuan Pengawasan Intern (SPI) PLN memiliki tugas pokok meliputi penyusunan dan pembinaan sistem audit perusahaan, penyelenggaraan audit intern, dan penyusunan kebijakan pembinaan audit internal.

Tugas Pokok Kepala Satuan Pengawasan Intern

Kepala Satuan Pengawasan Intern, bertanggung jawab memastikan terlaksananya audit internal berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance),* dengan tugas pokok:

1. Menyusun dan memastikan terlaksananya pengembangan audit internal:
   - Melaksanakan pengembangan kebijakan dan standar audit sesuai dengan praktek GCG.
   - Menyusun dan melaksanakan kebijakan, sistem dan standarisasi audit internal.
2. Memastikan terlaksananya program audit internal:
   - Menyusun dan melaksanakan perencanaan audit internal.
   - Melaksanakan pengelolaan audit internal dan audit khusus (investigasi / *fraud*).
   - Menyampaikan laporan dan rekomendasi audit kepada Direktur Utama dan pihak terkait lainnya.
3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pembinaan audit internal:
   - Melaksanakan pembinaan audit ke seluruh Unit Perusahaan.
   - Melaksanakan pengelolaan hubungan dengan auditor eksternal.

Pada 20 Januari 2010, perusahaan telah menerbitkan Piagam Pengawasan Intern PT PLN (Persero) sebagai wujud pelaksanaan GCG. Piagam ini dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi perusahaan dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas operasi, pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola dengan mengedepankan sikap profesionalisme sesuai dengan prinsip GCG.

lack of professional certification and the number of people who certified, and the absence of adequate regeneration process thus hampering the integrity of PLN's service to society.

The risk impacts are: decreased level of customer service that cause customer complaints and the declining of management quality of the new generation.

The mitigation that has been done are arranging human resources planning, transferring employees based on existing talents mapping and needs of the organization and implementing the organization management application systems (AMOR). In addition, PLN will also be seeking some risk mitigation steps, such as by making workforce planning and interesting career programs, recruiting and developing human resource talents as well as succession process and developing competence directory, job descriptions, job competency requirements for the entire business process.

Internal Control of Units (SPI)

The Internal Control Unit (SPI) has been assigned main duties involving preparation and development of the company's audit system, organization of internal audits and preparation of internal audit guidance policies.

Main Tasks of Internal Control's Head Unit

Head of Internal Control Unit, responsible for ensuring the implementation of internal audit is based on Good Corporate Governance (GCG), and its main tasks as follows:

1. Developing and ensuring the implementation of the development of internal auditing:
   - Implementing policy development and auditing standards in accordance with Good Corporate Governance practices
   - Developing and implementing policies, systems and standardization of internal audit
2. Ensuring the implementation of the internal audit program:
   - Develop and implement an internal audit planning
   - Carry out internal audits and special audits (investigative / fraud)
   - Delivering audit reports and recommendations to the Chief Executive Officer and other related parties
3. Developing and implementing internal audit policy guidance:
   - Implementing audit guidance throughout the Company Unit
   - Managing the relationship with the external auditor

On 20 January 2010, the Company issued the PT PLN (Persero) Internal Control Charter as a form of implementing GCG. The Internal Control Charter is designed to provide added value and improve corporate operational performance to achieve objectives through a systematic and regulated approach of evaluation process and improving operational effectiveness, risk management, managing process, and the governance process by prioritizing a professional attitude in line with GCG principles.

Piagam Pengawasan Intern juga dibuat untuk mengatur kegiatan SPI dalam melakukan kegiatan pengujian *(assurance)* dan konsultasi yang independen, objektif, tidak berprasangka buruk terhadap *auditee* serta menjunjung kode etik auditor.

The Internal Control Charter was also created to regulate the work of the Internal control unit in carrying out its assurance role, as well as its independent, objective and unprejudiced consultative activities for the auditee, and demonstrating the auditor code of conduct as well.

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern

Struktur organisasi Satuan Pengawas Intern sesuai SK DIR No. 159.K/DIR/2012 tanggal 03 April 2012 adalah sebagai berikut:

Internal Control Organizational Structure

The Internal Control Unit organizational structure was regulated accordance to the board of commissioner's decision letter no. 159.K/DIR/2012 dated 3 April 2012, as illustrated in the scheme below:

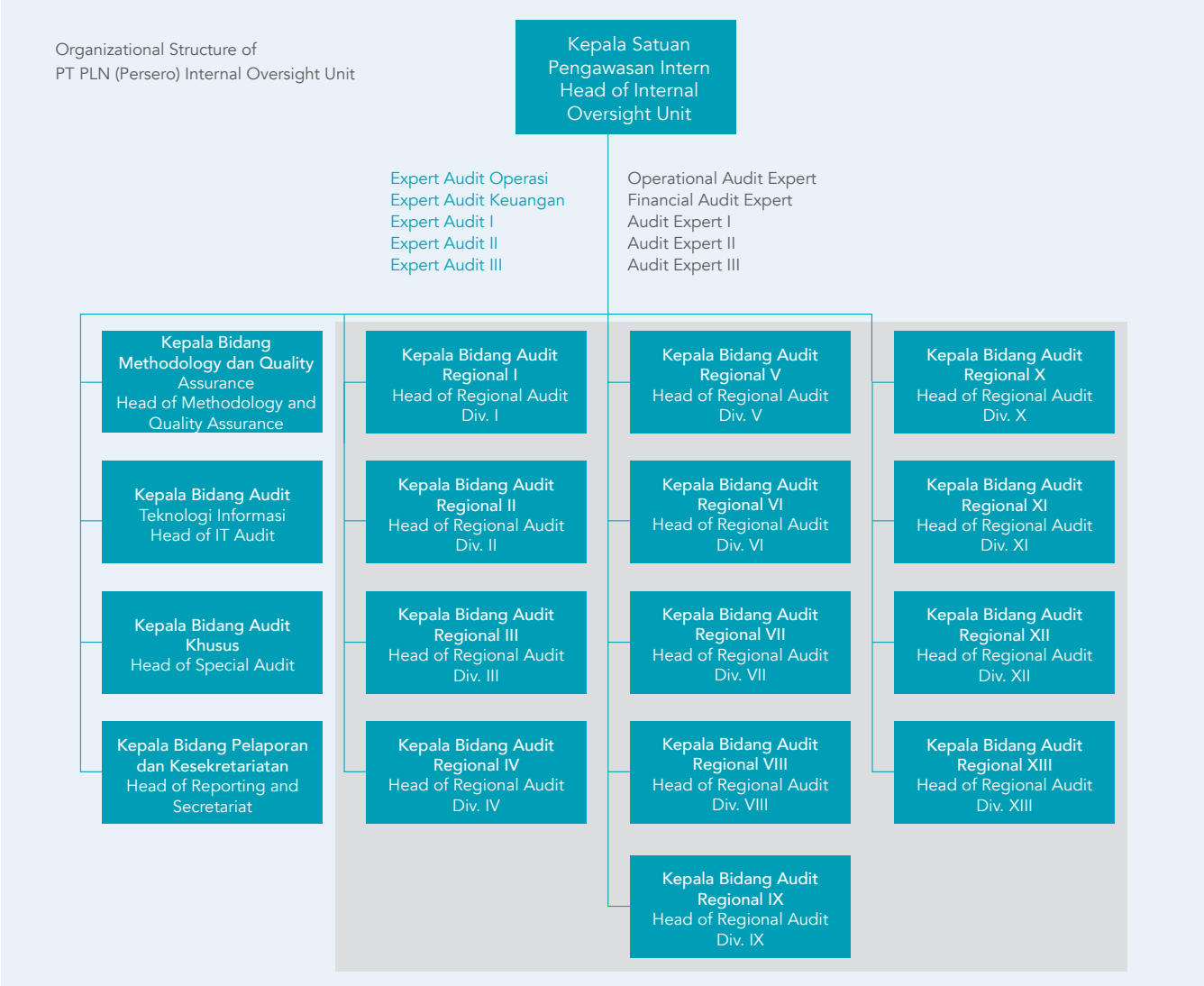

Kepala SPI, Kedudukan dan Proses Pemilihan

Sesuai formasi tersebut, organisasi SPI dipimpin oleh Kepala SPI yang berada langsung di bawah Direktur Utama dan bertangggung jawab kepada Direktur Utama. Pemilihan Kepala SPI dilakukan oleh Direktur Utama dengan sepengetahuan Komisaris Utama.

Chairman of the SPI, Position and Selection Process

As can be seen from the Chart of Organization Structure, the Internal Control Organization led by a Chief of Internal Control, which is directly under the CEO and being responsible to the President Director. Election of Chairman of the SPI is conducted by the President Director, after acknowledged by the President Commissioner.

Personalia Satuan Pengawas Intern saat ini terdiri dari dari 1 Kepala Satuan Pengawasan Intern, 4 kepala bidang di kantor SPI pusat yaitu, 1 KBID MQA + 2 Auditor, 1 KBID TI + 3 Auditor, 1 KBIDSUS + Auditor, 1 KBID LPS + 3 Tenaga Administrasi di kantor SPI Pusat, 13 Kepala Bidang Region diluar Kantor Pusat, 4 Expert, 154 Tenaga Auditor Regional, Unit dengan jumlah total sebanyak 185. Sebagian besar tenaga auditor tersebut sudah bersertifkat QIA.

Internal Supervisory Unit has personnel currently consists of 1 Head of Internal Supervisory Unit, 4 division head in central of Internal Supervisory Unit (SPI) which are 1 Head of Methodology and Quality Assurance + 2 Auditors, 1 Head of IT + 3 Auditors, 1 KBIDSUS + Auditor, 1 KBID LPS + 3 Administrative in Supervisory Unit Office, 13 Division Head in Supervisory Unit Office, 4 Experts, 154 Regional auditor employee, Unit with total number of 185. Most of the auditors is QIA-certified.

Jumlah personalia SPI, 2014.

Uraian	Jumlah	Description
KSPI	1	KSPI
Expert	4	Expert
Kepala Bidang SPI Pusat	4	Division Head of Internal Supervisory Unit (SPI)
Kepala Bidang Regional	13	Division Head of Regional
Auditor Regional	154	Regional Auditor
Auditor SPI Pusat	6	Head of SPI Auditor
Administrasi SPI Pusat	2	Head of SPI Administration
Sekretaris KSPI	1	Secretary of KSPI
Jumlah	**185**	**Total**

Pemeriksaan Operasional Tahun 2014 dan Tindak Lanjut

Berdasarkan Progam Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2014, sampai dengan triwulan IV 2014, SPI telah melaksanakan Pemeriksaan Operasional terhadap 49 unit induk, 244 Unit Pelaksana, 12 Direktorat PLN Pusat, 2 Anak Perusahaan. Total Obyek *(auditee)* yang diperiksa sebanyak 307 dengan jumlah temuan sebanyak 1.863 temuan.

Dari 1.863 temuan tersebut, tindak lanjut yang telah dinyatakan selesai sebanyak 1.364 temuan dengan rincian temuan sebagai berikut:

1. Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Operasional Audit Regional SPI I s.d XIII Tahun 2014.

Performance Audit of 2014 and Follow-Ups

In accordance with the Annual Internal Control Work Program (PKPT) 2014, as per Q-4 of 2014, the Internal Control Unit has performed performance or operational audit into 49 main units, 244 executing units, 12 Directorates at head office and 2 subsidiaries. The total auditees is 307, and the number of audit findings is 1,863.

Out of these 1,863 findings, 1,364 findings have been followed-up completely by the auditees. The audit findings in detail are as follows:

1. Audit Findings and their Followed-ups from Operational Audit I to XIII Year 2014 conducted by Internal Control Unit:

Audit Regional Regional Audit	Jumlah Unit yang diaudit Auditees	Jumlah Temuan Audit Findings	Tindak Lanjut Followed Ups	Sisa Temuan Yet Un-followed ups
1	25	81	52	29
2	20	176	167	9
3	21	211	205	6
4	16	109	76	33
5	26	119	64	55
6	38	187	139	48
7	22	177	112	65
8	34	83	54	29
9	22	145	77	68
10	27	201	124	77
11	24	109	92	17
12	19	143	119	24
13	13	122	83	39
Jumlah Total	307	1.863	1.364	499

2. Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Operasional Tahun 2014 Berdasarkan Kode Temuan.

2. Findings and Follow-ups of Operational Audit 2014 by Finding Code.

Kode / Klasifikasi Temuan Jumlah Temuan Finding Cod /Classification Total Findings		Jumlah Temuan Findings		
		Jumlah Temuan Findings	Tindak Lanjut Follow-ups	Sisa Temuan Remaining Findings
01.1	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Compliance with laws and regulations	39	30	9
01.2	Kepatuhan terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan Compliance with applicable work procedures	734	512	222
01.3	Kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan anggaran Compliance with budget implementation provisions	17	12	5
01.4	Temuan berulang Recurring findings	63	49	14
02.1	Keandalan & keakuratan informasi/laporan keuangan & non keu. Reliability and accuracy of financial information/statements and non-financial information	310	236	74
02.2	Keandalan & keakuratan informasi/laporan TUL Reliability & accuracy of Subscription Administration Report	95	79	16
03	Pengamanan Asset Asset security	88	68	20
04.1	Pemanfaatan sumber daya manusia Human resources leverage	15	11	4
04.2	Pemanfaatan sumber daya material dan peralatan Material resources and equipment utilization	36	31	5
04.3	Pemanfaatan sumber daya uang Money resources utilization	10	7	3
05	Pencapaian tujuan dan sasaran program atau operasi Program or operational objective and target accomplishment	347	266	81
06.1	Kasus yang merugikan perusahaan Cases that cause losses to company	30	12	18
06.2	Kewajiban penyetoran kepada negara/perusahaan Obligatory deposit payment to state or company	79	51	28
	Jumlah Total	**1.863**	**1.364**	**499**

Pemeriksaan Khusus Tahun 2014

Pemeriksaan Khusus pada umumnya dilaksanakan atas permintaan Direksi, Dewan Komisaris dan berdasarkan informasi dari masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemeriksaan dimaksudkan untuk mendapatkan fakta atas suatu masalah untuk dilaporkan kepada Direktur Utama.

Realisasi pemeriksaan khusus telah dilaporkan kepada Direktur Utama sebanyak 12 laporan, yaitu:

1. Proses Pengadaan/ Pembelian Batubara dan Penjualan Batubara tahun 2012/2013 pada PT PLN Batubara.
2. Pemerikasaan terjadinya selisih BBM HSD PLTD Sewa HSD Agreko 20 MW lokasi GI Tello Lama sejak tahun 2008 s.d tahun 2013.
3. Pemeriksaan Khusus pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo mengenai pengadaan barang dan Jasa khusus pengadaan Laptop.
4. Proses pengadaan Barang dan Jasa di Area Tual serta Pemeriksaan terhadap Rekening diluar Rekening perusahaan.
5. Proses Pengadaan Barang/ Jasa kWh Meter Type Prodigy, Segel DNA dan LBS Polymer di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.
6. Pemeriksaan khusus terhadap PLN P3B Jawa Bali atas terjadinya kerusakan/ gangguan PMS Line pada GITET Suralaya yang berpotensi PLN kehilangan kesempatan menghemat BBM.
7. Pemeriksaan proses proses pembayaran Uang Muka Penyediaan Batubara di PT PLN Batubara.
8. Pemerikasaan pembangunan Transmisi PLTU Waai-Paso-Sirimau di Pulau Ambon.
9. Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Renovasi Gedung Kantor di PT PLN (Persero) Area Semarang, Area Surakarta, Area Magelang, Area Purwokerto, Area Cilacap, Area Kudus, Area Tegal dan Area Pekalongan.

Special Audit 2014

In general, the Special Audit was performed upon the request of the board of directors and the board of commissioners as well as the information from general public or non-governmental organizations (NGOs). The audit is aimed to obtain facts regarding issues and report them to the President Director.

The special audit conducted in 2014 has resulted 12 reports that have been handed to the President Director, i.e:

1. Special Audit on PT PLN Batubara regarded procurements and sales of coal 2012/1013.
2. Special Audit on PLTD Sewa, PLTD Agreko 20 Mw, Substation Tello Lama, 2008 - 2013, regarded the exceeding amount of the use of HSD fuel.
3. Special Audit on PT PLN (Persero) East Java Distribution Area, Sidoarjo, regarded the procurement of Laptop.
4. Special Audit on Procurement of Goods and Services at PT PLN Tual Area and Audit on Bank Account Owned by third party.
5. Special Audit on Procurement of KWH Meter, Prodigy Type, DNA seal and LBS Polymer at PT PLN (Persero) West Java and Banten Distribution Area.
6. Special Audit on PLN P3B Java-Bali Area regarding The PMS line interference/damage on Suralaya Substation so that PLN loosing Chance to efficiently consumed the fuel.
7. Special Audit on the Advanced Payment Process of procurement of coal at PT PLN (Persero) Batubara.
8. Special Audit on the development of Transmission Line of PLTU Waai-Paso-Sirimau in Ambon island.
9. Special Audit on the procurement and renovation of Office Building at PT PLN (Persero) Semarang Area, Surakarta Area, Magelang Area, Purwokerto Area, Cilacap Area, Kudus Area, Tegal Area and Pekalongan Area.

10. Pemeriksaan Khusus menindaklanjuti Whistle Blower atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Pegawai PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau khususnya di PLN Area Tanjung Pinang atas pelaksanaan pekerjaan Sewa Genset, Penyalahgunaan Asset, Mark Up Pengadaan Material dan Pengaturan SDM.
11. Pemeriksaan Khusus menindaklanjuti indikasi Kelebihan Pembayaran Pembangunan PLTU Ambon (2 x 15 MW) berdasarkan kontrak nomor : 144.PJ/041/DIR/2010 tanggal 27 April 2010.
12. Menindaklanjuti laporan dari Whistle Blower tanggal 17 September 2013 tentang indikasi terjadinya penyimpangan prosedur pengadaan di PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan atas pelaksanaan Renovasi Gedung Kantor, Pengadaan Kamera CCTV, dan Pengadaan alat Vibrasi di Unit PLTG Jaka Baring Unit 1& 2.

Audit Teknologi Informasi Tahun 2014

Selain melaksanakan Pemeriksaan Khusus, SPI melaksanakan kegiatan audit teknologi informasi. Program ini dilakukan mengingat PLN telah dan akan semakin mengandalkan dukungan aplikasi teknologi informasi dalam mendukung effisiensi dan efektivitas kegiatan operasionalnya.

Adapun realisasi kegiatan audit teknologi informasi ditujukan pada beberapa masalah, yakni:
1. Audit / evaluasi implementasi Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T).
2. Audit / evaluasi implementasi Aplikasi Pengelolaan Angka Baca Meter yang dipakai oleh Unit Pelaksana.
3. Audit / evaluasi implementasi Aplikasi PMO

10. Special examination to follow up Whistle Blower on violations indications committed by unscrupulous employee of PT PLN (Persero) Riau Region and Riau Islands, especially in PLN Area Tanjung Pinang on the implementation of the Generator lease work, Asset misuse, Material Procurement Mark Up and HR arrangements.
11. Special Examination to follow up indicators of Payment Excess Development PLTU Ambon (2 x 15 MW) by contract number: 144.PJ / 041 / DIR / 2010 dated April 27, 2010.
12. Following up on the report of the Whistle Blower date of September 17, 2013 on indicators of irregularities in the procurement procedures of PT PLN (Persero) Pembangkitan Southern Sumatra on the implementation of the Office Building Renovation, CCTV Camera Procurement and Procurement tool vibration in PLTG Jaka Baring Unit 1 and Unit 2.

Audit on Information of Technology 2014

Besides the special audit, Internal Control Unit also conducted audit on Information Technology (IT Audit). This kind of audit is conducted due to the fact that PLN will in the future more rely on the use of the information technology application in order to support the effort to have more efficient and more effective operational activities.

Some audit of information technology which have been conducted were stressing on several problems, as follows:
1. Audit/evaluation on the implementation of Centralized Customers' Services Application (AP2T)
2. Audit/evaluation on the implementation of Metering Reader Management application used by executing unit.
3. Audit/evaluation on the implementation of PMO application.

No	Objek Pemeriksaan Audit Object	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendation	Pemantauan Tindak Lanjut Follow up monitoring				
				S	BS	BD	TDD	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Laporan Keuangan PT PLN (Persero) TB 2004 dan 2003	37	46	5	2	0	3	Financial Report of PT PLN (Persero) fiscal year 2004 and 2003
2	Subsidi Listrik PLN TA 2004	1	1	41	0	0	0	PLN's Electricity Subsidy of budget year 2004
3	Laporan Keuangan PLN TB 2004 dan 2005	41	53	37	14	0	2	PLN's Financial Report fiscal year 2004 and 2005
4	Subsidi Listrik Tahun 2005	1	1	1	0	0	0	Electricity Subsidy 2005
5	BPP TL dan Pembangkitan Tahun 2006	11	13	12	1	0	0	Electricity Tarrif of Basic Production Cost and Power Generation year 2006
6	Subsidi Listrik Tahun 2006	1	1	1	0	0	0	Electricity Subsidy year 2006
7	Subsidi Listrik Tahun 2007	9	15	13	2	0	0	Electricity Subsidy year 2007
8	Subsidi Listrik Tahun 2008	12	20	18	0	0	2	Electricity Subsidy year 2008
9	Subsidi Listrik Tahun 2009	20	26	21	4	0	1	Electricity Subsidy year 2009
10	Subsidi Listrik Tahun 2010	4	4	3	1	0	0	Electricity Subsidy year n 2010
11	Sistem Pengendalian Intern PT PLN (Persero) Tahun 2010	7	7	7	0	0	0	Intern Control System of PT PLN (Persero) Year2010
12	Sektor Hulu Listrik	44	86	57	19	3	7	Upstream Electricity Sector
13	Kinerja Distribusi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2011	11	26	23	1	0	2	Central Java and Yogyakarta Provinces' Distribution Performance Year 2011
14	Kinerja Distribusi Jawa Barat dan Banten Tahun 2009 dan Semester I/2010	15	23	23	0	0	0	West Java and Banten's Distribution Performance Year 2009 and first semester 2010
15	Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2011	8	9	3	6	0	0	Electricity Subsidy of Budget Year 2011
16	Uang Jaminan langganan PLN	3	7	5	1	1	0	PLN's customer deposit
17	Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2011	19	64	60	3	1	0	Electricity Subsidy of Budget Year 2011

No	Objek Pemeriksaan Audit Object	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendation	Pemantauan Tindak Lanjut Follow up monitoring				
18	Batubara dan BBM	9	12	4	8	0	0	Coal and Fuel
19	Pembelian dan Sewa Tenaga Listrik	6	12	4	8	0	0	Purchase and Lease of Electric Power
20	Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya	3	6	5	1	0	0	The Unspecified Status of Government Assistance
21	Subsidi Listrik TA 2013	18	62	27	35	0	0	Electricity Subsidy of Budget Year 2013
	Jumlah	**280**	**494**	**366**	**106**	**5**	**17**	**Total**

Catatan:
Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, karena rekomendasi tersebut ditujukan untuk pihak diluar PLN
Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti diantaranya karena kesalahan cetak pada LHP

S: Sesuai, BS: Beluam Sesuai, BD: Belum Ditindaklanjuti, TDD: Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Notes
Recommendations which are yet to be followed up, is mainly caused by those recommendations were addressed to external parties outside PLN. One of the cause of this postponed recommendation follow up action was misprinted LHP materials.
S: Compliance, BS: Non Compliance, BD: Awaiting Follow Up Actions, TDD: Can not be followed up

Akuntan Perseroan

Biaya dan Jasa

Pada periode 2014, biaya untuk melaksanakan audit sebesar Rp18 miliar. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers Indonesia) melakukan audit pada audit finansial Audit kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, Audit Atas Laporan Pekerjaan Dalam Pelaksanaan, Audit Atas Laporan Proyek Percepatan 10.000 MW, Audit Atas Laporan Penerusan Pinjaman, Review Atas Laporan Evaluasi Kinerja, Audit Atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Periode Penunjukan

Penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers Indonesia), untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2014, merupakan periode penunjukan KAP yang pertama kali. Sebelumnya akuntan perusahaan yang melakukan audit atas laporan keuangan adalah KAP KAP Osman Bing Satrio dan Eny.

Kantor Akuntan Publik yang pernah melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan adalah:

1. Osman Bing Satrio dan Eny, untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2013.
2. Osman Bing Satrio dan Eny, untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2012.
3. Osman Bing Satrio dan Rekan, untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2011.
4. Osman Bing Satrio dan Rekan, untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2010.
5. Osman Bing Satrio dan Rekan, untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2009.
6. Osman Bing Satrio dan Rekan, untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2008.
7. Osman Bing Satrio dan Rekan, untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2007.
8. Osman Ramli dan Rekan, untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2006.
9. Osman Ramli Satrio & Rekan, untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2005.

Company's External Auditors

Cost and Service

In the period 2014, the expenses disbursed to hire Public Accountant Office to conduct audit was IDR 18 billion. The audit on PT PLN (Persero) was conducted by Public Accountant Office Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Cooper Indonesia). Scope of worker are: financial audit, compliance audit on the implementation of Regulations, laws, and internal control systems for the year ended December 31, 2014, audit on the Construction in Progress report, audit on the Development of 10.000 Mw Acceleration Project report, audit on SLA Credit Agreement report, audit on Performance Evaluation report, audit on Partnership Program and Environment Development Program (PKBL).

Appointment Period

The appointment of Public Accountant Office: Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Cooper Indonesia) to do audit on the Company's Financial Statement for the period 2014 was for the first time. Formerly, the company accountants conducting financial statement audit was Public Accountant Office: Osman Ramli Satrio & Partner for seven consecutive years, as follows.

Public Accountants who have audited the Company's financial statements are:

1. Osman Bing Satrioand Eny, Company Financial Statement 2013.
2. Osman Bing Satrio and Eny, Company Financial Statement 2012.
3. Osman Bing Satrio and Partner, Company Financial Statement 2011.
4. Osman Bing Satrio and Partner, Company Financial Statement 2010.
5. Osman Bing Satrio and Partner, Company Financial Statement 2009.
6. Osman Bing Satrio and Partner, Company FinancialStatement 2008.
7. Osman Bind Satrio and Partner, Company Financial Statement 2007.
8. Osman Ramli and Partner, Company Financial Statement 2006.
9. Osman RamliSatrio and Partner, Company Financial Statement 2005.

Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal

Sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PAER-01/2011 sebagai pengganti Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-11/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada BUMN, ditegaskan bahwa setiap BUMN wajib membentuk sistem pengendalian dan pengawasan internal. Pembentukan sistem pengawasan dan pengendalian internal ini berfungsi sebagai salah satu mekanisme internal dari setiap unit kerja atau unit organisasi, agar dalam setiap pengambilan keputusan pelaksanaan transaksi ada mekanisme internal yang telah dilalui untuk memastikan bahwa keputusan transaksi tersebut telah berlangsung dengan benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam rangka mengimplementasikan peraturan tersebut dan meningkatkan akuntabilitas setiap keputusan dan meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan transaksi bisnis, PLN mengupayakan pengembangan Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan pendekatan COSO *(Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions)*. Sistem Pengendalian Internal tersebut mencakup:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan terstruktur;
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha;
3. Aktivitas pengendalian;
4. Sistem informasi dan komunikasi; dan
5. Monitoring, yang secara operasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kebijakan berupa Pedoman, Petunjuk Operasional, maupun Instruksi Kerja.

Evaluasi terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, PLN membentuk Unit Audit Internal sebagai pelaksana yang disebut Satuan Pengawasan Intern. Hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal menjadi salah satu dasar evaluasi Manajemen terhadap efektivitas sistem pengendalian internal untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan yang memungkinkan Manajemen menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dengan cara yang lebih efektif.

Whistleblowing System

Whistleblowing system atau sistem pelaporan pelanggaran merupakan salah satu cara yang dinilai paling efektif dalam mencegah dan memerangi praktik korupsi, suap, ataupun praktik-praktik kecurangan lainnya yang bertentangan dengan kaidah GCG. Hal ini adalah kesimpulan dari kajian yang dilakukan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dan Global Economic Crime Survey (GECS)* terhadap berbagai cara yang paling mungkin diterapkan oleh suatu organisasi, baik di kalangan pemerintahan maupun korporasi, untuk menekan dan mencegah secara dini terjadinya tindak korupsi dan penyimpangan lain yang sejenis.

Meyakini efektivitas sistem tersebut dalam mendeteksi, mencegah dan mengatasi terjadinya tindakan korupsi, fraud dan sejenisnya sebelum merebak lebih jauh, PLN bekerjasama dengan lembaga yang kompeten dalam bidang tersebut, merancang sistem pelaporan pelanggaran untuk diterapkan di seluruh jajaran bisnis Perseroan, baik di Unit Bisnis maupun di anak usaha. Sejak pertengahan tahun 2012, Perseroan melakukan kajian dan merancang sistem pelaporan pelanggaran yang sesuai dengan kondisi dan budaya perusahaan.

Internal Control and Supervision System

In accordance to Article 26 of Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-01/2011 as the replacement rules to the State Minister for State-Owned Enterprises Decision No. KEP-11/M-MBU/2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in SOEs, stipulates that each SOE shall establish a system of internal control and supervision. The established internal control and supervision system functions as one of the internal mechanisms of each work unit or organization unit, so that every decision-making on transaction execution shall first pass internal mechanism procedure to ensure that the decision with regard to the transaction has been made correctly, fairly and responsibly.

In order to implement the regulation and improve the accountability of every decision and increase transparency and accuracy of business transaction recording, PLN pursued the development of Internal Control System which uses the of the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions) approach. The Internal Control System comprises:

1. Disciplined and structured Internal control environment;
2. Assessment and management of business risks;
3. Control activities;
4. Information and communication systems; and
5. Monitoring systems, of which the operation is described further in a number of policies such as Guidelines, Operational Instructions (SOP), and work Instructions (WOP).

The Evaluation of Internal Control System Effectiveness

To evaluate effectiveness of the implementation of the internal control system, PLN formed the Internal Audit Unit (IAU). The result of the evaluation of the internal control system implementation uses as one of the basis for the Management to evaluate the effectiveness of such internal control system, in order to improve the systems or policies that allow management to conduct Company operational activities in a more effective way.

Whistleblowing System

Whistleblowing system or violation reporting system is one of the ways considerably the most effective way to prevent and combat any actions-(corruption, bribery, or other fraudulent practices) against the Good Corporate Governance (GCG). This conclusion come out of a study conducted by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) and the Global Economic Crime Survey (GECS) regarding a variety of ways that an organization, both governmental and corporation, would most likely apply to minimize and timely prevent the occurrence of corruption acts and other similar misconducts.

To assure the effectiveness of the system in detecting, preventing and resolving corruption, fraud and others misconducts - (and preventing them expanded widely) -, PLN cooperated with competent institutions designed a " Whistleblowing System" to be implemented at all levels of its organization, both at the Business Unit and the subsidiary. Since mid 2012, the Company has conducted a study and designed a Whistleblowing System adjusted in line with the conditions and culture of the company.

Setelah mengalami pembahasan intensif dan tahap uji coba secara terbatas, pada tanggal 20 Desember 2012, melalui Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 21.E/Dir/2012 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* Perseroan secara resmi memberlakukan "Sistem Pelaporan Pelanggaran" (*Whistleblowing System*) diseluruh jajaran bisnis PLN. Dalam ketetapan tertulis yang mengiringi pemberlakuan tersebut, dijelaskan secara ringkas dan jelas seluruh definisi, maksud dan tujuan serta mekanisme pelaporan, perlindungan pelapor dan tindak lanjut.

Tujuan Penerapan *Whistleblowing System*

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Perseroan merupakan tindakan pelanggaran yang harus diperangi bersama. Korupsi dapat hidup dan langgeng diantaranya disebabkan oleh sifat *permissive* (pembiaran) banyak pihak terhadap tindakan tidak terpuji tersebut. Untuk mengurangiya, seluruh insan PLN sebagai insan yang berintegritas harus menghilangkan sifat *permissive* terhadap korupsi dan aktif memberantas dengan melaporkan terjadinya tindak korupsi melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) milik Perseroan.

Pelaporan pelanggaran *(whistleblowing)* adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, atau korupsi atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan, yang disampaikan oleh personil atau badan hukum dari lingkungan internal maupun eksternal Perseroan kepada pimpinan PLN agar dapat diambil tindakan tegas atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan tersebut diupayakan dapat berlangsung secara rahasia (*confidential*), namun didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) dimaksudkan menjadi sistem yang digunakan oleh Perseroan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan yang disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan unit bisnis PLN.

Mekanisme Pelaporan

1. Pelapor dapat mengirimkan laporan pelanggaran yang diketahuinya ke alamat email plnbersih123@gmail.com atau PO Box 6043 GN JKS 12120.
2. Alamat email dan PO Box tersebut dipegang oleh lembaga yang diberi mandat oleh Direksi untuk menerima laporan pelanggaran dan mempunyai akses langsung kepada Direksi.
3. Penggunaan alamat email khusus tersebut dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan pengirim dan penerima laporan serta tidak terlacak oleh pengelola sistem informasi Perseroan.
4. Untuk pelapor internal yang tidak menginginkan identitasnya diketahui, disarankan untuk menggunakan email non korporat agar tidak terlacak oleh pengelola sistem informasi perusahaan. Demikian pula untuk pelapor eksternal.
5. Komunikasi lebih lanjut atas laporan yang disampaikan akan dilakukan melalui email tersebut ke alamat email pengirim laporan.

Tindak Lanjut

Atas penyampaian laporan, Direksi akan menindaklanjuti dengan upaya investigasi untuk mendapatkan kebenaran atas laporan tersebut dan selanjutnya laporan akan dilengkapi dengan bukti-bukti yang diperlukan untuk proses lebih lanjut.

Following intense discussions and a limited trials implemented phase, on December 20, 2012, the Board of Directors through Circular Resulation of PT PLN (Persero) No. 21.E/Dir/2012, the company formally announced the application of the Company Whistleblowing System, throughout PLN's business lines. In the decision letter that comes with the system application, it is briefly and clearly describes all the definitions, purposes, objectives and reporting mechanisms, protection rapporteur and follow-up measures.

Objectives of Whistleblowing System

Corruptions and abuses of authority in a Company are infringement that all must fight against. Corruption can become way of life because nobody care or alert to this infringement. To make peoples alert and care to this violation ways of conduct, especially corrupted conduct, PLN's personnels which have integrity should demolish the permissive nature existed among the personnels, and actively eradicate and report it through the Whistleblowing System (WBS) of the Company.

Whistleblowing Report is a disclosure of violation or unlawful act, or corruption or other acts that may harm the company and its stakeholders, reported by a person or legal entity within and outside of the Company to the executives of PLN so as the firm action can be carried out against the violation conducts. The disclosure report takes place confidentially, but it must be supported by strong evidences.

The Whistleblowing Reporting System (SPP) is a system utilized by the Company to receive, process, follow up, and publish a report which the contents are all of the information submitted by the whistleblower regarding the violation that occurs in PLN.

The Reporting Mechanism

1. The whistleblower can submit a report of violation conducts by email to plnbersih123@gmail.com or mail to PO Box 6043 GN JKS 12120;
2. The above email address and PO Box are managed by institutions that are mandated by the Board of Directors to receive reports of infringements and have direct access to the Board;
3. The dedicated email address is aimed to keep the confidentiality of the sender and receiver of the reports and it is not traceable by the Company's information system management;
4. For internal whistleblower who wishes to be anonymous, it is recommended to use non-corporate email so as the report is not traceable by the company's information system management. This also applies for external whistleblower;
5. Further communication on the reports submitted will be made via email to the email address of the whistleblower.

Follows Up

Upon submission of the report, the Board of Directors will follow it up with investigative efforts to verify the report and subsequently the report will be completed with evidences as necessary for further proceedings.

Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan, laporan yang telah dilengkapi dengan bukti yang cukup dan dapat ditindaklanjuti, oleh Direksi akan diteruskan kepada penegak hukum antara lain kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses lebih lanjut.

Perlindungan Pelapor dan Insentif

1. Pelapor dijaga kerahasiaan dengan cara menggunakan media komunikasi email yang diluar pengelolaan perusahaan (bukan alamat email pln.co.id).
2. Pelapor dilindungi secara khusus oleh Direksi.
3. Bagi pelapor internal, Direksi memberikan jaminan perlindungan tidak akan dikenai.
   - Pemecatan
   - Penurunan jabatan atau pangkat;
   - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya.
   - Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

   Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur dalam pasal 43 UU No. 15 tahun 2002 jo. UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 13 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban, dan pasal 5 PP No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Bagi Pelapor yang laporannya benar dan dapat ditindaklanjuti serta bersedia membuka identitasnya kepada Direksi, akan diberikan insentif yang menarik.

Pelaporan Melalui *Whistleblowing* di Tahun 2014 dan Tindakan yang Diambil

Pada tahun 2014 terdapat 6 (enam) laporan melalui *whistleblower* yang diteruskan dengan melakukan klarifikasi serta investigasi dan tindakan yang diambil adalah memberikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkara Hukum yang Melibatkan Perseroan

PLN menghadapi beberapa perkara hukum dalam menjalankan kegiatan operasinya. Beberapa perkara hukum tersebut pada tahun 2014 telah selesai diputus oleh Pengadilan. Sebagian perkara lagi masih dalam tahap akan memulai proses sidang pengadilan, sebagian lagi menjalani proses banding dari para pihak, saat Laporan Tahunan ini dibuat.

Laporan lengkap penanganan kasus hukum sepanjang tahun 2014 yang melibatkan PLN adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 639/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 02 Desember 2011 yang diajukan oleh PT Citra Buana Unggul terhadap PT PLN (Persero). Gugatan ini diajukan atas dasar terdapat jaringan kabel transmisi PT PLN (Persero) yang berada di atas tapak tower 12 dan 13 di areal tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat meminta jaringan kabel tersebut dipindahkan ke areal lain. Nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp1.936.800.000,00, immaterial sebesar Rp1 Miliar, dwangsom sebesar 5 juta rupiah per hari.

No later than 1 (one) month, the report that has come with sufficient evidences and been qualified to be followed up by the Board of Directors will be forwarded to the law enforcement bodies, including to the Corruption Eradication Commission (KPK) for further processing.

Whistleblower Protection and Incentives

1. The identity of the whistleblower is kept confidential if the report is send by a non-corporate email address (the domain is not pln.co.id);
2. The whistleblower is specifically protected by the Board of Directors;
3. For internal whistleblower, the Board of Directors guarantees that he/she will be free from:
   - Dismissal;
   - Demotion;
   - Harassment or discrimination in all forms;
   - Bad remarks in his/her personal file record.

   In addition to the above protections, the company will also provide to the good-willed whistleblower, legal protection, pursuant to article 43 of Law No. 15 of 2002 in conjunction with Law No. 25 of 2003 on Money Laundering and article 13 of Law No. 13 of 2006 on witness Protection, and Article 5 Government Regulation No. 57 of 2003 on Special Protection Procedures for witnesses and Reporting Parties of the Crime of Money Laundering;
4. Whistleblower whose report is true and qualified for follow-up and who is willing to disclose his/her identity to the Board of Directors will be given attractive incentives.

Whistleblowing Reports 2014 and The Actions Taken

In 2014, there are six (6) reports through whistleblower system is forwarded to the clarification and investigation and the action that taken is to provide solutions according to applicable regulations.

Legal Proceedings Involving The Company

PLN facings several lawsuits in conducting its operational activities. Several lawsuit has completed and decided by the court in 2014. Some cases are in the process to the trial court, while some is in appeal process as of this report was made.

Full report of lawsuit during the year 2014 as follows:

1. Unlawful act suit in the South Jakarta District Court Case No. 639/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel dated December 2, 2011 filed by PT Citra Buana Unggul against PT PLN (Persero). The lawsuit was filed as there was PT PLN (Persero) overhead transmission cable located above Tower 12 and 13 on the plaintiff's land. The claim requests the removal of the cable to an area other than the Plaintiff's land. The amount of compensation demanded is IDR 1,936,800,000, Non-material damage IDR 1,000,000,000, and penalty IDR 5,000,000/day.

Tingkat I PLN telah kalah diputus tanggal 18 Oktober 2012, Tingkat Pengadilan Tinggi PLN menang telah diputus tanggal 27 Juni 2013. Perkara masih dalam proses Kasasi.
PLN menang di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (putusan tanggal 21 Oktober 2014) serta telah berkekuatan hukum tetap (in-kracht)

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 662/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Desember 2011 yang diajukan oleh Sdr. Heri Santoso terhadap PT PLN (Persero). Gugatan ini diajukan karena menurut Penggugat di atas tanah Penggugat telah dibangun 2 tiang listrik tegangan menengah namun belum diberikan ganti rugi dan kompensasi. Nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp2.750.000.000,00 serta dwangsom sebesar 1 juta rupiah per hari.
   PT PLN (Persero) telah memenangkan Perkara di tingkat Pertama, Tingkat Pengadilan Tinggi PLN memenangkan perkara putusan tanggal 29 Januari 2013. Saat ini dalam proses Kasasi. PLN menang di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI (putusan tanggal 16 Desember 2013) serta telah berkekuatan hukum tetap.
3. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 09 Mei 2012 yang diajukan oleh Didik Suprijadi selaku Ketua Aliansi Petugas Pencatat Meter Listrik (AP2ML) terhadap Direktur Utama PT PLN (Persero). Gugatan ini diajukan Penggugat selaku perwakilan petugas pencatat meter dan menuntut pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 per petugas cater sebanyak 930 orang (total Rp186 Miliar) atas dasar penggajian masa kerja petugas cater, dan menuntut pembatalan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) atas dasar melanggar Pancasila dan UUD 1945.
   Perkara diputus tanggal 11 Februari 2013 dan PT PLN (Persero) telah memenangkan perkara di tingkat Pengadilan Negeri. Penggugat menyatakan Banding tanggal 18 Februari 2013. Memori Banding tanggal 24 April 2013. Perkara telah diputus dan PLN juga menang di tingkat Pengadilan Tinggi, putusan tanggal 22 Januari 2014. Penggugat mengajukan Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2014. Saat ini perkara masih dalam proses Kasasi.
4. Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara: 74/G/2012/PTUN-JKT tanggal 08 Mei 2012 yang diajukan oleh Didik Suprijadi selaku Ketua Aliansi Petugas Pencatat Meter Listrik (AP2ML) terhadap Direktur Utama PT PLN (Persero). Gugatan ini diajukan Penggugat selaku perwakilan petugas pencatat meter dan menuntut dibatalkannya Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero).
   Perkara telah diputus dan PLN menang di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan tanggal 28 November 2012. PLN juga menang di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, putusan tanggal 23 Juni 2013. PLN selanjutnya menang di tingkat Kasasi, putusan tanggal 29 Januari 2014. Saat ini perkara telah berkekuatan hukum tetap.
5. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 15/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Januari 2012 yang diajukan PT Acset Indonusa kepada PT PLN (Persero). Gugatan ini diajukan karena

Low court verdict as per October 18, 2012 stated that PLN was declared lost. While in the High Court, the verdict as per June 27, 2013 stated that the High Court was over ruled the Low Court verdict.
PLN wins in the Supreme Court of Cassation (decision dated October 21, 2014) and has been legally binding (in-kracht)

2. Unlawful act lawsuit in the South Jakarta District Court Case No. 662/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel dated December 14, 2011 filed by Mr. Heri Santoso over PT PLN (Persero). The Plaintiff claim that PLN has erected two medium voltage power lines poles in his land and no compensation has been paid to date for the damage. Demands of damages amount to IDR 2,750,000,000, penalty IDR 1,000,000/day.

   The verdict both at The Low Court and at the High Court decides PLN won the case as per January 29, 2013. Nowaday, the case is in the Cassation process at the Supreme Court. PLN wins at the Supreme Court of Cassation (decision dated December 16, 2013) and has legally binding.

3. Unlawful act lawsuit in the South Jakarta District Court Case No. 290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dated May 09, 2012 filed by Mr. Didik Suprijadi as the Chairman of the Electricity Metering Readers Allience (AP2ML) over the President Director of PT PLN (Persero). The plaintiff as the representative of the Metering Readers Allience claims a compensation in the amount of IDR 200.000.000,00 per metering reader to be paid to totally 930 persons (or totally IDR 186 billion) on the basis of working time salary of the reader, and claims the annulment of the Decision of the Directors of PLN No.: 305.K/DIR/2010 regarding the Procurement of Goods and Services at PT PLN (Persero), because it was claimed as in the contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. In its verdict as per February 11, 2013, the District Court decided PLN won the case. The plaintiff submit an Appeal to the High Court on February 18, 2013, with the Appeal memorandum dated April 24, 2013. The High Court verdicted that PT PLN (Persero) won the case as per January 22, 2014. Upon this verdict, the plaintiff submit the Cassation memorandum to Supreme Court as per May 20, 2014, and nowaday the case is in the Cassation process.
4. Administrative Lawsuit in Jakarta State Administrative Court Case Number: 74/G/2012/PTUN-JKT dated May 8, 2012 filed by Didik Suprijadi as chairman of the Electricity Metering Readers Alliance (AP2ML) against the President Director of PT PLN (Persero). Plaintiff as representative of the alliance filed this lawsuit and demanded annulment of the Board of the Directors of PT PLN (Persero) decision No. 305.K/DIR/2010 on Procurement of Goods and Services of PT PLN (Persero).

   The case has decided by the State Administration Court at November 28, 2012, and PLN decided to winning the case. The State Administrative High Court also decided as per June 23, 2013 that PLN won the case. Now, the verdict was finalized.

5. Unlawful act suit in the South Jakarta District Court Case No. 15/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dated January 10, 2012 filed by AcsetIndonusa against PT PLN. The claim is submitted due to the plaintiff argument that the defendant is acted arbitrarily over the plaintiff, as the

Tergugat dianggap sewenang-wenang terhadap Penggugat atas hasil temuan yang dilakukan oleh Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. PT PLN (Persero) dituntut Rp1.180.856.880,00 dan Rp2.361.713.760,00.

Perkara telah diputus pada tanggal 15 Agustus 2012 dan PT PLN (Persero) dinyatakan kalah. Tingkat Pengadilan Tinggi PLN kalah. Dalam Proses Kasasi.

6. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan Nomor Perkara: 38/Pdt.G/2011/PN.Bjn tanggal 29 Desember 2011 yang diajukan oleh Sri Indaini sebagai kuasa dari Ni Luh Supheni terhadap PT PLN (Persero) Kantor Pusat sebagai Tergugat III. Gugatan ini diajukan atas dasar pembangunan gardu listrik di atas tanah Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat. Penggugat menuntut ganti rugi kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp1.404.000.000,00, immateril sebesar Rp3 Miliar.

   Perkara telah diputus di Tingkat Pertama tanggal 26 Mei 2012, PT PLN (Persero) memenangkan perkara tersebut. Tingkat Pengadilan Tinggi PLN telah memenangkan Perkara diputus tanggal 27 Mei 2013. Dalam proses Kasasi.

7. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 698/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 30 Agustus 2010 yang diajukan oleh PT PLN (Persero) terhadap PT Dharma Lautan Utama (Tergugat I), PT Dharma Lautan Cabang Surabaya (Tergugat II), dan Subyantoro, Nakhoda Kapal KM Kirana III (Tergugat III). Gugatan ini diajukan karena para Tergugat telah melakukan lego jangkar di daerah larangan berlabuh jangkar sehingga mengenai dan merusak kabel laut PLN Sirkuit 1 Jawa-Madura. PT PLN (Persero) menuntut ganti rugi sebesar Rp25.675.453.000,00.

   PT PLN (Persero) memenangkan perkara pada Tingkat Pertama Putusan tanggal 17 Maret 1011. Tingkat Pengadilan Tinggi PLN kalah Putusan tanggal 05 Desember 2011. Dalam proses Peninjauan Kembali.

8. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara: 32/PDT.G/2012/PN.Mdn tanggal 20 Januari 2012 yang diajukan oleh PT Subur Sari Lastderich terhadap PLN. Gugatan ini diajukan karena merasa dirugikan atas proyek pembangunan PLTA Asahan III yang dilakukan PT PLN (Persero), seharusnya yang berhak membangun adalah Penggugat karena telah mendapatkan izin dari Bupati Tobasa. Nilai Tuntutan sebesar Rp10 miliar untuk kerugian material dan Rp1 triliun untuk kerugian immaterial.

   PT PLN (Persero) kalah di Tingkat Pertama, putusan tanggal 26 Desember 2012. PT PLN (Persero) melakukan Banding dan menang di Tingkat Banding, putusan tanggal 23 November 2013. Saat ini perkara masih dalam tahap Kasasi.

9. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh PT Meta Epsi terhadap PT PLN (Persero) sebagai Tergugat II. Gugatan diajukan karena Penggugat meminta Bank Garansi di Bank Niaga untuk tidak dicairkan kepada PT PLN (Persero). Nilai gugatan sebesar Rp83.346.920.456,00 dan US$5.116.957,00.

   PT PLN (Persero) kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan tanggal 14 Maret 2013. PLN sudah menyatakan Banding pada tanggal 19 Maret 2013. Perkara ini masih dalam proses Banding.

10. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 12 September 2012 yang diajukan oleh LPKSM Adamsco terhadap PT PLN (Persero) sebagai Tergugat

consequency of the audit finding conducted by the Demolition Team of the Electrical Power Consumption (P2TL) at the Jakarta Raya and Tanggerang Distribution Area. PLN was suit to compensate the plaintiff as much as IDR 1.180.856.888,00 and IDR 2.361.713.760,00. The case was decided on August 15, 2012, which PLN lost the case. PLN has submitted Appeal on August 16, 2012 and also lost at the high court level. PLN filed an appeal, memorandum of cassation on November 13, 2013. Now, it is in Cassation process.

6. Unlawful act suit in the Bojonegoro District Court Case No. 38/Pdt.G/2011/PN.Bjn dated December 29, 2011 filed by Sri Indaini as the proxy of Ni Luh Supheni against the Headquarter of PT PLN (Persero) as Defendant III. The lawsuit was filed on the basis that the electrical substations construction on the Plaintiff's land without consent from the Plaintiff. Plaintiff demanded compensation amounting Rp1.404.000.000 and immaterial loss Rp3 billion. The case was decided on May 26, 2012, and PLN won the case. Plaintiffs submitted an Appeal. The appeal was over ruled on May 27, 2013, and PLN won the case. The plaintiff filed an appeal to the Supreme Court on August 26, 2013.Now, the case is in Cassation process.

7. Unlawful act suit in Surabaya District Court Case No. 698/Pdt.G/2010/PN.Sby dated August 30, 2010 filed by PT PLN (Persero) over PT Dharma Ocean as Defendant I, PT Dharma Lautan Surabaya Branch as Defendant II, and Subyantoro, KM Kirana III Ship Helmsman as Defendant III. The lawsuit was filed by PLN due to Action by the Defendant who dropped anchor in a prohibited area, and had damaged the PLN undersea cable, circuit 1 Java-Madura. PLN is demanding damages of IDR 25,675,453,000. The District Court decided PLN won. However, the High Court over ruled the District Court verdict as per December 5, 2011, as well as at the Supreme Court. Now, the case is in the process of judicial review.

8. Unlawful act suit in Medan District Court Case No. 32/PDT.G/2012/PN.Mdn dated January 20, 2012 filed by PT Subur Sari Lastderich against PLN. Plaintiff claims having suffer from damages due to the development of Hydroelectric Power undertaken by PT PLN, while the plaintiff suppuse to have the right to build the project, since it having obtained permit from the Regent of Tobasa Regency. Lawsuit value of Rp10 billion for material losses and Rp1 trillion for immaterial losses. PLN lost in the district court level, the verdict was passed on December 26, 2012. PLN has appealed and won at the High Court, at which the High Court over ruled the District Court verdict as per November 23, 3013. Now, the case is still in the cassation process.

9. Unlawful act suit in the South Jakarta District Court Case No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel filed by PT Meta Epsi against PT PLN (Persero) as the Defendant II. The lawsuit was submitted by the Plaintiff due the argument that Defendant I has cashed a Bank Guarantee on the Instructions of Defendant II. Damages claim put by the plaintiff amounting USD 5,116,957.00 and IDR 83.346.920,00. The District Court has decided as per Mart 14, 2013 that the Defendant II lost the case. PLN filed an appeal on March 19, 2013. The case is still in appeal process.

10. Unlawful act suit in the South Jakarta District Court Case No. 510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dated September 12, 2012 filed by LPKSM Adamsco against PT PLN (Persero) as Defendant I. Plaintiff objected the additional administrative costs incurred

I. Gugatan diajukan karena Penggugat merasa keberatan atas biaya administrasi pada tambahan pada sistem Payment Point Online Bank yang dibebankan kepada pelanggan listrik PT PLN (Persero). Penggugat menuntut pengembalian seluruh biaya administrasi yang telah dikeluarkan seluruh pelanggan listrik PT PLN (Persero), tidak ada nilai rupiah pada gugatannya. Yang dituntut hanya agar PLN membayar seluruh biaya administrasi tambahan yang sudah dikeluarkan oleh konsumen ketenagalistrikan sejak mulai dibebankannya biaya administrasi tambahan ini kepada konsumen ketenagalistrikan. PLN memenangkan perkara di Tingkat PN, putusan tanggal 21 Oktober 2013. Perkara masih dalam proses Banding.

11. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 692/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Nopember 2012 yang diajukan oleh Lydia Manurung terhadap PT PLN (Persero) sebagai Tergugat. Gugatan diajukan karena Penggugat merasa tanahnya yang terletak di Desa Koperapoka, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika, Propinsi Papua, seluas 15.000 m2 telah dikuasai oleh Tergugat tanpa hak dan telah berdiri bangunan kantor PT PLN (Persero) Ranting Timika. Tuntutan ganti rugi sebesar Rp5.200.000.000,00, ganti rugi immaterial Rp15.000.000.000,00, dwangsom Rp1.000.000,00 per hari.
    PT PLN (Persero) memenangkan perkara, putusan tanggal 16 September 2013. Saat ini perkara masih dalam proses Banding.
12. Pada tahun 2001 Hendrik Nelwan dan kawan-kawan mengajukan gugatan ganti rugi selaku Ahli Waris kepada PT PLN (Persero) atas tanah PLTA Tonsealama sebesar Rp54.000.000.000,00, di Pengadilan Negeri Manado. Dalam proses berperkara, mulai dari Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI PT PLN (Persero) kalah. Pada saat akan dilakukan Eksekusi oleh PN Manado, PT PLN (Persero) melakukan Gugatan Perlawanan atas Eksekusi tanah tersebut dan saat ini perkara tersebut masih dalam proses di Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI.
13. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 762/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Desember 2012 yang diajukan oleh PT Modaco Enersys terhadap PT PLN (Persero) selaku Tergugat. Gugatan ini diajukan atas dasar Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTU 1 Riau (2x10 MW) Bengkalis karena alasan Tergugat memberikan rancangan pekerjaan yang keliru kepada Penggugat. Nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp10.140.825.582,00.
    Dalam proses persidangan di Tingkat Pertama.
14. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Desember 2012 yang diajukan oleh PT Modaco Enersys & PT Angkasa Buana Cipta terhadap PT PLN (Persero) selaku Tergugat. Gugatan ini diajukan atas dasar Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat memberikan rancangan pekerjaan pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x10 MW) Bima yang keliru sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunannya. Nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp61.927.363.731,00.
    PT PLN (Persero) memenangkan perkara Putusan di Pengadilan Negeri tanggal 17 Februari 2014. Perkara saat ini dalam proses Banding.
15. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara : 37/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 31 Januari 2013 yang diajukan oleh Abner Lumentut terhadap PT PLN (Persero) Kantor Pusat

at the Bank Payment Point Online system to be borne by electricity customers. Plaintiff demanded PLN to return all of administrative costs incurred to customers. No claims demanded, but PLN should return back all administrative costs already incurred to its consumers. PLN won the case at district court and at high court as well as per October 21, 2013. The case now in appeal process.

11. Unlawful act suit in the South Jakarta District Court Case No. 692/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dated November 29, 2012 filed by Lydia Manurung against PT PLN (Persero) as Defendant. Plaintiff claimed her 15,000 m2 land located in Koperapoka village, Mimika Baru district, Mimika, Papua Province, has been illegaly occupied by the Defendant and built an Office Building on it, which is PLN Ranting Timika office. The plaintiff Claims for damages amounting to IDR 5,200,000,000; immaterial losses compensation IDR 15,000,000,000, and penalty amounting IDR 1,000,000 per day. PT PLN (Persero) won the case, ruled on September 16, 2013.The case is in appeal process.
12. In the year 2001 Hendrik Nelwan and associates filed a compensation claim at Manado District Court as the inHeiritage against PT PLN (Persero) for land where Tonsealama hydro power plant constructed. The claim amounts to IDR 54.000.000.000,00. The case is in litigation process, the verdict - started from District Court, High Court, so as at Supreme Court - stated that PLN lost the case. However, at the execution time by the Manado District Court, PLN filed Resistance Lawsuit against the execution of the land and currently the case is still in the Appeal process in the Supreme Court. PLN seeks and strives to occupy the land of Tonsealama hydro power plant that it has controlled for over 55 years. Now, the case is still in judicial review in Supreme court.
13. Unlawful act suit in South Jakarta District Court Case Number: 762/Pdt. G/2012/PN.Jkt. dated December 26, 2012 filed by PT Modaco Enersys against PT PLN (Persero) as Defendant. The lawsuit was filed on the basis that the plaintiff is not able to carry out the work to develop of Riau 1 steam power plant (2x10 MW) Bengkalis due to the mistaken job design given to plaintiff by the Defendant. Claims for damages amounting to IDR 10.140.825.582.
14. Unlawful act suit in South Jakarta District Court Case Number: 763/Pdt. G/2012/PN.Jkt. dated December 26, 2012 filed by PT Angkasa Modaco Enersys & PT Buana Copyright against PT PLN (Persero) as the Defendant. The lawsuit was filed on the basis that the plaintiff presumed to have suffered from losses because the plaintiff not be able to contineou the work to develop PLTU 1 West Nusa Tenggara (2x10 MW. Damage claimed amounted to IDR 61,927,363,73.00.

    PLN has been declared by the court won the case as per February 17, 2013. The case now is in Appeal process.
15. Unlawful act suit in the Makassar District Court Case number: 37/Pdt. G/2012/PN.Mks dated January 31, 2013 filed by Abner Lumentut against the Headquarters of PT PLN (Persero) as Co-

selaku Turut Tergugat. Gugatan ini diajukan atas dasar Penggugat merasa memiliki tanah yang saat ini digunakan PT PLN (Persero) sebagai gardu trafo yang dibangun pada tahun 1940. Penggugat merasa dirugikan karena lokasi tersebut bernilai ekonomis, serta keberadaan gardu tersebut dirasakan membahayakan Penggugat beserta keluarganya. Nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp810.000.000,00 dan pengosongan lahan.
PT PLN (Persero) memenangkan perkara di Tingkat PN, putusan tanggal 27 Januari 2014. Perkara saat ini masih dalam proses Banding.

16. Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Padang dengan Nomor Perkara : 09/G/2012/PHI.PDG tanggal 08 Maret 2013 yang diajukan oleh Sdri. Putri Lisma Untari terhadap PT PLN (Persero) cq. PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan selaku Tergugat. Gugatan ini diajukan Penggugat karena merasa dirugikan oleh Tergugat yang telah melakukan PHK kepada Penggugat atas dasar melakukan pernikahan sesama pegawai PT PLN (Persero). Nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp4.923.560,00 sejak bulan Juni 2012 serta Tergugat agar mempekerjakan kembali Penggugat.
PLN telah memenangkan perkara pada di Tingkat Pengadilan Negeri, Putusan tanggal 08 Maret 2013. Perkara saat ini dalam proses Kasasi.
17. Gugatan Citizen Law Suit di Pengandilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor : 476/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst sebagai Penggugat David M. L. Tobing, SH, MH dan Agus Soetopo, SH, MH. PT PLN (Persero) dituntut tidak mampu memberikan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan kandalan yang baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
PT PLN (Persero) memenangkan perkara diputus tanggal 1 September 2010. Tingkat Pengadilan Tinggi PLN telah memenangkan Perkara diputus pada tanggal 20 Februari 2012. Perkara saat ini dalam proses Kasasi.

18. Permohonan arbitrase diajukan oleh Konsorsium PT Wijaya Karya – PT Mega Eltra – PT Navigat Turbines melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta, Perkara Nomor : 532/VII/ARB-BANI/2013 tanggal 23 Juli 2013 terhadap PT PLN (Persero) selaku Termohon II. Permohonan arbitrase ini diajukan oleh konsorsium atas dasar pembayaran pembebasan bea masuk barang-barang impor terkait proyek pekerjaan pembangungn PLTG Kaltim (Peaking) 2x(50-60) MW (Netto) yang telah dikeluarkan oleh konsorsium dan menuntut Para Termohon untuk mengembalikan bea masuk tersebut senilai Rp26.708.457.918,00 kepada konsorsium.
Perkara telah diputus dan PLN menang, putusan tanggal 18 Februari 2014. Putusan telah berkekuatan hukum tetap.
Saat ini perkara masih dalam proses arbitrase di BANI Jakarta.
19. Gugatan Hubungan Industrial oleh Sdr. Bambang Suryantoro melalui Pengadilan Hubungan Industrial Semarang, Perkara Nomor : 63/G/2009/PHI.SMG. Gugatan diajukan karena Penggugat menganggap Direksi PLN wanprestasi dengan tidak mematuhi PKB Pasal 20 ayat (4) perihal kesetaraan gaji dasar di perseroan dengan Anak Perusahaan paling lambat akhir tahun 2006. Penggugat menuntut agar selisih kenaikan gaji dasar yg dianggap belum dilakukan sejak tahun 2007 s.d tahun 2009 sebesar Rp48.625.008.000,00

Defendant. The lawsuit was filed on the basis that the plaintiff claim as the owner of the land, in which in the year 1940 PLN has built transformer substation at this location. The plaintiff claims that the plaintiff presumed to have suffered from losses because the land considerably economically valuable, and the existence of the substation harm the plaintiff and its families. Claims for damages amounts to IDR 810,000,000 and the clearing of the land.
PT PLN (Persero) has won the case at the District Court as per January 27, 2014. The case now at the Appeal process.

16. Industrial relations Dispute Lawsuit in the Industrial Relations Court Case number: 09/G/2012/PHI.PDG dated March 8, 2013 filed by Putri Lisma Untari against PT PLN (Persero), in this case PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Selatan as Defendant. The lawsuit was filed by the plaintiff because the plaintiff presumed to suffer from damages due to her dismissal from PT PLN (Persero), which is by regulation marriage between the fellow employee is prohibited. Claims for damages amounts to Rp4,923,560 since June 2012, and she request PT PLN (Persero) to rehire the plaintiff. PLN has won the case at the District Court as per 10 March 2013. The case now in Appeal process.

17. Citizen Lawsuit in the Central Jakarta District Court Case number: 487/Pdt. G/2009/PN.Jkt.Pst. The claimwas filed by David M. L. Tobing, SH, MH and AgusSoetopo, SH, MH against PT PLN (Persero) as the defendant. PT PLN (Persero) was sued for being not capable to deliver the power of electricity in reliable, good quality, and contineously manner as stipulated in the Law number 30 of 2009 on Electricity. PT PLN is verdicted won the case by the District Court, which ws ruled on September 1, 2010. However, the plaintiff submitted an Appeal to High Court. PT PLN (Persero) won the case, which was ruled by the High Court at February 20, 2012. The plaintiff requested for Cassation on June 11, 2012. Now, the case is in Cassation process.
18. A Petition for arbitration to Indonesia National Arbitration Agency (BANI Jakarta) had filed by Consortium - PT Wijaya Karya, PT Mega Eltra, PT Navigat Turbines -, case number: 532/VII/ARB-BANI/2013 dated July 23, 2013 against PT PLN (Persero) as the Defendant II. The Petition was filed by the Consortium on the argument that the imported goods related to project of East Kalimantan gas power plant (Peaking) 2 x (50-60) MW (Net) should by law be exemption from import duty, while the consortium had paid the import duty. The plaintiff claim PT PLN (Persero) to repay back the import duty to the plaintiff amounting to IDR 26,708,457,918.00.
The case has been disconnected and PLN wins, ruling dated February 18, 2014. The ruling was final and binding.

19. Industrial relations Lawsuit field by Bambang Suryantoro at the Industrial Relations Court of Semarang, Case number: 63/G/2009/PHI.SMG. The lawsuit was filed on the argument that the PT PLN (Persero) Board of Directors was considerably being default against Joint Work Agreement article 20 paragraph (4), in which is stipulated that the equality of basic salary between the company and its subsidiaries will be implemented at the latest by end 2006. The plaintiff demanded that the excess of the amount of basic salary since 2007 to 2009 amounting to IDR 48.625.008.000,00, of which

untuk dibayarkan kepada semua pegawai di lingkungan PLN Wilayah Disjateng.
PLN menang di Tingkat PN. Tingkat Kasasi PLN kalah. Perkara masih dalam proses di Tingkat PK di Mahkamah Agung.

20. Gugatan PTUN Medan No. 04/G/2011/PTUN MDN jo. PT TUN Medan Perkara No. 150/B/2011/PT TUN Medan tanggal 23 November 2011 Perkara No. 97.K/TUN/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang diajukan oleh Suabir sehubungan dengan Sertifikat Hak Guna Banguna PT PLN (Persero) No. 1 Tanggal 5 Juni 1998 yang terletak di Jalan Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu.
PT PLN (Persero) kalah di Tingkat PN Putusan tanggal 19 Mei 2011, Tingkat Pengadilan Tinggi PT PLN (Persero)) Menang, Putusan tanggal 23 November 2013, Tingkat Kasasi PLN menang, putusan Tanggal 1 April 2014.
21. Gugatan PTUN Medan 26/G/2012/PTUN-MDN 9 April 2012 dengan Tergugat Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan PT PLN (Persero) sebagai Tergugat II Intervensi. PT PLN (Persero) mengajukan diri sebagai Tergugat 2 Intervensi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena berkepentingan terhadap akibat hukum objek gugatan, yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang izin penetapan lokasi kepada PT PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk PLTA Asahan III seluas ± 210 hektar di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir.
PT PLN (Persero) Menang di Tingkat PTUN, Putusan tanggal 04 September 2012; Tingkat Pengadilan Tinggi PLN kalah, Putusan tanggal 26 Februari 2013. Tingkat Kasasi PT PLN (Persero) menang, putusan tanggal 21 Agustus 2013.
22. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Sdr. H. Rusli Usman, dkk. terhadap Direksi PT PLN (Persero) melalui Pengadilan Negeri Lhoksukon, Perkara Nomor: 23/Pdt.G/2013 tanggal 24 Desember 2013. Gugatan diajukan dengan alasan bahwa pembayaran ganti rugi tanah dan kompensasi tanaman milik Para Penggugat yang dibebaskan untuk pembangunan SUTT 150 kV di Gardu Induk Panton Labu Incomer dengan luas keseluruhan 33.233 m2 dianggap tidak sesuai harga pasar, sehingga Para Penggugat menuntut pembayaran sejumlah Rp1.784.147.200,00 dengan dwangsom sebesar Rp200.000 per hari.
Perkara telah diputus dan PLN menang di tingkat Pengadilan Negeri. Perkara telah berkekuatan hukum tetap.
23. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 148/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Maret 2014 yang diajukan oleh Ir. Ermansyah Jamin terhadap PT PLN (Persero). Gugatan ini diajukan atas dasar Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah Nomor 008-1PJ/523/DIR/2003. Tanggal 25 Agustus 2003. Penggugat meminta PLN mempertimbangkan permohonan untuk meneruskan kembali pembayaran angsuran rumah sebesar Rp7.548.402.036,- (tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua ribu tiga puluh enam rupiah).
Perkara telah dicabut oleh Penggugat.
24. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 111/Pdt.GBTH.PLW/2014/PN.JKT.PST yang diajukan oleh Tim Kurator PT NINCEC Multi Dimensi (Dalam Pailit) terhadap PT PLN (Persero). Gugatan ini diajukan atas dasar PT BPD Jabar

should be paid to all employees of PT PLN (Persero) Central Java Distribution Area. The District and High Court have decided PLN won the case, but at Supreme Court. Now, the case is in judicial review stage at the Supreme Court.

20. Unlawful act lawsuit in Medan State Administrative Court case No. 04/G/2011/PTUN MDN along with case No. 150/B/2011/PTUN MDN dated November 23, 2011, and case No.97.K/TUN/2013 dated Mart 26, 2013 filed by Suabir, in related to Sertificate of Building Right of PT PLN No 1 dated June 5, 1998, located at Jalan Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Paniai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. PT PLN (Persero) was decided lost at the District Court, ruled at Mei 19, 2011, and decided won at High Court, ruled at November 23,2013. And PT PLN had won the case at Cassation stage as per April 1, 2014.
21. Unlawful act lawsuit in Medan State Administrative Court, case No.26/G/2012/PTUN-MDN dated April 9, 2012, at which The Governor of North Sumatera Province and PT PLN (Persero) as the Defendant II Intervention. PT PLN (Persero) suit and claim - as the defendant II intervention - PTUN Medan due to its posistion as related party to the legal impact of the object lawsuit, which is the Decree of the Governor of North Sumatera Province regarding the Permit of Location Determination for PLN to develop The Cenral Project of Hydroelectric Power Asahan III, a 210 Hectare area in Kabupaten Asahan and Kabupaten Toba Samosir. PT PLN was decided won the case at PTUN court, ruled on September 4, 2012, but at High Court, ruled at Februari 26, 2013. However, PLN was decided won the case at Cassation stage at Supreme Court, ruled on as per August 21, 2013.
22. Unlawful act lawsuit in Lhoksukon District Court case No.23/Pdt.G/2013 dated December 24, 2013 failed by H Rusli Osman cs against the Board of Director of PT PLN (Persero). The suit is filed due to the argument that the damages compensation on the land clearing for the development of SUTT 150 kV at substation Panton Labu Incomer for about 33.233 m2 was considerably paid under the local market price of the land. Due to this argument, the plaintiff claim for the compensation amounting to IDR 1.784.147.200,00 and penalty IDR 200.000,00 per day. The Court has decided PLN won the case and at final verdict.
23. Unlawful act lawsuit in South Jakarta District Court, case No.148/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dated Mart 17, 2014 failed by Ir Ermansyah Jamin against PT PLN (Persero). The suit is filed due to the basis of Least Agreement of the Puchase on Land and Building No 008-1PJ/523/DIR/2003 dated August 25, 2003. The plaintiff requested PLN to reconsider the continuity of the installment payment of the least amounting to IDR 7.548.402.036,00 (seven billion five hundred fourty eight million four hundred two thousand and thirty six rupiah). The case was canceled by the plaintiff.
24. Claims Unlawful Acts in the Central Jakarta District Court Case Number: 111/Pdt.GBTH.PLW/2014/PN.JKT.PST proposed by Curator of PT NINCEC Multi Dimension (claimed in Bankruptcy) against PT PLN (Persero). The lawsuit was filed

dan Banten Cabang Khusus Jakarta) menahan jaminan Pelaksanaan (Performence Bond) sebesar Rp5.966.741.903,- dan sebesar USD 268.870, Tuntutan Dwangson Rp10.000.000,- Denda Kerugian 1% dari Rp7.736.117.573,- dan 1 % dari USD 53.774.
Perkara saat ini dalam proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri.

25. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 338/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Sdr. Ir. Ermansyah Jamin terhadap PT PLN (Persero). Gugatan ini diajukan atas dasar Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah Nomor 008- 1PJ/523/DIR/2003 tanggal 25 Agustus 2003. Penggugat meminta PLN mempertimbangkan permohonan untuk meneruskan kembali pembayaran angsuran rumah sebesar Rp7.548.402.036,- (tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua ribu tiga puluh enam rupiah). Perkara saat ini sudah diputus oleh PN Jakarta selatan yang memenangkan PLN dan Sdr. Ir. Ermansyah Jamin menyatakan banding atas putusan tersebut. Saat ini masih dalam proses Banding
26. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Perkara: 274/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar yang diajukan oleh Sdri. Komala Dewi terhadap PT PLN (Persero). Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan bahwa pembangunan tower SUTT diatas tanah yang diklaim Penggugat tanpa seijin ybs. Penggugat meminta Para Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil Rp2.200.000.000,00; kerugian Immateriil Rp1.000.000.000,- dan dwangsom Rp1.000.000,- per hari kelalaian serta membongkar Tower SUTT diatas tanah tersebut.
Perkara saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri.
27. Gugatan Legal Standing di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor Perkara: 62/Pdt.G/2014/PN.TK yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia terhadap PT PLN (Persero). Gugatan diajukan atas dilakukannya pemadaman yang dilakukan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung.
Perkara saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri.
28. Permohonan Arbitrase di BANI Jakarta dengan Nomor Perkara: 596/VI/ARB-BANI/2014 diajukan oleh PT Betasurya Tatagraha. Permohonan arbitrase ini diajukan karena kontrak tentang Pengadaan Combined Cycle PLTG Batanghari Sektor Pembangkitan Jambi PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Selatan diterminasi oleh PT PLN (Persero). Pemohon menuntut ganti rugi materiil Rp31.599.007.734,00 dan immateriil Rp2.211.636.680,00.
Perkara saat ini masih dalam proses persidangan di BANI.
29. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 465/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Agustus 2014 diajukan oleh Ny. Nesah binti Sadih dkk terhadap PT PLN (Persero). Gugatan diajukan atas dasar tanah yang digunakan PLTGU Muara Tawar dianggap belum dibebaskan dan belum dibayarkan ganti rugi dan kompensasi oleh PT PLN (Persero) kepada

on the argument that PT BPD West Java and Banten (Special Branch Jakarta) hold the collateral in the form of Performence Bond, amounting to IDR 5,966,741,903.00 and USD 268,870, demands Penalty IDR 10.000.000,00, and Fines for Losses 1 % from IDR 7,736,117,573, and 1 % from USD 53,774. Case is still under trial at the District Court level.

25. Claims Unlawful acts in the South Jakarta District Court in Case Number: 338/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel proposed by Ir. Ermansyah Jamin against PT PLN (Persero). The lawsuit was filed on the basis of the Lease Agreement of the Purchase on Land and Building No. 008-1PJ/523/DIR/2003 dated August 25, 2003. The plaintiff requested PLN to reconsider the continuity of installment payment amounting Rp7.548.402.036,00, (seven billion five hundred and forty-eight million four hundred and two thousand and thirty- six dollars). The Case is still in trial process in the District Court.
The current case has been decided by the South Jakarta District Court that won PLN and Sdr. Ir. Ermansyah Jamin appealed plaintiff against the ruling. Currently still in the process of Plaintiff.
26. Claims Unlawful acts in West Jakarta District Court Case Number: 274/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Bar filed by Ms. Komala Dewi to PT PLN (Persero). Unlawful acts lawsuit on the grounds that PLN had built SUTT tower construction on plaintiff's land without permission. Plaintiff requested the Defendant to pay the Material Losses IDR 2.200.000.000,00; immaterial losses IDR 1,000,000,000, and penalty IDR 1,000,000.00 per day and dismantling the SUTT Tower from the land. The Case is still in process in the District Court.
27. Lawsuit Legal Standing in the Tanjung Karang District Court Case No.:62/ Pdt.G/2014/PN.TK submitted by the Indonesian Legal Aid Foundation against PT PLN (Persero). The lawsuit was filed because PT PLN (Persero) Distribution Lampung, cut the electricity for a certain period. Case is currently on trial in the District Court.
28. A Petition for Arbitration in Jakarta BANI Case Number: 596/VI/ARB - BANI/ 2014 filed by PT Betasurya Tatagraha. The Request for arbitration was filed because the contract on Procurement of Combined Cycle Gas Power Plant Sector Jambi Batang, PT PLN (Persero) South Sumatera Generation terminated by PT PLN (Persero). Petitioners claim material damages IDR 31.599.007.734,00 and immaterial damages IDR 2.211.636.680,00. The Case is still in court proceedings in the BANI.
29. Claims Unlawful acts in the South Jakarta District Court in Case Number: 465/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dated August 21, 2014 filed by Mrs. Nesah binti Sadih cs against PT PLN (Persero). The suit was filed on the argument that the land used by Muara Tawar Combined Cycle Gas Power Plant considerably uncleared and no compensation yet paid by PT PLN (Persero)

Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp59.264.000.000,00.
Perkara saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri.

30. Gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor 237/Pdt.G/2014/PN.Mks tanggal 05 September 2014 yang diajukan oleh PT Dwipa Konetra dan PT Bina Energi Selaras selaku kontraktor atas dasar Kontraktor berdalil bahwa permintaan pengetestan dengan HVAC bertentangan dengan dokumen kontrak dan penawaran serta tidak dapat dilakukan tanpa adanya addendum, dan jika terjadi addendum akan menimbulkan kerugian bagi kontraktor karena harga untuk HVDC sebesar Rp138.000.000,- sedangkan untuk HVAC adalah sebesar Rp1.000.000.000,- sehingga apabila hal itu terjadi menyimpangi Perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRING SULMAPA/2008.
Perkara saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri.
31. Gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 748/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Sel yang diajukan oleh PT ISIS MEGAH MANDIRI atas dasar dinyatakan gagal Pelelangan / tender pengadaan jasa penarikan SKTM 20 kV Penyulang Baru untuk penunjang pemasaran GI Kemang dan Rencana Gardu Hubung PLN Jasdik No. 036.DP/LG/P2BJ(I)-A.LTA/2014 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Materiil Rp10.000.000,- dan Kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000,-.
Perkara saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri.
32. Permohonan Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 638/XII/ARB-BANI/2014 yang diajukan oleh KSO PT Wijaya Karya, PT Flamboyant Huma Arta karena PLN selaku pemberi kerja dianggap cidera janji karena tidak dapat menyediakan lahan untuk pembangunan Access Road PLTA Asahan III tepat waktu sehingga pembangunan access tidak berjalan sesuai dengan perjanjian yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp29.012.739.997,45 dan dwangsom Rp10.000.000,-.
Perkara saat ini masih dalam proses persidangan di BANI.
33. Gugatan Perlawanan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor Perkara 241/Pdt.Plw/2014/PN.Blb yang diajukan oleh PT PLN (Persero) terhadap Maman Hermana, Dkk terhadap penetapan pengadilan negeri bale bandung Nomor 22/PDT/Eks.G/2014/PN.BB atas eksekusi gugatan perwakilan kelompok (class action) mengenai ganti rugi atas tanah yang terlintangi SUTET 500 kV di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2011/PN.BB.
Perkara saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri.
34. Permohonan Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan nomor register 630/XI/ARB-BANI/2014 yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero), Tbk, PT Liman Obor Cahaya dan PT Euroasiatic Jaya Terhadap PT PLN (Persero) terkait pelaskanaan beberapa ketentuan tertentu pada perjanjian Pengadaan Sewa Pembangkit PLTMH 25 MW di Rawa Minyak- Riau, yang mengakibatkan tidak beroperasinya pembangkit tersebut yang merugikan Pemohon sebesar Rp258.637.515.996,-.
Perkara saat ini masih dalam proses persidangan di BANI.
35. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 662/Pdt.G/2014/

to the Plaintiff as the inheiratage and owners of the land. Plaintiff seeking damages for IDR 59.264.000.000,00. The case is still in court proceedings in the District Court

30. Breach of contract lawsuit in the District Court of Makassar with No. 237 / Pdt.G / 2014 / PN.Mks dated September 5, 2014 filed by PT Dwipa Konetra and PT Bina Energy Selaras as a contractor on the basis of the Contractor postulates that test demand with HVAC is contrary to the contract documents and offers can not be done without the addendum, and if there is an addendum, it will cause harm to the contractor due to HVDC price of Rp138,000,000, - whereas for HVAC is Rp1,000,000,000, - so when it happens it will deviate Agreement No. 206.Pj / 131 / Pikitring SULMAPA / 2008.
Case is still in court proceedings in the District Court.

31. Unlawful act against law in the South Jakarta District Court with No. 748 / Pdt.G / 2014 / PN.Jkt.Sel filed by PT ISIS MEGAH MANDIRI on the basis of declared by failed auction / SKTM tender withdrawal procurement of 20 kV new feeders to support marketing of GI Kemang and Connecting Relay Stations Plan of PLN Jasdik No. 036.DP / LG / P2BJ (I) -A.LTA / 2014 which causes damages to the Plaintiff by Material Rp10,000,000, - and Losses immaterial Rp1,000,000, -.
Case is still in court proceedings in the District Court.

32. Petition for Arbitration in the Indonesian National Arbitration Board No. 638 / XII / ARB-BANI / 2014 filed by KSO PT Wijaya Karya, PT Flamboyant Huma Arta because PLN as an employer is considered in default because it can not provide land for the construction of the Access Road PLTA Asahan III on time so that the construction of access does not run in accordance with the agreement that resulted in a loss of Rp29.012.739.997,45 and dwangsom 10,000,000, -.
Case is still in court proceedings in the BANI.

33. Resistance lawsuit in Bale Bandung District Court Case No. 241 / Pdt.Plw / 2014 / PN.Blb filed by PT PLN (Persero) to Maman Hermana, Dkk against Bale Bandung state court determination No. 22 / PDT / Eks.G / 2014 /PN.BB upon group execution lawsuits (class action) regarding compensation for land that passed by SUTET 500 kV in Bale Bandung District Court with registration case No. 74 / Pdt.G / 2011 / PN.BB.
Case is still in court proceedings in the District Court.

34. Petition for Arbitration in the Indonesian National Arbitration Board with registration number 630 / XI / ARB-BANI / 2014 filed by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Liman Obor Cahaya and PT Euroasiatic Jaya Against PT PLN (Persero) related implementation of some certain provisions to the agreement of Power plant lease procurement PLTMH 25 MW in Rawa Minyak-Riau, which resulted in no operation of the power plant and losses the Applicant for Rp258.637.515.996.
Case is still in court proceedings in the BANI.

35. Unlawful acts lawsuit in the South Jakarta District Court in Case Number: 662 / Pdt.G / 2014 / PN.Jkt.Sel dated

PN.Jkt.Sel tanggal 07 November 2014 diajukan oleh Ny. Tina Anggranya terhadap PT PLN (Persero). Gugatan diajukan atas dasar tanah yang digunakan tapak tower SUTET yang terletak di Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor tanpa hak, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp10.000.000.000,00. Dan Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,-
Perkara saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri.

36. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 754/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Sdr. Alex Lyandouw terhadap PT PLN (Persero). Gugatan ini diajukan atas dasar Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah Nomor 1242.PJ/554/DIR/2005 tanggal 18 April 2005. Penggugat meminta PLN menyatakan harga rumah dinas seharga Rp370.445.276,- dan menmbayar ganti rugi sebesar Rp3.212.323.377,-.
Perkara saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri.

November 7, 2014 filed by Mrs. Tina Anggraeny to PT PLN (Persero). The lawsuit was filed on the land basis which used by SUTET located in Gadog Village, Megamendung District, Bogor without rights, without permission and without the knowledge of the Plaintiff. Plaintiff demands for material compensation for Rp10,000,000,000.00. And immaterial amount of Rp5,000,000,000, -
Case is still in court proceedings in the District Court.

36. Unlawful acts against law in the South Jakarta District Court in Case Number: 754 / Pdt.G / 2014 / PN.Jkt.Sel proposed by Bro. Alex Lyandouw to PT PLN (Persero). The lawsuit was filed on the basis of Building and Land Lease Purchase Agreement No. 1242.PJ / 554 / DIR / 2005 dated April 18, 2005. The plaintiff asked PLN stated price for the home office Rp370.445.276, - and giving the compensation of Rp3.212.323.377 .
Case is still in court proceedings in the District Court.

Dampak Perkara Hukum dan Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Seluruh perkara hukum tersebut diatas, tidak memberikan dampak finansial signifikan terhadap PLN. Perkara tersebut juga tidak menyebabkan adanya pengurus PLN yang dikenai sanksi dari otoritas yang berwenang dan tidak melibatkan jajaran Perseroan lainnya.

PLN memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian dan proses hukum atas setiap pelanggaran kode etik dan wewenang yang terindikasi *fraud*, sebagai bentuk konsistensi Perseroan dalam menegakkan hukum dan menerapkan praktek terbaik Tata Kelola Perusahaan.

The Impact of Lawsuits and Administrative Sanctions from Related Authority

The entire lawsuits mentioned above, considerably does not provide a significant financial impact on PT PLN (Persero). The cases will not also be the subject to sanctions PLN's Board by the competent authority and do not involve any other company ranks.

PLN provide strict punishment in the form of dismissal and legal proceedings for any violation of code of ethics and authority, as indicated by fraud, as the Company's form of consistency in upholding the law and apply the best practices of corporate governance.

Pedoman Perilaku

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa publik, Perseroan bertanggung jawab untuk memenuhi harapan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*). Perseroan dikelola secara profesional serta senantiasa menjaga dan membina hubungan dengan semua Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) sesuai standar etika bisnis. Dalam mengemban tanggung jawab tersebut, Perusahaan menerapkan Pedoman GCG secara konsisten, serta didukung dengan standar etika perilaku bisnis dan individu yang dituangkan dalam Pedoman Perilaku PLN.

Pada Oktober 2005, Perseroan telah menerbitkan Pedoman Perilaku PLN (*Code of Conduct*) sebagai bentuk implementasi peningkatan dan penyempurnaan penerapan budaya perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Kode etik ini harus menjadi panduan serta dianut oleh seluruh pegawai di lingkungan PT PLN (Persero).

Pedoman Perilaku PLN berisi mengenai kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN, serta mengatur aspek kepemimpinan PLN, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota dan hubungan dengan pihak eksternal. Selain itu, Pedoman Perilaku merupakan sarana untuk menciptakan hubungan yang harmonis, sinergis dan saling menguntungkan antara Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) dengan Perseroan.

Code of Conduct

As a company engaged in the field of public services, the Company is responsible to meet the expectations of stakeholders (stakeholders). The Company is professionally managed and continually maintain and build relationships with all stakeholders in accordance with the ethical standards of business. In carrying out these responsibilities, the Company adopted corporate governance guidelines consistently, and supported by the ethical standards of business conduct and the individual as outlined in the Code of Conduct of PLN.

In October 2005, the Company has issued PLN's Code of Conduct (CoC) as an implementation of improvement and refinement of the implementation of the corporate culture and Good Corporate Governance. The code should be a guide and embraced by all employees of PT PLN (Persero).

Code of Conduct PLN contains about good habits and procedures of professional association in the PLN, and regulate aspects of PLN leadership, responsibility membership, professional relationships between members and relationships with external parties. In addition, the Code of Conduct is a means to create a harmonious relationship, synergy and mutual benefit between stakeholders with the Company.

Pedoman PLN Bersih

Guidelines *PLN Bersih*

Pada tahun 2014, Direksi PLN telah mengeluarkan Pedoman PLN Bersih melalui Peraturan Direksi No. 0060.K/DIR/2014. Direktur Utama PLN Nur Pamudji berupaya mewujudkan komitmen PLN terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap proses bisnisnya. Pedoman PLN Bersih ini diharapkan bisa mendorong Direksi, pegawai, pejabat, maupun pemangku kepentingan PLN lain agar melaksanakan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, peraturan perusahaan dan anggaran dasar PLN agar tercipta PLN Bersih dan bebas KKN.

Prinsip PLN Bersih memiliki empat pilar utama, yaitu Partisipasi, Integritas, Transparansi, dan Akuntabilitas atau disingkat PITA.

Partisipasi dilakukan dengan membangun dukungan dan rasa kepemilikan bersama meliputi komitmen integritas internal PLN, collective action yang merupakan komitmen bersama PLN, vendor, dan publik, serta multi stakeholder forum. Sedangkan integritas dilakukan dengan membangun manusia dan kultur yang meliputi kepatuhan terhadap *code of ethic* (CoE) dan *code of conduct* (CoC), serta peningkatan integritas layanan publik.

Transparansi dilakukan dengan membangun sistem terbuka yang responsif terhadap permintaan layanan informasi publik, kemudahan permintaan informasi publik, serta peningkatan keterbukaan informasi publik. Sedang akuntabilitas dilakukan dengan menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi complaint handling mechanism yang responsif, opini audit yang sangat baik, serta *Whistleblowing System* dan pengelolaan gratifikasi yang kredibel.

Selain pedoman PLN Bersih, Direksi mengeluarkan SK No. 054.K/DIR/2014 terkait pedoman transaksi keuangan antara PLN dengan mitra kerja guna mendukung PLN Bersih. Dalam pedoman ini, seluruh transaksi keuangan yang dilakukan PLN dengan mitra kerja, baik melalui perjanjian/kontrak pembangunan fasilitas kelistrikan maupun perjanjian/kontrak penyediaan barang/ jasa, harus dijalankan melalui transaksi non cash melalui jasa perbankan. Begitu pun transaksi keuangan mitra kerja dengan sub mitra kerja atau pihak lain terkait pelaksanaan pekerjaan dengan PLN diwajibkan untuk dilakukan dengan non cash. Jika terpaksa harus dilakukan transaksi cash yang melebih Rp50 juta, maka transaksi itu wajib dilaporkan kepada PLN.

In 2014, the Board of Directors has issued guidelines PLN Bersih under the Directors Regulation No. 0060.K/DIR/2014. PLN president director, Nur Pamudji, seeks a commitment related to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in all business process. Guidelines PLN Bersih is expected to encourage directors, employees, officials, and other stakeholders in order to carry out the PLN activities based on high moral values and compliance with laws, regulations and articles of association of the company in order to create PLN Bersih and free of corruption.

The PLN Bersih has four main principles, namely Participation, Integrity, Transparency, and Accountability or abbreviated in PITA.

Participation is conducted by building support and a sense of shared ownership includes internal integrity of PLN commitment, collective action which is a shared commitment between PLN, vendors, and the public, as well as multi- stakeholder forum. Integrity is done by building the human and culture which includes adherence to a code of ethical Conduct (CoEC) and the Code of Conduct (CoC), as well as improving the integrity of the public service.

Transparency is done by building an open system that is responsive to the demands of public information services, ease of public information requests, as well as increased public disclosure. Accountability is being done by creating accountability mechanisms include complaint handling mechanism which is responsive, the audit opinion is excellent, as well as Whistle Blowing System and management of credible gratification.

In addition to the guidelines of PLN Bersih, the Board of Directors issued Decree No. 054.K/DIR/2014 guidance related financial transactions between PLN with partners to support PLN Bersih. In these guidelines, all financial transactions are conducted by PLN cooperated with partners, either through agreement/contract construction electrical facilities and agreements/contracts the supply of goods/services, should be run through the non-cash transactions through banking services. Likewise financial transaction between partners with sub- partners or other parties related to the implementation of the work with PLN is required to be done by non- cash system. If at particular sircumstances be forced to do cash transactions that exceed USD 50 million, then the transaction must be reported to PLN.

Pada tahun 2010, Perseroan telah melakukan penyusunan ulang atas butir-butir ketentuan dalam Pedoman Perilaku Perusahaan yang telah ada, menyesuaikan kembali aturan di dalamnya dengan Pedoman GCG dan praktik-praktik lazim terkini dan menampilkannya dalam bentuk yang lebih ringkas agar mudah dibawa saat beraktifitas. Penyusunan Buku Pedoman Perilaku tersebut dilaksanakan sesuai SK Direksi No. 548A/K/DIR/2010 tentang. "Buku Pedoman Perilaku". Langkah tersebut diikuti dengan sosialisasi dan pemberlakuan Pedoman Perilaku Perseroan.

Pedoman Perilaku Perusahaan ini digunakan sebagai landasan untuk membentuk dan mengatur tingkah laku yang konsisten dalam menjalankan bisnis dan kegiatan yang berdasarkan prinsip-prinsip Saling percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar, selanjutnya disingkat dengan SIPP. Pada akhirnya komitmen disertai integritas yang tinggi untuk menerapkan praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan yang baik akan menjamin perwujudan visi, misi, falsafah, nilai-nilai dan Budaya Perusahaan.

In 2010, the Company has made rearrangements on the provisions in the Code of Conduct, readjust the rules in accordance with Good Corporate Governance guidelines and practices prevalent in a more compact form that is easy to carry during activity. Preparation Code of Conduct Handbook is implemented according to the Decree of Directors No. 548A/K/DIR/2010 regarded "Handbook Code of Conduct". It was soon followed by the dissemination and application of the Company's Code of Conduct.

Code of Conduct is used as the basis to establish and regulate behavior consistently in running the business and activities based on the principles of mutual trust, Integrity, Caring and Learning, hereinafter referred to as SIPP. At the end aim, based on high integrity and commitment to implement the best practices of Good Corporate Governance will ensure the realization of the vision, mission, philosophy, values and corporate culture.

Sebagai bentuk komitmen dan tekad Perseroan untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, PLN menerbitkan dan mensosialisasikan Pedoman Perilaku PLN *(Code of Conduct)*

PLN publishes and disseminates PLN Code of Conduct as a manifestation of the Company's commitment and intention to improve the quality of GCG implementation

Pokok-pokok pedoman perilaku

Pedoman Perilaku Perseroan menekankan kebijakan pelaksanaan perilaku insan perusahaan, yang menjadi tanggung jawab pegangan setiap insan Perseroan dalam berhubungan dengan seluruh individu jajaran Perseroan maupun pihak lain yang melakukan bisnis dengan Perseroan, meliputi:

1. Perilaku Pemimpin
   - Memberikan gambaran ringkas mengenai sikap perilaku pemimpin yang harus dikedepankan dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Sikap pemimpin tersebut harus:
   - Menginspirasi dan memberikan keteladanan perilaku Saling Percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar.
   - Mempelopori pembaharuan dan modernisasi perusahaan melalui pemikiran yang *out of the box*.
   - Memastikan semua unsur Perseroan bekerjasama secara sinergis guna mendapatkan kinerja unggul dan meningkatkan pelayanan publik.
   - Membina kader melalui proses CMC (*coaching, mentoring dan counseling*).
   - Mengantisipasi kondisi *turbulence* dan lingkungan yang selalu berubah dengan gesit (*agility*) dan fleksibel.
   - Perilaku Pemimpin sangat diharapkan tidak bertentangan dengan sikap-sikap tersebut diatas.

2. Perilaku dalam Berhubungan Antar Insan PLN
   - Saling Percaya
     i. Berpikir dan berperilaku positif.
     ii. Menghargai pendapat dan gagasan yang berbeda.
     iii. Obyektif dan transparan.
     iv. Menjalin hubungan yang harmonis.

Highlights of Code of Conduct

The Company's Code of Conduct emphasizes human behavior implementation in company policies, which are the responsibility of each member of the Company grip in by all individuals and the ranks of the Company in their interaction with other parties, and in doing business with the Company, including:

1. Leader Behavior
   - Gives an overview on the mindsets of leaders who must be put forward in carrying out the tasks of everyday. The attitude of the leader should:
   - Inspire and provide exemplary behavior of Mutual Trust, Integrity, Caring and Learning.
   - Pioneering renewal and modernization of the company through thinking out of the box.
   - Ensure all elements of the Company cooperated synergistically in order to obtain superior performance and improving public services.
   - Fostering cadre through the CMC (coaching, mentoring and counseling).
   - Anticipating turbulence conditions and ever-changing environment with agile (agility) and flexible.
   - The leader is expected behavior does not conflict with the above attitudes.

2. Behavior in the inter-action between the employees of PLN
   - Mutual Trust:
     i. Think and behave positively.
     ii. Appreciate different opinions and ideas.
     iii. Objective and transparent.
     iv. Create a harmonious relationship.

- Integritas
  i. Jujur dan menjaga komitmen.
  ii. Memberikan keteladanan.
  iii. Adil dan bertanggung jawab.
  iv. Mengakui keterbatasan.
- Peduli
  i. Saling membantu, memotivasi dan memberi perhatian.
  ii. Santun, ramah dan terbuka.
  iii. Menjaga citra dan memberikan pelayanan terbaik.
  iv. Saling mengingatkan bila ada yang melanggar aturan.
- Pembelajar
  i. Memahami dan melaksanakan kebijakan Perseroan.
  ii. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus.
  iii. Berbagi ide, informasi, pengetahuan dan pengalaman.
  iv. Melakukan inovasi dan mendorong perubahan.

3. Sikap Korporasi Terhadap Hubungan Eksternal / Pemangku Kepentingan
   - Hubungan dengan Pelanggan
     i. Mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan.
     ii. Menjalin komunikasi edukatif yang sehat, ramah, adil, jujur, dan tidak menyesatkan.
     iii. Memenuhi standar mutu pelayanan yang telah disepakati.
     iv. Menegakkan integritas pelayanan publik.
   - Hubungan dengan Mitra Kerja / Pemasok
     i. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perseroan.
     ii. Menilai secara objektif, transparan dan akuntabel.
     iii. Membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan.
     iv. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.
     v. Memberikan sanksi apabila tidak memenuhi kontrak kerja.
   - Hubungan dengan Pesaing
     i. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengandalkan keunggulan produk dan pelayanan.
     ii. Menjadikan pesaing sebagai pemicu peningkatan diri.
     iii. Menjaga kerahasiaan data dan informasi.
   - Hubungan dengan Investor
     i. Memilih investor yang terpercaya, kredibel dan bertanggung jawab.
     ii. Membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan
     iii. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.
     iv. Menyediakan informasi yang aktual, akurat dan prospektif.
     v. Menjaga kepercayaan investor.
   - Hubungan dengan Pemerintah / DPR.
     i. Mendukung program dan menjaga kepercayaan Pemerintah/DPR.
     ii. Membina hubungan yang harmonis dan konstruktif.
     iii. Memberikan laporan data secara benar dan akurat.
   - Hubungan dengan Masyarakat.
     i. Mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik.
     ii. Melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan memberi bantuan masyarakat yang mengalami musibah.
     iii. Menghormati tata nilai daerah.
     iv. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan.

- Integrity:
  i. Honest and keep commitments.
  ii. Provide exemplary.
  iii. Fair and responsible.
  iv. Acknowledging the limitations.
- Care:
  i. Mutual help, motivate and give attention.
  ii. Polite, friendly and open.
  iii. Maintain the image and provide the best service.
  iv. Remind each other when there is a violation of the rules.
- Learners:
  i. Understand and implement corporate policies
  ii. Improving competence continuously.
  iii. Share ideas, information, knowledge and experience.
  iv. To innovate and drive change.

3. Corporate Attitude Against External Relations/Stakeholders

   - Relationships with Customers:
     i. Satisfaction and customer trust.
     ii. Establish communication educative healthy, friendly, fair, honest, and not misleading.
     iii. Meet the quality standards of service that has been agreed upon.
     iv. Uphold the integrity of the public service.

   - Relationships with Partners/Suppliers:
     i. Maintain and prioritize the interests of the Company
     ii. Assess objectively, transparent and accountable
     iii. Creating mutually beneficial agreements
     iv. Communicating honestly and effectively while maintaining the confidentiality of data and information
     v. Impose sanctions if it does not meet the employment contract
   - Relationship with Competitors:
     i. Doing fair competition by relying on product excellence and service
     ii. Making a competitor as a trigger self improvement
     iii. Maintain the confidentiality of data and information.
   - Relationship with Investors:
     i. Selects reliable, credible and responsible investor
     ii. Creates mutually beneficial working agreements
     iii. Conducts honest and effective communication by taking data and information confidentiality into account
     iv. Provides actual, accurate and prospective information
     v. Upholds investor's trust

   - Relationship with the Government/House of Representatives:
     i. Supports the programs and keeps Government/House's trust
     ii. Develops harmonious and constructive relationship
     iii. Provides correct and accurate data reports
   - Relationship with the Public:
     i. Expands and maintains good relationships
     ii. Carries out Corporate Social Responsibility programs and helps people affected by disasters
     iii. Appreciates regional value systems
     iv. Keeps the environment preserved and clean.

- Hubungan dengan Media Massa.
  i. Menjaga dan mengutamakan citra Perseroan.
  ii. Memberikan informasi yang aktual, relevan, dan berimbang.
  iii. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun dengan memperhatikan aspek risiko dan biaya.
- Hubungan dengan Organisasi Profesi / Institusi Pendidikan
  i. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  ii. Menerapkan standar-standar dan sertifikasi yang disepakati bersama.
  iii. Memberikan kesempatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat.
- Hubungan dengan Penegak Hukum.
  i. Obyektif, transparan dan taat aturan.
  ii. Menjalin kerjasama dalam upaya menjaga keamanan dan keselamatan aset Perseroan.
  iii. Melaksanakan program konsultatif dan bantuan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

- Relationship with Mass Media:
  i. Maintains and prioritizes the Company's image
  ii. Provides actual, relevant and balanced information
  iii. Accepts and follows up building critiques by observing risk and cost aspects.
- Professional Organization/Educational Institution Relations:
  i. Conducts continuous cooperation to gather information on the latest science and technology.
  ii. Applies the consented standards and certifications.
  iii. Opens opportunities in education, research and community development.
- Relationship with Law Enforcer.
  i. Objective, transparent and compliant
  ii. Cooperates in order to maintain the security and safety of company's assets
  iii. Conducts consultative programs and legal aid according to the applicable terms and conditions.

Pedoman Perilaku Berlaku Bagi Seluruh Insan PLN

Untuk membangun budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi, Perseroan menyebarkan Pernyataan Kepatuhan untuk semua Pegawai agar mematuhi dan melaksanakan Pedoman Peraturan tanpa kecuali. Penandatanganan pernyataan ini dilaksanakan pada pertengahan tahun 2012, sebagai salah satu bentuk komitmen seluruh insan PLN dari Manajemen Puncak hingga pelaksana lapangan untuk menjunjung tinggi dan meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Penerapan dan penegakan Pedoman Perilaku ini adalah bagian dari kepatuhan atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* - GCG).

Perseroan mewajibkan seluruh jajaran Organ Perusahaan dan Pegawai, Anak Usaha serta Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) lainnya untuk turut mendukung, memahami dan mematuhi Pedoman Perilaku, Pedoman GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berhubungan dan berbisnis dengan Perseroan dan bersama-sama menegakkan lingkungan kerja yang bersih, bebas dari tindakan yang merugikan negara.

Kode Etik *(Code of Ethics)*

Pada tahun 2014 PLN telah menyelesaikan penyusunan dan mulai memberlakukan Pedoman Kode Etik (Code of Ethics). Maksud penyusunan Kode Etik (*Code of Ethic*) ini adalah sebagai panduan dalam menjalankan hubungan kerja dengan para pemangku kepentingan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengawal moral bagi pimpinan dan pegawai PT PLN (Persero) dalam setiap proses pengambilan keputusan dan bertindak.

Code of Conduct Applies to All PLN People

To build a culture of compliance throughout the organization line, the Company spreads Compliance Statement for all Employees to comply with and implement the Code of Regulations without exception. The signing of this statement carried by the middle of 2012, as one of the commitment of all employees of PLN, from Top Management to field operators to uphold and improve the quality of implementation of Good Corporate Governance. Implementation and enforcement of this Code of Conduct is part of the compliance of the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

The Company requires that all levels of Company's Organ and Employees, Subsidiary and Stakeholders to support the order, understand and comply with the Code of Conduct, corporate governance guidelines and regulations applicable in touch and do business with the Company and jointly uphold the working environment clean, free from misconducts which made loss to the state.

Code of Ethical Conducts

In 2014, PLN has completed the preparation and start enforcing the Code of Conduct or Code of Ethics. The Intention of drafting the Code of Ethics is a guideline to running a work relationship with stakeholders. While the goal is to safeguard the moral for the management and employees of PT PLN (Persero) in any decision-making process and act.

Kode Etik terdiri atas Lima Kode Etik dan untuk selanjutnya disebut sebagai "5 (lima) Kode Etik PLN ". Didalam penyebutannya, 5 (lima) Kode Etik PLN diawali dengan kata "kita" untuk memberi penekanan dan tekad yang kuat bagi pimpinan dan pegawai PLN dalam melaksanakan Kode Etik tersebut. Ke lima kode etik dimaksud adalah.

1. Kita Menjunjung Tinggi Integritas.
   Kita Menjunjung Tinggi Integritas, berarti pimpinan dan pegawai PLN meyakini dengan keteguhan akan menjaga kejujuran, menghargai harkat dan martabat manusia, bertindak profesional , mentaati peruturan dan perundang-undangan yang berlaku, melakukan tindakan yang benar, bertanggungjawab, menghindari perbuatan jahat dan tercela serta menghindari perbuatan yang menimbulkan benturan kepentingan.

2. Kita Mengutamakan Pelanggan
   Kita Mengutamakan Pelanggan, berarti pimpinan dan pegawai PLN dalam setiap tindakannya memberi perhatian yang sangat besar kepuasan dan harapan pelanggan. Kepuasan dan harapan pelanggan akan dapat dipenuhi dengan terus menerus meningkatkan kualitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik. Dengan memenuhi kepuasan dan harapan pelanggan maka kinerja PLN akan dapat terus meningkat dan Visi menjadi perusahaan kelas dunia akan dapat tercapai.

3. Kita Tidak Korupsi
   Kita Tidak Korupsi, berarti pimpinan dan pegawai PLN bertekad dengan teguh tidak melakukan tindakan pencurian dan penggelapan, menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, memberi dan menerima hadiah, melakukan kolusi dan nepotisme, menerima gratifikasi yang dapat merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

4. Kita Menjaga Aset, Informasi dan Kepentingan Perusahaan
   Kita Menjaga Aset, Informasi dan Kepentingan Perusahaan, berarti pimpinan dan pegawai PLN berkewajiban untuk menjaga dan menggunakan secara bertanggungjawab setiap aset dan informasi milik PLN, tidak mempergunakan aset untuk kepentingan pribadi, dan menjaga kerahasiaan informasi PLN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   Kita Menjaga Aset, Informasi dan Kepentingan Perusahaan, juga berarti bahwa pimpinan dan pegawai PLN berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan dan sesuai dengan fakta atau data yang ada.

5. Kita Menjaga Hubungan Kemitraan yang Harmonis
   Kita Menjaga Hubungan Kemitraan yang Harmonis, berarti pimpinan dan pegawai PLN saling percaya, menjaga dan mengelola dengan baik hubungannya dengan pimpinan dan pegawai PLN lainnya berdasarkan etika yang berlaku, serta menjaga dan mengelola dengan baik hubungannya dengan

The Code of Ethic consists of five codes and hereinafter referred to as the "PLN's 5 Code of Ethic". In the mention, 5 (five) Code of Ethic of PLN begins with the word "we" to give emphasis and strong determination for the management and employees of PLN in implementing the Code of Ethic. Those five codes of ethic are as follows.

1. We Uphold High Integrity.
   We Uphold High Integrity, meaning the leadership and employees of PLN believe with firmness will maintain honesty, respect for human dignity, act professionally, obey the prevailing rules and legislation, do the right thing, responsible, avoid disgraceful action and causes a conflict.

2. Customer Comes First
   We Prioritize customer, meaning the leadership and employees of PLN in every action gives a great attention and customer's satisfaction and expectations. Customer's satisfaction and expectations will be met by improving the quality and reliability of electricity supply continuously. With fulfilling the customer's satisfaction and expectations, the performance of the company will be able to continue to rise and become a world-class company's vision will be achieved.

3. We're Not Corruption
   We're Not Corruption, meaning the leadership and employees of PLN firmly determined not to act theft and fraud, misuse the authority and position, giving and receiving gifts, collusion and nepotism, accepting gratification which can be harmful and contrary to the values of social justice.

4. We Maintain Assets, Information and Corporate Interests
   We Maintain Assets, Information and Corporate Interests, meaning the leadership and employees of PLN obliged to maintain and use it responsibly every asset and information of PLN, do not use the assets for personal interest, and maintain the confidentiality of PLN's information in accordance with applicable regulations.
   We Maintain Assets, Information and Corporate Interests, also means that the managers and staff of PLN obliged to provide true information, not misleading and in accordance with the facts or existing data.

5. We Maintaining Harmonious Relationship Partnership
   We Maintaining Harmonious Relationship Partnership, meaning the leadership and employees of PLN has mutual trust, maintain and manage the good relationship with managers and staff based on ethics, as well as maintain and manage with good relationship with external parties, namely

pihak-pihak eksternal yaitu pelanggan, pemasok/mitra kerja, pesaing, investor, pemerintah/DPR, masyarakat, media massa, organisasi profesi/institusi pendidikan dan penegak hukum.

6. Kita Menjaga Hubungan Kemitraan Yang Harmonis, juga berarti pimpinan dan pegawai PLN menjaga kelestarian alam dan lingkungan dalam arti menjaga dan melaksanakan kegiatan usahanya dengan berwawasan lingkungan untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

customers, suppliers / partners, competitors, investors, government / parliament, the public, mass media, professional organizations / institutions of education and law enforcement.

6. We Maintain Harmonious Relationship Partnership, meaning the leadership and employees of PLN preserve nature and the environment in the sense of maintaining and conducting its business with environmental knowledgment to protect natural resources and the environment.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Kode Etik tersebut selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh jajaran pegawai PLN di seluruh lapisan struktur organisasi dan unit kerja. PLN menyertakan lembar "Pernyataan Integritas" dalam proses sosialisasi tersebut. PLN menerapkan sanksi tegas atas setiap pelanggaran terhadap kode etik dimaksud, dengan sanksi baik berupa penundaan kenaikan pangkat/jenjang karir, pemberhentian dengan tidak hormat dan diproses secara hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mendapatkan umpan balik bagi peningkatan implementasi dan internalisasi budaya perusahaan, maka pada akhir tahun 2012 PLN menyelenggarakan survey Budaya Perusahaan dengan bantuan konsultan independen yang kompeten.

The Effort to Implement and Uphold the CoCE

Code of Ethic is disseminated to all levels of employees at all levels PLN organizational structure and work units. PLN includes sheet "Integrity Statement" in the socialization process. PLN applies sanctions for any violation of the code of ethics, with sanctions in the form of delays promotion / career, dishonorable discharge and prosecuted in accordance to the applicable regulations. To get feedback for improving the implementation and internalization of the corporate culture, then by the end of 2012 PLN held survey Corporate Culture organized with the assistance of competent independent consultant.

Sebagai tindak lanjut hasil survey tersebut, maka pada tahun 2013 telah diimplementasikan Budaya Perusahaan dan *Code of Conduct*, serta telah dilakukan penyusunan *action plan* hasil survey Budaya Perusahaan yang diselaraskan dengan program PLN Bersih dan telah disebarkan ke seluruh Unit perusahaan.

As a follow-up of the survey results, in 2013 PLN had implemented Corporate Culture and the Code of Conduct, as well as the preparation of the action plan based on the results of the Corporate Culture survey, in line with "PLN Bersih" Program, and distributed throughout the enterprise unit.

Budaya Perusahaan

Nilai-nilai perusahaan sebagaimana disederhanakan dalam tag-line SIPP, yakni Saling percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar, dan dijabarkan dengan singkat dan jelas pada uraian "Profil Perusahaan" terus diusahakan untuk disosialisasikan kepada seluruh pegawai Perseroan.

Corporate Culture

The values of the company as simplified in the tag - line SIPP, namely mutual trust, Integrity, Caring and Learning, and described briefly and clearly in the description "Company Profile" be pursued for disseminated to all employees of the Company.

Saling percaya

Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang bersih dan etis.

Mutual Trust

An atmosphere of mutual respect and openness among members of the company based on the belief in the integrity, good faith, and the competence of the parties that are interconnected in organizing clean business practices and ethical.

Penandatanganan Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Etika sebagai wujud dam tekad seluruh jajaran dalam menerapkan praktek terbaik Tata Kelola Perusahaan yang bersih bebas dari penyimpangan.

The Statement of Compliance with Code of Conduct Signing is a manifestation and intention of all PLN employees to implement the best practices of Good Corporate Governance and free from misconducts.

Integritas

Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.

Integrity

The realization of the attitude of members of the company who consistently demonstrate honesty, harmony between words and deeds, and a sense of responsibility for the management of the company and use the company's assets for the benefit of both short and long term, as well as a sense of responsibility to all interested parties.

Peduli

Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dijiwai kepekaan setiap permasalahan yang dihadapi Perusahaan serta mencari solusi yang tepat.

Care

Reflection of an intention to preserve and maintain the perceived quality of work life of the member of the company, the parties concerned in order to grow and develop together, with sensitivity imbued every problem faced by the Company and to find appropriate solutions.

Pembelajar

Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktik pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir demi pembaharuan Perusahaan secara berkelanjutan.

Learners

The attitude of members of the company to always dare questioning the system and practice of development, management and operation, as well as trying to control the development of science and cutting-edge (latest) technology for the sake of renewal of the Company on an ongoing basis.

08 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Ruang Lingkup Kegiatan dan Sumber Dana Kegiatan CSR
CSR Program Scope and Funding

Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan, Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Perubahan Iklim
Environmental, Electricity Safety (K2) and Climate Change Responsibility

Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Workforce, Occupational Health and Safety

Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Occupational Health and Safety

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Social and Community Development

Tanggung Jawab Terhadap Konsumen
Responsibility to Consumer

PT PLN (Persero)

WIRAUSAHA BERSINAR

BANK SAMPAH

Bank yang mengerti lingkungan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Merealisasikan program tanggung jawab sosial terhadap para pemangku kepentingan sebagai wujud peningkatan kualitas praktik GCG dalam rangka menjaga dan mengelola pertumbuhan usaha yang berkualitas dalam jangka panjang.

Realizing social responsibility program with coverage include: fostering a harmonious relationship, improving the economic competence of qualified small businesses, participation in environmental conservation and improvement of social life, as a support to the success of the Company's business in the long term.

Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan misi perusahaan sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkualitas, Perseroan kini berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan secara menyeluruh. Untuk memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan, yakni pelanggan, mitra kerja, pemerintah, pegawai, lembaga-lembaga swadaya, media massa dan masyarakat sekitar dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan perbaikan kualitas pelaksanaan tersebut, maka maksud pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak terbatas pada kegiatan pemberian bantuan semata, melainkan menjadi salah satu pendukung keberhasilan pengembangan usaha dalam jangka panjang Perseroan, dengan tujuan yang terdefinisikan dengan jelas dan dengan ukuran keberhasilan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan CSR adalah:

1. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.
2. Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh dan berdaya saing dengan pengelolaan yang profesional.
3. Mengembangkan pola pembinaan usaha kecil dan koperasi, dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika.
4. Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Berdasarkan tujuan tersebut, PLN menyusun dan melaksanakan program tanggung jawab perusahaan yang melibatkan dan memberikan nilai tambah bagi konsumen, karyawan, mitra bisnis, Pemegang Saham, komunitas sekitar, bagi bangsa dan lingkungan hidup.

Visi dan Misi Kegiatan CSR PLN

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang pelaksanaan kegiatan CSR tersebut, PLN menetapkan Visi dan Misi kegiatan CSR sebagai berikut.

Visi CSR PLN

"Menjadikan CSR PT PLN (Persero) terdepan dalam meningkatkan kebutuhan Kelistrikan dengan tetap memperhatikan keharmonisan seluruh lapisan stakeholder dan Lingkungan".

Misi CSR PLN

"Melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu menjembatani semua kepentingan *stakeholder* perusahaan agar dapat berjalan sinergis menjalankan dan memajukan citra perusahaan."

Purpose and Objective

In order to bring to reality the Company's mission and to create quality growth, the Company strives to improve the overall quality of Corporate Social Responsibility (CSR) program implementation to meet the expectation of all stakeholders, i.e. the customers, partners, the government, employees, non-governmental organizations, mass media and surrounding communities, while preserving the environment.

The improvement in the quality of the CSR implementation means that the purpose of the implementation of CSR is not restricted only to the mere providing of assistance, but rather being one of the supporting elements of the Company's success in long-term business development, with clearly defined objectives and accountable measurement of success.

The objectives of CSR activity implementation are:

1. Creating a harmonious relationship between the Company and the public.
2. Spurring the growth and the development of small enterprises and cooperative union management so that they can be more independent, resilient, competitive, and professionally managed.
3. Fostering small enterprises and a cooperative development's approach based on equality, independence, professionalism and ethics
4. Preserving the environment, and helping the improvement of the quality of life through the development of infrastructure in education, public health, and welfare.

Based on its objectives, PLN then prepared and implements its CSR program which involves and delivers added value to the consumers, employees, business partners, Shareholders, surrounding communities, dedicated to the nation and the environment.

Vision and Missions of PLN in CSR Program

In order to achieve the long term objectives of the CSR implementation, PLN set its vision and missions as follows:

Vision

"Striving the CSR Program of PT PLN (Persero) advanced in increasing the need of electricity, while maintaining harmony among stakeholders and the Environment"

Missions

"Implementing social activities in order to build link for all the stakeholders, so that they can interact synergistic to maintain and promote the image of the company."

Ruang Lingkup Kegiatan dan Sumber Dana Kegiatan CSR

Sesuai dengan tujuan pencapaian misi perusahaan, PLN melaksanakan kegiatan CSR yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab dalam lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta tanggung jawab produk.

Pelaksanaan kegiatan CSR dilakukan oleh masing-masing unit kerja, dan sumber dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun.

PLN berusaha untuk merealisasikan kegiatan dibidang CSR dengan sungguh-sungguh mengingat kegiatan dibidang ketenagakerjaan, tanggung jawab produk dan keselamatan kerja memberi dampak sangat signifikan terhadap keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Bentuk kegiatan CSR PLN pada dasarnya terdiri dari dua kegiatan utama, yakni:

1. CSR dalam bentuk kegiatan dengan penerima manfaat para pemangku kepentingan sebagai bentuk amanat dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74, dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
2. CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Kebijakan Pelaksanaan Program CSR PKBL

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PLN berkewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam pelaksanaannya, kegiatan CSR PLN dalam bentuk PKBL mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pada tahun 2012 dan 2013 terdapat beberapa perubahan kebijakan dari Kementerian BUMN, yaitu:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012, tentang Perubahan atas Peraturan No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013, tanggal 1 Mei 2013, tentang Perubahan kedua atas Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Permen No. Per-20/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Perubahan ketiga atas Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Permen No. Per-20/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012 dan Permen BUMN No. PER-05/MBU/2013, tanggal 1 Mei 2013.
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013, tanggal 10 September 2013, tentang Perubahan keempat atas Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

The Scope and Funding of CSR's Activities

In accordance with the objective of the missions and the hard effort employed to achieve them, PLN implements CSR program that fully support the environment, workforce, occupational health and safety and product.

The CRS program is carried out by work units, and the funds to cover the cost of the activities are allocated annually in the Planned Activities and Company Budget (RKAP).

PLN seeks to realize the CSR program seriously, given that the activities regarding labor practices, product quality assurance and occupational safety significantly influence the long-term business sustainability.

The formation of CSR activities implemented by PLN consist of two main activities; ie:

1. Activities which beneficiary are the stakeholders as mandated in article 74 of the Government Regulation No 40/2007 regarded Limited Liability Company, and Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Company.
2. Activities which is in the form of the Partnership and Community Development Program.

CSR Policy

As a state-owned enterprise, PLN is also obliged to implement the Partnership and Community Development Program (PKBL). The activities in this program are based on Regulation of the SOE Minister No. PER 05/MBU/2007 regarding SOE Partnership Programs with Small Businesses and Environmental Development Programs.

In 2012 and 2013, some changes were made in the policy of SOE Ministry, i.e.:

1. SOE Minister Regulation No. PER-20/MBU/2012, dated December 27, 2012, on the Amendment to Regulation No. Per-05/MBU/2007 regarding SOE Partnership Programs with small businesses and Environmental Development Programs.
2. SOE Minister Regulation No. PER-05/MBU/2013, dated May 01, 2013, on Second Amendment to SOE Minister Regulation No. Per-05/MBU/2007 regarding SOE Partnership Programs with small businesses and Environmental Development Programs, as amended by Ministry Regulation No. Per-20/MBU/2012, dated December 27, 2012.
3. SOE Minister Regulation No. PER-07/MBU/2013, PER-05/MBU/2013, dated June 27, 2013, on 3rd Amendment to SOE Minister Regulation No. Per-05/MBU/2007 regarding SOE Partnership Programs with small businesses and Environmental Development Programs, as amended by Ministry Regulation No. PER-20/MBU/2012, dated December 27, 2012, SOE Minister Regulation No. PER-05/MBU/2013 dated May 01, 2013.
4. SOE Minister Regulation No. PER-08/MBU/2013, dated September 10, 2013, on 4th Amendment to SOE Minister Regulation No. Per-05/MBU/2007 regarding SOE Partnership Programs with small businesses and Environmental Development Programs.

Sumber Dana Program CSR

Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan PKBL berasal dari anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013, tanggal 10 September 2013 tersebut diatas, serta menindaklanjuti surat KBUMN No. S-92/D5.MBU/2013 tanggal 3 April 2013, perihal pengelolaan program kemitraan dan Bina Lingkungan, dimana di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tahun 2013 program PK ditiadakan (tidak ada penyaluran pinjaman baru dan hanya dilakukan kegiatan penagihan serta monitoring terhadap mitra binaan), PLN tidak lagi menganggarkan alokasi laba untuk Program Kemitraan.

Selanjutnya untuk melaksanakan Program CSR sebagaimana dimaksud oleh pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 sumber pembiayaannya berasal dari anggaran Perseroan yang untuk tahun 2014 berjumlah sebesar sebesar Rp60 miliar.

Secara keseluruhan, kegiatan tanggung jawab perusahaan yang dilaksanakan di tahun 2014 mencakup kegiatan di bidang lingkungan, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat, serta program bantuan bencana alam dan bantuan masyarakat.

CSR Program Funding

The funds for implementation of partnership activities are allocated from the Company's budget and accounted as expenses. As stipulated in the Regulation of SOE Ministry No. PER-08/MBU/2013, and follow up Decree of SOE no. S-92 / D5.MBU / 2013 dated April 3, 2013, concerning the management of the partnership program and Community Development, which in the letter stated that in 2013 the PK program is eliminated (no new loan and only do the invoice and monitoring the partners), PLN no longer budgets profit allocation for the Partnership Program.

Meanwhile, the funds for the CSR program referring to article 74 of Law No. 40/2007 were taken from the Company's 2014 budget allocation amounting to IDR 60 billion

Overall, the company's CSR activities in 2014 covered the activities in environmental matter, workforce, occupational health and safety, partnership program and community empowerment program, public facility and infrastructure constructions, as well as natural disaster aid and social aid.

Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan, Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Perubahan Iklim

Sejalan dengan misi perusahaan yaitu "Menjalankan Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan", PT PLN (Persero) selalu berusaha memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya. PLN secara maksimal telah berupaya mengurangi pencemaran tanah, air dan udara oleh zat-zat polutan termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Upaya ini dilakukan secara menyeluruh dalam semua kegiatan penyediaan listrik oleh PLN baik itu instalasi pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi.

Kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sebagai implementasi dari misi tersebut di atas, perusahaan telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian dalam kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Melalui penilaian kinerja ini, perusahaan dapat mengevaluasi pemenuhan komitmennya dalam bidang lingkungan.

Adapun Kebijakan Lingkungan yang mendukung Komitmen Perusahaan sebagai berikut:

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi keanekaragaman hayati; serta melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di sekitar wilayah kerja perusahaan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain serta mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan.
3. Mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan mengkaji ulang secara periodik Kebijakan Lingkungan sehingga senantiasa relevan, sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen lingkungan yang diterapkan secara spesifik di setiap unit kerja dan anak perusahaan.
4. Menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja

Environmental, Electricity Safety (K2) and Climate Change Responsibility

In line with one of the company's mission, which is "Running environmentally sound business activities", PT PLN (Persero) is always updated with the environmental issues in all of its activities. PLN has devoted maximum effort to minimizing the impact of its environmental pollutan, on land, water sources and on air, including carefully control the greenhouse gases emission. These efforts are exercised completely across all PLN activities from the generating of electricity, the development of transmission and distribution.

Environmental, Occupational Health and Safety Policy

To realize the mission, the Company has set the environment aspect as one of the factors in performance assessment of PLN business unit across Indonesia. Through this performance assessment, the Company shall be able to evaluate the realization of its commitment on the environmental issues.

To actualized those commitments, PLN has established Environment Policy as follows:

1. Preventing environmental pollution and degradation of biodiversity around the Company's business areas, and the safety and healthy of its workers as well.
2. Comply with regulations, legislation and other stipulations, as well as control the important aspects and effects on the environment of any activity, process and product from various work units and subsidiaries.
3. Documented, implemented, and maintaining and reviewing periodically the Company's environmental policies to ensure its continued relevance, in accordance with and used as a basic guideline for environmental management applied specifically at each work unit and subsidiary.
4. Uses these policies as the foundation for determining and evaluating the achievement of environmental goals and objectives

5. Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan terus-menerus melakukan perbaikan kinerja sistem manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja
6. Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara Kebijakan Lingkungan, sehingga setiap unit kerja, anak perusahaan dan para mitra kerja dapat menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan setempat.
7. Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemen dan individu karyawan perusahaan.
8. Mendorong pengembangan masyarakat di sekitar unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya menjadikan perusahaan sebagai bagian integral dengan masyarakat di sekitarnya.
9. Berpartisipasi dalam program Pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
10. Menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak pendana *(lender)* dan masyarakat luas.

Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Sekitar Instalasi

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, Perusahaan telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian dalam kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Melalui hasil penilaian ini Perusahaan dapat mengevaluasi pemenuhan komitmen dalam bidang lingkungan.

1. Instalasi PLN secara rutin melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).
2. Pembinaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau dikenal dengan PROPER yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
3. Partisipasi pada upaya penurunan gas rumah kaca melalui skema *Clean Development Mechanism* (CDM) telah dilakukan dengan dikembangkannya proyek CDM antara lain PLTP Kamojang IV dan PLTP Lahendong II. Selain melalui mekanisme CDM, perusahaan juga memanfaatkan mekanisme *Voluntary Carbon Mechanism (VCM)* untuk mendapatkan insentif dari hasil penjualan kredit karbon pembangkit energi terbarukan.
4. Pembangkit energi terbarukan yang sedang dikembangkan sebagai proyek VCM adalah PLTA Renun, PLTA Sipansihaporas dan PLTA Musi.
5. Perkembangan proyek CDM dan VCM, sampai Q-3 2014 adalah sebagai berikut:
   - PLTP Kamojang IV: sedang dalam negosiasi *amandemen emission reduction Purchase Agreement* (ERPA).
   - PLTP Lahendong II: proses perubahan *focal point* komunikasi ke UNFCCC, dari Bank Dunia ke PLN.
   - PLTA Sipansihaporas dan PLTA Renun: verifikasi social carbon tahun ke-2 untuk PLTA Renun dan tahun ke-0 untuk PLTA Sipansihaporas sudah selesai.

Untuk seluruh proyek pembangunan dengan dana berasal dari luar negeri, PLN konsisten menerapkan prosedur pelaksanaan proyek dengan mematuhi ketentuan peraturan perundangan, mencakup pelaksanaan penyusunan *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARP) dan penyusunan AMDAL yang dipresentasikan kepada pemangku kepentingan.

5. Motivating each working unit and subsidiary to continuously improve performance of the management of the environmental protection program, the safety and healthy programs as well.
6. Preparing and facilitating resources needed to implement and conduct the environmental policies so that every unit, subsidiary and working partner can apply those policies gradually considering the capability of the company and local environment conditions.
7. Using the environmental concerns and safety and healthy program as the fundamental aspect of all management and individual employee's concern.
8. Stimulating the community development around working units and subsidiaries in efforts to make the company as an integral part of that community and its surroundings.
9. Taking participation in the government programs on reducing greenhouse gas emissions.
10. Assuring that the policies will always be prepared and opened for all stakeholders, including lenders and society in general.

Environment, Occupational Safety and Health Policy

To implement the policies as mentioned above, the company has already determined that environmental aspects are subject of performance review program implemented to all PLN business units across Indonesia. Through the performance review, the company will be able to evaluate its commitment to the environment.

1. PLN routinely carry out environmental managerial and monitoring activities in accordance with its environmental certification (AMDAL/UKL-UPL).
2. Establishing a program to asses the company's performance on environmental issues (PROPER) as implemented by the Ministry of the Environment (KLH).
3. Taking Participation in reducing greenhouse emissions through the Clean Development Mechanism (CDM) approach, as implemented with CDM projects, including PLTP Kamojang IV and PLTP Lahendong II. Besides CDM mechanisms, PLN also voluntarily utilizes the carbon market mechanism (Voluntary Carbon Mechanism/VCM) to voluntarily promote incentives from the trade in of less carbon fired in the use of renewable energy sources.
4. New VCM electricity generation is being developed at the PLTA Renun, PLTA Sipansihaporas and PLTA Musi projects.
5. The development of CDM and VCM as of Q-3 of 2014 stood as follows:
   - PLTP Kamojang IV: is on negociation process in the projects of Amandemen Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA)
   - PLTP Lahendong II: currently is in focal point changing prosess, that should be approved by UNFCCC from the World bank to PLN.
   - PLTA Sipansihaporas and PLTA Renun: second year social carbon verification for PLTA Renun and zeroth year process for PTLA Sipansihaporas has been accomplished.

For all development projects financed by foreign funds, PLN consistently applied the project implementation procedures and complied with the rules and regulations, including the Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) and the compilation of AMDAL presented to the stakeholders.

Pengelolaan Limbah

1. Pengelolaan limbah cair B3 dan non B3 hasil pengoperasian pembangkit/transmisi:
   - Limbah cair B3 dikelola sesuai dengan PP No 18 Tahun 1999 Jo PP No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan aturan turunannya. Limbah cair B3 seperti oli bekas dikemas dalam drum yang diberi symbol dan label limbah B3 dan disimpan di gudang penyimpanan limbah B3 yang berizin, sebelum diambil oleh pihak ke 3 yang memiliki ijin untuk mengolah atau memanfaatkan limbah B3 cair tersebut. Pelabelan, pengemasan, dan penyimpanan limbah cair B3 mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dilakukan pula pencatatan neraca limbah B3 yang antara lain meliputi catatan jenis dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan yang dikeluarkan serta yang disimpan. Neraca limbah B3 dilaporkan secara berkala kepada instansi yang berwenang.
   - Limbah cair non B3 diolah dalam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk memperbaiki kualitas limbah cair tersebut sehingga air yang limbah yang dibuang ke badan air memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan Pemerintah.

2. Pengelolaan limbah padat B3 dan non B3 pengoperasian pembangkit/transmisi
   - Pengelolaan limbah padat *fly ash* dan *bottom ash* (limbah B3) dikelola sesuai dengan PP No 18 Tahun 1999 Jo PP No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan aturan turunannya. *Fly ash* dan *bottom ash* disimpan di tempat penyimpanan sementara (TPS) sebelum diambil oleh pihak ke 3 yang memiliki izin pemanfaatn limbah B3. TPS limbah B3 harus memiliki izin dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   - Pengelolaan limbah padat non B3 dilakukan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 089/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 dan SK Direksi No. 37.K/010/Dir/2000 tanggal 23 Maret 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembersihan Limbah/Sampah di Lingkungan PT PLN (Persero). Pemusnahan limbah padat non B3 diserahkan kepada Tim Penilai Limbah/Sampah.

Waste Management

1. Liquid waste management B3 and non B3 power plant operation results / transmission:
   - B3 liquid waste is managed in accordance with Regulation No. 18 Year 1999 Jo PP 85 of 1999 on Waste Management B3 and ordinances. B3 liquid waste such as used oil packed in drums given symbols and labels of B3 and stored in storage warehouse licensed B3 waste, before being taken by a third party who has permission to process or utilize the B3 waste liquid. Labeling, packaging, and storage of B3 waste liquid refers to the applicable regulations. There is also B3 waste balance sheet recording which includes a record type and total B3 waste that generated and issued and stored. B3 waste balance sheet reported regularly to the relevant authorities.
   - Non B3 liquid waste is treated in a liquid waste treatment installation (WWTP) to improve the quality of the liquid waste so that the liquid waste discharged into water meet the waste quality standards set by the Government.

2. Solid waste management B3 and non B3 power plant operation / transmission
   - Solid waste Management of fly ash and bottom ash (B3 waste) is managed in accordance with Government Regulation No. 18 Year 1999 Jo PP 85 of 1999 on B3 Waste Management and ordinances. Fly ash and bottom ash are stored in a temporary storage area (TPS) before it is taken by a third party who has permission of B3 waste utilization. TPS of B3 waste must have a permit and meet the technical requirements in accordance with applicable regulations.
   - Non B3 Solid waste management is according to Decree of the Minister of Finance No. 089 / KMK.013 / 1991 dated January 25, 1991 and the Decree of the Board of Directors 37.K / 010 / Dir / 2000 dated March 23, 2000 on Implementation Guidelines for Cleaning Waste / Garbage in PT PLN (Persero). Solid waste disposal of non B3 submitted to the Assessment Team Waste / Trash.

Penggunaan Bahan-Bahan Daur Ulang

PLN berupaya menggunakan bahan-bahan daur ulang atau penggunaan energi terbarukan, yakni dengan:

1. Penggunaan bahan-bahan daur ulang:
   - Penggunaan air *sampling rack*.
   - Melakukan purifier pada minyak pelumas.
   - Melakukan purifier dan reklamasi pada minyak oli trafo.
   - Menggunakan kertas bekas.
   - Menggunakan kembali limbah minyak HSD / MFO, melalui separator ulang atau memompa kembali ke reciving tank dan digunakan kembali.
   - Memanfaatkan sampah daun untuk pembuatan kompos.
   - Memanfaatkan limbah besi untuk dipakai kembali.

2. Penggunaan energy terbarukan:
   - Dalam RUPTL Tahun 2013-2022, PLN merencanakan untuk membangun pembangkit energi terbarukan skala besar dan pembangkit berbahan bakar gas dengan kapasitas total 21,7 GW.

The use of Recycled Materials

PLN strives to use recycled materials or the use of renewable energy, namely by:

1. The use of recycled materials:
   - The use of rack water sampling.
   - Perform purification on lubricants.
   - Perform purification and reclamation on transformer oil.
   - Use recycled paper.
   - Reuse oil waste of HSD / MFO, through reseparator or pumping back into receiving tank and reused.
   - Utilize leaf waste for composting.
   - Utilize iron waste for reuse.

2. The use of renewable energy:
   - In RUPTL 2013-2022, PLN plans to build large-scale renewable energy power plant and gas power plants with a total capacity of 21.7 GW.

Edukasi Memanfaatkan Limbah
Waste Utilization Education

Kebanyakan orang menganggap sampah atau limbah sesuatu yang tidak berguna dan banyak mendatangkan masalah. Namun bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rosela di Parit Pekong, Siantan, Kalimantan Barat, limbah malah bermanfaat.

Di tangan-tangan kreatif ibu-ibu dan remaja di Kelurahan Siantan Tengah, Pontianak, sampah adalah sumber penghasilan tambahan bagi keluarga. Untuk memberikan bukti, PKBM Rosela serta beberapa PKBM di Kota Pontianak dan Kabupaten menampilkan hasil kreasi pengolahan limbah pada expo yang digelar PLN Wilayah Kalimantan Barat bekerja sama dengan Lazis Muhamadiyah Kalbar di halaman asrama haji Jl. Sutoyo, Pontianak, Kamis-Sabtu (27-29 Maret 2014).

Acara ekspo tersebut, tidak hanya menampilkan kreasi pengolahan limbah, namun lebih menekankan proses edukasi kepada masyarakat melalui berbagai stan yang berbentuk sentra. Salah satunya sentra edukasi. Dalam sentra edukasi ini, para pengunjung berkesempatan mempelajari teknik pengolahan limbah mulai wujud awal sampah hingga menjadi bentuk karya seni yang bernilai jual.

Selain sentra edukasi, juga ada sentra promosi dan sentra kuliner dengan menampilkan berbagai makanan khas Kalbar. Setiap materi pelatihan singkat di sentra edukasi dapat diikuti pengunjung tanpa dipungut biaya.

Untuk menambah semarak arena expo, setiap hari dilaksanakan berbagai pertandingan bertema "Pemanfaatan Limbah dan Pelestarian Lingkungan". Pesertanya anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Setiap pertandingan bernuansa edukasi agar peserta memiliki pola pikir dan perilaku yang baik terhadap sampah.

Melalui acara tersebut, PLN bertekad memberikan contoh nyata, bahwa sampah yang selama ini dianggap pembawa masalah bersama semata, dapat digunakan sebagai bahan bagi penyaluran seni kreatifitas yang membawa manfaat bernilai ekonomi maupun bernilai terhadap lingkungan. Acara tersebut diharapkan menggugah seluruh masyarakat terhadap keberadaan sampah, dampak terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, sekaligus menggugah masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Most people consider trash or waste something useless and bring many problems. But for Community Learning Center (CLC) in Parit Pekong Rosela, Siantan, West Kalimantan, waste are useful.

In the creative hands of mothers and adolescents in Siantan Tengah County, Pontianak, waste and garbage is a source of additional income for the family. To provide evidence, CLC Rosela as well as several CLC in Pontianak City and County displays creations from waste processing at the expo held by PLN Region West Kalimantan in collaboration with Muhammadiyah LAZIS West Kalimantan in the front yard of the pilgrim hostel located at Jl. Sutoyo, Pontianak, Thursday- Saturday (27-29 March 2014).

The expo event, not only displays creations from waste and garbage, but more emphasis also on the educating process for the public through various booth centers. One of these is educational booth centers. In these educational centers, the visitors had the opportunity to learn the techniques of waste treatment from it early manifestation of garbage to be a form of arts that are worth selling.

In addition to educational centers, there is also a center for the promotion and culinary center with displays of various specialties of Kalimantan cuisine. Each short training material in the center of education can be followed by visitors free of charge.

To brighten the expo arena, a variety of themed games is held every day called "Waste Utilization and Environmental Protection". The participants were children early childhood, kindergarten, elementary, junior high, and high school. Every game implied education so that participants have the proper mindset and behavior of the trash.

Through the event, PLN committed to providing concrete examples, that the garbage that had been considered only as problem to society, can be used as material for the distribution of creative art which brings benefits and economic value and worthed to the environment. The event is expected to create awareness of the whole society to the existence of garbage, its impact on the environment if not properly managed, as well as inspire people to not litter.

- PLN juga berupaya membangun pembangkit EBT skala kecil dengan kapasitas total 1,3 GW.

3. Untuk meningkatkan efisiensi energi, PLN akan melakukan rehabilitasi PLTU Suralaya Unit 3 dan 4 dengan target peningkatan efisiensi sebesar 3%.

Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

PLN menggalang kerjasama dengan beberapa pihak ke-3 dalam berbagai bidang terkait lingkungan, seperti:

1. Kerjasama dalam hal pengelolaan limbah B3 dengan pihak ke 3 yang memiliki izin Pengangkutan, Pengumpulan, dan Pengelola akhir limbah B3 (pengolahan, pemanfaatan, penimbunan).
2. Kerjasama peningkatan kapasitas SDM Bidang Lingkungan terkait penyiapan dokumen lingkungan dan sosial oleh Bank Dunia.
3. Kerjasama studi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) tersebar dengan konsultan yang terakreditasi.
4. Kerjasama pembuatan laporan pelaksanaan RKL-RPL tersebar dengan konsultan independen.
5. Kerjasama pelaksanaan pemantauan lingkungan tersebar dengan laboratorium terakreditasi.
6. Kerjasama pelaksanaan pelatihan AMDAL A dengan PPSML Universitas Indonesia.
7. Kerjasama pengurusan izin PPLH dengan konsultan.

Penelitian dan Pengembangan bidang Lingkungan Hidup

Sebagai wujud komitmen terhadap lingkungan, PLN juga melakukan berbagai penelitian terkait lingkungan hidup, meliputi:

1. Penyusunan materi pembelajaran "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)" bersama Pusdiklat.
2. Pelaksanaan workshop pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Limbah B3 (RPP LB3) bekerjasama dengan Puslitbang.
3. Pelaksanaan FGD Evaluasi Fly Ash dan Bottom Ash sebagai Limbah B3 bekerjasama dengan Kementerian ESDM dan Pelaku Usaha Ketenagalistrikan.
4. Pelaksanaan workshop Revisi Format Laporan Kinerja Lingkungan Hidup.
5. Inisiasi pembentukan Asosiasi Lingkungan Ketenagalistrikan Indonesia (ALLIN) bersama pelaku usaha ketenagalistrikan.

Kegiatan di Bidang Lingkungan lainnya

1. *Monitoring* rutin Dokumen Pelaksanaan RKL.
2. Pembuatan database lingkungan.

Dampak Keuangan dari Kegiatan

Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan lingkungan hidup selama tahun 2014 sebesar Rp128,1 miliar mencakup kegiatan pembuatan dokumen lingkungan, realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta realisasi kegiatan penghijauan di sekitar area operasi pembangkitan maupun area pendukung lainnya.

- PLN also seeks to build a small-scale renewable energy power plant with a total capacity of 1.3 GW.

3. To increase energy efficiency, the company will carry out rehabilitation PLTU Suralaya Units 3 and 4 with a target of increasing the efficiency of 3%.

Cooperation with Third Parties

PLN gathers cooperation with some third parties in many areas related to the environment, such as:

1. Cooperation in terms of B3 waste management with third party with licence of Freight, collection, and the final waste management of B3 (processing, use, stockpiling).
2. Cooperation in Improvement of human resource capacity in Environment Sector related to environmental and social document preparation by the World Bank.
3. Cooperation in environmental studies (EIA, UKL-UPL) scattered by an accredited consultant.
4. Cooperation in implementation reports on RKL-RPL scattered by an independent consultant.
5. Cooperation in implementation of environmental monitoring scattered with accredited laboratories.
6. Cooperation in training implementation of AMDAL A with PPSML University of Indonesia.
7. Cooperation in permit management of PPLH with consultant.

Research and Development for Environment

As a commitment to the environment, PLN also conducts several studies related to the environment, including:

1. Preparation of learning material "Protection and Environmental Management (PPLH)" with Pusdiklat.
2. Workshop of Draft Regulation on B3Waste Management (RPP LB3) DIscussion in collaboration with the Research and Development Centre (Puslitbang).
3. Workshop of Evaluation FGD Fly Ash and Bottom Ash as B3 waste in cooperation with the Ministry of Energy and Mineral Resources and Electricity business communities.
4. Workshop of revision format on Environmental Performance Report.
5. Initiation of Indonesian Electricity Environment Association (ALLIN) with electricity business communities.

Other Environmental Activities

1. Monitoring the Planning and Implementation documents for environmental (RKL).
2. Creating the environmental database.

Financial Effects of Environmental Activities

The total cost incurred for environmental activities in 2014 was IDR 128.1 consist of environmental documentations, environmental management and monitoring activities as well as reforestation activities in the surrounding areas of power generation operation and other supporting areas.

Sertifikasi Bidang Lingkungan Hidup

Selaras dengan pencapaian misi Perseroan "Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan", PLN menerapkan kebijakan perolehan sertifikasi lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga independen bagi unit-unit bisnis dan anak usaha yang mengelola stasiun pembangkit. Adapun sertifikasi lingkungan hidup yang dipersyaratkan bagi unit pengelola pembangkit adalah ISO 14001-2004 Sistem Manajemen Lingkungan dan sertifikasi lingkungan lain yang relevan.

Pada tahun 2014, PLN, melalui unit-unit bisnis dan entitas anak, mendapatkan 29 sertifikat ISO 14001 (sistem manajemen lingkungan).

Environmental Certification

In line with the effort to achieve the Company's mission: "Running environmentally sound business activities", PLN implement environmental certification acquisition policy issued by an independent agency for business units and subsidiary that manages the power station. The environmental certification required for plant management unit is ISO 14001-2004 Environmental Management System and other relevant environmental certification.

In 2014, business unit and subsidiaries of PLN wins 29 certification ISO 14001 (environmental management system).

Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PLN sangat menyadari makna penting dari terciptanya hubungan kerja sama yang serasi antara manajemen dan seluruh pegawai. Oleh karenanya dalam setiap kegiatan operasional, Perseroan senantiasa menjalankan praktik atau perlakuan yang sama terhadap semua karyawan dengan tidak memandang suku, ras, agama, gender dan haluan politiknya, begitu pula semua karyawan memiliki kebebasan berserikat. Untuk merealisasikan hubungan kerja yang mendukung terciptanya kondisi lingkungan kerja yang kondusif, PLN bersama dengan Serikat Pekerja bersama-sama menyetujui Adendum PKB periode 2010-2012 sebagai dasar bagi penyelenggaraan hubungan industrial yang saling menghargai. PLN bersama dengan Serikat Pekerja kini tengah membahas PKB untuk periode selanjutnya sebagai pengganti PKB dimaksud.

Selain kesepakatan hubungan industrial tersebut, Perseroan aktif menyelenggarakan berbagai forum komunikasi bipartit dalam kerangka formal maupun informal. Kemudian untuk memastikan pengelolaan SDM yang optimal dan selaras dengan tujuan pengembangan usaha PLN mengorganisasikan tenaga kerja dengan kebijakan sesuai butir-butir yang tercantum dalam Keputusan Direksi No. 032.K/DIR/2009.

Workforce, Occupational Health and Safety

PLN is well aware of the significance of the creation of a harmonious working relationship between the management and all employees. Therefore, in any operational activities, the Company continuously running practice or equal treatment of all employees irrespective of ethnicity, race, religion, gender and political view, as well as all freedom of association for all employees. To create the working relationship that supports the creation of conducive conditions of working environment, along with labor unions PLN jointly approve the Addendum of PKB 2010-2012 period as the basis for the implementation of mutually respectful industrial relations. PLN along with labor unions now discuss the new PKB for the period referred to hereinafter as a substitute to old PKB.

In addition to the industrial relations agreements, the Company actively organizing various bipartite communications forums within the framework of formal or informal. Then, to ensure optimal management of human resources and aligned with business development goals, PLN organized labor with appropriate policy complied with the Decree of Directors No.032.K/DIR/2009.

Ketenagakerjaan

Kebijakan

PLN berupaya meningkatkan optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan kepentingan pegawai. Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM yang berkualitas dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil, sesuai dengan kemampuan Perseroan, maka PLN menerapkan kebijakan dasar pengelolaan SDM sebagai berikut:

1. Membina hubungan baik dengan pegawai berlandaskan kerjasama timbal balik yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama dan ditinjau secara berkala.
2. Mematuhi seluruh peraturan-peraturan dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
3. Memberlakukan sistem pengupahan berdasarkan kinerja yang diterpakan dengan adil, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
4. Menjunjung tinggi hak-hak asasi pegawai dan memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Serikat Pegawai.
5. Menyiapkan berbagai program peningkatan dan pelatihan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok dan akhirnya korporasi.

Workforce

Policies

PLN seeks to improve the optimization of human resources management with due regard to the interests of employees. As part of the implementation of best quality human resources management policies and considering the interests of both parties fairly, in accordance with the Company's ability, PLN implement the basic policy of HR management as follows:

1. Maintain good relationships with employees based on mutual cooperation as outlined in the document of CLA (PKB) and reviewed periodically.
2. Comply with all applicable regulations and legislation on employment issues.
3. Apply the wage system based on performance which is implemented in fair, transparent and accountable manner.
4. Uphold the rights of employees and provide full support to the establishment of the Labor Union.
5. Prepare various training programs and employee competence enhancement to improve the performance of individuals, groups and corporate end.

6. Menerapkan kesetaraan dalam jejang karir.
7. Menerapkan kesetaraan gender dalam hal remunerasi.

Kegiatan

Uraian lebih lengkap mengenai Kegiatan dibidang pengelolaan ketenagakerjaan terdapat dalam bahasan "Pengelolaan Sumber Daya Manusia", halaman 134.

Dampak Keuangan dari Kegiatan

Sebagai realisasi kebijakan PLN untuk meningkatkan kompetensi pegawai, Perseroan menyelenggarakan berbagai program pelatihan yang terbuka bagi seluruh pegawai, sesuai dengan jenjang jabatan dan program pengembangan perusahaan. Program-program tersebut juga diuraikan secara lengkap pada bahasan "Pengelolaan Sumber Daya Manusia". Adapun gambaran biaya yang telah dikeluarkan oleh PLN untuk meningkatkan kompetensi pegawai di tahun 2014 sebesar Rp239,8 miliar.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kebijakan

Kebijakan PLN dalam pengelolaan K3 tercantum dalam SK Direksi PT PLN (Persero) No. 134.K/DIR/2007 tentang Kebijakan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3), dengan ringkasan kebijakan K3, adalah:

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi keanekaragaman hayati; serta melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan disekitar wilayah kerja perusahaan.
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain dengan mengontrol risiko keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, serta mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan.
3. Mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan mengkaji ulang secara periodik Kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini sehingga senantiasa relevan, sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan secara spesifik disetiap unit kerja dan anak perusahaan.
4. Menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan terus menerus melakukan perbaikan kinerja sistem manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara kebijakan LK3, sehingga setiap unit kerja, anak perusahaan, dan mitra kerja dapat menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan setempat.
7. Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemen dan individu karyawan perusahaan.

6. Applying equality in career path.
7. Implement gender equality in terms of remuneration.

Activities

Activities in the field of workforce management is described under "Human Resource Management," page 134.

Financial Effects of Activities

As a realization of its policy to increase employee competency, PLN holds a variety of training programs that are open to all employees, in accordance with the position level and the company's development road map. These programs are described extensively under the "Human Resource Management." The estimated costs PLN incurred to increase employee competency in 2014 is IDR 239.8 billion.

Occupational Health and Safety

Policies

PLN's policy in the management of Occupational Safety and Health (K3) is stated in the PT PLN (Persero) Board of Directors Decree No. 134.K/DIR/2007 on Occupational Environment, Safety and Health, outlining the K3 policy as follows:

1. Preventing environmental pollution and bio diversity degradation, and protect the safety and health of employees in the company's workplaces.
2. Complying with the laws and other regulations by controlling risks involving employee Occupational Environment, Safety and Health, as well as important environmental impacts and aspects in all activities processes and products in all of the various business units and the subsidiaries.
3. To periodically documenting, implementing, maintaining and reviewing Environmental Safety and Health policies to ensure they are relevant, appropriate and serve as the basic guidelines for the management of occupational environment, Safety and Health that applies specifically to each business unit and subsidiary.
4. Using this policy as a basis for determining and evaluating the achievements of goals and objectives of environmental, Safety and Health management.
5. Encouraging each business unit and subsidiary to continue to improve performance of the environmental, Safety and Health management system.
6. Providing and facilitating the provision of resources needed to implement and maintain the LK3 policies so that each business unit, subsidiary and work partners can implement these policies gradually by taking into account the abilities of the company and the local environmental conditions.
7. Ensuring the attitude and behavior of each management body and all Company employees are in line with the policies on environmental protection and Occupational Environment, Safety and Health policies.

Sertifikasi K3

PLN menerapkan kebijakan pengelolaan K3 tersebut melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja & Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilengkapi dengan sertifikasi OHSAS 18001 serta penerapan ISO 14001: 2004, mengenai pengelolaan lingkungan.

PLN menerapkan target dicapainya *zero-accident* pada setiap periode operasional dalam pelaksanaan K3 sebagai acuan bagi seluruh unit bisnis untuk dipenuhi dan dijadikan sebagai pedoman target pelaksanaan kegiatan K3

Komite Keselamatan Ketenagalistrikan

Mengingat operasional PLN melalui 47 unit bisnis dan 10 anak usaha berlokasi di seluruh Indonesia, PLN membentuk badan khusus sejenis Komite untuk mengkoordinasikan kegiatan dan program terkait K3, yang dinamakan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui SK Direksi No 570.K/DIR/2010. Komite ini kemudian diperbaharui lagi melalui SK Direksi No 017.K/DIR/2011 dan dinamakan Komite Keselamatan Ketenagalistrikan.

Kegiatan-Kegiatan Utama di Tahun 2014

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan, di tahun 2014 PLN melaksanakan berbagai langkah strategis terkait keselamatan ketenagalistrikan, baik dibidang sistem, organisasi, bidang pelatihan, penyediaan peralatan APAR dan penetapan kebijakan, yakni:

1. Menerapkan SMK3 sesuai PP 50 Tahun 2012.
2. Melaksanakan Sosialisasi, Workshop, diklat terhadap pelaksana/pengawas/manajerial tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Membuat Edaran Direksi tentang Penilaian kinerja Keselamatan Ketenagalistrikan yang didalamnya termasuk K3.
4. Membuat struktur organisasi penanggulangan bahaya kebakaran.
5. Membuat SOP Tanggap Darurat.
6. Mewajibkan untuk setiap unit mengadakan simulasi bahaya kebakaran yang dijadwalkan minimal 1 tahun sekali.
7. Memasukkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam prakualifikasi calon kontraktor pelaksana pembangunan unit pembangkit maupun kontraktor perawatan pembangkit dengan tujuan mengetahui dan memastikan kinerja kontraktor/mitra kerja pada Perseroan dalam penerapan SMK3.
8. Inspeksi mendadak lapangan oleh manajemen ke lini operasi.

Untuk meningkatkan kesiapan penanggulangan kecelakaan, kebakaran maupun bencana, kegiatan lain yang dilaksanakan adalah melaksanakan pelatihan bersama dibidang penanggulangan kebakaran dan K3 yang diselenggarakan secara periodik.

PLN juga melaksanakan kegiatan konseling dengan lebih banyak melibatkan karyawan dan masyarakat umum sebagai audience, tujuannya adalah agar karyawan dan masyarakat menjadi tau dan lebih peduli dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, karena topik yang disampaikan lebih kepada pengenalan dan pencegahan bahaya ketenagalistrikan pada pekerjaan dan instalasi terutama bahaya yang ada pada instalasi perumahan, contoh: pemasangan stop kontak yang tumpang tindih dan lain-lain.

K3 Certification

PLN applies the K3 management policies through the application of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3), which carries the OHSAS 18001 and ISO 14001:2004 certifications.

PLN applies a zero-accident target during each operational period, implementing K3 as a reference for all business units to to be seriously implemented, and set it as K3 activities' target guidelines.

Electrical Power Safety Committee

Given that PLN operate through 47 business units and 10 subsidiaries which are located throughout Indonesia, PLN formed a special committee to coordinate the activities and programs related to Occupational Health and Safety (K3). The management therefore produced Board of Directors Decree No. 570.K/DIR/2010 regarded the Occupational Safety and Health (K3) Committee. This committee was later updated with Board of Directors Decree No. 017.K/DIR/2011, and changes the name of the committee to the Electrical Power Safety Committee.

Main Activities in 2014

To assure the quality of Electrical Power Safety implementation, in 2014 PLN carries out a variety of strategic measures in relation to electrical power safety, particularly in training, provision of APAR equipment and policy making as follows:

1. Implement appropriate SMK3 in accordance with Government Regulation No 50/2012 (PP 50 of 2012).
2. Conducting socialization, workshop, and training for executive/supervisory/managerial on Occupational Health and Safety.
3. Creating Circular Directors of the Electricity Safety performance assessment that includes K3.
4. Creating organizational structure for fire prevention.
5. Creating SOP for Emergency Response procedure.
6. Require each work unit to held fire hazard simulation at least once a year.
7. Incorporating aspects of health and safety in pre selection system (prakualifikasi) of the construction contractor of generating unit or plant maintenance contractor in order to know and ensure the performance of contractors/partners in regard to health and safety / SMK3.
8. Unscheduled field inspection by management to line operation.

To improve prevention of accidents, fires as well as disasters, PLN implements other activities including joint training in fire prevention and K3, which are held periodically.

PLN also conducting counseling with greater involvement of employees and the general public as an audience, in order to make the employees and the public alert and more concerned with the Occupational Health and Safety, especially in recognition and prevention of hazards at work and installation of electricity, ie: mounting socket overlapping and others.

Kinerja K3

Sekalipun prosedur kerja aman telah ditetapkan, kegiatan operasional yang banyak berlangsung di lapangan membuat insiden kecelakaan kerja pada unit-unit bisnis PLN yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia masih terjadi. Adapun gambaran insiden kecelakaan kerja selama lima tahun terakhir tergambar dari tabel dan tiga diagram sebagai berikut.

K3 (Occupational Health and Safety) Performance

Even though safe working procedures have been established in many operations that take place in all over Indonesia, the accidents may still happened. The picture of the incidence of occupational accidents over the past five years drawn from the table and the following three diagrams.

Jenis Kecelakaan Kerja
Work Accident

Tingkat Keparahan
Severity

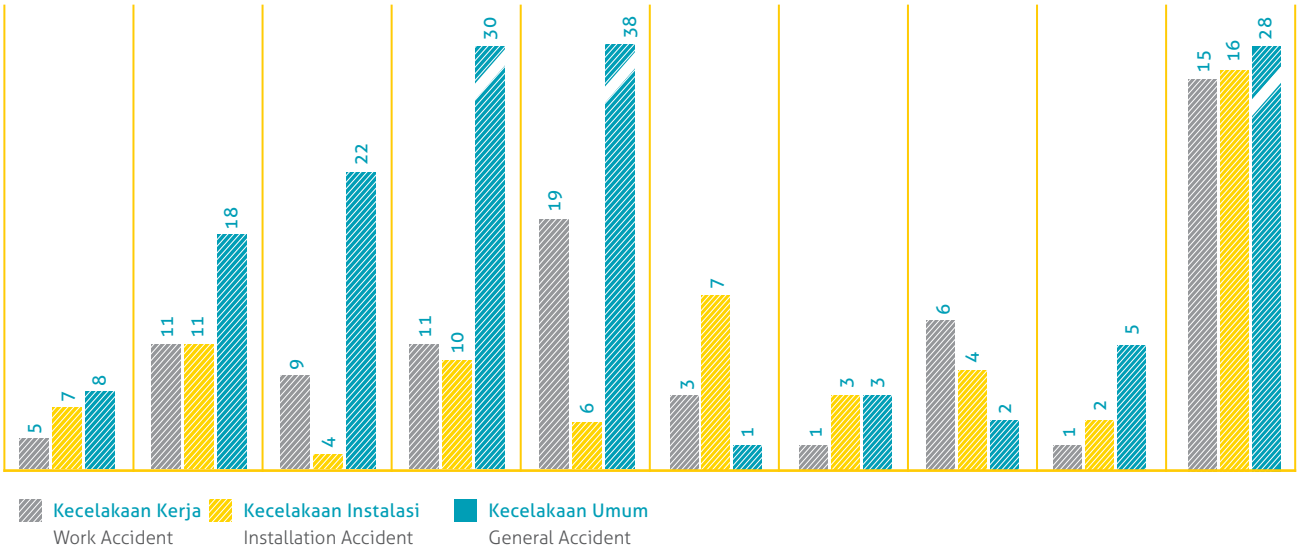

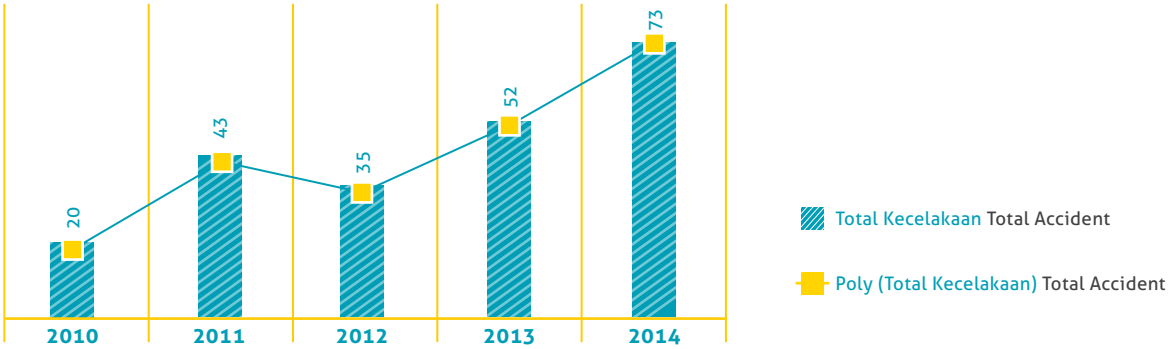

Menciptakan Budaya K3 sebagai Gaya Hidup

Creating a Culture of K3 (Health and Safety) as a Lifestyle

Penyebab utama terjadinya insiden kecelakaan kerja para petugas PLN di lapangan adalah ketidak patuhan pada aturan. Pada berbagai kasus insiden kecelakaan kerja, dijumpai bahwa petugas yang menjadi korban ternyata tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), tidak menerapkan surat izin kerja, tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP), dan tidak ada sertifikasi pengawas K3 jaringan. Pada insiden lain dijumpai bahwa korban tidak tidak menggunakan sarung tangan safety dan kepala tidak berhelm, tidak ada bukti dokumen job safety analysis, tidak ada dokumen identifikasi bahaya pengendalian risiko proses kerja, tidak ada SOP dan instruksi kerja, serta klausul K3 dalam kontrak tidak sesuai standar.

The main cause of workplace accidents of PLN officers is disobedience to the rules. In many cases of workplace accidents it is, found that the officer who becomes the victim did not use personal protective equipment (PPE), do not apply the work permit, do not have a standard operating procedure (SOP), and there is no network safety (K3) supervisor certification. In another incident, it is found that the victim did not not use safety gloves and helmets, no job safety analysis document, no documents of hazard risk control, no SOPs and work instructions, as well as K3 clause in the contract that is not according to the standard.

Memperhatikan beragam kasus insiden tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 yang telah dicanangkan sejak beberapa tahun lalu, belum sepenuhnya dijalankan dengan konsisten. Bercermin dari kasus-kasus insiden tersebut, PLN berupaya menjadikan K3 sebagai budaya kerja, kandati mewujudkan budaya dimaksud pada perusahaan sebesar PLN tentu bukan perkara mudah. Namun demikian PLN berupaya keras mewujudkannya.

All of the various cases of the above incident shows that the implementation of Occupational Health and Safety Management System or SMK3 that have been started several years ago, has not been fully implemented consistently. Based on the above incident cases, PLN attempts to make the K - 3 as an embedded work culture, regardless that it is difficult to be realized.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan budaya K3, PLN menerapkan program sertifikasi K3 terhadap 500 unit kerja hingga ke tingkat cabang. Sertifikasi implementasi K3 difokuskan pada unit-unit dengan risiko kecelakaan tinggi. Sedangkan untuk unit lain dilakukan kampanye rutin, termasuk kewajiban pelaksanaan simulasi penanggulangan kasus K3 secara berkala.

As a first step to realize the culture of K3, PLN implement a certification program for 500 units of work to the branch level. Implementation of K3 (safety) certification is focused on units with high accident risk. Meanwhile,, regular campaign are implemented for the other units, including the obligations to held simulation of K3 cases countermeasures periodically.

Beragam kegiatan tersebut diharapkan membuat K3 menjadi nadi pekerjaan, menjadi budaya dalam melakukan aktivitas operasional setiap insan PLN. K3 diharapkan kelak menjadi gaya hidup setiap pekerja di lingkungan PLN, terutama pada bidang operasi dan pemeliharaan yang memiliki risiko pekerjaan tinggi di pembangkitan, transmisi, dan distribusi, sehingga target zero accident di seluruh unit kerja kelak dapat tercapai.

Various activities held are expected to make K3 implanted into the pulse of the work, became operational culture in each human activity at PLN. K3 is expected to soon become the lifestyle of every worker in the PLN, especially in the specific jobs which have high -risk of accident, ie: in the generation plant, transmission, and distribution, so that the target of zero accident in the whole unit can be achieved in the future.

(Sumber Fokus -Februari 2014)

(Source Focus -Februari 2014)

Kecelakaan Kerja 2010 - 2014
2010 - 2014 Work Accident

Insiden	Tahun Year					Total	Incident
	2010	2011	2012	2013	**2014**	REKAP	
Jenis Kecelakaan							Type of Accident
Kecelakaan Kerja	5	14	9	12	**19**	59	Work Accident
Kecelakaan Instalasi	7	11	4	10	**6**	38	Installation Accident
Kecelakaan Umum	8	18	22	30	**48**	126	General Accident
Jenis Luka							Type of Injury
Jumlah luka ringan	3	1	6	1	**16**	27	Total minor injury
Jumlah luka berat	7	3	4	2	**16**	32	Total serious injury
Jumlah tewas	1	3	2	5	**28**	39	Total Killed
Total Kecelakaan	20	43	35	52	**73**	223	Total Accident
Sudah Investigasi	11	7	12	8	**60**	98	Has been investigated
Belum Investigasi	9	36	23	44	**13**	125	Has not been investigated

Kondisi tingkat insiden kecelakaan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan prosedur kerja maupun program peningkatan kesadaran budaya sadar aspek K3 dalam kegiatan operasional di seluruh unit bisnis PLN.

The above figures of incidence rates of the accident are then used as the material for the evaluation and improvement of work procedure and alertness on the K3 aspects across business units PLN.

Kesehatan

Berkaitan dengan kesehatan karyawan, PLN memiliki program pemeriksaan rutin bagi para pekerja yang bekerja pada lingkungan dan kondisi tertentu, misalnya terhadap para operator pada mesin pembangkit yang kesehariannya bekerja dengan kondisi kebisingan yang melewati ambang batas. PLN juga melakukan upaya pemantauan lingkungan di unit bisnis yang dimaksudkan untuk menjaga kondisi lingkungan agar terhindar dari limbah pembuangan yang bisa mencemarkan lingkungan. Dalam kaitan pemantauan kondisi lingkungan ini, PLN menetapkan SE Direksi nomor 109 Tahun 2014 yang didalamnya termasuk mewajibkan pemeriksaan berkala bagi tenaga kerja yang ada.

Health

Relating to employee health, PLN has a routine inspection program for workers who work in specific environments, for example the operators of generating unit who work daily with noise conditions that exceeded the standard threshold. PLN also conduct environmental monitoring efforts in the business units that are intended to maintain the environmental conditions in order to avoid waste disposal that can pollute the environment. In regard to this environmental condition monitoring, PLN set SE Directors number 109/2014 which includes requiring periodic inspection of the existing workforce.

Dampak Keuangan dari Kegiatan dibidang K3

Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja selama tahun 2014 adalah sebesar Rp61 miliar.

Financial Effects of K3 Activities

The total cost incurred for activities related to occupational health and safety during the year 2014 amounted to IDR 61 billion.

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Corporate Social and Responsibility* yang memiliki makna sangat berarti bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga Perusahaan. Melalui program ini Perusahaan turut berperan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja.

Selain itu Perusahaan mengharapkan agar masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap instalasi PLN, sehingga mereka turut berpartisipasi menjaga dan memelihara instalasi PLN.

Social and Community Development

This activity is implemented in the Partnership Program and Community Development (PKBL) and Corporate Social Responsibility which has a very significant meaning not only for the community, but also for the Company. Through this program, the Company contributed and improve people's lives and expand employment.

Besides, the Company expects that the people have a sense of belonging to PLN installation, so that they participate in protecting and maintaining the installation.

Kebijakan

Kegiatan pengembangan sosial dan kemasyarakatan PLN, khususnya program PKBL mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan dan perubahannya, yang merupakan bagian dari

Policy

Social and community development activities of PLN, especially Partnership program refers to the Regulation of the SOE's Minister No. PER 05/MBU/2007 on SOE Partnership Program with small businesses and the Community Development Program and amendments thereto, which is part of the realization of CSR

realisasi kegiatan CSR yang dilaksanakan dengan tujuan: (i) membantu pengembangan kemampuan masyarakat, (ii) meningkatkan pemberdayaan masyarakat, (iii) mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan, (iv) mendorong tersedianya tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (v) pengembangan desa binaan, serta (vi) menjaga kesinambungan lingkungan melalui pelestarian alam.

Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan terjadi hubungan emosi yang saling memahami, saling membutuhkan dan saling menjaga antara PLN dengan masyarakat sekitar.

Partisipasi PLN untuk turut aktif mengembangkan kehidupan masyarakat diimplementasikan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang telah dilaksanakan sejak tahun 1991.

Program Kemitraan

Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN. Program Kemitraan menyalurkan dana dalam bentuk:

1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian *asset* tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
2. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.
3. Beban Pembinaan:
   - Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan Produktifitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.
   - Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.
   - Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.

Menindaklanjuti surat KBUMN No. S-92/D5.MBU/2013 tanggal 3 April 2013, perihal pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, PLN tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyaluran dana pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi dalam bentuk Program Kemitraan. Dalam surat KBUMN tersebut dinyatakan bahwa tahun 2013 program PK ditiadakan (tidak ada penyaluran pinjaman baru dan hanya dilakukan kegiatan penagihan serta monitoring terhadap mitra binaan).

Dengan demikian untuk Program Kemitraan, PLN mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Di tahun 2014 tidak ada alokasi laba untuk Program Kemitraan. Program Kemitraan yang sudah berjalan agar tetap terus dijalankan, namun sudah tidak ada lagi aktivitas penyaluran pinjaman baru dan hanya dilakukan kegiatan penagihan serta monitoring terhadap mitra binaan dan pembinaan.

activities undertaken. The aim of activities are : (i) assist the development of the capability of the community, (ii) increase community empowerment, (iii) Empowering the community through education, i) encourage the availability of electricity to improve the quality of life, (v) Developing the villages to be a self sufficient and independent energy villages, and (vi) maintaining environmental sustainability through conservation.

This activity is conducted by involving all stakeholders and in collaboration with various parties including government, non-governmental organizations, mass organizations and others. Thus, it is expected to promote emotional relationship with mutual understanding, mutual need and mutual care of PLN and the surrounding community.

In order to be actively involved in the improvement of people's lives, PLN participates in the Partnership Program and Community Development (CSR/PKBL), which has been implemented since 1991.

Partnership program

Partnership Program is a program to improve the capability of small businesses to be stronger and independent through the use of funds derived from the profits of SOEs. Partnership Program allocates funds in the form of:

1. Loans to finance working capital and fixed assets or purchases in order to increase production and sales
2. Special loan to finance the funding required by coached business partners as the additional loans to finance short-term orders.
3. Coaching Expenses:
   - To finance the education, training, apprenticeship, marketing, promotion and other matters related to the increase in productivity as well as to finance the partners' study/research related to the Partnership Program;
   - Cost of coaching is a grant and the maximum amount spended not exceed of 20 % of the Partnership Program funds disbursed in the current year;
   - Cost of coaching can only be given to or for the benefit of the partners.

As a follow up of SOE's letter No S-92/D5.MBU/2013, dated April the 3rd 2013, regarded the Management of the Partnership Program and Community Development (CSR/PKBL), PLN does not allocate budget for the disbursement of funds to finance small and medium businesses,and cooperatives. The SOE Minister's letter, stated that in 2013 the Partnership Program is eliminated (no new funds disbursement and only active in the invoicing of current account balance, and monitors the partners).

Thus, in regard to Partnership Program, PLN take the following policies:

1. In the years 2014, there is no allocation of profits for the Partnership Program. Partnership program which has been running has to be continued, but there will be no more new lending activity and only concentrated on invoicing and monitoring activities of the partners and coaching activities.

2. Program Kemitraan yang saat ini sudah berjalan sesuai dengan kebijakan Kementerian BUMN nantinya akan diserahkan kepada salah satu BUMN yang akan ditentukan oleh Menteri BUMN.

Surat Kementerian BUMN No. S-119/ D5.MBU/2013, tanggal 29 April 2013 diterbitkan untuk mempertegas Surat Kementerian BUMN No. S-92/D5.MBU/2013, tanggal 3 April 2013, yang menyatakan bahwa pada tahun 2013 tidak dilakukan pengalokasian dana untuk Program Kemitraan dari laba BUMN tahun buku 2012. BUMN agar tidak melakukan penyaluran Program Kemitraan baru, kecuali untuk komitmen kepada mitra binaan yang telah disepakati sebelum terbitnya Surat No. S-92/D5.MBU/2013.

Pada tanggal 9 September 2013, Kementerian BUMN mengeluarkan surat No. S-554/MBU/2013 perihal Peraturan Menteri BUMN No. Per-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/ MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yaitu untuk Program Kemitraan, pelaksanaannya dilakukan dengan menyalurkan saldo dana Program Kemitraan yang tersedia di masing - masing BUMN, termasuk hasil pengembalian pinjaman.

Dengan demikian untuk tahun 2014, Kegiatan Kemitraan dilakukan dengan dukungan dana yang telah ada (dana bergulir), Dana tersedia dari dana bergulir adalah sebesar Rp29.973.868.662. Sedangkan Saldo Piutang Program Kemitraan Rp132.483.877.417, dengan rincian saldo piutang pinjaman Mitra Binaan senilai Rp115.562.344.021 dan piutang bermasalah senilai Rp16.921.533.396. Sampai dengan 31 Desember 2014, penyaluran sebesar Rp580 Juta adalah untuk dana Pembinaan Mitra Binaan.

Jumlah total mitra binaan sebanyak 43.872, dan penambahan jumlah mitra pada penyaluran tahun 2014 sebanyak 0 mitra, sehingga akumulasi sampai dengan akhir tahun 2014 jumlah mitra binaan PLN tidak ada perubahan yaitu sebanyak 43.872 mitra.

Kategori Piutang PK per 31 Desember 2014 adalah:
1. Kurang Lancar Rp1,5 M
2. Macet Rp114 M

Kerjasama dengan BUMN Penyalur dengan kondisi macet adalah:
1. PT SHS Rp21.7 M dari Rp25 M
2. PT Pertani Rp10.9 M dari Rp11 M
3. PT Garam Rp1.5 M dari Rp5 M (Kurang Lancar)
4. BPR BKK Taman Rp4.5 M dari Rp5 M (melalui PT PNM)

Program Bina Lingkungan

Merupakan kegiatan pemberdayaan serta pemberian bantuan antara lain pembangunan sarana dan prasarana umum masyarakat pada lingkup operasional Perusahaan. Sesuai hasil Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran PKBL Tahun Buku 2014, dengan risalah nomor: RIS-036/D5.MBU/RKA/2013, tanggal 25 November 2013, untuk program Bina Lingkungan alokasi dananya sebesar Rp10.030.000.000 (sepuluh miliar tiga puluh juta rupiah) dari alokasi biaya operasi perusahaan.

2. Partnership Program which is currently running in accordance with the policy of the Ministry of SOEs will be submitted to one of the SOEs which will be determined by the Minister of SOEs.

Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. S-119/ D5.MBU/2013, dated April 29, 2013 issued to reinforce the Ministry of SOE's Letter No. S-92/D5.MBU/2013, dated April 3, 2013, which states that in 2013 there will be no allocation of funds for the Partnership Program of fiscal year 2012. The SOEs are instructed not to commit on new disbursement of funds for Partnership Program, except for commitments which had been agreed upon prior to the issuance of the letter No.S-92/D5.MBU/2013.

On September 9, 2013, the Ministry of SOEs issued the letter No. S-554/MBU/2013 concerning Regulation of Minister of SOE No: Per-08/MBU/2013 about the 4th Amendment to the Regulation of the Minister of State Enterprises No.: Per-05/MBU/2007 on SOE Partnership Program with Small Business and Community Development Program, which is for the Partnership Program, the implementation is conducted through channeling program, which is taken from the remaining balance of Partnership Program funds available in each SOE, including from the proceeds repayment of the loan.

Therefore, for the years 2014, partnership activities is carried out, supported by the existing available funds (revolving fund), Funds are available from the revolving fund amounting Rp29,973,868,662. While Receivable Balance Partnership Program Rp132,483,877,417, and current remaining loan that amounted to Rp115,562,344,021 with non-performing loan totalling to Rp16,921,533,396 As of December 31, 2014, the distribution of Rp580 million is for Development Partners fund.

Total number of trained partners is 43,872, and no additional partner recruited in 2014, so that the accumulated number of partners until the end of 2014 is 43,872 partners.

PK receivables category per December 31, 2014 are:
1. Non-Current Rp1.5 Billion
2. Stuck Rp114 Billion

Cooperation with Distributor SOE with the stuck conditions are:
1. PT SHS Rp21.7 Billion of Rp25 Billion
2. PT Agricultural Rp10.9 Billion of Rp11 Billion
3. PT Garam Rp1.5 Billion of Rp5 Billion (Non-Current)
4. BPR BKK Taman Rp4.5 Billion of Rp5 Billion (through PT PNM)

Partnership Program

Partnership Program is an empowerment and assistance activities for the society, including the development of public facilities and infrastructure of society related to the scope of the Company's operations in the following activities. Based on the result of the Discussion Meeting discussed the Partnership Work Plan and Budget for Fiscal Year 2014, printed in the minutes of meeting number: RIS-036/D5.MBU/RKA/2013, dated November 25, 2013, funds allocated for the Community Development program was in the amount of IDR 10.03 billion.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013, tanggal 10 September 2013, tentang Perubahan keempat atas Permen BUMN No.Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dimana dana Bina Lingkungan dialokasikan dari dana operasional bukan dari alokasi laba perusahaan, kegiatan BUMN Peduli ditiadakan, serta menambahkan 1 ruang lingkup jenis bantuan Program Bina Lingkungan yaitu bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

In the Regulation of Minister of State PER-08/MBU/2013, dated September 10, 2013, regarding the 4th Amendment of SOE's Regulation No. Per-05/MBU/2007 about the Partnership Program in SOEs along with Small Business and Community Development Program in which the funds for Coaching Community Development program is allocated from operational funds instead of funds allocated from corporate profits, the activities of SOEs Care Program is dispensed, and the Ministry add 1 point to the scope of the type of assistance the Community Development Program which is social assistance to alleviate poverty.

Realisasi dana Bina Lingkungan pada tahun 2014 masih menggunakan dana BL lama yaitu :

The Community Development realization are carried out by using the budget in 2014 is as follows:

Kegiatan	Nilai Dana (Rp)	Activity
Bantuan Korban Bencana Alam	125.810.275	Earthquake Disaster Aid
Bantuan Pendidikan / Pelatihan	1.177.745.400	Education and training assistance, including:
Bantuan Peningkatan Kesehatan	53.702.566	Plantation potential development Training,
Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum	167.390.000	Tofu industry development Training,
Bantuan Sarana Ibadah	95.000.000	Tourism village potential development
Bantuan Pelestarian Alam	249.750.000	Agroforesty training in Aceh
Bantuan Pengentasan Kemiskinan	112.525.000	Learning Tools Assistance for students
Administrasi	0	
Jumlah	**1.981.923.241**	**Total**

Adapun kegiatan Bina Lingkungan yang dilakukan dengan menggunakan anggaran tersebut di tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Bencana alam;
   Bantuan bencana gempa bumi di Meulaboh Aceh, Kudus Jawa Tengah, Purwokerto, Bekasi dan bantuan banjir di Jakarta.
2. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:
   - Pelatihan pengembangan potensi perkebunan.
   - Pelatihan penguatan industri tahu rakyat.
   - Pengembangan potensi desa wisata.
   - Pelatihan agroforesty di Aceh.
   - Bantuan Peralatan belajar mengajar untuk pelajar.
3. Bantuan Kesehatan
   - Bantuan Posyandu di Desa Roban Timur Batang, Jawa Tengah.
   - Bantuan Pengobatan 3.500 gigi dan 1.600 tambal Gigi Pelajar gratis di Depok Jawa Barat rekor Muri.
4. Bantuan Sarana dan Prasarana Umum untuk pembangunan PLTMH Gunung Empuk di Aceh, bantuan renovasi tempat umum.
5. Bantuan Sarana Ibadah, untuk pembangunan Masjid dan Gereja di Nusa Tenggara Timur.
6. Bantuan Pelestarian Alam, untuk penanaman pohon di Pekalongan Jawa Tengah dan kegiatan kepedulian lingkungan lainnya.
7. Bantuan Pengentasan Kemiskinan, untuk Pasar murah di Takengon Aceh Tengah dan pembagian sembako di beberapa lokasi.

The Community Development activities are carried out by using the budget in 2014 is as follows:

1. Natural disasters;
   Earthquake Disaster Aid in Meulaboh Aceh, Kudus Central Java, Purwokerto, Bekasi and Jakarta for flooding disaster aid.
2. Education and training assistance, including:
   - Plantation potential development Training.
   - Tofu industry development Training.
   - Tourism village potential development.
   - Agroforesty training in Aceh.
   - Learning Tools Assistance for students.
3. Public Health Assistance
   - Service village assistance in Roban Timur Batang village, Central Java.
   - Treatment assistance of 3,500 free dental surgery and 1,600 free dental small surgery for Students in Depok West Java with Indonesian record (Muri).
4. Public Infrastructures and facilities assistance for the construction of MHP Gunung Empuk in Aceh, public places renovation assistance.
5. Religious Facilities assistance, for the construction of mosques and churches in East Nusa Tenggara.
6. Nature Conservation assistance, for tree planting in Pekalongan, Central Java and other environmental awareness activities.
7. Poverty Alleviation assistance, for Cheap market in Takengon Central Aceh and distribution of groceries in some locations.

Program Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan

Total dana Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang disediakan sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).

Penyaluran dana CSR tahun 2014 sebagian Anggaran Kas Operasi (AKO) telah digunakan untuk:

Environmental and Community Empowerment Participation Program Activities

Community and Environmental Participation Program of Total fund for Corporate Social Responsibility (CSR) program is Rp60 billion (sixty billion dollars).

CSR fund distribution in 2014 partly is from Operation Cash Budget (AKO) that has been used for:

Kegiatan	Nilai Dana (Rp)	Activity
Bantuan Korban Bencana Alam	823.123.050	Earthquake Disaster Aid
Bantuan Pendidikan / Pelatihan	10.055.257.007	Education and training assistance, including:
Bantuan Peningkatan Kesehatan	2.476.496.741	Plantation potential development Training,
Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau sarana Umum	15.978.383.214	Tofu industry development Training,
Bantuan Sarana Ibadah	2.016.387.843	Tourism village potential development
Bantuan Pelestarian alam	5.126.717.671	Agroforesty training in Aceh
Bantuan Pengentasan Kemiskinan	2.475.669.499	Learning Tools Assisstance for students
Administrasi	565.744.259	Administration
Jumlah	**39.517.779.284**	**Total**

Adapun kegiatan Program Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan selama tahun 2014 adalah:

1. Bantuan bencana alam sebesar Rp823.123.050 disalurkan untuk membantu korban banjir di Bekasi Purwakarta Cirebon Jawa Barat, Gunung Kelut Jawa Timur, Banjir Buleleng Bali, Banjir di Aceh, korban tanah longsor di Manado serta bantuan untuk Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara

There is also environmental and community empowerment participation program activities in 2014 which are:

1. Natural Disaster Assistance Rp823,123,050 distributed to help flood victims in Bekasi, Purwakarta, Cirebon in West Java, Mount Kelut in East Java, Flooding in Buleleng, Bali, Flooding in Aceh, landslide victims in Manado as well as assistance for Mount Sinabung in Karo North Sumatra

2. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp10.055.257.007 dilaksanakan tersebar di 34 propinsi di seluruh unit-unit PLN. Hal ini dikarenakan program Pendidikan terutama pendidikan non formal yang meningkatkan *skill* / kemampuan tenaga kerja yang kurang beruntung merupakan program yang lebih diprioritaskan di lapangan. Program tersebut diantaranya:
   - Lomba cerdas cermat dan Lomba Karya Ilmiah SMP di Jakarta
   - Program Beasiswa yang dilaksanakan di DKI Jakarta, di Padang Sumatera Barat, Jawa Tengah, Aceh, Bali
   - Pelatihan budidaya ikan, ternak dan pertanian di Kalimantan Timur, Papua, Kalimantan Tengah, P3B Sumatera, unit P3B yang tersebar di Jawa Bali.
   - Pelatihan bank sampah di Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Sumatera Utara,
   - Pelatihan kewirausahaan kecil untuk para usaha kecil pemula di Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Aceh, NTB, P3B Sumatera, unit P3B yang tersebar di Jawa Bali, Jawa Timur.
   - Pendidikan Usia Dini dilaksanakan di Lampung, di NTB,
   - Pelatihan Batik di Jakarta
   - Pembentukan 12 Kampung/ Desa Cerdas di Sumatera Utara
   - Pembentukan 3 Kampung Pintar daerah terpencil di Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu
   - Pelatihan bengkel / teknisi untuk pemuda di Sumatera Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Banten,

3. Bantuan peningkatan kesehatan senilai Rp2.476.496.741 dilaksanakan tersebar di 34 provinsi. Program tersebut diantaranya:
   - Khitanan masal di Jakarta, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan
   - Posyandu untuk ibu dan anak, pengobatan gratis di Batang Jawa Tengah, Pengobatan Gigi di Bawean Jawa Timur, Depok Jawa Barat, Pontianak Kalimantan Barat, NTB, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Labuan Indramayu Jawa Barat, Jawa timur, Talaud,
   - Deteksi kesehatan mata sejak dini di Aceh
   - Penyemprotan nyamuk Demam Berdarah di Bengkulu, Sumatera Selatan dan Jambi
   - Pembuatan MCK, saluran drainase yang sehat untuk lingkungan serta penyediaan air bersih layak konsumsi seperti di Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan.
4. Bantuan Pengembangan prasarana dan/atau sarana umum senilai Rp15.978.383.214, bantuan tersebut diantaranya :
   - Bantuan taman kota Garut di Jawa Barat
   - Bantuan Sarana Umum Wisata Desa Sedayu Yogyakarta
   - Bantuan Sarana Umum Wisata Gua Lalay Pelabuan Ratu Jawa Barat
   - Bantuan Lampu PJU Solar Cell di daerah terpencil
   - Bantuan PLTMH di Probolinggo Jawa Timur
   - Bantuan perbaikan sarana pasar tradisional agar bersih dan rapi di Bali dan Jawa Tengah
   - Bantuan Irigasi Desa CotHoho Aceh
   - Bantuan Mobil dan Ambulan Keliling di Riau
   - Bantuan Rumah singgah dan Halte di Kalimantan Barat\
   - Bantuan Sarana fasilitas umum di unit 9 terpencil di Indonesia yaitu Sumbawa NTB, Aceh, Takalar Sulawesi Selatan, Pematang Siantar Sumatera Utara, Pualu Pura

2. Education and Training Assistance Rp10,055,257,007 implemented in 34 provinces across units of PLN. This is because education program primarily non-formal education that enhances skills / abilities of disadvantaged workers is higher priority programs in the field. The program includes:
   - Quiz contest and research contest for junior high school in Jakarta
   - Scholarship Program held in Jakarta, in Padang West Sumatra, Central Java, Aceh, Bali
   - Fish cultivation training, cattle and agriculture in East Kalimantan, Papua, Central Kalimantan, Sumatra P3B, P3B units across Java and Bali.
   - Waste bank training in East Java, West Java, NTB, North Sumatra,
   - Small entrepreneurship training for beginner small business in West Java, West Kalimantan, West Sumatera, Aceh, West Nusa Tenggara, P3B Sumatra, P3B units across Java and Bali, East Java.
   - Toddlers Education held in Lampung, in West Nusa Tenggara,
   - Batik Training in Jakarta
   - The formation of 12 village / Smart Village in North Sumatra
   - The Formation of 3 Smart village in remote area of South Sumatra, Jambi and Bengkulu
   - Technician Training for young people in West Sumatra, West Java, South Sumatra, Banten,

3. Health Improvement Assistance 2.476.496.741, implemented in 34 provinces. The program includes:
   - Mass circumcision in Jakarta, Bangka Belitung, North Sumatra, South Sumatra
   - IHC for mothers and children, free medical treatment in Batang, Central Java, Dental Treatment in Bawean East Java, Depok West Java, Pontianak, West Kalimantan, West Nusa Tenggara, North Sumatra, South Sumatra, Lampung, West Sumatra, Labuan Indramayu in West Java, East Java, Talaud ,
   - Early detection of eye health in Aceh
   - Dengue mosquito spraying in Bengkulu, South Sumatra and Jambi
   - Making toilets, healthy drainage for the environment as well as the provision of potable water consumption such as West Java, West Sumatra, South Sulawesi.
4. Development infrastructure and / or facilities assistance amounts of Rp15,978,383,214, the assistance include:
   - Garut city park assistance in West Java
   - Public Facilities assistance for Tourism in Sedayu Village, Yogyakarta
   - Public Facilities assistance for Cave Tourism in Lalay Cave, Pelabuhan Ratu, West Java
   - PJU Lights Solar Cell assistance in remote areas
   - PLTMH assistance in Probolinggo East Java
   - Traditional markets improvement assistance in order to clean and neat in Bali and Central Java
   - Village Irrigation assistance in CotHoho Aceh
   - Cars and Ambulance assistance in Riau
   - Transit house and shelter assistance in West Kalimantan
   - Public facilities assistance in 9 remote areas in Indonesia, which are Sumbawa West Nusa Tenggara, Aceh, Takalar South Sulawesi, Pematang siantar North Sumatra, Pualu Pura in East

di NTT, Tual Maluku Selatan, Pangkalan Susu Sumatera Utara, Sapudi Jawa Timur, Kutai Timur Kalimantan Timur.

5. Bantuan Sarana Ibadah, senilai Rp2.016.387.843 bantuan tersebut tersebar di 34 Propinsi.
6. Bantuan Pelestarian alam senilai Rp5.126.717.671, bantuan tersebut untuk penghijauan dan program Bank Sampah di beberapa lokasi yaitu di Jawa Barat, JAwa Tengah, Jawa Timu, Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tmur, Sulawesi Utara, Maluku, NTB, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan
7. Bantuan Pengentasan Kemiskinan senilai Rp2.475.669.499 yaitu untuk pasar murah di Pontianak Kalimantan Barat dan bantuan untuk pemberdayaan desa-desa miskin di beberapa tempat di Jawa.

Tanggung Jawab Terhadap Konsumen

Kebijakan

1. Menjamin ketersediaan listrik yang berkualitas bebas dari pemadaman dan gangguan penyaluran.
2. Menjamin akurasi pencatatan meter pemakaian dan perhitungan tagihan.
3. Memberikan pelayanan pelanggan dan menyelesaikan keluhan pelanggan dengan cepat dan akurat.
4. Pengoptimalan upaya perbaikan citra perusahaan dan pembangunan corporate brand perusahaan.
5. Peningkatan keandalan pembangkit, transmisi dan distribusi untuk menekan SAIDI dan SAIFI.
6. Pemantauan terhadap angka penyambungan secara rutin.
7. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi guna mendukung *Customer Relationship Management System*, perbaikan proses bisnis pelayanan pelanggan serta layanan korporat lainnya secara terpusat setara perusahaan sejenis kelas dunia.

Program

PLN memiliki komitmen penuh untuk senantiasa memperbaiki kualitas pelaksanaan tanggung jawab terhadap konsumen dalam menjalankan kegiatan operasional dan mengembangkan usaha. Pebaikan ditujukan untuk mengubah maupun memperbaiki persepsi para pelanggan terhadap kualitas layanan PLN dalam memberikan jasa penyediaan tenaga listrik, memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pelanggan sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan listriknya maupun dalam menyelesaikan kewajibannya atas tenaga listrik yang digunakan.

Dalam rangka memperbaiki kualitas tersebut berbagai program telah dirancang dan direalisasikan sesuai dengan kemampuan Perseroan agar memberi dampak optimal terhadap perbaikan kualitas layanan sekaligus memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha. Sejalan dengan tuntutan efisiensi operasional dan tuntutan bagi terciptanya kegiatan operasional yang mampu meminimalisir *human error* dan lebih dapat dipertanggung jawabkan, PLN semakin intensif mengembangkan sistem layanan berbasiskan pada dukungan sistem teknologi informasi. Berbagi program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas tanggung jawab terhadap konsumen meliputi:

Nusa Tenggara, Tual South Maluku, Pangkalan Susu North Sumatra, Sapudi East Java, East Kutai in East Kalimantan.

5. Religious Facilities Assistance amounts Rp2.016.387.843 the assistance scattered in 34 provinces.
6. Nature conservation assistance amounts Rp5,126,717,671, the assistance for reforestation and waste bank program in several locations in West Java, Central Java, East Java, Jakarta, Bali, South Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, Maluku, West Nusa Tenggara, North Sumatra, South Sumatra, Lampung , South Sulawesi
7. Poverty Alleviation assistance amounts Rp2,475,669,499 which is for cheap market in Pontianak West Kalimantan and assistance for empowering poor villages in several places in Java.

Responsibility to Consumer

Policy

1. Ensure availability of quality power without outages (black out) or transmission interruption.
2. Ensure accuracy of usage metering and billing calculations
3. Provide customer service and resolve customer complaints quickly and accurately.
4. Optimize efforts to improve corporate image and corporate branding.
5. Improve the reliability of power plant, transmission and distribution to reduce SAIDI and SAIFI.
6. Monitor the connection points on a regular basis.
7. Optimize the use of information technology to support the Customer Relations Management System, improve and centralize processes of customer service business and other corporate services to be equal to world-class companies in similar business.

Program

PLN is fully committed to improve the quality of its responsibility to customers in running the operational activities and developing the business. The improvement is aimed to change or elevate the customers' perception toward PLN's service quality in providing electric power supply, meeting electric power needs and solving the problems the customers face related to the fulfillment of their electric power needs as well as settling their obligation for the electric power consumed.

To improve such quality, the Company has designed and implemented various programs in line with its capability, so as to create optimum results for service quality improvement and business development. In line with operational efficiency demand and the demand of operational activities that are more accountable and able to minimize human error, PLN more intensively develops IT-based service systems. The programs that have been conducted to improve the quality of responsibility to customers are:

1. Penyediaan *account officer* dan *official account* untuk pelanggan-pelanggan utama maupun pelanggan bisnis dan komersial utama.
2. Pengembangan sistem penagihan dan penyambungan, yakn AP2T dan P2APST.
3. Pengembangan Pelayanan *Borderless*, meliputi:
   - Pembukaan akun twitter @pln_123
   - Call center PLN 123, SMS 8123, USSD *8123#, email: pln123@pln.co.id, dan website pln www.pln.co.id.
4. Pengembangan Aplikasi Pengaduan Keluhan Terpadu (APKT).
5. Pengembangan program optimalisasi pengelolaan proses bisnis back office.

Pengembangan sistem operasional berbasis teknologi informasi tersebut selain dapat meningkatkan kecepatan layanan dan efisiensi operasional, juga dapat mengurangi peluang bagi terjadinya tindakan *fraud* akibat terjadinya kontak langsung dengan pelanggan.

Selain peningkatan kualitas layanan tersebut, PLN tetap konsisten melaksanakan upaya-upaya lain yang ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap konsumen. Upaya tersebut meliputi: pengurangan frekuensi gangguan pemadaman dan lama pemadaman, kestabilan tegangan dan pengembangan kapasitas pembangkitan untuk memenuhi kecukupan pasokan listrik.

Sertifikasi Mutu Layanan

Untuk meningkatkan standar pelayanan kepada pelanggan, PLN mengadopsi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Uraian kegiatan selengkapnya yang dilakukan PLN untuk menunjukkan pemenuhan tanggung jawab terhadap konsumen dijelaskan pada bab Diskusi dan Analisa Manajemen - "Peningkatan Mutu Layanan dan Keandalan."

1. The assignment of account officer and official account for key customers, both business and commercial customers.
2. The development of billing and connection systems, Centralized Customer Service Application (AP2T), and Centralized Management and Supervision of Revenue Flows (P2APST).
3. Borderless Service development, consisting of:
   - Launching Twitter account @pln_123 set-up
   - Call center PLN 123, SMS 8123, USSD *8123#, email: pln123@pln.co.id, and PLN's website www.pln.co.id.
4. Development of Application of Integrated Complaint Management (APKT) development.
5. Development of business process and back office application.

The development of IT-based operational systems Information resulted from this system can improve the speed of services to end customers and the level of operational efficiency, as well can minimize the chance of fraud due to direct contact with customers.

In addition to service quality improvement above, PLN remains consistently taking other efforts which are aimed to fulfill the responsibility to customers. These efforts are, among others, reducing frequency and length of power outage, improving stability of voltage and developing plant capacity to meet electric power supply sufficiency.

Service Quality Certification

To improve customer service standards, PLN adopted Quality Management System of ISO 9001:2008.

The activities carried out to demonstrate the fulfillment of PLN responsibility towards its consumers as discussed in the Management Discussion and Analysis chapter - "Improving Service Quality and Reliability."

INFO CC Mempercepat Layanan CC 123

INFO CC Accelerating the service of CC 123

Untuk memudahkan dalam meningkatkan kecepatan pelayanan kepada pelanggan PLN mengembangkan aplikasi *Back Office Contact Center* (Info CC). Aplikasi berbasis *web* ini berfungsi sebagai media untuk menyajikan data dan informasi bisnis proses PLN, baik info niaga maupun teknik kepada *Customer Service Officer* (CSO) Contact Center 123.

Aplikasi *back office Contact Center* 123 DJBB dibuat untuk memudahkan CSO mengakses data/informasi yang aktual, pemerataan dalam penyebaran informasi, serta pengarsipan laporan yang masuk ke CC 123. Terlebih, dengan adanya SK DIR No. 289.K/DIR/2013 yang menyebutkan bahwa *Contact Center* 123 sebagai pintu layanan PLN, maka dapat dipastikan jumlah *incoming call* akan semakin meningkat.

Aplikasi ini menggunakan metode *Single Sign On* untuk memasukkan *capture* aplikasi transaksional AP2T (Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat), P2APST (Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat), dan APKT (Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu). Juga menggunakan data alamat pelanggan sebagai pendekatan untuk menentukan koordinat rayon terdekat.

Dengan metode Single Sign On, aplikasi Info CC hanya menggunakan 1 username dan hanya sekali *log in*, maka beberapa aplikasi dapat langsung diakses, sehingga CSO tidak perlu menghafal semua *username* aplikasi untuk pengoperasian secara transaksional maupun non transaksional. Fitur aplikasi ini dibagi 2 bagian, yakni Fitur Transaksional dan Fitur Non Transaksional.

Fitur Transaksional merupakan gabungan beberapa aplikasi transaksi yang ada di PLN, kemudian dijadikan satu interface di Info CC. Fitur-fitur tersebut antara lain Transaksi Niaga seperti Proses PB/PD/PS melalui aplikasi AP2T, Suara Pelanggan seperti Proses Pengaduan dan Keluhan Pelanggan melalui APKT, Informasi Registrasi seperti Informasi Taglis dan Non Taglis melalui P2APST, dan SMS Niaga untuk Pelayanan PB/PD/PS melalui SMS di CC 123 DJBB.

Sementara Fitur Non Transaksional didapatkan dari informasi-informasi Niaga, Teknik, maupun Listrik Prabayar atau dikenal sebagai listrik pintar. Informasi bisa bersumber dari manajemen, internal PLN maupun pemberi kebijakan. Jika ada informasi penting dan tidak masuk dalam ketiga kriteria di atas bisa dimasukkan ke menu News. Fitur Non Transaksional dibuat untuk memberikan kecepatan penyajian informasi kepada CSO mengenai layanan Niaga, Teknik, LPB maupun informasi lain, dan memastikan ketepatan transaksi pelanggan sesuai dengan rayon terkait.

To facilitate in increasing the speed of customer service for PLN's customer developing application of Back Office Contact Center (CC info). This web-based application serves as a medium for presenting data and business information of PLN process, both commercial and technical information to the Customer Service Officer (CSO) Contact Center 123.

Back office application, Contact Center 123 DJBB made to facilitate CSO in accessing data / information that is actual, equity in information dissemination, and archiving reports to the CC 123. Moreover, the presence of Decree of Director No. 289.K / DIR / 2013, which states that the Contact Center 123 as PLN's services, it can be ascertained that total incoming calls are increasing.

This application using Single Sign On to incorporate transactional capture applications of AP2T (Centralized Customer Service Application), P2APST (Management and Control Flow In Centralized Revenue), and APKT (Complaints and Grievance Integrated Applications). It aslso uses the customer address data as an approach to determine the coordinates of the nearest rayon.

With Single Sign On method, application of Info CC only use 1 username and log in only once, so some applications can be directly accessed, so that CSOs do not have to memorize all the application usernames for operating in transactional and non-transactional. This application feature is divided in two parts, namely Transactional Feature and Non Transactional Feature.

Transactional feature is a combination of several transactional applications in PLN, then it becomes into one interface at info CC. These features include the Commercial Transactions such as Process PB / PD / PS through AP2T application, Customer Voice such as Customer Complaints and Complaint Process through APKT, Registration Information such as Taglis and Non Taglis Information through P2APST, and Commercial SMS for Services of PB / PD / PS via SMS in CC 123 DJBB.

While the Non-Transactional feature can be found in Commercial, Engineering, or Electrical Prepaid Information otherwise known as smart electricity. This information can be derived from the management, the internal of PLN and the regulator. If there is important information and it is not included in those criterias, it can be added to the News Menu. Non-Transactional Feature is made to provide the acceleration in presenting information to the CSO related to Commercial, Engineering, LPB and other information, and ensure the accuracy of customer transactions in accordance with the relevant rayon.

09 Informasi Perseroan

Corporate Information

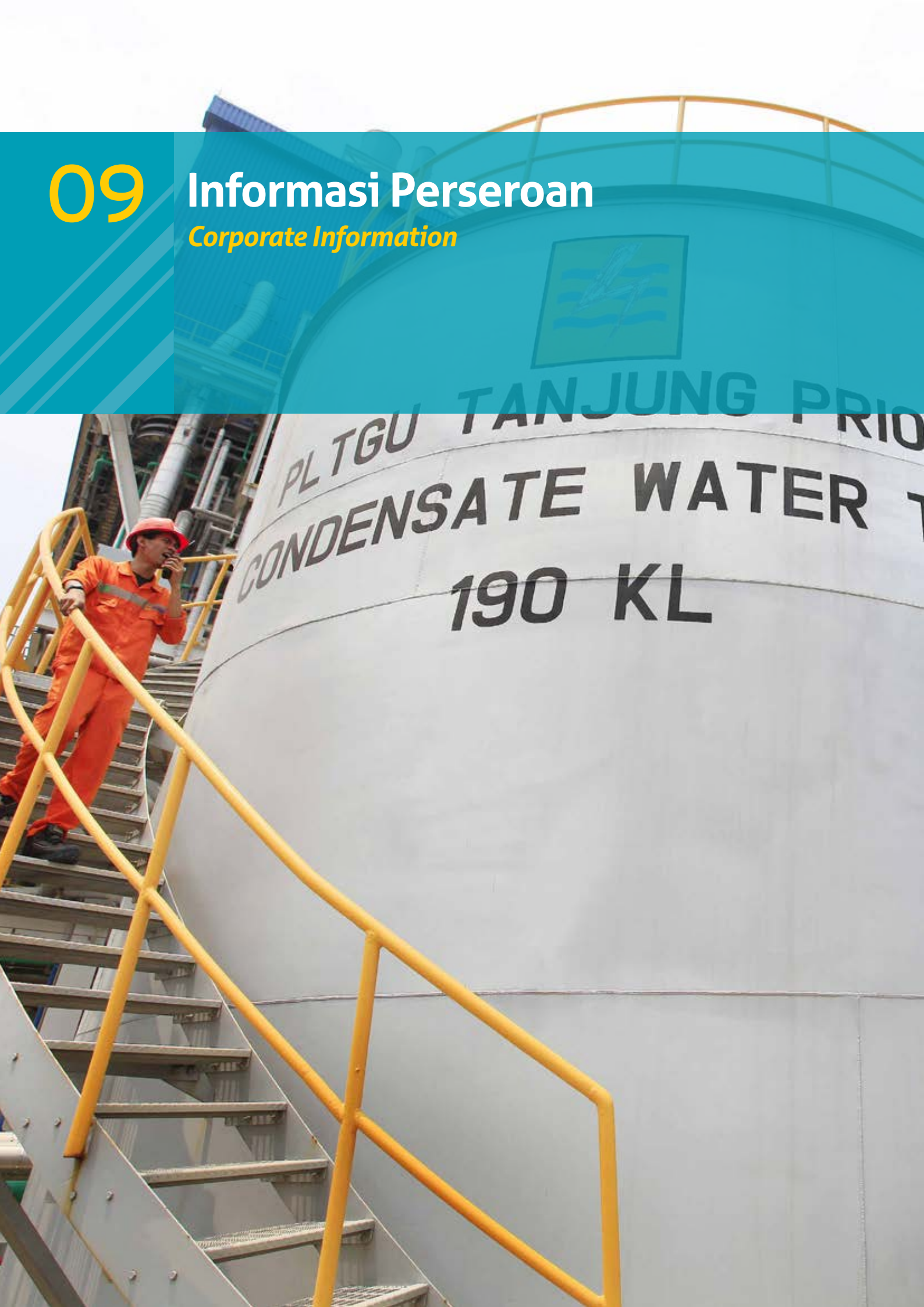

Profil Dewan Komisaris
Profile of The Board of Commissioners

Profil Direksi
Profile of The Board of Directors

Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Secretary and Corporate Secretary

Anggota Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee Members

Anggota Komite Audit
Audit Committee Members

Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Supervisory Unit

Daftar Unit Bisnis dan Alamat
Address and Business Unit

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2013 PT PLN (Persero)
Statement of The Members of The Board of Commissioners and The Board of Directors Concerning Responsibility Upon The 2014 Annual Report of PT PLN (Persero)

Profil Dewan Komisaris
Profile of The Board of Commissioners

CHANDRA M. HAMZAH
48 Tahun/Year
Komisaris Utama
President Commissioner

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak Desember 2014. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil ketua KPK Bidang Penindakan serta Bidang Informasi dan Data (2007-2011), setelah sebelumnya menjabat sebagai Anggota Tim Persiapan Pembentukan Komisi Anti Korupsi, Anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) (2000-2001).

Beliau meraih gelar Sarjana bidang Hukum dari Universitas Indonesia (1995)

Chandra M. Hamzah has served as President Commissioners since December 2014. He served as Vice Chairman of KPK and Data Information Field (2007-2011) He also served as a member of Formation Preparation Anti Corruption Team and a member of Joint Team of Corruption Eradication (2000-2001).

He holds a bachelor's degree in Law from University of Indonesia (1995)

OEGROSENO
58 Tahun/Year
Komisaris independen
Independent Commissioner

Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen sejak Oktober 2014. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Repubik Indonesia (2013-2014), Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes POLRI (2012-2013), Kepala Lembaga Pendidikan POLRI (2011-2012), Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (2010-2011) dan Kadiv Propam POLRI (2009-2010).

Beliau lulus dari Akademi Kepolisian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) di tahun 1978, perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di tahun 1986, SESPIMPOL di tahun 1996, SESPATI III pada tahun 2002 dan LEMHANAS pada tahun 2007.

Oegroseno has served as Independent Commissioner since October 2014. He served as Deputy Chief of Police Republic of Indonesia (2013-2014), Head of the Security Maintenance National Police Headquarters (2012-2013), Head of the National Police Education Institute (2011-2012), Head of North Sumatra Police (2010-2011) and Head of the Propam National Police (2009- 2010).

He graduated from the Police Academy of the Armed Forces of the Republic of Indonesia (AKABRI) in 1978, Police Institute in 1986, SESPIMPOL in 1996, SESPATI III in 2002 and LEMHANAS in 2007.

DARMONO
61 Tahun/Year
Komisaris independen
Independent Commissioner

Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen sejak Oktober 2014. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2013-sekarang), dan Dosen pada Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Universitas Trisakti Jakarta dan Universitas Esa Unggul Jakarta (2013-sekarang). Ketua Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi (2010-2013), PLT. Jaksa Agung RI (2010), Wakil Jaksa Agung RI (2009-2013) dan Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (2009-2011).

Beliau meraih gelar Sarjana Hukum UII Yogyakarta pada tahun 1977, Pasca Sarjana (S2) Magister Manajemen IPWI Jakarta pada tahun 2000 dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2010.

Darmono has served as independent Commissioner since October 2014. He serves as Commissioner in PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2013-present), dan Lecturer in Law Faculty in UII Yogyakarta, Universitas Trisakti Jakarta and Universitas Esa Unggul Jakarta (2013-present). Integrated Team Leader of Convicted seekers and Suspect Case of Corruption (2010-2013), PLT. Attorney General of Republif of Indonesia (2010), Deputy Attorney General of Republic of Indonesia (2009-2013) and Member of the Judicial Mafia Eradication Task Force (2009-2011).

He holds a bachelor's degree in Law from UII Yogyakarta (1977), Master degree (S2) in Manajement from IPWI Jakarta (2000) and Doctoral in Law from Universitas Padjadjaran Bandung (2010).

HARRY SUSETYO NUGROHO
59 Tahun/Year

Komisaris
Commissioner

Menjabat sebagai Komisaris sejak April 2013. Beliau juga menjabat sebagai Staf Ahli Tata Kelola, Kementerian BUMN (2010 – sekarang). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata, Kementerian BUMN (2005-2010) dan Asdep Usaha Aneka Industri Lainnya, Kementerian BUMN (2003-2005). Selain di Pemerintahan, beliau pernah bertugas sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) (2012-2013), Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) (2008-2012), Komisaris Perum Peruri (2007-2012) dan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2007-2012).

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1980) untuk selanjutnya meraih Master Bidang Administrasi Bisnis (Keuangan) dari University of Denver, Colorado, Amerika Serikat (1988).

Hary Susetyo Nugroho has served as Commissioner since April 2013. He also serves as Governance Senior Staff in Ministry of State-Owned Enterprises (2010 - present). Previously, he had served as Deputy of Logistics and Tourism in Ministry of State-Owned Enterprises (2005-2010) and Deputy Assistant Business Other Miscellaneous Industry in Ministry of State-Owned Enterprises (2003-2005). Besides in Government, he had served as a Commissioner of PT Pertamina (Persero) (2012-2013), President Commissioner of PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) (2008-2012), Commissioner of Perum Peruri (2007-2012) and Commissioner of PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2007-2012).

He holds a bachelor's degree in Industrial Engineering from Bandung Institute of Technology (1980) and Master's degree in Business Administration (Finance) from the University of Denver, Colorado, United States (1988)

SUMANGGAR MILTON PAKPAHAN
51 Tahun/Year

Komisaris
Commissioner

Menjabat sebagai Komisaris mulai Oktober 2014. Beliau juga menjabat sebagai Dewan Penasehat LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) (2006 – sekarang). Selain itu, sebelumnya pernah bertugas sebagai Anggota DPR RI (2009-2014), President Director dan pemegang saham PT. Intera Mas Servita. Oil and Gas Services & Supplies (1999 – 2009), Pemilik dan President Director PT. Mellissa Daya Mandiri Coal Mining & General Contractor (1999 – 2009), kemudian menjabat sebagai Sekretaris Jenderal LSM PRTNI (Peduli Rakyat Tani dan Nelayan Indonesia) (2006-2009) dan Wakil Ketua Umum APBI (Assosiasi Panas Bumi Indonesia) (2006 – 2007)

Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Teknik Fisika, ITB, Bandung pada tahun 1988, selanjutnya beliau menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana (S2) Jurusan Manajemen Pemasaran Institut Bisnis Indonesia (IBiI),Jakarta pada tahun 1997 dan memperoleh gelar Doktor Jurusan Competitive Intelligence Universitei't Marne la Valee, Paris pada tahun 2008.

Sumanggara Milton Pakpahan has served as Commissioner since October 2014. He also serves as Advisor Council NGO of LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) (2006 - present). In addition, he served as the Member of Parliament (2009-2014), President Director and shareholder of PT. Intera Mas Servita. Oil and Gas Services & Supplies (1999 - 2009), Owner and President Director of PT. Mellissa Daya Mandiri Coal Mining & General Contractor (1999 - 2009), then he served as Secretary General of the NGO of PRTNI (Peduli Rakyat Tani and Nelayan Indonesia) (2006-2009) and Vice Chairman of ICMA (Indonesian Geothermal Association) (2006-2007).

He holds a Bachelor's degree in Engineering Physics from ITB, Bandung in 1988, then he holds a Master's degree in Marketing Management from Institute of Business Indonesia (IBII), Jakarta in 1997 and obtained his Doctoral Degree in Competitive Intelligence from University of Marne la Vallée, Paris in 2008.

ANDIN HADIYANTO
49 Tahun/Year

Komisaris
Commissioner

Menjabat sebagai Komisaris mulai Oktober 2012. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan International (2013-sampai dengan sekarang) setelah sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2012). Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2009-2011), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Perdagangan (2006-2009), Kepala Bidang Analisa Sektor Riil Pusat Analisa Ekonomi Makro Badan Analisa Fiskal (2001-2005) dan Asisten Peneliti dan Pengajar pada Graduate School of International Development, Nagoya University, Nagoya, Japan (1997-1999).

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada (1989), beliau selanjutnya menyelesaikan jenjang pendidikan S-2 dan mendapatkan gelar Master of Economic dari Universitas Nagoya, Jepang (1997), untuk selanjutnya meraih Doctor in Economic dari Universitas Nagoya, Jepang (2000).

Andin Hadiyanto has served as Commissioner since October 2012. He also serves as Advisor Staff in Minister of Finance Division Macroeconomics and Finance International (2013-present). He had serves as Secretary of the Fiscal Policy Office, Ministry of Finance (2012). He had served as Head of International Cooperation Policy in Fiscal Policy Office, Ministry of Finance (2009-2011), Head of Research and Development, Ministry of Commerce (2006-2009), Head of Real Sector Analysis in Macroeconomic Analysis Center for Fiscal Analysis Office (2001- 2005) and Assistant Researcher and Lecturer at the Graduate School of International Development, Nagoya University, Nagoya, Japan (1997-1999).

He holds a bachelor's degree in Economic from the University of Gajah Mada (1989), and completed the Master's degree in Economics from the University of Nagoya, Japan (1997), Doctoral degree in Economics from the University of Nagoya, Japan (2000).

BUDIMAN
58 Tahun/Year

Komisaris
Commissioner

Menjabat sebagai Komisaris mulai Desember 2014. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) (2011-2013), setelah sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Kemenhan (2013), Wakil KASAD tahun (2010-2011), Dankodiklat TNI AD (2010) dan Pangdam IV/Diponegoro (2009).

Menyelesaikan pendidikan Akabri, Magelang Tahun 1978, beliau melanjutkan pendidikan di Seskoad (1994) dan selanjutnya menyelesaikan pendidikan di Sesko TNI (2001).

Budiman has served as Commissioner since December 2014. He served as Chief of the Army (2011-2013), then served as Secretary General of Ministry of Defense (2013), Deputy of Army (2010-2011), Dankodiklat Army (2010) and Commander IV / Diponegoro (2009-2010).

He graduated from the army academy, Magelang In 1978, he continued his education in Seskoad (1994) and graduated in Sesko TNI (2001).

HASAN BISRI
57 Tahun/Year
Komisaris
Commissioner

Menjabat sebagai Komisaris mulai tanggal 23 Desember 2014. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua BPK RI sejak September 2011 s.d. Oktober 2014, setelah sebelumnya bertugas sebagai Anggota BPK RI periode Oktober 2009 s.d. September 2011 dan periode Oktober 2004 s.d. Oktober 2009.

Lulusan Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Djakarta (UID), Jakarta tahun 1985, selanjunya beliau menyelesaikan program Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan, Universitas Satyagama Jakarta pada tahun 2004.

Hasan Basri has served as Commissioner since December 23, 2014. He currently serves as Vice Chairman of the BPK Republic of Indonesia since September 2011, he had served as a Member of BPK Republic of Indonesia from October 2009 until September 2011 from October 2004 to October 2009.

He holds a bachelor's degree in Business Economics from University of Islam Djakarta (UID), Jakarta in 1985, and Master's degree in Financial Management, University Satyagama, Jakarta in 2004.

ZULKIFLI ZAINI
58 Tahun/Year
Komisaris
Commissioner

Menjabat sebagai Komisaris mulai tanggal 2 Juli 2013. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri (2010-2013), setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bank Mandiri (2006-2010) dan Managing Director & SEVP Bank Mandiri (2003-2006).

Menyelesaikan pendidikan S-1 sebagai Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1980) untuk selanjutnya menyelesaikan program bidang Finance & International Bisnis dari Washington University, Amerika Serikat (1994).

Zulkifli Zaini has served as Commissioner since July 2, 2013. He previously was as President Director of Bank Mandiri (2010-2013), he had served as Director of Bank Mandiri (2006-2010) and Managing Director & SEVP Bank Mandiri (2003-2006).

He holds a bachelor's degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (1980) and master's degree in Finance and Business International from Washington University, USA (1994).

Profil Direksi
Profile of The Board of Directors

SOFYAN BASIR
56 Tahun/Year

Direktur Utama
President Director

Ditetapkan sebagai Direktur Utama sejak 23 Desember 2014. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (2005 - 2014), Direktur Utama Bank Bukopin (2005) setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial dan jabatan ditingkat manajemen lainnya. Sebelum bergabung di Bank Bukopin, Beliau berkarir di Bank Duta pada periode 1981-1986.

Meraih gelar Diploma dari STAK Trisakti, Jakarta pada tahun 1980, gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Ganesha Jakarta pada tahun 2010, dan gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2012.

Sofyan Basir defined as a President Director since December 23, 2014. He previously served as President Director of Bank Rakyat Indonesia since (2005 - 2004), President Director of Bank Bukopin (2005) after served as Director of Commercial and other management level positions. Prior to joining bank Bukopin, he served in Bank Duta (1981-1986).

He holds a Diploma of STAK Trisakti in 1980, a Bachelor of Economics from STIE Ganesha Jakarta in 2010, and an Honorary Doctorate from the University of Trisakti Jakarta in 2012.

NICKE WIDYAWATI
47 Tahun/Year

Direktur (Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan)
Director (Business, Risk Management dan Compliance)

Menjabat sebagai Direktur sejak 23 Desember 2014. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mega Eltra (2014), Direktur Usaha PT. Rekayasa Industri (2010-2014), Komisaris Utama PT Tracon Industri (2009-2013) dan Vice President Corporate Strategy Unit (CSU) PT. Rekayasa Industri (2007-2010).

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991, selanjutnya Meraih gelar Master di bidang Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2009.

Nicke Widyawati has served as Director since December 23, 2014. Previously, she had served as President Director of PT. Mega Eltra (2014), Business Director of PT. Rekayasa Industri (2010-2014), President Commissioner of PT Tracon Industry (2009-2013) and Vice President of Corporate Strategy Unit (CSU) PT. Rekayasa Industri (2007-2010).

Shee holds a bachelor's degree in Industrial Engineering from Bandung Institute of Technology in 1991, then a Master's degree in Business Law from Padjadjaran Bandung University in 2009.

SUPANGKAT IWAN SANTOSO
57 Tahun/Year

Direktur (Operasi Jawa Bali)
Director (Java and Bali Operational)

Menjabat sebagai Direktur mulai 23 Desember 2014, setelah sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Indonesia Power (2013) dan Kepala Divisi Pembangkitan Jawa Bali di Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera PLN. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Niaga PT Indonesia Power. Memulai karir di PT PLN pada tahun 1987 sebagai Mechanical Engineer.

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institute Teknologi Bandung pada tahun 1987, selanjutnya menyelesaikan jenjang S-2 dan meraih Master Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997.

Supangkat Iwan Santoso has served as Director from December 23, 2014, he previously served as President Director of PT Indonesia Power (2013) and Head of the Java Bali Power Division in the PLN Directorate of Java Bali Sumatra Operations. He also served as Director of Development and Commerce in PT Indonesia Power. He starts his career in PT PLN in 1987 as a Mechanical Engineer.

He holds a Bachelor of Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology in 1987, and completed Master degree in Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology in 1997.

AMIN SUBEKTI
44 Tahun/Year
Direktur (Pengadaan Strategis dan Energi Primer)
Director (Procurement and Primary Energy)

Menjabat sebagai Direktur sejak 23 Desember 2014. Sebelumnya beliau aktif menjabat sebagai ABAC Executive Director (APEC Business Advisory Council) (2013), dan pernah bertugas sebagai Senior Vice President (SVP) di PT Indika Energy Tbk, sebagai Direktur pada PT Cirebon Electric Power, PT Cirebon Power Services, PT Indika Multi Energi Internasional dan PT Indika Infrastruktur Investindo. Beliau juga pernah berkiprah di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) – Aceh & Nias (2006-2009) dan pernah bertugas sebagai Team Leader untuk Pengembangan Regional pada Kantor World Bank Jakarta pada tahun 2009-2011).

Beliau menyelesaikan pendidikan Akuntansi di STAN untuk selanjutnya menyelesaikan meraih MBA dari Universitas Melbourne, Australia.

Amin Subekti has served as Director since December 23, 2014. Previously, he actively served as Executive Director of ABAC (APEC Business Advisory Council) (2013), and had served as Senior Vice President (SVP) in PT Indika Energy Tbk, as Director of PT Cirebon Electric Power, PT Cirebon Power Services, PT Indika Multi Energi International and PT Indika Infrastruktur Investindo. He has also been active in the Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR) - Aceh and Nias (2006-2009) and served as Team Leader for Regional Development at the World Bank Office Jakarta in 2009-2011).

He graduated in Accounting in STAN and earned a Master's degree from the University of Melbourne, Australia.

NASRI SEBAYANG
59 Tahun/Year
Direktur (Konstruksi dan Energi Baru)
Director (Construction and New Renewable Energy)

Ditugaskan kembali sebagai Direktur PLN sejak 23 Desember 2014 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Konstruksi Dan Energi Baru Terbarukan mulai Maret 2013 setelah sebelumnya bertugas sebagai Direktur Konstruksi PLN sejak Oktober 2011. Sebelumnya beliau adalah Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN periode Desember 2009 hingga Oktober 2011. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Energi Primer sejak April 2008 hingga Desember 2009, Deputi Direktur Independent Power Producers (2006-2008), Kepala Satuan Manajemen Risiko (2006), General Manager PLN Pembangkitan Muara Tawar (2005-2006), Manajer SDM PLN Pembangkitan Muara Tawar (2003-2005), Kepala Divisi Operasi PLN Proyek Pembangkitan dan Jaringan (Pikitring) Sumatera Utara (2000-2003) dan juga pernah memimpin beberapa proyek pengembangan hydro dari tahun 1993 hingga 2000.

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sumatera Utara pada 1979 dan gelar Master Bisnis Administrasi dari Erasmus University & Center for Global Leadership pada 2007.

Nasri Sebayang re-appointed as Director of PLN since December 23, 2014 after serving as Director of Construction and Renewable Energy in March 2013. He previously served as Director of PLN Construction since October 2011. Previously, he was Director of Planning and Technology PLN from December 2009 to October 2011. He had served as Head of Primary Energy from April 2008 to December 2009, Deputy Director of the Independent Power Producers (2006-2008), Head of Risk Management (2006), General Manager of PLN Muara Tawar (2005-2006), HR Manager of PLN Muara Tawar (2003-2005), Head of the Operations Division in PLN Generation projects and Networks (Pikitring) North Sumatra (2000-2003) and has also led several hydro development projects from 1993 to 2000.

He holds a bachelor's degree in Civil Engineering from the University of North Sumatra in 1979 and a Master of Business Administration from Erasmus University and the Center for Global Leadership in 2007.

AMIR ROSIDIN
56 Tahun/Year
Direktur (Operasi Luar Jawa Bali)
Director (Outside Java and Bali Operational)

Bertugas sebagai Direktur 23 Desember 2014. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB). Selain itu beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko pada Direktorat Bisnis & Manajemen Risiko PLN Kantor Pusat (2010-2013), General Manager PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (2010) dan General Manager PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur (2008). Mulai berkarir di PLN pada tahun 1985.

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Listrik dari Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1985 untuk selanjutnya meraih Master di bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta.

Amin Rosidin has served as Director since December 23, 2014. Previously, he served as President Director of PT Java Bali Generation (PJB). In addition, he has served as Head of Risk Management Division in the Directorate Business & Risk Management of PLN Headquarters (2010-2013), General Manager of PLN Region South Sumatra, Jambi, Bengkulu (2010) and General Manager of PLN Region East Nusa Tenggara (2008). He stars his career in PLN in 1985.

He holds a bachelor's degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology, in 1985 and then a Master's Degree in Management from the Management Institute of PPM, Jakarta.

MURTAQI SYAMSUDDIN
59 Tahun/Year
Direktur (Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PLN)
Director (Planning and PLN Affiliation Development)

Kembali menjabat sebagai Direktur sejak 23 Desember 2014, setelah sebelumnya bertugas sebagai Direktur Perencanaan Dan Pembinaan Afiliasi mulai Maret 2013 dan sebagai Direktur Perencanaan & Manajemen Risiko sejak Oktober 2011. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko periode Desember 2009 hingga Oktober 2011. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Jawa Madura dan Bali sejak Maret 2008 hingga Desember 2009, General Manager PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (2003-2008), Ahli Pemasaran dan Pengembangan Unit Bisnis (2001-2003), Sekretaris Perusahaan (2000-2001), Kepala Dinas Kepegawaian (1998-2000) dan Deputi Manajer Perencanaan pada PLN Wilayah Sumatera utara (1996-1998).

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia pada tahun 1981 dan Gelar MBA Bidang Keuangan Perusahaan dari Universitas Oregon pada tahun 2003.

Murtaqi Syamsuddin reappointed sas a Director since December 23, 2014. Previously, he served as Director of Planning and PLN Affiliation Development in March 2013 and as Director of Planning & Risk Management since October 2011. He has served as Director of Business and Risk Management from December 2009 to October 2011. He also has served as Director of Java, Madura and Bali from March 2008 to December 2009, the General Manager of PLN Distribution West Java and Banten (2003-2008), Marketing Expert and Business Unit Development (2001-2003), Corporate Secretary (2000-2001), Head of Employee Division (1998-2000) and Deputy Manager for Planning at PLN North Sumatra region (1996-1998).

He holds a degree in Electrical Engineering from the University of Indonesia in 1981 and an MBA in Finance Corporation from the University of Oregon in 2003.

SARWONO SUDARTO
62 Tahun/Year
Direktur (Keuangan)
Director (Finance)

Menjabat sebagai Direktur sejak 23 Desember 2014. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional BRI sejak 2006, setelah sebelumnya menduduki berbagai jabatan manajerial di Bank Rakyat Indonesia diantaranya sebagai Kepala Divisi Treasury, Kepala Divisi Renstra, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Bisnis Ritel, Wakil Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan, Pemimpin Cabang Palembang Sriwijaya, Guest Officer Sanwa International Finance Ltd. Hongkong, Treasury Manager dan Chief Dealer BRI Finance Ltd. Hongkong.

Meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Niaga dari Universitas Diponegoro, Semarang (1975), gelar MBA dari Tulane University, Amerika Serikat (1987), dan gelar Doktor dari Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (2011). Telah mengikuti berbagai pendidikan serta pelatihan antara lain seperti Pasar Modal (Tokyo); Sertifikasi Manajemen Risiko, BSMR (Singapura); sebagai Asesor Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko dari BNSP; 5th World Islamic Economic Forum, Risk Management Certification Refreshment Program; LEMHANNAS RI, SESPIBANK, dan Organization Management (Jakarta).

Sarwono Sudarto has served as a Director since December 23, 2014. He previously served as Director of BRI Operations since 2006, having previously held various managerial positions at Bank Rakyat Indonesia such as the Head of Treasury Division, Head of Strategic Planning Division, Head of Internal Audit Division, Head of Retail Business Division, Deputy Chief Division of Accounting and Financial Management, Branch Manager in Palembang Sriwijaya, Guest Officer of Sanwa International Finance Ltd. Hongkong, Treasury Manager and Chief Dealer of BRI Finance Ltd. Hong Kong.

He holds a Bachelor's degree in Business Administration from the University of Diponegoro, Semarang (1975), an MBA from Tulane University, USA (1987), and his PhD from the Department of Educational Management form Universitas Negeri Jakarta (2011). He haas participated in various education and training, among others, such as the Capital Market (Tokyo); Risk Management Certification, BSMR (Singapore); as a Assessor of Risk Management Competency Certification from BNSP; 5th World Islamic Economic Forum, Risk Management Certification Refreshment Program; LEMHANNAS RI, SESPIBANK, and Organization Management (Jakarta).

Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Secretary and Corporate Secretary

ADI SUPRIONO

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak bulan Februari 2012. Sebelumnya adalah Direktur Pengembangan dan Niaga PT PJB (tahun 2010), Direktur SDM & Administrasi PT PJB (tahun 2009), Sekretaris Perusahaan PT PJB (tahun 2008) beliau juga pernah menjabat sebagai Manajer Anggaran, Pendanaan dan Perencanaan Korporat PT PJB (tahun 2001), Direktur Keuangan PT Bajradaya Sentra Nusa (tahun 2003).

Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari ITB tahun 1984, Master di bidang Manajemen Bisnis di Universitas Hasanuddin – Makasar tahun 2000 dan Master di bidang Administrasi Bisnis di University of Missouri – St Louis, USA tahun 2006.

Adi Supriono served as Corporate Secretary since February 2012. Previously, he was Director of Development and Commerce for PT PJB (2010), Director of Human Resources & Administration at PT PJB (2009), Corporate Secretary of PT PJB (2008) he also served as Manager of Budget, Finance and Corporate Planning at PT PJB (2001), Finance Director of PT Bajradaya Sentra Nusa (2003).

He holds a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1984), Master's degree in Business Management from University of Hasanuddin - Makasar in 2000 and Master's degree in Business Administration from University of Missouri - St. Louis, USA in 2006.

AGUS PRANOTO

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board Commissioners

Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak tahun 2010. Sebelum menjadi Sekretaris Dewan Komisaris, jabatannya adalah Tenaga Ahli Bidang Niaga Dewan Komisaris PT PLN (Persero) (2010), Komisaris Utama PT Rekadaya Elektrika (2007- 2010), Direktur Utama PT PJB (2007-2009), Direktur Keuangan PT PJB (2004-2007), Komisaris PT Bajradaya Sentra Nusa (BDSN)-IPP (2004-2006) dan General Manager (GM) PT PLN (Persero) DJBB (2000-2003).

Meraih gelar Sarjana Teknik Tenaga Listrik dari ITB, Bandung, 1979 serta Magister Manajemen Universitas Airlangga bidang Keuangan, tahun 2007.

Agus Pranoto has served as Secretary of Board of Commissioner 2010. Previuosly served as Expert in Commerce for PT PLN (Persero) Board of Commissioners (2010), President Commissioner at PT Rekadaya Elektrika (2007- 2010), Managing Director of PT PJB (2007-2009), Director of Finance for PT PJB (2004 -2007), Commissioner at PT Bajradaya Sentra Nusa (BDSN) -IPP (2004-2006) and General Manager (GM) of PT PLN (Persero) DJBB (2000-2003).

He holds a Bachelor's degree in Electrical Power Engineering from Bandung Institute Technology 1979 and Master's Degree in Management from Faculty of Finance in Airlangga University in 2007.

Anggota Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee Members

EDWIN R. LUMBAN TOBING

Komite Manajamen Risiko
Risk Management Committee

Menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko sejak tahun 2012. Sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) (2010-2011). Pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris PT Indonesia Power (2005-2009), Ketua Komite Pengawas Unit Bisnis NAD, SUMUT & RIAU (2003-2004), Vice President Restrukturisasi Perusahaan PT PLN (Persero) (2001), Ahli Utama Muda Pengembangan Organisasi pada Direktorat SDM & Organisasi (2000-2001).

Menyandang gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung dan Master di Bidang Human Resources Planning dari Westminter University – United Kingdom.

He has served as a Member of Risk Management Committee since 2012. Previously, he was Secretary of the Nomination and Remuneration Committee of PT PLN (Persero) (2010-2011). He has served as the Board of Commissioners for PT Indonesia Power (2005-2009), Chairman of the Business Unit Supervisory Committee of NAD, North Sumatra & RIAU (2003-2004), Vice President of Company Restructuring at PT PLN (Persero) (2001), Main Junior Expert for Organization Development at the Directorate of Human Resources & Organization (2000-2001).

He holds a bachelor's degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology and Master's degree in Human Resources Planning from Westminster University - UK.

YUSUF HAMDANI

Anggota Komite Manajemen Risiko
Member of Risk Management Committee

Menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko sejak 9 Januari 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Head of Corporate Finance PT BATR (2011-2013), Kepala Divisi Keuangan Korporat PT PLN (Persero) (2010-2011), Deputi Direktur Keuangan Korporat PT PLN (Persero) (2008-2009), Deputi Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) (2006-2008), Deputi Direktur Perencanaan Keuangan PT PLN (Persero) (2003-2005). Selain itu, pernah menjabat sebagai Deputi Direktur Perencanaan Keuangan PT PLN (Persero) (2003-2005), Komisaris PT Indonesia Power (2007-2009) dan Komisaris PT PLN Enjiniring (2002-2006).

Meraih gelar Sarjana Teknik Listrik dari Institut Teknologi Bandung (1979) dan Master Bisnis Administrasi Teknologi (MBAT), Institut Teknologi Bandung (2001).

He has served as a Member of Risk Management Committee since 9 January 2013. He previously served as Head of Corporate Finance of PT BATR (2011-2013). His career at PT PLN includes holding the position of Head of the Corporate Finance (2010-2011), Deputy Director of Corporate Finance (2008-2009), Deputy Director of Corporate Planning (2006-2008), Deputy Director of Financial Planning (2003-2005), Deputy Director of Finance Planning (2003-2005). He serves as Commissioner of PT Indonesia Power (2007-2009) and Commissioner of PT PLN Engineering (2002-2006).

He holds a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1979) and Master's degree in Business and Administration Technology (MBAT) from Bandung Institute of Technology (2001).

Anggota Komite Audit

Audit Committee Members

SUGENG ROCHADI

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Menjadi anggota Komite Audit PT PLN (Persero) sejak 1 Agustus 2013. Sebelumnya bertugas sebagai Staf Senior Bidang Teknik pada Sekretariat Dekom (2012-2013), Anggota Komite Audit (2010-2011), Kepala Bidang Audit Operasional Pada Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2006-2009), Kepala Audit Internal PT PLN (Persero) Distribusi Jaya & Tangerang (2001-2006) dan Kepala Audit Internal PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat (1999-2001).

Menyandang gelar Sarjana Strata-1 Elektroteknik dari Institut Teknologi Bandung dan Strata-2 Manajemen Bisnis dan Administrasi Teknologi dari Institut Teknologi Bandung.

He has served as member of the Audit Committee at PT PLN (Persero) since August 1, 2013. Previously, he served as Senior Staff of Technical Division at Board of Commissioner's Secretariat (2012-2013), Member of Audit Committee (2010-2011), Head of Operational Audit at Internal Supervisory Unit at PT PLN (Persero) Headquarters (2006-2009), Head of Internal Audit at PT PLN (Persero) Jaya & Tangerang Distribution (2001-2006) and Head of Internal Audit at PT PLN (Persero) West Java Distribution (1999-2001).

He holds a Bachelor's degree in Electrotechnical from Bandung Institute of Technology and Master's Degree in Business and Administration Technology from Bandung Institute of Technology.

AIDIL YUZAR

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT PLN (Persero) sejak 1 Agustus 2013. Selain itu juga memimpin salah satu Kantor Akuntan Publik (2012 - sekarang). Sebelumnya pernah berkarya sebagai Auditor pada Ernst & Young dan Arthur Andersen-SGV Utomo (1993-2011).

Menyandang gelar Sarjana Ekonomi – Jurusan Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara dan memiliki Piagam Akuntan Register Negara. Akuntan Publik bersertifikat (CPA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia, Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia dan Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) dari Ikatan Akuntan Indonesia, serta Auditor bersertifikat di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

He has served as a Member of the Audit Committee of PT PLN (Persero) since August 1, 2013. In addition, he has also chaired a Public Accountant Firm (2012 - present). Earlier, he was Auditor at Ernst & Young and Arthur Andersen-SGV Utomo (1993-2011).

He holds a Bachelor's degree in Economics – Accounting Study from the University of North Sumatra and has a Charter State Register Accountant. A certified Public Accountant (CPA) from Indonesian Public Accountants Institute, Chartered Accountant (VA) from Indonesian Accountants Association and Sharia Accounting Certification (SAS) from Indonesian Accountants Association as well as certified Auditor in Bank Indonesia and Financial Services Authority (OJK).

Kepala Satuan Pengawasan Intern

Head of Internal Supervisory Unit

IRYANTO HUTAGAOL

Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Supervisory Unit

Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak tahun 2012. Memiliki pengalaman profesional sampai 24 tahun diberbagai perusahaan skala global dan jabatan ditingkat manajemen. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Human Capital, Legal & General Administration dari PT Samudera Indonesia, Tbk (2010-2011), setelah sebelumnya menjabat sebagai Senior Vice President Audit Executive PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (2004-2010) Direktur Risk Management Group PricewaterhouseCoopers Indonesia (2001-2004).

Sarjana Akuntansi dari Universitas Diponegoro pada tahun 1987. Diploma – Institute of Banking & Trade Finance Services, Singapore, tahun 1990 Executive Development Program, Corp Financial Management & Strategy, University of California Berkeley USA, Haas Scool of Business, 1991. Executive Development Program (Accelerated Development Program/ADP), 1992 Diploma in Business and Economics, The Economic Institute, University of Colorady Boulder, USA, 1993) Master of Business Administration (MBA) in Strategic Management, The Claremont Graduate University, The Peter F. Drucker & M Ito Business School, USA, 1994-1996).

He has served as Head of Internal Supervisory Unit since 2012. He has a professional experience for 24 years in various global-scaled companies and for management level positions. He previously served as Director of Human Capital, Legal & General Administration of PT Samudera Indonesia, Tbk (2010-2011), having previously served as Senior Vice President Audit Executive for PT Bank Internasional Indonesia Tbk (2004-2010) and Director of Risk Management Group for PricewaterhouseCoopers Indonesia (2001-2004).

He holds a Bachelor's degree in Accounting from University of Diponegoro in 1987. Diploma from Institute of Banking and Trade Finance Services, Singapore (1990), Executive Development Program, Financial Management & Strategy Corp., University of California Berkeley, USA, Haas Scool of Business (1991) Executive Development Program (Accelerated Development Programme / ADP) (1992) Diploma in Business and Economics from The Economic Institute, University of Colorady Boulder, USA (1993) Master of Business Administration (MBA) in Strategic Management, The Claremont Graduate University, The Peter F. Drucker & M Ito Business School, USA (1994-1996).

Daftar Unit Bisnis dan Alamat

Address and Business Unit

Anak Perusahaan Subsidiary	Alamat Address
PT Indonesia Power	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 5267666 (Hunting), Fax. (021) 5252623
PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB)	Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya 60231 Telp. (031) 8283180 Fax. (031) 8283183 (031) 8291280 202 (031) 8291274 211
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	Jl. Engku Putri No. 3, Batam Center Batam 29432 Telp. (0778) 463150 s.d 463153 Fax. (0778) 463143 Call Center: (0778) 327999/123 (lokal)
PT Indonesia Comnets Plus	Gedung Wisma Mulia Lt. 50-51 Jl. Jend. Gatot Subroto No 42 Jakarta 12710 Telp. (021) 5253019 (Hunting) Jwots: 12900 Fax. (021) 5253659 Jwots: 12264
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	Jl. K.S. Tubun I No. 2 Lt.2 JAKARTA 11420 Telp. (021) 5608918, 5608432, 5609044 Fax. (021) 5640132
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	Jl. P. Diponogoro No. 1 Tarakan Kalimantan Timur 77114 Telp. (0551) 35192, 51349, 21828, 22017 Fax. (0551) 34158, 21928
PT PLN Batubara	Gedung I Lt. 8 PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. (021) 7206813, 7206814, 7206838 Fax. (021) 7206838
PT PLN Geothermal	Jl. Wijaya I No. 61, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170 Telp. (021) 7210170, 72795377, 7225322 Fax. (021) 7210450
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Jl. Kali Besar Timur No. 10 - 12, Jakarta 11110 Telp. (021) 691 2547, 6912548, 6912549 Fax. (021) 690 1450, 6902726
PT Haleyora Power	Pejaten Office Park Jl. Warung Bunci Raya Blok B No.79 Pejaten Barat - Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510 Telp. (021) 79192517 Fax. (021) 79192516

Unit Bisnis Subsidiary	Alamat Address
1. PT PLN (Persero) Wilayah Aceh PT PLN (Persero) Region Aceh	JL. Tgk. H. Mohd Daud Bereu-uh No. 172 Lamprit BANDA ACEH 23124 Telp. (0651) 22188 (Hunting 8 Saluran) Fax. (0651) 21516 E-mail : plnwilaceh@pln.co.id Website : //pln.aceh.co.id/aceh
2. PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara PT PLN (Persero) Region North Sumatra	Jl. K.L. Yos Sudarso No. 284 MEDAN 20115 Kotak Pos 2000 Telp. (061) 6615155 Fax. (061) 6613789 E-mail : plnsumut@plnwill.co.id
3. PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat PT PLN (Persero) Region West Sumatra	Jl. Dr. Wahidin No. 8 PADANG 25121 Telp. (0751) 33446 Fax. (0751) 29540, 31564 E-mail : PLN W3@indosat.net.id
4. PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri PT PLN (Persero) Region Riau and Riau Island	Jl. Setia Budi No. 57 PEKANBARU 28141 Telp. (0761) 855840, 855841, 853737, 855309 Fax. (0761) 855310 E-mail : wrkr@pln.co.id
5. PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu PT PLN (Persero) Region South Sumatra, Jambi and Bengkulu	Jl. Kapten A. Rivai No. 37, PALEMBANG 30129 Telp. (0711) 358355, 358804, 358859, 313217 (GM) Fax. (0711) 310376, 356759 (GM) E-mail : gmws2jb@plnpalembang.co.id Website : http/www.plnpalembang.co.id
6. PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung PT PLN (Persero) Region Bangka Belitung	Jl. Soekarno Hatta Km 5 Pangkal Pinang 33171 Kep. BANGKA BELITUNG Telp. (0717) 439300 (Hunting) Fax. (0717) 439600 E-mail : wbabel@pln.co.id
7. PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat PT PLN (Persero) Region West Kalimantan	Jl. Adi Sucipto Km 7,3 Sei Raya Kubu Raya PONTIANAK 78391 Telp. (0561) 722037 (Hunting), 721960 (GM) Fax. (0561) 721395 E-mail : kalbar@pln.co.id Web : www.plnkalbar.co.id
8. PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah PT PLN (Persero) Region South Kalimantan and Central Kalimantan	Jl. Panglima Batur Barat No. 1 BANJAR BARU 70711, KALSEL Telp. (0511) 4772520, 4772633,4772564, 4773575(GM) Fax. (0511) 4772442 E-mail: humas.kalseteng@pln.co.id
9. PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara PT PLN (Persero) Region East Kalimantan and North Kalimantan	Jl. MT. Haryono No. 384, BALIKPAPAN 76114 Telp. (0542) 871840 (Hunting) Fax. (0542) 876130 E-mail : humas.kaltim@pln.co.id
10.PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo PT PLN (Persero) Region North Sulawesi and Central Sulawesi	Jl. Bethesda No. 32, MANADO 95116 Telp : (0431) 863644, 865651, 862444 (GM) Fax : (0431) 863660, 862360 E-mail : gmsutg@pln.co.id
11.PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat PT PLN (Persero) Region South Sulawesi, South East Sulawesi and west Sulawesi	Jl. Letjend Hertasning Blok B, Kotak Pos 1206 PANAKUK KANG MAKASSAR 90222 Telp. (0411) 444488 (Hunting Sistem 7 Saluran) Fax. (0411) 442288

Unit Bisnis Subsidiary	Alamat Address
12.PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara PT PLN (Persero) Region Maluku and North Maluku	Jl. Diponegoro No. 2, AMBON 97127 Telp. (0911) 311810, 347766, 354696 Fax : (0911) 310910 E-mail : plnwilmaluku@plnmmu.co.id
13.PT PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat PT PLN (Persero) Region Papua and West Papua	Jl. Jend. A. Yani No. 18, JAYAPURA 99111 Kotak Pos 1045 Telp. (0967) 533891, 533981 (hunting 8 line) Fax. (0967) 534694 E-mail : wilpapua@pln.co.id Http:// www.pln.co.id
14.PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat PT PLN (Persero) Region PLN West Nusa Tenggara	Jl. Langko No. 25-27 Ampenan MATARAM 83114 Telp. (0370) 643123, 642868 (GM) Fax. (0370) 634401 E-mail : sekretariat@plnntb.co.id Website : http://www.plnntb.co.id
15.PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur PT PLN (Persero) Region East Nusa Tenggara	Jl. Piet A. Tallo - KUPANG 85228 Telp. (0380) 8554005 (Hunting) Fax. (0380) 8554010, 8554011 E-mail : wilayah@plnntt.co.id Website : htpp//www.plnntt.co.id
DISTRIBUSI DISTRIBUTION	
1. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur PT PLN (Persero) Region East Java Tenggara	Jl. Embong Trengguli No. 19 - 21 SURABAYA 60271 Telp. (031) 5340651 - 5340655 Fax. (031) 5310057 Jwots : 71016 – 18 Hunting E-mail : moch.sulatyo@pln.co.id Website : www.pln-jatim.co.id
2. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istemewa Yogyakarta PT PLN (Persero) PLN Central Java and DIY Distribution	Jl. Teuku Umar No. 47, SEMARANG Telp. (024) 8411991 (hunting) Fax. (024) 8412268 Jwots. 52027, 52028 E-mail : plnjatengdiy@pln.co.id E-mail : plnubd@plnjateng.co.id
3. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten PT PLN (Persero) PLN West Java and Banten	Jl. Asia Afrika No. 63, BANDUNG 40111 Telp. (022) 4230747 (hunting), 4206287 (GM) Fax. (022) 4230822 Jwots : 30995 E-mail : kontakkamijabarbanten@pln.co.id
4. PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang ISO 9001 : 2008 PT PLN (Persero) PLN Jakarta Raya and Tangerang Distribution, ISO 9001 : 2008	Jl. M.I.Ridwan Rais No. 1, JAKARTA 10110 Telp. (021) 3454000, 3455000 Fax. (021) 3456694 Email : humasjaya@pln.co.id
5. PT PLN (Persero) Distribusi Bali ISO 9001 : 2000 PT PLN (Persero) PLN Bali Distribution, ISO 9001 : 2000	Jl. Letda Tantular No. 1 Renon DENPASAR 80234 Telp. (0361) 221960 s.d 221968, 221957 Fax. (0361) 227101
6. PT PLN (Persero) Distribusi Lampung ISO 9001 : 2008 PT PLN (Persero) PLN Lampung Distribution, ISO 9001 : 2008	Jl. Z.A. Pagar Alam No. 05 Rajabasa BANDAR LAMPUNG 35144 Telp. (0721) 774868, 774867 Fax. (0721) 780247 Email : http://www.plnlampung.co.id

Unit Bisnis Subsidiary	Alamat Address
UNIT INDUK PEMBANGUNAN DEVELOPMENT UNIT	
1. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I PT PLN (Persero) Power Plant Development Unit I	Jl. Kasuari No. 8 Medan – 20122 Telp. (061) 8474059, 8474060 Fax. (061) 8474120 Email : www.plnsumatera-1.co.id
2. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II PT PLN (Persero) Power Plant Development Unit II	Jl. Dr. Cipto No. 12 MEDAN 20152 Telp. (061) 4144151, 4144152, 4518580 (GM) Fax. (061) 4144153 E-mail :sekrt.uipringsum1@pln.co.id
3. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III PT PLN (Persero) Power Plant Development Unit III	Jl. Residen Abdul Rozak No. 2180 Sekojo, PALEMBANG 30118 Telp. (0711) 719103 s.d 719109 Fax. (0711) 719102 Email : info@uipring-sumatera2.co.id
4. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IV PT PLN (Persero) Power Plant Development Unit IV	Gedung Wisma PMI Lt. 7 Jl. Wijaya I No. 63 Kebayoran Baru – Jaksel 12160 Telp. (021) 7265158, 7260612 Fax. (021) 72800948 Email: sekr.uipv@pln.co.id
5. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V PT PLN (Persero) Power Plant Development Unit V	Jl. Ehave-Gandul Kec. Cinere Depok 16512 Telp. (021) 7535500 Fax. (021) 7535599
6. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VI PT PLN (Persero) Power Plant Development Unit VI	Jl. Karawitan No. 32 Bandung 40264 Telp. (022) 7320595 Fax. (022) 7320596 Website : www.pln.co.id/hidrojb Email : hydro_jawa@yahoo.co.id
7. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VII PT PLN (Persero) Power Plant Development Unit VII	Jl. Ketintang Baru I No. 1-3 SURABAYA 60231 Telp. (031) 8281200 Fax. (031) 8280214 Email : sekre.uip7@pln.co.id; sekretariat.uip7@gmail.com
8.PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII PT PLN (Persero) Power Plant Development Unit VIII	Jl. Ketintang Baru I No. 1-3, SURABAYA 60231 Telp. (031) 8291377, 8291538 Fax. (031) 8288959
9. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IX PT PLN (Persero) Power Plant Development Unit IX	Jl. Haji Mistar Cokrokusumo Km. 39 Banjarbaru Kalimantan Selatan Telp. (0511) 4777571 Fax. (0511) 4777571
10. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan X PT PLN (Persero) Power Plant Development Unit X	Jl. MT. Haryono No. 384, Kotak Pos 210 Ring Road, BALIKPAPAN 76114, KALTIM Telp. (0542) 871559 (Hunting), 872192 (GM) Fax. (0542) 871558, 871565 (Sek GM) E-mail : pikitringkal@pln-pikal.co.id
11. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XI PT PLN (Persero) Power Plant Development Unit XI	Jl. Pendidikan No. 56 Mataram 83125 Telp. (0370) 621732, 621733 Fax. (0370) 621734 Email : pln@uip-nusra.co.id

Unit Bisnis Subsidiary	Alamat Address
12. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XII PT PLN (Persero) Power Plant Development Unit XII	Jl. Letjend. Hertasning, Makassar, Sulawesi Selatan 90222 Telp. (0411) 886245 Fax. (0411) 886515 Email : sekretariatsulmapa@yahoo.co.id
13. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIII PT PLN (Persero) Power Plant Development Unit XIII	Jl. Letjend. Hertasning, Panakkukang Makassar Sulawesi Selatan 90222 Telp. (0411) 452519, 452520, 452521 (Hunting) (0411) 457216 (GM) Fax. (0411) 444339 E-mail : www.pln.co.id/uipringsulmapa
12. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIV PT PLN (Persero) Power Plant Development Unit XIV	Jl. Majapahit No. 14, BIAK – PAPUA 98111 Telp. (0981) 22814 Fax. (0981) 22814 Email : uipxiv@gmail
PEMBANGKITAN	
1. PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara	Jl. Brigjend Katamso, KM. 5,5 No. 30 Titikuning MEDAN 20146 Telp : (061) 7869025 Fax : (061) 7867967 Website : http://www:pln.co.id/Kitsbu Email : plnksu@pln.co.id
2. PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan	Jl. Demang Lebar Daun No. 375 PALEMBANG 30128 Telp. (0711) 374951, 374953 (Hunting) Fax. (0711) 374958, 374959 E-mail : info.kitsbs@pln.co.id Website : http://www.pln.co.id/kitsbs/
3. PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B	Desa Tubanan, Kec Kembang Kab. Jepara JAWA TENGAH 59453 Telp. (0291) 772121, 772123, 772124 Fax. (0291) 772125 E-mail : tanjungjatib@pln.co.id
4. PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali	Jl. P. Mangkubumi No. 16 - Yogyakarta 55232 Telp. (0274) 582912, 582922 (GM) Fax. (0274) 582971, 583580 Email : plnkitcilegon@pln.co.id Website : www.plnkitcilegon.co.id
PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN (P3B)	
1. PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali ISO 9001 : 2000	Krukut – Limo, Cinere 16514, Kotak Pos 159 CNR JAKARTA SELATAN Telp. (021) 7543566, 7542646 Fax. (021) 7542516 E-mail : plnp3b@pln-jawa-bali.co.id
2. PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Sumatera	Jl. Musyawarah RT 01 RW 09 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru RIAU 28295 Telp. (0761) 6700011-6700012 Fax (0761) 6700015 E-mail : p3bs@pln.co.id

Unit Bisnis Subsidiary	Alamat Address
JASA	
1. PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan ISO/IEC 17025 – 2005	Jl. Duren Tiga No. 102, JAKARTA 12760 Telp. (021) 7973774, 7980190, 7989982 (Hunting) 7991155 (GM) Fax. (021) 7991762, 7975414 E-mail : customercare@pln-litbang.co.id Home Page : www.pln-litbang.co.id Jwots : 13107,13109,13110,13111,13115,13121
2. PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Jl. HR. Harsono RM. No. 59, Ragunan - Pasar Minggu JAKARTA SELATAN 12550 Telp. (021) 7811292, 7811293, 7800832, 7811368 (KPUSDIKLAT) Fax. (021) 7811294, 7811295 (SEKRETARIS KPUSDIKLAT) 7829263 (SDM) Website : http://pln-pusdiklat.co.id Vicon Ruang Meeting : 192.168.13.178
3. PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan ISO 9001 : 2008	Jl. K.S. Tubun I/2, Petamburan JAKARTA BARAT 11420 Kotak Pos : 4464 JKT Telp. (021) 5640141, 5638644 , 5638642 Fax. (021) 5638658, 5638661 E-mail : pusenlis@pln.co.id
4. PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan	Jl. Banten No. 10 Bandung 40272 Telp. (022) 7236791-3 Fax. (022) 7236794 Email : pusharlis@pln.co.id Homepage : www.pln.co.id/pusharlis
5. PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi ISO 9001 : 2000 LMK - KAN	Jl. Slamet No. 1, Gajah Mungkur SEMARANG 50232 Telp. (024) 8310060 Fax. (024) 8317241 E-mail : plnjmk@pln.co.id
6. PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi ISO 17021 : 2011	Jl. Laboratorium, Duren Tiga JAKARTA SELATAN 12760 Telp. (021) 7900034 (hunting) Fax. (021) 7982034, 7992056, 7943450 Jwots : 15192, 15193, 15194, 1595 E-mail : niaga@pln-jaser.co.id, skt@pln-jaser.co.id, psm@pln-jaser.co.id Homepage : wwwpln.co.id/jaser Vicon : 192.168.1.154

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

Statement of The Board of Commissioners and Directors

Sesuai dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 67 dan Peraturan Bapepam No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami, Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero) menyatakan telah Menyetujui dan Bertanggung Jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014.

In accordance with Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies Article 67 and Bapepam Regulation No. X.K.6 on the Obligation to Submit Annual Report for the Public Company, hereby we, Board of Commissioner and Directors of PT PLN (Persero), stated our approval and responsibility for accuracy of the content of the Annual Report for the fiscal year 2014.

Laporan Tahunan Perseroan ini juga memuat Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

The Company's Annual Report also disclosed Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2014 and 2013.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

CHANDRA M. HAMZAH
Komisaris Utama
President Commissioner

OEGROSENO
Komisaris Independen
Independent Commissioner

DARMONO
Komisaris Independen
Independent Commissioner

HARRY SUSETYO NUGROHO
Komisaris Commissioner

S. MILTON PAKPAHAN
Komisaris Commissioner

ANDIN HADIYANTO
Komisaris Commissioner

BUDIMAN
Komisaris Commissioner

HASAN BISRI
Komisaris Commissioner

ZULKIFLI ZAINI
Komisaris Commissioner

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

SOFYAN BASIR

Direktur Utama
(Direktur Utama, SDM dan Umum)
President Director
(President Director, Human Resource and General Affairs)

SARWONO SUDARTO

Direktur (Keuangan)
Director (Finance)

NICKE WIDYAWATI

Direktur (Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan)
Director (Business, Risk Management and Compliance)

MURTAQI SYAMSUDDIN

Direktur (Perencanaan dan Pembinaan Affiliasi PLN)
Director (Planning and PLN Affiliation Development)

SUPANGKAT IWAN SANTOSO

Direktur (Operasi Jawa Bali)
Director (Java and Bali Operational)

AMIN SUBEKTI

Direktur (Pengadaan Strategis dan Energi Primer)
Director (Procurement and Primary Energy)

NASRI SEBAYANG

Direktur (Konstruksi dan Energi Baru)
Director (Construction and New Renewable Energy)

AMIR ROSIDIN

Direktur (Operasi Luar Jawa Bali)
Director (Outside Java and Bali Operational)

10

Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2014

Consolidated Financial Statements 2014

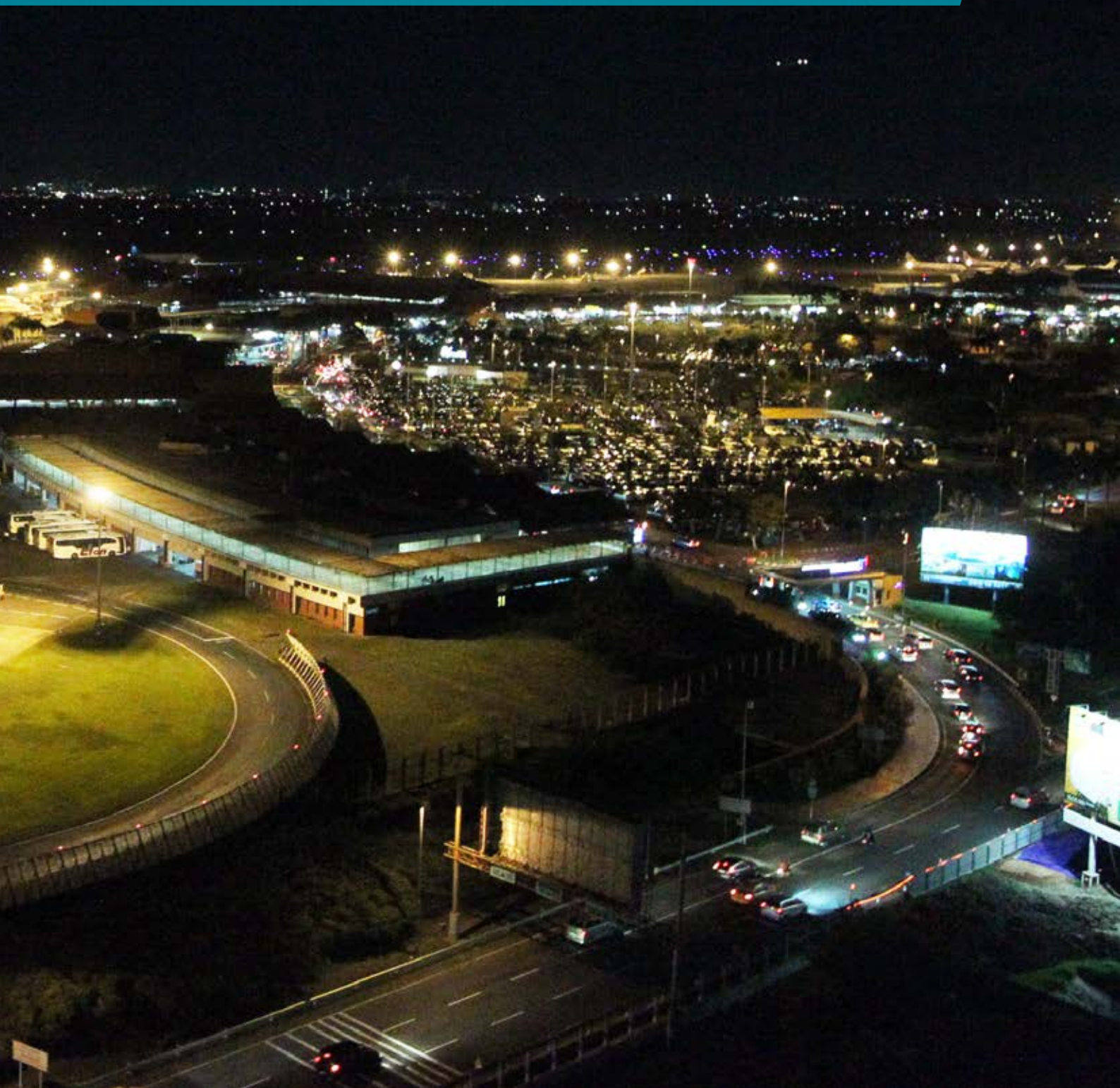

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ *CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*

31 DESEMBER 2014 DAN 2013/
DECEMBER 31, 2014 AND 2013

PT PLN (PERSERO)

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160
Telp. : (021) 7261875, 7261122, 7262234
(021) 7251234, 7250550
Kotak Pos : 4322/KBB Faximile : (021) 7221330 Alamat Kawat : PLNPST

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2014 DAN 2013

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2014 AND 2013
AND FORTHE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/*We, the undersigned:*

1. Nama/*Name* : SOFYAN BASIR
   Alamat kantor/*Office address* : PT PLN (Persero)
   Jl. Trunojoyo Blok M I/135
   Jakarta Selatan
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu indentitas lain/*Domicile as stated in ID Card* : Jl. Taman Bendungan Jatiluhur No. 3
   Bendungan Hilir
   Jakarta Pusat
   Nomor telepon/*Phone number* : (021) 7220300
   Jabatan/*Position* : DIREKTUR UTAMA / *PRESIDENT DIRECTOR*

2. Nama/*Name* : SARWONO SUDARTO
   Alamat kantor/*Office address* : PT PLN (Persero)
   Jl. Trunojoyo Blok M I/135
   Jakarta Selatan
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu indentitas lain/*Domicile as stated in ID Card* : Komplek BRI Blok A No. 45
   Jl. Pramukasari IV RT 009 RW 005
   Rawasari, Cempaka Putih
   Jakarta Pusat
   Nomor telepon/*Phone number* : (021) 7392038
   Jabatan/*Position* : DIREKTUR / *DIRECTOR*

menyatakan bahwa/*state that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements;
2. The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the Consolidated Financial Statements is complete and correct;
   b. The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts;
4. We are responsible for the Company and its Subsidiaries internal control system.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 27 Februari 2015 / February 27, 2015

METERAI TEMPEL
DIREKSI
6000

SOFYAN BASIR[1]
Direktur Utama / *President Director*

SARWONO SUDARTO[1]
Direktur / *Director*

[1] Baru menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2 Januari 2015/*Has just been appointed as the Company's director effective as of 2 January 2015*

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("Perusahaan") dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2014, and the consolidated statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-151/KM.1/2010.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan entitas anak tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara and its subsidiaries as at December 31, 2014, and their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA
27 Pebruari/February 27, 2015

Drs. Haryanto Sahari, CPA
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/*License of Public Accountant* No. AP.0223

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31* 2014	31 Desember/ *December 31* 2013	
ASET				ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	6	501.706.275	488.102.578	Property, plant and equipment
Properti investasi	7	233.057	159.330	Investment properties
Investasi pada entitas asosiasi	8	2.318.945	1.836.859	Investments in associates
Investasi pada ventura bersama	8	253.648	192.207	Investments in joint ventures
Aset pajak tangguhan	47	2.899.848	5.932.474	Deferred tax assets
Piutang pihak berelasi	9	98.829	176.032	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	10	5.994.028	5.659.753	Restricted cash in banks and time deposits
Piutang lain-lain	16	321.385	304.302	Other receivables
Aset tidak lancar lain	11	4.409.438	3.018.271	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		518.235.453	505.381.806	Total Non-current Assets
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	12	27.111.528	25.529.969	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	13	100.696	97.667	Short-term investments
Piutang usaha				Trade accounts receivable
Pihak berelasi	14	582.259	408.674	Related parties
Pihak ketiga	14	18.912.608	15.288.266	Third parties
Piutang subsidi listrik	15	19.280.861	21.793.929	Receivables on electricity subsidy
Piutang lain-lain	16	866.948	4.625.113	Other receivables
Persediaan - bersih	17	11.607.860	11.343.464	Inventories - net
Pajak dibayar dimuka	18	4.889.463	4.397.112	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	19	1.788.724	1.312.925	Prepaid expenses and advances
Piutang pihak berelasi	9	282.791	40.061	Receivables from related parties
Jumlah Aset Lancar		85.423.738	84.837.180	Total Current Assets
JUMLAH ASET		603.659.191	590.218.986	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31* 2014	31 Desember/ *December 31,* 2013	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the Company
Modal saham - nilai nominal Rp 1 juta per saham				Capital stock - par value of Rp 1 million per share
Modal dasar - 63.000.000 saham				Authorized - 63,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 46.197.380 saham pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013	20	46.197.380	46.197.380	Subscribed and paid-up - 46,197,380 shares as of December 31, 2014 and 2013
Tambahan modal disetor	21	52.496.893	49.901.404	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	20	19.108.528	19.108.528	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	20	46.814.284	35.030.871	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		164.617.085	150.238.183	Equity attributable to owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		54.141	93.175	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		164.671.226	150.331.358	Total Equity
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	47	3.752.797	3.902.785	Deferred tax liabilities - net
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term liabilities - net of current portion
Penerusan pinjaman	23	26.453.073	29.498.060	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	24	8.371.933	8.578.716	Government loans
Utang sewa pembiayaan	25	128.096.528	129.718.551	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	26	70.400.166	66.457.948	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi dan sukuk ijarah	27	81.672.556	81.017.989	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	28	6.654.142	6.784.275	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	29	7.331	6.906	Payable to related parties
Liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan	49	25.922.391	24.395.289	Post-employment benefits obligation
Utang lain-lain	31	98.771	221.150	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		351.429.688	350.581.669	Total Noncurrent Liabilities
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade accounts payable
Pihak berelasi	30	12.654.991	12.136.710	Related parties
Pihak ketiga	30	13.629.164	14.389.792	Third parties
Utang pajak	32	1.151.248	1.222.393	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	33	9.403.153	8.714.043	Accrued expenses
Uang jaminan langganan	34	10.828.518	10.107.402	Customers' security deposits
Utang biaya proyek	35	857.728	1.061.453	Project cost payable
Pendapatan ditangguhkan	22	1.306.976	990.913	Deferred revenue
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				Current portion of long-term liabilities
Penerusan pinjaman	23	2.644.611	3.208.983	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	24	293.793	293.793	Government loans
Utang sewa pembiayaan	25	5.116.369	4.901.469	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	26	9.527.681	8.387.881	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi dan sukuk ijarah	27	805.000	2.808.000	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	28	291.744	272.454	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	29	-	2.786	Payable to related parties
Liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan	49	2.700.106	2.584.480	Post-employment benefits obligation
Utang lain-lain	31	16.347.195	18.223.407	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		87.558.277	89.305.959	Total Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		438.987.965	439.887.628	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		603.659.191	590.218.986	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2014	Catatan/ *Notes*	2013	
PENDAPATAN USAHA				REVENUES
Penjualan tenaga listrik	186.634.484	36	153.485.606	Sale of electricity
Subsidi listrik Pemerintah	99.303.250	37	101.207.859	Government's electricity subsidy
Penyambungan pelanggan	5.623.913	22	6.027.799	Customer connection fees
Lain-lain	1.159.544	38	1.125.778	Others
Jumlah Pendapatan Usaha	292.721.191		261.847.042	Total Revenues
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	170.487.926	39	147.633.751	Fuel and lubricants
Pembelian tenaga listrik	3.492.679	40	2.393.790	Purchased electricity
Sewa	7.866.347	41	8.114.145	Lease
Pemeliharaan	20.206.661	42	19.839.465	Maintenance
Kepegawaian	15.749.478	43	15.555.063	Personnel
Penyusutan	23.618.262	6	21.893.665	Depreciation
Lain-lain	5.488.617	44	5.481.268	Others
Jumlah Beban Usaha	246.909.970		220.911.147	Total Operating Expenses
LABA USAHA	45.811.221		40.935.895	OPERATING INCOME
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	1.319.299		(48.096.810)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	4.157.018	46	1.792.124	Others income (charges) - net
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN KEUANGAN	51.287.538		(5.368.791)	INCOME (LOSS) BEFORE FINANCE COSTS
Penghasilan keuangan	584.061		736.378	Financial income
Beban keuangan	(35.971.211)	45	(30.146.545)	Financial cost
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	15.900.388		(34.778.958)	INCOME (LOSS) BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	(4.158.778)	47	8.543.343	TAX BENEFIT (EXPENSE)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	11.741.610		(26.235.615)	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
Pendapatan komprehensif lain	-		-	Other comprehensive income
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	11.741.610		(26.235.615)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
Laba (rugi) tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif diatribusikan kepada :				Income (loss) for the year and total comprehensive income attributable to :
Pemilik Entitas Induk	11.726.406		(26.232.034)	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali	15.204		(3.581)	Non-controlling interests
Jumlah	11.741.610		(26.235.615)	Total
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (Dalam Rupiah penuh)	253.833	48	(567.825)	BASIC/DILUTED EARNING (LOSS) PER SHARES (In full Rupiah amount)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Figures in tables stated in millions of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Subscribed and paid-up capital stock*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk/ *Equity attributable to owners of the Company*	Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
				Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*				
Saldo per 1 Januari 2013		46.197.380	44.930.345	17.343.884	64.471.349	172.942.958	94.644	173.037.602	Balance as of January 1, 2013
Penambahan tahun berjalan	21	-	4.971.059	-	-	4.971.059	2.712	4.973.771	Additions during the year
Cadangan umum tahun berjalan		-	-	1.764.644	(1.764.644)	-	-	-	Appropriations during the year
Dividen	20	-	-	-	(1.443.800)	(1.443.800)	(600)	(1.444.400)	Dividends
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	(26.232.034)	(26.232.034)	(3.581)	(26.235.615)	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2013		46.197.380	49.901.404	19.108.528	35.030.871	150.238.183	93.175	150.331.358	Balance as of December 31, 2013
Penambahan tahun berjalan	21	-	2.595.489	-	-	2.595.489	-	2.595.489	Additions during the year
Transaksi dengan pihak non-pengendali		-	-	-	57.007	57.007	(54.238)	2.769	Transaction with non-controlling interests
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	11.726.406	11.726.406	15.204	11.741.610	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2014		46.197.380	52.496.893	19.108.528	46.814.284	164.617.085	54.141	164.671.226	Balance as of December 31, 2014

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2014	2013	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	194.886.601	161.342.602	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(207.506.332)	(180.257.732)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(13.441.780)	(12.426.256)	Cash paid to employees
Kas digunakan untuk aktivitas operasi	(26.061.511)	(31.341.386)	Cash used in operations
Penerimaan subsidi listrik	101.816.318	99.979.714	Government subsidy received
Pembayaran bunga	(35.381.682)	(28.366.978)	Interest expense paid
Penerimaan bunga	584.061	736.378	Interest received
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	-	389.309	Income tax restitution received
Pembayaran pajak penghasilan	(1.704.744)	(3.221.807)	Income tax paid
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	39.252.442	38.175.230	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset	839.025	223.192	Proceeds from sale of assets
Perolehan aset tetap termasuk kapitalisasi biaya pinjaman	(30.132.270)	(34.650.475)	Additions to property, plant and equipment including capitalization of borrowing cost
Pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi - bersih	(131.177)	(165.294)	Loans given to related parties - net
Akuisisi entitas anak	-	(12.670)	Acquisition of subsidiaries
Perolehan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(149.771)	(120.480)	Acquisition of investments in associates and joint ventures
Penerimaan deviden dari entitas asosiasi	94.063	15.524	Proceeds from dividend of associates
Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	(915.912)	(557.636)	Placement of restricted cash in banks and time deposits
Pencairan (penempatan) investasi jangka pendek	(3.029)	280.541	Withdrawal (placement) of short-term investments
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(30.399.071)	(34.987.298)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Perolehan dari penerbitan obligasi	-	2.673.000	Proceeds from issuance of bonds
Pembayaran biaya transaksi pinjaman	(169.085)	(6.238)	Payments of financing related costs
Pembayaran utang obligasi	(2.808.000)	-	Payments of bonds payable
Pembayaran penerusan pinjaman	(3.179.484)	(2.350.109)	Payments of two-step loans
Pembayaran utang kepada Pemerintah	(293.793)	(293.793)	Payments of Government loans
Pembayaran dividen	-	(1.443.800)	Payments of dividends
Perolehan utang bank	63.291.617	72.291.979	Proceeds from bank loans
Pembayaran utang bank	(58.992.548)	(67.813.387)	Payments of bank loans
Pembayaran utang listrik swasta	(244.719)	(189.783)	Payments of electricity purchase payable
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(4.858.116)	(3.198.848)	Payments of lease liabilities
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(7.254.128)	(330.979)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1.599.243	2.856.953	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(17.684)	-	Effect of changes in foreign currency
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	25.529.969	22.639.853	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
Kas dan setara kas awal tahun entitas anak yang diakuisisi	-	33.163	Cash and cash equivalent at beginning of year of subsidiary acquired
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	27.111.528	25.529.969	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR

Lihat Catatan 50 untuk transaksi non-kas

See Note 50 for non-cash transactions

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("Perusahaan") didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk Jawatan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Perusahaan merupakan kelanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah"). Perusahaan listrik Belanda tersebut meliputi: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM dan NV WEMI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status Perusahaan berubah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Kemudian berdasarkan akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero). Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 tanggal 1 Agustus 1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6731.

Anggaran dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan (i) akta No. 15 tanggal 30 Januari 2009 dari Lenny Janis Ishak S.H., notaris di Jakarta, dalam rangka penyesuaian hak dan kewajiban Direksi Perusahaan. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.10-0224 tanggal 20 Maret 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 14 Nopember 2008, Tambahan No. 23523 (ii) berdasarkan akta No. 4 tanggal 5 Agustus 2011 dari Lenny Janis Ishak S.H., notaris di Jakarta, atas perubahan pasal 4 ayat 2 tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-26937 tanggal 19 Agustus 2011.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (the "Company") was established in 1961 as a unit of the Ministry of Energy and Public Works. The Company is a business continuation of several Dutch electricity companies taken over by the Government of the Republic of Indonesia ("Government"). The Dutch electricity companies include among others: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM and NV WEMI. Based on Government Regulation No. 19 year 1965, the Company's status was changed to that of a legal entity. Subsequently, based on Government Regulation No. 30 year 1970, as amended by Government Regulation No. 18 year 1972, the Company became a Perusahaan Umum (Perum). Based on notarial deed of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta, No. 169 dated July 30, 1994, the Company's status was changed to a limited liability company and was named Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara or PT PLN (Persero). This change was approved by the Minister of Justice in his decision letter No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 dated August 1, 1994 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 13, 1994, Supplement No. 6731.

The articles of association of the Company were recently amended by (i) notarial deed No. 15 dated January 30, 2009 of Lenny Janis Ishak S.H., notary in Jakarta, to clarify the rights and responsibilities of the Company's Directors. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-AH.01.10-0224 dated March 20, 2009, and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 92 dated November 14, 2008, Supplement No. 23523 (ii) notarial deed No. 4 dated August 5, 2011 of Lenny Janis Ishak S.H., notary in Jakarta, in accordance with article 4 section (2) concerning the increase in the subscribed and paid-up capital. This change was received and recorded in the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-AH.01.10-26937 dated August 19, 2011.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 48 unit pelaksana yang tersebar di wilayah Indonesia. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang "Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")", Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk margin yang diharapkan kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus. Perusahaan merupakan BUMN yang sedang melaksanakan penugasan khusus berupa penyediaan tenaga listrik bersubsidi kepada masyarakat (Catatan 37).

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak masing-masing 48.068 karyawan (tidak diaudit) dan 47.833 karyawan (tidak diaudit). Jumlah karyawan tidak termasuk jumlah karyawan dari PT Haleyora Powerindo yang bergerak dibidang jasa tenaga kerja, entitas anak dari PT Haleyora Power.

The Company is domiciled in Jakarta, with 48 business unit offices spread all over Indonesia. The Company's head office is located at Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the scope of its activities is to run an electricity business for public use, which is satisfactory both in quantity and quality and also to earn profit, and perform the assignment from the Government in relation to the electricity business in order to support the development of the application of the principles of Limited Liability Companies.

Based on Law No. 19 year 2003, regarding "State-Owned Enterprises ("BUMN")", the Government is obliged to provide compensation to these BUMN, which were appointed to perform special assignments, for all expenses which they have incurred, including expected return (margin). The Company is a BUMN, which performs a special assignment of providing subsidised electricity to the public (Note 37).

As of December 31, 2014 and 2013 the Company and its subsidiaries had a total number of employees of 48,068 (unaudited) and 47,833 (unaudited) respectively. The total amount of employees does not include the employees of PT Haleyora Powerindo whose nature of business is manpower services. It is the subsidiary of PT Haleyora Power.

b. Penawaran Umum Efek Utang Perusahaan

Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi dan Surat Utang PLN, sebagai berikut:

b. Public Offering of Bonds of the Company

The Company has issued several PLN Bonds and Notes, as follows:

	Tanggal Efektif/ *Effective Date*	Bursa Pencatatan/ *Listed In*	Tanggal Pencatatan/ *Listed Date*	Jumlah Efek Ditawarkan / *Offered Amount* Rp	
Obligasi Rupiah					Rupiah Bonds
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	11 Desember 2013/ *December 11, 2013*	1.244.000	Sustainable Bonds I PLN II Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	11 Desember 2013/ *December 11, 2013*	429.000	Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	8 Juli 2013/ *July 8, 2013*	879.000	Sustainable Bonds I PLN I Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	8 Juli 2013/ *July 8, 2013*	121.000	Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013
Obligasi PLN XII Tahun 2010	30 Juni 2010/ *June 30, 2010*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	9 Juli 2010/ *July 9, 2010*	2.500.000	PLN XII Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	30 Juni 2010/ *June 30, 2010*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	9 Juli 2010/ *July 9, 2010*	500.000	Sukuk Ijarah PLN V Year 2010
Obligasi PLN XI Tahun 2010	31 Desember 2009/ *December 31, 2009*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	13 Januari 2010/ *January 13, 2010*	2.703.000	PLN XI Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	31 Desember 2009/ *December 31, 2009*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	13 Januari 2010/ *January 13, 2010*	297.000	Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010
Obligasi PLN X Tahun 2009	31 Desember 2008/ *December 31, 2008*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	12 Januari 2009/ *January 12, 2009*	1.440.000	PLN X Bonds Year 2009
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009	31 Desember 2008/ *December 31, 2008*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	12 Januari 2009/ *January 12, 2009*	760.000	Sukuk Ijarah PLN III Year 2009
Obligasi PLN IX Tahun 2007	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	11 Juli 2007/ *July 11, 2007*	2.700.000	PLN IX Bonds Year 2007
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	11 Juli 2007/ *July 11, 2007*	300.000	Sukuk Ijarah PLN II Year 2007
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	12 Juni 2006/ *June 12, 2006*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	22 Juni 2006/ *June 22, 2006*	2.200.100	PLN VIII Bonds Year 2006
Sukuk Ijarah PLN I Tahun 2006	12 Juni 2006/ *June 12, 2006*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	22 Juni 2006/ *June 22, 2006*	200.000	Sukuk Ijarah PLN I Year 2006
Obligasi PLN VII Tahun 2004	3 Nopember 2004/ *November 3, 2004*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	12 Nopember 2004/ *November 12, 2004*	1.500.000	PLN VII Bonds Year 2004
Obligasi PLN VI Tahun 1997	27 Juni 1997/ *June 27, 1997*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	12 Agustus 1997/ *August 12, 1997*	600.000	PLN VI Bonds Year 1997
Obligasi PLN V Tahun 1996	28 Juni 1996/ *June 28, 1996*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	28 Agustus 1996/ *August 28, 1996*	1.000.000	PLN V Bonds Year 1996
Obligasi PLN IV Tahun 1995	30 Juni 1995/ *June 30, 1995*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel Exchange*	4 September 1995/ *September 4, 1995*	680.000	PLN IV Bonds Year 1995
Obligasi PLN III Tahun 1995	30 Januari 1995/ *January 30, 1995*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel Exchange*	18 April 1995/ *April 18, 1995*	318.430	PLN III Bonds Year 1995
Obligasi PLN IITahun 1993	28 September 1993/ *September 28, 1993*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel Exchange*	8 Nopember 1993/ *November 8, 1993*	600.000	PLN II Bonds Year 1993
Obligasi PLN I Tahun 1992	25 September 1992/ *September 25, 1992*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel Exchange*	10 Nopember 1992/ *November 10, 1992*	300.000	PLN I Bonds Year 1992
Jumlah				21.271.530	Total

	Tanggal Efektif/ *Effective Date*	Bursa Pencatatan/ *Listed In*	Tanggal Pencatatan/ *Listed Date*	Jumlah Efek Ditawarkan *)/ *Offered Amount *)* US$	
Surat Utang Jangka Menengah Global - US$					Global Medium Term Notes - US$
Penerbitan tahun 2012	16 Oktober 2012/ *October 16, 2012*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	25 Oktober 2012/ *October 25, 2012*	1.000.000.000	Issued in 2012
Penerbitan tahun 2011	15 Nopember 2011/ *November 15, 2011*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	23 Nopember 2011/ *November 23, 2011*	1.000.000.000	Issued in 2011
Jumlah				2.000.000.000	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

Majapahit Holding B.V., Belanda, entitas anak yang bertujuan khusus yang sepenuhnya milik Perusahaan, menerbitkan Obligasi Terjamin, sebagai berikut:

Majapahit Holding B.V., Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary of the Company, issued Guaranteed Notes, as follows:

	Tanggal Efektif/ *Effective Date*	Bursa Pencatatan/ *Listed In*	Tanggal Pencatatan/ *Listed Date*	Jumlah Efek Ditawarkan *)/ *Offered Amount *)* US$	
Obligasi Terjamin - US$					Guaranteed Notes - US$
Penerbitan 2009	30 Oktober 2009/ *October 30, 2009*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	9 Nopember 2009/ *November 9, 2009*	750.000.000	Issued in 2009
Penerbitan 2009	3 Agustus 2009/ August 3, 2009	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	*10 Agustus 2009/* August 10, 2009	1.250.000.000	Issued in 2009
Penerbitan 2007	*21 Juni 2007/* June 21, 2007	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	1.000.000.000	Issued in 2007
Penerbitan 2006	11 Oktober 2006/ *October 11, 2006*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	17 Oktober 2006/ *October 17, 2006*	1.000.000.000	Issued in 2006
Jumlah				4.000.000.000	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

c. Susunan Pengurus dan Informasi Lain

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

c. Management and Other Information

As of December 31, 2014 and 2013, the Company's management consisted of the following:

	31 Desember 2014/ *December 31, 2014*	
Komisaris Utama	Chandra M. Hamzah	President Commissioner
Komisaris	Budiman	Commissioners
	Hasan Bisri	
	Andin Hadiyanto	
	Harry Susetyo Nugroho	
	Zulkifli Zaini	
	Sumanggar Milton Pakpahan	
Komisaris Independen	Oegroseno	Independent Commissioners
	Darmono	
		Tugas dan Wewenang/*Duties and Authority*
Direktur Utama/ *President Director*	Sofyan Basir	Direktur Utama, SDM dan Umum/*President Director, Human Resource and General Affairs*
Direktur/*Director*	Sarwono Sudarto	Keuangan/*Finance*
Direktur/*Director*	Nasri Sebayang	Konstruksi dan Energi Baru/Terbarukan/*Construction and New/Renewable Energy*
Direktur/*Director*	Supangkat Iwan Santoso	Operasi Jawa Bali/*Java Bali Operations*
Direktur/*Director*	Amir Rosidin	Operasi Luar Jawa Bali/ *Outside Java Bali Operations*
Direktur/*Director*	Nicke Widyawati	Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan/*Commerce, Risk Management and Compliance*
Direktur/*Director*	Amin Subekti	Pengadaan Strategis dan Energi Primer/*Strategic Procurement and Primary Energy*
Direktur/*Director*	Murtaqi Syamsuddin	Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PLN/*Planning and Development Affiliates PLN*
Komite Audit		Audit Committee
Ketua	Zulkifli Zaini	Chairman
Anggota	Andin Hadiyanto	Members
	Harry Susetyo Nugroho	
	Oegroseno	
	Sugeng Rochadi	
	Aidil Yuzar	

	31 Desember 2013/ *December 2013*	
Komisaris Utama	Yogo Pratomo	President Commissioner
Komisaris	Wimpy S.Tjetjep	Commissioners
	Jarman	
	Andin Hadiyanto	
	Ahmad Yani Basuki	
	Harry Susetyo Nugroho	
	Zulkifli Zaini	
Komisaris Independen	Adang Firman	Independent Commissioners
	Syahrial Loetan	

		Tugas dan Wewenang/*Duties and Authority*
Direktur Utama/ *President Director*	Nur Pamudji	Direktur Utama/*President Director*
Direktur/*Director*	I.G.A Ngurah Adnyana	Operasi Jawa-Bali-Sumatera/*Java-Bali-Sumatera Operations*
Direktur/*Director*	Moch. Harry Jaya Pahlawan	Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan/*Commerce, Risk Management and Compliance*
Direktur/*Director*	Vickner Sinaga	Operasi Indonesia Timur/*East Indonesia Operations*
Direktur/*Director*	Bagiyo Riawan	Pengadaan Strategis dan Energi Primer/*Strategic Procurement and Primary Energy*
Direktur/*Director*	Nasri Sebayang	Konstruksi dan Energi Baru/Terbarukan/*Construction and New/Renewable Energy*
Direktur/*Director*	Murtaqi Syamsuddin	Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PLN/*Planning and Development Affiliates PLN*
Direktur/*Director*	Eddy D. Erningpraja	SDM dan Umum/*Human Resource General Affairs*
Direktur/*Director*	Setio Anggoro Dewo	Keuangan/*Finance*
Komite Audit		Audit Committee
Ketua	Adang Firman	Chairman
Anggota	Andin Hadiyanto	Members
	Harry Susetyo Nugroho	
	Zulkifli Zaini	
	Sugeng Rochadi	
	Aidil Yuzar	

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Sekretaris Perusahaan adalah Adi Supriono.

As of December 31, 2014 and 2013, the Company's corporate secretary is Adi Supriono.

Berdasarkan Surat Keputusan ("SK") Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ("Meneg BUMN") Republik Indonesia No. KEP-273/MBU//12/2014 tanggal 23 Desember 2014, Chandra M. Hamzah, Budiman, dan Hasan Bisri menggantikan Yogo Pratomo, Achmad Yani Basuki dan Jarman sebagai Komisaris.

Based on Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprise ("MSOE") of the Republic of Indonesia No. KEP-273/MBU//12/2014 dated December 23, 2014, Chandra M. Hamzah, Budiman, and Hasan Bisri were appointed as Commissioners replacing Yogo Pratomo, Achmad Yani Basuki and Jarman.

Direksi Perusahaan diangkat berdasarkan SK Meneg BUMN Republik Indonesia No. KEP-272/MBU//12/2014 tanggal 23 Desember 2014 menggantikan Direksi lama, kecuali Sofyan Basir dan Sarwono Sudarto yang baru efektif tanggal 2 Januari 2015.

The Company's Directors were appointed based on Decision Letter of MSOE of the Republic of Indonesia No. KEP-272/MBU//12/2014 dated December 23, 2014 to replace the previous Directors, except for the appointment of Sofyan Basir and Sarwono Sudarto which was effective on January 2, 2015.

Berdasarkan SK Meneg BUMN Republik Indonesia No. SK-211/MBO/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014, Oegroseno dan Darmono diangkat sebagai Komisaris Independen dan Sumanggar Milton Pakpahan sebagai Komisaris menggantikan Adang Firman, Wimpy S. Tjetjep dan Syahrial Loetan.

Based on Decision Letter of MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-211/MBO/10/2014 dated October 16, 2014, Oegroseno and Darmono were appointed as Independent Commissioners and Sumanggar Milton Pakpahan as Commissioner to replace Adang Firman, Wimpy S. Tjetjep and Syahrial Loetan.

Harry Susetyo Nugroho sebagai Komisaris diangkat berdasarkan SK Meneg BUMN Republik Indonesia No. SK-199/MBU/2013 tanggal 2 April 2013 dan Zulkifli Zaini sebagai Komisaris diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-302/MBU/2013 tanggal 2 Juli 2013.

Harry Susetyo Nugroho as Commissioner was appointed based on Decision Letter of MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-199/MBU/2013 dated April 2, 2013 and Zulkifli Zaini as Commissioner was appointed based on Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprise of the Republic of Indonesia No. SK-302/MBU/2013 dated July 2, 2013.

Andin Hadiyanto sebagai Komisaris diangkat berdasarkan SK Meneg BUMN Republik Indonesia No. SK-365/MBU/2012 tanggal 3 Oktober 2012.

Untuk tahun 2014 Komite Audit Perusahaan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perusahaan No. 08/SK/DK-PLN/2014 tanggal 21 Oktober 2014.

Untuk tahun 2013 Komite Audit Perusahaan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perusahaan No. 05.KR/DK-PLN/2013 tanggal 3 Juli 2013.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

a. Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan semua Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK") baru dan revisi serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Interpretasi standar akuntansi yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan adalah ISAK 27, "Pengalihan Aset dari Pelanggan".

Lihat Catatan 56 untuk penjelasan mengenai dampak penerapan ISAK 27 dan Catatan 3.v untuk kebijakan akuntansi mengenai biaya penyambungan pelanggan.

DSAK-IAI juga mengeluarkan beberapa interpretasi yang penerapannya belum memiliki pengaruh yang signifikan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi dapat mempengaruhi akuntansi untuk transaksi masa depan. Interpretasi tersebut adalah sebagai berikut:

- ISAK 28, “Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas”
- ISAK 29, “Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi Pada Tambang Terbuka”

Andin Hadiyanto as Commissioner was appointed based on Decision Letter of MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-365/MBU/2012 dated October 3, 2012.

For 2014 the Company’s Audit Committee was appointed based on Decision Letter of the Company’s Board of Commissioners No. 08/SK/DK-PLN/2014 dated October 21, 2014.

For 2013 the Company’s Audit Committee was appointed based on Decision Letter of the Company’s Board of Commissioners No. 05.KR/DK-PLN/2013 dated July 3, 2013.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

a. Standards Effective in The Current Year

In the current year, the Company and its subsidiaries have adopted all of the new and revised Statements of Financial Accounting Standards (“SFAS”) and Interpretations of Financial Accounting Standards (“ISFAS”) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (“DSAK-IAI”) that are relevant to their operations and effective for accounting periods beginning on January 1, 2014. The interpretation of the accounting standards that has a significant impact on the consolidated financial statements is ISFAS 27, “Transfers of Assets from Customers”.

Please refer to Note 56 for a detailed explanation of the implication of adopting ISFAS 27 and Note 3.v for the accounting policy on customers’ connection fees.

DSAK-IAI also issued the following interpretations of the financial accounting standards that have not had any significant impact on the amounts reported in the consolidated financial statements, but may affect the accounting for future transactions. The interpretations are as follows:

- ISFAS 28, “Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments”
- ISFAS 29, “Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine”

b. Standar Baru dan Revisi dan Interpretasi Baru yang Belum Diterapkan

Standar baru dan revisi atas standar yang berlaku berikut telah diterbitkan dan bersifat wajib bagi laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015:

- PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Akuntansi Pajak Penghasilan"
- PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama"
- PSAK No. 67, “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain”
- PSAK No. 68, “Pengukuran Nilai Wajar”
- ISAK No. 26 (Revisi 2014), “Penilaian Ulang Derivatif Melekat”

Pada saat penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”, maka semua keuntungan (kerugian) aktuaria dari kewajiban imbalan pasca kerja harus diakui secara langsung di dalam laba komprehensif lainnya. Kebijakan akuntansi Perusahaan saat ini yang masih menangguhkan keuntungan (kerugian) aktuaria dengan metode koridor tidak lagi diperbolehkan. Dengan demikian, Perusahaan memperkirakan akan ada kenaikan jumlah kewajiban imbalan pasca kerja. Pada saat ini, pihak manajemen masih menghitung dampak dari penerapan PSAK 24 (Revisi 2013).

Pada saat penerbitan laporan keuangan kosolidasian, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar baru, termasuk revisi yang lain.

b. New and Amended Standards and New Interpretations Not Yet Adopted

The following new standards and amendments to existing standards have been published and are mandatory for the Company’s consolidated financial statements for periods beginning on or after January 1, 2015:

- SFAS No. 1 (Revised 2013), “Presentation of Financial Statements”
- SFAS No. 4 (Revised 2013), “Separate Financial Statements”
- SFAS No. 15 (Revised 2013), “Investments in Associates and Joint Ventures”
- SFAS No. 24 (Revised 2013), “Employee Benefits”
- SFAS No. 46 (Revised 2014), “Income Taxes”
- SFAS No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets"
- SFAS No. 50 (Revised 2014), “Financial Instruments: Presentation”
- SFAS No. 55 (Revised 2014), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”
- SFAS No. 60 (Revised 2014), “Financial Instruments: Disclosures”
- SFAS No. 65, “Consolidated Financial Statements”
- SFAS No. 66, “Joint Arrangements”
- SFAS No. 67, “Disclosure of Interests in Other Entities”
- SFAS No. 68, “Fair Value Measurement”
- ISFAS No. 26 (Revised 2014), "Reassessment of Embedded Derivatives”

Upon the application of SFAS 24 (Revised 2013), “Employee Benefits”, all actuarial gains (losses) of the post-employment benefit obligations will have to be recognized immediately in other comprehensive income. The Company’s current accounting policy of deferring the recognition of unrecognized actuarial gains (losses) using the corridor method will no longer be permitted. As such, the Company expects an increase in the balance of post-employment benefit obligations. Management is still quantifying the full impact of the application of SFAS 24 (Revised 2013).

As at the authorisation date of these consolidated financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of the other new standards and amendments to existing standards.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (“Rp”), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) yang dikendalikan oleh Perusahaan atau entitas anak. Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya.

Hasil entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasian.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (“Rp”), which is also the functional currency of the Company and its subsidiaries. The measurement basis is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including special purpose entities) controlled by the Company or its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power to govern the financial and operating policies of the entity so as to obtain benefits from its activities.

The results of subsidiaries acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statements of comprehensive income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiaries to bring the accounting policies used in line with those used by the Company.

All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated on consolidation.

Kepentingan nonpengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan nonpengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan nonpengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan nonpengendali atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Seluruh laba rugi komprehensif diatribusikan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, keuntungan dan kerugian diakui didalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) keseluruhan nilai wajar yang diterima dan nilai wajar dari setiap sisa investasi dan (ii) nilai tercatat sebelumnya dari aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Ketika aset dari entitas anak dinyatakan sebesar nilai revaluasi atau nilai wajar dan akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan terakumulasi dalam ekuitas, jumlah yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan akumulasi ekuitas dicatat seolah-olah Perusahaan telah melepas secara langsung aset yang relevan (sebagai contoh direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer langsung ke saldo laba sebagaimana ditentukan oleh PSAK yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" atau, jika sesuai, biaya perolehan saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau pengendalian bersama entitas.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately and presented within equity. The interest of non-controlling shareholders is initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of fair value of the acquiree's identifiable net asset. The choice of measurement is made on an acquisition by acquisition basis. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interest is the amount of those interests at initial recognition plus non-controlling interests' share of subsequent changes in equity. Total comprehensive income is attributed to non-controlling interest even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

Changes in the Company and its subsidiaries interests in subsidiaries that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amount of the Company and its subsidiaries' interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries'. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Company loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. When assets of the subsidiary are carried at the revalued amount or at fair value and the related cumulative gain or loss has been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity, the amounts previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are accounted for as if the Company had directly disposed of the relevant assets (i.e. reclassified to profit or loss or transferred directly to retained earnings as specified by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under SFAS 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a jointly controlled entity.

d. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan dan entitas anak kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis. Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan, dengan diakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam pendapatan komprehensif lain (“OCI”).

d. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Company and its subsidiaries, liabilities incurred by the Company and its subsidiaries to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Company and its subsidiaries in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

When the consideration transferred by the Company and its subsidiaries in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to the reporting dates in accordance with the relevant accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss or in other comprehensive income (“OCI”).

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan dan entitas anak atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui di dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai ketika kepemilikannya dilepas/dijual.

When a business combination is achieved in stages, the Company and its subsidiaries' previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate when those interests were disposed of.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan dan entitas anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company and its subsidiaries report provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

e. Foreign Currency Transactions and Translation

Pembukuan Perusahaan dan entitas anak, kecuali Majapahit Holding B.V. ("MH") dan Majapahit Finance B.V. ("MF") diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali selisih kurs mata uang asing yang dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman.

The accounts of the Company and its subsidiaries, except for Majapahit Holding B.V. ("MH") and Majapahit Finance B.V. ("MF"), are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss, except those foreign exchange differences which are capitalized as borrowing costs.

Kegiatan usaha MH dan MF merupakan bagian integral dari kegiatan usaha Perusahaan, dengan demikian pembukuan MH dan MF yang diselenggarakan dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan prosedur yang sama dengan Perusahaan.

The operating activities of MH and MF are an integral part of the Company's activities; hence the accounts of MH and MF, which are maintained in foreign currency, are translated into Rupiah using the same procedures adopted by the Company.

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

c. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham dari Perusahaan.

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company and its subsidiaries (the reporting entity):

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
   vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
   vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

c. The entity is controlled, jointly controlled or materially affected by the Government. The government is the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the stockholder of the Company.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

All transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those transacted with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

g. Aset Keuangan

g. Financial Assets

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

All financial assets are recognized and derecognized on the trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as a fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: tersedia untuk dijual dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

The Company and its subsidiaries' financial assets are classified into the following specified categories: available-for-sale and loans and receivables.

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS")

Available-for-Sale Financial Assets ("AFS")

AFS pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya.

AFS are initially recognized at fair value, including directly attributable transaction costs. Subsequently, they are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses, until they are derecognized.

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka perusahaan mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

The Company measures the fair value of non-listed equity instruments by applying valuation techniques based on reasonable assumptions. In the limited case where the range of reasonable fair value measurements is significantly wide and the probabilities of the various estimates cannot be reasonably assessed, the Company records such AFS instruments at cost less impairment.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company and its subsidiaries' right to receive the dividends are established.

Pinjaman Diberikan dan Piutang

Kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Loans and Receivables

Cash and cash equivalents, trade receivable and other receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "loans and receivables". Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment. Interest is recognized by applying the effective interest rate method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal palaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Impairment of Financial Assets

Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laporan laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- default or delinquency in interest or principal payments; or
- it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation.

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company's and its subsidiaries' past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke pendapatan komprehensif lainnya.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Derecognition of Financial Assets

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

The Company and its subsidiaries derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company and its subsidiaries neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Company and its subsidiaries recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Company and its subsidiaries retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company and its subsidiaries continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralised borrowing for the proceeds received.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

On derecognition of a financial asset other than its entirety (e.g., when the Company and its subsidiaries retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Company and its subsidiaries allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Penerusan pinjaman, utang kepada pemerintah, utang bank dan surat utang jangka menengah, utang obligasi (termasuk sukuk ijarah), utang listrik swasta dan pinjaman lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya transaksi sukuk ijarah diamortisasi menggunakan metode garis lurus sepanjang umur kontrak dan liabilitasnya.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

i. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

h. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as Debt or Equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiaries are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded as the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities

Two step loans, government loans, bank loans and medium term notes, bonds payable (including sukuk ijarah), electricity purchase payable and other borrowings are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings using the effective interest rate method.

Transaction costs for sukuk ijarah are amortized using the straight line method over the contractual life of the liability.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries derecognize financial liabilities when, and only when the Company's and its subsidiaries' obligations are discharged, cancelled or expire. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries only offset financial assets and liabilities and present the net amount in the statement of financial position where they:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

- currently have a legal enforceable right to set off the recognized amount; and
- intend either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

j. Aset Tetap - Pemilikan Langsung

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap termasuk material cadangan utama dan peralatan siap pakai dengan manfaat ekonomis lebih dari satu tahun yang diperuntukkan untuk menjaga kelangsungan dan kestabilan operasi instalasi dan mesin pembangkit listrik dalam rangka memproduksi serta mendistribusikan tenaga listrik.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

j. Property, Plant and Equipment – Direct Acquisition

Property, plant and equipment held for use are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. Property, plant and equipment include major spare parts and stand-by equipment, with economic benefits of more than one year, which are used to ensure the continuity and stability of the power plant operations and electricity installations necessary to produce and distribute electricity.

Depreciation is recognized using the straight-line method based on their estimated economic useful lives as follows:

	Tahun/ *Years*	
Bangunan umum, waduk dan prasarana	10 – 47	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	13 – 30	Installations and power plant
Perlengkapan transmisi	37	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	15 – 37	Distribution equipment
Perlengkapan umum	4 – 8	General equipment
Kendaraan bermotor	3 – 5	Motor vehicles
Material cadangan	10 – 25	Spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	5 – 10	Telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	10 – 15	Vessel and equipment

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya ketika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan dan entitas anak akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant leases where there is no reasonable certainty that the Company and its subsidiaries will obtain ownership at the end of the lease term.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Biaya awal untuk mendapatkan hak atas tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak disusutkan.

Initial costs incurred to obtain land rights are recognized as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The costs of maintenance and repairs are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as assets if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the consolidated statement of comprehensive income.

Aset yang untuk sementara waktu tidak digunakan dalam operasi dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Aset yang sementara waktu tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Assets that are temporarity not used in operations are recorded as part of property, plant and equipment. Assets not used in operations are depreciated using the same method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

k. Impairment of Non-Financial Assets

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan dan entitas anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

At the reporting date, the Company and its subsidiaries review the carrying amounts of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. In accessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan dan entitas anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company and its subsidiaries estimate the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

The estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash-generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

I. Sewa

Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa

ISAK 8, "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa" memberikan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa atau mengandung sewa sehingga harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2011), "Sewa".

Penyelenggaraan usaha tenaga listrik di Indonesia dikendalikan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan setiap pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum harus memastikan ketersediaan tenaga listrik di setiap wilayah operasinya.

Perusahaan dan entitas anak mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik ("PPA" dan "ESC") dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta ("IPP"). IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang dapat diserahkan kepada entitas usaha lain dengan tanggung jawab untuk menghasilkan tenaga listrik guna kepentingan umum.

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") yang kemudian bergabung menjadi bagian dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), No. S-2366/BL/2009 tertanggal 30 Maret 2009, penyediaan tenaga listrik oleh IPP kepada Perusahaan dan entitas anak yang termasuk dalam kategori perjanjian pelaksanaan jasa publik ke swasta dikecualikan dari penerapan ISAK 8 sampai DSAK–IAI menerbitkan interpretasi standar akuntansi yang spesifik mangatur transaksi tersebut. Sebagai hasilnya, Perusahaan dan entitas anak tetap mengikuti kebijakan akuntansi yang berlaku, dimana pembelian listrik dianggap sebagai transaksi pembelian komoditas normal.

Manajemen mengevaluasi dampak dari ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012) terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Perusahaan dan entitas anak dengan IPP dan menetapkan bahwa transaksi tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Interpretasi, yang berisi untuk operator atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta. Selanjutnya, sesuai dengan surat manajemen tanggal 22 Desember 2011 kepada Ketua Bapepam-LK, manajemen memutuskan untuk menerapkan ketentuan ISAK 8, sesuai dengan PSAK 30, terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mulai tanggal 1 Januari 2012.

I. Leases

Determining Whether an Arrangement Contains a Lease

ISFAS 8, "Determining Whether an Arrangement Contains a Lease" provides guidance in determining whether an arrangement is in substance a lease that should be accounted for in accordance with SFAS 30 (Revised 2011), "Leases".

The electric power business in Indonesia is controlled by the Government and carried-out by the Company as a state-owned enterprise, which serves as the holder of an Electricity Business Proxy. The holder of an Electricity Business Proxy and each holder of an Electricity Business License for public use must ensure the adequacy of electric power supply in each of their operating areas.

The Company and its subsidiaries entered into power purchase agreements ("PPA") and energy sales contracts ("ESC") with Independent Power Producers ("IPPs"). Those IPPs are holders of Electricity Business License for public use, which may be granted to other business entities with responsibility to generate electricity for public use.

Based on letter No. S-2366/BL/2009 dated March 30, 2009 from the Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency ("Bapepam-LK"), which is subsequently merged into the Financial Services Authority ("OJK"), power supply arrangements by IPPs to the Company and its subsidiaries that are categorized as public-to-private consession arrangements, are exempted from the application of ISFAS 8, until DSAK-IAI has issued an accounting interpretation that can specifically address such transactions. As a result, the Company and its subsidiaries continued to follow its existing accounting policy in which the supply of electricity is accounted for as a normal purchase of commodity.

Management assessed the impact of ISFAS 16, "Service Concession Arrangements" (effective January 1, 2012) on the Company's and its subsidiaries' Power Supply Contracts with IPPs and determined that such transactions do not qualify under the scope of the Interpretation, which addresses the accounting of the operators of public-to-private concession arrangements. Subsequently, on its letter dated December 22, 2011 to the Chairman of Bapepam-LK, management decided to apply the provisions of ISFAS 8, in accordance with SFAS 30, on its Power Supply Contracts since January 1, 2012.

Klasifikasi Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada *lessee*. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui dalam sewa operasi sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari beban sewa dengan dasar garis lurus, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

Perusahaan dan entitas anak menetapkan bahwa beberapa perjanjian pembelian tenaga listrik dan perjanjian pembelian energi dengan Penghasil Listrik Independen (IPP) memenuhi persyaratan sebagai sewa dengan dasar bahwa Perusahaan dan entitas anak dan IPP memiliki perjanjian *take or pay*, dimana Perusahaan dan entitas anak mengambil hampir seluruh listrik dan energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Jenis perjanjian ini ditetapkan sebagai sewa pembiayaan dimana porsi signifikan dari risiko dan manfaat atas sejumlah pembangkit listrik telah dialihkan ke Perusahaan dan entitas anak dengan dasar bahwa masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset dan terdapat opsi beli pada akhir masa sewa.

Lease Classification

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incident to ownership of an asset to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Operating lease payments are recognized as expenses on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as expenses in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as liabilities. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

The Company and its subsidiaries determined that certain power purchase agreements and energy sales contracts with Independent Power Producers (IPPs) qualify as leases on the basis that the Company and its subsidiaries and the IPPs have take or pay arrangements where the Company and its subsidiaries are taking substansially all of electricity and energy output from the power plants. This type of arrangement is determined to be a finance lease where a significant portion of the risks and rewards of ownership of certain power plants have been transferred to the Company and its subsidiaries on the basis that the lease term is for the major part of the economic life of the assets and there is bargain purchase option at the end of the lease term.

m. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan dan beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

m. Construction in Progress

Construction in progress represents costs directly related to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction and depreciation of property and equipment that were used in the construction. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

n. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu asset kualifikasian, jumlah yang direkapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

n. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expensed on the qualifying assets. The capitalization rate is the weighted average of the total borrowings cost applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

o. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya. Properti investasi diukur sebesar nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan setiap akumulasi kerugian penurunan nilai.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

o. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building - or part of building – or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both. Investment properties are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Land is stated at cost and is not depreciated.

p. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan mengunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai PSAK 58 (Revisi 2009), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan". Investasi pada entitas asosiasi dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak atas aset bersih entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu. Bagian Perusahaan dan entitas anak atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Perusahaan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan menentukan apakah ada bukti objektif bahwa terdapat indikasi penurunan nilai untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Perusahaan dan entitas anak. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset", sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

p. Investments in Associates and Joint Venture

Investments in Associates

An associate is an entity over which the Company and its subsidiaries have significant influence and that is neither a subsidiary nor an interest in a joint venture. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with SFAS 58 (Revised 2009), "Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations". Investments in associates are carried in the consolidated statement of financial position at cost as adjusted by post-acquisition changes in the Company and its subsidiaries' share of the net assets of the associate, less any impairment in the value of the individual investments. Losses of the associates in excess of the Company and its subsidiaries' interest in those associates (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company and its subsidiaries' net investment in the associate) are recognized only to the extent that the Company and its subsidiaries have incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

The Company determines at each reporting date whether there is any objective evidence that impairment indicators exist to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company and its subsidiaries' investment in an associate. If impairment indicators exist, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with SFAS 48 (Revised 2009), "Impairment of Assets", as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with SFAS 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Pada saat pelepasan suatu entitas asosiasi yang mengakibatkan Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, investasi yang tersisa diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal Investasi AFS atau Investasi yang Dimiliki untuk Diperjualbelikan sesuai dengan PSAK 55. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya atas entitas asosiasi diatribusikan ke sisa kepemilikan dan nilai wajar termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian atas pelepasan entitas asosiasi. Selanjutnya, Perusahaan dan entitas anak memperhitungkan seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar yang sama dengan yang diperlukan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain oleh entitas asosiasi akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait, maka Perusahaan dan entitas anak mereklasifikasi keuntungan atau kerugian dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) sejak Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi.

Upon disposal of an associate that results in the Company and its subsidiaries losing significant influence over that associate, any retained investment is measured at fair value on the initial recognition of an AFS or Held for Trading Investment in accordance with SFAS 55. The difference between the previous carrying amount of the associate attributable to the retained interest and the fair value is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate. In addition, the Company and its subsidiaries account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if that associate had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate would be reclassify to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Company and its subsidiaries reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when it loses significant influence over that associate.

Ketika Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian dieliminasi sebesar kepentingan mereka dalam entitas asosiasi.

When the Company and its subsidiaries transact with an associate, profits and losses are eliminated to the extent of their interest in the relevant associate.

Bagian partisipasi dalam ventura bersama

Interest in joint ventures

Ventura bersama adalah perjanjian kontraktual dimana Perusahaan dan entitas anak dan pihak lain menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama (yaitu ketika keputusan kebijakan strategis keuangan dan operasional terkait dengan aktivitas ventura bersama tersebut mensyaratkan konsesus dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian).

A joint venture is a contractual arrangement whereby the Company and its subsidiaries and other parties undertake an economic activity that is subject to joint control (i.e. when the strategic financial and operating policy decisions relating to the activities of the joint venture require the unanimous consent of the parties sharing control).

Bagian partisipasi Perusahaan dan entitas anak dalam entitas yang dikendalikan bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai PSAK 58.

The Company's and its subsidiaries' ownership in a jointly controlled entity is accounted for using the equity method of accounting in the consolidated financial statements, except when the investment is classified as held for sale, in which case it is accounted for in accordance with SFAS 58.

Penyesuaian dibentuk terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk mengeliminasi bagian Perusahaan dan entitas anak atas keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dan entitas yang dikendalikan bersama. Ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sampai dengan tanggal dimana Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengendalian bersama atas entitas yang dikendalikan bersama.

Adjustments are made in the consolidated financial statements to eliminate the Company and its subsidiaries share of unrealized gains and losses on transactions between the Company and its subsidiaries and the jointly controlled entity. The joint venture is carried at equity method until the date on which the Company and its subsidiaries cease to have joint control over the jointly controlled entity.

Perusahaan dan entitas anak mengukur dan mengakui sisa investasi pada nilai wajar setelah hilangnya pengendalian dan entitas yang dikendalikan bersama tidak menjadi entitas anak atau entitas asosiasi. Selisih antara nilai tercatat atas hilangnya pengendalian bersama dengan agregat nilai wajar sisa investasi dan hasil pelepasan diakui pada laba rugi. Ketika sisa investasi mempunyai pengaruh yang signifikan, investasi tersebut dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi.

The Company and its subsidiaries measure and recognize the remaining investment at fair value upon loss of control and provided the jointly controlled entity does not become a subsidiary or associate. Any difference between the carrying amount of the jointly controlled entity upon loss of joint control, and the aggregate of the fair value of the remaining investment and proceeds from disposal is recognized in the profit or loss. When the remaining investment constitutes significant influence, it is accounted for as investment in an associate.

q. Aset Takberwujud

Biaya Pengembangan Piranti Lunak

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan diakui sebagai aset takberwujud. Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya.

Biaya Legal Terkait Pembaruan Hak Atas Tanah

Biaya legal terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

q. Intangible Assets

Software Development Cost

Costs associated with maintaining computer software programs are recognized as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company are recognized as intangible assets. Computer software development costs recognized as assets are amortized using the straight line method over their estimated useful lives.

Legal Costs to Renew Land Rights

Legal costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortized over the period of the land rights.

r. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

r. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

s. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Untuk kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang, lihat Catatan 3g.

s. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash in hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

Restricted cash in banks and time deposits are classified as loans and receivables. Refer to Note 3g for the accounting policy on loans and receivables.

t. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.

Di dalam penentuan nilai realisasi bersih, Perusahaan dan entitas anak tidak menurunkan nilai persediaan yang digunakan untuk penjualan tenaga listrik apabila Perusahaan dan entitas anak mampu memperoleh pendapatan penjualan tenaga listrik di atas biaya perolehan persediaan tersebut.

t. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the moving average method.

In determining the net realizable values, the Company and subsidiaries do not write down inventories held in use for production of electricity below their costs when the Company and subsidiaries are able to sell electricity above the costs of inventories.

u. Pinjaman dan Utang Obligasi (Termasuk Sukuk Ijarah)

Pinjaman dan utang obligasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Kebijakan akuntansi untuk liabilitas keuangan dijelaskan dalam Catatan 3h.

u. Borrowings and Bonds Payable (Including Sukuk Ijarah)

Borrowings and bonds payable are classified as financial liabilities. Refer to Note 3h for the accounting policy on financial liabilities.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan Tenaga Listrik

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh). Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

Subsidi Listrik Pemerintah

Subsidi listrik Pemerintah yang diberikan melalui Perusahaan diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Biaya Penyambungan Pelanggan

Perusahaan mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan sebagai pendapatan pada saat Perusahaan menyelesaikan kewajiban atas jasa koneksi tersebut.

Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan jaringan dan jasa telekomunikasi, sewa trafo dan jasa-jasa administratif lainnya. Pendapatan lainnya diakui pada saat penyelesaian jasa pengerjaan kepada pelanggan.

v. Revenue and Expense Recognition

Sale of Electricity

Revenue from sale of electricity is recognized based on electricity usage (kWh). Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

The Government's Electricity Subsidy

The Government's electricity subsidy is recognized as revenue on an accrual basis which is computed in accordance with the provisions stipulated in the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Customers Connection Fees

The Company recognizes connection fees received from customers that are used to construct or acquire property, plant, and equipment to connect the customers to its network as revenues when the Company completes the connection service.

Other Revenues

Other revenues consist of telecommunication network and services, transformer rental and other administrative services. Other revenue is recognized when services have been completed and rendered to customers.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakru berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Interest Income

Interest revenue is accrued on time basis, by reference to the principal outstanding timely and at the applicable interest rate.

w. Pembelian Tenaga Listrik

Perusahaan dan entitas anak memiliki sejumlah PPA dan ESC dengan IPP. Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan dan entitas anak membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh IPP sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya berbeda yaitu komponen kapasitas dan energi untuk PPA, komponen sumberdaya dan pembangkitan untuk ESC, komponen operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

Sebagai akibat penerapan ISAK 8, Perusahaan dan entitas anak telah mengevaluasi apakah PPA dengan IPP mengandung unsur sewa. Apabila terdapat unsur sewa, maka Perusahaan dan entitas anak perlu melakukan kajian untuk menentukan apakah sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaaan atau sewa operasi. Lihat Catatan 3.l untuk kebijakan akuntansi mengenai sewa.

Biaya yang dibayarkan Perusahaan untuk membeli tenaga listrik dari perjanjian yang tidak mengandung unsur sewa dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

w. Purchase of Electricity

The Company and its subsidiaries have various PPAs and ESCs with IPPs. Under those contracts, the Company and its subsidiaries pay the IPP for the supply of energy at an amount determined in accordance with the payment formula in which payment for different cost components, such as capacity and energy components for the PPA, resource and generation components for the ESC, as well as operations and maintenance components, depends on the level of energy supplied and other variables stipulated in the agreement.

As a result of adopting ISFAS 8, the Company and its subsidiaries have assessed whether a lease element is embedded in each of the PPAs with IPPs. If the agreement contains a lease, the Company and its subsidiaries will have to evaluate whether it is a finance or an operating lease based on the contractual terms of the agreement. Please refer to Note 3.l for the accounting policies for leases.

The costs paid to purchase electricity on agreements that do not contain a lease are recognized as expenditures in the profit or loss account as incurred.

x. Imbalan Kerja

Imbalan Pasca-Kerja

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan pasca-kerja lain tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan entitas anak.

Perhitungan imbalan pasca-kerja ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari jumlah yang lebih besar diantara nilai kini liabilitas imbalan pasti atau nilai wajar aset program diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung, apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

x. Employee Benefits

Post-employment Benefits

The Company and its subsidiaries established a defined benefit pension plan covering all of their eligible permanent employees. The Company and its subsidiaries also provide other unfunded defined post-employment benefit plans for their qualifying employees based on the Company and its subsidiaries' policies.

Post-employment benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. The accumulated unrecognized actuarial gains and losses that exceed 10% of the greater of the present value of the defined benefit obligations and the fair value of plan assets, is recognized on a straight-line basis over the expected average remaining service years of the participating employees. Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasca-kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial belum diakui dan biaya jasa lalu belum diakui, dan dikurangi dengan nilai wajar aset program.

The employee benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognized actuarial gains and losses and unrecognized past service cost, and reduced by the fair value of scheme assets.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Long-term Benefits

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu dan keuntungan (kerugian) aktuarial diakui langsung pada tahun yang bersangkutan.

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. Past service cost and actuarial gains (losses) are recognized immediately in the profit or loss.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

The long-term employee benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit obligation.

y. Provisi

y. Provisions

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, and it is probable that the Company and its subsidiaries will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

z. Pajak Penghasilan

z. Income Tax

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and deferred tax liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company and its subsidiaries expect, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laporan laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laporan laba rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in the profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside the profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside the profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

aa. Aset Donasi dari Pemerintah

Aset donasi dari Pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Perusahaan, diakui sebagai transaksi ekuitas dengan pemegang saham. Aset yang didonasikan tersebut dicatat sesuai dengan nilai transaksi yang telah disepakati dengan Pemerintah. Perusahaan mencatat aset donasi dari Pemerintah sebagai penambahan asset tetap dan peningkatan tambahan modal disetor oleh pemegang saham.

aa. Government Contributed Assets

Assets contributed by the Government, in their capacity as a shareholder of the Company, are accounted for as an equity transaction with the shareholder. The assets are recorded at the transaction costs agreed with the Government. The Company records the contributed asset as an addition to property, plant and equipment with a corresponding increase to additional payment in capital by the shareholder.

bb. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

bb. Earnings per Share

Basic earnings per share are computed by dividing income for the year of attributable to owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

cc. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan dan entitas anak yang secara regular di-*review* oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka dikategorikan berdasarkan lokasi geografis di mana penjualan tenaga listrik dilakukan.

cc. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company and its subsidiaries are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

a) that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
c) for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is grouped based on the geographical location of where electricity sales are made.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari di-*review* secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Perusahaan telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Nilai Wajar Pembangkit Listrik Di Dalam Sewa Pembiayaan

Atas penerapan ISAK 8 sejumlah perjanjian jual beli tenaga listrik Perusahaan dicatat sebagai sewa pembiayaan. Pada saat dimulainya sewa, Perusahaan mengakui asset dan liabilitas sewa pembiayaan sebesar nilai wajar pembangkit listrik yang disewa atau, jika lebih rendah, nilai kini dari pembayaran sewa minimum, yang ditentukan pada awal masa sewa.

Perusahaan menetapkan nilai wajar dari pembangkit listrik yang disewa dengan menerapkan teknik penilaian yang sesuai dan asumsi-asumsi yang memadai, termasuk estimasi biaya yang perlu dikeluarkan untuk membangun pembangkit listrik terkait, suku bunga implisit dalam sewa dan nilai sisa aset pada masa akhir kontrak. Perubahan - perubahan selanjutnya atas asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar pada awal masa sewa tidak akan merubah nilai aset pembiayaan di masa mendatang.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Company and its subsidiaries' accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Company has identified the following matters under which significant judgments are made:

Fair Value of Power Plants Held Under Finance Lease

As a result of applying ISFAS 8 a number of the Company's PPAs have been accounted for as finance leases. At the commencement of the lease, the Company recognizes the finance leased asset and liability at an amount equal to the fair value of the power plant or, if lower, the present value of the minimum lease payments, determined at the inception of the lease.

The Company determined the fair value of the finance leased power plant by applying the appropriate valuation techniques and assumptions, including, the expected cost to build the power plant, the implicit interest rate of the lease and the residual value of the asset at the end of the contract. Any subsequent changes to the assumptions used to measure fair value at inception do not affect the subsequent measurement amount of the leased asset.

Biaya Penyambungan Pelanggan

Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan kondisi yang relevan untuk menentukan pengakuan pendapatan terkait biaya penyambungan pelanggan. Untuk itu, Perusahaan perlu menentukan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerimaan biaya penyambungan dari pelanggan.

Perusahaan mempertimbangkan fakta bahwa kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik secara berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2009 dan semua pelanggan dikenakan tarif listrik yang yang telah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk penggunaan tenaga listrik (terlepas dari jumlah biaya penyambungan yang dibayarkan). Oleh karena itu, penerimaan biaya penyambungan tidak menimbulkan kewajiban terpisah bagi Perusahaan untuk menyediakan akses listrik secara berkelanjutan kepada pelanggan.

Perusahaan menyimpulkan bahwa menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan merupakan jasa yang diberikan untuk mendapatkan biaya penyambungan dari pelanggan. Jasa koneksi diserahkan kepada pelanggan dan merepresentasikan nilai yang berdiri sendiri (*stand-alone value)* untuk pelanggan tersebut. Sebagai hasilnya, Perusahaan mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan sebagai pendapatan pada saat Perusahaan menyelesaikan kewajiban atas jasa koneksi terkait.

Revenues from Customers' Connection Fees

The Company has considered all relevant facts and circumstances to determine the exact timing of revenue recognition pertaining to connection fees paid by customers. To do so, the Company needs to determine what performance obligations it has as a result of receiving connection fees.

The Company considered the facts that the obligation to provide ongoing supply of electricity is regulated by the 2009 Electricity Law and that the Company charges all customers the same regulated tariff for electricity usage prescribed by the Government of Republic of Indonesia (regardless of the amount of connection fees paid by the customers). Therefore, the receipt of connection fees does not create a separate performance obligation for the Company to provide ongoing electricity supply to its customers.

The Company concludes that connecting the customers to its network is the only service to be delivered in exchange for the connection fees. A service connection is delivered to the customer and represents stand-alone value for that customer. Consequently, the Company recognizes connection fees received from customers that are used to construct or acquire property, plant, and equipment to connect the customers to its network as revenues when the Company completes the connection services.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman Diberikan dan Piutang

Perusahaan dan entitas anak menilai penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang di-*review* secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang telah diungkapkan dalam Catatan 14 dan 16.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Company and its subsidiaries assess their loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in the profit or loss, management makes a judgment as to whether there is an objective evidence that the loss event has occurred. Management also makes judgments as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in Notes 14 and 16.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Properti Investasi

Nilai tercatat aset tetap dan properti investasi diungkapkan dalam Catatan 6 dan 7.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Penurunan Nilai Aset

Aset tetap dilakukan uji penurunan nilai ketika terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

Berdasarkan pertimbangan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap Perusahaan dan entitas anak. Nilai tercatat aset yang dilakukan uji penurunan nilai telah diungkapkan dalam Catatan 6 atas laporan keuangan konsolidasian.

Imbalan Pasca-Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca-kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca-kerja Perusahaan dan entitas anak.

Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment and Investment Properties

The carrying amounts of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 6 and 7.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

Asset Impairment

Property, plant and equipment are reviewed for impairment whenever impairment indicators are present. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets (cash generating unit) and a suitable discount rate in order to calculate the present value.

While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of operations.

Based on the assessment of management, there is no impairment indication apparent to the Company and its subsidiaries in relation to property, plant and equipment. The carrying values of assets, on which impairment analysis is applied, were described in Note 6 to the consolidated financial statements.

Post-employment Benefits

The determination of the post-employment benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company and its subsidiaries' assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Company and it subsidiaries assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the Company and its subsidiaries' post-employment benefit obligations.

Liabilitas imbalan pasca-kerja diungkapkan dalam Catatan 49.

Post-employment benefit obligations are disclosed in Note 49.

Pajak Penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Income Taxes

The calculations of income tax expense for the Company require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgement and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Company, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukkan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya- biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates of the expected sales level and the associated costs which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

5. ENTITAS ANAK

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

5. SUBSIDIARIES

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis Usaha/ *Nature of Business*	Persentase Pemilikan/ *Percentage of Ownership* 31 Desember/ *December 31,* 2014 %	2013 %	Tahun Operasi Komersial/ *Year of Operation*	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi **)/ *Total Assets Before Elimination* **) 31 Desember/ *December 31,* 2014	2013
PT Indonesia Power (IP) dan entitas anak/ *and its subsidiaries*	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99,99	99,99	1995	53.503	53.480
PT Cogindo Dayabersama (CDB) *)	Jakarta	Cogeneration, pemasok energi, jasa pelayanan dan manajemen/ *Cogeneration, energy distribution, energy service and management*	99,99	99,99	1999	790	745
PT Artha Daya Coalindo (ADC) *)	Jakarta	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	60,00	60,00	1999	87	93
PT Indo Ridlatama Power (IRP) *)	Kutai	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	86,00	81,00	****)	160	111
PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) *)	Jakarta	Pengembangan energi panas bumi dan pembangkit tenaga listrik/ *Development of geothermal energy and electricity supplies*	95,21	95,21	****)	82	92
PT Putra Indotenaga *)	Jakarta	Ketenagalistrikan dan Energi/ *Electricity and Energy*	99,90	99,90	***)	231	144
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) dan entitas anak/ *and its subsidiaries*	Surabaya	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99,99	99,99	1995	41.057	40.828
PT PJB Services (PJBS) *) dan entitas anak/ *and its subsidiary*	Surabaya	Jasa/*Service*	98,00	98,00	2001	488	262
PT Mitra Karya Prima (MKP) *)	Surabaya	Jasa/*Service*	92,00	92,00	2013	30	17
PT Rekadaya Elektrika (RDE) *) dan entitas anak/ *and its subsidiary*	Jakarta	Jasa listrik dan enjiniring/ *Electricity and engineering*	98,68	98,68	2004	482	428
PT Rekadaya Elektrika Consult *)	Jakarta	Supervisi dan Konsultasi/ *Supervision and consultation*	99,80	99,80	2011	45	37
PT Navigat Innovative Indonesia (NII) *)	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian/ *Trading, construction, mining and agriculture*	72,97	72,97	***)	150	102
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam)	Batam	Penyedia tenaga listrik/ *Electricity supplier*	99,99	99,99	2000	5.752	4.842
PT Pelayanan Energi Batam	Batam	Pembangunan pipa gas dan energi lainnya/ *Construction of gas pipeline and other energy sector*	99,99	-	***)	7	-
PT Indonesia Comnets Plus (ICON)	Jakarta	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi/ *Telecommunication provider*	99,99	99,99	2000	2.035	1.964
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLNE)	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi/ *Engineering, procurement and construction*	99,90	99,90	2003	425	363
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan)	Tarakan	Penyedia tenaga listrik/ *Electricity supplier*	99,97	99,97	2004	217	212
Majapahit Holding B.V. (MH) dan entitas anak/ *and its subsidiary*	Belanda/ *The Netherlands*	Lembaga keuangan/ *Finance*	100,00	100,00	2006	46.213	44.740
Majapahit Finance B.V. (MF) *)	Belanda/ *The Netherlands*	Lembaga keuangan/ *Finance*	100,00	100,00	2006	35.149	35.149
PT PLN Batubara (PLN Batubara)	Jakarta	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	99,99	99,99	2009	1.398	1.406
PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal)	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99,99	99,99	2010	83	86
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG)	Jakarta	Pelayaran/ *Shipping*	100,00	100,00	2011	1.388	1.008
PT Haleyora Power (HP) dan entitas anak/ *and its subsidiary*	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99,99	99,99	2013	364	315
PT Haleyora Powerindo (HPI) *)	Jakarta	Jasa/*Service*	90,00	90,00	2013	173	173

*) Pemilikan tidak langsung/*Indirect ownership*
**) Dalam miliaran Rupiah/*Stated in billions of Rupiah*
***) Dalam tahap pengembangan/*Under development stage*

Pada tahun 2014, PLN Batam dan PT Universal Batam Energy mendirikan PT Pelayanan Energi Batam. PLN Batam melakukan penyertaan sebesar Rp 7.493 juta atau setara dengan 99,90% saham PT Pelayanan Energi Batam.

Pada tahun 2014, PT Indonesia Power menambah penyertaan saham di PT Indo Ridlatama Power sebesar Rp 45.000 juta, penambahan setoran modal tersebut meningkatkan kepemilikan PT Indonesia Power menjadi 86%.

In 2014, PLN Batam and PT Universal Batam Energy established PT Pelayanan Energi Batam. PLN Batam made an initial investment amounting to Rp 7,493 million or equivalent to 99.90% of issued shares of PT Pelayanan Energi Batam.

In 2014, PT Indonesia Power increased its investment in PT Indo Ridlatama Power by Rp 45,000 million, which increases PT Indonesia Power's share ownership to 86%.

6. ASET TETAP / 6. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT

	1 Januari/ *January 1,* 2014	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December 31,* 2014	
Biaya perolehan						At cost
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Tanah	9.226.100	192.089	143.998	-	9.274.191	Land
Bangunan umum, waduk dan prasarana	55.723.604	123.021	304.156	4.214.062	59.756.531	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	172.954.951	158.897	1.156.761	14.266.909	186.223.996	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi	75.541.561	308.507	209.494	3.799.077	79.439.651	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	107.057.415	2.580.655	329.421	7.934.834	117.243.483	Distribution equipment
Perlengkapan umum	8.951.235	171.826	421.774	503.001	9.204.288	General equipment
Kendaraan bermotor	925.567	63.938	13.983	60.052	1.035.574	Motor vehicles
Material cadang	948.893	467.356	394.368	-	1.021.881	Spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	5.542.290	38.317	34.348	752.523	6.298.782	Telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	731.828	39.328	1.734	4.619	774.041	Vessels and equipment
Sub-jumlah	437.603.444	4.143.934	3.010.037	31.535.077	470.272.418	Subtotal
Aset sewaan						Leased assets
Tanah	48.388	-	-	-	48.388	Land
Instalasi dan mesin pembangkit	124.333.867	4.493.328	-	(173.364)	128.653.831	Installation and power plant
Sub-jumlah	124.382.255	4.493.328	-	(173.364)	128.702.219	Subtotal
Pekerjaan dalam pelaksanaan	95.738.735	33.313.805	504.600	(33.646.852)	94.901.088	Construction in progress
Aset tidak digunakan dalam operasi	6.054.271	-	524.733	1.143.294	6.672.832	Assets not used in operation
Jumlah	663.778.705	41.951.067	4.039.370	(1.141.845)	700.548.557	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Bangunan umum, waduk dan prasarana	13.194.770	2.015.967	83.244	286.556	15.414.049	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	60.231.054	10.024.315	1.035.123	-	69.220.246	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi	21.070.692	2.448.377	105.362	-	23.413.707	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	35.116.579	4.032.179	215.832	22.906	38.955.832	Distribution equipment
Perlengkapan umum	5.541.615	1.031.578	248.774	28.649	6.353.068	General equipment
Kendaraan bermotor	677.163	88.453	15.804	-	749.812	Motor vehicles
Material cadang	197.008	47.085	20.703	-	223.390	Spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	3.082.210	461.776	30.400	102.224	3.615.810	Telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	75.655	43.599	1.734	4.192	121.712	Vessels and equipment
Sub-jumlah	139.186.746	20.193.329	1.756.976	444.527	158.067.626	Subtotal
Aset sewaan						Leased assets
Instalasi dan mesin pembangkit	31.462.499	3.534.140	-	-	34.996.639	Installation and power plant
Aset tidak digunakan dalam operasi	5.026.882	454.586	483.474	780.023	5.778.017	Assets not used in operation
Jumlah	175.676.127	24.182.055	2.240.450	1.224.550	198.842.282	Total
Jumlah Tercatat	488.102.578				501.706.275	Net Carrying Value

	1 Januari/ January 1, 2013	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2013	
Biaya perolehan						At cost
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Tanah	8.763.934	25.426	124.982	561.722	9.226.100	Land
Bangunan umum, waduk dan prasarana	49.540.539	189.194	57.746	6.051.617	55.723.604	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	156.450.996	163.387	2.579.442	18.920.010	172.954.951	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi	67.416.362	118.325	823.944	8.830.818	75.541.561	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	94.269.914	2.781.148	76.495	10.082.848	107.057.415	Distribution equipment
Perlengkapan umum	6.533.598	234.230	68.380	2.251.787	8.951.235	General equipment
Kendaraan bermotor	841.083	46.618	73.651	111.517	925.567	Motor vehicles
Material cadang	1.067.334	470.367	588.808	-	948.893	Spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	4.477.693	20.436	112.519	1.156.680	5.542.290	Telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	489.222	-	27.178	269.784	731.828	Vessels and equipment
Sub-jumlah	389.850.675	4.049.131	4.533.145	48.236.783	437.603.444	Subtotal
Aset sewaan						Leased assets
Tanah	58.591	-	-	(10.203)	48.388	Land
Instalasi dan mesin pembangkit	119.104.117	5.309.239	-	(79.489)	124.333.867	Installation and power plant
Sub-jumlah	119.162.708	5.309.239	-	(89.692)	124.382.255	Subtotal
Pekerjaan dalam pelaksanaan	102.810.172	43.725.864	-	(50.797.301)	95.738.735	Construction in progress
Aset tidak digunakan dalam operasi	5.839.312	-	494.861	709.820	6.054.271	Assets not used in operation
Jumlah	617.662.867	53.084.234	5.028.006	(1.940.390)	663.778.705	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Bangunan umum, waduk dan prasarana	11.370.209	1.770.520	18.659	72.700	13.194.770	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	54.488.643	8.203.245	2.460.834	-	60.231.054	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi	18.882.562	2.243.369	148.879	93.640	21.070.692	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	31.455.444	3.636.334	31.549	56.350	35.116.579	Distribution equipment
Perlengkapan umum	4.417.298	759.014	29.417	394.720	5.541.615	General equipment
Kendaraan bermotor	630.115	71.697	24.649	-	677.163	Motor vehicles
Material cadang	213.332	50.109	66.433	-	197.008	Spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	2.713.308	442.161	89.506	16.247	3.082.210	Telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	50.708	37.304	12.357	-	75.655	Vessels and equipment
Sub-jumlah	124.221.619	17.213.753	2.882.283	633.657	139.186.746	Subtotal
Aset sewaan						Leased assets
Instalasi dan mesin pembangkit	26.767.280	4.695.219	-	-	31.462.499	Installation and power plant
Aset tidak digunakan dalam operasi	4.356.223	623.541	402.164	449.282	5.026.882	Assets not used in operation
Jumlah	155.345.122	22.532.513	3.284.447	1.082.939	175.676.127	Total
Jumlah Tercatat	462.317.745				488.102.578	Net Carrying Value

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2014	2013	
Beban usaha	23.618.262	21.893.665	Operating expenses
Pekerjaan dalam pelaksanaan	109.206	15.307	Construction in progress
Beban lain-lain	454.587	623.541	Others charges
Jumlah	24.182.055	22.532.513	Total

Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu. Hak Guna Bangunan Perusahaan mulai jatuh tempo antara tahun 2016 sampai dengan 2044, namun dapat diperpanjang. Perusahaan dan entitas anak juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Perusahaan dan entitas anak.

The Company and its subsidiaries own several pieces of land with Rights to Use (Hak Pakai) and Building Use Rights (Hak Guna Bangunan). Rights to Use have no expiration date while Building Use Rights will expire starting from 2016 to 2044, but they are renewable by the Company. The Company and its subsidiaries also have several pieces of land, which are still being processed for extension and for transfer of certificate in the name of the Company and its subsidiaries.

Bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal dengan jumlah tercatat sebesar Rp 156.996.069 juta diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi dengan, PT Asuransi Jasa Indonesia pihak berelasi, sebagai penanggung utama, PT Tugu Kresna Pratama dan PT Asuransi Ramayana terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar US$ 21.274 juta dan Rp 989.328 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dan US$ 21.135 juta dan Rp 1.434.709 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Aset sewaan PLTU Tanjung Jati B 4 x 660 MW diasuransikan kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar JPY 363.895 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dan JPY 196.210 juta pada tanggal 31 Desember 2013. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan aset tetap selain bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, serta kapal dan perlengkapan.

Building, installation and power plant, transmission equipment and vessels with net carrying value of Rp 156,996,069 million were insured with several insurance companies, with PT Asuransi Jasa Indonesia, a related party, acting as the lead underwriter, PT Tugu Kresna Pratama and PT Asuransi Ramayana against fire and other possible risks with insurance coverage of US$ 21,274 million and Rp 989,328 million as of December 31, 2014 and US$ 21,135 million and Rp 1,434,709 million as of December 31, 2013. Leased assets PLTU Tanjung Jati B 4 x 660 MW were insured to PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia against fire and other possible risks with insurance coverage of JPY 363,895 million as of December 31, 2014 and JPY 196,210 million as of December 31, 2013. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured. The Company and its subsidiaries do not cover insurance protection for assets other than building, installation and power plant, transmission equipment, and vessels and equipment.

Aset sewaan - instalasi dan mesin pembangkit merupakan pembangkit tenaga listrik berdasarkan perjanjian dengan IPP dalam bentuk sewa pembiayaan sesuai dengan penerapan ISAK 8 serta PLTU Tanjung Jati B 4 x 660 MW.

Leased assets – installation and power plant represent certain power plants under agreement with IPPs which were accounted for as finance leases in accordance with ISFAS 8 and the PLTU Tanjung Jati B 4 x 660 MW power plant.

Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp 29.378.937 juta.

As of December 31, 2014, gross carrying amount of property, plant and equipment that have been fully depreciated and still in use amounted to Rp 29,378,937 million.

Nilai wajar aset tetap, kecuali pekerjaan dalam pelaksanaan, pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 647.561.229 juta.

Fair value of property, plant and equipment, excluding construction in progress, as of December 31, 2014 amounted to Rp 647,561,229 million.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment of property, plant and equipment as of the reporting date.

Pekerjaan Dalam Pelaksanaan

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi/ perbaikan sarana kelistrikan, sebagai berikut:

Construction In Progress

This account represents costs incurred in relation to the construction and renovation/betterment of power supply facilities, as follows:

	2014	2013	
Proyek penugasan -			Mandatory project -
Program percepatan			Fast track program
Pembangkitan	38.084.328	44.817.025	Power plants
Transmisi	8.016.732	7.163.865	Transmission
Jumlah	46.101.060	51.980.890	Total
Konstruksi rutin			Regular constructions
Pembangkitan	13.187.566	11.564.112	Power plants
Transmisi	32.481.777	29.085.977	Transmission
Distribusi	2.925.154	2.945.585	Distribution
Perlengkapan	205.531	162.171	Equipment
Jumlah	48.800.028	43.757.845	Total
Jumlah	94.901.088	95.738.735	Total

(i) Program percepatan

Program percepatan (*fast track program*) merupakan proyek yang ditugaskan Pemerintah kepada Perusahaan. Pekerjaan dalam pelaksanaan program percepatan termasuk pembayaran uang muka kepada kontraktor, biaya pinjaman serta pengeluaran lain yang dapat dikapitalisasi.

(i) Fast track program

The fast track program represents projects which are mandated by the Government to the Company. Construction in progress by the fast track program includes advance payments made to the contractors, borrowing costs and other capitalizable expenditures.

(ii) Konstruksi rutin

Pembangkitan

Pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan terutama merupakan PLTA Peusangan 88 MW, PLTU Asahan III 2x87 MW dan PLTG Kaltim 2x50 MW.

Transmisi

Pekerjaan dalam pelaksanaan transmisi terutama merupakan proyek jaringan transmisi T/L 500 kV Jawa – Bali, T/L 150 kV untuk luar Jawa-Bali, proyek gardu induk 150 kV serta proyek interkoneksi jaringan.

(ii) Regular constructions

Power Plants

Power plants under construction consist mainly of PLTA Peusangan 88 MW, PLTU Asahan III 2x87 MW and PLTG Kaltim 2x50 MW.

Transmission

Transmission under construction consists mainly of projects of transmission lines of T/L 500 kV in Java – Bali, T/L 150 kV outside Java – Bali, substations 150 kV and interconnection of transmission projects.

Distribusi

Pekerjaan dalam pelaksanaan distribusi terutama merupakan proyek jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah 20 kV serta proyek gardu distribusi.

Perlengkapan

Perlengkapan pekerjaan dalam pelaksanaan termasuk materi dan perlengkapan khusus yang digunakan untuk menunjang fungsi pembangkitan dan distribusi listrik.

Pekerjaan dalam pelaksanaan ini diperkirakan selesai antara tahun 2015 dan 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2014, estimasi persentase jumlah tercatat pekerjaan dalam pelaksanaan Perusahaan terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

Distribution

Distribution under construction consists mainly of projects of mid and low voltage distribution lines of 20 kV and distribution substation projects.

Equipment

Equipment under construction consist of specialized materials and equipment used to support the generation and distribution of electricity.

Constructions in progress are expected to be completed between 2015 and 2016.

As at December 31, 2014, the estimated percentage of completion of the Company's construction in progress projects are as follows:

No	Nama Proyek/*Project Name*	Nilai pekerjaan dalam pelaksanaan/ *Value of construction in progress*	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*
1	PLTU 2 Jateng - Adipala	9.809.378	98%
2	PLTU Sumut - Pangkalan Susu	5.120.908	99%
3	PLTU 3 Jatim - Tanjung Awar-awar	3.789.812	96%
4	PLTU Riau - Tenayan	2.959.716	93%
5	PLTU Kaltim - Teluk Balikpapan	2.489.600	86%
6	PLTU Kalteng - Pulang Pisau	1.799.106	86%
7	PLTU Kalbar 1 - Parit Baru	1.570.001	82%
8	PLTU Parit Baru Site Bengkayang	1.061.921	48%
9	PLTU 2 NTB - Lombok	918.145	93%
10	PLTU 3 Babel - Bangka	744.871	98%
	Lainnya/*Others*	64.637.630	2%-98%
	Jumlah/*Total*	**94.901.088**	

Informasi mengenai persentase penyelesaian yang disajikan dalam tabel diatas menggambarkan estimasi kemajuan tahap *engineering, procurement and construction.* Selanjutnya, masih perlu dilakukan sejumlah pengujian-pengujian sebelum proyek pekerjaan dalam pelaksanaan menerima sertifikat laik operasi.

The information about the percentage of completion disclosed in the table above indicates the estimated progress during the engineering, procurement and construction phase. There are still a number of tests that need to be performed during the commissioning phase before the projects are certified for operation.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke pekerjaan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Borrowing costs which were capitalized to construction in progress are as follows:

	2014	2013	
Program percepatan			Fast track program
Bunga pinjaman	1.435.210	2.521.878	Interest expense
Kerugian kurs mata uang asing	709.570	1.212.636	Loss on foreign exchange
Jumlah	2.144.780	3.734.514	Total
Konstruksi rutin			Regular constructions
Bunga pinjaman	796.555	417.276	Interest expense
Kerugian kurs mata uang asing	287.909	64.876	Loss on foreign exchange
	1.084.464	482.152	
Jumlah	3.229.244	4.216.666	Total

Aset Tidak Digunakan Dalam Operasi

Kerugian penurunan nilai aset sebesar Rp 408.446 juta tahun 2014 dan Rp 559.027 juta tahun 2013 dicatat sebagai beban usaha lain-lain (Catatan 46).

Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap akan direlokasi, belum digunakan dalam operasi serta aset tetap akan diperbaiki.

Aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi dijual seharga Rp 32.975 juta tahun 2014 dan Rp 223.192 juta tahun 2013. Nilai buku aset yang dijual tersebut telah Rp nihil, sehingga hasil penjualan aset merupakan keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi.

Manajemen berpendapat bahwa penurunan nilai aset tidak digunakan dalam operasi memadai untuk menutup risiko kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul dari aset tersebut.

Assets Not Used In Operations

Loss on impairment of property, plant and equipment amounting to Rp 408,446 million in 2014 and Rp 559,027 million in 2013, respectively are recorded as other operating expenses (Note 46).

Assets not used in operations comprised property, plant and equipment to be relocated, not yet used in operations and property, plant and equipment to be repaired.

Certain assets not used in operations were sold with a selling price of Rp 32,975 million in 2014 and Rp 223,192 million in 2013. The carrying value of such assets was Rp nil, hence the proceeds from the sale of assets represented a gain on the sale of assets not used on operations.

Management believes that impairment for assets not yet used in operations is adequate to cover possible loss on impairment on the value of such assets.

Proyek Sarulla

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 23 Januari 2004 sebagaimana diubah dengan addendum tanggal 6 Februari 2004, Perusahaan telah mengambil alih hak, kepentingan dan kewajiban Unocal North Sumatra Geothermal Ltd. (“UNSG”) sehubungan dengan perjanjian jual beli listrik tahun 1993 (“proyek Sarulla”), dan Perusahaan akan mengalihkan hak, kepentingan dan kewajiban tersebut kepada pihak lain yang ditunjuk kemudian. Pengambilalihan tersebut dilaksanakan dengan membayar kompensasi yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan.

Sarulla Project

Based on Deed of Assignment dated January 23, 2004 as amended by the addendum dated February 6, 2004, the Company has taken over the rights, participating interests and obligations of Unocal North Sumatra Geothermal Ltd. (“UNSG”) in relation to the electricity sell and purchase agreement in 1993 (the “Sarulla project”), and the Company will transfer such rights, participating interests and obligations to the other entity, which will be appointed later. The compensation paid by the Company to take over the rights was recorded as construction in progress.

Untuk melanjutkan kembali proyek Sarulla, Perusahaan mengadakan tender, yang dimulai pada tahun 2004 dan *letter of intent* kepada pemenang tender diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2005. Berdasarkan *letter of intent* ini, pada tanggal 14 Desember 2007, Perusahaan bersama PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"), Sarulla Operations Ltd., PT Medco Geopower Sarulla, Sarulla Power Asset Ltd. dan OrSarulla Inc. sepakat untuk melakukan jual beli listrik yang dibangkitkan dari PLTP Sarulla 330 MW melalui amandemen ESC serta pengalihan hak, kepentingan dan kewajiban (Deed of Assigment) atas Kontrak Operasi Bersama ("JOC") dan ESC Sarulla.

Kontrak tersebut telah diperbaharui dan perubahan terakhir dilakukan pada tanggal 4 April 2013, dimana Perusahaan telah menandatangani addendum kedua atas *Deed of Assigment* dan addendum ESC untuk PLTP Sarulla yang menyatakan bahwa atas transfer pengalihan hak, kepentingan dan kewajiban, Konsorsium Sarulla harus membayar kepada Perusahaan sejumlah US$ 70 juta yang dibayarkan sekaligus pada tanggal *financial close*. Perusahaan telah menerima uang sejumlah US$ 70 juta di tahun 2014.

To continue the Sarulla project, the Company organized a bidding process, which started in 2004, and a letter of intent was issued to the winning bidder on July 25, 2005. Based on such letter of intent, on December 14, 2007, the Company together with PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"), Sarulla Operations Ltd., PT Medco Geopower Sarulla, Sarulla Power Asset Ltd. and OrSarulla Inc. agreed to perform buy and sell of electricity, which is generated from PLTP Sarulla 330 MW by means of amendment of ESC and to transfer the rights, participating interests and obligations (Deed of Assignment) on the Joint Operation Contract ("JOC") and Sarulla ESC.

The contract has been amended and the latest amendment was signed on April 4, 2013, in which the Company signed the Second Amendment to the Deed of Assignment and Amendment of the ESC for PLTP Sarulla, which states that for the transfer of rights, interest, and obligation, the Sarulla Consortium has to pay US$70 million on the financial close date. The Company has received US$70 million in the year 2014.

7. PROPERTI INVESTASI

Akun ini merupakan tanah milik PJB yang terletak di Paiton - Jawa Timur, Pluit – Jakarta Utara dan Asahan - Sumatera Utara, yang disewakan kepada atau digunakan oleh PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas dan PT Bajradaya Sentranusa.

Estimasi nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 311.616 juta dan Rp 221.890 juta ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak masing-masing bidang tanah. Biaya tercatat atas properti investasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 233.057 juta dan Rp 159.330 juta.

7. INVESTMENT PROPERTIES

This account pertains to pieces of land owned by PJB located in Paiton – East Java, Pluit – North Jakarta and Asahan – North Sumatera, which are rented to or used by PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas and PT Bajradaya Sentranusa.

The estimated fair value of these investment properties as of December 31, 2014 and 2013 amounted to Rp 311,616 million and Rp 221,890 million respectively, which was determined based on the property tax assessment letters of each parcel of land. The cost of investment properties at December 31, 2014 and 2013 amounted to Rp 233,057 million and Rp 159,330 million, respectively.

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

8. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

Details of investments in associates and joint ventures are as follows:

	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Tahun operasi komersial/ *Commercial operations*	Persentase penyertaan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December 31* 2014 %	31 Desember/ *December 31,* 2013 %
Investasi pada entitas asosiasi/ *Investment in associates*					
PT Geo Dipa Energi	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2002	33,00	33,00
PT Unelec Indonesia	Jakarta	Penunjang penyedia tenaga listrik/ *Electrical supports*	1988	32,35	32,35
PT Mitra Energi Batam	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2004	30,00	30,00
PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2006	49,00	49,00
PT Dalle Energy Batam	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2006	20,00	20,00
PT Bajradaya Sentranusa	Asahan	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2010	38,54	26,06
PT Bukit Pembangkit Innovative	Palembang	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	40,25	40,25
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Jepara	Operasi dan pemeliharaan/ *Operational and maintenance*	2010	49,00	49,00
PT Tanjung Kasam Power	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2012	10.00	10.00
Ventura bersama/*Joint ventures*					
PT Rajamandala Electric Power	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	51,00	51,00
PT Perta Daya Gas	Jakarta	Transportasi dan penyimpanan LNG/ *Transportation and storage of LNG*	*)	35,00	35,00
PT Indo Pusaka Berau	Berau	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	2005	46,80	46,80
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	45,00	45,00
PT Crompton Prima Switchgear	Jakarta	Peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik/ *Electricity controller and distribution*	*)	49,00	-

*) Tahap pengembangan/*Development stage*

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut :

Changes in investments in associates and joint ventures are as follows :

	Jumlah tercatat 1 Januari 2014/ *Carrying amount January 1, 2014*	Penambahan (pengurangan)/ *Additions (deduction)*	Bagian atas laba (rugi) bersih entitas/ *Equity in net income (loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2014 *Carrying amount December 31, 2014*	
Entitas asosiasi					Associates
PT Geo Dipa Energi	-	-	-	-	PT Geo Dipa Energi
PT Unelec Indonesia	171.973	-	(41.384)	130.589	PT Unelec Indonesia
PT Mitra Energi Batam	103.966	(3.030)	435	101.371	PT Mitra Energi Batam
PT Sumber Segara Primadaya	681.783	(30.517)	320.548	971.814	PT Sumber Segara Primadaya
PT Dalle Energy Batam	67.931	-	4.024	71.955	PT Dalle Energy Batam
PT Bajradaya Sentranusa	299.965	(28.129)	84.141	355.977	PT Bajradaya Sentranusa
PT Bukit Pembangkit Innovative	433.438	90.712	84.531	608.681	PT Bukit Pembangkit Innovative
PT Komipo PJB	43.476	(30.327)	36.952	50.101	PT Komipo PJB
PT Tanjung Kasam Power	34.327	547	(6.417)	28.457	PT Tanjung Kasam Power
Sub jumlah	1.836.859	(744)	482.830	2.318.945	Sub total
Ventura bersama					Joint ventures
PT Perta Daya Gas	11.684	-	(11.684)	-	PT Perta Daya Gas
PT Indo Pusaka Berau	92.384	(2.060)	7.693	98.017	PT Indo Pusaka Berau
PT Rajamandala Electric Power	64.780	36.493	(758)	100.515	PT Rajamandala Electric Power
PT Energi Pelabuhan Indonesia	23.359	-	9.738	33.097	PT Energi Pelabuhan Indonesia
PT Crompton Power Switchgear	-	22.019	-	22.019	PT Crompton Power Switchgear
Sub jumlah	192.207	56.452	4.989	253.648	Sub total
Jumlah	2.029.066	55.708	487.819	2.572.593	Total

	Jumlah tercatat 1 Januari 2013/ *Carrying amount January 1, 2013*	Penambahan (pengurangan)/ *Additions (deduction)*	Bagian atas laba (rugi) bersih entitas/ *Equity in net income (loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2013 *Carrying amount December 31, 2013*	
Entitas asosiasi					Associates
PT Unelec Indonesia	166.260	-	5.713	171.973	PT Unelec Indonesia
PT Mitra Energi Batam	46.205	56.258	1.503	103.966	PT Mitra Energi Batam
PT Sumber Segara Primadaya	605.361	-	76.422	681.783	PT Sumber Segara Primadaya
PT Dalle Energy Batam	60.749	-	7.182	67.931	PT Dalle Energy Batam
PT Bajradaya Sentranusa	245.652	-	54.313	299.965	PT Bajradaya Sentranusa
PT Bukit Pembangkit Innovative	407.057	-	26.381	433.438	PT Bukit Pembangkit Innovative
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	39.900	(15.524)	19.100	43.476	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
PT Tanjung Kasam Power	-	13.000	21.327	34.327	PT Tanjung Kasam Power
Sub jumlah	1.571.184	53.734	211.941	1.836.859	Sub total
Ventura bersama					Joint ventures
PT Perta Daya Gas	8.219	26.250	(22.785)	11.684	PT Perta Daya Gas
PT Indo Pusaka Berau	-	85.496	6.888	92.384	PT Indo Pusaka Berau
PT Rajamandala Electric Power	46.036	18.336	408	64.780	PT Rajamandala Electric Power
PT Energi Pelabuhan Indonesia	-	19.636	3.723	23.359	PT Energi Pelabuhan Indonesia
Sub jumlah	54.255	149.718	(11.766)	192.207	Sub total
Jumlah	1.625.439	203.452	200.175	2.029.066	Total

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Summarized financial information in associates and joint ventures are as follows:

	2014	2013	
Jumlah aset	29.255.038	23.085.501	Total assets
Jumlah liabilitas	(19.998.719)	(15.275.867)	Total liabilities
Aset bersih	9.256.319	7.809.634	Net assets
Jumlah pendapatan tahun berjalan	6.991.150	6.299.901	Total revenue for the year
Laba bersih tahun berjalan	1.010.704	575.740	Net income for the year

Investasi pada entitas diatas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Perusahaan dan entitas anak.

The investments in the above companies are held primarily for long-term growth potential, since these companies are engaged in the electricity business industry similar to the Company and its subsidiaries.

PT Geo Dipa Energi

PT Geo Dipa Energi didirikan untuk melanjutkan pembangunan pembangkit tenaga listrik Dieng dan Patuha yang sebelumnya dimiliki Himpurna California Energy Limited dan Patuha Power Limited.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, jumlah tercatat investasi pada PT Geo Dipa Energi adalah Rp nihil.

Pada tahun 2014 dan 2013, Perusahaan tidak mengakui bagian rugi bersih PT Geo Dipa Energi masing-masing sebesar Rp 99.991 juta dan Rp 87.053 juta.

PT Geo Dipa Energi

PT Geo Dipa Energi was established to continue the development of Dieng and Patuha power plant projects previously owned by Himpurna California Energy Limited and Patuha Power Limited.

As of December 31, 2014 and 2013, the carrying amount of investment in PT Geo Dipa Energi is Rp nil.

In 2014 and 2013, the Company did not recognize net loss of PT Geo Dipa Energi amounting to Rp 99,991 million and Rp 87,053 million, respectively.

PT Mitra Energi Batam (“MEB”)

Pada tahun 2014, MEB mendeklarasikan dividen tahun buku 2013 sebesar Rp 3.030 juta yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun.

Pada tahun 2013, PLN Batam meningkatkan investasi saham MEB sebesar US$ 4.954.661 setara dengan Rp 56.258 juta tanpa mengubah persentase kepemilikan saham.

PT Mitra Energi Batam (“MEB”)

In 2014, MEB declared the 2013 dividends in the amount of Rp 3,030 million which was still outstanding as of year end.

In 2013, PLN Batam increased its investment in shares of MEB by US$ 4,954,661 equivalent to Rp 56,258 million without changing its percentage of ownership.

PT Sumber Segara Primadaya (“S2P”)

Pada tahun 2014, PJB memperoleh dividen tahun buku 2013 dari S2P sebesar US$ 2.450.000 setara dengan Rp 30.517 juta.

PT Sumber Segara Primadaya (“S2P”)

In 2014, PJB received the 2013 dividends from S2P amounting to US$ 2,450,000 equivalent to Rp 30,517 million.

PT Unelec Indonesia (“Unindo”)

Pada tahun 2014 dan 2013, Perusahaan tidak menerima dividen dari Unindo.

PT Bajradaya Sentranusa (“BDSN”)

Pada tahun 2014, PJB memperoleh dividen tahun buku 2013 dari BDSN sebesar US$ 2.422.639 (ekuivalen Rp 28.129 juta).

PT Bukit Pembangkit Innovative (“BPI”)

Pada tahun 2014, PJB dan NII meningkatkan investasi saham BPI masing-masing sebesar Rp 65.696 juta dan Rp 25.016 juta tanpa mengubah persentase kepemilikan saham.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (“KPJB”)

Pada tahun 2014 dan 2013, PJB memperoleh dividen tahun buku 2013 dan 2012 dari KPJB masing-masing sebesar Rp 30.327 juta dan Rp 15.524 juta.

PT Indo Pusaka Berau (“IPB”)

Pada tahun 2014, IP memperoleh dividen tahun buku 2013 dari IPB sebesar Rp 2.060 juta.

Pada tahun 2013, IP kehilangan hak mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasi IPB. Investasi sebesar Rp 85.496 juta dicatat sebagai entitas asosiasi.

PT Tanjung Kasam Power (“TJK”)

Pada tahun 2013, PLN Batam mempunyai pengaruh yang signifikan atas TJK. Pengaruh yang signifikan dinilai berdasarkan keterwakilan PLN Batam pada susunan Direksi TJK.

PT Perta Daya Gas (“PDG”)

Pada tahun 2013, IP melakukan penambahan investasi sebesar Rp 26.250 juta tanpa mengubah persentase kepemilikan.

PT Rajamandala Electric Power (“REP”)

Pada tahun 2014 dan 2013, IP melakukan penambahan investasi masing-masing sebesar Rp 36.493 juta dan Rp 18.336 juta tanpa mengubah persentase kepemilikan.

PT Energi Pelabuhan Indonesia (“EPI”)

Pada tahun 2013, HP dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mendirikan EPI untuk menyediakan pasokan energi listrik di wilayah pelabuhan. HP melakukan penyertaan saham awal pada EPI sebesar Rp 19.636 juta atau 45% saham EPI.

PT Unelec Indonesia (“Unindo”)

In 2014 and 2013, the Company did not receive dividends from Unindo.

PT Bajradaya Sentranusa (“BDSN”)

In 2014, PJB received the 2013 dividends from BDSN amounting to US$ 2,422,639 (equivalent to Rp 28,129 million).

PT Bukit Pembangkit Innovative (“BPI”)

In 2014, PJB and NII increased their investment in shares of BPI by Rp 65,696 million and Rp 25,016 respectively million without changing their percentage of ownership.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (“KPJB”)

In 2014 and 2013, PJB received the 2013 and 2012 dividends from KPJB amounting to Rp 30,327 million and Rp 15,524 million, respectively.

PT Indo Pusaka Berau (“IPB”)

In 2014, IP received the 2013 dividends from IPB amounting to Rp 2,060 million.

In 2013, IP lost the power to govern IPB’s financial and operating policies. An investment of Rp 85,496 million was recorded as investment in associate.

PT Tanjung Kasam Power (“TJK”)

In 2013, PLN Batam gained significant influence over TJK. The significant influence was indicated by PLN Batam’s representation in TJK’s Directors.

PT Perta Daya Gas (“PDG”)

In 2013, IP has increased investment to PDG by Rp 26,250 million without changing its percentage of ownership.

PT Rajamandala Electric Power (“REP”)

In 2014 and 2013, IP has increased investment to REP by Rp 36,493 million and Rp 18,336 million respectively without changing its percentage of ownership.

PT Energi Pelabuhan Indonesia (“EPI”)

In 2013, HP and PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) established EPI to supply electricity in the port area. HP made an initial investment in EPI amounting to Rp 19,636 million, or 45% shares of EPI.

PT Crompton Prima Switchgear

Pada tahun 2014, PLN Enjiniring dan CG International Holding Singapore PTE, LTD mendirikan PT Crompton Prima Switchgear untuk membuat peralatan yang digunakan untuk pendistribusian listrik. PLN Enjiniring melakukan penyertaan saham awal sebesar US$ 1,9 juta atau setara dengan Rp 22.019 juta.

PT Crompton Prima Switchgear

In 2014, PLN Enjiniring and CG International Holding Singapore PTE, LTD established PT Crompton Prima Switchgear, to manufacture equipment used for electricity distribution. PLN Enjiniring made an initial investment amounting to US$ 1.9 million equivalent to Rp 22,019 million.

9. PIUTANG PIHAK BERELASI / 9. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES

	2014	2013	
PT Perta Daya Gas	249.072	188.369	PT Perta Daya Gas
PT Geo Dipa Energi	76.500	-	PT Geo Dipa Energi
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	27.441	22.345	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
PT Tanjung Kasam Power	23.935	-	PT Tanjung Kasam Power
PT Dalle Energy Batam	960	5.314	PT Dalle Energy Batam
PT Mitra Energi Batam	3.712	65	PT Mitra Energi Batam
Jumlah	381.620	216.093	Total
Dikurangi bagian jangka pendek	282.791	40.061	Less current portion
Bagian jangka panjang	98.829	176.032	Long-term portion

PT Perta Daya Gas (“PDG”)

Pada tanggal 12 Juni 2013, IP memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US$ 18,837 juta kepada PDG untuk membiayai proyek *Compressed Natural Gas* (CNG) di PLTU Tambak Lorok, Semarang. Pada tanggal 28 November 2014, IP melakukan amandemen atas pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada PDG. Jangka waktu pinjaman berubah menjadi 6 tahun dan akan jatuh tempo 1 Desember 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga 6,5% per tahun. Jumlah bunga pokok pinjaman terutang selama masa pembangunan proyek *(Interest During Construction)* terhitung sejak tanggal *dropping* dana sampai tanggal 30 Mei 2014 dan akan dibayarkan secara penuh tanggal 1 Desember 2015. Pinjaman pokok akan ditagihkan setiap 6 bulan sekali melalui angsuran sebanyak 15 kali dari tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 1 Desember 2021. Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo terhutang atas pokok pinjaman ini sebesar US$ 18,192 juta atau setara dengan Rp 226.302 juta. Piutang lainnya sebesar Rp 22.770 juta merupakan piutang yang diantara lain atas piutang bunga dan biaya relokasi pegawai.

PT Perta Daya Gas (“PDG”)

On June 12, 2013, IP granted a long-term loan of US$ 18.837 million to PDG for the financing of the Compressed Natural Gas (CNG) project in PLTU Tambak Lorok, Semarang. On November 28, 2014, IP made an amendment to the loan given to PDG. The tenor of the loan was revised to 6 years and will mature on December 1, 2021. This loan bears interest at 6.5% per annum. The total interest on the principal during the construction of the project (Interest During Construction) effective from the cash dropping until May 30, 2014 and will be paid in full on December 1, 2015. The principal shall be collected every 6 months through 15 installments from December 1, 2015 until December 1, 2021. On December 31, 2014, the outstanding principal of the loan amounted to US$ 18.192 million, equivalent to Rp 226,302 million. Other receivables from PDG amounting to Rp 22,770 million represent, among others, interest receivables and cost of relocation of employees.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("KPJB")

Pada tanggal 29 Desember 2010, PJB menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada KPJB dalam bentuk *shareholder loan* dengan suku bunga 14% per tahun. Pinjaman ini bertujuan untuk memberikan KPJB dana cadangan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian pengembangan operasi dan pemeliharaan dengan PJB. KPJB berkewajiban untuk memiliki dana cadangan selama berlakunya perjanjian untuk 6 bulan operasi dan pemeliharaan pembangkit. Jangka waktu pinjaman 7 tahun sejak tanggal 29 Desember 2010. Pelunasan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 29 Desember dan cicilan pertama pokok piutang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2012.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("KPJB")

On December 29, 2010, PJB agreed to provide loans to KPJB, in the form of a shareholder loan with annual interest of 14% per annum. The purpose of this loan is to provide cash reserves for KPJB in order to comply with the contractual obligation stipulated in the Expansion Operation and Maintenance Agreement with PJB, which requires KPJB to, at any time of the contract term, maintain the cash reserves for 6 months operation and maintenance of power plant. The term of the loan is 7 years starting from December 29, 2010. The interest will be due every December 29 and the first installment of principal payment started on December 29, 2012.

PT Tanjung Kasam Power, PT Dalle Energy Batam dan PT Mitra Energi Batam

Piutang dari PT Tanjung Kasam Power dan PT Dalle Energy Batam merupakan piutang atas denda kontrak penyediaan tenaga listrik. Sebagian besar piutang dari PT Mitra Energi Batam merupakan piutang atas dividen yang dideklarasikan di tahun 2013.

Manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa piutang pihak berelasi dapat tertagih.

PT Tanjung Kasam Power, PT Dalle Energy Batam and PT Mitra Energi Batam

Receivable balance from PT Tanjung Kasam Power and PT Dalle Energy Batam represents receivables on penalty of power purchase contracts. Amount receivable from PT Mitra Energi Batam mainly represents dividends receivable declared in 2013.

The Company and its subsidiaries' management consider these receivables from related parties to be collectible.

PT Geo Dipa Energi

Piutang dari PT Geo Dipa Energi merupakan pinjaman yang diberikan untuk membantu PT Geo Dipa Energi membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi.

PT Geo Dipa Energi

Receivable balance from PT Geo Dipa Energi represents a loan given to assist PT Geo Dipa Energi to construct a geothermal power plant.

10. REKENING BANK DAN DEPOSITO BERJANGKA DIBATASI PENGGUNAANNYA

10. RESTRICTED CASH IN BANKS AND TIME DEPOSITS

	2014	2013	
Angsuran sewa pembiayaan dan jaminan operasi			Lease installments and operation guarantee
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura			Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore
JPY	5.472.504	5.059.278	JPY
US$	508.333	475.266	US$
Jaminan pembelian gas			Guarantee deposit for gas purchases
Deposito berjangka			Time deposits
Bank Mandiri* - pihak berelasi			Bank Mandiri* - related party
Rupiah	6.733	100	Rupiah
US$	-	853	US$
Rekening bank - Bank Central Asia - Rupiah	5.502	5.510	Cash in bank - Bank Central Asia - Rupiah
Jaminan bank garansi			Bank guarantee
Rekening bank			Cash in banks
Bank Rakyat Indonesia** - pihak berelasi - Rupiah	450	930	Bank Rakyat Indonesia** - related party - Rupiah
Bank Mandiri - pihak berelasi - Rupiah	-	46.585	Bank Mandiri - related party - Rupiah
Jaminan *letter of credit*			Letter of credit guarantee
Bank Negara Indonesia*** - pihak berelasi - US$	506	71.231	Bank Negara Indonesia*** - related party - US$
Jumlah	5.994.028	5.659.753	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			Interest rate per annum on time deposits
Rupiah	0,40% - 2,00%	3,07% - 4,21%	Rupiah
JPY	0,05% - 0,19%	0,02% - 0,17%	JPY
US$	0,40% - 0,51%	0,18% - 0,44%	US$

* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai Bank Mandiri/*Hereafter PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is referred to as Bank Mandiri*
** PT BRI (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai Bank Rakyat Indonesia/*Hereafter PT BRI (Persero) Tbk is referred to as Bank Rakyat Indonesia*
*** PT BNI (Persero) Tbk selanjutnya disebut sebagai Bank Negara Indonesia/*Hereafter PT BNI (Persero) Tbk is referred to as Bank Negara Indonesia*

Perusahaan menempatkan dana cadangan pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura sebesar JPY 52.495 juta dan US$ 40,9 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dan sebesar JPY 48.464 juta dan US$ 60,8 juta pada tanggal 31 Desember 2013 untuk memenuhi persyaratan *Financial Lease Agreement* (“FLA”).

The Company established a reserve account with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore amounting to JPY 52,495 million and US$ 40.9 million as of December 31, 2014 and amounting to JPY 48,464 million and US$ 60.8 million as of December 31, 2013 to fulfill the requirement of the Financial Lease Agreement (“FLA”).

Rincian rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of restricted cash in bank and time deposits in foreign currencies are as follows:

	2014		2013		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
US$	40.903.457	508.839	44.905.240	547.350	US$
JPY	52.494.647.420	5.472.504	43.550.639.086	5.059.278	JPY
Jumlah		5.981.343		5.606.628	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

11. ASET TIDAK LANCAR LAIN

11. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	2014	2013	
Beban ditangguhkan	40.634	111.925	Deferred charges
Biaya dibayar dimuka			Prepaid expenses
Pembelian gas	589.145	613.958	Gas purchased
Lain-lain	200.139	93.789	Others
Jumlah	789.284	707.747	Total
Uang muka			Advances
Pengembangan proyek	1.867.827	858.561	Project development
Pembelian batubara	849.302	818.360	Purchase of coal
Jumlah	2.717.129	1.676.921	Total
Aset takberwujud			Intangible assets
Biaya legal terkait pembaruan hak atas tanah	53.127	50.614	Legal costs to renew landrights
Piranti lunak	788.610	462.878	Software
Jumlah	841.737	513.492	Total
Investasi saham tidak terdaftar di bursa	20.654	8.186	Investment in non-listed shares
Jumlah	4.409.438	3.018.271	Total

Investasi saham tidak terdaftar di bursa

Investasi saham tidak terdaftar di bursa terdiri dari investasi PJB pada PT Rekind Daya Mamuju sebesar biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Amortisasi aset takberwujud

Beban amortisasi aset takberwujud di tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 140.938 juta dan Rp 124.035 juta.

Investment in non-listed shares

Investment in non-listed shares mainly consists of PJB's investment in PT Rekind Daya Mamuju, which is measured at cost less impairment.

Amortization of intangible assets

Amortization of intangible assets for 2014 and 2013 amounted to Rp 140,938 million and Rp 124,035 million, respectively.

12. KAS DAN SETARA KAS / 12. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2014	2013	
Kas	9.573	9.728	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Pihak berelasi			Related parties
Bank Rakyat Indonesia			Bank Rakyat Indonesia
Rupiah	6.798.423	5.134.065	Rupiah
US$	1.172.673	307.086	US$
JPY	2.514	15.739	JPY
EUR	282.805	34.719	EUR
Bank Mandiri			Bank Mandiri
Rupiah	2.975.548	3.859.216	Rupiah
US$	713.118	1.054.482	US$
EUR	171.781	19.362	EUR
JPY	3.547	316	JPY
Bank Negara Indonesia			Bank Negara Indonesia
Rupiah	3.997.858	4.180.131	Rupiah
US$	448.599	832.459	US$
JPY	135.566	43.578	JPY
CHF	5.873	-	CHF
EUR	339.810	31.173	EUR
Bank Tabungan Negara			Bank Tabungan Negara
Rupiah	29.360	-	Rupiah
Jumlah pihak berelasi	17.077.475	15.512.326	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Bank Bukopin			Bank Bukopin
Rupiah	3.250.243	3.831.845	Rupiah
US$	406.643	208.816	US$
JPY	46.182	58.758	JPY
EUR	-	37	EUR
Bank Internasional Indonesia			Bank Internasional Indonesia
Rupiah	22.441	153.718	Rupiah
US$	47.312	48.495	US$
EUR	2.600	2.886	EUR
Bank Danamon			Bank Danamon
Rupiah	77.586	53.652	Rupiah
US$	2.593	2.541	US$
Bank Central Asia			Bank Central Asia
Rupiah	575.717	226.131	Rupiah
US$	53.286	130.428	US$
JPY	-	100	JPY
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)			Others (each below 5% of total)
Rupiah	1.050.469	777.997	Rupiah
US$	672.511	209.416	US$
JPY	2.272	343	JPY
EUR	6.683	-	EUR
Jumlah pihak ketiga	6.216.538	5.705.163	Total third parties
Jumlah kas dan bank	23.303.586	21.227.217	Total cash on hand and in banks

	2014	2013	
Setara kas - deposito berjangka			Cash equivalents - time deposits
Pihak berelasi			Related parties
Bank Rakyat Indonesia			Bank Rakyat Indonesia
Rupiah	1.092.593	1.050.019	Rupiah
Bank Negara Indonesia			Bank Negara Indonesia
Rupiah	631.562	863.685	Rupiah
Bank Mandiri			Bank Mandiri
Rupiah	511.772	801.262	Rupiah
Jumlah pihak berelasi	2.235.927	2.714.966	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Bank Bukopin			Bank Bukopin
Rupiah	1.452.547	1.234.333	Rupiah
US$	-	241.799	US$
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)			Others (each below 5% of total)
Rupiah	4.722	5.000	Rupiah
US$	114.746	106.654	US$
Jumlah pihak ketiga	1.572.015	1.587.786	Total third parties
Jumlah deposito berjangka	3.807.942	4.302.752	Total time deposits
Jumlah Kas dan Setara Kas	27.111.528	25.529.969	Total Cash and Cash Equivalents
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			Interest rate per annum on time deposits
Rupiah	6,79% - 8,80%	7,5% - 8,25%	Rupiah
US$	1,68% - 2,40%	2,25%	US$

Rincian kas dan setara kas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut :

Details of cash and cash equivalents in foreign currencies are as follows :

	2014		2013		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
US$	291.919.659	3.631.481	257.787.719	3.142.175	US$
JPY	1.823.340.554	190.081	647.816.467	75.256	JPY
EUR	53.106.807	803.679	5.241.930	88.177	EUR
Lain-lain **)	472.085	5.873	3.575.214	43.578	Others **)
Jumlah		4.631.114		3.349.186	Total

*) Dalam jumlah penuh
**) Kas dan setara kas dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) In full amount
**) Cash and cash equivalents in other currencies are presented in US$ equivalents using the exchange rate prevailing at reporting date

13. INVESTASI JANGKA PENDEK / 13. SHORT-TERM INVESTMENTS

	2014	2013	
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak berelasi			Related parties
Bank Rakyat Indonesia			Bank Rakyat Indonesia
Rupiah	84.100	87.363	Rupiah
Bank Negara Indonesia			Bank Negara Indonesia
Rupiah	-	1.000	Rupiah
Bank Mandiri			Bank Mandiri
Rupiah	9.790	3.750	Rupiah
Jumlah pihak berelasi	93.890	92.113	Total related parties
Investasi lain-lain			Other investments
Rupiah	6.806	5.554	Rupiah
Jumlah investasi jangka pendek	100.696	97.667	Total short-term investments
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			Interest rate per annum on time deposits
Rupiah	6,79% - 10,07%	5,25% - 7,25%	Rupiah

Risiko kredit pada aset keuangan tersebut dianggap dapat diabaikan, sebab pihak lawan merupakan bank terkemuka dengan peringkat kredit eksternal berkualitas tinggi.

The credit risk on these financial assets is considered negligible, since the counterparties are reputable banks with high quality external credit ratings.

14. PIUTANG USAHA / 14. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

	2014	2013	
a. Berdasarkan langganan			a. By Debtor
Pihak berelasi			Related parties
Badan Usaha Milik Negara	584.802	409.167	State-owned enterprises
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.543)	(493)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang usaha pihak berelasi	582.259	408.674	Total of related parties accounts receivable
Pihak ketiga			Third parties
Umum	17.977.478	14.641.151	Public
TNI dan Polri	455.732	339.872	Indonesian Armed Forces
Institusi lainnya	1.074.450	772.168	Other institutions
Sub jumlah	19.507.660	15.753.191	Sub total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(595.052)	(464.925)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang usaha pihak ketiga	18.912.608	15.288.266	Total of third parties account receivable
Bersih	19.494.867	15.696.940	Net
b. Berdasarkan umur piutang usaha yang belum diturunkan nilainya			b. By age category of accounts receivable that are not impaired
Belum jatuh tempo	16.786.155	13.723.754	Not yet due
Lewat jatuh tempo			Past due
1 s/d 90 hari	2.239.551	1.625.902	1 to 90 days
91 s/d 360 hari	226.054	158.821	91 to 360 days
Lebih dari 360 hari	243.107	188.463	More than 360 days
Jumlah	19.494.867	15.696.940	Total
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai			Changes in allowance for impairment losses
Saldo awal tahun	(465.418)	(388.227)	Balance at beginning of year
Penambahan	(223.768)	(183.000)	Additions
Penghapusan	91.591	105.809	Write-off
Saldo akhir tahun	(597.595)	(465.418)	Balance at end of year

Piutang usaha Perusahaan, PLN Batam dan PLN Tarakan dijamin dengan uang jaminan langganan jika terjadi kegagalan pembayaran (Catatan 34).

The Company, PLN Batam and PLN Tarakan's accounts receivable are secured by the customers' security deposits in case of default (Note 34).

Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk secara kolektif untuk seluruh piutang yang telah lewat jatuh tempo.

Allowance for impairment losses were made collectively for all accounts receivable which are past due.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang adalah cukup. Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah piutang Perusahaan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai adalah sebesar Rp 16.786.155 juta. Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas yang buruk karena Perusahaan memiliki jumlah pelanggan yang besar, tersebar mencakupi segmen pasar dan area geografis yang luas di seluruh Indonesia. Kesimpulan ini didukung juga oleh data historis kolektibilitas Perusahaan atas piutang usaha yang baik selama beberapa tahun.

Management believes that the allowances made for impairment losses are adequate. At December 31, 2014, the Company has Rp 16,786,155 million accounts receivable balance that is neither past due nor impaired. The Company believes there is no heightened risk of poor credit quality of accounts receivable because it has a broad customer base, dispersed across varying market segments and geographic locations throughout Indonesia. This assessment is also supported by the Company's good historical collection rate of accounts receivable across the years.

15. PIUTANG SUBSIDI LISTRIK / 15. RECEIVABLES ON ELECTRICITY SUBSIDY

	2014	2013	
Tahun anggaran			Budget years
2013	-	21.793.929	2013
2014	19.280.861	-	2014
Jumlah	19.280.861	21.793.929	Total

Dalam tahun 2014, Perusahaan telah menerima piutang subsidi listrik tahun anggaran 2013 sebesar Rp 21.793.929 juta.

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Tidak ada jumlah yang diklasifikasikan sebagai lewat jatuh tempo sehubungan dengan piutang tersebut. Risiko kredit pada piutang subsidi listrik dianggap dapat diabaikan, sebab pihak lawan merupakan Pemerintah Indonesia.

In 2014, the Company collected receivables on electricity subsidy for budget year 2013 amounting to Rp 21,793,929 million.

No impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. No amounts in relation to these receivables are classified as past due. The credit risk on receivables on electricity subsidy is considered negligible, since the counterparty is the Government of Indonesia.

16. PIUTANG LAIN-LAIN / 16. OTHER RECEIVABLES

	2014	2013	
Uang jaminan langganan	41.111	3.272.957	Customers security deposits
Karyawan	396.728	355.076	Employees
Lain-lain	750.494	1.301.382	Others
Jumlah	1.188.333	4.929.415	Total
Dikurangi bagian jangka pendek	866.948	4.625.113	Less current portion
Bagian jangka panjang	321.385	304.302	Long-term portion

Uang Jaminan Langganan

Uang jaminan langganan merupakan piutang dari pelanggan yang melakukan penyambungan baru dan perubahan daya sejak 1 Januari 2011 hingga 30 Juni 2013. Pelayanan yang dilakukan tidak dikenakan uang jaminan langganan pada saat melakukan penyambungan baru.

Pada tahun 2013, manajemen menerbitkan peraturan baru yang mensyaratkan uang jaminan langganan sehubungan dengan penyambungan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan mengakui jumlah piutang sebesar Rp 41.111 juta dan Rp 3.272.957 juta dari penerapan peraturan baru tersebut.

Customers Security Deposits

Customers security deposits represent receivables from customers for new electricity connections and electricity power upgrades from January 1, 2011 through June 30, 2013. These services were not subject to security deposits at the time of connection.

In 2013, the management issued a new regulation requiring customers deposits for those connections. As of December 31, 2014 and 2013, the Company recognized a total outstanding receivables of Rp 41,111 million and Rp 3,272,957 million as a result of the implementation of the new regulation.

Karyawan

Piutang karyawan merupakan pinjaman kepemilikan rumah. Pelunasan piutang dilakukan melalui pemotongan gaji.

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Tidak ada jumlah yang diklasifikasikan sebagai lewat jatuh tempo sehubungan dengan piutang tersebut. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa piutang tersebut dapat tertagih.

Employees

Account receivables from employees represent housing loans, which are paid monthly through salary deduction.

No impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. No amounts in relation to these receivables are classified as past due. The Company's management considers these receivables to be collectible.

17. PERSEDIAAN / 17. INVENTORIES

	2014	2013	
Bahan bakar dan pelumas	7.895.486	6.966.794	Fuel and lubricants
Persediaan umum	2.232.145	2.555.660	General supplies
Switchgear dan jaringan	841.845	1.061.564	Switchgear and networking
Alat pengukur dan pengendali	485.422	563.322	Meter recording device and control equipment
Transformator	189.428	241.133	Transformers
Kabel	78.145	93.737	Wire
Jumlah	11.722.471	11.482.210	Total
Penyisihan penurunan nilai	(114.611)	(138.746)	Allowance for decline in value
Bersih	11.607.860	11.343.464	Net
Mutasi penyisihan penurunan nilai			Changes in allowance for decline in value
Saldo awal tahun	(138.746)	(160.003)	Balance at beginning of year
Pemulihan (penambahan)	24.135	21.257	Recovery (additions)
Saldo akhir tahun	(114.611)	(138.746)	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan.

Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses on the decline in value of inventories.

The Company and its subsidiaries do not have any insurance coverage to cover the possible losses in inventories.

18. PAJAK DIBAYAR DIMUKA / 18. PREPAID TAXES

	2014	2013	
Pembayaran dimuka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	2.164.451	1.994.986	Prepayment of Tax Assessment Letter for Underpayment
Pajak penghasilan badan lebih bayar			Overpayment of corporate income tax
Perusahaan			The Company
2014	147.993	-	2014
2013	1.998.693	1.998.693	2013
2012	130.775	130.775	2012
Entitas anak			Subsidiaries
2014	84.704	-	2014
2013	79.484	79.484	2013
2012	-	12.211	2012
Pajak pertambahan nilai	283.363	180.963	Value added tax
Jumlah	4.889.463	4.397.112	Total

Lihat Catatan 47 untuk informasi mengenai beban pajak penghasilan dan surat ketetapan pajak.

Refer to Note 47 for income tax expense information and tax assessment letters.

19. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA / 19. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

	2014	2013	
Biaya dibayar dimuka			Prepaid expenses
Premi asuransi	156.746	147.559	Insurance
Sewa	150.024	15.627	Lease
Gaji dan tunjangan	10.358	357.378	Salaries and allowances
Lain-lain	214.234	193.682	Others
Sub jumlah	531.362	714.246	Subtotal
Uang muka			Advances
Pembelian barang	832.183	122.369	Purchases
Lain-lain	425.179	476.310	Others
Sub jumlah	1.257.362	598.679	Subtotal
Jumlah	1.788.724	1.312.925	Total

20. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA

Modal saham

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar Rp 63.000.000 juta yang terbagi atas 63.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2001, sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 43 tanggal 26 Oktober 2001 dari Haryanto S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui antara lain :

- Melakukan konversi utang Perusahaan kepada Pemerintah sebesar Rp 28.781.355 juta, yang berasal dari tunggakan bunga dan denda penerusan pinjaman menjadi tambahan penyertaan modal Pemerintah. Konversi utang menjadi penyertaan modal telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai surat No. S-352/MK.06/2001 tanggal 20 Juni 2001.

- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 28.781.354 juta, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp 46.107.154 juta, terbagi atas 46.107.154 saham dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham.

Pada tanggal 1 Agustus 2001, tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2001.

Pada tanggal 4 Maret 2011, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2011 sehubungan dengan tambahan penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan sebanyak 90.226 saham atau sebesar Rp 90.226 juta. Tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh saham milik Pemerintah pada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

20. CAPITAL STOCK AND RETAINED EARNINGS

Capital stock

The Company's shares of stock are wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia.

The Company has authorized capital of Rp 63,000,000 million consisting of 63,000,000 shares, with par value of Rp 1 million per share.

Based on The Extraordinary Stockholders' General Meeting dated July 18, 2001, as stated in Deed No. 43 dated October 26, 2001 of Haryanto, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved to :

- Converting the Company's liability to the Government of Rp 28,781,355 million, which arose from overdue interest and penalty on two-step loans, into Government Equity Participation. The conversion was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No. S-352/MK.06/2001 dated June 20, 2001.

- Increasing the subscribed and paid-up capital by Rp 28,781,354 million, resulting in the Company's total subscribed and paid-up capital of Rp 46,107,154 million consisting of 46,107,154 shares with par value of Rp 1 million per share.

On August 1, 2001, the Government issued Government Regulation No. 61 year 2001 in relation to the increase in Government equity participation in the Company.

On March 4, 2011, the Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 20 year 2011 relating to the increase in the Government's equity participation in the Company, consisting of 90,226 shares or an equivalent of Rp 90,226 million. The increase in the Government's equity participation in the Company is through the transfer of the Government's share in PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Berdasarkan keputusan pemegang saham Perusahaan diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. KEP-118/MBU/2011 tanggal 27 Mei 2011, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No. 4 tanggal 5 Agustus 2011 dari Lenny Janis Ishak S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pengeluaran saham baru Perusahaan untuk diambil bagian oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp 90.226 juta atau sebanyak 90.226 saham. Penambahan penerbitan saham kepada Pemerintah Republik Indonesia berasal dari pengalihan 21.674 saham milik Pemerintah Republik Indonesia pada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna kepada Perusahaan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta pengalihan saham PT Pelayaran Bahtera Adhiguna dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan di tahun 2011.

Based on the decision of the Company's shareholders at the General Shareholders Meeting No. KEP-118/MBU/2011, dated on May 27, 2011, as stated in Deed No. 4, dated August 5, 2011 of Lenny Janis Ishak S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved the new issuance of the Company's shares as stocks to the Government of Republic of Indonesia in the amount of Rp 90,226 million, equivalent to 90,226 shares. The additional issuance of shares to the Government of the Republic of Indonesia is for the planned transfer of 21,674 shares of the Government of the Republic of Indonesia in PT Pelayaran Bahtera Adhiguna to the Company. The Decision has been effective since the date the Company received the Deed of Transfer of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna shares from the Government of the Republic of Indonesia to the Company in 2011.

Saldo laba

Saldo laba terdiri dari:

i. Saldo laba yang ditentukan penggunaannya

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba yang dicadangkan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp 19.108.528 juta atau 41% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

ii. Saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya

Saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 46.814.284 juta dan Rp 35.030.871 juta.

Retained earnings

Retained earnings cosist of:

i. Appropriated retained earnings

Under Indonesian Limited Company Law, the Company is required to set up a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's subscribed and paid up capital.

The balance of the appropriated retained earnings as at December 31, 2014 and 2013 is Rp 19,108,528 million or 41% of the Company's subscribed and paid up capital.

ii. Unappropriated retained earnings

The balance of the unappropriated retained earnings as at December 31, 2014 and 2013 is Rp 46,814,284 million and Rp 35,030,871 million, respectively.

Dividen per lembar saham

Pada tahun 2013, Perusahaan membagikan total dividen kas untuk tahun 2012 sejumlah Rp 1.443.800 juta atau Rp 31.253 (nilai penuh) per lembar saham.

Dividends per share

In 2013, the Company paid a total dividend for 2012 of Rp 1,443,800 million or Rp 31,253 (full amount) per share.

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah yang diterima Perusahaan yang statusnya belum ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital represents the Government's additional equity participation received by the Company of which the status has not been determined, with details as follows:

	2014	2013	
Bantuan proyek	16.706.712	16.706.712	Project aid
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	34.512.089	31.955.283	List of Project Fund
Bantuan pemerintah daerah dan lainnya	1.278.092	1.239.409	Regional government participation and others
Jumlah	52.496.893	49.901.404	Total

Bantuan proyek merupakan bantuan luar negeri untuk bidang kelistrikan yang diteruskan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") merupakan penerimaan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk proyek kelistrikan melalui Departemen Pertambangan dan Energi.

Bantuan pemerintah daerah antara lain berupa tanah dan jaringan listrik yang disumbangkan kepada Perusahaan.

Jumlah aset yang didonasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang telah dicatat sebagai penambahan aset tetap dan tambahan modal disetor sepanjang tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 2.595.489 juta dan Rp 4.971.059 juta.

Project aid represents overseas aid for electricity projects, which was channelled by the Government of the Republic of Indonesia to the Company.

The List of Project Fund ("DIPA") represents electricity projects received from the Government of the Republic of Indonesia through the Department of Mining and Energy.

Regional government participation represents land and electricity equipment donated by the regional government to the Company.

Total amount of assets contributed by the Government of the Republic of Indonesia that have been recognized as additions to property, plant and equipment and additional-paid-in capital in 2014 and 2013 amounted to Rp 2,595,489 million and Rp 4,971,059 million, respectively.

22. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan penerimaan dari pelanggan yang mana jasa penyambungan terkait belum diselesaikan oleh Perusahaan. Rincian pendapatan ditangguhkan adalah sebagai berikut:

22. DEFERRED REVENUE

This account represents connection fees received from customers for which the connection services have not been completed by the Company. Details of the deferred revenue balance are as follows:

	2014	2013	
Saldo awal tahun	990.913	873.230	Balance at beginning of year
Penerimaan tahun berjalan	5.939.976	6.145.482	Additions during the year
Diakui sebagai pendapatan tahun berjalan	(5.623.913)	(6.027.799)	Recognized as revenue during the year
Saldo akhir tahun	1.306.976	990.913	Balance at end of year

Di tahun 2014, Perusahaan menerapkan ISAK 27 secara retrospektif. Oleh sebab itu, Perusahaan menyajikan kembali sejumlah akun-akun laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2013 (lihat Catatan 56).

In 2014, the Company adopted ISFAS 27 retrospectively. Consequently, the Company restated a number of financial statement line items as of and for the year ended December 31, 2013 (see Note 56).

23. PENERUSAN PINJAMAN

Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perusahaan untuk membiayai proyek-proyek Perusahaan. Rincian penerusan pinjaman adalah sebagai berikut:

23. TWO-STEP LOANS

This account represents overseas, collateral-free loans of the Government of the Republic of Indonesia which are re-loaned to the Company to finance its projects. The details of the two-step loans are as follows:

	31 Desember/December *31*, 2014					
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Jumlah/ *Amount*	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturities*	Bagian jangka panjang/ *Long-term portion*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum* %	Periode/ *Period* Tahun/Year
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)						
US$						
IBRD - 3845 IND - 812	7.845.042	97.592	97.592	-	IBRD + 0,5%	1995 - 2015
IBRD - 3978 IND - 893	13.352.281	166.102	166.102	-	IBRD + 0,5%	1996 - 2016
IBRD - 4712 & 7758 IND - 1165	75.431.470	938.367	110.600	827.767	IBRD + 0,5%	2004 - 2023
IBRD - 7905 IND - 1235	18.675.969	232.329	-	232.329	IBRD + 0,5%	2010 - 2034
IBRD - 7940 IND - 1238	58.013.178	721.684	-	721.684	IBRD + 0,5%	2011 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	4.090.084	50.881	-	50.881	IBRD + 0,5%	2012 - 2035
IBRD 8280 ID - 1256	-	-	-	-	LIBOR + Var Spread + 0,5%	2014 - 2034
Asian Development Bank (ADB)						
Rupiah						
ADB - 1032 INO - 540	-	163.530	77.779	85.751	ADB + 2,75%	1991 - 2016
ADB - 1092 INO - 580	-	59.725	29.862	29.863	ADB + 3,75%	1991 - 2016
USD						
ADB - 1397 INO - 878	13.796.135	171.624	171.624	-	ADB + 0,5%	1995 - 2015
ADB - 1982 INO - 1170	135.135.356	1.681.084	67.428	1.613.656	ADB + 0,5%	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	91.786.663	1.141.826	45.798	1.096.028	ADB + 0,5%	2004 - 2027
ADB - 2619 INO - 1236	25.304.046	314.782	-	314.782	ADB + 0,6% - 0,4% + 0,5%	2010 - 2035
ADB 3015 INO - 1255	18.186.123	226.235	-	226.235	ADB + 0,60% + 0,5%	2014 - 2033
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KFW)						
EUR						
KFW - 95.65.136 - 934a	6.491.647	98.239	16.373	81.866	1,25% - 5,36% dan/and KFW + 0,5%	1996 - 2020
KFW - 9024 - 1157	5.999.845	90.798	45.399	45.399	1,25% - 5,36% dan/and KFW + 0,5%	2002 - 2016
KFW - 10599 IND - 1179	8.243.831	124.756	35.645	89.111	4,86% + 0,5%	2003 - 2018
US$						
KFW - 10598 IND - 1183	5.496.154	68.372	27.349	41.023	4,75% + 0,5%	2004 - 2017
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)						
Yen						
JBIC IP 512 - 1163	50.188.272.000	5.232.067	275.372	4.956.695	1,8% + 0,5%	2004 - 2033
JBIC IP 513 - 1164	15.317.306.000	1.596.811	84.043	1.512.768	1,8% + 0,5%	2004 - 2033
JBIC IP 515 - 1177	53.896.397.151	5.618.635	288.135	5.330.500	1,3% + 0,5%	2004 - 2034
JBIC IP 516 - 1196	540.027.000	56.297	1.908	54.389	0,75% + 0,5%	2005 - 2044
JBIC IP 517 - 1178	4.517.356.107	470.929	-	470.929	0,75% + 0,5%	2004 - 2044
JBIC IP 518 - 1187	1.126.291.790	117.415	26.092	91.322	2,01% + 1,99% + 0,5%	2004 - 2019
JBIC IP 525 - 1197	16.068.683.783	1.675.141	54.922	1.620.219	0,75% + 0,5%	2005 - 2045
JBIC IP 526 - 1198	677.399.208	70.618	2.315	68.303	0,75% + 0,5%	2005 - 2045
JBIC IP 527 - 1211	9.620.205.639	1.002.895	-	1.002.895	1,80%	2007 - 2037
JBIC IP 532 - 1214	998.253.477	104.067	-	104.067	1,25%	2006 - 2047
JBIC IP 537 - 1220	260.681.092	27.176	-	27.176	2%	2009 - 2037
JBIC IP 538 - 1221	8.992.547.059	937.462	-	937.462	1,25%	2009 - 2047
JBIC IP 539 - 1222	3.652.714.350	380.791	-	380.791	2%	2009 - 2037
JBIC IP 555 - 1231	1.140.925.306	118.940	-	118.940	0,012%	2010 - 2039
JBIC IP xxx - 1188	497.405.153	51.854	12.963	38.891	2,01% + 2,01% + 0,5%	2005 - 2018
JBIC IP xxx - 1192	6.483.466.965	675.894	193.113	482.781	1,96% + 2,51% + 0,5%	2005 - 2018
JBIC LA No 1 - 1216	5.585.863.524	582.320	110.027	472.293	3,96% + 0,5%	2008 - 2020
JBIC LA No 2 - 1219	1.853.289.104	193.203	49.375	143.828	3,45% + 0,5%	2008 - 2018
JBIC LA No 3 - 1233	817.403.547	85.213	16.988	68.225	3,96%	2010 - 2020
JBIC LA No 4 - 1234	2.576.183.100	268.564	54.808	213.756	3,79%	2010 - 2020
JBIC LA No 5 - 1218	4.343.992.318	452.856	76.071	376.785	3,53% + 0,5%	2008 - 2020
JBIC IP - 1243	1.643.426.200	171.326	36.279	135.047	1,82% + 1,04% + 0,5%	2012 - 2022
Midland Bank Public Limited Company						
Rupiah						
Midland Bank - 798	-	89.619	14.937	74.682	SBI + 1%	1995 - 2020
Midland Bank - 818	-	7.545	1.372	6.173	SBI + 1%	1995 - 2020
Banque Paribas						
GBP						
Banque Paribas 1063	8.096.930	156.840	19.605	137.235	3,343% + 0,5%	1998 - 2022
EUR						
Banque Paribas - 1158	14.353.745	217.219	58.723	158.496	7,89% + 0,5%	2002 - 2018
Banque Paribas - 1176	6.074.622	91.929	26.265	65.664	4,76% + 0,5%	2004 - 2018
Calyon and BNP Paribas						
EUR						
Calyon BNP Paribas - 1175	2.684.030	40.618	10.155	30.464	5,32% + 0,5%	2004 - 2018
BNP Paribas & Calyon 1206	28.285.485	428.052	77.828	350.224	4,46% + 0,5%	2006 - 2020
Kerajaan Belgia/ Kingdom of Belgium						
EUR						
Kerajaan Belgia - 1185	2.146.209	32.479	3.419	29.060	0,50%	2005 - 2033
Fortis Bank Belgia -1186	781.583	11.828	4.731	7.097	4,82% + 0,5%	2005 - 2017
Efic Australia - 1071 AUD	10.819.093	110.552	14.741	95.811	4%	1997 - 2022
China Exim Bank 1181 - US$	74.299.758	924.289	231.072	693.217	3% + 0,5%	2003 - 2018
China Exim Bank 1248 - US$	15.741.837	195.828	-	195.828	3% + 0,5%	2013 - 2033
MKB Hungaria 1180 - US$	2.194.864	27.304	7.801	19.503	4,81% + 0,5%	2005 - 2018
AG Francaise 101901F - 1237 - US$	24.157.672	300.521	-	300.521	AFD + 0,47%+0,5%	2010 - 2025
AFD - 1254 - US$	18.059.547	224.661	-	224.661	LIBOR + 0,89% + 0,5%	2013 - 2028
		29.097.684	2.644.611	26.453.073		

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

	31 Desember/*December 31,* 2013					
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Jumlah/ *Amount*	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturities*	Bagian jangka panjang/ *Long-term portion*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum* %	Periode/ *Period **)* Tahun/Year
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)						
US$						
IBRD - 3761 IND - 773	20.372.558	248.321	248.321	-	IBRD + 0,5%	1995 - 2014
IBRD - 3845 IND - 812	23.535.127	286.869	191.246	95.623	IBRD + 0,5%	1995 - 2015
IBRD - 3978 IND - 893	26.704.562	325.502	162.751	162.751	IBRD + 0,5%	1996 - 2015
IBRD - 4712 & 7758 IND - 1165	82.718.968	1.008.261	106.502	901.759	IBRD + 0,5%	2004 - 2023
IBRD - 7905 IND - 1235	18.718.505	228.160	-	228.160	IBRD + 0,5%	2010 - 2034
IBRD - 7940 IND - 1238	27.335.866	333.197	-	333.197	IBRD + 0,5%	2011 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	3.310.408	40.351	-	40.351	IBRD + 0,5%	2012 - 2035
Asian Development Bank (ADB)						
Rupiah						
ADB - 1032 INO - 540	-	234.078	70.548	163.530	ADB + 2,75%	1991 - 2016
ADB - 1092 INO - 580	-	89.588	29.863	59.725	ADB + 3,75%	1991 - 2016
US$						
ADB - 1320 INO - 795	16.744.314	204.096	204.096	-	ADB + 0,5%	1996 - 2014
ADB - 1397 INO - 878	26.309.496	320.686	152.525	168.161	ADB + 0,5%	1995 - 2015
ADB - 1982 INO - 1170	138.621.818	1.689.661	54.013	1.635.648	ADB + 0,5%	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	92.067.756	1.122.214	31.418	1.090.796	ADB + 0,5%	2004 - 2027
ADB - 2619 INO - 1236	18.246.513	222.407	-	222.407	ADB + 0,6% - 0,4% + 0,5%	2010 - 2035
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KFW)						
Rupiah						
KFW - 92.65.315 - 749	-	4.728	4.728	-	7,6% - 13,1%	1993 - 2014
KFW - 92.66.107 - 748	-	6.823	6.823	-	7,6% - 13,1%	1993 - 2014
KFW - 92.66.115 - 747	-	1.140	1.140	-	7,6% - 13,1%	1993 - 2014
EUR						
KFW - 95.65.136 - 934a	7.573.607	127.399	18.200	109.199	1,25% - 5,36% dan/and KFW + 0,5%	1996 - 2020
KFW - 9024 - 1157	8.999.806	151.389	50.463	100.926	1,25% - 5,36% dan/and KFW + 0,5%	2002 - 2016
KFW - 10599 IND - 1179	10.599.257	178.295	39.621	138.674	4,86% + 0,5%	2003 - 2018
US$						
KFW - 10598 IND - 1183	7.694.616	93.790	26.797	66.993	4,75% + 0,5%	2004 - 2017
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)						
JPY						
JBIC IP 512 - 1163	52.829.760.000	6.137.170	306.859	5.830.311	1,8% + 0,5%	2004 - 2033
JBIC IP 513 - 1164	16.123.480.000	1.873.046	93.653	1.779.393	1,8% + 0,5%	2004 - 2033
JBIC IP 515 - 1177	56.133.138.186	6.520.919	318.094	6.202.825	1,8% + 0,5%	2004 - 2034
JBIC IP 516 - 1196	558.369.285	64.865	2.131	62.734	0,75% + 0,5%	2005 - 2044
JBIC IP 517 - 1178	4.517.356.107	524.776	-	524.776	0,75% + 0,5%	2004 - 2044
JBIC IP 518 - 1187	1.376.578.854	159.916	29.076	130.840	2,01% + 1,99% + 0,5%	2004 - 2019
JBIC IP 525 - 1197	16.033.188.454	1.862.556	-	1.862.556	0,75% + 0,5%	2005 - 2045
JBIC IP 526 - 1198	677.399.208	78.693	-	78.693	0,75% + 0,5%	2005 - 2045
JBIC IP 527 - 1211	8.503.377.874	987.827	-	987.827	1,80%	2007 - 2037
JBIC IP 532 - 1214	958.463.273	111.344	-	111.344	1,25%	2006 - 2047
JBIC IP 537 - 1220	224.798.026	26.115	-	26.115	2%	2009 - 2037
JBIC IP 538 - 1221	6.847.007.330	795.409	-	795.409	1,25%	2009 - 2047
JBIC IP 539 - 1222	1.840.163.510	213.770	-	213.770	2%	2009 - 2037
JBIC IP 555 - 1231	1.043.957.697	121.275	-	121.275	0,01%	2010 - 2039
JBIC IP xxx - 1188	621.756.443	72.229	14.446	57.783	2,01% + 2,01% + 0,5%	2005 - 2018
JBIC IP xxx - 1192	8.335.886.095	968.370	215.193	753.177	1,96% + 2,51% + 0,5%	2005 - 2018
JBIC LA No 1 - 1216	6.641.289.524	771.511	122.608	648.903	3,96% + 0,5%	2008 - 2020
JBIC LA No 2 - 1219	2.326.913.104	270.314	55.020	215.294	3,46% + 0,5%	2008 - 2018
JBIC LA No 3 - 1233	980.359.547	113.887	18.930	94.957	3,96%	2010 - 2020
JBIC LA No 4 - 1234	3.101.925.100	360.347	61.075	299.272	3,79%	2010 - 2020
JBIC LA No 5 - 1218	5.073.698.318	589.405	84.769	504.636	3,53% + 0,5%	2008 - 2020
JBIC IP - 1243	1.991.426.200	231.342	-	231.342	1,82% + 1,04% + 0,5%	2012 - 2022
Midland Bank Public Limited Company						
Midland Bank - 798	-	104.555	14.936	89.619	SBI + 1%	1995 - 2020
Midland Bank - 818	-	8.917	1.372	7.545	SBI + 1%	1995 - 2020
Banque Paribas						
Banque Paribas 1063- GBP	9.109.046	183.061	20.340	162.721	3,84%	1998 - 2022
EUR						
Banque Paribas - 1158	18.369.755	309.006	67.554	241.452	7,89% + 0,5%	2002 - 2018
Banque Paribas - 1176	7.810.261	131.380	29.196	102.184	4,76% + 0,5%	2004 - 2018
Calyon and BNP Paribas						
EUR						
Calyon BNP Paribas - 1175	3.355.052	56.436	11.287	45.149	5,32% + 0,5%	2004 - 2018
BNP Paribas & Calyon 1206	33.428.444	562.315	86.489	475.826	4,46% + 0,5%	2006 - 2020
Fortis Bank Belgia -1186 EUR	1.094.220	18.406	5.259	13.147	5,32%	2005 - 2017
AG Francaise 101901F - 1237 - US$	18.305.418	223.125	-	223.125	AFD + 0.47%+0.5%	2010 - 2025
Efic Australia - AUD 1071 - US$	12.261.639	133.353	15.688	117.665	4%	1997 - 2022
China Exim Bank 1181 - US$	92.874.698	1.132.049	226.409	905.640	3% + 0,5%	2003 - 2018
MKB Hungaria 1180 - US$	2.821.968	34.397	7.644	26.753	4,81% + 0,5%	2005 - 2018
Kerajaan Belgia - 1185 - EUR	2.259.177	38.002	1.900	36.102	0,50%	2005 - 2033
Jumlah/*Total*		32.707.043	3.208.983	29.498.060		

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*
**) Termasuk masa tenggang pembayaran/*Include grace periods in terms of payments*

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga penerusan pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian penerusan pinjaman.

The Company made payments of principal and interest on the two-step loans in accordance with the schedule of payment and complied with the restrictions specified within the agreements of the two-step loans.

Rincian penerusan pinjaman dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of the two-step loans in foreign currencies are as follows:

	2014		2013		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
US$	601.566.178	7.483.483	616.382.591	7.513.087	US$
JPY	190.798.089.873	19.890.472	196.740.292.135	22.855.084	JPY
EUR	75.060.997	1.135.918	93.489.580	1.572.629	EUR
Lain-lain **)	21.494.548	267.392	25.959.020	316.414	Others **)
Jumlah		28.777.265		32.257.215	Total

*) Dalam jumlah penuh
**) Penerusan pinjaman dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) In full amount
**) Two-step loans denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at reporting date

24. UTANG KEPADA PEMERINTAH

24. GOVERNMENT LOANS

	2014	2013	
Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001	1.515.015	1.761.668	Investment Fund Account No. RDI-393/DP3/2001
Pusat Investasi Pemerintah	7.150.711	7.110.841	Government Investment Center
Jumlah	8.665.726	8.872.509	Total
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	293.793	293.793	Less current portion
Bagian jangka panjang	8.371.933	8.578.716	Long-term portion

Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001

Investment Fund Account No. RDI-393/DP3/2001

	2014	2013	
Pokok pinjaman	1.762.756	2.056.548	Principal
Bunga masih harus dibayar	-	35.190	Accrued interest
Perbedaan nilai wajar	(247.741)	(330.070)	Fair value difference
Jumlah	1.515.015	1.761.668	Total

Pada tanggal 20 Juni 2001, Perusahaan dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui restrukturisasi tunggakan angsuran pokok penerusan pinjaman sebesar Rp 5.288.268 juta sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-352/MK.06/2001 menjadi pinjaman berjangka waktu 20 tahun. Pinjaman ini dikenakan bunga 4% per tahun dan tanpa jaminan. Pinjaman ini dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp 146.896 juta sampai dengan 30 Juli 2021.

On June 20, 2001, the Company and the Government of the Republic of Indonesia agreed to restructure the overdue principal of the two-step loans amounting to Rp 5,288,268 million as stated on the letter of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-352/MK.06/2001. The loan is unsecured, has a period of 20 years and bears interest at 4% per annum. The loan will be paid in semi-annual installments of Rp 146,896 million until July 30, 2021.

Pusat Investasi Pemerintah / **Government Investment Center**

	2014	2013	
Pokok pinjaman	7.500.000	7.500.000	Principal
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(33.542)	(37.745)	Unamortized transaction cost
Perbedaan nilai wajar	(315.747)	(351.414)	Fair value difference
Jumlah	7.150.711	7.110.841	Total

Pada tanggal 13 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp 7.500.000 juta, dengan tingkat bunga 5,25% per tahun berjangka waktu 15 tahun.

On December 13, 2011, the Company obtained soft loan facility from the Government Investment Center under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia amounting to Rp 7,500,000 million, with an annual interest rate of 5.25% and a term of 15 years.

Pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengadaan dan penggantian trafo, instalasi perlengkapan transmisi dan distribusi serta investasi lainnya.

This loan was used to finance the procurement and replacement of transformers, the installation of transmission and distribution equipment and also other capital expenditures.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga tidak kurang dari 1.5 : 1.

In relation to this loan facility, the Company is required to maintain a ratio of EBITDA to interest expense at a minimum of 1,5 : 1.

Utang kepada Pemerintah berdasarkan jadwal pembayaran pokok, adalah sebagai berikut:

Government loans by installment schedules, at nominal amount, are as follows:

	2014	2013	
Dibayarkan:			Payable to:
Dalam satu tahun	293.793	293.793	Within one year
Pada tahun kedua	293.793	293.793	In the second year
Pada tahun ketiga	293.793	293.793	In the third year
Pada tahun keempat	293.793	293.793	In the fourth year
Setelah lima tahun	8.087.584	8.381.376	After five years
Jumlah	9.262.756	9.556.548	Total

25. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Akun ini merupakan utang kepada IPP terkait PPA dan ESC yang telah diklasifikasikan ke dalam sewa pembiayaan sebagai akibat penerapan ISAK 8. Akun ini juga termasuk utang kepada PT Central Java Power ("CJP") dalam rangka Perjanjian Sewa Pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik 4 x 660 MW Tanjung Jati B Unit A, B, C, dan, D.

Sehubungan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan tersebut, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura bertindak sebagai *Escrow Agent* dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo bertindak sebagai *Security Agent*. Untuk memenuhi persyaratan FLA, Perusahaan telah membentuk dana cadangan pada *Escrow Agent* untuk jaminan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan pengadaan bahan bakar serta untuk angsuran sewa pembiayaan (Catatan 10).

Nilai tunai pembayaran minimum atas utang sewa pembiayaan tersebut pada tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

25. LEASE LIABILITIES

This account represents amounts payable to certain IPPs in relation to PPAs and ESCs that have been classified as finance leases as a result of the adoption of ISFAS 8. This account also includes amounts payable to PT Central Java Power ("CJP") in relation to the Financial Lease Agreement on the acquisition of Tanjung Jati B Unit A, B, C, and, D 4 x 660 MW power plants.

In relation to the Finance Lease Agreement, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore acts as the Escrow Agent and Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo acts as the Security Agent. To fulfill the requirements of FLA, the Company established a reserve account to an Escrow Agent for guarantee of operations, maintenance and fuel procurement and for lease payments (Note 10).

The present value of minimum lease payments for such lease liabilities in 2014 and 2013 is as follows:

	2014	2013	
a. Berdasarkan jatuh tempo			a. By due date
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			Minimum lease payments due:
Tidak lebih dari 1 tahun	25.735.327	25.647.864	No later than 1 year
Antara lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun	99.815.855	104.163.013	Later than 1 year and no later than 5 years
Lebih dari 5 tahun	300.340.464	305.507.698	Later than 5 years
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	425.891.646	435.318.575	Total minimum lease payments
Dikurangi bunga	292.678.749	300.698.555	Less interest
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	133.212.897	134.620.020	Present value of future minimum lease payments
Dikurangi bagian lancar	5.116.369	4.901.469	Less current portion
Bagian jangka panjang	128.096.528	129.718.551	Long-term portion

	2014	2013	
b. Berdasarkan lessor			b. By lessor
Pihak berelasi			Related parties
PT Sumber Segara Primadaya - US$	6.631.483	6.507.209	PT Sumber Segara Primadaya - US$
PT Bajradaya Sentranusa Asahan - US$	4.297.521	4.227.536	PT Bajradaya Sentranusa Asahan - US$
PT Geo Dipa Energy	1.413.227	-	PT Geo Dipa Energy
PT Tanjung Kasam Power - Rupiah	1.193.605	1.204.081	PT Tanjung Kasam Power - Rupiah
PT Pertamina Geothermal Energi (The Kamojang) - US$	867.690	858.225	PT Pertamina Geothermal Energi (The Kamojang) - US$
PT Dalle Energy Batam - Rupiah	711.425	734.065	PT Dalle Energy Batam - Rupiah
PT Wijaya Karya - Navigat - Rupiah	576.192	656.535	PT Wijaya Karya - Navigat - Rupiah
PT Wijaya Karya - Mirlindo Pandu Kencana			PT Wijaya Karya - Mirlindo Pandu Kencana
US$	282.724	323.789	US$
Rupiah	121.372	140.603	Rupiah
PT Mitra Energi Batam - Rupiah	112.408	117.813	PT Mitra Energi Batam - Rupiah
Jumlah pihak berelasi	16.207.647	14.769.856	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
PT Central Java Power - JPY	25.633.542	31.642.916	PT Central Java Power - JPY
PT Paiton Energy - US$	34.789.326	34.371.988	PT Paiton Energy - US$
PT Jawa Power - US$	19.684.536	19.478.143	PT Jawa Power - US$
PT Cirebon Electric Power - US$	7.402.128	7.442.073	PT Cirebon Electric Power - US$
Lain-lain (masing-masing di bawah 5% dari jumlah)	29.495.718	26.915.044	Others (each below 5% of total)
Jumlah pihak ketiga	117.005.250	119.850.164	Total third parties
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	133.212.897	134.620.020	Present value of future minimum lease payments
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	5.116.369	4.901.469	Less current portion
Bagian jangka panjang	128.096.528	129.718.551	Long-term portion

Tingkat suku bunga liabilitas sewa pembiayaan adalah tetap sejak tanggal kontrak, yang berkisar antara 5,04% sampai dengan 24,65% per tahun.

Beban bunga dan keuangan terkait sewa pembiayaan pada tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 22.712.397 juta dan Rp 19.832.196 juta. Beban bunga dan keuangan ini termasuk sewa kontinjen masing-masing sebesar Rp 1.610.760 juta dan Rp 1.315.515 juta pada tahun 2014 dan 2013 untuk faktor penyesuaian tertentu, antara lain meliputi kurs konversi mata uang JPY, tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi.

The interest rates underlying these finance lease liabilities are fixed at respective contract dates ranging from 5.04% to 24.65% per annum.

Interest expense and financial charges related to finance leases in 2014 and 2013 amounted to Rp 22,712,397 million and Rp 19,832,196 million, respectively. These interest expense and financial charges include contingent rent of Rp 1,610,760 million and Rp 1,315,515 million in 2014 and 2013 for certain adjustment factors which include, among other things, conversion of foreign exchange in JPY currency, interest rate and investment rate of returns.

26. UTANG BANK / 26. BANK LOANS

	2014	2013	
Pinjaman terkait program percepatan			Loans related to fast track program
Pihak berelasi			Related parties
Bank Negara Indonesia	3.985.102	4.860.105	Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia	4.105.099	4.568.429	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri	2.753.910	3.400.266	Bank Mandiri
Jumlah pihak berelasi	10.844.111	12.828.800	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
The Export-Import Bank of China	15.603.080	15.303.757	The Export-Import Bank of China
Bank of China Limited	11.980.540	12.738.196	Bank of China Limited
China Development Bank	10.492.729	10.499.686	China Development Bank
Bank Mega	3.000.601	3.776.739	Bank Mega
Bank Bukopin	2.154.535	2.334.693	Bank Bukopin
Bank Central Asia	1.261.476	1.241.783	Bank Central Asia
Bank DKI	2.154.570	2.084.189	Bank DKI
Jumlah pihak ketiga	46.647.531	47.979.043	Total third parties
Sub jumlah	57.491.642	60.807.843	Subtotal
Pinjaman tidak terkait program percepatan			Loans not related to fast track program
Pihak berelasi			Related parties
Bank Mandiri	6.125.000	7.000.000	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia	8.928.696	8.500.000	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia	1.112.884	-	Bank Negara Indonesia
Jumlah pihak berelasi	16.166.580	15.500.000	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Bank Central Asia	7.000.000	-	Bank Central Asia
Standard Chartered Bank	702.813	-	Standard Chartered Bank
Jumlah pihak ketiga	7.702.813	-	Total third parties
Sub jumlah	23.869.393	15.500.000	Subtotal
Jumlah	81.361.035	76.307.843	Total
Biaya transaksi belum diamortisasi	(1.433.188)	(1.462.014)	Unamortized transaction cost
Jumlah bersih	79.927.847	74.845.829	Total net
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			Less current maturities within one year
Pihak berelasi			Related parties
Bank Rakyat Indonesia	857.402	1.176.457	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia	996.810	801.003	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri	1.521.356	1.521.356	Bank Mandiri
Jumlah pihak berelasi	3.375.568	3.498.816	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Bank of China Limited	1.658.494	1.503.435	Bank of China Limited
The Export-Import Bank of China	1.248.524	905.541	The Export-Import Bank of China
Bank Mega	776.138	776.138	Bank Mega
China Development Bank	1.186.083	468.190	China Development Bank
Bank Central Asia	297.621	276.656	Bank Central Asia
Bank DKI	676.000	676.000	Bank DKI
Bank Bukopin	309.253	283.105	Bank Bukopin
Jumlah pihak ketiga	6.152.113	4.889.065	Total third parties
Jumlah bagian jatuh tempo dalam satu tahun	9.527.681	8.387.881	Total current portion
Bagian jangka panjang	70.400.166	66.457.948	Long-term portion

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, rincian utang bank dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2014 and 2013, details of bank loans in foreign currency are as follows:

	2014		2013		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
US$	3.060.799.804	38.076.349	3.162.001.759	38.541.639	US$
EUR	46.441.613	702.813	-	-	EUR
Jumlah		38.779.162		38.541.639	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

Pinjaman terkait program percepatan

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak *Engineering Procurement and Construction* (EPC) untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007, pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2014, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Loans related to fast track program

The Company obtained credit facilities from several banks to finance 85% of the value of Engineering Procurement and Construction (EPC) contracts for its fast track program. These loans are fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (PP) No. 91 Year 2007, which superseded PP No. 86 year 2006, regarding Grant of Government Guarantee for Construction of Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is restricted by general rules as described in the loan agreements.

As of December 31, 2014, details of such loan facilities are as follows:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* US$ *)	Rp *)	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance Premium* US$ *)	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity*
1	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank of China Limited/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/*West Java*	592	-	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 0,785%	55	27 Mei 2021/ *May 27, 2021*
2	The Export-Import Bank of China/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/*East Java*	331	-	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 0,84%	32	30 Januari 2023/ *January 30, 2023*
3	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU 2 Labuan, Banten	-	2.741.298	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 0,825%	-	23 Juli 2018/ *July 23, 2018*
4	The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Suralaya, Banten	284	-	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 0,84%	27	30 Januari 2023/ *January 30, 2023*
5	China Development Bank/ and Barclays Capital, The Investment Banking Division of Barclays Bank PLC PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/*Central Java*	262	-	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 3,25%	-	3 Desember 2021/ *December 3, 2021*
6	Bank DKI/ PLTU Naganraya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU Sumatera Barat PLTU 2 Kalimantan Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara PLTU Sulawesi Tengah PLTU 1 Nusa Tenggara Timur PLTU 2 Sulawesi Utara PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU 1 Kalimantan Tengah PLTU Maluku Utara	-	4.732.000	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1%	-	24 April 2019/ *April 24, 2019*
7	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia PLTU Sulawesi Selatan/*South Sulawesi* PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/*South Kalimantan*	-	2.074.739	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1%	-	30 Januari 2019/ *January 30, 2019*
	Jumlah dipindahkan/*Total carry forward*	1.469	9.548.037		114	

*) Dalam jutaan/In million

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* US$ *)	Rp *)	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance Premium* US$ *)	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity*
	Jumlah pindahan/*Total carried forward*	1.469	9.548.037		114	
8	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Mandiri/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/*Central Java*	-	1.911.480	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,11%	-	23 Maret 2018/ *March 23, 2018*
9	Bank Mega/ PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat/*West Java*	-	1.874.315	JIBOR 6 bulanan/ *6 month JIBOR* + 1,10%	-	29 Juli 2018/ *July 29, 2018*
10	Bank Bukopin/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	-	1.606.612	JIBOR 6 bulanan/ *6 month JIBOR* + 0,71%	-	29 Juli 2021/ *July 29, 2021*
11	Bank Mega/ PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU Gorontalo PLTU 2 Sulawesi Utara, Manado PLTU Kep Riau, Tanjung Balai Karimun PLTU 1 Nusa Tenggara Timur, Ende PLTU Sulawesi Tenggara 2 PLTU 1 Kalimantan Tengah	-	1.498.513	JIBOR 6 bulanan/ *6 month JIBOR* + 1,10%	-	29 Juli 2018/ *July 29, 2018*
12	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/*West Java*	-	1.272.913	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,10%	-	23 Pebruari 2018/ *February 23, 2018*
13	Bank Mega/ PLTU Lampung, Lampung PLTU 2 Sumatera Utara, Medan	-	1.240.661	JIBOR 6 bulanan/ *6 month JIBOR* + 1,10%	-	29 Juli 2018/ *July 29, 2018*
14	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Central Asia/ PLTU 2 Labuan, Banten	-	1.077.578	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,12%	-	18 April 2018/ *April 18, 2018*
15	Pinjaman sindikasi dikordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan/*South Sulawesi* PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/*South Kalimantan*	-	1.151.005	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1%	-	30 Januari 2019/ *January 30, 2019*
16	Bank Bukopin/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur/*East Java*	-	1.045.924	JIBOR 6 bulanan/ *6 month JIBOR* + 0,71%	-	29 Juli 2021/ *July 29, 2021*
17	Bank Mega/ PLTU 1 Suralaya Baru, Banten	-	735.387	JIBOR 6 bulanan/ *6 month JIBOR* + 1,10%	-	18 April 2018/ *April 18, 2018*
18	Bank Mega/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/*East Java*	-	600.636	JIBOR 6 bulanan/ *6 month JIBOR* + 1,10%	-	18 April 2018/ *April 18, 2018*
	Jumlah dipindahkan/*Total carry forward*	1.469	23.563.061		114	

* Dalam jutaan/*In million*

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* US$ *)	Rp *)	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance Premium* US$ *)	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity*
	Jumlah pindahan/*Total carried forward*	1.469	23.563.061		114	
19	The Export-Import Bank of China/ PLTU NAD	124	-	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 2,8%	12	14 Januari 2025/ *January 14, 2025*
20	The Export-Import Bank of China/ PLTU Pelabuhan Ratu	482	-	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 2,8%	44	12 Februari 2025/ *February 12, 2025*
21	Bank of China Limited/ PLTU Teluk Naga	455	-	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 2,3%	46	4 Mei 2022/ *May 4, 2022*
22	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU Tanjung Aw ar-aw ar	-	1.155.352	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1%	-	30 Januari 2019/ *January 30, 2019*
23	The Export-Import Bank of China/ PLTU Pacitan	293	-	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 2,8%	30	2 Juli 2025/ *July 2, 2025*
24	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Lampung PLTU Sumatera Utara/North Sumatera	-	3.941.772	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,5%	34	14 Oktober 2019/ *October 14, 2019*
25	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Mandiri/ Transmisi/*Transmission*	-	2.613.012	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,5%	-	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
26	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Central Asia/ Transmisi/*Transmission*	-	327.195	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,5%	-	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
27	China Development Bank/ PLTU Adipala, Cilacap	625	-	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 3,85%	-	14 Oktober 2022/ *October 14, 2022*
28	China Development Bank/ PLTU Sumbar	138	-	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 3,85%	-	14 Oktober 2022/ *October 14, 2022*
29	Bank of China Limited/ PLTU Tanjung Aw ar-Aw ar	372	-	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 2,30%	-	14 Desember 2022/ *December 14, 2022*
30	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ Transmisi/*Transmission*	-	1.930.063	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,50%	-	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
31	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Central Asia/ PLTU Riau dan/*and* PLTU Kalbar	-	1.080.598	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,50%	-	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
32	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ Transmisi/*Transmission*	-	1.067.684	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,05%	-	27 Desember 2020/ *December 27, 2020*
	Jumlah/*Total*	3.958	35.678.737		280	

*) Dalam jutaan/*In million*

Pinjaman tidak terkait program percepatan

Bank Mandiri

Pada tanggal 27 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri sebesar Rp 7.000.000 juta, dengan tingkat bunga per tahun sebesar rata-rata tertimbang suku bunga deposito berjangka dalam mata uang Rupiah tiga bulan dari kreditur sindikasi + 3,42% dan jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2021. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 6.125.000 juta dan Rp 7.000.000 juta.

Bank Rakyat Indonesia

Kredit Modal Kerja 2011

Pada bulan Juni 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 15,000,000 juta, dengan tingkat suku bunga berdasarkan JIBOR tiga bulanan + 1,65% dan jatuh tempo pada 31 Juni 2012. Terdapat sejumlah perubahan atas perjanjian awal kredit modal kerja sejak tahun 2011. Pada tanggal 20 Juni 2013, fasilitas kredit diubah menjadi Rp 13.000.000 juta dan tanggal jatuh tempo diubah menjadi 21 Juni 2014. Pada tanggal 21 Juli 2014, tingkat suku bunga pinjaman diubah menjadi tingkat suku bunga JIBOR tiga bulanan + 2,1% dan jatuh tempo fasilitas pinjaman diperpanjang sampai 21 Juni 2015.

Arus kas penarikan dan pembayaran utang Bank Rakyat Indonesia untuk tahun 2014 dan 2013 sebagai berikut:

Loans not related to fast track program

Bank Mandiri

On December 27, 2011, the Company obtained a syndicated investment loan facilities coordinated by Bank Mandiri amounting to Rp 7,000,000 million, with annual interest based on weighted average time deposit in Rupiah three months of syndicated creditors + 3.42% and maturity date on October 23, 2021. As of December 31, 2014 and 2013, the balance outstanding amounted to Rp 6,125,000 million and Rp 7,000,000 million, respectively.

Bank Rakyat Indonesia

Working Capital Loan 2011

On June 2011, the Company obtained a syndicated working capital loan facility coordinated by Bank Rakyat Indonesia amounting to Rp 15,000,000 million, with annual interest based on three months JIBOR + 1.65% and maturity on June 21, 2012. There have been a number of amendments to the original working capital loan facility since 2011. On June 20, 2013, the credit facility was changed to Rp 13,000,000 million and the maturity date was amended to June 21, 2014. On July 21, 2014, the interest rate of the facility was changed to three months JIBOR + 2.1% and the maturity date was extended to June 21, 2015.

Cash flows of withdrawal and payment of the Bank Rakyat Indonesia loan in 2014 and 2013 are as follows:

	2014	2013	
Penarikan	50.527.002	60.308.923	Withdrawal
Pembayaran	(50.527.002)	(60.308.923)	Payment
Bersih	-	-	Net

Pinjaman Perusahaan 2012

Pada tanggal 21 Desember 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 8.500.000 juta dengan tingkat bunga per tahun sebesar rata-rata suku bunga deposito berjangka tiga bulan + 3,2% yang terutang setiap tiga bulan. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 23 Nopember 2022. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tahun 2014 dan 2013 sebesar Rp 8.500.000 juta.

Corporate Loan 2012

On December 21, 2012, the Company obtained working capital loan facilities from Bank Rakyat Indonesia amounting to Rp 8,500,000 million, with annual interest rate of the average time deposit three months + 3.2%, which is due every three months. The maturity date of the principal is on November 23, 2022. The balance as of December 31, 2014 and 2013, the balance outstanding amounted to Rp 8,500,000 million.

Pinjaman Perusahaan 2014

Pada tanggal 17 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 2.000.000 juta dengan tingkat bunga pertahun menggunakan rata – rata suku bunga deposito berjangka tiga bulanan Bank Rakyat Indonesia + 2,75% dan jatuh tempo pokok pinjaman pada tanggal 17 Desember 2024. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 428.696 juta.

Corporate Loan 2014

On December 17, 2014, the Company obtained a credit facility from Bank Rakyat Indonesia amounting to Rp 2,000,000 million, with the annual interest rate based on Bank Rakyat Indonesia's average three months time deposit + 2.75% and maturity on December 17, 2024. As of December 31, 2014 the balance outstanding amounted to Rp 428,696 million.

Bank Central Asia

Pada tanggal 23 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Central Asia sebesar Rp 7.000.000 juta, dengan tingkat suku bunga berdasarkan JIBOR tiga bulanan + 2,4% yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2023. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 7.000.000 juta dan Rp nihil.

Bank Central Asia

On December 23, 2013, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by Bank Central Asia amounting to Rp 7,000,000 million, with annual interest rate based on three months JIBOR + 2.4% and maturity on December 23, 2023. As of December 31, 2014 and 2013 the balance outstanding of this facility amounted to Rp 7,000,000 million and Rp nil, respectively.

Standard Chartered Bank

Fasilitas Arun

Pada tanggal 11 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai pembangunan PLTMG Arun sebesar EUR 90.000.000 dengan tingkat suku sebesar 2,1% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakir pada tanggal 11 Desember 2025. Hingga pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, belum ada jumlah terhutang atas pinjaman ini.

Standard Chartered Bank

Arun Facility

On December 11, 2013, the Company obtained an export credit facility to finance the construction of Arun Solar and Steam Power Plant amounting to EUR 90,000,000 with interest rate of 2.1% per annum. This credit facility will mature on December 11, 2025. As of December 31, 2014 and 2013, there is no balance outstanding for this loan.

Fasilitas Bangkanai

Pada tanggal 23 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai pembangunan PLTMG Bangkanai sebesar EUR 70.850.000 dengan tingkat suku bunga yang digunakan untuk pinjaman tersebut sebesar 2,1% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2025. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 702.813 juta dan Rp nihil.

Bangkanai Facility

On December 23, 2013, the Company obtained an export credit facility to finance the construction of Bangkanai Solar and Steam Power Plant amounting to EUR 70,850,000 with interest rate of 2.1% per annum. This credit facility will mature on December 23, 2025. As of December 31, 2014 and 2013 the balance outstanding of this facility amounted to Rp 702,813 million and Rp nil, respectively.

Bank Negara Indonesia

Pada tanggal 18 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp 6.500.000 juta yang dikoordinasikan oleh Bank Negara Indonesia, dengan tingkat suku bunga menggunakan rata – rata tertimbang suku bunga deposito berjangka tiga bulan + 3 % per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2024. Jumlah terhutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 1.112.884 juta dan Rp nihil.

Bank Negara Indonesia

On December 18, 2014, the Company obtained a syndicated investment credit facility amounting to Rp 6,500,000 million coordinated by Bank Negara Indonesia, with annual interest rate based on three months weighted average time deposit + 3 % per annum. This credit facility will mature on December 18, 2024. As of December 31, 2014 and 2013 the balance outstanding amounted to Rp 1,112,884 million and Rp nil, respectively.

27. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH / 27. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARAH

	2014	2013	
Obligasi Rupiah			Rupiah Bonds
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	1.244.000	1.244.000	Sustainable Bonds I PLN II Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	429.000	429.000	Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	879.000	879.000	Sustainable Bonds I PLN I Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	121.000	121.000	Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013
Obligasi PLN XII Tahun 2010	2.500.000	2.500.000	PLN XII Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	500.000	500.000	Sukuk Ijarah PLN V Year 2010
Obligasi PLN XI Tahun 2010	2.703.000	2.703.000	PLN XI Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	297.000	297.000	Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010
Obligasi PLN X Tahun 2009	-	1.015.000	PLN X Bonds Year 2009
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009	-	293.000	Sukuk Ijarah PLN III Year 2009
Obligasi PLN IX Tahun 2007	2.700.000	2.700.000	PLN IX Bonds Year 2007
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	300.000	300.000	Sukuk Ijarah PLN II Year 2007
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	2.200.100	2.200.100	PLN VIII Bonds Year 2006
Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006	200.000	200.000	Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006
Obligasi PLN VII Tahun 2004	-	1.500.000	PLN VII Bonds Year 2004
Surat Utang Jangka Menengah Global - US$			Global Medium Term Notes - US$
Penerbitan tahun 2012	12.440.000	12.189.000	Issued in 2012
Penerbitan tahun 2011	12.440.000	12.189.000	Issued in 2011
Obligasi Terjamin - US$			Guaranteed Notes - US$
Penerbitan tahun 2009	24.880.000	24.378.000	Issued in 2009
Penerbitan tahun 2007	12.440.000	12.189.000	Issued in 2007
Penerbitan tahun 2006	6.842.000	6.703.950	Issued in 2006
Sub jumlah	83.115.100	84.530.050	Subtotal
Biaya emisi belum diamortisasi	(637.544)	(704.061)	Unamortized debt issuance cost
Jumlah	82.477.556	83.825.989	Total
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai :			Presented in consolidated statements of financial position
Liabilitas jangka pendek	805.000	2.808.000	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	81.672.556	81.017.989	Noncurrent liabilites
Jumlah	82.477.556	83.825.989	Total

Obligasi Rupiah

Obligasi ini diterbitkan sebesar harga nominal dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

Rupiah Bonds

The bonds were issued at nominal value and are denominated in Rupiah, with details as follow:

	Pokok/ *Principal*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga/ *Interest rate*	
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013				Sustainable Bonds I PLN II Year 2013
Seri A	593.000	10 Desember 2018/*December 10, 2018*	9%	Series A
Seri B	651.000	10 Desember 2023/*December 10, 2023*	9,60%	Series B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013				Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013
Seri A	321.000	10 Desember 2018/*December 10, 2018*	-	Series A
Seri B	108.000	10 Desember 2023/*December 10, 2023*	-	Series B
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013				Sustainable Bonds I PLN I Year 2013
Seri A	182.000	5 Juli 2020/*July 5, 2020*	8%	Series A
Seri B	697.000	5 Juli 2023/*July 5, 2023*	8,25%	Series B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	121.000	5 Juli 2020/*July 5, 2020*	-	Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013
Obligasi PLN XII Tahun 2010				PLN XII Bonds Year 2010
Seri A	645.000	8 Juli 2015/*July 8, 2015*	9,70%	Series A
Seri B	1.855.000	8 Juli 2022/*July 8, 2022*	10,40%	Series B
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010				Sukuk Ijarah PLN V Year 2010
Seri A	160.000	8 Juli 2015/*July 8, 2015*	-	Series A
Seri B	340.000	8 Juli 2022/*July 8, 2022*	-	Series B
Obligasi PLN XI Tahun 2010				PLN XI Bonds Year 2010
Seri A	920.000	12 Januari 2017/*January 12, 2017*	11,95%	Series A
Seri B	1.783.000	12 Januari 2020/*January 12, 2020*	12,55%	Series B
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010				Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010
Seri A	130.000	12 Januari 2017/*January 12, 2017*	-	Series A
Seri B	167.000	12 Januari 2020/*January 12, 2020*	-	Series B
Obligasi PLN IX Tahun 2007				PLN IX Bonds Year 2007
Seri A	1.500.000	10 Juli 2017/*July 10, 2017*	10,40%	Series A
Seri B	1.200.000	10 Juli 2022/*July 10, 2022*	10,90%	Series B
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	300.000	10 Juli 2017/*July 10, 2017*	-	Sukuk Ijarah PLN II Year 2007
Obligasi PLN VIII Tahun 2006				PLN VIII Bonds Year 2006
Seri A	1.335.100	21 Juni 2016/*June 21, 2016*	13,60%	Series A
Seri B	865.000	21 Juni 2021/*June 21, 2021*	13,75%	Series B
Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006	200.000	21 Juni 2016/*June 21, 2016*	-	Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006
Jumlah	14.073.100			Total

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013

Pada tanggal 10 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PLN tahap II tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 1.244.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN tahap II tahun 2013, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN tahap II Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp 429.000 juta, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 28.890 juta per tahun untuk Obligasi Seri A dan Rp 10.368 juta per tahun untuk Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Sustainable Bonds I PLN II Year 2013

On December 10, 2013, the Company issued Sustainable Bonds I PLN II Year 2013 with a total nominal value of Rp 1,244,000 million consisting of Series A and Series B bonds, with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from March 10, 2014 until the maturity date of the bonds.

Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013

Concurrent with the issuance of Sustainable Bonds I PLN II Year 2013, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013, with a nominal value of Rp 429,000 million consisting of Series A and Series B with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. Total ijarah fee per annum amounting to Rp 28,890 million for Series A Bonds and 10,368 million for Series B Bonds is payable on a quarterly basis, starting from March 10, 2014 until the maturity date of the Sukuk Ijarah.

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013

Pada tanggal 5 Juli 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PLN tahap I tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 879.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN tahap I tahun 2013, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN tahap I Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp 121.000 juta dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 9.680 juta per tahun dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Obligasi PLN XII tahun 2010

Pada tanggal 8 Juli 2010, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN XII Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 2.500.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XII Tahun 2010, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp 500.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 15.520 juta per tahun untuk obligasi Seri A dan Rp 35.360 juta per tahun untuk obligasi Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Obligasi PLN XI Tahun 2010

Pada tanggal 12 Januari 2010, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN XI Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 2.703.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sustainable Bonds I PLN I Year 2013

On July 5, 2013, the Company issued Sustainable Bonds I PLN I Year 2013 with a total nominal value of Rp 879,000 million consisting of Series A and Series B bonds with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 5, 2013 until the maturity date of the bonds.

Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013

Concurrent with the issuance of Sustainable Bonds I PLN I Year 2013, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013 with a nominal value of Rp 121,000 million with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp 9,680 million is payable on a quarterly basis, starting from October 5, 2013 until the maturity date of the Sukuk Ijarah.

PLN XII Bonds Year 2010

On July 8, 2010, the Company issued PLN XII Bonds Year 2010 with a total nominal value of Rp 2,500,000 million consisting of Series A and and Series B bonds with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 8, 2010 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah PLN V Year 2010

Concurrent with the issuance of PLN XII Bonds Year 2010, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN V Year 2010 with a nominal value of Rp 500,000 million, consisting of Series A and Series B bonds with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp 15,520 million for Series A bonds and Rp 35,360 million for Series B bonds is payable on a quarterly basis, starting from October 8, 2010 until the maturity date of the bonds.

PLN XI Bonds Year 2010

On January 12, 2010, the Company issued PLN XI Bonds Year 2010 with a total nominal value of Rp 2,703,000 million, consisting of Series A and and Series B bonds, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XI Tahun 2010, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp 297.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 15.535 juta per tahun untuk obligasi Seri A dan Rp 20.958 juta per tahun untuk obligasi Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010

Concurrent with the issuance of PLN XI Bonds Year 2010, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010 with a nominal value of Rp 297,000 million consisting of Series A and Series B bonds with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp 15,535 million for Series A bonds and Rp 20,958 million for Series B bonds is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until the maturity date of the bonds.

Obligasi PLN IX Tahun 2007

Pada tanggal 10 Juli 2007, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dengan jumlah nilai nominal Rp 2.700.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

PLN IX Bonds Year 2007

On July 10, 2007, the Company issued PLN IX Bonds Year 2007 with a total nominal value of Rp 2,700,000 million consisting of Series A and Series B bonds, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2007 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN IX Tahun 2007, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dengan nilai nominal Rp 300.000 juta jangka waktu sepuluh tahun, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 31.200 juta per tahun dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah PLN II Year 2007

Concurrent with the issuance of PLN IX Bonds Year 2007, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN II Year 2007 with a nominal value of Rp 300,000 million with a term of ten years, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The total ijarah fee per annum amounting to Rp 31,200 million is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2007 until the maturity date of the bonds.

Obligasi PLN VIII Tahun 2006

Pada tanggal 21 Juni 2006, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal Rp 2.200.100 juta, dengan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sejak tanggal 18 Maret 2008, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN VIII Tahun 2006 yang tertuang dalam Akta No. 34 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

PLN VIII Bonds Year 2006

On June 21, 2006, the Company issued PLN VIII Bonds Year 2006 with a total nominal value of Rp 2,200,100 million with PT Bank Mega Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from September 21, 2006 until the maturity date of the bonds.

On March 18, 2008, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) in accordance with the Minutes of Meeting of the Bond holders of PLN VIII Bonds Year 2006, as documented in notarial deed No. 34 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.

Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN VIII Tahun 2006, Perusahaan juga menerbitkan Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 dengan nilai nominal Rp 200.000 juta, dengan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 6.800 juta per tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sejak tanggal 18 Maret 2008, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 yang tertuang dalam Akta No. 35 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi di atas, masing-masing perjanjian perwaliamanatan menetapkan antara lain bahwa:

- Satu tahun sejak tanggal emisi, Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi ini sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi.

- Seluruh obligasi ini tidak dijamin secara khusus, namun dijamin dengan seluruh aset Perusahaan, serta hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.

- Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan antara lain (a) menjaminkan harta kekayaan Perusahaan; (b) memberikan penjaminan; (c) memberikan pinjaman kepada pihak lain; (d) mengadakan penggabungan, konsolidasi dan akuisisi yang menyebabkan Perusahaan bubar; (e) mengalihkan aset tetap; memberikan izin kepada entitas anak untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain atau melakukan investasi; (f) menerbitkan obligasi dengan kedudukan lebih tinggi; dan (g) mengubah bidang usaha; mengurangi modal dasar; modal ditempatkan dan disetor.

Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006

Concurrent with the issuance of PLN VIII Bonds Year 2006, the Company also issued Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006 with a nominal value of Rp 200,000 million, with PT Bank Mega Tbk acting as the Trustee. The ijarah fee amounting to Rp 6,800 million is payable on a quarterly basis, starting from September 21, 2006 until the maturity date of the bonds.

On March 18, 2008, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006, as documented in notarial deed No. 35 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.

In relation to the issuance of the bonds above, each trustee agreement stipulates, among others that:

- After one year from the issuance date, the Company is allowed to buy-back either a portion or the entire bonds before the maturity date.

- The bonds are not secured by specific collateral but secured by all of the Company's assets and the bondholders' rights are paripassu without preference to the other creditors.

- The Company is restricted by certain covenants, which require written approval from the Trustee to: (a) use the Company's assets as collateral; (b) act as a guarantor; (c) grant a loan to another party; (d) perform merger, consolidation and acquisition that would cause the Company to be dissolved; (e) transfer the Company's property, plant and equipment, and allow subsidiaries to grant a loan to another party or to make an investment; (f) issue higher ranking bonds; and (g) change the business activities and decrease the Company's authorized, subscribed and paid-up capital.

Selain itu Perusahaan juga diwajibkan memenuhi: (a) rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset tidak lebih dari 80%; (b) kecuali untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah IV Tahun 2010 dan Obligasi PLN X Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah III Tahun 2009, rasio antara laba sebelum beban bunga, pajak dan penyusutan dan amortisasi (termasuk perhitungan aktuaria imbalan kerja) - EBITDA dengan beban bunga minimum 2 : 1, untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah IV Tahun 2010 dan Obligasi PLN X Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah III Tahun 2009 minimum rasio adalah 1,5 : 1; (c) rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada Pemerintah) minimum 150% untuk Obligasi PLN VIII tahun 2006 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I tahun 2006, dan rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman, pinjaman langsung, obligasi internasional dan utang kepada Pemerintah) minimum 125% untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010, Obligasi PLN X Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 dan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007.

The Company is also required to maintain the following: (a) a ratio of total financial liabilities to total assets not exceeding 80%; (b) except for PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah IV Year 2010, PLN X Bonds Year 2009 and Sukuk Ijarah III Year 2009, the ratio of EBITDA to interest expense at a minimum of 2 : 1, for PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah IV Year 2010 and PLN X Bonds Year 2009 and Sukuk Ijarah III Year 2009, the minimum ratio is 1.5 : 1 ; (c) a ratio of power plant, transmission and distribution facilities to interest-bearing liabilities which are not secured by specific collaterals (excluding two-step loans and Government loans) at a minimum of 150% for PLN VIII Bonds Year 2006 and Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006, and a ratio of power plant, transmission and distribution facilities to interest bearing liabilities which are not secured by specific collaterals (excluding two-step loans, direct loans, global bonds and government loans) at a minimum of 125% for the PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010, PLN X Bonds Year 2009 and Sukuk Ijarah PLN III Year 2009 and PLN IX Bonds Year 2007 and Sukuk Ijarah PLN II Year 2007.

- Untuk Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006, Perusahaan setuju untuk mengalihkan manfaat mesin pembangkit tenaga diesel dan perangkat trafo tertentu kepada pemegang obligasi dan pemegang obligasi memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk membuat dan melangsungkan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna trafo tersebut untuk kepentingan pemegang obligasi. Perusahaan juga menerima kuasa dari Wali Amanat untuk membuat dan melangsungkan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna trafo tersebut untuk melaksanakan penagihan piutang terkait.

- Related to Sukuk Ijarah PLN II Year 2007, and Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006, the Company has agreed to transfer benefits obtained from certain diesel power plants and transformers of the Company to the bondholders, and the bondholders have agreed to provide the Company with a power of attorney to enter into agreements with transformer users for the benefits of the bondholders. The Company also received a power of attorney from the Trustee to enter into agreements with the transformer users to collect the related receivables.

- Perusahaan tidak disyaratkan untuk membentuk penyisihan dana pelunasan obligasi.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013, Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 digunakan untuk kegiatan investasi transmisi dan distribusi. Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi PLN VII tahun 2004 digunakan untuk membiayai kembali proyek PLTGU Muara Tawar. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi lainnya digunakan untuk kebutuhan modal kerja antara lain untuk pengadaan bahan bakar.

Perusahaan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat masing-masing obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahun 2013, Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010, Obligasi PLN X tahun 2009 dan Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009, Obligasi PLN IX Tahun 2007, Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dan Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 dan Obligasi PLN VII tahun 2004 memperoleh peringkat “AAA” dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.

- The Company was not required to provide sinking fund for such bonds.

The proceeds from the issuance of Sustainable Bonds I PLN II Year 2013 and Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013, Sustainable Bonds I PLN I Year 2013 and Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013, PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah IV Year 2010 were used to finance the transmission and distribution of construction projects. The proceeds from the issuance of PLN VII Bonds Year 2004 were used to refinance the PLTGU Muara Tawar Project. The proceeds from the other bonds issued were used for working capital requirements which, among others, includes the purchase of fuel.

The Company complies with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee of the corresponding bond obligations.

As of December 31, 2014, Sustainable Bonds I PLN II Year 2013 and Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013, Sustainable Bonds I PLN Year 2013 and Sustainable Sukuk Ijarah I PLN Year 2013, the PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah PLN V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010, PLN X Bonds Year 2009 and Sukuk Ijarah PLN III Year 2009 and PLN IX Bonds Year 2007 and Sukuk Ijarah PLN II Year 2007, PLN VIII Bonds Year 2006 and Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006 and PLN VII Bonds Year 2004 are rated as “AAA” by PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin – US$

Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dan obligasi terjamin adalah sebagai berikut:

Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes – US$

The details of Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes are as follows:

	Pokok/ *Principal* *)	Harga penerbitan/ *Issuing price*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga/ *Interest rate*	
	US$				
Surat Utang Jangka Menengah Global					Global Medium Term Notes
Penerbitan tahun 2012					Issued in 2012
Jatuh tempo 2042	1.000.000.000	98,514%	24 Oktober 2042/ *October 24, 2042*	5,25%	Due in 2042
Penerbitan tahun 2011					Issued in 2011
Jatuh tempo 2021	1.000.000.000	99,054%	22 Nopember 2021/ *November 22, 2021*	5,5%	Due in 2021
Obligasi Terjamin					Guaranteed Notes
Penerbitan tahun 2009					Issued in 2009
Jatuh tempo 2020	1.250.000.000	99,152%	20 Januari 2020/ *January 20, 2020*	7,750%	Due in 2020
Jatuh tempo 2019	750.000.000	99,155%	7 Agustus 2019/ *August 7, 2019*	8,000%	Due in 2019
Sub jumlah	2.000.000.000				Subtotal
Penerbitan tahun 2007					Issued in 2007
Jatuh tempo 2017	500.000.000	99,127%	28 Juni 2017/ *June 28, 2017*	7,250%	Due in 2017
Jatuh tempo 2037	500.000.000	98,586%	29 Juni 2037/ *June 29, 2037*	7,875%	Due in 2037
Sub jumlah	1.000.000.000				Subtotal
Penerbitan tahun 2006					Issued in 2006
Jatuh tempo 2016	550.000.000	98,976%	17 Oktober 2016/ *October 17, 2016*	7,75%	Due in 2016
Sub jumlah	550.000.000				Subtotal
Jumlah	5.550.000.000				Total

*) dalam jumlah penuh/*in full amount*

Surat Utang Jangka Menengah Global

Pada tanggal 24 Oktober 2012, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US$ 1.000 juta dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Pada tanggal 22 Nopember 2011, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US$ 1.000 juta dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Global Medium Term Notes

On October 24, 2012, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US$ 1,000 million, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from May 24, 2013 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

On November 22, 2011, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US$ 1,000 million, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from May 22, 2012 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

Obligasi Terjamin

Penerbitan tahun 2009

Pada tanggal 6 Nopember 2009, Majapahit Holding B.V. (MH), Belanda, entitas anak, menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 1.250 juta dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 Januari 2010 sampai dengan jatuh tempo obligasi.

Pada tanggal 7 Agustus 2009, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 750 juta dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 8 Februari 2010 sampai dengan jatuh tempo obligasi.

Penerbitan tahun 2007

Pada tanggal 28 Juni 2007, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 1.000 juta dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 28 Desember 2007 sampai dengan jatuh tempo obligasi.

Penerbitan tahun 2006

Pada tanggal 16 Oktober 2006, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 1.000 juta dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 17 April 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Pada tanggal 17 Oktober 2011, MH melunasi Obligasi Terjamin yang telah jatuh tempo dengan harga nominal sebesar US$ 450 juta.

Obligasi ini tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan dan entitas anak, jika ada.

Perjanjian perwaliamanatan menetapkan bahwa:

- Tidak lebih dari 30 hari sejak dua kejadian dimana Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara pada Perusahaan atau, jika dan ketika diterbitkan saham Dwiwarna Seri A dan kejadian yang menurunkan peringkat (*Change of Control Triggering Event*), Majapahit Holding B.V. dapat diminta untuk melakukan penawaran untuk membeli kembali Obligasi Terjamin dengan harga 101% dari nilai nominal ditambah bunga terutang sampai tanggal pembelian kembali. Majapahit Holding B.V. mempunyai opsi dalam waktu tertentu untuk menebus kembali seluruh Obligasi Terjamin ini dengan harga 100% dari nilai nominal, bersama dengan utang bunga dalam hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Belanda atau Indonesia.

Guaranteed Notes

Issued in 2009

On November 6, 2009, Majapahit Holding B.V. (MH), The Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary, issued Guaranteed Notes amounting to US$ 1,250 million, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from January 20, 2010 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

On August 7, 2009, MH issued Guaranteed Notes amounting to US$ 750 million, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from February 8, 2010 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

Issued in 2007

On June 28, 2007, MH issued Guaranteed Notes amounting to US$ 1,000 million, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from December 28, 2007 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

Issued in 2006

On October 16, 2006, MH issued Guaranteed Notes amounting to a total of US$ 1,000 million with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually from April 17, 2007 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

On October 17, 2011, MH paid the Guaranteed Notes which had matured with price at a nominal value of US$ 450 million.

These Guaranteed Notes are irrevocably and unconditionally guaranteed by the Company and its subsidiaries, if any.

The Indenture is governed that:

- No later than 30 days following the occurrence of two separate events in which the Government of Indonesia ceases to own, directly or indirectly, more than 50% of the voting securities of the Company or, if and when issued, the Class A Dwiwarna Share and an event in which a rating decline (Change of Control Triggering Event), MH may be required to make an offer to repurchase all Guaranteed Notes outstanding at a purchase price equal to 101% of their principal amount plus accrued and unpaid interest, if any, to the date of repurchase. The Guaranteed Notes are subject to redemption in whole, at 100% of their principal amount, together with any accrued interest, at the option of MH at a certain time in the event of certain changes affecting taxes of The Netherlands or Indonesia.

- Pembatasan tertentu termasuk antara lain: penambahan pinjaman sesuai dengan "Rasio Pengecualian", yang setelah memperhitungkan pengaruhnya terhadap pinjaman diperkenankan minimum 2 : 1; pemberian jaminan; pembayaran dividen; penggabungan usaha, akuisisi dan penjualan aset.

Perusahaan dan entitas anak memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin ini digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi program percepatan pembangunan fasilitas tenaga listrik, konstruksi rutin dan untuk tujuan umum korporasi.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Surat Utang Jangka Menengah Global ini memperoleh peringkat "Baa3 stable" dari Moody's Investor Service, Inc., dan "BB" dari Standard and Poor's serta "BBB-" dari Fitch.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Obligasi Terjamin ini memperoleh peringkat "Baa3" dari Moody's Investor Service, Inc., dan "BB" dari Standard and Poor's serta "BBB-" dari Fitch.

- Certain covenants, including, among others, the incurrence of additional indebtedness along with the "Ratio Exception", that after giving effect to the permitted indebtedness is at least 2 : 1; the incurrence of liens; the payment of dividends; mergers, acquisitions and disposals.

The Company and its subsidiaries complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee.

The proceeds from the Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes issued were used to fund the capital expenditure requirements in connection with the Fast Track Program, regular construction and for general corporate purposes.

As of December 31, 2014, these Global Medium Term Notes are rated as "Baa3 stable" by Moody's Investors Service, Inc., and "BB" by Standard and Poor's and "BBB-" by Fitch.

As of December 31, 2014, these Guaranteed Notes are rated as "Baa3" by Moody's Investors Service, Inc., and "BB" by Standard and Poor's and "BBB-" by Fitch.

28. UTANG LISTRIK SWASTA

Akun ini merupakan utang listrik swasta yang direstrukturisasi melalui renegosiasi dengan penyedia dan pengembang listrik swasta dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pemasok

	2014	2013	
PT Paiton Energy (US$ 558.350.954 tahun 2014 dan US$ 578.942.401 tahun 2013)	6.945.886	7.056.729	PT Paiton Energy (US$ 558,350,954 in 2014 and US$ 578,942,401 in 2013)
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	291.744	272.454	Less current portion
Bagian jangka panjang	6.654.142	6.784.275	Long-term portion

b. Berdasarkan jadwal pembayaran pokok

	2014	2013	
Dibayarkan:			Payable in:
Dalam satu tahun	291.744	272.454	Within one year
Pada tahun kedua	283.112	264.393	In the second year
Pada tahun ketiga	297.040	277.400	In the third year
Pada tahun keempat	311.653	291.047	In the fourth year
Setelah lima tahun	5.762.337	5.951.435	After five years
Jumlah pembayaran	6.945.886	7.056.729	Total payments

28. ELECTRICITY PURCHASE PAYABLE

This account represents electricity purchase payable, which was restructured through renegotiation with Independent Power Producers with details as follows:

a. By creditor

b. By installment schedule, at nominal amount

Utang kepada PT Paiton Energy dikenakan bunga per tahun sebesar 4,81% dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2031.

Payable to PT Paiton Energy bears annual interest of 4.81%, and is payable in 360 monthly installments from January 1, 2002 until December 1, 2031.

29. UTANG PIHAK BERELASI / 29. PAYABLE TO RELATED PARTIES

	2014	2013	
PT Mitra Energi Batam	5.434	6.304	PT Mitra Energi Batam
PT Dalle Energy Batam	1.897	3.388	PT Dalle Energy Batam
Jumlah	7.331	9.692	Total
Dikurangi bagian jangka pendek	-	2.786	Less current portion
Bagian jangka panjang	7.331	6.906	Long-term portion

PT Mitra Energi Batam (MEB) dan PT Dalle Energy Batam (DEB)

Utang kepada MEB dan DEB merupakan utang oleh PLN Batam masing-masing untuk pembelian *switchyard* dan hutang atas setoran saham yang belum dibayarkan penuh oleh PLN Batam.

PT Mitra Energi Batam (MEB) and PT Dalle Energy Batam (DEB)

Payable to MEB and DEB are payable by PLN Batam for purchases of switchyard and historical subscription of shares that have not been fully paid by PLN Batam.

30. UTANG USAHA / 30. TRADE ACCOUNTS PAYABLE

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut :

This account represents payables arising from purchases of electricity, fuel, goods and services, with details as follows :

	2014	2013	
Pihak berelasi			Related parties
Pembelian tenaga listrik	519.356	537.130	Purchases of electricity
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	12.135.635	11.599.580	Purchases of fuel, goods and services
Subtotal	12.654.991	12.136.710	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
Pembelian tenaga listrik	3.588.983	3.901.980	Purchases of electricity
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa			Purchases of fuel, goods and services
Lainnya (masing-masing dibawah 5% dari sub jumlah)	10.040.181	10.487.812	Others (each below 5% of subtotal)
Subtotal	13.629.164	14.389.792	Subtotal
Jumlah utang usaha	26.284.155	26.526.502	Total of trade account payable

Jangka waktu kredit pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 hari.

Credit terms of payable arising from purchase of electricity, fuel, goods and services, both local and foreign supplier, are approximately 30 days.

Rincian utang usaha dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of trade accounts payable in foreign currencies are as follows:

	2014		2013		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
US$	356.085.611	4.429.705	482.749.364	588.140.232	US$
EUR	13.307.109	201.380	-	-	EUR
Jumlah		4.631.085		588.140.232	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

31. UTANG LAIN-LAIN

31. OTHER PAYABLES

	2014	2013	
Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan			Acquisition of property, plant and equipment and construction in progress
Rupiah	9.532.838	10.777.909	Rupiah
US$ 322.188.702 tahun 2014 dan US$ 385.592.348 tahun 2013)	4.008.027	4.699.985	US$ 322,188,702 in 2014, and US$ 385,592,348 in 2013)
EUR 11.446.166 tahun 2014 dan EUR 12.038.340 tahun 2013)	173.218	202.502	EUR 11,446,166 in 2014 and EUR 12,038,340 in 2013)
CHF 30.396.839 tahun 2014 dan CHF 22.829.614 tahun 2013)	382.478	313.491	CHF 30,396,839 in 2014 and CHF 22,829,614 in 2013)
JPY 644.740.431 tahun 2014 dan JPY 1.846.231.338 tahun 2013)	67.213	214.474	JPY 644,740,431 in 2014 and JPY 1,846,231,338 in 2013)
NZD nihil tahun 2014 dan NZD 335.075 tahun 2013)	-	3.358	NZD nil in 2014 and NZD 335,075 in 2013)
Pemerintah daerah	1.654.096	1.397.898	Regional government
Uang muka penjualan tenaga listrik	420.318	323.630	Advances received on sale of electricity
Karyawan	19.278	74.142	Employees
Lain-lain	188.500	437.168	Others
Jumlah	16.445.966	18.444.557	Total
Dikurangi bagian jangka panjang	98.771	221.150	Less long-term portion
Bagian jangka pendek	16.347.195	18.223.407	Current portion

Pemerintah daerah

Utang kepada pemerintah daerah merupakan jumlah yang ditagih Perusahaan dari pelanggan untuk pajak penerangan jalan umum. Selanjutnya jumlah yang dipungut akan diteruskan kepada pemerintah daerah.

Regional government

Payable to regional government represents amount collected by the Company from the customer for streetlight taxes. This is subsequently remitted to the respective regional government.

Uang muka penjualan tenaga listrik

Akun ini merupakan kas yang diterima atas penjualan listrik prabayar.

Advances received on sale of electricity

This account represents cash received from sale of prepaid electricity.

Karyawan

Utang kepada karyawan terutama merupakan penerimaan dimuka atas cicilan penjualan rumah dinas.

Employees

Payable to employees mainly represents receipt of advance installment payment from employees related to house installment.

32. UTANG PAJAK / 32. TAXES PAYABLE

	2014	2013	
Pajak penghasilan kini	204.622	315.767	Current income tax
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	118.062	79.869	Article 21
Pasal 22	36.906	26.060	Article 22
Pasal 23	57.010	43.320	Article 23
Pasal 4 (2), 15, 25 dan 26	186.686	316.462	Article 4 (2), 15, 25 and 26
Pajak pertambahan nilai	529.444	393.457	Value added tax
Pajak bumi dan bangunan	2.647	146	Land and building taxes
Bea materai	15.871	12.418	Stamp duty
Pajak selisih penilaian kembali aset tetap	-	34.894	Tax on revaluation increment on property, plant and equipment
Jumlah	1.151.248	1.222.393	Total

33. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR / 33. ACCRUED EXPENSES

	2014	2013	
Bunga dan beban keuangan			Interest and financing charges
Pihak berelasi			Related parties
Penalti atas pembelian BBM	18.572	18.266	Penalties on purchases of fuel
Utang bank	344.019	286.252	Bank loans
Utang penerusan pinjaman	227.981	281.653	Two-step loans
Utang kepada pemerintah	30.163	-	Government loan
Jumlah pihak berelasi	620.735	586.171	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Utang bank	400.497	394.358	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	1.319.546	1.473.325	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang sewa pembiayaan	2.141.306	1.795.763	Lease liabilities
Utang listrik swasta	48.837	41.185	Electricity purchase payable
Jumlah pihak ketiga	3.910.186	3.704.631	Total third parties
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek			Short-term employee benefits obligation
Gaji	-	512.674	Salaries
Bonus dan insentif prestasi kerja	3.573.807	2.805.847	Bonus and performance incentives
Lain-lain	166.055	6.875	Others
Jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	3.739.862	3.325.396	Total short-term employee benefits obligation
Sub jumlah	8.270.783	7.616.198	Subtotal
Biaya operasional	1.132.370	1.097.845	Operational charges
Jumlah	9.403.153	8.714.043	Total

Rincian biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of accrued expenses in foreign currencies are as follows:

	2014		2013		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
US$	264.749.763	3.293.487	254.388.120	3.100.737	US$
JPY	4.294.224.806	447.668	2.805.331.271	325.892	JPY
EUR	677.691	10.256	842.301	14.169	EUR
Lain-lain **)	227.936	2.836	278.176	3.391	Others **)
Jumlah		3.754.247		3.444.189	Total

*) Dalam jumlah penuh
**) Biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan.

*) In full amount
**) Accrued expenses denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at reporting date.

34. UANG JAMINAN LANGGANAN

Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besar daya dan golongan tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar.

34. CUSTOMERS' SECURITY DEPOSITS

This account represents security deposits from customers determined based on power supply and electricity tariff. Customer security deposits will be refunded, net of unpaid electricity bills, upon discontinuation of customers' subscriptions.

35. UTANG BIAYA PROYEK

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor atas biaya konstruksi dan pengadaan material yang akan direklasifikasi ke akun penerusan pinjaman pada saat penerbitan *Withdrawal Authorization* (WA) atau dokumen lain yang sejenis.

35. PROJECT COST PAYABLE

This account represents payable to contractors arising from construction of property and equipment and purchases of materials. This account will be reclassified into the two-step loans account when the Company receives the Withdrawal Authorization (WA) or other similar documents.

36. PENJUALAN TENAGA LISTRIK

Penjualan tenaga listrik menurut pelanggan adalah sebagai berikut:

36. SALE OF ELECTRICITY

Sale of electricity by customers is as follows:

	2014	2013	
Pihak berelasi			Related parties
Badan Usaha Milik Negara	5.084.025	5.140.658	State-owned enterprises
Pihak ketiga			Third parties
Umum	172.517.107	141.054.260	Public
Lembaga dan kementerian	8.017.005	6.359.523	Institutions and ministries
TNI dan Polri	1.016.347	931.165	Indonesian Armed Forces
Jumlah pihak ketiga	181.550.459	148.344.948	Total of third parties
Jumlah	186.634.484	153.485.606	Total

Penjualan tenaga listrik tahun 2014 dan 2013 didasarkan pada Tarif Dasar Listrik, yang ditetapkan oleh Pemerintah, sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 09 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014, tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang diperbarui dengan Peraturan No. 19 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014.

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 30 Tahun 2012, tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 33 Tahun 2008, tentang harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.

- Peraturan Walikota Batam No. 40 Tahun 2012, tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.

- Peraturan Walikota Tarakan No. 17 Tahun 2014 tanggal 17 Agustus 2014, tentang pemberlakuan penyesuaian tariff listrik berkala.

Tidak terdapat penjualan kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari penjualan tenaga listrik.

Sale of electricity for the year 2014 and 2013 is based on basic electricity tariff determined by the Government as follows:

- Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 09 Year 2014 dated April 1, 2014, regarding the tariff of electricity provided by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, which has been amended by Regulation No. 19 Year 2014 dated June 30, 2014.

- Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 30 Year 2012, regarding the tariff of electricity provided by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

- Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 33 Year 2008, regarding the selling price of electricity provided by PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.

- Regulation of the Mayor of Batam No. 40 Year 2012, regarding the price of electricity provided by PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.

- Regulation of the Mayor of Tarakan No. 17 Year 2014 dated August 17, 2014, regarding the enforcement of adjusted periodical tariff of electricity.

The Company has no single customer from which it generates revenue of more than 10% of total sale of electricity.

37. SUBSIDI LISTRIK PEMERINTAH

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui Perusahaan. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik Tahun Anggaran 2014 dan 2013 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.02/2013 tanggal 28 Nopember 2013. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula, termasuk tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

37. GOVERNMENT'S ELECTRICITY SUBSIDY

The Government of Republic of Indonesia has provided electricity subsidy to customers through the Company. The procedure for the calculation and payment of electricity subsidy for budget year 2014 and 2013 uses regulation of the Minister of Finance of Republic Indonesia No. 170/PMK.02/2013 dated November 28, 2013. The electricity subsidy is computed as the negative difference between the average sales prices (Rp/kWh) of each tariff category less the cost of electricity supplies on the voltage for each tariff category multiplied by the electricity sales volume (kWh) of each tariff category. The cost of electricity supplies is computed based on the formula, including the rate of transmission and distribution losses which is determined by the Directorate General of Electricity and Energy Consumption under the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi tanggal 30 September 2014, pagu tertinggi subsidi listrik tahun anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp 103.816.319 juta, termasuk 7% margin diatas biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Based on the Approval Letter of Budget Performance List (DIPA) revised on September 30, 2014, the electricity subsidy plafond for budget year 2014 amounted to Rp 103,816,319 million, which includes 7% margin above the costs of supplied electricity.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi pertama tanggal 22 Juli 2013, pagu tertinggi subsidi listrik tahun anggaran 2013 ditetapkan sebesar Rp 99.979.720 juta, termasuk 7% margin diatas biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Based on the Approval Letter of Budget Performance List (DIPA) first revision dated July 22, 2013, the electricity subsidy plafond for budget year 2013 amounted to Rp 99,979,720 million, which includes 7% margin above the costs of supplied electricity.

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

The amount of the electricity subsidy in a budget year is based on the result of the compliance audit of the usage of the electricity subsidy performed by an auditor assigned by the Directorate General of Budget under the Ministry of Finance.

Pada tanggal 26 Februari 2015 dan 25 Februari 2014, Perusahaan telah menerima hasil audit perhitungan subsidi listrik tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 99.303.250 juta dan Rp 101.207.859 juta.

On February 26, 2015 and February 25, 2014, the Company received the final audited result for electricity subsidy for 2014 and 2013 amounting to Rp 99,303,250 million and Rp 101,207,859 million, respectively.

Pendapatan subsidi listrik dirinci sebagai berikut:

The details of revenue from electricity subsidy are as follows:

	2014	2013	
Realisasi penerimaan subsidi tahun anggaran berjalan	80.022.389	79.413.930	Realization of subsidy from current year budget
Piutang subsidi listrik	19.280.861	21.793.929	Receivables on electricity subsidy
Jumlah pendapatan subsidi listrik	99.303.250	101.207.859	Total revenue from electricity subsidy

38. PENDAPATAN USAHA LAIN-LAIN

38. OTHER REVENUES

	2014	2013	
Jaringan dan jasa telekomunikasi	718.169	651.523	Telecommunication network and service
Perubahan daya tersambung dan administrasi	45.529	33.715	Upgrading of electricity power and administration fees
Sewa transformator	198.419	132.697	Transformer rental
Jasa-jasa dan lainnya	197.427	307.843	Services and others
Jumlah	1.159.544	1.125.778	Total

39. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

39. FUEL AND LUBRICANTS EXPENSE

	2014	2013	
Bahan Bakar Minyak			Fuel
Solar High Speed Diesel	65.205.934	59.220.384	Solar High Speed Diesel
Residu	7.795.372	8.970.174	Fuel marine oil
Solar Industrial Diesel	41.663	29.469	Solar Industrial Diesel
Lainnya	130.438	144.711	Others
Sub jumlah	73.173.407	68.364.738	Subtotal
Bahan Bakar - Non Minyak			Nonfuel
Batubara	44.805.655	37.167.790	Coal
Gas alam	47.664.395	37.785.922	Natural gas
Panas bumi	4.309.591	3.706.203	Geothermal
Air	259.870	317.907	Water
Sub jumlah	97.039.511	78.977.822	Subtotal
Minyak pelumas	275.008	291.191	Lubricants
Jumlah	170.487.926	147.633.751	Total

Jumlah pembelian Perusahaan dari pemasok yang melebihi 10% dari total pendapatan Perusahaan adalah masing-masing sebesar Rp 60.747.294 juta dan Rp 58.254.669 juta di tahun 2014 dan 2013 dari PT Pertamina (Persero) (pihak berelasi).

Purchases from a single supplier exceeding 10% of the Company's total revenues were transacted with PT Pertamina (Persero) (a related party) which amounted to Rp 60,747,294 million and Rp 58,254,669 million in 2014 and 2013, respectively.

40. BEBAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK

Akun ini termasuk pembelian tenaga listrik dari IPP selama masa komisioning dan pembelian tenaga listrik dari kelebihan produksi dari IPP tertentu. Rinciannya adalah sebagai berikut:

40. PURCHASED ELECTRICITY

This account includes purchase of electricity from IPPs during the commissioning stage and purchase of excess electricity generated by certain IPPs. The details are as follows:

	2014	2013	
PT Cikarang Listrindo	1.911.609	1.534.398	PT Cikarang Listrindo
PT Indonesia Asahan Aluminium	416.766	117.869	PT Indonesia Asahan Aluminium
PT Makmur Sejahtera Wisesa	251.702	62.017	PT Makmur Sejahtera Wisesa
PT Kalimantan Powerindo	103.922	113.198	PT Kalimantan Powerindo
Lain-lain (dibawah 5% dari jumlah)	808.680	566.308	Others (each below 5% of total)
Jumlah	3.492.679	2.393.790	Total

41. BEBAN SEWA

Akun ini merupakan biaya pembelian tenaga listrik sehubungan perjanjian dengan IPP tertentu yang ditentukan sebagai sewa operasi dengan rincian sebagai berikut:

41. LEASE EXPENSES

This account pertains to purchase of electricity related to certain arrangements with IPPs, classified as operating lease, the details are as follows:

	2014	2013	
Kontrak IPP yang diklasifikasikan sebagai sewa operasi	581.616	1.318.496	IPP's contract classified as rent
Kontrak sewa	7.284.731	6.795.649	Rental contract
Jumlah	7.866.347	8.114.145	Total

Lihat Catatan 54 untuk rincian kontrak IPP dan kontrak sewa.

Refer to Note 54 for details of IPP and other lease arrangements.

42. BEBAN PEMELIHARAAN

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan untuk keperluan pemeliharaan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

42. MAINTENANCE EXPENSES

This account represents spare parts used and contractor fees for maintenance purposes. The details are as follows:

	2014	2013	
Jasa borongan	15.133.566	13.346.054	Contractor fees
Pemakaian material	5.073.095	6.493.411	Spare parts used
Jumlah	20.206.661	19.839.465	Total

43. BEBAN KEPEGAWAIAN

43. PERSONNEL EXPENSES

	2014	2013	
Imbalan kerja	3.901.383	5.026.857	Employee benefits
Gaji	3.522.228	3.749.476	Salaries
Tunjangan	1.396.134	1.133.128	Allowances
Jasa produksi dan insentif prestasi kerja	4.384.027	3.513.942	Bonus and performance incentives
Lain-lain	2.545.706	2.131.660	Others
Jumlah	15.749.478	15.555.063	Total

44. BEBAN USAHA LAIN-LAIN

44. OTHER OPERATING EXPENSES

	2014	2013	
Honorarium	620.856	353.376	Honorarium
Perjalanan dinas	539.268	722.921	Travel
Baca meter	216.004	737.487	Meter reading
Pengelolaan pelanggan	847.251	657.463	Customer maintenance
Penagihan rekening dan penertiban pemakaian tenaga listrik	492.611	471.864	Billing collection and orderliness of electricity used
Asuransi	350.512	417.136	Insurance
Teknologi informasi	458.605	397.932	Technological information
Listrik, gas dan air	278.690	252.803	Electricity, gas and hydro
Lain-lain (dibawah 5% dari jumlah)	1.684.820	1.470.286	Others (each below 5% of total)
Jumlah	5.488.617	5.481.268	Total

45. BEBAN KEUANGAN / 45. FINANCIAL COST

	2014	2013	
Pihak berelasi			Related parties
Utang sewa pembiayaan	2.711.645	2.086.719	Lease liabilities
Utang bank	2.883.238	1.618.454	Bank loans
Penerusan pinjaman	788.463	826.407	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	597.610	616.050	Government loans
Utang usaha atas pembelian BBM	18.514	11.568	Trade accounts payable on purchase of fuel
Jumlah pihak berelasi	6.999.470	5.159.198	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Utang sewa pembiayaan	20.000.752	17.745.477	Lease liabilities
Utang obligasi	6.671.859	5.858.343	Bonds payable
Utang bank	1.695.937	739.542	Bank loans
Utang listrik swasta	460.847	410.077	Electricity purchase payable
Lain-lain	142.346	233.908	Others
Jumlah pihak ketiga	28.971.741	24.987.347	Total third parties
Jumlah	35.971.211	30.146.545	Total

46. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH / 46. OTHERS INCOME (CHARGES) - NET

	2014	2013	
Penghasilan denda administrasi	1.702.851	1.510.863	Administrative penalty income
Penghasilan jasa dan klaim	73.418	87.412	Claim and service income
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi	32.975	223.192	Gain on sale of assets not used in operations
Beban penelitian	(8.512)	(4.743)	Research expenses
Program pemberdayaan lingkungan	(72.707)	(48.182)	Community development programs
Kerugian penurunan nilai aset tetap (Catatan 6)	(408.446)	(559.027)	Loss on impairment of property, plant and equipment (Note 6)
Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi dan ventura bersama*)	487.819	200.175	Equity in net income of associates and joint ventures*)
Lain-lain	2.349.620	382.434	Others
Jumlah	4.157.018	1.792.124	Total

*) Lihat Catatan 8

*) See Note 8

47. PAJAK PENGHASILAN / 47. INCOME TAX

(Beban) manfaat pajak Perusahaan dan entitas anak terdiri dari:

Tax (expense) benefit of the Company and its subsidiaries consist of the following:

	2014	2013	
Pajak kini	(1.276.140)	(1.178.035)	Current tax
Pajak tangguhan	(2.882.638)	9.721.378	Deferred tax
Jumlah (beban) manfaat pajak	(4.158.778)	8.543.343	Total tax (expense) benefits

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan adalah sebagai berikut:

Current Tax

A reconciliation between income (loss) before tax per consolidated statements of comprehensive income and taxable income (fiscal losses) of the Company is as follows:

	2014	2013	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	15.900.388	(34.778.958)	Income (loss) before tax per consolidated statements of comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	(4.481.205)	(3.469.391)	Income before tax attributable to subsidiaries
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	11.419.183	(38.248.349)	Income (loss) before tax - the Company
Perbedaan temporer :			Temporary differences :
Sewa pembiayaan	(101.372)	22.581.520	Lease
Biaya penyambungan pelanggan	159.412	72.925	Customer connection fees
Penyusutan aset tetap	(7.822.000)	(8.407.873)	Depreciation of fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	1.332.084	2.626.307	Employee benefits obligations
Amortisasi biaya emisi obligasi	(1.176)	(3.499)	Amortization of bonds issuance costs
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			Non-deductible expenses (non-taxable income)
Kesejahteraan karyawan	797.173	663.231	Employee welfare
Penyusutan rumah dinas	8.499	12.907	Depreciation of guest house
Penghasilan bunga telah dikenakan pajak final	(437.126)	(351.535)	Interest income subjected to final tax
Beban lain tidak dapat dikurangkan	445.240	2.594.819	Other non-deductible expenses
Laba (rugi) kena pajak Perusahaan tahun berjalan	5.799.917	(18.459.547)	The Company's taxable income (loss) for the year
Rugi fiskal 2013:	(18.459.547)	-	Fiscal losses 2013
Akumulasi rugi fiskal Perusahaan	(12.659.630)	(18.459.547)	Accumulated fiscal losses of the Company

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amount may be adjusted when the Annual Tax Returns are filled with the tax office.

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. Manajemen memperkirakan bahwa akumulasi kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan laba fiskal di masa mendatang masing-masing sebesar Rp 12.659.630 dan Rp 18.459.547 juta tahun 2014 dan 2013.

The fiscal loss can be utilized against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the fiscal loss was incurred. Management believes that probable future taxable profits will be available to utilize accumulated fiscal losses amounting to Rp 12,659,630 and Rp 18,459,547 million in 2014 and 2013, respectively.

Perhitungan beban dan utang pajak kini (pajak penghasilan lebih bayar) adalah sebagai berikut:

Current tax expense and payable (income tax overpayment) are as follows:

	2014	2013	
Beban pajak kini			Current tax expense
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	1.276.140	1.178.035	Subsidiaries
Jumlah	1.276.140	1.178.035	Total
Pembayaran pajak dimuka			Prepayment of taxes
Perusahaan			The Company
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 22	137.047	155.799	Article 22
Pasal 23	10.946	9.425	Article 23
Pasal 25	-	1.833.469	Article 25
Jumlah	147.993	1.998.693	Total
Entitas anak	1.156.222	941.753	Subsidiaries
Jumlah	1.304.215	2.940.446	Total
Utang pajak kini setelah dikurangi pajak dibayar dimuka	(28.075)	(1.762.411)	Current tax payable net of tax prepayments
Terdiri dari			Consist of
Utang pajak kini			Current tax payable
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	204.622	315.767	Subsidiaries
Jumlah hutang pajak kini	204.622	315.767	Total current tax payable
Pajak penghasilan lebih bayar			Income tax overpayment
Perusahaan	(147.993)	(1.998.693)	The Company
Entitas anak	(84.704)	(79.484)	Subsidiaries
Jumlah pajak penghasilan lebih bayar	(232.697)	(2.078.177)	Total income tax overpayment
Bersih	(28.075)	(1.762.410)	Net

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

The details of the Company and its subsidiaries deferred tax assets and liabilities are as follows:

	1 Januari/ *January 1,* 2014	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to income for the period*	31 Desember/ *December 31,* 2014	
Aset pajak tangguhan -				Deferred tax assets
Perusahaan				The Company
Aset Pajak tangguhan				Deferred tax assets
Akumulasi rugi fiskal	4.614.887	(1.449.979)	3.164.908	Accumulated fiscal losses
Sewa pembiayaan	10.208.055	(25.343)	10.182.712	Leases
Liabilitas imbalan kerja	5.946.168	333.021	6.279.189	Employee benefit obligation
Pendapatan ditangguhkan	244.744	39.853	284.597	Deferred income
Jumlah	21.013.854	(1.102.448)	19.911.406	Total
Liabilitas pajak tangguhan				Deferred tax liabilities
Aset tetap	(15.120.388)	(1.955.500)	(17.075.888)	Property, plant and equipment
Lainnya	(2.130)	(293)	(2.423)	Others
Jumlah	(15.122.518)	(1.955.793)	(17.078.311)	Total
Bersih	5.891.336	(3.058.241)	2.833.095	Net
Entitas anak - bersih	41.138	25.615	66.753	Subsidiaries - net
Jumlah Aset pajak tangguhan - bersih	5.932.474	(3.032.626)	2.899.848	Total of deferred tax assets - net
Liabilitas pajak tangguhan - bersih				Deferred tax liabilities - net
Entitas Anak - bersih	(3.902.785)	149.988	(3.752.797)	Subsidiaries - net
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	(3.902.785)	149.988	(3.752.797)	Total of deferred tax liabilities - net
Beban pajak tangguhan		(2.882.638)		Deferred tax expense

	1 Januari/ *January 1,* 2013	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to income for the period*	31 Desember/ *December 31,* 2013	
Aset pajak tangguhan				Deferred tax assets
Perusahaan				The Company
Aset pajak tangguhan				Deferred tax assets
Akumulasi rugi fiskal	171.954	4.442.933	4.614.887	Accumulated fiscal losses
Sew a pembiayaan	4.585.060	5.622.995	10.208.055	Leases
Liabilitas imbalan kerja	5.289.592	656.576	5.946.168	Employee benefit obligation
Pendapatan ditangguhkan	216.842	27.902	244.744	Deferred income
Jumlah	10.263.448	10.750.406	21.013.854	Total
Liabilitas pajak tangguhan				Deferred tax liabilities
Aset tetap	(13.952.700)	(1.167.688)	(15.120.388)	Property, plant and equipment
Lainnya	(1.255)	(875)	(2.130)	Others
Jumlah	(13.953.955)	(1.168.563)	(15.122.518)	Total
Bersih	(3.690.507)	9.581.843	5.891.336	Net
Entitas anak - bersih	28.759	12.379	41.138	Subsidiaries - net
Aset pajak tangguhan - bersih	(3.661.748)	9.594.222	5.932.474	Deferred tax assets - net
Liabilitas pajak tangguhan				Deferred tax liabilities
Entitas anak - bersih	(4.029.941)	127.156	(3.902.785)	Subsidiaries - net
Jumlah	(4.029.941)	127.156	(3.902.785)	Total
Manfaat pajak tangguhan		9.721.378		Deferred tax benefit

Analisis aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The analysis of deferred tax assets and deferred tax liabilities is as follows:

	2014	
Aset pajak tangguhan		Deferred tax assets
Aset pajak tangguhan yang akan dipulihkan setelah 12 bulan	17.072.983	Deferred tax assets to be recovered after 12 months
Aset pajak tangguhan yang akan dipulihkan dalam 12 bulan	2.838.423	Deferred tax assets to be recovered within 12 months
Liabilitas pajak tangguhan		Deferred tax liabilities
Liabilitas pajak tangguhan yang akan dipulihkan setelah 12 bulan	(15.348.834)	Deferred tax liabilities to be recovered after 12 months
Liabilitas pajak tangguhan yang akan dipulihkan dalam 12 bulan	(1.729.477)	Deferred tax liabilities to be recovered within 12 months

Rekonsiliasi antara jumlah manfaat pajak dan hasil perkalian rugi akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak efektif adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax benefit and the amounts computed by applying the effective tax rates to the loss before tax is as follows:

	2014	2013	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	15.900.388	(34.778.958)	Profit (loss) before tax per consolidated statements of comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	(4.481.205)	(3.469.391)	Income before tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak - Perusahaan	11.419.183	(38.248.349)	Income before tax - the Company
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	2.854.796	(9.562.087)	Tax expenses at prevailing rate
Pengaruh pajak atas			Tax effect on
Pengakuan liabilitas pajak tangguhan tahun sebelumnya	-	(756.574)	Recognition of prior year's deferred tax liabilities
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			Non-deductible expenses (non-taxable income)
Kesejahteraan karyawan	199.293	165.808	Employee welfare
Penyusutan rumah dinas	2.125	3.227	Depreciation of guest house
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(109.282)	(87.884)	Interest income subjected to final tax
Beban lain tidak dapat dikurangkan	111.310	648.705	Other nondeductible expenses
Jumlah beban pajak Perusahaan	3.058.242	(9.588.805)	Tax expense - the Company
Beban pajak entitas anak	1.100.536	1.045.462	Tax expense - Subsidiaries
Jumlah	4.158.778	(8.543.343)	Total

Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

Pada tahun 2014, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan (PPh) badan tahun 2012 sebesar Rp 1.330.243 juta dan menetapkan kenaikan laba fiskal sebesar Rp 4.540.925 juta. Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB PPh badan tahun 2012. Atas pengajuan keberatan ini, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp 182.496 juta. Perusahaan juga menerima Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. KEP-1764/WPJ.19/2014 tanggal 3 September 2014 tentang penolakan atas pengajuan keberatan Perusahaan mengenai SKPKB PPh pasal 4 ayat 2 tahun 2011 sebesar Rp 13.030 juta, atas keputusan tersebut Perusahaan menerima dan mencatat sebagai beban lain-lain.

Pada tahun 2013, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan (PPh) badan tahun pajak 2011 sebesar Rp 84.857 juta dan penetapan laba fiskal tahun 2011 sebesar Rp 8.099.968 juta menjadi sebesar Rp 11.506.614 juta. Perusahaan mengajukan keberatan kepada DJP pada bulan Desember 2013 dan ditolak DJP pada bulan Nopember 2014.

Pada tahun 2012, Perusahaan menerima SKPLB atas PPh badan tahun pajak 2010 sebesar Rp 98.148 juta dan penetapan laba fiskal tahun 2010 sebesar Rp 6.627.167 juta menjadi sebesar Rp 9.627.659 juta. Perusahaan juga menerima SKPKB PPh pasal 4 ayat 2, pasal 21, pasal 23, dan pasal 26 dan PPN tahun 2010 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 141.012 juta. Perusahaan mengajukan Surat Keberatan atas SKPKB PPh pasal 23 dan 26 sebesar Rp 84.305 juta, sedangkan SKPKB sebesar Rp 59.918 juta telah diterima dan dicatat Perusahaan sebagai beban lain-lain. Pada bulan Januari 2014, DJP menolak keberatan tersebut dan Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan April 2014.

Tax Assessment Letters

The Company

In 2014, the Company received a tax assessment letter for the underpayment (SKPKB) of corporate income tax for fiscal year 2012 amounting to Rp 1,330,243 million and increased the taxable income amounting to Rp 4,540,925 millon. The Company has submitted an objection letter with regard to SKPKB of corporate income tax for fiscal year 2012. Related to this objection the Company has paid Rp 182,496 million. The Company also received Decision Letter of the Directorate General of Tax (DGT) No. KEP-1764/WPJ.19/2014 dated September 3, 2014 about the refusal of the objection letter related to the SKPKB of income tax article 4 section 2 amounting to Rp 13,030 million. The Company has recorded the amount as other expenses.

In 2013, the Company received a tax assessment letter for the overpayment (SKPLB) of corporate income tax for fiscal year 2011 amounting to Rp 84,857 million and increased the taxable income for the year 2011 from Rp 8,099,968 million to Rp 11,506,614 million. The Company submitted an objection to DGT in December 2013 and rejected by DGT in November 2014.

In 2012, the Company received an SKPLB of corporate income tax for fiscal year 2010 amounting to Rp 98,148 million and for the increased the taxable income for the year 2010 from Rp 6,627,167 million to Rp 9,627,659 million. The Company also received an SKPKB of income tax article 4 section 2, article 21, article 23, article 26 and value added tax for fiscal year 2010 with the total amount of Rp 141,012 million. The Company submitted an objection letter with regard to the SKPKB of income tax article 23 and 26 amounting to Rp 84,305 million while the SKPKB amounting to Rp 59,918 million has been accepted and recorded by the Company as other expense. In January 2014, DGT rejected the objection and the Company filed an appeal against the rejection in April 2014.

Pada tahun 2011, Perusahaan menerima SKPKB dan STP PPh pasal 4 ayat (2), pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 26 dan PPN tahun 2009, 2007 dan 2006 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.636.826 juta. Perusahaan mengajukan surat keberatan atas SKPKB pajak penghasilan pasal 23, pasal 26 dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp 1.360.282 juta, sedangkan SKPKB dan STP sebesar Rp 276.544 juta telah diterima dan dicatat Perusahaan sebagai beban lain-lain. Pada bulan Mei dan Juni 2012, DJP menolak keberatan yang diajukan oleh Perusahaan. Kemudian Perusahaan mengajukan banding pada bulan Agustus dan September 2012. Pada bulan Oktober 2013, Pengadilan Pajak menyetujui banding atas PPh pasal 23 dan mengembalikan kelebihan bayar pajak sebesar Rp 181.908 juta.

In 2011, the Company received SKPKB and tax collection notice (STP) of income tax article 4 section (2), article 21, article 22, article 23 and article 26 and value added tax for fiscal years 2009, 2007 and 2006 with the total amount of Rp 1,636,826 million. The Company filed an objection letter on the SKPKB of income tax article 23, article 26 and value added tax amounting to Rp 1,360,282 million, while the SKPKB and STP amounting to Rp 276,544 million has been acepted and recorded by the Company as other expense. In May and June 2012, DGT rejected the Company's objections. Then the Company filed appeals in August and September 2012. In October 2013, Tax Court accepted the Company's appeal for income tax article 23 and refunded the tax overpayments of Rp 181,908 million.

Pada tahun 2010, Perusahaan menerima SKPKB dan STP PPh pasal 4 ayat (2), pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26 dan PPN tahun pajak 2008 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.006.727 juta. Perusahaan mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh pasal 23 dan pasal 26 sebesar Rp 915.996 juta, dan sebagian telah diterima dan dicatat Perusahaan sebagai beban lain-lain. Pada bulan Oktober 2011, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menolak keberatan yang diajukan Perusahaan. Selanjutnya pada bulan Desember 2011, Perusahaan mengajukan banding atas penolakan dari DJP tersebut.

In 2010, the Company received an SKPKB and STP of income tax article 4 section (2), article 21, article 22, article 23, article 26 and value added tax for fiscal year 2008 with the total amount of Rp 1,006,727 million. The Company submitted an objection letter on the SKPKB of income tax article 23 and article 26 amounting to Rp 915,996 million, and the Company accepted and recorded the remaining balance as other expenses. In October 2011, DGT rejected the objection submitted by the Company. Furthermore, in December 2011, the Company filed an appeal against the rejection.

Sehubungan dengan Perusahaan mengajukan surat keberatan dan banding, pembayaran yang telah dilakukan atas SKPKB tersebut sebesar Rp 2.164.151 juta dan Rp 1.994.986 juta tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dicatat sebagai pajak dibayar dimuka (Catatan 18).

Due to the objections and appeals filed by the Company against the SKPKB, payments made by the Company for the SKPKB amounting to Rp 2,164,151 and Rp 1,994,986 million as of December 31, 2014 and 2013, respectively, was recorded as prepaid taxes (Note 18).

48. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Laba (Rugi)

Laba (rugi) bersih untuk tujuan perhitungan laba (rugi) per saham dasar tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 11.726.406 juta dan (Rp 26.232.034) juta.

Jumlah saham

Rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan rugi dan laba per saham dasar adalah 46.197.380 saham tahun 2014 dan 2013.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

48. BASIC AND DILUTED EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Profit (Loss)

Net income (loss) for the computation of basic earnings (loss) per share in 2014 and 2013 amounted to Rp 11,726,406 million and (Rp 26,232,034) million, respectively.

Number of shares

The weighted average number of shares for the computation of basic loss and earnings per share was 46,197,380 shares in 2014 and 2013.

The Company did not have potential dilutive ordinary shares, thus basic earnings per share is the same as the diluted earnings per share.

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja Karyawan

Program Pensiun Imbalan Pasti

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan pasca kerja berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN (Persero) (DP-PLN), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-078/KM.12/2006 tanggal 29 Agustus 2006 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Perusahaan dan entitas anak dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan sebesar 6% dan pemberi kerja sebesar 12,38%.

Imbalan Pasca-Kerja Lain

Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan pasca-kerja lain tanpa pendanaan berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian, tunjangan tambahan penghasilan dan penghargaan purna jabatan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan entitas anak. Imbalan program ini ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja karyawan.

Imbalan Pemeliharaan Kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN dan imbalan pasca kerja lain, Perusahaan dan entitas anak menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan kerja jangka panjang tanpa pendanaan berupa uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan pemakaman dan penghargaan winduan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

49. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

Post-employment Benefits Obligation

Defined Benefit Pension Plan

The Company and its subsidiaries established a defined benefit pension plan covering all of its eligible permanent employees. This plan provides pension benefits based on years of service and salaries of the employees.

The pension plan is managed by Dana Pensiun PLN (Persero) (DP-PLN), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated May 15, 1997.

DP-PLN obtained an approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-078/KM.12/2006 dated on August 29, 2006 in relation to the increase in pension benefits provided by the Company and its subsidiaries' pension plan.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees, which is 6% and the employer, which is 12.38%.

Other Post-employment Benefits

The Company and its subsidiaries also provide other unfunded defined post-employment benefit plans such as severance pay, service pay, compensation pay, additional allowance and functional retirement pay for their qualifying employees based on the Company and its subsidiaries' policies. These other post-employment benefits are computed based on the salaries and service years of the employees.

Health Care Benefits

In addition to the pension plan managed by DP-PLN and the other post-employment benefits, the Company and its subsidiaries also provide unfunded health care benefit plans for their pensioners and their eligible dependents.

Long-term Benefits

The Company and its subsidiaries also provide unfunded defined long-term benefit plans such as long service leave, work accident, death and funeral allowances, and eight years service award for their qualifying employees.

Perhitungan imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang ini dihitung oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris independen. Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris adalah sebagai berikut :

The cost of providing post-employment and long-term benefits were calculated by an independent actuary, PT Binaputera Jaga Hikmah. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions :

	2014	2013	
Umur pensiun normal	56	56	Normal retirement age
Hasil diharapkan dari aset program	10%	10%	Expected rate of return on plan assets
Tingkat diskonto per tahun:			Discount rate per annum:
Program pensiun, jaminan pemeliharaan kesehatan	8,54%	8,97%	Pension plan, health care benefits
Program pasca kerja lainnya, imbalan kerja jangka panjang lainnya	8,34%	8,97%	Other post-employment benefits, long-term benefits
Tingkat kenaikan gaji per tahun	6,80%	5%	Rate of salary increase per annum
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	9%	9%	Rate of health cost increase

Asumsi mortalita ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria yang menggunakan statistik yang telah dipublikasikan secara umum dan pengalaman Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2014, asumsi mortalita yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan ditentukan berdasarkan tabel statistik TMI III. Perusahaan memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan sepanjang umur pensiunan, sehingga kenaikan tingkat harapan hidup menyebabkan kenaikan liabilitas pasca-kerja karyawan.

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience of the Company. As at December 31, 2014, the mortality assumptions used for the post-employment benefits obligations are based on the statistics produced in the TMI III table. The plan's obligations are to provide benefits for the life of the member, so increases in life's expectancy will result in an increase in the post-employment liabilities.

Beban imbalan kerja Perusahaan dan entitas anak dibebankan ke beban kepegawaian adalah sebagai berikut:

The Company and its subsidiaries' employee benefit expenses charged to personnel expenses are as follows:

	2014					
	Imbalan pasca-kerja/ *Post-employment benefit*			Imbalan kerja jangka panjang/ *Long-term benefits*	Jumlah/ *Total*	
	Program pensiun/ *Pension plan*	Pasca-kerja lain/ *Other post-employment*	Pemeliharaan kesehatan/ *Health care benefits*			
Biaya jasa kini	95.447	424.418	444.907	228.340	1.193.112	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	25.822	-	-	25.822	Past service cost
Hasil aset program diharapkan	(604.258)	-	-	-	(604.258)	Expected return on plan assets
Beban bunga	478.994	775.554	1.638.020	59.146	2.951.714	Interest costs
(Keuntungan) kerugian aktuari	(3.545)	(105.446)	66.790	196.299	154.098	Actuarial (gain) losses
Dampak pembatasan aset	180.895	-	-	-	180.895	Asset limitation
Jumlah	147.533	1.120.348	2.149.717	483.785	3.901.383	Total

	2013					
	Imbalan pasca-kerja/ *Post-employment benefit*			Imbalan kerja jangka panjang/ *Long-term benefits*		
	Program pensiun/ *Pension plan*	Pasca-kerja lain/ *Other post-employment*	Pemeliharaan kesehatan/ *Health care benefits*		Jumlah/ *Total*	
Biaya jasa kini	113.668	761.039	928.505	253.588	2.056.800	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	25.395	-	110	25.505	Past service cost
Hasil aset program diharapkan	(637.663)	-	-	-	(637.663)	Expected return on plan assets
Beban bunga	316.010	786.920	1.580.350	71.613	2.754.893	Interest costs
(Keuntungan) kerugian aktuaria	(2.579)	118.880	720.338	(365.286)	471.353	Actuarial (gain) losses
Dampak pembatasan aset	355.969	-	-	-	355.969	Asset limitation
Jumlah	145.405	1.692.234	3.229.193	(39.975)	5.026.857	Total

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

The Company and its subsidiaries movement in the present value of employee benefits obligation are as follows:

	2014					
	Program pensiun/ *Pension plan*	Pasca-kerja lain/ *Other post-employment*	Pemeliharaan kesehatan/ *Health care benefits*	Jangka panjang/ *Long-term*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal tahun	5.340.201	8.660.226	18.261.698	984.697	33.246.822	Balance at beginning of year
Biaya jasa kini	95.447	424.418	444.907	228.340	1.193.112	Current service cost
Beban bunga	478.994	775.554	1.638.020	59.146	2.951.714	Interest cost
Kerugian aktuaria	815.065	2.829.661	24.481.360	184.875	28.310.961	Actuarial losses
Manfaat yang dibayarkan	(525.132)	(1.315.983)	(525.308)	(304.508)	(2.670.931)	Benefits paid
Saldo akhir tahun	6.204.575	11.373.876	44.300.677	1.152.550	63.031.678	Balance at end of year

	2013					
	Program pensiun/ *Pension plan*	Pasca-kerja lain/ *Other post-employment*	Pemeliharaan kesehatan/ *Health care benefits*	Jangka panjang/ *Long-term*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal tahun	5.283.462	13.061.587	26.421.238	1.196.632	45.962.919	Balance at beginning of year
Biaya jasa kini	113.668	761.039	928.505	253.588	2.056.800	Current service cost
Beban bunga	316.010	786.920	1.580.350	71.613	2.754.893	Interest cost
(Keuntungan) kerugian aktuaria	51.832	(4.918.150)	(9.792.347)	(314.503)	(14.973.168)	Actuarial (gains) losses
Manfaat yang dibayarkan	(424.771)	(1.114.737)	(876.048)	(222.743)	(2.638.299)	Benefits paid
Liabilitas Imbalan Kerja awal tahun entitas anak yang diakuisisi	-	83.567	-	110	83.677	Defined benefit obligation beginning of year of subsidiaries acquired
Saldo akhir tahun	5.340.201	8.660.226	18.261.698	984.697	33.246.822	Balance at end of year

Liabilitas imbalan kerja Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

The Company and its subsidiaries' employee benefits obligation are as follows:

	2014					
	Program pensiun/ *Pension plan*	Pasca-kerja lain/ *Other post-employment*	Pemeliharaan kesehatan/ *Health care benefits*	Jangka panjang/ *Long-term*	Jumlah/ *Total*	
Nilai kini liabilitas	6.204.575	11.373.876	44.300.677	1.152.550	63.031.678	Present value of obligation
Biaya jasa lalu belum diakui	-	(71.673)	-	-	(71.673)	Unrecognized past service cost
Keuntungan (kerugian) aktuaria belum diakui	(199.357)	(950.478)	(27.182.455)	-	(28.332.290)	Unrecognized actuarial gains (losses)
Kekayaan yang tidak diakui	1.244.178	-	-	-	1.244.178	Asset not recognized
Nilai w ajar aset program	(7.249.396)	-	-	-	(7.249.396)	Fair value of plan assets
Liabilitas imbalan kerja	-	10.351.725	17.118.222	1.152.550	28.622.497	Employee benefits obligation
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	-	(1.960.267)	(579.688)	(160.151)	(2.700.106)	Current maturities
Bagian jangka panjang	-	8.391.458	16.538.534	992.399	25.922.391	Long-term portion

	2013					
	Program pensiun/ *Pension plan*	Pasca-kerja lain/ *Other post-employment*	Pemeliharaan kesehatan/ *Health care benefits*	Jangka panjang/ *Long-term*	Jumlah/ *Total*	
Nilai kini liabilitas	5.340.201	8.660.226	18.261.698	984.697	33.246.822	Present value of obligation
Biaya jasa lalu belum diakui	-	(97.495)	-	-	(97.495)	Unrecognized past service cost
Keuntungan (kerugian) aktuaria belum diakui	(159.116)	1.955.157	(2.799.909)	-	(1.003.868)	Unrecognized actuarial gains (losses)
Kekayaan yang tidak diakui	1.239.908	15.395	-	-	1.255.303	Asset not recognized
Nilai w ajar aset program	(6.420.993)	-	-	-	(6.420.993)	Fair value of plan assets
Liabilitas imbalan kerja	-	10.533.283	15.461.789	984.697	26.979.769	Employee benefits obligation
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	-	(1.673.262)	(502.157)	(409.061)	(2.584.480)	Current maturities
Bagian jangka panjang	-	8.860.021	14.959.632	575.636	24.395.289	Long-term portion

Mutasi nilai wajar aset program imbalan kerja Perusahaan dan entitas anak sehubungan dengan program pensiun adalah sebagai berikut :

Movements in the Company and it's subsidiaries fair value of employee benefits plan assets related to pension plan are as follows:

	2014	2013	
Saldo aw al tahun	6.420.993	6.656.842	Balance at beginning of year
Pengembalian yang diharapkan dari aset program	604.258	637.663	Expected return on plan assets
Keuntungan (kerugian) aktuaria	601.743	(594.146)	Actuarial gains (losses)
Pembayaran imbalan oleh pemberi kerja	147.534	145.405	Contributions from the employer
Manfaat yang dibayarkan	(525.132)	(424.771)	Benefits paid
Saldo akhir tahun	7.249.396	6.420.993	Balance at end of year

Kategori utama dari aset program adalah sebagai berikut:

The major categories of plan assets is as follows:

	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets*		
	2014	2013	
	Rp	Rp	
Instrumen ekuitas	670.467	554.614	Equity instruments
Instrumen utang	4.319.395	3.857.886	Debt instruments
Properti	630.782	590.462	Property
Lain-lain	1.628.752	1.418.031	Others
Jumlah	7.249.396	6.420.993	Total

Keseluruhan tingkat keuntungan atas aset yang diharapkan ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar pada tanggal pengukuran, berlaku untuk periode saat kewajiban diselesaikan.

The overall expected rate of return on assets is determined based on the market expectations prevailing on that date, applicable to the period over which the obligation is to be settled.

Hasil aktual atas aset program adalah sebesar Rp 630.563 juta untuk tahun 2014 dan Rp 43.517 juta untuk tahun 2013.

The actual return on plan assets was Rp 630,563 million in 2014 and Rp 43,517 million in 2013.

Historis penyesuaian yang terjadi adalah sebagai berikut:

The history of experience adjustments is as follows:

	2014	2013	2012	2011	2010	
Nilai wajar liabilitas imbalan pasti	63.031.678	33.246.822	45.962.919	41.561.052	33.388.204	Present value of employee benefits obligation
Nilai wajar aset program	7.249.396	6.420.993	6.656.842	5.784.929	5.401.780	Fair value of plan asset
Defisit	55.782.282	26.825.829	39.306.077	35.776.123	27.986.424	Deficit
Penyesuaian liabilitas imbalan program	8.764.859	(13.186.477)	3.374.327	6.933.376	4.786.129	Experience adjustments on plan liabilities
Penyesuaian aset program	(11.536)	-	-	-	-	Experience adjustments on plan assets

Perusahaan dan entitas anak mengekspektasikan untuk membayar kontribusi pada program pensiun imbalan pasti sebesar Rp 125.275 juta pada tahun berikutnya.

The Company and its subsidiaries expect to make a contribution of Rp 125,275 million to the defined benefits plans during the next financial year.

Pengaruh satu persen perubahan pada biaya imbalan manfaat kesehatan yang diasumsikan akan menyebabkan perubahan agregat biaya jasa dan bunga dan akumulasi liabilitas imbalan pasca-kerja untuk biaya kesehatan pada periode-periode berikut:

The effect of a one percentage point change in assumed health care benefits rate would result in the following changes to the aggregate service and interest costs and the accumulated post-employment obligation for health care as of these periods:

	2014	2013	
Kenaikan 1%			**Increase 1%**
Biaya jasa agregat dan bunga	230.558	3.012.281	Aggregate service and interest cost
Akumulasi liabilitas imbalan pasca-kerja untuk biaya kesehatan	7.384.912	21.324.586	Accumulated post-employment obligation for healthcare
Penurunan 1%			**Decrease 1%**
Biaya jasa agregat dan bunga	207.205	2.131.330	Aggregate service and interest cost
Akumulasi liabilitas imbalan pasca-kerja untuk biaya kesehatan	5.901.277	17.481.069	Accumulated post-employment obligation for healthcare

50. TRANSAKSI NON-KAS

50. NON-CASH TRANSACTIONS

	2014	2013	
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas :			Non-cash investing and financing activities :
Perolehan aset sewaan melalui utang sewa pembiayaan	4.319.964	5.309.239	Acquisition of leased assets through lease liability
Perolehan pekerjaan dalam pelaksanaan melalui :			Additions to construction in progress through :
Penarikan pinjaman dan utang biaya proyek	1.695.567	2.552.334	Drawdown of loans and project cost payable
Bantuan Pemerintah	2.595.489	4.971.059	Government equity participation
Kapitalisasi kerugian kurs	997.479	1.279.751	Capitalization of foreign exchange losses
Kapitalisasi beban penyusutan	109.206	15.307	Capitalization of depreciation expense
Mutasi utang lain-lain	(2.047.945)	1.190.681	Movement of other payables

51. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat Hubungan Berelasi

a. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

b. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Menteri Keuangan.

c. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (Catatan 8).

d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

51. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Related Parties

a. The Government is the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Stockholder of the Company and State-Owned Enterprises (SOE).

b. The Company is related to other SOE owned by the Ministry of Finance.

c. The Company and its subsidiaries have significant influence on investments in associates or joint ventures (Note 8).

d. The Board of Commissioners and Directors is a member of the key management of the Company and its subsidiaries.

Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*
PT Pertadaya Gas	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
Bank Rakyat Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
Bank Mandiri	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
Bank Negara Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT Wijaya Karya - Navigat	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT Pertamina Geothermal Energi	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT Wijaya Karya - Mirlindo Padu Kencana	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT Pertamina (Persero) (Pertamina)	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT Tambang Batubara Bukit Asam	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT Perusahaan Gas Negara	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT Wijaya Karya	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT Transportasi Gas Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT Nusantara Regas	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT Surveyor Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT Sucofindo	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT Superintending Company of Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT Jakarta Lloyd	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT Asuransi Jasa Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT Jasa Tirta	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT PAL Indonesia	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
BUMN lainnya/ other SOE	BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ *other SOE owned by Ministry of Finance*
PT Geo Dipa Energy	Entitas asosiasi/ *Associate*
PT Tanjung Kasam Pow er	Entitas asosiasi/ *Associate*
PT Dalle Energy Batam	Entitas asosiasi/ *Associate*
PT Mitra Energi Batam	Entitas asosiasi/ *Associate*
PT Sumber Segara Primadaya	Entitas asosiasi/ *Associate*
PT Bajradaya Sentranusa Asahan	Entitas asosiasi/ *Associate*
PT Komipo Pembangkitan Jaw a Bali	Entitas asosiasi/ *Associate*
Dana pensiun PLN	Program imbalan pascakerja/ *Post-employment benefit plan*

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Balances and Transactions with Related Parties

	Catatan/ *Notes*	2014 Rp	2014 % *)	2013 Rp	2013 % *)	
Piutang pihak berelasi	9					Receivables from related parties
PT Perta Daya Gas		249.072	0,04%	188.369	0,03%	PT Perta Daya Gas
PT Geo Dipa Energi		76.500	0,01%	-	0,00%	PT Geo Dipa Energi
PT Komipo - PJB		27.441	0,00%	22.345	0,00%	PT Komipo - PJB
PT Tanjung Kasam Power		23.935	0,00%	-	0,00%	PT Tanjung Kasam Power
PT Dalle Energy Batam		960	0,00%	5.314	0,00%	PT Dalle Energy Batam
PT Mitra Energi Batam		3.712	0,00%	65	0,00%	PT Mitra Energi Batam
Sub jumlah		381.620	0,05%	216.093	0,03%	Subtotal
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	10					Restricted cash in banks and time deposits
Bank Rakyat Indonesia		450	0,00%	930	0,00%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri		6.733	0,00%	47.515	0,01%	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia		506	0,00%	71.231	0,01%	Bank Negara Indonesia
Sub jumlah		7.689	0,00%	119.676	0,02%	Subtotal
Kas dan setara kas	12					Cash and cash equivalents
Bank Rakyat Indonesia		9.349.008	1,55%	6.541.628	1,10%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia		5.559.268	0,92%	5.951.026	1,00%	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri		4.375.766	0,72%	5.734.638	0,97%	Bank Mandiri
Bank Tabungan Negara		29.360	0,00%	-	0,00%	Bank Tabungan Negara
Sub jumlah		19.313.402	3,19%	18.227.292	3,07%	Subtotal
Investasi jangka pendek	13					Short-term investment
Bank Rakyat Indonesia		84.100	0,01%	87.363	0,01%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia		-	0,00%	1.000	0,00%	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri		9.790	0,00%	3.750	0,00%	Bank Mandiri
Sub jumlah		93.890	0,01%	92.113	0,01%	Subtotal
Piutang usaha	14					Trade accounts receivable
Badan Usaha Milik Negara		584.802	0,10%	409.167	0,07%	State-owned enterprises
Piutang subsidi listrik	15	19.280.861	3,19%	21.793.929	3,69%	Receivables on electricity subsidy
Jumlah		39.662.264	6,54%	40.858.270	6,89%	Total

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan/Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses

	Catatan/ *Notes*	2014		2013		
		Rp	% *)	Rp	% *)	
Penerusan pinjaman	23	29.097.684	6,62%	32.707.043	7,43%	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	24	8.665.726	1,97%	8.872.509	2,02%	Government loans
Utang sewa pembiayaan	25					Lease liabilities
PT Sumber Segara Primadaya		6.631.483	1,51%	6.507.209	1,48%	PT Sumber Segara Primadaya
PT Bajradaya Sentranusa Asahan		4.297.521	0,98%	4.227.536	0,96%	PT Bajradaya Sentranusa Asahan
PT Geo Dipa Energy		1.413.227	0,32%	-	0,00%	PT Geo Dipa Energy
PT Tanjung Kasam Power		1.193.605	0,27%	1.204.081	0,27%	PT Tanjung Kasam Power
PT Pertamina Geothermal Energi		867.690	0,20%	858.225	0,19%	PT Pertamina Geothermal Energi
PT Dalle Energy Batam		711.425	0,16%	734.065	0,16%	PT Dalle Energy Batam
PT Wijaya Karya - Navigat		576.192	0,13%	656.535	0,15%	PT Wijaya Karya - Navigat
PT Wijaya Karya - Mirlindo Padu Kencana		404.096	0,09%	464.392	0,10%	PT Wijaya Karya - Mirlindo Padu Kencana
PT Mitra Energi Batam		112.408	0,03%	117.813	0,02%	PT Mitra Energi Batam
Sub jumlah		16.207.647	3,68%	14.769.856	3,33%	Subtotal
Utang bank	26					Bank loans
Bank Rakyat Indonesia		13.033.795	2,97%	13.068.429	2,97%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia		5.097.986	1,16%	4.860.105	1,10%	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri		8.878.910	2,02%	10.400.260	2,36%	Bank Mandiri
Sub jumlah		27.010.691	6,15%	28.328.794	6,43%	Subtotal
Utang pihak berelasi	29					Payable to related parties
PT Mitra Energi Batam		5.434	0,00%	6.304	0,00%	PT Mitra Energi Batam
PT Dalle Energy Batam		1.897	0,00%	3.388	0,00%	PT Dalle Energy Batam
Sub jumlah		7.331	0,00%	9.692	0,00%	Subtotal
Utang usaha	30					Trade accounts payable
Pertamina		9.820.434	2,23%	9.994.110	2,27%	Pertamina
PT Tambang Batubara Bukit Asam		677.527	0,15%	739.129	0,16%	PT Tambang Batubara Bukit Asam
PT Perusahaan Gas Negara		802.366	0,18%	632.717	0,14%	PT Perusahaan Gas Negara
PT Sumber Segara Primadaya		242.638	0,06%	250.840	0,05%	PT Sumber Segara Primadaya
PT Dalle Energy Batam		44.680	0,01%	44.598	0,01%	PT Dalle Energy Batam
PT Bajradaya Sentranusa		104.664	0,02%	69.686	0,01%	PT Bajradaya Sentranusa
PT Pertamina Geothermal Energy		35.078	0,01%	88.489	0,02%	PT Pertamina Geothermal Energy
PT Mitra Energi Batam		41.897	0,01%	-	0,00%	PT Mitra Energi Batam
PT Wijaya Karya		59.006	0,01%	111.696	0,02%	PT Wijaya Karya
PT Jasa Tirta		65.535	0,01%	52.117	0,01%	PT Jasa Tirta
PT Transportasi Gas Indonesia		-	0,00%	2.928	0,00%	PT Transportasi Gas Indonesia
PT Nusantara Regas		536.370	0,12%	9.315	0,00%	PT Nusantara Regas
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		75.919	0,02%	51.169	0,01%	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
PT Surveyor Indonesia		6.370	0,00%	3.334	0,00%	PT Surveyor Indonesia
PT Sucofindo		5.708	0,00%	2.076	0,00%	PT Sucofindo
PT Superintending Company of Indonesia		-	0,00%	989	0,00%	PT Superintending Company of Indonesia
PT Jakarta Lloyd - Rupiah		3.098	0,00%	-	0,00%	PT Jakarta Lloyd - Rupiah
PT Tanjung Kasam Power - Rupiah		50.400	0,01%	-	0,00%	PT Tanjung Kasam Power - Rupiah
Lain-lain		83.301	0,02%	-	0,00%	Others
Sub jumlah		12.654.991	2,86%	12.053.193	2,70%	Subtotal
Biaya masih harus dibayar	33					Accrued expenses
Penerusan pinjaman		227.981	0,05%	281.653	0,06%	Two-step loans
Utang bank						Bank loans
Bank Rakyat Indonesia		140.735	0,03%	109.880	0,02%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia		41.089	0,01%	39.456	0,00%	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri		162.195	0,04%	136.916	0,03%	Bank Mandiri
Penalti atas pembelian BBM						Penalties on purchase of fuel
Pertamina		18.572	0,00%	18.266	0,00%	Pertamina
Utang kepada Pemerintah		30.163	0,01%	-	0,00%	Government loan
Subjumlah		620.735	0,14%	586.171	0,11%	Subtotal
Jumlah		94.264.805	21,42%	97.327.258	22,02%	Total

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan/*Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses*

	Catatan/ *Notes*	2014		2013		
		Rp	% *)	Rp	% *)	
Penjualan tenaga listrik	36					Sale of electricity
Badan Usaha Milik Negara		5.084.025	2,72%	5.140.658	3,34%	State-owned enterprises
Subsidi listrik Pemerintah	37	99.303.250	100,00%	101.207.859	100,00%	Government's electricity subsidy
Beban bahan bakar dan pelumas	39					Fuel and lubricants expense
Pertamina		60.747.294	35,63%	58.254.669	39,46%	Pertamina
PT Nusantara Regas		12.601.820	7,39%	10.115.261	6,85%	PT Nusantara Regas
PT Perusahaan Gas Negara		7.805.325	4,58%	5.617.380	3,80%	PT Perusahaan Gas Negara
PT Tambang Batubara Bukit Asam		1.700.791	1,00%	2.153.673	1,46%	PT Tambang Batubara Bukit Asam
Jumlah		82.855.230	48,60%	76.140.983	51,57%	Total
Beban pemeliharaan	42					Maintenance expenses
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		574.025	2,84%	536.710	2,71%	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
Beban usaha lain-lain	44					Other operating expenses
PT Asuransi Jasa Indonesia		342.468	6,24%	-	0,00%	PT Asuransi Jasa Indonesia
PT Sucofindo		33.553	0,61%	19.095	0,35%	PT Sucofindo
PT Surveyor Indonesia		26.480	0,48%	9.295	0,17%	PT Surveyor Indonesia
		402.501	7,33%	28.390	0,52%	
Beban keuangan	45					Financial cost
Utang bank		2.883.238	8,01%	1.618.454	5,37%	Bank loans
Utang sewa pembiayaan		2.711.645	7,53%	2.086.719	6,92%	Lease liabilities
Penerusan pinjaman		788.463	2,19%	826.407	2,74%	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah		597.610	1,66%	616.050	2,04%	Government loans
Utang usaha pembelian bahan bakar		18.514	0,05%	11.568	0,04%	Trade accounts payable on purchase of fuel
Jumlah		6.999.470	19,44%	5.159.198	17,11%	Total

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan pada tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 12.866 juta Rp 14.424 juta.

Total compensation of the Company's Board of Commissioners in 2014 and 2013 amounted to Rp 12,866 million and Rp 14,424 million, respectively.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 29.057 juta dan Rp 45.951 juta.

Total compensation of the Company's Directors in 2014 and 2013 amounted to Rp 29,057 million and Rp 45,951 million, respectively.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

All the compensation to the Company's Board of Commissioners and Directors represent short-term employee benefits.

Informasi mengenai kontribusi yang dilakukan Perusahaan dan entitas anak ke DP-PLN diungkapkan di Catatan 49.

Information about the contributions made by the Company and its subsidiaries to DP-PLN is disclosed in Note 49.

52. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan dan entitas anak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

52. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

At December 31, 2014 and 2013, the Company and its subsidiaries had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

	2014				
	JPY *)	US$ *)	EUR *)	Lain-lain/ *Others* **)	
Aset moneter					**Monetary assets**
Piutang pihak berelasi	-	18.191.532	-	-	Receivables from related parties
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	52.494.647.420	40.903.457	-	-	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	1.823.340.554	291.919.659	53.106.807	472.085	Cash and cash equivalents
Jumlah aset moneter	54.317.987.974	351.014.648	53.106.807	472.085	Total monetary assets
Liabilitas moneter					**Monetary liabilities**
Penerusan pinjaman	190.798.089.873	601.566.178	75.060.997	21.494.548	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	245.888.101.122	8.354.867.595	-	-	Lease liability
Utang bank	-	3.060.799.804	46.441.613	-	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	-	5.550.000.000	-	-	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	-	558.350.954	-	-	Electricity purchase payable
Utang lain-lain	644.740.431	322.188.702	11.446.166	30.745.828	Other payables
Utang biaya proyek	1.836.781.529	29.233.124	4.989.618	-	Project cost payable
Utang usaha	-	356.085.611	13.307.109	-	Trade accounts payable
Biaya masih harus dibayar	4.294.224.806	264.749.763	677.691	227.936	Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter	443.461.937.761	19.097.841.731	151.923.194	52.468.312	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter bersih	(389.143.949.787)	(18.746.827.083)	(98.816.387)	(51.996.227)	Net monetary liabilities
Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)	(40.567.790)	(233.210.529)	(1.495.415)	(646.833)	Rupiah equivalent (in millions)
Jumlah dalam Rupiah - bersih (dalam jutaan)	(275.920.566)				Total in Rupiah - net (in millions)

	2013				
	JPY *)	US$ *)	EUR *)	Lain-lain/ *Others* **)	
Aset moneter					**Monetary assets**
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	43.550.639.086	44.905.240	-	-	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	647.816.467	257.787.719	5.241.930	3.575.214	Cash and cash equivalents
Jumlah aset moneter	44.198.455.553	302.692.959	5.241.930	3.575.214	Total monetary assets
Liabilitas moneter					**Monetary liabilities**
Penerusan pinjaman	196.740.292.135	616.382.591	93.489.580	25.959.020	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	272.429.005.192	8.128.425.177	-	-	Lease liability
Utang bank dan surat hutang jangka menengah	-	3.162.001.759	-	-	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	-	5.550.000.000	-	-	Bonds payable
Utang listrik swasta	-	578.942.401	-	-	Electricity purchase payable
Utang lain-lain	1.846.231.338	385.592.348	12.038.340	43.590.368	Other payables
Utang biaya proyek	1.173.441.551	41.152.917	14.644.635	-	Project cost payable
Utang usaha	-	482.749.364	-	-	Trade accounts payable
Biaya masih harus dibayar	2.805.331.271	254.388.120	842.301	278.176	Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter	474.994.301.487	19.199.634.678	121.014.857	69.827.564	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter bersih	(430.795.845.934)	(18.896.941.719)	(115.772.927)	(66.252.350)	Net monetary liabilities
Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)	(49.972.318)	(230.334.823)	(1.947.416)	(807.550)	Rupiah equivalent (in millions)
Jumlah dalam Rupiah - bersih (dalam jutaan)	(283.062.107)				Total in Rupiah - net (in millions)

*) Dalam jumlah penuh
**) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) In full amount
**) Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rate prevailing at the reporting date

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut:

The conversion rates used by the Company and its subsidiaries on December 31, 2014 and 2013 are as follows:

Mata uang / Currency	2014 Kurs tengah/ *Middle rate* Rp *)	2013 Kurs tengah/ *Middle rate* Rp *)
JPY	104	116
US$	12.440	12.189
EUR	15.133	16.821

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perusahaan dan entitas anak mencatat laba kurs mata uang asing bersih sebesar Rp 1.319.299 juta tahun 2014 dan (rugi) kurs sebesar (Rp 48.096.810) juta tahun 2013.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2014 dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan mata uang asing pada tanggal laporan ini, maka liabilitas bersih dalam mata uang asing Perusahaan akan naik (turun) sebesar Rp 9.279.403.

In relation to the fluctuation of the Rupiah against foreign currencies, the Company and its subsidiaries recorded net gain on foreign exchange of Rp 1,319,299 million in 2014 and net (loss) amounting to (Rp 48,096,810) million in 2013.

If assets and liabilities in foreign currencies as at December 31, 2014 had been translated using the closing rates as at the date of this report, the total net foreign currency liabilities of the Company would have been increased (decreased) by Rp 9,279,403.

53. SEGMEN OPERASI

Informasi Wilayah Geografis

Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan dan entitas anak dibagi dalam operasi geografis Sumatera, Jawa-Bali dan Indonesia Timur. Operasi geografis tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Perusahaan dan entitas anak, rinciannya adalah sebagai berikut :

53. OPERATING SEGMENT

Geographical Information

Operating segment is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statement.

For management reporting purposes, in December 31, 2014 and 2013, the Company and its subsidiaries were divided into Sumatera, Java-Bali and East Indonesia. These geographical operations are the basis on which the Company and its subsidiaries report segment information, the details are as follow :

	2014					
	Sumatera/ *Sumatera*	Indonesia Timur/ *East Indonesia*	Jawa Bali/ *Java Bali*	Eliminasi/ *Elimination*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan usaha						**Revenue**
Pendapatan eksternal	71.892.129	28.253.887	192.575.175	-	292.721.191	External revenue
Pendapatan antar segmen	5.840.528	1.854.097	66.281.798	(73.976.423)	-	Inter-segment revenue
Jumlah	77.732.657	30.107.984	258.856.973	(73.976.423)	292.721.191	Total
Hasil segmen	(14.886.405)	(24.064.868)	102.664.758	(3.348.631)	60.364.854	**Segment results**
Beban tidak dapat dialokasikan					(14.553.633)	Unallocated expenses
Laba usaha					45.811.221	Operating Income
Penghasilan (beban) lain-lain tidak dapat dialokasikan					(29.910.833)	Unallocated income (expenses)
Beban pajak					(4.158.778)	Tax expense
Laba bersih					11.741.610	Net income
Aset segmen	95.257.266	77.445.270	350.251.563	(109.472.435)	413.481.664	**Segment Assets**
Aset tidak dapat dialokasikan	190.177.527	-	-	-	190.177.527	Unallocated assets
Jumlah aset konsolidasi					603.659.191	Total consolidated assets
Liabilitas segmen	77.817.781	75.991.252	259.688.309	(12.420.886)	401.076.456	**Segment Liabilities**
Liabilitas tidak dapat dialokasikan	37.911.509	-	-	-	37.911.509	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas konsolidasi					438.987.965	Total consolidated liabilities

	2013					
	Sumatera	Indonesia Timur/ *East Indonesia*	Jawa Bali/ *Java Bali*	Eliminasi/ *Elimination*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan usaha						**Revenue**
Pendapatan eksternal	94.163.882	34.072.126	133.611.034	-	261.847.042	External revenue
Pendapatan antar segmen	-	-	-	-	-	Inter-segment revenue
Jumlah	94.163.882	34.072.126	133.611.034	-	261.847.042	Total
Hasil segmen	12.382.869	(11.858.523)	210.310.548	-	210.834.894	**Segment results**
Beban tidak dapat dialokasikan					(169.898.999)	Unallocated expenses
Laba usaha					40.935.895	Operating Income
Penghasilan (beban) lain-lain tidak dapat dialokasikan					(75.714.853)	Unallocated income (expenses)
Manfaat pajak					8.543.343	Tax benefit
Rugi bersih					(26.235.615)	Net loss
Aset segmen	88.177.685	76.459.857	338.844.683	(100.769.988)	402.712.237	**Segment Assets**
Aset tidak dapat dialokasikan					187.506.749	Unallocated assets
Jumlah aset konsolidasi					590.218.986	Total consolidated assets
Kewajiban segmen	71.906.047	86.672.119	214.593.416	13.243.364	386.414.946	**Segment Liabilities**
Kewajiban tidak dapat dialokasikan					53.472.682	Unallocated liabilities
Jumlah kewajiban konsolidasi					439.887.628	Total consolidated liabilities

54. IKATAN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan dan entitas anak memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar

i. Gas

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Supplier*	Periode/ *Period*	Satuan/ *Unit*	Kuantitas/ *Quantity* e)
Cilegon	a)	2006-2018	bbtu	356.300
Cilegon	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	101.400
Muara Karang - Priok	b)	2004-2017	bbtu	679.000
Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2008-2015	bbtu	287.245
Muara Tawar, Payo Selincah, Rengat, Duri	c)	2009-2020	bbtu	182.585
Muara Tawar	Medco E&P Lematang	2009-2017	bbtu	129.136
Gresik	Kangean Energy Indonesia Ltd	2010-2027	bbtu	368.700
Gresik	PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore	2002-2018	bbtu	482.560
Gresik	Hess Ltd	2006-2026	mmscf	330.200
Gresik	PT Walinusa Energi	2010-2018	bbtu	44.160
Aceh	PT Medco E&P Malaka	2010-2027	bbtu	85.000
Belawan	PT Pertamina EP/TAC Pertamina Glagah Kambuna	2009-2017	mmscf	65.650
Pekanbaru	Kalila Bentu Ltd	2005-2020	bbtu	128.619
Keramasan	PT Pertamina EP	2010-2015	bbtu	27.735
Inderalaya	PT Medco E&P Indonesia	2002-2015	bbtu	65.342
Payo Selincah	PT Energasindo Heksa Karya	2009-2018	bbtu	104.002
Tanjung Batu	PT Pertamina (Persero), Semco (TAC)	2005-2015	bbtu	79.026
Tarakan	PT Pertamina EP	2012-2015	bbtu	2.558
Bontang	Total E&P Indonesie, INPEX Co	2009-2017	bbtu	681
Batam	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2004-2019	bbtu	72.270
Tanjung Priok	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2012-2015	bbtu	21.870
Grati	d) Lapangan Oyong	2009-2016	bbtu	116.070
Talang Duku	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	21.000
Sungai Gelam	PT Pertamina EP	2011-2017	mmscf	8.434
Bangkanai	Salamander Energy (Bangkanai) Ltd	2013-2023	bbtu	104.000
Sengkang	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd	2012-2022	bbtu	51.945
Muara Tawar	PT Pertamina EP	2010-2015	bbtu	61.281
Tambak Lorok	PT Sumber Petrindo Perkasa	2010-2022	bbtu	219.000
Grati	d) Lapangan Wortel	2012-2018	bbtu	55.827
Grati	PT Parna Raya	2009-2020	mmscf	280.000
Batam	Premier Oil Natuna Sea B.V.; Natuna 1 B.V.; Natuna 2 B.V.; Kufpec Indonesia (Natuna) B.V.	2011-2022	bbtu	280.100
Grati	PT Sampang Mandiri Perkasa	2012-2019	bbtu	31.793
Grati	PT Pasuruan Migas	2012-2019	bbtu	5.911
Jakabaring (CNG)	PDPDE Prov Sumatera Selatan	2012-2020	bbtu	8.340
Tambak Lorok	PC Muriah Ltd	2014-2026	bbtu	354.000
Melibur	Kondur Petroleum SA	2012-2020	bbtu	831
Nunukan	Pertamina EP	2012-2018	mmscf	4.200
Sungai Gelam	Pertamina EP (Own Operation UBEP Jambi)	2012-2017	mmscf	3.500
Sanga Sanga (CBM)	Virginia Indonesia Co. CBM Limited	2012-2019	mmscf	366
Muara Karang - Priok (LNG)	PT Nusantara Regas	2012-2022	Juta Ton	11
Tanjung Selor	Perusda Nusa Serambi Persada	2013-2024	bbtu	11.550
Bunyu Kaltim	Pertamina EP	2012-2015	mmscf	609
Gresik	Santos (Madura Offshore) Peluang	2013-2017	bbtu	33.362
Gresik	PT Surya Cipta Internusa	2013-2015	bbtu	4.790
Sumatera	PDPDE Prov Sumatera Selatan	2013-2019	bbtu	9.250
Tarakan	But. Manhattan Kalimantan Investment Pte.Ltd	2012-2018	bbtu	10.500
Batam	Inti Daya Latu Prima	2012-2019	bbtu	11.685
Gresik	Petrogas Jatim Utama	2013-2017	mmscf	39.898
Belawan, Muara Karang, Priok (LNG)	Tangguh PSC Contract Parties	2015-2033	kargo	406

54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

As of December 31, 2014, the Company and its subsidiaries have significant commitments and contingencies, as follows:

a. Fuel supply agreements

i. Gas

a) CNOOC SES Ltd.; PT Pertamina Hulu Energi Oses; KNOC Sumatra Ltd.; Salamander Energy Sumatra BV.; Fortuna Resources (Sunda) Ltd.; Talisman UK (Southeast Sumatra) Ltd.; dan/*and* Talisman Resources (Bahamas) Ltd.
b) Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd.; Itochu Oil Exploration Co. Ltd.; Orchard Energy Java BV.; Inpex Jawa Ltd.; CNOOC ONWJ Ltd.; dan/*and* Talisman Resources (North West Java) Ltd.
c) PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang; Talisman (Jambi Merang) Ltd.; dan/*and* Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd.
d) Santos (Sampang) Pty Ltd.; Singapore Petroleum Sampang Ltd. (*formerly* Coastal Indonesia Sampang Ltd.); dan/*and* Cue Sampang Pty Ltd.
e) Dalam jumlah penuh/*In full amount*

Harga pembelian gas pipa pada titik penyerahan berkisar antara US$ 3,7 sampai dengan US$ 9,8 per MMBTU dan Liquid Natural Gas ("LNG") antara US$ 13,16 sampai dengan US$ 15,84 per MMBTU.

Pada tanggal 26 Juli 2007, PJB mengadakan perjanjian dengan PT Petrokimia (PKG) dan Kangean Energy Indonesia Ltd. terkait *Gas Diversion Agreement*. Perjanjian ini menetapkan bahwa PKG akan menerima pinjaman gas dari pihak PJB dengan mengalihkan sejumlah pasokan gas yang diperoleh Kangean Energy Indonesia Ltd. ke PKG. Atas pinjaman gas tersebut, PKG akan membayar penggantian biaya kompensasi swap gas pada PJB. Pada tanggal 25 September 2007, PJB mengadakan kesepakatan dengan PKG terkait metode perhitungan penggantian biaya kompensasi swap gas.

Pada tanggal 25 September 2008, Perusahaan dengan PGN mengadakan perjanjian jual beli dan penyaluran gas untuk PLTGU Cilegon untuk jangka waktu sepuluh tahun yang dimulai sejak Maret 2009 sampai dengan Februari 2019. Penyaluran gas untuk periode bulan pertama adalah sebesar 36,36 BBTU per hari, sedangkan untuk periode selanjutnya sampai dengan lima tahun sebesar 27,27 BBTU per hari. Untuk periode selanjutnya sampai berakhirnya perjanjian, pemakaian maksimum dan minimum gas akan disesuaikan dengan ketersediaan gas PGN. Pada tanggal 26 Juni 2012, Perusahaan dan PGN menandatangani Kesepakatan Bersama pemakaian gas interruptible untuk PLTGU Cilegon sebesar maksimal 10 BBTUD.

Perusahaan memperoleh fasilitas *stand-by letter of credit* (SBLC) maksimum sebesar US$ 39,9 juta dari Bank Negara Indonesia, berjangka waktu 13 tahun sampai dengan 31 Desember 2016 untuk menjamin kewajiban pembayaran pembelian gas untuk Sektor Muara Karang - Priok.

PLN Batam mengadakan perjanjian kerjasama dengan PGN untuk mengadakan gas alam. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 15 tahun dengan jumlah volume gas sebesar 72.270 BBTU, sejak gas pertama disalurkan ketitik penyerahan, yaitu tanggal 7 Agustus 2004. Sesuai dengan perjanjian, PLN Batam harus menyerahkan jaminan pembayaran berupa SBLC yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.

Gas pipe purchase price at point of delivery ranges from US$ 3.7 to US$ 9.8 per MMBTU and the price of Liquid Natural Gas ("LNG") ranges from US$ 13.16 to US$ 15.84 per MMBTU.

On July 26, 2007, PJB entered into an agreement with PT Petrokimia (PKG) and Kangean Energy Indonesia Ltd. relating to a Gas Diversion Agreement. This agreement determined that PKG will receive a gas loan from PJB by diverting an amount of supply of gas, which is provided by Kangean Energy Indonesia Ltd. to PKG. In accordance with this gas loan, PKG will pay to PJB the replacement costs for the compensation expenses of the gas swap. On September 25, 2007, PJB established an agreement with PKG in relation to the method of computation of replacement costs for the compensation expenses of gas swap.

On September 25, 2008, the Company entered into an agreement with PGN, in relation to buying, selling and channeling of gas for PLTGU Cilegon with a term of ten years starting from March 2009 until February 2019. Gas channeling for the first month is 36.36 BBTU per day, while for the succeeding periods until the fifth year the figure is 27.27 BBTU per day. For the remaining succeeding periods until the end of the agreement, the maximum and minimum use of gas will be in accordance with the gas availability of PGN. On June 26, 2012, the Company and PGN have signed the Joint Deal of Interruptible gas usage for PLTGU Cilegon with the maximum amount of 10 BBTUD.

The Company has a stand-by letters of credit (SBLC) facility from Bank Negara Indonesia with the maximum amount of US$ 39.9 million and a term of 13 years, due on December 31, 2016 to guarantee the payment obligations for the purchase of gas for Muara Karang – Priok Sector.

PLN Batam entered into an agreement with PGN for the supply of natural gas. The agreement is valid for 15 years with total gas volume of 72,270 BBTU, starting from the first time the gas is channeled to the point of delivery, which was on August 7, 2004. In accordance with the agreement, PLN Batam must provide a payment guarantee in the form of SBLC issued by Bank Mandiri.

ii. Batubara

ii. Coal

Pemasok/*Suppliers*	Jumlah metrik ton per tahun / *Quantity per year in metric ton *)*	Periode/ *Period*
Rutin /Regular		
PT Bukit Asam (Persero), Tbk	5.180.000	2013-2022
PT Adaro Indonesia	1.595.969	2014-2023
PT Kaltim Prima Coal	5.000.000	2007-2016
PT Kideco Jaya Agung	1.700.000	2009-2018
PT Berau Coal	2.500.000	2009-2018
PT Indominco Mandiri	2.100.000	2008-2017
PT Natuna Energi Indonesia	480.000	2006-2015
PT Oktasan Baruna Persada	720.000	2006-2015
PT Eksploitasi Energi Indonesia	480.000	2006-2015
Kadya Caraka Mulia	96.000	2012-2015
Kerjasama konsorsium/Consortium		
PT Kasih Industri Indonesia dan/and PT Senamas Energindo Mulia	378.000	2009-2028
PT Arutmin Indonesia dan/and PT Darma Henw a	1.501.000	2007-2027
PT.Oktasan Baruna Persada dan/and PT Insani Perkasa	540.000	2012-2015
PT.Prima Multi Mineral dan/and PT.Baratama	384.000	2012-2015
Program Percepatan/Fast Track Program		
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	3.500.000	2011-2030
PT Kideco Jaya Agung	2.000.000	2011-2015
PT Titan Mining Energy	2.920.000	2011-2029
PT Hanson Energy	2.128.000	2011-2034
PT Dw i Guna Laksana	1.890.000	2010-2032
Kerjasama konsorsium/Consortium		
PT Arutmin Indonesia dan/and PT Darma Henw a	5.903.000	2009-2029
PT Multi Bara Persada dan/and PT Eksploitasi Energi Indonesia	932.000	2010-2015
PT Kasih Industri Indonesia dan/and PT Senamas Energindo Mulia	2.860.000	2009-2029
PT Golden Great Borneo, PT Oktasan Baruna Persada dan/and PT Buana Eltra	576.000	2011-2015
PT Risna Karya Whardana Mandiri dan/and Rizki Anugrah Pratama	893.656	2010-2015
PT Oktasan Baruna Persada dan/and PT Buana Risky Armia	1.241.000	2010-2031
PT Energi Batubara Lestari dan/and PT Batara Batari Sinergy Nusantara	220.500	2014-2032

*) Dalam jumlah penuh/In full amount

Harga *stockpile* pembelian batubara berkisar antara Rp 323.644 dan Rp 763.993 per ton yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, SFT dan HGI.

The stockpile price of coal purchases ranges from Rp 323,644 to Rp 763,993 per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, SFT and HGI.

PLN Batubara mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara dengan beberapa pemasok sebagai berikut:

PLN Batubara entered into Coal Mining Operation Cooperation Agreement with suppliers as follows:

Pemasok/ *Suppliers*	Lokasi/ *Locations*	Jumlah metrik ton/ *Quantity in metric ton*
PT Tansri Madjid Energi	Muara Enim, Sumatera Selatan/*South Sumatera*	43.396.322
PT Megapura Prima Industri	Sorong, Papua Barat/*West Papua*	14.800.000
PT Mahakarya Abadi Prima	Sorolangun, Jambi	11.822.430
PT Bangun Persada Jambi Energi	Sorolangun, Jambi	5.000.000
PT Andhika Yoga Pratama	Sorolangun, Jambi	2.857.143
PT Awang Sejahtera	Parenggean, Kalimantan Tengah/*Central Kalimantan*	677.680
PT Bima Putra Abadi Citranusa	Lahat, Sumatera Selatan/*South Sumatera*	136.000

iii. Bahan Bakar Minyak

Perusahaan dan Pertamina mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diaddendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mean Oil Platts Singapore* (MOPS) ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp 18 triliun; dan (vi) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai *independent surveyor.*

iii. Fuel

The Company and Pertamina entered into a Fuel Sale and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001. This agreement was amended on May 16, 2007, whereby, the Company and Pertamina agreed among others: (i) the monthly fuel price to be used for the period January 1 until April 30, 2007 is determined by Pertamina, and the fuel price of 109.5% from Mean Oil Platts Singapore (MOPS) plus Value Added Tax for the period May 1, 2007 until December 31, 2007; (ii) the fuel price subsequent to December 31, 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payment with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective on May 1, 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until April 30, 2007 will bear interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN bonds, which is no later than August 31, 2007; (v) the maximum payable to Pertamina, includes bonds which will be issued amounting to Rp 18 trillion; and (vi) this agreement is valid for five years from January 1, 2007 until December 31, 2011.

Based on the Joint Deal Letter dated May 16, 2007, PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor.

Berdasarkan Addendum III Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 7 Nopember 2011, Perusahaan dan Pertamina menyepakati dalam tahun 2011 sebagai berikut:

1. HSD
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 2.537.161 kl di 18 titik penyerahan Pertamina adalah 105% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 480.487 kl di titik penyerahan Pertamina Terminal Transit Manggis adalah 108% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 2.978.360 kl di titik penyerahan Instalasi Tanjung Priok dan Instalasi Surabaya Group adalah 108,5% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD diatas 5.996.008 kl atau yang diserahkan diluar 21 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina adalah 109,5% dari MOPS.
2. Harga pembelian IDO sampai dengan 3.933 kl di titik penyerahan Kilang Plaju adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 3.933 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Plaju adalah 109,5% dari MOPS.
3. Harga pembelian MFO sampai dengan 1.193.166 kl di titik penyerahan Kilang Cilacap adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 1.193.166 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Cilacap adalah 109,5% dari MOPS.
4. Memperpanjang Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak efektif sampai dengan tahun 2015.

Tahun 2013, Perusahaan dan Pertamina sepakat untuk menggunakan harga tahun 2011, karena amandemen Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak belum diselesaikan.

Based on Amendment III of the Fuel Sale and Purchase Agreement dated November 7, 2011, the Company and Pertamina agreed in 2011 on the following:

1. HSD
   - The price of HSD for purchase of up to 2,537,161 kl from 18 supply points of Pertamina is 105% from MOPS.
   - The price of HSD for purchase of up to 480,487 kl from supply points of Pertamina Terminal Transit Manggis is 108% from MOPS.
   - The price of HSD for purchase of up to 2,978,360 kl from supply points Instalasi Tanjung Priok and Instalasi Surabaya Group is 108.5% from MOPS.
   - The price of HSD in excess of 5,996,008 kl or supplied from suppy points other than the 21 supply points specified by Pertamina is 109.5% from MOPS.
2. The price of IDO for purchases of up to 3,933 kl from supply point Kilang Plaju is 105% from MOPS and for purchases in excess of 3,933 kl or supplied from supply point other than supply point Kilang Plaju is 109.5% from MOPS.
3. The price of MFO for purchases of up to 1,193,166 kl from supply point Kilang Cilacap is 105% from MOPS and for purchases in excess of 1,193,166 kl or supplied from a supply point other than supply point Kilang Cilacap is 109.5% from MOPS.
4. The Fuel Sale and Purchase Agreement was amended to be effective until the year 2015.

In 2013, the Company and Pertamina agreed to use the 2011 price, since the Fuel Sale Purchase Agreement amendment has not been completed yet.

Dalam rangka penyelesaian harga jual Bahan Bakar Minyak ("BBM") (HSD dan MFO) Pertamina kepada Perusahaan, telah dilakukan rapat koordinasi antara Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Staf Ahli Menteri Bidang Investasi dan Produksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Utama Pertamina dan Direktur Utama Perusahaan pada tanggal 30 Januari 2015. Berdasarkan rapat koordinasi tersebut pada tanggal 5 Februari 2015, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat No. S-74/MK.02/2015 kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral mengenai rekomendasi penetapan harga jual beli HSD dan MFO antara Perusahaan dan Pertamina tahun 2014. Penyelesaian harga jual beli tersebut berdasarkan audit BPKP atas harga jual BBM (HSD dan MFO) untuk periode tahun 2013 dan semester 1 2014 sebagai referensi harga jual BBM yang akan digunakan pada tahun 2014.

In settlement of the fuel sales price of Pertamina's fuel (HSD and MFO) to the Company, a coordination meeting was held between the Minister of Finance, Minister of State Owned Enterprises, Expert Staff from the Minister of Energy and Mineral Resources for Investment and Production, President Director of Pertamina and President Director of the Company, on January 30, 2015. Based on the coordination meeting, on February 5, 2015, the Minister of Finance of Republic of Indonesia sent letter No. S-74/MK.02/2015 to Minister of Energy and Mineral Resources regarding recommendation of the sale and purchase price of HSD and MFO between the Company and Pertamina for 2014. The settled sales and purchase price is based on BPKP audit of the sale price of fuel (HSD and MFO) for the period of 2013 and first semester of 2014 as a reference for the fuel sale price that will be used in 2014.

Berdasarkan pertemuan tanggal 30 Januari 2015 tersebut diatas, pokok-pokok kesepakatan antara Pertamina dan Perusahaan antara lain:

a. Harga jual tahun 2014 menggunakan harga berdasarkan evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebesar HSD: MOPS + 9,19% dan MFO: MOPS + 11,94%;
b. Dalam rangka efisiensi biaya pembelian di tahun 2015, Perusahaan diperkenankan untuk mencari sumber BBM selain Pertamina, dengan tetap menjaga keamanan pasokan BBM.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2014 berdasarkan harga tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, estimasi liabilitas bunga dan denda atas utang pembelian bahan bakar kepada Pertamina masing-masing Rp 18.572 juta dan Rp 18.266 juta yang dicatat sebagai biaya masih harus dibayar (Catatan 33).

Pada tanggal 3 Nopember 2010, Perusahaan dan Pertamina menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD untuk PLTGU Gresik dan Grati sebanyak 600.000 kl selama empat tahun yang berakhir tahun 2014.

Pada tanggal 3 Nopember 2010, Perusahaan dan Pertamina menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD untuk PLTGU Muara Tawar sebanyak 400.000 kl selama empat tahun yang berakhir tahun 2014.

Based on the meeting on January 30, 2015 above, the terms of the agreement between Pertamina and the Company are:

a. Sales price for 2014 uses the price based on review of Board of Finance and Development Supervision as follow: for HSD: MOPS + 9.19% and for MFO: MOPS + 11.94%;
b. For the efficiency of purchase cost in 2015, the Company is allowed to acquire from other sources of fuel than Pertamina, whilst maintaining security of fuel supply.

The Company has recorded purchase of HSD and MFO for the year 2014 based on those prices.

As of December 31, 2014 and 2013, estimated liabilities on interest and penalties for payable on purchases of fuel to Pertamina amounted to Rp 18,572 million and Rp 18,266 million, respectively, which are recorded as accrued expenses (Note 33).

On November 3, 2010, the Company and Pertamina entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD for supply of HSD to PLTGU Gresik and Grati for 600,000 kl for four years until 2014.

On November 3, 2010, the Company and Pertamina entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD for supply of HSD to PLTGU Muara Tawar for 400,000 kl for four years until 2014.

Pada tanggal 1 Desember 2010, Perusahaan dan Pertamina menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD untuk PLTGU Muara Karang dan Tanjung Priok sebanyak 2.000.000 kl selama empat tahun yang berakhir tahun 2014.

On December 1, 2010, the Company and Pertamina entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD for supply of HSD to PLTGU Muara Karang and Tanjung Priok for 2,000,000 kl for four years until 2014.

Pada tanggal 10 April 2008, Perusahaan dengan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Shell Indonesia dan PT Kutilang Paksi Mas menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD untuk PLTGU Grati selama tiga tahun yang berakhir tahun 2011 sebanyak 600.000 kl per tahun. Pada tanggal 20 Mei 2011, kedua pihak membuat Addendum atas perjanjian Jual Beli HSD untuk periode empat tahun yang berakhir pada tahun 2015 sebanyak 640.000 kl.

On April 10, 2008, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with Joint Operation of PT Shell Indonesia and PT Kutilang Paksi Mas for supply of HSD to PLTGU Grati for 600,000 kl per annum, respectively, for three years until 2011. On May 20, 2011, both parties made an Addendum to the Sale and Purchase Agreement of HSD for four years until 2015 for 640,000 kl.

Pada tanggal 7 Juni 2012, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT AKR Corporindo, Tbk sebanyak 150.000 kl selama tiga tahun yang berakhir tahun 2015.

On June 7, 2012, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT AKR Corporindo, Tbk for 150,000 kl for three years until 2015.

Pada tanggal 3 September 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit Belawan sebanyak 750.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

On September 3, 2014, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Belawan Power Plant for 750,000 kl for three years or fulfillment of total volume whichever is the first.

Pada tanggal 15 April 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT AKR Corporindo, Tbk untuk Lokasi Pembangkit Listrik Sei Raya, Siantan, Sanggau (Menyurai dan Semboja), dan Ketapang (Sukaharja) sebanyak 450.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

On April 15, 2014, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT AKR Corporindo, Tbk Power Plant Location in Sei Raya, Siantan, Sanggau (Menyurai and Semboja), and Ketapang (Sukaharja) for 450,000 kl for three years or fulfillment of total volume whichever is the first.

iv. Uap Panas Bumi

iv. Geothermal Heat

Perusahaan memiliki perjanjian dengan Pertamina untuk pengadaan uap panas bumi untuk Kamojang selama 30 tahun yang berakhir tahun 2012 dan telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2015, dan untuk Gunung Salak dan Darajat selama 30 tahun yang berakhir tahun 2030, serta untuk PLN Lahendong selama 30 tahun yang berakhir tahun 2038.

The Company has a geothermal heat procurement agreement with Pertamina for Kamojang for 30 years until 2012. This has been extended until December 31, 2015, for Gunung Salak and Darajat for 30 years until 2030 and for PLN Lahendong for 30 years until 2038.

Pada tanggal 17 Februari 2010, Perusahaan dan Pertamina mengadakan perjanjian untuk pengadaan uap panas bumi, untuk Ulubelu selama 30 tahun.

On February 17, 2010, the Company and Pertamina entered into an geothermal heat procurement agreement for Ulubelu for 30 years.

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Kontrak Penjualan Energi

Sebelum tahun 1997, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) dan Kontrak Penjualan Energi (ESC) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP) skala besar. Pada tahun 1999, Perusahaan telah melaksanakan renegosiasi terhadap PPA dan ESC melalui Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PLN dibawah arahan Pemerintah. Renegosiasi tersebut meliputi antara lain keseimbangan kondisi kontrak, kewajaran harga dan disparitas harga jual listrik swasta dan harga jual Perusahaan.

Dalam perjanjian dengan IPP tertentu, disepakati bahwa setiap saat selama perjanjian berlaku, Perusahaan dapat melaksanakan opsi untuk membeli hak penjual, milik, dan kepentingan atas proyek yang bersangkutan.

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2c, Perusahaan menilai bahwa perjanjian PPA dan ESC tertentu memenuhi kriteria sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan sesuai dengan ISAK 8. Pada tanggal 31 Desember 2014, perjanjian signifikan antara Perusahaan dan entitas anak dengan IPP adalah sebagai berikut:

b. Power Purchase Agreements and Energy Sales Contract

Prior to 1997, the Company entered into Power Purchase Agreement (PPA) and Energy Sales Contract (ESC) with big scale IPPs. In 1999, the Company entered into renegotiation of the PPA and ESC through a Working Group on PLN Special Contract Renegotiation under the direction of the Government. Such renegotiation includes, among others, equalization in contract conditions, reasonableness of price and disparity of selling price between the IPP and the Company.

Based on the agreements with certain IPPs, the Company may exercise its option to purchase all of the IPP's rights, title and interest in the projects at any time during the contract period.

As discussed in Note 2c, the Company and its subsidiaries have assessed that certain PPA and ESC qualify as either operating lease or finance lease in accordance with ISFAS 8. As of December 31, 2014, the significant agreements between the Company and its subsidiaries with IPPs are as follows:

i. Sudah Beroperasi

Perjanjian jual beli tenaga listrik sebagai sewa pembiayaan

i. In Operations

PPAs under finance lease

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity* (MW)	AF b) (%)	Periode/ *Period* a)	Tanggal operasi komersial/ *Commercial Operation Date*
1.	PT Energi Sengkang	Sengkang, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Gas	315	85	1999-2022	1 Maret 1999/ *March 1, 1999* 16 Nopember 2008/ *November 16, 2008* 15 September 2013/ *September 15, 2013*
2.	Chevron Geothermal Salak Ltd dan/*and* Dayabumi Salak Pratama Ltd.	Salak, Jawa Barat/*West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	165	90	2000-2040	1 Oktober 2000/ October 1, 2000
3.	PT Makassar Power	Pare-pare, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	MFO	62,2	80	1998-2016	1 Mei 1998/ *May 1, 1998*
4.	PT Paiton Energy	Paiton I, Jawa Timur/*East Java*	Batubara/*Coal*	1.230	85	2002-2040	1 Januari 2002/ *January 1, 2002*
5.	PT Jawa Power	Paiton II, Jawa Timur/*East Java*	Batubara/*Coal*	1.220	83	2001-2030	1 Januari 2001/ *January 1, 2001*
6.	Pertamina, Cevron Drajat Ltd. Texaco Drajat Ltd. dan/*and* PT Drajat Geothermal Ind.	Drajat, Jawa Barat/*West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	180	95	2000-2030	1 Pebruari 2000/ *February 1, 2000* 1 Agustus 2007/ *August 1, 2007*
7.	Pertamina and Magma Nusantara Limited	Wayang Windu, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	110	90	2000-2030	1 Juni 2000/ *June 1, 2000*
				110	90	2009-2039	1 Maret 2009/ *March 1, 2009*
8.	PT Asrigita Prasarana	Palembang, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Gas	150	85	2004-2024	1 September 2004/ *September 1, 2004*
9.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap, Jawa Tengah/*Central Java*	Batubara/*Coal*	562	80	2007-2037	1 Pebruari 2007/ February 1, 2007
10.	PT Dalle Energy Batam	Panaran, Pulau Batam/*Batam Island*	Gas	85,5	90	2005-2025	1 Desember 2005/ *December 1, 2005*
11.	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam/*Batam Island*	Gas	55	84	2005-2034	29 Oktober 2004/ *October 29, 2004*
12.	PT Indo Matra Power	Kawasan Industri Kabil, Pulau Batam/*Batam Island*	Gas	17,4	80	2005-2017	11 September 2005/ *September 11, 2005* 1 April 2006/ *April 1, 2006*
13.	PT Metaepsi Pejebe Power Generation	Gunung Megang, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Gas	80	80	2007-2027	10 Nopember 2007/ *November 10, 2007*
14.	PT Pusaka Jaya Palu Power	Palu, Sulawesi Tengah/ *Central Sulawesi*	Batubara/*Coal*	27	80	2007-2032	1 Nopember 2007/ *November 1, 2007*
	Jumlah dipindahkan/*Balance carryforward*			4.369,1			

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity* (MW)	AF b) (%)	Periode/ *Period* a)	Tanggal operasi komersial/ *Commercial Operation Date*
	Jumlah pindahan/*Balance carryforward*			4.369,1			
15.	PT Pertamina Geothermal Energi	Kamojang, Jawa Barat/*West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	60	90	2008-2038	26 Januari 2008/ *January 26, 2008*
16.	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut, Kalimantan Timur/ *East Kalimantan*	Batubara/*Coal*	45	83	2008-2038	20 Desember 2008/ *December 20, 2008*
17.	PT Dizamatra Powerindo	Sebayak, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Panas bumi/ *Geothermal*	11,3	95	2008-2038	19 Desember 2008/ *December 19, 2008*
18.	PT Bajradaya Sentranusa	Asahan, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Tenaga air/*Hydro*	180	90	2011-2040	18 Januari 2011/ *January 18, 2011*
19.	PT Cipta Daya Nusantara	Mobuya, Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Tenaga air/*Hydro*	3	80	2007-2027	31 Juli 2007/ *July 31, 2007*
20.	PT Fajar Futura Energi Luwu	Luwu, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Tenaga air/*Hydro*	2,4	-	2010-2035	1 Mei 2010/ *May 1, 2010*
21.	PT Sulawesi Mini Hydro Power	Sinjai, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Tenaga air/*Hydro*	10	-	2011-2036	1 Pebruari 2011/ *February 1, 2011*
22.	PT GH EMM Indonesia	Muara Enim, Sumatera Selatan / *South Sumatera*	Batubara/*Coal*	227	80	2011-2041	1 Agustus 2011/ *August 1, 2011* 1 Desember 2011/ *December 1, 2011*
23.	PT Eksploitasi Energi Indonesia	Pangkalan Bun, Kalimantan Selatan/ *South Kalimantan*	Batubara/*Coal*	11	80	2011-2036	14 Oktober 2011/ *October 14, 2011*
24.	PT Paiton Energy	Paiton III, Jawa Timur/*East Java*	Batubara/*Coal*	815	85	2012-2042	1 Maret 2012/ *March 1, 2012*
25.	PT Cirebon Electric Power	Cirebon, Jawa Barat/*West Java*	Batubara/*Coal*	660	80	2012-2042	3 Agustus 2012/ *August 3, 2012*
26.	PT Bosowa Energi	Jeneponto, Sulawesi Selatan / *South Sulawesi*	Batubara/*Coal*	200	80	2012-2042	31 Oktober 2012/ *October 31, 2012*
27.	PT Tanjung Kasam Power	Tanjung Kasam, Pulau Batam/ *Batam Island*	Batubara/*Coal*	110	85	2012-2042	25 Oktober 2012/ *October 25, 2012* 1 Nopember 2012/ *November 1, 2012*
28.	PT Humbahas Bumi Energi	Hutaraja, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Tenaga air/*Hydro*	5	65	2012-2037	10 Mei 2012/ *May 10, 2012*
29.	Joint Operation PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Mirlindo Padu Kencana	Pesanggaran, Bali	Diesel	50	85	2009-2017	1 Maret 2011/ *March 1, 2011*
30.	Konsorsium/*Consortium* PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Navigat Energy	Borang, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Gas	67,17	80	2012-2019	29 Juni 2012/ *June 29, 2012*
31.	Konsorsium/*Consortium* PT Modaco Enersys, PT Elektrindo Perkasa Utama, Pratt & Whitney Ps. Inc., Renewable Energy Power International	Payo Selincah, Jambi	Gas	93,56	60	2012-2019	8 Juni 2012/ *June 8, 2012*
32.	PT Bekasi Power	Bekasi, Jawa Barat/*West Java*	Gas	118,8	90	2013-2032	5 Januari 2013/ *January 5, 2013*
33.	Konsorsium/*Consortium* PT PP (Persero) Tbk, PT Bangun Energy Resources, PT Navigat Energy, PT SNC Lavalin TPS General Electric	Talang Duku, Jambi	Gas	56,6	60	2013-2019	11 Januari 2007/ *January 11, 2007*
34.	PT Poso Energy	Poso, Sulawesi Tengah/*Central Sulawesi*	Tenaga air/*Hydro*	65	845,52 GWh/th	2012-2042	30 Desember 2012/ *December 30, 2012*
35.	PT Cahaya Fajar kaltim	Ekspansi/*Expansion*	Batubara/*Coal*	50	87	2014-2039	14 Agustus 2014/ *August 14, 2014*
36.	PT Geo Dipa Energi	Patuha, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/*Geothermal*	55	95	2014-2044	22 September 2014/ *September 22, 2014*
37.	PT Tenaga Listrik Gorontalo	Molotabu, Gorontalo	Batubara/*Coal*	21	80	2014-2039	13 September 2014/ *September 13, 2014*
38.	PT Sepoetih Daya Prima	Lampung Tengah, Lampung	Batubara/*Coal*	12	80	2014-2039	2 Mei 2014/ *May 2, 2014*
	Jumlah/*Total*			7.297,9			

Rincian nilai tunai pembayaran sewa minimum terkait dengan PPA diuraikan dalam Catatan 25.

Details of the present value of minimum lease payments related to these PPAs are discussed in Note 25.

Perjanjian jual beli tenaga listrik signifikan sebagai sewa operasi:

The significant power purchase agreements under operating lease:

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity* (MW)	AF (%)	Periode/ *Period*
1.	Perum Jasa Tirta	Purwakarta, Jawa Barat/*West Java*	Tenaga air/ *Hydro*	187	50	2012-2016
2.	PT Geo Dipa Energi	Dieng, Jawa Tengah/*Central Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	60	85	2002-2044
3.	PT Jembo Citra Energindo	Kawasan Industri Kabil, Pulau Batam/*Batam Island*	Gas	24	65	2008-2015
4.	PT Dalle Energy Batam	Panaran, Pulau Batam/*Batam Island*	Gas	19	60	2009-2015
5.	PT Indo Matra Power	Kawasan Industri Kabil, Pulau Batam/*Batam Island*	Gas	14	90	2007-2014
	Jumlah/*Total*			304		

Jumlah pembayaran sewa minimum dalam sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

The future aggregate minimum lease payments under non-cancellable operating leases are as follows:

	2014	2013	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			Minimum lease payments due:
Tidak lebih dari 1 tahun	121.319	154.210	Not later than 1 year
Antara lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	97.720	94.874	Later than 1 year and not later than 2 years
Lebih dari 2 tahun	-	97.720	Later than 2 years
Jumlah pembayaran minimum sewa	219.039	346.804	Total minimum lease payments

	2014	2013	
Rincian pembayaran sewa minimum berdasarkan lessor:			Details of the minimum lease payment by lessor:
Perum Jasa Tirta	192.594	284.705	Perum Jasa Tirta
PT Dalle Energy Batam	11.609	23.218	PT Dalle Energy Batam
PLTMG Jembo	14.836	22.254	PLTMG Jembo
PT Indo Matra Power	-	16.627	PT Indo Matra Power
Jumlah	219.039	346.804	Total

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Lain

Perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT Cikarang Listrindo dengan kapasitas 300 MW yang berlokasi di Jawa Barat hingga tahun 2018, dicatat sebagai transaksi pembelian normal.

Other Power Purchase Agreement

This pertains to power purchase agreement with PT Cikarang Listrindo with total capacity of 300 MW located in West Java until year 2018, which is accounted for as a normal purchase transaction.

ii. Belum Beroperasi (Dalam Tahap Pengembangan)

ii. Not Yet in Operations (Development Stage)

No.	Perusahaan/ Company	Proyek/Projects	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF b) (%)	Periode/ Period a)	Status
1.	PT Bhimasena Power Indonesia	Pemalang, Jawa Tengah/Central Java	Batubara/ Coal	1.900	86	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
2.	PT Huadian Bukit Asam Power	Sumsel-8, Sumatera Selatan/South Sumatera	Batubara/ Coal	1.200	80	2017-2042	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
3.	PT Lestari Banten Energi	Banten	Batubara/ Coal	660	80	2017-2042	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
4.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap Ekspansi	Batubara/ Coal	614	85	2016-2036	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
5.	PT General Energy Bali	Celukan Bawang, Bali	Batubara/ Coal	380	85	2015-2046	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
6.	PT Pertamina Geothermal Energy and Sarulla Operations Ltd	Sarulla, Sumatera Utara/North Sumatera	Panas Bumi/ Geothermal	330	90	2017-2047	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
7.	PT DSSP Power Sumsel	Sumsel-5, Sumatera Selatan/South Sumatera	Batubara/ Coal	300	80	2015-2040	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
8.	PT Sorik Marapi Geothermal Energy	Mandailing Natal, Sumatera Utara/North Sumatera	Panas Bumi/ Geothermal	240	90	2021-2051	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
9.	PT Priamanaya Power Energi	Keban Agung, Baturaja, Sumatera Selatan/South Sumatera	Batubara/ Coal	240	80	2016-2046	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
10.	PT Bukit Pembangkit Innovative	Banjarsari, Sumatera Selatan/South Sumatera	Batubara/ Coal	220	80	2015-2045	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
11.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lumut Balai, Sumatera Selatan/South Sumatera	Panas Bumi/ Geothermal	220	90	2015-2045	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
12.	PT Supreme Energy Rajabasa	Rajabasa, Lampung	Panas Bumi/ Geothermal	220	90	2016-2046	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
13.	PT Supreme Energy Muara Laboh	Muara Laboh, Sumatera Barat/West Sumatera	Panas Bumi/ Geothermal	220	90	2016-2046	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
14.	PT Supreme Energy Rantau Dedap	Rantau Dedap, Sumatera Selatan/South Sumatera	Panas Bumi/ Geothermal	220	90	2016-2046	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
15.	PT Sejahtera Alam Energy	Baturraden, Jawa Tengah/Central Java	Panas Bumi/ Geothermal	220	90	2021-2051	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
16.	PT Graha Power Kaltim	Bontang, Kalimantan Timur/East Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
17.	PT Tanjung Power Indonesia	Tabalong, Kalimantan Selatan/South Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
18.	PT Surya Kalimantan Sejati	Gunung Mas, Kalimantan Tengah/Central Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2020-2045	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
19.	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu #3-4	Panas Bumi/ Geothermal	110	90	2015-2045	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
20.	PT Medco Cahaya Geothermal	Ijen, Jawa Timur/East Java	Panas Bumi/ Geothermal	110	90	2020-2050	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
21.	PT Sintesa Banten Geothermal	Serang, Banten	Panas Bumi/ Geothermal	110	90	2019-2049	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
22.	PT Tangkuban Parahu Geothermal Power	Subang, Jawa Barat/West Java	Panas Bumi/ Geothermal	110	90	2020-2050	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
23.	PT Bakrie Darmakarya Energi	Ponorogo, Jawa Timur/East Java	Panas Bumi/ Geothermal	110	90	2021-2051	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
24.	PT Kartanegara Energi Perkasa	Senipah, Kalimantan Timur/East Borneo	Gas	82	85	2013-2038	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
25.	PT Tanggamus Electric Power	Lampung Tengah, Lampung	Tenaga air/Hydro	56	57	2018-2048	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
26.	PT Geo Dipa Energi	Dieng 2, Jawa Tengah/Central Java	Panas Bumi/ Geothermal	55	95	2019-2049	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
27.	PT Geo Dipa Energi	Patuha 2, Jawa Barat/West Java	Panas Bumi/ Geothermal	55	95	2018-2048	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
28.	PT Indo Ridlatama Power	Samboja, Kalimantan Timur/East Borneo	Batubara/ Coal	55	80	2017-2045	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
29.	PT Giri Indah Sejahtera	Ungaran, Jawa Tengah/Central Java	Panas Bumi/ Geothermal	55	90	2017-2047	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
30.	PT Spring Energi Sentosa	Tegal, Jawa Tengah/Central Java	Panas Bumi/ Geothermal	55	90	2019-2049	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
31.	PT Rekind Daya Mamuju	Mamuju, Sulawesi Barat/West Sulawesi	Batubara/ Coal	50	80	2016-2046	Tahap Pembangunan/ Construction Stage
32.	PT Lombok Energy Dynamics	Lombok, Nusa Tenggara Barat/West Nusa	Batubara/ Coal	50	80	2016-2041	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
33.	PT Jabar Rekind Geothermal	Sukabumi, Jawa Barat/West Java	Panas Bumi/ Geothermal	50	90	2020-2050	Tahap Pembiayaan/ Financing Stage
34.	PT Pertamina Geothermal Energy dan/and Star Energy	Wayang Windu #3,4, Jawa Barat/West Java	Panas Bumi/ Geothermal	220	90	2020-2050	Renegosiasi/ Renegotiation
35.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Hululais	Panas Bumi/ Geothermal	110	85	2019-2049	Eksplorasi/ Exploration
36.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Kotamobagu	Panas Bumi/ Geothermal	80	90	2024-2054	Eksplorasi/ Exploration
37.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Sungai Penuh	Panas Bumi/ Geothermal	110	85	2024-2055	Eksplorasi/ Exploration
38.	Lainnya/The Others c)			1.086,5			
				10.503,5			

a) Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 20 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal produksi komersial.

b) AF = Faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perusahaan.

c) Meliputi kontrak dengan 118 IPP, terdiri dari 46 IPP dalam tahap pembangunan dan 72 IPP dalam tahap pembiayaan, berlokasi di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan bahan bakar batu bara, panas bumi dan *mini hydro* dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW.

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi, dan biaya pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge* dan *Capacity Charge*.

Sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, PLN Batam telah menyerahkan jaminan deposito berjangka sebesar Rp 5.502 juta (Catatan 10).

a) The agreements are effective from the date of signing and buying and selling of electricity is valid between 20 to 30 years starting from the commercial operation date.

b) AF = Power supply factor which should be absorbed by the Company.

c) Represents contracts with 118 IPPs, consisting of 46 IPPs under construction and 72 IPPs in the financing stage, which are located in several areas of Indonesia and are generated by coal, geothermal and mini hydro with each power plant's capacity of less than 50 MW.

The electricity power price per kWh for gas, MFO and coal power plants are determined by certain formula as stated in the agreement which regulate, among others, capital cost recovery, fixed operation and maintenance cost payment, fuel expense and variable operation, and maintenance cost payment. For geothermal heat power plants, the electricity power price is determined by a certain formula as stated in the agreement, among others, Energy Charge and Capacity Charge.

In relation with the purchase of electricity, PLN Batam has placed collateral time deposits amounting to Rp 5,502 million (Note 10).

c. Perolehan barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan, jaringan transmisi dan distribusi adalah sebagai berikut:

c. Capital expenditures

As of December 31, 2014, total commitments on capital expenditures based on contracts, which are related to procurement of power plants, transmissions and distributions are as follows:

	Mata uang/ *Currencies*	Jumlah dalam mata uang asing/ *Amount in foreign currencies*)*	Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	
Program percepatan				Fast track program
Kontrak pembangkitan	US$	214.965.743	2.674.174	Power plant contracts
	EUR	19.933.542	301.658	
	JPY	450.424.400	46.956	
	NZD	893.873	8.726	
	Rupiah		2.589.169	
			5.620.683	
Kontrak transmisi	Rupiah		79.279	Transmission contracts
			79.279	
Kontrak konstruksi rutin	US$	250.593.227	3.117.380	Regular construction contracts
	EUR	115.121.830	1.742.162	
	JPY	13.086.976.866	1.364.302	
	Rupiah		17.114.452	
			23.338.296	

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

Program Percepatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi sepuluh pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa – Bali.

Kontrak Pembangkitan

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan telah menandatangani 36 kontrak EPC meliputi sepuluh pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 26 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.451 MW di luar Jawa – Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan telah membayar uang muka sebesar US$ 5.863 juta dan Rp 26.408.798 juta untuk 35 kontrak EPC, atau sekitar 15% dari jumlah nilai kontrak, yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan (Catatan 6). Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.

Kontrak Transmisi

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan telah menandatangani 137 kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

Kontrak Konstruksi Rutin

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

Fast Track Program

Based on President of the Republic of Indonesia Decree No. 71 Year 2006 dated July 5, 2006 which was amended by President of the Republic of Indonesia Regulation No. 59 dated December 23, 2009, the Government mandates the Company to build coal-fired power plants (PLTU) at 42 locations in Indonesia, which include ten power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 32 power plants with aggregate capacity of 2,769 MW outside Java – Bali.

Power Plant Contracts

As of December 31, 2014, the Company signed 36 EPC contracts which consist of ten electricity power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 26 electricity power plants with aggregate capacity of 2,451 MW outside Java - Bali. Under the terms of such contracts, the Company is required to pay the contractor a down payment, which is approximately 15% of the contract price and the remaining 85% will be funded through credit facilities from banks.

Until December 31, 2014, the Company made a total down payment of US$ 5,863 million and Rp 26,408,798 million for 35 EPC contracts or approximately 15% of the total contract price, which are recorded as construction in progress (Note 6). Such down payments are funded by the proceeds of the issued Guaranteed Notes and withdrawal of credit facilities for the fast track program.

Transmission Contracts

As of December 31, 2014, the Company signed 137 contracts for upgrading and constructing new transmission and sub-stations in Java and outside Java. These projects are financed by the Company's own funds and withdrawal of credit facilities from banks.

Regular Construction Contracts

Capital expenditure commitments for regular construction represent project contracts signed for additional electricity generating plants and development of the transmission and distribution network. These projects are financed by the Company's own funds and other external funding through offshore loans, grants and investment projects from the State budget.

Pada tanggal 31 Desember 2014, PJB mengadakan ikatan/kontrak dengan berbagai pihak untuk pengadaan material dan aset tetap serta jasa borongan dengan berbagai mata uang dengan jumlah setara Rupiah masing-masing sebesar Rp 607.783 juta.

As of December 31, 2014, PJB entered into commitments or contracts with various parties for the supply of materials, property, plant and equipment, and contracted services in various currencies, with Rupiah equivalent totaling Rp 607,783 million.

d. Fasilitas pinjaman belum digunakan

d. Unused loan facilities

Penerusan pinjaman

Two-step loans

Mata uang	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent *)*	*Currency*
US$	1.652	20.551.816	US$
JPY	116.963	12.193.253	JPY
Jumlah		32.745.069	Total

*) Dalam jutaan

*) In millions

Pada tanggal 31 Desember 2014, fasilitas pinjaman belum digunakan setara Rp 14.955.217 juta dikenakan provisi sebesar 0,10% - 0,75% per tahun, sedangkan fasilitas sebesar Rp 17.789.852 juta tidak dikenakan provisi. Fasilitas ini berakhir antara tahun 2015 sampai dengan 2047.

As of December 31, 2014 the unused facilities equivalent to of Rp 14,955,217 million bear provision charge of 0.10% - 0.75% per annum, while the remaining facilities of Rp 17,789,852 million do not bear any provision charge. These facilities will be due between 2015 to 2047.

Perjanjian pinjaman program percepatan

Tujuan fasilitas pinjaman ini adalah untuk membiayai 85% dari nilai kontrak EPC untuk program percepatan. Jangka waktu pinjaman termasuk periode penyediaan kredit selama 36 bulan, dan sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007 pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan – batasan umum.

Loan agreements for fast track program

The purpose of these loan facilities is to finance 85% of the contract price of EPC for the fast track program. The term of the loan includes preparation of credit for 36 months and is fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (PP) No. 91 Year 2007, superseding No. 86 Year 2006, regarding Grant of Government Guarantee for Construction of Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is obliged to comply with general restrictions.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, rincian fasilitas pinjaman untuk membiayai program percepatan adalah sebagai berikut:

As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, details of loan facilities to finance the fast track program are as follow:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility *)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities *)*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance premium *)*	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity*	Periode/ *Period* Tahun/*Year*
	Fasilitas pinjaman dalam US$/*US$ loan facilities*						
1	The Export-Import Bank of China/ PLTU Nanggroe Aceh Darussalam	124	17	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 2,80%	12	14 Januari 2025/ *January 14, 2025*	15
2	The Export-Import Bank of China/ PLTU 2 Jawa Barat/*West Java* PLTU 3 Pelabuhan Ratu, Banten	482	28	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 2,80%	44	12 Februari 2025/ *February 12, 2025*	15
3	China Development Bank/ PLTU Adipala, Cilacap, Jawa Tengah/*Central Java*	625	56	LIBOR 6 bulanan/ *6 month LIBOR* + 3,85%	-	14 Oktober 2022/ *October 14, 2022*	13
	Jumlah dalam US$/*Total in* US$	1.231	101		56		
	Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/*Rupiah loan facilities*						
1	PT. Bank DKI/ PLTU Naganraya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara* PLTU 1 Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Tenggara* PLTU Sumatera Barat/*West Sumatera* PLTU 2 Kalimantan Barat/*West Kalimantan* PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara/*North Maluku* PLTU Sulawesi Tengah/*Central Sulawesi* PLTU 1 Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara* PLTU 2 Sulawesi Utara/*North Sulawesi* PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara* PLTU 1 Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Tenggara* PLTU 4 Bangka Belitung PLTU 2 Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Tenggara* PLTU 1 Kalimantan Tengah/*Central Kalimantan*	4.732.000	718.430	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1%	-	24 April 2009/ *April 24, 2009*	10
2	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* PT Bank Rakyat Indonesia/ Transmisi paket 3/*Transmission packages 3*	1.067.684	17.211	JIBOR 3 bulanan/ *3 month JIBOR* + 1,05%	-	27 Desember 2020/ *December 27, 2020*	10
	Jumlah dalam Rupiah/*Total in Rupiah*	5.799.684	735.641		-		

*) Dalam jutaan/*In million*

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, rincian fasilitas pinjaman tidak terkait program percepatan adalah sebagai berikut:

As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, details of loan facilities non-related to the fast track program are as follow:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility *)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities *)*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance premium *)*	Tanggal perjanjian/ *Date of agreement*	Periode/ *Period* Tahun/*Year*
	Fasilitas pinjaman dalam EUR/*EUR loan facilities*						
1	Standard Chartered Bank/ PLTMG Arun	90	90	2,10%	6	11 Desember 2013/ *December 11, 2013*	14,5
2	Standard Chartered Bank/ PLTMG Bangkanai	71	24	2,10%	5	23 Desember 2013/ *December 23, 2013*	14,5
	Jumlah dalam EUR/*Total in* EUR	161	114		11		
	Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/*Rupiah loan facilities*						
1	PT. Bank Rakyat Indonesia	2.000.000	1.571.304	Rata-rata deposito berjangka 3 bulanan/ *3 month average time deposit* + 5%	-	17 Desember 2014/ *December 17, 2014*	10
2	*Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by* PT Bank Negara Indonesia/	6.500.000	5.387.116	Rata-rata tertimbang deposito berjangka 3 bulanan/*3 month Average Weighted time deposit* + 3%	-	18 Desember 2014/ *December 18, 2014*	10
	Jumlah dalam Rupiah/*Total in Rupiah*	8.500.000	6.958.420		-		

*) Dalam jutaan/*In million*

e. Program operasi dan pemeliharaan

Untuk meningkatkan dan memulihkan daya guna unit pembangkit sampai pada level tertentu, Perusahaan menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebagai berikut:

e. Operation and maintenance programs

In order to improve and restore the performance of generator units up to a certain level, the Company has entered into Operation and Maintenance Agreements with contractors. The contract payment comprises fixed and variable portions. The contractors have to meet certain targets and will be charged a penalty if these targets are not met. The commitments with the contractors for the fixed portion are as follows:

Pembangkitan/ *Power plant*	Kontraktor/ *Contractors*	Nilai kontrak/ *Contract amount* Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	Periode/ *Period*
PLTU Tanjung Jati B	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	3.036.181	2010-2032
PLTU Tanjung Jati B	Konsorsium/ consortium of Fortum Service OY & PT Medco Energy	1.502.781	2005-2030
Jumlah/*Total*		4.538.962	

f. Litigasi

(i) Pada tahun 2001, Hendrik Nelwan dan kawan-kawan mengajukan gugatan ganti rugi atas tanah ahli waris yang telah dipergunakan Perusahaan sebagai PLTA Tonsealama sebesar Rp 54 miliar di Pengadilan Negeri Manado. Dalam proses berperkara, mulai dari Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI PT PLN (Persero) kalah. Pada saat akan dilakukan Eksekusi oleh PN Manado, PT PLN (Persero) melakukan Gugatan Perlawanan atas Eksekusi *(Derden Verzet)* terhadap tanah tersebut mengingat PT PLN (Persero) merupakan *bezitter* yang baik dengan menguasai tanah serta mengoperasikan PLTA Tonsea Lama selama lebih dari 50 tahun. Saat ini perkara *Derden Verzet* tersebut masih dalam proses di Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(ii) Pada tanggal 20 Januari 2012, Perusahaan menghadapi gugatan ganti rugi dari PT Subur Sari Lastderich sebesar Rp 10 miliar untuk kerugian material dan sebesar Rp 1 triliun untuk kerugian immaterial sehubungan dengan pembangunan PLTA Asahan III (PLTA) oleh Perusahaan. Penggugat mengklaim bahwa PT Subur Sari Lastderich berhak untuk membangun PLTA tersebut. Perusahaan memenangkan perkara ini di tingkat banding. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

f. Litigation

(i) In 2001, Hendrik Nelwan and co-claimants filed claims for compensation for the heirs of the land that has been utilized by the Company as hydroelectric power plant PLTA Tonsealama, amounting to Rp 54 billion in the District Court of Manado. In the process of court trial from District Court to Reconsideration PT PLN (Persero) lost. In the preparation of Execution by District Court of Manado, PT PLN (Persero) filed a Third Resistence of the Execution *(Derden Verzet)* of the land considering PT PLN (Persero) is a good *bezitter* who effectively controling and operating PLTA Tonsea Lama for more than 50 years. Currently the the *Derden Verzet* still in the process of Reconsideration in the Supreme Court of The Republic of Indonesia. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in progress in the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

(ii) On January 20, 2012, the Company faced a claim from PT Subur Sari Lastderich amounting to Rp 10 billion for the material loss and Rp 1 trillion for the immaterial loss in relation to development of PLTA Asahan III (PLTA) by the Company. The plaintiff's claimed that PT Subur Sari Lastderich has the right to build this PLTA. The Company won the case in the appeal process. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in the appeal process in the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

(iii) Pada tahun 2012, Perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh PT Meta Epsi sehubungan dengan Penggugat meminta bank garansi di Bank Niaga untuk tidak dicairkan kepada Perusahaan. Nilai gugatan sebesar Rp 83,3 miliar dan US$ 5 juta. Pada tanggal 14 Maret 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan penggugat. Pada tanggal 19 Maret 2013, Perusahaan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan. Pada tanggal 27 Oktober 2014, Pengadilan Tinggi Jakarta, mengabulkan banding Perusahaan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena Pengadilan Tinggi Jakarta telah menetapkan keputusan yang menolak gugatan penggugat, masih terdapat kemungkinan bahwa penggugat akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(iii) In 2012, the Company faced unlawful acts from PT Meta Epsi in the District Court of South Jakarta relating to the plaintiff's claim to unwithdraw bank guarantee account in a Bank Niaga. The amount of the claim is Rp 83,3 billion and US$ 5 million. On March 14, 2013, the District Court of South Jakarta granted the plaintiff's claim. On March 19, 2013 the Company appealed to the High Court of South Jakarta. On October 27, 2014, the High Court of Jakarta granted the Company's appeal and cancelled the ruling of the Disctrict Court of South Jakarta. As the High Court of Jakarta has issued a decision declining the plaintiff's claim, there is still a possibility that the plaintiff will file an appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

(iv) Pada tanggal 26 Desember 2012 Perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Modaco Enersys dan PT Angkasa Buana Cipta terkait Penggugat merasa dirugikan karena Perusahaan selaku tergugat memberikan rancangan pekerjaan pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima yang dirasa keliru sehingga penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunannya. Nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp 62 miliar. Pada tanggal 19 Februari 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan penggugat, dan selanjutnya penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 3 Maret 2014. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Jakarta.

(iv) On December 26, 2012, the Company faced unlawful acts from PT Modaco Enersys and PT Angkasa Buana Cipta relating to the plaintiff's claim that the defendant gave an unsuitable design for PLTU 1 West Nusa Tenggara (2 x 10 MW) Bima. The amount of the claim is Rp 62 billion. On February 19, 2014, the District Court of South Jakarta refused the claim of plaintiff, and consequently submitted an appeal to High Court of Jakarta on March 3, 2014. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in progress in the High Court of Jakarta.

(v) Pada tanggal 21 Agustus 2014, Perusahaan menghadapi gugatan di yang diajukan oleh Ny. Nesah binti Sadih sehubungan dengan sengketa tanah PLTGU Muara Tawar. Nilai gugatan sebesar Rp 59,2 miliar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

(v) On August 21, 2014, the Company faced unlawful act from Ny. Nesah binti Sadih relating to disputes regarding PLTGU Muara Tawar land. The amount of the claim is Rp 59.2 billion. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in progress in the South Jakarta Court.

(vi) Pada tanggal 9 Mei 2012, Perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Didik Suprijadi selaku Ketua Aliansi Petugas Pencatat Meter Listrik (AP2ML) sehubungan dengan dasar penggajian masa kerja petugas pencatat meter dan menuntut pembatalan Keputusan Direksi tentang pengadaan barang dan jasa yang dianggap melanggar hukum. Nilai gugatan sebesar Rp 186 miliar. Perusahaan memenangkan perkara ini sampai dengan tingkat banding. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(vi) On May 9, 2012, the Company faced unlawful acts from Didik Suprijadi as Chairman of the Electricity Meter Recorder Alliance (AP2ML) regarding the salary basis on the working period of meter recorder and cancellation of the Director Decision regarding procurement of materials and services that is considered a breach of law. The claim total is Rp 186 billion. The Company won the case in the appeal process. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in the appeal process in the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

(vii) Pada tanggal 10 November 2014, PT Wijaya Karya (Persero), PT Liman Obor Cahaya dan PT Euroasiatic Jaya mengajukan permohonan arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terhadap Perusahaan terkait pelaksanaan beberapa ketentuan tertentu pada Perjanjian Sewa Pembangkit PLTMG 25 MW di Rawa Minyak, Riau, yang mengakibatkan tidak beroperasinya pembangkit tersebut yang merugikan pemohon sebesar Rp 259 miliar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses arbitrase di BANI.

(vii) On November 10, 2014, PT Wijaya Karya (Persero), PT Liman Obor Cahaya and PT Euroasiatic Jaya registered an arbitration case to the Indonesia National Board of Arbitration (BANI) regarding the terms of several clauses in the Lease Agreement of PLTMG 25 MW in Rawa Minyak, Riau, that made the power plant cannot be operated and has yielded loss to the consorcium. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in abitration progress with BANI.

(viii) Pada tanggal 5 April 2012, PLN Geothermal, entitas anak, menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Permata Drilling Internasional (PDI) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan pekerjaan *Integrated Project Management* Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Desember 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa PLN Geothermal dinyatakan harus membayar ganti rugi kepada PDI sebesar US$ 12,3 juta. Pada tanggal 18 Desember 2012, PLN Geothermal mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, namun Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Juli 2013 menolak banding PLN Geothermal. Pada tanggal 10 Desember 2013, PLN Geothermal mengajukan kasasi. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara perdata tersebut di atas masih dalam proses kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(viii) On April 5, 2012, PLN Geothermal, a subsidiary, faced unlawful acts from PT Permata Drilling Internasional (PDI) in the District Court of South Jakarta relating to the work of the Integrated Project Management of Drilling Exploration Wells at PLTP Tulehu. Based on the verdict of the District Court of South Jakarta dated December 11, 2012, PLN Geothermal should pay compensation to PDI amounting to US$ 12.3 million. On December 18, 2012, PLN Geothermal appealed to the High Court of Jakarta, but verdict of High Court of Jakarta dated July 15, 2013, denied the appeal. On December 10, 2013, PLN Geothermal appealed to the Supreme Court of Republic of Indonesia. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in process in the Supreme Court of Republic of Indonesia.

Secara terpisah, pada tanggal 31 Agustus 2012 PLN Geothermal mengajukan permohonan arbitrase di BANI terhadap PDI atas permasalah yang sama, karena berdasarkan kontrak perselisihan yang timbul harus diselesaikan melalui BANI. Berdasarkan Putusan BANI tanggal 14 Maret 2013, permohonan PLN Geothermal tersebut dikabulkan BANI dan PDI harus membayar denda keterlambatan kepada PLN Geothermal sebesar US$ 348.279 ditambah biaya administrasi arbitrase sebesar US$ 31.560 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Perusahaan mempertimbangkan bahwa keputusan BANI mengabulkan gugatan PLN Geothermal, sehingga tidak ada provisi kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian.

(ix) Perusahaan dan entitas anak juga menghadapi gugatan ganti rugi dalam jumlah yang tidak material di beberapa lokasi bangunan jaringan transmisi/distribusi, perselisihan dengan karyawan, perkara dengan pelanggan dan pemasok. Manajemen berpendapat klaim-klaim tersebut tidak material dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, hasil litigasi-litigasi di atas belum dapat dipastikan dan estimasi andal tidak dapat ditentukan pada saat ini, atau Perusahaan memiliki dasar yang kuat dalam kasus ini karena keputusan pengadilan terakhir menguntungkan Perusahaan dan entitas anak, sehingga tidak ada provisi kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

Separately, on August 31, 2012, PLN Geothermal registered arbitration case to BANI regarding the same case against PDI, because it was stated in the contract that any conflict arised should be settled through BANI. Based on verdict of BANI dated March 14, 2013, PLN Geothermal's petition has been granted by BANI and PDI is obligated to make late penalty payment to PLN Geothermal amounting to US$ 348,279 and arbitration administration fee of US$ 31,560 and it is final and binding.

The Company considers that BANI decision was in favor of PLN Geothermal, as such no provision has been recorded in the consolidated financial statements.

(ix) The Company and its subsidiaries also face claims for compensation of losses, which are immaterial in amount, at several areas of the Company's transmission/distribution facilities, disputes with the Company's employees, and cases with customers and suppliers. Management believes that such claims are not material and will not significantly affect the Company's operations.

As of the completion date of these consolidated financial statements, the results of the above litigations are either still uncertain and there are no reliable estimate that can be made at this point, or the Company has strong grounds supporting the case as the recent court decisions were in favour of the Company and subsidiaries, therefore no provision has been recorded in these consolidated financial statements.

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Tabel berikut ini mengungkapkan rincian instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan klasifikasi aset keuangan:

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

a. Categories and classes of financial instruments

The following table discloses the details of the Company's and its subsidiaries' financial asset classification:

	2014			
	Klasifikasi instrumen keuangan/ *Financial instruments classification*			
	Aset Keuangan/ *Financial Asset*			
	Pinjaman yang diberikan dan piutang / *Loans and Receivables*	Tersedia untuk dijual / *Available-for-Sale*	Jumlah Aset Keuangan / *Total Financial Assets*	
Aset keuangan				**Financial assets**
Aset tidak lancar				**Noncurrent assets**
Piutang pihak berelasi	98.829	-	98.829	Receivable from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunannya	5.994.028	-	5.994.028	Restricted cash in banks and time deposits
Piutang lain-lain	321.385	-	321.385	Other receivables
Aset tidak lancar lain	-	20.654	20.654	Other noncurrent assets
Jumlah aset tidak lancar	6.414.242	20.654	6.434.896	Total noncurrent assets
Aset lancar				**Current assets**
Kas dan setara kas	27.111.528	-	27.111.528	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	100.696	-	100.696	Short-term investments
Piutang usaha	19.494.867	-	19.494.867	Trade accounts receivable
Piutang subsidi listrik	19.280.861	-	19.280.861	Receivables on electricity subsidy
Piutang lain-lain	866.948	-	866.948	Other receivables
Piutang pihak berelasi	282.791	-	282.791	Receivables from related parties
Jumlah aset lancar	67.137.691	-	67.137.691	Total current assets
Jumlah aset keuangan	73.551.933	20.654	73.572.587	Total financial assets

	2013			
	Klasifikasi instrumen keuangan/ *Financial instruments classification*			
	Aset Keuangan/ *Financial Asset*			
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and Receivables*	Tersedia untuk dijual/ *Available-for-Sale*	Jumlah Aset Keuangan/ *Total Financial Assets*	
Aset keuangan				**Financial assets**
Aset tidak lancar				**Noncurrent assets**
Piutang pihak berelasi	176.032	-	176.032	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5.659.753	-	5.659.753	Restricted cash in banks and time deposits
Piutang lain-lain	304.302	-	304.302	Other receivables
Aset tidak lancar lain	-	8.186	8.186	Other noncurrent assets
Jumlah aset tidak Lancar	6.140.087	8.186	6.148.273	Total noncurrent assets
Aset lancar				**Current assets**
Kas dan setara kas	25.529.969	-	25.529.969	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	97.667	-	97.667	Short-term investments
Piutang usaha	15.696.940	-	15.696.940	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	4.625.113	-	4.625.113	Other receivables
Piutang subsidi listrik	21.793.929	-	21.793.929	Receivables on electricity subsidy
Piutang pihak berelasi	40.061	-	40.061	Receivables from related parties
Jumlah aset lancar	67.783.679	-	67.783.679	Total current assets
Jumlah aset keuangan	73.923.766	8.186	73.931.952	Total financial assets

Seluruh liabilitas keuangan milik Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

All of the Company's and subsidiaries' financial liabilities are classified as financial liabilities measure at amortised cost, details are as follow:

	2014	2013	
Liabilitas keuangan			**Financial liabilities**
Liabilitas jangka panjang			**Noncurrent liabilities**
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			Long-term liabilities - net of current maturities
Penerusan pinjaman	26.453.073	29.498.060	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	8.371.933	8.578.716	Government loans
Utang sewa pembiayaan	128.096.528	129.718.551	Lease liabilities
Utang bank	70.400.166	66.457.948	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	81.672.556	81.017.989	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	6.654.142	6.784.275	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	7.331	6.906	Payable to related parties
Utang lain-lain	98.771	221.150	Other payables
Jumlah liabilitas jangka panjang	321.754.500	322.283.595	Total noncurrent liabilities
Liabilitas jangka pendek			**Current liabilities**
Utang usaha	26.284.155	26.526.502	Trade accounts payable
Biaya masih harus dibayar	5.663.291	5.388.647	Accrued expense
Uang jaminan langganan	10.828.518	10.107.402	Customers' security deposits
Utang biaya proyek	857.728	1.061.453	Project cost payable
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun			Current maturities of long-term liabilities
Penerusan pinjaman	2.644.611	3.208.983	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	293.793	293.793	Government loans
Utang sewa pembiayaan	5.116.369	4.901.469	Lease liabilities
Utang bank	9.527.681	8.387.881	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	805.000	2.808.000	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	291.744	272.454	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	-	2.786	Payable to related parties
Utang lain-lain	14.272.781	18.223.407	Other payables
Jumlah liabilitas jangka pendek	76.585.671	81.182.777	Total current liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	398.340.171	403.466.372	**Total financial liabilities**

b. Manajemen risiko modal

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan dan entitas anak terdiri dari pinjaman (Catatan 23, 24, 25, 26, 27 dan 28) dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, saldo laba (Catatan 20), dan tambahan modal disetor (Catatan 21).

Dewan Direksi Perusahaan dan entitas anak secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Perusahaan dan entitas anak. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

b. Capital risk management

The Company and its subsidiaries manage capital risk to ensure that they will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Company and its subsidiaries capital structure consists of debt (Notes 23, 24, 25, 26, 27 and 28) and equity shareholders of the holding that consist of capital stock, retained earnigs (Note 20), and additional paid-in capital (Note 21).

The Board of Directors of the Company and its subsidiaries periodically review the Company and its subsidiaries' capital structure. As part of this review, the Board of Directors consider the cost of capital and related risks.

Batasan pinjaman Perusahaan mensyaratkan antara lain pemenuhan rasio pinjaman terhadap ekuitas dan rasio kecukupan modal. Manajemen secara berkala memonitor persyaratan tersebut untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam batasan pinjaman Perusahaan.

Perusahaan dan entitas anak berusaha untuk meminimalkan biaya pinjaman sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan dan entitas anak. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dan entitas anak dalam mencari pendanaan melalui utang selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Perusahaan membentuk Divisi Manajemen Risiko (Divisi MRO) yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Perusahaan. Divisi ini juga bertugas untuk menyusun profil risiko yang bersifat strategis sebagai himbauan awal kepada manajemen Perusahaan dan entitas anak. Divisi MRO bertanggung jawab kepada Direktur Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Perusahaan telah menetapkan taksonomi risiko dengan membagi risiko menjadi lima kelompok yaitu risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko proyek, dan risiko kepatuhan. Risiko keuangan diantaranya adalah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam mengelola risiko, Perusahaan mempertimbangkan skala prioritas yang didasarkan pada level risikonya. Level risiko ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan skala dampak yang ditimbulkan.

The Company's loan covenants requires among other things, the fullfilment of certain debt to equity ratio and capital adequacy ratio. Management regularly monitors such requirements to ensure that there are no defaults on the loans of the Company.

The Company and its subsidiaries aim to minimize the cost of debt in order to maximize their value. Therefore, in their financing policies, the Company and its subsidiaries always take into account the financial risk that may arise in the future.

c. Financial risk management objectives and policies

The objectives and policies of the Company and its subsidiaries financial risk management are to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of their business, while managing their exposure to market risks (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company and its subsidiaries operate within defined policies approved by the Board of Directors.

In managing those risks, the Company established a Risk Management Division (MRO Division) which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guideline and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Company's environment. The division is also established to formulate a strategic risk profile as an early warning to the Company and its subsidiaries' management. The MRO Division is responsible to the Commerce, Risk Management and Compliance Director.

The Company has established risk taxonomy by dividing risk into five categories: strategic risk, financial risk, operational risk, project risk, and compliance risk. Financial risk includes market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. In managing those risks, the Company considers prioritization based on risk level. Risk level is determined by the level of possibility and scale of potential impact.

Terkait dengan risiko keuangan, Perusahaan sedang mengkaji kebijakan manajemen untuk melakukan akuntansi lindung nilai. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, kebijakan manajemen yang telah disetujui menjadi sangat penting agar tidak timbul masalah pada waktu pelaksanaan akuntansi lindung nilai tersebut. Selain itu, Perusahaan juga sedang mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menangani akuntansi lindung nilai untuk memastikan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akuntansi lindung nilai dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pada tanggal 31 Desember 2014, pedoman pelaksanaan akuntansi lindung nilai tersebut belum selesai.

Related to financial risks, the Company is currently reviewing management's policy related to hedge accounting. As an SOE, the approved management policy is very important in order to avoid any issues that may arise during the implementation of such hedging programs. In addition, the Company is also preparing human resources that will handle the hedge accounting to ensure proper recognition, measurement and in accordance with applicable standards. As of December 31, 2014, the hedge accounting guideline are not yet finalized.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan dan entitas anak memiliki banyak transaksi dan sumber pendanaan dalam mata uang asing. Sebagai akibatnya timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Perusahaan telah melakukan diskusi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mendapatkan pemahaman komprehensif atas keadaan pasar. Perusahan kemudian akan mempertimbangkan keadaan pasar ke dalam proyeksi keuangan internal mereka dan mengembangkan strategi yang telah disetujui bersama untuk memitigasi eksposur risiko mata uang asing dengan membeli instrumen mata uang asing yang dibutuhkan disaat yang tepat.

Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan dan entitas anak pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 52.

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Perusahaan dan entitas anak untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. 10% kenaikan dan penurunan menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

i. Foreign currency risk management

The Company and its subsidiaries undertake many transactions and funding sources denominated in foreign currencies. Consequently, there is exposures to exchange rate fluctuations.

The Company held regular discussion with Bank of Indonesia (BI) to get a comprehensive understanding of the market outlook. The Company will then incorporate this outlook into its internal financial forecast and develop a concerted strategy to mitigate its foreign currency exposure by purchasing the required foreign currency denominated instruments at the right time.

The Company and its subsidiaries foreign currency exposure as of the reporting date is disclosed in Note 52.

Foreign currency sensitivity

The following table explains the details of the Company's and its subsidiaries' sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. 10% increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

Analisa sensitifitas ini tidak memperhitungkan dampak dan perubahan kurs mata uang asing yang dapat dikapitalisasi sebagai aset pekerjaan dalam penyelesaian sesuai dengan PSAK 26, "Biaya Pinjaman".

This sensitivity analysis does not consider the potential changes to the amount of foreign exchange differences that can be capitalized as construction in progress asset in accordance with SFAS 26, "Borrowing Costs".

	Dampak terhadap laba setelah pajak/*Effect to profit after tax*)* 2014				
	JPY		USD		
	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan					**Financial Assets**
Piutang pihak berelasi	-	-	16.973	(16.973)	Receivables from related parties
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	410.438	(410.438)	38.163	(38.163)	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	14.256	(14.256)	272.361	(272.361)	Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	424.694	(424.694)	327.497	(327.497)	Total financial assets
Liabilitas Keuangan					**Financial Liabilities**
Penerusan pinjaman	(1.491.785)	1.491.785	(561.261)	561.261	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	(1.922.515)	1.922.515	(7.795.091)	7.795.091	Lease liability
Utang bank	-	-	(2.855.726)	2.855.726	Bank loan
Utang obligasi dan sukuk ijarah	-	-	(5.178.150)	5.178.150	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	-	-	(520.941)	520.941	Electricity purchase payable
Utang lain-lain	(5.041)	5.041	(300.602)	300.602	Other payables
Utang biaya proyek	(14.361)	14.361	(27.275)	27.275	Project cost payable
Utang usaha	-	-	(332.228)	332.228	Trade accounts payable
Biaya masih harus dibayar	(33.575)	33.575	(247.012)	247.012	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	(3.467.277)	3.467.277	(17.818.286)	17.818.286	Total financial liabilities
Jumlah bersih	(3.042.583)	3.042.583	(17.490.789)	17.490.789	Total - net

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman/ *Not considering the effect of borrowing cost capitalization*

	Dampak terhadap laba setelah pajak/*Effect to profit after tax*)* 2014				
	EUR		Lain-lain/*Others **)*		
	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan					**Financial Assets**
Kas dan setara kas	60.276	(60.276)	440	(440)	Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	60.276	(60.276)	440	(440)	Total financial assets
Liabilitas Keuangan					**Financial Liabilities**
Penerusan pinjaman	(85.194)	85.194	(20.054)	20.054	Two-step loans
Utang bank	(52.711)	52.711	-	-	Bank loans
Utang lain-lain	(12.991)	12.991	(28.686)	28.686	Other payables
Utang biaya proyek	(5.663)	5.663	-	-	Project cost payable
Utang usaha	(15.104)	15.104	-	-	Trade accounts payable
Biaya masih harus dibayar	(769)	769	(213)	213	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	(172.432)	172.432	(48.953)	48.953	Total financial liabilities
Jumlah bersih	(112.156)	112.156	(48.513)	48.513	Total - net

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman

**) Dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara AS$ menggunakan kurs tangga pelaporan

*) Not considering the effect of borrowing cost capitalization

**) Denominated in other foreign currency are presented as US$ equivalent using the exchange rates prevelling at reporting dates

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax* 2013				
	JPY		USD		
	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan					**Financial Assets**
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	379.442	(379.442)	41.051	(41.051)	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	5.644	(5.644)	235.663	(235.663)	Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	385.086	(385.086)	276.714	(276.714)	Total financial assets
Liabilitas Keuangan					**Financial Liabilities**
Penerusan pinjaman	(1.714.131)	1.714.131	(563.482)	563.482	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	(2.373.581)	2.373.581	(7.430.803)	7.430.803	Lease liability
Utang bank dan surat hutang jangka menengah	-	-	(2.890.623)	2.890.623	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	-	-	(5.073.671)	5.073.671	Bonds payable
Utang listrik swasta	-	-	(529.255)	529.255	Electricity purchase payable
Utang usaha	-	-	(441.317)	441.317	Trade accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	(24.442)	24.442	(232.555)	232.555	Accrued expenses
Utang biaya proyek	(10.224)	10.224	(37.621)	37.621	Project cost payable
Utang lain-lain	(16.086)	16.086	(452.069)	452.069	Other payables
Jumlah liabilitas keuangan	(4.138.464)	4.138.464	(17.651.396)	17.651.396	Total financial liabilities
Jumlah bersih	(3.753.378)	3.753.378	(17.374.682)	17.374.682	Total - net

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax* 2013				
	EUR		Lain-lain/ *Others*		
	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan					**Financial Assets**
Kas dan setara kas	6.613	(6.613)	3.268	(3.268)	Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	6.613	(6.613)	3.268	(3.268)	Total financial assets
Liabilitas Keuangan					**Financial Liabilities**
Penerusan pinjaman	(117.947)	117.947	(23.731)	23.731	Two-step loans
Biaya yang masih harus dibayar	(1.063)	1.063	(254)	254	Accrued expenses
Utang biaya proyek	(18.476)	18.476	-	-	Project cost payable
Utang lain-lain	(15.188)	15.188	(39.849)	39.849	Other payables
Jumlah liabilitas keuangan	(152.674)	152.674	(63.834)	63.834	Total financial liabilities
Jumlah bersih	(146.061)	146.061	(60.566)	60.566	Total - net

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Perusahaan dan entitas anak memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko tingkat suku bunga. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

Perusahaan menunjuk konsultan yang memahami pasar untuk menentukan harga obligasi dan MTN. Selanjutnya, manajemen secara terus menerus menilai kondisi pasar untuk menemukan peluang untuk memastikan suku bunga efektif.

ii. Interest rate risk management

The Company and its subsidiaries have transactions at fixed and floating interest rates. Trasactions at floating interest rates are exposed to interest rate risk. The Company and its subsidiaries manage the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

The Company hires consultants which are experts in the market to determine the pricing of its bonds and MTNs. Further, management continually assess market conditions to find opportunities to ensure the effective interest rates.

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Interest rate sensitivity

The sensitivity analysis below have been determined based on the Company's and its subsidiaries' exposure to interest rates for financial instruments after tax outstanding at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of a 50 basis point increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. A 50 basis points increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax*)* 2014		
	+ 50 bp	- 50 bp	
Aset			**Assets**
Kas dan setara kas	101.668	(101.668)	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	352	(352)	Short-term investments
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	22.478	(22.478)	Restricted cash in banks and time deposits
Sub jumlah laba (rugi)	124.498	(124.498)	Subtotal income (loss)
Liabilitas keuangan:			**Financial Liabilities:**
Penerusan pinjaman	(25.570)	25.570	Two-step loans
Utang bank	(307.896)	307.896	Bank loans
Sub jumlah laba (rugi)	(333.466)	333.466	Subtotal income (loss)
Jumlah laba (rugi)	(208.968)	208.968	Total income (loss)

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman/ *Not considering the effect of borrowing cost capitalization*

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax* 2013		
	+ 50 bp	- 50 bp	
Aset Keuangan			**Financial Assets**
Kas dan setara kas	79.566	(79.566)	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	345	(345)	Short-term investments
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	21.224	(21.224)	Restricted cash in banks and time deposits
Sub jumlah laba (rugi)	101.135	(101.135)	Subtotal income (loss)
Liabilitas keuangan:			**Financial Liabilities:**
Penerusan pinjaman	(28.389)	28.389	Tw o-step loans
Utang bank	(280.672)	280.672	Bank loans
Sub jumlah laba (rugi)	(309.061)	309.061	Subtotal income (loss)
Jumlah laba (rugi)	(207.926)	207.926	Total income (loss)

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa pihak ketiga akan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan entitas anak. Sebagai perusahaan yang diberikan kewajiban untuk melayani publik oleh Pemerintah Republik Indonesia, Perusahaan dan entitas anak diwajibkan melayani semua pelanggan tanpa melihat apakah nantinya akan bisa membayar atau tidak. Dalam meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang, Perusahaan dan entitas anak menerapkan uang jaminan pelanggan dan melakukan pemutusan sambungan listrik ke pelanggan ditentukan jika pelanggan tidak membayar lewat dari tiga bulan untuk meminimalkan risiko kredit. Untuk kas dan setara kas, Perusahaan dan entitas anak mengelola rekening pada beberapa Bank untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko kredit. Lihat Catatan 55.a untuk rinciannya.

iii. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that the counterparties will default on their contractual obligations resulting in a loss to the Company and its subsidiaries. As a company that performs a public service obligation on behalf of the Governement of the Republic of Indonesia, the Company and its subsidiaries are obliged to serve all customers regardless of the ability to pay. In minimizing the risk of uncollected receivables, the Company and its subsidiaries collect customers security deposits and will terminate the electricity connection to the customer if a customer does not make payment on time after three months to minimize the Company's credit risk. For cash and cash equivalents, the Company and its subsidiaries maintain accounts with several banks to avoid significant concentration of cash with one institution.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Company's and its subsidiaries exposure to credit risk. See Note 55.a for details.

Kualitas kredit piutang usaha

Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas yang buruk karena piutang usaha Perusahaan tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar yang meliputi berbagai industri dan wilayah geografis. Perusahaan juga melakukan evaluasi kredit berkelanjutan atas kondisi keuangan piutang secara berkala. Lihat Catatan 14 untuk rincian umur piutang dan analisa cadangan penurunan nilai.

Credit quality of trade accounts receivable

The Company believes there is no heightened risk of poor credit quality because its trade receivables are spread over a large number of customers across diverse industries and geographic areas. The Company also performs ongoing credit evaluation on the financial condition of its accounts receivable. See Note 14 for detailed information of the aging of receivables and impairment assessment of trade receivables.

Kualitas kredit piutang subsidi listrik

Perusahaan berkeyakinan bahwa piutang subsidi listrik dapat diterima sepenuhnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada risiko gagal bayar oleh Pemerintah.

Credit quality of electricity subsidy

Receivable on electricity subsidy can be fully recovered in time because it is to be collected from the Government of the Republic of Indonesia. The Company believes there is no risk of default by the Government.

Kualitas kredit kas, deposito berjangka dan kas yang dibatasi penggunaannya

Perusahaan menempatkan kas dan setara kas, deposito berjangka dan rekening deposito yang dibatasi penggunaannya pada bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh karena itu, Perusahaan berkeyakinan bahwa risiko kredit atas aset keuangan ini adalah minimal. Pihak ketiga yang dimaksud termasuk institusi keuangan utama dan BUMN lainnya.

Credit qualities of cash, term deposits and restricted cash

The Company placed cash and cash equivalents, term deposits and restricted cash with reputable counterparties that have good credit rating or bank standing. Consequently, the Company believes the credit risk of such financial assets is minimal. These counterparties include large financial institutions and other SOEs.

Kualitas kredit piutang lainnya

Piutang lainnya ditagihkan kepada pihak berelasi dan karyawan Perushaan, oleh karena itu Perusahaan dapat memonitor kolektibilitas piutang-piutang ini dengan seksama. Perusahaan memiliki tingkat kolektibilitas yang baik atas piutang-piutang terkait.

Credit quality of other receivables

Other receivables are to be collected from the Company's related parties and employees; as such, the Company can closely monitors the collectability of these receivables. The Company has good historical collection rate of these financial assets.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan dan entitas anak akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas, simpanan, fasilitas bank dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Selanjutnya Perusahaan dan entitas anak juga memelihara kecukupan dana dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada periode 31 Desember 2014. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar. Untuk arus bunga dengan tingkat bunga mengambang, nilai arus kas yang tidak terdiskonto diperoleh dari kurva suku bunga pada akhir periode. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskontokan ditranslasi dengan kurva nilai tukar *forward* yang relevan pada akhir periode pelaporan.

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Company and its subsidiaries will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company and its subsidiaries short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Company and its subsidiaries manage liquidity risk by maintaining adequate cash, reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial liabilities.

In addition, the Company and its subsidiaries maintain an adequate amount of cash and cash equivalents and short-time investments, which may be readily converted to cash upon any unforeseen interruption of its cash collections.

The following table details the Company and its subsidiaries remaining contractual maturity for its financial liabilities with agreed repayment period as of December 31, 2014. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Company and its subsidiaries are required to pay. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. For foreign currency denominated financial liabilities, the undiscounted amortization is translated using the relevant forward exchange curve at the end of the reporting period.

	2014					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/ *Over five years*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas Keuangan						**Financial Liabilities**
Penerusan pinjaman	3.402.946	5.778.914	4.718.086	20.160.403	34.060.349	Two-step loans
Utang kepada pemerintah	761.547	2.228.581	2.799.908	6.601.621	12.391.657	Government loans
Utang sewa pembiayaan	25.735.327	50.603.341	49.212.515	300.340.464	425.891.647	Lease liability
Utang bank	16.688.443	31.449.736	25.462.557	26.319.226	99.919.962	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	7.104.476	28.719.129	20.384.658	81.935.528	138.143.791	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	597.120	1.194.240	1.194.240	7.165.440	10.151.040	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	3.969	3.362	-	-	7.331	Related parties payables
Utang usaha	26.284.155	-	-	-	26.284.155	Trade accounts payable
Utang jaminan langganan	10.828.518	-	-	-	10.828.518	Customer's security deposits
Utang biaya proyek	857.728	-	-	-	857.728	Project cost payable
Biaya masih harus dibayar	5.663.291	-	-	-	5.663.291	Accrued expense
Utang lain-lain	14.272.781	98.771	-	-	14.371.552	Other payables
Jumlah	112.200.301	120.076.074	103.771.964	442.522.682	778.571.021	Total

d. Nilai wajar instrumen keuangan

Kecuali dijabarkan pada tabel berikut ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek, instrumen tersebut dijamin penuh atau mempunyai tingkat suku bunga pasar:

d. Fair value of financial instruments

Except as detailed in the following table, the management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities, the instruments are fully collateralized or they carry a market interest rate:

	2014		2013		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Pinjaman diberikan dan piutang					**Loans and receivables**
Piutang pihak berelasi	381.620	381.620	216.093	216.191	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5.994.028	6.789.350	5.659.753	5.594.475	Restricted cash in banks and time deposits
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi					**Liabilities at amortised cost**
Penerusan pinjaman	29.097.684	31.011.737	32.707.043	33.833.498	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	8.665.726	8.284.824	8.872.509	8.149.855	Government loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	82.477.556	89.549.382	83.825.989	86.380.138	Bonds payable and sukuk ijarah

Nilai wajar instrumen keuangan diatas, kecuali untuk utang obligasi, ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan menggunakan suku bunga pasar dengan penyesuaian kredit pada tanggal pelaporan.

Nilai wajar dari utang obligasi, ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dikuotasikan pada tanggal pelaporan.

The fair value for the above financial instruments, except for bonds payable, was determined by discounting estimated future cash flows with credit adjusted market interest rates at the reporting date.

The fair value of bonds payable is determined by quoted the closing ask price at the reporting date.

56. PENERAPAN ISAK 27

Di tahun 2014 Perusahaan menerapkan ISAK 27, “Pengalihan Aset dari Pelanggan". ISAK 27 berlaku untuk perjanjian di mana Perusahaan menerima aset tetap (atau uang tunai untuk memperoleh atau membangun aset tetap) dari pelanggan yang harus digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan atau menyediakan akses berkelanjutan atas pasokan listrik, atau keduanya.

Ketika Perusahaan menerima pengalihan aset tetap dari pelanggan yang memenuhi definisi aset, Perusahaan harus mengakui aset yang dialihkan tersebut sebagai aset tetap Perusahaan. Pendapatan atas kontribusi yang diperoleh dari pelanggan diakui di dalam laporan laba rugi ketika Perusahaan telah memenuhi kewajiban atas kontribusi tersebut.

Oleh karena Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan akses berkelanjutan atas jaringan listriknya dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (terlepas dari kontribusi yang telah diberikan oleh pelanggan) maka Perusahaan menyimpulkan bahwa menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan merupakan jasa yang diberikan untuk mendapatkan aset tersebut. Jasa koneksi diserahkan kepada pelanggan dan merepresentasikan nilai yang berdiri sendiri (*stand-alone value*) untuk pelanggan tersebut. Sebagai hasilnya, Perusahaan mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan sebagai pendapatan pada saat Perusahaan menyelesaikan kewajiban atas jasa koneksi tersebut dan tidak ditangguhkan selama 20 tahun seperti periode sebelumnya.

Perusahaan wajib menerapkan ISAK 27 untuk mencatat pengalihan aset dari pelanggan yang diterima pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Pada tanggal 23 Februari 2015, DSAK-IAI menerbitkan Buletin Teknis 10 tentang Penerapan Ketentuan Transisi ISAK 27 yang menjelaskan bahwa penerapan dini diperkenankan dengan syarat penilaian dan informasi lain yang dibutuhkan untuk menerapkan Interpretasi ini pada pengalihan yang telah terjadi sebelumnya diperoleh pada saat pengalihan tersebut terjadi. Perusahaan memiliki informasi yang cukup untuk menerapkan Interpretasi secara retrospektif dan oleh karena itu Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian yang telah di audit untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 pada tanggal 27 Februari 2015 untuk mencerminkan penerapan awal ISAK 27.

56. APPLICATION OF ISFAS 27

In 2014 the Company adopted ISFAS 27, “Transfer of Assets from Customer". ISFAS 27 applies to arrangements in which the Company receives a property, plant, and equipment (or cash to acquire or construct a property, plant and equipment) from a customer that must be used either to connect the customer to its network or to provide the customer with ongoing access to the supply of electricity, or both.

When the item of property, plant and equipment transferred from a customer meets the definition of an asset the Company must recognize the asset in its financial statements. Revenue arising from contributions received from customers is recognised in profit or loss when the performance obligations associated with receiving those contributions are met.

As the Company has an obligation to provide ongoing access to its network to all customers at the same price regulated by the Government of Republic of Indonesia (regardless of the amount of contributions made by the customers) the Company concludes that connecting the customers to its network is the only service to be delivered in exchange for the assets. A service connection is delivered to the customer and represents stand-alone value for that customer. As a result, the Company recognizes connection fees received from customers that are used to construct or acquire property, plant, and equipment to connect the customers to its network as revenues when the Company completes the connection services and these are not deferred over 20 years as was the case in prior periods.

The Company should apply ISFAS 27 to transfer of assets from customers received on or after January 1, 2014. On February 23, 2015, DSAK-IAI published a Technical Bulletin 10 on the Implementation of the Transitional Provisions of ISFAS 27, confirming that earlier application is permitted provided the valuations and other information need to apply the Interpretation to past transfers were obtained at the time those transfers occurred. The Company has sufficient information to apply the Interpretation retrospectively and hence the Company reissued its audited consolidated financial statements for the years ended December 31, 2013 and 2012 on February 27, 2015 to reflect the early application of ISFAS 27.

Akun - akun laporan keuangan berikut ini disesuaikan untuk mencerminkan dampak dari penerapan ISAK 27:

The following financial statement line items were adjusted to reflect the implication of applying ISFAS 27:

	Jumlah sebelum penyesuaian/ *Balance before adjustment* 31 Desember/ *December 31 2013*	Penyesuaian / *Adjustments*	Jumlah setelah penyesuaian/ *Balance after adjustment* 31 Desember/ *December 31 2013*	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				Consolidated statement of financial position
Aset tidak lancar				Noncurrent assets
Aset pajak tangguhan	11.590.879	(5.658.405)	5.932.474	Deferred tax assets
Liabilitas jangka panjang				Noncurrent liabilities
Pendapatan ditangguhkan	23.788.838	(23.788.838)	-	Deferred revenue
Liabilitas pajak tangguhan	3.862.843	39.942	3.902.785	Deferred tax liabilities
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Pendapatan ditangguhkan	-	990.913	990.913	Deferred revenue
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya	17.931.293	17.099.578	35.030.871	Retained earnings - unappropriated
Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian				Consolidated statement of comprehensive income
Pendapatan usaha				Revenues
Penyambungan pelanggan	1.585.338	4.442.461	6.027.799	Customer connection fees
Manfaat (beban) pajak	9.653.958	(1.110.615)	8.543.343	Tax benefit (expense)
Laba (rugi) tahun berjalan dan jumlah laba	(29.567.461)	3.331.846	(26.235.615)	Profit (loss) for the year and total comprehensive income
Laba (rugi) per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	(639.947)	72.122	(567.825)	Basic earnings (loss) per share (in full Rupiah amount)

Penerapan ISAK 27 tidak memiliki dampak pada laporan arus kas konsolidasian Perusahaan.

The adoption of ISFAS 27 has no impact on the consolidated statement of cash flow of the Company.

57. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 14 Januari 2015, melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No 01/KR/DK-PLN/2015, telah diangkat Darmono dan Hasan Bisri sebagai Komite Audit menggantikan Zulkifli Zaini, Harry Susetyo Nugroho, dan Oegroseno sehingga susunan Komite Audit menjadi sebagai berikut:

Ketua : Darmono
Anggota : Andin Hadiyanto
Hasan Bisri
Sugeng Rochadi
Aidil Yuzar

57. SUBSEQUENT EVENTS

As stipulated in the Board of Commissioners Decision Letter No 01/KR/DK-PLN/2015 dated January 14, 2015 the Company's Board of Commissioners appointed Darmono and Hasan Bisri as new Audit Committee members replacing Zulkifli Zaini, Harry Susetyo Nugroho and Oegroseno. The composition of the new Audit Committee is as follows:

Chair : Darmono
Member : Andin Hadiyanto
Hasan Bisri
Sugeng Rochadi
Aidil Yuzar

58. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2015.

58. MANAGEMENTS RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on February 27, 2015.

****

Laporan Keuangan Konsolidasian 2013

Consolidated Financial Statements 2013

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012, DAN 1 JANUARI 2012/
31 DESEMBER 2011 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012/
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012, AND JANUARY 1, 2012/DECEMBER 31, 2011 AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013 AND 2012

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*
DAFTAR ISI/*TABLE OF CONTENTS*

	Halaman/ *Page*
SURAT PERNYATAAN DIREKSI/*DIRECTORS' STATEMENT LETTER*	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/*INDEPENDENT AUDITORS' REPORT*	1
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan 1 Januari 2012/31 Desember 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012/	
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – As of December 31, 2013 and 2012, and January 1, 2012/December 31, 2011 and for the years ended December 31, 2013 and 2012	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/*Consolidated Statements of Financial Position*	3
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian/*Consolidated Statements of Comprehensive Income*	5
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/*Consolidated Statements of Changes in Equity*	6
Laporan Arus Kas Konsolidasian/*Consolidated Statements of Cash Flows*	7
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian/*Notes to Consolidated Financial Statements*	8

PT PLN (PERSERO)

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160
Telp. : (021) 7261875, 7261122, 7262234
(021) 7251234, 7250550
Kotak Pos : 4322/KBB Faximile : (021) 7221330 Alamat Kawat : PLNPST

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
DAN 1 JANUARI 2012 / 31 DESEMBER 2011
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012
AND JANUARY 1, 2012 / DECEMBER 31, 2011
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/*We, the undersigned:*

1. Nama/*Name* : SOFYAN BASIR
   Alamat kantor/*Office address* : PT PLN (Persero)
   Jl. Trunojoyo Blok M I/135
   Jakarta Selatan
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu indentitas lain/*Domicile as stated in ID Card* : Jl. Taman Bendungan Jatiluhur No. 3.
   Bendungan Hilir
   Jakarta Pusat
   Nomor telepon/*Phone number* : (021) 7220300
   Jabatan/*Position* : DIREKTUR UTAMA / *PRESIDENT DIRECTOR*

2. Nama/*Name* : SARWONO SUDARTO
   Alamat kantor/*Office address* : PT PLN (Persero)
   Jl. Trunojoyo Blok M I/135
   Jakarta Selatan
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu indentitas lain/*Domicile as stated in ID Card* : Komplek BRI Blok A No. 45
   Jl. Pramukasari IV RT 009 RW 005
   Rawasari, Cempaka Putih
   Jakarta Pusat
   Nomor telepon/*Phone number* : (021) 7392038
   Jabatan/*Position* : DIREKTUR / *DIRECTOR*

menyatakan bahwa/*state that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements;
2. The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the Consolidated Financial Statements is complete and correct;
   b. The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts;
4. We are responsible for the Company and its Subsidiaries internal control system.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 27 Februari 2015 / February 27, 2015

METERAI TEMPEL
BEBACF381739437
DIREKSI
6000

SOFYAN BASIR
Direktur Utama / *President Director*

SARWONO SUDARTO[1]
Direktur / *Director*

[1] Baru menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2 Januari 2015/*Has just been appointed as the Company's director effective as of 2 January 2015*

Deloitte.

Osman Bing Satrio & Eny
Registered Public Accountants
License: KMK No. 1423/KM.1/2012
The Plaza Office Tower 32nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav 28 - 30
Jakarta 10350, Indonesia

Tel: +62 21 29923100
Fax: +62 21 29928200, 29928300
E-mail: iddtd@deloitte.com
www.deloitte.com

Laporan Auditor Independen

No. GAR115 0061 PLN OS

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No. GAR115 0061 PLN OS

The Stockholder, Board of Commissioners and Directors

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2013 and the consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan entitas anak tanggal 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Seperti dijelaskan dalam Catatan 56 atas laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian telah disesuaikan secara retrospektif sehubungan dengan penerapan ISAK 27 "Pengalihan Aset dari Pelanggan" yang efektif berlaku 1 Januari 2014.

Seperti dijelaskan dalam Catatan 14 atas laporan keuangan konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2012 dan 2011 disajikan kembali untuk menyesuaikan piutang belum ditagih.

Seperti dijelaskan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan mengakui pendapatan subsidi listrik Pemerintah atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp 101.207.859 juta tahun 2013.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara and its subsidiaries as of December 31, 2013 and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of Matters

As discussed in Note 56 to the consolidated financial statements, the accompanying consolidated financial statements have been retrospectively adjusted for the adoption of ISAK 27 "Transfer of Assets from Customers" which is effective January 1, 2014.

As discussed in Note 14 to the consolidated financial statements, the accompanying 2012 and 2011 consolidated statements of financial position has been restated to adjust the not yet billed receivable.

As discussed in Note 37 to the consolidated financial statements, the Company recognized revenue from Government's electricity subsidy on accrual basis which was computed in accordance with the provisions of the Rule of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia amounting to Rp 101,207,859 million in 2013.

OSMAN BING SATRIO & ENY

Drs. Osman Sitorus
Izin Akuntan Publik/*License of Public Accountant* No. AP.0567

25 Februari 2014, kecuali untuk Catatan 56 yang bertanggal 27 Februari 2015/
February 25, 2014, except for Note 56 as to which the date is February 27, 2015

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2013 *)	31 Desember/ *December 31,* 2012 *)	1 Januari/ *January 1,* 2012/ 31 Desember/ *December 31,* 2011 *)	
ASET					ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NONCURRENT ASSETS
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 175.676.127 juta tanggal 31 Desember 2013, Rp 155.345.122 juta tanggal 31 Desember 2012 dan Rp 136.396.197 juta tanggal 1 Januari 2012	6	488.102.578	462.317.745	402.260.912	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 175,676,127 million as of December 31, 2013, Rp 155,345,122 million as of December 31, 2012 and Rp 136,396,197 million as of January 1, 2012
Properti investasi	7	159.330	158.280	152.796	Investment properties
Investasi pada entitas asosiasi	8	1.836.859	1.571.184	1.141.698	Investments in associates
Investasi pada ventura bersama	8	192.207	54.255	1.152	Investments in joint ventures
Aset pajak tangguhan	47	5.932.474	28.759	18.018	Deferred tax assets
Piutang pihak berelasi	9,52	176.032	22.329	212.709	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	10	5.659.753	4.792.736	3.889.763	Restricted cash in banks and time deposits
Piutang lain-lain	16	304.302	303.058	355.270	Other receivables
Aset tidak lancar lain	11	3.018.271	2.645.508	1.497.943	Other noncurrent assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		505.381.806	471.893.854	409.530.261	Total Noncurrent Assets
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	12	25.529.969	22.639.853	22.088.093	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	13	97.667	378.208	636.264	Short-term investments
Piutang usaha	14				Trade accounts receivable
Pihak berelasi - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 493 juta pada tanggal 31 Desember 2013, Rp 341 juta tanggal 31 Desember 2012 dan Rp 649 juta tanggal 1 Januari 2012		408.674	266.708	227.264	Related parties - net of allowance for impairment losses of Rp 493 million as of December 31, 2013, Rp 341 million as of December 31, 2012 and Rp 649 million as of January 1, 2012
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 464.925 juta pada tanggal 31 Desember 2013, Rp 387.886 juta tanggal 31 Desember 2012 dan Rp 355.498 juta tanggal 1 Januari 2012		15.288.266	12.255.412	11.947.759	Third parties - net of allowance for impairment losses of Rp 464,925 million as of December 31, 2013, Rp 387,886 million as of December 31, 2012 and Rp 355,498 million as of January 1, 2012
Piutang subsidi listrik	15,37	21.793.929	20.565.784	12.101.668	Receivables on electricity subsidy
Piutang lain-lain	16	4.625.113	849.120	598.750	Other receivables
Persediaan - bersih	17	11.343.464	16.738.446	15.654.105	Inventories - net
Pajak dibayar dimuka	18	4.397.112	2.562.075	2.396.990	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	19	1.312.925	1.026.080	1.204.393	Prepaid expenses and advances
Piutang pihak berelasi	9,52	40.061	28.470	67.256	Receivables from related parties
Jumlah Aset Lancar		84.837.180	77.310.156	66.922.542	Total Current Assets
JUMLAH ASET		590.218.986	549.204.010	476.452.803	TOTAL ASSETS

*) Disajikan kembali - Catatan 14 dan 56

*) As restated - Notes 14 and 56

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2013 *)	31 Desember/ *December 31,* 2012 *)	1 Januari/ *January 1,* 2012/ 31 Desember/ *December 31,* 2011 *)	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to owners of the Company
Modal saham - nilai nominal Rp 1 juta per saham					Capital stock - par value of Rp 1 million per share
Modal dasar - 63.000.000 saham					Authorized - 63,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 46.197.380 saham	20	46.197.380	46.197.380	46.197.380	Subscribed and paid-up - 46,197,380 shares
Tambahan modal disetor	21	49.901.404	44.930.345	40.050.208	Additional paid-in capital
Saldo laba					Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		19.108.528	17.343.884	13.720.014	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		35.030.871	64.471.349	65.050.360	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		150.238.183	172.942.958	165.017.962	Equity attributable to owners of the Company
Kepentingan nonpengendali		93.175	94.644	96.391	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		150.331.358	173.037.602	165.114.353	Total Equity
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	47	3.902.785	7.720.448	9.860.294	Deferred tax liabilities - net
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun					Long-term liabilities - net of current maturities
Penerusan pinjaman	23	29.498.060	27.294.132	27.036.690	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	24	8.578.716	8.707.826	6.016.818	Government loans
Utang sewa pembiayaan	25	129.718.551	107.609.232	77.690.486	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	26	66.457.948	54.271.679	46.003.191	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	27	81.017.989	67.250.977	55.908.388	Bonds payable
Utang listrik swasta	28	6.784.275	5.582.143	5.413.311	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	29,52	6.906	9.675	13.991	Payable to related parties
Liabilitas imbalan kerja	50	24.395.289	22.090.632	18.967.344	Employee benefits obligation
Utang lain-lain	31	221.150	153.530	196.508	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		350.581.669	300.690.274	247.107.021	Total Noncurrent Liabilities
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha					Trade accounts payable
Pihak berelasi	30,52	12.136.710	14.894.376	14.070.569	Related parties
Pihak ketiga	30,52	14.389.792	10.861.230	7.875.637	Third parties
Utang pajak	32	1.222.393	1.146.104	955.509	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	33	8.714.043	7.580.945	6.060.347	Accrued expenses
Uang jaminan langganan	34	10.107.402	6.455.405	6.511.261	Customers' security deposits
Utang biaya proyek	35	1.061.453	1.226.238	2.467.142	Project cost payable
Pendapatan ditangguhkan	22	990.913	873.231	680.996	Deferred revenue
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun					Current maturities of long-term liabilities
Penerusan pinjaman	23	3.208.983	2.309.841	2.236.422	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	24	293.793	334.010	346.372	Government loans
Utang sewa pembiayaan	25	4.901.469	3.699.829	2.803.911	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	26	8.387.881	7.808.344	4.694.652	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	27	2.808.000	-	-	Bonds payable
Utang listrik swasta	28	272.454	206.013	184.130	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	29,52	2.786	4.073	1.431	Payable to related parties
Liabilitas imbalan kerja	50	2.584.480	1.680.688	1.611.500	Employee benefits obligation
Utang lain-lain	31	18.223.407	16.395.807	13.731.550	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		89.305.959	75.476.134	64.231.429	Total Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		439.887.628	376.166.408	311.338.450	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		590.218.986	549.204.010	476.452.803	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

*) Disajikan kembali - Catatan 14 dan 56

*) As restated - Notes 14 and 56

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Figures in tables stated in millions of Rupiah)

	2013 *)	Catatan/ *Notes*	2012 *)	
PENDAPATAN USAHA				REVENUES
Penjualan tenaga listrik	153.485.606	36	126.721.647	Sale of electricity
Subsidi listrik Pemerintah	101.207.859	37	103.331.285	Government's electricity subsidy
Penyambungan pelanggan	6.027.799	22	5.755.017	Customer connection fees
Lain-lain	1.125.778	38	1.297.061	Others
Jumlah Pendapatan Usaha	261.847.042		237.105.010	Total Revenues
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	147.633.751	39	136.535.495	Fuel and lubricants
Pembelian tenaga listrik	2.393.790	40	2.939.624	Purchased electricity
Sewa	8.114.145	41	6.963.983	Lease
Pemeliharaan	19.839.465	42	17.567.375	Maintenance
Kepegawaian	15.555.063	43	14.400.976	Personnel
Penyusutan	21.893.665	6	19.499.221	Depreciation
Lain-lain	5.481.268	44	5.208.776	Others
Jumlah Beban Usaha	220.911.147		203.115.450	Total Operating Expenses
LABA SEBELUM POS KEUANGAN DAN LAIN-LAIN	40.935.895		33.989.560	INCOME BEFORE FINANCIAL AND OTHER ITEMS
POS KEUANGAN DAN LAIN-LAIN BERSIH				NET FINANCIAL AND OTHER ITEMS
Penghasilan bunga	736.378		384.043	Interest income
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(48.096.810)	53	(5.938.482)	Loss on foreign exchange - net
Beban keuangan	(30.146.545)	45	(24.612.091)	Financial cost
Penghasilan lain-lain - bersih	1.792.124	46	1.657.252	Others income - net
Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih	(75.714.853)		(28.509.278)	Net Financial and Other Items
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(34.778.958)		5.480.282	INCOME (LOSS) BEFORE TAX
MANFAAT PAJAK	8.543.343	47	1.061.657	TAX BENEFIT
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN DAN JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF	(26.235.615)		6.541.939	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Laba (rugi) tahun berjalan dan jumlah laba rugi komprehensif diatribusikan kepada :				Income (loss) for the year and total comprehensive income attributable to :
Pemilik Entitas Induk	(26.232.034)		6.544.859	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali	(3.581)		(2.920)	Non-controlling interest
Jumlah	(26.235.615)		6.541.939	Total
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (Dalam Rupiah penuh)	(567.825)	48	141.672	BASIC/DILUTED EARNINGS (LOSS) PER SHARE (In full Rupiah amount)

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*) As restated - Note 56

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Figures in tables stated in millions of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Subscribed and paid-up capital stock*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/ *Retained earnings* *)		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of the Company* *)	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
				Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*				
Saldo per 1 Januari 2012, sebagaimana dilaporkan sebelumnya		46.197.380	40.050.208	13.720.014	45.948.843	145.916.445	96.391	146.012.836	Balance as of January 1, 2012, as previously reported
Koreksi piutang usaha belum ditagih	14	-	-	-	8.670.200	8.670.200	-	8.670.200	Correction trade receivable - not yet billed
Pengaruh penerapan ISAK 27 secara retrospektif	56	-	-	-	10.431.317	10.431.317	-	10.431.317	The effects of retrospective application of ISAK 27
Saldo per 1 Januari 2012 setelah disajikan kembali		46.197.380	40.050.208	13.720.014	65.050.360	165.017.962	96.391	165.114.353	Balance as of January 1, 2012 as restated
Penambahan tahun berjalan	21	-	4.880.137	-	-	4.880.137	3.385	4.883.522	Additions during the year
Cadangan umum tahun berjalan	49	-	-	3.623.870	(3.623.870)	-	-	-	Appropriation during the year
Dividen tunai	49	-	-	-	(3.500.000)	(3.500.000)	(2.212)	(3.502.212)	Cash dividends
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	6.544.859	6.544.859	(2.920)	6.541.939	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2012		46.197.380	44.930.345	17.343.884	64.471.349	172.942.958	94.644	173.037.602	Balance as of December 31, 2012
Penambahan tahun berjalan	21	-	4.971.059	-	-	4.971.059	2.712	4.973.771	Additions during the year
Cadangan umum tahun berjalan	49	-	-	1.764.644	(1.764.644)	-	-	-	Appropriation during the year
Dividen tunai	49	-	-	-	(1.443.800)	(1.443.800)	(600)	(1.444.400)	Cash dividends
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan		-	-	-	(26.232.034)	(26.232.034)	(3.581)	(26.235.615)	Total comprehensive loss for the year
Saldo per 31 Desember 2013		46.197.380	49.901.404	19.108.528	35.030.871	150.238.183	93.175	150.331.358	Balance as of December 31, 2013

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*) As restated - Note 56

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2013	2012	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	161.342.602	137.486.222	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(180.257.732)	(167.365.322)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(12.426.256)	(11.120.577)	Cash paid to employees
Kas digunakan untuk aktivitas operasi	(31.341.386)	(40.999.677)	Cash used in operations
Penerimaan subsidi listrik	99.979.714	94.867.169	Government subsidy received
Pembayaran bunga	(28.366.978)	(22.568.006)	Interest expense paid
Penerimaan bunga	736.378	583.908	Interest received
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	389.309	13.974	Income tax restitution received
Pembayaran pajak penghasilan	(3.221.807)	(1.433.106)	Income tax paid
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	38.175.230	30.464.262	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi	223.192	76.805	Proceeds from sale of assets not used in operations
Perolehan aset tetap	(34.650.475)	(40.895.117)	Additions to property, plant and equipment
Penurunan (kenaikan) piutang pihak berelasi	(165.294)	29.300	Decrease (increase) in receivables from related parties
Akuisisi entitas anak	(12.670)	(109.200)	Acquisition of subsidiaries
Perolehan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(120.480)	(120.321)	Acquisition of investments in associates and joint ventures
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	15.524	98.343	Dividends received from associate
Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	(557.636)	(1.117.505)	Placement of restricted cash in banks and time deposits
Pencairan investasi jangka pendek	280.541	277.689	Withdrawal of short-term investments
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(34.987.298)	(41.760.006)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Perolehan dari penerbitan obligasi	2.673.000	9.615.000	Proceeds from issuance of bonds
Pembayaran biaya penerbitan obligasi	(6.238)	(172.719)	Payment of bonds issuance costs
Pembayaran utang obligasi	-	(892.000)	Payment of bonds payable
Pembayaran penerusan pinjaman	(2.350.109)	(2.286.711)	Payment of two-step loans
Penarikan utang kepada Pemerintah	-	3.000.023	Proceeds from Government loans
Pembayaran utang kepada Pemerintah	(293.793)	(293.793)	Payment of Government loans
Pembayaran dividen	(1.443.800)	(3.500.000)	Payment of dividends
Perolehan utang bank	72.291.979	69.833.045	Proceeds from bank loans
Pembayaran utang bank	(67.813.387)	(60.185.808)	Payment of bank loans
Pembayaran utang listrik swasta	(189.783)	(169.623)	Payment of electricity purchase payable
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(3.198.848)	(3.099.923)	Payment of lease liabilities
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(330.979)	11.847.491	Net Cash Provided (Cash Used) by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	2.856.953	551.747	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	22.639.853	22.088.093	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
Kas dan setara kas awal tahun entitas anak yang diakuisisi	33.163	13	Cash and cash equivalent at beginning of year of subsidiary acquired
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	25.529.969	22.639.853	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("Perusahaan") didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk Jawatan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Perusahaan merupakan kelanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah). Perusahaan listrik Belanda tersebut meliputi NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM dan NV WEMI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status Perusahaan berubah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Kemudian berdasarkan akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero). Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 tanggal 1 Agustus 1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6731.

Anggaran dasar Perusahaan terakhir diubah (i) berdasarkan akta No. 2 tanggal 1 Juli 2008 dari Lenny Janis Ishak S.H., notaris di Jakarta, dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-46951.AH.01.02 Th 2008 tanggal 1 Agustus 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 14 Nopember 2008, Tambahan No. 23523 (ii) berdasarkan akta No. 4 tanggal 5 Agustus 2011 dari Lenny Janis Ishak S.H., notaris di Jakarta, atas perubahan pasal 4 ayat 2 tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-26937 tanggal 19 Agustus 2011.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (the Company) was established in 1961 as a unit of the Ministry of Energy and Public Works. The Company is a business continuation of several Dutch electricity companies taken over by the Government of the Republic of Indonesia (Government). The Dutch electricity companies include among others: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM and NV WEMI. Based on Government Regulation No. 19 year 1965, the Company's status was changed to that of a legal entity. Subsequently, based on Government Regulation No. 30 year 1970, as amended by Government Regulation No. 18 year 1972, the Company became a Perusahaan Umum (Perum). Based on notarial deed of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta, No. 169 dated July 30, 1994, the Company's status was changed to a limited liability company and was named Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara or PT PLN (Persero). This change was approved by the Minister of Justice in his decision letter No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 dated August 1, 1994 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 13, 1994, Supplement No. 6731.

The articles of association of the Company was recently amended by (i) notarial deed No. 2 dated July 1, 2008 of Lenny Janis Ishak S.H., notary in Jakarta, to conform with Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Companies. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-46951.AH.01.02 Th 2008 dated August 1, 2008, and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 92 dated November 14, 2008, Supplement No. 23523 (ii) notarial deed No. 4 dated August 5, 2011 of Lenny Janis Ishak S.H., notary in Jakarta, in accordance with article 4 section (2) concerning the increase the subscribed and paid-up capital. This change was received and recorded in the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-AH.01.10-26937 dated August 19, 2011.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 48 unit pelaksana yang tersebar di wilayah Indonesia. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

The Company is domiciled in Jakarta, with 48 business unit offices spread all over Indonesia. The Company's head office is located at Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the scope of its activities is to run electricity business for public use, which is satisfactory both in quantity and quality and also to earn profit, and perform the assignment from the Government in electricity business in order to support development with the application of the principles of Limited Liability Companies.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang "Badan Usaha Milik Negara (BUMN)", Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk margin yang diharapkan kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus. Perusahaan merupakan BUMN yang sedang melaksanakan penugasan khusus berupa penyediaan tenaga listrik bersubsidi kepada masyarakat (Catatan 37).

Based on Law No. 19 year 2003, regarding "State-Owned Enterprises (BUMN)", the Government is obliged to provide compensation to these BUMN, which were appointed to perform special assignment, for all expenses which they have incurred, including expected return (margin). The Company is a BUMN, which performs a special assignment of providing electricity power with subsidy to the public (Note 37).

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Januari 2012, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak masing-masing 63.204 karyawan, 47.976 karyawan dan 47.615 karyawan.

As of December 31, 2013 and 2012 and January 1, 2012 the Company and its subsidiaries had total number of employees of 63,204, 47,976 and 47,615, respectively.

b. Penawaran Umum Efek Utang Perusahaan

Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi dan Surat Utang PLN, sebagai berikut:

b. Public Offering of Bonds of the Company

The Company has issued several PLN Bonds and Notes, as follows:

	Tanggal Efektif/ *Effective Date*	Bursa Pencatatan/ *Listed In*	Tanggal Pencatatan/ *Listed Date*	Jumlah Efek Ditawarkan / *Offered Amount* Rp	
Obligasi Rupiah					Rupiah Bonds
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	11 Desember 2013/ *December 11, 2013*	1.244.000	Sustainable Bonds I PLN II Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	11 Desember 2013/ *December 11, 2013*	429.000	Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	8 Juli 2013/ *July 8, 2013*	879.000	Sustainable Bonds I PLN I Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	8 Juli 2013/ *July 8, 2013*	121.000	Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013
Obligasi PLN XII Tahun 2010	30 Juni 2010/ *June 30, 2010*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	9 Juli 2010/ *July 9, 2010*	2.500.000	PLN XII Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	30 Juni 2010/ *June 30, 2010*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	9 Juli 2010/ *July 9, 2010*	500.000	Sukuk Ijarah PLN V Year 2010
Obligasi PLN XI Tahun 2010	31 Desember 2009/ *December 31, 2009*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	13 Januari 2010/ *January 13, 2010*	2.703.000	PLN XI Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	31 Desember 2009/ *December 31, 2009*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	13 Januari 2010/ *January 13, 2010*	297.000	Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010
Obligasi PLN X Tahun 2009	31 Desember 2008/ *December 31, 2008*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	12 Januari 2009/ *January 12, 2009*	1.440.000	PLN X Bonds Year 2009
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009	31 Desember 2008/ *December 31, 2008*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*	12 Januari 2009/ *January 12, 2009*	760.000	Sukuk Ijarah PLN III Year 2009
Obligasi PLN IX Tahun 2007	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	11 Juli 2007/ *July 11, 2007*	2.700.000	PLN IX Bonds Year 2007
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	11 Juli 2007/ *July 11, 2007*	300.000	Sukuk Ijarah PLN II Year 2007
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	12 Juni 2006/ *June 12, 2006*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	22 Juni 2006/ *June 22, 2006*	2.200.100	PLN VIII Bonds Year 2006
Sukuk Ijarah PLN I Tahun 2006	12 Juni 2006/ *June 12, 2006*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	22 Juni 2006/ *June 22, 2006*	200.000	Sukuk Ijarah PLN I Year 2006
Obligasi PLN VII Tahun 2004	3 Nopember 2004/ *November 3, 2004*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	12 Nopember 2004/ *November 12, 2004*	1.500.000	PLN VII Bonds Year 2004
Obligasi PLN VI Tahun 1997	27 Juni 1997/ *June 27, 1997*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	12 Agustus 1997/ *August 12, 1997*	600.000	PLN VI Bonds Year 1997
Obligasi PLN V Tahun 1996	28 Juni 1996/ *June 28, 1996*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	28 Agustus 1996/ *August 28, 1996*	1.000.000	PLN V Bonds Year 1996
Obligasi PLN IV Tahun 1995	30 Juni 1995/ *June 30, 1995*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel Exchange*	4 September 1995/ *September 4, 1995*	680.000	PLN IV Bonds Year 1995
Obligasi PLN III Tahun 1995	30 Januari 1995/ *January 30, 1995*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel Exchange*	18 April 1995/ *April 18, 1995*	318.430	PLN III Bonds Year 1995
Obligasi PLN IITahun 1993	28 September 1993/ *September 28, 1993*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel Exchange*	8 Nopember 1993/ *November 8, 1993*	600.000	PLN II Bonds Year 1993
Obligasi PLN I Tahun 1992	25 September 1992/ *September 25, 1992*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel Exchange*	10 Nopember 1992/ *November 10, 1992*	300.000	PLN I Bonds Year 1992
Jumlah				21.271.530	Total

	Tanggal Efektif/ *Effective Date*	Bursa Pencatatan/ *Listed In*	Tanggal Pencatatan/ *Listed Date*	Jumlah Efek Ditawarkan *)/ *Offered Amount* *) US$	
Surat Utang Jangka Menengah Global - US$					Global Medium Term Notes - US$
Penerbitan tahun 2012	16 Oktober 2012/ *October 16, 2012*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	25 Oktober 2012/ *October 25, 2012*	1.000.000.000	Issued in 2012
Penerbitan tahun 2011	15 Nopember 2011/ *November 15, 2011*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	23 Nopember 2011/ *November 23, 2011*	1.000.000.000	Issued in 2011
Jumlah				2.000.000.000	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

Majapahit Holding B.V., Belanda, entitas anak yang bertujuan khusus yang sepenuhnya milik Perusahaan, menerbitkan Obligasi Terjamin, sebagai berikut:

Majapahit Holding B.V., Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary of the Company, issued Guaranteed Notes, as follows:

	Tanggal Efektif/ *Effective Date*	Bursa Pencatatan/ *Listed In*	Tanggal Pencatatan/ *Listed Date*	Jumlah Efek Ditawarkan *)/ *Offered Amount *)* US$	
Obligasi Terjamin - US$					Guaranteed Notes - US$
Penerbitan 2009	30 Oktober 2009/ *October 30, 2009*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	9 Nopember 2009/ *November 9, 2009*	750.000.000	Issued in 2009
Penerbitan 2009	3 Agustus 2009/ August 3, 2009	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	*10 Agustus 2009/* August 10, 2009	1.250.000.000	Issued in 2009
Penerbitan 2007	*21 Juni 2007/* June 21, 2007	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	1.000.000.000	Issued in 2007
Penerbitan 2006	11 Oktober 2006/ *October 11, 2006*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	17 Oktober 2006/ *October 17, 2006*	550.000.000	Issued in 2006
Jumlah				3.550.000.000	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

c. Susunan Pengurus dan Informasi Lain

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

c. Management and Other Information

As of December 31, 2013 and 2012, the Company's management consisted of the following:

	31 Desember 2013/ *December 31*, 2013	
Komisaris Utama	Yogo Pratomo	President Commissioner
Komisaris	Wimpy S.Tjetjep	Commissioners
	Jarman	
	Andin Hadiyanto	
	Ahmad Yani Basuki	
	Harry Susetyo Nugroho	
	Zulkifli Zaini	
Komisaris Independen	Adang Firman	Independent Commissioners
	Syahrial Loetan	
		Tugas dan Wewenang/*Duties and Authority*
Direktur Utama/ *President Director*	Nur Pamudji	Direktur Utama/*President Director*
Direktur/*Director*	I.G.A Ngurah Adnyana	Operasi Jawa-Bali-Sumatera/*Java-Bali-Sumatera Operations*
Direktur/*Director*	Moch. Harry Jaya Pahlawan	Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan/*Commerce, Risk Management and Compliance*
Direktur/*Director*	Vickner Sinaga	Operasi Indonesia Timur/*East Indonesia Operations*
Direktur/*Director*	Bagiyo Riawan	Pengadaan Strategis dan Energi Primer/*Strategic Procurement and Primary Energy*
Direktur/*Director*	Nasri Sebayang	Konstruksi dan Energi Baru/Terbarukan/*Construction and New/Renewable Energy*
Direktur/*Director*	Murtaqi Syamsuddin	Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PLN/*Planning and Development Affiliates PLN*
Direktur/*Director*	Eddy D. Erningpraja	SDM dan Umum/*Human Resource General Affairs*
Direktur/*Director*	Setio Anggoro Dewo	Keuangan/*Finance*
Komite Audit		Audit Committee
Ketua	Adang Firman	Chairman
Anggota	Andin Hadiyanto	Members
	Harry Susetyo Nugroho	
	Zulkifli Zaini	
	Sugeng Rochadi	
	Aidil Yuzar	

	31 Desember 2012/ *December 31*, 2012	
Komisaris Utama	Yogo Pratomo	President Commissioner
Komisaris	Wimpy S.Tjetjep	Commissioners
	Syahrial Loetan	
	Jarman	
	Andin Hadiyanto	
Komisaris Independen	Abdul Azis	Independent Commissioners
	Adang Firman	
Direktur Utama	Nur Pamudji	President Director
Direktur Operasi Jawa-Bali	I.G.A Ngurah Adnyana	Director of Java-Bali Operations
Direktur Operasi Indonesia Barat	Moch. Harry Jaya Pahlawan	Director of West Indonesia Operations
Direktur Operasi Indonesia Timur	Vickner Sinaga	Director of East Indonesia Operations
Direktur Pengadaan Strategis	Bagiyo Riawan	Director of Strategic Procurement
Direktur Konstruksi	Nasri Sebayang	Director of Construction
Direktur Perencanaan dan Manajemen Risiko	Murtaqi Syamsuddin	Director of Planning and Risk Management
Direktur SDM dan Umum	Eddy D. Erningpraja	Director of Human Resource & General Affairs
Direktur Keuangan	Setio Anggoro Dewo	Director of Finance
Komite Audit		Audit Committee
Ketua	Abdul Azis	Chairman
Wakil Ketua	Adang Firman	Vice Chairman
Anggota	Elok Tresnaningsih	Members
	Lilik Safrudin Ismail	

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Sekretaris Perusahaan adalah Adi Supriono.

As of December 31, 2013 and 2012, the Company's corporate secretary is Adi Supriono, respectively.

Jarman sebagai Komisaris diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-424/MBU/2012 tanggal 26 Nopember 2012.

Jarman as Commissioner was appointed based on Decision Letter of Minister of State-Owned Enterprise of the Republic of Indonesia No. SK-424/MBU/2012 dated November 26, 2012.

Andin Hadiyanto sebagai Komisaris diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-365/MBU/2012 tanggal 3 Oktober 2012.

Andin Hadiyanto as Commissioner was appointed based on Decision Letter of Minister of State-Owned Enterprise of the Republic of Indonesia No. SK-365/MBU/2012 dated October 3, 2012.

Harry Susetyo Nugroho sebagai Komisaris diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-199/MBU/2013 tanggal 2 April 2013.

Harry Susetyo Nugroho as Commissioner was appointed based on Decision Letter of Minister of State-Owned Enterprise of the Republic of Indonesia No. SK-199/MBU/2013 dated April 2, 2013.

Ahmad Yani Basuki sebagai Komisaris diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-251/MBU/2013 tanggal 21 Mei 2013.

Ahmad Yani Basuki as Commissioner was appointed based on Decision Letter of Minister of State-Owned Enterprise of the Republic of Indonesia No. SK-251/MBU/2013 dated May 21, 2013.

Zulkifli Zaini sebagai Komisaris diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-302/MBU/2013 tanggal 2 Juli 2013.

Zulkifli Zaini as Commissioner was appointed based on Decision Letter of Minister of State-Owned Enterprise of the Republic of Indonesia No. SK-302/MBU/2013 dated July 2, 2013.

Dewan Komisaris Perusahaan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-253/MBU/2009 tanggal 22 Desember 2009 sebagaimana tercantum dalam akta No. 31 tanggal 28 Desember 2009 dari notaris Devi Yunanda S.H., Mkn, sebagai pengganti dari Lenny Janis Ishak S.H.

The Company's Board of Commissioners were appointed based on Decision Letter of Minister of State-Owned Enterprise of the Republic of Indonesia No. KEP-253/MBU/2009 dated December 22, 2009, as stated in notarial deed No. 31 dated December 28, 2009 of Devi Yunanda S.H., Mkn, substitute of Lenny Janis Ishak S.H.

Direksi Perusahaan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-224/MBU/2011 tanggal 31 Oktober 2011, sebagaimana tercantum dalam akta No. 1 tanggal 3 Nopember 2011 dari notaris Lenny Janis Ishak S.H.

The Company's Directors were appointed based on Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprise of the Republic of Indonesia No. KEP-224/MBU/2011 dated October 31, 2011, as stated in notarial deed No. 1 dated November 3, 2011 of Lenny Janis Ishak S.H.

Komite Audit Perusahaan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perusahaan No. 05.KR/DK-PLN/2013 tanggal 3 Juli 2013.

The Company's Audit Committee were appointed based on Decision Letter of the Company's Board of Commissioners No. 05.KR/DK-PLN/2013 dated July 3, 2013.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-273/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014, Chandra M. Hamzah, Budiman dan Hasan Bisri diangkat sebagai Komisaris Perusahaan menggantikan Yogo Pratomo, Achmad Yani Basuki dan Jarman.

Based on Decision Letter of Minister of State-Owned Enterprise of the Republic of Indonesia No. SK-273/MBU/12/2014 dated December 23, 2014, Chandra M. Hamzah, Budiman and Hasan Bisri were appointed as the Company's Commissioners to replace Yogo Pratomo, Achmad Yani Basuki and Jarman.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-272/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amir Rosidin, Nicke Widyawati dan Amin Subekti diangkat sebagai Direktur Perusahaan menggantikan Nur Pamudji, I.G.A Ngurah Adnyana, Moch. Harry Jaya Pahlawan, Vickner Sinaga, Nasri Sebayang, Bagiyo Riawan, Eddy D. Erningpraja dan Setio Anggoro Dewo, kecuali pengangkatan Sofyan Basir dan Sarwono Sudarto yang baru efektif tanggal 2 Januari 2015.

Based on Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprise of the Republic of Indonesia No. SK-272/MBU/12/2014 dated December 23, 2014, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amir Rosidin, Nicke Widyawati and Amin Subekti were appointed as the Company's Director to replace Nur Pamudji, I.G.A Ngurah Adnyana, Moch. Harry Jaya Pahlawan, Vickner Sinaga, Nasri Sebayang, Bagiyo Riawan, Eddy D. Erningpraja and Setio Anggoro Dewo, except for the appointment of Sofyan Basir and Sarwono Sudarto that was effective on January 2, 2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-211/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014, Oegroseno dan Darmono diangkat sebagai Komisaris Independen dan Sumanggar Milton Pakpahan sebagai Komisaris menggantikan Adang Firman, Wimpy S. Tjetjep dan Syahrial Loetan.

Based on Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprise of the Republic of Indonesia No. SK-211/MBU/10/2014 dated October 16, 2014, Oegroseno and Darmono were appointed as Independent Commissioners and Sumanggar Milton Pakpahan as Commissioner to replace Adang Firman, Wimpy S. Tjetjep dan Syahrial Loetan.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013. Penerapan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi dapat mempengaruhi akuntansi untuk transaksi masa depan atau perjanjian.

- PSAK 38 (revisi 2012), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

  Standar revisi ini memberikan ruang lingkup lebih sempit yang hanya mencakup transaksi kombinasi bisnis dimana standar sebelumnya mencakup transaksi tertentu antara entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama yang belum tentu merupakan kombinasi bisnis. Standar revisi ini mengacu pada PSAK 22, Kombinasi Bisnis dalam menentukan apa yang merupakan pengertian bisnis.

  Standar baru ini tetap mempertahankan penerapan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi sebesar jumlah tercatatnya. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis yang sebelumnya dicatat sebagai Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali (SINTRES) di ekuitas sekarang disajikan sebagai bagian dari Tambahan Modal Disetor.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATIONS OF PSAK (ISAK)

a. Standards Effective in The Current Year

In the current year, the Company and its subsidiaries have adopted all of the new and revised Standards and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) that are relevant to their operations and effective for accounting periods beginning on January 1, 2013. Their adoption has not had any significant impact on the amounts reported on the consolidated financial statements, but may affect the accounting for future transactions or arrangements.

- PSAK 38 (revised 2012), Business Combination of Entities Under Common Control

  This revised standard provides a narrower scope as it only covers business combination transactions between entities under common control, whereas the previous standard covered certain transactions between entities under common control that are not necessarily business combinations. The revised standard refers to PSAK 22, Business Combination, in determining what constitutes a business.

  The new standard retains the application of the pooling of interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values. The difference between the transfer price and the book value of the business combination which was previously recorded under equity as Difference in the Value of Restructuring Transactions of Entities Under Common Control (SINTRES) is now presented as Additional Paid in Capital.

Standar sebelumnya mengharuskan SINTRES diakui dalam laba rugi ketika hilangnya sepengendalian atau pelepasan aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lain ke pihak lain yang tidak sepengendali. Di dalam standar revisi, selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah aset neto yang diperoleh akan selalu tetap disajikan sebagai Tambahan Modal Disetor pengakuisisi dan tidak akan diakui ke laba rugi.

- Penyesuaian PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan

  Standar ini mensyaratkan pengungkapan antara lain deskripsi agunan yang dimiliki entitas sebagai jaminan, dan peningkatan kualitas kredit lain, dan dampak keuangannya (misalnya kuantifikasi sejauh mana agunan dan peningkatan kualitas kredit lain dalam memitigasi risiko kredit) dengan mengacu pada jumlah terbaik yang mencerminkan eksposur maksimum terhadap risiko kredit.

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

i. Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2014 adalah:
   - ISAK 27, Pengalihan Aset dari Pelanggan
   - ISAK 28, Pengakhiran Liabiltas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

ii. Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015 adalah:
   - PSAK 1 (revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan
   - PSAK 4 (revisi 2013), Laporan Keuangan Tersendiri
   - PSAK 15 (revisi 2013), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
   - PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja
   - PSAK 65, Laporan Keuangan Konsolidasian
   - PSAK 66, Pengaturan Bersama
   - PSAK 67, Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
   - PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar

The previous standard requires the recycling of the SINTRES to profit and loss where the relevant entities are no longer under common control or when the corresponding assets, liabilities, shares, or other ownership instruments are transferred to an entity which is not under common control. Under the revised standard, the difference between the transfer price and the net assets acquired will always remain as part of the acquirer's Additional Paid In Capital, and should not be recycled to profit and loss.

- Amendment to PSAK 60, Financial Instruments: Disclosure

  Among other things, the standard requires the disclosures of the description of collateral held as security and of other credit enhancements, and their financial effect (e.g., quantification of the extent to which collateral and other credit enhancements mitigate credit risk) in respect of the amount that best represents the maximum exposure to credit risk.

b. Standards and interpretation in issue not yet adopted

i. Effective for periods beginning on or after January 1, 2014 :
   - ISAK 27, Transfers of Assets from Customers
   - ISAK 28, Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

ii. Effective for periods beginning on or after January 1, 2015:
   - PSAK 1 (revised 2013), Presentation of Financial Statements
   - PSAK 4 (revised 2013), Separate Financial Statements
   - PSAK 15 (revised 2013), Investments in Associates and Joint Ventures
   - PSAK 24 (revised 2013), Employee Benefits
   - PSAK 65, Consolidated Financial Statements
   - PSAK 66, Joint Arrangements
   - PSAK 67, Disclosures of Interests in Other Entities
   - PSAK 68, Fair Value Measurements

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi terhadap laporan keuangan konsolidasian.

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effect of adoption of these standards and interpretations on the consolidated financial statements is not known nor reasonably estimable by management.

c. ISAK 8, Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 “Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa” memberikan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa atau mengandung sewa sehingga harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011), “Sewa”.

Penyelenggaraan usaha tenaga listrik di Indonesia dikendalikan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan setiap pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum harus memastikan ketersediaan tenaga listrik di setiap wilayah operasinya.

Perusahaan dan entitas anak mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA dan ESC) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP). IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang dapat diserahkan kepada entitas usaha lain dengan tanggung jawab untuk menghasilkan tenaga listrik guna kepentingan umum.

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. S-2366/BL/2009 tertanggal 30 Maret 2009, penyediaan tenaga listrik oleh IPP kepada Perusahaan dan entitas anak termasuk dalam kategori perjanjian pelaksanaan jasa publik ke swasta, yang dikecualikan dari penerapan ISAK 8, sampai DSAK–IAI menerbitkan interpretasi standar akuntansi yang spesifik mangatur transaksi tersebut. Sebagai hasilnya, Perusahaan dan entitas anak tetap mengikuti kebijakan akuntansi yang berlaku, dimana pembelian listrik dianggap sebagai transaksi pembelian komoditas normal.

c. ISAK 8, Determining Whether an Arrangement Contains a Lease

Interpretation of Financial Accounting Standard (ISAK) 8 “Determining Whether an Arrangement Contains a Lease” provides guidance in determining whether an arrangement is substance a lease that should be accounted for in accordance with PSAK 30 (revised 2011), “Leases”.

The electric power business in Indonesia is controlled by the Government and carried-out by the Company as a state-owned enterprise, which serves as the holder of Electricity Business Proxy. The holder of Electricity Business Proxy and each holder of Electricity Business License for public use must ensure the adequacy of electric power supply in each of their operating areas.

The Company and its subsidiaries entered into power purchase agreements (PPA) and energy sales contracts (ESC) with Independent Power Producers (IPPs). Those IPPs are holders of Electricity Business License for public use, which may be granted to other business entities with responsibility to generate electricity for public use.

Based on letter No. S-2366/BL/2009 dated March 30, 2009 from the Chairman of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK), power supplies by IPPs to the Company and its subsidiaries included on categorize of public-to-private consession arrangements, which are exempted for application of ISAK 8, until DSAK-IAI issued on accounting interpretation that can specifically address such transactions. As a result, the Company and its subsidiaries continued to follow its existing accounting policy in which the supply of electricity is accounted for as a normal purchase of commodity.

Manajemen mengevaluasi dampak dari ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012) terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Perusahaan dan entitas anak dengan IPP dan menetapkan bahwa transaksi tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Interpretasi, yang berisi untuk operator atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta. Selanjutnya, sesuai dengan surat manajemen tanggal 22 Desember 2011 kepada Ketua Bapepam-LK, manajemen telah memutuskan untuk menerapkan ketentuan ISAK 8, sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011), terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mulai tanggal 1 Januari 2012.

The management assessed the impact of ISAK 16 "Service Concession Arrangements" (effective January 1, 2012) on the Company and its subsidiaries Power Supply Contracts with IPPs and determined that such transactions do not qualify under the scope of the Interpretation, which provides on the accounting by operators for public-to-private concession arrangements. Subsequently, on its letter dated December 22, 2011 to the Chairman of Bapepam-LK, the management has decided to apply the provisions of ISAK 8, in accordance with PSAK 30 (revised 2011), on its Power Supply Contracts since January 1, 2012.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp) dan laporan keuangan konsolidasian tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. These financial statements are not intended to present the financial position, result of operations and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.

b. Basic of Preparation

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), while the measurement basis is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) yang dikendalikan oleh Perusahaan (entitas anak). Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya.

Hasil entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasian.

Kepentingan nonpengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan nonpengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan nonpengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan nonpengendali atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Seluruh laba rugi komprehensif diatribusikan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Entitas Induk.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including special purpose entities) controlled by the Company (its subsidiaries). Control is achieved where the Company has the power to govern the financial and operating policies of the entity so as to obtain benefits from its activities.

The results of subsidiaries acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statements of comprehensive income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiaries to bring the accounting policies used in line with those used by the Company.

All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated on consolidation.

Non-controlling interest in subsidiaries are identified separately and presented within equity. The interest of non-controlling shareholders maybe initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of fair value of the acquiree's identifiable net asset. The choice of measurement is made on acquisition by acquisition basis. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interest is the amount of those interests at initial recognition plus non-controlling interests' share of subsequent changes in equity. Total comprehensive income is attributed to non-controlling interest even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

Changes in the Company and its subsidiaries interests in subsidiaries that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amount of the Company and its subsidiaries interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, keuntungan dan kerugian diakui didalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) keseluruhan nilai wajar yang diterima dan nilai wajar dari setiap sisa investasi dan (ii) nilai tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill) dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Ketika aset dari entitas anak dinyatakan sebesar nilai revaluasi atau nilai wajar dan akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan terakumulasi dalam ekuitas, jumlah yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan akumulasi ekuitas dicatat seolah-olah Perusahaan telah melepas secara langsung aset yang relevan (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer langsung ke saldo laba sebagaimana ditentukan oleh PSAK yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, jika sesuai, biaya perolehan saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau pengendalian bersama entitas.

When the Company loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. When assets of the subsidiary are carried at revalued amount or fair values and the related cumulative gain or loss has been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity, the amounts previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are accounted for as if the Company had directly disposed of the relevant assets (i.e. reclassified to profit or loss or transferred directly to retained earnings as specified by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55 (revised 2011), Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a jointly controlled entity.

d. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan dan entitas anak kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Kepentingan non pengendali diukur baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan kepentingan non pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi.

d. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Company and its subsidiaries, liabilities incurred by the Company and its subsidiaries to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Company and its subsidiaries in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Non-controlling interests are measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis. Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

When the consideration transferred by the Company and its subsidiaries in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan dengan mengakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam pendapatan komprehensif lain (OCI).

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to reporting dates in accordance with the relevant accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss or in other comprehensive income (OCI).

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan dan entitas anak atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian nya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikannya dilepas/dijual.

When a business combination is achieved in stages, the Company and its subsidiaries' previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquire prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan dan entitas anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company and its subsidiaries reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan dan entitas anak, kecuali Majapahit Holding B.V. (MH) dan Majapahit Finance B.V. (MF) diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali selisih kurs mata uang asing yang dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman.

Kegiatan usaha MH dan MF merupakan bagian integral dari kegiatan usaha Perusahaan, dengan demikian pembukuan MH dan MF yang diselenggarakan dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan prosedur yang sama dengan Perusahaan.

e. Foreign Currency Transactions and Translation

The books of accounts of the Company and its subsidiaries, except for Majapahit Holding B.V. (MH) and Majapahit Finance B.V. (MF), are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss, except those foreign exchange differences which are capitalized as borrowing costs.

Operating activities of MH and MF are an integral part of the Company's activities, hence the books of accounts of MH and MF, which are maintained in foreign currency, are translated into Rupiah using the same procedures adopted by the Company.

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

   ii. memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau

   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company and its subsidiaries (the reporting entity):

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

   i. has control or joint control over the reporting entity;

   ii. has significant influence over the reporting entity; or

   iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).

ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

c. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham dari Perusahaan.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

g. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

iii. Both entities are joint ventures of the same third party.

iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

c. The entity is controlled, jointly controlled or materially affected by Government. Government is Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the stockholder of the Company.

All transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those transacted with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

g. Financial Assets

All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as a fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: tersedia untuk dijual dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

The Company and its subsidiaries financial assets are classified into the following specified categories: available-for-sale and loans and receivables.

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (AFS)

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar dipasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Available-for-Sale Financial Assets (AFS)

Investments in nonlisted equity instruments that are not quoted in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are also classified as AFS, measured at cost less impairment.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company and its subsidiaries' right to receive the dividends is established.

Pinjaman Diberikan dan Piutang

Kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Loans and Receivables

Cash and cash equivalents, trade receivable and other receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "loans and receivables". Loans and receivables are measured at amortised cost using the effective interest method less impairment. Interest is recognized by applying the effective interest rate method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal palaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Impairment of Financial Assets

Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- default or delinquency in interest or principal payments; or
- it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation.

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company and its subsidiaries' past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in statement of comprehensive income.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi komprehensif.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in equity are reclassified to statement of comprehensive income.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortised cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke pendapatan komprehensif lainnya.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Derecognition of Financial Assets

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

The Company and its subsidiaries derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company and its subsidiaries neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company and its subsidiaries recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company and its subsidiaries retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company and its subsidiaries continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Company and its subsidiaries retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Company and its subsidiaries allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Penerusan pinjaman, utang kepada pemerintah, utang bank dan surat utang jangka menengah, utang obligasi, utang listrik swasta dan pinjaman lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman.

h. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as Debt or Equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiaries are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities

Two step loans, government loans, bank loans and medium term notes, bonds payable, electricity purchase payable and other borrowings are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries derecognize financial liabilities when, and only when, the Company's and its subsidiaries obligations are discharged, cancelled or expires. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

i. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries only offset financial assets and liabilities and present the net amount in the statement of financial position where they:

- currently have a legal enforceable right to set off the recognized amount; and
- intend either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

j. Aset Tetap - Pemilikan Langsung

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap termasuk material cadangan utama dan peralatan siap pakai dengan manfaat ekonomis lebih dari satu tahun yang diperuntukkan untuk menjaga kelangsungan dan kestabilan operasi instalasi dan mesin pembangkit listrik dalam rangka memproduksi serta mendistribusikan tenaga listrik.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

j. Property, Plant and Equipment – Direct Acquisition

Property, plant and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. Property, plant and equipment include major spare parts and stand-by equipment, with economic benefits of more than one year, which are used to ensure the continuity and stability of the power plant operations and electricity installations necessary to produce and distribute electricity.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on their estimated economic useful lives as follows :

	Tahun/ *Years*	
Bangunan umum, waduk dan prasarana	10 – 47	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	13 – 30	Installations and power plant
Perlengkapan transmisi	37	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	15 – 37	Distribution equipment
Perlengkapan umum	4 – 8	General equipment
Kendaraan bermotor	3 – 5	Motor vehicles
Material cadangan	10 – 25	Spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	5 – 10	Telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	10 – 15	Vessel and equipment

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant lease.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan di-*review* setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs are charged to consolidated statement of comprehensive income as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the consolidated statement of comprehensive income.

Aset yang untuk sementara waktu tidak digunakan dalam operasi dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Aset yang sementara waktu tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Assets that are temporarity not used in operations are recorded as part of property, plant and equipment. Assets not used in operations are depreciated using the same method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

k. Impairment of Non-Financial Assets

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan dan entitas anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

At reporting date, the Company and its subsidiaries review the carrying amounts of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. In accessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan dan entitas anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3g.

If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company and its subsidiaries estimate the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash-generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3g.

I. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada lessee. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan dan entitas anak yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai utang sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui dalam sewa operasi sebagai beban di dalam periode terjadinya.

I. Leases

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incident to ownership of an asset to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Company and its subsidiaries at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the consolidated statement of financial position as a finance lease obligation.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Operating lease payments are recognized as expenses on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as expenses in the period in which they are incurred.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari beban sewa dengan dasar garis lurus, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as liabilities. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik

Perusahaan dan entitas anak menetapkan bahwa beberapa perjanjian pembelian tenaga listrik dan perjanjian pembelian energi dengan Penghasil Listrik Independen (IPP) memenuhi persyaratan sebagai sewa dengan dasar bahwa Perusahaan dan entitas anak dan IPP memiliki perjanjian *take or pay*, dimana Perusahaan dan entitas anak mengambil lebih dari jumlah yang tidak signifikan dari seluruh listrik dan energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Jenis perjanjian ini ditetapkan sebagai sewa pembiayaan dimana porsi signifikan dari risiko dan manfaat atas sejumlah pembangkit listrik telah dialihkan ke Perusahaan dan entitas anak dengan dasar bahwa masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset dan terdapat opsi beli pada akhir masa sewa.

Power Purchase Agreements

The Company and its subsidiaries determined that certain power purchase agreements and energy sales contracts with Independent Power Producers (IPPs) qualify as leases on the basis that the Company and its subsidiaries and the IPPs have take or pay arrangements where the Company and its subsidiaries is taking more than an insignificant amount of electricity and energy output from the power plants. This type of arrangement is determined to be a finance lease where a significant portion of the risks and rewards of ownership of certain power plants have been transferred to the Company and its subsidiaries on the basis that the lease term is for the major part of the economic life of the assets and there is bargain purchase option at the end of the lease term.

m. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan dan beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

m. Construction in Progress

Construction in progress represents costs directly related to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction and depreciation of property and equipment that were used in the construction. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

n. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

n. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada periode terjadinya.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognized in statement of consolidated comprehensive income in the period in which they are incurred.

o. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya. Properti investasi diukur sebesar nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan setiap akumulasi kerugian penurunan nilai.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

o. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building - or part of building – or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both. Investment properties are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Land is stated at cost and is not depreciated.

p. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

p. Investments in Associates and Joint Venture

Investments in Associates

An associate is an entity over which the Company and its subsidiaries has significant influence and that is neither a subsidiary nor an interest in a joint venture. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan mengunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai PSAK 58 (revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Investasi pada entitas asosiasi dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak atas aset bersih entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu. Bagian Perusahaan dan entitas anak atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Perusahaan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi.

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58 (revised 2009), Non-Current Assets Held for Sale and Discountinued Operations. Investments in associates are carried in the consolidated statement of financial position at cost as adjusted by post-acquisition changes in the Company and its subsidiaries' share of the net assets of the associate, less any impairment in the value of the individual investments. Losses of the associates in excess of the Company and its subsidiaries' interest in those associates (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company and its subsidiaries' net investment in the associate) are recognized only to the extent that the Company and its subsidiaries have incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Persyaratan dalam PSAK 55 (Revisi 2011) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Perusahaan dan entitas anak. Jika perlu, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2009), Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

The requirements of PSAK 55 (Revised 2011), Financial Instruments: Recognition and Measurement, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company and its subsidiaries' investment in an associate. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48 (Revised 2009), Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Pada saat pelepasan suatu entitas asosiasi yang mengakibatkan Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, investasi yang tersisa diukur pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajarnya dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai suatu aset keuangan sesuai dengan PSAK 55. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya atas entitas asosiasi diatribusikan ke sisa kepemilikan dan nilai wajar termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian atas pelepasan entitas asosiasi. Selanjutnya, Perusahaan dan entitas anak memperhitungkan seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar yang sama dengan yang diperlukan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain oleh entitas asosiasi akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait, maka Perusahaan dan entitas anak mereklasifikasi keuntungan atau kerugian dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) sejak Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi.

Upon disposal of an associate that results in the Company and its subsidiaries losing significant influence over that associate, any retained investment is measured at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with PSAK 55. The difference between the previous carrying amount of the associate attributable to the retained interest and the fair value is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate. In addition, the Company and its subsidiaries accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if that associate had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Company and its subsidiaries reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when it loses significant influence over that associate.

Ketika Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian dieliminasi sebesar kepentingan mereka dalam entitas asosiasi.

When the Company and its subsidiaries transact with an associate, profits and losses are eliminated to the extent of their interest in the relevant associate.

Bagian partisipasi dalam ventura bersama

Ventura bersama adalah perjanjian kontraktual dimana Perusahaan dan entitas anak dan pihak lain menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama (yaitu ketika keputusan kebijakan strategis keuangan dan operasional terkait dengan aktivitas ventura bersama tersebut mensyaratkan konsesus dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian).

Bagian partisipasi Perusahaan dan entitas anak dalam entitas yang dikendalikan bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai PSAK 58 (revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

Interest in joint ventures

A joint venture is a contractual arrangement whereby the Company and its subsidiaries and other parties undertaken an economic activity that is subject to joint control (i.e. when the strategic financial and operating policy decisions relating to the activities of the joint venture require the unanimous consent of the parties sharing control).

The Company and its subsidiaries ownership in a jointly controlled entity is accounted for using the equity method of accounting in the consolidated financial statements, except when the investment is classified as held for sale, in which case it is accounted for in accordance with PSAK 58 (revised 2009), Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations.

Penyesuaian dibentuk terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk mengeliminasi bagian Perusahaan dan entitas anak atas keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dan entitas yang dikendalikan bersama. Ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sampai dengan tanggal dimana Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengendalian bersama atas entitas yang dikendalikan bersama.

Perusahaan dan entitas anak mengukur dan mengakui sisa investasi pada nilai wajar setelah hilangnya pengendalian dan entitas yang dikendalikan bersama tidak menjadi entitas anak atau entitas asosiasi. Selisih antara nilai tercatat atas hilangnya pengendalian bersama dengan agregat nilai wajar sisa investasi dan hasil pelepasan diakui pada laba rugi. Ketika sisa investasi mempunyai pengaruh yang signifikan, investasi tersebut dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi.

Adjustments are made in the consolidated financial statements to eliminate the Company and its subsidiaries share of unrealized gains and losses on trasactions between the Company and its subsidiaries and the jointly controlled entity. The joint venture is carried at equity method until the date on which the Company and its subsidiaries cease to have joint control over the jointly controlled entity.

The Company and its subsidiaries measure and recognize the remaining investment at fair value upon loss of control and provided the jointly controlled entity does not become a subsidiary or associate. Any difference between the carrying amount of the jointly controlled entity upon loss of joint control, and the aggregate of the fair value of the remaining investment and proceeds from disposal is recognized in the profit or loss. When the remaining investment constitutes significant influence, it is accounted for as investment in an associate.

q. Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya

Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Untuk kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang, lihat Catatan 3g.

q. Restricted Cash in Banks and Time Deposits

Restricted cash in banks and time deposits are classified as loans and receivable. Refer to Note 3g for the accounting policy on loans and receivables.

r. Beban Ditangguhkan

Biaya perolehan perangkat lunak, pengurusan perpanjangan hak legal tanah dan biaya transaksi pinjaman ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaatnya.

r. Deferred Charges

Costs of software, renewal cost of land rights and transaction cost of loan are deferred and amortized using the straight-line method over their beneficial periods.

s. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

s. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

t. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

t. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

u. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

u. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method.

v. Pinjaman dan Utang Obligasi

Pinjaman dan utang obligasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Kebijakan akuntansi untuk liabilitas keuangan dijelaskan dalam Catatan 3h.

Penerusan pinjaman diakui berdasarkan otorisasi penarikan (*Withdrawal Authorization*) atau dokumen lain sejenis.

v. Borrowings and Bonds Payable

Borrowings and bonds payable are classified as financial liabilities. Refer to Note 3h for the accounting policy on financial liabilities.

Two-step loans are recognized based on the Withdrawal Authorization (WA) or other similar documents.

w. Biaya Penyambungan

Biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan yang memenuhi syarat berdasarkan ISAK 27, yang digunakan untuk membangun aset tetap yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan dan entitas anak diakui sebagai pendapatan sejak tanggal penyambungan.

w. Connection Fees

Connection fees received from customers that qualified under ISAK 27, that are used to contract or acquire property, plant and equipment to connect the customers to the Company's and its subsidiaries network are recognized as revenue since the connection date.

x. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh). Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

Pendapatan bunga diakru berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

x. Revenue and Expense Recognition

Revenue from sale of electricity is recognized based on electricity usage (kWh). Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Interest revenue is accrued on time basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate.

y. Pembelian Tenaga Listrik

Perusahaan dan entitas anak memiliki sejumlah perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA dan ESC) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP). Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan dan entitas anak membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh IPP sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya berbeda yaitu komponen kapasitas dan energi untuk PPA, komponen sumberdaya dan pembangkitan untuk ESC, komponen operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

y. Purchase of Electricity

The Company and its subsidiaries have various Power Purchase Agreements (PPA) and Energy Sales Contracts (ESC) with Independent Power Producers (IPP). Under those contracts, the Company and its subsidiaries pay IPP for the supply of energy at an amount determined in accordance with the payment formula in which payment for different cost components, such as capacity and energy components for the PPA, resource and generation components for the ESC, as well as operations and maintenance components, depends on the level of energy supplied and other variables stipulated in the agreement.

Sebagai akibat penerapan ISAK 8, Perusahaan dan entitas anak telah mengevaluasi apakah kontrak dengan IPP termasuk dalam sewa. Jika termasuk dalam sewa, maka Perusahaan dan entitas anak telah mereklasifikasi porsi dari pembelian tenaga listrik terkait PPA dan ESC yang telah ditentukan sebagai sewa, baik sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi sesuai perjanjian.

Jika tidak termasuk dalam sewa, maka biaya pembelian tenaga listrik dari IPP diakui pada saat terjadinya berdasarkan ketentuan kontrak dan disajikan sebagai beban pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

As a result of adoption of ISAK 8, the Company and its subsidiaries have assessed whether contracts with IPP are included in lease. If included in the lease, the Company and its subsidiaries have reclassified the portion of purchased electricity related to PPAs and ESCs that have been determined as lease either as finance lease or operating lease agreement.

If it is not included in the lease, the costs of energy purchased from IPP are recognized as incurred based on the terms of the contracts, and presented in consolidated statements of comprehensive income as purchased electricity based on the month such is incurred.

z. Subsidi Listrik Pemerintah

Subsidi listrik Pemerintah yang diberikan melalui Perusahaan diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

z. Government's Electricity Subsidy

Government's electricity subsidy is recognized as revenue on accrual basis which is computed in accordance with the provisions stipulated in the Decree of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

aa. Imbalan Kerja

Imbalan Pasca-Kerja

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap. Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan pasca-kerja lain tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan entitas anak.

Perhitungan imbalan pasca-kerja ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari jumlah yang lebih besar diantara nilai kini liabilitas imbalan pasti atau nilai wajar aset program diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung, apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

aa. Employee Benefits

Post-employment Benefits

The Company and its subsidiaries established a defined benefit pension plan covering all of their permanent employees. The Company and its subsidiaries also provide other unfunded defined post-employment benefit plans for their qualifying employees based on the Company and its subsidiaries' policies.

Post-employment benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. The accumulated unrecognized actuarial gains and losses that exceed 10% of the greater of the present value of the defined benefit obligations and the fair value of plan assets, is recognized on straight-line basis over the expected average remaining service years of the participating employees. Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasca-kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial belum diakui dan biaya jasa lalu belum diakui, dan dikurangi dengan nilai wajar aset program.

The employee benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognized actuarial gains and losses and unrecognized past service cost, and reduced by the fair value of scheme assets.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Long-term Benefits

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu dan keuntungan (kerugian) aktuarial diakui langsung pada tahun yang bersangkutan.

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. Past service cost and actuarial gains (losses) are recognized immediately to the current operations.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

The long-term employee benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit obligation.

bb. Provisi

bb. Provisions

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company and its subsidiaries will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

cc. Pajak Penghasilan

cc. Income Tax

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company and its subsidiaries expect, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

dd. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

dd. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year of attributable to owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

ee. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan dan entitas anak yang secara regular di-*review* oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

ee. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company and its subsidiaries are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

a) that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);

b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and

c) for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each product.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari di-*review* secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan yang secara signifikan berdampak pada nilai tercatat dari laporan keuangan konsolidasian, terlepas dari estimasi berikut, yang akan ditangani dengan cara di bawah ini.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Nilai Wajar Pembangkit Listrik di Dalam Sewa Pembiayaan

Perusahaan dan entitas anak menentukan nilai wajar untuk beberapa pembangkit listrik berdasarkan sewa pembiayaan, sebagai hasil dari implementasi ISAK 8, dengan cara menerapkan teknik penilaian yang memadai dengan menggunakan asumsi utama dari manajemen yang mencakup estimasi atas tingkat diskonto yang digunakan dan alokasi atas komponen pembayaran.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Company and its subsidiaries' accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, there is no any judgment that has significant impact on the amounts recognized in the consolidated financial statements, apart from those involving estimates, which is dealt with below.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Fair Value of Power Plants Held under Finance Lease

The Company and its subsidiaries determined the fair value of certain power plants held under finance lease, as a result of adoption of ISAK 8, by applying appropriate valuation techniques using key assumptions from management which include estimations on discount rates used and allocation of payment components.

Meskipun diyakini bahwa asumsi tersebut didasarkan pada dasar memadai, perubahan signifikan dalam asumsi tersebut berdampak material jumlah tercatat aset dan utang sewa pembiayaan yang berdampak pada operasi Perusahaan dan entitas anak.

Nilai tercatat dari aset sewa dan utang sewa pembiayaan masing-masing diungkapkan pada Catatan 6 dan 25.

While it is believed that the assumptions are based on reasonable basis, significant changes in these assumptions may affect materially the recorded leased assets and leased liabilities, which may impact the result of the Company and its subsidiaries operation.

The carrying amount of leased assets and leased liabilities are disclosed in Notes 6 and 25, respectively.

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman Diberikan dan Piutang

Perusahaan dan entitas anak menilai penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang di-*review* secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang telah diungkapkan dalam Catatan 14 dan 16.

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Company and its subsidiaries assess their loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in Notes 14 and 16.

Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Perusahaan dan entitas anak membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang digunakan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Perusahaan dan entitas anak. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 17.

Allowance for Decline in Value of Inventories

The Company and its subsidiaries provide allowance for decline in value of inventories based on estimated future usage of such inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which ultimately will impact the result of the Company and its subsidiaries' operations. The carrying amount of inventories is disclosed in Note 17.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Properti Investasi

Masa manfaat setiap aset tetap dan properti investasi Perusahaan dan entitas anak ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset di-*review* secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment and Investment Properties

The useful life of each item of the Company and its subsidiaries property, plant and equipment and investment properties are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of property, plant and equipment.

Nilai tercatat aset tetap dan properti investasi diungkapkan dalam Catatan 6 dan 7.

The carrying amounts of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 6 and 7.

Penurunan Nilai Aset

Asset Impairment

Aset tetap dilakukan uji penurunan nilai ketika terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

Property, plant and equipment are reviewed for impairment whenever impairment indicators are present. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets (cash generating unit) and a suitable discount rate in order to calculate the present value.

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of operations.

Berdasarkan pertimbangan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap Perusahaan dan entitas anak. Nilai tercatat aset yang dilakukan uji penurunan nilai telah diungkapkan dalam Catatan 6 atas laporan keuangan konsolidasian.

Based on the assessment of management, there is no impairment indication on the Company and its subsidiaries property, plant and equipment. The carrying value of assets, on which impairment analysis are applied, were described in Notes 6 to the consolidated financial statements.

Imbalan Kerja

Employee Benefits

Penentuan liabilitas imbalan pasca-kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca-kerja Perusahaan dan entitas anak.

The determination of post-employment benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company and its subsidiaries assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Company and it subsidiaries assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the Company and its subsidiaries' post-employment benefit obligations.

Liabilitas imbalan pasca-kerja diungkapkan dalam Catatan 50.

Post-employment benefit obligations are disclosed in Note 50.

5. ENTITAS ANAK

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

5. SUBSIDIARIES

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis Usaha/ *Nature of Business*	Persentase Pemilikan/ *Percentage of Ownership* 31 Desember/ *December 31,* 2013 %	31 Desember/ *December 31,* 2012 %	1 Januari/ *January 1,* 2012 %	Tahun Operasi Komersial/ *Year of Operation*	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi **)/ *Total Assets Before Elimination* **) 31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012
PT Indonesia Power (IP) dan entitas anak/ *and its subsidiaries*	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99,99	99,99	99,99	1995	53.480	53.557	53.925
PT Cogindo Dayabersama (CDB) *)	Jakarta	Cogeneration, pemasok energi, jasa pelayanan dan manajemen/ *Cogeneration, energy distribution, energy service and management*	99,99	99,99	99,99	1999	745	713	665
PT Indo Pusaka Berau (IPB) ***)	Berau	Perdagangan batubara/ *Coal trading*	-	46,80	46,80	2005	-	211	218
PT Artha Daya Coalindo (ADC) *)	Jakarta	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	60,00	60,00	60,00	1999	93	109	94
PT Indo Ridlatama Power (IRP) *)	Kutai	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	81,00	55,00	55,00	****)	111	2	2
PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) *)	Jakarta	Pengembangan energi panas bumi dan pembangkit tenaga listrik/ *Development of geothermal energy and electricity supplies*	95,21	95,21	-	****)	92	71	-
PT Putra Indotenaga *)	Jakarta	Ketenagalistrikan dan Energi/ *Electricity and Energy*	99,90	-	-	****)	144	-	-
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) dan entitas anak/ *and its subsidiaries*	Surabaya	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99,99	99,99	99,99	1995	40.828	40.024	41.319
PT PJB Services (PJBS) *) dan entitas anak/ *and its subsidiary*	Surabaya	Jasa/*Service*	98,00	98,00	98,00	2001	262	283	204
PT Mitra Karya Prima (MKP) *)	Surabaya	Jasa/*Service*	92,00	-	-	2013	17	-	-
PT Rekadaya Elektrika (RDE) *) dan entitas anak/ *and its subsidiary*	Jakarta	Jasa listrik dan enjiniring/ *Electricity and engineering*	91,79	89,92	85,41	2004	428	195	145
PT Rekadaya Elektrika Consult *)	Jakarta	Supervisi dan Konsultasi/ *Supervision and consultation*	99,80	99,80	99,80	2011	37	27	14
PT Navigat Innovative Indonesia (NII) *)	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian/ *Trading, construction, mining and agriculture*	72,97	72,97	72,97	****)	102	102	-
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam)	Batam	Penyedia tenaga listrik/ *Electricity supplier*	99,99	99,99	99,99	2000	4.842	4.406	2.960
PT Indonesia Comnets Plus (ICON)	Jakarta	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi/ *Telecommunication provider*	99,99	99,99	99,99	2000	1.964	1.846	1.662
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLNE)	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi/ *Engineering, procurement and construction*	99,90	99,90	99,90	2003	363	320	276
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan)	Tarakan	Penyedia tenaga listrik/ *Electricity supplier*	99,97	99,97	99,97	2004	212	215	236
Majapahit Holding B.V. (MH) dan entitas anak/ *and its subsidiary*	Belanda/ *The Netherlands*	Lembaga keuangan/ *Finance*	100,00	100,00	100,00	2006	44.740	35.413	33.112
Majapahit Finance B.V. (MF) *)	Belanda/ *The Netherlands*	Lembaga keuangan/ *Finance*	100,00	100,00	100,00	2006	35.149	35.149	36.835
PT PLN Batubara (PLN Batubara)	Jakarta	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	99,99	99,99	99,99	2009	1.406	1.223	427
PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal)	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99,99	99,99	99,99	2010	86	79	66
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG)	Jakarta	Pelayaran/ *Shipping*	100,00	100,00	100,00	2011	1.008	764	460
PT Haleyora Power (HP) dan entitas anak/ *and its subsidiary*	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99,99	99,99	99,99	2013	315.317	26	25
PT Haleyora Powerindo (HPI) *)	Jakarta	Jasa/*Service*	90,00	-	-	2013	173.907	-	-

*) Pemilikan tidak langsung/*Indirect ownership*
**) Dalam miliaran Rupiah/*Stated in billions of Rupiah*
***) Pada tahun 2012, IP mempunyai hak mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasi IPB, sehingga laporan keuangan IPB dikonsolidasikan.
Pada tahun 2013, IP kehilangan pengendalian sehingga laporan keuangan IPB tidak dikonsolidasikan/
In 2012, IP has the power to govern IPB's financial and operating policies, hence its financial statements has been consolidated
In 2013, IP has lost the control of IPB, hence its financial statements hasn't been consolidated.
****) Dalam tahap pengembangan/*Under development stage*

Pada tahun 2012, IP bersama Cyrq Energy, Inc. mendirikan TPGP. Modal ditempatkan dan disetor penuh TPGP sebesar US$ 7.300.000, setara dengan Rp 83.074 juta. IP melakukan penyertaan saham sebesar US$ 6.950.000 setara dengan Rp 66.909 juta atau setara 95,21% saham TPGP.

In 2012, IP and Cyrq Energy, Inc. established TPGP. Subscribed and paid-up capital stock of TPGP amounts US$ 7,300,000, equivalent to Rp 83,074 million. IP made initial investment in TPGP amounting to US$ 6,950,000, equivalent to Rp 66,909 million, or 95.21% of issued of shares of TPGP.

Pada tahun 2012, PJB membeli 73% saham NII dari Sri Andini dan Muhammad Soleh Thamrin dengan harga perolehan Rp 109.200 juta.

In 2012, PJB purchased 73% shares of NII from Sri Andini and Muhammad Soleh Thamrin with cost of investment amounting to Rp 109,200 million.

Pada tahun 2012, PJB menambah penyertaan saham RDE melalui konversi pinjaman pemegang saham sebesar Rp 150.000 juta. Pada tahun 2011, PJB menambah penyertaan saham RDE sebesar Rp 235.000 juta.

In 2012, PJB increased ownership shares of RDE through conversion of the shareholders loans amounting to Rp 150,000 million. In 2011, PJB increased ownership shares of RDE amounting to Rp 235,000 million.

Pada tahun 2013, IP menambah penyertaan saham IRP sebesar Rp 90.379 juta, sehingga persentase kepemilikan saham IP menjadi 81%.

In 2013, IP increased ownership shares of IRP amounting to Rp 90,379 million, thus IP's percentage of ownership increased to 81%.

Pada tahun 2013, IP kehilangan pengendalian atas IPB. Pengendalian atas IPB ditentukan berdasarkan susunan Direksi dalam IPB. Investasi pada IPB dicatat sebagai investasi pada ventura bersama efektif pada 1 Januari 2013 (Catatan 8).

In 2013, IP loss of control over the IPB. The control of IPB was determined by the IPB's Director composition. Investment to IPB is recorded as investment in joint venture effective on January 1, 2013 (Note 8).

Pada tahun 2013, IP bersama Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan IP mendirikan PT Putra Indotenaga yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan dan energi dengan jumlah setoran modal awal sebesar Rp 143.749 juta.

In 2013, IP and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan IP established PT Putra Indotenaga, engaged in energy and electricity sector with total initial investments amounting to Rp 143,749 million.

Pada tahun 2013, PJB menambah penyertaan saham RDE sebesar Rp 110.000 juta.

In 2013, PJB increased ownership in shares of RDE amounting to Rp 110,000 million.

Pada tahun 2013, PJBS membeli 92% saham MKP dengan biaya perolehan sebesar Rp 2.500 juta.

In 2013, PJBS acquired 92% equity ownership of MKP at acquisition cost of Rp 2,500 million.

Pada tanggal 23 Januari 2013, HP membeli 90% saham PT Mitra Insan Utama (MIU) dengan biaya perolehan sebesar Rp 10.174 juta. Pada tanggal 15 Maret 2013, MIU berubah nama menjadi PT Haleyora Powerindo.

On January 23, 2013, HP purchased 90% shares of PT Mitra Insan Utama (MIU) at acquisition cost of Rp 10,174 million. On March 15, 2013, MIU changed its name to PT Haleyora Powerindo.

6. ASET TETAP / 6. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT

	1 Januari/ *January 1,* 2013	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December 31,* 2013	
Biaya perolehan						At cost
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Tanah	8.763.934	25.426	124.982	561.722	9.226.100	Land
Bangunan umum, waduk dan prasarana	49.540.539	189.194	57.746	6.051.617	55.723.604	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	156.450.996	163.387	2.579.442	18.920.010	172.954.951	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi	67.416.362	118.325	823.944	8.830.818	75.541.561	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	94.269.914	2.781.148	76.495	10.082.848	107.057.415	Distribution equipment
Perlengkapan umum	6.533.598	234.230	68.380	2.251.787	8.951.235	General equipment
Kendaraan bermotor	841.083	46.618	73.651	111.517	925.567	Motor vehicles
Material cadang	1.067.334	470.367	588.808	-	948.893	Spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	4.477.693	20.436	112.519	1.156.680	5.542.290	Telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	489.222	-	27.178	269.784	731.828	Vessels and equipment
Sub-jumlah	389.850.675	4.049.131	4.533.145	48.236.783	437.603.444	Subtotal
Aset sewaan						Leased assets
Tanah	58.591	-	-	(10.203)	48.388	Land
Instalasi dan mesin pembangkit	119.104.117	5.309.239	-	(79.489)	124.333.867	Installation and power plant
Sub-jumlah	119.162.708	5.309.239	-	(89.692)	124.382.255	Subtotal
Pekerjaan dalam pelaksanaan	102.810.172	43.725.864	-	(50.797.301)	95.738.735	Construction in progress
Aset tidak digunakan dalam operasi	5.839.312	-	494.861	709.820	6.054.271	Assets not used in operation
Jumlah	617.662.867	53.084.234	5.028.006	(1.940.390)	663.778.705	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation and impairment value
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Bangunan umum, waduk dan prasarana	11.370.209	1.770.520	18.659	72.700	13.194.770	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	54.488.643	8.203.245	2.460.834	-	60.231.054	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi	18.882.562	2.243.369	148.879	93.640	21.070.692	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	31.455.444	3.636.334	31.549	56.350	35.116.579	Distribution equipment
Perlengkapan umum	4.417.298	759.014	29.417	394.720	5.541.615	General equipment
Kendaraan bermotor	630.115	71.697	24.649	-	677.163	Motor vehicles
Material cadang	213.332	50.109	66.433	-	197.008	Spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	2.713.308	442.161	89.506	16.247	3.082.210	Telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	50.708	37.304	12.357	-	75.655	Vessels and equipment
Sub-jumlah	124.221.619	17.213.753	2.882.283	633.657	139.186.746	Subtotal
Aset sewaan						Leased assets
Instalasi dan mesin pembangkit	26.767.280	4.695.219	-	-	31.462.499	Installation and power plant
Aset tidak digunakan dalam operasi	4.356.223	623.541	402.164	449.282	5.026.882	Assets not used in operation
Jumlah	155.345.122	22.532.513	3.284.447	1.082.939	175.676.127	Total
Jumlah Tercatat	462.317.745				488.102.578	Net Carrying Value

	1 Januari/ *January 1,* 2012	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December 31,* 2012	
Biaya perolehan						At cost
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Tanah	8.346.234	60.777	26.663	383.586	8.763.934	Land
Bangunan umum, waduk dan prasarana	40.287.413	155.774	168.444	9.265.796	49.540.539	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	140.824.350	992.663	1.734.472	16.368.455	156.450.996	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi	63.650.299	115.417	165.980	3.816.626	67.416.362	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	82.838.314	2.026.185	424.360	9.829.775	94.269.914	Distribution equipment
Perlengkapan umum	5.453.945	235.089	72.887	917.451	6.533.598	General equipment
Kendaraan bermotor	804.510	15.310	38.482	59.745	841.083	Motor vehicles
Material cadang	1.000.190	135.934	68.790	-	1.067.334	Spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	4.242.112	52.564	119.629	302.646	4.477.693	Telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	313.192	191.518	15.488	-	489.222	Vessels and equipment
Sub jumlah	347.760.559	3.981.231	2.835.195	40.944.080	389.850.675	Subtotal
Aset sewaan						Leased assets
Tanah	58.591	-	-	-	58.591	Land
Instalasi dan mesin pembangkit	87.648.974	31.455.143	-	-	119.104.117	Installation and power plant
Sub jumlah	87.707.565	31.455.143	-	-	119.162.708	Subtotal
Pekerjaan dalam pelaksanaan	98.057.296	44.741.806	-	(39.988.930)	102.810.172	Construction in progress
Aset tidak digunakan dalam operasi	5.131.689	-	2.319.047	3.026.670	5.839.312	Assets not used in operation
Jumlah	538.657.109	80.178.180	5.154.242	3.981.820	617.662.867	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation and impairment value
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Bangunan umum, waduk dan prasarana	9.795.369	1.609.647	76.135	41.328	11.370.209	Buildings, reservoir and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	48.295.978	7.141.550	948.885	-	54.488.643	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi	16.720.484	2.211.167	60.991	11.902	18.882.562	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	28.478.842	3.180.973	237.732	33.361	31.455.444	Distribution equipment
Perlengkapan umum	3.864.293	607.157	54.152	-	4.417.298	General equipment
Kendaraan bermotor	581.457	71.377	38.063	15.344	630.115	Motor vehicles
Material cadang	226.273	48.020	60.961	-	213.332	Spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	2.466.932	354.517	108.141	-	2.713.308	Telecommunication and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	46.161	19.562	15.015	-	50.708	Vessels and equipment
Sub jumlah	110.475.789	15.243.970	1.600.075	101.935	124.221.619	Subtotal
Aset sewaan						Leased assets
Instalasi dan mesin pembangkit	22.502.388	4.264.892	-	-	26.767.280	Installation and power plant
Aset tidak digunakan dalam operasi	3.418.020	457.231	1.119.103	1.600.075	4.356.223	Assets not used in operation
Jumlah	136.396.197	19.966.093	2.719.178	1.702.010	155.345.122	Total
Jumlah Tercatat	402.260.912				462.317.745	Net Carrying Value

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2013	2012	
Beban usaha	21.893.665	19.499.221	Operating expenses
Pekerjaan dalam pelaksanaan	15.307	9.641	Construction in progress
Beban lain-lain	623.541	457.231	Others expense
Jumlah	22.532.513	19.966.093	Total

Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hak pakai tidak mempunyai jangka waktu. Hak guna bangunan berjangka waktu antara 20 tahun sampai dengan 30 tahun yang jatuh tempo antara tahun 2016 sampai dengan 2036. Perusahaan dan entitas anak juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Perusahaan dan entitas anak.

The Company and its subsidiaries own several pieces of land with Rights to Use (Hak Pakai), Building Use Rights (Hak Guna Bangunan). Rights to Use have no expiration date while Building Use Rights will expire between 20 to 30 years until 2016 to 2036. The Company and its subsidiaries also have several pieces of land, which are still being processed for extension and for transfer of certificate in the name of the Company and its subsidiaries.

Bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal dengan jumlah tercatat sebesar Rp 210.379.773 juta diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi dengan PT Tugu Kresna Pratama, pihak berelasi, sebagai penanggung utama, PT Asuransi Jasa Indonesia, pihak berelasi, sebagai penanggung utama, PT Asuransi Videi, Asuransi Ekspor Indonesia dan PT Asuransi Wahana Tata terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar US$ 21.135 juta dan Rp 1.434.709 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dan US$ 19.881 juta dan Rp 1.380.731 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Aset sewaan PLTU Tanjung Jati B 4 x 660 MW diasuransikan kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar JPY 196.210 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dan JPY 320.562 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan aset tetap selain bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, serta kapal dan perlengkapan.

Building, installation and power plant, transmission equipment and vessels with net carrying value of Rp 210,379,773 million were insured to several insurance companies, with PT Tugu Kresna Pratama, a related party, acting as the lead underwriter, PT Asuransi Jasa Indonesia, related party, acting as the lead underwriter, PT Asuransi Videi, Asuransi Ekspor Indonesia and PT Asuransi Wahana Tata against fire and other possible risks with insurance coverage of US$ 21,135 million and Rp 1,434,709 million as of December 31, 2013 and US$ 19,881 million and Rp 1,380,731 million as of December 31, 2012. Leased assets PLTU Tanjung Jati B 4 x 660 MW were insured to PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia against fire and other possible risks with insurance coverage of JPY 196,210 million as of December 31, 2013 and JPY 320,562 million as of December 31, 2012. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured. The Company and its subsidiaries do not cover insurance protection for assets other than building, installation and power plant, transmission equipment and vessels and equipment.

Aset sewaan - instalasi dan mesin pembangkit merupakan pembangkit tenaga listrik berdasarkan perjanjian dengan IPP dalam bentuk sewa pembiayaan sesuai dengan penerapan ISAK 8 serta PLTU Tanjung Jati B 4 x 660 MW (Catatan 2c).

Leased assets – installation and power plant represent certain power plants under agreement with IPPs which were accounted for as finance lease in accordance with ISAK 8 and the PLTU Tanjung Jati B 4 x 660 MW power plant (Note 2c).

Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp 25.137.912 juta.

As of December 31, 2013, gross carrying amount of property, plant and equipment that have been fully depreciated and still in used amounted to Rp 25,137,912 million.

Nilai wajar aset tetap pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 526.262.055 juta.

Fair value of property, plant and equipment as of December 31, 2013 amounted to Rp 526,262,055 million.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate an impairment in value of property, plant and equipment as of the reporting date.

Pekerjaan Dalam Pelaksanaan

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan perbaikan/renovasi sarana kelistrikan, sebagai berikut :

Construction In Progress

This account represents costs incurred in relation to the construction and renovation/betterment of power supply facilities, as follows :

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1, 2012*	
Proyek penugasan -				Mandatory projects -
Program percepatan				Fast track program
Pembangkitan	44.817.025	54.694.654	54.123.611	Power plants
Transmisi	7.163.865	8.017.177	6.354.536	Transmission
Jumlah	51.980.890	62.711.831	60.478.147	Total
Konstruksi rutin				Regular constructions
Pembangkitan	11.564.112	10.828.851	16.860.578	Power plants
Transmisi	29.085.977	26.291.632	18.761.718	Transmission
Distribusi	2.945.585	2.878.408	1.878.722	Distribution
Perlengkapan	162.171	99.450	78.131	Equipment
Jumlah	43.757.845	40.098.341	37.579.149	Total
Jumlah	95.738.735	102.810.172	98.057.296	Total

(i) Program percepatan

Program percepatan (*fast track program*) merupakan proyek yang ditugaskan Pemerintah kepada Perusahaan (Catatan 55). Pekerjaan dalam pelaksanaan program percepatan termasuk pembayaran uang muka kepada kontraktor, biaya pinjaman serta pengeluaran lain yang dapat dikapitalisasi.

(i) Fast track program

Fast track program represents projects mandated by the Government to the Company (Note 55). Construction in progress of fast track program include advance payments made to the contractors, borrowing costs and other capitalizable expenditures.

(ii) Konstruksi rutin

Pembangkitan

Pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan terutama merupakan PLTP Sarulla 300 MW, PLTA Peusangan 88 MW, PLTU Asahan III 2x87 MW dan PLTG Kaltim 2x50 MW. PLTP Sarulla merupakan proyek pembangkitan listrik tenaga panas bumi yang pada tanggal 23 Januari 2004 diambil alih oleh Perusahaan dari Unocal North Sumatera Geothermal Ltd. dengan harga perolehan US$ 60 juta (Catatan 55).

Transmisi

Pekerjaan dalam pelaksanaan transmisi terutama merupakan proyek jaringan transmisi T/L 500 kV Jawa – Bali, T/L 150 kV untuk luar Jawa-Bali, proyek gardu induk 150 kV serta proyek interkoneksi jaringan.

(ii) Regular constructions

Power Plants

Power plants under construction consist mainly of PLTP Sarulla 300 MW, PLTA Peusangan 88 MW, PLTU Asahan III 2x87 MW and PLTG Kaltim 2x50 MW. PLTP Sarulla is a geothermal power plant which was taken over by the Company on January 23, 2004 from Unocal North Sumatera Geothermal Ltd. for US$ 60 million (Note 55).

Transmission

Transmission under construction consists mainly of projects of transmission lines of T/L 500 kV in Java – Bali, T/L 150 kV outside Java – Bali, substations 150 kV and interconnection of transmission projects.

Distribusi

Pekerjaan dalam pelaksanaan distribusi terutama merupakan proyek jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah 20 kV serta proyek gardu distribusi.

Distribution

Distribution under construction consists mainly of projects of mid and low voltage distribution lines of 20 kV and distribution substation projects.

Pekerjaan dalam pelaksanaan ini diperkirakan selesai antara tahun 2014 dan 2015.

Constructions in progress are expected to be completed between 2014 and 2015.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke pekerjaan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut :

Borrowing costs which were capitalized to construction in progress are as follows :

	2013	2012	
Program percepatan			Fast track program
Bunga pinjaman	2.519.669	2.622.906	Interest expense
Kerugian kurs mata asing	1.212.636	1.227.099	Loss on foreign exchange
Amortisasi emisi obligasi	2.209	17.898	Amortization of debt issuance cost
Jumlah	3.734.514	3.867.903	Total
Konstruksi rutin			Regular constructions
Bunga pinjaman	417.246	458.495	Interest expense
Kerugian kurs mata asing	64.876	178.705	Loss on foreign exchange
Amortisasi emisi obligasi	30	5.915	Amortization of debt issuance cost
Jumlah	482.152	643.115	Total
Jumlah	4.216.666	4.511.018	Total

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai pekerjaan dalam pelaksanaan pada tanggal pelaporan.

Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate an impairment in value of construction in progress as of the reporting date.

Aset Tidak Digunakan Dalam Operasi

Assets Not Used In Operations

Kerugian penurunan nilai aset sebesar Rp 559.027 juta tahun 2013 dan Rp 383.196 juta tahun 2012 dicatat sebagai beban lain-lain.

Loss on impairment of property, plant and equipment amounting to Rp 559,027 million in 2013 and Rp 383,196 million in 2012, respectively are recorded as other expenses.

Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap akan direlokasi dan belum digunakan dalam operasi serta aset tetap akan diperbaiki.

Assets not used in operations comprised of property, plant and equipment to be relocated and not yet used in operations and property, plant and equipment to be repaired.

Aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi dijual seharga Rp 223.192 juta tahun 2013 dan Rp 76.805 juta tahun 2012. Nilai buku aset yang dijual tersebut telah nihil sehingga hasil penjualan aset merupakan keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi.

Certain assets not used in operations were sold with selling price of Rp 223,192 million in 2013 and Rp 76,805 million in 2012. The carrying value of such assets were nil, hence the proceeds from sale of assets represented gain on sale of assets not used on operations.

Manajemen berpendapat bahwa penurunan nilai aset tidak digunakan dalam operasi memadai untuk menutup risiko kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul dari aset tersebut.

Management believes that impairment for assets not yet used in operations is adequate to cover possible loss on impairment on value of such assets.

7. PROPERTI INVESTASI

Akun ini merupakan tanah milik PJB yang terletak di Paiton - Jawa Timur, Pluit – Jakarta Utara dan Asahan - Sumatera Utara, yang disewakan kepada atau digunakan oleh penyedia listrik swasta PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas dan PT Bajradaya Sentranusa.

Estimasi nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 221.890 juta dan Rp 215.539 juta ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak masing-masing bidang tanah.

7. INVESTMENT PROPERTIES

This account pertains to pieces of land owned by PJB located in Paiton – East Java, Pluit – North Jakarta and Asahan – North Sumatera, which are rented to or used by independent power producers, PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas and PT Bajradaya Sentranusa.

The estimated fair value of these investment properties as of December 31, 2013 and 2012 amounted to Rp 221,890 million and Rp 215,539 million, respectively, which was determined based on the market value of tax object of each parcel of land.

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut :

8. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

Details of investments in associates and joint ventures are as follows :

	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Tahun operasi komersial/ *Commercial operations*	Persentase penyertaan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December 31,* 2013 %	31 Desember/ *December 31,* 2012 %	1 Januari/ *January 1,* 2012 %
Investasi pada entitas asosiasi/ *Investment in associates*						
PT Geo Dipa Energi	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2002	33,00	33,00	33,00
PT Unelec Indonesia	Jakarta	Penunjang penyedia tenaga listrik/ *Electrical supports*	1988	32,35	32,35	32,35
PT Mitra Energi Batam	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2004	30,00	30,00	30,00
PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2006	49,00	49,00	49,00
PT Dalle Energy Batam	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2006	20,00	20,00	20,00
PT Bajradaya Sentranusa	Asahan	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2010	26,06	26,06	26,06
PT Bukit Pembangkit Innovative	Palembang	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	40,25	40,25	40,25
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Jepara	Operasi dan pemeliharaan/ *Operational and maintenance*	2010	49,00	49,00	49,00
PT Tanjung Kasam Power	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2009	10,00	'-	'-
Ventura bersama/*Joint ventures*						
PT Perta Daya Gas	Jakarta	Transportasi dan penyimpanan LNG/ *Transportation and storage of LNG*	*)	35,00	35,00	'-
PT Rajamandala Electric Power	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	51,00	51,00	'-
IP-NTP Consortium	Bandung	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	'-	'-	80
PT Indo Pusaka Berau (Catatan/*Note* 5)	Berau	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	2005	46,80	'-	'-
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2013	45,00	'-	'-

*) Tahap pengembangan/*Development stage*

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut :

Changes in investments in associates and joint ventures are as follows :

	Jumlah tercatat 1 Januari 2013/ *Carrying amount January 1, 2013*	Penambahan (pengurangan)/ *Additions (deduction)*	Bagian atas laba (rugi) bersih entitas/ *Equity in net income (loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2013 *Carrying amount December 31, 2013*	
Entitas asosiasi					Associates
PT Unelec Indonesia	166.260	-	5.713	171.973	PT Unelec Indonesia
PT Mitra Energi Batam	46.205	56.258	1.503	103.966	PT Mitra Energi Batam
PT Sumber Segara Primadaya	605.361	-	76.422	681.783	PT Sumber Segara Primadaya
PT Dalle Energy Batam	60.749	-	7.182	67.931	PT Dalle Energy Batam
PT Bajradaya Sentranusa	245.652	-	54.313	299.965	PT Bajradaya Sentranusa
PT Bukit Pembangkit Innovative	407.057	-	26.381	433.438	PT Bukit Pembangkit Innovative
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	39.900	(15.524)	19.100	43.476	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
PT Tanjung Kasam Power	-	13.000	21.327	34.327	PT Tanjung Kasam Power
Sub jumlah	1.571.184	53.734	211.941	1.836.859	Sub total
Ventura bersama					Joint ventures
PT Perta Daya Gas	8.219	26.250	(22.785)	11.684	PT Perta Daya Gas
PT Rajamandala Electric Power	46.036	18.336	408	64.780	PT Rajamandala Electric Power
PT Indo Pusaka Berau	-	85.496	6.888	92.384	PT Indo Pusaka Berau
PT Energi Pelabuhan Indonesia	-	19.636	3.723	23.359	PT Energi Pelabuhan Indonesia
Sub jumlah	54.255	149.718	(11.766)	192.207	Sub total
Jumlah	1.625.439	203.452	200.175	2.029.066	Total

	Jumlah tercatat 1 Januari 2012/ *Carrying amount January 1, 2012*	Penambahan (pengurangan)/ *Additions (deduction)*	Bagian atas laba (rugi) bersih entitas/ *Equity in net income (loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2012 *Carrying amount December 31, 2012*	
Entitas asosiasi					Associates
PT Unelec Indonesia	110.496	(62.545)	118.309	166.260	PT Unelec Indonesia
PT Mitra Energi Batam	47.306	-	(1.101)	46.205	PT Mitra Energi Batam
PT Sumber Segara Primadaya	529.613	(17.946)	93.694	605.361	PT Sumber Segara Primadaya
PT Dalle Energy Batam	48.487	-	12.262	60.749	PT Dalle Energy Batam
PT Bajradaya Sentranusa	168.052	-	77.600	245.652	PT Bajradaya Sentranusa
PT Bukit Pembangkit Innovative	193.994	194.872	18.191	407.057	PT Bukit Pembangkit Innovative
PT Komipo Pembangkitan Jaw a Bali	43.750	(17.852)	14.002	39.900	PT Komipo Pembangkitan Jaw a Bali
Sub jumlah	1.141.698	96.529	332.957	1.571.184	Sub total
Ventura bersama					Joint ventures
PT Perta Daya Gas	-	8.750	(531)	8.219	PT Perta Daya Gas
PT Rajamandala Electric Pow er	-	45.839	197	46.036	PT Rajamandala Electric Pow er
IP-NTP Consortium	1.152	(1.152)	-	-	IP-NTP Consortium
Sub jumlah	1.152	53.437	(334)	54.255	Sub total
Jumlah	1.142.850	149.966	332.623	1.625.439	Total

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Summarized financial information in associates and joint ventures are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Jumlah aset	23.085.501	12.471.642	12.321.472	Total assets
Jumlah liabilitas	(15.275.867)	(7.353.630)	(7.955.739)	Total liabilities
Aset bersih	7.809.634	5.118.012	4.365.733	Net assets
Jumlah pendapatan tahun berjalan	6.299.901	4.959.248	5.111.862	Total revenue for the year
Laba bersih tahun berjalan	575.740	708.240	431.064	Net income for the year

Investasi pada entitas diatas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Perusahaan dan entitas anak.

The investments in the above companies are held primarily for long-term growth potential, since these companies are engaged in the electricity business industry similar to the Company and its subsidiaries.

PT Geo Dipa Energi

PT Geo Dipa Energi didirikan untuk melanjutkan pembangunan pembangkit tenaga listrik Dieng dan Patuha yang sebelumnya dimiliki Himpurna California Energy Limited dan Patuha Power Limited.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 jumlah tercatat investasi pada PT Geo Dipa Energi adalah nihil.

Pada tahun 2013 dan 2012, Perusahaan tidak mengakui bagian Perusahaan atas rugi bersih PT Geo Dipa Energi masing-masing sebesar Rp 87.053 juta dan Rp 37.214 juta.

PT Geo Dipa Energi

PT Geo Dipa Energi was established to continue the development of Dieng and Patuha power plant projects previously owned by Himpurna California Energy Limited and Patuha Power Limited.

As of December 31, 2013 and 2012, the carrying amount of investment in PT Geo Dipa Energi is nil.

In 2013 and 2012, the Company did not recognize share in net loss of PT Geo Dipa Energi amounting to Rp 87,053 million and Rp 37,214 million, respectively.

PT Unelec Indonesia (Unindo)

Unindo didirikan untuk memproduksi dan menjual transformator dan switchgear. Pada tahun 2012, Perusahaan memperoleh dividen dari Unindo sebesar Rp 62.545 juta.

PT Unelec Indonesia (Unindo)

Unindo was established to engage principally in the manufacture and sale of power and distribution transformers and switchgears. In 2012, the Company received dividends from Unindo amounting to Rp 62,545 million.

PT Mitra Energi Batam (MEB)

Pada tahun 2013, PLN Batam meningkatkan investasi saham MEB sebesar US$ 4.954.661 setara dengan Rp 56.258 juta tanpa mengubah persentase kepemilikan saham.

PT Mitra Energi Batam (MEB)

In 2013, PLN Batam increased its investment in shares of MEB amounting to US$ 4,954,661 equivalent to Rp 56,258 million without changing its percentage of ownership.

PT Sumber Segara Primadaya (S2P)

Pada tahun 2012, PJB memperoleh dividen dari S2P sebesar US$ 1.862.000 setara dengan Rp 17.946 juta.

Tanjung Kasam Power (TJK)

Pada tahun 2013, PLN Batam mempunyai pengaruh yang signifikan atas TJK. Pengaruh yang signifikan dinilai berdasarkan keterwakilan PLN Batam pada susunan Direksi TJK (Catatan 11).

PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)

Pada tahun 2012, PJB meningkatkan investasi saham BPI sebesar Rp 65.732 juta tanpa mengubah persentase kepemilikan saham.

Pada tahun 2012, PJB juga meningkatkan investasi saham BPI melalui pembelian saham NII dari pemegang saham lain sebesar Rp 129.140 juta (Catatan 5), sehingga persentase kepemilikan saham PJB menjadi 40,25%.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)

Pada tahun 2013 dan 2012, PJB memperoleh dividen dari KPJB masing-masing sebesar Rp 15.524 juta dan Rp 17.852 juta.

PT Perta Daya Gas (PDG)

Pada tahun 2013, IP melakukan penambahan investasi sebesar Rp 26.250 juta tanpa mengubah persentase kepemilikan. Pada tahun 2012, IP melakukan penyertaan saham pada PDG sebesar Rp 8.750 juta atau 35% saham PDG.

PT Rajamandala Electric Power (REP)

Pada tahun 2013, IP melakukan penambahan investasi sebesar Rp 18.336 juta tanpa mengubah persentase kepemilikan.

Pada tahun 2012, IP bersama KPIC Netherlands B.V. mendirikan REP sebagai ventura bersama, untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik di Cianjur, Jawa Barat. IP melakukan penyertaan saham pada REP sebesar US$ 5.100.000 setara dengan Rp 45.839 juta atau 51% saham REP.

PT Sumber Segara Primadaya (S2P)

In 2012, PJB received dividend from S2P amounting to US$ 1,862,000, equivalent to Rp 17,946 million.

Tanjung Kasam Power (TJK)

In 2013, PLN Batam gained significant influence of TJK. The significant influence was measured by PLN Batam's representation in TJK's Directors (Note 11).

PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)

In 2012, PJB increased its investment in shares of BPI amounting to Rp 65,732 million without changing its percentage of ownership.

In 2012, PJB also increased its investment in shares of BPI by purchasing shares of NII from other stockholders amounting to Rp 129,140 million, (Note 5), thus PJB's percentage of ownership increased to 40.25%.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)

In 2013 and 2012, PJB received dividend from KPJB amounting to Rp 15,524 million and Rp 17,852 million, respectively.

PT Perta Daya Gas (PDG)

In 2013, IP has increased investment to PDG amounting Rp 26,250 million without changing its percentage of ownership. In 2012, IP made initial investment in shares of PDG amounting to Rp 8,750 million, or 35% of issued shares of PDG.

PT Rajamandala Electric Power (REP)

In 2013, IP has increased investment to REP amounting Rp 18,336 million without changing its percentage of ownership.

In 2012, IP and KPIC Netherlands B.V. established REP, as a joint venture, to build and operate a power plant in Cianjur, West Java. IP made initial investment in REP amounting to US$ 5,100,000, equivalent to Rp 45,839 million, or 51% shares of REP.

PT Indo Pusaka Berau (IPB)

Pada tahun 2013, IP kehilangan hak mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasi IPB. Investasi sebesar Rp 85.496 juta dicatat sebagai ventura bersama.

PT Indo Pusaka Berau (IPB)

In 2013, IP lost the power to govern IPB's financial and operating policies. Investment amounting to Rp 85,496 million recorded as investment in joint ventures.

PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI)

Pada tahun 2013, HP dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mendirikan EPI yang bergerak dalam bidang pasokan energi listrik di wilayah pelabuhan. HP melakukan penyertaan saham pada EPI sebesar Rp 19.636 juta atau 45% saham EPI.

PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI)

In 2013, HP and PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) established EPI to supply electricity in port area. HP made initial investment in EPI amounting to Rp 19,636 million, or 45% shares of EPI.

9. PIUTANG PIHAK BERELASI

9. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
PT Perta Daya Gas (US$ 15.454.066 tahun 2013)	188.369	-	-	PT Perta Daya Gas (US$ 15,454,066 in 2013)
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (US$ 3.677.768 tahun 2011)	22.345	29.048	33.350	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (US$ 3,677,768 in 2011)
PT Sumber Segara Primadaya (US$ 21.197.133 tahun 2011)	-	-	199.470	PT Sumber Segara Primadaya (US$ 21,197,133 in 2011)
PT Metaepsi Pejebe Power Generation (US$ 4.500.000 tahun 2011)	-	-	40.806	PT Metaepsi Pejebe Power Generation (US$ 4,500,000 in 2011)
PT Tanjung Kasam Power	-	12.211	-	PT Tanjung Kasam Power
PT Dalle Energy Batam	5.314	8.922	6.127	PT Dalle Energy Batam
PT Mitra Energi Batam	65	618	212	PT Mitra Energi Batam
Jumlah	216.093	50.799	279.965	Total
Dikurangi bagian jangka pendek	40.061	28.470	67.256	Less current portion
Bagian jangka panjang	176.032	22.329	212.709	Long-term portion

PT Perta Daya Gas (PDG)

Pada tanggal 12 Juni 2013, IP memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US$ 18.837 juta kepada PDG untuk membiayai proyek *Compressed Natural Gas* (CNG) di PLTU Tambak Lorok, Semarang. Jangka waktu pinjaman 8 tahun, jatuh tempo 1 Desember 2021 dan dikenakan bunga 6,5% per tahun. Pinjaman pokok akan diangsur dalam 16 kali angsuran mulai 1 Juni 2014 sampai dengan 1 Desember 2021. Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo pokok pinjaman ini sebesar US$ 15.039 juta.

PT Perta Daya Gas (PDG)

On June 12, 2013, IP granted a long-term loan of US$ 18,837 million to PDG for the financing of Compressed Natural Gas (CNG) project in PLTU Tambak Lorok, Semarang. This loan will mature in 8 years, due on December 1, 2021 and bears interest at 6.5% per annum. The principal will be collected in 16 installments starting from June 1, 2014 until December 1, 2021. On December 31, 2013, this principal balance of the loan amounting to US$ 15,039 million.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)

Pada tanggal 29 Desember 2010, PJB menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada KPJB jumlah pokok keseluruhan sebesar US$ 3,675 juta dan suku bunga 14% per tahun. Pinjaman ini bertujuan untuk memberikan KPJB dana cadangan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian pengembangan operasi dan pemeliharaan dengan PJB. KPJB berkewajiban untuk memiliki dana cadangan selama berlakunya perjanjian untuk 6 bulan operasi dan pemeliharaan pembangkit. Jangka waktu pinjaman 7 tahun sejak tanggal 29 Desember 2010. Pelunasan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 29 Desember dan cicilan pertama pokok piutang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2012.

Pada tanggal 29 Februari 2012, PJB menyetujui amandemen perjanjian pinjaman, jumlah pinjaman dikonversi ke dalam mata uang Rupiah menjadi sebesar Rp 33.494 juta.

Pada tahun 2013 dan 2012, PJB menerima pembayaran pokok masing-masing sebesar Rp 6.699 juta dan Rp 4.466 juta.

PT Tanjung Kasam Power, PT Dalle Energy Batam dan PT Mitra Energi Batam

Piutang kepada PT Tanjung Kasam Power, PT Dalle Energy Batam dan PT Mitra Energi Batam merupakan piutang atas denda kontrak penyediaan tenaga listrik.

Manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa piutang pihak berelasi dapat tertagih.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)

On December 29, 2010, PJB agreed to provide loans to KPJB, in the form of shareholder loan with the aggregate principal amount of US$ 3.675 million and the loan bears interest at 14% per annum. The purpose of this loan is to provide cash reserve for KPJB in order to comply with the contractual obligation stipulated in the Expansion Operation and Maintenance Agreement with the PJB, which requires KPJB to, at any time of the contract term, maintain the cash reserve for 6 months operation and maintenance of power plant. The term of the loan is 7 years starting from December 29, 2010. The interest will be due each December 29 and the first installment of principal payment started on December 29, 2012.

On February 29, 2012, PJB agreed to amend the loan agreement and the shareholder loan was converted to Rupiah, amounting to Rp 33,494 million.

In 2013 and 2012, PJB received principal payment amounting to Rp 6,699 million and Rp 4,466 million, respectively.

PT Tanjung Kasam Power, PT Dalle Energy Batam and PT Mitra Energi Batam

Accounts receivable from PT Tanjung Kasam Power, PT Dalle Energy Batam and PT Mitra Energy Batam represent receivables on penalty of power purchase contracts.

The Company and its subsidiaries' management consider these receivable from related parties to be collectible.

10. REKENING BANK DAN DEPOSITO BERJANGKA DIBATASI PENGGUNAANNYA

10. RESTRICTED CASH IN BANKS AND TIME DEPOSITS

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Angsuran sewa pembiayaan dan jaminan operasi				Lease installments and operation guarantee
Rekening bank				Cash in bank
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura				Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore
JPY	5.059.278	4.362.942	3.554.145	JPY
US$	475.266	307.178	257.734	US$
Jaminan pembelian gas				Guarantee deposit for gas purchases
Deposito berjangka				Time deposits
Bank Mandiri - pihak berelasi				Bank Mandiri - related party
Rupiah	100	369	269	Rupiah
US$	853	5.738	4.746	US$
Jaminan pembelian tenaga listrik				Guarantee deposit for purchase of electricity
Rekening bank - Bank Central Asia - Rupiah	5.510	5.391	4.981	Cash in bank - Bank Central Asia - Rupiah
Deposito berjangka - Bank Mandiri - pihak berelasi - Rupiah	-	-	1.500	Time deposit - Bank Mandiri - related party - Rupiah
Jaminan pinjaman bank				Guarantee deposit for bank loans
Deposito berjangka - Bank Bukopin - Rupiah	-	5.000	5.000	Time deposits - Bank Bukopin - Rupiah
Jaminan bank garansi				Bank guarantee
Rekening bank				Cash in banks
Bank Rakyat Indonesia - pihak berelasi - Rupiah	930	600	46.628	Bank Rakyat Indonesia - related party - Rupiah
Bank Mandiri - pihak berelasi - Rupiah	46.585	42.654	1.420	Bank Mandiri - related party - Rupiah
Bank Negara Indonesia - pihak berelasi - Rupiah	-	389	-	Bank Negara Indonesia - related party - Rupiah
Deposito berjangka				Time deposits
Bank Mandiri - pihak berelasi - Rupiah	-	-	112	Bank Mandiri - related party - Rupiah
Bank Niaga				Bank Niaga
Rupiah	-	-	5.477	Rupiah
US$	-	-	7.751	US$
Jaminan *letter of credit*				Letter of credit guarantee
Rekening bank				Cash in bank
Bank Negara Indonesia - pihak berelasi - US$	71.231	56.475	-	Bank Negara Indonesia - related party - US$
Deposito berjangka				Time deposit
Bank Rakyat Indonesia - pihak berelasi - Rupiah	-	6.000	-	Bank Rakyat Indonesia - related party - Rupiah
Jumlah	5.659.753	4.792.736	3.889.763	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun				Interest rate per annum on time deposits
Rupiah	3,07% - 4,21%	0,10% - 6%	2,59% - 8,25%	Rupiah
US$	0,18% - 0,44%	0,84% - 2%	0,84% - 1,84%	US$

Perusahaan menempatkan dana cadangan pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura sebesar JPY 48.464 juta dan US$ 60,8 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dan sebesar JPY 44.299 juta dan US$ 61 juta pada tanggal 31 Desember 2012 untuk memenuhi persyaratan *Financial Lease Agreement* (FLA).

The Company established a reserve account to Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore amounting to JPY 48,464 million and US$ 60.8 million as of December 31, 2013 and amounting to JPY 44,299 million and US$ 61 million as of December 31, 2012 to fulfill the requirement of Financial Lease Agreement (FLA).

Rincian rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of restricted cash in banks and time deposits in foreign currencies are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2013		31 Desember/*December 31,* 2012		1 Januari/*January 1,* 2012		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
US$	44.905.240	547.350	38.199.725	369.391	29.800.483	270.231	US$
JPY	43.550.639.086	5.059.278	38.966.409.302	4.362.942	30.428.504.732	3.554.145	JPY
Jumlah		5.606.628		4.732.333		3.824.376	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

11. ASET TIDAK LANCAR LAIN

11. OTHER NONCURRENT ASSETS

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Beban ditangguhkan - bersih				Deferred charges - net
Biaya transaksi pinjaman	111.925	129.511	186.739	Transaction cost
Hak atas tanah	50.614	41.611	43.682	Landrights
Perangkat lunak	462.878	281.203	265.023	Software
Jumlah	625.417	452.325	495.444	Total
Biaya dibayar dimuka				Prepaid expenses
Pembelian gas	613.958	363.611	329.466	Gas purchased
Lain-lain	93.789	84.478	9.349	Others
Jumlah	707.747	448.089	338.815	Total
Uang muka				Advances
Pengembangan proyek	858.561	919.098	467.827	Project development
Pembelian batubara (Catatan 55)	818.360	809.810	158.000	Purchase of coal (Note 55)
Jumlah	1.676.921	1.728.908	625.827	Total
Investasi saham tidak terdaftar di Bursa	8.186	16.186	37.857	Investment in non-listed shares
Jumlah	3.018.271	2.645.508	1.497.943	Total

Beban amortisasi beban ditangguhkan pada tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 124.035 juta dan Rp 154.263 juta.

Amortization expenses of deferred charges in 2013 and 2012 amounted to Rp 124,035 million and Rp 154,263 million, respectively.

Investasi saham tidak terdaftar di bursa

Pada tahun 2013, PJB membeli saham PT Rekind Daya Mamuju (RDM) dengan harga perolehan sebesar Rp 5.000 juta.

Pada tahun 2013, PLN Batam melakukan reklasifikasi investasi pada PT Tanjung Kasam Power sebesar Rp 13.000 juta menjadi investasi pada entitas asosiasi (Catatan 8).

Pada tahun 2012, PJB menjual investasi saham Meppogen dengan harga perolehan sebesar Rp 17.670 juta.

Investment in non-listed shares

In 2013, PJB purchased shares of PT Rekind Daya Mamuju (RDM), with a total cost of Rp 5,000 million.

In 2013, PLN Batam reclassified its investment in PT Tanjung Kasam Power with a total cost of Rp 13,000 million to investment in associates (Note 8).

In 2012, PJB sold its investment in shares of Meppogen, with a total cost of Rp 17,670 million.

12. KAS DAN SETARA KAS / 12. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Kas	9.728	9.614	23.179	Cash on hand
Bank				Cash in banks
Pihak berelasi				Related parties
Bank Rakyat Indonesia				Bank Rakyat Indonesia
Rupiah	5.134.065	9.234.166	4.543.798	Rupiah
US$	307.086	526.153	2.671.235	US$
JPY	15.739	3.626	31.667	JPY
EUR	34.719	14.993	33.959	EUR
Bank Mandiri				Bank Mandiri
Rupiah	3.859.216	3.338.290	4.264.032	Rupiah
US$	1.054.482	104.907	1.530.719	US$
EUR	19.362	2.673	3.770	EUR
JPY	316	261	56	JPY
Bank Negara Indonesia				Bank Negara Indonesia
Rupiah	4.180.131	2.687.523	2.413.041	Rupiah
US$	832.459	110.716	659.700	US$
CHF	43.578	5.863	4.497	CHF
EUR	31.173	28.224	3.661	EUR
Jumlah pihak berelasi	15.512.326	16.057.395	16.160.135	Total related parties
Pihak ketiga				Third parties
Bank Bukopin				Bank Bukopin
Rupiah	3.831.845	3.287.076	3.299.201	Rupiah
US$	208.816	52.770	144.699	US$
JPY	58.758	3.508	3.777	JPY
EUR	37	29	27	EUR
Bank Internasional Indonesia				Bank Internasional Indonesia
Rupiah	153.718	161.320	26.564	Rupiah
US$	48.495	38.412	35.571	US$
EUR	2.886	-	-	EUR
Bank Danamon				Bank Danamon
Rupiah	53.652	94.926	126.549	Rupiah
US$	2.541	2.015	1.890	US$
Bank Central Asia				Bank Central Asia
Rupiah	226.131	75.782	31.064	Rupiah
US$	130.428	2.381	3.437	US$
JPY	100	97	102	JPY
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)				Others (each below 5% of total)
Rupiah	777.997	849.666	1.311.940	Rupiah
US$	209.416	121.253	179.734	US$
JPY	343	421	296	JPY
Jumlah pihak ketiga	5.705.163	4.689.656	5.164.851	Total third parties
Jumlah kas dan bank	21.227.217	20.756.665	21.348.165	Total cash on hand and in banks

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Setara kas - deposito berjangka				Cash equivalents - time deposits
Pihak berelasi				Related parties
Bank Rakyat Indonesia				Bank Rakyat Indonesia
Rupiah	1.050.019	239.784	330.000	Rupiah
US$	-	483.977	-	US$
Bank Negara Indonesia				Bank Negara Indonesia
Rupiah	863.685	108.719	110.100	Rupiah
Bank Mandiri				Bank Mandiri
Rupiah	801.262	74.743	60.041	Rupiah
US$	-	828	680	US$
Jumlah pihak berelasi	2.714.966	908.051	500.821	Total related parties
Pihak ketiga				Third parties
Bank Bukopin				Bank Bukopin
Rupiah	1.234.333	187.500	72.600	Rupiah
US$	241.799	672.701	67.882	US$
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)				Others (each below 5% of total)
Rupiah	5.000	6.826	24.617	Rupiah
US$	106.654	108.110	74.008	US$
Jumlah pihak ketiga	1.587.786	975.137	239.107	Total third parties
Jumlah deposito berjangka	4.302.752	1.883.188	739.928	Total time deposits
Jumlah Kas dan Setara Kas	25.529.969	22.639.853	22.088.093	Total Cash and Cash Equivalents
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun				Interest rate per annum on time deposits
Rupiah	7,5% - 8,25%	5,5% - 8,25%	5,5% - 8,25%	Rupiah
US$	2,25%	0,5% - 1,84%	0,5% - 1,84%	US$

Rincian kas dan setara kas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut :

Details of cash and cash equivalents in foreign currencies are as follows :

	31 Desember/*December 31,* 2013		31 Desember/*December 31,* 2012		1 Januari/*January 1,* 2012		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
US$	257.787.719	3.142.175	230.012.720	2.224.223	592.143.400	5.369.556	US$
JPY	647.816.467	75.256	70.672.767	7.913	307.297.054	35.893	JPY
EUR	5.241.930	88.177	3.584.661	45.919	3.528.201	41.417	EUR
Lain-lain **)	3.575.214	43.578	606.308	5.863	495.954	4.497	Others **)
Jumlah		3.349.186		2.283.918		5.451.363	Total

*) Dalam jumlah penuh
**) Kas dan setara kas dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal pelaporan.

*) In full amount
**) Cash and cash equivalents denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at reporting date.

13. INVESTASI JANGKA PENDEK / 13. SHORT-TERM INVESTMENTS

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Deposito berjangka				Time deposits
Pihak berelasi				Related parties
Bank Rakyat Indonesia				Bank Rakyat Indonesia
Rupiah	87.363	296.415	56.000	Rupiah
Bank Negara Indonesia				Bank Negara Indonesia
Rupiah	1.000	70.332	37.009	Rupiah
Bank Mandiri				Bank Mandiri
Rupiah	3.750	1.900	1.000	Rupiah
Jumlah pihak berelasi	92.113	368.647	94.009	Total related parties
Pihak ketiga				Third parties
Bank Bukopin				Bank Bukopin
Rupiah	-	-	25.000	Rupiah
US$	-	-	507.808	US$
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)				Others (each below 5% of total)
Rupiah	-	1.393	-	Rupiah
Jumlah pihak ketiga	-	1.393	532.808	Total third parties
Investasi lain-lain				Other investments
Rupiah	5.554	8.168	9.447	Rupiah
Jumlah investasi jangka pendek	97.667	378.208	636.264	Total short-term investments
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun				Interest rate per annum on time deposits
Rupiah	5,25% - 7,25%	6,5% - 7,25%	5,19% - 7,7%	Rupiah
US$	-	-	2,25%	US$

Risiko kredit pada aset keuangan tersebut dianggap dapat diabaikan, sebab pihak lawan merupakan bank terkemuka dengan peringkat kredit eksternal berkualitas tinggi.

The credit risk on these financial assets is considered negligible, since the counterparties are reputable banks with high quality external credit ratings.

14. PIUTANG USAHA / 14. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January1,* 2012	
a. Berdasarkan langganan				a. By Debtor
Pihak berelasi				Related parties
Badan Usaha Milik Negara	409.167	267.049	227.913	State-owned companies
Cadangan kerugian penurunan nilai	(493)	(341)	(649)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang usaha pihak berelasi - Bersih	408.674	266.708	227.264	Total of related parties account receivable - Net
Pihak ketiga				Third parties
Umum	14.641.151	11.650.793	10.538.344	Public
TNI dan Polri	339.872	426.175	1.091.499	Indonesian Armed Forces
Lembaga dan Kementerian	772.168	566.330	673.414	Institution and Ministries
Sub jumlah	15.753.191	12.643.298	12.303.257	Sub total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(464.925)	(387.886)	(355.498)	Allowance for impairment losses
Jumlah piutang usaha pihak ketiga - Bersih	15.288.266	12.255.412	11.947.759	Total of third parties account receivable - Net
Bersih	15.696.940	12.522.120	12.175.023	Net
b. Berdasarkan umur piutang usaha yang belum diturunkan nilainya				b. By age category of trade receivables that are not impaired
Belum ditagih	13.723.754	10.555.430	9.998.973	Not yet billed
Lewat jatuh tempo				Past due
1 s/d 90 hari	1.625.902	1.461.638	1.417.273	1 to 90 days
91 s/d 360 hari	158.821	246.615	511.972	91 to 360 days
Lebih dari 360 hari	188.463	258.437	246.805	More than 360 days
Jumlah	15.696.940	12.522.120	12.175.023	Total
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai				Changes in the allowance for impairment losses
Saldo awal tahun	(388.227)	(356.147)	(330.451)	Balance at beginning of year
Penambahan	(183.000)	(146.295)	(116.820)	Additions
Penghapusan	105.809	114.215	91.124	Write-off
Saldo akhir tahun	(465.418)	(388.227)	(356.147)	Balance at end of year

Piutang usaha Perusahaan, PLN Batam dan PLN Tarakan dijamin dengan uang jaminan pelanggan jika terjadi kegagalan pembayaran (Catatan 34).

Piutang usaha belum ditagih merupakan pemakaian energi listrik (kWh) pada tanggal pelaporan yang akan ditagihkan kepada pelanggan pada periode penagihan berikutnya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk secara kolektif untuk seluruh piutang yang telah lewat jatuh tempo.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang adalah cukup. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang.

The Company, PLN Batam and PLN Tarakan's trade receivables are secured by the customer's security deposit in case of default (Note 34).

Not yet billed receivables represent electricity consumed (kWh) as of reporting date and which will be billed to customers in the next billing period.

Allowance for impairment losses made collectively for all trade receivables which are past due.

Management believes that the allowance for impairment losses are adequate. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in receivables.

Penyajian Kembali

Mulai tahun 2013, Perusahaan telah menerapkan sistem *billing* (AP2T) dan *Enterprise Resource Planning* (SAP) pada seluruh unit penghasil pendapatan. Akibatnya, Perusahaan menemukan bahwa periode sebelumnya jumlah bruto piutang belum ditagih tidak tercatat dengan tepat.

Laporan posisi keuangan tahun 2012 dan 2011 disajikan kembali untuk menyesuaikan perubahan sebagai berikut:

Restatements

In 2013, the Company has implemented standardized billing system (AP2T) and Enterprise Resource Planning (SAP) to all revenue center business units. As a result, the Company noted that the prior periods gross amount of not yet billed receivable were not properly recorded.

The 2012 and 2011 statements of financial position were restated to reflect the following changes:

	31 Desember/*December 31*, 2012			
	Sebelum Penyajian Kembali / *Before Restatement*	Penyesuaian / *Adjustments*	Setelah Penyajian Kembali / *After Restatement*	
ASET				ASSETS
Piutang usaha - bersih	3.851.920	8.670.200	12.522.120	Trade receivable - net
EKUITAS				EQUITY
Saldo laba				Retained earnings
Tidak ditentukan penggunaannya	42.033.417	8.670.200	50.703.617	Unappropriated

	1 Januari/*January 1*, 2012			
	Sebelum Penyajian Kembali / *Before Restatement*	Penyesuaian / *Adjustments*	Setelah Penyajian Kembali / *After Restatement*	
ASET				ASSETS
Piutang usaha - bersih	3.504.823	8.670.200	12.175.023	Trade receivable - net
EKUITAS				EQUITY
Saldo laba				Retained earnings
Tidak ditentukan penggunaannya	45.948.843	8.670.200	54.619.043	Unappropriated

15. PIUTANG SUBSIDI LISTRIK

15. RECEIVABLES ON ELECTRICITY SUBSIDY

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Tahun anggaran				Budget years
2010	-	-	4.506.798	2010
2011	-	7.310.729	7.594.870	2011
2012	-	13.255.055	-	2012
2013 (Catatan 37)	21.793.929	-	-	2013 (Note 37)
Jumlah	21.793.929	20.565.784	12.101.668	Total

Dalam tahun 2013, Perusahaan telah menerima piutang subsidi listrik tahun anggaran 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 13.255.055 juta dan Rp 7.310.729 juta.

Dalam tahun 2012, Perusahaan telah menerima piutang subsidi listrik tahun anggaran 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 284.141 juta dan Rp 4.506.798 juta.

In 2013, the Company collected the receivables on electricity subsidy for budget year 2012 and 2011 amounting to Rp 13,255,055 million and Rp 7,310,729 million, respectively.

In 2012, the Company collected the receivables on electricity subsidy for budget year 2011 and 2010 amounting to Rp 284,141 million and Rp 4,506,798 million, respectively.

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Tidak ada jumlah yang diklasifikasikan sebagai lewat jatuh tempo sehubungan dengan piutang tersebut. Risiko kredit pada piutang subsidi listrik dianggap dapat diabaikan, sebab pihak lawan merupakan Pemerintah Indonesia.

No impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. No amounts in relation to these receivables are classified as past due. The credit risk on receivables on electric subsidy is considered negligible, since the counterparty is the government of Indonesia.

16. PIUTANG LAIN-LAIN / 16. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Uang jaminan langganan	3.272.957	-	-	Customers' security deposits
Karyawan	355.076	362.968	418.951	Employees
Lain-lain	1.301.382	789.210	535.069	Others
Jumlah	4.929.415	1.152.178	954.020	Total
Dikurangi bagian jangka pendek	4.625.113	849.120	598.750	Less current portion
Bagian jangka panjang	304.302	303.058	355.270	Long-term portion

Uang Jaminan Langganan

Uang jaminan langganan merupakan piutang kepada pelanggan yang melakukan penyambungan baru dan perubahan daya sejak 1 Januari 2011 hingga 30 Juni 2013. Pelanggan tersebut tidak dikenakan uang jaminan langganan pada saat melakukan penyambungan baru.

Pada tahun 2013, manajemen menerbitkan peraturan baru yang mensyaratkan uang jaminan langganan sehubungan dengan penyambungan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan mengakui jumlah piutang sebesar Rp 3.272.957 juta dari penerapan peraturan baru tersebut (Catatan 34).

Customer's Security Deposits

Customer's security deposits represent receivable from customers pertaining to new electricity connections and upgrading of electricity power from January 1, 2011 through June 30, 2013. These customers were not assessed with security deposit at the time of connection.

In 2013, the management issued a new regulation requiring customer's deposits for those connections. As of December 31, 2013, the Company recognized total receivable of Rp 3,272,957 million as a result of such new regulation (Note 34).

Karyawan

Piutang karyawan merupakan pinjaman kepemilikan rumah. Pelunasan piutang dilakukan melalui pemotongan gaji.

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Tidak ada jumlah yang diklasifikasikan sebagai lewat jatuh tempo sehubungan dengan piutang tersebut. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa piutang tersebut dapat tertagih.

Employees

Accounts receivable from employees represents housing loans, which are paid monthly through salary deduction.

No impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. No amounts in relation to these receivables are classified as past due. The Company's management considers these receivables to be collectible.

17. PERSEDIAAN / 17. INVENTORIES

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Bahan bakar dan pelumas	6.966.794	9.957.330	9.826.674	Fuel and lubricants
Persediaan umum	2.555.660	3.226.053	2.480.457	General supplies
Switchgear dan jaringan	1.061.564	1.676.485	1.215.829	Switchgear and networking
Alat ukur, pembatas dan kontrol	563.322	1.014.913	1.157.669	Meter recording device and control equipment
Kabel	93.737	476.262	648.125	Wire
Transformator	241.133	547.406	456.128	Transformers
Jumlah	11.482.210	16.898.449	15.784.882	Total
Penyisihan penurunan nilai	(138.746)	(160.003)	(130.777)	Allowance for decline in value
Bersih	11.343.464	16.738.446	15.654.105	Net
Mutasi penyisihan penurunan nilai				Changes in allowance for decline in value
Saldo awal tahun	(160.003)	(130.777)	(98.898)	Balance at beginning of year
Pemulihan (penambahan)	21.257	(29.226)	(31.879)	Recovery (additions)
Saldo akhir tahun	(138.746)	(160.003)	(130.777)	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan.

Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan.

Management believes that allowance is adequate to cover possible losses on decline in value of inventories.

The Company and its subsidiaries do not have any insurance coverage to cover the possible losses in inventories.

18. PAJAK DIBAYAR DIMUKA / 18. PREPAID TAXES

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Pajak penghasilan badan lebih bayar (Catatan 47)				Overpayment of corporate income tax (Note 47)
Perusahaan				The Company
2013	1.998.693	-	-	2013
2012	130.775	130.775	-	2012
2011	-	102.635	102.635	2011
2010	-	95.370	95.370	2010
Entitas anak				Subsidiaries
2013	79.484	-	-	2013
2012	12.211	19.751	-	2012
2011	-	2.742	13.398	2011
2010	-	-	474	2010
2009	-	-	376	2009
Pajak pertambahan nilai	180.963	79.353	117.365	Value added tax
Pembayaran dimuka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Catatan 47)	1.994.986	2.131.449	2.067.372	Prepayment of Tax Assessment Letter for Underpayment (Note 47)
Jumlah	4.397.112	2.562.075	2.396.990	Total

19. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA

19. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Biaya dibayar dimuka				Prepaid expenses
Premi asuransi	147.559	72.485	98.613	Insurance
Sewa	15.627	5.794	16.554	Lease
Gaji dan tunjangan	357.378	344.684	378.939	Salaries and allowances
Lain-lain	193.682	72.458	154.244	Others
Sub jumlah	714.246	495.421	648.350	Subtotal
Uang muka				Advances
Pembelian barang	122.369	108.449	12.100	Purchases
Lain-lain	476.310	422.210	543.943	Others
Sub jumlah	598.679	530.659	556.043	Subtotal
Jumlah	1.312.925	1.026.080	1.204.393	Total

20. MODAL SAHAM

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar Rp 63.000.000 juta yang terbagi atas 63.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2001, sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 43 tanggal 26 Oktober 2001 dari Haryanto S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui antara lain :

- Melakukan konversi utang Perusahaan kepada Pemerintah sebesar Rp 28.781.355 juta yang berasal dari tunggakan bunga dan denda penerusan pinjaman menjadi tambahan penyertaan modal Pemerintah. Konversi utang menjadi penyertaan modal telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai surat No. S-352/MK.06/2001 tanggal 20 Juni 2001.

- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 28.781.354 juta, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp 46.107.154 juta, terbagi atas 46.107.154 saham dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham.

Pada tanggal 1 Agustus 2001, tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2001.

20. CAPITAL STOCK

The Company's shares of stock are wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia.

The Company has authorized capital of Rp 63,000,000 million consisting of 63,000,000 shares, with par value of Rp 1 million per share.

Based on The Extraordinary Stockholders' General Meeting dated July 18, 2001, as stated in Deed No. 43 dated October 26, 2001 of Haryanto, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved to :

- Convert the Company's payable to Government of Rp 28,781,355 million, which arose from overdue interest and penalty on two-step loans, into Government Equity Participation. The conversion was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No. S-352/MK.06/2001 dated June 20, 2001.

- Increase the subscribed and paid-up capital by Rp 28,781,354 million, resulting to the Company's total subscribed and paid-up capital of Rp 46,107,154 million consisting of 46,107,154 shares with par value of Rp 1 million per share.

On August 1, 2001, the Government issued Government Regulation No. 61 year 2001 in relation to the increase in Government equity participation in the Company.

Pada tanggal 4 Maret 2011, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2011 sehubungan dengan tambahan penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan sebanyak 90.226 saham atau sebesar Rp 90.226 juta. Tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh saham milik Pemerintah pada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Berdasarkan keputusan pemegang saham Perusahaan diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. KEP-118/MBU/2011 tanggal 27 Mei 2011, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No. 4 tanggal 5 Agustus 2011 dari Lenny Janis Ishak S.H., notaris di Jakarta pemegang saham menyetujui pengeluaran saham baru Perusahaan untuk diambil bagian oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp 90.226 juta atau sebanyak 90.226 saham. Penambahan penerbitan saham kepada Pemerintah Republik Indonesia berasal dari pengalihan 21.674 saham milik Pemerintah Republik Indonesia pada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna kepada Perusahaan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta pengalihan saham PT Pelayaran Bahtera Adhiguna dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan.

On March 4, 2011, the Government of Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 20 year 2011 related to the increase of the Governments equity participation in the Company, consisting of 90,226 shares or an equivalent of Rp 90,226 million. The increase in Governments equity participation in the Company is through the transfer of Government's right on PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Based on the decision of the Company's shareholders outside the General Shareholders Meeting No. KEP-118/MBU/2011, dated on May 27, 2011, as stated in Deed No. 4, dated August 5, 2011 of Lenny Janis Ishak S.H., the stockholders approved the new issuance of the Company's shares of stocks to Government of Republic of Indonesia in the amount of Rp 90,226 million, equivalent to 90,226 shares. The additional issuance of share to Government of Republic of Indonesia is for the planned transfer of 21,674 shares of the Government of Republic of Indonesia in PT Pelayaran Bahtera Adhiguna to the Company. The Decision will be effective upon the approval date of Deed of Transfer of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna shares from the Government of Republic of Indonesia to the Company.

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah yang diterima Perusahaan yang statusnya belum ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital represents Government's additional equity participation received by the Company of which the status has not been determined yet, with details as follows :

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Bantuan proyek	16.706.712	16.706.712	16.706.712	Project aid
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	31.955.283	27.002.509	22.141.480	List of project fund
Bantuan Pemerintah Daerah dan lainnya	1.239.409	1.221.124	1.202.016	Regional Government participation and others
Jumlah	49.901.404	44.930.345	40.050.208	Total

Bantuan proyek merupakan bantuan luar negeri untuk bidang kelistrikan yang diteruskan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan penerimaan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk proyek kelistrikan melalui Departemen Pertambangan dan Energi.

Project aid represents overseas aid for electricity project, which was directed by the Government of the Republic of Indonesia to the Company.

List of Project Fund (DIPA) represents electricity projects received from the Government of the Republic of Indonesia through the Department of Mining and Energy.

Bantuan Pemerintah Daerah antara lain berupa tanah dan jaringan listrik yang disumbangkan kepada Perusahaan.

Jumlah yang diakui sebagai penambahan Tambahan Modal Disetor tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 4.971.059 juta dan Rp 4.880.137 juta.

Regional Government participation represents land and electricity equipment donated by the Regional Government to the Company.

Total amount recognized as an addition to Additional Paid-In Capital in 2013 and 2012 amounted to Rp 4,971,059 million and Rp 4,880,137 million, respectively.

22. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan yang mana jasa penyambungannya belum diselesaikan oleh Perusahaan dan entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

22. DEFERRED REVENUE

This account represents connection fees received from customers for which the connection service have not been completed by the Company and its subsidiaries, with details as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2013 *)	31 Desember/ *December 31,* 2012 *)	1 Januari/ *January 1,* 2012 *)	
Saldo awal tahun	873.230	680.996	332.605	Balance at beginning of year
Penerimaan tahun berjalan	6.145.482	5.947.252	5.470.500	Additions during the year
Diakui sebagai pendapatan tahun berjalan	(6.027.799)	(5.755.017)	(5.122.109)	Recognized as revenue during the year
Saldo akhir tahun	990.913	873.231	680.996	Balance at end of year

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*) As restated - Note 56

23. PENERUSAN PINJAMAN

Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perusahaan untuk membiayai proyek-proyek Perusahaan. Rincian penerusan pinjaman adalah sebagai berikut :

23. TWO-STEP LOANS

This account represents overseas, collateral-free loans of the Government of the Republic of Indonesia which are re-loaned to the Company to finance its projects. The details of two-step loans are as follows :

	31 Desember/*December 31*, 2013					
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Jumlah/ *Amount*	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturities*	Bagian jangka panjang/ *Long-term portion*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum* %	Periode/ *Period **)* Tahun/Year
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)						
US$						
IBRD - 3761 IND - 773	20.372.558	248.321	248.321	-	IBRD + 0,5%	1995 - 2014
IBRD - 3845 IND - 812	23.535.127	286.869	191.246	95.623	IBRD + 0,5%	1995 - 2015
IBRD - 3978 IND - 893	26.704.562	325.502	162.751	162.751	IBRD + 0,5%	1996 - 2015
IBRD - 4712 & 7758 IND - 1165	82.718.968	1.008.261	106.502	901.759	IBRD + 0,5%	2004 - 2023
IBRD - 7905 IND - 1235	18.718.505	228.160	-	228.160	IBRD + 0,5%	2010 - 2034
IBRD - 7940 IND - 1238	27.335.866	333.197	-	333.197	IBRD + 0,5%	2011 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	3.310.408	40.351	-	40.351	IBRD + 0,5%	2012 - 2035
Asian Development Bank (ADB)						
Rupiah						
ADB - 1032 INO - 540	-	234.078	70.548	163.530	ADB + (1% - 3,75%)	1991 - 2016
ADB - 1092 INO - 580	-	89.588	29.863	59.725	ADB + (1% - 3,75%)	1991 - 2016
US$						
ADB - 1320 INO - 795	16.744.314	204.096	204.096	-	ADB + 0,5%	1996 - 2014
ADB - 1397 INO - 878	26.309.496	320.686	152.525	168.161	ADB + 0,5%	1995 - 2015
ADB - 1982 INO - 1170	138.621.818	1.689.661	54.013	1.635.648	ADB + 0,5%	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	92.067.756	1.122.214	31.418	1.090.796	ADB + 0,5%	2004 - 2027
ADB - 2619 INO - 1236	18.246.513	222.407	-	222.407	ADB + 0,5%	2010 - 2035
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KFW)						
Rupiah						
KFW - 92.65.315 - 749	-	4.728	4.728	-	7,6% - 13,1%	1993 - 2014
KFW - 92.66.107 - 748	-	6.823	6.823	-	7,6% - 13,1%	1993 - 2014
KFW - 92.66.115 - 747	-	1.140	1.140	-	7,6% - 13,1%	1993 - 2014
EUR						
KFW - 95.65.136 - 934a	7.573.607	127.399	18.200	109.199	1,25% - 5,36% dan/and KFW + 0,5%	1996 - 2020
KFW - 9024 - 1157	8.999.806	151.389	50.463	100.926	1,25% - 5,36% dan/and KFW + 0,5%	2002 - 2016
KFW - 10599 IND - 1179	10.599.257	178.295	39.621	138.674	1,25% - 5,36% dan/and KFW + 0,5%	2003 - 2018
US$						
KFW - 10598 IND - 1183	7.694.616	93.790	26.797	66.993	4,75% + 0,5%	2004 - 2017
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)						
JPY						
JBIC IP 512 - 1163	52.829.760.000	6.137.170	306.859	5.830.311	1,25% - 4,46%	2004 - 2033
JBIC IP 513 - 1164	16.123.480.000	1.873.046	93.653	1.779.393	1,25% - 4,46%	2004 - 2033
JBIC IP 515 - 1177	56.133.138.186	6.520.919	318.094	6.202.825	1,25% - 4,46%	2004 - 2034
JBIC IP 516 - 1196	558.369.285	64.865	2.131	62.734	1,25% - 4,46%	2005 - 2044
JBIC IP 517 - 1178	4.517.356.107	524.776	-	524.776	1,25% - 4,46%	2004 - 2044
JBIC IP 518 - 1187	1.376.578.854	159.916	29.076	130.840	1,25% - 4,46%	2004 - 2019
JBIC IP 525 - 1197	16.033.188.454	1.862.556	-	1.862.556	1,25% - 4,46%	2005 - 2045
JBIC IP 526 - 1198	677.399.208	78.693	-	78.693	1,25% - 4,46%	2005 - 2045
JBIC IP 527 - 1211	8.503.377.874	987.827	-	987.827	1,25% - 4,46%	2007 - 2037
JBIC IP 532 - 1214	958.463.273	111.344	-	111.344	1,25% - 4,46%	2006 - 2047
JBIC IP 537 - 1220	224.798.026	26.115	-	26.115	1,25% - 4,46%	2009 - 2037
JBIC IP 538 - 1221	6.847.007.330	795.409	-	795.409	1,25% - 4,46%	2009 - 2047
JBIC IP 539 - 1222	1.840.163.510	213.770	-	213.770	1,25% - 4,46%	2009 - 2037
JBIC IP 555 - 1231	1.043.957.697	121.275	-	121.275	1,25% - 4,46%	2010 - 2039
JBIC IP xxx - 1188	621.756.443	72.229	14.446	57.783	1,25% - 4,46%	2005 - 2018
JBIC IP xxx - 1192	8.335.886.095	968.370	215.193	753.177	1,25% - 4,46%	2005 - 2018
JBIC LA No 1 - 1216	6.641.289.524	771.511	122.608	648.903	1,25% - 4,46%	2008 - 2020
JBIC LA No 2 - 1219	2.326.913.104	270.314	55.020	215.294	1,25% - 4,46%	2008 - 2018
JBIC LA No 3 - 1233	980.359.547	113.887	18.930	94.957	1,25% - 4,46%	2010 - 2020
JBIC LA No 4 - 1234	3.101.925.100	360.347	61.075	299.272	1,25% - 4,46%	2010 - 2020
JBIC LA No 5 - 1218	5.073.698.318	589.405	84.769	504.636	1,25% - 4,46%	2008 - 2020
JBIC IP - 1243	1.991.426.200	231.342	-	231.342	3,36%	2012 - 2022
Midland Bank Public Limited Company						
Midland Bank - 798	-	104.555	14.936	89.619	SBI + 1%	1995 - 2020
Midland Bank - 818	-	8.917	1.372	7.545	SBI + 1%	1995 - 2020
Banque Paribas						
Banque Paribas 1063- GBP	9.109.046	183.061	20.340	162.721	3,84%	1998 - 2022
EUR						
Banque Paribas - 1158	18.369.755	309.006	67.554	241.452	5,26%-6,39%	2002 - 2018
Banque Paribas - 1176	7.810.261	131.380	29.196	102.184	5,26%-6,39%	2004 - 2018
Calyon and BNP Paribas						
EUR						
Calyon BNP Paribas - 1175	3.355.052	56.436	11.287	45.149	5,26%-6,39%	2004 - 2018
BNP Paribas & Calyon 1206	33.428.444	562.315	86.489	475.826	5,26%-6,39%	2006 - 2020
Fortis Bank Belgia -1186 EUR	1.094.220	18.406	5.259	13.147	5,32%	2005 - 2017
AG Francaise 101901F - 1237 - US$	18.305.418	223.125	-	223.125	AFD + 0.47%+0.5%	2010 - 2025
Efic Australia - AUD 1071 - US$	12.261.639	133.353	15.688	117.665	4%	1997 - 2022
China Exim Bank 1181 - US$	92.874.698	1.132.049	226.409	905.640	3% + 0,5%	2003 - 2018
MKB Hungaria 1180 - US$	2.821.968	34.397	7.644	26.753	4,81% + 0,5%	2005 - 2018
Kerajaan Belgia - 1185 - EUR	2.259.177	38.002	1.900	36.102	0,5%	2005 - 2033
Jumlah/*Total*		32.707.043	3.208.983	29.498.060		

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*
**) Termasuk masa tenggang pembayaran/*Include grace periods in terms of payments*

	31 Desember/*December 31,2012*					
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Jumlah/ *Amount*	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturities*	Bagian jangka panjang/ *Long-term portion*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum* %	Periode/ *Period **)* Tahun/Year
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)						
Rupiah						
IBRD 3602-IND	-	30.530	30.530	-	IBRD + APRS + 1%	1994 - 2013
US$						
IBRD 3761-IND	39.338.952	380.408	183.405	197.003	IBRD + 0,5%	1995 - 2014
IBRD 3845-IND	39.225.211	379.308	151.723	227.585	IBRD + 0,5%	1995 - 2015
IBRD 3978-IND	40.056.843	387.350	129.117	258.233	IBRD + 0,5%	1996 - 2015
IBRD 4712-IND & IBRD 7758 SLA 1165a	86.732.971	838.708	83.012	755.696	IBRD + 0,5%	2004 - 2023
IBRD - 7905 IND - 1235	11.642.362	112.582	-	112.582	IBRD + 0,5%	2010 - 2034
IBRD - 7940 IND - 1238	866.596	8.380	-	8.380	IBRD + 0,5%	2011 - 2034
IBRD 8057 IND - 1244	2.053.967	19.862	-	19.862	IBRD + 0,5%	2012 - 2035
Asian Development Bank (ADB)						
Rupiah						
ADB 1032-INO	-	298.066	63.989	234.078	ADB + 2,75%	1991 - 2016
ADB 1092-INO-BNI	-	119.451	29.863	89.588	ADB + 3,75%	1991 - 2016
ADB 1271-INO	-	36.700	36.700	-	ADB + APRS + 1%	1994 - 2013
US$						
ADB 1320-INO	31.931.944	308.782	146.864	161.918	ADB + 0,5%	1996 - 2014
ADB 1397-INO	37.659.654	364.169	109.756	254.413	ADB + 0,5%	1995 - 2015
ADB 1982-INO-1170	119.034.861	1.151.067	35.589	1.115.478	ADB + 0,5%	2004 - 2027
ADB 1983-INO-1171	76.334.458	738.154	22.823	715.331	ADB + 0,5%	2004 - 2027
ADB - 2619 INO - 1236	1.475.298	14.266	-	14.266	ADB + 0,5%	2010 - 2035
Kreditantstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KFW)						
Rupiah						
KFW - 92.65.042 - 746	-	3.839	3.839	-	7,2% + APRS + 1%	1993 - 2013
KFW - 92.65.315 - 749	-	14.185	9.457	4.728	6,8% + APRS + 1%	1993 - 2014
KFW - 92.66.107 - 748	-	20.469	13.646	6.823	7,2% + APRS + 1%	1993 - 2014
KFW - 92.66.115 - 747	-	3.419	2.279	1.140	6,9% + APRS + 1%	1993 - 2014
EUR						
KFW - 95.65.136 - 934a	8.655.550	110.877	13.860	97.017	1,25% - 2,5% dan/*and* KFW + 0,5%	1996 - 2020
KFW - 9024 - 1157	11.999.742	153.715	38.429	115.286	4,43+0,5 dan/*and* KFW + 0,5%	2002 - 2016
KFW - 10599 IND - 1179	12.954.647	165.947	30.172	135.775	4,86% + 0,5%	2003 - 2018
US$						
KFW - 10598 IND - 1183	9.893.078	95.666	21.259	74.407	4,75% + 0,5%	2004 - 2017
Japan Bank for International Coorperation (d/h The Export-Import Bank Of Japan)						
JPY						
JBIC IP 512 - 1163	53.309.559.742	5.968.901	145.583	5.823.318	1,8% + 0,5%	2004 - 2033
JBIC IP 513 - 1164	16.189.598.046	1.812.697	44.212	1.768.485	1,8% + 0,5%	2004 - 2033
JBIC IP 515 - 1177	55.356.557.847	6.198.097	-	6.198.097	1,3% + 0,5%	2004 - 2034
JBIC IP 517 - 1178	4.517.356.107	505.794	-	505.794	0,75% + 0,5%	2004 - 2044
JBIC IP 518 - 1187	1.626.865.918	182.155	28.024	154.131	4% + 0,5%	2004 - 2019
JBIC IP xxx - 1188	746.107.733	83.539	13.923	69.616	4,02% + 0,5 %	2005 - 2018
JBIC IP xxx - 1192	10.188.305.225	1.140.752	207.409	933.342	4,47%+0,5%	2005 - 2018
JBIC IP 516 - 1196	529.071.189	59.238	-	59.238	0,75% + 0,5%	2005 - 2044
JBIC IP 525 - 1197	14.763.270.256	1.652.996	-	1.652.996	0,75% + 0,5%	2005 - 2045
JBIC IP 526 - 1198	677.399.208	75.846	-	75.846	0,75% + 0,5%	2005 - 2045
JBIC IP 527 - 1211	6.725.524.842	753.035	-	753.035	1,8%	2007 - 2037
JBIC IP 532 - 1214	855.587.272	95.797	-	95.797	1,25%	2006 - 2047
JBIC LA No 1 - 1216	7.696.715.524	861.777	118.173	743.604	4,46%	2008 - 2020
JBIC LA No 5 - 1218	5.793.720.599	648.704	81.702	567.002	4,03%	2008 - 2020
JBIC LA No 2 - 1219	2.800.537.104	313.567	53.030	260.537	3,95%	2008 - 2018
JBIC IP 537 - 1220	189.997.240	21.273	-	21.273	2,00%	2009 - 2037
JBIC IP 538 - 1221	3.653.833.948	409.108	-	409.108	1,25%	2009 - 2047
JBIC IP 539 - 1222	216.084.710	24.194	-	24.194	2,00%	2009 - 2037
JBIC IP 555 - 1231	746.544.286	83.588	-	83.588	0,012%	2010 - 2039
JBIC LA No 3 - 1233	1.089.695.794	122.010	18.246	103.764	3,96%	2010 - 2020
JBIC LA No 4 - 1234	2.656.340.222	297.422	58.866	238.556	3,79%	2010 - 2020
Midland Bank Public Limited Company						
Rupiah						
Midland Bank (SLA 798)	-	119.491	14.936	104.555	SBI + 1%	1995 - 2020
Midland Bank PLC (SLA 818)	-	10.289	1.372	8.917	SBI + 1%	1995 - 2020
Banque Paribas						
GBP						
Banque Paribas - 1063	10.121.163	157.675	15.767	141.909	3,343% + 0,5%	1998 - 2022
EUR						
Banque Paribas - 1158	22.385.703	286.758	51.444	235.314	5,26% - 6,39%	2002 - 2018
Banque Paribas - 1176	9.545.875	122.281	22.233	100.048	4,76% + 0,5%	2004 - 2018
BNP Paribas & Calyon 1206	38.571.281	494.093	65.863	428.230	4,46% + 0,5%	2006 - 2020
Calyon BNP Paribas - 1175	4.026.062	51.573	8.595	42.978	5,32% + 0,5%	2004 - 2018
China Exim Bank - 1181 - US$	111.449.637	1.077.718	179.620	898.098	3% + 0,5%	2003 - 2018
MKB Hungaria - 1180 - US$	3.449.072	33.353	6.064	27.288	4,81% + 0,5%	2005 - 2018
Efic Australia 1071 - AUD	13.704.185	137.390	14.462	122.928	3,5% + 0,5%	1997 - 2022
Fortis Bank Belgia - 1186 - EUR	1.406.855	18.022	4.005	14.017	4,82% + 0,5%	2005 - 2017
Kerajaan Belgia - 1185 - EUR	2.259.177	28.940	-	28.940	0% + 0,5%	2005 - 2033
Jumlah/*Total*		29.603.973	2.309.841	27.294.132		

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*
**) Termasuk masa tenggang pembayaran/*Include grace periods in terms of payments*

	1 Januari/January *1*, 2012					
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Jumlah/ *Amount*	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturities*	Bagian jangka panjang/ *Long-term portion*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum* %	Periode/ *Period **)* Tahun/Year
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)						
Rupiah						
IBRD 3501-IND	-	103.468	103.468	-	IBRD + APRS+ 0,75%	1992 - 2012
IBRD 3602-IND	-	58.935	28.405	30.530	IBRD + APRS+ 1%	1994 - 2013
US$						
IBRD 3761-IND	56.999.893	516.875	160.149	356.726	IBRD + 0,5%	1995 - 2014
IBRD 3845-IND	54.915.295	497.972	142.278	355.694	IBRD + 0,5%	1995 - 2015
IBRD 3978-IND	53.409.124	484.314	121.078	363.235	IBRD + 0,5%	1996 - 2015
IBRD 4712-IND & IBRD 7785 SLA 1165a	95.073.558	862.127	76.455	785.672	IBRD + 0,5%	2004 - 2023
Asian Development Bank (ADB)						
Rupiah						
ADB 1032-INO	-	356.106	58.040	298.066	ADB + 2,75%	1991 - 2016
ADB 1092-INO-BNI	-	149.313	29.863	119.450	ADB + 3,75%	1991 - 2016
ADB 1172-INO	-	132.313	132.313	-	ADB + APRS+ 1%	1993 - 2012
ADB 1271-INO	-	69.988	69.988	-	ADB + APRS+ 1%	1994 - 2013
US$						
ADB 1320-INO	45.707.603	414.477	124.918	289.559	ADB + 0,5%	1996 - 2014
ADB 1397-INO	47.954.395	434.850	93.353	341.498	ADB + 0,5%	1995 - 2015
ADB 1982-INO-1170	110.727.407	1.004.076	27.258	976.818	ADB + 0,5%	2004 - 2027
ADB 1983-INO-1171	71.459.162	647.992	17.591	630.400	ADB + 0,5%	2004 - 2027
Kreditantstalt Fur Wiederaufbau, German (KFW)						
Rupiah						
KFW - 90.65.566 - 586	-	9.975	9.975	-	9%	1991 - 2012
KFW - 92.65.042 - 746	-	7.679	3.839	3.840	7,2% + APRS + 1%	1993 - 2013
KFW - 92.65.315 - 749	-	23.642	9.457	14.185	6,8% + APRS + 1%	1993 - 2014
KFW - 92.66.107 - 748	-	34.115	13.646	20.469	7,2% + APRS + 1%	1993 - 2014
KFW - 92.66.115 - 747	-	5.698	2.279	3.419	6,9% + APRS + 1%	1993 - 2014
EUR						
KFW - 10599 IND - 1179	15.310.038	179.724	27.650	152.074	4,86% + 0,5%	2003 - 2018
KFW - 95.65.136 - 934a	9.737.490	114.308	12.701	101.607	1,25% - 2,5% dan/*and* KFW + 0,5%	1996 - 2020
KFW - 9024 - 1157	14.999.677	176.081	35.216	140.865	4,43+0,5 dan/*and* KFW + 0,5%	2002 - 2016
US$						
KFW - 10598 IND - 1183	12.091.540	109.646	19.936	89.710	4,75% + 0,5%	2004 - 2017
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank Of Japan)						
JPY						
JBIC IP 512 - 1163	51.115.098.684	5.970.408	-	5.970.408	1,8% + 0,5%	2004 - 2033
JBIC IP 513 - 1164	15.427.280.771	1.801.956	-	1.801.956	1,8% + 0,5%	2004 - 2033
JBIC IP 515 - 1177	51.950.313.812	6.067.963	-	6.067.963	1,3% + 0,5%	2004 - 2034
JBIC IP 517 - 1178	4.517.356.107	527.642	-	527.642	0,75% + 0,5%	2004 - 2044
JBIC IP 518 - 1187	1.877.152.982	219.257	29.234	190.023	4% + 0,5%	2004 - 2019
JBIC IP xxx - 1188	870.459.023	101.672	14.525	87.148	4,02% + 0,5 %	2005 - 2018
JBIC IP xxx - 1192	12.040.724.355	1.406.395	216.369	1.190.027	4,47%+0,5%	2005 - 2018
JBIC IP 516 - 1196	529.071.189	61.797	-	61.797	0,75% + 0,5%	2005 - 2044
JBIC IP 525 - 1197	8.817.055.575	1.029.860	-	1.029.860	0,75% + 0,5%	2005 - 2045
JBIC IP 526 - 1198	677.399.208	79.122	-	79.122	0,75% + 0,5%	2005 - 2045
JBIC IP 527 - 1211	2.882.192.635	336.649	-	336.649	1,8%	2007 - 2037
JBIC IP 532 - 1214	674.473.888	78.781	-	78.781	1,25%	2006 - 2047
JBIC LA No 1 - 1216	8.752.141.524	1.022.278	123.277	899.001	4,46%	2008 - 2020
JBIC LA No 5 - 1218	6.185.646.260	722.503	110.330	612.173	4,03%	2008 - 2020
JBIC LA No 2 - 1219	2.995.777.249	349.916	55.321	294.596	3,95%	2008 - 2018
JBIC IP 537 - 1220	150.524.230	17.582	-	17.582	2,00%	2009 - 2037
JBIC IP 538 - 1221	2.403.734.456	280.764	-	280.764	1,25%	2009 - 2047
JBIC IP 539 - 1222	140.696.705	16.434	-	16.434	2,00%	2009 - 2037
JBIC IP 555 - 1231	520.949.802	60.849	-	60.849	0,012%	2010 - 2039
JBIC LA No 3 - 1233	7.687.217	898	56	842	3,96%	2010 - 2020
JBIC LA No 4 - 1234	20.602.249	2.406	150	2.256	3,79%	2010 - 2020
Midland Bank Public Limited Company						
Rupiah						
Midland Bank (SLA 798)	-	134.428	14.936	119.491	SBI + 1%	1995 - 2020
Midland Bank PLC (SLA 818)	-	11.661	1.372	10.289	SBI + 1%	1995 - 2020
Banque Paribas						
GBP						
Banque Paribas - 1063	11.133.279	155.524	14.139	141.385	3,343% + 0,5%	1998 - 2022
EUR						
Banque Paribas - 1158	26.401.651	309.929	47.143	262.786	5,26% - 6,39%	2002 - 2018
Banque Paribas - 1176	11.281.488	132.433	20.374	112.059	4,76% + 0,5%	2004 - 2018
Calyon BNP Paribas - 1175	4.697.072	55.139	7.877	47.262	5,32% + 0,5%	2004 - 2018
BNP Paribas & Calyon 1206	43.703.419	513.034	60.357	452.677	4,46% + 0,5%	2006 - 2020
Bank Austria Aktiengesellschaft						
EUR						
Bank Austria (SLA 906)	527.491	6.192	6.192	-	3.5 + 0.5 %	1995 - 2012
Bank Austria (SLA 917)	284.350	3.338	3.338	-	3.5 + 0.5 %	1996 - 2012
China Exim Bank - 1181 - US$	130.024.577	1.179.063	168.438	1.010.625	3% + 0,5%	2003 - 2018
Islamic Development Bank - 1173 - US$	55.833	506	506	-	8%+0.5%	2004 - 2012
MKB Hungaria - 1180 - US$	4.076.176	36.963	5.687	31.276	4,81% + 0,5%	2005 - 2018
Efic Australia - 1071 - AUD	15.146.731	139.391	13.275	126.115	3,5% + 0,5%	1997 - 2022
Fortis Bank Belgia - 1186 - EUR	1.719.490	20.185	3.670	16.515	4,82% + 0,5%	2005 - 2017
Kerajaan Belgia - 1185 - EUR	2.259.177	26.520	-	26.520	0% + 0,5%	2005 - 2033
Jumlah/*Total*		29.273.112	2.236.422	27.036.690		

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*
**) Termasuk masa tenggang pembayaran/*Include grace periods in terms of payments*

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga penerusan pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian penerusan pinjaman.

The Company made payments on principal and interest on two-step loans in accordance with the schedule of payment and complied with the restrictions specified within the agreements of two-step loans.

Rincian penerusan pinjaman dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of two-step loans in foreign currencies are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2013		31 Desember/*December 31,* 2012		1 Januari/*January 1,* 2012		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
US$	616.382.591	7.513.087	611.144.904	5.909.771	682.494.562	6.188.861	US$
JPY	196.740.292.135	22.855.084	190.328.672.812	21.310.492	172.556.337.921	20.155.132	JPY
EUR	93.489.580	1.572.629	111.804.893	1.432.205	130.921.343	1.536.884	EUR
Lain-lain **)	25.959.020	316.414	30.513.537	295.066	32.522.530	294.915	Others **)
Jumlah		32.257.215		28.947.535		28.175.792	Total

*) Dalam jumlah penuh
**) Penerusan pinjaman dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) In full amount
**) Two-step loans denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at reporting date

24. UTANG KEPADA PEMERINTAH

24. GOVERNMENT LOANS

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001	1.761.668	1.969.249	2.168.501	Investment Fund Account No. RDI-393/DP3/2001
Pusat Investasi Pemerintah	7.110.841	7.072.587	4.194.689	Government Investment Center
Jumlah	8.872.509	9.041.836	6.363.190	Total
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	293.793	334.010	346.372	Less current maturities
Bagian jangka panjang	8.578.716	8.707.826	6.016.818	Long-term portion

Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001

Investment Fund Account No. RDI-393/DP3/2001

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Pokok pinjaman	2.056.548	2.350.341	2.644.134	Principal
Bunga masih harus dibayar	35.190	40.217	45.244	Accrued interest
Perbedaan nilai wajar - bersih	(330.070)	(421.309)	(520.877)	Fair value difference - net
Jumlah	1.761.668	1.969.249	2.168.501	Total

Pada tanggal 20 Juni 2000, Perusahaan dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui restrukturisasi tunggakan angsuran pokok penerusan pinjaman sebesar Rp 5.288.268 juta sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-352/MK.06/2001 menjadi pinjaman berjangka waktu 20 tahun termasuk tenggang waktu 2 tahun. Pinjaman ini dikenakan bunga 4% per tahun dan tanpa jaminan. Pinjaman ini dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp 146.896 juta sampai dengan 30 Juli 2021.

On June 20, 2000, the Company and the Government of the Republic of Indonesia agreed to restructure the overdue principal of two-step loans amounting to Rp 5,288,268 million as stated on the letter of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-352/MK.06/2001. The loan is unsecured, has a period of 20 years, including 2 years grace period and bears interest at 4% per annum. The loan will be paid in semi-annual installment of Rp 146,896 million until July 30, 2021.

Pusat Investasi Pemerintah / **Government Investment Center**

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Pokok pinjaman	7.500.000	7.500.000	4.499.977	Principal
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(37.745)	(41.351)	(27.000)	Unamortized transaction cost
Perbedaan nilai wajar - bersih	(351.414)	(386.062)	(278.288)	Fair value difference - net
Jumlah	7.110.841	7.072.587	4.194.689	Total

Pada tanggal 13 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp 7.500.000 juta, dengan tingkat bunga 5,25% per tahun berjangka waktu 15 tahun termasuk tenggang waktu 5 tahun.

On December 13, 2011, the Company obtained soft loan facility from Government Investment Center under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia amounting to Rp 7,500,000 million, with annual interest rate of 5.25% and term of 15 years including 5 years grace period.

Pinjaman ini digunakan untuk pengadaan dan penggantian trafo, penguatan instalasi, transmisi dan distribusi serta investasi lainnya.

This loan was used to finance the procurement and replacement of transformers, strengthening of the installation, transmission and distribution and also others capital expenditures.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga tidak kurang dari 1,5 : 1.

In relation to these loan facility, the Company is required to maintain ratio of EBITDA to interest expense at a minimum of 1.5 : 1.

Utang kepada Pemerintah berdasarkan jadwal pembayaran pokok, adalah sebagai berikut :

Government loans by installment schedules, at nominal amount, are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Dibayarkan:				Payable to:
Dalam satu tahun	293.793	293.793	293.793	Within one year
Pada tahun kedua	293.793	293.793	293.793	In the second year
Pada tahun ketiga	293.793	293.793	293.793	In the third year
Pada tahun keempat	293.793	293.793	293.793	In the fourth year
Setelah lima tahun	8.381.376	8.675.169	5.968.939	After five years
Jumlah	9.556.548	9.850.341	7.144.111	Total

25. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Akun ini merupakan utang kepada IPP terkait PPA dan ESC yang telah diklasifikasikan ke dalam sewa pembiayaan sebagai akibat penerapan ISAK 8 (Catatan 2). Akun ini juga termasuk utang kepada PT Central Java Power (CJP) dalam rangka perjanjian sewa pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik 4 x 660 MW Tanjung Jati B Unit A, B, C dan D.

Nilai tunai pembayaran minimum atas utang sewa pembiayaan tersebut pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

25. LEASE LIABILITIES

This account represents payable to certain IPPs in relation to PPAs and ESCs that have been classified as finance lease as a result of adoption of ISAK 8 (Note 2). This account also includes payable to PT Central Java Power (CJP) in relation to Financial Lease Agreement on the acquisition of Tanjung Jati B Unit A, B, C and D power plant 4 x 660 MW.

Present value of minimum lease payments for such lease liabilities as of December 31, 2013 and 2012 and January 1, 2012 are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
a. Berdasarkan jatuh tempo				a. By due date
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu :				Minimum lease payments due :
Tidak lebih dari 1 tahun	25.647.864	20.398.632	14.448.606	Not later than 1 year
Antara lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun	104.163.013	86.639.804	60.165.696	Later than 1 year and not later than 5 years
Lebih dari 5 tahun	305.507.698	252.381.736	187.150.602	Later than 5 years
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	435.318.575	359.420.172	261.764.904	Total minimum lease payments
Dikurangi bunga	300.698.555	248.111.111	181.270.507	Less interest
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	134.620.020	111.309.061	80.494.397	Present value of future minimum lease payments
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	4.901.469	3.699.829	2.803.911	Less current maturity
Bagian jangka panjang	129.718.551	107.609.232	77.690.486	Long-term portion

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
b. Berdasarkan lessor:				b. By lessor
Pihak berelasi				Related parties
PT Sumber Segara Primadaya - US$	6.507.209	5.168.889	4.851.246	PT Sumber Segara Primadaya - US$
PT Bajradaya Sentranusa Asahan - US$	4.227.536	3.367.260	3.166.941	PT Bajradaya Sentranusa Asahan - US$
PT Tanjung Kasam Power - Rupiah	1.204.081	1.212.730	-	PT Tanjung Kasam Power - Rupiah
PT Dalle Energy Batam - Rupiah	734.065	752.967	859.683	PT Dalle Energy Batam - Rupiah
PT Wijaya Karya - Navigat - Rupiah	656.535	724.902	-	PT Wijaya Karya - Navigat - Rupiah
PT Pertamina Geothermal Energi (The Kamojang) - US$	858.225	687.991	651.655	PT Pertamina Geothermal Energi (The Kamojang) - US$
PT Wijaya Karya - Mirlindo Pandu Kencana				PT Wijaya Karya - Mirlindo Pandu Kencana
US$	323.789	289.417	298.330	US$
Rupiah	140.603	157.091	171.326	Rupiah
PT Mitra Energi Batam - Rupiah	117.813	144.549	152.147	PT Mitra Energi Batam - Rupiah
Jumlah pihak berelasi	14.769.856	12.505.796	10.151.328	Total related parties
Pihak ketiga				Third parties
PT Central Java Power - JPY	31.642.916	33.137.439	26.041.923	PT Central Java Power - JPY
PT Paiton Energy - US$	34.371.988	27.388.273	17.311.869	PT Paiton Energy - US$
PT Jawa Power - US$	19.478.143	15.598.248	14.723.451	PT Jawa Power - US$
PT Cirebon Electric Power - US$	7.442.073	6.044.132	-	PT Cirebon Electric Power - US$
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)	26.915.044	16.635.173	12.265.826	Others (each below 5% of total)
Jumlah pihak ketiga	119.850.164	98.803.265	70.343.069	Total third parties
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	134.620.020	111.309.061	80.494.397	Present value of future minimum lease payments
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	4.901.469	3.699.829	2.803.911	Less current maturity
Bagian jangka panjang	129.718.551	107.609.232	77.690.486	Long-term portion

Tingkat suku bunga liabilitas sewa pembiayaan adalah tetap sejak tanggal kontrak, yang berkisar antara 5,04% sampai dengan 20,97% per tahun.

Beban bunga dan keuangan untuk tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 19.396.573 juta dan Rp 16.258.214 juta. Beban bunga dan keuangan ini termasuk sewa kontinjen masing-masing sebesar Rp 1.315.515 juta dan Rp 1.133.388 juta untuk tahun 2013 dan 2012 untuk faktor penyesuaian tertentu antara lain meliputi kurs konversi mata uang JPY, tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi.

Pada tanggal 23 Mei 2003, Perusahaan dan CJP mengadakan perjanjian untuk melanjutkan pengembangan pembangkit Tanjung Jati B Unit A dan B. Perusahaan dan CJP mengadakan perjanjian sewa pembiayaan (*Financial Lease Agreement* - FLA) yang mengatur antara lain bahwa CJP akan menyewakan pembangkit selama 20 tahun sejak operasi komersial atau tanggal batas maksimum keterlambatan setelah 31 Juli 2003, mana yang lebih dahulu dan Perusahaan memiliki hak opsi untuk membeli pembangkit pada akhir masa sewa, atau sebelum masa FLA berakhir sebesar jumlah tertentu sesuai dengan *Call Right Agreement*. FLA mensyaratkan Perusahaan mengoperasikan pembangkit sesuai dengan *Operation and Maintenance Agreement* (*O&M Agreement*). Pembayaran minimum sewa pembiayaan tengah tahunan setelah disesuaikan dengan formula dan faktor kondisi pada tanggal FLA adalah JPY 11.289 juta untuk unit A dan B. Sehubungan dengan keterlambatan operasi komersial pembangkitan unit A dan B yang dimulai masing-masing pada tanggal 1 Oktober dan 1 Nopember 2006, jangka waktu perjanjian sewa telah menjadi 23,5 tahun sampai dengan 31 Maret 2030.

The interest rates underlying these finance lease liabilities are fixed at respective contract dates ranging from 5.04% to 20.97% per annum.

Interest expense and financial charges for 2013 and 2012 amounted to Rp 19,396,573 million and Rp 16,258,214 million, respectively. These interest expense and financial charges include contingent rent of Rp 1,315,515 million and Rp 1,133,388 million for 2013 and 2012 for certain adjustment factors which include, among others, conversion of foreign exchange in JPY currency, interest rate and investment rate of returns.

On May 23, 2003, the Company and CJP entered into an agreement to continue the development of power plant Tanjung Jati B Unit A and B. The Company and CJP entered into a Financial Lease Agreement (FLA) which stipulates, among others, that CJP will lease the power plant for 20 years starting on its Commercial Operation Date (COD) or the date of maximum delay, for each unit, after July 31, 2003, whichever is earlier, and the Company has an option to purchase the power plant on or before the end of FLA period at certain purchase price as stipulated in the Call Right Agreement. The FLA required the Company to operate the power plant in accordance with Operation and Maintenance Agreement (O&M Agreement). The semi-annual minimum lease payment, after including adjustments based on the formula and condition factors at the date of FLA, amounted to a total of JPY 11,289 million for both Unit A and B. In relation to the delayed COD of power plant Unit A and B, on October 1 and November 1, 2006, respectively, the term of the lease agreement was effected to become 23.5 years until March 31, 2030.

Pada tanggal 4 Nopember 2008, Perusahaan dan CJP mengadakan perjanjian sewa pembiayaan untuk ekspansi Tanjung Jati B 1 & 2 - "FLA V", yang antara lain mengatur bahwa CJP akan menyewakan aset sewaan ekspansi (Unit "C" dan "D") kepada Perusahaan. Pada tanggal perjanjian sewa pembiayaan ekspansi (EFLA) perkiraan biaya ekspansi tersebut sebesar JPY 200.000 juta. Periode sewa akan dimulai sejak tanggal sewa setiap unit ekspansi dan berakhir 20 tahun setelah operasi komersial Unit D. Pembayaran minimum sewa pembiayaan selama ekspansi tahap satu, yang periodenya dimulai sejak tanggal sewa Unit C dan berakhir pada tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian, adalah sebesar JPY 6.486 juta untuk setiap unit ekspansi per 6 bulanan. Pembayaran dilakukan tengah tahunan enam bulan sejak tanggal sewa Unit D dan jumlah utang sewa yang dibayar oleh Perusahaan pada tanggal jatuh tempo ditentukan berdasarkan EFLA. Perusahaan memiliki hak opsi untuk membeli aset sewaan tersebut senilai JPY 1.000. Periode sewa untuk Unit C dimulai pada bulan Oktober 2011 dan Unit D pada bulan Januari 2012.

On November 4, 2008, the Company and CJP entered into Finance Lease Agreement for Expansion of Tanjung Jati B 1 & 2 - "FLA V", which stipulates among others that CJP will lease the expansion leased assets (Unit "C" and "D") to the Company. The expected acquisition cost of the expansion, as of the date of the Expansion Finance Lease Agreement (EFLA), is approximately JPY 200,000 million. The lease period will commence on the expansion lease-in date for each expansion unit and will expire on the date, that is 20 years after the Unit D COD. The minimum amount of lease payment during the expansion phase one, which is the period commencing on the Unit C lease-in date and ending at a date determined in the agreement, shall be JPY 6,486 million for each expansion unit every 6 months. The lease payment shall be paid semi-annually from six months after the Unit D lease-in date and the amount of the lease payment payable by the Company on the due date shall be determined in accordance with the EFLA. The Company has an option to purchase the expansion leased assets for JPY 1,000. Lease periods commence in October 2011 for Unit C and January 2012 for Unit D.

Sehubungan dengan FLA tersebut, The Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura bertindak sebagai *Escrow Agent* dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo bertindak sebagai *Security Agent*. Untuk memenuhi persyaratan FLA, Perusahaan telah membentuk dana cadangan pada *Escrow Agent* untuk jaminan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan pengadaan bahan bakar serta untuk angsuran sewa pembiayaan (Catatan 10).

In relation to the FLA, The Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore acts as the Escrow Agent and Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo acts as the Security Agent. To fulfill the requirements of FLA, the Company established a reserve account to an Escrow Agent for guarantee of operations, maintenance and fuel procurement and for lease payments (Note 10).

Perusahaan dibatasi oleh ketentuan FLA, antara lain, menggadaikan *escrow accounts*, mengalihkan hak Perusahaan berdasarkan Perjanjian Penyelesaian PLN yang akan dikembalikan setelah utang lunas, dan menyetujui pengalihan hak CJP kepada krediturnya sebagai jaminan pinjaman CJP.

The Company is restricted by certain covenants of the FLA, such as pledge of escrow accounts, transfer of the Company's rights based on PLN Settlement Agreement, which will be returned if the payment of lease liabilities has been made, and recognition of CJP's transfer of rights to its creditors, as guarantee of CJP's obligations.

Utang sewa pembiayaan kepada CJP secara efektif dijamin dengan kembalinya hak atas aset sewaan kepada lessor apabila terjadi gagal bayar.

Lease liability to CJP is in effect secured by the leased assets, since the rights over these assets will be returned to the lessor when the Company fails to pay.

26. UTANG BANK DAN SURAT UTANG JANGKA MENENGAH

26. BANK LOANS AND MEDIUM TERM NOTES

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Pinjaman terkait program percepatan				Loans related to fast track program
Pihak berelasi				Related parties
Bank Negara Indonesia	4.860.105	5.405.148	5.653.648	Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia	4.568.429	5.391.743	5.097.520	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri	3.400.266	3.283.135	3.481.999	Bank Mandiri
Bank DKI	2.084.189	2.093.263	2.245.573	Bank DKI
Jumlah pihak berelasi	14.912.989	16.173.289	16.478.740	Total related parties
Pihak ketiga				Third parties
The Export-Import Bank of China	15.303.757	12.312.991	10.685.374	The Export-Import Bank of China
Bank of China Limited	12.738.196	11.078.074	10.105.846	Bank of China Limited
Barclays Bank Plc and China Development Bank	10.499.686	7.461.219	4.031.165	Barclays Bank Plc and China Development Bank
Bank Mega	3.776.739	4.004.298	3.422.648	Bank Mega
Bank Bukopin	2.334.693	2.404.253	2.044.944	Bank Bukopin
Bank Central Asia	1.241.783	1.312.764	1.190.053	Bank Central Asia
Jumlah pihak ketiga	45.894.854	38.573.599	31.480.030	Total third parties
Sub jumlah	60.807.843	54.746.888	47.958.770	Subtotal
Pinjaman tidak terkait program percepatan				Loans not related to fast track program
Pihak berelasi				Related parties
Bank Mandiri	7.000.000	7.000.000	2.000.000	Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia	8.500.000	1.024.656	416.500	Bank Rakyat Indonesia
Pertamina - Surat Utang Jangka Menengah	-	1.000.000	2.000.000	Pertamina - Medium Term Notes
Jumlah pihak berelasi	15.500.000	9.024.656	4.416.500	Total related parties
Pihak ketiga				Third parties
Bank Bukopin	-	534	6.485	Bank Bukopin
Sub jumlah	15.500.000	9.025.190	4.422.985	Subtotal
Jumlah	76.307.843	63.772.078	52.381.755	Total
Biaya transaksi belum diamortisasi	(1.462.014)	(1.692.055)	(1.683.912)	Unamortized transaction cost
Jumlah bersih	74.845.829	62.080.023	50.697.843	Total net
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				Less current maturities
Pihak berelasi				Related parties
Bank Rakyat Indonesia	1.176.457	1.023.931	714.870	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia	801.003	1.014.233	635.463	Bank Negara Indonesia
Pertamina - Surat Utang Jangka Menengah	-	1.000.000	1.000.000	Pertamina - Medium Term Notes
Bank DKI	676.000	676.000	240.597	Bank DKI
Bank Mandiri	1.521.356	646.356	273.069	Bank Mandiri
Jumlah pihak berelasi	4.174.816	4.360.520	2.863.999	Total related parties
Pihak ketiga				Third parties
Bank of China Limited	1.503.435	1.277.457	677.645	Bank of China Limited
The Export-Import Bank of China	905.541	727.265	431.952	The Export-Import Bank of China
Bank Mega	776.138	498.722	103.417	Bank Mega
Barclays Bank Plc and China Development Bank	468.190	386.932	237.400	Barclays Bank Plc and China Development Bank
Bank Central Asia	276.656	378.402	169.793	Bank Central Asia
Bank Bukopin	283.105	179.046	210.446	Bank Bukopin
Jumlah pihak ketiga	4.213.065	3.447.824	1.830.653	Total third parties
Jumlah bagian jatuh tempo dalam satu tahun	8.387.881	7.808.344	4.694.652	Total current maturities
Bagian jangka panjang	66.457.948	54.271.679	46.003.191	Long-term portion

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, utang bank dalam mata uang asing masing-masing sebesar US$ 3.162.001.759 (setara Rp 38.541.639 juta) dan US$ 3.190.515.447 (setara Rp 30.852.284 juta).

As of December 31, 2013 and 2012, bank loans in foreign currency amounted to US$ 3,162,001,759 (equivalent to Rp 38,541,639 million) and US$ 3,190,515,447 (equivalent to Rp 30,852,284 million), respectively.

Pinjaman terkait program percepatan

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak *Engineering Procurement and Construction* (EPC) untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007 pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit.

Loans related to fast track program

The Company obtained credit facilities from several banks to finance 85% of the value of Engineering Procurement and Construction (EPC) contracts for fast track program. These loans are fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (PP) No. 91 Year 2007, which supersedes PP No. 86 year 2006, regarding Grant of Government Guarantee for Construction of Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is restricted by general rules as described in the loan agreements.

Pada tanggal 31 Desember 2013, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut :

As of December 31, 2013, details of such loan facilities are as follow:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* US$ *)	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* Rp *)	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance Premium* US$ *)	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity* **)
1	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank of China Limited/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/*West Java*	592	-	0,785% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	55	27 Mei 2021/ *May 27, 2021*
2	The Export-Import Bank of China/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/*East Java*	331	-	0,84% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	32	30 Januari 2023/ *January 30, 2023*
3	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU 2 Labuan, Banten	-	2.741.298	0,825% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	-	23 Juli 2018/ *July 23, 2018*
4	The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Suralaya, Banten	284	-	0,84% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	27	30 Januari 2023/ *January 30, 2023*
5	Barclays Capital, The Investment Banking Division of Barclays Bank Plc and China Development Bank/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/*Central Java*	262	-	3,25% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	-	3 Desember 2021/ *December 3, 2021*
6	Bank DKI/ PLTU Naganraya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara* PLTU 1 Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Tenggara* PLTU Sumatera Barat/*West Sumatera* PLTU 2 Kalimantan Barat/*West Kalimantan* PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara/*North Maluku* PLTU Sulawesi Tenggara/*Southeast Sulawesi* PLTU 1 Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara* PLTU 2 Sulawesi Utara/*North Sulawesi* PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Tenggara* PLTU 1 Kalimantan Tengah/*Central Kalimantan*	-	4.732.000	1% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	-	24 April 2019/ *April 24, 2019*
	Jumlah dipindahkan/*Total carry forward*	1.469	7.473.298		114	

*) Dalam jutaan/*In million*

**) Termasuk masa tenggang/*Include grace periods*

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* US$ *)	Rp *)	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance Premium* US$ *)	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity* **)
	Jumlah pindahan/*Total carried forward*	1.469	7.473.298		114	
7	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia PLTU Sulawesi Selatan/*South Sulawesi* PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/*South Kalimantan*	-	2.074.739	1% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	-	30 Januari 2019/ *January 30, 2019*
8	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Mandiri/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/*Central Java*	-	1.911.480	1,11% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	-	23 Maret 2018/ *March 23, 2018*
9	Bank Mega/ PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat/*West Java*	-	1.874.315	1,10% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	-	29 Juli 2018/ *July 29, 2018*
10	Bank Bukopin/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	-	1.606.612	0,71% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	-	29 Juli 2021/ *July 29, 2021*
11	Bank Mega/ PLTU 2 Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Tenggara* PLTU Gorontalo PLTU 2 Manado, Sulawesi Utara/*North Sulawesi* PLTU Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau/*Riau Island* PLTU 1 Ende, Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara* PLTU Sulawesi Tenggara/*Southeast Sulawesi* PLTU 1 Kalimantan Tengah/*Central Kalimantan*	-	1.498.513	1,10% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	-	29 Juli 2018/ *July 29, 2018*
12	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/*West Java*	-	1.272.914	1,10% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	-	23 Februari 2018/ *February 23, 2018*
13	Bank Mega/ PLTU Lampung, Lampung PLTU Sumatera Utara/*North Sumatera* , Medan	-	1.240.661	1,10% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	-	29 Juli 2018/ *July 29, 2018*
14	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Central Asia/ PLTU 2 Labuan, Banten	-	1.188.548	1,12% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	-	18 April 2018/ *April 18, 2018*
15	Pinjaman sindikasi dikordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan/*South Sulawesi* PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/*South Kalimantan*	-	1.151.005	1% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	-	30 Januari 2019/ *January 30, 2019*
16	Bank Bukopin/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur/*East Java*	-	1.045.924	0,71% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	-	29 Juli 2021/ *July 29, 2021*
	Jumlah dipindahkan/*Total carry forward*	1.469	22.338.009		114	

*) Dalam jutaan/*In million*

**) Termasuk masa tenggang/*Include grace periods*

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* US$ *)	Rp *)	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance Premium* US$ *)	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity* **)
	Jumlah pindahan/*Total carried forward*	1.469	22.338.009		114	
17	Bank Mega/ PLTU 1 Suralaya, Banten	-	735.387	1,10% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	-	18 April 2018/ *April 18, 2018*
18	Bank Mega/ PLTU 2 Jawa Timur/*East Java,* Paiton	-	600.635	1,10% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	-	18 April 2018/ *April 18, 2018*
19	The Export-Import Bank of China/ PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat	124	-	2,8% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	12	14 Januari 2025/ *January 14, 2025*
20	The Export-Import Bank of China/ PLTU NAD	482	-	2,8% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	46	12 Februari 2025/ *February 12, 2025*
21	Bank of China Limited/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	455	-	2,30% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	46	4 Mei 2022/ *May 4, 2022*
22	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU Tanjung Awar-awar	-	1.155.352	1% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	-	30 Januari 2019/ *January 30, 2019*
23	The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Jawa Timur/*East Java* , Pacitan	293	-	2,8% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	30	2 Juli 2025/ *July 2, 2025*
24	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Lampung PLTU 2 Sumatera Utara/*North Sumatera*	-	3.941.772	1,5% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	34	14 Oktober 2019/ *October 14, 2019*
25	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Mandiri/ Transmisi/*Transmission* PLTU 1 Suralaya Koneksi 1 & 2, Banten PLTU 2 Labuan Koneksi 1, Banten PLTU 3 Teluk Naga koneksi 1 dan 2, Banten PLTU 2 Pelabuhan Ratu koneksi 1, Banten PLTU 1 Rembang koneksi 2, Jawa Tengah/*Central Java* PLTU 2 Adipala koneksi 2, Jawa Tengah/*Central Java* PLTU 2 Paiton Baru koneksi 2, Jawa Timur/*East Java* PLTU3 Tanjung Awar-awar koneksi 1, Jawa Timur/ *East Java*	-	2.613.012	1,5% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	-	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
26	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Central Asia/ Transmisi/*Transmission* PLTU 1 Suralaya koneksi 2, Banten PLTU 2 Labuhan koneksi 2, Banten PLTU 3 Lontar koneksi 2, Banten PLTU 1 Indramayu koneksi 2, Jawa Barat/*West Java* PLTU 2 Pelabuhan Ratu koneksi 2, Banten PLTU 1 Pacitan koneksi 2, Jawa Timur/*East Java* PLTU 2 Paiton koneksi 2, Jawa Timur/*East Java* PLTU 3 Tanjung Awar-Awar koneksi 2, Jawa Timur/ *East Java*	-	327.195	1,5% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	-	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
	Jumlah dipindahkan/*Total carry forward*	2.823	31.711.362		282	

*) Dalam jutaan/*In million*

**) Termasuk masa tenggang/*Include grace periods*

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* US$ *)	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* Rp *)	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance Premium* US$ *)	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity* **)
	Jumlah pindahan/*Total carried forward*	2.823	31.711.362		282	
27	China Development Bank/ PLTU 2 Jawa Tengah/*Central Java* , Adipala	625	-	3,85% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	-	14 Oktober 2022/ *October 14, 2022*
28	China Development Bank/ PLTU Sumatera Barat/*West Sumatera* , Teluk Sirih	138	-	3,85% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	-	14 Oktober 2022/ *October 14, 2022*
29	Bank of China/ PLTU Tanjung Awar-Awar	372	-	2,30% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	-	14 Desember 2022/ *December 14, 2022*
30	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ Transmisi/*Transmission* PLTU Meulaboh koneksi 1, Nanggroe Aceh Darussalam PLTU2 Pangkalan Susu, Sumatera Utara/ *North Sumatera* PLTU Teluk Sirih koneksi 1 & 2, Sumatera Barat/ *West Sumatera* PLTU Tarahan koneksi 2, Lampung PLTU Asam-Asam koneksi 1 & 2, Kalimantan Selatan/*South Kalimantan* PLTU 1 Pulang Pisau koneksi 2, Kalimantan Tengah/ *Central Kalimantan* PLTU 2 Amurang koneksi 2, Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	-	1.930.063	1,50% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	-	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
31	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Central Asia PLTU 1 Riau, Bengkalis PLTU 2 Riau, Selat Panjang PLTU 1 Kepulauan Riau/*Riau Island* , Tanjung Balai Karimun PLTU 1 Kalimantan Barat/*West Kalimantan* , Parit Baru	-	1.507.851	1,50% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	-	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
32	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ Transmisi/*Transmission*	-	1.067.684	1,05% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	-	27 Desember 2020/ *December 27, 2020*
	Jumlah/*Total*	3.958	36.216.960		282	

*) Dalam jutaan/*In million*
**) Termasuk masa tenggang/*Include grace periods*

Pinjaman tidak terkait program percepatan

Bank Mandiri

Pada tanggal 27 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri sebesar Rp 7.000.000 juta, dengan tingkat bunga per tahun rata-rata tertimbang suku bunga deposito berjangka dalam mata uang Rupiah 3 bulan dari kreditur sindikasi + 3,42% dan jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2021.

Loans not related to fast track program

Bank Mandiri

On December 27, 2011, the Company obtained a syndicated investment loan facilities coordinated by Bank Mandiri amounting to Rp 7,000,000 million, with annual interest weighted average time deposit in Rupiah 3 months of syndicated creditors + 3.42% and maturity date on October 23, 2021.

Bank Rakyat Indonesia

Pada tanggal 21 Juni 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 15.000.000 juta, dengan tingkat bunga per tahun JIBOR 3 bulanan + 1,65% dan jatuh tempo tanggal 21 Juni 2012. Pada tanggal 23 Nopember 2011, fasilitas kredit diubah menjadi Rp 20.000.000 juta dan tanggal jatuh tempo diubah menjadi tanggal 21 Juni 2013. Pada tanggal 20 Juni 2013, fasilitas kredit diubah menjadi Rp 13.000.000 juta dan tanggal jatuh tempo diubah menjadi 21 Juni 2014 dan tingkat bunga per tahun menjadi Average Time Deposit 3 bulanan dari Bank Sindikasi + 2,67%.

Arus kas penarikan dan pembayaran utang Bank Rakyat Indonesia diatas selama tahun 2013 dan 2012 sebagai berikut:

Bank Rakyat Indonesia

On June 21, 2011, the Company obtained a syndicated working capital loan facilites coordinated by Bank Rakyat Indonesia amounting to Rp 15,000,000 million, with annual interest JIBOR 3 months + 1.65% and maturity date on June 21, 2012. On November 23, 2011, the credit facility was changed into Rp 20,000,000 million and the maturity date has been extended until June 21, 2013. On June 20, 2013 the credit facility was changed into Rp 13,000,000 million and the maturity date has extended until June 21, 2014 and annual interest become Average Time Deposit 3 months from Syndicated Bank + 2.67%.

Cash flows of withdrawal and payment of Bank Rakyat Indonesia loan above for the years 2013 and 2012 are as follow:

	2013	2012	
Penarikan	60.308.923	55.212.690	Withdrawal
Pembayaran	(60.308.923)	(55.212.690)	Payment
Netto	-	-	Net

Pada tanggal 21 Desember 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 8.500.000 juta dengan tingkat bunga per tahun sebesar rata-rata suku bunga deposito berjangka 3 bulan + 3,2% yang terutang setiap 3 bulan. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 23 Nopember 2022.

On December 21, 2012, the Company obtained working capital loan facilities from Bank Rakyat Indonesia amounting to Rp 8,500,000 million, with annual interest rate of average time deposit 3 months + 3.2%, which is due every three months. The maturity date of the principal is on November 23, 2022.

Surat Utang Jangka Menengah

Pada tanggal 27 Juni 2008, Perusahaan dan PT Pertamina (Persero) menandatangani Perjanjian Restrukturisasi untuk mengkonversi utang usaha Perusahaan dan entitas anak per 30 April 2007 menjadi utang jangka panjang sebesar Rp 5.000.000 juta melalui penerbitan Surat Promes. Perjanjian ini telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan dan Pertamina, masing-masing tanggal 29 Juli 2008 dan 26 Juni 2008.

Selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2008, Perusahaan dan Pertamina sepakat untuk mengubah Surat Promes menjadi Surat Utang Jangka Menengah (MTN). Perusahaan dan Pertamina menandatangani Perjanjian Penerbitan MTN tersebut dengan jumlah pokok sebesar Rp 5.000.000 juta, terdiri dari 10 seri Sertifikat Jumbo dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 500.000 juta, jatuh tempo setiap tanggal 15 bulan Juni dan Desember tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dengan tingkat bunga SBI 3 bulanan + 2,5% per tahun. Perjanjian ini efektif terhitung sejak tanggal 29 Juli 2008. Perusahaan menerbitkan MTN tersebut pada tanggal 15 Desember 2008. Pada tahun 2013, Perusahaan telah melunasi MTN ini.

Medium Term Notes

On June 27, 2008, the Company and PT Pertamina (Persero) entered into a Debt Restructuring Agreement to convert the Company and its subsidiaries outstanding trade accounts payable as of April 30, 2007 amounting to Rp 5,000,000 million into long-term payable by issuing promissory notes. This agreement has been approved during the General Stockholder's Meeting of the Company and Pertamina dated July 29, 2008 and June 26, 2008, respectively.

Furthermore, on November 28, 2008, the Company and Pertamina agreed to replace the promissory notes with Medium Term Notes (MTN). The Company and Pertamina entered into an Agreement on Issuance of MTN with total principal amount of Rp 5,000,000 million, consisting of 10 series of Jumbo certificates with nominal value of Rp 500,000 million each, which will mature every 15th of June and December of year 2009 until 2013 and bear interest at SBI 3 months + 2.5% per annum. This agreement is effective starting on July 29, 2008. The Company issued such MTN on December 15, 2008. In 2013, the Company has fully paid such MTN.

Perusahaan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai *Arranger* dan Bank Mandiri (Persero) sebagai Wali Amanat untuk MTN tersebut.

The Company appointed PT Mandiri Sekuritas as Arranger and Bank Mandiri (Persero) as Trustee of such MTN.

Bank Bukopin

Pada tahun 2006, ICON memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 50.000 juta dengan jangka waktu 4 tahun untuk pembelian peralatan jaringan. Pada tanggal 6 Nopember 2008, fasilitas kredit diubah menjadi sebesar Rp 34.589 juta. Pinjaman ini dikenakan bunga per tahun sebesar 13,50% tahun 2012 dan 2011 yang dibayar dalam 48 kali angsuran bulanan sejak 4 Februari 2009 sampai dengan 4 Februari 2013. Pinjaman ini dijamin dengan peralatan jaringan dan distribusi dan deposito berjangka milik ICON sebesar Rp 5.000 juta pada bank yang sama. Pada tahun 2013, ICON telah melunasi pinjaman ini.

Bank Bukopin

In 2006, ICON obtained investment credit facilities totaling Rp 50,000 million, with term of 4 years, for the purchase of the transmission equipments. On November 6, 2008, the credit facility was changed into Rp 34,589 million. This loan bears annual interest of 13.50% in 2012 and 2011, and will be paid in 48 monthly installments from February 4, 2009 until February 4, 2013. This loan is secured by ICON's transmission and distribution equipment and time deposits of Rp 5,000 million in the same bank. In 2013, ICON has fully paid the loan.

27. UTANG OBLIGASI / 27. BONDS PAYABLE

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Obligasi Rupiah				Rupiah Bonds
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	1.244.000	-	-	Sustainable Bonds I PLN II Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	429.000	-	-	Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	879.000	-	-	Sustainable Bonds I PLN I Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	121.000	-	-	Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013
Obligasi PLN XII Tahun 2010	2.500.000	2.500.000	2.500.000	PLN XII Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	500.000	500.000	500.000	Sukuk Ijarah PLN V Year 2010
Obligasi PLN XI Tahun 2010	2.703.000	2.703.000	2.703.000	PLN XI Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	297.000	297.000	297.000	Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010
Obligasi PLN X Tahun 2009	1.015.000	1.015.000	1.440.000	PLN X Bonds Year 2009
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009	293.000	293.000	760.000	Sukuk Ijarah PLN III Year 2009
Obligasi PLN IX Tahun 2007	2.700.000	2.700.000	2.700.000	PLN IX Bonds Year 2007
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	300.000	300.000	300.000	Sukuk Ijarah PLN II Year 2007
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	2.200.100	2.200.100	2.200.100	PLN VIII Bonds Year 2006
Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006	200.000	200.000	200.000	Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006
Obligasi PLN VII Tahun 2004	1.500.000	1.500.000	1.500.000	PLN VII Bonds Year 2004
Surat Utang Jangka Menengah Global - US$				Global Medium Term Notes - US$
Penerbitan tahun 2012	12.189.000	9.670.000	-	Issued in 2012
Penerbitan tahun 2011	12.189.000	9.670.000	9.068.000	Issued in 2011
Obligasi Terjamin - US$				Guaranteed Notes - US$
Penerbitan tahun 2009	24.378.000	19.340.000	18.136.000	Issued in 2009
Penerbitan tahun 2007	12.189.000	9.670.000	9.068.000	Issued in 2007
Penerbitan tahun 2006	6.703.950	5.318.500	4.987.400	Issued in 2006
Sub jumlah	84.530.050	67.876.600	56.359.500	Subtotal
Biaya emisi belum diamortisasi	(704.061)	(625.623)	(451.112)	Unamortized debt issuance cost
Jumlah	83.825.989	67.250.977	55.908.388	Total
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai :				Presented in consolidated statements of financial position
Liabilitas jangka pendek	2.808.000	-	-	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	81.017.989	67.250.977	55.908.388	Noncurrent liabilites
Jumlah	83.825.989	67.250.977	55.908.388	Total

Pada tanggal 9 Januari 2012, Perusahaan melakukan opsi beli seluruh obligasi PLN X Tahun 2009 Seri B dengan harga nilai nominal sebesar Rp 425.000 juta dan Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 Seri B dengan harga nilai nominal sebesar Rp 467.000 juta.

On January 9, 2012, the Company decided to exercise the call option on the whole of PLN X Bonds Year 2009 Series B with price a nominal value of Rp 425,000 million and Sukuk Ijarah PLN III Year 2009 Series B with price a nominal value of Rp 467,000 million.

Obligasi Rupiah

Rupiah Bonds

Obligasi ini diterbitkan sebesar harga nominal dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

The bonds were issued at nominal value and are denominated in Rupiah, with details as follow:

	Pokok/ *Principal*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga/ *Interest rate*	
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013				Sustainable Bonds I PLN II Year 2013
Seri A	593.000	10 Desember 2018/*December 10, 2018*	9%	Series A
Seri B	651.000	10 Desember 2023/*December 10, 2023*	9,6%	Series B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013				Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013
Seri A	321.000	10 Desember 2018/*December 10, 2018*	-	Series A
Seri B	108.000	10 Desember 2023/*December 10, 2023*	-	Series B
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013				Sustainable Bonds I PLN I Year 2013
Seri A	182.000	5 Juli 2020/*July 5, 2020*	8%	Series A
Seri B	697.000	5 Juli 2020/*July 5, 2023*	8,25%	Series B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	121.000	5 Juli 2020/*July 5, 2020*	-	Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013
Obligasi PLN XII Tahun 2010				PLN XII Bonds Year 2010
Seri A	645.000	8 Juli 2015/*July 8, 2015*	9,7%	Series A
Seri B	1.855.000	8 Juli 2022/*July 8, 2022*	10,4%	Series B
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010				Sukuk Ijarah PLN V Year 2010
Seri A	160.000	8 Juli 2015/*July 8, 2015*	-	Series A
Seri B	340.000	8 Juli 2022/*July 8, 2022*	-	Series B
Obligasi PLN XI Tahun 2010				PLN XI Bonds Year 2010
Seri A	920.000	12 Januari 2017/*January 12, 2017*	11,95%	Series A
Seri B	1.783.000	12 Januari 2020/*January 12, 2020*	12,55%	Series B
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010				Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010
Seri A	130.000	12 Januari 2017/*January 12, 2017*	-	Series A
Seri B	167.000	12 Januari 2020/*January 12, 2020*	-	Series B
Obligasi PLN X Tahun 2009				PLN X Bonds Year 2009
Seri A	1.015.000	9 Januari 2014/*January 9, 2014*	14,75%	Series A
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009				Sukuk Ijarah PLN III Year 2009
Seri A	293.000	9 Januari 2014/*January 9, 2014*	-	Series A
Obligasi PLN IX Tahun 2007				PLN IX Bonds Year 2007
Seri A	1.500.000	10 Juli 2017/*July 10, 2017*	10,4%	Series A
Seri B	1.200.000	10 Juli 2022/*July 10, 2022*	10,9%	Series B
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	300.000	10 Juli 2017/*July 10, 2017*	-	Sukuk Ijarah PLN II Year 2007
Obligasi PLN VIII Tahun 2006				PLN VIII Bonds Year 2006
Seri A	1.335.100	21 Juni 2016/*June 21, 2016*	13,60%	Series A
Seri B	865.000	21 Juni 2021/*June 21, 2021*	13,75%	Series B
Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006	200.000	21 Juni 2021/*June 21, 2021*	-	Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006
Obligasi PLN VII Tahun 2004	1.500.000	11 Nopember 2014/*November 11, 2014*	12,25%	PLN VII Bonds Year 2004
Jumlah	16.881.100			Total

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013

Pada tanggal 10 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan obligasi berkelanjutan I PLN tahap II tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 1.244.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sustainable Bonds I PLN II Year 2013

On December 10, 2013, the Company issued Sustainable Bonds I PLN II Year 2013 with a total nominal value of Rp 1,244,000 million consisting of Series A and Series B bonds, with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from March 10, 2014 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan obligasi berkelanjutan I PLN tahap II tahun 2013, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN tahap II Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp 429.000 juta, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 28.890 juta per tahun untuk Obligasi Seri A dan Rp 10.368 juta per tahun untuk Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013

Concurrent with the issuance of Sustainable Bonds I PLN II Year 2013, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013, with a nominal value of Rp 429,000 million consisting of Series A and Series B with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. Total ijarah fee per annum amounting to Rp 28,890 million for Series A Bonds and 10,368 million for Series B Bonds is payable on a quarterly basis, starting from March 10, 2014 until the maturity date of the Sukuk Ijarah.

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013

Pada tanggal 5 Juli 2013, Perusahaan menerbitkan obligasi berkelanjutan I PLN tahap I tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 879.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sustainable Bonds I PLN I Year 2013

On July 5, 2013, the Company issued Sustainable Bonds I PLN I Year 2013 with a total nominal value of Rp 879,000 million consisting of Series A and Series B bonds with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 5, 2013 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan obligasi berkelanjutan I PLN tahap I tahun 2013, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN tahap I Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp 121.000 juta dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 9.680 juta per tahun dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013

Concurrent with the issuance of Sustainable Bonds I PLN I Year 2013, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013 with a nominal value of Rp 121,000 million with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. Total ijarah fee per annum amounting to Rp 9,680 million is payable on a quarterly basis, starting from October 5, 2013 until the maturity date of the Sukuk Ijarah.

Obligasi PLN XII tahun 2010

Pada tanggal 8 Juli 2010, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN XII Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 2.500.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

PLN XII Bonds Year 2010

On July 8, 2010, the Company issued PLN XII Bonds Year 2010 with a total nominal value of Rp 2,500,000 million consisting of Series A and and Series B bonds with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 8, 2010 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XII Tahun 2010, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp 500.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 15.520 juta per tahun untuk obligasi Seri A dan Rp 35.360 juta per tahun untuk obligasi Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Obligasi PLN XI Tahun 2010

Pada tanggal 12 Januari 2010, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN XI Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 2.703.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XI Tahun 2010, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp 297.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 15.535 juta per tahun untuk obligasi Seri A dan Rp 20.958 juta per tahun untuk obligasi Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Obligasi PLN X Tahun 2009

Pada tanggal 9 Januari 2009, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN X Tahun 2009 dengan jumlah nilai nominal Rp 1.440.000 juta, terdiri dari obligasi Seri A dan obligasi Seri B, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 9 April 2009 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah PLN V Year 2010

Concurrent with the issuance of PLN XII Bonds Year 2010, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN V Year 2010 with a nominal value of Rp 500,000 million consisting of Series A and Series B bonds with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. Total ijarah fee per annum amounting to Rp 15,520 million for Series A bonds and Rp 35,360 million for Series B bonds is payable on a quarterly basis, starting from October 8, 2010 until the maturity date of the bonds.

PLN XI Bonds Year 2010

On January 12, 2010, the Company issued PLN XI Bonds Year 2010 with a total nominal value of Rp 2,703,000 million consisting of Series A and and Series B bonds, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010

Concurrent with the issuance of PLN XI Bonds Year 2010, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010 with a nominal value of Rp 297,000 million consisting of Series A and Series B bonds with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. Total ijarah fee per annum amounting to Rp 15,535 million for Series A bonds and Rp 20,958 million for Series B bonds is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until the maturity date of the bonds.

PLN X Bonds Year 2009

On January 9, 2009, the Company issued PLN X Bonds Year 2009 with a total nominal value of Rp 1,440,000 million consisting of Series A and Series B bonds, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from April 9, 2009 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN X Tahun 2009, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 dengan nilai nominal Rp 760.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 43.217 juta per tahun untuk obligasi Seri A dan Rp 70.050 juta per tahun untuk obligasi Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 9 April 2009 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah PLN III Year 2009

Concurrent with the issuance of PLN X Bonds Year 2009, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN III Year 2009 with a nominal value of Rp 760,000 million consisting of Series A and Series B bonds with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. Total ijarah fee per annum amounting to Rp 43,217 million for Series A bonds and Rp 70,050 million for Series B bonds is payable on a quarterly basis, starting from April 9, 2009 until the maturity date of the bonds.

Obligasi PLN IX Tahun 2007

Pada tanggal 10 Juli 2007, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dengan jumlah nilai nominal Rp 2.700.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

PLN IX Bonds Year 2007

On July 10, 2007, the Company issued PLN IX Bonds Year 2007 with a total nominal value of Rp 2,700,000 million consisting of Series A and Series B bonds, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2007 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN IX Tahun 2007, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dengan nilai nominal Rp 300.000 juta jangka waktu 10 tahun, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 31.200 juta per tahun dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah PLN II Year 2007

Concurrent with the issuance of PLN IX Bonds Year 2007, the Company also issued Sukuk Ijarah PLN II Year 2007 with a nominal value of Rp 300,000 million with a term of 10 years, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. Total ijarah fee per annum amounting to Rp 31,200 million is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2007 until the maturity date of the bonds.

Obligasi PLN VIII Tahun 2006

Pada tanggal 21 Juni 2006, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal Rp 2.200.100 juta, dengan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

PLN VIII Bonds Year 2006

On June 21, 2006, the Company issued PLN VIII Bonds Year 2006 with a total nominal value of Rp 2,200,100 million with PT Bank Mega Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from September 21, 2006 until the maturity date of the bonds.

Sejak tanggal 18 Maret 2008, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN VIII Tahun 2006 yang tertuang dalam Akta No. 34 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

On March 18, 2008, the acting Trustee was changed with PT Bank Tabungan Negara (Persero) in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of PLN VIII Bonds Year 2006, as documented in notarial deed No. 34 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.

Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN VIII Tahun 2006, Perusahaan juga menerbitkan Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 dengan nilai nominal Rp 200.000 juta, dengan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 6.800 juta per tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sejak tanggal 18 Maret 2008, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 yang tertuang dalam Akta No. 35 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

Obligasi PLN VII Tahun 2004

Pada tanggal 11 Nopember 2004, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN VII Tahun 2004 dengan nilai nominal Rp 1.500.000 juta, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 11 Februari 2005 sampai dengan jatuh tempo obligasi.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi di atas, masing-masing perjanjian perwaliamanatan menetapkan antara lain bahwa:

- Satu tahun sejak tanggal emisi, Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi ini sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi.

- Perusahaan dapat melakukan pembelian awal seluruh Obligasi PLN X Tahun 2009 Seri B dan Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 Seri B pada ulang tahun ketiga sejak tanggal emisi melalui Opsi Beli.

- Seluruh obligasi ini tidak dijamin secara khusus, namun dijamin dengan seluruh aset Perusahaan, serta hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.

Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006

Concurrent with the issuance of PLN VIII Bonds Year 2006, the Company also issued Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006 with a nominal value of Rp 200,000 million, with PT Bank Mega Tbk acting as the Trustee. The ijarah fee amounting to Rp 6,800 million is payable on a quarterly basis, starting from September 21, 2006 until the maturity date of the bonds.

On March 18, 2008, the acting Trustee was changed with PT Bank Tabungan Negara (Persero) in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006, as documented in notarial deed No. 35 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.

PLN VII Bonds Year 2004

On November 11, 2004, the Company issued PLN VII Bonds Year 2004 amounting to Rp 1,500,000 million, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from February 11, 2005 until the maturity date of the bonds.

In relation to the issuance of the bonds above, each trustee agreement stipulates, among others that:

- After one year from the issuance date, the Company is allowed to buy-back either a portion or the entire bonds before the maturity date.

- The Company is allowed to carry-out, through call option, an early purchase of the entire PLN X Bonds Year 2009 Series B and Sukuk Ijarah PLN III Year 2009 Series B on the third year since the issuance date.

- The bonds are not secured by specific collateral but secured by all of the Company's assets and the bondholders' rights are paripassu without preference to the other creditors.

- Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan antara lain (a) menjaminkan harta kekayaan Perusahaan; (b) memberikan penjaminan; (c) memberikan pinjaman kepada pihak lain; (d) mengadakan penggabungan, konsolidasi dan akuisisi yang menyebabkan Perusahaan bubar; (e) mengalihkan aset tetap; memberikan izin kepada entitas anak untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain atau melakukan investasi; (f) menerbitkan obligasi dengan kedudukan lebih tinggi; dan (g) mengubah bidang usaha; mengurangi modal dasar; modal ditempatkan dan disetor.

  Selain itu Perusahaan juga diwajibkan memenuhi: (a) rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset tidak lebih dari 80%; (b) kecuali untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah IV Tahun 2010 dan Obligasi PLN X Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah III Tahun 2009, rasio antara laba sebelum beban bunga, pajak dan penyusutan dan amortisasi (termasuk perhitungan aktuaria imbalan kerja) - (EBITDA) dengan beban bunga minimum 2 : 1, untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah IV Tahun 2010 dan Obligasi PLN X Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah III Tahun 2009 minimum rasio adalah 1,5 : 1; (c) rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada Pemerintah) minimum 150% untuk Obligasi PLN VIII tahun 2006 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I tahun 2006, dan rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman, pinjaman langsung, obligasi internasional dan utang kepada Pemerintah) minimum 125% untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010, Obligasi PLN X Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 dan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007.

- The Company is restricted by certain covenants, which require written approval from the Trustee to: (a) use the Company's assets as collateral; (b) act as a guarantor; (c) grant loan to other party; (d) perform merger, consolidation and acquisition that would cause the Company to be dissolved; (e) transfer the Company's property, plant and equipment, and allow subsidiaries to grant loan to other party or to make an investment; (f) issue higher ranking bonds; and (g) change the business activities and decrease the Company's authorized, subscribed and paid-up capital.

  The Company is also required to maintain the following: (a) ratio of total financial liabilities to total assets not exceeding 80%; (b) except for PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah IV Year 2010, PLN X Bonds Year 2009 and Sukuk Ijarah III Year 2009, ratio of income before interest, tax, depreciation and amortization (including actuarial calculation of employment benefit) - (EBITDA) to interest expense at a minimum of 2 : 1, for PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah IV Year 2010 and PLN X Bonds Year 2009 and Sukuk Ijarah III Year 2009, the minimum ratio is 1.5 : 1 ; (c) ratio of power plant, transmission and distribution facilities to interest-bearing liabilities which are not secured by specific collaterals (excluding two-step loans and Government loans) at a minimum of 150% for PLN VIII Bonds Year 2006 and Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006, and ratio of power plant, transmission and distribution facilities to interest bearing liabilities which are not secured by specific collaterals (excluding two-step loans, direct loans, global bonds and government loans) at a minimum of 125% for the PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010, PLN X Bonds Year 2009 and Sukuk Ijarah PLN III Year 2009 and PLN IX Bonds Year 2007 and Sukuk Ijarah PLN II Year 2007.

- Untuk Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006, Perusahaan setuju untuk mengalihkan manfaat mesin pembangkit tenaga diesel dan perangkat trafo tertentu kepada pemegang obligasi dan pemegang obligasi memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk membuat dan melangsungkan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna trafo tersebut untuk kepentingan pemegang obligasi. Perusahaan juga menerima kuasa dari Wali Amanat untuk membuat dan melangsungkan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna trafo tersebut untuk melaksanakan penagihan piutang terkait.

- Perusahaan tidak disyaratkan untuk membentuk penyisihan dana pelunasan obligasi.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013, Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 digunakan untuk kegiatan investasi transmisi dan distribusi. Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi PLN VII tahun 2004 digunakan untuk membiayai kembali proyek PLTGU Muara Tawar. Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi lainnya digunakan untuk kebutuhan modal kerja antara lain untuk pengadaan bahan bakar.

Perusahaan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat masing-masing obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahun 2013, Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010, Obligasi PLN X tahun 2009 dan Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009, Obligasi PLN IX Tahun 2007, Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dan Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 dan Obligasi PLN VII tahun 2004 memperoleh peringkat "AAA" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.

- Related to Sukuk Ijarah PLN II Year 2007, and Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006, the Company has agreed to transfer benefits obtained from certain diesel power plants and transformers of the Company to the bondholders, and the bondholders have agreed to provide the Company a power of attorney to enter into agreements with transformer users for the benefits of the bondholders. The Company also received a power of attorney from the Trustee to enter into agreements with the transformer users to collect the related receivables.

- The Company was not required to provide sinking fund for such bonds.

The proceeds from the issuance of Sustainable Bonds I PLN II Year 2013 and Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013, Sustainable Bonds I PLN I Year 2013 and Sustainable Sukuk Ijarah I PLN I Year 2013, PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah IV Year 2010 were used to finance the transmission and distribution construction projects. The proceeds from issuance of PLN VII Bonds Year 2004 were used to refinance the PLTGU Muara Tawar Project. The proceeds from the other bonds issued were used for working capital requirement which, among others, includes the purchase of fuel.

The Company complies with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee of the corresponding bond obligations.

As of December 31, 2013, Sustainable Bonds I PLN II Year 2013 and Sustainable Sukuk Ijarah I PLN II Year 2013, Sustainable Bonds I PLN Year 2013 and Sustainable Sukuk Ijarah I PLN Year 2013, the PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijarah IV Year 2010, PLN X Bonds Year 2009 and Sukuk Ijarah PLN III Year 2009 and PLN IX Bonds Year 2007 and Sukuk Ijarah PLN II Year 2007, PLN VIII Bonds Year 2006 and Syariah Ijarah PLN I Bonds Year 2006 and PLN VII Bonds Year 2004 are rated as "AAA" by PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin – US$

Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dan obligasi terjamin adalah sebagai berikut :

Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes – US$

The details of Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes are as follows:

	Pokok/ *Principal* *) US$	Harga penerbitan/ *Issuing price*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga/ *Interest rate*	
Surat Utang Jangka Menengah Global					Global Medium Term Notes
Penerbitan tahun 2012					Issued in 2012
jatuh tempo 2042	1.000.000.000	98,514%	24 Oktober 2042/ *October 24, 2042*	5,25%	Due in 2042
Penerbitan tahun 2011					Issued in 2011
jatuh tempo 2021	1.000.000.000	99,054%	22 Nopember 2021/ *November 22, 2021*	5,5%	Due in 2021
Obligasi Terjamin					Guaranteed Notes
Penerbitan tahun 2009					Issued in 2009
Jatuh tempo 2020	1.250.000.000	99,152%	20 Januari 2020/ *January 20, 2020*	7,750%	Due in 2020
Jatuh tempo 2019	750.000.000	99,155%	7 Agustus 2019/ *August 7, 2019*	8,000%	Due in 2019
Sub jumlah	2.000.000.000				Subtotal
Penerbitan tahun 2007					Issued in 2007
Jatuh tempo 2017	500.000.000	99,127%	28 Juni 2017/ *June 28, 2017*	7,250%	Due in 2017
Jatuh tempo 2037	500.000.000	98,586%	29 Juni 2037/ *June 29, 2037*	7,875%	Due in 2037
Sub jumlah	1.000.000.000				Subtotal
Penerbitan tahun 2006					Issued in 2006
Jatuh tempo 2016	550.000.000	98,976%	17 Oktober 2016/ *October 17, 2016*	7,75%	Due in 2016
Sub jumlah	550.000.000				Subtotal
Jumlah	5.550.000.000				Total

*) dalam jumlah penuh/*in full amount*

Surat Utang Jangka Menengah Global

Pada tanggal 24 Oktober 2012, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US$ 1.000 juta dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Pada tanggal 22 Nopember 2011, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US$ 1.000 juta dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Global Medium Term Notes

On October 24, 2012, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US$ 1,000 million, under Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas, acting as the trustee. The interest is payable semi-annually starting from May 24, 3013 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

On November 22, 2011, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US$ 1,000 million, under Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas, acting as the trustee. The interest is payable semi-annually starting from May 22, 2012 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

Obligasi Terjamin

Penerbitan tahun 2009

Pada tanggal 6 Nopember 2009, Majapahit Holding B.V. (MH), Belanda, entitas anak, menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 1.250 juta dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 Januari 2010 sampai dengan jatuh tempo obligasi.

Pada tanggal 7 Agustus 2009, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 750 juta dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 8 Februari 2010 sampai dengan jatuh tempo obligasi.

Penerbitan tahun 2007

Pada tanggal 28 Juni 2007, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 1 miliar dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 28 Desember 2007 sampai dengan jatuh tempo obligasi.

Penerbitan tahun 2006

Pada tanggal 16 Oktober 2006, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$ 1 miliar dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 17 April 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Pada tanggal 17 Oktober 2011, MH melunasi Obligasi Terjamin yang telah jatuh tempo dengan harga nominal sebesar US$ 450 juta.

Obligasi ini tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan dan entitas anak, jika ada.

Perjanjian perwaliamanatan menetapkan bahwa :

- Tidak lebih dari 30 hari sejak dua kejadian dimana Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan lebih 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara pada Perusahaan atau, jika dan ketika diterbitkan saham Dwiwarna Seri A dan kejadian yang menurunkan peringkat (*Change of Control Triggering Event*), Majapahit Holding B.V. dapat diminta untuk melakukan penawaran untuk membeli kembali Obligasi Terjamin dengan harga 101% dari nilai nominal ditambah bunga terutang sampai tanggal pembelian kembali. Majapahit Holding B.V. mempunyai opsi dalam waktu tertentu untuk menebus kembali seluruh Obligasi Terjamin ini dengan harga 100% dari nilai nominal, bersama dengan utang bunga dalam hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Belanda atau Indonesia.

Guaranteed Notes

Issued in 2009

On November 6, 2009, Majapahit Holding B.V. (MH), The Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary, issued Guaranteed Notes amounting to US$ 1,250 million, with Deutsche Bank Trust Company Americas, acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from January 20, 2010 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

On August 7, 2009, MH issued Guaranteed Notes amounting to US$ 750 million, with Deutsche Bank Trust Company Americas, acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from February 8, 2010 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

Issued in 2007

On June 28, 2007, MH issued Guaranteed Notes amounting to US$ 1 billion, with Deutsche Bank Trust Company Americas, acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from December 28, 2007 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

Issued in 2006

On October 16, 2006, MH issued Guaranteed Notes amounting to a total of US$ 1 billion with Deutsche Bank Trust Company Americas, acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually from April 17, 2007 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

On October 17, 2011, MH paid the Guaranteed Notes which has matured with price a nominal value of US$ 450 million.

These Guaranteed Notes are irrevocably and unconditionally guaranteed by the Company and its subsidiaries, if any.

The Indenture is governed that :

- No later than 30 days following the occurrence of both an event in which the Government of Indonesia ceases to own, directly or indirectly, more than 50% of the voting securities of the Company or, if and when issued, the Class A Dwiwarna Share and an event in a rating decline (Change of Control Triggering Event), Majapahit Holding B.V. may be required to make an offer to repurchase all Guaranteed Notes outstanding at a purchase price equal to 101% of their principal amount plus accrued and unpaid interest, if any, to the date of repurchase. The Guaranteed Notes are subject to redemption in whole, at 100% of their principal amount, together with any accrued interest, at the option of Majapahit Holding B.V. at a certain time in the event of certain changes affecting taxes of The Netherlands or Indonesia.

- Pembatasan tertentu termasuk antara lain: penambahan pinjaman sesuai dengan "Rasio Pengecualian", yang setelah memperhitungkan pengaruhnya terhadap pinjaman diperkenankan minimum 2 : 1; pemberian jaminan; pembayaran dividen; penggabungan usaha, akuisisi dan penjualan aset.

Perusahaan dan entitas anak memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin ini digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi program percepatan pembangunan fasilitas tenaga listrik, konstruksi rutin dan untuk tujuan umum korporasi.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Surat Utang Jangka Menengah Global ini memperoleh peringkat "Baa3 stable" dari Moody's Investor Service, Inc., dan "BB" dari Standard and Poor's serta "BBB-" dari Fitch.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Obligasi Terjamin ini memperoleh peringkat "Baa3" dari Moody's Investor Service, Inc., dan "BB" dari Standard and Poor's serta "BBB-" dari Fitch.

- Certain covenants, including, among others, the incurrence of additional indebtedness along with the "Ratio Exception", that after giving effect to the permitted indebtedness is at least 2 : 1; the incurrence of liens; the payment of dividends; mergers, acquisitions and disposals.

The Company and its subsidiaries complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee.

The proceeds from Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes issued were used to fund the capital expenditure requirements in connection with the Fast Track Program, regular construction and for general corporate purposes.

As of December 31, 2013, these Global Medium Term Notes are rated as "Baa3 stable" by Moody's Investors Service, Inc., and "BB" by Standard and Poor's, and "BBB-" by Fitch.

As of December 31, 2013, these Guaranteed Notes are rated as "Baa3" by Moody's Investors Service, Inc., and "BB" by Standard and Poor's, and "BBB-" by Fitch.

28. UTANG LISTRIK SWASTA

Akun ini merupakan utang listrik swasta yang direstrukturisasi melalui renegosiasi dengan penyedia dan pengembang listrik swasta dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pemasok

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
PT Paiton Energy (US$ 578.942.401 tanggal 31 Desember 2013, US$ 598.568.336 tanggal 31 Desember 2012, US$ 617.274.032 tanggal 1 Januari 2012)	7.056.729	5.788.156	5.597.441	PT Paiton Energy (US$ 578,942,401 as of December 31, 2013, US$ 598,568,336 as of December 31, 2012, US$ 617,274,032 as of January 1, 2012)
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	272.454	206.013	184.130	Less current maturities
Bagian jangka panjang	6.784.275	5.582.143	5.413.311	Long-term portion

28. ELECTRICITY PURCHASE PAYABLE

This account represents electricity purchase payable, which was restructured through renegotiation with Independent Power Producers with details as follows:

a. By creditor

b. Berdasarkan jadwal pembayaran pokok

b. By installment schedule, at nominal amount

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Dibayarkan:				Payable in:
Dalam satu tahun	272.454	206.013	184.130	Within one year
Pada tahun kedua	264.393	199.918	178.682	In the second year
Pada tahun ketiga	277.400	209.753	187.472	In the third year
Pada tahun keempat	291.047	220.072	196.695	In the fourth year
Setelah lima tahun	5.951.435	4.952.400	4.850.462	After five years
Jumlah pembayaran	7.056.729	5.788.156	5.597.441	Total payments

Utang kepada PT Paiton Energy dikenakan bunga per tahun sebesar 4,81% dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2031.

Payable to PT Paiton Energy bears annual interest of 4.81%, and payable in 360 monthly installments from January 1, 2002 until December 1, 2031.

29. UTANG PIHAK BERELASI

29. PAYABLE TO RELATED PARTIES

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
PT Mitra Energi Batam	6.304	7.867	9.174	PT Mitra Energi Batam
PT Dalle Energy Batam	3.388	5.881	6.248	PT Dalle Energy Batam
Jumlah	9.692	13.748	15.422	Total
Dikurangi bagian jangka panjang	6.906	9.675	13.991	Less long-term portion
Bagian jangka pendek	2.786	4.073	1.431	Current portion

PT Mitra Energi Batam (MEB) dan PT Dalle Energy Batam (DEB)

Utang kepada MEB dan DEB merupakan utang oleh PLN Batam masing-masing untuk pembelian *switchyard* dan pembayaran atas setoran saham.

PT Mitra Energi Batam (MEB) and PT Dalle Energy Batam (DEB)

Payable to MEB and DEB are payable by PLN Batam for purchases of switchyard and payment of purchase of shares of stock, respectively.

30. UTANG USAHA

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut :

30. TRADE ACCOUNTS PAYABLE

This account represents payables arising from purchases of electricity, fuel, goods and services, with details as follows :

a. Berdasarkan pemasok / a. By creditor

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Pihak berelasi (Catatan 52)				Related parties (Note 52)
Pembelian tenaga listrik				Purchases of electricity
PT Sumber Segara Primadaya				PT Sumber Segara Primadaya
Rupiah	147.035	161.406	16.289	Rupiah
US$	103.805	3.080	-	US$
PT Pertamina Geothermal Energy - US$	88.489	96.071	11.607	PT Pertamina Geothermal Energy - US$
PT Dalle Energy Batam				PT Dalle Energy Batam
Rupiah	23.790	24.846	19.810	Rupiah
US$	20.808	18.602	17.989	US$
PT Bajradaya Sentranusa				PT Bajradaya Sentranusa
Rupiah	8.913	9.338	8.468	Rupiah
US$	60.773	12.783	5.779	US$
PT Metaepsi Pejebe Power Generation				PT Metaepsi Pejebe Power Generation
Rupiah	2.225	1.736	2.755	Rupiah
US$	81.292	2.724	14.581	US$
PT Mitra Energy Batam - Rupiah	-	6.225	2.622	PT Mitra Energy Batam - Rupiah
PT Geo Dipa Energi - US$	-	-	5.956	PT Geo Dipa Energi - US$
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa				Purchases of fuel, goods and services
Pertamina				Pertamina
Rupiah	9.047.845	11.749.757	12.668.900	Rupiah
US$	946.265	1.246.597	240.256	US$
PT Tambang Batubara				PT Tambang Batubara
Bukit Asam - Rupiah	739.129	1.017.158	768.398	Bukit Asam - Rupiah
PT Wijaya Karya - Rupiah	111.696	37.625	-	PT Wijaya Karya - Rupiah
PT Perusahaan Gas Negara				PT Perusahaan Gas Negara
Rupiah	84.721	67.984	61.621	Rupiah
US$	547.996	339.941	175.117	US$
PT Jasa Tirta - Rupiah	52.117	-	-	PT Jasa Tirta - Rupiah
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali				PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
Rupiah	51.169	-	-	Rupiah
PT Nusantara Regas - US$	9.315	-	-	PT Nusantara Regas - US$
PT Transportasi Gas Indonesia - Rupiah	2.928	-	-	PT Transportasi Gas Indonesia - Rupiah
PT Surveyor Indonesia - Rupiah	3.334			PT Surveyor Indonesia - Rupiah
PT Sucofindo - Rupiah	2.076	-	-	PT Sucofindo - Rupiah
PT Superintending Company Of Indonesia				PT Superintending Company Of Indonesia
Rupiah	989	-	-	Rupiah
Koperasi Karyawan - Rupiah	-	98.503	47.569	Employee Cooperative - Rupiah
PT PAL Indonesia - Rupiah	-	-	2.852	PT PAL Indonesia - Rupiah
Jumlah utang usaha pihak berelasi	12.136.710	14.894.376	14.070.569	Total of trade accounts payable to related parties
Pihak ketiga				Third parties
Pembelian tenaga listrik				Purchases of electricity
PT Paiton Energy				PT Paiton Energy
Rupiah	749.718	998.157	317.591	Rupiah
US$	253.954	110.302	-	US$
PT Jawa Power				PT Jawa Power
Rupiah	379.226	660.972	450.736	Rupiah
US$	111.654	51.284	7.106	US$
Chevron Geothermal Salak, Ltd. - US$	255.600	200.675	165.489	Chevron Geothermal Salak, Ltd. - US$
Star Energy Geothermal, Ltd. - US$	161.518	148.017	69.820	Star Energy Geothermal, Ltd. - US$
Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. - US$	-	109	173.269	Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. - US$
Lainnya (masing-masing dibawah 5% dari sub jumlah)				Others (each below 5% of subtotal)
Rupiah	866.114	1.152.558	415.393	Rupiah
US$	1.124.196	204.471	268.921	US$
Sub jumlah	3.901.980	3.526.545	1.868.325	Subtotal
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa				Purchases of fuel, goods and services
Lainnya (masing-masing dibawah 5% dari sub jumlah)				Others (each below 5% of subtotal)
Rupiah	8.280.756	6.572.179	5.571.770	Rupiah
US$	2.207.056	694.782	402.574	US$
EUR	-	67.237	32.968	EUR
JPY	-	487	-	JPY
Sub jumlah	10.487.812	7.334.685	6.007.312	Subtotal
Jumlah utang usaha pihak ketiga	14.389.792	10.861.230	7.875.637	Total of trade accounts payable to third parties
Jumlah utang usaha	26.526.502	25.755.606	21.946.206	Total trade accounts payable

Jangka waktu kredit pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 hari.

Credit terms of payable arising from purchase of electricity, fuel, goods and services, both local and foreign, are approximately 30 days.

b. Berdasarkan umur / b. By age category

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
1 - 180 hari	26.231.014	24.888.058	21.719.472	1 - 180 days
181 - 360 hari	76.341	823.563	80.865	181 - 360 days
Lebih dari 360 hari	219.147	43.985	145.869	More than 360 days
Jumlah	26.526.502	25.755.606	21.946.206	Total

Rincian utang usaha dalam mata uang asing adalah sebagai berikut :

Details of trade accounts payable in foreign currencies are as follows :

	31 Desember/*December 31,* 2013		31 Desember/*December 31,* 2012		1 Januari /*January 1, 2012*		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
US$	482.749.364	588.140.232	323.623.520	3.129.439	171.864.138	1.558.464	US$
EUR	-	-	5.248.831	67.237	2.808.420	32.968	EUR
JPY	-	-	4.342.359	486	-	-	JPY
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	Others
Jumlah		588.140.232		3.197.162		1.591.432	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

31. UTANG LAIN-LAIN / 31. OTHER PAYABLES

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan				Acquisition of property, plant and equipment and construction in progress
Rupiah	10.777.909	11.807.184	8.687.076	Rupiah
US$ 385.592.348 tahun 2013, US$ 273.512.428 tahun 2012 dan US$ 326.498.191 tanggal 1 Januari 2012	4.699.985	2.644.865	2.960.686	US$ 385,592,348 in 2013, US$ 273,512,428 in 2012 and US$ 326,498,191 as of January 1, 2012
EUR 12.038.340 tanggal 31 Desember 2013 EUR 10.131.991 tahun 2012 dan EUR 46.285.639 tanggal 1 Januari 2012	202.502	129.789	543.346	EUR 12,038,340 in 2013, EUR 10,131,991 in 2012 and EUR 46,285,639 as of January 1, 2012
CHF 22.829.614 tahun 2013, CHF 22.829.614 tahun 2012 dan CHF 30.803.006 tanggal 1 Januari 2012	313.491	241.918	296.820	CHF 22,829,614 in 2013, CHF 22,829,614 in 2012 and CHF 30,803,006 as of January 1, 2013
JPY 1.846.231.338 tahun 2013, JPY 1.758.374.974 tahun 2012 dan JPY 1.233.966.315 tanggal 1 Januari 2012	214.474	196.880	144.131	JPY 1,846,231,338 in 2013, JPY 1,758,374,974 in 2012 and JPY 1,233,966,315 as of January 1, 2012
SGD 50.880 tahun 2012	-	402	-	SGD 50,880 in 2012
NZD 335.075 tahun 2013 dan NZD 300.769 tanggal 1 Januari 2012	3.358	-	2.107	NZD 335,075 in 2013 and NZD 300,769 as of January 1, 2012
Pemerintah daerah	1.397.898	737.581	661.953	Local government
Uang muka penjualan tenaga listrik	323.630	235.805	177.166	Advances received on sale of electricity
Karyawan	74.142	148.983	151.298	Employees
Lain-lain	437.168	405.930	303.475	Others
Jumlah	18.444.557	16.549.337	13.928.058	Total
Dikurangi bagian jangka panjang	221.150	153.530	196.508	Less long-term portion
Bagian jangka pendek	18.223.407	16.395.807	13.731.550	Current portion

Pemerintah daerah

Utang kepada Pemerintah Daerah merupakan jumlah yang ditagih Perusahaan dari pelanggan untuk penerangan jalan umum. Selanjutnya akan diteruskan pada Pemerintah Daerah.

Local Government

Payable to Local Government represents amount collected by the Company from the customer for streetlights. This is subsequently remitted to the respective Local Government.

Uang muka penjualan tenaga listrik

Akun ini merupakan kas yang diterima atas penjualan listrik prabayar.

Advances received on sale of electricity

This account represents cash received for sale of prepaid electricity.

Karyawan

Utang kepada karyawan terutama merupakan penerimaan dimuka atas cicilan penjualan rumah dinas.

Employees

Payable to employees mainly represent receipt of advance installment payment from employees related to house sale.

32. UTANG PAJAK / 32. TAXES PAYABLE

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Pajak kini (Catatan 47)	315.767	417.825	491.662	Current tax (Note 47)
Pajak penghasilan				Income taxes
Pasal 21	79.869	57.845	51.460	Article 21
Pasal 22	26.060	99	69	Article 22
Pasal 23	43.320	28.350	53.684	Article 23
Pasal 15, 25 dan 26	316.462	171.916	115.742	Article 15, 25 and 26
Pasal 29 tahun 2010	-	-	13.173	Article 29 for the years 2010
Pajak pertambahan nilai	393.457	424.678	184.673	Value added tax
Pajak bumi dan bangunan	146	30	-	Land and building taxes
Surat Tagihan Pajak	-	-	3.997	Tax Collection Notice
Bea materai	12.418	10.467	6.155	Stamp duty
Pajak selisih penilaian kembali aset tetap	34.894	34.894	34.894	Tax on revaluation increment on property, plant and equipment
Jumlah	1.222.393	1.146.104	955.509	Total

33. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR / 33. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Bunga dan beban keuangan				Interest and financing charges
Pihak berelasi				Related parties
Utang usaha atas pembelian BBM	18.266	36.181	68.646	Trade accounts payable on purchases of fuel
Utang bank dan surat utang jangka menengah	286.252	211.954	142.976	Bank loans and medium term notes
Utang penerusan pinjaman	281.653	264.493	263.378	Tw o-step loans
Jumlah pihak berelasi	586.171	512.628	475.000	Total related parties
Pihak ketiga				Third parties
Utang bank	394.358	331.083	278.630	Bank loans
Utang obligasi	1.473.325	1.207.459	1.093.305	Bonds payable
Utang sew a pembiayaan	1.795.763	2.087.798	1.295.228	Lease liabilities
Utang listrik sw asta	41.185	41.077	35.911	Electricity purchase payable
Jumlah pihak ketiga	3.704.631	3.667.417	2.703.074	Total third parties
Sub jumlah	4.290.802	4.180.045	3.178.074	Subtotal
Biaya operasional	4.423.241	3.400.900	2.882.273	Operational charges
Jumlah	8.714.043	7.580.945	6.060.347	Total

Rincian biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing adalah sebagai berikut :

Details of accrued expenses in foreign currencies are as follows :

	31 Desember/*December 31,* 2013		31 Desember/*December 31,* 2012		1 Januari/*January1,* 2012		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*	
US$	254.388.120	3.100.737	125.718.469	1.215.698	200.659.859	1.819.584	US$
JPY	2.805.331.271	325.892	20.234.731.093	2.265.618	5.361.966.084	626.278	JPY
EUR	842.301	14.169	1.017.716	13.037	1.175.918	13.804	EUR
Lain-lain **)	278.176	3.391	345.764	3.344	357.645	3.243	Others **)
Jumlah		3.444.189		3.497.697		2.462.909	Total

*) Dalam jumlah penuh
**) Biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan.

*) In full amount
**) Accrued expenses denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at reporting date.

34. UANG JAMINAN LANGGANAN

Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besar daya dan golongan tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut:

34. CUSTOMERS' SECURITY DEPOSITS

This account represents security deposits from customers determined based on power supply and electricity tariff. Customers' security deposits will be refunded, net of unpaid electricity bills, when customers discontinue subscribing the electricity. The details are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Saldo awal	6.455.405	6.511.261	6.544.422	Beginning balance
Piutang lain-lain (Catatan 16)	3.272.957	-	-	Others receivables (Note 16)
Penambahan (pengembalian) - bersih	379.040	(55.856)	(33.161)	Additions (refund) - net
Saldo akhir	10.107.402	6.455.405	6.511.261	Ending balance

35. UTANG BIAYA PROYEK

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor atas biaya konstruksi dan pengadaan material yang akan direklasifikasi ke akun penerusan pinjaman pada saat penerbitan *Withdrawal Authorization* (WA) atau dokumen lain yang sejenis.

35. PROJECT COST PAYABLE

This account represents payable to contractors arising from construction of property and equipment and purchases of materials. This account will be reclassified into two-step loans account when the Company receives the Withdrawal Authorization (WA) or other similar documents.

36. PENJUALAN TENAGA LISTRIK

Penjualan tenaga listrik menurut pelanggan adalah sebagai berikut :

36. SALE OF ELECTRICITY

Sale of electricity by customers are as follows :

	2013	2012	
Pihak berelasi			Related parties
Badan Usaha Milik Negara	5.140.658	3.096.990	State-owned enterprises
Pihak ketiga			Third parties
Umum	141.054.260	117.371.592	Public
Lembaga dan kementerian	6.359.523	5.386.654	Institutions and Ministries
TNI dan Polri	931.165	866.411	Indonesian Armed Forces
Jumlah pihak ketiga	148.344.948	123.624.657	Total of third parties
Jumlah	153.485.606	126.721.647	Total

Penjualan tenaga listrik tahun 2013 dan 2012 didasarkan pada Tarif Dasar Listrik, yang ditetapkan oleh Pemerintah, sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 30 Tahun 2012, tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 07 Tahun 2010, tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 33 Tahun 2008, tentang harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.
- Peraturan Walikota Batam No. 40 Tahun 2012, tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.
- Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 1 Tahun 2010, tentang penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan.

Tidak terdapat penjualan kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari penjualan tenaga listrik.

Sale of electricity in 2013 and 2012 is based on basic electricity tariff determined by the Government as follows:

- Based on the regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resource of the Republic of Indonesia No. 30 Year 2012, regarding the tariff of electricity provided by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 07 Year 2010, regarding the price of electricity is provided by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 33 Year 2008, regarding the selling price of electricity is provided by PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.
- Regulation of the Mayor of Batam No. 40 Year 2012, regarding the price of electricity is provided by PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.
- Regulation Local of Government of Tarakan No. 1 Year 2010, regarding the tariff of electricity for consumers provided by PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan.

The Company has no single customer from which it obtains its revenue of more than 10% of total sale of electricity.

37. SUBSIDI LISTRIK PEMERINTAH

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui Perusahaan. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik Tahun Anggaran 2013 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.02/2013 tanggal 28 Nopember 2013. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik Tahun Anggaran 2012 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 111/PMK.02/2007 tanggal 14 September 2007 yang diperbaharui dengan Peraturan No. 162/PMK.02/2007 tanggal 17 Desember 2007. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula, termasuk tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi pertama tanggal 22 Juli 2013, pagu tertinggi subsidi listrik tahun anggaran 2013 ditetapkan sebesar Rp 99.979.720 juta, termasuk 7% margin diatas biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pagu tertinggi subsidi listrik tahun anggaran 2012 ditetapkan sebesar Rp 90.076.230 juta, termasuk 7% margin diatas biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

Pada tanggal 25 Februari 2014 dan 3 April 2013, Perusahaan telah menerima hasil audit perhitungan subsidi listrik tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 101.207.859 juta dan Rp 103.331.285 juta.

37. GOVERNMENT'S ELECTRICITY SUBSIDY

The Government of Republic of Indonesia has provided electricity subsidy to customers through the Company. Procedure for the calculation and payment of electricity subsidy for budget year 2013 is using the regulation of Minister of Finance of Republic Indonesia No. 170/PMK.02/2013 dated November 28, 2013. Procedure for the calculation and payment of electricity subsidy for budget year 2012, is using the Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 111/PMK.02/2007 dated September 14, 2007, which has been amended by Regulation No. 162/PMK.02/2007 dated December 17, 2007. The electricity subsidy is computed as the negative difference between the average sales prices (Rp/kWh) of each tariff category less the cost of electricity supplies on the voltage for each tariff category multiplied by the electricity sales volume (kWh) of each tariff category. The cost of electricity supplies is computed based on the formula, including the rate of transmission and distribution losses which is determined by the Directorate General of Electricity and Energy Consumption under the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Based on the Approval Letter of Budget Performance List (DIPA) first revision dated July 22, 2013, the electricity subsidy plafond for budget year 2013 amounted to Rp 99,979,720 million, which includes 7% margin above the costs of supplied electricity.

Based on the Approval Letter of Budget Performance List (DIPA), the electricity subsidy plafond for budget year 2012 amounted to Rp 90,076,230 million, which includes 7% margin above the costs of supplied electricity.

The amount of electricity subsidy in a budget year is based on the result of the compliance audit of the usage of the electricity subsidy performed by an auditor assigned by the Directorate General of Budget under the Ministry of Finance.

On February 25, 2014 and April 3, 2013, the Company agreed with the result of audit of 2013 and 2012 electricity subsidy computation amounting to Rp 101,207,859 million and Rp 103,331,285 million, respectively.

Pendapatan subsidi listrik dirinci sebagai berikut:

The details of revenue from electricity subsidy are as follows:

	2013	2012	
Realisasi penerimaan subsidi tahun anggaran berjalan	79.413.930	90.076.230	Realization of subsidy from current year budget
Piutang subsidi listrik tahun anggaran berjalan (Catatan 15)	21.793.929	13.255.055	Subsidy receivable from current year budget (Note 15)
Jumlah pendapatan subsidi listrik	101.207.859	103.331.285	Total revenue from electricity subsidy

38. PENDAPATAN USAHA LAINNYA

38. OTHER REVENUES

	2013	2012	
Jaringan dan jasa telekomunikasi	651.523	544.393	Telecommunication network and service
Perubahan daya tersambung dan administrasi	33.715	51.957	Upgrading of electricity power and administration fees
Sewa transformator	132.697	61.821	Transformer rental
Jasa-jasa dan lainnya	307.843	638.890	Services and others
Jumlah	1.125.778	1.297.061	Total

39. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

39. FUEL AND LUBRICANTS EXPENSE

	2013	2012	
Bahan Bakar Minyak			Fuel
Solar High Speed Diesel	59.220.384	59.205.542	Solar High Speed Diesel
Residu	8.970.174	12.101.023	Residue
Solar Industrial Diesel	29.469	22.504	Solar Industrial Diesel
Lainnya	144.711	72.863	Others
Sub jumlah	68.364.738	71.401.932	Subtotal
Bahan Bakar - Non Minyak			Nonfuel
Gas alam	37.785.922	23.755.659	Natural gas
Batubara	37.167.790	37.281.547	Coal
Panas bumi	3.706.203	3.611.778	Geothermal
Air	317.907	207.452	Water
Sub jumlah	78.977.822	64.856.436	Subtotal
Minyak pelumas	291.191	277.127	Lubricants
Jumlah	147.633.751	136.535.495	Total

44,72% dan 51,59% dari jumlah beban bahan bakar dan pelumas masing-masing untuk tahun 2013 dan 2012, dibeli dari pihak berelasi.

44.72% and 51.59% of the total fuel and lubricants expense in 2013 and 2012, respectively, were purchased from related parties.

40. BEBAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK

Akun ini termasuk pembelian tenaga listrik dari IPP selama masa komisioning dan pembelian tenaga listrik dari kelebihan produksi dari IPP tertentu. Rinciannya adalah sebagai berikut :

40. PURCHASED ELECTRICITY

This account includes purchase of electricity from IPPs during commissioning stage and purchase of excess electricity generated by certain IPPs. The details are as follows:

	2013	2012	
PT Cikarang Listrindo	1.534.398	1.171.291	PT Cikarang Listrindo
PT Indonesia Asahan Aluminium Kuala Tanjung	117.869	1.072	PT Indonesia Asahan Aluminium Kuala Tanjung
PT Kalimantan Powerindo	113.198	106.921	PT Kalimantan Powerindo
PT Paiton Energy	-	395.774	PT Paiton Energy
PT Cirebon Electric Power	-	275.234	PT Cirebon Electric Power
PT Bosowa Energi	-	257.370	PT Bosowa Energi
Lain-lain (dibawah 5% dari jumlah)	628.325	731.962	Others (each below 5% of total)
Jumlah	2.393.790	2.939.624	Total

41. BEBAN SEWA

Akun ini merupakan biaya pembelian tenaga listrik sehubungan perjanjian dengan IPP tertentu yang ditentukan sebagai sewa operasi (Catatan 55).

41. LEASE EXPENSES

This account pertains to operating lease payments to certain arrangements with IPPs (Note 55).

42. BEBAN PEMELIHARAAN

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan, sebagai berikut:

42. MAINTENANCE EXPENSES

This account represents spare parts used and contractor fees for maintenance purposes, as follows:

	2013	2012	
Jasa borongan	13.346.054	11.436.547	Contractor fees
Pemakaian material	6.493.411	6.130.828	Spare parts used
Jumlah	19.839.465	17.567.375	Total

43. BEBAN KEPEGAWAIAN

43. PERSONNEL EXPENSES

	2013	2012	
Imbalan kerja (Catatan 50)	5.026.857	4.892.160	Employee benefits (Note 50)
Gaji	3.749.476	3.251.930	Salaries
Jasa produksi dan insentif prestasi kerja	3.513.942	3.143.922	Bonus and performance incentives
Tunjangan	1.133.128	1.126.295	Allowances
Lain-lain	2.131.660	1.986.669	Others
Jumlah	15.555.063	14.400.976	Total

44. BEBAN USAHA LAIN-LAIN / 44. OTHER OPERATING EXPENSES

	2013	2012	
Baca meter	737.487	588.375	Meter reading
Perjalanan dinas	722.921	623.078	Travel
Pengelolaan pelanggan	657.463	452.770	Customer maintenance
Penagihan rekening dan penertiban pemakaian tenaga listrik	471.864	434.961	Billing collection and orderliness of electricity used
Asuransi	417.136	370.846	Insurance
Teknologi informasi	397.932	311.883	Technological information
Honorarium	353.376	704.866	Honorarium
Pos, telepon dan telegram	122.449	166.250	Postage, telephone and telegraph
Lain-lain (dibawah 5% dari jumlah)	1.600.640	1.555.747	Others (each below 5% of total)
Jumlah	5.481.268	5.208.776	Total

45. BEBAN KEUANGAN / 45. FINANCIAL COST

	2013	2012	
Pihak berelasi			Related parties
Utang sewa pembiayaan	2.086.719	1.994.601	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	1.618.454	1.453.321	Bank loans and medium term notes
Penerusan pinjaman	826.407	917.551	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	616.050	630.062	Government loans
Utang usaha atas pembelian BBM	11.568	101.301	Trade accounts payable on purchase of fuel
Jumlah pihak berelasi	5.159.198	5.096.836	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Utang sewa pembiayaan	17.745.477	14.263.614	Lease liabilities
Utang obligasi	5.858.343	4.470.363	Bonds payable
Utang bank dan surat utang jangka menengah	739.542	527.474	Bank loans and medium term notes
Utang listrik swasta	410.077	375.803	Electricity purchase payable
Lain-lain	233.908	11.467	Others
Jumlah pihak ketiga	24.987.347	19.648.721	Total third parties
Sub jumlah	30.146.545	24.745.557	Subtotal
Penyesuaian nilai wajar			Fair value adjustments
Pihak berelasi			Related parties
Utang kepada Pemerintah	-	(133.466)	Government loans
Jumlah	30.146.545	24.612.091	Total

Penyesuaian nilai wajar berkaitan dengan pengakuan awal untuk mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan ke nilai wajar.

Fair value adjustments pertain to adjustment on initial recognition to recognize financial assets and financial liabilities at fair value.

46. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH

46. OTHERS INCOME (EXPENSES) – NET

	2013	2012	
Penghasilan denda administrasi	1.510.863	1.280.630	Administrative penalty income
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi (Catatan 6)	223.192	76.805	Gain on sale of assets not used in operations (Note 6)
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama (Catatan 8)	200.175	332.623	Equity in net income of associates and joint ventures (Note 8)
Penghasilan jasa dan klaim	87.412	115.902	Claim and service income
Program kemitraan dan bina lingkungan	-	(70.000)	Environmental partnership programs and community development
Beban penelitian	(4.743)	(13.259)	Research expenses
Program pemberdayaan lingkungan	(48.182)	(45.797)	Community development programs
Kerugian penurunan nilai aset tetap (Catatan 6)	(559.027)	(383.196)	Loss on impairment of property, plant and equipment (Note 6)
Lain-lain	382.434	363.544	Others
Jumlah	1.792.124	1.657.252	Total

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 19 Juni 2012, disetujui alokasi dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2012 sebesar Rp 70.000 juta.

Based on the Annual General Stockholder's Meeting dated June 19, 2012, the approved allocation of funds for Environmental Partnership Program and Community Development in 2012 amount to Rp 70,000 million.

47. PAJAK PENGHASILAN

Beban (manfaat) pajak Perusahaan dan entitas anak terdiri dari :

47. INCOME TAX

Tax expense (benefit) of the Company and its subsidiaries consist of the following :

	2013 *)	2012 *)	
Pajak kini	1.178.036	1.088.930	Current tax
Pajak tangguhan	(9.721.379)	(2.150.587)	Deferred tax
Jumlah manfaat pajak	(8.543.343)	(1.061.657)	Total tax benefit

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*) As restated - Note 56

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan adalah sebagai berikut :

Current Tax

A reconciliation between income (loss) before tax per consolidated statements of comprehensive income and taxable income (fiscal losses) of the Company is as follows :

	2013 *)	2012 *)	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	(34.778.958)	5.480.282	Income (loss) before tax per consolidated statements of comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	(3.469.391)	(3.501.721)	Income before tax attributable to subsidiaries
Rugi sebelum pajak Perusahaan	(38.248.349)	1.978.561	Loss before tax - the Company
Perbedaan temporer :			Temporary differences :
Sewa pembiayaan	22.581.520	8.092.418	Lease expenses
Penyambungan pelanggan	72.925	174.563	Customer connection fees
Penyusutan aset tetap	(8.407.873)	(7.194.754)	Depreciation
Imbalan kerja	2.626.307	2.763.625	Employee benefits
Beban kerugian penurunan nilai piutang dan penurunan nilai persediaan	160.172	162.679	Impairment losses of account receivable and decline in value of inventories
Amortisasi biaya emisi obligasi	(3.499)	(1.171)	Amortization of bonds issuance costs
Beban (penghasilan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			Nondeductible expenses (nontaxable income)
Kesejahteraan karyawan	663.231	551.144	Employee welfare
Penyusutan rumah dinas	12.907	10.715	Depreciation of guest house
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(351.535)	(298.923)	Interest income subjected to final tax
Beban lain tidak dapat dikurangkan	2.434.647	1.519.192	Other nondeductible expenses
Laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan sebelum kompensasi kerugian	(18.459.547)	7.758.049	The Company's taxable income (fiscal loss) before fiscal loss carry forward
Rugi fiskal - 2008	-	(8.445.860)	Fiscal loss - 2008
Akumulasi rugi fiskal Perusahaan	(18.459.547)	(687.811)	Accumulated fiscal losses the Company

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*) As restated - Note 56

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. Manajemen memperkirakan bahwa akumulasi kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan laba fiskal di masa mendatang masing-masing sebesar Rp 18.459.547 juta dan Rp 687.811 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. Oleh karena itu, aset pajak tangguhan yang diakui masing-masing sebesar Rp 4.614.887 juta dan Rp 171.954 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

The fiscal loss can be utilized against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the fiscal loss was incurred. Management believes that probable future taxable profits will be available to utilize accumulated fiscal losses amounting to Rp 18,459,547 million and Rp 687,811 million as of December 31, 2013 and 2012, respectively. Hence, deferred tax of Rp 4,614,887 million and Rp 171,954 million as of December 31, 2013 and 2012, respectively, was recognized on such fiscal losses.

Perhitungan beban dan utang pajak kini (pajak penghasilan lebih bayar) adalah sebagai berikut :

Current tax expense and payable (income tax overpayment) are as follows :

	2013	2012	
Beban pajak kini			Current tax expense
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	1.178.036	1.088.930	Subsidiaries
Jumlah	1.178.036	1.088.930	Total
Pembayaran pajak dimuka			Prepayment of taxes
Perusahaan			The Company
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 22	155.799	130.111	Article 22
Pasal 23	9.425	664	Article 23
Pasal 25	1.833.469	-	Article 25
Sub jumlah	1.998.693	130.775	Subtotal
Entitas anak	941.753	690.856	Subsidiaries
Jumlah	2.940.446	821.631	Total
Utang pajak kini (pajak penghasilan lebih bayar) dikurangi pajak dibayar dimuka	(1.762.410)	267.299	Current tax payable (income tax overpayment) net of tax prepayments
Terdiri dari:			Consist of:
Utang pajak kini			Current tax payable
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	315.767	417.825	Subsidiaries
Jumlah utang pajak kini	315.767	417.825	Total current tax payable
Pajak penghasilan lebih bayar			Income tax overpayment
Perusahaan	(1.998.693)	(130.775)	The Company
Entitas anak	(79.484)	(19.751)	Subsidiaries
Jumlah pajak penghasilan lebih bayar	(2.078.177)	(150.526)	Total income tax overpayment

Rugi fiskal dan pajak penghasilan lebih bayar Perusahaan dan utang pajak entitas anak untuk tahun 2012 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Fiscal loss and corporate income tax overpayment for the Company and tax payable for the subsidiaries for the fiscal year 2012 are in accordance with the corporate tax returns filed with the Tax Service Office.

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

The details of the Company and its subsidiaries deferred tax assets and liabilities are as follows:

	1 Januari/ *January 1,* 2013 *)	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to income for the period* *)	31 Desember/ *December 31,* 2013 *)	
Aset pajak tangguhan -				Deferred tax assets
Entitas anak - bersih	28.759	12.378	41.137	Subsidiaries - Net
Liabilitas pajak tangguhan				Deferred tax liabilities
Perusahaan				The Company
Aset pajak tangguhan				Deferred tax assets
Akumulasi rugi fiskal	171.954	4.442.933	4.614.887	Accumulated fiscal losses
Liabilitas imbalan kerja	5.289.592	5.622.995	10.912.587	Employee benefit obligation
Pendapatan ditangguhkan	216.842	656.577	873.418	Deferred income
Sewa pembiayaan	4.585.060	27.902	4.612.962	Leases
Jumlah	10.263.448	10.750.407	21.013.854	Total
Liabilitas pajak tangguhan				Deferred tax liabilities
Aset tetap	(13.952.700)	(1.167.688)	(15.120.388)	Property, plant and equipment
Lainnya	(1.255)	(874)	(2.129)	Others
Jumlah	(13.953.955)	(1.168.562)	(15.122.517)	Total
Bersih	(3.690.507)	9.581.845	5.891.338	Net
Entitas anak - bersih	(4.029.941)	127.156	(3.902.785)	Subsidiaries - net
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(7.720.448)	9.709.001	1.988.553	Deferred tax liabilities - net
Manfaat pajak tangguhan		9.721.379		Deferred tax benefit

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*) As restated - Note 56

	1 Januari/ *January 1,* 2012 *)	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to income for the period* *)	31 Desember/ *December 31,* 2012 *)	
Aset pajak tangguhan -				Deferred tax assets
Entitas anak - bersih	18.018	10.741	28.759	Subsidiaries - Net
Liabilitas pajak tangguhan				Deferred tax liabilities
Perusahaan				The Company
Aset pajak tangguhan				Deferred tax assets
Akumulasi rugi fiskal	-	171.954	171.954	Accumulated fiscal losses
Liabilitas imbalan kerja	4.598.685	690.907	5.289.592	Employee benefit obligation
Pendapatan ditangguhkan	165.584	51.258	216.842	Deferred income
Sewa pembiayaan	2.561.955	2.023.105	4.585.060	Leases
Jumlah	7.326.224	2.937.224	10.263.448	Total
Liabilitas pajak tangguhan				Deferred tax liabilities
Aset tetap	(13.078.516)	(874.184)	(13.952.700)	Property, plant and equipment
Lainnya	(962)	(293)	(1.255)	Others
Jumlah	(13.079.478)	(874.477)	(13.953.955)	Total
Bersih	(5.753.254)	2.062.747	(3.690.507)	Net
Entitas anak - bersih	(4.107.040)	77.099	(4.029.941)	Subsidiaries - net
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(9.860.294)	2.139.846	(7.720.448)	Deferred tax liabilities - net
Manfaat pajak tangguhan		2.150.587		Deferred tax benefit

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*) As restated - Note 56

Rekonsiliasi antara jumlah manfaat pajak dan hasil perkalian rugi akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak efektif adalah sebagai berikut :

A reconciliation between the total tax benefit and the amounts computed by applying the effective tax rates to loss before tax is as follows :

	2013 *)	2012 *)	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	(34.778.958)	5.480.282	Income (loss) before tax per consolidated statements of comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	(3.508.078)	(3.532.192)	Income before tax of the subsidiaries
Rugi sebelum pajak - Perusahaan	(38.287.036)	1.948.090	Loss before tax - the Company
Manfaat pajak sesuai tarif yang berlaku	(9.571.759)	487.022	Tax benefit at prevailing rate
Pengaruh pajak atas			Tax effect on
Pajak tangguhan tidak diakui atas			Unrecognized deferred tax on
Rugi fiskal	-	(2.111.465)	Fiscal losses
Beban kerugian penurunan nilai piutang dan penurunan nilai persediaan	40.043	40.670	Impairment losses of account receivable and decline in value of inventories
Pengakuan aset pajak tangguhan tahun sebelumnya	(746.902)	(924.505)	Recognition of prior year's deferred tax assets
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			Nondeductible expenses (nontaxable income)
Kesejahteraan karyawan	165.808	137.786	Employee welfare
Penyusutan rumah dinas	3.227	2.679	Depreciation of guest house
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(87.884)	(74.731)	Interest income subjected to final tax
Beban lain tidak dapat dikurangkan	608.662	379.798	Other nondeductible expenses
Jumlah manfaat pajak Perusahaan	(9.588.805)	(2.062.746)	Tax benefit - the Company
Beban pajak Entitas Anak	1.045.462	1.001.088	Tax expense - Subsidiaries
Jumlah manfaat pajak	(8.543.343)	(1.061.658)	Total tax benefit

*) Disajikan kembali - Catatan 56

*) As restated - Note 56

Aset pajak tangguhan yang tidak diakui adalah sebagai berikut :

Unrecognized deferred tax asset is as follows :

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari 2012/ *January 1, 2012*	
Perusahaan				The Company
Rugi fiskal	-	-	2.861.588	Fiscal losses
Lainnya	232.229	106.140	94.269	Others
Jumlah	232.229	106.140	2.955.857	Total
Entitas anak				Subsidiaries
Rugi fiskal	25.071	28.720	31.438	Fiscal losses
Jumlah	257.300	134.860	2.987.295	Total

Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

Pada tahun 2013, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan (PPh) badan tahun pajak 2011 sebesar Rp 84.857 juta dan penetapan laba fiskal tahun 2011 sebesar Rp 8.099.968 juta menjadi sebesar Rp 11.506.614 juta. Perusahaan juga menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh pasal 4 ayat 2, pasal 21, pasal 23, dan pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2011 sebesar Rp 11.905 juta. Perusahaan mengajukan Surat Keberatan atas SKPLB PPh badan tahun pajak 2011.

Pada tahun 2012, Perusahaan menerima SKPLB atas PPh badan tahun pajak 2010 sebesar Rp 98.148 juta dan penetapan laba fiskal tahun 2010 sebesar Rp 6.627.167 juta menjadi sebesar Rp 9.627.659 juta. Perusahaan juga menerima SKPKB PPh pasal 4 ayat 2, pasal 21, pasal 23, dan pasal 26 dan PPN tahun 2010 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 141.012 juta. Perusahaan mengajukan Surat Keberatan atas SKPKB PPh pasal 23 dan 26 sebesar Rp 81.094 juta, sedangkan SKPKB sebesar Rp 59.918 juta telah disetujui dan dicatat sebagai beban lain-lain.

Pada tahun 2011, Perusahaan menerima SKPKB dan STP PPh pasal 4 ayat (2), pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 26 dan PPN tahun 2009, 2007 dan 2006 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.636.826 juta. Perusahaan mengajukan surat keberatan atas SKPKB pajak penghasilan pasal 23, pasal 26 dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp 1.360.282 juta, sedangkan SKPKB dan STP sebesar Rp 276.544 juta telah disetujui dan dicatat Perusahaan sebagai beban lain-lain tahun 2011.

Pada tahun 2010, Perusahaan menerima SKPKB dan STP PPh pasal 4 ayat (2), pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26 dan PPN tahun pajak 2008 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.006.727 juta. Perusahaan mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh pasal 23 dan pasal 26 sebesar Rp 707.091 juta, sedangkan SKPKB dan STP sebesar Rp 299.636 juta, telah disetujui dan dicatat Perusahaan sebagai beban lain-lain tahun 2010. Pada tanggal 4 Oktober 2011, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menolak keberatan yang diajukan Perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2011, Perusahaan mengajukan banding atas penolakan dari DJP tersebut.

Tax Assessment Letters

The Company

In 2013, the Company received a tax assessment letter for the overpayment (SKPLB) of corporate income tax for fiscal year 2011 amounting to Rp 84,857 million and for the increase in taxable income for the year 2011 from Rp 8,099,968 million to Rp 11,506,614 million. The Company also received a tax assessment letter for underpayment (SKPKB) of income tax article 4 section 2, article 21, article 23, article 26 and value added tax for fiscal 2011 amounting Rp 11,905 million. The Company filed an objection letter on SKPLB of corporate income tax for fiscal year 2011.

In 2012, the Company received SKPLB of corporate income tax for fiscal year 2010 amounting to Rp 98,148 million and for the increase in taxable income for the year 2010 from Rp 6,627,167 million to Rp 9,627,659 million. The Company also received SKPKB of income tax article 4 section 2, article 21, article 23, article 26 and value added tax for fiscal 2010 with total amount Rp 141,012 million. The Company filed objection letter of SKPKB of income tax article 23 and 26 amounting Rp 81,094 million while SKPKB amounting Rp 59,918 million has been recognized and recorded as other expense.

In 2011, the Company received Tax Assessment Letters for Underpayment (SKPKB) and tax collection notice (STP) of income tax article 4 section (2), article 21, article 22, article 23 and article 26 and value added tax for fiscal year 2009, 2007 and 2006 with total amount of Rp 1,636,826 million. The Company file objection letter on SKPKB of income tax article 23, article 26 and value added tax amounting to Rp 1,360,282 million, while SKPKB and STP amounting to Rp 276,544 million has been recognized and recorded by the Company as other expense in 2011.

In 2010, the Company received SKPKB and STP of income tax article 4 section (2), article 21, article 22, article 23, article 26 and value added tax for fiscal year 2008 with total amount of Rp 1,006,727 million. The Company filed an objection letter on SKPKB of income tax article 23 and article 26 amounting to Rp 707,091 million, while SKPKB and STP amounting to Rp 299,636 million has been recognized and recorded by the Company as other expense in 2010. On October 4, 2011, Director General of Tax (DJP) denied the objection filed by the Company. Furthermore, on December 23, 2011, the Company filed an appeal.

Sehubungan dengan Perusahaan mengajukan surat keberatan dan banding, pembayaran yang telah dilakukan Perusahaan atas SKPKB tersebut sebesar Rp 1.994.986 juta tanggal 31 Desember 2013 dan Rp 2.131.449 juta tanggal 31 Desember 2012 dicatat sebagai pajak dibayar dimuka (Catatan 18).

Due to the objection and appeal filed by the Company against the SKPKB, payment made by the Company for such SKPKB amounting to Rp 1,994,986 million as of December 31, 2013 and Rp 2,131,449 million as of December 31, 2012 was recorded as prepaid taxes (Note 18).

48. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR/DILUSIAN

Laba (Rugi)

Laba (rugi) bersih untuk tujuan perhitungan rugi dan laba per saham dasar tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar (Rp 26.232.034 juta) dan Rp 6.544.859 juta.

Jumlah saham

Rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan rugi dan laba per saham dasar adalah 46.197.380 saham untuk tahun 2013 dan 2012.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

48. BASIC/DILUTED EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Profit (Loss)

Net income (loss) for the computation of basic loss and earnings per share in 2013 and 2012 amounted to (Rp 26,232,034 million) and Rp 6,544,859 million, respectively.

Number of shares

The weighted average number of shares for the computation of basic loss and earnings per share was 46,197,380 shares in 2013 and 2012.

The Company did not have potential dilutive ordinary shares, thus basic earnings per share is similar to diluted earnings per share.

49. DIVIDEN TUNAI DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 7 Mei 2013, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 1.443.800 juta dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp 1.764.644 juta.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 19 Juni 2012, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 3.500.000 juta dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp 3.623.870 juta.

49. CASH DIVIDENDS AND GENERAL RESERVE

Based on the Annual General Stockholders' Meeting dated May 7, 2013 the stockholders approved the distribution of cash dividends amounting to Rp 1,443,800 million and appropriate Rp 1,764,644 million for general reserve.

Based on the Annual General Stockholders' Meeting dated June 19, 2012 the stockholders approved the distribution of cash dividends amounting to Rp 3,500,000 million and appropriate Rp 3,623,870 million for general reserve.

50. IMBALAN KERJA

Imbalan Pasca-Kerja

Program Pensiun Imbalan Pasti

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap. Program pensiun ini memberikan imbalan pasca kerja berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN (Persero) (DP-PLN), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-078/KM.12/2006 tanggal 29 Agustus 2006 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Perusahaan dan entitas anak dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan sebesar 6% dan pemberi kerja sebesar 12,38%.

Imbalan Pasca-Kerja Lain

Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan pasca-kerja lain tanpa pendanaan berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian, tunjangan tambahan penghasilan dan penghargaan purna jabatan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan entitas anak. Imbalan program ini ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja karyawan.

Imbalan Pemeliharaan Kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN dan imbalan pasca kerja lain, Perusahaan dan entitas anak menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan keluarganya yang memenuhi persyaratan.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan kerja jangka panjang tanpa pendanaan berupa uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan pemakaman dan penghargaan winduan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

50. EMPLOYEE BENEFITS

Post-employment Benefits

Defined Benefit Pension Plan

The Company and its subsidiaries established a defined benefit pension plan covering all of their permanent employees. This plan provides pension benefits based on years of service and salaries of the employees.

The pension plan is managed by Dana Pensiun PLN (Persero) (DP-PLN), a related party, which deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated May 15, 1997.

DP-PLN obtained an approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-078/KM.12/2006 dated on August 29, 2006 in relation to the increase in pension benefits provided by the Company and its subsidiaries' pension plan.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees, which is 6% and the employer, which is 12.38%.

Other Post-employment Benefits

The Company and its subsidiaries also provide other unfunded defined post-employment benefit plans such as severance pay, service pay, compensation pay, additional allowance and functional retirement pay for their qualifying employees based on the Company and its subsidiaries' policies. These other post-employment benefits are computed based on the salaries and service years of the employees.

Health Care Benefits

In addition to the pension plan managed by DP-PLN and the other post-employment benefits, the Company and its subsidiaries also provide unfunded health care benefit plans for their pensioners and their eligible dependents.

Long-term Benefits

The Company and its subsidiaries also provide unfunded defined long-term benefit plans such as long service leave, work accident, death and funeral allowances, and eight years service award for their qualifying employees.

Perhitungan imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang ini dihitung oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris independen. Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris adalah sebagai berikut :

The cost of providing post-employment and long-term benefits were calculated by an independent actuary, PT Binaputera Jaga Hikmah. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions :

Umur pensiun normal	56 tahun/*years*	Normal retirement age
Hasil diharapkan dari aset program	10%	Expected rate of return on plan assets
Tingkat diskonto per tahun	8,97% tahun/*year* 2013 dan/*and* 5,98% tahun/*year* 2012	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun		Rate of salary increase per annum
Program pensiun	5%	Pension plan
Imbalan pasca-kerja lain dan imbalan kerja jangka panjang	5%	Other post-employment and long-term benefits
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	9%	Rate of health cost increase

Beban imbalan kerja Perusahaan dan entitas anak dibebankan ke beban kepegawaian adalah sebagai berikut :

The Company and its subsidiaries' employee benefit expenses charged to personnel expenses, are as follows :

	2013					
	Imbalan pasca-kerja/ *Post-employment benefit*			Imbalan kerja jangka panjang/ *Long-term benefits*	Jumlah/ *Total*	
	Program pensiun/ *Pension plan*	Pasca-kerja lain/ *Other post-employment*	Pemeliharaan kesehatan/ *Health care benefits*			
Biaya jasa kini	113.668	761.039	928.505	253.588	2.056.800	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	25.395	-	110	25.505	Past service cost
Hasil aset program diharapkan	(637.663)	-	-	-	(637.663)	Expected return on plan assets
Beban bunga	316.010	786.920	1.580.350	71.613	2.754.893	Interest costs
Keuntungan (kerugian) aktuaria	(2.579)	118.880	720.338	(365.286)	471.353	Actuarial gain (losses)
Dampak pembatasan aset	355.969	-	-	-	355.969	Asset limitation
Jumlah	145.405	1.692.234	3.229.193	(39.975)	5.026.857	Total

	2012					
	Imbalan pasca-kerja/ *Post-employment benefit*			Imbalan kerja jangka panjang/ *Long-term benefits*	Jumlah/ *Total*	
	Program pensiun/ *Pension plan*	Pasca-kerja lain/ *Other post-employment*	Pemeliharaan kesehatan/ *Health care benefits*			
Biaya jasa kini	124.517	657.703	650.935	248.530	1.681.685	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	25.748	-	-	25.748	Past service cost
Hasil aset program diharapkan	(600.583)	-	-	-	(600.583)	Expected return on plan assets
Beban bunga	368.124	833.230	1.505.801	74.442	2.781.597	Interest costs
Keuntungan (kerugian) aktuaria	781	127.502	678.506	(43.381)	763.408	Actuarial gain (losses)
Dampak pembatasan aset	240.305	-	-	-	240.305	Asset limitation
Jumlah	133.144	1.644.183	2.835.242	279.591	4.892.160	Total

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

The Company and its subsidiaries movement in the present value of employee benefits obligation are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2013					
	Program pensiun/ *Pension plan*	Pasca-kerja lain/ *Other post-employment*	Pemeliharaan kesehatan/ *Health care benefits*	Jangka panjang/ *Long-term*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal tahun	5.283.462	13.061.587	26.421.238	1.196.632	45.962.919	Balance at beginning of year
Biaya jasa kini	113.668	761.039	928.505	253.588	2.056.800	Current service cost
Beban bunga	316.010	786.920	1.580.350	71.613	2.754.893	Interest cost
Keuntungan (kerugian) aktuaria	51.832	(4.918.150)	(9.792.347)	(314.503)	(14.973.168)	Actuarial gains (losses)
Manfaat yang dibayarkan	(424.771)	(1.114.737)	(876.048)	(222.743)	(2.638.299)	Benefits paid
Liabilitas Imbalan Kerja awal tahun entitas anak yang diakuisisi	-	83.567	-	110	83.677	Defined benefit obligation beginning of year of subsidiaries acquired
Saldo akhir tahun	5.340.201	8.660.226	18.261.698	984.697	33.246.822	Balance at end of year

	31 Desember/*December 31,* 2012					
	Program pensiun/ *Pension plan*	Pasca-kerja lain/ *Other post-employment*	Pemeliharaan kesehatan/ *Health care benefits*	Jangka panjang/ *Long-term*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal tahun	5.503.573	12.441.418	22.504.925	1.111.136	41.561.052	Balance at beginning of year
Biaya jasa kini	124.517	657.703	650.935	248.530	1.681.685	Current service cost
Beban bunga	368.124	833.230	1.505.801	74.442	2.781.597	Interest cost
Keuntungan (kerugian) aktuaria	(295.877)	66.272	2.194.814	(42.986)	1.922.223	Actuarial gains (losses)
Manfaat yang dibayarkan	(416.875)	(937.036)	(435.237)	(194.490)	(1.983.638)	Benefits paid
Saldo akhir tahun	5.283.462	13.061.587	26.421.238	1.196.632	45.962.919	Balance at end of year

Liabilitas imbalan kerja Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut :

The Company and its subsidiaries' employee benefits obligation are as follows :

	31 Desember/*December 31,* 2013					
	Program pensiun/ *Pension plan*	Pasca-kerja lain/ *Other post-employment*	Pemeliharaan kesehatan/ *Health care benefits*	Jangka panjang/ *Long-term*	Jumlah/ *Total*	
Nilai kini liabilitas	5.340.201	8.660.226	18.261.698	984.697	33.246.822	Present value of obligation
Biaya jasa lalu belum diakui	-	(97.495)	-	-	(97.495)	Unrecognized past service cost
Keuntungan (kerugian) aktuaria belum diakui	(159.116)	1.955.157	(2.799.909)	-	(1.003.868)	Unrecognized actuarial gains (losses)
Kekayaan yang tidak diakui	1.239.908	15.395	-	-	1.255.303	Asset not recognized
Nilai wajar aset program	(6.420.993)	-	-	-	(6.420.993)	Fair value of plan assets
Liabilitas imbalan kerja	-	10.533.283	15.461.789	984.697	26.979.769	Employee benefits obligation
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	-	(1.673.262)	(502.157)	(409.061)	(2.584.480)	Current maturities
Bagian jangka panjang	-	8.860.021	14.959.632	575.636	24.395.289	Long-term portion

	31 Desember/*December 31,* 2012					
	Program pensiun/ *Pension plan*	Pasca-kerja lain/ *Other post-employment*	Pemeliharaan kesehatan/ *Health care benefits*	Jangka panjang/ *Long-term*	Jumlah/ *Total*	
Nilai kini liabilitas	5.283.462	13.061.587	26.421.238	1.196.632	45.962.919	Present value of obligation
Biaya jasa lalu belum diakui	-	(121.905)	-	-	(121.905)	Unrecognized past service cost
Keuntungan (kerugian) aktuaria belum diakui	104.430	(3.056.284)	(13.729.948)	-	(16.681.802)	Unrecognized actuarial gains (losses)
Kekayaan yang tidak diakui	1.268.950	-	-	-	1.268.950	Asset not recognized
Nilai wajar aset program	(6.656.842)	-	-	-	(6.656.842)	Fair value of plan assets
Liabilitas imbalan kerja	-	9.883.398	12.691.290	1.196.632	23.771.320	Employee benefits obligation
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	-	(936.988)	(550.300)	(193.400)	(1.680.688)	Current maturities
Bagian jangka panjang	-	8.946.410	12.140.990	1.003.232	22.090.632	Long-term portion

	1 Januari/*January 1,* 2012					
	Program pensiun/ *Pension plan*	Pasca-kerja lain/ *Other post-employment*	Pemeliharaan kesehatan/ *Health care benefits*	Jangka panjang/ *Long-term*	Jumlah/ *Total*	
Nilai kini liabilitas	5.503.573	12.441.418	22.504.925	1.111.136	41.561.052	Present value of obligation
Biaya jasa lalu belum diakui	-	(146.607)	-	-	(146.607)	Unrecognized past service cost
Keuntungan (kerugian) aktuaria belum diakui	(102.625)	(3.118.388)	(12.213.640)	-	(15.434.653)	Unrecognized actuarial gains (losses)
Kekayaan yang tidak diakui	383.981	-	-	-	383.981	Asset not recognized
Nilai wajar aset program	(5.784.929)	-	-	-	(5.784.929)	Fair value of plan assets
Liabilitas imbalan kerja	-	9.176.423	10.291.285	1.111.136	20.578.844	Employee benefits obligation
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	-	(996.787)	(425.364)	(189.349)	(1.611.500)	Current maturities
Bagian jangka panjang	-	8.179.636	9.865.921	921.787	18.967.344	Long-term portion

Mutasi nilai wajar aset program imbalan kerja Perusahaan dan entitas anak sehubungan dengan program pensiun adalah sebagai berikut :

Movements in the Company and it's subsidiaries fair value of employee benefits plan assets related to pension plan are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Saldo awal tahun	6.656.842	5.784.929	5.401.780	Balance at beginning of year
Pengembalian yang diharapkan dari aset program	637.663	600.583	577.972	Expected return on plan assets
Keuntungan (kerugian) aktuaria	(594.146)	546.881	63.787	Actuarial gains (losses)
Pembayaran imbalan oleh pemberi kerja	145.405	141.324	136.956	Contributions from the employer
Manfaat yang dibayarkan	(424.771)	(416.875)	(395.566)	Benefits paid
Saldo akhir tahun	6.420.993	6.656.842	5.784.929	Balance at end of year

Kategori utama aset program dan pengembalian yang diharapkan dari aset program adalah sebagai berikut:

The major categories of plan assets and expected return from plan assets are as follows:

	Keuntungan yang diharapkan/ *Expected return*			Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets*			
	31 Desember/ *December 31, 2013*	31 Desember/ *December 31, 2012*	1 Januari/ *January 1, 2012*	31 Desember/ *December 31, 2013*	31 Desember/ *December 31, 2012*	1 Januari/ *January 1, 2012*	
	%	%	%	Rp	Rp	Rp	
Instrumen ekuitas	10	10	10	554.614	300.471	379.339	Equity instruments
Instrumen utang	10	10	10	3.857.886	3.307.168	3.280.984	Debt instruments
Properti	10	10	10	590.462	1.067.117	495.528	Property
Lain-lain	10	10	10	1.418.031	1.982.086	1.629.078	Others
Rata-rata tertimbang keuntungan yang diharapkan	10	10	10	6.420.993	6.656.842	5.784.929	Weighted average expected return

Keseluruhan tingkat keuntungan yang diharapkan ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar pada tanggal pengukuran, berlaku untuk periode saat kewajiban diselesaikan.

The overall expected rate of return on assets is determined based on the market expectations prevailing on that date, applicable to the period over which the obligation is to be settled.

Hasil aktual atas aset program adalah sebesar Rp 43.517 juta untuk tahun 2013 dan Rp 1.146.914 juta untuk tahun 2012.

The actual return on plan assets was Rp 43,517 million in 2013 and Rp 1,146,914 million in 2012.

Historis penyesuaian yang terjadi adalah sebagai berikut:

The history of experience adjustments is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2013	31 Desember/ *December 31,* 2012	31 Desember/ *December 31,* 2011	31 Desember/ *December 31,* 2010	31 Desember/ *December 31,* 2009	
Nilai wajar liabilitas imbalan pasti	33.246.822	45.962.919	41.561.052	33.388.204	28.239.134	Present value of employee benefits obligation
Nilai wajar aset program	6.420.993	6.656.842	5.784.929	5.401.780	4.818.094	Fair value of plan asset
Defisit	39.667.815	52.619.761	47.345.981	38.789.984	33.057.228	Deficit
Penyesuaian liabilitas imbalan program	(13.186.477)	3.374.327	6.933.376	4.786.129	2.762.271	Experience adjustments on plan liabilities
Penyesuaian aset program	-	-	-	-	-	Experience adjustments on plan assets

Perusahaan dan entitas anak mengekspektasikan untuk membayar kontribusi pada program pensiun imbalan pasti sebesar Rp 146.154 juta pada tahun berikutnya.

The Company and its subsidiaries expect to make a contribution of Rp 146,154 million to the defined benefits plans during the next financial year.

Pengaruh satu persen perubahan pada biaya imbalan manfaat kesehatan yang diasumsikan akan menyebabkan perubahan agregat biaya jasa dan bunga pada periode-periode berikut:

The effect of a one percentage point change in assumed health care benefits rate would result in aggregate service and interest costs and accumulated healthcare benefit obligation as of these periods:

	31 Desember/ *December 31, 2013*	31 Desember/ *December 31, 2012*	1 Januari/ *January 1, 2012*	
Kenaikan 1%				**Increase 1%**
Biaya jasa agregat dan bunga	3.012.281	2.540.133	2.086.661	Aggregate service and interest cost
Akumulasi liabilitas imbalan kerja untuk biaya kesehatan	21.324.586	30.843.985	25.461.209	Accumulated post retirement obligation for healthcare
Penurunan 1%				**Decrease 1%**
Biaya jasa agregat dan bunga	2.131.330	1.859.337	1.622.365	Aggregate service and interest cost
Akumulasi liabilitas imbalan kerja untuk biaya kesehatan	17.481.069	24.031.401	20.079.578	Accumulated post retirement obligation for healthcare

51. TRANSAKSI NON-KAS

51. NON-CASH TRANSACTIONS

	2013	2012	
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas :			Non-cash investing and financing activities :
Perolehan aset sewaan melalui utang sewa pembiayaan	5.309.239	31.455.143	Addition of leased assets through lease liabilities
Perolehan pekerjaan dalam pelaksanaan melalui :			Additions to construction in progress through :
Penarikan pinjaman dan utang biaya proyek	2.552.334	1.763.525	Drawdown of loans and project cost payable
Bantuan Pemerintah	4.971.059	4.880.137	Government equity participation
Kapitalisasi biaya pinjaman	1.279.751	1.429.617	Capitalization of borrowing costs
Kapitalisasi beban penyusutan	15.307	9.641	Capitalization of depreciation expense
Utang lain-lain	1.190.681	1.975.431	Other payables

52. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat Hubungan Berelasi

a. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara.

b. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi (Catatan 8).

c. Pengurus Koperasi Karyawan juga merupakan karyawan Perusahaan dan entitas anak.

52. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Related Parties

a. Government is Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Stockholder of the Company and State-Owned Enterprises.

b. The Company and its subsidiaries have significant influence on investments in associates (Note 8).

c. Management of Employee Cooperative is composed of the Company and its subsidiaries' employees.

d. Pendiri dan pengawas Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pengurus dan karyawan Perusahaan dan entitas anak.

e. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham mayoritas PT Tugu Kresna Pratama.

f. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

d. The founders and controllers of Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) are composed of management and employees of the Company and its subsidiaries.

e. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) is the majority stockholder of PT Tugu Kresna Pratama.

f. Board of Commissioners and Directors is a member of the key management of the Company and its subsidiaries.

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Balances and Transactions with Related Parties

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2013		31 Desember/ *December 31,* 2012		1 Januari/ *January 1,* 2012		
		Rp	% *)	Rp	% *)	Rp	% *)	
Piutang pihak berelasi	9							Receivables from related parties
PT Perta Daya Gas		188.369	0,03%	-	-	-	-	PT Perta Daya Gas
PT Sumber Segara Primadaya		-	-	-	-	199.470	0,04%	PT Sumber Segara Primadaya
PT Metaepsi Pejebe Power Generation		-	-	-	-	40.806	0,01%	PT Metaepsi Pejebe Power Generation
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		22.345	0,00%	29.048	0,01%	33.350	0,01%	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
PT Tanjung Kasam Power		-	-	12.211	0,00%	-	-	PT Tanjung Kasam Power
PT Dalle Energy Batam		5.314	0,00%	8.922	0,00%	212	0,00%	PT Dalle Energy Batam
PT Mitra Energi Batam		65	0,00%	618	0,00%	6.127	0,00%	PT Mitra Energi Batam
Sub jumlah		216.093	0,03%	50.799	0,01%	279.965	0,06%	Subtotal
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	10							Restricted cash in banks and time deposits
Bank Rakyat Indonesia		930	0,00%	6.600	0,00%	46.628	0,01%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri		47.538	0,01%	48.761	0,01%	8.047	0,00%	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia		71.231	0,01%	56.864	0,01%	-	0,00%	Bank Negara Indonesia
Sub jumlah		119.699	0,02%	112.225	0,02%	54.675	0,01%	Subtotal
Kas dan setara kas	12							Cash and cash equivalents
Bank Rakyat Indonesia		6.541.628	1,10%	10.502.699	1,94%	7.610.659	1,63%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia		5.951.026	1,00%	2.941.045	0,54%	3.190.999	0,68%	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri		5.734.638	0,96%	3.521.702	0,65%	5.859.298	1,25%	Bank Mandiri
Sub jumlah		18.227.292	3,06%	16.965.446	3,13%	16.660.956	3,56%	Subtotal
Investasi jangka pendek	13							Short-term investment
Bank Rakyat Indonesia		87.363	0,01%	296.415	0,05%	56.000	0,01%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia		1.000	0,00%	70.332	0,01%	37.009	0,01%	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri		3.750	0,00%	1.900	0,00%	1.000	0,00%	Bank Mandiri
Sub jumlah		92.113	0,01%	368.647	0,07%	94.009	0,02%	Subtotal
Piutang usaha	14							Trade accounts receivable
Badan Usaha Milik Negara		409.167	0,07%	267.049	0,05%	227.913	0,00%	State-owned companies
Piutang subsidi listrik	15	21.793.929	3,64%	20.565.784	3,80%	12.101.668	2,59%	Receivables on electricity subsidy
Jumlah		40.858.292	6,83%	38.329.950	7,08%	29.419.185	6,24%	Total

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan/Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2013		31 Desember/ *December 31,* 2012		1 Januari/ *January 1,* 2012		
		Rp	% *)	Rp	% *)	Rp	% *)	
Penerusan pinjaman	23	32.707.043	7,07%	29.603.974	7,59%	29.273.112	9,10%	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	24	8.872.509	1,92%	9.041.836	2,32%	6.363.190	1,98%	Government loans
Utang sewa pembiayaan	25							Lease liabilities
PT Wijaya Karya - Navigat		656.535	0,14%	724.902	0,19%	-	-	PT Wijaya Karya - Navigat
PT Sumber Segara Primadaya		6.507.209	1,41%	5.168.889	1,32%	4.851.246	1,51%	PT Sumber Segara Primadaya
PT Bajradaya Sentranusa Asahan		4.227.536	0,91%	3.367.260	0,86%	3.166.941	0,98%	PT Bajradaya Sentranusa Asahan
PT Pertamina Geothermal Energi		858.225	0,19%	687.991	0,18%	651.655	0,20%	PT Pertamina Geothermal Energi
PT Wijaya Karya - Mirlindo Padu Kencana		464.392	0,10%	446.508	0,11%	469.656	0,15%	PT Wijaya Karya - Mirlindo Padu Kencana
PT Dalle Energy Batam		734.065	0,16%	752.967	0,19%	859.683	0,27%	PT Dalle Energy Batam
PT Mitra Energi Batam		117.813	0,03%	144.549	0,04%	152.147	0,05%	PT Mitra Energi Batam
PT Tanjung Kasam Power		1.204.081	0,26%	1.212.730	0,31%	-	-	PT Tanjung Kasam Power
PT Metaepsi Pejebe Power Generation		-	-	-	-	429.489	0,13%	PT Metaepsi Pejebe Power Generation
Sub jumlah		14.769.856	3,20%	12.505.796	3,20%	10.580.817	3,28%	Subtotal
Utang bank dan surat utang jangka menengah	26							Bank loans and medium term notes
Bank Rakyat Indonesia		13.068.429	2,82%	6.416.399	1,64%	5.514.020	1,71%	Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia		4.860.105	1,05%	5.405.148	1,39%	5.653.648	1,76%	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri		10.400.260	2,25%	10.283.135	2,64%	5.481.999	1,70%	Bank Mandiri
Bank DKI		2.084.189	0,45%	2.093.263	0,54%	2.245.573	0,70%	Bank DKI
Pertamina		-	-	1.000.000	0,26%	2.000.000	0,62%	Pertamina
Sub jumlah		30.412.983	6,57%	25.197.945	6,47%	20.895.240	6,49%	Subtotal
Utang pihak berelasi	29							Payable to related parties
PT Mitra Energi Batam		6.304	0,00%	7.867	0,00%	9.174	0,00%	PT Mitra Energi Batam
PT Dalle Energy Batam		3.388	0,00%	5.881	0,00%	6.248	0,00%	PT Dalle Energy Batam
Sub jumlah		9.692	0,00%	13.748	0,00%	15.422	0,21%	Subtotal
Utang usaha	30							Trade accounts payable
Pertamina		9.994.110	2,16%	12.996.354	3,33%	12.909.156	4,01%	Pertamina
PT Tambang Batubara Bukit Asam		739.129	0,16%	1.017.158	0,26%	768.398	0,24%	PT Tambang Batubara Bukit Asam
PT Perusahaan Gas Negara		632.717	0,14%	407.925	0,10%	236.738	0,07%	PT Perusahaan Gas Negara
PT Sumber Segara Primadaya		250.840	0,05%	164.486	0,04%	16.289	0,01%	PT Sumber Segara Primadaya
Koperasi karyawan		-	-	98.503	0,03%	47.569	0,01%	Employee Cooperative
PT Metaepsi Pejebe Power Generation		83.517	0,02%	4.460	0,00%	17.336	0,01%	PT Metaepsi Pejebe Power Generation
PT Dalle Energy Batam		44.598	0,01%	43.448	0,01%	37.799	0,01%	PT Dalle Energy Batam
PT Bajradaya Sentranusa		69.686	0,02%	22.121	0,01%	14.247	0,00%	PT Bajradaya Sentranusa
PT Pertamina Geothermal Energy		88.489	0,02%	96.071	0,02%	11.607	0,00%	PT Pertamina Geothermal Energy
PT Mitra Energi Batam		-	-	6.225	0,00%	2.622	0,00%	PT Mitra Energi Batam
PT Geo Dipa Energi		-	-	-	0,00%	5.956	0,00%	PT Geo Dipa Energi
PT PAL Indonesia		-	-	-	0,00%	2.852	0,00%	PT PAL Indonesia
PT Wijaya Karya		111.696	0,02%	37.625	0,01%	-	-	PT Wijaya Karya
PT Jasa Tirta		52.117	0,01%	-	-	-	-	PT Jasa Tirta
PT Transportasi Gas Negara		2.928	0,00%	-	-	-	-	PT Transportasi Gas Negara
PT Nusantara Regas		9.315	0,00%	-	-	-	-	PT Nusantara Regas
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		51.169	0,01%	-	-	-	-	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
PT Surveyor Indonesia		3.334	0,00%	-	-	-	-	PT Surveyor Indonesia
PT Sucofindo		2.076	0,00%	-	-	-	-	PT Sucofindo
PT Superintending Company of Indonesia		989	0,00%	-	-	-	-	PT Superintending Company of Indonesia
Sub jumlah		12.136.710	2,62%	14.894.376	3,81%	14.070.569	4,36%	Subtotal
Biaya masih harus dibayar	33							Accrued expenses
Penerusan pinjaman		281.653	0,06%	264.493	0,07%	263.378	0,08%	Two-step loans
Utang bank dan surat utang jangka menengah		286.252	0,06%	211.954	0,05%	142.976	0,04%	Bank loans and medium term notes
Utang usaha pembelian bahan bakar		18.266	0,00%	36.181	0,01%	68.646	0,02%	Trade accounts payable on purchase of fuel
Subjumlah		586.171	0,12%	512.628	0,13%	475.000	0,14%	Subtotal
Jumlah		99.494.964	21,50%	91.770.303	23,52%	81.673.350	25,56%	Total

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan/Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2013		31 Desember/ *December 31,* 2012		
		Rp	% *)	Rp	% *)	
Penjualan tenaga listrik	36					Sale of electricity
Badan Usaha Milik Negara		5.140.658	3,35%	3.096.990	2,44%	State-owned enterprises
Jumlah		5.140.658	3,35%	3.096.990	2,44%	Total
Subsidi listrik Pemerintah	37	101.207.859	100,00%	103.331.285	100,00%	Government's electricity subsidy
Beban bahan bakar dan pelumas	39					Fuel and lubricants expense
Pertamina		58.254.669	39,46%	63.834.672	46,75%	Pertamina
PT Perusahaan Gas Negara		5.617.380	3,80%	3.750.359	2,75%	PT Perusahaan Gas Negara
PT Tambang Batubara Bukit Asam		2.153.673	1,46%	2.855.166	2,09%	PT Tambang Batubara Bukit Asam
Jumlah		66.025.722	44,72%	70.440.197	51,59%	Total
Asuransi						Insurance
PT Tugu Kresna Pratama	44	80.639	1,47%	186.788	3,59%	PT Tugu Kresna Pratama
Sewa gedung						Building lease
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN	44	68.197	1,24%	57.274	1,10%	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN
Beban keuangan	45					Financial cost
Utang bank dan surat utang jangka menengah		1.618.454	5,37%	1.453.321	5,90%	Bank loans and medium term notes
Penerusan pinjaman		826.407	2,74%	917.551	3,73%	Two-step loans
Utang usaha pembelian bahan bakar		11.568	0,04%	101.301	0,41%	Trade accounts payable on purchase of fuel
Utang kepada Pemerintah		616.050	2,04%	630.062	2,02%	Government loans
Utang sewa pembiayaan		2.086.719	6,93%	1.994.601	8,10%	Lease liabilities
Jumlah		5.159.198	17,12%	5.096.836	20,16%	Total

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan/Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 14.424 juta dan Rp 12.803 juta.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 45.951 juta dan Rp 44.747 juta.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

Total compensation of the Company's Board of Commissioners in 2013 and 2012 amounted to Rp 14,424 million and Rp 12,803 million, respectively.

Total compensation of the Company's Directors in 2013 and 2012 amounted to Rp 45,951 million and Rp 44,747 million, respectively.

All the compensation to the Company's Board of Commissioners and Directors represent as short-term employee benefit.

53. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Januari 2012, Perusahaan dan entitas anak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut :

53. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

At December 31, 2013 and 2012 and January 1, 2012, the Company and its subsidiaries had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows :

	31 Desember 2013/*December 31, 2013*				
	JPY *)	US$ *)	EUR *)	Lain-lain/ *Others* **)	
Aset moneter					**Monetary assets**
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	43.550.639.086	44.905.240	-	-	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	647.816.467	257.787.719	5.241.930	3.575.214	Cash and cash equivalents
Jumlah aset moneter	44.198.455.553	302.692.959	5.241.930	3.575.214	Total monetary assets
Liabilitas moneter					**Monetary liabilities**
Penerusan pinjaman	196.740.292.135	616.382.591	93.489.580	25.959.020	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	272.429.005.192	8.128.425.177	-	-	Lease liability
Utang bank dan surat hutang jangka menengah	-	3.162.001.759	-	-	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	-	5.550.000.000	-	-	Bonds payable
Utang listrik swasta	-	578.942.401	-	-	Electricity purchase payable
Utang lain-lain	1.846.231.338	385.592.348	12.038.340	43.590.368	Other payables
Utang biaya proyek	1.173.441.551	41.152.917	14.644.635	-	Project cost payable
Utang usaha	-	482.749.364	-	-	Trade accounts payable
Biaya masih harus dibayar	2.805.331.271	254.388.120	842.301	278.176	Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter	474.994.301.487	19.199.634.678	121.014.857	69.827.564	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter bersih	(430.795.845.934)	(18.896.941.719)	(115.772.927)	(66.252.350)	Net monetary liabilities
Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)	(49.972.318)	(230.334.823)	(1.947.416)	(807.550)	Rupiah equivalent (in millions)
Jumlah dalam Rupiah - bersih (dalam jutaan)	(283.062.107)				Total in Rupiah - net (in millions)

	31 Desember/*December 31,* 2012				
	JPY *)	US$ *)	EUR *)	Lain-lain/ *Others* **)	
Aset moneter					**Monetary assets**
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	38.966.409.302	38.199.725	-	-	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	70.672.767	230.012.720	3.584.661	606.308	Cash and cash equivalents
Jumlah aset moneter	39.037.082.069	268.212.445	3.584.661	606.308	Total monetary assets
Liabilitas moneter					**Monetary liabilities**
Penerusan pinjaman	190.328.672.812	611.144.904	111.804.893	30.513.537	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	295.957.854.354	7.738.274.619	-	-	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	-	3.190.515.447	-	-	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	-	5.550.000.000	-	-	Bonds payable
Utang listrik swasta	-	598.568.336	-	-	Electricity purchase payable
Utang lain-lain	1.758.374.974	273.512.428	10.131.991	25.058.945	Other payables
Utang biaya proyek	3.234.766.486	43.694.904	14.860.190	-	Project cost payable
Utang usaha	4.342.359	323.623.520	5.248.831	-	Trade accounts payable
Biaya masih harus dibayar	20.234.731.093	125.718.469	1.017.716	345.764	Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter	511.518.742.078	18.455.052.627	143.063.621	55.918.246	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter bersih	(472.481.660.009)	(18.186.840.182)	(139.478.960)	(55.311.938)	Net monetary liabilities
Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)	(52.902.236)	(175.866.745)	(1.786.706)	(534.866)	Rupiah equivalent (in millions)
Jumlah dalam Rupiah - bersih (dalam jutaan)	(231.090.553)				Total in Rupiah - net (in millions)

*) Dalam jumlah penuh
**) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) In full amount
**) Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rate prevailing at reporting date

	1 Januari/*Januari 1* , 2012				
	JPY *)	US$ *)	EUR *)	Lain-lain/ *Others* **)	
Aset moneter					**Monetary assets**
Piutang pihak berelasi	-	30.174.901	-	-	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	30.428.504.732	29.800.483	-	-	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	307.297.054	592.143.400	3.528.201	495.954	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	-	56.000.000	-	-	Short term investment
Jumlah aset moneter	30.735.801.786	708.118.784	3.528.201	495.954	Total monetary assets
Liabilitas moneter					**Monetary liabilities**
Penerusan pinjaman	172.556.337.921	682.494.562	130.921.343	32.522.530	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	222.955.652.060	5.823.971.112	-	-	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	-	2.737.360.602	-	-	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	-	4.550.000.000	-	-	Bonds payable
Utang listrik swasta	-	617.274.032	-	-	Electricity purchase payable
Utang lain-lain	1.233.966.315	326.498.191	46.285.639	32.965.042	Other payables
Utang biaya proyek	7.345.888.676	102.939.080	2.093.560	3.681.154	Project cost payable
Utang usaha	-	171.864.138	2.808.420	-	Trade accounts payable
Biaya masih harus dibayar	5.361.966.084	200.659.859	1.175.918	357.645	Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter	409.453.811.056	15.213.061.576	183.284.880	69.526.371	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter bersih	(378.718.009.270)	(14.504.942.792)	(179.756.679)	(69.030.417)	Net monetary liabilities
Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)	(44.310.007)	(131.530.821)	(2.110.164)	(625.968)	Rupiah equivalent (in millions)
Jumlah dalam Rupiah - bersih (dalam jutaan)	(178.576.960)				Total in Rupiah - net (in millions)

*) Dalam jumlah penuh
**) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) In full amount
**) Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rate prevailing at reporting date

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Januari 2012, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak serta kurs yang berlaku pada tanggal 25 Februari 2014 sebagai berikut:

The conversion rates used by the Company and its subsidiaries on December 31, 2013 and 2012 and January 1, 2012 and the prevailing rates on February 25, 2014 are as follows:

	25 Februari 2014/ *February 25, 2014*	31 Desember 2013/ *December 31, 2013*	31 Desember 2012/ *December 31, 2012*	1 Januari 2012/ *January 1,2012*	
	Kurs tengah/ *Middle rate*	Kurs tengah/ *Middle rate*	Kurs tengah/ *Middle rate*	Kurs tengah/ *Middle rate*	
	Rp *)	Rp *)	Rp *)	Rp *)	
Mata uang					Currency
JPY	113	116	112	117	JPY
US$	11.620	12.189	9.670	9.068	US$
EUR	15.956	16.821	12.810	11.739	EUR

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perusahaan dan entitas anak mencatat kerugian kurs mata uang asing bersih sebesar Rp 48.096.810 juta tahun 2013 dan Rp 5.938.482 juta tahun 2012.

In relation to the fluctuation of Rupiah against foreign currencies, the Company and its subsidiaries recorded net loss on foreign exchange of Rp 48,096,810 million in 2013 and Rp 5,938,482 million in 2012.

Pada tanggal 25 Februari 2014, kurs konversi mata uang asing melemah terhadap mata uang Rupiah. Dengan menggunakan kurs mata uang asing tanggal 25 Februari 2014, liabilitas moneter bersih dalam mata uang asing Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2013 turun sebesar Rp 12.182.589 juta.

On February 25, 2014, there were decreases in exchange rates of foreign currencies to Rupiah. In using the exchange rates as of February 25, 2014, net monetary liabilities in foreign currencies of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2013 decreased by Rp 12,182,589 million.

54. SEGMEN OPERASI

Informasi Wilayah Geografis

Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tahun 2013, Perusahaan dan entitas anak dibagi dalam operasi geografis Sumatera, Jawa-Bali dan Indonesia Timur dan tahun 2012 dibagi dalam operasi geografis Jawa-Bali, Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Operasi geografis tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Perusahaan dan entitas anak, sebagai berikut :

54. OPERATING SEGMENT

Geographical Information

Operating segment is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statement.

For management reporting purposes, in 2013, the Company and its subsidiaries are divided into Sumatera, Java-Bali and East Indonesia and in 2012 divided into Java-Bali, West Indonesia and East Indonesia geographical operations. These geographical operations are the basis on which the Company and its subsidiaries report segment information, as follow :

	31 Desember 2013/*December 31, 2013*					
	Sumatera	Indonesia Timur/ *East Indonesia*	Jawa Bali/ *Java Bali*	Eliminasi/ *Elimination*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan usaha						**Revenue**
Pendapatan eksternal	94.163.882	34.072.126	133.611.034	-	261.847.042	External revenue
Pendapatan antar segmen	-	-	-	-	-	Inter-segment revenue
Jumlah	94.163.882	34.072.126	133.611.034	-	261.847.042	Total
Hasil segmen	12.382.869	(11.858.523)	210.310.548	-	210.834.894	**Segment results**
Beban tidak dapat dialokasikan					(169.898.999)	Unallocated expenses
Laba usaha					40.935.895	Operating Income
Penghasilan (beban) lain-lain tidak dapat dialokasikan					(75.714.853)	Unallocated income (expenses)
Manfaat pajak					8.543.343	Tax benefit
Rugi bersih					(26.235.615)	Net loss
Aset segmen	88.177.685	76.459.857	338.844.683	(100.769.988)	402.712.237	**Segment Assets**
Aset tidak dapat dialokasikan					187.506.749	Unallocated assets
Jumlah aset konsolidasi					590.218.986	Total consolidated assets
Kewajiban segmen	71.906.047	86.672.119	214.593.416	13.243.364	386.414.946	**Segment Liabilities**
Kewajiban tidak dapat dialokasikan					53.472.682	Unallocated liabilities
Jumlah kewajiban konsolidasi					439.887.628	Total consolidated liabilities

	31 Desember 2012/*December 31, 2012*					
	Indonesia Barat/ *West Indonesia*	Indonesia Timur/ *East Indonesia*	Jawa Bali/ *Java Bali*	Eliminasi/ *Elimination*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan usaha						**Revenue**
Pendapatan eksternal	65.893.955	20.814.107	150.396.948	-	237.105.010	External revenue
Pendapatan antar segmen	-	-	-	-	-	Inter-segment revenue
Jumlah	65.893.955	20.814.107	150.396.948	-	237.105.010	Total
Hasil segmen	(11.472.165)	(15.133.875)	217.383.101	-	190.777.061	**Segment results**
Beban tidak dapat dialokasikan					(156.787.501)	Unallocated expenses
Laba usaha					33.989.560	Operating Income
Penghasilan (beban) lain-lain tidak dapat dialokasikan					(28.509.278)	Unallocated income (expenses)
Manfaat pajak					1.061.657	Tax benefit
Laba bersih					6.541.939	Net income
Aset segmen	87.037.309	45.651.547	275.872.781	(100.338.049)	308.223.588	**Segment Assets**
Aset tidak dapat dialokasikan					240.980.422	Unallocated assets
Jumlah aset konsolidasi					549.204.010	Total consolidated assets
Kewajiban segmen	95.034.398	59.111.020	125.039.501	(3.586.226)	275.598.693	**Segment Liabilities**
Kewajiban tidak dapat dialokasikan					100.567.715	Unallocated liabilities
Jumlah kewajiban konsolidasi					376.166.408	Total consolidated liabilities

Setiap informasi wilayah geografis melaporkan pendapatan terutama yang berasal dari penjualan tenaga listrik ke pelanggan, penyambungan pelanggan dan lain-lain. Sejalan dengan tugas utamanya sebagai pelaksana kewajiban pelayanan publik dalam penyediaan listrik, Perusahaan menerima subsidi dari Pemerintah. Perusahaan dan entitas anak yang bukan bergerak dalam bidang tenaga listrik mencakup 0,44% dan 0,56% dari pendapatan usaha masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012. Rincian informasi produk dan jasa terdapat dalam Catatan 36, 37 dan 38.

Each geographic reportable information derives its revenues mostly from electricity sales to customers, connection fees from customers, and others. In line with its main duty as executor of Public Service Obligation in electricity provision, the Company receives subsidy from the Government. The Company and its subsidiaries operations which are not engaged in electricity represent 0.44% and 0.56% of total revenues for the years ended December 31, 2013 and 2012, respectively. Detailed information on products and services are found in Notes 36, 37 and 38.

55. IKATAN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan dan entitas anak memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar

i. Gas

55. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

As of December 31, 2013, the Company and its subsidiaries have significant commitments and contingencies, as follows:

a. Fuel supply agreements

i. Gas

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Supplier*	Periode/ *Period*	Satuan/ *Unit*	Kuantitas/ *Quantity* e)
Cilegon	a)	2006-2018	bbtu	356.300
Cilegon	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	109.500
Muara Karang - Priok	b)	2004-2017	bbtu	679.000
Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2008-2014	bbtu	255.500
Muara Tawar, Payo Selincah, Rengat, Duri	c)	2009-2020	bbtu	182.585
Muara Tawar	Medco E&P Lematang	2009-2018	bbtu	129.136
Gresik	Kangean Energy Indonesia	2010-2027	bbtu	368.700
Gresik	PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore	2002-2018	bbtu	482.560
Gresik	Hess Ltd	2006-2026	mmscf	330.200
Gresik	PT Walinusa Energi	2010-2018	bbtu	44.160
Aceh	PT Medco E&P Malaka	2010-2027	bbtu	85.000
Belawan	PT Pertamina EP/TAC Pertamina Glagah Kambuna	2009-2017	mmscf	65.650
Pekanbaru	Kalila Bentu Ltd	2005-2020	bbtu	146.036
Keramasan	PT Medco E&P Indonesia	2009-2014	bbtu	32.680
Keramasan	PT Pertamina EP	2010-2015	bbtu	27.735
Borang	PT Medco E&P Indonesia	2003-2014	bbtu	36.780
Inderalaya	PT Medco E&P Indonesia	2002-2014	bbtu	65.342
Payo Selincah	PT Energasindo Heksa Karya	2009-2018	bbtu	65.700
Tanjung Batu	PT Pertamina (Persero), Semco (TAC)	2005-2015	bbtu	79.026
Tarakan	PT Pertamina EP	2010-2015	bbtu	2.558
Bontang	Total E&P Indonesie, INPEX Co	2009-2017	bbtu	681
Batam	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2004-2019	bbtu	72.270
Tanjung Priok	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2012-2014	bbtu	9.545
Grati	d)	2009-2016	bbtu	116.070
Talang Duku	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	21.000
Sunyaragi	PT Pertamina (Persero)	2008-2014	mmscf	7.875
Sungai Gelam	PT Pertamina EP	2011-2017	mmscf	8.434
Bangkanai	Salamander Energy (Bangkanai) Ltd	2013-2023	bbtu	104.000
Sengkang	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd	2012-2022	bbtu	51.945
Muara Tawar	PT Pertamina EP	2010-2015	bbtu	61.281
Tambak Lorok	PT Sumber Petrindo Perkasa	2010-2022	bbtu	219.000
Grati	d)	2012-2018	bbtu	55.827
Grati	PT Parna Raya	2009-2020	mmscf	280.000
Gresik	PT Media Karya Sentosa	2008-2014	bbtu	23.980
Batam	Premier Oil Natuna Sea B.V.; Natuna 1 B.V.; Natuna 2 B.V.; Kufpec Indonesia (Natuna) B.V.	2011-2022	bbtu	98.035
Grati	PT Sampang Mandiri Perkasa	2012-2019	bbtu	31.793
Grati	PT Pasuruan Migas	2012-2019	bbtu	5.911
Jakabaring (CNG)	PDPDE Prov Sumatera Selatan	2012-2020	bbtu	8.340
Tambak Lorok	PC Muriah Ltd	2014-2026	bbtu	487.200
Melibur	Kondur Petroleum SA	2012-2020	bbtu	831
Nunukan	Pertamina EP	2012-2018	mmscf	4.200
Sungai Gelam	Pertamina EP (Own Operation UBEP Jambi)	2012-2017	mmscf	3.500
Sanga Sanga (CBM)	Virginia Indonesia Co. CBM Limited	2012-2014	mmscf	366
Muara Karang - Priok (LNG)	PT Nusantara Regas	2012-2022	mt	11
Tanjung Selor	Perusda Nusa Serambi Persada	2013-2024	bbtu	11.550
Tarakan	But. Manhattan Investment Pte. Ltd	2012-2018	bbtu	10.500
Bunyu Kaltim	Pertamina EP	2012-2015	mmscf	609
Gresik	Santos (Madura offshore) Peluang	2013-2017	bbtu	33.362
Gresik	PT Surya Cipta Internusa	2013-2014	bbtu	35.580

a) CNOOC SES LTD.; PT Pertamina Hulu Energi Oses; KNOC Sumatra Ltd.; Salamander Energy Sumatra BV.; Fortuna Resources (Sunda) Ltd.; Talisman UK (Southeast Sumatra) Ltd.; Talisman Resources (Bahamas) Ltd.
b) Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd.; Itochu Oil Exploration Co. Ltd., Orchard Energy Java BV.; Inpex Jawa Ltd., CNOOC ONWJ Ltd. dan Talisman Resources (North West Java) Ltd.
c) PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang; Talisman (Jambi Merang) Limited dan Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited
d) Santos (Sampang) Pty Ltd., Singapore Petroleum Sampang Ltd. (formerly Coastal Indonesia Sampang Ltd.) and Cue Sampang Pty Ltd.
e) Dalam jumlah penuh/In full amount

Harga pembelian gas pipa pada titik penyerahan berkisar antara US$ 2,52 sampai dengan US$ 9,8 per MMBtu dan LNG antara US$ 15 sampai dengan US$ 17 per MMBtu.

Gas pipe purchase price at point of delivery ranges from US$ 2.52 to US$ 9.8 per MMBTu and price of LNG ranges from US$ 15 to US$ 17 per MMBtu.

Pada tanggal 26 Juli 2007, PJB mengadakan perjanjian dengan PT Petrokimia (PKG) dan EMP Kangean Limited terkait *Gas Diversion Agreement*. Perjanjian ini menetapkan bahwa PKG akan menerima pinjaman gas dari pihak PJB dengan mengalihkan sejumlah pasokan gas yang diperoleh EMP Kangean ke PKG. Atas pinjaman gas tersebut, PKG akan membayar penggantian biaya kompensasi swap gas pada PJB. Pada tanggal 25 September 2007, PJB mengadakan kesepakatan dengan PKG terkait metode perhitungan penggantian biaya kompensasi swap gas.

On July 26, 2007, PJB entered into an agreement with PT Petrokimia (PKG) and EMP Kangean Limited, relating to Gas Diversion Agreement. This agreement determined that PKG will receive gas loan from PJB by diverting an amount of supply of gas, which is provided by EMP Kangean to PKG. In accordance with such gas loan, PKG will pay to PJB the replacement costs for the compensation expenses of gas swap. On September 25, 2007, PJB established an agreement with PKG in relation to the method of computation of replacement costs for the compensation expenses of gas swap.

Pada tanggal 25 September 2008, Perusahaan dengan PGN mengadakan perjanjian jual beli dan penyaluran gas untuk PLTGU Cilegon untuk jangka waktu 10 tahun yang dimulai sejak Maret 2009 sampai dengan Februari 2019. Penyaluran gas untuk periode bulan pertama adalah sebesar 36,36 BBTU per hari, sedangkan untuk periode selanjutnya sampai dengan lima tahun sebesar 27,27 BBTU per hari. Untuk periode selanjutnya sampai berakhirnya perjanjian, pemakaian maksimum dan minimum gas akan disesuaikan dengan kesediaan gas PGN. Pada tanggal 26 Juni 2012, Perusahaan dan PGN menandatangani Kesepakatan Bersama pemakaian gas interruptible untuk PLTGU Cilegon sebesar maksimal 10 BBTUD.

On September 25, 2008, the Company entered into an agreement with PGN, in relation to buying, selling and channeling of gas for PLTGU Cilegon with a term of 10 years starting from March 2009 until February 2019. Gas channeling for the first month is 36.36 BBTU per day, while the succeeding periods until the fifth year is 27.27 BBTU per day. For the remaining succeeding periods until the end of the agreement, the maximum and minimum use of gas will be in accordance with the gas availability of PGN. On June 26, 2012, the Company and PGN have signed the Joint Deal of Interruptible gas usage for PLTGU Cilegon with maximum amount of 10 BBTUD.

Perusahaan memperoleh fasilitas *stand-by letter of credit* (SBLC) maksimum sebesar US$ 39,9 juta dari Bank Negara Indonesia, berjangka waktu 13 tahun sampai dengan 31 Desember 2016 untuk menjamin kewajiban pembayaran pembelian gas untuk Sektor Muara Karang - Priok.

The Company has stand-by letters of credit (SBLC) facility from Bank Negara Indonesia with maximum amount of US$ 39.9 million and a term of 13 years, due on December 31, 2016 to guarantee the payment obligations for the purchase of gas for Muara Karang – Priok Sector.

PLN Batam mengadakan perjanjian kerjasama dengan PGN untuk mengadakan gas alam. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 15 tahun dengan jumlah volume gas sebesar 72.270 BBTU, sejak gas pertama disalurkan ketitik penyerahan, yaitu tanggal 7 Agustus 2004. Sesuai dengan perjanjian, PLN Batam harus menyerahkan jaminan pembayaran berupa SBLC yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Catatan 10).

PLN Batam entered into an agreement with PGN for the supply of natural gas. The agreement is valid for 15 years with total gas volume of 72,270 BBTU, starting for the first time the gas is channeled to the point of delivery, which is on August 7, 2004. In accordance with the agreement, PLN Batam must provide a payment guarantee in the form of SBLC issued by Bank Mandiri (Note 10).

ii. Batubara

ii. Coal

Pemasok/*Suppliers*	Jumlah metrik ton per tahun / *Quantity per year in metric ton *)*	Periode/ *Period*
Rutin /*Regular*		
PT Tambang Batubara Bukit Asam	7.430.000	2002-2013/2031
PT Adaro Indonesia	3.575.000	2011-2021
PT Kaltim Prima Coal	5.000.000	2009-2014/2015
PT Kideco Jaya Agung	1.297.500	2000-2020
PT Berau Coal	2.000.000	2009-2018
PT Indominco Mandiri	2.100.000	2010-2015
PT Natuna Energi Indonesia	480.000	2006-2015
PT Oktasan Baruna Persada	1.003.000	2009-2029
PT Exploitasi Energi Indonesia	457.500	2006-2015
PT Kadya Caraka Mulia	288.000	2012-2015
Kerjasama Konsorsium/*Consortium*		
PT Kasih Industri Indonesia dan PT Senamas Energindo Mulia	378.000	2009-2029
PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa	1.501.000	2007-2027
PT Oktasan Baruna Persada dan PT Insani Perkasa	1.620.000	2012-2015
PT Prima Multi Mineral dan PT Baratama	1.152.000	2012-2015
Program Percepatan/*Fast Track Program*		
PT Kaltim Prima Coal	3.000.000	2012-2031
PT Tambang Batubara Bukit Asam	2.300.000	2011-2031
PT Kideco Jaya Agung	1.500.000	2011-2031
PT Titan Mining Energy	2.920.000	2011-2031
PT Hanson Energy	1.069.000	2011-2031
PT Lanna Narita	215.000	2011-2016
PT Dwi Guna Laksana	1.284.000	2012-2030
Kerjasama konsorsium/*Consortium*		
PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa	6.128.000	2010-2030
PT Multi Bara Persada dan PT Eksploitasi Energi Indonesia	1.208.000	2010-2015
PT Kasih Industri Indonesia dan PT Senamas Energindo Mulia	2.860.000	2009-2029
PT Golden Great Borneo, PT Oktasan Baruna Persada dan PT Buana Eltra	576.000	2011-2016
PT Risna Karya Whardana Mandiri dan Rizki Anugrah Pratama	974.000	2010-2015
PT Oktasan Baruna Persada dan PT Buana Risky Armia	724.000	2011-2031

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*

Harga *stockpile* pembelian batubara berkisar antara Rp 500.684 dan Rp 1.042.338 per ton yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, SFT dan HGI.

The stockpile price of coal purchases ranges from Rp 500,684 to Rp 1,042,338 per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, SFT and HGI.

PLN Batubara mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara dengan beberapa pemasok, adalah sebagai berikut:

PLN Batubara entered into Coal Mining Operation Cooperation Agreement with suppliers are as follows:

Pemasok/ *Suppliers*	Lokasi/ *Locations*	Jumlah metrik ton/ *Quantity in metric ton*
PT Tansri Madjid Energi	Muara Enim, Sumatera Selatan/*South Sumatera*	40.669.049
PT Bangun Persada Jambi Energi	Sorolangun, Jambi	16.822.430
PT Megapura Industri	Sorong, Papua Barat/*West Papua*	8.800.000
PT Andhika Yoga Pratama	Sorolangun, Jambi	2.857.143
PT Lumbung Resources	Aimas, Sorong, Papua Barat/*West Papua*	2.000.000
PT Delapan Inti Power	Rambang Kuang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan/*South Sumatera*	1.000.000
PT Awang Sejahtera	Parenggean, Kalimantan Tengah/*Central Kalimantan*	460.000
PT Bima Putra Abadi Citranusa	Lahat, Sumatera Selatan/*South Sumatera*	34.000

iii. Bahan Bakar Minyak

Perusahaan dan Pertamina mengadakan Perjanjian Payung Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001 yang berlaku sampai dengan 8 Oktober 2004. Perjanjian ini telah diaddendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan yang ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mid Oil Platts Singapore* (MOPS) ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp 18 triliun; (vi) perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011; (vii) PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai *independent surveyor*.

iii. Fuel

The Company and Pertamina entered into a Fuel Sale and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001 which was valid until October 8, 2004. This agreement has been amended on May 16, 2007, whereby, the Company and Pertamina agreed among others: (i) the monthly fuel price to be used for the period January 1 until April 30, 2007 is determined by Pertamina and, the fuel price of 109.5% from Mid Oil Platts Singapore (MOPS) plus Value Added Tax for the period May 1, 2007 until December 31, 2007; (ii) the fuel price subsequent to December 31, 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payment with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective on May 1, 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until April 30, 2007 will bear an interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN Bonds, which is no later than August 31, 2007; (v) the maximum payable to Pertamina, includes bonds which will be issued amounting to Rp 18 trillion; (vi) this agreement is valid for 5 years from January 1, 2007 until December 31, 2011; (vii) PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor.

Berdasarkan Addendum III Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 7 Nopember 2011, Perusahaan dan Pertamina menyepakati dalam tahun 2011 sebagai berikut:

1. HSD
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 2.537.161 kl di 18 titik penyerahan Pertamina adalah 105% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 480.487 kl di titik penyerahan Pertamina TT Manggis adalah 108% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 2.978.360 kl di titik penyerahan ITP Priok dan ISG Surabaya adalah 108,5% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD diatas 5.996.008 kl atau yang diserahkan diluar 21 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina adalah 109,5% dari MOPS.

2. Harga pembelian IDO sampai dengan 3.933 KL di titik penyerahan Kilang Plaju adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 3.933 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Plaju adalah 109,5% dari MOPS.

3. Harga pembelian MFO sampai dengan 1.193.166 kl di titik penyerahan Kilang Cilacap adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 1.193.166 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Cilacap adalah 109,5% dari MOPS.

4. Memperpanjang Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak efektif sampai dengan tahun 2015.

Tahun 2013 dan 2012, Perusahaan dan Pertamina sepakat untuk menggunakan harga tahun 2011, karena amandemen Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak belum diselesaikan.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, estimasi liabilitas bunga dan denda atas utang pembelian bahan bakar kepada Pertamina masing-masing Rp 18.266 juta dan Rp 36.181 juta yang dicatat sebagai biaya masih harus dibayar (Catatan 33).

Based on the amendment III of Fuel Sale and Purchase Agreement dated November 7, 2011, the Company and Pertamina agreed in 2011 the following:

1. HSD
   - The price of HSD for purchase of up to 2,537,161 kl in of 18 supply points of Pertamina is 105% from MOPS.
   - The price of HSD for purchase of up to 480,487 kl in supply points of Pertamina TT Manggis is 108% from MOPS.
   - The price of HSD for purchase of up to 2,978,360 kl in supply points ITP Priok and ISG Surabaya is 108.5% from MOPS.
   - The price of HSD in excess of 5,996,008 kl or supplied from suppy points other than the 21 supply points specified by Pertamina is 109.5% from MOPS.

2. The price of IDO for purchases of up to 3,933 KL in supply point Kilang Plaju is 105% from MOPS and for purchases in excess of 3,933 kl or supplied from supply point other than supply point Kilang Plaju is 109.5% from MOPS.

3. The price of MFO for purchases of up to 1,193,166 kl in supply point Kilang Cilacap is 105% from MOPS and for purchases in excess of 1,193,166 kl or supplied from supply point other than supply point Kilang Cilacap is 109.5% from MOPS.

4. Fuel Sell and Purchase Agreement was amended to be effective until year 2015.

In 2013 and 2012, the Company and Pertamina agreed to use the 2011 price, since the Fuel Sale Purchase Agreement amendment has not been completed yet.

As of December 31, 2013 and 2012, estimated liabilities on interest and penalties for payable on purchases of fuel to Pertamina amounted to Rp 18,266 million and Rp 36,181 million, respectively, which are recorded as accrued expenses (Note 33).

Pada tanggal 3 Nopember 2010, Perusahaan dan Pertamina menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD untuk PLTGU Gresik dan Grati sebanyak 600.000 KL selama 4 tahun yang berakhir tahun 2014.

On November 3, 2010, the Company and Pertamina entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD for supply of HSD to PLTGU Gresik and Grati for 600,000 KL for 4 years until 2014.

Pada tanggal 3 Nopember 2010, Perusahaan dan Pertamina menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD untuk PLTGU Muara Tawar sebanyak 400.000 KL selama 4 tahun yang berakhir tahun 2014.

On November 3, 2010, the Company and Pertamina entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD for supply of HSD to PLTGU Muara Tawar for 400,000 KL for 4 years until 2014.

Pada tanggal 1 Desember 2010, Perusahaan dan Pertamina menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD untuk PLTGU Muara Karang dan Tanjung Priok sebanyak 2.000.000 kl selama 4 tahun yang berakhir tahun 2014.

On December 1, 2010, the Company and Pertamina entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD for supply of HSD to PLTGU Muara Karang and Tanjung Priok for 2,000,000 kl for 4 years until 2014.

Pada tanggal 10 April 2008, Perusahaan dengan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Shell Indonesia dan PT Kutilang Paksi Mas menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD untuk PLTGU Grati selama 3 tahun yang berakhir tahun 2011 sebanyak 600.000 kl per tahun. Pada tanggal 20 Mei 2011, kedua pihak membuat addendum atas perjanjian Jual Beli HSD untuk periode 4 tahun yang berakhir pada tahun 2015 sebanyak 640.000 kl.

On April 10, 2008, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with Joint Operation of PT Shell Indonesia and PT Kutilang Paksi Mas for supply of HSD to PLTGU Grati for 600,000 kl per annum, respectively, for 3 years until 2011. On May 20, 2011, both parties made on addendum of Sell and Purchase Agreement of HSD 4 years period ending in 2015 640,000 kl.

Pada tanggal 10 Desember 2010, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan Tuban Konsorsium PT Trans Pacific Petrochemical dan PT Tuban LPG Indonesia sebanyak 1.200.000 kl selama 4 tahun yang berakhir tahun 2014. Pada tanggal 15 Mei 2012, Perusahaan melakukan pemutusan Perjanjian Jual Beli karena ketidakmampuan Tuban Konsorsium PT Trans Pacific Petrochemical dan PT Tuban LPG Indonesia memasok bahan bakar sesuai dengan perjanjian.

On December 10, 2010, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with Tuban Consortium PT Trans Pacific Petrochemical and PT Tuban LPG Indonesia for supply of HSD for 1,200,000 kl for 4 years until 2014. On May 15, 2012, the Company terminated the Sale and Purchases Agreement due to inability of Tuban Consortium PT Trans Pacific Petrochemical and PT Tuban LPG Indonesia, to supply fuel in accordance with the Agreement.

Pada tanggal 7 Juni 2012, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT AKR Corporindo, Tbk sebanyak 400.000 kl selama 3 tahun yang berakhir tahun 2015.

On June 7, 2012, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT AKR Corporindo, Tbk for 400,000 kl for 3 years until 2015.

iv. Uap Panas Bumi

Perusahaan memiliki perjanjian dengan Pertamina untuk pengadaan uap panas bumi untuk Kamojang selama 30 tahun yang berakhir tahun 2012 dan telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2014, dan untuk Gunung Salak dan Darajat selama 30 tahun yang berakhir tahun 2030, serta untuk Lahendong selama 30 tahun yang berakhir tahun 2038.

iv. Geothermal Heat

The Company has a geothermal heat procurement agreement with Pertamina for Kamojang for 30 years until 2012 and has been extended until December 31, 2014, for Gunung Salak and Darajat for 30 years until 2030 and for Lahendong for 30 years until 2038.

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Kontrak Penjualan Energi

Sebelum tahun 1997, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) dan Kontrak Penjualan Energi (ESC) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP) skala besar. Pada tahun 1999, Perusahaan telah melaksanakan renegosiasi terhadap PPA dan ESC melalui Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PLN dibawah arahan Pemerintah. Renegosiasi tersebut meliputi antara lain keseimbangan kondisi kontrak, kewajaran harga dan disparitas harga jual listrik swasta dan harga jual Perusahaan.

Dalam perjanjian dengan IPP tertentu, disepakati bahwa setiap saat selama perjanjian berlaku, Perusahaan dapat melaksanakan opsi untuk membeli hak penjual, milik, dan kepentingan atas proyek yang bersangkutan.

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2c, Perusahaan menilai bahwa perjanjian PPA dan ESC tertentu memenuhi kriteria sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan sesuai dengan ISAK 8. Pada tanggal 31 Desember 2013, perjanjian signifikan antara Perusahaan dan entitas anak dengan IPP adalah sebagai berikut:

b. Power Purchase Agreements and Energy Sales Contract

Prior to 1997, the Company entered into Power Purchase Agreement (PPA) and Energy Sales Contract (ESC) with big scale Independent Power Producers (IPP). In 1999, the Company entered into renegotiation of PPA and ESC through Working Group on PLN Special Contract Renegotiation under the direction of the Government. Such renegotiation includes, among others, equalization in contract condition, reasonableness of price and disparity of selling price between IPP and the Company.

Based on the agreements with certain IPPs, the Company may exercise its option to purchase all of the IPP's rights, title and interest in the projects at any time during the contract period.

As discussed in Note 2c, the Company and its subsidiaries have assessed that certain PPA and ESC qualify as either operating lease or finance lease in accordance with ISAK 8. As of December 31, 2013, the significant agreements between the Company and its subsidiaries with IPPs are as follows:

i. Sudah Beroperasi

Perjanjian jual beli tenaga listrik sebagai sewa pembiayaan

i. In Operations

Power purchase agreements under finance lease

No.	Perusahaan/Company	Proyek/Project	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF b) (%)	Periode/ Period a)	Tanggal operasi komersial/ *Commercial Operation Date*
1.	PT Energi Sengkang	Sengkang, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Gas	195	85	1999-2023	1 Maret 1999/ *March 1, 1999* 16 Nopember 2008/ *November 16, 2008*
2.	Chevron Geothermal Salak Ltd dan/and Dayabumi Salak Pratama Ltd.	Salak, Jawa Barat/West Java	Panas bumi/ Geothermal	165	90	1997-2040	1 Oktober 1997/ *October 1, 1997*
3.	PT Makassar Power	Pare-pare, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	MFO	63	80	1998-2016	1 Mei 1998/ *May 1, 1998*
4.	PT Paiton Energy	Paiton I, Jawa Timur/*East Java*	Batubara/Coal	1230	85	2000-2040	1 Juli 2000/ *July 1, 2000*
5.	PT Jawa Power	Paiton II, Jawa Timur/*East Java*	Batubara/Coal	1220	83	2000-2030	1 Nopember 2000/ *November 1, 2000*
6.	Pertamina, Cevron Drajat Ltd. Texaco Drajat Ltd. dan/and PT Drajat Geothermal Ind.	Drajat, Jawa Barat/*West Java*	Panas bumi/ Geothermal	180	95	2000-2030	1 Februari 2000/ *February 1, 2000* 1 Agustus 2007/ *August 1, 2007*
7.	Pertamina and Magma Nusantara Limited	Wayang Windu, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/ Geothermal	220	90	2005-2039	1 Desember 2005/ *December 1, 2005*
8.	PT Asrigita Prasarana	Palembang, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Gas	150	85	2004-2024	1 September 2004/ *September 1, 2004*
9.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap, Jawa Tengah/*Central Java*	Batubara/Coal	562	80	2007-2037	1 Februari 2007/ February 1, 2007
10.	PT Dalle Energy Batam	Panaran, Pulau Batam/Batam Island	Gas	55	80	2005-2016	31 Desember 2005/ *December 31, 2005* 30 April 2006/ *April 30, 2006* 25 Maret 2010/ *March 25, 2010*
11.	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam/Batam Island	Gas	55	84	2005-2016	29 Oktober 2004/ *October 29, 2004*
12.	PT Indo Matra Power	Kawasan Industri Kabil, Pulau Batam/Batam Island	Gas	17	90	2005-2017	11 September 2005/ *September 11, 2005* 1 April 2006/ *April 1, 2006*
13.	PT Metaepsi Pejebe Power Generation	Gunung Megang, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Gas	110	85	2005-2027	10 Nopember 2007/ *November 10, 2007*
14.	PT Pusaka Jaya Palu Power	Palu, Sulawesi Tengah/ Central Sulawesi	Batubara/Coal	27	80	2007-2032	1 Nopember 2007/ *November 1, 2007*
	Jumlah dipindahkan/*Balance carryforward*			4.249			

No.	Perusahaan/Company	Proyek/Project	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF b) (%)	Periode/ Period a)	Tanggal operasi komersial/ *Commercial Operation Date*
	Jumlah pindahan/*Balance carryforward*			4.249			
15.	PT Pertamina Geothermal Energi	Kamojang, Jawa Barat/*West Java*	Panas bumi/ Geothermal	60	90	2008-2038	26 Januari 2008/ January 26, 2008
16.	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut, Kalimantan Timur/ *East Kalimantan*	Batubara/Coal	45	72	2008-2038	20 Desember 2008/ *December 20, 2008*
17.	PT Dizamatra Powerindo	Sebayak, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Panas bumi/ Geothermal	11	95	2008-2038	19 Desember 2008/ *December 19, 2008*
18.	PT Bajradaya Sentranusa	Asahan, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Tenaga air/*Hydro*	180	1.175 GWh/th	2011-2040	18 Januari 2011/ January 18, 2011
19.	PT Cipta Daya Nusantara	Mobuya, Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Tenaga air/*Hydro*	3	80	2007-2027	31 Juli 2007/ July 31, 2007
20.	PT Fajar Futura Energi Luwu	Luwu, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Tenaga air/*Hydro*	2	97	2010-2035	10 Mei 2010/ *May 10, 2010*
21.	PT Sulawesi Mini Hydro Power	Sinjai, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Tenaga air/*Hydro*	10	79	2011-2036	12 Februari 2011/ *February 12, 2011*
22.	PT GH EMM Indonesia	Muara Enim, Sumatera Selatan / *South Sumatera*	Batubara/Coal	227	80	2011-2043	11 Nopember 2011/ *November 11, 2011*
23.	PT Eksploitasi Energi Indonesia	Pangkalan Bun, Kalimantan Selatan/ *South Kalimantan*	Batubara/Coal	11	80	2011-2036	14 Oktober 2011/ *October 14, 2011*
24.	PT Paiton Energy	Paiton III, Jawa Timur/East Java	Batubara/Coal	815	90	2012-2042	1 Maret 2012/ *March 1, 2012*
25.	PT Cirebon Electric Power	Cirebon, Jawa Barat/West Java	Batubara/Coal	660	80	2012-2037	3 Agustus 2012/ *August 3, 2012*
26.	PT Bosowa Energi	Jeneponto, Sulawesi Selatan / *South Sulawesi*	Batubara/Coal	200	80	2012-2042	31 Oktober 2012/ *October 31, 2012*
27.	PT Tanjung Kasam Power	Tanjung Kasam, pulau Batam/ *Batam island*	Batubara/Coal	110	85	2012-2042	25 Oktober 2012/ *October 25, 2012* 1 Nopember 2012/ *November 1, 2012*
28.	PT Humbahas Bumi Energi	Hutaraja, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Hydro	5	65	2012-2037	10 Mei 2012/ *May 10, 2012*
29.	Joint Operation PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Mirlindo Padu Kencana	Pesanggaran, Bali	Diesel	50	85	2011-2019	1 Maret 2011/ *March 1, 2011*
30.	Konsorsium/*Consortium* PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Navigat Energy	Borang, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Gas	67	80	2012-2019	31 Juli 2012/ July 31, 2012
31.	Konsorsium/*Consortium* PT Modaco Enersys, PT Elektrindo Perkasa Utama, Pratt & Whitney Ps. Inc., Renewable Energy Power International	Payo Selincah, Jambi	Gas	100	60	2012-2019	8 Mei 2012/ *May 8, 2012*
32.	PT Poso Energy	Poso, Sulawesi Tengah/*Central Sulawesi*	Tenaga air/*Hydro*	195	845,52 GWh/th	2013 - 2042	30 Desember 2012/ *December 30, 2012*
33.	PT Bekasi Power	Bekasi, Jawa Tengah/*West Java*	Gas	119	90	2013-2032	5 Januari 2013/ *January 5, 2013*
34.	Konsorsium/*Consortium* PT PP (Persero) Tbk, PT Bangun Energy Resources, PT Navigat Energy, PT SNC Lavalin TPS General Electric	Talang Duku, Jambi	Gas	57	60	2013-2020	11 Januari 2013/ *January 11, 2013*
	Jumlah/Total			7.176			

Rincian nilai tunai pembayaran sewa minimum terkait dengan PPA diuraikan dalam Catatan 25.

Details on present value of minimum lease payments related to these PPAs are discussed in Note 25.

Perjanjian jual beli tenaga listrik signifikan sebagai sewa operasi

The significant power purchase agreements under operating lease

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity* (MW)	AF (%)	Periode/ *Period*
1.	Perum Jasa Tirta	Purwakarta, Jawa Barat/*West Java*	Tenaga air/ *Hydro*	150	50	2012-2016
2.	PT Geo Dipa Energy	Dieng, Jawa Tengah/*Central Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	60	85	2002-2044
3.	PT Jembo Energindo	Panaran, Pulau Batam/*Batam Island*	Gas	24	65	2012-2014
4.	PT Dalle Energy Batam	Panaran, Pulau Batam/*Batam Island*	Gas	19	90	2009-2014
5.	PT Indo Matra Power	Kawasan Industri Kabil, Pulau Batam/*Batam Island*	Gas	14	60	2011-2014
	Jumlah/*Total*			267		

Jumlah pembayaran sewa minimum dalam sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

The future aggregate minimum lease payments under non-cancellable operating leases are as follows:

	31 Desember/ *December 31* 2013	31 Desember/ *December 31* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:				Minimum lease payments due :
Tidak lebih dari 1 tahun	154.210	136.286	240.222	Not later than 1 year
Antara lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	94.874	115.329	50.832	Later than 1 year and not later than 2 years
Lebih dari 2 tahun	97.720	192.594	34.828	Later than 2 years
Jumlah pembayaran minimum sewa	346.804	444.209	325.882	Total minimum lease payments

	31 Desember/ *December 31* 2013	31 Desember/ *December 31* 2012	1 Januari/ *January 1,* 2012	
Rincian pembayaran sewa minimum berdasarkan lessor				Details of the minimum lease payment by lessor
Perum Jasa Tirta	284.705	374.133	69.334	Perum Jasa Tirta
PT Dalle Energy Batam	23.218	46.437	81.328	PT Dalle Energy Batam
PT Jembo Energindo	22.254	22.254	37.150	PT Jembo Energindo
PT Indo Matra Power	16.627	1.385	26.372	PT Indo Matra Power
Aggreko International Projects Ltd	-	-	88.579	Aggreko International Projects Ltd
PLTD Jembo	-	-	23.119	PLTD Jembo
Jumlah	346.804	444.209	325.882	Total

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Lain

Perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT Cikarang Listrindo dengan kapasitas 300 MW yang berlokasi di Jawa Barat hingga tahun 2018, dicatat sebagai transaksi pembelian normal.

Other Power Purchase Agreement

This pertains to power purchase agreement with PT Cikarang Listrindo with total capacity of 300 MW located in West Java until year 2018, which is accounted for as a normal purchase transaction.

ii. Belum Beroperasi (Dalam Tahap Pengembangan)

ii. Not Yet in Operations (Development Stage)

No.	Perusahaan/ *Company*	Proyek/*Projects*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity (MW)*	AF b) (%)	Periode/ *Period a)*	Status
1.	PT Bhimasena Power Indonesia	Pemalang, Jawa Tengah/Central Java	Batubara/Coal	1900	86	2018-2043	Tahap Pembiayaan/Financing Stage
2.	PT Huadian Bukit Asam Power	Sumsel-8,	Batubara/Coal	1200	80	2017-2042	*Tahap Pembiayaan/Financing Stage*
3.	PT Lestari Banten Energi	Banten	Batubara/Coal	660	80	2017-2042	*Tahap Pembiayaan/Financing Stage*
4.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap Ekspansi	Batubara/Coal	600	85	2016-2036	Tahap Pembiayaan/Financing Stage
5.	PT General Energy Bali	Celukan Bawang, Bali	Batubara/Coal	380	85	2014-2044	*Tahap Pembangunan/Construction Stage*
6.	Sarulla Operations Ltd	Sarulla, Sumatera Utara/North Sumatera	Panas Bumi/Geothermal	330	90	2017-2047	*Tahap Pembiayaan/Financing Stage*
7.	PT DSSP Power Sumsel	Sumsel-5, Sumatera Selatan/South Sumatera	Batubara/Coal	300	80	2015-2040	Tahap Pembangunan/Construction Stage
8.	PT Madhucon Sriwijaya Power	Sumsel-7, Sumatera Selatan/South Sumatera	Batubara/Coal	300	80	2016-2041	Tahap Pembiayaan/Financing Stage
9.	PT Priamanaya Power Energi	Keban Agung, Baturaja, Sumatera Selatan/South Sumatera	Batubara/Coal	225	80	2015-2045	Tahap Pembangunan/Construction Stage
10.	PT Ranyza Energi	Kuala Tanjung, Sumatera Utara/North Sumatera	Batubara/Coal	225	84	2010-2040	Tahap Pembiayaan/Financing Stage
11.	PT Bukit Pembangkit Innovative	Banjarsari, Sumatera Selatan/South Sumatera	Batubara/Coal	220	80	2015-2045	Tahap Pembangunan/Construction Stage
12.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lumut Balai, Sumatera Selatan/South Sumatera	Panas Bumi/Geothermal	220	90	2015-2045	Tahap Pembangunan/Construction Stage
13.	PT Supreme Energy Rajabasa	Rajabasa, Lampung	Panas Bumi/Geothermal	220	90	2016-2046	*Tahap Pembiayaan/Financing Stage*
14.	PT Supreme Energy Muara Laboh	Muara Laboh, Sumatera Barat/West Sumatera	Panas Bumi/Geothermal	220	90	2016-2046	*Tahap Pembiayaan/Financing Stage*
15.	PT Supreme Energy Rantau Dedap	Rantau Dedap, Sumatera Selatan/South Sumatera	Panas Bumi/Geothermal	220	90	2016-2046	Tahap Pembiayaan/Financing Stage
16.	Star Energy	Wayang Windu #3,4, Jawa Barat/ West Java	Panas Bumi/Geothermal	220	85	2015-2035	Renegosiasi/ Renegotiation
17.	Bali Energi Ltd.	Bedugul, Bali	Panas Bumi/Geothermal	175	95	2011-2041	Tahap Pembiayaan/Financing Stage
18.	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu #3-4	Panas Bumi/Geothermal	110	90	2015-2045	Tahap Pembangunan/Construction Stage
19.	PT Medco Cahaya Geothermal	Ijen, Jawa Timur/East Java	Panas Bumi	110	90	2018-2048	Tahap Pembiayaan/Financing Stage
20.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Hululais	Panas Bumi/Geothermal	110	85	2016-2046	Eksplorasi/Exploration
21.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Sungai Penuh	Panas Bumi/Geothermal	110	85	2017-2047	Eksplorasi/Exploration
22.	PLTG Senipah	Senipah, Kalimantan Timur/East Borneo	Gas/Gas	80	85	2013-2038	Tahap Pembangunan/Construction Stage
23.	PT Geo Dipa Energi	Dieng 2, Jawa tengah/Central Java	Panas Bumi/Geothermal	55	85	2017-2047	Tahap Pembiayaan/Financing Stage
24.	PT Geo Dipa Energi	Patuha, Jawa Barat/West Java	Panas Bumi/Geothermal	55	95	2014-2044	Tahap Pembangunan/Construction Stage
25.	PT Indo Ridlatama Power	Samboja, Kalimantan Timur/East Borneo	Batubara/Coal	55	80	2015-2045	Tahap Pembiayaan/Financing Stage
26.	PT Giri Indah Sejahtera	Ungaran, Jawa Tengah/Central Java	Panas Bumi	55	90	2018-2048	Tahap Pembiayaan/Financing Stage
27.	PT Equator Manunggal Power	Pontianak, Kalimantan Barat/West Borneo	Batubara/Coal	50	80	2010-2035	Tahap Pembangunan/Construction Stage
28.	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut Ekspansi, Kalimantan Timur/East Borneo	Batubara/Coal	50	87	2015-2040	Tahap Pembangunan/Construction Stage
29.	PT Rekind Daya Mamuju	Mamuju, Sulawesi Barat/West Sulawesi	Batubara/Coal	50	80	2015-2040	Tahap Pembiayaan/Financing Stage
30.	PT Lombok Energy Dynamics	Lombok, Nusa Tenggara Barat	Batubara/Coal	50	80	2017-2042	Tahap Pembiayaan/Financing Stage
31.	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Kotamobagu	Panas Bumi/Geothermal	80	90	2020-2050	Eksplorasi/Exploration
32.	Lainnya/The Others c)			961			
	Jumlah/*Total*			9.596			

a) Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 19 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal produksi komersial.

b) AF = Faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perusahaan.

c) Meliputi kontrak dengan 142 IPP, terdiri dari 57 IPP dalam tahap pembangunan dan 85 IPP dalam tahap pembiayaan, berlokasi di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan bahan bakar batu bara, panas bumi dan *mini hydro* dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW.

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi, dan biaya pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge* dan *Capacity Charge*.

Sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, PLN Batam telah menyerahkan jaminan deposito berjangka sebesar Rp 5.510 juta (Catatan 10).

a) The agreements are effective from the date of signing and buy and sell of electricity is valid between 19 to 30 years starting from the commercial operation date.

b) AF = Power supply factor which should be absorbed by the Company.

c) Represents contracts with 142 IPPs, consisting of 57 IPPs under construction and 85 IPPs in financing stage, which are located in several areas of Indonesia and are generated by coal, geothermal and mini hydro with capacity of each power plant's capacity of less than 50 MW.

The electricity power price per kWh for gas, MFO and coal power plants are determined by certain formula as stated in the agreement which regulate, among others, capital cost recovery, fixed operation and maintenance cost payment, fuel expense and variable operation, and maintenance cost payment. For geothermal heat power plants, the electricity power price are determined by certain formula as stated in the agreement, among others, Energy Charge and Capacity Charge.

In relation with the purchase of electricity, PLN Batam has placed collateral time deposits amounting to Rp 5,510 million (Note 10).

iii. PLTP Sarulla

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 23 Januari 2004 sebagaimana diubah dengan a*ddendum* tanggal 6 Februari 2004, Perusahaan telah mengambil alih hak, kepentingan dan kewajiban Unocal North Sumatra Geothermal Ltd. (UNSG) sehubungan dengan perjanjian jual beli listrik tahun 1993 (proyek Sarulla), dan Perusahaan akan mengalihkan hak, kepentingan dan kewajiban tersebut kepada pihak lain yang ditunjuk kemudian. Pengambilalihan tersebut dilaksanakan dengan membayar kompensasi sebesar US$ 60 juta dan dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan (Catatan 6). Untuk melanjutkan kembali proyek Sarulla, Perusahaan mengadakan tender, yang dimulai pada tahun 2004 dan *letter of intent* kepada pemenang tender diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2005. Berdasarkan *letter of intent* ini, pada tanggal 14 Desember 2007, Perusahaan bersama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Sarulla Operations Ltd., PT Medco Geopower Sarulla, Sarulla Power Asset Ltd. dan OrSarulla Inc. (Konsorsium) sepakat untuk melakukan jual beli listrik yang dibangkitkan dari PLTP Sarulla 330 MW melalui amandemen Kontrak Penjualan Energi (ESC) serta pengalihan hak, kepentingan dan kewajiban (*Deed of Assigment*) atas Kontrak Operasi Bersama (JOC) dan ESC Sarulla. Kesepakatan tersebut antara lain meliputi: (i) Konsorsium akan memberikan kompensasi kepada Perusahaan sebesar US$ 73.675.000, termasuk bunga sebesar US$ 3.675.000, dibayar dalam empat angsuran enam bulanan terhitung sejak tanggal terjadinya penarikan pertama *senior debt* dalam perjanjian pembiayaan (*financial close*), (ii) *Financial close* paling lambat 12 bulan terhitung sejak kesepakatan tersebut disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM), (iii) Masa kontrak berakhir pada 27 Februari 2046, (iv) Operasi komersial untuk 6 unit pembangkit berkisar 30 - 48 bulan sejak *financial close*. Kesepakatan ini akan efektif setelah dilakukannya pembayaran pertama oleh Konsorsium kepada Perusahaan dan diterbitkannya persetujuan MESDM atas *Deed of Assignment*, Amandemen ESC, Amandemen JOC antara PGE dan Konsorsium, serta harga jual listrik dinyatakan dalam Amandemen ESC. Pada tanggal 27 Agustus 2008, Perusahaan telah menerima surat persetujuan dari MESDM.

iii. PLTP Sarulla

Based on Deed of Assignment dated January 23, 2004 as amended by the addendum dated February 6, 2004, the Company has taken over the rights, participating interests and obligations of Unocal North Sumatra Geothermal Ltd. (UNSG) in relation to the electricity sell and purchase agreement in 1993 (the Sarulla project), and the Company will transfer such rights, participating interests and obligations to other entity, which will be appointed later. The amount of the compensation paid by the Company for such taking-over of rights amounted US$ 60 million and was recorded as construction in progress (Note 6). To continue the Sarulla project, the Company organized bidding process, which started in 2004, and letter of intent was issued to the winning bidder on July 25, 2005. Based from such letter of intent, on December 14, 2007, the Company together with PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Sarulla Operations Ltd., PT Medco Geopower Sarulla, Sarulla Power Asset Ltd. and OrSarulla Inc. collectively, referred to as “the Consortium”, agreed to perform buy and sell of electricity, which is generated from PLTP Sarulla 330 MW by means of amendment of Energy Sales Contract (ESC) and to transfer the rights, participating interests and obligations (Deed of Assignment) on the Joint Operation Contract (JOC) and Sarulla ESC. The agreement includes, among others: (i) the Consortium will give compensation to the Company amounting to US$ 73,675,000, including interest of US$ 3,675,000, payable in four semi annual installments, which will start on the date on which the first drawdown of senior debt under the financing agreements occurs (financial close), (ii) the financial close shall begin no later than 12 months after the date on which the Minister of Energy and Mineral Resources (MESDM) issues the approval, (iii) the contract period will be due on February 27, 2046, (iv) the commercial operations of the 6 unit power plants will approximately be 30 - 48 months since the financial close. This agreement will be effective after the Consortium has made the first payment to the Company and after MESDM’s approval on the Deed of Assignment, ESC Amendment, JOC Amendment between PGE and the Consortium, and electricity selling price stated in the amended ESC. On August 27, 2008, the Company received the letter of approval from MESDM.

Pada tanggal 2 Juli 2008, Konsorsium menyetujui amandemen pembayaran kepentingan dan kewajiban, dimana jumlah kompensasi menjadi US$ 71.837.500, termasuk bunga sebesar US$ 1.837.500. Jumlah ini akan dibayar dalam 2 kali pembayaran, pembayaran pertama sebesar US$ 52.500.000 pada saat *financial close* dan pembayaran kedua sebesar US$ 19.337.500 adalah 18 bulan setelah *financial close*.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan Konsorsium sedang dalam proses finalisasi amandemen kedua atas JOC dan ESC untuk memenuhi syarat pendanaan oleh pemberi pinjaman.

On July 2, 2008, the Consortium approved the amendment of the terms of payment of the Deed of Assignment, wherein the total compensation amounted to US$ 71,837,500, which includes interest of US$ 1,837,500. This will be paid in two installments, with the first payment of US$ 52,500,000 at the financial close date and the second payment US$ 19,337,500 on 18 months subsequent to the financial close date.

As of the date of issuance of the consolidated financial statement, the Company and Consortium is in the process of finalising a second amendment to the JOC and ESC, to meet the funding requirements by the lender.

c. Perolehan barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan, jaringan transmisi dan distribusi adalah sebagai berikut :

c. Capital expenditures

As of December 31, 2013, total commitments on capital expenditures based on contracts, which are related to procurement of power plants, transmissions and distributions are as follows :

	Mata uang/ *Currencies*	Jumlah dalam mata uang asing/ *Amount in foreign currencies *)*	Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent **)*	
Program percepatan				Fast track program
Kontrak pembangkitan	US$	244	2.973.866	Power plant contracts
	Rupiah		1.744.797	
			4.718.663	
Kontrak transmisi	Rupiah		505.589	Transmission contracts
Kontrak konstruksi rutin	US$	151	1.840.550	Regular construction contracts
	JPY	17	201.904	
	Rupiah		5.630.652	
			7.673.106	

*) Dalam jutaan

**) Perolehan barang modal dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan.

*) In million

**) Capital expenditures denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rate prevailing at reporting date.

Program Percepatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa – Bali. Proyek ini diharapkan beroperasi pada tahun 2014 dan 2015.

Kontrak Pembangkitan

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah menandatangani 36 kontrak *Engineering Procurement and Construction* (EPC) meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 26 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.451 MW di luar Jawa – Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah membayar uang muka sebesar US$ 5.431 juta dan Rp 22.496.752 juta untuk 35 kontrak EPC, atau sekitar 15% dari jumlah nilai kontrak, yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan (Catatan 6). Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.

Kontrak Transmisi

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah menandatangani 137 kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

Fast Track Program

Based on Presidential of the Republic of Indonesia Decree No. 71 Year 2006 dated July 5, 2006 which was amended by Presidential of the Republic of Indonesia Regulation No. 59 dated December 23, 2009, the Government mandates the Company to build coal-fired power plants (PLTU) at 42 locations in Indonesia, which include 10 power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 32 power plants with aggregate capacity of 2,769 MW outside Java – Bali. These projects are expected to be in operation by 2014 and 2015.

Power Plant Contracts

As of December 31, 2013, the Company signed 36 Engineering Procurement and Construction (EPC) contracts which consist of 10 electricity power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 26 electricity power plants with aggregate capacity of 2,451 MW outside Java - Bali. Under the terms of such contracts, the Company is required to pay the contractor a down payment, which is approximately 15% of the contract price and the remaining 85% will be funded through credit facilities from banks.

Until December 31, 2013, the Company made a total down payment of US$ 5,431 million and Rp 22,496,752 million for 35 EPC contracts or approximately 15% of the total contract price, which are recorded as construction in progress (Note 6). Such down payments are funded by the proceeds of the issued Guaranteed Notes and withdrawal of credit facilities for fast track program.

Transmission Contracts

As of December 31, 2013, the Company signed 137 contracts for upgrading and constructing new transmission and sub-stations in Java and outside Java. These projects are financed by own funds and withdrawal of credit facilities from banks.

Kontrak Konstruksi Rutin

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

Pada tanggal 31 Desember 2013, IP dan PJB mengadakan ikatan/kontrak dengan berbagai pihak untuk pengadaan material dan aset tetap serta jasa borongan dengan berbagai mata uang dengan jumlah setara Rupiah masing-masing sebesar Rp 1.075.991 juta dan Rp 504.133 juta.

Regular Construction Contracts

Capital expenditure commitments for regular construction represent project contracts signed for additional electricity generating plants and development of transmission and distribution network. These projects are financed by own funds and other external funding through offshore loans, grants and investment projects from the State budget.

As of December 31, 2013, IP and PJB entered into commitments or contracts with various parties for the supply of materials, property, plant and equipment, and contracted services in various currencies, with Rupiah equivalent totaling to Rp 1,075,991 million and Rp 504,133 million, respectively.

d. Fasilitas pinjaman belum digunakan

Penerusan pinjaman

Mata uang	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent *)*	Curency
US$	1.083	13.202.506	US$
JPY	118.176	13.728.312	JPY
Jumlah		26.930.818	Total

*) Dalam jutaan

Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas pinjaman belum digunakan setara Rp 7.629.218 juta dikenakan provisi sebesar 0,10% - 0,75% per tahun, sedangkan fasilitas sebesar Rp 19.301.600 juta tidak dikenakan provisi. Fasilitas ini berakhir antara tahun 2014 sampai dengan 2047.

Perjanjian pinjaman program percepatan

Tujuan fasilitas pinjaman ini adalah untuk membiayai 85% dari nilai kontrak EPC untuk program percepatan. Jangka waktu pinjaman termasuk periode penyediaan kredit selama 36 bulan, dan sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007 pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan – batasan umum.

d. Unused loan facilities

Two-step loans

*) In millions

As of December 31, 2013 the unused facilities with equivalent of Rp 7,629,218 million bear provision charge of 0.10% - 0.75% per annum, while the remaining facilities of Rp 19,301,600 million do not bear any provision charge. These facilities will be due between 2014 to 2047.

Loan agreements for fast track program

The purpose of these loan facilities is to finance 85% of the contract price of EPC for fast track program. The term of the loan includes preparation of credit for 36 months and is fully guaranteed by the Government of the Republic Indonesia in accordance with the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (PP) No. 91 Year 2007, superseding No. 86 Year 2006, regarding Grant of Government Guarantee for Construction of Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is obliged to comply with general restrictions.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, rincian fasilitas pinjaman untuk membiayai program percepatan adalah sebagai berikut:

As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, details of loan facilities to finance the fast track program are as follow:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility *)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities *)*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance premium *)*	Tanggal perjanjian/ *Date of agreement*	Periode/ *Period **)* Tahun/*Year*
	Fasilitas pinjaman dalam US$/*US$ loan facilities*						
1	The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Suralaya, Banten	284	-	0,84% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	27	30 Januari 2008/ *January 30, 2008*	15
2	The Export-Import Bank of China/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/*East Java*	331	-	0,84% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	32	30 Januari 2008/ *January 30, 2008*	15
3	Barclays Bank PLC and China Development Bank/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/*Central Java*	262	-	3,25% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	-	31 Desember 2008/ *December 31, 2008*	13
4	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank of China Limited/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/*West Java*	592	-	0,785% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	55	29 Mei 2008/ *May 29, 2008*	13
5	The Export-Import Bank of China/ PLTU Nanggroe Aceh Darussalam	124	19	2.80% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	12	4 Mei 2009/ *May 4, 2009*	15
6	The Export-Import Bank of China/ PLTU 2 Jawa Barat/*West Java* PLTU 3 Pelabuhan Ratu, Baten	482	57	2.80% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	44	4 Mei 2009/ *May 4, 2009*	15
7	Bank of China Limited/ PLTU 3 Banten PLTU Teluk Naga	455	26	1% + LIBOR 1 tahun/ *1 year*	46	4 Mei 2009/ *May 4, 2009*	13
8	The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur/*East Java*	293	45	2.80% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	29	1 Juli 2009/ *July 1, 2009*	15
9	Bank of China Limited/ PLTU Tanjung Awar-awar	372	73	2.30% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	34	14 Desember 2009/ *December 14, 2009*	13
10	China Development Bank/ PLTU Adipala, Cilacap, Jawa Tengah/*Central Java*	625	76	3.85% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	-	14 Oktober 2009/ *October 14, 2009*	13
11	China Development Bank/ PLTU Teluk Sirih, Padang, Sumatera Barat/ *West Sumatra*	138	16	3.85% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	-	14 Oktober 2009/ *October 14, 2009*	13
	Jumlah dalam US$/*Total in* US$	3.958	312		279		

*) Dalam jutaan/*In million*
**) Termasuk masa tenggang/*Include grace period*

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility *)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities *)*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Tanggal perjanjian/ *Date of agreement*	Periode/ *Period **)* Tahun/*Year*
	Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/*Rupiah loan facilities*					
1	PT Bank Mega Tbk/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/*East Java*	600.635	-	1,10% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	18 April 2008/ *April 18, 2008*	10
2	PT Bank Mega Tbk/ PLTU 1 Suralaya Baru, Banten	735.387	-	1,10% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	18 April 2008/ *April 18, 2008*	10
3	PT Bank Mega Tbk/ PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Banten	1.874.315	-	1,10% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	29 Juli 2008/ *July 29, 2008*	10
4	PT Bank Mega Tbk/ PLTU 2 Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Tenggara* PLTU Gorontalo PLTU 2 Manado, Sulawesi Utara/*North Sulawesi* PLTU Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau/*Riau Island* PLTU 1 Ende, Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara* PLTU Sulawesi Tenggara 2, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi* PLTU 1 Kalimantan Tengah/*Central Kalimantan*	1.498.513	521.422	1,10% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	29 Juli 2008/ *July 29, 2008*	10
5	PT Bank Mega Tbk/ PLTU Lampung, Lampung PLTU 2 Medan, Sumatera Utara/*North Sumatera*	1.240.661	-	1,10% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	29 Juli 2008/ *July 29, 2008*	10
6	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* PT Bank Mandiri/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/*Central Java*	1.911.480	-	1,11% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	23 Maret 2008/ *March 23, 2008*	10
7	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* PT Bank Negara Indonesia/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/*West Java*	1.272.913	-	1,10% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	23 Februari 2008/ *February 23, 2008*	10
8	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* PT Bank Central Asia Tbk/ PLTU 2 Labuan, Banten	1.188.548	-	1,12% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	23 Juli 2008/ *July 23, 2008*	10
9	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* PT Bank Negara Indonesia/ PLTU 2 Labuan, Banten	2.741.298	-	0,825% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	23 Juli 2008/ *July 23, 2008*	10
10	PT Bank Bukopin Tbk/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur/*East Java*	1.045.924	-	0,71% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	29 Juli 2008/ *July 29, 2008*	13
11	PT Bank Bukopin Tbk/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	1.606.612	10.236	0,71% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	29 Juli 2008/ *July 29, 2008*	13
	Jumlah dipindahkan/*Total carry forward*	15.716.287	531.658			

*) Dalam jutaan/*In million*
**) Termasuk masa tenggang/*Include grace period*

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility *)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities *)*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Tanggal perjanjian/ *Date of agreement*	Periode/ *Period **)* Tahun/*Year*
	Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/*Rupiah loan facilities*					
	Jumlah pindahan/*Total carried forward*	15.716.287	531.658			
12	*Pinjaman sindikasi dikoordinasi/* *Syndicated loan coordinated by* PT Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan/*South Sulawesi* PLTU Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/*South Kalimantan*	2.074.739	583.065	1% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	30 Januari 2009/ *January 30, 2009*	10
13	Pinjaman sindikasi dikordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* PT Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan/*South Sulawesi* PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/*South Kalimantan*	1.151.005	152.102	1% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	30 Januari 2009/ *January 30, 2009*	10
14	PT. Bank DKI/ PLTU Naganraya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara* PLTU 1 Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Tenggara* PLTU Sumatera Barat/*West Sumatera* PLTU 2 Kalimantan Barat/*West Kalimantan* PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara/*North Maluku* PLTU Sulawesi Tengah/*Central Sulawesi* PLTU 1 Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara* PLTU 2 Sulawesi Utara/*North Sulawesi* PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara* PLTU 1 Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Tenggara* PLTU 4 Bangka Belitung PLTU 2 Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Tenggara* PLTU 1 Kalimantan Tengah/*Central Kalimantan*	4.732.000	1.457.900	1% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	25 Maret 2009/ *March 25, 2009*	10
15	PT Bank Negara Indonesia/ PLTU Tanjung Awar-Awar, Jawa Timur/*East Java*	1.155.352	108.191	1% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	30 Januari 2009/ *January 30, 2009*	10
16	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* PT Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Tarahan, Lampung PLTU2 Pangkalan Susu, Sumatera Utara/*North Sumatera*	3.941.772	1.136.977	1.50% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	14 Oktober 2009/ *October 14, 2009*	10
17	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* PT Bank Negara Indonesia/ Transmisi/*Transmission :* PLTU Meulaboh koneksi 1, Nanggroe Aceh Darussalam PLTU2 Pangkalan Susu, Sumatera Utara/ *North Sumatera* PLTU Teluk Sirih koneksi 1 & 2, Sumatera Barat/ *West Sumatera* PLTU Tarahan koneksi 2, Lampung PLTU Asam-Asam koneksi 1 & 2, Kalimantan Selatan/*South Kalimantan* PLTU 1 Pulang Pisau koneksi 2, Kalimantan Tengah/ *Central Kalimantan* PLTU 2 Amurang koneksi 2, Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	1.930.063	-	1.50% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	14 Desember 2009/ *December 14, 2009*	10
	Jumlah dipindahkan/*Total carry forward*	30.701.218	3.969.893			

*) Dalam jutaan/*In million*
**) Termasuk masa tenggang/*Include grace period*

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility *)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities *)*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Tanggal perjanjian/ *Date of agreement*	Periode/ *Period **)* Tahun/*Year*
	Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/*Rupiah loan facilities*					
	Jumlah pindahan/*Total carried forward*	30.701.218	3.969.893			
18	*Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by* PT Bank Mandiri/ Transmisi/*Transmission :* PLTU 1 Suralaya Koneksi 1 & 2, Banten PLTU 2 Labuan Koneksi 1, Banten PLTU 3 Teluk Naga koneksi 1 dan 2, Banten PLTU 2 Pelabuhan Ratu koneksi 1, Banten PLTU 1 Rembang koneksi 2, Jawa Tengah/*Central Java* PLTU 2 Adipala koneksi 2, Jawa Tengah/*Central Java* PLTU 2 Paiton Baru koneksi 2, Jawa Timur/*East Java* PLTU3 Tanjung Awar-awar koneksi 1, Jawa Timur/ *East Java*	2.613.012	-	1.50% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	14 Desember 2009/ *December 14, 2009*	10
19	*Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by* PT Bank Central Asia/ Transmisi/*Transmission :* PLTU 1 Suralaya koneksi 2, Banten PLTU 2 Labuhan koneksi 2, Banten PLTU 3 Lontar koneksi 2, Banten PLTU 1 Indramayu koneksi 2, Jawa Barat/*West Java* PLTU 2 Pelabuhan Ratu koneksi 2, Banten PLTU 1 Pacitan koneksi 2, Jawa Timur/*East Java* PLTU 2 Paiton koneksi 2, Jawa Timur/*East Java* PLTU 3 Tanjung Awar-Awar koneksi 2, Jawa Timur/ *East Java*	327.195	145.005	1.50% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	14 Desember 2009/ *December 14, 2009*	10
20	*Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by* PT Bank Central Asia/ PLTU 1 Bengkalis (2x10MW), Riau PLTU 2 Selat Panjang (2x7MW), Riau PLTU 1 Parit Baru, Kalimantan Barat/ *West Kalimantan*	635.929	235.398	1.50% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	14 Desember 2009/ *December 14, 2009*	10
21	*Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by* PT Bank Central Asia/ PLTU 1 Bengkalis, Riau PLTU 2 Selat Panjang, Riau PLTU 1 Tanjung Bale Karimun, Kepulauan Riau/ *Riau Island* PLTU 1 Parit Baru, Kalimantan Barat/*West Kalimantan*	871.922	264.379	1.50% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	14 Desember 2009/ *December 14, 2009*	10
22	*Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by* PT Bank Rakyat Indonesia/ Transmisi paket 3/*Transmission packages 3*	1.067.684	180.323	1.05% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	27 Desember 2010/ *December 27, 2010*	10
	Jumlah dalam Rupiah/*Total in* Rupiah	36.216.960	4.794.998			

*) Dalam jutaan/*In million*
**) Termasuk masa tenggang/*Include grace periods*

Fasilitas pinjaman yang telah digunakan oleh Perusahaan dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian adalah sebesar Rp 320.282 juta.

The loan facilities utilized by the Company from January 1, 2014 until the date of the issuance of the consolidated financial statements amounted to Rp 320,282 million.

e. Program operasi dan pemeliharaan

Untuk meningkatkan dan memulihkan daya guna unit pembangkit sampai pada level tertentu, Perusahaan menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebagai berikut:

e. Operation and maintenance programs

In order to improve and restore the performance of generator units until a certain level, the Company has entered into Operation and Maintenance Agreements with contractors. The contract payment comprise of fixed and variable portions. The contractors have to meet certain targets and will be charged with penalty if these targets are not met. The commitments with the contractors for fixed portion are as follows:

Pembangkitan/ *Power plant*	Kontraktor/ *Contractors*	Nilai kontrak/ *Contract amount* Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	Periode/ *Period*
PLTU Tanjung Jati B	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	3.235.299	2010-2032
PLTU Tanjung Jati B	Konsorsium/ consortium of Fortum Service OY & PT Medco Energy	1.704.578	2005-2030
PLTU Muara Tawar	Siemens AG	57.797	2004-2014
Jumlah/ *Total*		4.997.674	

f. Litigasi

(i) Pada tahun 2001 Hendrik Nelwan dan kawan-kawan mengajukan gugatan ganti rugi atas tanah ahli waris yang telah dipergunakan Perusahaan sebagai PLTA Tonsealama sebesar Rp 54 miliar di Pengadilan Negeri Manado. Berdasarkan putusan tanggal 16 Maret 2011, Pengadilan Tinggi memutuskan menerima gugatan dari penggugat. Atas putusan ini Perusahaan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak Kasasi dari Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia karena ada beberapa novum yang mendukung Perusahaan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia.

f. Litigations

(i) In 2001, Hendrik Nelwan and co-claimants filed claims for the compensation for the heirs of land that has been utilized by the Company as hydropower plant PLTA Tonsealama, amounting to Rp 54 billion in District Court of Manado. Based on the letter of verdict dated March 16, 2011, the High Court of Manado has granted the plaintiff's claim. The Company appealed to the Supreme Court of the Republic of Indonesia but the Supreme Court of the Republic of Indonesia has refused the appeal of the Company. Because of that, the Company appealed to Supreme Court of the Republic of Indonesia again based on new evidences presented. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in process in Supreme Court of the Republic of Indonesia.

(ii) Pada tahun 2011, Perusahaan menghadapi gugatan ganti rugi dari Dindin dan kawan-kawan sebesar Rp 15,6 miliar untuk kerugian material dan Rp 85 miliar untuk kerugian immaterial sehubungan dengan pembangunan saluran udara tegangan tinggi 500 kV yang melalui tempat tinggal penggugat. Berdasarkan putusan tanggal 29 Februari 2012, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat. Pada tanggal 7 Maret 2012, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Pada tanggal 1 April 2013, Perusahaan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(ii) In 2011, the Company faced claim from Dindin and co-claimants amounting to Rp 15.6 billion for the material loss and Rp 85 billion for the immaterial loss in relation to the construction of 500 kV high-tension air intake which crossed the plaintiff's residence. Based on the letter of verdict dated February 29, 2012, the District Court of Bandung granted just part of plaintiff's claim. On March 7, 2012, the Company made appeal to the High Court of Bandung. On April 1, 2013, the Company appealed to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in process in the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

(iii) Pada tanggal 20 Januari 2012, Perusahaan menghadapi gugatan ganti rugi dari PT Subur Sari Lastderich sebesar Rp 10 miliar untuk kerugian material dan sebesar Rp 1 triliun untuk kerugian immaterial sehubungan dengan pembangunan PLTA Asahan III (PLTA) oleh Perusahaan. Penggugat mengklaim bahwa PT Subur Sari Lastderich berhak untuk membangun PLTA tersebut. Perusahaan memenangkan perkara ini tingkat banding. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(iii) On January 20, 2012, the Company faced claim from PT Subur Sari Lastderich amounting to Rp 10 billion for the material loss and Rp 1 trillion for the immaterial loss in relation to development of PLTA Asahan III (PLTA) by the Company. Plaintiff's claimed that PT Subur Sari Lastderich has the right to build such PLTA. The Company won the case in appeal process. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in process in Supreme Court of the Republic of Indonesia.

(iv) Pada tanggal 5 April 2012, PLN Geothermal, entitas anak, menghadapi gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Permata Drilling Internasional (PDI) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan pekerjaan *Integrated Project Management Pengeboran* Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu. Berdasarkan surat keputusan tanggal 11 Desember 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa PLN Geothermal harus membayar ganti rugi kepada PDI sebesar US$ 12,3 juta. Pada tanggal 18 Desember 2012, PLN Geothermal mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan.

(iv) On April 5, 2012, PLN Geothermal, a subsidiary, faced Unlawful Acts from PT Permata Drilling Internasional (PDI) in the District Court of South Jakarta relating to the work of the Integrated Project Management of Drilling Exploration Wells at PLTP Tulehu. Based on the letter of verdict dated December 11, 2012, the District Court of South Jakarta decided that PLN Geothermal should pay compensation to PDI amounting to US$ 12.3 million. On December 18, 2012, PLN Geothermal appealed to the High Court of South Jakarta. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in process in the High Court of South Jakarta.

Berdasarkan surat perjanjian antara PLN Geothermal dan PDI, semua persengketaan yang timbul akan diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2012, PLN Geothermal mendaftarkan perkara tersebut ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Berdasarkan surat keputusan tanggal 14 Maret 2013, BANI memutuskan menerima sebagian gugatan dari PLN Geothermal dimana jumlah sisa pembayaran yang masih harus dibayarkan oleh PLN Geothermal adalah sebesar US$ 4 juta dan PDI harus membayar biaya administrasi dan arbiter sebesar US$ 31.560 kepada PLN Geothermal.

Based on the agreement between PLN Geothermal and PDI, all disputes arising will be submitted to the Indonesia National Board of Arbitration (BANI). In relation to the matter, on August 31, 2012, PLN Geothermal registered the case to BANI. Based on the letter of verdict dated March 14, 2013, BANI has granted the plaintiff's claim where the remaining payments still to be paid by PLN Geothermal is amounting to US$ 4 million and PDI should pay administration and arbiter expense amounting to US$ 31,560 to PLN Geothermal.

(v) Pada tahun 2012, Perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh PT Meta Epsi sehubungan dengan Penggugat meminta bank Garansi di Bank Niaga untuk tidak dicairkan kepada Perusahaan. Nilai gugatan sebesar Rp 83,3 miliar dan US$ 5 juta. Pada tanggal 14 Maret 2013, Pengadilan Negeri Jakarta selatan menerima gugatan penggugat. Pada tanggal 19 Maret 2013, Perusahaan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan.

(v) In 2012, the Company faced unlawful acts from PT Meta Epsi in the District Court of South Jakarta relating to plaintiff's claim to unwithdraw guarantee account in Bank Niaga. The amount of claim is Rp 83,3 billion and US$ 5 million. On March 14, 2013, the District Court of South Jakarta has granted the plaintif's claim. On March 19, 2013 the Company has appealed to the High Court of South Jakarta. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in process in the High Court of South Jakarta.

(vi) Pada tanggal 26 Desember 2012 Perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Modaco Enersys & PT Angkasa Buana Cipta terkait Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat memberikan rancangan pekerjaan pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima yang keliru sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunannya. Nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp 62 miliar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

(vi) On December 26, 2012, the Company faced unlawful acts from PT Modaco Enersys & PT Angkasa Buana Cipta relating to the plaintiffs claim that defendant gave the unsuitable design of PLTU 1 West Nusa Tenggara (2 x 10 MW) Bima. The amount of claim is Rp 62 billion. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in process in the South Jakarta Court.

(vii) Perusahaan dan entitas anak juga menghadapi gugatan ganti rugi dalam jumlah yang tidak material di beberapa lokasi bangunan jaringan transmisi/distribusi, perselisihan dengan karyawan, perkara dengan pelanggan dan pemasok. Manajemen berpendapat klaim-klaim tersebut tidak material dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.

56. PENERAPAN ISAK 27 "PENGALIHAN ASET DARI PELANGGAN"

Pada tanggal 1 Januari 2014 Perusahaan dan entitas anak menerapkan ISAK 27, "Pengalihan Aset dari Pelanggan". ISAK 27 berlaku untuk perjanjian di mana Perusahaan dan entitas anak menerima aset tetap (atau uang tunai untuk memperoleh atau membangun aset tetap) dari pelanggan yang harus digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan dan entitas anak atau menyediakan akses berkelanjutan atas pasokan listrik, atau keduanya. Pada tanggal 23 Februari 2015, DSAK–IAI menerbitkan Buletin Teknis 10 tentang Penerapan Ketentuan Transisi ISAK 27 "Pengalihan Aset dari Pelanggan". Buletin Teknis 10 tersebut memberikan klarifikasi bahwa ISAK 27 dapat diterapkan atas pengalihan aset dari pelanggan sebelum tanggal efektif ISAK 27, sepanjang nilai wajar dan informasi lain yang dibutuhkan untuk penerapan ISAK 27 dapat diperoleh pada saat pengalihan tersebut terjadi.

Ketika Perusahaan dan entitas anak menerima pengalihan aset tetap dari pelanggan yang memenuhi definisi aset, Perusahaan dan entitas anak harus mengakui aset yang dialihkan tersebut sebagai aset tetap Perusahaan dan entitas anak. Pendapatan atas kontribusi yang diperoleh dari pelanggan diakui di dalam laba rugi ketika Perusahaan dan entitas anak telah memenuhi kewajiban atas kontribusi tersebut.

(vii) The Company and its subsidiaries also face claims for compensation of losses, which are immaterial in amount, at several areas of the Company's transmission/distribution facilities, disputes with the Company's employees, and cases with customers and suppliers. Management believes that such claims are not material and will not significantly affect the Company's operations.

56. ADOPTION OF ISAK 27 "TRANSFER OF ASSETS FROM CUSTOMERS"

On January 1, 2014, the Company and its subsidiaries adopted ISAK 27, "Transfer of Assets from Customer". ISAK 27 applies to arrangements in which the Company and its subsidiaries receive a property, plant, and equipment (or cash to acquire or construct a property, plant and equipment) from a customer that must be used either to connect the customer to its network or to provide the customer with ongoing access to the supply of electricity, or both. On February 23, 2015, DSAK – IAI published a Technical Bulletin 10 on the Implementation of the Transitional Provisions of ISAK 27: Transfer of Assets from Customers. Technical Bulletin 10 provided clarification that ISAK 27 can be applied on the transfer of assets from customers before the effective date of ISAK 27, as long as fair value and other information required for ISAK 27 can be obtained at the time the transfer occurred.

When the item of property, plant and equipment transferred from a customer meets the definition of an asset the Company and its subsidiaries must recognize the asset in its financial statements. Revenue arising from contributions received from customers are recognised in profit or loss when the performance obligations associated with receiving those contributions are met.

Oleh karena Perusahaan dan entitas anak berkewajiban untuk menyediakan akses berkelanjutan atas jaringan listriknya dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (terlepas dari kontribusi yang telah diberikan oleh pelanggan) maka Perusahaan dan entitas anak menyimpulkan bahwa menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan dan entitas anak merupakan jasa yang diberikan untuk mendapatkan aset tersebut. Jasa koneksi diserahkan kepada pelanggan dan merepresentasikan nilai yang berdiri sendiri (*stand-alone value*) untuk pelanggan tersebut. Sebagai hasilnya, Perusahaan dan entitas anak mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan dan entitas anak sebagai pendapatan pada saat Perusahaan dan entitas anak menyelesaikan kewajiban atas jasa koneksi tersebut.

As the Company and its subsidiaries have an obligation to provide ongoing access to its network to all customers at the same price regulated by the Government of Republic of Indonesia (regardless of the amount of contributions made by the customers) the Company and its subsidiaries conclude that connecting the customers to its network is the only service to be delivered in exchange for the assets. A service connection is delivered to the customer and represents stand-alone value for that customer. As a result, the Company and its subsidiaries recognize connection fees received from customers that are used to construct or acquire property, plant and equipment to connect the customers to its network as revenues when the Company and its subsidiaries complete the connection services.

Manajemen mengevaluasi dampak dari ISAK 27 "Pengalihan Aset dari Pelanggan" terhadap biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan yang digunakan untuk membangun aset tetap untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan dan entitas anak dan menetapkan bahwa biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan termasuk dalam ruang lingkup ISAK 27 dan Perusahaan dan entitas anak memiliki informasi yang cukup untuk menerapkan Interpretasi secara retrospektif. Sebelum penerapan ISAK 27, biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi sebesar 5% per tahun sejak tanggal penyambungan. Perusahaan dan entitas anak mengubah kebijakan akuntansi biaya penyambungan (Catatan 2w) untuk disesuaikan dengan ISAK 27 dan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 atas dampak perubahan tersebut.

The management assessed the impact of ISAK 27 "Transfers of Assets from Customers" for connection fees received from customers that are used to construct property, plant and equipment to connect customers to the Company and its subsidiaries network and determined that connection fees received from customers qualify under the scope of the ISAK 27 and the Company and its subsidiaries have the sufficient information to apply the Interpretation retrospectively. Prior to adoption of ISAK 27, connection fees received from customers are recorded as deferred revenue and amortized at the rate of 5% per annum starting from the connection date. The Company and its subsidiaries changed its accounting policy pertaining to connection fees (Note 2w), in accordance with ISAK 27 and restate its consolidated financial statements for the years ended December 31, 2013 and 2012, to effect such change.

Akun-akun laporan keuangan berikut ini telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak dari penerapan ISAK 27:

The following financial statement line items have been restated to reflect the impact of applying the interpretation ISAK 27:

	31 Desember/*December 31,* 2013			
	Sebelum Penyajian Kembali / Before *Restatement*	Penyesuaian / *Adjustments*	Setelah Penyajian Kembali / After *Restatement*	
ASET				ASSETS
Aset pajak tangguhan	11.590.879	(5.658.405)	5.932.474	Deferred tax assets
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
EKUITAS				EQUITY
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya	17.931.293	17.099.578	35.030.871	Retained earnings - Unappropriated
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Pendapatan ditangguhkan	23.788.838	(23.788.838)	-	Deferred revenue
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	3.862.843	39.942	3.902.785	Deferred tax liabilities - net
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pendapatan ditangguhkan	-	990.913	990.913	Deferred revenue

	2013			
	Sebelum Penyajian Kembali / *Before Restatement*	Penyesuaian / *Adjustments*	Setelah Penyajian Kembali / After *Restatement*	
PENDAPATAN USAHA				REVENUES
Penjualan tenaga listrik	153.485.606	-	153.485.606	Sale of electricity
Subsidi listrik Pemerintah	101.207.859	-	101.207.859	Government's electricity subsidy
Penyambungan pelanggan	1.585.338	4.442.461	6.027.799	Customer connection fees
Lain-lain	1.125.778	-	1.125.778	Others
Jumlah Pendapatan Usaha	257.404.581	4.442.461	261.847.042	Total Revenues
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	147.633.751	-	147.633.751	Fuel and lubricants
Pembelian tenaga listrik	2.393.790	-	2.393.790	Purchased electricity
Sewa	8.114.145	-	8.114.145	Lease
Pemeliharaan	19.839.465	-	19.839.465	Maintenance
Kepegawaian	15.555.063	-	15.555.063	Personnel
Penyusutan	21.893.665	-	21.893.665	Depreciation
Lain-lain	5.481.268	-	5.481.268	Others
Jumlah Beban Usaha	220.911.147	-	220.911.147	Total Operating Expenses
LABA SEBELUM POS KEUANGAN DAN LAIN-LAIN	36.493.434	4.442.461	40.935.895	INCOME BEFORE FINANCIAL AND OTHER ITEMS
POS KEUANGAN DAN LAIN-LAIN BERSIH				NET FINANCIAL AND OTHER ITEMS
Penghasilan bunga	736.378	-	736.378	Interest income
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(48.096.810)	-	(48.096.810)	Loss on foreign exchange - net
Beban keuangan	(30.146.545)	-	(30.146.545)	Financial cost
Penghasilan lain-lain - bersih	1.792.124	-	1.792.124	Others income - net
Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih	(75.714.853)	-	(75.714.853)	Net Financial and Other Items
RUGI SEBELUM PAJAK	(39.221.419)	4.442.461	(34.778.958)	LOSS BEFORE TAX
MANFAAT PAJAK	9.653.958	(1.110.615)	8.543.343	TAX BENEFIT
RUGI TAHUN BERJALAN DAN JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF	(29.567.461)	3.331.846	(26.235.615)	LOSS FOR THE YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Rugi tahun berjalan dan jumlah laba rugi komprehensif diatribusikan kepada :				Loss for the year and total comprehensive income attributable to :
Pemilik Entitas Induk	(29.563.880)	3.331.846	(26.232.034)	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali	(3.581)	-	(3.581)	Non-controlling interest
Jumlah	(29.567.461)	3.331.846	(26.235.615)	Total
RUGI PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (Dalam Rupiah penuh)	(639.947)	72.122	(567.825)	BASIC/DILUTED LOSS PER SHARE (In full Rupiah amount)

	31 Desember/*December 31,* 2012			
	Sebelum Penyajian Kembali / Before *Restatement*	Penyesuaian / *Adjustments*	Setelah Penyajian Kembali / After *Restatement*	
ASET				ASSETS
Aset pajak tangguhan	200.713	(171.954)	28.759	Deferred tax assets
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
EKUITAS				EQUITY
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya	50.703.617	13.767.732	64.471.349	Retained earnings - Unappropriated
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Pendapatan ditangguhkan	19.228.694 *)	(19.228.694)	-	Deferred revenue
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	3.304.671	4.415.777	7.720.448	Deferred tax liabilities - net
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pendapatan ditangguhkan	-	873.231	873.231	Deferred revenue

*) Saldo setelah penyajian kembali dalam Catatan 14

*) Amount after Note 14 restatement

	2012			
	Sebelum Penyajian Kembali / *Before Restatement*	Penyesuaian / *Adjustments*	Setelah Penyajian Kembali / After *Restatement*	
PENDAPATAN USAHA				REVENUES
Penjualan tenaga listrik	126.721.647	-	126.721.647	Sale of electricity
Subsidi listrik Pemerintah	103.331.285	-	103.331.285	Government's electricity subsidy
Penyambungan pelanggan	1.306.463	4.448.554	5.755.017	Customer connection fees
Lain-lain	1.297.061	-	1.297.061	Others
Jumlah Pendapatan Usaha	232.656.456	4.448.554	237.105.010	Total Revenues
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	136.535.495	-	136.535.495	Fuel and lubricants
Pembelian tenaga listrik	2.939.624	-	2.939.624	Purchased electricity
Sewa	6.963.983	-	6.963.983	Lease
Pemeliharaan	17.567.375	-	17.567.375	Maintenance
Kepegawaian	14.400.976	-	14.400.976	Personnel
Penyusutan	19.499.221	-	19.499.221	Depreciation
Lain-lain	5.208.776	-	5.208.776	Others
Jumlah Beban Usaha	203.115.450	-	203.115.450	Total Operating Expenses
LABA SEBELUM POS KEUANGAN DAN LAIN-LAIN	29.541.006	4.448.554	33.989.560	INCOME BEFORE FINANCIAL AND OTHER ITEMS
POS KEUANGAN DAN LAIN-LAIN BERSIH				NET FINANCIAL AND OTHER ITEMS
Penghasilan bunga	384.043	-	384.043	Interest income
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(5.938.482)	-	(5.938.482)	Loss on foreign exchange - net
Beban keuangan	(24.612.091)	-	(24.612.091)	Financial cost
Penghasilan lain-lain - bersih	1.657.252	-	1.657.252	Others income - net
Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih	(28.509.278)	-	(28.509.278)	Net Financial and Other Items
LABA SEBELUM PAJAK	1.031.728	4.448.554	5.480.282	INCOME BEFORE TAX
MANFAAT PAJAK	2.173.796	(1.112.139)	1.061.657	TAX BENEFIT
LABA TAHUN BERJALAN DAN JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF	3.205.524	3.336.415	6.541.939	INCOME FOR THE YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Laba tahun berjalan dan jumlah laba rugi komprehensif diatribusikan kepada :				Income for the year and total comprehensive income attributable to :
Pemilik Entitas Induk	3.208.444	3.336.415	6.544.859	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali	(2.920)	-	(2.920)	Non-controlling interest
Jumlah	3.205.524	3.336.415	6.541.939	Total
LABA PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (Dalam Rupiah penuh)	69.451	72.221	141.672	BASIC/DILUTED EARNINGS PER SHARE (In full Rupiah amount)

	1 Januari/*January 1*, 2012			
	Sebelum Penyajian Kembali / Before *Restatement*	Penyesuaian / *Adjustments*	Setelah Penyajian Kembali / After *Restatement*	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
EKUITAS				EQUITY
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya	54.619.043 *)	10.431.317	65.050.360	Retained earnings - Unappropriated
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Pendapatan ditangguhkan	14.587.906	(14.587.906)	-	Deferred revenue
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	6.384.701	3.475.593	9.860.294	Deferred tax liabilities - net
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pendapatan ditangguhkan	-	680.996	680.996	Deferred revenue

*) Saldo setelah penyajian kembali dalam Catatan 14

*) Amount after Note 14 restatement

Penerapan ISAK 27 tidak memiliki dampak pada laporan laba arus kas konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

The adoption of ISAK 27 has no impact to the consolidated statements of cash flow of the Company and its subsidiaries.

57. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 9 Januari 2014, Perusahaan melakukan pembayaran pokok Obligasi PLN X Tahun 2009 Seri A dan Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 Seri A.

57. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

On January 9, 2014, the Company has paid PLN Bonds X Year 2009 Series A and Sukuk Ijarah PLN III Year 2009 Series A.

58. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Tabel berikut ini mengungkapkan rincian instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan:

58. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

a. Categories and classes of financial instruments

The following table disclosed the details of the Company and its subsidiaries financial instruments based on financial instruments classification:

	31 Desember/ *December 31, 2013*							
	Klasifikasi instrumen keuangan/ Financial instruments classification							
	Aset Keuangan/ Financial Asset				Liabiltias Keuangan/ Financial Liabilities			
	Dimiliki hingga jatuh tempo / *Held to Maturity*	Pinjaman yang diberikan dan piutang / *Loans and Receivables*	Tersedia untuk dijual / *Available-for-Sale*	Nilai wajar melalui laba rugi / *Fair Value Through Profit or Loss*	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi / *Financial Liabilities at Amortized Cost*	Nilai wajar melalui laba rugi / *Fair value through profit or loss*	Jumlah Aset dan Liabilitas Keuangan / *Total Financial Assets and Liabilities*	
Aset								Assets
Aset Tidak Lancar								**Noncurrent Assets**
Piutang pihak berelasi	-	176.032	-	-	-	-	176.032	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	-	5.659.753	-	-	-	-	5.659.753	Restricted cash in banks and time deposits
Piutang lain-lain	-	304.302	-	-	-	-	304.302	Other receivables
Aset tidak lancar lain	-	-	8.186	-	-	-	8.186	Other noncurrent assets
Jumlah aset tidak Lancar	-	6.140.087	8.186	-	-	-	6.148.273	Total noncurrent assets
Aset Lancar								**Current Assets**
Kas dan setara kas	-	25.529.969	-	-	-	-	25.529.969	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	-	97.667	-	-	-	-	97.667	Short-term investments
Piutang usaha	-	15.696.940	-	-	-	-	15.696.940	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	-	4.625.113	-	-	-	-	4.625.113	Other receivables
Piutang subsidi listrik	-	21.793.929	-	-	-	-	21.793.929	Receivables on electricity subsidy
Piutang pihak berelasi	-	40.061	-	-	-	-	40.061	Receivables from related parties
Jumlah aset lancar	-	67.783.679	-	-	-	-	67.783.679	Total current assets
Jumlah aset keuangan	-	73.923.766	8.186	-	-	-	73.931.952	Total financial assets
Liabilitas Jangka Panjang								**Noncurrent Liabilities**
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun								Long-term liabilities - net of current maturi
Penerusan pinjaman	-	-	-	-	29.498.060	-	29.498.060	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	-	-	-	-	8.578.716	-	8.578.716	Government loans
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	-	129.718.551	-	129.718.551	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	-	-	-	-	66.457.948	-	66.457.948	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	-	-	-	-	81.017.989	-	81.017.989	Bonds payable
Utang listrik swasta	-	-	-	-	6.784.275	-	6.784.275	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	-	-	-	-	6.906	-	6.906	Payable to related parties
Utang lain-lain	-	-	-	-	221.150	-	221.150	Other payables
Jumlah liabilitas jangka panjang	-	-	-	-	322.283.595	-	322.283.595	Total noncurrent liabilities
Liabilitas Jangka Pendek								**Current Assets**
Utang usaha	-	-	-	-	26.526.502	-	26.526.502	Trade accounts payable
Uang jaminan langganan	-	-	-	-	10.107.402	-	10.107.402	Customers' security deposits
Utang biaya proyek	-	-	-	-	1.061.453	-	1.061.453	Project cost payable
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun								Current maturities of long-term liabilities
Penerusan pinjaman	-	-	-	-	3.208.983	-	3.208.983	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	-	-	-	-	293.793	-	293.793	Government loans
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	-	4.901.469	-	4.901.469	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	-	-	-	-	8.387.881	-	8.387.881	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi					2.808.000		2.808.000	Bonds payable
Utang listrik swasta	-	-	-	-	272.454	-	272.454	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	-	-	-	-	2.786	-	2.786	Payable to related parties
Utang lain-lain	-	-	-	-	18.223.407	-	18.223.407	Other payables
Jumlah liabilitas jangka pendek	-	-	-	-	75.794.130	-	75.794.130	Total current liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	-	-	398.077.726	-	398.077.726	Total financial liabilities

	31 Desember/ *December 31, 2012*							
	Klasifikasi instrumen keuangan/ Financial instruments classification							
	Aset Keuangan/ Financial Asset				Liabiltias Keuangan/ Financial Liabilities			
	Dimiliki hingga jatuh tempo / *Held to Maturity*	Pinjaman yang diberikan dan piutang / *Loans and Receivables*	Tersedia untuk dijual / *Available-for-Sale*	Nilai wajar melalui laba rugi / *Fair Value Through Profit or Loss*	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi / *Financial Liabilities at Amortized Cost*	Nilai wajar melalui laba rugi / *Fair value through profit or loss*	Jumlah Aset dan Liabilitas Keuangan / *Total Financial Assets and Liabilities*	
Aset								**Assets**
Aset tidak lancar								**Noncurrent assets**
Piutang pihak berelasi	-	22.329	-	-	-	-	22.329	Receivable from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunannya	-	4.792.736	-	-	-	-	4.792.736	Restricted cash in banks and time deposits
Piutang lain-lain	-	303.058	-	-	-	-	303.058	Other receivables
Aset tidak lancar lain	-	-	43.606	-	-	-	43.606	Other noncurrent assets
Jumlah aset tidak lancar	-	5.118.123	43.606	-	-	-	5.161.729	Total noncurrent assets
Aset lancar								**Current assets**
Kas dan setara kas	-	22.639.853	-	-	-	-	22.639.853	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	-	378.208	-	-	-	-	378.208	Short-term investments
Piutang usaha	-	3.851.920	-	-	-	-	3.851.920	Trade accounts receivable
Piutang subsidi listrik	-	20.565.784	-	-	-	-	20.565.784	Receivables on electricity subsidy
Piutang lain-lain	-	849.120	-	-	-	-	849.120	Other receivables
Piutang pihak berelasi	-	28.470	-	-	-	-	28.470	Receivables from related parties
Jumlah aset lancar	-	48.313.355	-	-	-	-	48.313.355	Total current assets
Jumlah aset keuangan	-	53.431.478	43.606	-	-	-	53.475.084	Total financial assets
Liabilitas								**Liabilities**
Liabilitas jangka panjang								**Noncurrent liabilities**
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun								Long-term liabilities - net of current maturities
Penerusan pinjaman	-	-	-	-	27.294.132	-	27.294.132	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	-	-	-	-	8.707.826	-	8.707.826	Government loans
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	-	107.609.232	-	107.609.232	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	-	-	-	-	54.271.679	-	54.271.679	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	-	-	-	-	67.250.977	-	67.250.977	Bonds payable
Utang listrik swasta	-	-	-	-	5.582.143	-	5.582.143	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	-	-	-	-	9.675	-	9.675	Payable to related parties
Utang lain-lain	-	-	-	-	153.530	-	153.530	Other payables
Jumlah liabilitas jangka panjang	-	-	-	-	270.879.194	-	270.879.194	Total noncurrent liabilities
Liabilitas jangka pendek								**Current liabilities**
Utang usaha	-	-	-	-	25.755.606	-	25.755.606	Trade accounts payable
Uang jaminan langganan	-	-	-	-	6.455.405	-	6.455.405	Customers' security deposits
Utang biaya proyek	-	-	-	-	1.226.239	-	1.226.239	Project cost payable
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun								Current maturities of long-term liabilities
Penerusan pinjaman	-	-	-	-	2.309.841	-	2.309.841	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	-	-	-	-	334.010	-	334.010	Government loans
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	-	3.699.829	-	3.699.829	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	-	-	-	-	7.808.344	-	7.808.344	Bank loans and medium term notes
Utang listrik swasta	-	-	-	-	206.013	-	206.013	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	-	-	-	-	4.073	-	4.073	Payable to related parties
Utang lain-lain	-	-	-	-	16.395.807	-	16.395.807	Other payables
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	-	-	64.195.167	-	64.195.167	Total financial liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	-	-	335.074.361	-	335.074.361	**Total financial liabilities**

b. Manajemen risiko modal

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan dan entitas anak terdiri dari pinjaman (Catatan 23, 24, 25, 26, 27 dan 28) dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 20), tambahan modal disetor (Catatan 21) dan saldo laba.

Dewan Direksi Perusahaan dan entitas anak secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Perusahaan dan entitas anak. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

b. Capital risk management

The Company and its subsidiaries manage capital risk to ensure that they will be able to continue as going concern and to ensure compliance with covenants of capital adequacy ratio. The Company and its subsidiaries capital structure consist of debt (Notes 23, 24, 25, 26, 27 and 28) and equity shareholders of the holding that consist of capital stock (Note 20), additional paid-in capital (Note 21) and retained earnings.

The Board of Directors of the Company and its subsidiaries periodically review the Company and its subsidiaries capital structure. As part of this review, the Board of Directors consider the cost of capital and related risks.

Batasan pinjaman Perusahaan mensyaratkan antara lain pemenuhan rasio pinjaman terhadap ekuitas dan rasio kecukupan modal. Manajemen secara berkala memonitor persyaratan tersebut untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam batasan pinjaman Perusahaan.

Perusahaan dan entitas anak berusaha untuk meminimalkan biaya modal (*weighted average cost of capital*/WACC) sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan dan entitas anak. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dan entitas anak dalam mencari pendanaan melalui utang selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Perusahaan membentuk Divisi Manajemen Risiko (Divisi MRO) yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Perusahaan. Divisi ini juga bertugas untuk menyusun profil risiko yang bersifat strategis sebagai himbauan awal kepada manajemen Perusahaan dan entitas anak. Divisi MRO bertanggung jawab kepada Direktur (Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan).

The Company's loan covenants requires among others to fulfill certain debt to equity ratio and capital adequacy ratio. The management regularly monitors such requirements to ensure that there will be no defaults on the loans of the Company.

The Company and its subsidiaries aim to minimize the cost of capital (weighted average cost of capital/WACC), in order to maximize their value. Therefore, in their funding though debt policies, the Company and its subsidiaries always take into account the financial risk that may arise in the future.

c. Financial risk management objectives and policies

The objective and policies of the Company and its subsidiaries financial risk management is to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of their business, while managing their exposure to market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company and its subsidiaries operate within defined policies approved by the Board of Directors.

In managing the risk, the Company established a Risk Management Division (MRO Division) which is responsible for the preparation of the policies, frameworks, risk management implementation guide and infrastructure of the risk management and ensuring the implementation of the risk management in the Company environment. The division is also established to formulate a strategic risk profile as an early warning to the Company and its subsidiaries management. MRO Division is responsible to the Director (Commerce, Risk Management and Compliance).

Perusahaan telah menetapkan taksonomi risiko dengan membagi risiko menjadi lima kelompok yaitu risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko proyek, dan risiko kepatuhan. Risiko keuangan diantaranya adalah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam mengelola risiko, Perusahaan mempertimbangkan skala prioritas yang didasarkan pada level risikonya. Level risiko ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan skala dampak yang ditimbulkan.

The Company has established risk taxonomy by dividing risk into five categories: strategic risk, financial risk, operational risk, project risk, and compliance risk. Financial risk includes market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. In managing the risk, the Company considers prioritization based on risk level. Risk level is determined by the level of possibility and scale of potential impact.

Terkait dengan risiko keuangan, Perusahaan sedang mengkaji kebijakan manajemen untuk melakukan akuntansi lindung nilai untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, kebijakan manajemen yang telah disetujui menjadi sangat penting agar tidak timbul masalah pada waktu pelaksanaan akuntansi lindung nilai tersebut. Selain itu, Perusahaan juga sedang mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menangani akuntansi lindung nilai untuk memastikan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akuntansi lindung nilai dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pada tanggal 31 Desember 2013, pedoman pelaksanaan akuntansi lindung nilai tersebut belum selesai.

Related to financial risks, the Company is currently reviewing the management policy related to hedge accounting to serve as guidance for implementation. As a State-Owned Enterprise, the approved management policy is very important in order to avoid any issues that may arise during the implementation of such hedging programs. In addition, the Company is also preparing human resources that will handle the hedging accounting to ensure proper recognition, measurement and in accordance with applicable standards. As of December 31, 2013, the hedge accounting guideline is not yet finalized.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan dan entitas anak memiliki banyak transaksi dan sumber pendanaan dalam mata uang asing. Sebagai akibatnya timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Perusahaan telah melakukan diskusi dengan Bank Indonesia (BI) dalam memitigasi eksposur risiko mata uang asing ini. Perusahaan mendapatkan fasilitas dari BI untuk membeli mata uang asing melalui Bank yang ditunjuk oleh BI.

Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan dan entitas anak pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 53.

i. Foreign currency risk management

The Company and its subsidiaries undertake many transactions and funding sources denominated in foreign currencies. Consequently, there are exposures to exchange rate fluctuations. The Company had discussions with Bank of Indonesia (BI) in mitigating exposure to foreign currency risk. The Company obtains a facility from BI to purchase foreign currency through the Bank appointed by BI.

The Company and its subsidiaries foreign currency exposure as of reporting date is disclosed in Note 53.

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Perusahaan dan entitas anak untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. 10% kenaikan dan penurunan menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

Foreign currency sensitivity

The following table explains the details of the Company and its subsidiaries sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. 10% increase or decrease represents the management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates after considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes only after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax*								
	31 Desember/*December 31*, 2013								
	JPY		USD		EUR		Lain-lain/ *Others*		
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan									**Financial Assets**
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	379.442	(379.442)	41.051	(41.051)	-	-	-	-	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	5.644	(5.644)	235.663	(235.663)	6.613	(6.613)	3.268	(3.268)	Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	385.086	(385.086)	276.714	(276.714)	6.613	(6.613)	3.268	(3.268)	Total financial assets
Liabilitas Keuangan									**Financial Liabilities**
Penerusan pinjaman	(1.714.131)	1.714.131	(563.482)	563.482	(117.947)	117.947	(23.731)	23.731	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	(2.373.581)	2.373.581	(7.430.803)	7.430.803	-	-	-	-	Lease liability
Utang bank dan surat hutang jangka menengah	-	-	(2.890.623)	2.890.623	-	-	-	-	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	-	-	(5.073.671)	5.073.671	-	-	-	-	Bonds payable
Utang listrik swasta	-	-	(529.255)	529.255	-	-	-	-	Electricity purchase payable
Utang usaha	-	-	(441.317)	441.317	-	-	-	-	Trade accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	(24.442)	24.442	(232.555)	232.555	(1.063)	1.063	(254)	254	Accrued expenses
Utang biaya proyek	(10.224)	10.224	(37.621)	37.621	(18.476)	18.476	-	-	Project cost payable
Utang lain-lain	(16.086)	16.086	(452.069)	452.069	(15.188)	15.188	(39.849)	39.849	Other payables
Jumlah liabilitas keuangan	(4.138.464)	4.138.464	(17.651.396)	17.651.396	(152.674)	152.674	(63.834)	63.834	Total financial liabilities
Jumlah bersih	(3.753.378)	3.753.378	(17.374.682)	17.374.682	(146.061)	146.061	(60.566)	60.566	Total - net

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax*								
	31 Desember/*December 31*, 2012								
	JPY		USD		EUR		Lain-lain/ *Others*		
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan									**Financial Assets**
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	327.221	(327.221)	27.704	(27.704)	-	-	-	-	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	593	(593)	166.817	(166.817)	3.444	(3.444)	440	(440)	Cash and cash equivalents
Jumlah aset keuangan	327.814	(327.814)	194.521	(194.521)	3.444	(3.444)	440	(440)	Total financial assets
Liabilitas Keuangan									**Financial Liabilities**
Penerusan pinjaman	(1.598.286)	1.598.286	(443.233)	443.233	(107.415)	107.415	(22.130)	22.130	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	(2.485.308)	2.485.308	(5.612.184)	5.612.184	-	-	-	-	Lease liability
Utang bank dan surat hutang jangka menengah	-	-	(2.313.921)	2.313.921	-	-	-	-	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	-	-	(4.025.138)	4.025.138	-	-	-	-	Bonds payable
Utang listrik swasta	-	-	(434.112)	434.112	-	-	-	-	Electricity purchase payable
Utang usaha	(36)	36	(234.708)	234.708	(5.043)	5.043	-	-	Trade accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	(169.921)	169.921	(91.177)	91.177	(978)	978	(251)	251	Accrued expenses
Utang biaya proyek	(27.164)	27.164	(31.690)	31.690	(14.277)	14.277	-	-	Project cost payable
Utang lain-lain	(14.766)	14.766	(198.365)	198.365	(9.734)	9.734	(18.174)	18.174	Other payables
Jumlah liabilitas keuangan	(4.295.481)	4.295.481	(13.384.528)	13.384.528	(137.447)	137.447	(40.555)	40.555	Total financial liabilities
Jumlah bersih	(3.967.667)	3.967.667	(13.190.007)	13.190.007	(134.003)	134.003	(40.115)	40.115	Total - net

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Perusahaan dan entitas anak memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko tingkat suku bunga. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

Perusahaan menunjuk konsultan yang memahami pasar untuk menentukan harga obligasi dan MTN. Selanjutnya, manajemen secara terus menerus menilai kondisi pasar untuk menemukan peluang untuk memastikan suku bunga efektif.

Profil suku bunga

Profil suku bunga Perusahaan dan entitas anak terhadap aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

ii. Interest rate risk management

The Company and its subsidiaries have transactions at fixed and floating interest rates. Trasaction at floating interest rate are exposed to interest rate risk. The Company and its subsidiaries manage the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

The Company hires consultants which are experts in the market to determine the pricing of its bonds and MTNs. Further, management continually assess market conditions to find opportunities to ensure the effective interest rates.

Interest rate profile

The interest rate profile of the Company and its subsidiaries financial assets and liabilities are as follows:

	31 Desember/*December 31, 2013*				
	Tingkat bunga mengambang/ *Floating rate*	Tingkat bunga tetap/ *Fixed rate*	*Tidak dikenakan bunga/Non-interest bearing*	Jumlah/*Total*	
Aset Keuangan:					Financial Assets:
Piutang pihak berelasi	-	210.715	5.378	216.093	Receivable from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5.659.753	-	-	5.659.753	Restricted cash in banks and time deposits
Aset tidak lancar lain			8.186	8.186	Other noncurrent assets
Kas dan setara kas	21.217.489	4.302.752	9.728	25.529.969	Cash and cash equivalent
Investasi jangka pendek	92.113	-	5.554	97.667	Short-term investment
Piutang usaha	-	-	15.696.940	15.696.940	Trade accounts receivable
Piutang subsidi listrik	-	-	21.793.929	21.793.929	Receivable on electricity subsidy
Piutang lainnya	-	-	4.929.415	4.929.415	Other receivable
Jumlah aset keuangan	26.969.355	4.513.467	42.449.130	73.931.952	Total financial assets
Liabilitas keuangan:					Financial Liabilities:
Penerusan pinjaman	7.570.510	25.136.533		32.707.043	Two-step loan
Utang kepada pemerintah	-	8.872.509	-	8.872.509	Government loans
Utang sewa pembiayaan	-	134.620.020	-	134.620.020	Lease liability
Utang bank dan surat utang jangka menengah	74.845.829	-	-	74.845.829	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	-	83.825.989	-	83.825.989	Bonds payable
Utang listrik swasta	-	7.056.729	-	7.056.729	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	-	6.304	3.388	9.692	Payable to related parties
Utang lain-lain	-	-	18.444.557	18.444.557	Other payables
Utang usaha	-	-	26.526.502	26.526.502	Trade accounts payable
Uang jaminan langganan	-	-	10.107.402	10.107.402	Customer security deposits
Utang biaya proyek	-	-	1.061.453	1.061.453	Project cost payable
Jumlah liabilitas keuangan	82.416.339	259.518.084	56.143.302	398.077.725	Total financial liabilities

	31 Desember/*December 31, 2012*				
	Tingkat bunga mengambang/ *Floating rate*	Tingkat bunga tetap/ *Fixed rate*	*Tidak dikenakan bunga/Non-interest bearing*	Jumlah/*Total*	
Aset Keuangan:					Financial Assets:
Piutang pihak berelasi	-	29.028	21.771	50.799	Receivable from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	4.775.629	17.107	-	4.792.736	Restricted cash in banks and time deposits
Aset tidak lancar lain	-	-	16.186	16.186	Other noncurrent assets
Kas dan setara kas	20.747.051	1.883.188	9.614	22.639.853	Cash and cash equivalent
Investasi jangka pendek	315.725	54.315	8.168	378.208	Short-term investment
Piutang usaha	-	-	12.522.120	12.522.120	Trade accounts receivable
Piutang subsidi listrik	-	-	20.565.784	20.565.784	Receivable on electricity subsidy
Piutang lainnya	-	-	1.152.178	1.152.178	Other receivable
Jumlah aset keuangan	25.838.405	1.983.638	34.295.821	62.117.864	Total Financial assets
Liabilitas keuangan:					Financial Liabilities:
Penerusan pinjaman	5.513.189	24.090.784	-	29.603.973	Two-step loan
Utang kepada pemerintah	-	9.041.836	-	9.041.836	Government loans
Utang sewa pembiayaan	-	111.309.061	-	111.309.061	Lease liability
Utang bank dan surat utang jangka menengah	62.080.023	-	-	62.080.023	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	-	67.250.977	-	67.250.977	Bonds payable
Utang listrik swasta	-	5.788.156	-	5.788.156	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	-	7.867	5.881	13.748	Payable to related parties
Utang lain-lain	-	-	16.549.337	16.549.337	Other payables
Utang usaha	-	-	25.755.606	25.755.606	Trade accounts payable
Uang jaminan langganan	-	-	6.455.405	6.455.405	Customer security deposits
Utang biaya proyek	-	-	1.226.238	1.226.238	Project cost payable
Jumlah liabilitas keuangan	67.593.212	217.488.681	49.992.467	335.074.360	Total financial liabilities

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Interest rate sensitivity

The sensitivity analysis below have been determined based on the Company and its subsidiaries exposure to interest rates for financial instruments after tax outstanding at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of 50 basis point increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. 50 basis points increase or decrease represents the management's assessment of the reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax*		
	31 Desember/*December 31, 2013*		
	+50 bp	-50bp	
Aset			**Assets**
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	21.224	(21.224)	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	79.566	(79.566)	Cash & cash equivalents
Investasi jangka pendek	345	(345)	Short-term investments
Sub jumlah laba (rugi)	101.135	(101.135)	Sub income (loss)
Liabilitas			**Liabilities**
Penerusan pinjaman	(28.389)	28.389	Two-step loans
Utang bank dan surat hutang jangka menengah	(280.672)	280.672	Bank loans and medium term notes
Sub jumlah laba (rugi)	(309.061)	309.061	Sub income (loss)
Jumlah laba (rugi)	(207.926)	207.926	Total income (loss)

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax* 31 Desember/*December 31, 2012*		
	+50 bp	-50bp	
Aset			**Assets**
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	17.909	(17.909)	Restricted cash in banks and time deposits
Kas dan setara kas	77.801	(77.801)	Cash in bank
Investasi jangka pendek	1.184	(1.184)	Short-term investments
Sub jumlah laba (rugi)	96.894	(96.894)	Subtotal income (loss)
Liabilitas			**Liabilities**
Penerusan pinjaman	(20.674)	20.674	Two-step loans
Utang bank dan surat utang jangka menengah	(232.800)	232.800	Bank loan and medium term notes
Sub jumlah laba (rugi)	(253.474)	253.474	Subtotal income (loss)
Jumlah laba (rugi)	(156.580)	156.580	Total income (loss)

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa pihak ketiga akan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan entitas anak. Sebagai Perusahaan yang melayani infrastruktur publik, Perusahaan dan entitas anak diwajibkan melayani semua pelanggan tanpa melihat apakah nantinya akan bisa membayar atau tidak. Dalam meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang, Perusahaan dan entitas anak menerapkan uang jaminan pelanggan dan melakukan pemutusan sambungan listrik ke pelanggan jika pelanggan tidak membayar pada waktu yang telah tiga bulan untuk meminimalkan risiko kredit. Untuk kas dan setara kas, Perusahaan dan entitas anak mengelola rekening pada beberapa Bank untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko kredit.

Piutang usaha tersebar kepada sejumlah besar pelanggan di berbagai industri dan wilayah geografis. Evaluasi kredit berkelanjutan dilakukan pada kondisi keuangan piutang dan pada batasan tertentu, piutang dijamin dengan uang jaminan pelanggan.

iii. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that the counterparties will default on its contractual obligations resulting in a loss to the Company and its subsidiaries. As public infrastructure company, the Company and its subsidiaries are obliged to serve all customers regardless of the ability to pay. In minimizing the risk of uncollected receivables, the Company and its subsidiaries determine customer security deposits and will terminate the electricity connection to the customer if the customer does not make payment on time, which is determined to be three months to minimizing credit risks. For cash and cash equivalents, the Company and its subsidiaries maintain accounts with several Banks to avoid significant concentration of cash with one institution.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Company and its subsidiaries exposure to credit risk.

Trade receivables are spread over a large number of customers across divers industries and geographic areas. Ongoing credit evaluation is being performed on the financial condition of accounts receivable and to a certain extend, receivables are secured by customers' deposit.

Eksposur maksimum Perusahaan dan entitas anak untuk risiko kredit berdasarkan wilayah geografis untuk piutang usaha pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

The Company and its subsidiaries maximum exposure to credit risk by geographical area for trade receivables at the reporting date are as follows:

	31 Desember/ *December 31,*		
	2013	2012	
Indonesia Bagian Timur	1.575.784	1.214.484	East Indonesia
Sumatera	2.393.634	1.989.374	Sumatera
Jawa dan Bali	11.727.522	9.318.262	Java and Bali
Jumlah Piutang Usaha	15.696.940	12.522.120	Total Trade Receivables

Tabel berikut ini menunjukan aset keuangan yang memiliki jaminan dan tidak memiliki jaminan dalam meminimalkan risiko kredit.

The following table shows the enhancement on the Company and its subsidiaries credit risks on financial assets:

	31 Desember/*December 31, 2013*			
	Jumlah/*Total*	Dijamin dengan uang deposit/ *Secured with cash deposits*	*Tanpa jaminan/ Unsecured*	
Piutang pihak berelasi	216.093	-	216.093	Receivable from related parties
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5.659.753	-	5.659.753	Restricted cash in banks and time deposit
Aset tidak lancar lain	8.186	-	8.186	Other noncurrent assets
Kas dan setara kas	25.529.969	-	25.529.969	Cash and cash equivalent
Investasi jangka pendek	97.667	-	97.667	Short term investment
Piutang usaha	15.696.940	10.107.402	5.589.538	Trade account receivable
Piutang subsidi listrik	21.793.929	-	21.793.929	Receivable on electricity subsidy
Piutang lain - lain	4.929.415	-	4.929.415	Other receivable
Jumlah	73.931.952	10.107.402	63.824.550	Total

Tabel berikut ini menunjukkan kualitas aset keuangan Perusahaan dan entitas anak sebelum cadangan kerugian penurunan nilai:

The following table shows the quality of Company and its subsidiaries financial assets before allowance for impairment losses:

	31 Desember/*December 31, 2013*				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *impaired*	Jumlah/ *total*	
Piutang pihak berelasi	216.093	-	-	216.093	Receivable from related parties
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5.659.753	-	-	5.659.753	Restricted cash in banks and time deposit
Aset tidak lancar lain	8.186	-	-	8.186	Other noncurrent assets
Kas dan setara kas	25.529.969	-	-	25.529.969	Cash and cash equivalent
Investasi jangka pendek	97.667	-	-	97.667	Short term investment
Piutang usaha	13.723.754	2.438.604	-	16.162.358	Trade account receivable
Piutang subsidi listrik	21.793.929	-	-	21.793.929	Receivable on electricity subsidy
Piutang lain - lain	4.929.415	-	-	4.929.415	Other receivable
Jumlah	71.958.766	2.438.604	-	74.397.370	Total

	31 Desember/*December 31, 2012*				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *impaired*	Jumlah/ *total*	
Piutang pihak berelasi	50.799	-	-	50.799	Receivable from related parties
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	4.792.736	-	-	4.792.736	Restricted cash in banks and time deposit
Aset tidak lancar lain	16.186			16.186	Other noncurrent assets
Kas dan setara kas	22.639.853	-	-	22.639.853	Cash and cash equivalent
Investasi jangka pendek	378.208	-	-	378.208	Short term investment
Piutang usaha	10.555.430	2.354.917	-	12.910.347	Trade account receivable
Piutang subsidi listrik	20.565.784	-	-	20.565.784	Receivable on electricity subsidy
Piutang lain - lain	1.152.178	-	-	1.152.178	Other receivable
Jumlah	60.151.174	2.354.917	-	62.506.091	Total

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

Certain financial asset are individually assessed for impairment and, if found to be impaired, have impairment loss assigned to them on an individual basis.

Tabel di atas termasuk aset keuangan yang mana penurunan nilainya dilakukan secara kolektif. Tidak praktis untuk mengidentifikasi penurunan nilai aset keuangan tersebut secara individu dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik risiko yang sama dimana penurunan nilainya dilakukan secara kolektif.

The above table includes financial assets on which collective impairment have been assessed. It is not practicable to individually identify impaired financial assets within the portfolio of financial assets with similar risk characteristics which are collectively assessed for impairment.

Kualitas kredit aset keuangan

Credit quality of financial assets

Kualitas kredit aset keuangan Perusahaan dan entitas anak dinilai dan dikelola berdasarkan peringkat internal.

The credit quality of the Company and its subsidiaries' financial assets is assessed and managed by using internal ratings.

Kualitas kredit dimonitor dengan menggunakan Sistem Peringkat Perusahaan dan entitas anak. Sistem peringkat dinilai dan diperbarui secara berkala untuk menjaga akurasi dan konsistensi peringkat risiko. Kualitas kredit dan Sistem Peringkat Perusahaan dan entitas anak dinilai sebagai berikut:

The credit quality is monitored using the Company and its subsidiaries' Rating System. The rating system is assessed and updated regularly to maintain accurate and consistent risk rating. The credit quality and the Rating System of the Company and its subsidiaries' are as follows:

- Tingkat tinggi
  Aset keuangan tingkat tinggi meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, rekening dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dan investasi dalam saham yang tidak tercatat di bursa, dimana transaksi tersebut dilakukan kepada pihak ketiga atau bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh karena itu, risiko kredit adalah minimal. Pihak ketiga yang dimaksud termasuk institusi keuangan utama, perusahaan dan institusi Pemerintah. Untuk piutang usaha, pelanggan dapat diberi peringkat tingkat tinggi jika memiliki kapasitas pembayaran utang yang sangat kuat. Pelanggan tingkat tinggi dinilai dapat memiliki sebuah kualitas *outlook* kredit yang tinggi dalam segala kondisi ekonomi. Tingkat tinggi adalah peringkat paling tinggi yang diberikan kepada pelanggan berdasarkan Sistem Penilaian Perusahaan dan entitas anak.

- Tingkat standar
  Aset keuangan peringkat standar termasuk piutang usaha yang tidak diklasifikasikan sebagai tingkat tinggi. Untuk piutang usaha, pelanggan dapat diberi peringkat standar jika pelanggan memiliki kapasitas pembayaran utang yang kuat. Walaupun probabilitas gagal bayar rendah, pelanggan dengan peringkat tingkat standar dinilai lebih rentan terhadap efek samping dari perubahan kondisi ekonomi.

- Tingkat sub standar
  Aset keuangan peringkat sub standar termasuk piutang usaha, dimana eksposur kredit untuk setiap pelanggan dianggap tidak berisiko untuk sementara waktu tetapi kinerja pelanggan telah melemah dan, kecuali tren berubah, dapat menyebabkan kerugian. Hal ini termasuk piutang dari pelanggan yang telah dihapus.

Tabel di bawah ini menunjukkan kualitas kredit setiap kelompok aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (tidak termasuk penyisihan kerugian penurunan nilai).

- High grade
  High grade financial assets include cash and cash equivalents, short term investment, restricted cash in banks and time deposits, and investments in non listed shares, which the transaction are conducted with counterparties with good credit rating or bank standing. Consequently, credit risk is minimal. These counterparties include large prime financial institutions, government companies and agencies. For trade account receivables, a customer is given a high grade rating if it has an extremely strong debt service capacity. High grade customers are viewed to possess a high credit quality outlook under all economic conditions. High grade is the highest rating provided to a customer under the Company and its subsidiaries' Rating System.

- Standard grade
  Standard grade financial assts include trade account receivables that are not classified as high grade. For trade receivable, a customer given a standard grade rating if it is deemed to have a strong debt service capacity. While the probability of default is low, standard grade customers are more susceptible to the adverse effects of changes in economic conditions.

- Sub-standard grade
  Sub-standard grade financial assets include trade account receivables where the credit exposures for a customer is deemed to be not at risk for temporary but the customer's performance has already weakened and unless present trends are reverse, could lead to losses. This includes receivables from accounts that have been terminated.

The table below shows the credit quality per class of financial assets that are neither past due nor impaired (exludes the allowance for impairment loss).

	31 Desember/*31 December 2013*				
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*	Tingkat sub standar/ *Sub-standard grade*	Jumlah/ *Total*	
Piutang pihak berelasi	216.093	-	-	216.093	Receivable from related parties
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5.659.753	-	-	5.659.753	Restricted cash in banks and time deposit
Aset tidak lancar lain	8.186	-	-	8.186	Other noncurrent assets
Kas dan setara kas	25.529.969	-	-	25.529.969	Cash and cash equivalent
Investasi jangka pendek	97.667	-	-	97.667	Short term investment
Piutang usaha	13.676.700	37.735	9.319	13.723.754	Trade account receivable
Piutang subsidi listrik	27.793.929	-	-	27.793.929	Receivable on electricity subsidy
Piutang lain - lain	4.929.415	-	-	4.929.415	Other receivable
Jumlah	77.911.712	37.735	9.319	77.958.766	Total

	31 Desember/*31 December 2012*				
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*	Tingkat sub standar/ *Sub-standard grade*	Jumlah/ *Total*	
Piutang pihak berelasi	50.799	-	-	50.799	Receivable from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	4.792.736	-	-	4.792.736	Restricted cash in banks and time deposits
Aset tidak lancar lain	16.186	-	-	16.186	Other noncurrent assets
Kas dan setara kas	22.639.853	-	-	22.639.853	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	378.208	-	-	378.208	Short term investments
Piutang usaha	10.544.948	9.900	582	10.555.430	Trade accounts receivable
Piutang subsidi listrik	20.565.784	-	-	20.565.784	Receivable on electricity subsidy
Piutang lain - lain	1.152.178	-	-	1.152.178	Other receivables
Jumlah	60.140.692	9.900	582	60.151.174	Total

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan dan entitas anak akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas, simpanan, fasilitas bank dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Selanjutnya Perusahaan dan entitas anak juga memelihara kecukupan dana dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Company and its subsidiaries will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company and its subsidiaries short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Company and its subsidiaries manage liquidity risk by maintaining adequate cash, reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial liabilities.

In addition, the Company and its subsidiaries maintain an adequate amount of cash and cash equivalents and short-time investments, which may be readily converted to cash in any unforeseen interruption of its cash collections.

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada periode 31 Desember 2013 dan 2012. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar. Untuk arus bunga dengan tingkat bunga mengambang, nilai arus kas yang tidak terdiskonto diperoleh dari kurva suku bunga pada akhir periode. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskontokan ditranslasi dengan kurva nilai tukar *forward* yang relevan pada akhir periode pelaporan. Tanggal jatuh tempo kontraktual didasarkan pada tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar.

The following table details the Company and its subsidiaries remaining contractual maturity for its financial liabilities with agreed repayment period as of December 31, 2013 and 2012. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Company and its subsidiaries are required to pay. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. For foreign currency denominated financial liabilities, the undiscounted amortization is translated using the relevan forwards exchange curve at the end of the reporting period. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Company and its subsidiaries may be required to pay.

	31 Desember/December 31, 2013					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/ *Over five years*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas						**Liabilities**
Penerusan pinjaman	4.134.361	7.619.466	7.691.315	65.899.821	85.344.963	Two-step loans
Utang kepada pemerintah	773.462	1.512.419	2.903.581	7.975.657	13.165.119	Government loans
Utang sewa pembiayaan	22.909.511	58.635.656	67.325.524	664.692.273	813.562.964	Lease liability
Utang bank dan surat hutang jangka menengah	13.996.225	28.545.165	27.966.704	57.368.510	127.876.604	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	8.892.550	24.367.314	23.210.687	194.862.407	251.332.958	Bonds payable
Utang listrik swasta	652.033	1.363.600	1.558.724	14.130.974	17.705.331	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	3.603	7.647	-	-	11.250	Related parties payables
Utang usaha	26.526.501	-	-	-	26.526.501	Trade accounts payable
Utang jaminan langganan	10.107.402	-	-	-	10.107.402	Customer's security deposits
Utang biaya proyek	1.061.454	-	-	-	1.061.454	Project cost payable
Utang lain-lain	18.223.407	221.150	-	-	18.444.557	Other payables
Jumlah	107.280.509	122.272.417	130.656.535	1.004.929.642	1.365.139.103	Total

	31 Desember/December 31, 2012					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/ *Over five years*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas						**Liabilities**
Penerusan pinjaman	3.096.126	6.984.326	6.102.618	41.069.575	57.252.645	Two-step loans
Utang kepada pemerintah	785.377	1.535.008	2.228.581	9.401.529	13.950.495	Government loans
Utang sewa pembiayaan	21.296.137	27.223.004	48.646.209	466.106.694	563.272.044	Lease liabilities
Utang bank dan surat hutang jangka menengah	9.616.225	19.895.391	20.310.097	37.827.021	87.648.734	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi	2.507.281	8.696.647	21.686.375	96.875.606	129.765.909	Bonds payable
Utang listrik swasta	518.641	1.030.035	1.129.676	10.255.114	12.933.466	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	4.347	7.205	2.637	-	14.189	Related parties payable
Utang usaha	25.755.606	-	-	-	25.755.606	Trade accounts payable
Utang jaminan langganan	6.455.405	-	-	-	6.455.405	Customer's security deposits
Utang biaya proyek	1.226.239	-	-	-	1.226.239	Project cost payable
Utang lain-lain	16.395.807	153.530	-	-	16.549.337	Other payables
Jumlah	87.657.191	65.525.146	100.106.193	661.535.539	914.824.069	Total

d. Nilai wajar instrumen keuangan

Kecuali dijabarkan pada tabel berikut ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau mempunyai tingkat suku bunga pasar:

d. Fair value of financial instruments

Except as detailed in the following table, the management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market interest rate:

	31 Desember/ *December 31*				
	2013		2012		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Pinjaman diberikan dan piutang					**Loans and receivables**
Piutang pihak berelasi	216.093	216.191	50.799	53.148	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5.659.753	5.594.475	4.792.736	4.852.742	Restricted cash in banks and time deposits
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi					**Liabilities at amortised cost**
Penerusan pinjaman	32.707.043	33.833.498	29.603.973	30.816.109	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	8.872.509	8.149.855	9.041.836	9.881.194	Government loans
Utang sewa pembiayaan	134.620.020	142.670.048	111.309.061	128.069.290	Lease liabilities
Utang obligasi	83.825.989	86.380.138	67.250.977	81.374.537	Bonds payable
Utang listrik swasta	7.056.729	7.667.150	5.788.156	7.002.953	Electricity purchase payable
Utang pihak berelasi	9.692	9.692	13.748	13.789	Payable to related parties

Nilai wajar instrumen keuangan diatas, kecuali untuk utang obligasi, ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan menggunakan suku bunga pasar dengan penyesuaian kredit pada tanggal pelaporan.

The fair value for the above financial instruments, except for bonds payable, was determined by discounting estimated future cash flows with credit adjusted market interest rates at the reporting date.

Nilai wajar investasi tertentu dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga pasar diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual tidak diungkapkan karena tidak memiliki data yang dapat diobservasi. Investasi ini merupakan investasi saham yang tidak terdaftar di bursa dan diklasifikasikan pada level 3 dalam hierarki nilai wajar dengan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp 8.186 juta dan Rp 16.186 juta pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki intensi untuk menjual saham tersebut.

The fair value of certain investments in unquoted equity instruments classified as available-for-sale has not been disclosed because unobservable data. This investment represents non-listed shares' investment and classified as level 3 on fair value hierarchy with carrying amount of Rp 8,186 million and Rp 16,186 million as of December 31, 2013 and 2012. As of the issuance of reporting date, the Company and its subsidiaries do not have the intention to dispose this investment.

Nilai wajar dari utang obligasi, ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dikuotasikan pada tanggal pelaporan.

The fair value of bonds payable is determined by quoted closing ask price at the reporting date.

59. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 3 sampai 165 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2015.

59. MANAGEMENTS RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 3 to 165 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on February 27, 2015.

****

Referensi Peraturan OJK
Cross Reference to OJK Rule

	KRITERIA CRITERIA	HALAMAN PAGE
I	**Umum General**	
1	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris. Written in good and correct Indonesian, and it is recommended to present the report in English as well.	√
2	Laporan tahunan dicetak pada kertas yang berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas. Printed with good quality, using readable type and size of font.	√
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. Corporate identity should be stated clearly.	√
4	Laporan Tahunan ditampilkan di ***website*** Perusahaan. Posted in the Company's website.	√
II	**Ikhtisar Data Keuangan Penting Financial Highlights**	
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Financial information in comparative form over a period of three financial years or since operation commence date if company has been operational less than three years.	14 & 16
2	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Financial information in comparative form over a period of three financial years or since operation commence date if company has been operational less than three years.	14
3	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Financial ratios in comparative form over a period of three financial years or since operation commence date if company has been operational less than three years.	14
4	Informasi dalam bentuk tabel dan grafik yang memuat: 1. Jumlah saham yang beredar; 2. Kapitalisasi pasar; 3. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan 4. Volume perdagangan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada). Share price in table and graph. a. Number of shares in circulation b. Market capitalization; c. Highest, lowest and closing share prices; and d. Trade Volume	N.A Bukan Perusahaan Terbuka Non Listed Company
5	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Information on total bonds, sukuk or convertible bonds outstanding in the last two financial years.	18
III	**Laporan Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors Report**	
1	Laporan Dewan Komisaris Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi 3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada dibawah Dewan Komisaris; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada) Board of Commissioners Report Information includes: 1. Evaluation of Board of Directors performance 2. Review of business prospects stated by Board of Directors 3. Evaluation on performance of committees under the Board of Commissioners; and 4. Changes in Board of Commissioners composition (if any)	 36 38 40-42 39-40

	KRITERIA CRITERIA	HALAMAN PAGE
2	Laporan Direksi, memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Kinerja perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. 2. Gambaran tentang prospek usaha 3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada) Board of Directors Report 1. Analysis of company performance: strategic policy, comparison of result and target, problems facing the company 2. Business prospects 3. Good corporate governance practice 4. Changes in Board of Directors composition (if any).	 46-50 54 52 53
3	Tanda tangan anggota Direksi dan anggota dewan komisaris Signatures of Board of Commissioners and Board of Directors members	386
IV	**Profil Perusahaan Corporate Profile**	
1	Nama dan alamat lengkap perusahaan Name and address	58
2	Riwayat singkat perusahaan Brief history	59-61
3	Bidang usaha. 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. Line of business Description regarding: 1. Line of business in accordance with articles of association 2. Line of business; and 3. products or services provided	58, 62-63
4	Struktur Organisasi Organization structure	72
5	Visi dan Misi Perusahaan. 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; dan 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris. Vision and mission Elaborates on: 1. Corporate vision 3. Corporate mission 2. Statement that corporate vision and mission are approved by Board of Directors/Board of Commissioners	64
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris. 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Pendidikan; 5. Pengalaman kerja; dan 6. Tanggal penunjukkan pertama kali. Identity and brief curriculum vitae of Board of Commissioners Members Information includes: 1. Name 2. Position (incl. position in any other company or institution) 3. Age 4. Education 5. Working experience 6. Date of first appointment as member of Board of Commissioners	366-371

	KRITERIA CRITERIA	HALAMAN PAGE
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi. 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Pendidikan; 5. Pengalaman kerja; dan 6. Tanggal penunjukkan pertama kali. Identity and brief curriculum vitae of Board of Directors members Information includes: 1. Name 2. Position (incl. position in any other company or institution) 3. Age 4. Education 5. Working experience 6. Date of first appointment as member of Board of Directors	371-376
8	Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan). 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan. Total employees (two-year comparison) and description of potential development (e.g. education and training). Information describes: 1. Number of employees in each organization level 2. Number of employees by employment status 3. Accomplished training reflecting equal opportunity for all employees 4. Total costs incurred	 145 145 144 139-144 147
9	Komposisi Pemegang Saham. 1. Nama Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham; 2. Nama Direktur dan Komisaris yang memiliki saham; 3. Kelompok Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%; dan persentase kepemilikannya Shareholding composition Information includes among other things: 1. Name of Shareholders owning 5% or more ownership 2. Directors and Commissioners owning shares 3. Public Shareholders each owning less than 5% and the percentage of their ownership	66
10	Daftar Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Asosiasi. 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham ; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). Subsidiaries and/or affiliates Information contains at least: 1. Name of subsidiaries/affiliates 2. Percentage of share ownership 3. Core business of subsidiaries/affiliates 4. Operating status of subsidiaries/affiliates (operational or non operational)	 66 66 66 66
11	Struktur grup perusahaan: Yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan *special purpose vehicle* (SPV), atau pernyataan tidak memiliki grup. Company Group Structure Structure describes the subsidiary, affiliates, joint ventures, special purpose vehicle (SPV) or statement of not owning any group	68

	KRITERIA CRITERIA	HALAMAN PAGE
12	Kronologis pencatatan saham. 1. Kronologis pencatatan saham; 2. Jenis tindakan korporasi *(corporate action)* yang menyebabkan perubahan jumlah saham; 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; dan 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.	N.A. Bukan Perusahaan Publik
	Share listing chronology Information describes at least: 1. Share listing chronology 2. Corporate action affecting total number of shares 3. Changes of share total number from initial listing to end of financial year 4. Name of bourse (s) where company shares are listed	Non Listed Company
13	Kronologis pencatatan Efek lainnya.	
	1. Kronologis pencatatan efek lainnya;	120
	2. Jenis tindakan korporasi *(corporate action)* yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya;	121
	3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku;	121-122
	4. Nama Bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan	122
	5. Peringkat efek.	18 & 122
	Other securities listing chronology Description includes among other things: 1. Other securities listing chronology 2. Corporate action affecting total number of other securities 3. Changes of securities total number from initial listing to end of financial year 4. Name of bourse(s) where securities are listed 5. Securities rating	
14	Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal.	
	1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan;	74
	2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan	74
	3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	73
	Name & address of capital market institutions and professionals Information with regard to: 1. Name & address of Share Registrar 2. Name & address of public Accountant 3. Office name & address of Rating Agency	
15	Penghargaan dan atau sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional. 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	28-30
	Awards and/or certifications received by company at national and international level Information includes, among other things: 1. Name of award and/or certification 2. Year awarded 3. Agency issuing the award and/or certification 4. Validity period (for certification)	
16	Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Name and address of subsidiaries or branches or representative offices (if any) Containing information of, among others:	380-385

	KRITERIA CRITERIA	HALAMAN PAGE
V	**Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan** **Management Discussion and Analysis**	
1	Tinjauan operasi per segmen usaha. 1. Produksi/kegiatan usaha; 2. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; 3. Penjualan/pendapatan usaha; dan 4. Profitabilitas. Review of business operations per business segment Contains information on: 1. Production or business activity 2. Increase/decrease of production capacity 3. Sales/operating income 4. Profitability of each business segment presented in financial statement, if any	175-235, Segmen Listrik Electricity Segmen 235 Segmen Non Listrik Non Electricity Segmen
2	Uraian atas kinerja keuangan Perusahaan: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan 5. Arus kas. Description of financial performance Comparative financial analysis of current and previous years (in narration and table), covering: 1. Current assets, non-current assets, total assets 2. Current liabilities, non-current liabilities, total liabilities 3. Equity 4. Total comprehensive profit (loss) net profit 5. Cash flow	 200-205 205-210 211 213-219 219-220
3	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan : Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang 2. Tingkat kolektibilitas piutang Discussion and analysis of debt service ratio and turnover rate Explanation on: 1. Ratio solvability 2. Account receivable collectability ratio	 220-222 220-221
4	Bahasan tentang struktur modal *(capital structure)*, kebijakan manajemen atas struktur modal *(capital structure policy)*: 1. Struktur modal *(capital structure)*; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (***capital structure policies***) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut. Discussion of capital structure and capital structure policy Explanation on: 1. Capital structure 2. Capital structure policies	 211-212 212
5	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal 1. Tujuan dari ikatan tersebut; 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 3. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Material commitment in capital expenditure Description of: 1. Purpose of commitment 2. Funding sources to honor commitment 3. Currency 4. Action plans to hedge foreign currency risks Note: if company has no commitment in capital expenditure, it should be stated	228-229

	KRITERIA CRITERIA	HALAMAN PAGE
6	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir. 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. **Catatan:** apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan Material commitment in capital expenditure Description on: 1. Type of capital goods investment 2. The aim of capital goods investment; and 3. The value of capital goods investment incurred in the last financial year. Note: if there is no capital goods investment realization, state so	222
7	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Informasi memuat antara lain: 1. perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) 2. target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang Comparative information between targets in beginning of financial year and results achieved, also targets or projection for one year to come of revenue, profit, capital structure and others deemed important by company. Information includes, among other things: 1. Comparison between targets in beginning of financial year and results achieved 2. Targets or projections for one year to come	223
8	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan : Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. **Catatan**: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan Material information and fact subsequent to date of accountant report Description of significant events subsequent to accountant report including the effects on company's future performance and business risk. Note: if there is no significant event subsequent to accountant report, state so	232
9	Uraian tentang prospek usaha perusahaan Description of company business prospects	168-171
10	Uraian tentang aspek pemasaran; strategi dan pangsa pasar Description of marketing aspect	177
11	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. *Payout ratio*; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun. **Catatan:** apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan Description of dividend policy, total cash dividend per share and total dividend per year declared and paid for the past two financial years Description includes: 1. Policy of dividend sharing 2. Total cash dividend 3. Total cash dividend per share 4. Payout ratio for each year 5. Date of announcement and payment of cash dividends for each year. Note: if no dividend is paid, state the reason	244

	KRITERIA CRITERIA	HALAMAN PAGE
12	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga ***exercise***. **Catatan:** apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan Employee Stock Option (ESOP) and Management Stock Option (MSOP Information on the following: 1. Number of ESOP/MSOP stocks and the realization; 2. Tenure; 3. Requirement of rightful employee and/or management and 4. Exercise price. Note: if there is no such program, state so	229
13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Application of public offering proceeds (if company is still required to make such report) Description of the following: 1. Total fund acquired 2. Proposed application of fund 3. Detail of fund application 4. Balance of fund 5. Date of GMS approval for revised fund application, if any	N.A. Bukan Perusahaan Publik Not Public Company
14	Informasi material mengenai investasi, ekspansi,divestasi,akuisisi atau restrukturisasi hutang/modal. 1. Tujuan dilakukannya transaksi; 2. Nilai transaksi atau jumlah yang direstrukturisasi; dan 3. Sumber dana. Catatan. Jika tidak ada transaksi dimaksud, agar diungkapkan Material information on investment, expansion, divestment, acquisition or debt/capital restructuring Information on the following: 1. Purpose of transaction 2. Value of transaction or restructuring 3. Source(s) of fund Note: if there is no such transaction, state so	225
15	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi. 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan : Apabila tidak ada transaksi dimaksud, agar diungkapkan Information on material transaction involving conflict of interest and/or transaction with affiliated parties. Description of the following: 1. Name of party making transaction and nature of affiliation 2. Explanation on transaction fairness 3. Reason for making transaction 4. Realized transaction in current period 5. Company policy in relation to mechanism of transaction review 6. Compliance with related rules and regulations Note: if there is no such transaction, state so	231, Benturan Kepentingan Conflict of Interest 231-232, Transaksi Afiliasi Transaction with affiliated

	KRITERIA CRITERIA	HALAMAN PAGE
16	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan Catatan: Apabila tidak ada transaksi dimaksud, agar diungkapkan. Description of changes in laws and regulations significantly affecting the company Describe changes in government policy and the effects on the company Note: if there are no significant changes in laws and regulations, state so	232-233
17	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir. Catatan: Apabila tidak ada, agar diungkapkan Description of changes in accounting policies Describe changes in accounting policies, reasons and effects on financial statement Note: if there are no changes in accounting policies, state so	229-230
VI	**Good Corporate Governance Good Corporate Governance**	
1	Uraian Dewan Komisaris; Antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris 4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan 5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris 6. Pengungkapan mengenai *Board Charter* (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris) Description of Board of Commissioners 1. Board of Commissioners responsibility 2. Procedures of fixing remuneration Remuneration 3. structure showing remuneration components and nominal amount per component for each member of Board of Commissioners 4. Frequency and attendance rate of Board of Commissioners meeting 5. Training program for enhancing Board of Commissioners' competence 6. Disclosure of Board Charter (work guidelines and procedures of Board of Commissioners)	 262 270 272 267 272 262
2	Informasi mengenai Komisaris Independen. 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. Description of Board of Directors Comprising, among others: 1. Criteria of selecting Independent Commissioner; and 2. Statement on each Independent Commissioner's independence	260 - 261
3	Uraian Direksi; Antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 2. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota Direksi 3. Frekuensi pertemuan dan Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan gabungan Direksi dan Dewan Komisaris; 4. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi 5. Pengungkapan mengenai *Board Charter* (pedoman dan tata tertib kerja Direksi) 6. Kebijakan suksesi Direksi Description of Board of Directors Description include: 1. Scope of duty and responsibility of each member of Board of Directors 2. Frequency of Board of Directors meeting 3. Attendance rate of Board of Directors meeting 4. Training program for enhancing Board of Directors' competence 5. Disclosure of Board Charter (work guidelines and procedures of Board of Directors) 6. Policy on Board of Directors' succession	 275 279-280 267 287-288 276 273

	KRITERIA CRITERIA	HALAMAN PAGE
4	*Assessment* terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi : Mencakup antara lain: 1. Proses pelaksanaan *assessment* atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan *assessment* atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 3. Pihak yang melakukan *assessment* Assessment of members of Board of Commissioners and Board of Directors Description includes: 1. Procedures of fixing remuneration 2. Remuneration structure showing type and amount of short-term, long-term and post employment benefits for each member of Board of Directors 3. Performance indicator of Board of Directors	 267, 286 286-287 267, 286
5	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi. 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 2. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi 3. Pengungkapan indikator kinerja untuk mengukur ***performance*** Direksi Description of remuneration policy for Board of Directors 1. Procedures of fixing remuneration 2. Remuneration structure showing type and amount of short-term, long-term and post employment benefits for each member of Board of Directors 3. Performance indicator of Board of Directors	 283-284 284-285 286
6	Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. Dalam bentuk skema atau diagram. Information on Principal Shareholders and Controlling Shareholders, either directly or not directly, through to individuals In the form of chart or diagram. unless for SOE which entirely owned by the Government	Perusahaan BUMN State Owned Enterprise (SOE)
7	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. **Catatan:** apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan Disclosure of affiliate relation between Board of Commissioners, Directors, and principal Shareholders and/or controlling Shareholders Information includes among other things: 1. Affiliate relation between Board of directors member and other Board of directors member 2. Affiliate relation between Board of directors member and Board of commissioners member 3. Affiliate relation between Board of directors member and Principal Shareholder and/or Controlling Shareholder 4. Affiliate relation between Board of commissioners member and other Board of commissioners member 5. Affiliate relation between Board of commissioners member and Principal Shareholder and/or Controlling Shareholder Note: if no such affiliate relation exists, state so	283

	KRITERIA CRITERIA	HALAMAN PAGE
8	Komite Audit.	
	1. Nama dan jabatan anggota komite audit;	290
	2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit;	378
	3. Independensi anggota komite audit;	289-290
	4. Uraian tugas dan tanggung jawab;	288-289
	5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan	292
	6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	291
	Audit Committee Information includes: 1. Name and position of members 2. Qualification and experience of members 3. Independence of members 4. Duty and responsibility 5. Activity report 6. Audit Committee meeting frequency and attendance rate	
9	Komite Nominasi dan Remunerasi.	
	1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;	295-296
	2. Independensi anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;	
	3. Uraian tugas dan tanggung jawab;	
	4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi; dan	
	5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi.	
	Nomination and Remuneration Committee Description includes: 1. Name, position, brief curriculum vitae of members 2. Independence of members 3. Duty and responsibility 4. Activity report 5. Meeting frequency and attendance rate	
10	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan Other Committees under Board of Commissioners	292-295
11	Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan.	
	1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;	377
	2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan	298-299
	3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan.	299
	Job and function of Corporate Secretary Description includes: 1. Name and brief curriculum vitae of Corporate Secretary 2. Activity report 3. Training Program in order to develop the Company's corporate secretary's competencies	
12	Uraian mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya:	
	1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya.	256-259
	2. Realisasi hasil RUPS pada tahun buku; dan	
	3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan.	
	Information on previous year's General Meeting of Shareholders (GMS) Comprising, among others: 1. Decision of the GMS in the previous year; 2. Realization of the GMS results in the financial year; and 3. Reason for unrealized GMS decisions	

	KRITERIA CRITERIA	HALAMAN PAGE
13	Uraian mengenai unit Audit Internal.	
	1. Nama ketua unit audit internal	379
	2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal;	318
	3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal;	318
	4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;	317
	5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan	318-319
	6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal.	317
	Internal Audit Unit Description of:	
	1. Name of head of internal audit unit	
	2. Total employees of internal audit unit	
	3. Professional internal audit qualification/certification	
	4. Structure and position of internal audit unit	
	5. Activity report	
	6. Party appointing/terminating head of internal audit unit	
14	Akuntan Publik	
	1. Jumlah periode akuntan publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan;	321
	2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan;	321
	3. Besarnya *fee* untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik; dan	321
	4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan.	321
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan	
	Accountant	
	Information on:	
	1. Number of periods accountant has audited company's annual financial statements	
	2. Number of periods public accountant office has audited company's annual financial statements	
	3. Amount of audit fee and other attestation fees (if accountant provides attestation concurrently with audit)	
	4. Other accountant services besides financial audit	
	Note: if no other service exists, state so	
15	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan.	
	Mencakup antara lain:	
	1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko	302
	2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko	305
	3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan	306-307
	4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut	308-316
	Description of company's risk management	
	Description includes:	
	1. Risk management system	
	2. Evaluation of effectiveness of risk management system	
	3. Risks facing the company	
	4. Efforts to manage such risks	
16	Uraian mengenai sistem pengendalian intern.	
	Mencakup antara lain:	
	1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional	322
	2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional/COSO *(control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities)*	322
	3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern.	322
	Description of internal control system	
	Information includes:	
	1. Brief report on internal control system, including financial and operational control	
	2. Explanation on internal control system suitability with internationally acknowledged frameworks/ COSO (control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities)	
	3. Evaluation of effectiveness of internal control system	

	KRITERIA CRITERIA	HALAMAN PAGE
17	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan lingkungan hidup.	
	1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen;	345-346
	2. Kegiatan yang dilakukan; terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, dan lain-lain	346-349
	3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	350
	Description of corporate social responsibility related to environment Description includes information on: 1. Policy 2. Activities Financial effect of environmental program activities, such as usage of recyclable material and ecofriendly energy, waste treatment system, etc. 3. Environmental certification owned by the Company	
18	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja.	
	1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan	350
	2. Kegiatan yang dilakukan terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat ***turnover*** karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain.	134-149
	Description of corporate social responsibility related to employment, work safety and health Comprising information on, among others: 1. Policy set by the management; and 2. Activities carried out in terms of manpower, occupational health and safety practices such as gender equality and work opportunity, work facility and safety, employee turnover rate, occupational accident rate, and others.	
19	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan.	
	1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen;	355-356
	2. Kegiatan yang dilakukan; dan	356-360
	3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.	358, 359
	Description of corporate social responsibility related to social and community development Information includes: 1. Policy 2. Activities Financial effect of these activities in relation to employment, work safety and health, gender equality and equal opportunity, working facilities, employee turnover, work-related accident rate, training, etc. 3. The costs incurred related to social and community development, such as utilization of local workers, development of community surrounding the company's premise, social facility and infrastructure improvement, other donations, etc.	
20	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen.	
	1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan	361
	2. Kegiatan yang dilakukan terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	362-363
	Description of corporate social responsibility in relation to customer Information covers: 1. Policy 2. Activities Financial effect of these activities in relation to customer's safety and health, product information, means of handling customer complaints, total number of customer complaints settled, etc.	

	KRITERIA CRITERIA	HALAMAN PAGE
21	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan anggota dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan.	
	1. Pokok perkara/gugatan;	324-332
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan;	324-332
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan	332
	4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada Entitas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).	332
	Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan	
	Description of significant cases faced by the company, subsidiaries, incumbent members of Board of Directors and Board of Commissioners	
	Description includes:	
	1. Subject of cases/claims	
	2. Status of cases/claims settlement	
	3. Effects on company's financial condition	
	4. Administrative penalty imposed on subsidiary, members of Board of Directors and Board of Commissioners, by the related authority (capital market, bank, etc) in the last financial year	
	Note: if there is no significant case, state sot	
22	Akses informasi dan data perusahaan Public access to corporate data and information	75
23	Bahasan mengenai kode etik perusahaan.	
	1. Isi kode etik;	333-336
	2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;	336
	3. Penyebarluasan kode etik;	336-338
	4. Upaya penegakan dan sanksi pelanggaran kode etik; dan	338
	5. Pernyataan mengenai budaya perusahaan *(corporate culture)* yang dimiliki perusahaan.	338
	Discussion of code of conduct	
	Discussion includes:	
	1. Content of code of conduct	
	2. Statement that code of conduct is applicable to all organization levels	
	3. Dissemination of CoC.	
	4. Efforts to implement and enforce code of conduct	
	5. Statement of corporate culture	
24	Pengungkapan mengenai *Whistleblowing System,* memuat antara lain*:*	
	1. Penyampaian laporan pelanggaran	322
	2. Perlindungan bagi *whistleblower*	324
	3. Penanganan pengaduan	323
	4. Pihak yang mengelola pengaduan	324
	5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya.	324
	Elaboration on Whistleblowing System	
	Elaboration on whistle-blowing mechanism:	
	1. Method of reporting	
	2. Protection of whistle-blower	
	3. Handling of reports	
	4. Party that handles reports	
	5. Output of reports handled	
25	1. Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	261
	2. Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan	260
	3. Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.	
	4. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya	
	1. The diversity of composition of the Board of Commissioners and Board of Directors	
	2. Description of the Company's policy on diversity composition of the Board	
	3. Commissioners and Directors in education (field of study), work experience, age, and gender.	
	4. Note: if there is no defined policy, it must be revealed the reasons and considerations	
VII	**Informasi Keuangan Financial Information**	
1	Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Statement of Board of Directors regarding its responsibility of financial statement	391
2	Opini Auditor Independen atas laporan keuangan Independent auditor's opinion on financial statement	392-393

	KRITERIA CRITERIA	HALAMAN PAGE
3	Deskripsi Auditor Independen di Opini 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. Description of independent auditor in opinion. Description contains: 1. Name and signature 2. Date of audited report 3. License number of Public Accountant office and license number of Public Accountant	393
4	Laporan Keuangan yang lengkap 1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan laba rugi komprehensif 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan Arus Kas 5. Catatan atas laporan keuangan 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). Full financial statement Contains all financial statement elements: 1. Balance sheet 2. Comprehensive income statement 3. Changes in equity report 4. Cash flow report 5. Notes to financial statement 6. Financial statement at the beginning of comparative periods when the company implements accounting policy retrospectively or restates financial statement accounts, or reclassifies financial statement accounts (if applicable).	 394-395 396 397 398 399-544 546-730
5	Perbandingan tingkat profitabilitas Comparison of profitability ratio	213, 221, 396
6	Laporan Arus Kas 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung *(direct method)* untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Presentation of cash flow report In compliance with the following: 1. Classification of activities in three categories: operating, investing and financing activities 2. Usage of direct method in reporting cash flow from operating activities 3. Separate presentation of cash income/expense in current year in operating, investing and financing activities 4. Disclosure of non-cash activities in notes to financial statement	398
7	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pengakuan pendapatan dan beban; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan. Description of accounting policy Description contains at least: 1. Statement of compliance with SFAS 2. Basis of financial statement measurement and presentation 3. Recognition of income and expense 4. Fixed assets 5. Financial instruments	 406 406 424 425 411-415

	KRITERIA CRITERIA	HALAMAN PAGE
8	Pengungkapan transaksi pihak berelasi.	
	1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;	504
	2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan	505
	3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.	506-507
	Disclosure of related-party transactions Items to be disclosed include: 1. Name of related parties, nature of relationship to related parties 2. Value of transactions and percentage to relevant total income and expense 3. Transaction balance and percentage to total assets or liabilities	
9	Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan	
	1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;	491
	2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;	491
	3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan;	492
	4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan	492-494
	5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	496-497
	Disclosure of tax obligations Items to be disclosed include: 1. Relation between tax expense (income) and accounting profit 2. Reconciliation between fiscal and current tax assessment 3. Statement that reconciled taxable profit is the basis of making corporate annual income tax return 4. Breakdown of deferred tax assets and liabilities recognized in balance sheet for each period and total deferred tax expense (income) recognized in income statement if such amount is not shown in total deferred tax assets or liabilities recognized in financial statement 5. Statement whether or not there is any tax dispute	
10	Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap	
	1. Metode penyusutan yang digunakan;	416
	2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya;	416-417
	3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan	416
	4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	434-435
	Disclosure of fixed assets Items to be disclosed: 1. Depreciation method applied 2. Description of accounting policy adopted between fair value model and cost model 3. Significant method and assumption adopted in estimating fair value of fixed assets (revaluation model) or disclosure of fair value of fixed assets (cost model) 4. Reconciliation of recorded gross amount and cumulative depreciation of fixed assets at beginning and at end of period by showing addition, reduction and reclassification	

	KRITERIA CRITERIA	HALAMAN PAGE
11	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi. 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. Disclosure of operating segment-related matters Items to be disclosed include: 1. General information that comprises factors referred to for identifying the reported segments; 2. Information of profit and loss, assets and liability of reported segments; 3. Reconciliation of the total segment revenue, the reported segment profit and loss, segment assets, segment liabilities and material elements of other segments against the number of entities involved; and 4. Disclosure of entity level, comprising information on product and/or service, geographic area and main customers.	
12	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan. Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 2. Klasifikasi instrumen keuangan; 3. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan; 4. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko; 5. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 6. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Disclosure of financial instruments Items to be disclosed include: 1. Accounting requirements, conditions and policies for each group of financial instruments 2. Classification of financial instruments 3. Fair value of each group of financial instruments 4. Purpose and policy of financial risk management 5. Explanation on risks related to financial instruments: market risks, credit risks and liquidity risks 6. Quantitative analysis on risks related to financial instruments	 411-416 532-533 542 533-535 535-541 540
13	Penerbitan laporan keuangan. 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Publication of financial statement Items to be disclosed include: 1. Date of authorization for financial statement publication 2. Party responsible for authorizing financial statement	 544 391, 544

PT PLN (Persero)
Electricity for a Better life

2014
LAPORAN TAHUNAN
Annual Report

PT PLN (PERSERO)
Jl. Trunojoyo Blok M I No.135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel. (62 21) 7251234, 7250550, 7261122
Fax. (62 21) 7221330

Website: www.pln.co.id